



WALIKOTA MADIUN
SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOTA MADIUN TAHUN 2023-2027

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dalam mewujudkan birokrasi serta pelayanan yang efektif dan terpadu, Pemerintah Daerah perlu menyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Madiun Tahun 2023-2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Madiun Tahun 2023-2027;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOTA MADIUN TAHUN 2023-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

6. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:
 - a. menyusun pedoman pengelolaan dan pengembangan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - b. memetakan aplikasi dan infrastruktur untuk mendukung layanan SPBE;
 - c. merumuskan arah kebijakan pembangunan layanan SPBE di Kota Madiun; dan
 - d. menyusun Arsitektur SPBE Daerah sebagai panduan bagi Pemerintah Kota Madiun dalam mengimplementasikan layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. penyusunan kerangka kerja (*framework*) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien;
 - b. memberikan arah dan strategi pengelolaan dan pengembangan layanan SPBE Kota Madiun agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien; dan
 - c. penyusunan dokumen Arsitektur SPBE Kota Madiun 2023-2027 yang berfungsi sebagai Rencana Induk pengembangan dan pengelolaan layanan SPBE yang bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kota Madiun.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Arsitektur SPBE Daerah Tahun 2023-2027 adalah sebagai berikut:
 - a. BAB I KONDISI EKSISTING DAN ANALISIS GAP SPBE
 - b. BAB II ARSITEKTUR PROSES BISNIS SPBE
 - c. BAB III ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI DAN LAYANAN SPBE
 - d. BAB IV ARSITEKTUR APLIKASI SPBE
 - e. BAB V ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE
 - f. BAB VI ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE
 - g. BAB VII ARSITEKTUR TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPBE DAN PENYELENGGARAAN SPBE
- (2) Uraian sistematika Arsitektur SPBE Kota Madiun Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Arsitektur SPBE dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
- (2) Pengawasan Arsitektur SPBE dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Madiun.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pendanaan, pelaksanaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 Juli 2022
WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 11 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 196704161993031015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 32/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

BAB I
KONDISI EKSISTING DAN ANALISIS GAP
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1.1 Pendahuluan

Subtansi I ini memberikan gambaran umum tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Pada subtansi ini akan membahas tentang pentingnya arsitektur SPBE, referensi hukum dan arsitektur, serta metode untuk tahap persiapan, dan diakhiri dengan penjelasan luaran yang akan dihasilkan pada kegiatan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Madiun.

1.1.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengguna SPBE yang dimaksud adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Pelaksanaan SPBE harus dilakukan dengan 7 prinsip, yaitu efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. **Efektivitas** yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. **Keterpaduan** merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. **Kesinambungan** sebagai keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya. **Efisiensi** menjadi bentuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna. **Akuntabilitas** menjadi wujud kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE. **Keamanan** menjadi wujud kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

1.1.2 Pengertian Arsitektur SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE**, **Arsitektur SPBE** adalah sebuah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pada level Pemerintah Daerah menerapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk periode 5 tahun dan ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah.

Proses penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah harus dilakukan dengan berkoordinasi dan/ atau berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara. Selain menyusun arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, setiap Pemerintah Daerah juga berkewajiban melakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan. Proses reviu yang dilakukan harus berdasarkan pada:

- a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
- b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
- c. Perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah (rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE) atau
- d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.1.3 Referensi Penyusunan Arsitektur SPBE

Referensi yang digunakan dalam penyusunan Arsitektur SPBE terdiri dari referensi hukum dan referensi arsitektur SPBE yang dapat dijelaskan pada sub bab berikut ini.

Arsitektur Pemerintah Kota Madiun dibuat dengan mengacu dan memenuhi Peraturan - Peraturan Pemerintah terkait dan terkini, meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014. Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
11. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi dan Informatika
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Madiun
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Madiun
20. Keputusan Walikota Madiun Nomor 180.45-401.021/253/2019 Tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun
21. Keputusan Walikota Madiun Nomor 900-401.2022/7/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Madiun

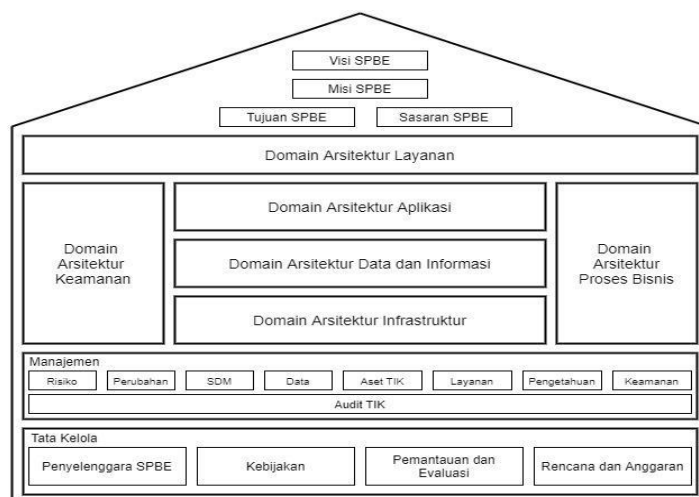
1.1.3.1 Referensi Penyusunan Arsitektur SPBE

Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE harus memuat 2 hal, yakni **referensi arsitektur** dan **domain arsitektur**. Arsitektur SPBE Nasional merupakan arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional. Dengan pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan.

Referensi Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponen-komponen arsitektur secara baku, mendukung pengambilan keputusan organisasi, mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan informasi dan komponen teknologi informasi dan komunikasi secara berbagi pakai, meningkatkan kemampuan integrasi antar komponen arsitektur dan menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, **referensi arsitektur** mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

Meskipun pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tidak secara langsung menyebutkan jika arsitektur pemerintah daerah harus memuat referensi arsitektur, akan tetapi dikarenakan arsitektur SPBE Pemerintah daerah mengacu pada arsitektur nasional, maka arsitektur SPBE Pemerintah daerah juga harus memuat referensi arsitektur. Referensi arsitektur juga diperkuat dengan **indikator 11** pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE yaitu tingkat kematangan arsitektur SPBE baru akan bisa mencapai tingkat 3 apabila dokumen arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dan domain arsitektur SPBE. Berikut akan diilustrasikan terkait susunan kerangka kerja SPBE seperti pada **Gambar 1.1.**



Gambar 1.1 Kerangka Kerja SPBE

(sumber: Dokumen Referensi Arsitektur SPBE Nasional)

Berdasarkan Gambar 1.1, Unsur-unsur SPBE ini antara lain rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan audit TIK, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE. Pada arsitektur SPBE Nasional yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat Taksonomi Referensi Arsitektur SPBE, yang terdiri dari:

1. Referensi Proses Bisnis (RAB)

RAB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/ proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 46 (empat puluh enam) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua).

2. Referensi Data dan Informasi (RAD)

RAD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. RAD SPBE Nasional terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok di tingkat 1 (satu) dan 50 (lima puluh) data tematik di tingkat 2 (dua).

3. Referensi Layanan (RAL)

RAL adalah sistem pengklasifikasian layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RAL terdiri dari 2 (dua) domain domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 54 (lima puluh empat) area layanan di tingkat 2 (kedua).

4. Referensi Aplikasi SPBE (RAA)

RAA adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. RAA terdiri dari 2 (dua) domain aplikasi di tingkat 1 dan 3 (tiga) area di tingkat 2. RAA menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi.

5. Referensi Infrastruktur SPBE (RAI)

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Referensi Infrastruktur terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 (satu) dan 7 (tujuh) area di tingkat 2 (dua). Referensi Infrastruktur menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi.

6. Referensi Keamanan SPBE (RAK)

Referensi Keamanan pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian

keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi IPPD. Referensi Keamanan terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 dan 10 (sepuluh) area keamanan di tingkat 2. Arsitektur SPBE Nasional terdapat **6 (enam) domain referensi arsitektur** yang mempunyai saling keterkaitan yang erat. Keterkaitan antar referensi arsitektur dimulai dari **domain proses bisnis**, yakni sebuah urusan pemerintah pada dasarnya akan memiliki data dan informasi didalamnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, penggunaan data dan informasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan layanan, dimana layanan akan berbasis elektronik, berupa aplikasi yang berjalan diatas infrastruktur TIK berbagi pakai yang handal dan aman. Keterkaitan antar domain tersebut, dapat terlihat dalam kerangka kerja SPBE. Berkenaan dengan hal tersebut, kegiatan penyusunan Arsitektur SPBE Kota Madiun, dilaksanakan berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional yang tercantum dalam Amanat pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 sebagai referensi arsitektur.

Kerangka ini menjelaskan domain arsitektur yang selaras dengan domain arsitektur SPBE Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

1.1.4 Metodologi Penyusunan Arsitektur SPBE

Arsitektur Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023-2027 disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, dan mencakup **6 (enam) domain**, yakni:

- a. Domain **Layanan SPBE**,
- b. Domain **Proses Bisnis**,
- c. Domain **Data dan Informasi**,
- d. Domain **Aplikasi SPBE**,
- e. Domain **Infrastruktur SPBE**, dan
- f. Domain **Keamanan SPBE**.

Masing-masing penyusunan domain juga akan memiliki **Referensi Arsitektur**, yakni:

- a. Referensi Arsitektur SPBE Nasional untuk seluruh Domain arsitektur

- b. Referensi arsitektur Layanan SPBE akan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020
- c. Referensi arsitektur Proses Bisnis akan menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang **Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**
- d. Referensi arsitektur Data dan Informasi akan menggunakan kerangka kerja **Data Management Association (DAMA)**
- e. Referensi arsitektur Aplikasi akan menggunakan standar **90003:2018** tentang *computer software guideline*
- f. Referensi infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE akan menggunakan standar **ISO 27001-series**.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan metode:

- a. Studi pustaka (*literature review*) untuk referensi metodologi, perangkat pengumpulan data dan pengukuran, serta analisisnya
- b. Survei *online* dan *offline* dengan menggunakan aplikasi berbasis *web*
- c. Observasi bukti pendukung (dokumen, peralatan, dll)
- d. Wawancara
- e. *Focus Group Discussion* dan *Desk Evaluation* untuk konfirmasi temuan dan rekomendasi akhir.

Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Madiun, dirumuskan berdasarkan pada metodologi ilmiah yang telah terbukti sebagai praktik terbaik (*best practice*) di dunia, yakni *Warren McFarlan's Strategic Matrix* (1983), khususnya untuk prioritas sistem informasi.

1.1.5 Tahapan Penyusunan Arsitektur SPBE

Dalam melakukan penyusunan dokumen Arsitektur SPBE Kota Madiun Tahun 2023-2027, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan ini terdiri dari **15 (lima belas)** proses untuk menghasilkan dokumen Arsitektur SPBE Kota Madiun. Detail dari masing-masing tahapan, sebagai berikut:

1) Inisiasi Kegiatan.

Inisiasi kegiatan ini meliputi negosiasi anggaran, analisis kebutuhan, dan kesepakatan luaran dokumen.

2) Pembuatan Dokumen Administrasi

Dokumen administrasi kegiatan dimulai dari penawaran kegiatan sampai serah terima pekerjaan.

3) Pembentukan Tim Proyek

Pembentukan tim proyek terdiri dari *project owner*, *project manager*, analis dan *surveyor* yang terlibat dalam kegiatan.

4) Pengumpulan Dokumen eksisting

Dokumen eksisting didapatkan dari laman *web* Kota Madiun serta dokumen dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Dokumen berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dan regulasi terkait.

5) Sosialisasi Seluruh Perangkat Daerah

Sosialisasi dilakukan pada Hari Senin, 31 Mei 2022 secara luring. Kegiatan ini mengundang perwakilan dari 21 (dua puluh satu) Dinas, 6 (enam) Badan, 1 (satu) RSUD, 9 (sembilan) Bagian pada Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan, dan UPTD Puskesmas. Proses sosialisasi dilakukan pukul 09.00 – 14.00 WIB. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman ke masing-masing Perwakilan Perangkat Daerah tentang SPBE dan detail kegiatan yang akan dilaksanakan. Menekankan pentingnya SPBE dan dukungan apa yang dapat diberikan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk kegiatan ini.

6) Penjelasan Aplikasi Survei dengan Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilakukan pada Hari Senin, 4 Juli 2022 secara luring yang dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mendemonstrasikan pengisian form survei berbasis *web*. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan pemahaman ke Perangkat Daerah terkait dokumen apa saja yang dibutuhkan saat survei nantinya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pengenalan terhadap *surveyor* lapangan untuk berkoordinasi dengan *PIC (Personal in Charge)* masing-masing Perangkat Daerah terkait jadwal visitasi ke Perangkat Daerah.

7) Pengisian Data Survei Secara Mandiri

Pengisian data secara mandiri dilakukan oleh masing-masing PIC Perangkat Daerah, bekerjasama dengan seluruh bidang pada setiap Perangkat Daerah. Pengisian ini dilakukan pada laman *web* <http://survey-madiun.pttati.co.id/>. Masing-masing Perangkat Daerah memiliki *username* dan *password* untuk melakukan pengisian. Pengisian secara mandiri dilakukan pada tanggal 5 – 8 Juli 2022.

8) Survei Lapangan dan Verifikasi Data Isian Survei Tiap Perangkat Daerah

Survei lapangan dan Verifikasi data isian survei dilakukan oleh tim survei satu-per-satu tiap Perangkat Daerah. Proses survei dan verifikasi dilakukan setelah proses pengisian mandiri yaitu pada tanggal 11 Juli - 15 Juli 2022. Sebelum melakukan verifikasi, tim proyek melakukan pengecekan hasil isian, untuk membuat daftar kekurangan data, data apa yang masih kurang jelas, dan bukti dokumen apa yang harus di unggah.

9) Rekapitulasi data Hasil survei

Rekapitulasi data hasil survei ini bertujuan untuk melihat kesenjangan data yang didapatkan serta data apa saja yang masih belum dikumpulkan. Pada tahap ini, tim proyek akan menghubungi PIC Perangkat Daerah terkait bilamana ada data yang dibutuhkan.

10) Analisis Gap dan Penyusunan Dokumen Eksisting SPBE

Analisis Gap dilakukan untuk mengetahui perbedaan kondisi sekarang dan kondisi mendatang yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Madiun. Kondisi eksisting disusun berdasarkan data hasil survei dan dianalisis metadata dari setiap domain.

11) Verifikasi Data Eksisting dengan Seluruh Perangkat Daerah

Verifikasi data eksisting ini dilakukan via aplikasi *zoom meeting* setelah data hasil survei sudah dianalisis menjadi dokumen eksisting Kota Madiun.

Tujuannya untuk melakukan konfirmasi data eksisting agar valid dan sesuai dengan kondisi setiap Perangkat Daerah. Analisis Gap dilakukan untuk mengetahui perbedaan kondisi sekarang dan kondisi mendatang yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Madiun.

12) Penyusunan Dokumen Arsitektur

Dokumen Arsitektur SPBE ini adalah penyusunan Bab 2 hingga Bab 7. Arsitektur yang disusun disesuaikan dengan analisis eksisting dan hasil GAP yang telah didapatkan. Hasil dari tahapan ini menghasilkan Arsitektur SPBE Kota Madiun Tahun 2023-2027.

13) FGD dan Desk Evaluation data Peta Rencana

FGD (*Forum Group Discussion*) bertujuan untuk melakukan pengecekan kebenaran data peta rencana yang telah dianalisis kepada masing-masing Perangkat Daerah. FGD dilakukan secara *online* dengan perwakilan PIC dari seluruh Perangkat Daerah. Kegiatan ini melakukan verifikasi kesesuaian hasil analisis usulan peta rencana SPBE dalam kurun 5 tahun dengan kebutuhan tiap Perangkat Daerah.

14) Presentasi Akhir

Presentasi akhir dilakukan ketika keseluruhan dokumen Arsitektur SPBE Kota Madiun telah selesai dianalisis. Presentasi mendatangkan perwakilan dari seluruh Perangkat Daerah di Kota Madiun.

15) Revisi Dokumen & Penyerahan Dokumen Akhir

Hasil dari presentasi akhir, tidak menutup kemungkinan untuk adanya revisi dokumen. Tim proyek akan melakukan pengecekan ulang dokumen berdasarkan revisi yang telah diberikan. Kemudian, hasil dari revisi akhir merupakan dokumen akhir **Arsitektur SPBE** Kota Madiun **Tahun 2023-2027**.

1.1.6 Keluaran Kegiatan Arsitektur SPBE

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa dokumen **Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** Kota Madiun **2023-2027**.

1.2 KONDISI YANG INGIN DICAPAI

Kondisi yang ingin dicapai merupakan gambaran tentang Kota Madiun dan harapan predikat penilaian yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan RPJMD. Pencapaian indeks SPBE melibatkan seluruh elemen Pemerintah Kota Madiun.

1.2.1 Pemerintah Kota Madiun

Kota Madiun memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan wilayah di Wilayah Jawa Timur bagian barat. Posisi tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Kota Madiun merupakan kota transit yang cukup strategis karena mempunyai topografi tanah yang datar sehingga menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta mendukung daerah *hinterland* yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.

Secara astronomis, Kota Madiun terletak di titik koordinat 7°-8° Lintang Selatan dan antara 111°-112° Bujur Timur. Wilayah Kota Madiun hampir sepenuhnya berbatasan/dikelilingi oleh Kabupaten Madiun dan sebagian kecil oleh Kabupaten Magetan dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Pada tahun 2020 Kota Madiun memiliki wilayah seluas 33,23 km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan Taman dengan luasan sebesar 12,46 km² (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 km² (32,29%), dan Kecamatan Manguharjo seluas 10,04 km² (30,21%). Berikut ditampilkan luas wilayah dan persentase tiap kecamatan di Kota Madiun.

1.2.1.1 Visi dan Misi RPJMD Kota Madiun Rumusan Visi pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya Pemerintahan bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

Terdapat 4 (empat) Misi Kota Madiun yang tertuang dalam RPJMD Kota Madiun Periode 2019–2024. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan

kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai. Penjabaran dari misi, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Misi 1** : Mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. **Misi 2** : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
3. **Misi 3** : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun.
4. **Misi 4** : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

1.2.1.2 Keterkaitan Visi dan Misi dengan Arsitektur SPBE

Penyusunan Arsitektur SPBE diharapkan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Madiun. Penyusunan Arsitektur SPBE selaras dengan misi nomor 1 (satu) yaitu "**Mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*).**" Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Madiun yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan sistem *modern* berbasis informasi teknologi (IT) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

1.2.2 Visi dan Misi SPBE

Visi dan Misi SPBE Pemerintah Kota Madiun disusun berdasarkan visi misi Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2018-2023 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah diselaraskan.

Sehingga Visi SPBE Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023-2027 yaitu "**Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terpadu dan Menyeluruh guna mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang Berkinerja Tinggi Menuju Masyarakat Sejahtera**".

Untuk mewujudkan dan mendukung visi SPBE, adapun misi SPBE Kota Madiun yakni sebagian berikut:

- **Misi 1:** Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu.
- **Misi 2:** Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Madiun dengan membangun Sumber Daya Manusia yang kompeten dan inovatif berbasis Teknologi informasi dan komunikasi.

- **Misi 3:** Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau guna mensejahterakan masyarakat Kota Madiun untuk mendukung kemandirian ekonomi.
- **Misi 4:** Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan didukung fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal.

1.2.3 Tujuan dan Sasaran SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan dan sasaran SPBE Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023-2027 adalah:

- 1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis *smart cities*.
- 2) Terwujudnya Pembangunan infrastruktur SPBE sebagai Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan yang terintegrasi.
- 3) Meningkatnya kapasitas Pembangunan Sumber Daya Manusia SPBE yang berkualitas dan berdaya saing.
- 4) Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif untuk tata Kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien.
- 5) Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat dengan layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.

1.2.4 Hasil Penilaian SPBE Kota Madiun

Berdasarkan indikator penilaian pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang *Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi SPBE berskala nasional, dimana seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Instansi memiliki indeks penilaian masing-masing. Tujuan dilakukannya evaluasi ini agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya.

Evaluasi SPBE dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk

menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai 1-5 yang nantinya akan menghasilkan nilai Indeks. Nilai ini dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Detail nilai indeks dan predikat dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Predikat Indeks SPBE

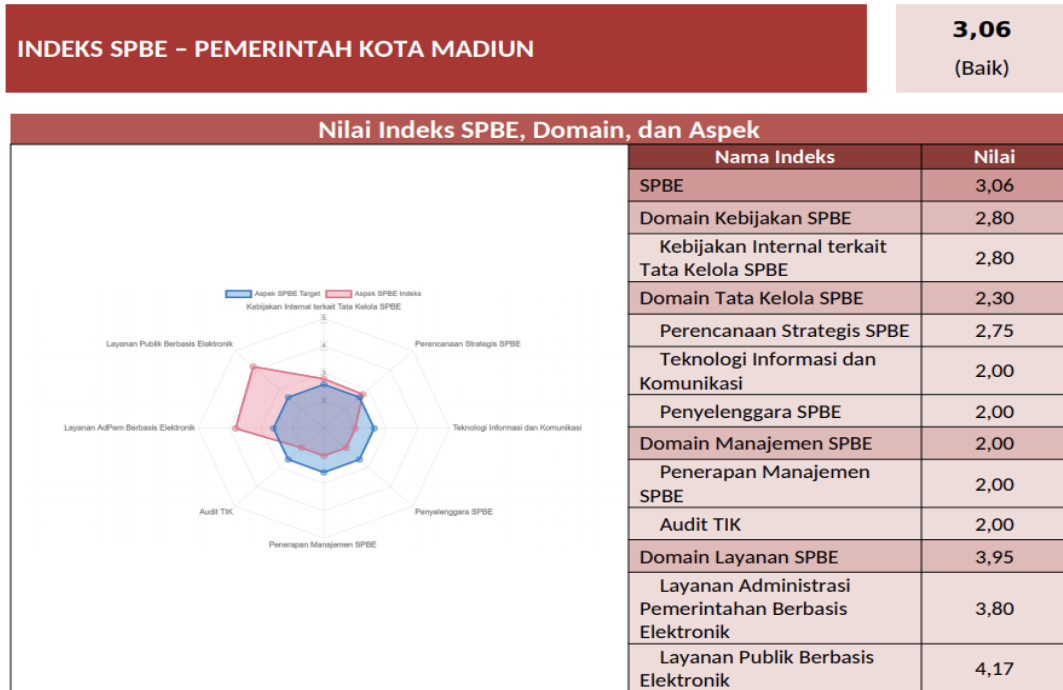
No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

(sumber: Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE)

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Berpedoman pada predikat indeks yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hasil Evaluasi SPBE tahun 2021 untuk Pemerintah Kota Madiun menunjukkan nilai **indeks 3,06 dengan predikat Baik**. Detail hasil penilaian dapat dilihat pada **Gambar 1.2**.



Gambar 1.2. Indeks SPBE Kota Madiun Tahun 2021

Hasil Penilaian SPBE tahun 2021 Pemerintah Kota Madiun menunjukkan predikat “baik” dengan nilai indeks SPBE adalah 3,06. Nilai indeks ini diperoleh dari beberapa domain dalam indeks penilaian SPBE ini yaitu Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE. Dalam hasil penilaian indeks SPBE terdapat aspek target dan hasil indeks SPBE, hal ini bertujuan untuk melihat Gap ketercapaian dari masing-masing domain. Terdapat beberapa domain yang masih belum terpenuhi dan dibawah nilai target yang ditentukan.

Berdasarkan hasil evaluasi, setiap indeks memiliki kekuatan dan kelebihan. **Domain Kebijakan SPBE** yang mencakup Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE memiliki (**nilai 2,80**). Pemerintah Kota Madiun memiliki kelemahan untuk substansi Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE dimana pengaturan penyusunan arsitektur hanya Sebagian domain saja yang masih diterapkan pada lingkup internal Kota Madiun.

Pada tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data, data dukung tidak menggambarkan adanya serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas. Kemudian, **Domain Tata Kelola** yang mencakup perencanaan strategis SPBE.

Teknologi informasi dan komunikasi dan Penyelenggara SPBE memperoleh (**nilai 2,30**). Pada domain ini, terdapat nilai aspek

terendah yaitu pada Teknologi informasi dan komunikasi dan penyelenggara SPBE (**nilai 2,00**), nilai ini dipengaruhi karena pada dokumen arsitektur SPBE tidak/belum mencakup referensi dan domain arsitektur Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE. **Domain Manajemen** yang mencakup penerapan manajemen SPBE dan Audit TIK memperoleh (**nilai 2,00**).

Secara keseluruhan Pemerintah Kota Madiun masih belum melaksanakan penerapan manajemen SPBE Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Manajemen Perubahan dimana tidak ditemukan adanya perencanaan matang yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Renstra terkait dengan manajemen. Pelaksanaan audit infrastruktur dan pelaksanaan audit aplikasi SPBE dimana kegiatan audit ini juga belum dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti pada Renstra. **Domain Layanan SPBE** yang meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik memperoleh (**nilai 3,95**). Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun sudah mengimplementasikan beberapa layanan aplikasi untuk layanan publik berbasis elektronik.

1.2.5 Indeks SPBE yang ingin dicapai Pemerintah Kota Madiun

Indeks SPBE mengacu pada peraturan SPBE yang telah diperbarui sejak tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018. Pada Tahun 2020, disahkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk dijadikan pedoman penilaian dengan 47 indikator. Dokumen RPJMD Kota Madiun sudah menyebutkan Target Indeks SPBE pada indikator kinerja dari Misi ke 1 sasaran ke 1 yaitu meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Target nilai dapat dilihat pada **Gambar 1.3**

Tabel 5.5
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian				Kondisi Akhir		
				2021	2022	2023	2024			
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)										
T.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	IT1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	(B) 65,55	(B) 67	(B) 68	(B) 69	(BB) 70,01	(BB) 70,01
S.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	Skor	BB (70,01)	BB (73)	BB (76)	BB (79)	A (80,01)	A (80,01)
		IS1.2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	3,385 (tinggi)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		IS1.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Tidak ada penilaian tahun 2020	2,83 (BAIK)	2,85 (BAIK)	2,87 (BAIK)	2,90 (BAIK)	2,90 (BAIK)
			Opini BPK	WTP	WTP	-	-	-	-	WTP
			Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	%	18,51	-	-	-	-	18,51

Gambar 1.3. Target Indeks SPBE pada RPJMD Kota Madiun

Berdasarkan nilai indeks SPBE Pemerintah Kota Madiun tahun 2021 yaitu **3,06**, dimana hasil ini **telah sesuai** dengan target yang diharapkan. Target Indeks SPBE yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dijabarkan pada Gambar 1.3.

Tabel 1.2. Target Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021-2024

2021	2022	2023	2024
2,83	2,85	2,87	2,90

Sesuai dengan capaian target pada tahun 2022 yang tertuang pada RPJMD yaitu 2,85, dimana hasil laporan hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2021 yaitu 3,06 hasil ini telah melampaui target yang telah dituliskan pada RPJMD. Sehingga, diharapkan target nilai indeks SPBE pada tahun 2022 dapat meningkat atau mempertahankan capaian nilai di tahun 2022. Adapun peningkatan nilai indeks RPJMD ini sebesar 0,2 setiap tahunnya. Peningkatan nilai indeks SPBE ini dihitung dari target indeks SPBE pada RPJMD. Terdapat 3 Domain yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Madiun yaitu domain kebijakan SPBE, domain tata Kelola SPBE, dan domain manajemen SPBE. Dalam domain tersebut terdapat indikator yang harus ditingkatkan pada masing-masing aspek yaitu:

1. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE
 - Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah (Nilai Tingkat Kematangan 2)

- Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data
- 2. Perencanaan Strategis SPBE (Nilai Tingkat Kematangan 2)
 - Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Nilai Tingkat Kematangan 2)
 - Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Nilai Tingkat Kematangan 2)
- 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE (Nilai Tingkat Kematangan 2)
 - Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data (Nilai Tingkat Kematangan 1)
 - Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah (Nilai Tingkat Kematangan 2)
- 4. Penyelenggara SPBE
 - Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Nilai Tingkat Kematangan 2)
 - Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE (Nilai Tingkat Kematangan 2)
- 5. Manajemen SPBE
 - Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE (Nilai Tingkat Kematangan 1)
 - Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data (Nilai Tingkat Kematangan 2)
 - Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK (Nilai Tingkat Kematangan 2)
 - Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Nilai Tingkat Kematangan 2)
 - Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan (Nilai Tingkat Kematangan 1)
 - Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan (Nilai Tingkat Kematangan 2)
- 6. Audit TIK
 - Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (Nilai Tingkat Kematangan 1)
 - Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (Nilai Tingkat Kematangan 1)

Dokumen Arsitektur SPBE merupakan dokumen yang akan dievaluasi setiap tahunnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Madiun harus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan nilai evaluasi SPBE pada nilai maksimal hingga 4,06 di tahun 2027. Aspek penilaian SPBE yang masih memiliki kekurangan seperti kebijakan SPBE, domain tata Kelola SPBE, dan domain manajemen SPBE dapat lebih ditingkatkan lagi.

1.3 KONDISI EKSISTING PROSES BISNIS DAN ANALISIS GAP

Kondisi Eksisting Proses Bisnis dan Analisis GAP menjelaskan mengenai **Proses Bisnis** pada Pemerintah Kota Madiun. Setelah mengetahui kondisi saat ini, akan dibahas kondisi yang ideal untuk dicapai setelah itu akan didapatkan Gap antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk menemukan strategi pembangunan yang tepat selama 5 (lima) tahun mendatang.

1.3.1 Pengertian Proses Bisnis

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Proses bisnis merupakan salah satu domain Arsitektur SPBE yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Penyusunan proses bisnis pada setiap Pemerintah Daerah berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah daerah.

1.3.2 Struktur Arsitektur Proses Bisnis

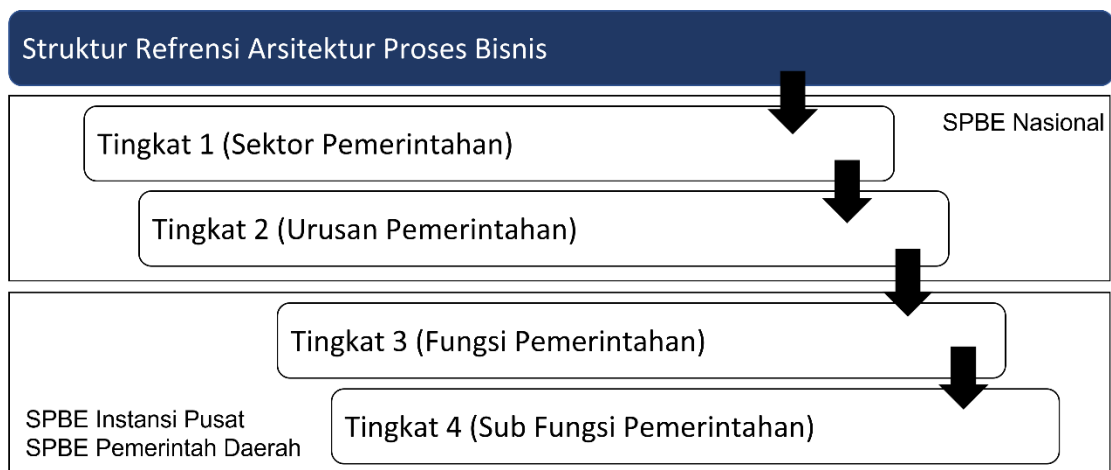
Referensi Proses Bisnis (RAB) digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan, kemudian diklasifikasikan substansi pemerintah ke dalam 4 (empat) tingkatan Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis, yaitu:

- 1) Sektor Pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- 2) Urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik

Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;

- 3) Fungsi Pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (tiga), yang selanjutnya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- 4) Sub Fungsi Pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (empat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor Pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 45 (empat puluh lima) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua). Pemerintah Daerah, dalam menyusun RAB masing-masing mengacu pada RAB SPBE Nasional serta melengkapi proses bisnis pada tingkat bawahnya yaitu pada fungsi pemerintahan di tingkat 3 (tiga) dan sub fungsi pemerintahan di tingkat 4 (empat) sebagaimana dijelaskan pada **Gambar 1.4**.



Gambar 1.4. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

1.3.3 Referensi Proses Bisnis (RAB)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 telah dijelaskan pada Referensi Arsitektur Proses Bisnis, bahwa Domain proses bisnis memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkatan, dimana terdapat tingkat 1 (satu) dan tingkat 2 (dua) merupakan struktur di

tingkat nasional yang mengacu pada Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait proses bisnis dijelaskan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Referensi Proses Bisnis

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri.
Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri.
02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan.
02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian.
02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan.
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan.
02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan.
02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan penanaman modal.
02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan koperasi.
02.10	Usaha Kecil Dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
		dalam bidang transmigrasi.
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.
03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan.
03.07	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.
Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
04.03	Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum.
05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.
05.03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia.
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan.
06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
		dalam bidang pertambangan.
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi.
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan.
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan.
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.
Budaya dan Agama (08)		
08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama.
08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan.
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara.
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi.
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Kesekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sekretariat negara.

1.3.4 Kondisi Eksisting Proses Bisnis Kota Madiun

Kondisi eksisting adalah kondisi yang mengacu pada keadaan atau kejadian saat sekarang. Pada bagian ini mengacu pada kondisi Proses Bisnis Pemerintahan Kota Madiun pada saat ini. Hal yang akan dibahas yaitu mengenai urusan pemerintahan Kota Madiun, ketersediaan peta proses bisnis level kota pada Pemerintahan Kota Madiun, ketersediaan peta proses bisnis level Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Madiun dan Ketersediaan dokumen standar operasional (SOP) di pemerintahan Kota Madiun.

1.3.4.1 Daftar Urusan

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dimana urusan pemerintahan ini tercantum dalam RPJMD. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dibagi menjadi 3 (tiga) urusan, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun ini terbagi menjadi 8 kelompok urusan.

Delapan urusan tersebut yaitu **Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar** (6 urusan), **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar** (16 urusan), **Urusan Pemerintahan Pilihan** (6 urusan), **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** (1 urusan), **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** (8 urusan), **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan** (2 urusan), **Unsur Kewilayahan** (2 urusan), dan **Unsur Pemerintahan Umum** (1 urusan) yang masing-masing diuraikan pada **Tabel 1.4**.

Tabel 1.4 Daftar Urusan Perangkat Daerah Kota Madiun

Sektor Urusan	Urusan Pemerintahan	Diampu/ Tidak Diampu (Ya/Tidak)	Kelompok Urusan	Nama Urusan	
Pertahanan dan Luar Negeri	Pertahanan	Ya	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Pendidikan	
	Hubungan Luar Negeri	Tidak		Kesehatan	
Ekonomi dan Industri	Industri	Ya		Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Kesehatan
	Perdagangan	Ya			
	Pertanian	Ya			
	Perkebunan	Ya			
	Peternakan	Ya			
	Perikanan	Ya			
	Badan Usaha Milik Negara	Tidak			
	Investasi	Tidak			
	Koperasi	Ya			
Usaha Kecil Dan	Ya	Perumahan			

Sektor Urusan	Urusan Pemerintahan	Diampu/ Tidak Diampu (Ya/Tidak)	Kelompok Urusan	Nama Urusan
	Menengah			Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pariwisata	Ya		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan Kewilayahan	Pekerjaan Umum	Ya		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat
	Transmigrasi	Ya		Sosial
	Transportasi	Ya		
	Perumahan	Ya	Urusan Pemerintahan	Tenaga Kerja
	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tunggal	Ya		Pengendalian Pendudukan dan Pencatatan Sipil
	Pertahanan	Ya		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan Sosial dan Kesehatan	Kependudukan	Ya	Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Perhubungan
	Kesehatan	Ya		Komunikasi dan Informatika
	Sosial	Ya		Statistik
Ketertiban Umum dan Keselamatan	Pemberdayaan Perempuan	Ya		Persandian
	Hukum	Tidak		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Keamanan	Tidak		Pangan
Hak Asasi Manusia	Tidak	Pertanahan		
Pendidikan dan Tenaga	Pendidikan	Ya		Lingkungan Hidup

Sektor Urusan	Urusan Pemerintahan	Diampu/ Tidak Diampu (Ya/Tidak)	Kelompok Urusan	Nama Urusan
Kerja	Ketenagakerjaan	Ya		Kepemudaan dan Olahraga
	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Tidak		Kebudayaan
	Pemuda	Ya		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Olahraga	Ya		Perpustakaan
Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Pertambangan	Tidak	Urusan Pilihan	Kearsipan
	Energi	Ya		Pertanian
	Kehutanan	Ya		Kelautan dan Perikanan
	Kelautan	Ya		Pariwisata
	Lingkungan Hidup	Ya		Perdagangan
Budaya dan Agama	Agama	Tidak		Perindustrian
	Kebudayaan	Ya		Transmigrasi
Pemerintahan Umum	Dalam Negeri		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD
	Keuangan	Ya		- Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	Informasi	Tidak		- Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat - Bagian Hukum - Bagian Organisasi

Sektor Urusan	Urusan Pemerintahan	Diampu/ Tidak Diampu (Ya/Tidak)	Kelompok Urusan	Nama Urusan
				- Bagian Umum - Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
	Komunikasi	Tidak		Perencanaan
	Perencanaan Pembangunan Nasional	Ya	Urusan Penunjang	Keuangan
	Aparatur Negara	Ya	Urusan Pemerintahan	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
	Kesekretariatan Negara	Tidak	Unsur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengawasan
			Unsur Kewilayahan	Kecamatan
			Unsur Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada **Tabel 1.4**, dari 8 kelompok urusan yang telah dijabarkan kedalam daftar urusan Pemerintah Kota Madiun telah dipetakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Dari **45 (empat puluh lima) referensi arsitektur bisnis**, Pemerintah Kota Madiun telah memenuhi 36 (tiga puluh enam) referensi arsitektur proses bisnis. Sementara untuk **7 (tujuh) referensi arsitektur proses bisnis** lainnya tidak menjadi kewenangan urusan Pemerintah Kota Madiun. Untuk 7 (tujuh) pengelompokan urusan berdasarkan

referensi arsitektur proses bisnis diantaranya (RAB 01.02) **Hubungan Luar Negeri**, (RAB 02.04) **Perkebunan**, (RAB 07.01) **Pertambangan**, (RAB 07.04) **Kelautan**, (RAB 07.03) **Kehutanan**, (RAB 08.01) **Agama**, dan (RAB 07.02) **Energi**. Setiap urusan memiliki beberapa nama urusan dan nama Perangkat Daerahnya yang kemudian diuraikan Jumlah Urusan, Nama Urusan dan dan Jumlah PD dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5. Jumlah Kelompok Urusan, Urusan dan PD Kota Madiun

Kelompok Urusan	Jumlah Urusan	Jumlah PD
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	5	6
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	16	12
Urusan Pemerintahan Pilihan	7	7
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	7
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	8	7
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	2	3
Unsur Kewilayahan	1	1
Unsur Pemerintah Umum	1	1

Pada Tabel 1.5. terdapat 5 (**lima**) jenis urusan pada **urusan Wajib Pelayanan Dasar**, 16 (**enam belas**) jenis urusan pada **urusan Wajib Pelayanan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar**, 7 (**tujuh**) jenis urusan pada **urusan Pelayanan Pilihan**, 4 (**empat**) jenis urusan pada **urusan Pendukung Urusan Pemerintahan**, 8 (**delapan**) jenis urusan pada urusan **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**, 2 (**dua**) jenis urusan pada urusan **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**, 1 (**satu**) jenis urusan pada urusan **Unsur Kewilayahan** dan 1 (**satu**) jenis urusan pada kelompok urusan **Unsur Pemerintahan Umum**. Diantara 8 Kelompok Urusan terdapat 3 kelompok urusan yang memiliki jenis urusan paling sedikit yaitu kelompok **Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan** yang memiliki jenis urusan **Inspektorat Daerah**, kelompok **Unsur Kewilayahan** yang memiliki jenis urusan **Kecamatan**, dan **kelompok Unsur Pemerintahan Umum** yang memiliki jenis urusan **Kesatuan Bangsa dan Politik**.

1.3.4.2 Ketersediaan Peta Proses Bisnis Level Kota

Penyusunan Peta Proses Bisnis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

Menurut **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018**, tentang penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis yang sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis. Peta proses bisnis yang dimiliki instansi Pemerintah berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung.

Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

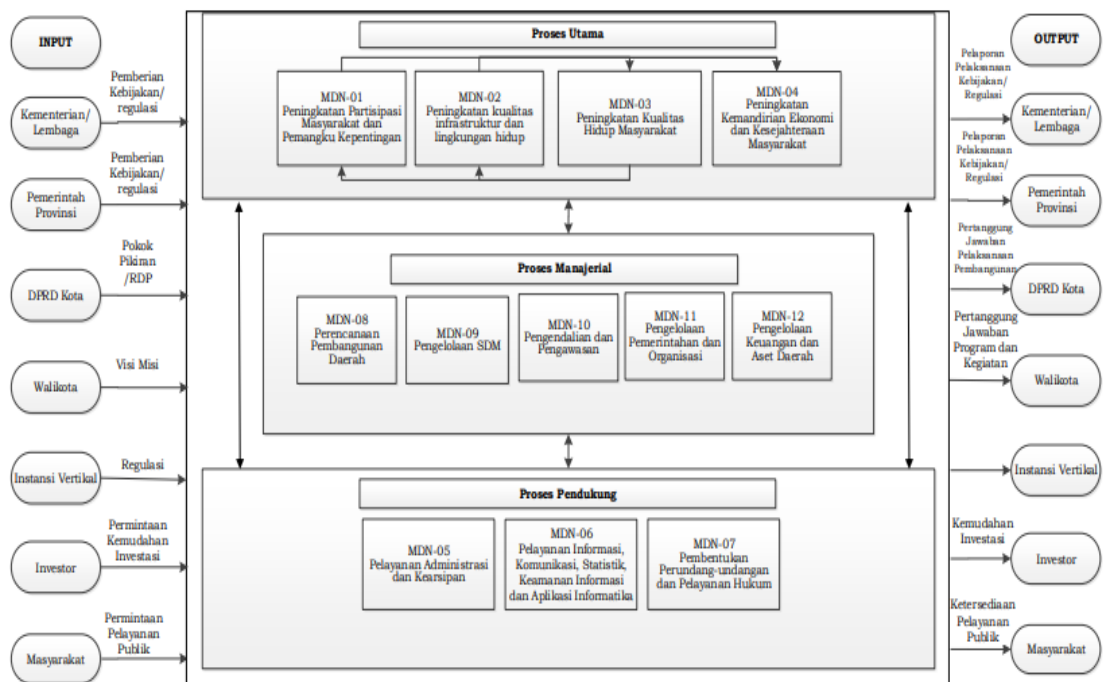
b. Level 1

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

c. Level Selanjutnya (Level n)

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.

Berdasarkan kondisi eksisting Kota Madiun telah memiliki peta proses bisnis level kota yang mana pembuatan peta proses bisnis ini telah mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018** Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan. Pembuatan peta proses telah disahkan ke dalam **Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 180.45-401.021/253/2019** tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun. Peta proses bisnis level Kota milik Pemerintah Madiun diidentifikasi ke dalam 3 proses yaitu Proses Bisnis Utama atau Proses Inti, Proses Bisnis Manajerial dan Proses Bisnis Pendukung. Penggambaran peta proses bisnis ini telah disesuaikan dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC). Detail penggambaran peta proses bisnis level Kota di Kota Madiun dapat dilihat pada **Gambar 1.5**.



Gambar 1.5 Peta Proses Bisnis Kota Madiun

Representasi dari **Gambar 1.5**. Peta proses bisnis level 0 Kota Madiun bahwa peta proses bisnis tersebut merupakan turunan langsung dari visi, misi, dan tujuan Pemerintah Kota Madiun. Penentuan peta proses bisnis level 0 juga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Proses Utama didefinisikan sebagai proses yang menciptakan aliran nilai utama. Pada proses utama digambarkan sebagai proses yang berkaitan langsung dengan masyarakat, sehingga didapatkan

hasil identifikasi **dari misi 2 sampai dengan misi 4 Kota Madiun** masuk ke dalam proses utama. Terdapat **4 proses pada peta proses bisnis level 0** pemerintah Kota Madiun.

Peta sub proses diidentifikasi berdasarkan sasaran atau tujuan yang dituangkan dengan menggunakan bahasa proses. Peta sub proses level 1 Kota Madiun **MDN-01 “Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan”**, peta sub proses ini merupakan turunan langsung dari misi 2. Peta sub proses bisnis ini mengacu pada misi 1 Kota Madiun, namun sasaran pada misi 1 adalah internal Kota Madiun. Peta proses bisnis level 1 Kota Madiun MDN-02, MDN-03, dan MDN-04 mendukung dan mengacu pada misi 2-misi 4 Kota Madiun. Pada peta sub proses level 1 **MDN-02 “Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup”**.

Diidentifikasi bahwa peta sub proses ini mendukung misi 2 Kota Madiun, yang mana peta sub proses MDN-02 sesuai dengan sasaran pada misi 2 Kota Madiun yaitu Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Peta sub proses level 1 **MDN-03 “Peningkatan kualitas hidup masyarakat”**, diidentifikasi bahwa peta sub proses ini mendukung misi 3 Kota Madiun yaitu Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan gender merupakan acuan dari sasaran misi 3 Kota Madiun yang sesuai dengan peta sub proses MDN-03.

Peta sub proses level 1 **MDN-04 “Peningkatan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”**, diidentifikasi peta sub proses MDN-04 mendukung misi 4 Kota Madiun yaitu Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif dan terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan stabilitas kehidupan sosial masyarakat. Peta sub proses MDN-04 telah mengacu sasaran misi 4 Kota Madiun.

Proses Manajerial adalah proses untuk mengelola perencanaan dan pembangunan daerah, pengelolaan SDM, pengendalian dan pengawasan, pengelolaan pemerintahan dan organisasi, pengelolaan keuangan dan aset daerah. **Proses manajerial dan proses pendukung Peta Proses Bisnis Kota Madiun merupakan terjemahan dari misi 1** (internal Pemerintah Kota Madiun) dengan

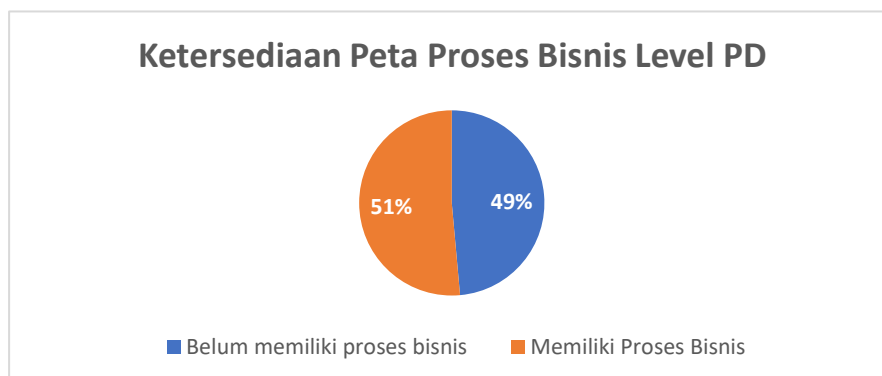
bahasa proses, yang mana pada misi 1 Kota Madiun tidak berkaitan langsung dengan masyarakat. Pada proses manajerial peta proses bisnis level 0 pemerintah Kota Madiun tertuang dari fungsi kesekretariatan. Maka dalam proses ini terdapat **3 proses manajerial**.

Serta Proses Pendukung merupakan proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik. Proses pendukung pada peta proses bisnis level 0 pemerintah Kota Madiun memberikan nilai tambah bagi pengampu eksternal. Dalam hal ini terdapat 3 proses pendukung yaitu pelayanan administrasi dan kearsipan, pelayanan informasi, komunikasi, statistik, keamanan informasi dan aplikasi informatika, serta pembentukan perundang-undangan dan pelayanan hukum.

Gambar Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun diidentifikasi dengan penerapan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC). Tahapan input/masukan dan output/ keluaran proses peta proses bisnis Kota Madiun terdiri dari 7 *supplier*/pemasok, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, DPRD Kota, Walikota, Instansi Vertikal, Investor, dan Masyarakat.

1.3.4.3 Ketersediaan Peta Proses Bisnis Level Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil survei kondisi eksisting yang telah dilakukan pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Madiun, sebanyak 18 (51%) Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Madiun telah memiliki Peta Proses Bisnis. Dan sebanyak 17 (49%) Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Madiun belum memiliki Peta Proses Bisnis. Berikut **Gambar 1.6** penjelasan grafik ketersediaan proses bisnis pada Pemerintahan Kota Madiun.

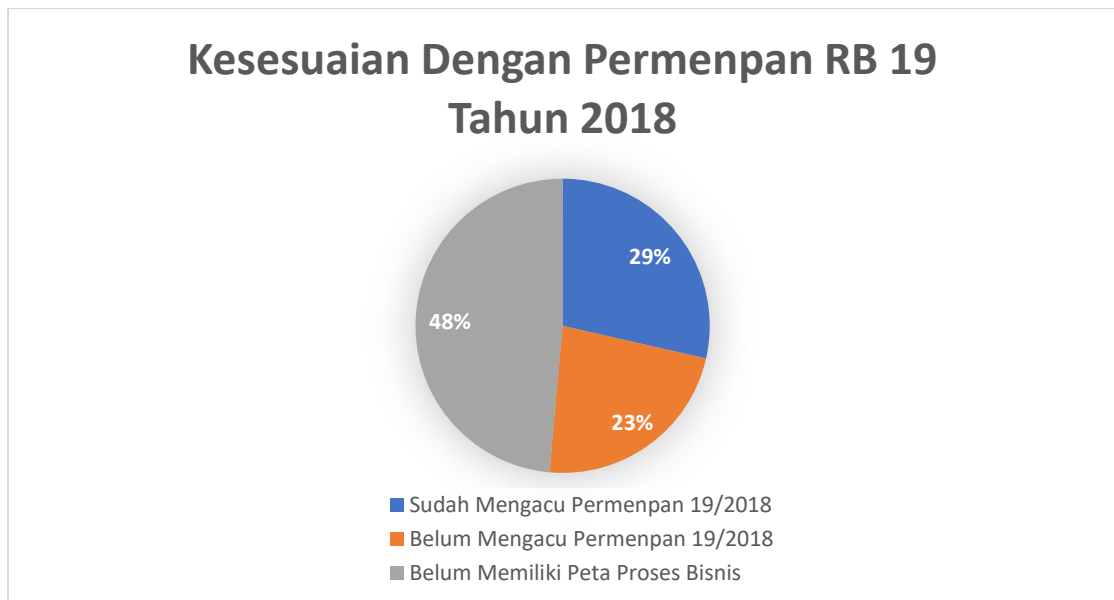


Gambar 1.6. Ketersediaan Peta Proses Bisnis Level PD

Berdasarkan kondisi eksisting ketersediaan proses bisnis pada Pemerintahan Kota Madiun, dari jumlah 35 Perangkat Daerah sebanyak **18 Perangkat Daerah** (51%) telah memiliki peta proses bisnis. Merujuk pada hasil analisis dari 18 Perangkat Daerah yang

telah memiliki peta proses bisnis terdapat sejumlah **10 PD** (23%) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018.

Sedangkan 8 Perangkat Daerah yang memiliki peta proses bisnis, namun berdasarkan pada hasil analisis belum mengikuti tahapan penyusunan peta proses bisnis. Kesesuaian peta proses bisnis di Pemerintahan Kota Madiun dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 dapat dilihat pada **Gambar 1.7**.

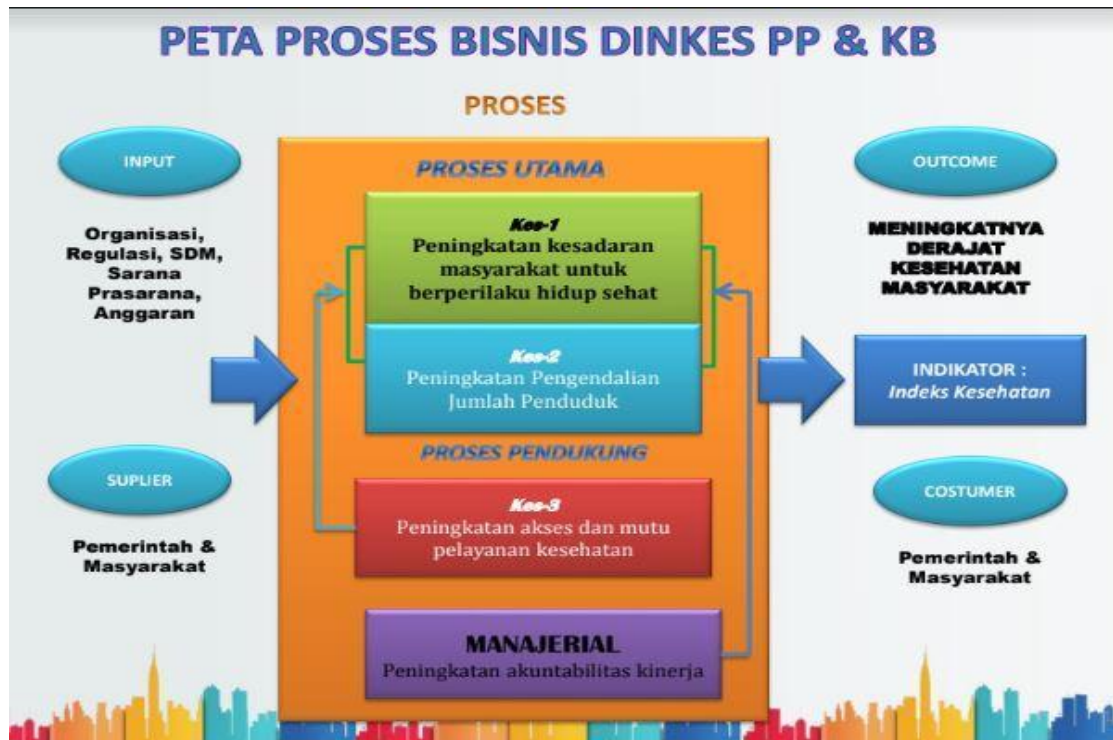


Gambar 1.7 Kesesuaian Dengan Permenpan RB 19 Tahun 2018

Representasi data pada **Gambar 3.4** yang mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018** tentang Proses Bisnis Instansi Pemerintahan 3 proses yaitu proses utama, proses manajerial dan proses lainnya. Terdapat **9 (sembilan) Perangkat Daerah (PD)** yang memiliki peta proses bisnis tetapi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 adalah **Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan Manguharjo.**

Terdapat salah satu contoh Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah (PD) yang telah mengacu pada **Peraturan Menteri**

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 adalah Peta Proses Bisnis yang dibuat oleh **Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**. Peta Proses Bisnis yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 1.8**.



Gambar 1.8. Gambar Peta Proses Bisnis pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambar 1.8 merupakan Peta Proses Bisnis dari **Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana**. Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 dan telah diidentifikasi ke dalam Proses Utama, Proses Pendukung dan Proses Manajerial. Proses Utama terdiri dari proses Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Berperilaku Hidup Sehat dan Peningkatan Pengendalian Jumlah Penduduk. Proses Pendukung terdiri dari proses Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan. Proses Manajerial terdiri dari proses Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Pada Peta Proses Bisnis tersebut telah menggunakan struktur *SIPOC* (*Supplier, Input, Proses, Output, Customer*).

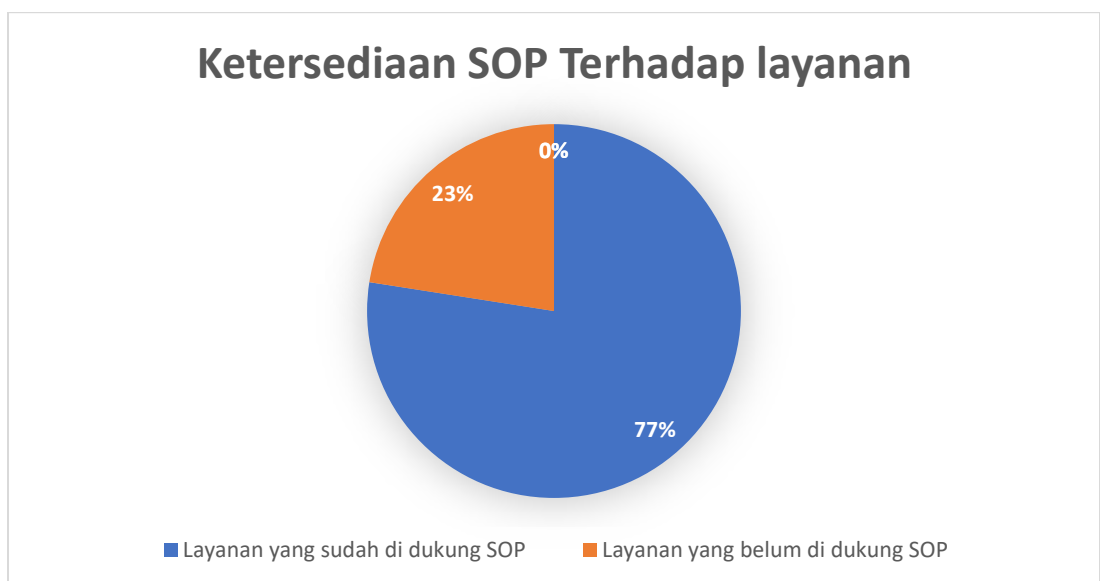
1.3.4.4 Ketersediaan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan

aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ada empat faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan dipakai oleh suatu organisasi yaitu berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam suatu prosedur, berapa banyak langkah dan sub langkah yang diperlukan dalam suatu prosedur, siapa yang dijadikan target sebagai pelaksana Standar Operasional Prosedur (SOP) dan apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan SOP ini. Format terbaik SOP adalah format yang sederhana dan dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara tepat serta memfasilitasi implementasi SOP secara konsisten sesuai dengan tujuan penyusunan SOP.

Beberapa manfaat dari penyusunan SOP di setiap layanan yang dimiliki adalah SOP dapat menjamin konsistensi pelayanan terhadap masyarakat, SOP membantu penyelesaian terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam memberikan layanan, serta SOP juga membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan. Ketersediaan SOP terhadap layanan pada Pemerintahan Kota Madiun divisualisasikan pada Gambar 1.9.



Gambar 1.9. Ketersediaan SOP Terhadap Layanan

Pada **Gambar 1.9** merepresentasikan metadata eksisting ketersediaan SOP terhadap layanan. Berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan pada 35 Perangkat Daerah (PD) di Kota Madiun, dari **324 layanan** terdapat **251 (dua ratus lima puluh satu) atau 72%**

layanan Pemerintah Kota Madiun yang telah didukung SOP dan terdapat **73 layanan (tujuh puluh tiga) atau 23% layanan Pemerintah Kota Madiun yang belum didukung SOP**. Berdasarkan hasil dari analisa yang telah dilakukan, Layanan Pemerintahan Kota Madiun yang paling banyak sudah didukung SOP adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan jumlah 37 SOP. Detail keseluruhan SOP yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di masing-masing dapat dilihat pada **Lampiran 2.1 Ketersediaan SOP**.

1.3.5 Metadata Proses Bisnis SPBE

Metadata Proses Bisnis SPBE berisi informasi mengenai urusan pemerintahan yang diselenggarakan. Entitas Metadata Arsitektur proses bisnis dapat mewakili Referensi Arsitektur proses bisnis. **Metadata proses bisnis terdiri dari 5 (lima) atribut** yang terdiri dari ID, nama bisnis/urusan, uraian bisnis/urusan, kode model referensi, ID metadata terkait. Detail dari metadata Proses Bisnis SPBE yang telah dianalisis dapat dilihat pada **Lampiran 3.1 Metadata Proses Bisnis SPBE**.

1.3.6 Analisis Gap

Setelah mengetahui kondisi eksisting pada pemerintah Kota Madiun dan dilakukan analisis, kondisi tersebut akan dibandingkan dengan kondisi ideal proses bisnis. Hasilnya akan ditemukan GAP antara Kondisi eksisting dan kondisi ideal di pemerintah Kota Madiun. Penjelasan analisis Gap dijabarkan pada **Tabel 3.4**.

Tabel 1.6. Analisis GAP Proses Bisnis SPBE

Parameter	Referensi	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Ketersediaan Peta Proses Bisnis	Peraturan MENPAN-RB No 19 Tahun 2018	Dari 35 Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Madiun, terdapat 10 PD memiliki peta proses bisnis yang sesuai, 5 PD memiliki peta proses bisnis namun tidak sesuai dengan Permen PAN-RB No. 19 Tahun 2018.	Semua Perangkat Daerah (PD) memiliki peta proses bisnis sesuai dengan PERMENPAN-RB No. 19 tahun 2018	Terdapat 17 PD pada Pemerintah Kota Madiun yang belum memiliki peta proses bisnis
Ketersediaan Dokumen Standar Operasional	Peraturan MENPAN-RB Nomor 35 Tahun 2012	Dari 322 layanan SPBE Pemerintah Kota Madiun, terdapat 251	Layanan SPBE pada masing-masing PD sebaiknya	Terdapat 73 layanan (23%) Pemerintah Kota Madiun yang

Parameter	Referensi	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Prosedur Terhadap Layanan		layanan (77%) yang telah didukung SOP dan 73 layanan (23%) yang belum didukung SOP	didukung dengan adanya SOP sehingga lebih terstruktur dalam melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan	belum didukung dengan SOP

1.4 KONDISI EKSISTING DATA DAN INFORMASI DAN ANALISIS GAP

Pada Subtansi 1.4 ini akan dibahas mengenai kondisi saat ini dari data dan informasi yang ada pada Pemerintahan Kota Madiun. Selanjutnya akan dilakukan proses analisis dengan kondisi ideal data dan informasi, sehingga menghasilkan gap antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal data dan informasi Pemerintahan Kota Madiun.

1.4.1 Pengertian Data dan Informasi

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Surat Edaran** Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dijelaskan bahwa Data dan Informasi merupakan semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan atau pihak lain. Dalam penggunaannya Data dan Informasi diutamakan untuk bagi pakai data dan informasi antar instansi pusat dan Pemerintah daerah dengan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data merupakan catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

- b. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.
- d. Mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

Informasi menurut **Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa data dan Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang mengandung nilai yang merepresentasikan suatu keadaan atau kondisi yang dapat diterima oleh akal manusia.

1.4.2 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

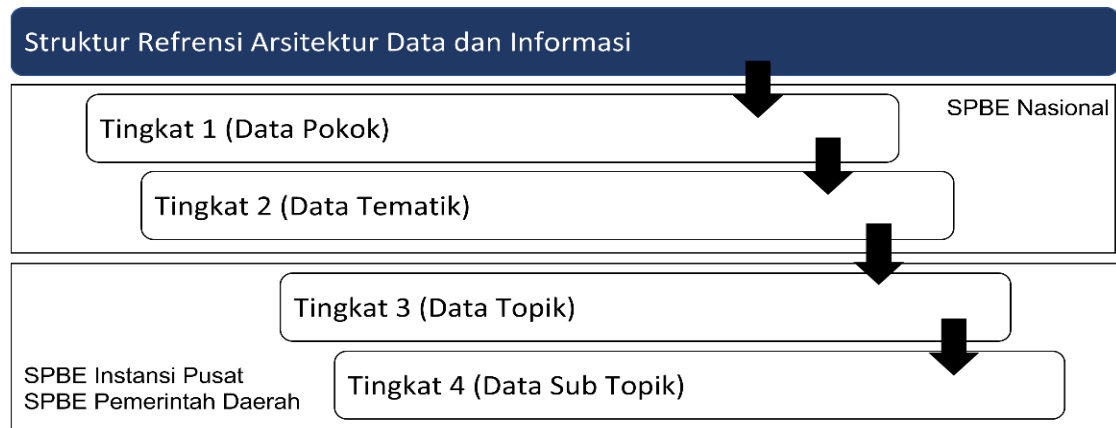
Berdasarkan Peraturan Presiden Arsitektur mengenai SPBE Referensi Arsitektur Data dan Informasi merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan Pemerintah yang diperlukan, di mana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Arsitektur Data dan Informasi terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data sektor Pemerintahan dan data pendukung umum sebagai Arsitektur Data dan Informasi tingkat 1 (pertama).
2. Data tematik, yang menjelaskan urusan Pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang, dikelompokkan ke dalam

data urusan Pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai Arsitektur Data dan Informasi pada tingkat 2.

Selanjutnya Pemerintah Daerah akan mendefinisikan di tingkat bawahnya, yang akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Untuk taksonomi RAD SPBE Nasional terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok di tingkat 1 (satu) dan 49 (Empat Puluh Sembilan) data tematik di tingkat 2 (dua).

Pemerintah Daerah, dalam menyusun RAD masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada RAD SPBE Nasional, serta melengkapi RAD pada tingkat di bawahnya sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 1.10** Data dan Informasi akan menjadi masukan dalam menjalankan berbagai fungsi pada aplikasi SPBE hingga terbentuknya layanan pemerintah yang diharapkan.



Gambar 1.10. Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Pada **Gambar 1.10** menjelaskan pengelompokan Arsitektur Data dan Informasi. Berdasarkan Taksonominya Arsitektur Data dan Informasi terdiri dari sepuluh data pada Data Pokok tingkat pertama dan empat puluh sembilan pada Data Tematik tingkat kedua.

1.4.3 Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Referensi Arsitektur Data dan Informasi merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Sub Bab RAB. Dengan adanya taksonomi dalam RAD yang selaras dengan RAB, maka memberikan kemudahan dalam menentukan metoda berbagi pakai data (Data Share) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redudansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi.

Tabel 1.7. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Data Pertahanan	Data yang merepresentasikan bidang pertahanan negara.
01.02	Data Hubungan Luar Negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri.
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Data Industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri.
02.02	Data Perdagangan	Data yang merepresentasikan bidang perdagangan.
02.03	Data Pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pertanian.
02.04	Data Perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang perkebunan.
02.05	Data Peternakan	Data yang merepresentasikan bidang peternakan.
02.06	Data Perikanan	Data yang merepresentasikan bidang perikanan.
02.07	Data Badan Usaha Milik Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Data Investasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan penanaman modal.
02.09	Data Koperasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan koperasi.
02.10	Data Usaha Kecil Dan Menengah	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Data Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Data Pekerjaan Umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum.
03.02	Data Transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi.
03.03	Data Transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi.
03.04	Data Perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan
03.05	Data Pembangunan	Data yang merepresentasikan bidang

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
	Kawasan atau Daerah Tunggal	pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Data Pertahanan	Data yang merepresentasikan bidang pertahanan.
03.07	Data Kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan.
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Data Kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan.
04.02	Data Sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial.
04.03	Data Pemberdayaan Perempuan	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan perempuan.
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Data Hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum.
05.02	Data Keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan.
05.03	Data Hak Asasi Manusia	Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia.
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Data Pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan.
06.02	Data Ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan.
06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Data Pemuda	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Data Olahraga	Data yang merepresentasikan bidang keolahragaan.
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Data Pertambangan	Data yang merepresentasikan bidang pertambangan.
07.02	Data Energi	Data yang merepresentasikan bidang energi.
07.03	Data Kehutanan	Data yang merepresentasikan bidang kehutanan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
07.04	Data Kelautan	Data yang merepresentasikan bidang kelautan.
07.05	Data Lingkungan Hidup	Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup.
Informasi Budaya dan Agama (08)		
08.01	Data Agama	Data yang merepresentasikan bidang agama.
08.02	Data Kebudayaan	Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan.
Informasi Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Data Dalam Negeri	Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri.
09.02	Data Keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan negara.
09.03	Data Informasi	Data yang merepresentasikan bidang informasi.
09.04	Data Komunikasi	Data yang merepresentasikan bidang komunikasi.
09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data yang merepresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Data Aparatur Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Data Kesekretariatan Negara	Data yang merepresentasikan bidang kesekretariatan negara.
Data Pendukung Umum (10)		
10.01	Data Kebijakan Pemerintah	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah.
10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan pemerintahan.
10.03	Data Kewilayahan	Data yang merepresentasikan informasi kewilayahan.
10.04	Data Dukung Lainnya	Data yang merepresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya.

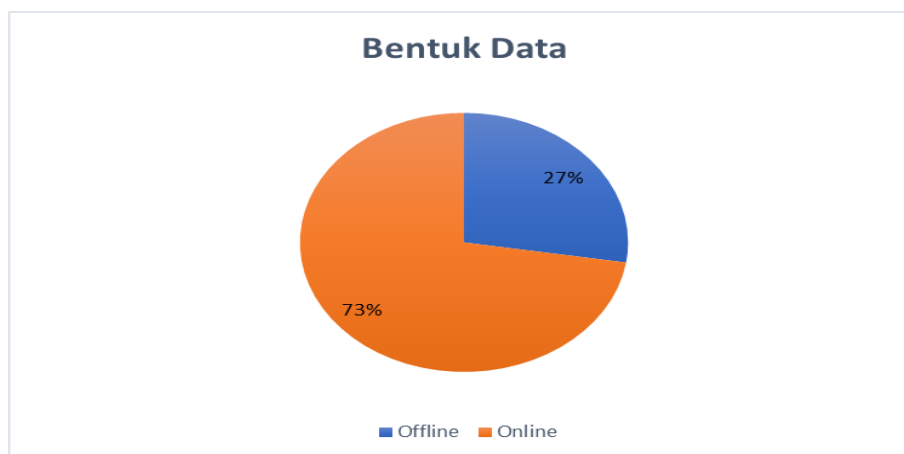
1.4.4 Kondisi Eksisting Data dan Informasi

Pada bagian ini akan dibahas terkait kondisi eksisting data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun. Berdasarkan

hasil survei yang mana merupakan kondisi *real* pada lapangan yang ditinjau terkait data dan informasi yang dimiliki dan dikelola pada Pemerintah kota Madiun. Didapatkan sebanyak **302 (tiga ratus dua)** data yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Madiun yang dihimpun dari masing-masing Perangkat Daerah.

1.4.4.1 Bentuk Data yang dimiliki

Berdasarkan hasil survei pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah didapatkan total 302 (Tiga ratus dua) data dan informasi yang tersebar di Pemerintahan Kota Madiun. Bentuk data yang dimiliki Pemerintahan Kota Madiun terbagi menjadi dua yaitu: *Offline* dan *Online*. Bentuk data *online* merupakan data yang disimpan melalui aplikasi yang berbasis *online* dimana tempat penyimpanan datanya adalah *database*. Sedangkan Bentuk data *offline* yaitu data yang disimpan melalui komputer internal Perangkat Daerah ataupun masih menggunakan kertas (berbentuk dokumen cetak). Berikut adalah grafik dari data dan informasi pada Pemerintahan Kota Madiun dapat dilihat pada **Gambar 1.11**.



Gambar 1.11 Persentase Bentuk Data yang dimiliki

Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.11. berdasarkan pada hasil survei, didapatkan pemetaan data dengan kategori bentuk data yang dimiliki oleh masing-masing Perangkat Daerah dimana dari data yang dihimpun didapatkan 302 **data** yang tersebar pada 35 Perangkat Daerah, **27% (83)** merupakan data **Offline**, **73% (219)** merupakan data **Online**.

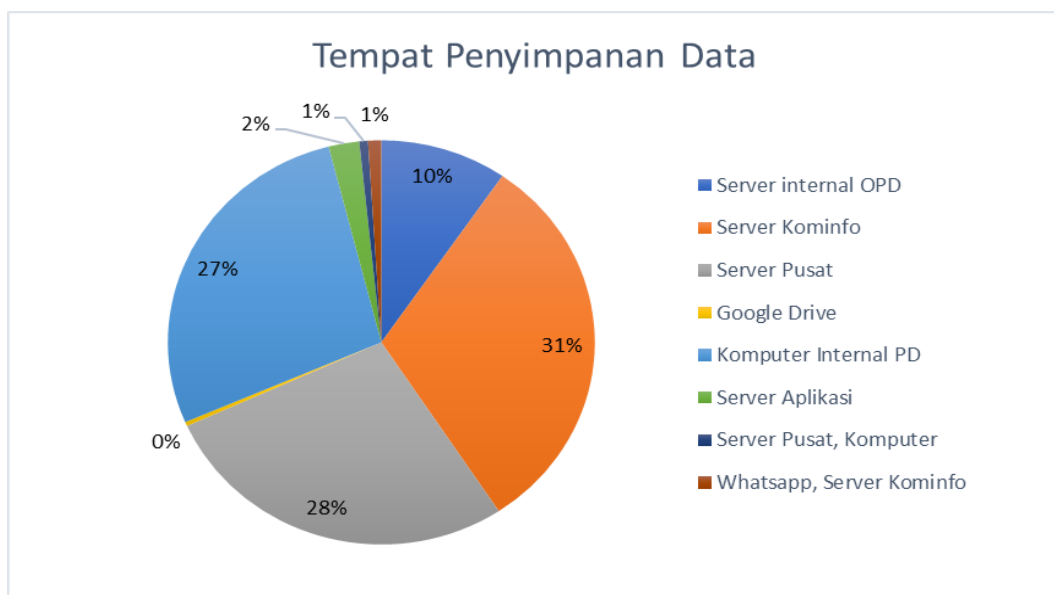
Data dengan bentuk *online* yang dimiliki Pemerintahan Kota Madiun telah tersimpan secara *online* sehingga pengelolaan data dapat diperbaharui secara otomatis. Adapun data yang *offline* merupakan data yang sebagian disimpan secara manual menggunakan kertas ataupun masih disimpan pada komputer internal namun belum dapat diakses secara *realtime*.

Contoh bentuk data *online* yang dimaksud adalah data E-SAKIP milik Bagian Organisasi, data tersebut dikatakan *online* karena data tersebut dapat diakses melalui aplikasi. Sedangkan contoh data *offline* seperti data indikator kinerja utama (IKA, IKU) milik Dinas Lingkungan Hidup.

1.4.4.2 Tempat Penyimpanan Data

Berdasarkan hasil survei kondisi eksisting pada Pemerintahan Kota Madiun dikategorikan menjadi 8 jenis tempat penyimpanan data seperti Server Internal Perangkat Daerah, Server Dinas Komunikasi dan Informatika, Server Pusat, *Google Drive*, Komputer Internal Perangkat Daerah, Server Aplikasi, Server Pusat Komputer, *Whatsapp* Server Komunikasi dan Informatika. Berikut merupakan persentase Tempat Penyimpanan Data pada Pemerintahan Kota Madiun:

- 10% (29) data disimpan pada Server internal Perangkat Daerah
- 31% (94) data disimpan pada Server Komunikasi dan Informatika
- 27% (83) data disimpan pada Server Pusat
- 0% (1) data disimpan pada *Google Drive*
- 27% (83) data disimpan pada Komputer Internal Perangkat Daerah
- 2% (7) data disimpan pada Server Aplikasi
- 1% (2) data disimpan pada Server Pusat, Komputer
- 1% (3) data disimpan pada *Whatsapp*, Server Komunikasi dan Informatika



Gambar 1.12. Tempat Penyimpanan Data

Berdasarkan Gambar 1.12 Persentase Tempat Penyimpanan Data, terdapat 83 data (27%) yang tersimpan pada **Komputer**

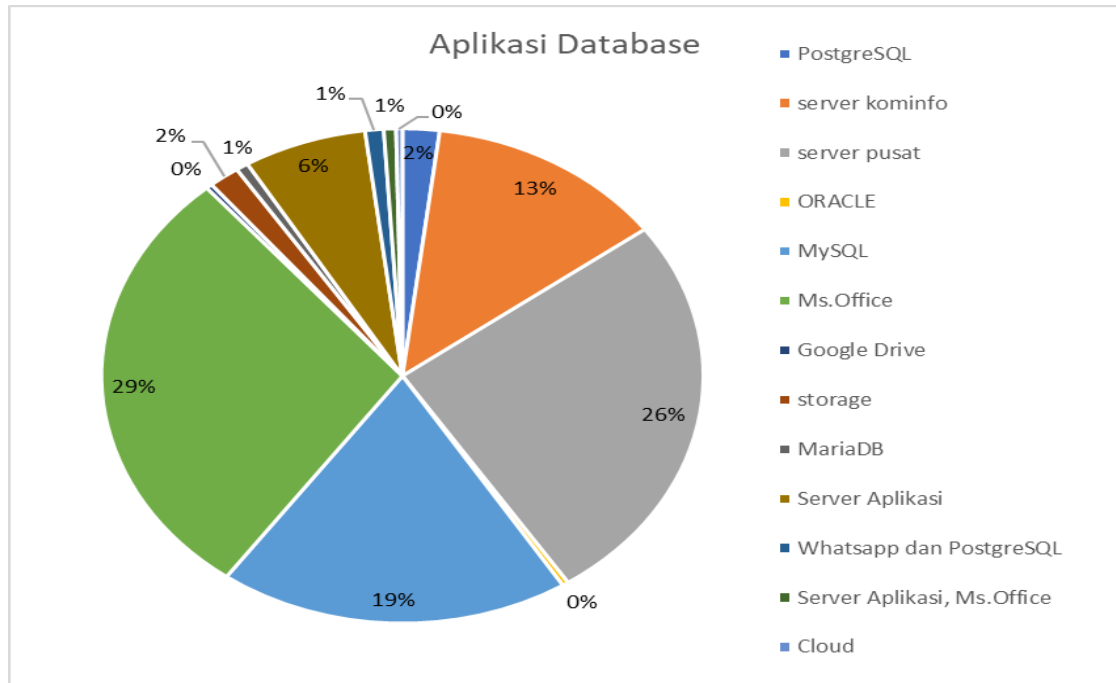
Internal Perangkat Daerah secara *offline* yang mayoritas disimpan dalam bentuk *Microsoft Word* dan *Microsoft Excel*. Untuk data yang disimpan secara *online*, ada 29 data (10%) disimpan pada **Server Internal Perangkat Daerah**, 94 data (31%) disimpan pada **Server Kominfo**, 83 data (27%) disimpan pada **Server Pusat**, 1 data (0%) disimpan pada **Google Drive**, 7 data (2%) disimpan pada **Server Aplikasi**, 2 data (2%) disimpan pada **Server pusat**, Komputer dan 3 data (1%) disimpan pada **Whatsapp, Server Kominfo**.

Mayoritas penyimpanan data pada Pemerintahan Kota Madiun sudah *online*. Contoh data yang disimpan pada komputer internal Perangkat Daerah yaitu data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Madiun milik Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Mayoritas penyimpanan data Pemerintahan Kota Madiun disimpan pada Server Dinas Komunikasi dan Informatika. Dimana Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peranan penting bagi Perangkat Daerah guna penyimpanan data terpusat, dengan dibuktikannya penggunaan server Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyimpanan data secara terpusat ini dimaksudkan agar memudahkan dalam mengelola dan memonitoring server sehingga lebih aman.

1.4.4.3 Aplikasi Database yang digunakan

Aplikasi *Database* merupakan perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer untuk melakukan penyimpanan data secara terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses dari suatu sistem pada komputer. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 35 (Tiga Puluh Lima) Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Madiun terdapat beberapa aplikasi *database* yang digunakan oleh Perangkat Daerah antara lainnya adalah *MySQL*, *Server Kominfo*, *Server Pusat*, *Oracle* dan lainnya. Selain itu terdapat pula aplikasi yang bukan termasuk aplikasi *database* akan tetapi juga digunakan untuk menyimpan data dan ada juga dari masing-masing perangkat Daerah yang tidak mengetahui aplikasi yang digunakan. Aplikasi tersebut antara lain adalah *Ms Office*, *Ms Excel*, *Google Drive* dan lainnya yang diilustrasikan pada **Gambar 1.13**.



Gambar 1.13. Aplikasi Database Yang Digunakan

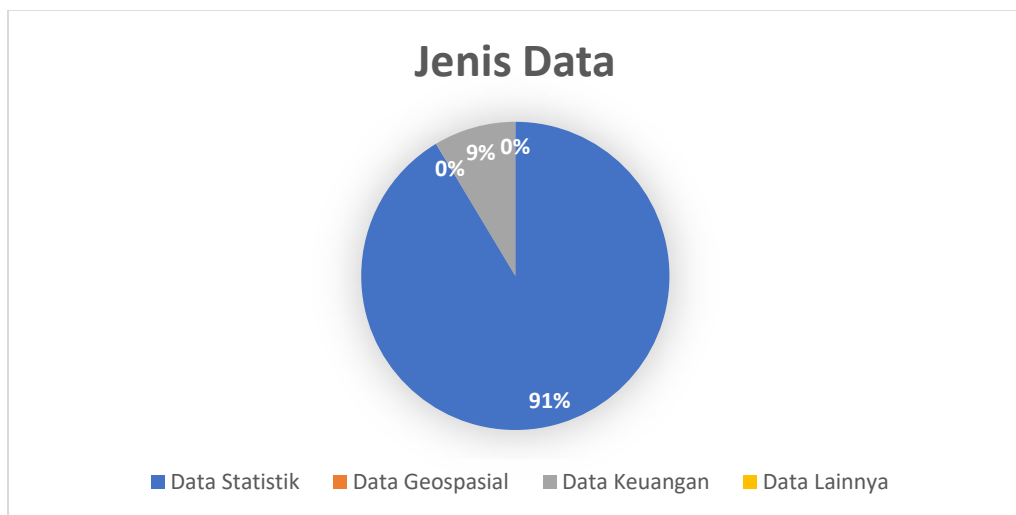
Berdasarkan **Gambar 1.13** menunjukkan bahwa, dari 302 (Tiga Ratus Dua) data yang tersimpan secara *online* dan *offline* terdapat 6 data (2%) disimpan pada **PostgreSQL**, 39 data (13%) disimpan pada Server **Kominfo**, 78 data (26%) disimpan pada **Server Pusat**, 1 data (0%) disimpan pada **ORACLE**, 57 data (19%) disimpan pada **MySQL**, 87 data (29%) disimpan pada **Ms.Office**, 1 data (0%) disimpan pada **Google Drive**, 5 data (2%) disimpan pada **Storage**, 2 data (1%) disimpan pada **MariaDB**, 20 data (7%) disimpan pada **Server Aplikasi**, 3 data (1%) disimpan pada **Whatsapp dan PostgreSQL**, 2 data (1%) disimpan pada **Server Aplikasi, Ms.Office**, 1 data (0%) disimpan pada **Cloud**.

Persentasi terbesar aplikasi *database* yang digunakan adalah *Ms.Office* yaitu sebanyak 29% (87 data), seperti contoh pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah memiliki data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Madiun yang masih disimpan menggunakan aplikasi *Ms. Office*. Persentase terbesar kedua adalah aplikasi *database* pada server pusat yaitu sebanyak 26% (78 data), seperti contoh Data Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dimiliki oleh Bagian Organisasi yang disimpan pada aplikasi milik pusat.

1.4.4.4 Jenis Data

Jenis data merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya. Dimana jenis data dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu data statistik, data geospasial, data keuangan dan data lainnya.

Data Statistik adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Data statistik diolah dengan metode tertentu untuk menghasilkan informasi yang berguna. **Data geospasial** merupakan data keruangan yang berhubungan dengan lokasi spesifik di permukaan bumi. Data geospasial bisa berupa tempat atau lokasi, posisi yang terdapat di bawah, pada, maupun di atas permukaan bumi. **Data Keuangan** adalah data yang berhubungan dengan anggaran pemerintah, pendapatan daerah, dan aset atau barang milik daerah. Data lainnya adalah data yang tidak berhubungan dengan ketiga data yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan data hasil survei yang telah dihimpun didapatkan pemetaan jenis data seperti Gambar 1.14.



Gambar 1.14 Jenis Data

Berdasarkan **Gambar 1.14** dapat diketahui bahwa 9% (26 data) merupakan jenis data Keuangan, sedangkan 91% (276 data) merupakan jenis data statistik dan 0% (0 data) merupakan jenis data geospasial dan data lainnya. Berdasarkan kalkulasi tersebut dapat diketahui bahwa jenis data terbanyak yaitu data statistik. Contoh data statistik yaitu data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kemudian data keuangan yaitu data aset kekayaan Aparatur Sipil Negara milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.4.4.5 Integrasi Data dan Informasi Eksisting

Berikut ini adalah integrasi data dan informasi pada Pemerintahan Kota Madiun. Dari data yang ada terdapat integrasi data antar Perangkat Daerah dengan aplikasi tertentu. **Tabel 1.8** merupakan penjelasan ketersediaan integrasi data dan informasi pada Pemerintahan Kota Madiun.

Tabel 1.8 Daftar Integrasi Data dan Informasi Eksisting

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Aplikasi	Nama Data yang Terintegrasi	Aplikasi Terintegrasi	Perangkat Daerah yang Terintegrasi
1	Bagian Organisasi	E-SAKIP	Data Tunjangan Kepegawaian	SIPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
1	Bagian Organisasi	E-SAKIP	Data Kinerja Pegawai	E-Kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	LPSE	Data LPSE (KTP dan NPWP)	INAPROC	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	INAPROC	Data tender, data produk pengadaan barang dan jasa	LPSE	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	INAPROC	Data tender, data produk pengadaan barang dan jasa	e-purchasing	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	INAPROC	Data tender, data produk pengadaan barang dan jasa	SIKAP	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	e-purchasing	data penyedia, non-penyedia	LPSE	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	e-purchasing	data penyedia, non-penyedia	SIKAP	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	e-purchasing	data penyedia, non-penyedia	Inaproc	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Aplikasi	Nama Data yang Terintegrasi	Aplikasi Terintegrasi	Perangkat Daerah yang Terintegrasi
	dan Administrasi Pembangunan				Pembangunan
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	SIKAP	data atau informasi kinerja penyedia barang/jasa (identitas, kualifikasi, serta riwayat kinerja penyedia.)	INAPROC	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	E-KAK	Data RPJMD dan Data RKPD, data permasalahan perangkat daerah, data rincian ,data tematik, data kinerja, data program, kegiatan, dan sub kegiatan	SIPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	E-KAK	Data RPJMD dan Data RKPD, data permasalahan perangkat daerah, data rincian ,data tematik, data kinerja, data program, kegiatan, dan sub kegiatan	M-SKP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIPKD	Data Keuangan SKPD	TTE (Tanda Tangan Elektronik)	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	My SAPK (SAPK)	Data Diklat Teknis dan Fungsional, Data Penjatuhan Hukuman Disiplin, Layanan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/C	IDIS BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Aplikasi	Nama Data yang Terintegrasi	Aplikasi Terintegrasi	Perangkat Daerah yang Terintegrasi
			ke Atas		
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IDIS BKN	Data pelaporan hukuman disiplin	MY SAPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	e-Mutasi	data mutasi ASN	SAPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SIST-BRO	Registrasi Pasien (NIK, Nama, Alamat,dsb)	Pcare	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SIST-BRO	Registrasi Pasien (NIK, Nama, Alamat,dsb)	SIAK Terpusat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SIST-BRO	Registrasi Pasien (NIK, Nama, Alamat,dsb)	E-Logistik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pcare BPJS	data pelayanan kesehatan, data BPJS	SIST-BRO	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	E-Puskesmas	Data pelayanan, data pasien	pCare	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	MADIUN MONITORING	Data PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial)	Puskesmas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Aplikasi	Nama Data yang Terintegrasi	Aplikasi Terintegrasi	Perangkat Daerah yang Terintegrasi
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SIAK TERPUSAT	NIK dan biodata penduduk	Web Portal DWH Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SIAK TERPUSAT	NIK dan biodata penduduk	Aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	Dinas Perhubungan	E-Kir	Data Kendaraan Wajib Uji, Data kendaraan lulus uji, Data kendaraan tidak taat uji	CSS Bank Jatim	Pihak Lainnya
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	e-surat	Data informasi surat (NIP, Nama, jabatan)	Esign BSRE	BSSN
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Madiun Dashboard	Data publik dari tiap PD	Sicaker	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	SIM-RS	-NIK dari database dispendukcapil, -data identitas pasien seperti nama, nomor bpjs, alamat, nomor telepon dari isian form, -nomor SEP, nomor rujukan dan data BPJS lainnya dari V-CLAIM BPJS	V-CLAIM BPJS	Pihak Lainnya
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	SIM-RS	-NIK dari database dispendukcapil, -data identitas pasien seperti nama, nomor bpjs, alamat, nomor telepon dari isian form, -nomor SEP, nomor rujukan dan data BPJS	SIAK Terpusat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Aplikasi	Nama Data yang Terintegrasi	Aplikasi Terintegrasi	Perangkat Daerah yang Terintegrasi
			lainnya dari V-CLAIM BPJS		
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	SISMADAK	Data penilaian tenaga kesehatan dari berbagai indikator dari isian form	SIM-RS RSUD Kota Madiun	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	INACBGS	Nominal tarif pembayaran hasil export aplikasi SIM-RS RSUD Kota Madiun	INACBGS Pusat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	SI-JASPEL	Nominal Jasa Medis dari database SIM-RS RSUD Kota Madiun, Data Pegawai dari database E-SITI	SIM-RS RSUD Kota Madiun	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	SI-JASPEL	Nominal Jasa Medis dari database SIM-RS RSUD Kota Madiun, Data Pegawai dari database E-SITI	E-SITI	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun

Dari **Tabel 1.8** diketahui terdapat 33 (tiga puluh tiga) data yang terintegrasi dengan aplikasi tertentu baik antar PD, sesama PD ataupun dengan aplikasi pusat dalam lingkup Pemerintahan Kota Madiun.

1.4.5 Metadata Data dan Informasi

Metadata merupakan ringkasan detail atau informasi yang terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi yang mudah untuk ditemukan, digunakan atau dikelola. Metadata Data dan Informasi yang dimaksud disini merupakan sebuah data yang menjelaskan suatu kegiatan urusan Pemerintahan pada setiap masing-masing PD. Menurut Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE terdapat acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan Pemerintah, urusan tersebut dibagi menjadi dua jenis data yaitu Data Pokok dan Data Tematik. Data Pokok merupakan data yang dikelompokkan ke dalam sektor Pemerintahan dan data pendukung umum.

Data Tematik merupakan data yang menjelaskan urusan Pemerintahan di emban oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pengelompokan ini juga untuk memberikan data yang lebih akurat berkualitas dalam menghasilkan layanan Pemerintahan sebagaimana juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia adalah **Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019**. Atribut yang akan diidentifikasi pada metadata ini adalah nama data, uraian data, tujuan data, kode model referensi data, kode PD, penanggung jawab PD, bidang PD, bentuk data (*online/offline*), tempat penyimpanan data, aplikasi database atau penyimpanan data yang dipakai, akses data, dan ID metadata terkait. Hasil identifikasi metadata data dan informasi dapat dilihat pada **Lampiran 4.1 Metadata Eksisting Data dan Informasi**.

1.4.6 Permasalahan Data dan Informasi

Berdasarkan hasil survei kondisi eksisting pada Pemerintahan Kota Madiun terkait permasalahan data dan informasi terdapat beberapa permasalahan yang dialami, diantaranya adalah:

1. Terdapat 4 PD yang mengalami permasalahan data Kehilangan data, dikarenakan kurangnya manajemen data dan penyimpanan tidak terpusat.
2. Terdapat 7 PD yang mengalami permasalahan data *Redundant*.
3. Terdapat 3 PD yang mengalami permasalahan data tidak *update*.
4. Terdapat 1 PD yang mengalami permasalahan data *Redundant*, Hilang dan tidak *update*.
5. Terdapat 1 PD yang mengalami permasalahan terkait Permasalahan lainnya.

Dari keseluruhan permasalahan data dan informasi, terjadinya kehilangan data pada PD Bagian Organisasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perhubungan dan Kecamatan Manguharjo. Permasalahan data *Redundant* pada PD Bagian Hukum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Lingkungan Hidup, Rumah sakit umum Kota Madiun, Kecamatan Kartoharjo dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Permasalahan data tidak *update* dialami oleh PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Permasalahan data *Redundant*, Hilang dan tidak *update* dialami oleh Puskesmas Sukosari. Untuk permasalahan lainnya dialami oleh PD Badan Keuangan dan Aset Daerah dimana permasalahan yang terjadi adalah *Update* yang terlambat karena menunggu data dari PD lain.

1.4.7 Analisis Gap

Analisis Gap dilakukan dengan membandingkan kondisi saat ini dari data dan informasi di Kota Madiun dengan kondisi idealnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1.9**.

Tabel 1.9 Analisis Gap Data dan Informasi

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Bentuk data yang dimiliki	Bentuk data yang dimiliki secara detail dijelaskan sebagai berikut, <ul style="list-style-type: none"> • 27% (83) dengan bentuk data <i>Offline</i> • 73% (219) dengan bentuk data <i>Online</i> • 0% (0) dengan bentuk data <i>Online & Offline</i> 	Seluruh Bentuk data diharuskan untuk <i>Online</i> demi mendukung program Pemerintah Satu Data Indonesia	Terdapat 83 data yang masih tersimpan secara Offline dan disarankan untuk menyimpannya pada penyimpanan awan atau cloud agar memiliki backup data, sehingga dibutuhkan kajian lebih lanjut terkait data yang masih disimpan secara offline agar nantinya dapat mendukung satu data Indonesia.
Tempat Penyimpanan data	Tempat penyimpanan data yang dipakai adalah sebagai berikut antara lain, <ul style="list-style-type: none"> • 10% (29) Server Internal PD • 31% (94) Server Kominfo • 27% (83) Server Pusat • 0% (1) <i>Google Drive</i> • 27% (83) Komputer Internal PD • 2% (7) Server Aplikasi • 1% (2) Server Pusat, Komputer • 1% (3) <i>Whatsapp</i>, 	Penyimpanan data dan informasi dilakukan terpusat pada server yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga penyimpanan data dan informasi terpusat pada satu <i>data center</i> untuk memudahkan data terkontrol dan menjaga keamanan data.	Masih terdapat beberapa PD yang menyimpan datanya secara <i>offline</i> yang memiliki tingkat risiko tinggi untuk kehilangan data dan beberapa data masih disimpan pada server secara internal yang masih memiliki kerentanan data hilang maupun rusak. Diharapkan data tersebut segera dipusatkan sehingga mempermudah dalam menjaga dan mengontrol data.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	Server Kominfo		
Aplikasi Database	<p>Penyimpanan data yang disimpan dalam aplikasi database antara lain,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2% (6) PostgreSQL • 13% (39) Server Kominfo • 26% (78) Server Pusat • 0% (1) Oracle • 19% (57) MySQL • 26% (78) Ms.Office • 0% (1) Google Drive • 2% (5) Storage • 1% (2) MariaDB • 7% (20) Server Aplikasi • 1% (3) Whatsapp dan PostgreSQL • 1% (2) Server Aplikasi, Ms.Office • 3% (9) Komputer Internal PD • 0% (1) Cloud 	<p>Dalam penggunaannya Aplikasi Database merupakan aplikasi yang salah satunya mampu digunakan untuk saling bagi pakai antar layanan dan aplikasi, Sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam penggunaan layanan sehingga, dapat mendukung penggunaan Sistem Penghubung Layanan.</p>	<p>Aplikasi database yang digunakan masih beragam, diharapkan kedepannya tiap PD dapat menggunakan 1 jenis database sehingga data dapat saling terintegrasi dan saling terhubung satu sama lain dengan lebih mudah.</p>
Jenis data	<p>Jenis data bagi pakai yang dipakai oleh PD sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 91% (276) Data Statistika • 9% (26) Data Keuangan • 0% (0) Data Geospasial • 0% (0) Data lainnya 	<p>Jenis data statistik dapat memberi banyak informasi berdasarkan data data yang sudah dikumpulkan di tiap OPD sehingga seluruh data dapat terorganisir dengan baik dan benar.</p>	<p>Terdapat 276 data statistika dan 26 data keuangan, diharapkan seluruh data dapat terorganisir dengan baik demi kelancaran perserabarn data di Kota Madiun.</p>

1.5 KONDISI EKSISTING LAYANAN SPBE DAN ANALISIS GAP

Kondisi Eksisting Layanan SPBE dan Analisis GAP membahas terkait kondisi saat ini dari layanan SPBE di Pemerintah Kota Madiun serta analisis gap dari kondisi layanan yang ada. Pembahasan akan

dimulai dari pengertian layanan dan referensi arsitektur layanan SPBE, kondisi eksisting layanan SPBE yang dimiliki, metadata layanan SPBE dan permasalahan SPBE, dan terakhir analisis gap dari layanan SPBE.

1.5.1 Pengertian Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang - undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu domain arsitektur layanan SPBE diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Dunia Usaha seperti penerapan cipta kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (*Government to Citizen/G2C* dan *Government to Business/G2B*) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah maupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (*Government to Government/ G2G*, *Government to Employee/G2E*). Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 layanan SPBE terdiri dari 2 jenis layanan yaitu **layanan administrasi** dan **layanan publik**. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mempunyai tujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah dengan cara mendukung tata laksana internal birokrasi di pemerintahan Daerah.

Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik mencakup layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Sedangkan layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan yang bersifat publik baik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik mencakup layanan yang mendukung kegiatan di berbagai sektor seperti sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal,

komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Pengaplikasian domain layanan SPBE dalam mengidentifikasi layanan pemerintah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi, serta dapat mempercepat pembangunan untuk ketersediaan infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara komprehensif, sehingga dapat menjadikan pemerintah yang bersifat *user-centric* menuju penerapan *Society 5.0*.

1.5.2 Struktur Arsitektur Layanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Arsitektur SPBE menjelaskan bahwa Referensi Arsitektur Layanan (RAL) merupakan sistem klasifikasi layanan pemerintah yang berasal dari proses bisnis tertentu. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan yang tepat akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif.

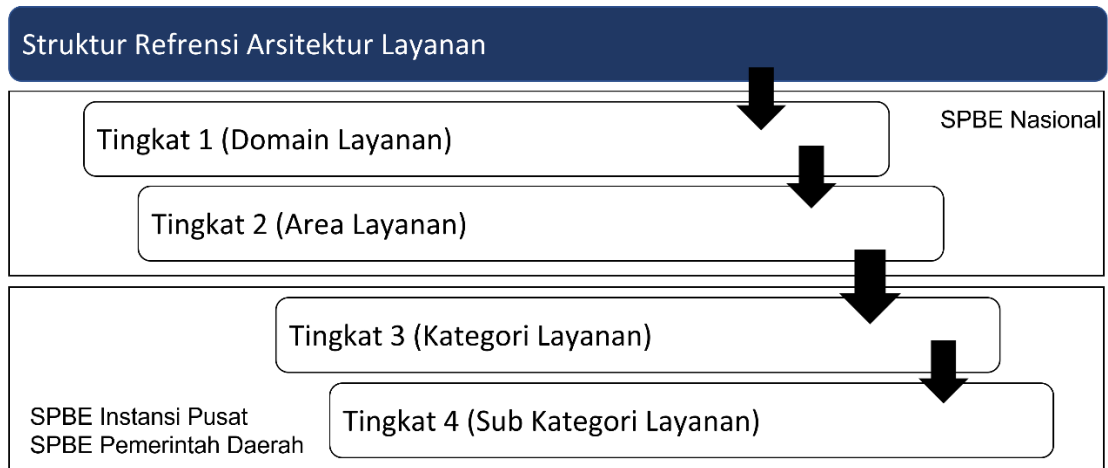
Dalam domain arsitektur layanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi layanan SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur layanan SPBE yang terbagi menjadi 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Kategori layanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki,

dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);

- d. Sub kategori layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Referensi arsitektur layanan dapat dilihat pada gambar 1.15 dibawah.



Gambar 1.15 Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Berdasarkan Gambar 5.1, Referensi Arsitektur struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 dan tingkat 2 merupakan struktur di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi layanan SPBE (RL) tingkat nasional yang terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 54 (lima puluh empat) area layanan di tingkat 2 (kedua) dengan 9 (sembilan) area layanan administrasi pemerintahan dan 45 (empat puluh lima) area layanan publik.

1.5.3 Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Referensi Arsitektur Layanan (RAL) merupakan sistem klasifikasi layanan pemerintah yang berasal dari proses bisnis tertentu. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan yang tepat akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif. Domain layanan sebagaimana yang telah ditentukan pada Gambar 4.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana

terdapat tingkat 1 dan tingkat 2 merupakan struktur di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL) tingkat nasional yang terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 54 (lima puluh empat) area layanan di tingkat 2 (kedua). Referensi arsitektur layanan SPBE dijelaskan lebih detail pada **Tabel 1.10**

Tabel 1.10 Referensi Arsitektur Layanan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
Layanan Publik (01)		
01.01	Pertahanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan negara
01.02	Hubungan Luar Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang hubungan luar negeri.
01.03	Kenegaraan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kenegaraan.
01.04	Ekonomi	Kegiatan pelayanan dalam bidang perekonomian.
01.05	Industri	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan industri.
01.06	Perdagangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perdagangan.
01.07	Pertanian	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian.
01.08	Perkebunan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perkebunan
01.09	Peternakan	Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan.
01.10	Perikanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan
01.11	Badan Usaha Milik Negara	Kegiatan pelayanan dalam pengelolaan badan usaha milik negara.
01.12	Investasi	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan penanaman moda
01.13	Koperasi	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan koperasi.
01.14	Usaha Kecil dan Menengah	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan usaha kecil dan menengah
01.15	Pariwisata	Kegiatan pelayanan dalam bidang

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
		kepariwisataan
01.16	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi.
01.17	Pekerjaan Umum	Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum.
01.18	Transmigrasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transmigrasi
01.19	Transportasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi.
01.20	Perumahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan
01.21	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
01.22	Pertanahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanahan
01.23	Kependudukan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan
01.24	Pemerintahan Daerah	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum
01.25	Kesehatan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan
01.26	Sosial	Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial.
01.27	Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
01.28	Hukum	Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum.
01.29	Keamanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan
01.30	Hak Asasi Manusia	Kegiatan pelayanan dalam bidang hak asasi manusia
01.31	Pendidikan	Kegiatan pelayanan dalam bidang

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
		pendidikan
01.32	Ketenagakerjaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan
01.33	Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
01.34	Pemuda	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda
01.35	Olahraga	Kegiatan pelayanan dalam bidang keolahragaan
01.36	Pertambangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertambangan.
01.37	Energi	Kegiatan pelayanan dalam bidang energi.
01.38	Kehutanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan
01.39	Kelautan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan.
01.40	Lingkungan Hidup	Kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup
01.41	Agama	Kegiatan pelayanan dalam bidang agama.
01.42	Kebudayaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan.
01.43	Informasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi.
01.44	Komunikasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi.
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)		
02.01	Dalam Negeri	Kegiatan pelayanan bidang dalam negeri.
02.02	Keuangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan negara
02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
02.04	Aparatur Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
		pengelolaan aparatur negara.
02.05	Kesekretariatan Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang sekretariatan negara.
02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/instansi.
02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja
02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan
02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan.

1.5.4 Kondisi Eksisting Layanan SPBE

Dalam meningkatkan layanan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun maka hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengetahui kondisi eksisting atau kondisi saat ini dari suatu layanan yang ada. Kondisi eksisting layanan dikelompokkan berdasarkan domain layanan, yaitu domain layanan administrasi pemerintahan dan domain layanan publik.

1.5.4.1 Layanan yang dimiliki Seluruh PD

Pada sub-bab ini akan membahas terkait layanan yang dimiliki oleh Pemerintahan Kota Madiun yang dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu berdasarkan ketersediaan layanan SPBE, status akses layanan dan jenis layanan berdasarkan domain layanan.

1. Ketersediaan Layanan SPBE

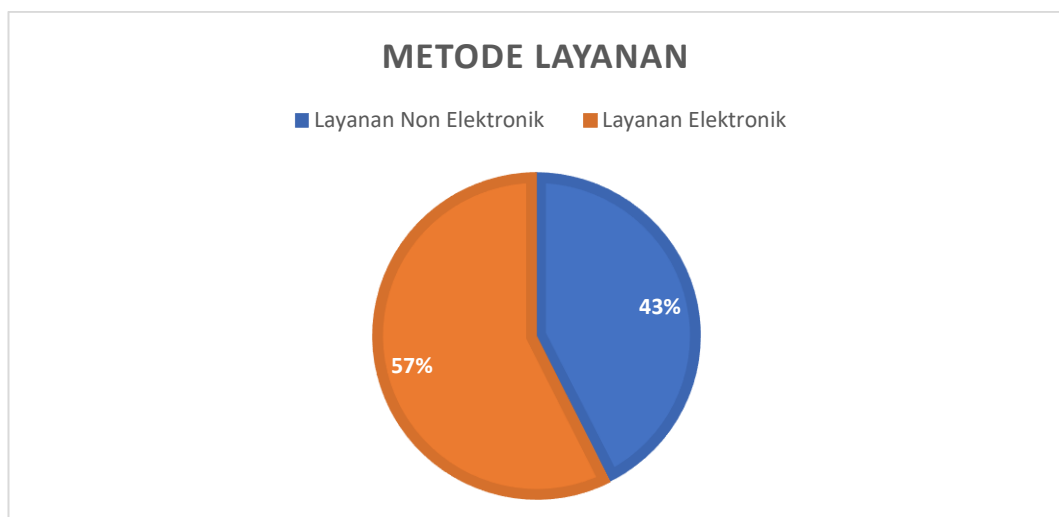
Berdasarkan hasil survei, dapat diketahui bahwa hampir seluruh PD pada Pemerintah Kota Madiun sudah memiliki layanan. Dari data yang dihimpun diketahui bahwa terdapat **322 (tiga ratus dua puluh dua)** layanan yang tersebar

dalam 34 (tiga puluh empat) dari 35 (tiga puluh lima) PD Pemerintah Kota Madiun. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran layanan masih belum optimal.

Adapun PD yang memiliki layanan paling banyak adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 32 (tiga puluh dua) layanan disusul oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dengan 23 (dua puluh tiga) layanan. PD yang tidak memiliki layanan adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.

2. Metode Layanan SPBE

Metode layanan adalah model penyampaian pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Model penyampaian layanan yang akan diberikan ini dapat dibedakan oleh dua metode layanan yaitu layanan elektronik dan layanan non elektronik. Dimana **layanan elektronik** adalah layanan yang telah didukung Teknologi informasi dan Komunikasi, seperti penggunaan aplikasi dalam mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien dalam segi waktu. Sedangkan **layanan non elektronik** adalah layanan yang diberikan belum didukung oleh aplikasi. Layanan non elektronik masih menggunakan pendataan dan pencatatan secara manual, seperti penggunaan formulir kertas dalam permohonan pelayanan.



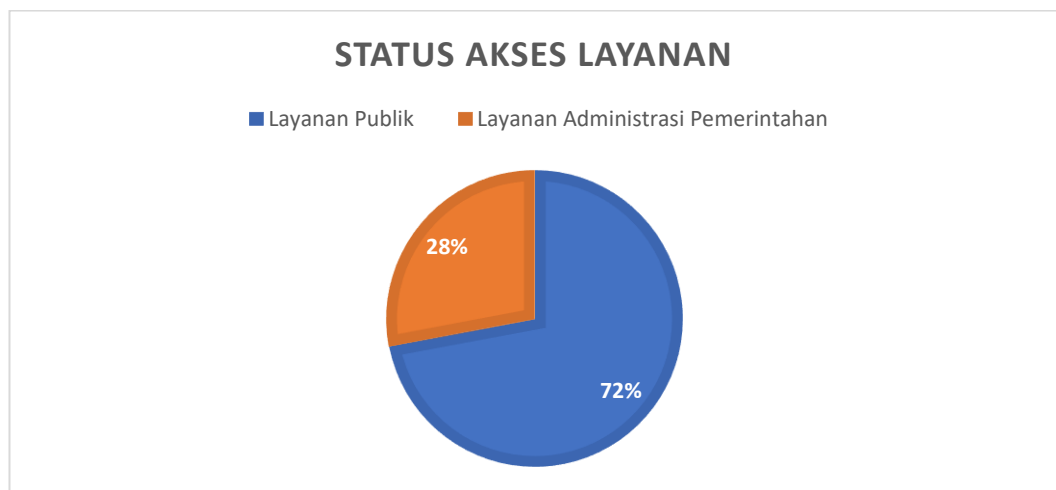
Gambar 1.16 Persentase Status Akses Layanan SPBE

Berdasarkan Gambar 1.16 dapat diketahui bahwa layanan terbanyak masih dilakukan secara non elektronik atau masih belum didukung oleh aplikasi. Layanan dengan metode non

elektronik memiliki nilai sebesar 43% atau 137 (seratus tiga puluh tujuh) layanan. Selanjutnya layanan dengan metode elektronik memiliki nilai 57 % dengan layanan berjumlah 185. Berdasarkan data survei dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki layanan dengan metode non elektronik paling banyak dengan layanan berjumlah 16 layanan.

3. Jenis Layanan Berdasarkan Domain Layanan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 layanan SPBE terdiri dari 2 jenis layanan yaitu layanan administrasi dan layanan publik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah dengan cara mendukung tata laksana internal birokrasi di pemerintahan Daerah. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik mencakup layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Sedangkan layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan yang bersifat publik baik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik mencakup layanan yang mendukung kegiatan di berbagai sektor seperti sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.



Gambar 1.17 Persentase Layanan Berdasarkan Domain Layanan SPBE

Berdasarkan Gambar 1.17 menunjukkan bahwa sebagian besar layanan yang ada di Pemerintah Kota Madiun merupakan layanan publik. Dimana dari total 322 layanan yang ada, **72% (232 layanan)** merupakan layanan Publik.

Sedangkan layanan administrasi pemerintahan yaitu sebanyak **28% (90 layanan)**. PD yang seluruh layanannya merupakan layanan publik yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan untuk PD yang hanya memiliki layanan administrasi saja adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.5.4.2 Layanan Administrasi Berbasis Elektronik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Layanan Administrasi Berbasis elektronik merupakan layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik layanan administrasi telah ditetapkan bahwa terdapat 10 indikator pada Aspek 7 tentang Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat dilihat pada **Tabel 1.11**.

Tabel 1.11 Indikator Layanan Administrasi pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020

Indikator	Nama Indikator Domain Layanan Administrasi SPBE
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

Layanan administrasi berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum. Namun, jika layanan

administrasi yang diberikan belum didukung oleh aplikasi umum, maka **Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, untuk mendukung layanan administrasi tersebut.** Untuk layanan administrasi berbasis elektronik yang dimiliki Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada **Tabel 1.12.**

Tabel 1.12 Kondisi Eksisting Layanan Administrasi Berbasis Elektronik

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan
1	Perencanaan	RAL 02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan Perencanaan	SIPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Penganggaran	RAL 02.02 Keuangan	Layanan Penganggaran	SIPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Keuangan	RAL 02.02 Keuangan	Layanan mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah	SIPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		RAL 02.02 Keuangan	Layanan Pengelolaan Keuangan daerah	SIPKD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		RAL 02.02 Keuangan	Layanan Keuangan Desa	SIMTRADA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		RAL 02.02 Keuangan	Layanan Keuangan Dana Insentif Daerah	DID	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		RAL 02.02 Keuangan	Layanan Monitoring PNBP	SIMPONI	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Pengadaan Barang dan Jasa	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	LPSE	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Layanan Pemberian Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)	SIRUP	Bag Pengadaan Barang Jasa dan Adm. Pembangunan
		RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	e-Katalog	Bag Pengadaan Barang Jasa dan Adm. Pembangunan
		RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (tata cara pembelian barang/jasa melalui	e-Purchasing	Bag Pengadaan Barang Jasa dan Adm. Pembangunan

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan
			sistem katalog elektronik)		
		RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	SPSE	Bag Pengadaan Barang Jasa dan Adm. Pembangunan
5	Kepegawaian	RAL 02.04 Aparatur Negara	layanan Informasi Kepegawaian	SIK	Badan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
		RAL 02.04 Aparatur Negara	Layanan Informasi Data Pegawai Negeri Sipil	MYSAPK	Badan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
		RAL 02.04 Aparatur Negara	Layanan e-Kinerja Pegawai	MSKP	Badan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
		RAL 02.04 Aparatur Negara	Layanan Pengajuan Cuti Pegawai	E-SITI	Rumah Sakit Umum Daerah
		RAL 02.04 Aparatur Negara	Layanan Perencanaan Kebutuhan SDM	RENBUT	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		RAL 02.04 Aparatur Negara	Pelayanan Kelembagaan dan Anjab	Aplikasi Anjab ABK /SINJAB	Badan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
6	Kearsipan	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Layanan Kearsipan Dinamis	SIKD	Arsip Nasional Republik Indonesia
		RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Layanan Kearsipan Dinamis	SRIKANDI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Pengelolaan Barang Milik Negara	RAL 02.02 Keuangan	Layanan pengelolaan barang milik negara	SIMDA BMD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		RAL 02.02 Keuangan	Layanan pengelolaan barang milik daerah	SIMBADA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
8	Pengawasan Internal terkait Pemerintah	RAL 02.05 Kesekretariatan Negara	Layanan pengawasan internal OPD daerah	SPIP	Inspektorat
		RAL 02.05 Kesekretariatan Negara	Layanan Pengawasan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi	MCP	Badan Pendapatan Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan
9	Akuntabilitas Kinerja Organisasi	RAL 02.07 Akuntabilitas Kinerja	Layanan pemantauan dan pengendalian kinerja OPD	E-SAKIP, e-sakip reuiu	Bagian Organisasi
		RAL 02.07 Akuntabilitas Kinerja	Layanan akuntabilitas OPD	PMPRB	Inspektorat dan Bagian Organisasi
10	Kinerja Pegawai	RAL 02.04 Aparatur Negara	Layanan Evaluasi Capaian Kinerja	M-SKP	Badan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
		RAL 02.04 Aparatur Negara	Layanan Evaluasi Capaian Kinerja	E-Kinerja	Badan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

Berdasarkan **Tabel 1.12** dari 10 (sepuluh) layanan administrasi berbasis elektronik yang telah dijabarkan pada Perpres 95 tahun 2018, semua layanan tersebut merupakan layanan yang terbagi menjadi jenis layanan pusat dan daerah. Layanan pusat merupakan layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum. Sedangkan layanan daerah merupakan layanan yang layanan khusus yang bergantung pada fungsi. Klasifikasi layanan ini berdasarkan pemilik dari layanan tersebut. Mengacu hal tersebut, layanan administrasi pada Pemerintah Kota Madiun telah menggunakan 11 (sebelas) aplikasi umum berupa aplikasi pusat dan 15 (lima belas) aplikasi daerah yang mendukung layanan administrasi pada Pemerintah Kota Madiun.

1.5.4.3 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Berdasarkan Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Layanan Publik berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik baik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Layanan publik SPBE mencakup layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis

lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik layanan publik terdapat 6 indikator yang ditetapkan pada Aspek 8, berikut ini merupakan nama indikator domain layanan publik SPBE yang dapat dilihat pada **Tabel 1.13**.

Tabel 1.13 Indikator Layanan Publik Berbasis Elektronik

Aspek/Indikator	Indikator Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

Layanan publik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum. Namun, jika layanan publik yang diberikan belum didukung oleh aplikasi umum, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus. Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, taksonomi referensi arsitektur layanan publik berbasis elektronik Hasil identifikasi 3 Layanan Publik Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Sektoral dapat dilihat pada **Tabel 1.14**.

Tabel 1.14 Kondisi Eksisting Layanan Publik Berbasis Elektronik

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	Perangkat Daerah Pemilik Layanan	Jenis
1	Pengaduan Layanan Publik	RAL 01.44 Komunikasi	Layanan Aduan Pelayanan Publik	LAPOR SPAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pusat
		RAL 01.44 Komunikasi	Layanan Pengaduan / Keluhan Masyarakat	Website Satpol PP dan Damkar	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Daerah
2	Data Terbuka	RAL 01.43 Informasi	Pemberian Informasi oleh Pejabat	PPID	Dinas Komunikasi dan	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	Perangkat Daerah Pemilik Layanan	Jenis
			Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		Informatika	
		RAL 01.43 Informasi	Pelayanan Data Statistik Sektoral	Tidak ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	Daerah
		RAL 01.43 Informasi	"Layanan Satu Data Kota Madiun	Madiun Dashboard	Dinas Komunikasi dan Informatika	Daerah
		RAL 01.43 Informasi	Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Madiun	Peta Sebaran Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
		RAL 01.43 Informasi	Peta Digital Perizinan	Peta Sebaran Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
3	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	RAL 01.28 Hukum	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	http://dokum.madiunkota.go.id/	Bagian Hukum	Daerah
Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik						
1	Pendidikan	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan PPDB	https://ppdb.madiunkota.go.id/	Dinas Pendidikan	Daerah
		RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Be SMART Kota Madiun	https://beasi.swa.madiunkota.go.id/	Dinas Pendidikan	Daerah
		RAL 01.31 Pendidikan	Layanan LI (Laporan Individu Sekolah)	https://lidisdi.k.madiunkota.go.id	Dinas Pendidikan	Daerah
2	Pengajaran	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Pekerjaan dan Usaha	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Pelayanan Perizinan	MASS Madiun, OSS	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah
4	Tempat Tinggal	RAL 01.20 Perumahan	Pelayanan Rekomendasi Izin Lokasi (Pembangunan dan	Tidak ada	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	Perangkat Daerah Pemilik Layanan	Jenis
			Pengembangan Perumahan).			
5	Komunikasi dan Informasi	RAL 01.43 Informasi	Layanan Permohonan Informasi	PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika	Daerah
		RAL 01.44 Komunikasi	Layanan Pengelolaan Pengaduan	Span Laport	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pusat
		RAL 01.43 Informasi	Layanan Informasi terkait layanan yang disediakan oleh RSUD kota Madiun	http://rsud.madiunkota.go.id/	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Daerah
		RAL 01.44 Komunikasi	Layanan Pengaduan terkait layanan yang disediakan oleh RSUD kota Madiun	http://rsud.madiunkota.go.id/	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Daerah
6	Lingkungan Hidup	RAL 01.40 Lingkungan Hidup	Layanan SILAPLING	www.silapling.madiunkota.go.id	Dinas Lingkungan Hidup	Daerah
7	Kesehatan	RAL 01.25 Kesehatan	Pelayanan Pengajuan Izin SATGAS COVID	Tidak ada	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bea Iur Daerah (KIS PBID)	Pcare BPJS	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Pelayanan Pengusulan KIS PBIN	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Pelayanan Penonaktifan KIS PBIN	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	Perangkat Daerah Pemilik Layanan	Jenis
					Anak	
		RAL 01.25 Kesehatan	antrian <i>Online</i>	Web RSUD	OPD	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Pelayanan Loket Pendaftaran	SIM-RS	OPD	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Pelayanan Pendaftaran	SIST-BRO	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Pelayanan Pendaftaran dan Administrasi	SIST-BRO	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Pelayanan Pemeriksaan Umum	SIST-BRO	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	SIST-BRO	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Pelayanan KIA-KB-Imunisasi	SIST-BRO, KLIK KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Pelayanan Gawat Darurat (Kasus Gawat Darurat, Pasien Batuk Pilek/Suhu > 37,5°C)	Tidak ada	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Pelayanan Konsultasi (Gizi, Sanitasi, UBM (Upaya Berhenti Merokok dan	Si Gizi Terpadu - ePPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	Perangkat Daerah Pemilik Layanan	Jenis
			Pengaduan)	Masyarakat)		
		RAL 01.25 Kesehatan	Pelayanan Santun Lansia	Tidak ada	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Pelayanan Pemeriksaan Khusus (Tb, HIV, dan Bapil)	SITB (TB), SIHA (HIV/AIDS)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Pelayanan Kefarmasian	SIMONA	KEMENKES	Pusat
		RAL 01.25 Kesehatan	Pelayanan Laboratorium	Tidak ada	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Pelayanan Ambulans	Tidak ada	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Pendaftaran dan Rekam Medik	Menggunakan WhatsApp	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Pemeriksaan Umum	SIST-BRO	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut	SIST-BRO	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan PryKB	Tidak Diketahui	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	Perangkat Daerah Pemilik Layanan	Jenis
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Gawat Darurat	Tidak Diketahui	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Gizi	Si Gizi Terpadu - ePPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Kefarmasian	SIMONA	KEMENKES	Pusat
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan laboratorium	Tidak Diketahui	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Konsultasi Sanitasi, Berhenti Merokok (UBM) dan VCT	Tidak Diketahui	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan TB	SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Khusus	Tidak Diketahui	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
		RAL 01.25 Kesehatan	Layanan Vaksinasi	SIST-BRO	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah
8	Jaminan Sosial	RAL 01.26 Sosial	Pelayanan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	puskesmas (pusat kesejahteraan sosial Kota Madiun)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	Perangkat Daerah Pemilik Layanan	Jenis
9	Energi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10	Perhubungan dan Lalu Lintas	RAL 01.19 Transportasi	Layanan KIR AE	e-Kir	Dinas Perhubungan	Daerah
		RAL 01.19 Transportasi	Pelayanan E-TLE	e-TLE	Dinas Perhubungan	Daerah
		RAL 01.19 Transportasi	Layanan pendaftaran <i>online</i> Pengujian Kendaraan Bermotor dan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor	CSS Bank Jatim	Dinas Perhubungan	Daerah
11	Sumber Daya Alam	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
12	Pariwisata	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
13	Sosial	RAL 01.26 Sosial	Pelayanan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	puskesos (pusat kesejahteraan sosial Kota Madiun)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Daerah
		RAL 01.26 Sosial	Pelayanan Pemberian Bantuan Pemakaman Bagi Gepeng (OT/T4)	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Daerah
		RAL 01.26 Sosial	Pelayanan Santunan Kematian	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Daerah
14	Koperasi	RAL 01.13 Koperasi	Ijin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	Tidak ada	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Daerah
15	Penanggulangan Bencana dan Linmas	RAL 01.26 Sosial	Layanan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Tidak ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah
		RAL 01.26 Sosial	layanan Penanganan	Tidak ada	Badan Penanggulangan	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	Perangkat Daerah Pemilik Layanan	Jenis
			Bencana Alam (Banjir, Angin puting beliung)		an Bencana Daerah	
		RAL 01.26 Sosial	Layanan Evakuasi / Penanggulangan Bencana	Tidak ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah
		RAL 01.26 Sosial	Pelayanan Penanganan Bencana Sosial	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Daerah
		RAL 01.26 Sosial	Penanganan Bencana Alam	Tidak ada	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Daerah
16	Perdagangan, perindustrian, PM, dan PTSP	RAL 01.04 Ekonomi	Layanan Retribusi Pasar	E-Retribusi	Dinas Perdagangan	Daerah
17	Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	RAL 01.29 Keamanan	Pelayanan Penebangan/Pengeprasan Pohon dan atau Tanaman Tepi Jalan.	Google Form	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daerah
18	Ketenagakerjaan	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Layanan KARTU TANDA PENCARI KERJA / AK I ONLINE	SICAKER	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Daerah
		RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Rekomendasi Paspur (Cpmi)	SISKOTKLN	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Daerah
		RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Pelayanan Pemberian Informasi Pasar Kerja Kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja	SICAKER	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Daerah
		RAL 01.32	Penerbitan	Tidak ada	Dinas Tenaga	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	Perangkat Daerah Pemilik Layanan	Jenis
		Ketenagakerjaan	Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal		Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
		RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Penerbitan Rekomendasi Ijin Tempat Penampungan	Tidak ada	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Daerah
		RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)	Tidak ada	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Daerah
		RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Rekomendasi Penyelenggara Pameran Bursa Kerja/Job Market Fair	Tidak ada	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Daerah
		RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Pelayanan Pendaftaran Siaga Kita	Tidak ada	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Daerah
19	Cipta Karya dan Tata Ruang	RAL 01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Pelayanan Calon Penghuni Rusunawa.	Google Form	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daerah
20	Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAL 01.07 Pertanian	Pelayanan Permintaan Bantuan Pestisida Pertanian	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Daerah
		RAL 01.07 Pertanian	Pelayanan Surat Pengantar Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	Perangkat Daerah Pemilik Layanan	Jenis
			Agribisnis Perdesaan (BLM PUAP) Ke Bank			
		RAL 01.07 Pertanian	Pelayanan Rekomendasi Kredit Usaha Tani	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Daerah
		RAL 01.07 Pertanian	Pelayanan Fasilitas Pengajuan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Daerah
		RAL 01.07 Pertanian	Pelayanan Verifikasi dan Validasi Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Distribusi Pupuk Bersubsidi	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Daerah
		RAL 01.09 Peternakan	Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Tani Ternak	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Daerah
		RAL 01.09 Peternakan	Pelayanan Kesehatan Hewan	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Daerah
21	Layanan Bina Marga dan Pematusan	RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Layanan pelaporan jalan dan jembatan	SILAT	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Daerah
		RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Pelayanan Jasa Rekomendasi Penurunan Trotoar	Tidak ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Daerah
22	Layanan Pengelolaan Bangunan dan Tanah	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Layanan Permohonan Persetujuan Bangunan	http://simbg.pu.go.id/	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	Perangkat Daerah Pemilik Layanan	Jenis
			Gedung		Ruang	
23	Layanan Pemadam Kebakaran	RAL 01.44 Komunikasi	Layanan Pengaduan / Keluhan Masyarakat	https://satpol.madiunkota.go.id/	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Daerah
24	Perpustakaan	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Perpustakaan	http://Inlislit.e.madiunkota.go.id/	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Daerah
25	Pemuda dan Olahraga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
26	Kependudukan Catatan Sipil	RAL 01.23 Kependudukan	Pelayanan Inovasi Takziah	Whatsapp	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Pelayanan Inovasi Gadjah Mada (Petugas Adminduk Berkunjung ke Rumah, Masyarakat Kota Madiun Bahagia)	SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pusat
		RAL 01.23 Kependudukan	Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	Klik WA, SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Pelayanan Penerbitan KK	Klik WA, SAKIP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)	Klik WA, Digiform, SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan	Klik WA, Digiform, SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Klik WA, Digiform, SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	Perangkat Daerah Pemilik Layanan	Jenis
					Sipil	
		RAL 01.23 Kependudukan	Layanan Pencatatan Kematian	Klik WA, Digiform, SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Pelayanan Pencatatan Perkawinan (Bagi Warga Non Muslim)	Klik WA, Digiform, SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Pelayanan Penerbitan Akta Perceraian (Bagi Warga Non Muslim)	Klik WA, SILANDEP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Pelayanan Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan Dan Pengesahan Anak	Klik WA, Digiform, SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama	Klik WA, digiform, SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Pelayanan Pencatatan Pembetulan Dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	Klik WA, Digiform, SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Pelayanan Pembatalan Dokumen Administrasi Kependudukan Melalui Asas Contrarius Actus	Klik WA, Digiform, SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Pelayanan Penerbitan Kembali Register Dan Akta Pencatatan	Klik WA, Digiform, SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	Perangkat Daerah Pemilik Layanan	Jenis
			Sipil			
		RAL 01.23 Kependudukan	Pelayanan Permintaan Data Jumlah Penduduk	Klik WA, Digiform, SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	Pelayanan Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan	Web Portal	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah
		RAL 01.23 Kependudukan	PELAYANAN INOVASI BAKTIKU EYANGKU (Bawakan Akte Kelahiran Untukmu EYANGKU	Tidak ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah
27	Badan Kesatuan, Politik dan Perlindungan Masyarakat	RAL 01.33 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pengajuan Penelitian	SIPERMATA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Daerah
28	Perpajakan	RAL 02.02 Keuangan	Pelayanan SIMPADAMA (Pelayanan Pajak Daerah)	SIMPADAMA	Badan Pendapatan Daerah	Daerah

Berdasarkan Tabel 1.14 dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis layanan publik berbasis elektronik dan 13 (tiga belas) jenis layanan publik sektoral berbasis elektronik, namun belum semua layanan publik sektoral memiliki layanan maupun aplikasi pendukung dari layanan tersebut. Pada Pemerintah Kota Madiun terdapat 5 (lima) layanan publik sektoral yang belum didukung layanan maupun aplikasi. Jenis layanan tersebut adalah layanan pada sektor Pengajaran, Energi, Sumber Daya Alam, Pariwisata, dan Pemuda dan Olahraga.

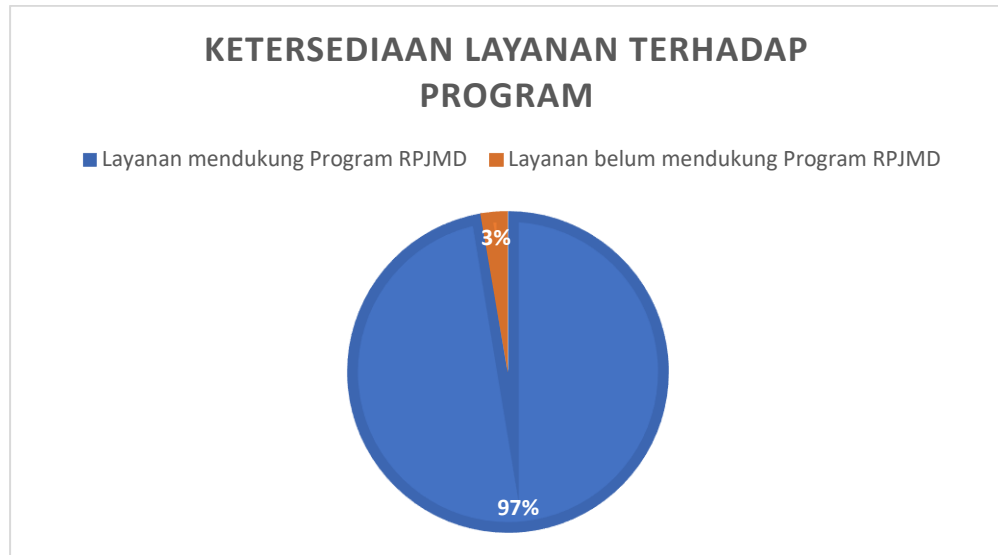
Secara keseluruhan layanan publik sektoral yang ada pada Pemerintah Kota Madiun adalah 60 (enam puluh) layanan yang tersebar di seluruh PD. Selain itu, terdapat beberapa jenis layanan

yang masih belum didukung aplikasi yaitu layanan Pekerjaan dan Usaha, Tempat Tinggal, Koperasi, Penanggulangan Bencana dan Linmas, dan Pertanian dan Ketahanan Pangan. Layanan tersebut terdapat pada PD Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.5.4.4 Ketersediaan Layanan Terhadap Program

Ketersediaan Layanan terhadap program merupakan ketersediaan layanan dari seluruh Perangkat Daerah yang mendukung program RPJMD. Peninjauan dilakukan terhadap layanan apa saja yang telah mendukung program pada RPJMD. Berdasarkan dari hasil survei yang telah dilakukan pada Pemerintah Kota Madiun diketahui bahwa tidak seluruh program urusan RPJMD didukung oleh layanan.

Pada Pemerintahan Kota Madiun terdapat 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) Program yang tersebar pada seluruh Perangkat Daerah. Dalam upaya melaksanakan program yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka dikembangkan layanan yang diharapkan sesuai dengan program tersebut dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum apabila diimplementasikan dengan baik. Data terkait RPJMD layanan terhadap program Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada **Lampiran 5.1 Identifikasi Layanan Terhadap Program RPJMD.**



Gambar 1.18 Persentase Ketersediaan Layanan Terhadap Program

Berdasarkan **Gambar 1.18** dapat diketahui bahwa masih banyak layanan yang masih belum mendukung program RPJMD. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa layanan yang tidak mendukung program memiliki nilai sebesar 68% atau sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) layanan. Sedangkan layanan yang mendukung program memiliki nilai sebesar 32% atau sebanyak 119 (seratus sembilan belas) layanan.

1.5.5 Metadata Layanan SPBE

Metadata arsitektur ini dapat merepresentasikan entitas pada arsitektur SPBE secara lebih jelas. Entitas metadata arsitektur layanan SPBE berisi informasi mengenai luaran atau hasil dari sebuah/beberapa urusan pemerintahan sebagai induknya.

Entitas metadata arsitektur layanan SPBE berhubungan dengan arsitektur aplikasi SPBE sebagai perangkat yang memberikan layanan tersebut. Pada entitas ini tidak terdapat hubungan internal sehingga tidak perlu dilakukan dekomposisi. Masing-masing metadata arsitektur memiliki beberapa atribut yang merupakan karakteristik/ciri yang mendefinisikan metadata arsitekturnya. Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE**, detail metadata layanan SPBE dapat dilihat pada **Tabel 1.15**.

Tabel 1.15 Atribut Metadata Layanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Layanan	Merupakan nama dari layanan yang dihasilkan oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Tujuan Layanan	Merupakan penjelasan tujuan dari layanan
4	Fungsi Layanan	Merupakan uraian penjelasan dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam layanan
5	Model Referensi Layanan	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama layanan yang dipilih
6	Unit Pelaksana	Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan layanan
7	Kementerian/ Lembaga terkait	Merupakan kementerian/lembaga terkait dengan layanan
8	Urusan Pemerintahan Terkait	Merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan layanan
9	Target Layanan	Merupakan target pengguna layanan
10	Metode Layanan	Merupakan model dari layanan
11	Potensi Manfaat	Merupakan manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE baik untuk kebutuhan internal instansi pusat dan pemerintah daerah, serta kepentingan eksternal, para pemangku kepentingan, hingga nasional (a.l.: meningkatkan kualitas layanan pemerintah, mempercepat proses pemberian layanan, peningkatan akurasi dan kualitas data, meningkatkan efisiensi operasional dll).
12	Potensi Ekonomi	Merupakan kuantifikasi potensi manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE
13	Potensi Risiko	Merupakan potensi risiko yang akan terjadi dalam penerapan layanan SPBE
14	Mitigasi Risiko	Merupakan mitigasi penanganan potensi risiko yang dihadapi dalam penerapan layanan SPBE
15	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Penjabaran metadata layanan dapat menunjukkan bahwa layanan yang dikelola telah memenuhi referensi dari SPBE nasional. Dari analisis tersebut menunjukkan bahwa sejumlah OPD telah melaksanakan pelayanan yang disebutkan dalam

Lampiran Perpres 95 tahun 2018. Detail metadata layanan SPBE dapat dilihat pada **Lampiran 5.2 Metadata Layanan SPBE**.

1.5.6 Permasalahan Layanan SPBE

Dalam pelaksanaan layanan yang ada, PD di Pemerintah Kota Madiun memiliki sejumlah permasalahan yang dihadapi. Dari hasil survei yang telah dilakukan, terdapat beberapa masalah yang kerap terjadi dalam pelaksanaan layanan di Pemerintah Kota Madiun, diantaranya:

- a. Pekerjaan masih dilakukan secara manual
- b. Kurangnya pemahaman SDM secara teknis
- c. Aplikasi masih belum sepenuhnya terintegrasi
- d. Kurangnya sosialisasi penggunaan layanan
- e. Akses layanan lambat

Permasalahan yang ada sebagian besar dikarenakan sarana prasarana pendukung layanan seperti server, jaringan yang kurang pendukung sehingga membuat akses layanan menjadi lambat atau kurang *update*. Akses layanan lambat juga dikarenakan layanan yang masih manual sehingga diperlukan waktu lebih untuk menyelesaikan layanan yang ada. Sedangkan kurangnya sosialisasi layanan terhadap target pengguna layanan menjadikan layanan jarang diakses atau digunakan.

1.5.7 Analisis Gap

Setelah pembahasan kondisi layanan Pemerintah Kota Madiun di atas, maka dilakukan analisis kesenjangan atau gap atas kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi ideal dari layanan SPBE di Pemerintah Kota Madiun. Hasil analisis gap layanan SPBE Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada **Tabel 1.16**.

Tabel 1.16 Analisis GAP Layanan SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Ketersediaan layanan	Terdapat 322 layanan yang tersebar pada 35 OPD.	Seluruh instansi Pemerintahan memiliki layanan dan atau mendukung layanan OPD lain.	Terdapat GAP karena ada 1 PD yang tidak memiliki layanan yaitu Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Akses layanan	Berdasarkan 322 layanan yang ada di Kota Madiun, terdapat 119 layanan yang memiliki akses secara <i>online</i> , 137 layanan dengan akses manual, dan 66 layanan dengan akses <i>online</i> dan manual.	Layanan didukung aplikasi umum berbagi pakai dan atau aplikasi khusus (Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE)	Perlu dilakukan perubahan terhadap 137 layanan dengan akses manual menjadi <i>online</i> .
Layanan Administrasi Pemerintah	Dari 10 layanan administrasi berbasis elektronik pada PERPRES Nomor 95 Tahun 2018, dapat diketahui dari semua layanan telah didukung oleh aplikasi.	Layanan didukung dengan aplikasi bagi pakai (Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE)	Kondisi ideal telah terpenuhi.
Layanan Publik	Berdasarkan 3 jenis layanan publik berbasis elektronik, layanan eksisting yang ada di Pemerintahan Kota Madiun telah didukung oleh aplikasi pusat maupun daerah.	Penggunaan aplikasi bagi pakai untuk mendukung layanan dan Pemerintah dapat menyempurnakan dengan pembangunan aplikasi khusus jika belum tersedia aplikasi umum berbagi pakai (Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE)	Pengusulan perubahan pada aplikasi layanan publik internal daerah untuk dapat menjadi bagi pakai dengan PD lain.
Layanan Publik Sektoral	Terdapat 152 layanan pada public sectoral. Selain itu, terdapat 5 sektoral yang tidak memiliki layanan dan didukung aplikasi yaitu pengajaran, energi, sumber daya alam, pariwisata, dan pemuda & olahraga.	Menggunakan aplikasi bagi pakai dan Pemerintah dapat menyempurnakan dengan pembangunan aplikasi khusus jika belum tersedia aplikasi umum berbagi pakai (Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE)	Perlu dilakukan pengusulan layanan dan aplikasi terkait sektor yang masih belum didukung layanan maupun aplikasi.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Ketersediaan layanan terhadap program	Berdasarkan data analisis terdapat 377 program. Terdapat 119 layanan yang mendukung program. Sedangkan terdapat 258 layanan yang tidak didukung oleh program.	Seluruh program yang tercantum pada RPJMD telah didukung oleh layanan Pemerintah Kota Madiun	Perlu dilakukan penambahan terhadap layanan agar program RPJMD dapat terealisasi secara keseluruhan

1.6 KONDISI EKSISTING APLIKASI SPBE DAN ANALISIS GAP

Subtansi 1.6 menjelaskan kondisi aplikasi SPBE Pemerintah Kota Madiun saat ini dan hasil analisis kesenjangannya terhadap harapan yang ingin dicapai. Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintahan di era perkembangan teknologi informasi saat ini tidak luput dari peran aplikasi sebagai alat bantu untuk mempermudah pelayanan publik, administrasi maupun terkait manajemen pada pemerintahan. Pemerintah Republik Indonesia saat ini telah melaksanakan program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka sangat penting dilakukan pengembangan suatu sistem atau aplikasi sebagai salah satu media dalam mendukung berjalannya program tersebut.

1.6.1 Pengertian Aplikasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE menjelaskan bahwa **Aplikasi SPBE** adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan pemerintah. Secara garis besar aplikasi SPBE dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu **Aplikasi Umum** dan **Aplikasi Khusus**.

Aplikasi Umum merupakan aplikasi SPBE yang dalam penggunaannya dapat digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Aplikasi umum dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian atau Pemerintah Pusat agar dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam membantu manajemen dan melaksanakan proses bisnis pemerintah daerah agar data yang dikelola terkumpul menjadi satu dan mudah dalam pengelolaan data. **Aplikasi Khusus** merupakan aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Instansi Pusat atau

Pemerintahan Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintahan Daerah lain. Aplikasi khusus dibangun untuk mendukung proses bisnis atau pelayanan dengan kebutuhan tertentu.

1.6.2 Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE

Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Arsitektur SPBE Nasional menyebutkan bahwa posisi aplikasi dalam SPBE yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dimana domain Arsitektur Aplikasi menempati posisi di bawah domain layanan yang menunjukkan bahwa aplikasi sebagai media pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan dari instansi pemerintah. **Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA)** adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. Referensi arsitektur menjadi acuan untuk penyusunan domain arsitektur secara nasional, sehingga IPPD akan menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan aplikasi yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur TIK nasional. Berdasarkan informasi yang dihasilkan dari proses pemetaan tersebut, akan membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi ataupun redundansi, peluang untuk berbagi pakai, ataupun untuk penggunaan kembali. Pemetaan domain aplikasi SPBE yang menggunakan RAA akan dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur TIK nasional.

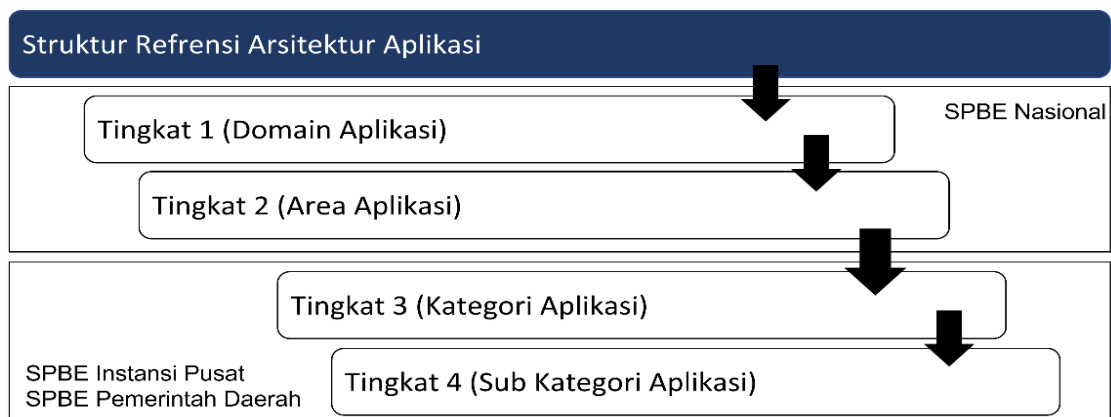
Dalam domain arsitektur Aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi Aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur Aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a) **Domain aplikasi**, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b) **Area aplikasi**, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c) **Kategori aplikasi**, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi

Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);

- d) **Sub kategori aplikasi**, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (empat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Ilustrasi struktur referensi arsitektur Aplikasi SPBE dapat terlihat pada **Gambar 1.19**. Selanjutnya proses klasifikasi dan identifikasi pada struktur domain di tingkat nasional, akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE Nasional, melalui referensi arsitektur aplikasi dan menjadi acuan pada pembentukan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



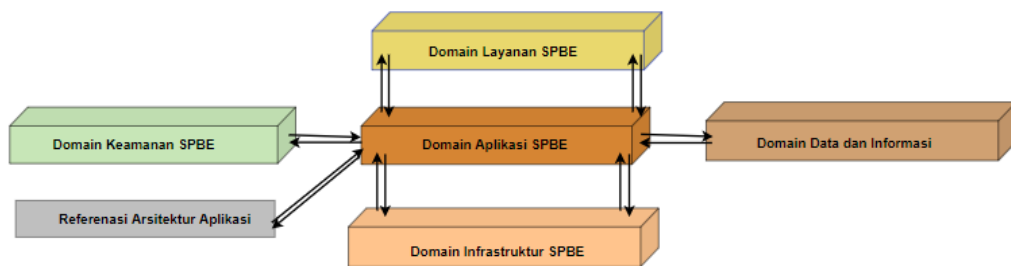
Gambar 1.19 Arsitektur Aplikasi SPBE

Penyusunan referensi arsitektur pada domain Aplikasi SPBE bertujuan untuk melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya, melalui pemetaan aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan nasional berupa penciptaan layanan pemerintah terintegrasi, sehingga membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi aplikasi dan peluang untuk berbagi pakai aplikasi.

Penyusunan referensi arsitektur Aplikasi SPBE dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- Disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi;
- Aplikasi yang berorientasi pada layanan;

- c. Didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
- d. Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- e. Berbasis kode sumber terbuka (open source); dan
- f. Terkorelasi dengan domain layanan SPBE dan domain data dan informasi melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung oleh domain infrastruktur SPBE dan domain keamanan SPBE, yang dapat dilihat relasi langsung antar domain Aplikasi SPBE pada **Gambar 1.20**.



Gambar 1.20 Relasi langsung pada Domain Aplikasi SPBE

1.6.3 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Domain Aplikasi SPBE memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (satu) dan tingkat 2 (dua) merupakan struktur di tingkat nasional. Dan tingkat 3 (tiga) dan tingkat 4 (empat) merupakan struktur di tingkat Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah. Penjelasan mengenai taksonomi referensi arsitektur aplikasi SPBE dijabarkan pada **Tabel 1.17**.

Tabel 1.17 Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
Aplikasi Umum (01)		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misis Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
		memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.

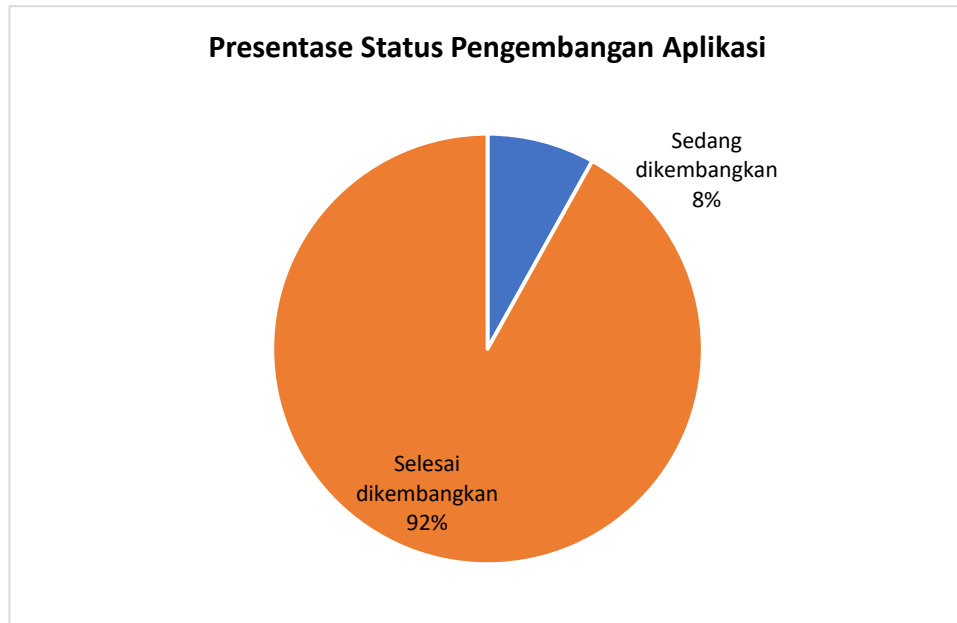
1.6.4 Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan pada 35 PD melalui pengisian web survei dan pengumpulan data secara langsung di Kota Madiun, maka didapatkan bahwa pemerintah Kota Madiun memiliki total **210 (dua ratus sepuluh) aplikasi**, dimana **seluruh PD telah memiliki aplikasi** sebagai pendukung layanan publik maupun administrasi. Selanjutnya akan dijelaskan pengelompokan dari aplikasi SPBE yang telah dianalisis dari hasil survei. Pengelompokan terbagi menjadi 5 yaitu berdasarkan status pengembangan aplikasi, status penggunaan aplikasi, referensi arsitektur SPBE, unit pengembang aplikasi, dan basis aplikasi. Lebih jelasnya, akan dijelaskan pada subbab **1.6.4.1** sampai **1.6.4.5**.

1.6.4.1 Status Pengembangan Aplikasi

Berdasarkan status pengembangannya, aplikasi SPBE terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sedang dikembangkan dan selesai dikembangkan. Status aplikasi **sedang dikembangkan** yang mana aplikasi tersebut dalam proses pengembangan untuk meningkatkan atau memperbaiki fitur tertentu, sedangkan status pengembangan aplikasi **selesai dikembangkan** merupakan aplikasi yang tidak dalam tahap pengembangan atau perbaikan fitur. Persentase status

pengembangan dari **210 aplikasi** di Pemerintah Kota Madiun dijabarkan pada **Gambar 1.21**.



Gambar 1.21 Persentase Status Pengembangan Aplikasi

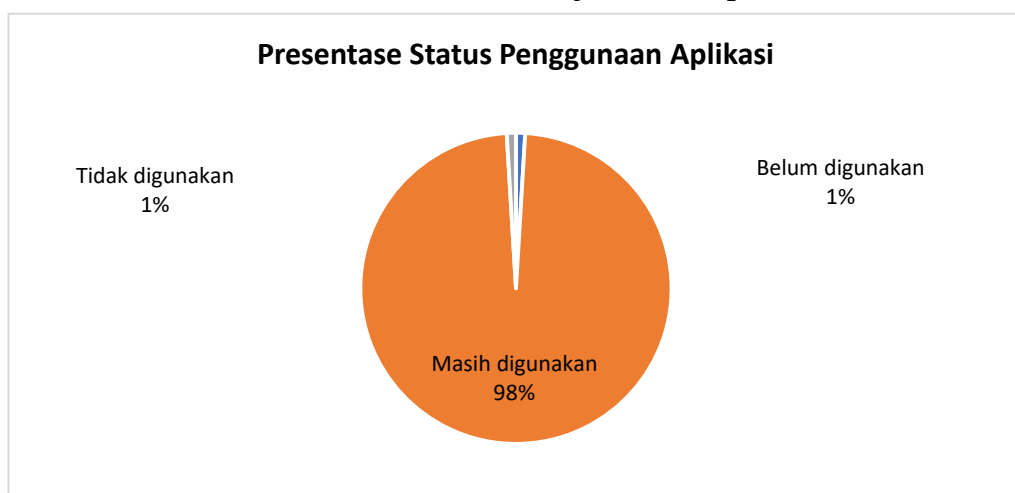
Berdasarkan Gambar 1.21 terlihat bahwa aplikasi yang dimiliki Pemerintah Kota Madiun sebagian besar telah selesai dikembangkan, yaitu sebesar **92% (193 aplikasi)**, sedangkan lainnya, yaitu sebesar **8% (17 aplikasi)** saat ini sedang dalam proses pengembangan. Terdapat 24 PD yang seluruh aplikasi yang dimiliki telah selesai dikembangkan, dan 11 sisanya memiliki aplikasi yang telah selesai dikembangkan dan juga ada aplikasi yang sedang dalam proses pengembangan. Berikut PD yang masih memiliki aplikasi yang sedang dalam pengembangan, diantaranya:

- a. Bagian Organisasi sedang mengembangkan aplikasi E-Sakip.
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah sedang mengembangkan 3 aplikasi yaitu, SIPKD, SIM GAJI dan ALADIN.
- c. Badan Pendapatan Daerah sedang mengembangkan aplikasi SIMPADAMA.
- d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sedang mengembangkan aplikasi KUE DAKON.
- e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sedang mengembangkan aplikasi Sisan Baline.
- f. Dinas Lingkungan Hidup sedang mengembangkan aplikasi SILAPLING.

- g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sedang mengembangkan aplikasi INLIS.LITE.
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sedang mengembangkan 4 aplikasi yaitu, BBM Satpol PP, aplikasi Gakda, SIM Satpol PP Kota Madiun, dan aplikasi Lek Pakar.
- i. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sedang mengembangkan aplikasi SI-JASPEL.
- j. Kecamatan Manguharjo sedang mengembangkan aplikasi SICAKRA.
- k. Kecamatan Kartoharjo sedang mengembangkan aplikasi E-Surpris dan SIM Karto.

1.6.4.2 Status Penggunaan Aplikasi

Aplikasi SPBE terbagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan status Penggunaan Aplikasi, yaitu tidak digunakan, belum digunakan, dan masih digunakan. Status Penggunaan Aplikasi Tidak digunakan, aplikasi yang sudah tidak lagi digunakan untuk mendukung layanan maupun proses bisnis, Status Penggunaan Aplikasi belum digunakan, aplikasi yang masih belum dirilis untuk digunakan secara Internal maupun publik, dan Status Penggunaan Aplikasi masih digunakan, aplikasi yang masih digunakan sampai saat ini dalam menunjang urusan Administrasi dan pelayanan publik. Persentase status pengembangan dari **210 (dua ratus sepuluh) aplikasi** di Pemerintah Kota Madiun dijabarkan pada **Gambar 1.22**.



Gambar 1.22 Persentase Status Penggunaan Aplikasi

Berdasarkan Gambar 1.22 dapat disimpulkan jika sebagian besar aplikasi milik Pemerintah Kota Madiun masih aktif digunakan, yaitu sebesar **98% (206 aplikasi)**. Sementara sisanya sebesar **1% (2**

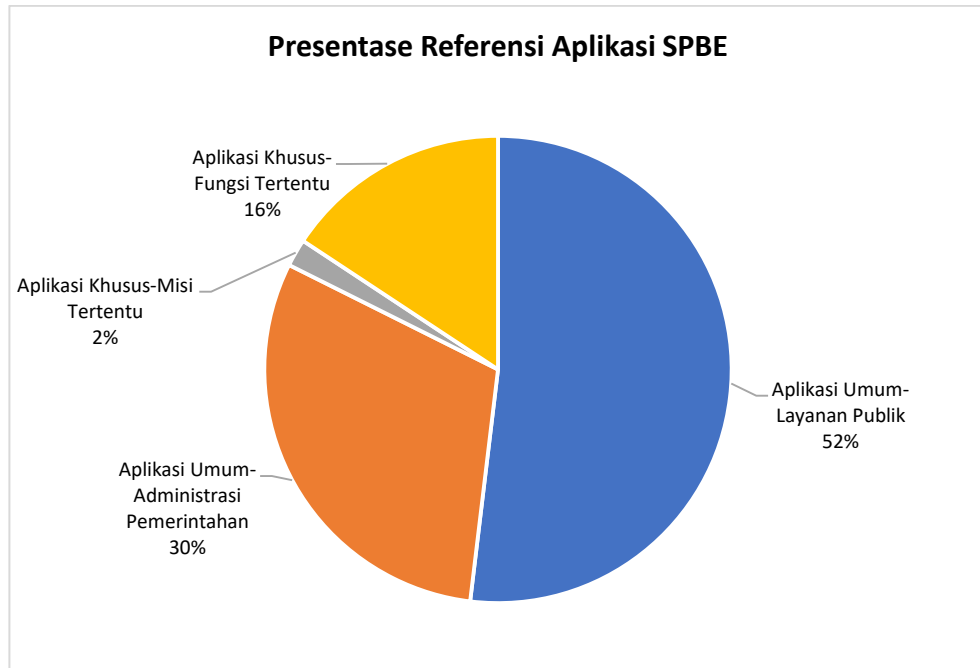
aplikasi) sudah tidak digunakan dan **1% (2 aplikasi)** belum digunakan.

- a) Aplikasi yang belum digunakan diantaranya
- Aplikasi **KUE DAKON** milik **Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.**
 - Aplikasi **Lek Pakar** milik **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.**
- b) Aplikasi yang sudah tidak digunakan diantaranya:
- Aplikasi **e-Inisiatif** milik **Sekretariat DPRD** dikarenakan sudah beralih ke aplikasi e-AR.
 - Aplikasi **SILAT** milik **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** karena sudah beralih ke aplikasi Lapor milik pusat.

1.6.4.3 Area Arsitektur Aplikasi SPBE

Referensi arsitektur aplikasi SPBE terbagi menjadi 4 kode referensi, yaitu **RA 01.01 Aplikasi Umum layanan publik, RA 01.02 Aplikasi Umum administrasi pemerintahan, RA 02.01 Aplikasi Khusus Misi dan RA 02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu.** **Aplikasi Layanan Publik** adalah Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk mendukung pelayanan publik. **Aplikasi Administrasi Pemerintahan** adalah Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk mendukung administrasi pemerintahan. **Aplikasi Misi Tertentu** adalah Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan IPPD lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.

Aplikasi Fungsi Tertentu adalah Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi IPPD lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu. Pada **Gambar 1.23** dijabarkan presentasi aplikasi berdasarkan referensi arsitektur aplikasinya.

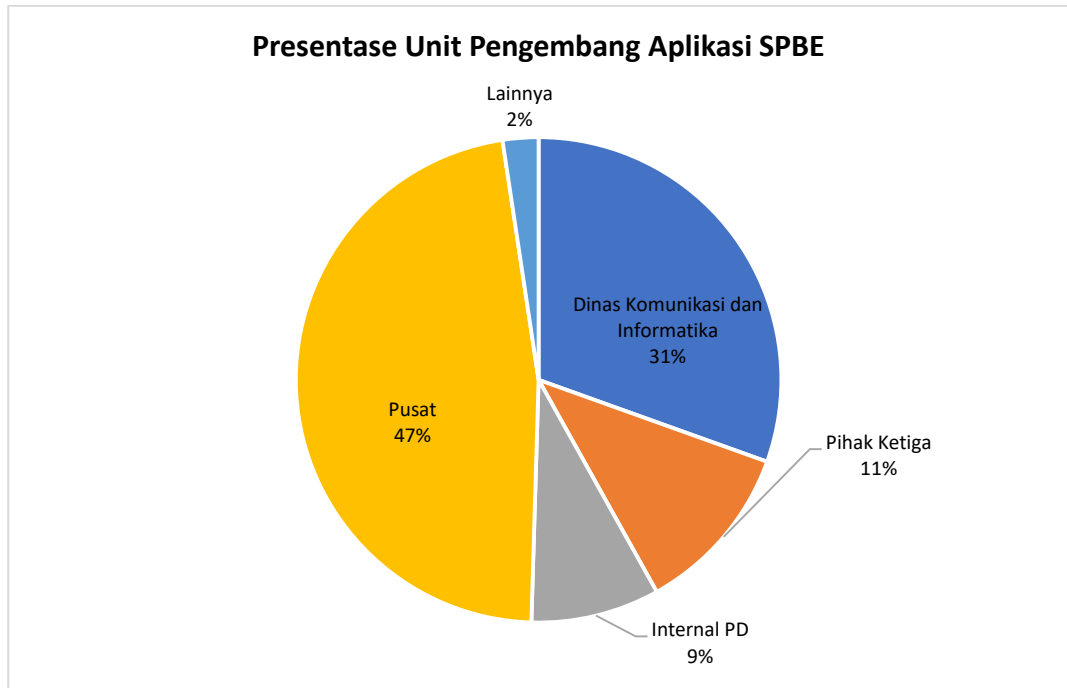


Gambar 1.23 Presentase Referensi Aplikasi SPBE

Berdasarkan **Gambar 1.23** dari total keseluruhan aplikasi yaitu 210 (dua ratus sepuluh) aplikasi pada pemerintahan Kota Madiun aplikasi paling banyak yang dimiliki yaitu kategori Aplikasi Umum-Layanan Publik yaitu sebesar **52% (109 aplikasi)**, kemudian Aplikasi Umum-Administrasi Pemerintahan **30% (64 aplikasi)**, Aplikasi Khusus-Fungsi Tertentu **16% (33 aplikasi)**, dan persentase paling sedikit yaitu sebesar **2% (4 aplikasi)** untuk Aplikasi Khusus Misi Tertentu. Aplikasi Khusus Misi tertentu ini merupakan aplikasi yang berkaitan dengan COVID-19 yaitu aplikasi **KPCPEN VAKSINASI**, aplikasi **Monitoring PPKM**, aplikasi **New All Record Antigen/PCR COVID-19**, dan aplikasi **SILACAK (Sistem Informasi Tracing COVID-19)** yang merupakan aplikasi pusat dibawah naungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.6.4.4 Unit Pengembang Aplikasi SPBE

Unit Pengembangan Aplikasi SPBE adalah unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi, yang dibedakan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu, dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dikembangkan oleh Pihak Ketiga, dikembangkan secara mandiri oleh Perangkat Daerah itu sendiri, dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, dan lainnya (dikembangkan instansi lain). Persentase aplikasi Kota Madiun berdasarkan Unit Pengembangnya dijabarkan pada **Gambar 6.6** sebagai berikut.



Gambar 1.24 Presentase Unit Pengembang Aplikasi SPBE

Berdasarkan **Gambar 1.24** dapat diketahui jika aplikasi milik Pemerintah Kota Madiun paling banyak dikembangkan oleh Pemerintah Pusat yaitu sebanyak **47% (99 aplikasi)**, dimana Perangkat Daerah yang paling banyak menggunakan aplikasi Pusat adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bagi pakai dengan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, yaitu sebanyak 69 (enam puluh sembilan) aplikasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa sebaiknya aplikasi yang digunakan untuk mendukung layanan merupakan aplikasi umum bagi pakai seperti aplikasi yang dikembangkan pusat.

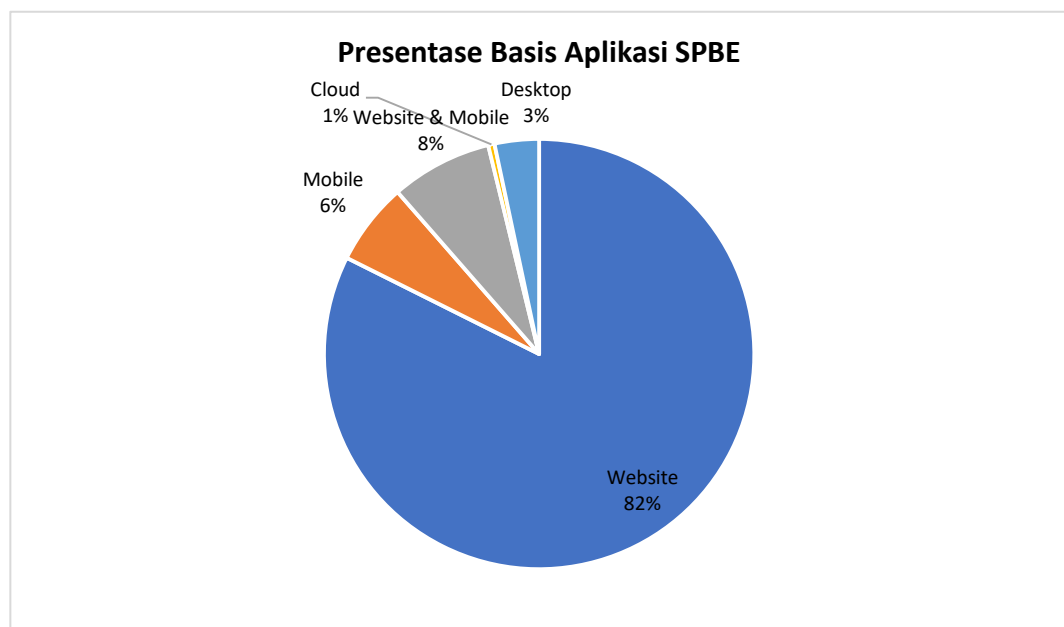
Selanjutnya aplikasi paling banyak kedua adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sebanyak **31% (64 aplikasi)**. Sisanya yaitu sebanyak **11% (24 aplikasi)** dikembangkan pihak ketiga, sebanyak **9% (18 aplikasi)** dikembangkan oleh internal PD, dan **2% (5 aplikasi)** dikembangkan oleh pihak instansi lain. Aplikasi yang dikembangkan oleh instansi lain yaitu ada 4 (empat) aplikasi milik BPJS dan 1 (satu) aplikasi milik Bank Jatim.

1.6.4.5 Basis Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE terbagi menjadi 4 (empat) kategori berdasarkan Basis Aplikasinya, yaitu berbasis *mobile*, *cloud*, *desktop*, dan

website. Aplikasi berbasis *mobile* adalah aplikasi yang dibangun dan disematkan pada perangkat *mobile* (*smartphone*).

Aplikasi berbasis *cloud* adalah aplikasi yang dibangun pada komputasi awan (*cloud*). Aplikasi berbasis desktop adalah aplikasi yang berjalan di satu atau beberapa komputer. Aplikasi berbasis *website* adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang berjalan dari sisi *client* dan membutuhkan *web server*, serta *browser* untuk menjalankannya. Persentase aplikasi pemerintah Kota Madiun berdasarkan Basis Aplikasi dijabarkan pada **Gambar 1.25** sebagai berikut.



Gambar 1.25 Presentase Basis Aplikasi SPBE

Berdasarkan Gambar 1.25 secara garis besar aplikasi yang dimiliki Pemerintah Kota Madiun yaitu aplikasi berbasis *website* sebanyak **82% (173 aplikasi)**, **8% (16 aplikasi)** aplikasi berbasis *website* dan *mobile*, **6% (13 aplikasi)** berbasis *mobile*, **3% (7 aplikasi)** berbasis desktop dan **1% (1 aplikasi)** berbasis *cloud*. Aplikasi berbasis *cloud* adalah **aplikasi Penyimpanan Arsip Bersama** yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang sedang dalam proses untuk dibagi pakai kan dengan seluruh PD.

1.6.5 Metadata Aplikasi SPBE

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya

menjadikan suatu informasi mudah dikelola, ditemukan, dan digunakan kembali.

Untuk menganalisis arsitektur aplikasi dalam penerapan SPBE digunakan dokumen acuan yaitu mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE** yang didalamnya terdapat metadata yang sudah ditentukan informasi atau data apa saja yang dibutuhkan. Secara umum metadata aplikasi meliputi atribut metadata yang dijabarkan pada **Tabel 1.18** sebagai berikut.

Tabel 1.18 Atribut Metadata Aplikasi SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi
4	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung.
5	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi
6	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata layanan.
7	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan.
9	Inputan Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan (diinputkan)
10	Supplier Data	Merupakan identifikasi terhadap nama penghasil data.
11	Luaran Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dihasilkan
12	Customer Data	Merupakan identifikasi terhadap pengguna data
13	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (<i>Desktop; Web; Cloud; atau Mobile</i>)

No.	Nama Atribut	Keterangan
14	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server
15	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (<i>Open Source/Proprietary</i>)
16	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi
17	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau <i>Framework</i> yang digunakan oleh aplikasi
18	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi.
19	Unit Pengembang	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi
20	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan
21	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

Atribut pada **Tabel 1.18** digunakan untuk melakukan analisis dari metadata Aplikasi SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun. Secara lebih detail Metadata aplikasi SPBE dijelaskan dan dapat dilihat pada **Lampiran 6.2 Metadata Aplikasi SPBE**.

1.6.6 Permasalahan Aplikasi SPBE

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan kepada 35 PD di Kota Madiun, telah menyebutkan beberapa permasalahan terkait aplikasi secara umum. Daftar permasalahan aplikasi SPBE Kota Madiun dijabarkan pada **Tabel 1.19** sebagai berikut.

Tabel 1.19 Daftar Permasalahan Aplikasi Kota Madiun

Kode PD	Nama Perangkat Daerah	Permasalahan	Frekuensi terjadinya masalah	Solusi Penanganan
1	Bagian Organisasi	Data tidak bisa diakses setelah disimpan cukup lama	Cukup Sering (45%)	<i>backup database</i> lainnya
2	Bagian Hukum	Kelengkapan <i>soft file</i> produk hukum sebelum tahun 2000	Jarang (1-2 kali dalam setahun)	Mencarikan <i>hardcopy</i> nya kemudian didokumentasikan dalam bentuk foto
3	Bagian	Server LPSE dikelola	Sering (4x)	Koordinasi

Kode PD	Nama Perangkat Daerah	Permasalahan	Frekuensi terjadinya masalah	Solusi Penanganan
	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	oleh pusat	seminggu)	dengan pusat
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Server Down	Jarang	menunggu beberapa saat
5	Bagian Umum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Bagian Pemerintahan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Source data yang diintegrasikan dari SIPD belum dapat sepenuhnya tercukupi	Sering	berkoordinasi dengan Diskominfo Kota Madiun
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	output aplikasi selalu harus di update kembangkan sesuai dengan aturan yg berlaku	Setiap Tahun	mengupdate aplikasi sehingga menimbulkan penambahan anggaran
10	Badan Pendapatan Daerah	Tarik data yang terlambat	10 dari 100	Update tarik data
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data tidak akurat khususnya di Riwayat Jabatan, Golongan Pangkat	Jarang	mengupdate dari admin kota
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Akses Si-Permata down	Jarang	Lapor Kominfo
13	Inspektorat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
14	Sekretariat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Kode PD	Nama Perangkat Daerah	Permasalahan	Frekuensi terjadinya masalah	Solusi Penanganan
	DPRD			
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jaringan Kurang	Sering (karena lokasi PD berapa di titik terjauh)	Kontak Kominfo Kota Madiun
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemohon kurang mengerti terkait pengisian data dan sejenisnya	Sering	Konsultasi
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hacker Terhadap Aplikasi	Jarang	Ganti Domain dan Backup Database
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	jaringan lemot	Sering (tiap minggu)	menunggu perbaikan
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Pendidikan	<i>Down Server Si Caker</i>	Jarang	Menghubungi Kominfo
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
22	Dinas Lingkungan Hidup	Ada, banyak data yang masih belum terupload	Terjadi ketika data terlalu besar	Mengecilkan datanya
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan melalui <i>online</i> kurang efektif	Sering	pengaduan keterlambatan diselesaikan saat itu juga
24	Dinas Perhubungan	Untuk upload dan sinkronisasi data	Tidak menentu	Mengganti jenis koneksi yang

Kode PD	Nama Perangkat Daerah	Permasalahan	Frekuensi terjadinya masalah	Solusi Penanganan
		dengan kemenhub terkadang gagal dan lemot		awalnya menggunakan wifi diganti menggunakan kabel LAN
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	error aplikasi karena kesalahan penulisan kode atau logika program	sering (tiap bulan terjadi kesalahan)	dilakukan ulang penulisan kode
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	tidak ada masalah	tidak ada	tidak ada
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	banyak aplikasi yang tidak terintegrasi	tidak ada	tidak ada
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	kesulitan akses aplikasi yang dipakai pada waktu bersamaan	Sering	mencari waktu yang tidak biasa digunakan untuk mengakses aplikasi
29	Dinas Perdagangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Koneksi Internet dari Kominfo Bermasalah	Seminggu sekali	Lapor kepada kominfo
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Data gagal <i>insert</i>	Seminggu 2 kali	Memperbaiki teknik insert dan mengoptimalkan kemampuan jaringan internal

Kode PD	Nama Perangkat Daerah	Permasalahan	Frekuensi terjadinya masalah	Solusi Penanganan
				saat ini
32	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
33	Kecamatan Kartoharjo	Pengajuan waris terverifikasi sendiri	20%	Membatalkan verifikasi dan mengecek program
34	Puskesmas Manguharjo	<i>Briging server BPJS trouble</i>	Jarang	Tidak ada, menunggu dan pakai <i>pcare</i>
35	Puskesmas Sukosari	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Berdasarkan Tabel 1.19 dapat disimpulkan bahwa permasalahan aplikasi yang sering dialami oleh Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan data (data tidak bisa diakses setelah disimpan cukup lama, *source* data yang diintegrasikan belum dapat sepenuhnya tercukupi, tarik data terlambat, gagalnya *insert*, *upload* dan sinkronisasi data).
- b. Integrasi aplikasi (banyak aplikasi yang belum saling terintegrasi).
- c. Permasalahan server (server sering *down*).
- d. Aplikasi *Error* karena kesalahan penulisan kode atau logika program.

1.7 Analisis Gap

Setelah dilakukan analisis kondisi eksisting, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis gap untuk mengetahui perbandingan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal dari aplikasi SPBE. Analisis gap atau kesenjangan dilakukan dengan cara mengidentifikasi seluruh aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah pada Kota Madiun.

Analisis gap aplikasi ditentukan dengan membandingkan antara kinerja eksisting Pemerintah Kota Madiun saat ini dengan kondisi ideal yang tercantum pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintah Berbasis Elektronik**.

Analisis gap aplikasi SPBE dilakukan pemetaan seluruh aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah berdasarkan bidang dan program RPJMD oleh masing-masing pemerintah daerah. Berikut penjabaran hasil analisis gap secara detail dapat dilihat pada **Tabel 1.20**.

Tabel 1.20 Analisa Gap Aplikasi SPBE

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	GAP
1	Bagian Organisasi	Terdapat 6 program RPJMD, 3 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Subkoordinator dan semua telah didukung aplikasi
2	Bagian Hukum	Terdapat 7 program RPJMD, 3 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Subkoordinator, 2 Subkoordinator belum didukung aplikasi
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Terdapat 2 program RPJMD, 1 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Subkoordinator, 1 Subkoordinator belum didukung aplikasi
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Terdapat 11 program RPJMD, 4 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Subkoordinator, 2 Subkoordinator belum didukung aplikasi
5	Bagian Umum	Terdapat 3 program RPJMD, seluruh program telah didukung aplikasi. Memiliki 2 Subkoordinator, 1 Subkoordinator belum didukung aplikasi
6	Bagian Pemerintahan	Terdapat 8 program RPJMD, 4 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Subkoordinator, 2 Subkoordinator belum didukung aplikasi
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terdapat 7 program RPJMD, 3 program belum didukung aplikasi. Memiliki 1 Subkoordinator dan telah didukung

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	GAP
		aplikasi dan 3 Seksi yang belum didukung aplikasi
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terdapat 4 program RPJMD dan belum didukung aplikasi. Memiliki 5 Bidang, 3 Bidang belum didukung aplikasi
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terdapat 11 program RPJMD, 2 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
10	Badan Pendapatan Daerah	Terdapat 8 program RPJMD, 1 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Bidang, 1 Bidang belum didukung aplikasi
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terdapat 12 program RPJMD, 7 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, 1 Bidang belum didukung aplikasi
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terdapat 11 program RPJMD, 7 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, 2 Bidang belum didukung aplikasi
13	Inspektorat Daerah	Terdapat 10 program RPJMD, 4 program belum didukung aplikasi. Memiliki 5 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
14	Sekretariat DPRD	Terdapat 7 program RPJMD, 2 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Bidang, 1 Bidang belum didukung aplikasi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terdapat 17 program RPJMD, 3 program belum didukung aplikasi. Memiliki 5 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terdapat 19 program RPJMD, 13 program belum didukung aplikasi. Memiliki 5 Bidang, 2 Bidang belum didukung aplikasi
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terdapat 14 program RPJMD, 8 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Bidang, 2 Bidang belum didukung aplikasi

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	GAP
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terdapat 19 program RPJMD, 9 program belum didukung aplikasi. Memiliki 5 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Terdapat 20 program RPJMD, 12 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
20	Dinas Pendidikan	Terdapat 12 program RPJMD, 5 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, 1 Bidang belum didukung aplikasi
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Terdapat 21 program RPJMD, 17 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, 3 Bidang belum didukung aplikasi
22	Dinas Lingkungan Hidup	Terdapat 17 program RPJMD, 11 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, 2 Bidang belum didukung aplikasi
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terdapat 11 program RPJMD, 1 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, 1 Bidang belum didukung aplikasi
24	Dinas Perhubungan	Terdapat 8 program RPJMD, 3 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terdapat 13 program RPJMD, 3 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terdapat 15 program RPJMD, 4 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Terdapat 16 program RPJMD, 12 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, 3 Bidang belum didukung aplikasi

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	GAP
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terdapat 11 program RPJMD, 2 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
29	Dinas Perdagangan	Terdapat 13 program RPJMD, 6 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Bidang, 1 Bidang belum didukung aplikasi
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Terdapat 11 program RPJMD, 5 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Terdapat 6 program RPJMD, 3 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
32	Kecamatan Manguharjo	Terdapat 13 program RPJMD, 8 program belum didukung aplikasi. Memiliki 1 Bidang dan 4 Seksi, hanya Bidang Sekretariat yang didukung aplikasi
33	Kecamatan Kartoharjo	Terdapat 13 program RPJMD, 7 program belum didukung aplikasi. Memiliki 1 Bidang dan 4 Seksi, Bidang dan 1 Seksi sudah didukung aplikasi
34	Puskesmas Manguharjo	Tidak memiliki program RPJMD karena di bawah naungan Dinas Kesehatan. Menggunakan aplikasi dari Daerah, Pusat dan Dinas Kesehatan saja, tidak memiliki aplikasi mandiri
35	Puskesmas Sukosari	Tidak memiliki program RPJMD karena di bawah naungan Dinas Kesehatan. Menggunakan aplikasi dari Daerah, Pusat dan Dinas Kesehatan saja, tidak memiliki aplikasi mandiri

Berdasarkan analisis GAP tersebut didapatkan bahwa seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Madiun untuk Bidang dan Program RPJMD belum secara keseluruhan telah didukung aplikasi.

Perangkat Daerah yang seluruh Bidang nya sudah didukung aplikasi diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagian Organisasi;
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Dinas Perhubungan;
- h. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- k. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk Perangkat Daerah yang seluruh Program RPJMD yang diampu sudah didukung aplikasi adalah Bagian Umum, dan untuk Perangkat Daerah yang seluruh Program RPJMD yang diampu belum didukung aplikasi adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.7 KONDISI EKSISTING INFRASTRUKTUR SPBE DAN ANALISIS GAP

Subtansi 1.7 menjelaskan terkait kondisi eksisting infrastruktur SPBE pada Pemerintah Kota Madiun saat ini dan Analisis GAP terhadap kondisi Infrastruktur SPBE ideal yang ingin dicapai. Penjelasan dimulai dari pengertian Infrastruktur SPBE yang didukung dengan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE, Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE, dan Permasalahan Infrastruktur serta Penjelasan dari hasil Analisis GAP antara kondisi eksisting dengan kondisi yang akan dicapai Pemerintah Kota Madiun. Hal ini dapat digunakan untuk menemukan strategi pembangunan infrastruktur SPBE yang tepat dan baik selama 5 (lima) tahun mendatang.

1.7.1 Pengertian Infrastruktur SPBE

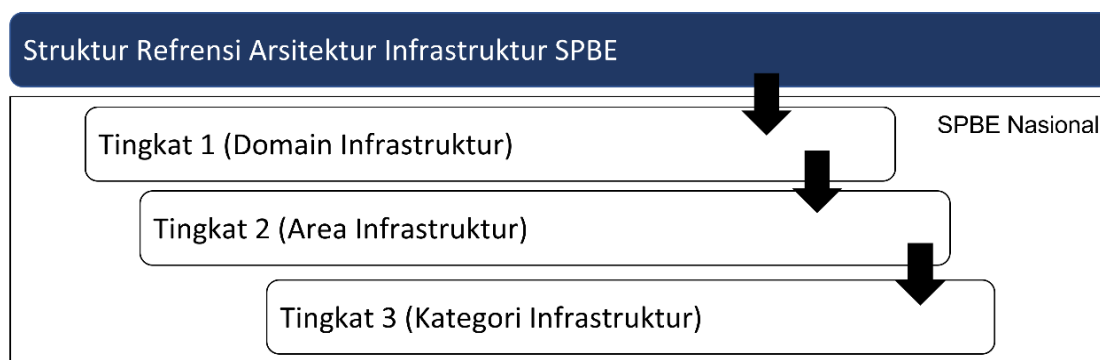
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan

penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. **Jaringan Intra Pemerintah** adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan Pemerintah Daerah. **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah** adalah perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Pemerintah Daerah.

1.7.2 Referensi Arsitektur Infrastruktur

Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilitasnya, agar infrastruktur SPBE dapat dipergunakan secara terpadu serta efektif dan efisien. Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan adalah:

- 1) Taksonomi RAI harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
- 2) Didefinisikan sebagai hierarki elemen infrastruktur TIK;
- 3) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- 4) Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
- 5) Berbasis standar umum (*open standard*); dan
- 6) Dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RAD melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh RAK.



Gambar 1.26 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

RAI berlaku secara nasional, sehingga Pemerintah Daerah menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur TIK yang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan infrastruktur TIK yang menjadi prioritas agenda pembangunan. Struktur dari RAI SPBE Nasional pada 2 (dua) tingkat teratas yaitu:

- 1) Domain, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain sebagai RAI tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam area sesuai dengan masing-masing domain arsitekturnya sebagai RAI tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya untuk mendefinisikan di tingkat bawahnya, akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE.

1.7.3 Metadata Infrastruktur SPBE

Metadata arsitektur infrastruktur SPBE merupakan metadata yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan. Arsitektur infrastruktur SPBE dikelompokkan menjadi *platform*, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi. Dalam penggunaannya, ketiga entitas metadata arsitektur infrastruktur SPBE saling terkait satu sama lain sehingga menyebabkan terjadi hubungan internal dalam metadata arsitektur infrastruktur ini, untuk itu entitas ini perlu dilakukan dekomposisi, dengan atribut pada setiap komponen infrastruktur SPBE.

Tabel 1.21.1 dan Tabel 1.21.7 merupakan penjabaran atribut yang digunakan untuk melakukan penyusunan metadata infrastruktur SPBE.

Tabel 1.21.1 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata

No.	Nama Atribut	Keterangan
2	Nama Fasilitas	Merupakan nama fasilitas komputasi
3	Kode Model Referensi SPBE	Merupakan kode model referensi SPBE sesuai dengan fasilitas yang dipilih
4	<i>Bandwidth Intranet</i>	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> internet yang tersedia selama 1 tahun
5	<i>Bandwidth Internet</i>	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> internet yang tersedia selama 1 tahun
6	Lokasi	Merupakan lokasi dari fasilitas
7	Kepemilikan	Merupakan unit pemilik dari fasilitas
8	Unit Kerja Penanggung Jawab	Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang bertanggung jawab atas fasilitas
9	Klasifikasi Tier Fasilitas	Merupakan klasifikasi tier fasilitas
10	Sistem Pengamanan Fasilitas	Merupakan tipe pengaman fasilitas
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.21.2 Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Jaringan	Merupakan nama jaringan intra pemerintah
3	Deskripsi Jaringan	Merupakan penjelasan dari jaringan
4	Jenis Jaringan	Merupakan jenis jaringan yang digunakan
5	Kepemilikan	Merupakan pemilik dari jaringan
6	Nama Pemilik	Merupakan nama dari pemilik jaringan
7	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Merupakan unit kerja/perangkat daerah pengelola jaringan
8	<i>Bandwidth</i>	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> yang tersedia
9	Tipe Media Jaringan	Merupakan tipe dari media jaringan
10	Media Lainnya	Merupakan tipe dari media jaringan
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.21.3 Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas

No.	Nama Atribut	Keterangan
		metadata
2	Nama Sistem Penghubung	Nama sistem penghubung yang digunakan atau dimiliki
3	Deskripsi Sistem Penghubung	Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang digunakan
4	Jenis Sistem Penghubung	Jenis sistem penghubung yang digunakan (Sistem penghubung pemerintah / Sistem penghubung non pemerintah)
5	Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik data <i>storage</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri
7	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Nama jaringan intra yang digunakan oleh sistem penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari metadata jaringan intra
8	Aplikasi yang Dihubungkan	Aplikasi yang dihubungkan oleh sistem penghubung, pilihan aplikasi didapat dari metadata aplikasi
9	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.21.4 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Data <i>Storage</i>	Nama dari data <i>storage</i> yang digunakan
3	Deskripsi Data <i>Storage</i>	Berisi deskripsi dari data <i>storage</i> yang digunakan
4	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari data <i>storage</i> yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)

No.	Nama Atribut	Keterangan
6	Nama Pemilik	Nama pemilik data <i>storage</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri
7	Unit Pengelola Data <i>Storage</i>	Unit pengelola data <i>storage</i> yang digunakan
8	Lokasi Data <i>Storage</i>	Lokasi dari data <i>storage</i> yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas
9	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh data <i>storage</i> , pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak
10	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada data <i>storage</i> , satuan kapasitas penyimpanan dalam <i>Gigabyte</i> (GB)
11	Metode Akses Data <i>Sharing</i>	Metode akses data <i>sharing</i> yang digunakan pada data <i>storage</i> (<i>Direct Attached Storage/DAS</i> atau <i>Network Attached Storage/NAS</i>)
12	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.21.5 Atribut Metadata Perangkat Keras Server

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Server</i>	Nama dari perangkat server yang digunakan
3	Deskripsi <i>Server</i>	Berisi deskripsi dari perangkat server yang digunakan
4	Jenis Penggunaan <i>Server</i>	Jenis penggunaan dari server yang digunakan, jenis penggunaan tersebut a.l.: <i>Web Server; Mail Server; Aplikasi; Database; File Server; Active Directory</i> , keamanan informasi
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari server yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik server yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri
7	Unit Pengelola <i>Server</i>	Unit pengelola server yang digunakan

No.	Nama Atribut	Keterangan
8	Lokasi Perangkat Keras <i>Server</i>	Lokasi dari perangkat server yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas
9	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh server, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak
10	Kapasitas Memori	Kapasitas memori atau <i>Random Access Memory</i> (RAM) yang digunakan oleh server, satuan kapasitas memori dalam <i>GigaByte</i> (GB)
11	Jenis Teknologi Prosesor	Jenis teknologi prosesor yang digunakan oleh server, a.l.: <i>High End, Mid End, Low End</i>
12	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada server, satuan kapasitas penyimpanan dalam <i>Gigabyte</i> (GB)
13	Teknik Penyimpanan	Teknik penyimpanan yang digunakan pada server (RAID 1, RAID 3, RAID 5, atau non-RAID)
14	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.21.6 Atribut Metadata Perangkat Lunak *Platform*

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Perangkat Lunak	Nama Perangkat Lunak yang digunakan
3	Deskripsi Perangkat Lunak	Penjelasan dari Perangkat Lunak yang digunakan
4	Tipe Perangkat Lunak	Jenis dari Perangkat Lunak yang digunakan (Sistem Operasi , Sistem <i>Utilitas</i> , atau Sistem <i>Database</i>)
5	Jenis Sistem Operasi (jika pilihan adalah 1 pada No.3)	(<i>Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS</i> , atau Lainnya)
6	Jenis Sistem Utilitas (jika pilihan adalah 2 pada No. 3)	(<i>Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS</i> , atau Lainnya)
7	Jenis Sistem <i>Database</i> (jika pilihan adalah 3)	(<i>Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS</i> , atau Lainnya)

No.	Nama Atribut	Keterangan
	pada No. 3)	
8	Jenis lisensi	Jenis Lisensi Perangkat Lunak yang digunakan (Lisensi Seumur Hidup, Lisensi Periodik, atau Kode Sumber Terbuka)
9	Nama Pemilik Lisensi	Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak
10	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak yang digunakan
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.21.7 Atribut Metadata Komputasi Awan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Government Cloud</i>	Nama <i>Government Cloud</i> yang digunakan
3	Deskripsi <i>Government Cloud</i>	Penjelasan dari <i>Government Cloud</i> yang digunakan
4	Tipe <i>Government Cloud</i>	Jenis dari <i>Government Cloud</i> yang digunakan (PaaS, IaaS, SaaS, BDaaS, dan SecaaS)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari <i>Government Cloud</i> yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>Government Cloud</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Biaya Layanan	Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk layanan <i>Government Cloud</i>
8	Unit Pengembang <i>Government Cloud</i>	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan <i>Government Cloud</i>
9	Unit Operasional <i>Government Cloud</i>	Unit operasional <i>Government Cloud</i> yang digunakan
10	Jangka Waktu Pelayanan	Periode penggunaan layanan <i>Government Cloud</i>
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

1.7.4 Kondisi Eksisting Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (1) huruf b merupakan jaringan

interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah. Pembahasan terkait dengan jaringan intra pemerintah meliputi ketersediaan topologi jaringan dan ketersediaan *bandwidth* yang terdapat pada Pemerintah Kota Madiun.

Kondisi eksisting terkait dengan infrastruktur Jaringan yang ada di Pemerintah Kota Madiun sudah cukup baik dalam penerapannya. Bentuk penerapan yaitu dengan penerapan jaringan intra pemerintah terpusat yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dan penggunaan media Jaringan yang ada di Pemerintah Kota Madiun telah menerapkan *Fiber Optik (FO)* dalam integrasi jaringan yang digunakan, keseluruhan Jaringan Intra Pemerintah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Keseluruhan data eksisting terkait infrastruktur jaringan didapatkan dari proses pelaksanaan survei lapangan berdasarkan dengan kondisi sebenarnya yang telah diimplementasikan oleh seluruh PD di Pemerintah Kota Madiun. Penjabaran kondisi eksisting jaringan intra pemerintah yang ada di Pemerintah Kota Madiun akan dijelaskan pada subbab dibawah ini.

1.7.4.1 Ketersediaan Topologi Jaringan

Jaringan intra pemerintah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun sudah menghubungkan seluruh Perangkat Daerah yang ada. Pengelolaan jaringan intra pemerintah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dimana seluruh Perangkat Daerah terhubung menggunakan jaringan *fiber optic* dengan menggunakan *core* yang cukup besar.

Namun persebaran jaringan intra pemerintah yang sudah baik dan merata, belum didukung dengan adanya dokumentasi dalam bentuk topologi jaringan. Kondisi ini dapat mempengaruhi penilaian dan monitoring Indeks SPBE yang dilakukan setiap tahun pada **indikator 17**. Dimana bukti dukung yang digunakan adalah jaringan topologi yang menggambarkan hubungan seluruh Perangkat Daerah dalam satu jaringan intra pemerintah.

1.7.4.2 Ketersediaan *Bandwidth*

Berdasarkan dengan kondisi eksisting yang didapatkan dari pengumpulan data survei yang dilakukan sebelumnya, diperoleh data terkait dengan ketersediaan *bandwidth* yang ada di Pemerintah Kota Madiun. Seluruh **Jaringan Intra Pemerintah telah terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun** dimana seluruh *bandwidth* pada masing-masing Perangkat Daerah telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Ketersediaan *bandwidth* untuk Jaringan Intra Pemerintah Kota Madiun yaitu saat ini **menggunakan 2 (dua) media yang digunakan untuk distribusi Jaringan intra pemerintah** antara lain yaitu menggunakan Kabel *Fiber Optik* dan Nirkabel (*Wireless*). Detail Ketersediaan *Bandwidth* ditampilkan pada **Tabel 1.22**.

Tabel 1.22 Eksisting Ketersediaan Akses Internet (*Bandwidth*)

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Jaringan	Bandwidth	Tipe Media jaringan
1	Bagian Organisasi	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel
2	Bagian Hukum	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	KOMINFO
5	Bagian Umum	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel
6	Bagian Pemerintahan	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pecel-Land	40 Mbps	Kabel dan Nirkabel
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Nirkabel
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Intranet	40 Mbps	Kabel

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Jaringan	Bandwidth	Tipe Media jaringan
10	Badan Pendapatan Daerah	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Nirkabel
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel dan Nirkabel
13	Inspektorat Daerah	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Nirkabel
14	Sekretariat DPRD	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Telkom	40 Mbps	Kabel
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jaringan internet/intra kota madiun	40 Mbps	Nirkabel
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel
20	Dinas Pendidikan	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Nirkabel
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel
22	Dinas Lingkungan Hidup	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jarkomdat Kemendagri	40 Mbps	Kabel FO

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Jaringan	Bandwidth	Tipe Media jaringan
24	Dinas Perhubungan	Jarkomdat Internal Pemkot Madiun	40 Mbps	Kabel FO
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Nirkabel, Kabel
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Nirkabel
29	Dinas Perdagangan	-	10 Mbps	-
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Tidak Ada	40 Mbps	Tidak Ada
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel
32	Kecamatan Manguharjo	Jaringan FO DISKOMINFO	40 Mbps	Kabel
33	Kecamatan Kartoharjo	Jaringan FO DISKOMINFO	20 Mbps	Kabel
34	Puskesmas Manguharjo	Jaringan FO DISKOMINFO	20 Mbps	KOMINFO
35	Puskesmas Sukosari	Peceland	20 Mbps	Wifi

1.7.5 Kondisi Eksisting Pusat Data atau Ruang Server

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Ruang Server memiliki definisi sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Kondisi Eksisting terkait Ruang Server yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun saat ini **telah menerapkan Pemusatan Data Center** pada **Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun** yang ditunjukkan dengan adanya Pusat Data atau Ruang server yang dimiliki saat ini dan terdapat beberapa PD yang telah meletakkan

pada Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang mana nantinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola dan merawat server yang dititipkan oleh PD serta **telah dilengkapi dengan adanya standar keamanan ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang diterapkan pada ruang server.** Penjelasan secara detail terkait dengan Daftar server dan Aspek pusat data akan dijelaskan pada sub bab dibawah ini.

1.7.5.1 Daftar Server

Berdasarkan dengan kondisi eksisting terkait dengan data server yang ada pada Pemerintah Kota Madiun terdapat beberapa daftar server yang dimiliki dan dikelola oleh beberapa Perangkat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Dari hasil pengumpulan data survei yang dilakukan pada Pemerintah Kota Madiun terdapat **29 (dua puluh sembilan) Server** yang dimiliki oleh **7 (tujuh) Perangkat Daerah.** Detail penjabaran daftar server yang dimiliki oleh pemerintah Kota Madiun ditampilkan pada **Tabel 1.23.**

Tabel 1.23 Eksisting Ketersediaan Server Kota Madiun

No	Nama PD	Nama Server	Deskripsi	Jenis penggunaan	Status kepemilikan	Lokasi perangkat keras
10	Badan Pendapatan Daerah	Server Sismiop	Server Mysql	<i>Aplikasi, Database</i>	Internal	Internal Bapenda
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sikda	Sikda	<i>Database</i>	Internal Pd	Pusat Data Dinkominfo
23	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Server Proxy Siak Terpusat	Server Proxy Siak Terpusat	<i>Proxy Server</i>	Disdukcapil (Hibah Bkpsdm)	Disdukcapil
23	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Server Aplikasi Siak	Server Aplikasi Siak Terdistribusi	<i>Server Aplikasi</i>	Disdukcapil (Hibah Kemendagri Ditjen Dukcapil)	Disdukcapil
23	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Server Biometrik Ktp-El	Server Database Ktp-El	<i>Server Database</i>	Disdukcapil (Hibah Kemendagri Ditjen Dukcapil)	Disdukcapil

No	Nama PD	Nama Server	Deskripsi	Jenis penggunaan	Status kepemilikan	Lokasi perangkat keras
23	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Server Database Siak Terdistribusi	Server Database Siak Terdistribusi	Server Database	Disdukcapil	Disdukcapil
23	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Server DWH	Server DWH Pemanfaatan Data	Server Aplikasi	Disdukcapil	Disdukcapil
23	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Server Arsip	Server Arsip Siak Terdistribusi	Server Storage	Disdukcapil	Disdukcapil
24	Dinas Perhubungan	Server Sim Pkb	Web Server Dan Database Server Berbasis Os Linux	Web Server Dan Database Server	Internal Pd	Internal Pd
24	Dinas Perhubungan	Server CCTV	Menyimpan Data CCTV	File Server	Internal PD	Internal PD
24	Dinas Perhubungan	Server ETLE	File Server, Foto Foto Tilang	File Server	Internal	Internal PD
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Srv-Sik-Bkd-Baru	Server Untuk Aplikasi Sik Milik Bkpsdm	Aplikasi	Internal Pd	Pusat Data Diskominfo
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Srv-Proumkm	Kumpulan Aplikasi	File Server	Internal Pd	Pusat Data Diskominfo
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Srv-Api-Ekinerja	Srv-Api-Ekinerja	Aplikasi	Internal Pd	Pusat Data Diskominfo
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Srv-Apisipd	Srv-Apisipd	Aplikasi	Internal Pd	Pusat Data Diskominfo
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Srv-App_Kominfo	Web Server Aplikasi Kominfo	Web Server	Internal Pd	Pusat Data Diskominfo
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Srv-Apps	Server Coba Aplikasi	Aplikasi	Internal Pd	Pusat Data Diskominfo

No	Nama PD	Nama Server	Deskripsi	Jenis penggunaan	Status kepemilikan	Lokasi perangkat keras
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Srv-Db-Ekinerja	Srv-Db-Ekinerja	Database	Internal Pd	Pusat Data Diskominfo
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Srv-Web_Madiunto day	Server Web Madiuntoday	Aplikasi	Internal Pd	Pusat Data Diskominfo
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Srv-Webbaru	Server Yang Berisi Web Pd	Web Server	Internal Pd	Pusat Data Diskominfo
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Srv-Smartcity-Baru	Server Untuk Web Smartcity	Web Server	Internal Pd	Pusat Data Diskominfo
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Srv-Esurat-Baru	Server Untuk Aplikasi E-Surat Kota Madiun	Aplikasi	Internal Pd	Pusat Data Diskominfo
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Srv-Zimbra 1	Server Untuk Mail.Madiun kota.Go.Id	Mail Server	Internal Pd	Pusat Data Diskominfo
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Server Database Sim-Rs	Server Untuk Menyimpan Database Yang Digunakan Untuk Untuk Aplikasi Sim-Rs	Database	Internal Pd	Internal Pd
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Server Aplikasi Sim-Rs	Server Untuk Menyimpan Source Code Aplikasi Sim-Rs	Web Server	Internal Pd	Internal Pd
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Server Aplikasi Pendukung Administrasi	Server Yang Berisi Aplikasi (Web Server Dan Database) Pendukung Diluar Bidang Pelayanan, Seperti Aplikasi Pendukung Bidang Kepegawaian, Bidang	Aplikasi	Internal Pd	Internal Pd

No	Nama PD	Nama Server	Deskripsi	Jenis penggunaan	Status kepemilikan	Lokasi perangkat keras
			Keuangan Dll			
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Server Aplikasi Pendukung Pelayanan Lainnya	Server Yang Berisi Aplikasi (Web Server Dan Database) Pendukung Bidang Pelayanan Selain Aplikasi Sim-Rs	<i>Aplikasi</i>	Internal Pd	Internal Pd
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Server Aplikasi Pendukung Pelayanan Lainnya (2)	Server Yang Berisi Aplikasi (Web Server Dan Database) Pendukung Bidang Pelayanan Selain Aplikasi Sim-Rs	<i>Aplikasi</i>	Internal Pd	Internal Pd
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Server Http://Rsud.Madiunkota.Go.Id/	Server Untuk Aplikasi Web Profile Rsud Kota Madiun	<i>Aplikasi (Web Dan Database)</i>	Dinkominfo	Pusat Data Dinkominfo

1.7.5.2 Aspek Pusat Data

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pusat Data atau Server memiliki definisi sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Tolok ukur kelayakan atau kesiapan sebuah ruang server dalam memenuhi fungsinya salah satunya adalah Aspek pusat data. Terutama apabila ruang server

tersebut direncanakan untuk menampung kebutuhan atau pemusatan pusat data pemerintah daerah.

Aspek ruang server perlu diperhatikan sebagaimana yang telah dijelaskan pada **TIA-942 untuk standar yang baik dalam pembuatan serta pemusatan data pada Ruang Server**. Berikut merupakan detail penerapan aspek pusat data yang ada pada beberapa PD yang ditampilkan pada **Tabel 1.24**.

Tabel 1.24 Kondisi Eksisting Aspek Ruang Server

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Aspek Pusat Data yang dimiliki
10	Badan Pendapatan Daerah	Ruangan khusus untuk memonitoring server
		<i>Raised floor</i>
		<i>UPS</i>
		<i>Cooling system</i>
		Cadangan listrik (<i>power backup</i>)
		AC
		Pendeteksi asap
		Pendeteksi api
		Labelling kabel
		CCTV
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ruangan khusus untuk memonitoring server
		<i>UPS</i>
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data
		Cadangan listrik (<i>power backup</i>)
		AC
		<i>Master sleeve AC</i>
		Pendeteksi asap

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Aspek Pusat Data yang dimiliki
		Pendeteksi api Labelling kabel CCTV Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data
24	Dinas Perhubungan	Ruang khusus untuk memonitoring server <i>UPS</i> <i>Cooling system</i> Cadangan listrik (power backup) AC <i>Master sleeve AC</i> Labelling kabel CCTV Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pintu masuk lebih dari satu Ruang khusus untuk memonitoring server <i>Raised floor</i> <i>UPS</i> <i>Cooling system</i> Pengamanan sebelum memasuki pusat data Cadangan listrik (<i>power backup</i>) AC <i>Master sleeve AC</i> Pendeteksi asap Pendeteksi api Labelling kabel CCTV Terdapat standar keamanan

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Aspek Pusat Data yang dimiliki
		yang digunakan pada pusat data
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pengamanan sebelum memasuki pusat data
		AC
		CCTV
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data
		AC
		CCTV
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	<i>Raised floor</i>
		<i>UPS</i>
		<i>Cooling system</i>
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data
		Cadangan listrik (<i>power backup</i>)
		AC
		CCTV
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data

1.7.6 Komputasi

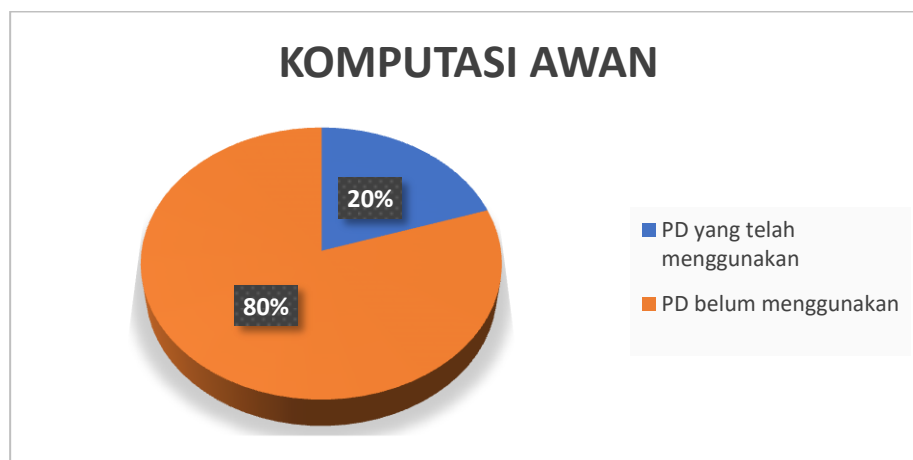
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE pada sub domain Infrastruktur disebutkan bahwa komputasi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu komputasi awan dan fasilitas komputasi. **Komputasi awan** yang berfokus pada penggunaan

perangkat lunak pada sistem *cloud*. Sedangkan **fasilitas komputasi** lebih mengarah pada metode komputasi yang lebih kompleks seperti halnya *cloud computing* ataupun pemrosesan sebuah program dengan sistem *cloud*.

1.7.6.1 Komputasi Awan

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE, Komputasi awan adalah lapisan yang menghubungkan antara lapisan arsitektur lainnya secara logikal berbentuk layanan infrastruktur SPBE berbagi pakai berupa sistem *Infrastructure as a Services* (IaaS), *Platform as a Services* (PaaS), dan *Software as a Services* (SaaS), dimana data dan informasi didalamnya, diolah menggunakan *Big Data as a Services* (BaaS), serta didukung aspek keamanan untuk keseluruhan komputasi awan dengan *Security as a Services* (SecaaS).

Salah satu yang sering ditemukan dan paling populer adalah *Google Drive*, yang tidak hanya menyediakan media penyimpanan tetapi juga media pengolah angka, pengolah kata dan lainnya. Detail penerapan penggunaan Komputasi Awan pada Pemerintah Kota Madiun ditampilkan pada **Gambar 1.27**.



Gambar 1.27 Penggunaan Komputasi Awan

Berdasarkan Gambar 1.2.7 dari hasil pengumpulan data survei terkait dengan kondisi eksisting terdapat data penggunaan Komputasi Awan pada lingkungan Pemerintah Kota Madiun antara lain yaitu **7 (Tujuh) PD** atau sebesar **20%** telah menerapkan penggunaan Komputasi Awan berupa *Google Drive* dan **28 (Dua Puluh Delapan)**

PD atau sebesar **80% (delapan puluh persen)** yang belum menggunakan komputasi awan. Berikut merupakan detail penggunaan Komputasi Awan yang ditampilkan pada **Tabel 1.24**.

Tabel 1.24 Kondisi Eksisting Komputasi Awan

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Government Cloud	Deskripsi Government Cloud	Tipe Government Cloud	Status Kepemilikan	Nama Pemilik
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Google Drive	Penyimpanan Data	Cloud	Instansi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
13	Inspektorat Daerah	Google Drive	Penyimpanan Data	Cloud	Instansi	Inspektorat
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Google Drive Resmi PD internal	Sarana untuk mengatur kebutuhan Internal PD	Resmi	Milik PD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
20	Dinas Pendidikan	Google Drive	Penyimpanan data untuk pemilik akun google	-	Masing-masing pemilik akun google	-
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Google drive	penyimpanan sementara	Cloud	Sewa	Google
29	Dinas Perdagangan	Google Drive	Google Drive	Cloud	PD	Google Drive
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Google Drive	Data Sharing	FREE	RSUD Kota Madiun	RSUD Kota Madiun

1.7.6.2 Fasilitas Komputasi (Server)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE fasilitas komputasi awan berupa pusat data nasional, pusat data komputasi dan pusat kendali yang bersifat nasional. Fasilitas komputasi ini berupa fasilitas komputasi milik IPPD yang telah

terintegrasi dengan fasilitas komputasi nasional. Dalam ruang lingkup daerah, pusat data ini dapat diwakilkan dengan ruang server, sedangkan untuk pusat komputasi kendali dapat berupa *command center*.

Pemanfaatan pusat komputasi lebih membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, sehingga tidak banyak yang menerapkan untuk tingkat PD. Namun kelebihan dari fasilitas komputasi yang memadai salah satunya adalah bisa digunakan secara berbagi dengan PD lain seperti penggunaan *Google Drive*, *Onedrive* dan *Owncloud*. Dari hasil pengumpulan data survei terkait dengan kondisi eksisting, PD yang terdapat pada Kota Madiun hingga saat ini terkait penerapan komputasi awan **belum menyeluruh menerapkan** dan hanya terdapat beberapa PD yang telah menggunakan dan menerapkan Fasilitas Komputasi.

1.7.7 Sistem Penghubung Layanan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan. Sistem penghubung layanan memiliki tujuan untuk mempermudah dalam melakukan integrasi layanan yang telah didukung dengan aplikasi. Sistem penghubung layanan dapat direalisasikan dalam bentuk *Web Service*, API (*point to point* maupun *gateway*), dan database. Dari hasil pengumpulan data survei terkait dengan kondisi eksisting, Pemerintah Kota Madiun **belum menerapkan** Sistem Penghubung Layanan secara terpusat. Pemerintah Kota Madiun saat ini telah menerapkan beberapa Penghubung Layanan yang dibangun sendiri dan digunakan pada beberapa Perangkat Daerah yaitu terdapat **15 Perangkat Daerah** yang menggunakan Penghubung layanan dengan memanfaatkan *Web API* dan *Web Service*. Berikut merupakan detail sistem penghubung layanan yang ditampilkan pada **Lampiran 7.5**.

1.7.8 Perangkat Keras dan Lunak

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi

data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Pengklasifikasian infrastruktur terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat Keras terdiri dari perangkat keras utama, perangkat keras peripheral, perangkat jaringan dan perangkat media penyimpanan. Sedangkan perangkat lunak yang terdiri dari sistem operasi dan aplikasi perkantoran yang digunakan untuk menunjang dalam pelaksanaan infrastruktur SPBE pada Pemerintah Kota Madiun. Ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak didapatkan dari hasil survei yang telah dilakukan pada masing-masing PD pada Pemerintah Kota Madiun.

1.7.8.1 Ketersediaan Perangkat Keras

Ketersediaan perangkat keras pada Pemerintah Kota Madiun digunakan untuk menunjang dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ketersediaan Perangkat Keras dibedakan menjadi 4 poin pembahasan yaitu Perangkat Keras Utama, Perangkat Keras Periferal, Perangkat Jaringan, dan Perangkat Media Penyimpanan. Sebagai berikut penjelasan detail terkait macam-macam perangkat keras:

1. Perangkat Keras Utama

Perangkat keras utama adalah perangkat keras yang digunakan untuk menunjang pekerjaan pada masing-masing Perangkat Daerah yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *PC*, *Laptop*, dan *Printer*.

A. Personal Computer (PC)

Kondisi eksisting perangkat *Personal Computer* (PC) yang diperoleh melalui hasil survei terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori tahun penggunaan yaitu ≥ 5 tahun, 1-5 tahun, dan ≤ 1 tahun. Total jumlah perangkat PC sejumlah **996 PC** dimana mayoritas PC berusia 1-5 tahun yaitu sejumlah **647 PC**. Secara detail dapat dilihat pada **Tabel 1.25**.

Tabel 1.25 Eksisting Perangkat Keras *Personal Computer* (PC)

Kode Perangkat Daerah	PD Pemilik	Perangkat Keras PC			Jumlah PC
		≥ 5 Tahun	1-5 Tahun	≤ 1 Tahun	
1	Bagian Organisasi	3	0	0	3
2	Bagian Hukum	2	0	0	2

Kode Perangkat	PD Pemilik	Perangkat Keras PC			Jumlah PC
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	0	0	0	0
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	4	0	0	4
5	Bagian Umum	38	3	3	44
6	Bagian Pemerintahan	6	0	0	6
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	0	0	4
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10	2	0	12
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	28	10	5	43
10	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0
13	Inspektorat Daerah	31	0	0	31
14	Sekretariat DPRD	11	0	0	11
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	38	22	9	69
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36	15	4	55
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	31	3	31
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	2	0	14
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1	2	1	4
20	Dinas Pendidikan	0	59	0	59
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9	2	1	12
22	Dinas Lingkungan Hidup	15	9	0	24
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23	7	8	38
24	Dinas Perhubungan	45	0	0	45

Kode Perangkat	PD Pemilik	Perangkat Keras PC			Jumlah PC
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	40	0	2	42
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	0	4	14
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	8	5	0	13
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	5	7	24
29	Dinas Perdagangan	15	1	4	20
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	6	0	7
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	150	70	30	250
32	Kecamatan Manguharjo	7	2	0	9
33	Kecamatan Kartoharjo	17	0	11	28
34	Puskesmas Manguharjo	34	2	0	36
35	Puskesmas Sukosari	37	5	0	42
Total Usulan PC		647	260	89	996

B. Perangkat Laptop

Kondisi eksisting perangkat laptop yang diperoleh melalui hasil survei terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori tahun penggunaan yaitu ≥ 5 tahun, 1-5 tahun, dan ≤ 1 tahun. Total jumlah perangkat laptop sejumlah **765 (tujuh ratus enam puluh lima) laptop** dimana mayoritas laptop berusia lebih dari 5 tahun yaitu sejumlah **391 (tiga ratus sembilan puluh satu) laptop**. Secara detail dapat dilihat pada **Tabel 1.26**.

Tabel 1.26 Eksisting Perangkat Keras Laptop

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Keras Laptop			Jumlah Laptop
		≥ 5 Tahun	1-5 Tahun	≤ 1 Tahun	
1	Bagian Organisasi	6	4	2	12
2	Bagian Hukum	9	0	0	9
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	0	18	4	22
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	13	1	0	14
5	Bagian Umum	34	23	9	66

Kode	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Keras Laptop			Jumlah
6	Bagian Pemerintahan	3	0	3	6
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	0	6
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13	6	0	19
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	20	10	3	33
10	Badan Pendapatan Daerah	7	4	0	11
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0
13	Inspektorat Daerah	55	0	0	55
14	Sekretariat DPRD	11	46	0	57
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24	10	5	39
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	4	0	9
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	9	3	12
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30	8	0	38
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	9	5	2	16
20	Dinas Pendidikan	0	44	0	44
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7	6	0	13
22	Dinas Lingkungan Hidup	30	0	0	30
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	9	5	24
24	Dinas Perhubungan	11	0	0	11
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	44	23	0	67
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	0	8	20
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	2	15	0	17
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	2	1	7
29	Dinas Perdagangan	0	3	3	6
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	6	0	7
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	0	50	0	50

Kode	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Keras Laptop			Jumlah
32	Kecamatan Manguharjo	10	2	1	13
33	Kecamatan Kartoharjo	8	2	9	19
34	Puskesmas Manguharjo	4	1	0	5
35	Puskesmas Sukosari	4	4	0	8
TOTAL PERANGKAT LAPTOP		391	316	58	765

C. Perangkat Printer

Kondisi eksisting perangkat printer yang diperoleh melalui hasil survei terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori tahun penggunaan yaitu ≥ 5 tahun, 1-5 tahun, dan ≤ 1 tahun. Total jumlah perangkat printer sejumlah **948 (sembilan ratus empat puluh delapan) printer** dimana mayoritas *printer* berusia lebih dari 5 (lima) tahun yaitu sejumlah **489 (empat ratus delapan puluh sembilan) printer**. Secara detail dapat dilihat pada **Tabel 1.27**.

Tabel 1.27 Eksisting Perangkat Keras *Printer*

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Keras <i>Printer</i>			Jumlah Printer
		≥ 5 Tahun	1-5 Tahun	≤ 1 Tahun	
1	Bagian Organisasi	4	0	0	4
2	Bagian Hukum	4	1	0	5
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	0	16	0	16
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	6	0	0	6
5	Bagian Umum	56	21	4	81
6	Bagian Pemerintahan	7	2	1	10
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	4	0	7
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	21	6	0	27
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	36	9	1	46
10	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0
13	Inspektorat Daerah	42	0	0	42
14	Sekretariat DPRD	28	13	0	41

Kode	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Keras Printer			Jumlah
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34	35	10	79
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40	0	3	43
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	19	0	19
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	3	0	17
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	10	2	2	14
20	Dinas Pendidikan	0	78	0	78
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10	2	0	12
22	Dinas Lingkungan Hidup	14	9	0	23
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13	23	8	44
24	Dinas Perhubungan	49	0	0	49
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	30	7	0	37
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	0	2	14
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	2	26	0	28
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10	6	4	20
29	Dinas Perdagangan	2	2	1	5
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	6	0	7
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	0	100	0	100
32	Kecamatan Manguharjo	0	7	0	7
33	Kecamatan Kartoharjo	15	1	11	27
34	Puskesmas Manguharjo	22	6	0	28
35	Puskesmas Sukosari	4	4	4	12
TOTAL PERANGKAT PRINTER		489	408	51	948

Berdasarkan dengan kondisi eksisting perangkat keras yang termuat pada **Tabel 1.25 dan Tabel 1.27** dapat disimpulkan jumlah keseluruhan perangkat keras yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun, dijabarkan pada **Tabel 1.28**

Tabel 1.28 Total Eksisting Perangkat Keras Utama

No	Nama Perangkat Keras	Jumlah
1	PC	996
2	Laptop	765
3	Printer	948

Dari hasil jumlah perangkat keras yang terdata pada saat survei, terdapat perangkat keras dengan usia penggunaan lebih dari 5 (lima) tahun serta terdapat beberapa PD tidak melakukan inventarisasi barang secara berkala sehingga dalam **Tabel 1.25 dan Tabel 1.28** terkait dengan data untuk perangkat *PC*, *laptop* dan *printer* yang berjumlah 0 (nol).

Hal tersebut dapat menjadi dasar usulan untuk pengadaan pembaruan perangkat, dengan usia penggunaan diatas 5 (lima) tahun untuk mendukung kinerja dan performa kebutuhan kantor sehari hari.

Perangkat dengan usia penggunaan tersebut adalah usia optimal untuk dilakukannya pergantian perangkat keras mengingat munculnya OS baru, keadaptifan dalam membuka *browser* atau melakukan hal berat pada perangkat keras dengan membuka aplikasi baru, serta menurunnya performa perangkat keras.

2. Perangkat Keras Periferal

Perangkat Keras Periferal atau perangkat tambahan adalah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Beberapa perangkat yang umum digunakan yaitu terdiri dari *Scanner*, *Printer Khusus*, *Kamera*, *Speaker*, *HT*, *LED TV*, *Monitor*, *Proyektor* dan lain sebagainya. Berikut merupakan daftar perangkat periferal yang diperoleh dari hasil survei pada 35 Perangkat Daerah disajikan pada **Tabel 1.29**.

Tabel 1.29 Eksisting Perangkat Keras Periferal

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)
2	Bagian Hukum	LCD	Digunakan untuk rapat	1

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)
		Webcam	Digunakan untuk meeting	1
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Scanner perangkat	Scanner	3
		Perangkat presentasi	Proyektor	2
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Scanner	Scanner	1
		Handy Talky	Handy Talky	1
		Layar film/proyektor	Layar film/proyektor	1
		Handycam	Handycam	1
		Televisi	Televisi	1
5	Bagian Umum	Layar Film/Projector	Layar Film/Projector	12
		CAMERA FILM	Nikon / D3200	4
6	Bagian Pemerintahan	Scanner	Scanner	1
		Proyektor	Proyektor	1
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Scanner	Fujitsu Image	1
		LCD	Panasonic	1
		Handycam	Handycam	1
		Camera	Camera	1
		Printer	Canon / Pixma MX-366	1
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Camera	Canon Digital	6
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Proyektor	Untuk rapat	2
		LCD	Untuk rapat dan monitoring	8
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Scanner	Scanner	cek KIB
		Projector	Projector	cek KIB
14	Sekretariat DPRD	Scanner	EPSON	4

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)
		Proyektor	LG, SAMSUNG	33
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Speaker aktif	Berupa sound kecil untuk penguat suara, dimanfaatkan saat rapat kecil	8
		Speaker Aktif	Sound penguat untuk acara lapangan atau rapat di ruangan lebar	3 Unit
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LCD	Digunakan untuk rapat	7
		Webcam	Digunakan untuk rapat <i>online</i>	2
		Proyektor	Digunakan untuk presentasi	5 kondisi baik dan 2 rusak
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Drone	Kamera Drone Untuk Kegiatan <i>Outdoor</i>	2
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	monitor / proyektor	monitor layar ukuran 80 inci	2
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	LCD Proyektor	Panasonic / PT - VX61; Epson	5
		Camera Digital	NIKON L830; Logitech / Video Conferencing System	8
20	Dinas Pendidikan	LCD	COOCAA	4
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Scanner	Document Scanner	1
		LCD Proyektor	Screen Proyektor	1
22	Dinas Lingkungan Hidup	LCD	Epson	2

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)
		TV	Polytron,Samsung dan LG	5
		Kamera digital	Canon	3
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Printer Fargo	Printer untuk pencetakan KTP-EI	4
		Printer Evolis	Printer untuk Pencetakan KIA	3 (1 baik dan 2 rusak)
		Card Reader	Pembaca dan Penulis Chip KTp-el	3
		Mesin Fotocopy	Perangkat Cetak/Penggandaan dan Scanner	1
		Scanner	Perangkat Scanning	3
		Printer Epson	Perangkat Cetak dan Scanner	2
		Printer Brother	Perangkat Cetak dan Scanner	2
		Printer Epson	Perangkat Cetak dan Scanner	1
		Printer Epson L1300	Perangkat Cetak	2
		Printer Canon	Printer Cetak dokumen	1
		Printer Epson	Printer Cetak dokumen	10
		Printer Epson	Printer Cetak dokumen	2
		Printer Brother	Printer Cetak dokumen	1
		Printer Epson	Printer Cetak dokumen	8
Printer Brother	Printer Cetak dokumen	1		

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)
		Printer HP	Printer Cetak dokumen	7
		Mesin Fotocopy	Perangkat Cetak/Penggandaan dan Scanner	1
		Sound System Polytron	Alat pengeras suara	1
		Soundsystem Behringer	Alat pengeras suara	1
		Overhead Projector	LCD Proyektor	1
		Overhead Projector	LCD Proyektor	1
		Scanner Aibi	Iris Scanner KTP-el	1
		Scanner Cmitech	Iris Scanner KTP-el	1
		Scanner Biomorf	Fingerprint scanner rekam KTP-el	2
		Scanner B-scan	Fingerprint scanner rekam KTP-el	1
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Server	Server VM	2 Unit
		Server	Server VM	3 Unit
		Storage	Server Storage	3 Unit
		Router	Router	6 Unit
		Proyektor	LCD Proyektor	1 Unit
		Proyektor	LCD Proyektor	1 Unit
		Scanner	Scanner	12 Unit
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Proyektor	Sony dan epson	3
		CCTV	Hikvision	8

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Camera, TV, video trone	-	-
29	Dinas Perdagangan	Kamera	Kamera Cannon EOS	4
		LCD Proyektor	LCD Proyektor ePSON EX300	1
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Sensor Sidik Jari	Perangkat perekam sidik jari untuk konfirmasi kehadiran pasien poli yang menggunakan asuransi BPJS	9
		Monitor	Monitor	150
		Proyektor	Proyektor	2
		TV	TV (Smart TV dan Analog)	20
32	Kecamatan Manguharjo	LED TV	Toshiba P2301	1
		LED TV	LG LB550	1
		Scanner	Brother ads-1600w	1
		Scanner	Hp officejet pro 7720	1
		Monitor Layar	Brite	1
		Monitor Layar	Layar Gantung	2
		Proyektor	Sony xga vpl-ex130	1
		Proyektor	Sony vpl-dx 11	1
		Speaker	Yamaha Platinum	1
		Speaker	Soundbest s8111	2
33	Kecamatan Kartoharjo	Microphone Wireless Mic	PGX4, BETA/ 58A	2
		Scanner	CANON, COMPACT	3

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)
		Proyektor	ACER	1
34	Puskesmas Manguharjo	Speaker Aktif	Untuk panggilan pasien	3
35	Puskesmas Sukosari	Proyektor + Attachment	-	5
		Sound System	Sound System	1

3. Perangkat Jaringan

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 pada pasal 27 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa jaringan intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra pusat dan pemerintah daerah. Agar terlaksananya jaringan intra pemerintah harus memenuhi infrastruktur terkait perangkat konektivitas yang digunakan untuk mendukung terlaksananya infrastruktur jaringan intra pemerintah, Adapun perangkat yang digunakan meliputi *Modem, Hub/Switch, Gateway-Router, Access Point, Repeater Wifi dan Antena Outdoor*. Berikut merupakan perangkat keras Jaringan yang dimiliki oleh masing-masing PD yang ada pada Pemerintah Kota Madiun sebagaimana disajikan pada **Tabel 1.30 dan Tabel 6.22**.

A. Perangkat Jaringan Modem

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah, penggunaan perangkat jaringan modem dari tiap Perangkat Daerah berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu ≥ 5 tahun, 1-5 tahun, dan ≤ 1 tahun. Dari 35 (tiga puluh lima) PD, terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang menggunakan perangkat jaringan modem, dan terdapat 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah yang tidak terdapat perangkat jaringan modem dikarenakan beberapa Perangkat Daerah tidak melakukan inventarisasi barang secara berkala terkait dengan data untuk perangkat Jaringan modem yang berjumlah 0.

Berikut detail jumlah keseluruhan perangkat jaringan modem yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun disajikan dalam **Tabel 1.30**.

Tabel 1.30 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan Modem

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Modem			Jumlah Modem
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
		1	Bagian Organisasi	1	
2	Bagian Hukum	0	0	0	0
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	0	0	1	1
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0
5	Bagian Umum	0	0	0	0
6	Bagian Pemerintahan	0	0	1	1
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	1
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	0	0	0
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	0
10	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0
13	Inspektorat Daerah	0	0	0	0
14	Sekretariat DPRD	0	0	0	0
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	0	0	2
16	Dinas Pekerjaan Umum	0	1	0	1

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan			Jumlah Modem
		Modem			
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
	dan Penataan Ruang				
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	0	0	1
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	0
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0	0	0	0
20	Dinas Pendidikan	0	0	0	0
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	0	0	1
22	Dinas Lingkungan Hidup	1	0	0	1
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	0	0	2
24	Dinas Perhubungan	0	0	0	0
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0	0
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	0	0	0	0
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0
29	Dinas Perdagangan	0	0	0	0
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	0	0	0
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	0	0	0	0
32	Kecamatan Manguharjo	0	0	0	0
33	Kecamatan Kartoharjo	1	0	0	1

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Modem			Jumlah Modem
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
		34	Puskesmas Manguharjo	0	
35	Puskesmas Sukosari	0	0	0	0
TOTAL PERANGKAT MODEM		9	2	2	13

B. Hub/switch

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah, penggunaan perangkat jaringan *Hub Switch* dari tiap Perangkat Daerah berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu ≥ 5 tahun, 1-5 tahun, dan ≤ 1 tahun. Dari 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah, terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang menggunakan perangkat jaringan modem, dan terdapat 25 (dua puluh lima) Perangkat Daerah yang tidak terdapat perangkat jaringan *Hub/Switch* dikarenakan beberapa Perangkat Daerah tidak melakukan inventarisasi barang secara berkala terkait dengan data untuk perangkat Jaringan *Hub/Switch* yang berjumlah 0. Berikut detail jumlah keseluruhan perangkat jaringan *Hub/Switch* yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun disajikan dalam **Tabel 1.31**.

Tabel 1.31 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan *Hub/Switch*

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Hub/Switch			Jumlah Hub/Switch
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
		1	Bagian Organisasi	0	
2	Bagian Hukum	0	0	0	0
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	0	0	1	1
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Hub/Switch			Jumlah Hub/Switch
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
5	Bagian Umum	0	0	0	0
6	Bagian Pemerintahan	0	0	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	1
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	0	0	0
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	0
10	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0
13	Inspektorat Daerah	0	0	0	0
14	Sekretariat DPRD	0	0	0	0
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	9	0	9
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	0	0	1
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	0	0	0	0

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Hub/Switch			Jumlah Hub/Switch
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
	Perlindungan Anak				
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0	0	0	0
20	Dinas Pendidikan	0	0	0	0
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	0	0	1
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	0
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	0	0	5
24	Dinas Perhubungan	0	0	0	0
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	5	0	5
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	0	0	0	0
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0
29	Dinas Perdagangan	0	0	0	0
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	0	0	0
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	0	50	20	70
32	Kecamatan	0	0	0	0

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Hub/Switch			Jumlah Hub/Switch
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
	Manguharjo				
33	Kecamatan Kartoharjo	0	0	0	0
34	Puskesmas Manguharjo	2	0	0	2
35	Puskesmas Sukosari	0	0	0	0
TOTAL PERANGKAT HUB/SWITCH		9	67	21	97

C. Gateway/Router

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah, penggunaan perangkat jaringan *Gateway Router* dari tiap Perangkat Daerah berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu >= 5 (lima) tahun, 1-5 tahun, dan <=1 tahun.

Dari 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah, terdapat 12 (dua belas) Perangkat Daerah yang menggunakan perangkat jaringan *Gateway Router*, dan terdapat 23 (dua puluh tiga) Perangkat Daerah yang tidak terdapat perangkat jaringan *Gateway Router* dikarenakan beberapa Perangkat Daerah tidak melakukan inventarisasi barang secara berkala terkait dengan data untuk perangkat Jaringan *Gateway Router* yang berjumlah 0. Berikut detail jumlah keseluruhan perangkat jaringan *Gateway Router* yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun disajikan dalam **Tabel 1.32**.

Tabel 1.32 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan *Gateway Router*

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Gateway Router			Jumlah Gateway Router
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
1	Bagian Organisasi	0	1	0	1
2	Bagian Hukum	0	0	0	0
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan	0	0	0	0

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Gateway Router			Jumlah Gateway Router
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
	Administrasi Pembangunan				
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0
5	Bagian Umum	0	0	0	0
6	Bagian Pemerintahan	0	0	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	1
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	0	0	0
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	2	0	2
10	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0
13	Inspektorat Daerah	0	0	0	0
14	Sekretariat DPRD	0	0	0	0
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	5	0	5
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	0	0	3
17	Dinas Perumahan	0	0	0	0

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Gateway Router			Jumlah Gateway Router
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
	Rakyat dan Kawasan Permukiman				
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	0
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0	0	0	0
20	Dinas Pendidikan	0	0	0	0
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	0	0	1
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	0
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	0
24	Dinas Perhubungan	1	0	0	1
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	0	1
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	0	1	0	1
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0
29	Dinas Perdagangan	0	0	0	0
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	0	0	0	0

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Gateway Router			Jumlah Gateway Router
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
	Kebakaran				
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	0	4	0	4
32	Kecamatan Manguharjo	0	0	0	0
33	Kecamatan Kartoharjo	3	0	0	3
34	Puskesmas Manguharjo	1	0	0	1
35	Puskesmas Sukosari	0	0	0	0
TOTAL PERANGKAT GATEWAY ROUTER		9	15	0	24

D. Access Point

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah, penggunaan perangkat jaringan *Access Point* dari tiap Perangkat Daerah berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu ≥ 5 tahun, 1-5 tahun, dan ≤ 1 tahun. Dari 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah, terdapat 14 (empat belas) Perangkat Daerah yang menggunakan perangkat jaringan *Access Point*, dan terdapat 21 (dua puluh satu) Perangkat Daerah yang tidak terdapat perangkat jaringan *Access Point* dikarenakan beberapa Perangkat Daerah tidak melakukan inventarisasi barang secara berkala terkait dengan data untuk perangkat Jaringan *Access Point* yang berjumlah 0. Berikut detail jumlah keseluruhan perangkat jaringan *Access Point* yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun disajikan dalam **Tabel 1.33**.

Tabel 1.33 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan *Access Point*

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Access Point			Jumlah Access Point
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
1	Bagian Organisasi	0	1	0	1

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Access Point			Jumlah Access Point
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
2	Bagian Hukum	0	1	0	1
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	0	0	1	1
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0
5	Bagian Umum	0	0	0	0
6	Bagian Pemerintahan	0	0	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	1
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	7	0	7
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	2	0	2
10	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	3	0	3
13	Inspektorat Daerah	0	0	0	0
14	Sekretariat DPRD	0	0	0	0
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	0	0

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Access Point			Jumlah Access Point
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
		16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	0
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0	3	0	3
20	Dinas Pendidikan	0	0	0	0
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	0	0	0
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	0
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	0	0	3
24	Dinas Perhubungan	1	0	0	1
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	10	0	10
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	0	1	0	1
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Access Point			Jumlah Access Point
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
29	Dinas Perdagangan	0	0	0	0
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	0	0	0
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	0	20	0	20
32	Kecamatan Manguharjo	0	4	0	4
33	Kecamatan Kartoharjo	0	0	0	0
34	Puskesmas Manguharjo	0	0	0	0
35	Puskesmas Sukosari	0	0	0	0
TOTAL PERANGKAT ACCESS POINT		4	53	1	58

E. Repeater Wifi

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah, penggunaan perangkat jaringan *Repeater Wifi* dari tiap Perangkat Daerah berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu ≥ 5 tahun, 1-5 tahun, dan ≤ 1 tahun. Dari 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah, terdapat 2 (Dua) Perangkat Daerah yang menggunakan perangkat jaringan *Repeater Wifi*, dan terdapat 33 (Tiga puluh tiga) Perangkat Daerah yang tidak terdapat perangkat jaringan *Repeater Wifi* dikarenakan beberapa Perangkat Daerah tidak melakukan inventarisasi barang secara berkala terkait dengan data untuk perangkat Jaringan *Repeater Wifi* yang berjumlah 0. Berikut detail jumlah keseluruhan perangkat jaringan *Repeater Wifi* yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun disajikan dalam **Tabel 1.34**.

Tabel 1.34 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan *Repeater Wifi*

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan <i>Repeater Wifi</i>			Jumlah <i>Repeater Wifi</i>
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
1	Bagian Organisasi	0	0	0	0
2	Bagian Hukum	0	0	0	0
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	0	0	0	0
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0
5	Bagian Umum	0	0	0	0
6	Bagian Pemerintahan	0	0	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	1
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	0	0	0
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	0
10	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0
13	Inspektorat Daerah	0	0	0	0
14	Sekretariat DPRD	0	0	0	0
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan	0	0	0	0

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Repeater Wifi			Jumlah Repeater Wifi
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
	Keluarga Berencana				
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	0
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0	0	0	0
20	Dinas Pendidikan	0	0	0	0
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	0	0	0
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	0
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	0
24	Dinas Perhubungan	4	0	0	4
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0	0
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	0	0	0	0
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0
29	Dinas Perdagangan	0	0	0	0

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Repeater Wifi			Jumlah Repeater Wifi
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	0	0	0
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	0	0	0	0
32	Kecamatan Manguharjo	0	0	0	0
33	Kecamatan Kartoharjo	0	0	0	0
34	Puskesmas Manguharjo	0	0	0	0
35	Puskesmas Sukosari	0	0	0	0
TOTAL PERANGKAT REPEATER WIFI		4	1	0	5

F. Antena Outdoor

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah, penggunaan perangkat jaringan *Antena Outdoor* dari tiap Perangkat Daerah berdasarkan rentang waktu usia perangkat yaitu ≥ 5 tahun, 1-5 tahun, dan ≤ 1 tahun. Dari 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah, terdapat 3 (Tiga) Perangkat Daerah yang menggunakan perangkat jaringan *Antena Outdoor*, dan terdapat 33 (Tiga puluh dua) Perangkat Daerah yang tidak terdapat perangkat jaringan *Antena Outdoor* dikarenakan beberapa Perangkat Daerah tidak melakukan inventarisasi barang secara berkala terkait dengan data untuk perangkat Jaringan *Antena Outdoor* yang berjumlah 0 (nol). Berikut detail jumlah keseluruhan perangkat jaringan *Antena Outdoor* yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun disajikan dalam **Tabel 1.35**.

Tabel 1.35 Kondisi Eksisting Perangkat Jaringan *Antena Outdoor*

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Antena Outdoor			Jumlah Antena Outdoor
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
1	Bagian Organisasi	0	0	0	0
2	Bagian Hukum	0	0	0	0
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	0	0	0	0
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0
5	Bagian Umum	0	0	0	0
6	Bagian Pemerintahan	0	0	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	0
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	0	0	0
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	0
10	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0
13	Inspektorat Daerah	0	0	0	0
14	Sekretariat DPRD	0	0	0	0
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian	0	0	0	0

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Antena Outdoor			Jumlah Antena Outdoor
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
	Penduduk dan Keluarga Berencana				
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	0
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0	0	0	0
20	Dinas Pendidikan	0	0	0	0
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	0	0	0
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	0
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	0
24	Dinas Perhubungan	0	0	0	0
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	5	0	7
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0
27	Dinas	0	0	0	0

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pemilik	Perangkat Jaringan Antena Outdoor			Jumlah Antena Outdoor
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1 Tahun	
	Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0
29	Dinas Perdagangan	3	0	0	3
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	0	0	0
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	0	0	0	0
32	Kecamatan Manguharjo	0	0	0	0
33	Kecamatan Kartoharjo	0	0	0	0
34	Puskesmas Manguharjo	1	0	0	1
35	Puskesmas Sukosari	0	0	0	0
TOTAL PERANGKAT ANTENA OUTDOOR		6	5	0	11

Berdasarkan dengan penjelasan pada tabel diatas terkait dengan ketersediaan perangkat Jaringan dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing Perangkat Daerah telah terdapat perangkat Jaringan yang mendukung terkait dengan integrasi atau distribusi jaringan intra pemerintah kota madiun. Berikut merupakan total seluruh perangkat jaringan yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah ditampilkan pada **Tabel 1.36**.

Tabel 1.36 Eksisting Perangkat Jaringan

Nama Perangkat	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Jumlah
Modem	9	2	2	13

Nama Perangkat	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Jumlah
Hub/Switch	9	67	21	97
Gateway/router	9	15	0	24
Access Point	4	53	1	58
Repeater Wifi	4	1	0	5
Antena Outdoor	6	5	0	11

1.7.8.2 Ketersediaan Perangkat Lunak

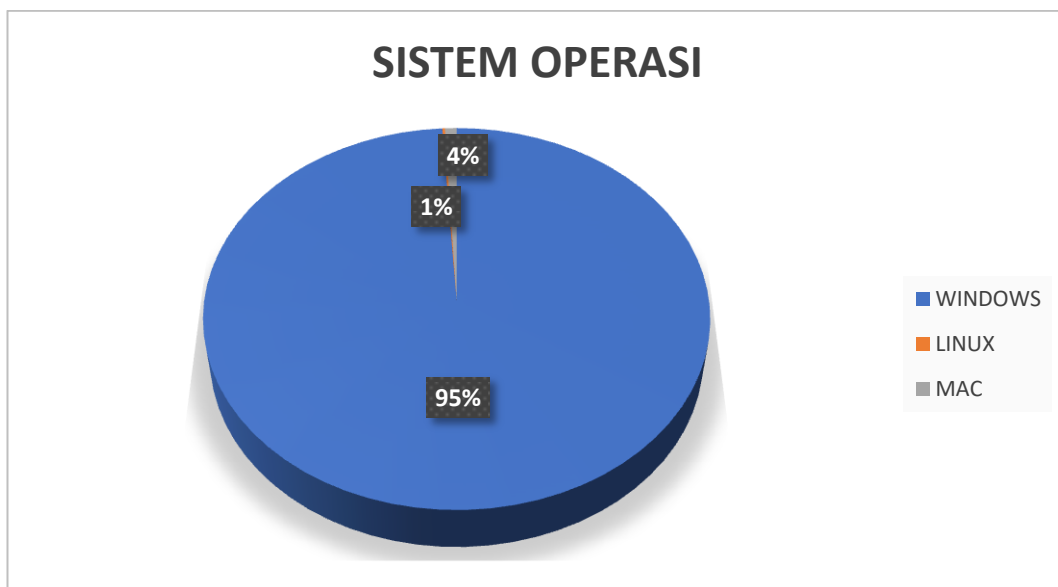
Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang infrastruktur SPBE adalah tersedianya perangkat lunak. Penggunaan perangkat lunak dibutuhkan dalam mendukung aktivitas sehari-hari untuk menunjang kinerja Pemerintah Kota Madiun. Dalam Draft Arsitektur SPBE yang diterbitkan pada 22 Juni 2021 pada metadata disebutkan perangkat lunak *platform* terbagi menjadi sistem operasi dan aplikasi perkantoran (pemrosesan kata, pemrosesan angka, pemrosesan visual, *editing* foto, *tools programming*, DBMS, penyuntingan video, *browser*, dan *video conference*).

Ketersediaan perangkat lunak yang terdapat pada Pemerintah Kota Madiun digunakan sebagai penunjang atau sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Sistem operasi terdiri dari *windows*, *linux*, *mac*, *dual os*, dan lainnya. Sedangkan aplikasi perkantoran terdiri dari *Ms. Office*, *Google Doc*, *Google Sheet*, *Google Slide*, dan lainnya. Perangkat lunak yang terdapat pada Pemerintah Kota Madiun akan dijelaskan lebih detail di bawah ini.

1.7.8.2.1 Sistem Operasi

Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer, kecuali program *booting*.

Berikut merupakan kondisi eksisting dari penggunaan sistem operasi pada Pemerintah Kota Madiun yang ditampilkan pada **Gambar 1.28**.

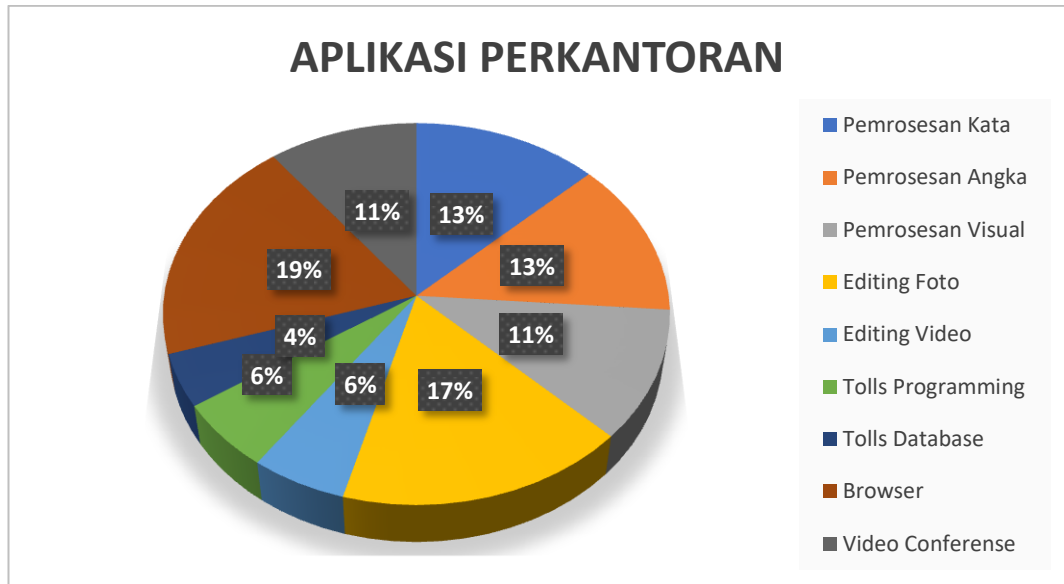


Gambar 1.28 Penggunaan Sistem Operasi

Berdasarkan Gambar 1.28 mayoritas penggunaan sistem operasi pada Pemerintah Kota Madiun lebih kepada Sistem Operasi *Windows* yaitu sebanyak **35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah** yang menggunakan dengan persentase 95% (sembilan puluh lima persen), *Linux* sebanyak **1 (satu) Perangkat Daerah** yang menggunakan dengan presentase 1% (satu persen), dan *Mac* sebanyak **5 (lima) Perangkat Daerah** yang menggunakan dengan presentase 4% (empat persen).

1.7.8.2.2 Aplikasi Perkantoran

Perangkat lunak aplikasi perkantoran digunakan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari dari masing-masing Perangkat Daerah. Penggunaan perangkat lunak aplikasi perkantoran dibagi beberapa bagian yaitu Aplikasi perkantoran pemrosesan kata, pemrosesan angka, pemrosesan visual, *editing* foto, *tools programming*, DBMS, penyuntingan video, *browser*, dan *video conference*. Ilustrasi penggunaan aplikasi perkantoran yang ada di Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada **Gambar 1.29**.



Gambar 1.29 Persentase Penggunaan Aplikasi Perkantoran

Berdasarkan Gambar 1.29 diatas menunjukkan bahwa terdapat 9 Aplikasi Perkantoran yang digunakan pada Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Madiun, antara lain yaitu Pemrosesan Kata 13% (tiga belas persen), Pemrosesan Angka 13% (tiga belas persen), Pemrosesan Visual 11% (sebelas persen), *Editing Video* 6% (enam persen), *Tools Programming* 6% (enam persen), DBMS 4% (empat persen), *Editing Foto* 17% (tujuh belas persen), *Browser* 19% (sembilan belas persen) dan *Video Conference* 11% (sebelas persen).

1.7.8.3 Media Penyimpanan

Berdasarkan dengan kondisi eksisting yang didapatkan dari hasil survei, pada beberapa Perangkat Daerah terdapat perangkat media penyimpanan yang digunakan antara lain seperti *Hardisk* Eksternal dan *Flashdisk* dan beberapa perangkat penyimpanan lainnya yang bertujuan untuk menyimpan *backup* data perkantoran ataupun data penting. Berikut merupakan detail perangkat media penyimpanan yang ada pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun ditampilkan pada **Tabel 1.37**.

Tabel 1.37 Kondisi Eksisting Media Penyimpanan

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Nama Pemilik
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Hardisk dan flashdisk	file kantor dan file pribadi	berkas kantor	Bagian Perekonomian dan Kesra

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Nama Pemilik
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Hardisk	Seagate	tidak ada	BAPPEDA
14	Sekretariat DPRD	Hardisk Eksternal	MENYIMPAN DATA KEGIATAN DEWAN	MENYIMPAN DATA KEGIATAN DEWAN	SEKRETARIAT DPRD
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hardisk Eksternal	Menyimpan Data Rekam Medis dan Data Penduduk	Data Rekam Medis dan Data Penduduk	Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Madiun
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hardisk Eksternal	Perangkat Keras	Data internal OPD	Internal OPD
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	seagate HDD eksternal 2 TR	back up data PC	Membackup data2 di PC dan Laptop	Dinsos
20	Dinas Pendidikan	Hardisk Eksternal	WD	Data Internal OPD dan foto	Dinas Pendidikan
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Hardisk (2)	Digunakan untuk menyimpan data DKPP	Data Pangan dan Pertanian	DKPP
22	Dinas Lingkungan Hidup	Hardisk external, dan SSD	Toshiba dan Sandisk	Data internal OPD	DLH
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Storage Biometrik KTP-el	External Storage	Biometrik KTP-el	Disdukcapil
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	SSD eksternal 2 TB	digunakan untuk menyimpan backup data server yang terkena serangan mendadak	file server, data backup	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	SSD Eksternal Samsung EVO 2TB	digunakan sebagai storage tambahan	file, data kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

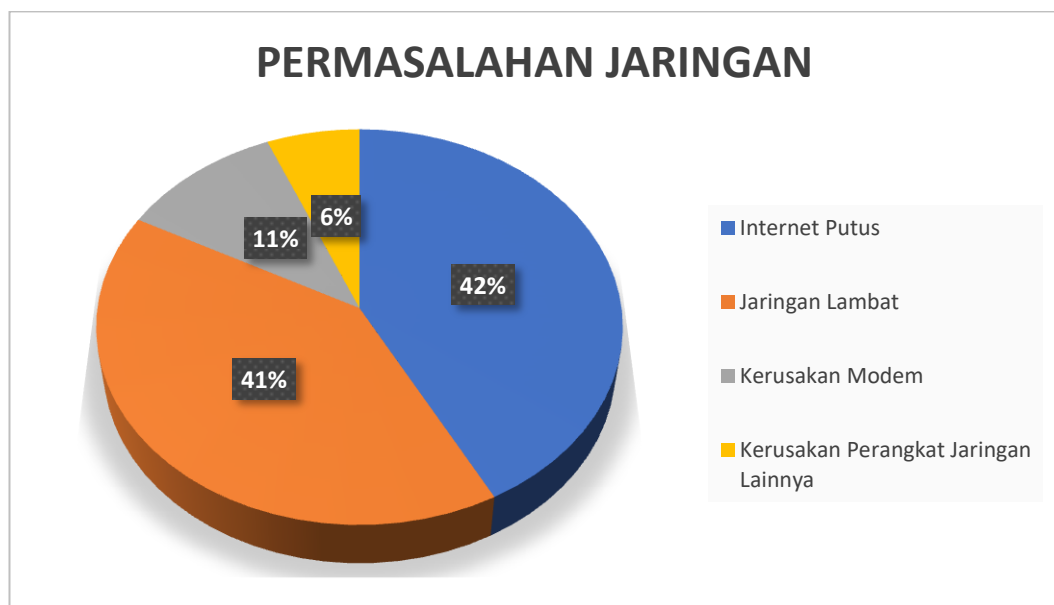
Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Nama Pemilik
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	SSD Eksternal Samsung EVO 2TB	digunakan sebagai storage tambahan	file, data kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hard disk Eksternal	Seagate	Data Perizinan, Data backup OPD	DPMPPTSP
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Hardisk Eksternal (2)	-	-	-
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Hardisk	penyimpanan data dan dokumentasi	-	-
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Hardisk Eksternal	Digunakan untuk penyimpanan data RSUD Kota Madiun	Data RSUD Kota Madiun	RSUD Kota Madiun
35	Puskesmas Sukosari	Flashdisk	Flashdisk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar.	-	Puskesmas Sukosari
35	Puskesmas Sukosari	SDHC atau SD High Capacity	SDHC atau SD High Capacity adalah pembaharuan dari teknologi yang dipakai pada SD Card	-	Puskesmas Sukosari

1.7.9 Permasalahan Infrastruktur SPBE

Berdasarkan dengan kondisi eksisting infrastruktur SPBE Kota Madiun yang didapatkan dari hasil pengumpulan data survei terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya Permasalahan Jaringan Intra Pemerintah, Permasalahan Ruang Server/Server, Permasalahan Sistem Penghubung Layanan, Permasalahan Perangkat Keras dan Lunak (Sistem Operasi dan Aplikasi Perkantoran). Setiap permasalahan terkait dengan infrastruktur SPBE dibahas lebih lanjut pada sub bab berikut.

1.7.9.1 Permasalahan Jaringan Intra Pemerintah

Permasalahan Jaringan yang terjadi pada Pemerintah Kota Madiun terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam Penerapan Jaringan Intra yang dimiliki saat ini, antara lain seperti Putus, Internet Lambat, dan Kerusakan Perangkat Keras Jaringan. Ilustrasi permasalahan Jaringan dapat dilihat pada **Gambar 1.30**



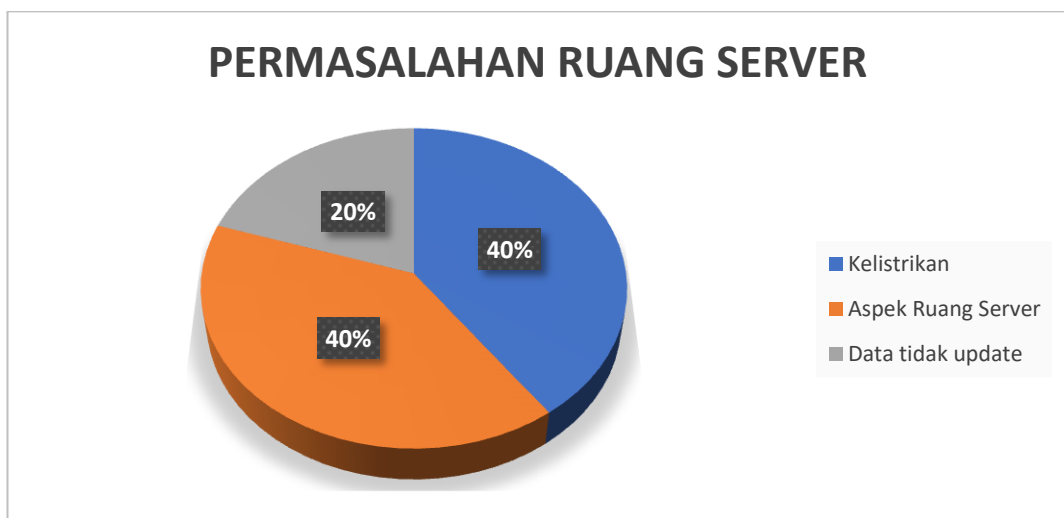
Gambar 1.30 Permasalahan Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan **Gambar 1.30** kondisi eksisting terkait dengan permasalahan Jaringan Intra Pemerintah yang ada di Pemerintah Kota Madiun antara lain yaitu persentase terjadinya Internet Putus sebanyak 42% (empat puluh dua persen) jaringan internet lambat 41% (empat puluh satu persen), Kerusakan Modem 11% (sebelas persen), dan kerusakan Perangkat Keras Jaringan 6% (enam persen). Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Jaringan yang mayoritas dihadapi oleh Perangkat Daerah di Kota

Madiun yaitu **Permasalahan terkait Jaringan putus** dengan persentase 42% (empat puluh dua persen).

1.7.9.2 **Permasalahan Ruang Server (*Data Center*)**

Permasalahan Ruang Server/Server yang terjadi pada Pemerintah Kota Madiun terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam Penerapan Ruang Server yang dimiliki saat ini, antara lain seperti *Server Down*, Kelistrikan, Kehilangan data, Perangkat dan Peralatan Rusak, Ruang Server tidak memenuhi Aspek dan Permasalahan Jaringan. Ilustrasi permasalahan Ruang Server dapat dilihat pada **Gambar 1.31**.

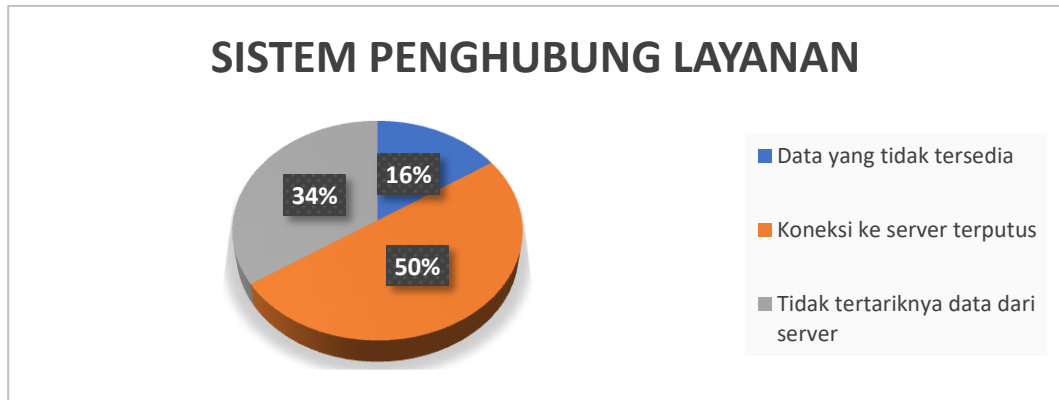


Gambar 1.31 Permasalahan Ruang Server (*Data Center*)

Berdasarkan **Gambar 1.31** Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Ruang Server yang ada di Pemerintah Kota Madiun antara lain yaitu Persentase terjadinya Kelistrikan (Sering Mati) sebanyak 40% (empat puluh persen), Ruang Server tidak memenuhi aspek sebanyak 40% (empat puluh persen), dan Data tidak *update* 20% (dua puluh persen). Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Ruang Server yang mayoritas di Kota Madiun yaitu **Jaringan Lambat (Internet)** dengan Persentase sebanyak 65% (enam puluh lima persen),

1.7.9.3 **Permasalahan Sistem Penghubung Layanan**

Permasalahan Sistem Penghubung Layanan yang terjadi pada Pemerintah Kota Madiun untuk saat ini yang dialami tidak cukup signifikan antara tidak adanya Sistem Penghubung Layanan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan terdapat beberapa permasalahan yang ditampilkan pada **Gambar 1.32**.

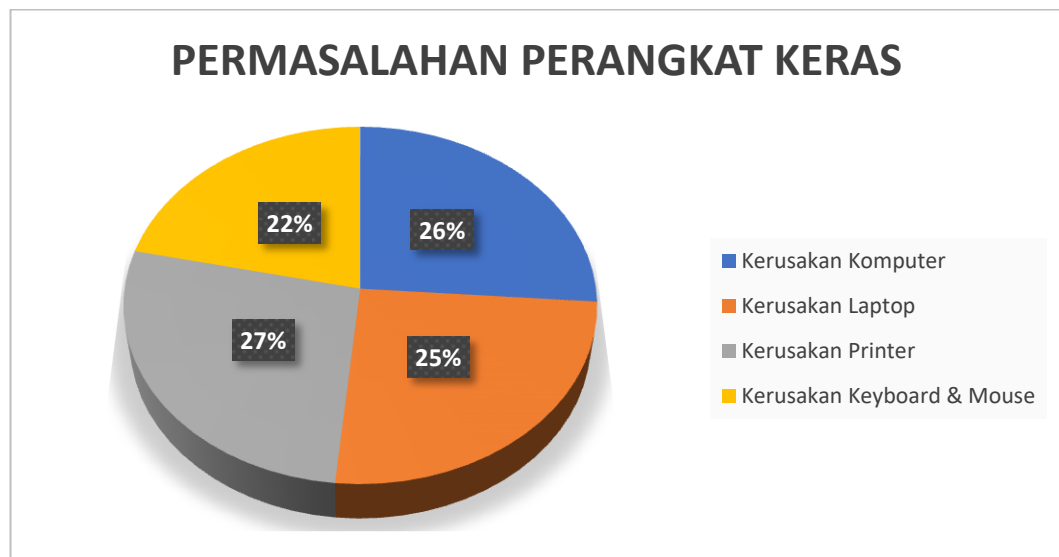


Gambar 1.32 Permasalahan Sistem Penghubung Layanan

Berdasarkan **Gambar 1.32** Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Sistem Penghubung Layanan yang ada di Pemerintah Kota Madiun antara lain yaitu persentase Data yang tidak tersedia 16 % (enam belas persen), Koneksi ke server terputus 50% (lima puluh persen) dan tidak tertariknya data dari server 34% (tiga puluh empat persen).

1.7.9.4 Permasalahan Perangkat Keras

Permasalahan Perangkat Keras yang terjadi pada Pemerintah Kota Madiun terdapat beberapa permasalahan yang dialami saat ini, antara lain seperti Kerusakan *Keyboard/mouse*, Kerusakan Komputer, Kerusakan Laptop, Kerusakan *Printer*. Ilustrasi permasalahan Perangkat Keras dapat dilihat pada **Gambar 1.33**

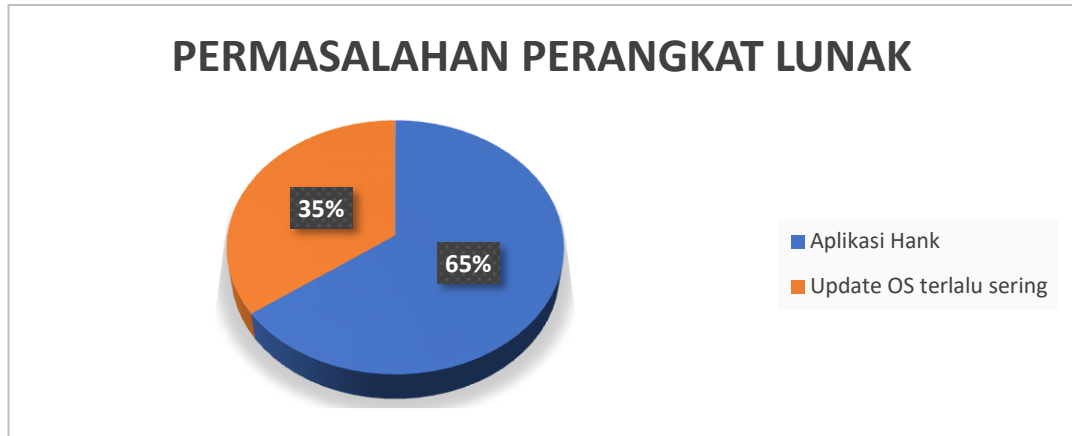


Gambar 1.33 Permasalahan Perangkat Keras

Berdasarkan dengan **Gambar 1.33** Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Perangkat Keras yang ada di Pemerintah Kota Madiun antara lain yaitu persentase Kerusakan Laptop sebanyak 25% (dua puluh lima persen), Kerusakan *Printer* sebanyak 27% (dua puluh tujuh persen), *Keyboard/Mouse* sebanyak 22% (dua puluh dua persen), dan Kerusakan Komputer sebanyak 26% (dua puluh enam persen).

1.7.9.4 Permasalahan Perangkat Lunak

Permasalahan Perangkat Lunak yang terjadi pada Pemerintah Kota Madiun terdapat beberapa permasalahan yang dialami saat ini, antara lain seperti Aplikasi Perkantoran yang *error* dan *Update OS* terlalu sering. Ilustrasi permasalahan Perangkat Lunak dapat dilihat pada **Gambar 1.34**.



Gambar 1.34 Permasalahan Perangkat Lunak

Berdasarkan **Gambar 1.34** Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Perangkat Lunak yang ada di Pemerintah Kota Madiun antara lain yaitu presentasi Aplikasi Perkantoran yang *Hang* sebanyak 65% (enam puluh lima persen) dan *Update OS* terlalu sering sebanyak 35% (tiga puluh lima persen). Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Perangkat Lunak yang mayoritas di Kota Madiun yaitu **Aplikasi Perkantoran yang *error*** dengan Persentase sebanyak 65% (enam puluh lima persen).

1.7.10 Analisis GAP

Bagian ini menjelaskan terkait analisis kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari infrastruktur Pemerintah Kota Madiun. Analisis kesenjangan diperlukan untuk memenuhi proses perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur Pemerintah Kota Madiun. Penjelasan mengenai analisis kesenjangan infrastruktur Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada **Tabel 1.38**.

Tabel 1.38 Analisis GAP Infrastruktur SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
Jaringan Intra Pemerintah			
Topologi Jaringan	Tidak memiliki Topologi Jaringan Fisik dan Logik baik	Jaringan Intra Pemerintah tersedia dan	Telah menerapkan Jaringan Intra Pemerintah pada

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
	secara umum maupun secara detail	tersebar luas pada PD Kota Madiun untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Madiun.	lingkup pemerintah Kota Madiun , tetapi masih belum adanya topologi Jaringan baik dalam bentuk fisik atau logic dan telah dilakukan pemusatan Jaringan intra tetapi masih terdapat pengadaan secara mandiri oleh PD
<i>Bandwidth</i>	Seluruh <i>Bandwidth</i> telah disediakan oleh Diskominfo dan telah terpusat tetapi masih terdapat PD yang melakukan Pengadaan <i>Bandwidth</i> secara mandiri		Diharapkan Jaringan Intra Pemerintah yang tersedia saat ini didukung dengan adanya topologi jaringan dan tersebar luas pada seluruh PD Kota Madiun secara maksimal untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Madiun dan tidak ada pengadaan secara mandiri.
Ruang Server			
Daftar Server	Seluruh daftar Server telah tercatat secara rapi dan detail serta telah terpusat pada Ruang Server Diskominfo	Pengadaan ruang server dan peningkatan aspek ruang server untuk memenuhi aspek keamanan dan performa server. Idealnya pengelolaan server terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah Kota madiun telah melakukan pemusatan server yang ditunjukkan dengan adanya data terkait server yang telah dipusatkan serta menerapkan aspek dan standar keamanan data center.
Aspek Ruang Server	Aspek Ruang server yang dimiliki oleh diskominfo telah memenuhi standar dan memenuhi aspek		Diharapkan untuk dapat selalu melakukan daily check pada ruang server dan mempertahankan

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
			serta melakukan evaluasi (Audit) pada penerapan ISO yang telah diterapkan.
Komputasi			
Komputasi Awan	Tidak semua PD menerapkan Komputasi awan dan memahami akan pentingnya penggunaan komputasi awan	Menerapkan penggunaan Komputasi untuk media penyimpanan sebagai penerapan teknologi komputasi awan sebagai penunjang operasional.	Masih banyak PD yang belum menerapkan Komputasi awan dan diharapkan untuk dapat Menerapkan penggunaan Komputasi untuk media penyimpanan sebagai penerapan teknologi komputasi awan sebagai penunjang operasional.
Fasilitas Komputasi	Belum banyak PD menerapkan fasilitas Komputasi awan	Melakukan penerapan penggunaan fasilitas komputasi untuk penunjang operasional dalam penyimpanan.	Banyak PD yang belum menerapkan fasilitas komputasi dan diharapkan untuk segera Melakukan penerapan penggunaan fasilitas komputasi untuk penunjang operasional dalam penyimpanan.
Sistem Penghubung Layanan	saat ini menggunakan API yang dibuat dan disediakan oleh Diskominfo Kota Madiun.	Implementasi sistem penghubung layanan untuk mendukung integrasi aplikasi	Belum menggunakan Penghubung yang disediakan oleh pusat diharapkan untuk dapat Implementasi sistem penghubung layanan untuk mendukung integrasi aplikasi serta menggunakan dari pusat
Perangkat Keras			

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
Perangkat Keras Utama	Masih terdapat PD yang memiliki perangkat keras yang kurang memenuhi melihat SDM yang cukup banyak dan kondisi perangkat yang lebih dari 5 tahun	Pengadaan dan pengelolaan perangkat keras untuk menunjang peningkatan kinerja Pemerintah Kota Madiun.	Terdapat banyak OPD yang Perangkat Keras sudah berusia lebih dari 5 tahun diharapkan untuk dilakukan peremajaan perangkat dan mempertimbangkan kebutuhan dari masing-masing PD untuk menunjang kebutuhan operasional
Perangkat Keras Periferal	Banyak PD yang tidak memiliki perangkat periferal pendukung		
Perangkat Jaringan	Masih terdapat PD yang belum memiliki perangkat Jaringan yang maksimal dan terdapat perangkat yang kondisinya lebih dari 5 tahun serta harus dilakukan peremajaan.		
Perangkat Lunak			
Sistem Operasi	Masih banyak yang menggunakan OS bawaan dari perangkat dan terdapat beberapa perangkat yang belum berlisensi	Menggunakan Sistem Operasi yang berlisensi dan berbayar untuk mencegah terjadinya kerusakan pada perangkat yang digunakan.	Kebanyakan PD menggunakan OS Windows dan diharapkan seluruh OS yang terpasang pada perangkat Device Berlisensi untuk mencegah Kerusakan
Aplikasi Perkantoran	Mayoritas seluruh PD telah menggunakan aplikasi perkantoran untuk mendukung operasional perkantoran.	Menggunakan aplikasi perkantoran yang resmi agar tidak terjadinya error dan tidak mudah terserang virus bawaan dari aplikasi yang tidak resmi (crack).	Seluruh PD membutuhkan dan menggunakan aplikasi perkantoran, serta disarankan untuk Menggunakan aplikasi perkantoran yang resmi agar tidak terjadinya error dan tidak mudah terserang virus bawaan dari aplikasi yang tidak resmi

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
			(crack).

1.8 KONDISI EKSISTING KEAMANAN SPBE DAN ANALISIS GAP

Terkait kondisi eksisting keamanan SPBE yang ada di Pemerintah Kota Madiun akan dijelaskan pada Subtansi 1.7. Dimulai dari pengertian keamanan SPBE, referensi arsitektur keamanan SPBE, metadata keamanan SPBE, kondisi eksisting keamanan SPBE yang ada di Pemerintah Kota Madiun, dan terkait dengan analisis kesenjangan antara kondisi eksisting (*as is*) dengan kondisi yang ingin dicapai (*to be*).

1.8.1 Pengertian Keamanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, **Keamanan SPBE** mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. **Penjaminan kerahasiaan** dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. **Penjaminan keutuhan** dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. **Penjaminan ketersediaan** dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. **Penjaminan keaslian** dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. **Penjaminan kenirsangkalan (*non repudiation*)** dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

1.8.2 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Berdasarkan Draft Arsitektur SPBE Nasional, Referensi Keamanan SPBE (RAK) pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah. Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian

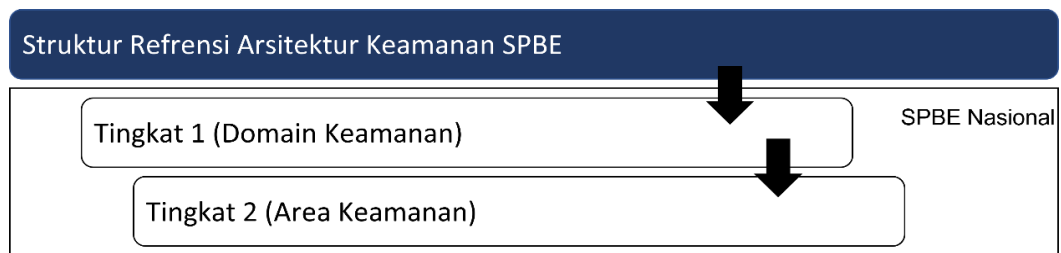
melalui identifikasi program keamanan, pengujian kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Secara tidak langsung, RK akan turut mengawal pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan pada umumnya akan turut melancarkan pelaksanaan pemerataan infrastruktur TIK.

Tabel 1.39 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE.
01.03	Regulasi Lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	Edukasi kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	Identifikasi kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	Penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE
02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

Berdasarkan draf hasil harmonisasi arsitektur SPBE Nasional, di dalamnya memuat beberapa hal yang bertujuan untuk melengkapi rencana penerapan SPBE. Pada Arsitektur SPBE Nasional, terdapat Taksonomi atau pengelompokan Referensi Arsitektur SPBE dimana salah satunya adalah taksonomi Keamanan SPBE.



Gambar 1.35 Struktur Referensi Keamanan SPBE

Struktur dari RAK SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- a. Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan pertimbangan kelaikan keamanan, sebagai RK tingkat 1 (pertama); dan
- b. Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai RAK tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya untuk mendefinisikan elemen didalamnya, akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE.

1.8.3 Metadata Keamanan SPBE

Metadata adalah informasi terstruktur untuk memudahkan mendeskripsikan, menjelaskan, menjadi suatu informasi yang mudah ditemukan kembali. Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE** Metadata keamanan meliputi Keamanan Data dan Informasi, Keamanan Infrastruktur SPBE, Keamanan Aplikasi SPBE yang dituangkan dalam bentuk penerapan keamanan pengelolaan jaringan, penggunaan perangkat keamanan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Kemudian pada aspek Manajemen Keamanan merupakan penerapan standar keamanan yang digunakan, pemberlakuan SOP dan audit keamanan secara keseluruhan. Penjabaran atribut Metadata Keamanan yang dalam penyusunan metadata keamanan SPBE dijabarkan pada **Tabel 1.40 dan Tabel 1.41**.

Tabel 1.40 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Security Device</i>	Nama dari Security Device yang digunakan
3	Deskripsi <i>Security Device</i>	Penjelasan dari Security Device yang digunakan
4	Tipe <i>Security Device</i>	Jenis dari security device yang digunakan (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless intrusion prevention and detection system, Unified Threat Management, atau Network Access Control)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari Security Device yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Status kepemilikan dari Security Device

No	Nama Atribut	Keterangan
		yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
7	Unit Pengelola <i>Security Device</i>	Unit pengelola <i>Security Device</i> yang digunakan
8	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.41 Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Standar Keamanan	Merupakan nama dari Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD
3	Jenis Standar Keamanan	Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD diantaranya: 1. standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan SPBE; 2. standar internasional terkait keamanan informasi; 3. Regulasi lainnya.
4	Deskripsi	Merupakan penjelasan dari standar teknis dan prosedur yang dimasukkan
5	Tanggal Mulai Penerapan	Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya
6	Tanggal Akhir Penerapan	Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya
7	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

1.8.4 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, seluruh instansi pemerintah wajib Keamanan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik yang dimana telah dijelaskan bahwa faktor keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*Non Repudiation*) terkait dengan data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Secara umum Pemerintah Kota Madiun **telah menerapkan menerapkan secara keseluruhan** terkait standar keamanan yang sesuai dengan standar keamanan baik standar nasional maupun internasional. Dari segi keamanan fisik, Pemerintah Kota Madiun telah menerapkan adanya penggunaan *firewall* untuk keamanan jaringan dan Server, perangkat keamanan pendukung dan Prosedur/SOP keamanan serta dilengkapi dengan implementasi CCTV di setiap SKPD sebagai bentuk sarana pendukung keamanan.

Dari segi Tata Kelola Keamanan, Pemerintah Kota Madiun menggunakan **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi**. Hal ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan implementasi keamanan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengampu utama terkait dengan Keamanan SPBE. Beberapa bentuk kegiatan terkait dengan keamanan yang dapat dilakukan oleh Kota Madiun pada tahap awal dalam melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan **Standar ISO 27001, Indeks KAMI, Manajemen Risiko, inventarisir atau evaluasi SOP Keamanan** dan Beberapa penerapan keamanan lainnya.

Penerapan Audit yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun yaitu telah melakukan Audit dengan Pendampingan Tenaga Ahli terkait penerapan Standar ISO 27001 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi sejak tahun 2020 dan telah dilakukan pengecekan Kondisi desain keamanan fisik dan *logic* serta telah dilakukan penerapan Indeks KAMI pada tahun 2022 sebagai bentuk audit internal terkait penerapan keamanan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Secara detail terkait dengan usulan Keamanan SPBE akan dibahas pada **Bab VI Arsitektur Keamanan SPBE Kota Madiun**.

1.8.5 Keamanan Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang mengatur dan memastikan terselenggaranya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE. Sedangkan Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.

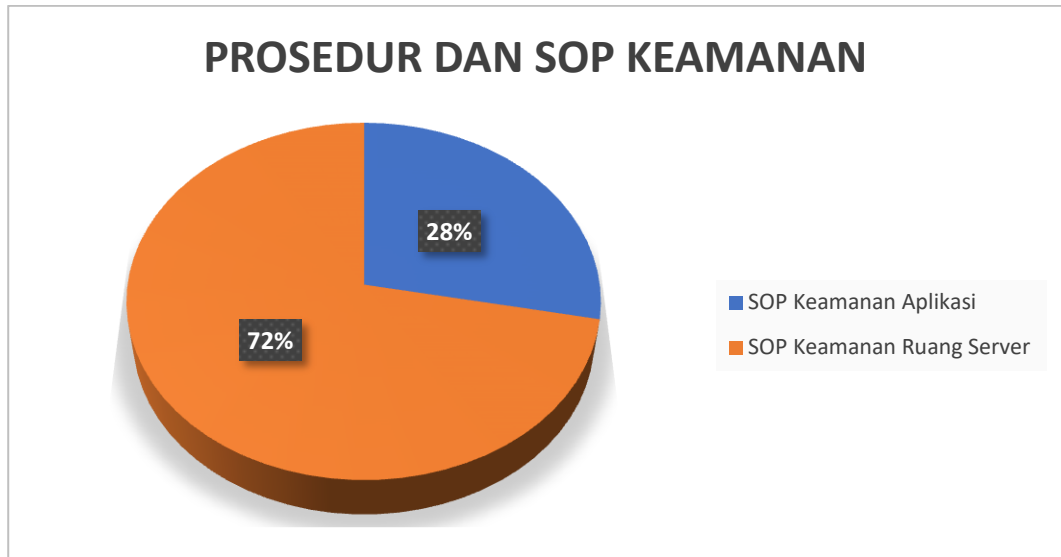
1.8.5.1 Standar Keamanan Informasi

Berdasarkan dengan Kondisi Eksisting terkait dengan penerapan Standar Keamanan Informasi yang diterapkan Pemerintah Kota Madiun saat ini yaitu telah menerapkan Standar ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Penerapan Standar ISO 27001 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sejak tahun 2020 hingga saat ini serta telah dilakukan audit internal dan eksternal.

1.8.5.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Informasi

Pemerintah Kota Madiun terkait dengan Penerapan SOP Keamanan Informasi yang terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan data yang didapatkan dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Tim. Pemerintah Kota Madiun telah menerapkan SOP Keamanan Informasi pada Ruang server ataupun pada seluruh Operasional yang ada di masing-masing Server.

Berikut merupakan SOP keamanan informasi dan detail Penerapan Keamanan SPBE yang akan disajikan dalam bentuk diagram pada **Gambar 1.36**.



Gambar 1.36 SOP Keamanan Informasi

Berdasarkan Gambar 1.36 dengan Kondisi Eksisting terkait Penerapan SOP Keamanan Informasi yang ada di Pemerintah Kota Madiun, telah dijelaskan bahwasanya terkait penerapan SOP Keamanan Informasi yang telah diterapkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yaitu Persentase penerapan SOP Keamanan Aplikasi dengan persentase sebesar 28% (12 SOP) dan SOP Keamanan Ruang Server dengan persentase sebesar 72% (41 SOP). Berikut merupakan Detail Penerapan SOP Keamanan Informasi yang ditampilkan pada **Tabel 1.42 Dan Tabel 1.43.**

Tabel 1.42 SOP Keamanan Aplikasi

SOP KEAMANAN APLIKASI			
No	Nama SOP	No	Nama SOP
1	SOP Analisis Aplikasi Baru	9	SOP Back Up Database dan Sistem Informasi
2	SOP Pemenuhan Permintaan Akses	10	SOP Desain Aplikasi
3	SOP Pemenuhan Permintaan Layanan	11	SOP Implementasi Aplikasi
4	SOP Penanganan Insiden	12	SOP Imigrasi Aplikasi
5	SOP Penanganan Permasalahan	13	SOP Pemantauan Aplikasi
6	SOP Pendampingan Aplikasi	14	SOP Pemberhentian Aplikasi
7	SOP Pengembangan Aplikasi	15	SOP Perawatan Infrastruktur TI
8	SOP Perencanaan Aplikasi	16	SOP Perbaikan Aplikasi

Tabel 1.43 SOP Keamanan Ruang Server

SOP KEAMANAN RUANG SERVER			
No	Nama SOP	No	Nama SOP
1	SOP Akses ke Ruang Data Center	22	SOP Pengelolaan Password
2	SOP Audit Internal	23	SOP Pengelolaan Perangkat yang Hilang
3	SOP Backup dan Restore	24	SOP Pengelolaan Perubahan
4	SOP Keamanan Infrastruktur TIK	25	SOP Pengendalian Informasi Yang Terdokumentasi
5	SOP Keamanan kabel	26	SOP Penghapusan Hak Akses
6	SOP Klasifikasi Informasi	27	SOP Penilaian dan Penanganan Risiko
7	SOP Keamanan Server	28	SOP Penilaian Kejadian Keamanan Informasi
8	SOP Keamanan Jaringan	29	SOP Penilaian Kerentanan Teknis
9	SOP Manajemen Kapasitas	30	SOP Penilaian Uji Tuntas Pemasok
10	SOP Media yang Dapat Dilepas (removable media)	31	SOP Penyaringan Pegawai
11	SOP Membawa aset keluar kantor	32	SOP Perawatan Peralatan TI
12	SOP Pelabelan Informasi	33	SOP Permintaan Hak Akses
13	SOP Pelatihan dan Pengembangan SDM	34	SOP Persyaratan Hukum, Peraturan dan Kontrak
14	SOP Pembuangan Media	35	SOP Pertukaran Data dan Informasi
15	SOP Pemeliharaan Server	36	SOP Tanggap Insiden Kelanjutan Bisnis
16	SOP Pemisahan Lingkungan Pengembangan dan Pengujian	37	SOP Tinjauan Manajemen
17	SOP Pelaksanaan Keamanan Operasi	38	SOP Transfer Media Fisik
18	SOP Penanganan Aset	39	SOP Untuk Bekerja Di Area Yang Aman
19	SOP Penanganan Insiden	40	SOP Perawatan Genset
20	SOP Pengelolaan Akses Server	41	SOP Pemadaman Listrik
21	SOP Pengelolaan Hak Akses		

1.8.6 Keamanan Teknis

Berdasarkan dengan pengumpulan data hasil survei terkait Penerapan Keamanan Teknis yang ada di Pemerintah Kota Madiun, saat ini telah menerapkan Keamanan Teknis pada beberapa Aspek Keamanan, diantaranya dengan adanya perangkat keamanan pendukung yaitu CCTV, Alat dan *alarm* Pemadam *Finger Lock*, *Firewall*, *Fingerprint*, Sensor Pintu/*Access Control*. Berikut merupakan keamanan Teknis yang diterapkan pada Pemerintah Kota Madiun yang ditampilkan pada **Tabel 1.44**.

Tabel 1.44 Eksisting Perangkat Keras Pendukung Keamanan Teknis

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	CCTV	CCTV	CCTV	SENDIRI	BAPPELITBA NGDA
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	CCTV (14)	Digunakan untuk pengawasan dan keamanan ruangan	Hardware	Internal PD	BPKAD
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	CCTV	CCTV untuk area kantor	-	Internal OPD	Internal OPD
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Firewall	Terpusat Dikominfo	Terpusat Dikominfo	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	CCTV (15)	Monitoring ruangan dan area kantor	Hardware	Internal PD	DPUPR
20	Dinas Pendidikan	CCTV	Hikvision	Hardware	Internal OPD	Dispendik
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	CCTV (8)	Digunakan untuk pengawasan ruangan dan keamanan	Hardware	Internal OPD	DKPP
22	Dinas Lingkungan Hidup	CCTV	-	-	-	Internal PD

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kunci Pintu Sidik Jari	Kunci Pintu Menggunakan Sidik Jari	Sidik Jari	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
		Alarm Kebakaran	Alat untuk mendeteksi kebakaran pada ruang pusat data	alarm	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun
		Alat Pemadam Api Ringan	Alat Pemadam Api Ringan yang digunakan untuk memadamkan api kebakaran di ruang Server	Pemadam Api	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
		AC	Pendingin Ruangan di ruang Server untuk mendinginkan server pusat data	pendingin server	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
		CCTV	kamera pemantau untuk memonitoring aktivitas di ruang server	kamera pemantau	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
		Genset	Cadangan pembangkit listrik untuk menjaga stabilitas pasokan listrik	cadangan pasokan listrik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DigiCert Inc	-	SSL	US	www.digicert.com
		CCTV	Perangkat keras	Hikvision	Internal PD	Internal PD
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Smart Door Lock	Gagang pintu dengan keamanan RFID dan Fingerprint atau Passcode	ARBIT - Smart Home WiFi Door Lock Without Handle	Pemilik	RSUD Kota Madiun
32	Kecamatan Manguharjo	CCTV (6)	Pengawasan Ruangan	Keamanan	Internal OPD	Kecamatan Manguharjo

1.8.7 Audit Keamanan SPBE

Penerapan Audit yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun yaitu telah melakukan Audit dengan Pendampingan Tenaga Ahli terkait penerapan Standar ISO 27001 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi sejak tahun 2020 dan telah dilakukan pengecekan Kondisi desain keamanan fisik dan logic serta telah dilakukan penerapan Indeks KAMI pada tahun 2022 sebagai bentuk audit internal terkait penerapan keamanan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

1.8.8 Permasalahan Keamanan SPBE

Permasalahan Keamanan SPBE di Pemerintah Kota Madiun yang didapatkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan terkait kondisi eksisting keamanan pada Pemerintah Kota Madiun terdapat beberapa permasalahan keamanan SPBE yang didapatkan berdasarkan dengan hasil *surveillance* ISO 27001(Audit Internal). Berikut merupakan beberapa temuan permasalahan SPBE yang ditampilkan pada **Tabel 1.45**.

Tabel 1.45 Permasalahan Keamanan SPBE

Permasalahan Keamanan			
No	Temuan Permasalahan	Rencana Tindakan Korektif	Detail Tindakan Korektif
1	Masih adanya pegawai yang menempel password di layar monitor PC kerja	Penyebab	Kurangnya tingkat kesadaran pegawai terkait dengan keamanan informasi password
		Koreksi	Membuat poster awareness terkait dengan keamanan informasi dalam pengelolaan password
		Tindakan Korektif	Melakukan sosialisasi awareness dengan mencetak poster terkait dengan keamanan informasi dalam pengelolaan password dan ditaruh di tempat yang sering dijangkau oleh pegawai
		Verifikasi Efektif	Memeriksa layar monitor dari masing-masing pegawai di seluruh diskominfo kota

Permasalahan Keamanan			
No	Temuan Permasalahan	Rencana Tindakan Korektif	Detail Tindakan Korektif
			madiun
2	Ruang pusat data yang kurang tertutup rapat setelah digunakan	Penyebab	Masih kurangnya penerapan prosedur terkait akses ke ruang data center dan kebijakan terkait akses pusat data
		Koreksi	Sosialisasi adanya kebijakan dan prosedur yang mengatur akses ruang pusat data
		Tindakan Korektif	Awareness terkait prosedur dan kebijakan disosialisasikan dengan pihak-pihak yang memiliki akses melalui rapat internal dengan TIM SMKI yang bersangkutan
		Verifikasi Efektif	Selalu memeriksa ruangan server setelah diakses atau digunakan
3	Kartu perawatan genset tidak tertulis secara rutin	Penyebab	Proses pengisian perawatan kartu genset sebenarnya sudah ada prosedur namun seringkali tidak dijalankan secara baik, serta proses dokumentasi belum secara optimal dilakukan
		Koreksi	Segera dibuatkan proses/prosedur perawatan genset
		Tindakan Korektif	Proses perawatan genset harus sesuai dengan proses/prosedur yang berlaku dan dilengkapi dengan pengisian kartu perawatan genset dan laporan perawatan genset
		Verifikasi Efektif	Memeriksa kartu perawatan genset dan membuat laporan perawatan genset sesuai

Permasalahan Keamanan			
No	Temuan Permasalahan	Rencana Tindakan Korektif	Detail Tindakan Korektif
			dengan prosedur dan kebijakan yang telah dibuat
4	Daftar buku tamu di ruang server yang tidak terisi secara rutin	Penyebab	Proses dokumentasi terkait dengan pegawai dan pihak ketiga (tamu) yang mengakses ruang pusat data belum secara optimal dilakukan.
		Koreksi	Dilakukan Pengisian buku tamu
		Tindakan Korektif	Melakukan pendokumentasian terkait dengan buku tamu yang digunakan untuk mengelola pegawai dan pihak ketiga yang akan dan telah mengakses ruang pusat data untuk meningkatkan tingkat keamanan terhadap ruang pusat data
		Verifikasi Efektif	Memeriksa buku tamu secara berkala dan dilaporkan ke Koordinator Manajemen Keamanan Fisik dan Sistem Informasi
5	Perlunya peningkatan awareness terkait clear desk dan clear screen	Penyebab	Belum adanya kesadaran pegawai terkait dengan pentingnya mematikan PC dan merapikan meja kerja setelah digunakan, prosedur dan kebijakan sudah dibuat tapi belum dijalankan secara optimal
		Koreksi	Sosialisasi terkait dengan proses prosedur dan kebijakan mematikan PC dan merapikan meja kerja setelah digunakan untuk bekerja

Permasalahan Keamanan			
No	Temuan Permasalahan	Rencana Tindakan Korektif	Detail Tindakan Korektif
		Tindakan Korektif	Awareness terkait prosedur dan kebijakan mematikan PC dan merapikan meja kerja disosialisasikan video banner dan penempelan stiker pada kubikel kerja masing-masing pegawai di Diskominfo Kota Madiun,
		Verifikasi Efektif	Melakukan inspeksi atau pengecekan secara berkala terkait dengan implementasi dari prosedur dan kebijakan mematikan PC dan merapikan meja kerja
6	Antivirus atau utility dari windows perlu diperbarui	Penyebab	Kurangnya pemahaman pegawai terkait dengan keamanan informasi antivirus atau utility dari windows
		Koreksi	Selalu memeriksa versi dari antivirus atau utility dari windows agar sesuai standar keamanan informasi
		Tindakan Korektif	Selalu melakukan <i>update</i> berkala antivirus atau utility windows dari masing-masing PC pegawai
		Verifikasi Efektif	Melakukan pengecekan berkala terkait dengan <i>update</i> antivirus atau utility windows

1.8.9 Analisis Gap

Terdapat beberapa permasalahan dan usulan yang terdapat pada Pemerintah Kota Madiun dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas Arsitektur Keamanan SPBE yang ada. Maka dari itu diperlukan Analisis GAP untuk memenuhi proses perbaikan dan peningkatan kualitas keamanan yang semuanya dilakukan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan tertulis pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan

Arsitektur SPBE Nasional. Permasalahan dan usulan yang dilakukan untuk perbaikan Keamanan yang ada dapat dilihat pada **Tabel 1.46**.

Tabel 1.46 Analisis GAP Keamanan SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	GAP Analisis
Tata kelola dan Manajemen Keamanan	Telah Menerapkan keamanan Tata Kelola dan Manajemen Keamanan	Melakukan manajemen keamanan mengacu pada BSSN 10/2019 dan BSSN 4/2021	Telah menerapkan tata kelola dan manajemen keamanan
	Telah dilakukan implementasi dan pemahaman pentingnya keamanan	Implementasi keamanan SPBE sesuai dengan standar/framework	Telah diimplementasikan terkait keamanan SPBE dengan Standar ISO 27001 dan Indeks KAMI serta telah dilakukan sosialisasi dan pemahaman pentingnya keamanan SPBE
Audit Keamanan	Telah dilakukannya audit keamanan secara berkala baik secara internal maupun eksternal Pada dinas komunikasi dan informatika melalui penerapan ISO 27001	Audit keamanan dilakukan secara rutin dalam 2 tahun sekali	Telah dilakukannya audit keamanan secara berkala melalui penerapan ISO 27001
	Masih terdapat beberapa permasalahan keamanan yang ditemukan	Meminimalisir terjadinya permasalahan keamanan dengan implementasi audit keamanan	Masih terdapat permasalahan keamanan yang terjadi dan diharapkan untuk meminimalisir terjadinya masalah yang ditemukan dengan rutin melakukan audit keamanan

1.9 KONDISI EKSISTING TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPBE DAN ANALISIS GAP

Pada Subtansi ini akan membahas terkait kondisi Tata Kelola dan Manajemen SPBE Pemerintah Kota Madiun saat ini dan hasil analisis kesenjangan terhadap kondisi idealnya. Hasil

analisis tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk menemukan strategi pembangunan tata Kelola dan manajemen SPBE yang tepat selama lima tahun mendatang.

1.9.1 Pengertian Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menyatakan bahwa **Tata Kelola SPBE** adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, diperlukan perbaikan Tata Kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di Pemerintah Daerah, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE.

Sedangkan **Manajemen SPBE** adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Penerapan manajemen SPBE pada Pemerintahan Daerah dilaksanakan antara lain: 1) manajemen risiko; 2) manajemen keamanan informasi; 3) manajemen data; 4) manajemen aset TIK; 5) manajemen sumber daya manusia 6). manajemen pengetahuan; 7) manajemen perubahan; dan 8) manajemen layanan SPBE.

Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.

Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan

terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE untuk memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Pengoperasian Layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Pengelolaan Aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

1.9.2 **Kondisi Eksisting Tata Kelola SPBE**

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kondisi tata kelola SPBE pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun.

1.9.2.1 **Kebijakan SPBE**

Sesuai dengan **Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik**, pada Domain Kebijakan Internal SPBE, terdapat 10 (sepuluh) Indikator tentang Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. Penjabaran hasil penilaian indikator dan kebijakan internal tersebut yang telah ada pada Pemerintah Kota Madiun dijabarkan pada **Tabel 1.47**.

Tabel 1.47 Hasil Penilaian Indikator dan Kebijakan Internal Eksisting

No	Indikator	Kebijakan Internal Eksisting
1	Arsitektur SPBE	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kedua Pasal 6
2	Peta Rencana SPBE	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Ketiga Pasal 7

No	Indikator	Kebijakan Internal Eksisting
3	Manajemen Data	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Keenam Pasal 10 - 12
4	Pembangunan Aplikasi SPBE	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kedelapan Pasal 23 dan 24.
5	Layanan Pusat Data	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Paragraf 2 Pasal 14 - 17
6	Layanan Jaringan Intra	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Paragraf 3 Pasal 18 - 21
7	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Paragraf 4 Pasal 22
8	Manajemen Keamanan Informasi	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kesembilan Pasal 25 dan 26.
9	Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bab VI
10	Tim Koordinasi SPBE	Keputusan Walikota Madiun Nomor : 180.45-401.021/129/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

Dari **Tabel 1.47** dapat diperoleh bahwa seluruh indikator Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang telah terpenuhi pada Pemerintah Kota Madiun. Terlihat bahwa indikator 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) tertuang dalam peraturan kebijakan yang sama yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

1.9.3 Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan **Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, **Pemantauan SPBE** adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Sedangkan **Evaluasi SPBE** adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

Berdasarkan hasil survei, saat ini mayoritas Perangkat Daerah di Kota Madiun belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE. Dari 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah terdapat **6 (enam) Perangkat Daerah** yang menyebutkan bahwa telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE diantaranya sebagai berikut:

- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah menyebutkan telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE setiap satu tahun sekali, namun tidak disebutkan bentuk kegiatan yang dilakukan;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyebutkan telah melaksanakan evaluasi secara rutin, yaitu setiap tahunnya terkait Layanan Kepegawaian dan Layanan Pengembangan SDM SPBE;
- c. Dinas Perhubungan menyebutkan bahwa telah melaksanakan rapat evaluasi pelayanan, salah satunya mencakup tentang aplikasi SPBE setiap 6 (enam) bulan sekali;
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika menyebutkan telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE setiap satu tahun sekali, namun tidak disebutkan bentuk kegiatan yang dilakukan; dan
- e. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun menyebutkan telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait aset dan aplikasi SPBE setiap minggunya.

1.9.2.3 **Audit TIK**

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Audit TIK mencakup pemeriksaan hal pokok teknis diantaranya:

1. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
2. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi; dan
3. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan, serta aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Menurut **Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018** tentang SPBE, pada Pelaksanaan Audit TIK dibagi kedalam tiga aspek yaitu **audit aplikasi SPBE**, **audit infrastruktur SPBE**, dan **audit Keamanan SPBE**.

a) Audit Aplikasi

Audit Aplikasi SPBE dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil survei kepada 35 (tiga puluh) Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun mayoritas Perangkat Daerah belum melaksanakan audit aplikasi, hanya terdapat 2 (dua) Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa telah melaksanakan audit aplikasi SPBE, yaitu **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** yang melaksanakan audit aplikasi setiap 3 (tiga) bulan sekali, namun tidak disebutkan bentuk kegiatannya seperti apa. **Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** juga menyebutkan telah melaksanakan audit TIK yaitu dengan pemeriksaan pengembangan aplikasi

secara rutin, namun jumlah frekuensi kegiatannya tidak disebutkan.

b) Audit Infrastruktur SPBE

Audit Infrastruktur SPBE merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil survei kepada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun belum ada Perangkat Daerah yang melaksanakan audit infrastruktur SPBE.

c) Audit Keamanan SPBE

Audit Keamanan SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap keamanan SPBE yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil survei kepada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun belum ada Perangkat Daerah yang melaksanakan audit keamanan SPBE.

1.9.3 Kondisi Eksisting Manajemen SPBE

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kondisi saat ini dari manajemen SPBE pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah yang ada di Kota Madiun.

1.9.3.1 Manajemen Risiko SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjelaskan bahwa Manajemen risiko merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap adanya risiko dalam SPBE.

Penjelasan terkait manajemen risiko juga dijelaskan dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait

pengelolaan Risiko SPBE. Berdasarkan pengumpulan data hasil survei kepada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Kota Madiun, terdapat **7 (tujuh) Perangkat Daerah** menyebutkan bahwa telah melaksanakan manajemen risiko, diantaranya **Bagian Organisasi** melaksanakan manajemen risiko pada Kegiatan Penilaian SAKIP masing-masing Perangkat Daerah, **Bagian Hukum** telah melaksanakan manajemen risiko pada Kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan, **Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** melaksanakan identifikasi risiko, prioritas risiko, dampak, penyebab dan rencana tindak lanjut (SPIP Terintegrasi BPKP.co.id), **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** menyebutkan telah membuat SOP untuk setiap layanan seperti Penebangan Pohon, Gangguan Lampu, dan Standar Pelayanan Pemakaman untuk menghindari adanya risiko, **Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun** menyebutkan sudah melakukan manajemen risiko pada tahun 2021 bersama Bapelitbangda dan kegiatan proses akreditasi RSUD Kota Madiun. **Puskesmas Manguharjo** melaksanakan manajemen risiko dengan membuat list kemungkinan risiko di setiap bidang, **Puskesmas Sukosari** telah melaksanakan Manajemen Risiko tapi masih dalam tahap awal.

Seluruh Perangkat Daerah yang menyatakan telah melaksanakan manajemen risiko belum ada yang telah mengacu pada standar manajemen risiko dan dari hasil tersebut didapatkan bahwa mayoritas Perangkat Daerah di Kota Madiun belum melaksanakan manajemen risiko, dan Perangkat Daerah yang telah melaksanakan manajemen risiko belum sesuai dengan standar dan prosedur terkait manajemen risiko.

1.9.3.2 Manajemen Keamanan Informasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, manajemen keamanan SPBE harus dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019** menjelaskan bahwa **keamanan Informasi** merupakan terjaganya kerahasiaan,

keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi. Untuk pelaksanaan manajemen keamanan informasi dapat mengacu pada framework **ISO 27001**. **ISO 27001** sendiri mendefinisikan sistem manajemen keamanan informasi sebagai bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan, berdasarkan pendekatan risiko bisnis, untuk menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. Berdasarkan pengumpulan data hasil survei kepada 35 Perangkat Daerah di Kota Madiun, terdapat **3 (tiga) Perangkat Daerah** yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen keamanan informasi, diantaranya **Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** dengan penyampain informasi diidentifikasi berdasarkan hak akses (ada data yang dipublish dan ada yang dikecualikan) dan permintaan melalui satu pintu harus izin ke bagian perencanaan, **Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun** dengan melakukan backup data secara berkala, dan **Puskesmas Manguharjo** dengan hak akses satu pintu dengan Dinas Kesehatan. Ketiga Perangkat Daerah tersebut menyatakan bahwa belum ada standar atau *framework* yang telah dijadikan sebagai acuan.

1.9.3.3 Manajemen Data SPBE

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018**, manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019** tentang Satu Data Indonesia juga mengatur terkait penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Pada Perpres tersebut disebutkan bahwa tata kelola data pemerintahan diselenggarakan melalui kebijakan Satu Data Indonesia dimana pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, kode referensi dan

data induk diperlukan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Berdasarkan pengumpulan data hasil survei kepada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Kota Madiun, terdapat **3 (tiga) Perangkat Daerah** yang menyatakan bahwa telah melaksanakan manajemen data, diantaranya **Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun** menyebutkan bahwa telah menganalisa performa server penyimpanan data dan melakukan peremajaan jika diperlukan, **Puskesmas Manguharjo** telah menerapkan Hak akses satu pintu dengan dinas kesehatan, **Puskesmas Sukosari** telah menggunakan Sistem Informasi Puskesmas sebagai penyimpanan data utama. Tiga Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa telah melaksanakan manajemen data belum mengacu pada standar terkait manajemen data.

Dari hasil tersebut didapatkan bahwa mayoritas Perangkat Daerah di Kota Madiun belum melaksanakan manajemen data dan PD yang telah melaksanakan manajemen data belum sesuai dengan standar dan prosedur terkait manajemen data. Pemerintah Kota Madiun juga belum melaksanakan Satu Data Kota Madiun sebagai pusat data.

1.9.3.4 Manajemen Aset TIK

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018**, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE yang telah diatur. *Framework* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan manajemen aset TIK adalah **ITIL 4 (empat)** pada *practice IT Asset Management*. Menurut ITIL tujuan dari manajemen aset TI adalah untuk merencanakan dan mengelola siklus hidup penuh semua aset TI, untuk membantu organisasi. Dimana ruang lingkup manajemen aset TI biasanya mencakup semua perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, layanan *cloud*, dan perangkat klien. Dalam beberapa kasus, ini juga dapat mencakup aset non-TI seperti bangunan atau informasi yang

memiliki nilai finansial dan diperlukan untuk memberikan layanan TI

Berdasarkan pengumpulan data hasil survei kepada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Kota Madiun, terdapat **5 (lima) Perangkat Daerah** yang menyebutkan jika telah melaksanakan manajemen aset TIK, diantaranya **Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, Puskesmas Manguharjo, dan Puskesmas Sukosari**. 5 (lima) Perangkat Daerah tersebut menyebutkan jika bentuk kegiatan yang dilakukan terkait manajemen aset yaitu dengan melaksanakan pencatatan dan pelaporan aset secara berkala, namun belum ada standar atau *framework* yang menjadi acuan dalam manajemen aset tersebut.

1.9.3.5 Manajemen Sumber Daya Manusia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Untuk *framework* yang dapat digunakan pada manajemen sumber daya manusia adalah **ITIL 4 (empat) pada practices Workforce & Talent Management**. Menurut ITIL tujuan dari manajemen tenaga kerja dan talenta adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang tepat dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dan dalam peran yang benar untuk mendukung tujuan bisnisnya. Manajemen ini mencakup serangkaian aktivitas luas yang berfokus pada keterlibatan dengan karyawan dan sumber daya orang organisasi, termasuk perencanaan, rekrutmen, orientasi, pembelajaran dan pengembangan, pengukuran kinerja, dan perencanaan suksesi.

Standar/*Framework* lain yang dapat dijadikan sebagai acuan manajemen sumber daya manusia adalah Peta Okupasi Nasional sesuai dengan area Fungsi TIK BNSP. **Peta Okupasi Nasional** menjelaskan pemetaan profil kebutuhan serta ketersediaan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi Indonesia dalam berbagai okupasi dan fungsi kunci, Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di bidang teknologi

informasi dan komunikasi yang mengacu pada KKNI, serta penyelenggaraan aktivitas sertifikasi kompetensi yang berbasis pada skema okupasi nasional maupun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengumpulan data hasil survei kepada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Kota Madiun, terdapat **7 (tujuh) Perangkat Daerah** yang menyebutkan jika telah melaksanakan manajemen sumber daya manusia, diantaranya **Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, Puskesmas Manguharjo, dan Puskesmas Sukosari**. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sumber daya manusia, terutama di bidang TIK adalah dengan telah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) TIK dan aplikasi untuk mengelola data SDM TIK maupun SDM di bidang lainnya. Dalam pelaksanaan manajemen SDM tersebut belum mengacu pada standar atau framework yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.

1.9.3.6 Manajemen Pengetahuan

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018**, manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Salah satu *framework* yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan adalah **ITIL 4 (empat)** dengan *practice Knowledge Management*. Menurut ITIL tujuan dari manajemen pengetahuan adalah untuk memelihara dan meningkatkan penggunaan informasi yang efektif, efisien, dan nyaman dan pengetahuan di seluruh organisasi. Manajemen pengetahuan memberikan pendekatan terstruktur untuk mendefinisikan, membangun, menggunakan kembali, dan berbagi pengetahuan (yaitu informasi, keterampilan, praktik, solusi, dan masalah) dalam berbagai bentuk. Berdasarkan pengumpulan data hasil survei kepada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Kota Madiun,

terdapat **5 (lima) Perangkat Daerah** yang menyebutkan jika telah melaksanakan manajemen pengetahuan, diantaranya **Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika,** dan **Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.** Bentuk kegiatan dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan yaitu dengan mengikuti seminar, *workshop* dan juga bimtek berdasarkan kompetensi masing-masing.

Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah memiliki *website* edu (<https://edu.madiunkota.go.id>) yang berguna untuk informasi pembinaan dan pelatihan untuk pegawai pemerintahan di Kota Madiun.

1.9.3.7 Manajemen Perubahan

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018**, manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Standar atau *framework* yang dapat digunakan untuk pelaksanaan manajemen perubahan adalah **ITIL 4 (empat)** pada ***Practice Change Control***. Pada ITIL disebutkan bahwa tujuan dari perubahan kontrol adalah memaksimalkan jumlah layanan dan perubahan produk yang berhasil dengan memastikan bahwa risiko telah dinilai dengan benar, proses otorisasi perubahan, dan mengelola perubahan jadwal. Perubahan adalah penambahan, modifikasi, atau penghapusan apa pun yang dapat berdampak langsung atau tidak langsung pada layanan. Ruang lingkup perubahan kontrol ditentukan oleh masing-masing organisasi. Ini biasanya akan mencakup semua infrastruktur TI, aplikasi, dokumentasi, proses, hubungan pemasok, dan hal lain yang mungkin secara langsung atau tidak langsung berdampak pada produk atau layanan.

Berdasarkan pengumpulan data hasil survei kepada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Kota Madiun, terdapat **3 (tiga) Perangkat Daerah** yang menyebutkan jika telah melaksanakan manajemen perubahan, diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, Puskesmas Manguharjo, dan Puskesmas Sukosari.

Bentuk kegiatan dalam manajemen perubahan yang telah dilakukan adalah dengan mencatat setiap perubahan yang ada, namun ketiga Perangkat Daerah tersebut belum mengacu pada standar atau *framework* terkait manajemen perubahan.

1.9.3.8 Manajemen Layanan SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018**, manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Untuk pelaksanaan manajemen layanan, salah satu *framework* yang dapat digunakan sebagai acuan adalah **ITIL 4** pada *practices Service desk, Incident management, Problem management, Monitoring & Event management*, serta *Service request management*.

Layanan *Service desk* menyediakan jalur yang jelas bagi pengguna untuk melaporkan masalah, dan permintaan, dan memintanya untuk diakui, diklasifikasikan, dimiliki, dan ditindaklanjuti. Tujuan manajemen insiden adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari kejadian dengan memulihkan operasi layanan normal secepat mungkin, dimana kejadian adalah gangguan yang tidak direncanakan terhadap layanan atau penurunan kualitas layanan. *Problem management* adalah untuk mengurangi kemungkinan dan dampak insiden dengan mengidentifikasi penyebab insiden aktual dan potensial, dan mengelola solusi dan kesalahan yang diketahui. *Problem* di sini berarti penyebab, atau penyebab potensial, dari satu atau lebih insiden. *Monitoring & Event management* mengidentifikasi dan memprioritaskan infrastruktur, layanan, proses bisnis, dan peristiwa keamanan informasi, dan menetapkan respons yang tepat terhadap peristiwa tersebut, termasuk menanggapi kondisi yang dapat menyebabkan potensi kesalahan atau insiden. Sedangkan untuk manajemen permintaan layanan bertujuan untuk mendukung kualitas yang disepakati layanan dengan menangani semua permintaan layanan yang *pre-defined* dan *user-initiated* dengan cara yang efektif dan ramah pengguna.

Berdasarkan pengumpulan data hasil survei kepada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Kota Madiun,

terdapat **5 (lima) Perangkat Daerah** yang menyebutkan jika telah melaksanakan manajemen layanan yaitu diantaranya, **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** yang menyebutkan jika Manajemen Layanan Kepegawaian indeks SPBE sudah di level 4, **Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** yang menyebutkan jika seluruh layanan sudah dipaparkan dalam dokumen standar pelayanan, **Dinas Komunikasi dan Informatika** menyebutkan jika sudah memiliki servicedesk untuk pelaporan permasalahan terkait IT, pengaduan masyarakat dan hukum, **Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun** dengan melakukan monitoring performa aplikasi layanan seperti SIM-RS dan Antrian *Online*, dan melakukan penambahan fitur jika diperlukan, dan **Puskesmas Sukosari** menyebutkan jika sudah menerapkan layanan secara *online*.

Kelima Perangkat Daerah tersebut menyebutkan jika belum mengacu pada standar atau *framework* yang berkaitan dengan manajemen layanan. Pemerintah Kota Madiun telah menerapkan pendokumentasian informasi layanan dengan menuangkan dalam bentuk dokumen standar pelayanan untuk masing-masing Perangkat Daerah.

1.9.4 Kondisi Eksisting Rencana dan Anggaran SPBE

Bagian ini akan menjelaskan tentang kondisi eksisting terkait rencana dan anggaran SPBE dari 35 Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Madiun.

1.9.4.1 Kondisi Eksisting Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah masing-masing. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Madiun diatur dalam **Keputusan Walikota Madiun Nomor: 900-401.202/7/2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun**. Penjabaran secara umum terkait tugas dari Tim Anggaran Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA.
- c. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS.
- d. Melakukan verifikasi RKA SKPD.
- e. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD.
- f. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.
- g. Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD.
- h. Menyiapkan surat edaran Walikota Madiun tentang pedoman penyusunan RKA.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran detail jabatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Madiun dapat dilihat pada **Tabel 1.48**.

Tabel 1.48 Daftar Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kota Madiun

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Pembina	Walikota Madiun
2.	Pengarah	Wakil Walikota Madin
3.	Ketua	Sekretaris Daerah
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.	Anggota	a. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum c. Kepala Badan Pendapatan Daerah d. Inspektur e. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah g. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
		Daerh.

Kemudian untuk rincian tugas untuk masing-masing Tim Anggaran Pemerintah Daerah dijabarkan sebagai berikut :

a. Ketua

Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah.

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah.
3. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah.

b. Wakil Ketua

1. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan rumusan kebijakan teknis keuangan dan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Walikota.
3. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan aset daerah.
4. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional keuangan daerah pedoman pelaksanaan APBD.
5. Pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
6. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
7. Pelaksanaan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD selaku PPKD.
8. Pelaksanaan penyusunan anggaran kas.
9. Pelaksanaan penetapan SPD selaku BUD.
10. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

11. Penyaji informasi keuangan daerah.
12. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
13. Pelaksanaan penempatan kas daerah, pengelolaan, dan penatausahaan investasi daerah.
14. Penyiapan keputusan Walikota tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan dan pejabat penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah.
16. Pelaksanaan sistem dan prosedur dan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
17. Pelaksanaan pemberian pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada pengelola barang.
18. Pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota.
19. Pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan serta pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Walikota.
20. Pelaksanaan koordinasi kepada pengelola barang terkait inventarisasi barang milik daerah.
21. Pelaksanaan pencatatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui pengelola barang, serta barang milik daerah yang berada pada pengelola barang.
22. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
23. Pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah.

24. Pelaksanaan penyusunan KUA-PPAS dan KUPA PPASP.
25. Pelaksanaan penyusunan tentang standar biaya umum dan standar biaya khusus.
26. Pelaksanaan penyusunan tentang analisis standar belanja.
27. Pelaksanaan penyusunan Standar Satuan Harga.
28. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

c. Sekretaris

1. Mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusun kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
3. Pelaksanaan koordinasi unsur penunjang urusan pemerintahan perencanaan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan.
4. Pembinaan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan.
5. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan.
6. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim.

d. Anggota

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

2. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang umum, organisasi, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

3. Badan Pendapatan Daerah

- a. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi Daerah di Bidang Penghimpunan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perumusan kebijakan teknis penghimpunan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Walikota.
- c. Pengembalian kebijakan dalam Bidang Pengelolaan Pajak Daerah serta Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pajak Daerah serta Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan.
- e. Perumusan laporan pertanggungjawaban potensi, target dan realisasi Pajak Daerah.
- f. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah.
- g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

4. Inspektorat

- a. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan.
- b. Penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah

- a. Melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, mempublikasikan, mendokumentasikan produk hukum, serta melaksanakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum.
- b. Pelaksanaan penelitian perumusan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

7. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

- a. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, Analisa dan formasi jabatan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja.
- b. Penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana di Bagian Organisasi.
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

1.9.4.2 Ketersediaan Rencana dan Anggaran SPBE

Ketersediaan Rencana Anggaran SPBE dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu a) anggaran pembangunan/pengembangan /pembelian aplikasi dan *software* komersial, b) anggaran pembelian/pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi serta c) anggaran pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan *software* komersial. Untuk detail jumlah anggaran yang ada dapat dilihat pada **Tabel 1.49**.

Tabel 1.49 Ketersediaan Rencana dan Anggaran SPBE
tiap Perangkat Daerah

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Pembangunan/ Pengembangan / Pembelian aplikasi dan <i>software</i> komersial	Pembelian/ Pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi	Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan <i>software</i> komersial	Total Anggaran TIK
1	Bagian Organisasi	0	0	109.875.000	109.875.000
2	Bagian Hukum	0	0	10.648.000	10.648.000
3	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	0	15.070.000	0	15.070.000
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	0	94.305.075	7.370.000	101.675.075
5	Bagian Umum	0	134.243.050	17.810.000	152.053.050
6	Bagian Pemerintahan	0	0	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	7.051.000	7.051.000
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	90.000.000	0	0	90.000.000
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	49.640.000	49.640.000
10	Badan Pendapatan Daerah	264.442.000	110.000.000	0	374.442.000
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	238.650.000	0	238.650.000

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Pembangunan/ Pengembangan / Pembelian aplikasi dan software komersial	Pembelian/ Pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi	Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial	Total Anggaran TIK
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0
13	Inspektorat Daerah	0	390.231.325	22.801.000	413.032.325
14	Sekretariat DPRD	130.000.000	123.200.000	130.916.400	384.116.400
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	140.865.300	140.865.300
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	2.282.455	42.230.000	44.512.455
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	64.452.940	64.505.100	128.958.040
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	55.237.625	54.482.550	109.720.175
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	65.862.500	0	17.774.460	83.636.960
20	Dinas Pendidikan	65.800.000	39.000.000	335.191.415	439.991.415
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	0	20.511.000	20.511.000
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	39.416.025	35.170.000	74.586.025
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.000.000	117.735.795	21.038.999	171.774.794
24	Dinas Perhubungan	0	0	0	0
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000.000	90.259.830	8.983.597.940	9.373.857.770
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	30.000.000	30.000.000
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,	0	20.790.000	11.800.000	32.590.000

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Pembangunan/ Pengembangan / Pembelian aplikasi dan software komersial	Pembelian/ Pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi	Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial	Total Anggaran TIK
	Kepemudaan dan Olah Raga				
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	638.467.900	64.900.000	703.367.900
29	Dinas Perdagangan	150.000.000	0	74.714.000	224.714.000
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	4.965.000	50.000.000	54.965.000
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	276.520.000	0	258.228.350	534.748.350
32	Kecamatan Manguharjo	0	7.397.500	12.918.200	20.315.700
33	Kecamatan Kartoharjo	0	118.164.860	7.336.000	125.500.860
34	Puskesmas Manguharjo	0	48.450.000	48.450.000	96.900.000
35	Puskesmas Sukosari	0	29.548.200	15.032.800	44.581.000

Dari total 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah yang telah disurvei, terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang masih belum memiliki anggaran untuk 3 (tiga) kegiatan pembangunan aplikasi, pengadaan maupun pemeliharaan perangkat keras. Ketiga Perangkat Daerah tersebut adalah Bagian Pemerintahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Dinas Perhubungan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebanyak 9 (sembilan) Perangkat Daerah telah memiliki anggaran untuk kegiatan pembangunan/pengembangan /pembelian aplikasi dan software komersial. Sebanyak 21 (dua puluh satu) Perangkat Daerah telah memiliki anggaran untuk pembelian/pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi. Terakhir sebanyak 28 (dua puluh delapan) Perangkat Daerah telah memiliki anggaran untuk kegiatan pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.

Total anggaran pengadaan aplikasi dan software terbesar dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sebesar Rp.

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan anggaran pengadaan aplikasi dan software terendah dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah). Anggaran pengadaan perangkat keras terbesar dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu sebesar Rp. 638.467.900 (enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Sedangkan anggaran pengadaan perangkat keras terendah dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu sebesar Rp. 4.965.000 (empat juta sembilan ratus enam puluh lima rupiah). Untuk anggaran pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras paling besar dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sebesar Rp. 8.983.597.940 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Sedangkan anggaran pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras paling rendah dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu sebesar Rp. 7.051.000 (tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah). Secara keseluruhan, total anggaran SPBE terbesar dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sebesar Rp. 9.373.857.770 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah). Detail Rincian Anggaran dapat dilihat pada **Hasil analisis terkait ketersediaan anggaran ini silahkan dianalisis memiliki keterkaitan apa dengan domain” yang lain dan untuk pemda seperti apa.**

1.9.5 Analisis GAP

Bagian ini akan membahas tentang kesenjangan antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari tata kelola, manajemen serta rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kota Madiun.

1.9.5.1 Analisis GAP Tata Kelola SPBE

Bagian ini menjelaskan tentang analisis kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari komponen **tata kelola SPBE**. Untuk penjelasan gap tata kelola dari Kota Madiun dapat dilihat pada **Tabel 1.49**.

Tabel 1.49 Analisis GAP Tatakelola SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Kebijakan SPBE			
Arsitektur SPBE	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Arsitektur SPBE, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kedua Pasal 6	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE) serta telah terintegrasi antar pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan internal telah direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Dalam Perbup terkait Arsitektur SPBE Kota Madiun telah dituangkan 6 komponen arsitektur SPBE, yaitu Arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE, namun dalam penyusunan arsitektur SPBE hanya sebagian domain saja sehingga hanya dapat mencapai level 2.
Peta Rencana SPBE	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Peta Rencana SPBE, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Ketiga Pasal 7	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK) dan keselarasan dengan peta rencana SPBE nasional.	Dalam Peta Rencana SPBE Kota Madiun belum menggambarkan secara detail Peta Rencana SPBE yang mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap yaitu peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK.
Manajemen Data	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Manajemen Data, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Keenam Pasal 10 - 12	Kebijakan internal manajemen data di pemerintah daerah untuk mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.	Manajemen Data Pemerintah Kota Madiun tidak menggambarkan adanya serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas data.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Pembangunan Aplikasi SPBE	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Pembangunan Aplikasi SPBE, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kedelapan Pasal 23 dan 24.	Kebijakan internal telah mengatur terkait proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Pemerintah Daerah, serta keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE belum menggambarkan dokumen pelaksanaan penyusunan Aplikasi lengkap dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pemeliharaan yang sesuai dengan SOP
Layanan Pusat Data	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Layanan Pusat Data, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Paragraf 2 Pasal 14 - 17	Kebijakan internal telah mengatur terkait Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/ perangkat daerah di Pemerintah Daerah dan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional.	Belum memiliki pusat data seperti Satu Data Kota Madiun yang dapat digunakan sebagai pusat data yang dapat dilihat secara publik
Layanan Jaringan Intra	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Layanan Jaringan Intra, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Paragraf 3 Pasal 18 - 21	Kebijakan internal telah mengatur terkait Layanan Jaringan Intra Pemerintah untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah dan interkoneksi Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Pemerintah Daerah lain.	Pemerintah Kota Madiun telah mengimplementasikan jaringan intra pemerintah yang disediakan terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika.
Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota	Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah dan keterhubungan dengan Sistem Penghubung	Integrasi terhadap aplikasi masih belum terlihat dilakukan secara menyeluruh

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	Madiun Paragraf 4 Pasal 22	Layanan Pemerintah.	
Manajemen Keamanan Informasi	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Manajemen Keamanan Informasi, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kesembilan Pasal 25 dan 26.	Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi) serta penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah.	Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi pada Pemerintah Kota Madiun belum mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi) serta penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah.
Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bab VI	Kebijakan internal telah mengatur terkait pelaksanaan Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).	Pelaksanaan audit keamanan informasi pada Pemerintah Kota Madiun telah mengacu pada ISO 27001.
Tim Koordinasi SPBE	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Tim Koordinasi SPBE, yaitu Keputusan Walikota Madiun Nomor : 180.45-401.021/129/2021 Tentang Pembentukan Tim	Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah	Belum dijelaskan secara rinci terkait tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Madiun.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan Keputusan Walikota Nomor 180.45/401.021/145/2021 Tahun 2021 tentang Tim Asesor Internal Pemerintah Kota Madiun	di Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal telah direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	
Pemantauan dan Evaluasi			
Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Mayoritas PD belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE. Hanya 6 dari 35 PD yang menyebutkan telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE	Seluruh perangkat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE secara berkala dan mendokumentasikannya dalam bentuk laporan.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE belum terdokumentasikan dengan baik, dan juga belum ada pelaksanaan Audit yang dilaksanakan dengan perencanaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan pedoman Audit SPBE.
Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi SPBE	Mayoritas PD belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE. Hanya 6 dari 35 PD yang menyebutkan telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE	Seluruh perangkat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE secara berkala dan mendokumentasikannya dalam bentuk laporan.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE belum terdokumentasikan dengan baik, dan juga belum ada pelaksanaan Audit yang dilaksanakan dengan perencanaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan pedoman Audit SPBE.
Audit TIK			
Audit Infrastruktur SPBE	Belum ada PD yang telah melaksanakan audit infrastruktur SPBE.	Audit Infrastruktur dilaksanakan dengan perencanaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan pedoman Audit Infrastruktur SPBE.	Belum ada PD yang telah melaksanakan audit keamanan SPBE.
Audit Aplikasi SPBE	Hanya 2 dari 35 PD yang telah	Audit Aplikasi dilaksanakan dengan	Dalam pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	melaksanakan audit aplikasi SPBE, namun belum sesuai dengan Pedoman Audit Aplikasi SPBE	perencanaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan pedoman Audit Aplikasi SPBE.	belum dilaksanakan dengan perencanaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan pedoman Audit Aplikasi SPBE dan belum terdokumentasikan dengan baik.
Audit Keamanan SPBE	Belum ada PD yang telah melaksanakan audit keamanan SPBE.	Audit Keamanan dilaksanakan dengan perencanaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan pedoman Audit Keamanan serta oleh dilakukan SPBE.	Belum ada PD yang telah melaksanakan audit keamanan SPBE.

1.9.5.2 Analisis Gap Manajemen SPBE

Bagian ini menjelaskan terkait analisis kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari manajemen SPBE Pemerintah Kota Madiun. Penjelasan mengenai analisis kesenjangan manajemen SPBE Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada **Tabel 1.50**.

Tabel 1.50 Analisis GAP Manajemen SPBE

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
Manajemen Risiko	Terdapat 7 dari 35 PD yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen risiko, namun dalam pelaksanaan Manajemen risiko belum dilakukan dengan program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Risiko SPBE	Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE. Kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit	Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko belum dilaksanakan secara terencana dan belum mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Risiko SPBE, serta belum terdokumentasikan dengan baik.

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
		kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah.	
Manajemen Keamanan	Terdapat 3 dari 35 PD yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen keamanan, namun dalam pelaksanaan Manajemen keamanan belum dilakukan dengan program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Keamanan TIK.	Pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Risiko SPBE dan dilakukan melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah. Selain itu, pengendalian Keamanan Informasi telah dilakukan <i>review</i> dan evaluasi secara periodik untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi.	Dalam pelaksanaan Manajemen Keamanan belum dilaksanakan secara terencana dan belum mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Keamanan Informasi, serta belum terdokumentasikan dengan baik.
Manajemen Data	Terdapat 3 dari 35 PD yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen data, namun dalam	Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana.	Dalam pelaksanaan Manajemen Data belum dilaksanakan secara terencana dan belum mengacu pada standar atau <i>framework</i>

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	<p>pelaksanaan manajemen data belum dilakukan dengan program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Data.</p>	<p>Manajemen Data telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Data yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data serta dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah.</p>	<p>Manajemen Data, serta belum terdokumentasikan dengan baik.</p>
<p>Manajemen Aset TIK</p>	<p>Terdapat 5 dari 35 PD yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen aset TIK, namun dalam pelaksanaan manajemen aset TIK belum dilakukan dengan</p>	<p>Manajemen Aset TIK diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu</p>	<p>Dalam pelaksanaan Manajemen Aset belum dilaksanakan secara terencana dan belum mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Aset TIK, serta belum terdokumentasikan dengan baik.</p>

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	<p>program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Aset TIK</p>	<p>pada pedoman Manajemen Aset TIK yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/ penggunaan, dan penghapusan aset TIK serta dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja/ perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK. . Selain itu, penerapan Manajemen Aset TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK</p>	
<p>Manajemen Sumber Daya Manusia</p>	<p>Terdapat 7 (tujuh) dari 35 (tiga puluh lima) PD yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen Sumber Daya Manusia, namun dalam pelaksanaan</p>	<p>Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE,</p>	<p>Dalam pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia belum dilaksanakan secara terencana dan belum mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Sumber Daya Manusia, serta</p>

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	<p>manajemen Sumber Daya Manusia belum dilakukan dengan program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Sumber Daya Manusia.</p>	<p>data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE selanjutnya dilakukan peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.</p>	<p>belum terdokumentasikan dengan baik.</p>
Manajemen Pengetahuan	<p>Terdapat 5 (lima) dari 35 (tiga puluh lima) PD yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen pengetahuan, namun dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan belum dilakukan</p>	<p>Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan dan mengacu pada pedoman di Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan</p>	<p>Dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan belum dilaksanakan secara terencana dan belum mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Pengetahuan, serta belum terdokumentasikan dengan baik.</p>

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	<p>dengan program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Pengetahuan.</p>	<p>SPBE. Semua unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPB</p>	
<p>Manajemen Perubahan</p>	<p>Terdapat 3 (tiga) dari 35 (tiga puluh lima) PD yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen perubahan, namun dalam pelaksanaan manajemen perubahan belum dilakukan dengan program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau <i>framework</i></p>	<p>Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan dan dilakukan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah terkait di Pemerintah Daerah sesuai pedoman Manajemen Perubahan. Selain itu, kegiatan</p>	<p>Dalam pelaksanaan Manajemen Perubahan belum dilaksanakan secara terencana dan belum mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Pengetahuan, serta belum terdokumentasikan dengan baik.</p>

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	Manajemen Perubahan.	Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Perubahan SPBE.	
Manajemen Layanan	Terdapat 5 (lima) dari 35 (tiga puluh lima) PD yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen layanan, namun dalam pelaksanaan manajemen layanan belum dilakukan dengan program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Layanan.	Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan dan dilakukan pada seluruh proses Manajemen Layanan SPBE yaitu Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE. Selain itu, Manajemen Layanan SPBE telah diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan, dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan	Dalam pelaksanaan Manajemen Layanan belum dilaksanakan secara terencana dan belum mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Pengetahuan, serta belum terdokumentasikan dengan baik.

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
		Manajemen Layanan SPBE.	

1.9.5.3 Analisis Gap Rencana Anggaran SPBE

Bagian ini menjelaskan terkait analisis kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kota Madiun. Penjelasan mengenai analisis kesenjangan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada **Tabel 1.50**.

Tabel 1.50 Analisis GAP Rencana dan Anggaran SPBE

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
Ketersediaan Tim Anggaran SPBE	Ketersediaan tim anggaran SPBE pada kondisi eksisting Kota Madiun mengacu pada Keputusan Walikota Madiun Nomor: 900-401.202/7/2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun	Terdapat tim anggaran dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mengatur tentang tupoksi serta memberikan pertimbangan terkait implementasi anggaran.	Sudah ada SK atau peraturan yang mengatur tentang pembentukan Tim anggaran Pemerintah Kota Madiun
Anggaran pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial	Pada kondisi eksisting ketersediaan rencana dan anggaran SPBE terdapat 9 (sembilan) PD Pemerintah Madiun yang telah memiliki anggaran untuk pengadaan Aplikasi dan software.	Semua PD memiliki anggaran untuk pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial.	Terdapat 26 (dua puluh enam) PD Kota Madiun yang belum memiliki anggaran untuk pengadaan aplikasi dan software.
Anggaran pembelian/ pengadaan perangkat	Pada kondisi eksisting ketersediaan rencana dan anggaran SPBE	Semua PD memiliki anggaran untuk pembelian/ pengadaan perangkat	Terdapat 14 (empat belas) PD Kota Madiun yang belum

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
keras teknologi informasi dan komunikasi	terdapat 21 (dua puluh satu) PD Pemerintah Madiun yang telah memiliki anggaran untuk pengadaan/ pembelian perangkat keras informasi dan komunikasi.	keras teknologi informasi dan komunikasi.	memiliki anggaran untuk pengadaan atau pembelian perangkat keras informasi dan komunikasi.
Anggaran pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial	Pada kondisi eksisting ketersediaan rencana dan anggaran SPBE terdapat 28 (dua puluh delapan) PD Pemerintah Madiun yang telah memiliki anggaran untuk pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi serta aplikasi/ software komersial.	Semua PD memiliki anggaran untuk pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial.	Terdapat 7 (tujuh) PD Kota Madiun yang belum memiliki anggaran untuk pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi serta aplikasi/ software komersial.

1.10 KONDISI EKSISTING PENYELENGGARA SPBE DAN SDM TIK DAN ANALISIS GAP

Pada Sub ini akan dijabarkan mengenai kondisi eksisting penyelenggara SPBE dan SDM TIK yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun. Selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan atau GAP antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal penyelenggara SPBE dan SDM TIK yang diinginkan.

1.10.1 Pengertian Penyelenggara SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, Penyelenggara SPBE adalah tim koordinasi yang perlu dibentuk guna meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE daerah. Penyelenggara SPBE perlu ditetapkan dalam kesatuan tim yang disebut sebagai Tim Koordinasi SPBE. Tim Koordinasi memiliki

tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. **Koordinator SPBE** pada pemerintah Daerah dijabat oleh **Sekretaris Daerah**.

1.10.2 Referensi Penyelenggara SPBE dan SDM TIK

Referensi yang digunakan untuk penyelenggara SPBE dan SDM TIK mengacu pada Peta Okupasi yang diambil dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada area fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peta Okupasi merupakan dokumen pemetaan pengembangan sumber daya manusia yang disusun oleh para pemangku kepentingan sebagai referensi dalam memenuhi berbagai kebutuhan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Pihak pemangku kepentingan dimaksud adalah asosiasi industri, asosiasi profesi, perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya di samping sejumlah profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Konten dari dokumen peta okupasi diperoleh melalui kajian secara menyeluruh dan komprehensif dengan melihat berbagai tren kebutuhan sumber daya manusia yang mengacu pada kebutuhan nasional, regional, dan internasional di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pada Peta Okupasi, terdiri dari **16 (enam belas)** fungsi kunci bidang teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Kota Madiun, terdapat **9 (sembilan) unit kompetensi** yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) TIK Kota Madiun. Setelah dipetakan sesuai dengan fungsi kunci dari Peta Okupasi, bisa disimpulkan Kota Madiun memenuhi **8 (delapan) fungsi kunci**. Penjabaran pemetaan kompetensi dijabarkan pada **Tabel 1.51**.

Tabel 1.51 Pemetaan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) TIK dan Peta Okupasi

No	Kompetensi sesuai Okupasi	Kompetensi yang dimiliki Perangkat Daerah
1.	<i>Data Management System</i>	Admin Database
2.	<i>Programming and Software Development</i>	Programmer
3.	<i>Hardware and Digital Peripherals</i>	Teknisi Komputer

No	Kompetensi sesuai Okupasi	Kompetensi yang dimiliki Perangkat Daerah
4.	<i>Network and Infrastructure</i>	Admin Jaringan
5.	<i>Operation and System Tools</i>	Operator/User Sistem Admin Website
6.	<i>Information System and Technology Development</i>	Analisis & Desain Sistem
7.	<i>IT Governance and Management</i>	-
8.	<i>IT Project Management</i>	-
9.	<i>IT Enterprise Architecture</i>	-
10.	<i>IT Security and Compliance</i>	Admin Keamanan TI
11.	<i>IT Services Management System</i>	Service Desk/Help Desk
12.	<i>IT and Computing Facilities Management</i>	-
13.	<i>IT Multimedia</i>	-
14.	<i>IT Mobility and Internet of Things</i>	-
15.	<i>Integration Application System</i>	-
16.	<i>IT Consultancy and Advisory</i>	-

Dari hasil pemetaan pada **Tabel 1.51** terkait kompetensi SDM dengan kompetensi sesuai dengan peta okupasi, menunjukkan hasil bahwa terdapat **8 (delapan) kompetensi yang belum dimiliki oleh PD** yaitu *IT Governance and Management, IT Project Management, IT Enterprise Architecture, IT and Computing Facilities Management, IT Multimedia, IT Mobility and Internet of Things, Integration Application System, dan IT Consultancy and Advisory*.

1.10.3 Kondisi Eksisting Penyelenggara SPBE

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait kondisi eksisting dari penyelenggaraan SPBE di 35 (tiga puluh lima) PD Pemerintahan Kota Madiun.

1.10.3.1 Ketersediaan Tim Koordinasi SPBE

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Tim koordinasi SPBE mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Seperti yang telah dituangkan dalam **Keputusan**

Walikota Madiun Nomor 180.45-401.021/129/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, bahwa Pemerintah Kota Madiun telah memiliki Tim Koordinasi SPBE. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa Tim Koordinasi SPBE Kota Madiun bertugas untuk mengarahkan, merancang, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu. Penjabaran detail jabatan Tim Asesor Internal SPBE Kota Madiun dapat dilihat pada **Tabel 1.52**.

Tabel 1.52 Daftar Tim Asesor Internal SPBE
Pemerintah Kota Madiun

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	Pelindung	Walikota Madiun
2	Pembina	Wakil Walikota Madiun
3	Koordinator	Sekretaris Daerah
4	Wakil Koordinator I	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
5	Wakil Koordinator II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6	Anggota	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
7		Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
8		Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat
9		Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
10		Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat
11		Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
12		Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
13		Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
14		Kepala Bagian Pengadaan

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
		Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
15		Sekretaris DPRD
17		Inspektur
18		Kepala Dinas Pendidikan
19		Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
20		Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
21		Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
22		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24		Kepala Dinas Perdagangan
25		Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
26		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27		Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
28		Kepala Dinas Perhubungan
29		Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
30		Kepala Dinas Lingkungan Hidup
31		Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
32		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran
33		Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
34		Kepala Badan Keuangan dan Aset

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
		Daerah
35		Kepala Badan Pendapatan Daerah
36		Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
37		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
38		Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
39		Direktur rumah Sakit Umum Daerah
40		Camat Kartoharjo
41		Camat Manguharjo
42		Camat Taman

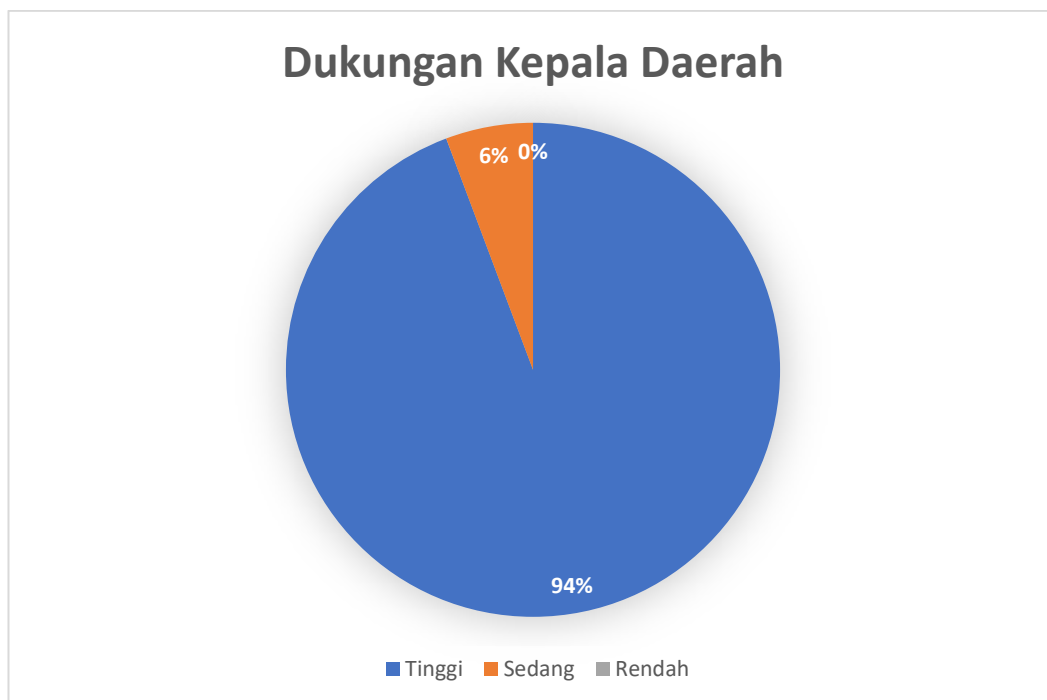
Berdasarkan **Tabel 1.52** Walikota Kota Madiun bertindak sebagai Pelindung Tim Asesor Internal SPBE dan Wakil Walikota Kota Madiun bertindak sebagai Pembina Tim Asesor Internal SPBE. Tim ini terdiri dari Koordinator, Wakil Koordinator I serta Wakil Koordinator II. Sekretaris Daerah bertindak sebagai Koordinator SPBE.

1.10.3.2 **Komitmen Pimpinan Daerah**

Pada bagian ini akan dibahas mengenai seberapa besar dukungan, komitmen serta keterlibatan pimpinan daerah Kota Madiun terhadap pelaksanaan SPBE. Pimpinan Daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah Kepala Daerah yaitu Kepala Daerah, Kepala Dinas serta Sekretaris Dinas. Selain hubungan dengan Pimpinan Daerah, pada sub bab ini akan membahas mengenai hubungan Perangkat Daerah dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

1.10.3.2.1 **Dukungan Kepala Daerah**

Besar dukungan Kepala Daerah Kota Madiun terhadap SPBE dapat dilihat pada **Gambar 1.37** Dukungan Kepala Daerah adalah bentuk aspirasi dalam pelaksanaan SPBE. Berdasarkan hasil dari survei terhadap 35 (tiga puluh lima) PD di Kota Madiun. Besar dukungan Kepala Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni mulai dari rendah, sedang dan tinggi.



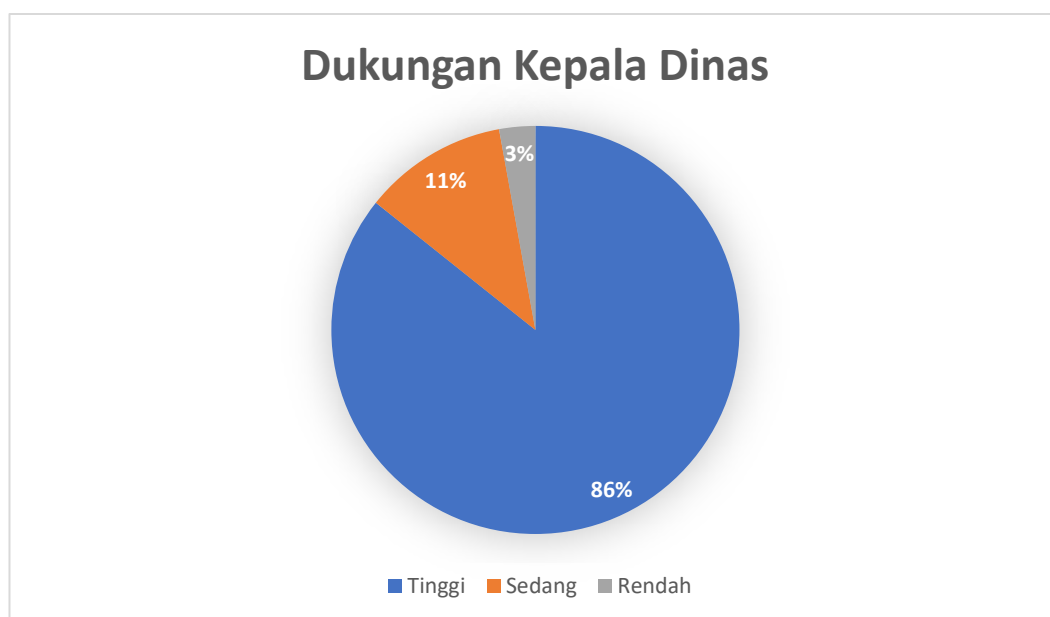
Gambar 1.37 Persentase Dukungan Kepala Daerah

Berdasarkan **Gambar 1.37** hasil dari persentase dukungan Kepala Daerah, didapatkan beberapa informasi sebagian besar PD menyatakan bahwa Kepala Daerah memberikan dukungan relatif tinggi terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 33 (tiga puluh tiga) PD dari 35 (tiga puluh lima) PD atau sebesar 94% (sembilan puluh empat persen) menyatakan Kepala Daerah telah memberikan **dukungan yang tinggi** terhadap SPBE. Adapun bentuk dari dukungan tinggi Kepala Daerah yaitu diberlakukannya **Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2021** tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, **Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, **Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 tahun 2017** tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sedangkan 2 PD atau sebesar 6% (enam persen) menyatakan bahwa Kepala Daerah memberikan **dukungan sedang** terhadap SPBE. Dukungan ini terlihat dari SPBE dimulai di Kota Madiun Tahun 2003 dan sudah pernah dilakukan Evaluasi Rutin 5 (lima) tahun sekali, namun terdapat salah satu Program Prioritas Kota Madiun yaitu Smart City yang harus didukung oleh Implementasi SPBE serta Rakor terkait SPBE. Namun demikian, meskipun dukungan

Kepala Dinas terbilang cukup tinggi sebagai evaluasi Kepala Dinas harus memperbaiki bentuk dukungan yang masih terhitung rendah.

1.10.3.2.2 Dukungan Kepala Dinas

Besar dukungan Kepala Dinas Kota Madiun terhadap pelaksanaan SPBE dapat dilihat pada **Gambar 1.38**. Hasil ini didapatkan dari survei terhadap 35 Perangkat Daerah di Kota Madiun. Besar dukungan Kepala Dinas dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yakni mulai dari rendah, sedang dan tinggi.



Gambar 1.38 Persentase Dukungan Kepala Dinas

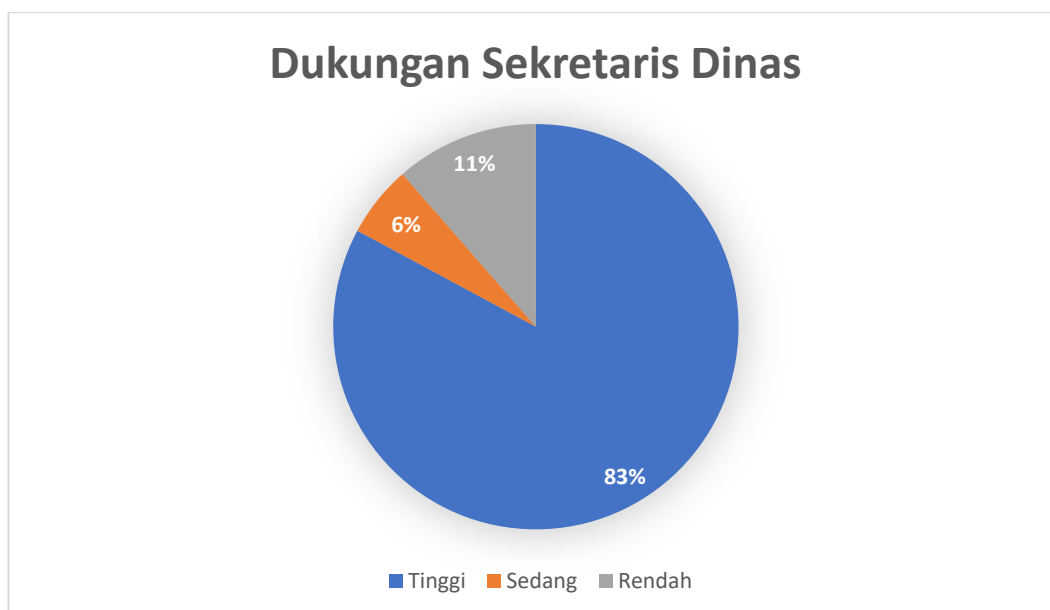
Berdasarkan **Gambar 1.38**, hasil dari persentase dukungan Kepala Dinas, didapatkan beberapa informasi sebagian besar Perangkat Daerah menyatakan bahwa Kepala Dinas memberikan dukungan relatif tinggi terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 30 (tiga puluh) Perangkat Daerah dari 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah atau sebesar 86% (delapan puluh enam persen) menyatakan Kepala Daerah telah memberikan **dukungan yang tinggi** terhadap SPBE.

Adapun bentuk dari dukungan tinggi Kepala Daerah yaitu diterbitkannya SK Tim Sekretariat Daerah, Kebijakan dan keterlibatan dalam evaluasi SPBE, memfasilitasi pembuatan dan penerapan website ataupun aplikasi guna mendukung SPBE serta sebagai penanggung jawab, pembinaan dan pengawasan, Penyedia anggaran dan perencanaan program yang mendukung kegiatan SPBE, mendukung proses pengadaan kebutuhan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan. Dukungan Kepala Dinas juga

masih dibutuhkan lagi, karena terdapat beberapa PD yang menyatakan Kepala Dinas dengan **dukungan sedang** sebanyak 4 (empat) PD atau sebesar 11% (sebelas persen) terhadap SPBE. Dukungan ini terlihat dari Kepala Dinas belum sepenuhnya ikut andil menggunakan program-program yang telah terintegrasi. Salah satu PD menyatakan bahwa kurangnya penganggaran terkait IT. Namun terdapat 1 (satu) PD atau sebesar 3% (tiga persen) yang menyatakan bahwa Kepala **Dukungan rendah** terhadap terselenggaranya SPBE. Sehingga dalam hal ini masih perlu dilakukan upaya dukungan yang lebih spesifik yang diberikan Kepala Dinas terkait SPBE.

10.3.2.3 Dukungan Sekretaris Dinas

Besar dukungan Sekretaris Dinas Kota Madiun terhadap SPBE dapat dilihat pada **Gambar 1.39**. Hasil ini didapatkan dari survei terhadap 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Kota Madiun. Besar dukungan Sekretaris Dinas dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yakni mulai dari rendah, sedang dan tinggi.



Gambar 1.39 Persentase Dukungan Sekretaris Dinas

Dari **Gambar 1.39** hasil dari persentase dukungan Sekretaris Dinas, didapatkan beberapa informasi sebagian besar Perangkat Daerah menyatakan bahwa Sekretaris Dinas memberikan dukungan relatif tinggi terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 29 (dua puluh sembilan) Perangkat Daerah dari 35 Perangkat Daerah atau sebesar 83% (delapan puluh tiga persen) menyatakan Sekretaris

Daerah telah memberikan **dukungan yang tinggi** terhadap SPBE. Adapun bentuk dari dukungan tinggi Sekretaris Daerah yaitu Pengkoordinasian, mendukung, serta mengevaluasi segala kebijakan terkait implementasi SPBE, kegiatan administrasi dan tupoksi telah menggunakan aplikasi sehingga semua data yang dibutuhkan dapat dipantau secara online, sebagai penanggung jawab dan ikut andil dalam pembahasan dan mengusulkan pembangunan aplikasi, sebagai penyedia dan perencanaan anggaran. Dukungan Sekretaris Dinas juga masih dibutuhkan lagi, karena terdapat beberapa Perangkat Daerah yang menyatakan Kepala Dinas dengan **dukungan sedang** sebanyak 2 Perangkat Daerah atau sebesar 6% (enam persen) terhadap SPBE. Dukungan ini terlihat dari Kepala Dinas belum sepenuhnya ikut andil menggunakan program-program yang telah terintegrasi.

Salah satu Perangkat Daerah menyatakan bahwa kurangnya penganggaran terkait IT. Adapun **dukungan rendah** terhadap Sekretaris Dinas yaitu sebesar 4 (empat) Perangkat Daerah atau sebesar 11% (sebelas persen) karena dalam hal ini belum adanya keterlibatan Sekretaris Dinas.

1.10.3.2.4 Hubungan Perangkat Daerah dengan Dinas Komunikasi dan Informatika

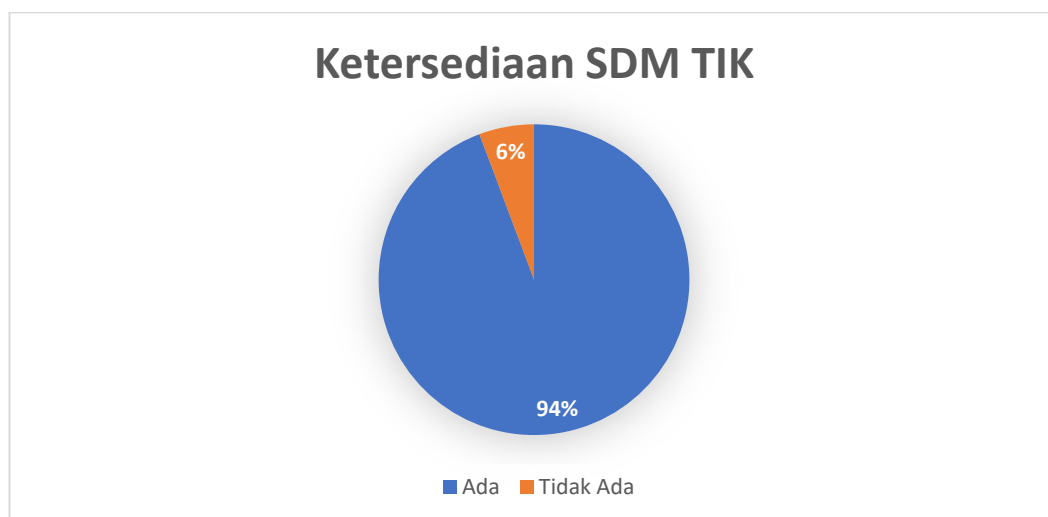
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah Kota Madiun, bahwa mayoritas Perangkat Daerah atau 28 (dua puluh delapan) Perangkat Daerah menyatakan memiliki hubungan Harmonis atau Lancar dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan 7 (tujuh) Perangkat Daerah menyatakan bahwa memiliki hubungan yang biasa. Hal yang menjadikan kondisi Harmonis antara Perangkat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika mendampingi dan memberikan sosialisasi kepada Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi, memberikan kewenangan untuk Perangkat Daerah membangun konsep elektronik pembinaan serta pengawasan untuk diimplementasikan, menangani keluhan gangguan jaringan yang dialami Perangkat Daerah serta sigap dalam mengatasi dan memberi informasi permasalahan.

1.10.4 Kondisi Eksisting SDM TIK

Bagian ini akan dibahas mengenai kondisi eksisting dari SDM TIK pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Madiun. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang TIK yang dimiliki oleh pemerintah Kota Madiun merupakan kondisi eksisting SDM TIK diperlukan guna mendukung operasional penyelenggaraan SPBE.

1.10.4.1 Ketersediaan SDM TIK

Berdasarkan data yang dikumpulkan pada saat survei, dapat diketahui ada atau tidaknya SDM TIK di setiap Perangkat Daerah Kota Madiun. Ketersediaan SDM TIK pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Kota Madiun ditunjukkan pada diagram di **Gambar 1.40**. berikut.



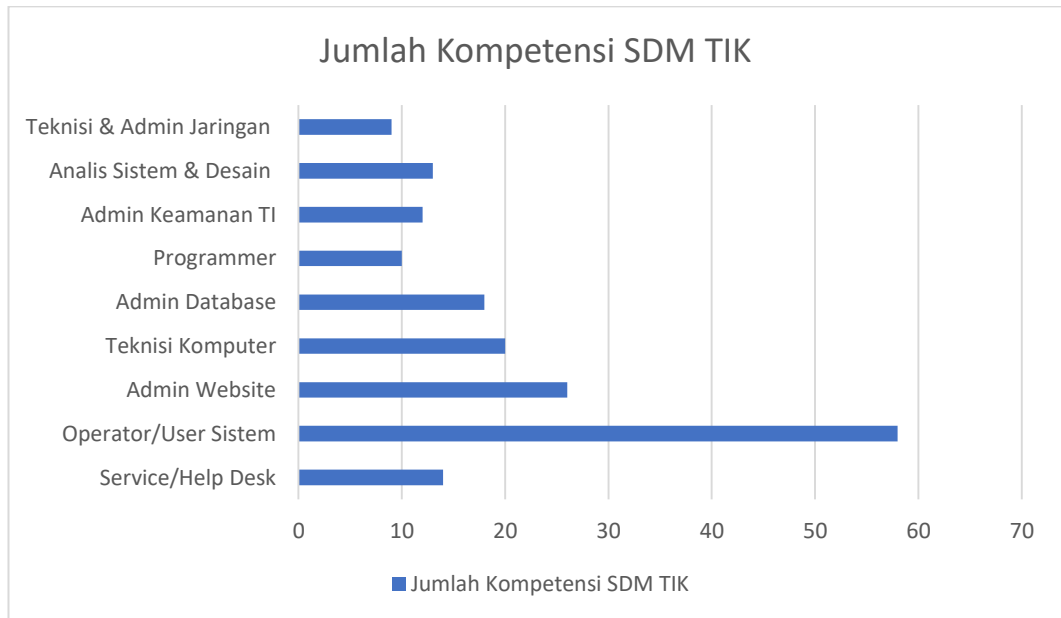
Gambar 1.40 Persentase Ketersediaan SDM TIK

Berdasarkan Gambar 1.40 disimpulkan bahwa pelaksanaan TIK pada Pemerintah Kota Madiun sebagian besar telah didukung dengan SDM TIK. Terbukti sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Madiun **atau sebesar 94% (sembilan puluh empat persen) telah memiliki SDM TIK** yang berjumlah **121 orang**, dan sebanyak **2 Perangkat Daerah atau sebesar 6% (enam persen) belum memiliki SDM TIK**. Perangkat Daerah yang tidak memiliki SDM TIK adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Bagian Pemerintahan.

1.10.4.2 Kompetensi SDM TIK yang dimiliki

Kompetensi SDM TIK yang dimiliki oleh 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat

melalui **Gambar 1.41**. Pada beberapa Perangkat Daerah di Kota Madiun terdapat satu orang yang memiliki beberapa kompetensi. Kompetensi SDM TIK sendiri dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok yaitu teknisi komputer, teknisi dan admin jaringan, *service/helpdesk*, *programmer*, *operator/user sistem*, analisis sistem dan desain, admin *website*, admin database serta admin keamanan TI.



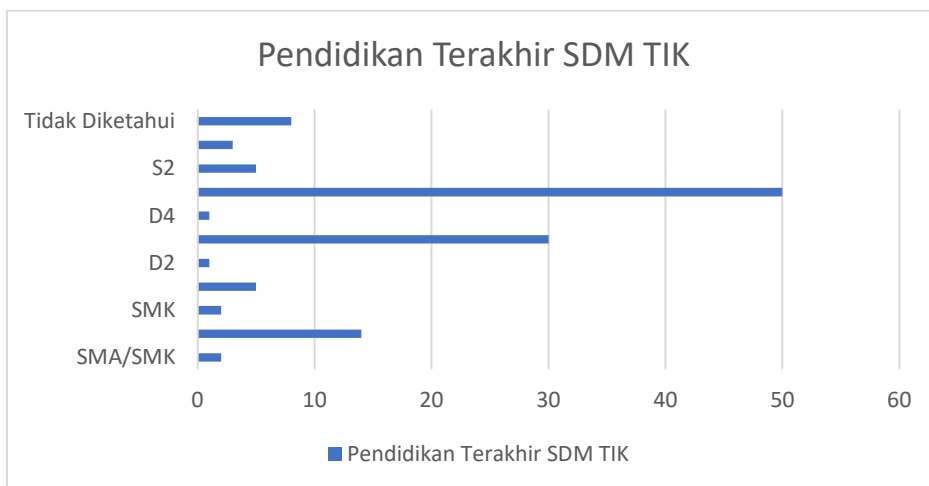
Gambar 1.41 Jumlah Kompetensi SDM TIK

Pada **Gambar 1.41** terlihat dari 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah yang memiliki SDM TIK dengan Kompetensi SDM TIK yang dimiliki, bahwa Kompetensi yang paling banyak dimiliki oleh SDM TIK pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Madiun adalah **Operator/User Sistem** sebanyak **58 (lima puluh delapan) orang**. Sedangkan pada kompetensi terbanyak kedua yaitu **Admin Website** sebanyak **26 (dua puluh enam) orang**, Kompetensi **Teknisi Komputer** sebanyak **20 (dua puluh) orang**, **Admin Database** sebanyak **18 (delapan belas) orang**, **Service/Help Desk** sebanyak **14 (empat belas) orang**, **Analis Sistem & Desain** sebanyak **13 (tiga belas) orang**, **Admin Keamanan TI** sebanyak **12 (dua belas) orang**, **Programmer** sebanyak **10 (sepuluh) orang**. Sedangkan jumlah kompetensi SDM TIK paling sedikit adalah **Teknisi & Admin Jaringan** sebanyak **9 (sembilan) orang**. Namun jumlah pada kompetensi SDM TIK tidak sama dengan jumlah total ketersediaan SDM TIK,

dikarenakan terdapat beberapa orang merangkap kompetensi pekerjaan lebih dari satu.

1.10.4.3 Pendidikan Terakhir SDM TIK

Pendidikan terakhir yang dimiliki oleh 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok diantaranya adalah tingkat SMA, SMK, Diploma, D2, D3, D4, S1 dan S2. Ilustrasi pendidikan terakhir SDM TIK dapat dilihat pada **Gambar 1.42**.



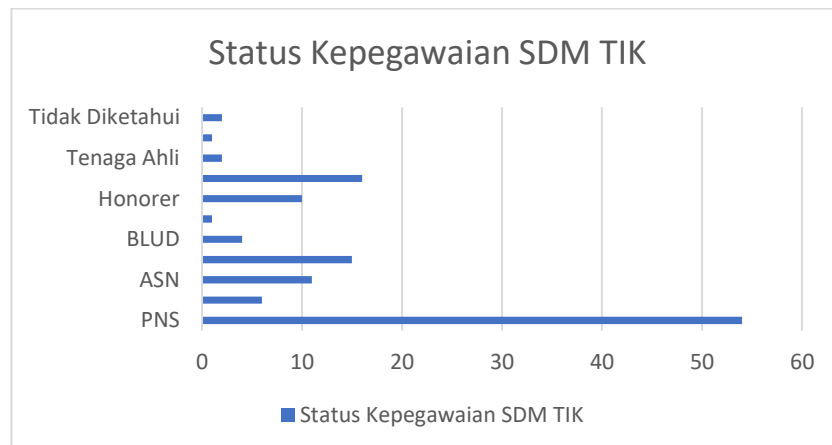
Gambar 1.42 Persentase Pendidikan Terakhir SDM TIK

Dari **Gambar 1.42** tingkat pendidikan dengan jumlah tertinggi yang dimiliki oleh SDM TIK adalah dari kelompok **S1** sebanyak **50 orang**, kelompok **SMA** sebanyak **14** (empat belas) **orang**, kelompok **SMK** sebanyak **2** (dua) **orang**, kelompok **S2** sebanyak **5** (lima) **orang**, kelompok **S3** sebanyak **3** (tiga) **orang**, kelompok **Diploma** sebanyak **5** (lima) **orang**, kelompok **D2** sebanyak **1 orang**, kelompok **D3** sebanyak **50** (lima puluh) **orang**, dan yang terakhir kelompok **D4** sebanyak **1**(satu) **orang**. Selain itu ada beberapa Perangkat Daerah yang tidak menyebutkan pendidikan terakhir yang dimiliki oleh SDM TIK yaitu **sebanyak 8** (delapan) **orang**. Beberapa Perangkat Daerah yang tidak menyebutkan pendidikan terakhir dengan spesifik yaitu kelompok **SMA/SMK** sebanyak **2** (dua)**orang**.

1.10.4.4 Status Kepegawaian SDM TIK

Setiap pegawai TIK di 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Kota Madiun memiliki status kepegawaian yang dapat dibagi menjadi 10 kelompok, yaitu Pegawai Negeri Sipil, CPNS, ASN, Non-ASN, BLUD, THL, Honorer, Tenaga Upahan, Tenaga Ahli, serta

Kontrak. Ilustrasi pendidikan terakhir SDM TIK dapat dilihat pada **Gambar 1.43.**

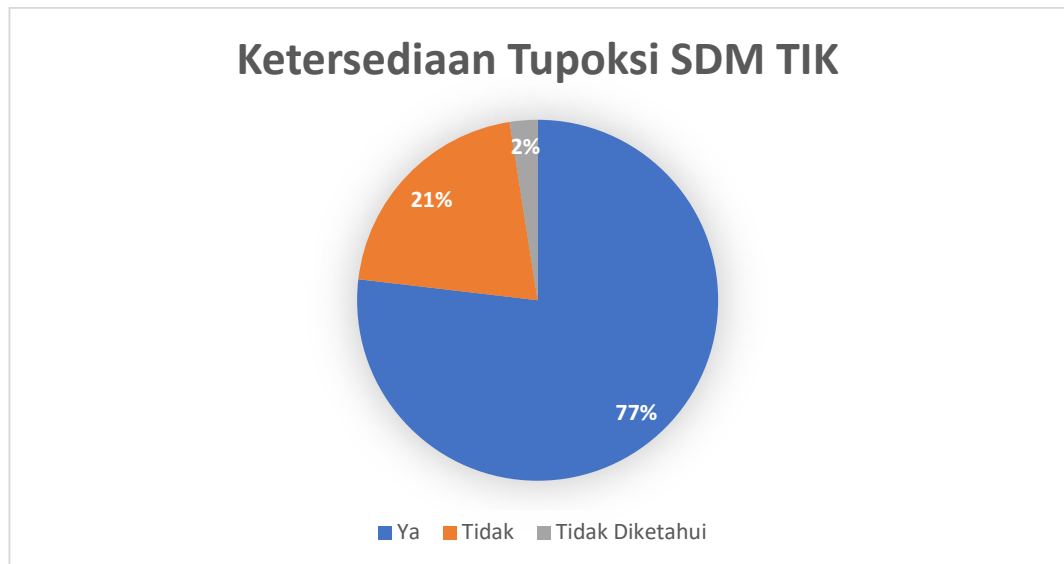


Gambar 1.43 Persentase Status Kepegawaian SDM TIK

Dari **Gambar 1.43** sebagian besar dari status kepegawaian SDM TIK berdasarkan dari hasil survei yang didapatkan yaitu berstatus sebagai **PNS** sebanyak **54 (lima puluh empat orang) orang**. Sementara untuk status pegawai lain seperti **Tenaga Upahan** sebanyak **16 (enam belas) orang**, pegawai **Non - ASN** sebanyak **15 (lima belas) orang**, pegawai **ASN** sebanyak **11 (sebelas) orang**, pegawai **Honorer** sebanyak **10 (sepuluh) orang**, pegawai **CPNS** sebanyak **6 (enam) orang**, pegawai **BLUD** sebanyak **4 (empat) orang**, pegawai **Tenaga Ahli** sebanyak **2 (dua) orang**, serta pegawai **THL** dan **Kontrak** memiliki jumlah pegawai paling sedikit yaitu sebanyak **1 (satu) orang**. sebagai Adapun **4 (empat) SDM TIK** yang tidak menyertakan keterangan terkait status kepegawaiannya.

1.10.4.5 Ketersediaan Tupoksi/SK SDM TIK

Penunjukan SDM TIK dapat dilakukan melalui SK sehingga SDM TIK dapat dikelompokkan berdasarkan ketersediaan tupoksi yaitu SDM yang ditunjuk melalui SK dan SDM yang ditunjuk secara ad hoc tanpa adanya SK. Ketersediaan Tupoksi SDM TIK dapat dilihat pada **Gambar 1.44.**

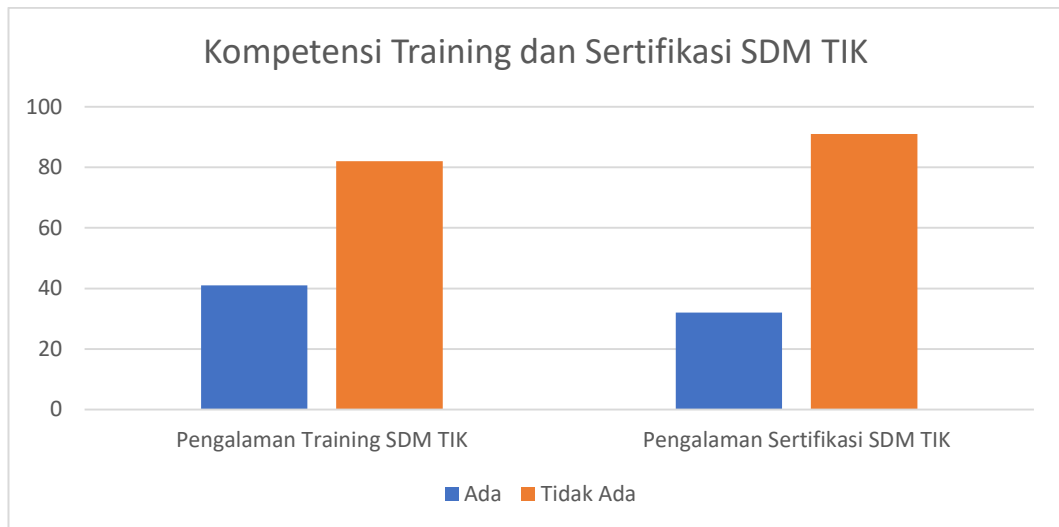


Gambar 1.44 Ketersediaan Tupoksi/SK SDM TIK

Dari **Gambar 1.44** dapat disimpulkan bahwa mayoritas SDM TIK yang ada di 35 Kota Madiun ditunjukkan melalui SK dan memiliki tupoksi yaitu **sebanyak 93** (sembilan puluh tiga) **orang atau sebesar (77%)**. Sedangkan SDM TIK yang ditunjuk secara fungsional tanpa SK sebanyak **25** (dua puluh lima) **orang atau sebesar 20% (dua puluh persen)**. Terdapat sebanyak **3 (tiga) orang** atau **sebesar 2% (dua persen)** yang belum menunjukkan bukti kepemilikan SK.

1.10.4.6 **Kompetensi *Training* dan Sertifikasi SDM TIK**

Kompetensi SDM TIK pada 35 (tiga puluh lima) PD di Kota Madiun dapat dilihat juga dari pengalaman keikutsertaan *training* di bidang TIK atau kepemilikan sertifikasi di bidang TIK. Pelatihan *Training* dan Sertifikasi SDM TIK sendiri bertujuan sebagai persiapan kemampuan semua SDM TIK saat mengemban pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Ilustrasi kompetensi pelatihan dan kepemilikan sertifikasi SDM TIK dapat dilihat pada **Gambar 1.45**.



Gambar 1.45 *Training* dan Sertifikasi SDM TIK

Dari **Gambar 1.45** dapat disimpulkan bahwa sebagian besar SDM TIK Kota Madiun belum pernah mengikuti kompetensi *Training* maupun Sertifikasi di bidang TIK. Terdapat sejumlah **41** (empat puluh satu) **orang SDM TIK** yang pernah mengikuti pelatihan di bidang TIK. Pelatihan yang diikuti antara lain seperti Sosialisasi Penilaian Admin PPID, Pelatihan Website PPID, BIMTEK pengelola SIAK, Pelatihan Pengembangan Website. Sedangkan terdapat **32** (tiga puluh dua) **orang SDM TIK** yang memiliki sertifikasi di bidang TIK. Sertifikasi yang dimiliki antara lain seperti Programming dan desain grafis.

1.10.5 **Metadata SDM TIK**

Berdasarkan sub bab Kompetensi SDM TIK, Kompetensi SDM TIK dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok yang terdiri dari, teknisi komputer, teknisi dan admin jaringan, *service/help desk*, *programmer*, *operator/user* sistem, analisis sistem dan desain, admin *website*, admin *database* serta admin keamanan TI. Dari 9 (sembilan) kompetensi SDM TIK dipetakan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika. Pemetaan ini berguna untuk memenuhi berbagai kompetensi terkait dengan sumber daya manusia Indonesia.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika memuat kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi,

deskripsi, level kompetensi, dan indikator perilaku. Kumpulan kompetensi diperlukan oleh ASN yang menjalankan tugas dan fungsi bidang kominfo. Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika diperuntukkan bagi Kementerian Kominfo dan Perangkat Daerah di Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika sub bidang informasi dan komunikasi publik dan sub bidang aplikasi informatika.

Tabel 1.53 Metadata SDM TIK

Kompetensi SDM Eksisting	Kebijakan terkait	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi	Definisi
Admin Keamanan TI	Permen Kominfo No 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi TIK	Pengelolaan Pusat Data	K-STANKOM/ KOMINFO/ DJAPTIKA/2020/ 15	Kemampuan merencanakan, membangun, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi layanan infrastruktur pusat data beserta mekanisme regulasi dan petunjuk terkait.
Operator/ user system	-	-	-	-
Programmer	Permen Kominfo No 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi TIK	Pengembangan Aplikasi Umum dan Khusus	K-STANKOM/ KOMINFO/ DJAPTIKA/2020/ 20	Kemampuan mengembangkan aplikasi umum dan/atau khusus (meliputi perencanaan, desain, pembangunan, pengujian, serta pembaruan) pada instansi, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
Analisis Sistem dan Desain	Permen Kominfo No 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi TIK	Pengembangan Aplikasi Umum dan Khusus	K-STANKOM/ KOMINFO/DJAPTIKA/2020/20	Kemampuan mengembangkan aplikasi umum dan/atau khusus (meliputi perencanaan, desain, pembangunan, pengujian, serta pembaruan) pada

Kompetensi SDM Eksisting	Kebijakan terkait	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi	Definisi
				instansi, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
Admin Website	Permen Kominfo No 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi TIK	Pengendalian Konten Internet	K-STANKOM/KOMINFO/DJAPTIKA/2020/05	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan model pengelolaan dan pengendalian konten internet yang mengintegrasikan aplikasi.
		Pengelolaan Web Portal Milik Pemerintah	K-STANKOM/KOMINFO/DJAPTIKA/KONKUREN/2020/02	Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, memantau, dan mengevaluasi layanan pengelolaan web portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
Service/ Help Desk	Permen Kominfo No 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi TIK	Manajemen Pelayanan pengujian	K-STANKOM/KOMINFO/DJSDP/PI/2020/25	Kemampuan untuk merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan layanan pengujian alat/perangkat telekomunikasi dan kalibrasi alat ukur
Teknisi dan Admin Jaringan	Permen Kominfo No 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi TIK	Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintahan	-K-STANKOM/KOMINFO/DJAPTIKA/2020/23	-Kemampuan mengelola jaringan intra pemerintahan pada instansi sebagai penghubung dalam menjalankan layanan administrasi di internal pemerintahan, termasuk

Kompetensi SDM Eksisting	Kebijakan terkait	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi	Definisi
				uk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
		Topologi Jaringan Telekomunikasi	K-STANKOM/ KOMINFO/DJPPI/ 2020/17	Kemampuan mengidentifikasi,men gumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep topologi jaringan telekomunikasi
		Pengelolaan Jaringan Internet	K-STANKOM/ KOMINFO/ DJAPTIKA/ 2020/24	Kemampuan mengelola jaringan internet pada instansi sebagai penghubung antara pengguna, instansi, serta aplikasi dalam menjalankan layanan publik dan/atau administrasi, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
Teknisi Komputer	-	-	-	-
Admin Database	Permen Kominfo No 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi TIK	Pengelolaan Pusat Data	K-STANKOM/ KOMINFO/ DJAPTIKA/2020/ 15	Kemampuan merencanakan, membangun, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi layanan infrastruktur pusat data beserta mekanisme regulasi dan petunjuk terkait.
		Pengelolaan Database	K-STANKOM/ KOMINFO/ DJAPTIKA/2020/ 17	Kemampuan merencanakan, menyimpan, merekayasa, menyajikan, dan mendistribusikan basis data.

1.10.6 Analisis Gap

Bagian ini akan menjelaskan tentang kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari Penyelenggara SPBE dan SDM TIK. Untuk penjelasan gap penyelenggara SPBE Kota Madiun dapat dilihat pada Tabel 11.4.

Gambar 1.54 Analisis Gap Penyelenggara SPBE

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
Ketersediaan SDM TIK	Dari hasil kondisi eksisting Ketersediaan SDM TIK, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) atau sebesar 94% (Sembilan puluh empat persen) PD pada Pemerintah Kota Madiun telah memiliki 121 pegawai yang ditunjuk sebagai SDM TIK. Dan sebanyak 2 (dua) atau sebesar 6% (enam persen) PD masih belum memiliki pegawai yang ditunjuk sebagai SDM TIK.	Setiap PD di Pemerintah Kota Madiun memiliki SDM pada masing-masing PD.	Dari 35 (tiga puluh lima) PD pada Pemerintah Kota Madiun 2 (dua) PD masih belum memiliki SDM TIK.
Ketersediaan Tupoksi pada SDM TIK SPBE	Pada kondisi eksisting ketersediaan Tupoksi SDM TIK SPBE, mayoritas 35 (tiga puluh lima) PD Pemerintah Madiun sebanyak 93 SDM TIK atau sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) telah memiliki tupoksi/SK . Sedangkan sebanyak 25 SDM TIK atau sebesar 20% (dua puluh persen) masih belum memiliki Tupoksi/SK , serta sebanyak 3 (tiga) SDM TIK atau sebesar 2 %	Setiap PD di Pemerintah Kota Madiun memiliki divisi/tim khusus untuk mengelola SI/TI secara struktur organisasi yaitu memiliki SK/Tupoksi khusus untuk pekerjaan terkait TIK.	Dari 35 PD pada Pemerintah Kota Madiun, sebanyak 25 (dua puluh lima) SDM TIK atau sebesar 20% belum memiliki tupoksi/SK . Serta sebanyak 3 (tiga) SDM TIK atau sebesar 2% (dua persen) tidak menyertakan bukti tupoksi/SK .

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	(dua persen) tidak menyertakan bukti ada atau tidak adanya Tupoksi/SK		
Kompetensi SDM TIK sesuai peta okupasi	Pada kondisi eksisting Kompetensi SDM TIK sesuai peta okupasi, terdapat 9 (sembilan) unit kompetensi dengan 8 fungsi kunci.	Pemerintah daerah memiliki SDM TIK yang berkompentensi pada 16 (enam belas) fungsi kunci di Peta Okupasi.	Terdapat 8 (delapan) kompetensi yang belum dimiliki oleh PD yaitu <i>IT Governance and Management, IT Project Management, IT Enterprise Architecture, IT and Computing Facilities Management, IT Multimedia, IT Mobility and Internet of Things, Integration Application System, dan IT Consultancy and Advisory.</i>
Kompetensi SDM TIK SPBE	Dari keseluruhan SDM TIK yang dimiliki PD Pemerintah Kota Madiun, mayoritas Kompetensi SDM TIK yaitu sebagai Operator/User System sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang.	Terdapat 4 (empat) kompetensi yang dimiliki SDM TIK yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi perencanaan SPBE 2. Rekayasa proses bisnis Pemerintah 3. Pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal 4. Pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif. 	Pada Pemerintah Kota Madiun masih terdapat 2 (dua) PD yang masih belum memiliki SDM TIK yaitu Bagian Pemerintahan serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pendidikan SDM TIK SPBE	Berdasarkan hasil data survei telah didapatkan yang kemudian dikalkulasikan, Pendidikan terakhir SDM TIK pada Pemerintah Madiun sebagian besar yaitu S1	SDM TIK memiliki keahlian terkait dengan kompetensi atau pekerjaan yang dilakukan sebagai bentuk adanya standar kompetensi teknis SPBE.	Pada Pemerintah Madiun masih terdapat SDM TIK yang berbeda atau tidak berkaitan dengan riwayat Pendidikan terakhir. Serta

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	dan D3 .		masih terdapat data SDM TIK yang tidak diketahui riwayat pendidikan terakhirnya.
Training SDM TIK SPBE	Pada hasil kondisi eksisting training SDM TIK SPBE pada Pemerintah Kota Madiun, terdapat 41 (empat puluh satu) SDM TIK yang telah mengikuti kegiatan Training TI.	Adanya peningkatan kompetensi dengan kegiatan training berbagai bidang khusus TIK.	Sebanyak 82 (delapan puluh dua) SDM TIK pada Pemerintah Kota Madiun masih belum pernah mengikuti kegiatan training TI.
Sertifikasi SDM TIK SPBE	Pada hasil kondisi eksisting sertifikasi SDM TIK SPBE pada Pemerintah Kota Madiun, terdapat sebanyak 32 (tiga puluh dua) SDM TIK telah memiliki sertifikasi TI.	Tersedianya SDM TIK yang telah memiliki sertifikasi secara kompetensi terkait.	Sebanyak 91 (sembilan puluh satu) SDM TIK pada Pemerintah Kota Madiun masih belum pernah memiliki sertifikasi TI.

LAMPIRAN

Lampiran 2.1 Ketersediaan SOP

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
1	Bagian Organisasi	SOP Analisis Kelembagaan
		SOP Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
		SOP Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas
		SOP Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas
		SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) I Sosialisasi/ Pembinaan dan/Pelatihan Ketatalaksanaan
		SOP Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun
		SOP Penyusunan Laporan Pengaduan Pelayanan Publik Kota Madiun
		SOP Evaluasi Ketatalaksanaan
		SOP Evaluasi Pelayanan Publik
		SOP Penyelenggaraan Rapat Dinas
		SOP Administrasi Surat Keluar (ditujukan di Lingkungan Sekretariat Daerah)
		SOP Administrasi Surat Keluar (ditujukan di luar Lingkungan Sekretariat Daerah)
		SOP Administrasi Surat Masuk
		SOP Laporan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan
		SOP Pengumpulan Data Pengukuran Kinerja
		SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SOP Pelaksanaan Kelompok Budaya Kerja		
2	Bagian Hukum	SOP Penelitian Keputusan Walikota dan Peraturan Walikota
		SOP Penelitian Peraturan Walikota (Dengan Tingkat Kesulitan Tertentu)
		SOP Penelitian Peraturan Daerah
		SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
		SOP Pemantauan Peraturan Terkait Tugas Pemerintah Daerah
		SOP Penelitian Naskah Dinas Selain Produk Hukum
		SOP Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)
		SOP Sosialisasi Produk Hukum
		SOP Upload Peraturan/Keputusan Walikota Ke Website JDIH Kota Madiun
		SOP Upload berita Ke Website JDIH Kota Madiun
		SOP Register Penomoran dan Pengiriman Produk Hukum
		SOP Administrasi Surat Masuk
		SOP Administrasi Surat Keluar (Antar Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah)
		SOP Surat Keluar (Diluar Bagian di Lingkungan Pemerintah Daerah)
		SOP Penyimpanan Arsip Aktif
		SOP Penerbitan Surat Ijin Cuti
		SOP Pelaporan Data Kepegawaian
		SOP Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		SOP Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor
		SOP Pemeliharaan Gedung Kantor
		SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas
		SOP Penyelenggaraan Rapat Dinas
		SOP Penyusunan Renja dan Renstra
		SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
		SOP Penyuluhan Hukum
		SOP Penyelesaian Sengketa
3	Bagian	SOP Permohonan Menjadi Narasumber
	Pengadaan	SOP Konsultasi Rencana Umum Pengadaan
	Barang / Jasa	SOP Konsultasi Pengadaan Barang/jasa

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
	dan Administrasi Pembangunan	Pemerintah SOP Konsultasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	SOP Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan DBHCHT SOP Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas BUMD SOP Pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Karena Selesai Masa Jabatan Periode Pertama SOP Pemberhentian Direksi dan dewan Pengawas BUMD Karena Meninggal Dunia SOP Pemberhentian Sewaktu-Waktu Direksi dan Dewan Pengawas BUMD SOP Penilaian KPI atau Evaluasi Kinerja Direksi dan Dewan Pengawas SOP Pendirian BUMD SOP Pembubaran BUMD SOP Restrukturisasi atau Penggabungan BUMD SOP Cara Penilaian Kinerja BUMD SOP Pemberian Persetujuan Kerjasama BUMD Dengan Pihak Ketiga SOP Pelaporan oleh Dewan Pengawas ke Walikota Selaku Pembina SOP Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Koordinasi Pembinaan BUMD
5	Bagian Umum	SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar SOP Pelayanan Pencatatan Cuti Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Madiun SOP Konsultasi dan Pengaturan Pelaksanaan Acara (Protokoler) yang dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun SOP Pelayanan Pinjam Ruang Rapat SOP Pelayanan Pinjam Kendaraan Dinas

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Pelayanan Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat Dinas
		SOP Penyimpanan Surat Aktif
		SOP Penyusunan Daftar Pertanggungjawaban Anggaran (DPA)
		SOP SPJ Fungsional/administrasi
		SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
		SOP Penyusunan Laporan Keuangan
		SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
		SOP Penyusunan Perjanjian Kerja
		SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
		SOP Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
		SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
		SOP Pembuatan KIR
		SOP Penatausahaan Barang
		SOP Penghapusan Barang
		SOP Pengurusan Kebutuhan Rumah Dinas
		SOP Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor
		SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Pimpinan
		SOP Pinjam Kendaraan Dinas Operasional
		SOP Pemakaian Ruang Rapat
		SOP Pemakaian Ruang Transit
		SOP Pinjam Sound System
		SOP Penyusunan Neraca Aset
		SOP Kegiatan Bimtek Keprotokolan
		SOP Kegiatan Hari Besar Nasional
		SOP Kegiatan Keprotokolan
		SOP Kegiatan Kesegaran Jasmani
		SOP Penerbitan Surat Ijin Cuti (Eselon IV dan Staf di Lingkungan Sekretariat daerah)
		SOP Pelaporan Data kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah
		SOP Pelayanan Tamu Pejabat

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Pelayanan Tamu Dinas
6	Bagian Pemerintahan	Tidak Memiliki SOP
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SOP Pemantauan Bencana
		SOP Pendistribusian JPS
		SOP Pengaduan Masyarakat
		SOP Penyusunan laporan kerugian kejadian
		SOP Pendistribusian Logistik
		SOP Pengaduan Masyarakat
		SOP Bantuan Sosial Bencana Covid-19
		SOP Penanganan Bencana Alam (Banjir, Angin, Puting Beliung)
		SOP Pembekalan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
		SOP Evakuasi/Penanggulangan Bencana
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	SOP Penyusunan RKPD
		SOP Penyusunan RPJMD
		SOP Penyusunan RPJPD
		SOP Pelaksanaan Evaluasi RPJMD
		SOP Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Triwulan
		SOP Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perencanaan Pembangunan (Renstra, Renja, RKPD)
		SOP Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
		SOP Pembentukan Tim Corporate Social Responsibility (CSR)
		SOP Fasilitas Pengembangan CSR
		SOP Penyusunan Penelitian dan Kajian Pembangunan Daerah
SOP Penyusunan Fisik dan Prasarana		
9	Badan Keuangan dan	SOP Pelayanan Pengelolaan Administrasi Gaji
		SOP Pelayanan Penerbitan Surat Permintaan

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
	Aset Daerah	Pencairan dana (SP2D) SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) SOP Pelayanan Verifikasi SPJ Fungsional Pendapatan, SPJ Fungsional Belanja dan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja SOP Pelayanan Laporan Keuangan SKPD SOP Pelayanan DPA dan DPPA SOP Pelayanan Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal SOP Pelayanan Konsultasi Penatausahaan SIPD SOP Pelayanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah SOP Pelayanan Penanganan Pengaduan.
10	Badan Pendapatan Daerah	SOP Administrasi Surat Masuk (melalui SIKD) Kominfo dan Perpus SOP Administrasi Surat Masuk SOP Administrasi Surat Keluar (di luar Pemkot Madiun) SOP Administrasi Surat Keluar (lingkup Pemkot Madiun) SOP Penyimpanan Arsip SOP Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat SOP Pembuatan KIR SOP Pengajuan Usulan Penghapusan Barang SOP Penyelenggaraan Rapat Dinas SOP Pelayanan Tamu SOP Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik SOP Pengamanan Kantor

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Penatausahaan Barang
		SOP Pengadaan Barang
		SOP Publikasi Informasi melalui Website
		SOP Penyusunan Renja
		SOP Penyusunan RKA-RKPA
		SOP Penyusunan Perjanjian Kerja
		SOP Penyusunan Renstra
		SOP Penyusunan KAK
		SOP Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
		SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
		SOP Penyusunan Penyediaan Data dan Informasi LKPJ LPPD
		SOP Pembukuan dan Monev
		SOP Pemeriksaan Pajak Daerah
		SOP Penagihan Pajak Daerah
		SOP Subid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
		11
SOP Permintaan Data Pegawai		
SOP Administrasi Surat Masuk		
SOP Administrasi Surat Keluar		
SOP Penerbitan SK Pensiun PNS Gol. Iv/c Keatas		
SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin		
SOP Ijin Perkawinan dan Pembinaan Pranikah		
SOP Penerbitan Ijin Perceraian		
SOP Laporan Perkawinan		
SOP Penerbitan SK Pensiun PNS Gol. Iv/b Kebawah		
SOP Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		
SOP Ijin Belajar		
SOP Surat Keterangan Berfungsi Sama Ijin Belajar		
SOP Perpanjangan Tugas Belajar		
SOP Laporan Ijin Belajar		
SOP Pemrosesan Pengangkatan dan		

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional
		SOP Penerbitan Surat Ijin Perkawinan dan Pembinaan Pra Nikah
		SOP Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala
		SOP Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan Iii/D Ke Bawah
		SOP Pemrosesan Kenaikan Pangkat Golongan Iv/A Dan Iv/B
		SOP Pemrosesan Kenaikan Pangkat Golongan Iv/C Keatas
		SOP Pemrosesan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi
		SOP Persiapan dan Pelaksanaan Pelantikan dan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional
		SOP Penerbitan Kartu Istri dan Kartu Suami
		SOP Pemrosesan Pemindahan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional
		SOP Pengajuan Cuti Pegawai pada Eselon II dan III
		SOP Pemrosesan Penganugerahan Tanda Kehormatan SatyaLancana Karya Satya
		SOP Penerbitan Surat Pengantar untuk Pemrosesan Tunjangan Istri/Suami dan Anak
		SOP Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SOP Pelayanan Tamu
		SPO Penerbitan Rekomendasi Penelitian
13	Inspektorat	SOP Administrasi Surat Masuk
		SOP Administrasi Surat Keluar (yang ditujukan dalam lingkup pemerintah kota Madiun)

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Administrasi Surat Keluar (yang ditujukan keluar instansi pemerintah kota Madiun)
		SOP Penyimpanan Arsip Aktif
		SOP Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat
		SOP Pembuatan KIR
		SOP Pengajuan Usulan Penghapusan Barang
		SOP Penyelenggaraan rapat Dinas
		SOP Pelayanan Tamu
		SOP Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
		SOP Pengamanan Kantor
		SOP Penatausahaan Barang
		SOP Publikasi Informasi Melalui Website
		SOP Pengajuan Uang Persediaan
		SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan
		SOP Pengajuan LS Gaji/Belanja Langsung/Belanja Tidak Langsung
		SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
		SOP Penyusunan laporan Keuangan
		SOP Penyusunan Neraca Aset
		SOP Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
		SOP Penyusunan SPJ Fungsional/Administrasi
		SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan)
		SOP Penyusunan RKA/RKPA
		SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja
		SOP Penyusunan RENSTRA
		SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
		SOP Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj)
		SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Penerbitan Surat Ijin Cuti Pegawai
		SOP Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
		SOP Pengajuan Ijin Menikah
		SOP Pengajuan Pelanggaran Disiplin Pegawai
		SOP Penyusunan Daftar Urut Kenaikan (DUK)
		SOP Pengusulan Kartu Pegawai (KARPEG)
		SOP Pengusulan Kartu Istri (KARIS)/Suami (KARSU)
		SOP Pengusulan Tunjangan Istri/ Suami/ Anak
		SOP Pengusulan Tugas Belajar
		SOP Pengusulan Izin Belajar
		SOP Pengusulan Satya Lencana
		SOP Pengajuan Pensiun
		SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat
		SOP Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Madiun
		SOP Penyusunan Laporan Gratifikasi
		SOP Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI
		SOP Pemutakhiran Data Temuan Pemeriksaan Reguler
		SOP Pemeriksaan Khusus
		SOP Pemeriksaan Reguler
		SOP Probitas Audit
SOP Reviu atas Laporan Keuangan		
14	Sekretariat DPRD	SOP Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
		SOP Pembuatan KIR
		SOP Perawatan Kendaraan Dinas
		SOP PIKIR
		SOP Pokok Pikiran DPRD
		SOP Fasilitasi Pelayanan Sidak
		SOP Penyiapan Bahan Administrasi Reses
		SOP FASILITASI PEMBAHASAN KUA PPAS/KUPA

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		PPAS-P
		SOP Administrasi Surat Keluar (Untuk DPRD)
		SOP Administrasi Surat Keluar (Internal)
		SOP Administrasi Surat Keluar (dari DPRD)
		SOP Administrasi Masuk (Internal)
		SOP Pencairan Dana belanja perjalanan Dinas DPRD
		SOP Surat Ijin Cuti
		SOP Pnyusunan Pidato rapat Paripurna
		SOP Penyusunan Risalah Rapat Paripurna
		SOP Rancangan Awal RAPERDA Inisiatif DPRD
		15
SOP Administrasi Surat Masuk		
SOP Pencatatan dan Pelaporan Barang Inventaris		
SOP Pengusulan Kartu Pegawai		
SOP Penerbitan Surat Pengantar Ijin Penelitian		
SOP Administrasi Pengambilan Cuti		
SOP Pengusulan KARIS / KARSU		
SOP Pengusulan Tunjangan Istri / Suami		
SOP Pengusulan Tunjangan Anak		
SOP Penyimpanan Arsip		
SOP Pengambilan Data Kesehatan		
SOP Penyusunan RKA dan RKPA		
SOP Pembuatan Informasi Data yang Dipublikasikan Melalui Website		
SOP Pembuatan Informasi Kegiatan Rutin yang Dipublikasikan Melalui Website		
SOP Publikasi Informasi Melalui Website		
SOP Penyusunan DPA dan DPPA		
SOP Pembinaan Kader Posyandu Lansia		
SOP Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP)		
SOP Pelacakan Kasus Gizi Buruk		
SOP Pemilihan Duta Kesehatan		
SOP Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan		

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
		SOP Membuat Desain Media Promosi Kesehatan
		SOP Pembuatan Jadwal Siaran Interaktif Radio dan Televisi
		SOP Siaran Keliling
		SOP Membuat Jadwal Siaran Keliling
		SOP Pendistribusian Vaksin ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		SOP Pelaporan Data Surveilans
		SOP Penyelidikan Epidemiologi
		SOP Pencatatan dan Pelaporan Penyakit Diare
		SOP Pencatatan dan Pelaporan Penyakit Filariasis
		SOP Pencatatan dan Pelaporan Penyakit ISPA (Pneumonia)
		SOP Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis
		SOP Pencatatan dan Pelaporan Kolaborasi TB-HIV
		SOP Pencatatan dan Pelaporan Penyakit Hepatitis
		SOP Pencatatan dan Pelaporan Penyakit HIV/AIDS
		SOP Pencatatan dan Pelaporan Penyakit Tidak Menular
		SOP Pencatatan dan Pelaporan Kesehatan Jiwa
		SOP Pencatatan dan Pelaporan Kesehatan Indera
		SOP Penjadwalan Tim Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
		SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Lembar Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO)
		SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Toko Alat Kesehatan
		SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		SOP Pelayanan Penerbitan Kartu Madiun Sehat
		SOP Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		Komitmen Izin Usaha Apotek
		SOP Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan
		Komitmen Izin Mendirikan Klinik
		SOP Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan
		Komitmen Izin Operasional
		SOP Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan
		Komitmen Izin Mendirikan Rumah Sakit
		SOP Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan
		Komitmen Izin Operasional Rumah Sakit
		SOP Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan
		Komitmen Izin Usaha Toko Obat
		SOP Pencatatan dan Pelaporan KB Usia Subur, KtP, KtA dan PPIA
		SOP Verifikasi Catatan Peserta KB Puskesmas
		SOP Penyusunan Konsep Pelaporan FI/DALAP/13
Tingkat Kecamatan dan Kota		
SOP Pencatatan dan Pelaporan F/II/KB/13		
SOP Pencatatan dan Pelaporan Usia Kawin		
Pertama (UKP) bagi Calon Pengantin Perempuan		
SOP Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan		
Kampung KB		
SOP Pelaporan FI/DALAP/13		
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SOP Pembangunan Jalan
		SOP Pembangunan Jembatan
		SOP Pemutakhiran Data Jalan dan Jembatan
		SOP Sewa Alat Berat Pada Seksi Pemeliharaan
		Jalan Dan Jembatan Bidang Bina Marga
		SOP Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Bidang
		Bina Marga
		SOP Pemutakhiran Data Badan Usaha
		SOP Penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknis
		Badan Usaha Jasa Konstruksi
		SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Jasa
		Konstruksi

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Verifikasi Rekomendasi Teknis Untuk Bahan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
		SOP Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
		SOP Menyediakan Bangunan Pengaman Pada Wilayah Sungai
		SOP Rekomendasi Teknis Untuk Izin Penyediaan Peruntukan Dan Pengusahaan Sumber Daya Air
		SOP Rekomendasi Ijin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengusahaan Dan Atau Pembongkaran Bangunan Dan Atau Saluran Irigasi Pada Jaringan Irigasi Primer Dan Sekunder Dalam Daerah Irigasi Yang Berada Dalam Satu Daerah
		SOP Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Pengubahan Dan/Atau Pembongkaran Bangunan Saluran Drainase
		SOP Penyusunan Perencanaan Program Dan Evaluasi Serta Penyiapan Bahan Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Teknis Dan Pelaksanaan Pembangunan, Perbaikan Atau Peremajaan Dan Pemeliharaan Sistem Drainase Atau Saluran Pematuan
		Sop Monitoring, Evaluasi Dan Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Drainase
		SOP Pengamatan Tinggi Muka Air
		SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
		SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
		SOP Penyusunan Laporan Pelanggaran Disiplin Pegawai
		SOP Penerbitan Surat Ijin Cuti
		SOP Pengajuan Pensiun
		SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Pelayanan Kebersihan & Ketertiban
		SOP Pelayanan Perizinan Sewa GOR, Stadion Wilis & Wisma Haji
		SOP Pemeliharaan Gedung & Bangunan
		SOP Pemeliharaan Peralatan & Mesin
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	SOP Pemeliharaan Gangguan PJU
		SOP Pemasangan Lampu Dalam Rangka Event Pemerintah Kota Madiun
		SOP Penebangan Pohon
		SOP Perawatan Ruang Terbuka Hijau
		SOP Pelayanan Pemakaman
		SOP Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni & Jambanisasi
		SOP Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan
		SOP Pelaksanaan Pekerjaan Penataan Kampung Tematik
		SOP Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi) dan Saluran Lingkungan Permukiman
		SOP Pelaksanaan Identifikasi, Pengumpulan Dan Pengolahan Data Rumah Korban Bencana
		SOP Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Penyediaan Rumah Korban Bencana
		SOP Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
		SOP Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Relokasi Rumah Korban Bencana
		SOP Perencanaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
		SOP Pelaksanaan Rehab Rumah Korban Bencana
		SOP Sosialisasi & Persiapan Rehab Atau Relokasi Rumah
		SOP Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		Rehabilitasi Atau Relokasi Rumah Korban Bencana SOP Fasilitasi Penyediaan Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) SOP Penyusunan Pedoman Dan Manual Penghunian Dan Pengelolaan Rumah Susun Bagi (MBR) SOP Pengolahan Data Perumahan SOP Pemeliharaan Dan Perawatan Rumah Susun Mbr SOP Operasionalisasi Rumah Susun Mbr SOP Proses Serah Terima Psu Perumahan SOP Pengajuan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan SOP Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Perumahan SOP Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan SOP Melaksanakan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) SOP Melaksanakan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung SOP Ijin Lokasi IPPT
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SOP BINTEK KHA SOP Penanganan Kasus Korban KDRT dan Non KDRT 2021 SOP Pencegahan Perkawinan Usia Anak Dini SOP Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SOP Hari Ibu SOP HKG SOP Pembinaan dan Monev P3EL SOP Penyelenggaraan Pelatihan Bimtek PPRG

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Pleno PKK
		SOP Pemberian Bantuan Alat Bantu
		SOP Pemberian Bantuan OT
		SOP Pemberian Bantuan Pemakaman OT
		SOP Pemberian SPT Pendampingan
		SOP Bencana
		SOP Gelar Pahlawan
		SOP Ijin Ziarah TMP
		SOP Pelayanan STP OROSO_Yayasan
		SOP Penerbitan Rekom Izin Pengumpulan sumbangan dipergunakan di Wil Kota Madiun
		SOP Penerbitan Rekom Izin UGB
		SOP Penerbitan Rekomendasi Adopsi Anak
		SOP Rakor data terpilah gender
		SOP Gelar Perintis Kemerdekaan
		19
SOP Administrasi Surat Keluar (lingkup Pemkot Madiun)		
SOP Administrasi Surat Keluar (di luar Pemkot Madiun)		
SOP Penyimpanan Arsip		
SOP Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat		
SOP Pembuatan KIR		
SOP Pengajuan Usulan Penghapusan Barang		
SOP Penyelenggaraan Rapat Dinas		
SOP Pelayanan Tamu		
SOP Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik		
SOP Pengamanan Kantor Kecamatan		
SOP Penatausahaan Barang		
SOP Publikasi Informasi melalui Website		
SOP Pengajuan Uang Persediaan		
SOP Pengajuan Ganti Uang (GU) Tambah Uang (TU) Persediaan		
SOP Pengajuan LS Gaji-Belanja Langsung-Belanja		

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		Tidak Langsung
		SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
		SOP Penyusunan Laporan Keuangan
		SOP Penyusunan Neraca Aset
		SOP Penyusunan DPA-DPPA
		SOP Penyusunan SPH Fungsional Administratif
		SOP Pengumpulan Data Pengukuran Kinerja
		SOP Penyusunan Renja
		SOP Penyusunan Perjanjian Kerja
		SOP Penyusunan RKA-RKPA
		SOP Penyusunan Renstra
		SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
		SOP Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
		SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
		SOP Penerbitan Ijin Cuti Pegawai
		SOP Penyusunan SKP
		SOP Pengajuan Ijin Menikah
		SOP Pengajuan Pelanggaran Disiplin Pegawai
		SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
		SOP Pengusulan Kartu Pegawai
		SOP Pengusulan Kartu Istri (KARIS)- Kartu Suami (KARSU)
		SOP Pengusulan Tunjangan Istri-Suami
		SOP Pengusulan Tugas Belajar
		SOP Pengusulan Izin Belajar
		SOP Pengusulan Satya Lencana
		SOP Pengajuan Pensiun
		SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat
		SOP Pembuatan Rekomendasi Paspor
		SOP Penertiban Angkatan Kerja (AK) I (Kartu Tanda Pencari Kerja) <i>Online</i>
		SOP Penerbitan Ijin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
		SOP Pengesahan Peraturan Perusahaan
		SOP Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
		SOP Pencatatan Perjanjian Waktu Tertentu
		SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Pinjaman Modal Usaha Bagi Ikm Melalui Bank
		SOP Pelatihan Produksi Industri
		SOP Fasilitasi Pameran UMKM
20	Dinas Pendidikan	SOP Penyebaran Informasi Melalui Website
		SOP Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
		SOP Pengadaan Barang/Jasa (Metode Pemilihan Penyedia Pengadaan Langsung)
		SOP Administrasi Surat Masuk
		SOP Administrasi Surat Keluar (lingkup Pemkot Madiun)
		SOP Penyimpanan Arsip
		SOP Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat
		SOP Pembuatan KIR
		SOP Pengajuan Usulan Penghapusan Barang
		SOP Penyelenggaraan Rapat Dinas
		SOP Pelayanan Tamu
		SOP Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
		SOP Pengamanan Kantor
		SOP Penatausahaan Barang
		SOP Publikasi Informasi melalui Website
		SOP Administrasi Surat Masuk (melalui SIKD)
		SOP Pengadaan Barang
		SOP Pengajuan Uang Persediaan
		SOP Pengajuan Ganti Uang (GU) Tambah Uang (TU) Persediaan
		SOP Pengajuan LS Gaji-Belanja Langsung-Belanja Tidak Langsung
SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan		

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		Keuangan
		SOP Penyusunan Laporan Keuangan
		SOP Penyusunan Neraca Aset
		SOP Penyusunan DPA-DPPA
		SOP Penyusunan SPJ Fungsional Administratif
		SOP Pengajuan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
		SOP Penyusunan Renja
		SOP Penyusunan RKA-RKPA
		SOP Penyusunan Perjanjian Kerja
		SOP Penyusunan Renstra
		SOP Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
		SOP Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
		SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
		SOP Penyusunan Penyediaan Data dan Informasi LKPJ LPPD
		SOP Penerbitan Ijin Cuti Pegawai
		SOP Penyusunan SKP
		SOP Pengajuan Ijin Menikah
		SOP Pengajuan Pelanggaran Disiplin Pegawai
		SOP Pengusulan Kartu Pegawai
		SOP Pengusulan Kartu Istri (KARIS)- Kartu Suami (KARSU)
		SOP Pengusulan Tunjangan Istri-Suami-Anak
		SOP Pengusulan Tugas Belajar
		SOP Pengusulan Izin Belajar
		SOP Pengusulan Satya Lencana
		SOP Pengajuan Pensiun
		SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat
		SOP Penerbitan Surat Keterangan Praktek Kerja Lapangan
		SOP Penerbitan Karpeg Guru
		SOP Penerbitan Surat Ijin Cuti Guru
		SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Guru

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Penerbitan Surat Ijin Belajar Guru
		SOP Penerbitan Surat Ijin Nikah Guru
		SOP Penerbitan Surat Perintah Tugas Guru
		SOP Pengusulan SKP Pegawai Guru
		SOP Pengusulan Satya Lencana Guru
		SOP Penyusunan Laporan Selesai Belajar Guru
		SOP Pengajuan Usul Tunjangan Keluarga Guru
		SOP Workshop Kompetensi Pendidik Guru
		SOP Pelaksanaan Lomba Pendidik Guru
		SOP Pengajuan Ijin Cerai Guru
		SOP Permohonan Karis Karsu Guru
		SOP Penerbitan Surat Ijin Cuti Tenaga Kependidikan
		SOP Penerbitan Daftar Urut Kepangkatan Tenaga Kependidikan
		SOP Penerbitan Surat Ijin Belajar Tenaga Kependidikan
		SOP Penerbitan Surat Ijin Nikah Tenaga Kependidikan
		SOP Pengusulan Pensiun Tenaga Kependidikan
		SOP Penerbitan Surat Perintah Tugas Tenaga Kependidikan
		SOP Pengusulan SKP Pegawai Tenaga Kependidikan
		SOP Pengusulan Satya Lencana Tenaga Kependidikan
		SOP Pengusulan Mutasi Pegawai
		SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
		SOP Pengusulan Kontrak Pegawai Tidak Tetap (PTT)
		SOP Pengusulan Mutasi Jenjang Guru
		SOP Pengusulan Promosi Kepala Sekolah
		SOP Pengusulan SK Penetapan Tambahan Penghasilan Gaji Sertifikasi Guru

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Pengusulan Pensiun SOP Penerbitan Ijin Pendirian SD SOP Penerbitan Ijin Pendirian SMP SOP Penerbitan ijin lembaga kursus SOP Perpanjangan ijin lembaga kursus SOP Penerbitan ijin lembaga PAUD SOP Perpanjangan ijin lembaga PAUD
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SOP Lomba Cipta Menu SOP Monitoring informasi harga pasar SOP Neraca Bahan Makanan SOP Pembinaan Lembaga Keamanan SOP Workshop Pola Pangan Harapan SOP Bantuan Bibit Pangan Lestari SOP Pelayanan Bantuan Benih SOP Pelayanan Sewa Kios Pasar Ikan SOP Surat Rekomendasi Usaha dan Atau Usaha Perikanan SOP Fasilitasi Pengajuan Klaim Asuransi Usahatani Padi SOP Permintaan Bantuan Pestisida Pertanian SOP Penerbitan Surat Pengantar Pencairan Dana SOP Penerbitan Rekomendasi Kredit Usaha Tani SOP Verifikasi Dan Validasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi SOP 4.1.1.1 Administrasi Surat Masuk SOP Administrasi Surat Keluar (lingkup Pemkot Madiun) SOP Administrasi Surat Keluar (di luar Pemkot Madiun) SOP Penyimpanan Arsip SOP Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat SOP Pembuatan KIR

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Pengajuan Usulan Penghapusan Barang
		SOP Penyelenggaraan Rapat Dinas
		SOP Pelayanan Tamu
		SOP Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
		SOP Pengamanan Kantor
		SOP Penatausahaan Barang
		SOP Publikasi Informasi melalui Website
		SOP Administrasi Surat Masuk (melalui SIKD) Kominfo dan Perpus
		SOP Pengadaan Barang
		SOP Pengajuan Uang Persediaan
		SOP Pengajuan Ganti Uang (GU) Tambah Uang (TU) Persediaan
		SOP Pengajuan LS Gaji-Belanja Langsung-Belanja Tidak Langsung
		SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
		SOP Penyusunan Laporan Keuangan
		SOP Penyusunan Neraca Aset
		SOP Penyusunan DPA-DPPA
		SOP Penyusunan SPJ Fungsional Administratif
		SOP Pengajuan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
		SOP Penyusunan SKP
		SOP Pengajuan Izin Menikah
		SOP Pengajuan Pelanggaran Disiplin Pegawai
		SOP Pengusulan Kartu Istri (KARIS)- Kartu Suami (KARSU)
		SOP Pengusulan Tunjangan Istri-Suami-Anak
		SOP Pengusulan Tugas Belajar
		SOP Pengusulan Izin Belajar
		SOP Pengusulan Satya Lencana
		SOP Pengajuan Pensiun
		SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Penerbitan Surat Keterangan Praktek Kerja Lapangan
		SOP Penyusunan Renja
		SOP Penyusunan RKA-RKPA
		SOP Penyusunan Perjanjian Kerja
		SOP Penyusunan Renstra
		SOP Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
		SOP Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
		SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
		SOP Penyusunan Penyediaan Data dan Informasi LKPJ LPPD
22	Dinas Lingkungan Hidup	SOP Pengajuan Pensiun
		SOP Pengusulan Satya Lencana
		SOP Penerbitan Surat Keterangan Praktek Kerja Lapangan
		SOP Pengusulan Izin Belajar
		SOP Pengusulan Tugas Belajar
		SOP Pengusulan Kartu Istri (KARIS)/ Kartu Suami (KARSU)
		SOP Pengusulan Tunjangan Istri/Suami/Anak
		SOP Pengajuan Pelanggaran Disiplin Pegawai
		SOP Pengajuan Ijin Menikah
		SOP Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
		SOP Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
		SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
		SOP Penyusunan Laporan Kinerja
		SOP Penyusunan Pemenuhan Data dan Informasi LKPJ/LPPD
		SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja/Perubahan Perjanjian Kinerja
		SOP Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ rencana Kerja Perubahan (RKPA)
SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/Rencana Kerja Perubahan (RENJA)		

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		Perubahan) SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)/ Perubahan RENSTRA
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SOP Penerbitan KTP el baru SOP Penerbitan KTP el hilang, rusak dan perubahan data SOP Penerbitan KIA SOP Penerbitan Kutipan akta kelahiran SOP Penerbitan Kutipan kedua akta kelahiran SOP Penerbitan Akte kematian SOP Penerbitan Akte kematian Lempeng gapit SOP Inovasi Pelayanan SOP Pemanfaatan Data SOP Penerbitan Akta Perkawinan Non muslim SOP Penerbitan Akta Perceraian Non muslim SOP Penerbitan Akta Pengangkatan Anak SOP-Seksi PIAK-Instalasi SIAK SOP-Seksi PIAK-Pemberian Hak Akses SIAK SOP laporan layanan Kependudukan harian SOP Penerbitan KK BARU (Pindah Datang Dan Perubahan Data) SOP Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa SOP Pengajuan Uang Persediaan SOP Penyusunan Laporan keuangan SOP Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Administratif dan Fungsional SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SOP Penyusunan Rencana Strategis Kota Madiun SOP Penyusunan RKA dan DPA SOP Pengajuan Ijin Menikah SOP Pengajuan Pelanggaran Disiplin Pegawai SOP Pengusulan Kartu Pegawai SOP Pengusulan Kartu Istri (KARIS) - Kartu

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		Suami (KARSU) SOP Pengusulan Tunjangan Istri-Suami SOP Pengusulan Tugas Belajar SOP Pengusulan Izin Belajar SOP Pengusulan Satya Lencana SOP Pengajuan Pensiun SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat
24	Dinas Perhubungan	SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) SOP Pengoperasian Alat Uji Kedalaman Alur Ban SOP Pengoperasian Alat Uji Pengukur Berat SOP Pengoperasian Alat Axle Play Detector SOP Pengoperasian Alat Uji Kemampuan Rem SOP Pengoperasian Alat Uji Emisi Gas Buang SOP Pengoperasian Alat Uji Kemampuan Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama SOP Pengoperasian Alat Uji Kincup Roda Depan SOP Pengoperasian Alat Uji Ketebalan Asap Gas Buang SOP Pengoperasian Alat Uji Tingkat Kebisingan Suara Klakson SOP Pengoperasian Alat Pengukur Akurasi Penunjuk Kecepatan SOP Pengoperasian Alat Uji Daya Tembus Cahaya Pada Kaca SOP Administrasi Surat Keluar SOP Administrasi Surat Masuk SOP Daftar <i>Online</i> dan Non Tunai SOP Mutasi Keluar SOP Numpang Uji SOP Pelayanan Pengujian SOP Pemeliharaan Alat SOP Penerbitan Surat Keterangan Teknis Kendaraan Bermotor Numpang Uji Keluar

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Penerbitan Surat Keterangan Teknis Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk
		SOP Penerbitan Surat Keterangan Teknis Kendaraan Bermotor Rubah Sifat
		SOP Pengaduan
		SOP Rubah Bentuk
		SOP Rubah Sifat
		SOP Tata Cara Pengujian
		SOP Pendaftaran <i>Online</i> dan Pembayaran Non Tunai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	SOP Pemberian Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
		SOP Layanan Aspirasi dan Solusi di LPPL Radio Suara Madiun
		SOP Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Madiun
		SOP Pelayanan Data Statistik Sektoral
		SOP Pelayanan Wifi Gratis
		SOP Layanan Call Center 112
		SOP Government Chief Information Officer
		SOP Pelayanan Pengembangan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Masyarakat
		SOP Penyelenggaraan Pelatihan dan Bimtek SDM TIK
		SOP Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pada Pengembangan Sumber Daya Teknolohi Informasi dan Komunikasi
		SOP Analisis Aplikasi Baru
		SOP Pemenuhan Permintaan Akses
		SOP Pemenuhan Permintaan Layanan
		SOP Penanganan Insident
		SOP Penanganan Permasalahan
		SOP Perencanaan Aplikasi
		SOP Pengembangan Aplikasi
		SOP Penanganan Aplikasi

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Backup database dan Sistem informasi
		SOP Design Aplikasi
		SOP Implementasi Aplikasi
		SOP Migrasi Aplikasi
		SOP Pemantauan Aplikasi
		SOP Pemberhentian Aplikasi
		SOP Perawatan Infrastruktur TI
		SOP Perbaikan Aplikasi
		SOP Administrasi Surat Masuk
		SOP Surat Keluar (Yang Ditujukan Dalam Lingkup Pemerintah Kota Madiun)
		SOP Surat Keluar (Yang Ditujukan Di Luar Pemerintah Kota Madiun)
		SOP Penyimpanan Arsip Aktif
		SOP Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat
		SOP Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan
		SOP Pengajuan Usulan Penghapusan Barang
		SOP Penyelenggaraan Rapat Dinas
		SOP Pelayanan Tamu
		SOP Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
		SOP Pengamanan Kantor
		SOP Penatausahaan Barang
		SOP Publikasi Informasi Melalui website
		SOP Pengadaan Barang/Jasa (Metode Pemilihan Penyedia Pengadaan Langsung)
		SOP Pengajuan Uang Persediaan
		SOP Pengajuan Ganti Uang/Tambah Uang Persediaan
		SOP Pengajuan LS/LS Gaji/LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya
		SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
		SOP Penyusunan Laporan Keuangan
		SOP Penyusunan Neraca Aset

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran
		SOP Penyusunan SPJ Fungsional/Administratif
		SOP Pengajuan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
		SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan)
		SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA)
		SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja/Perubahan Perjanjian Kinerja
		SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
		SOP Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
		SOP Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)
		SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
		SOP Penyusunan Pemenuhan Data dan Informasi LKPJ/LPPD
		SOP Penerbitan Ijin Cuti Pegawai Eselon III ke bawah
		SOP Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
		SOP Pengajuan Ijin Menikah
		SOP Pengajuan Pelanggaran Disiplin Pegawai
		SOP Pengusulan Kartu Pegawai
		SOP Pengusulan Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)
		SOP Pengusulan Tunjangan Istri/Suami/Anak
		SOP Pengusulan Tugas Belajar
		SOP Pengusulan Izin Belajar
		SOP Pengusulan Satya Lencana
		SOP Pengajuan Pensiun
		SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Penerbitan Surat Keterangan Praktek Kerja Lapangan
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Dan Usaha Mikro	SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri/ Perluasan IUI
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan IUTS/IUPP
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan IUTS Terintegrasi Dengan Pusat Perbelanjaan
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan dan Perpanjangan Pendidikan Non Formal
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Lembaga Pelatihan Kerja
		SOP Izin Pengusahaan Rumah Kos/Pemondokan
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan - AMDAL
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan - UKL-UPL
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Laboratorium Klinik
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C,D dan Kelas D Pratama
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C,D dan Kelas D Pratama
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Toko Alat Kesehatan
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Apotek
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Toko Obat
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Klinik
		SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah
		SOP Penerbitan Surat Izin Reklame Permanen
		SOP Penerbitan Surat Izin Reklame Insidentil
		SOP Surat Izin Kerja Perawat
		SOP Surat Izin Kerja Perawat
		SOP Surat Izin Kerja Perawat Gigi
		SOP Surat Izin Praktek Bidan
		SOP Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
		SOP Surat Izin Praktek Apoteker
		SOP Surat Izin Praktik Ahli Teknologi LAB Medis
		SOP Surat Izin Kerja Terapis Wicara
		SOP Surat Izin Praktik Fisioterapis
		SOP Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
		SOP Surat Izin Kerja Perekam Medis
		SOP Surat Izin Praktik Elektromedis
		SOP Surat Izin Kerja Refraksionis Optision
		SOP Surat Izin Kerja Radiografer

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Surat Izin Kerja Ototis Prostetis
		SOP Surat Izin Praktek Terapis Wicara
		SOP Surat Izin Kerja Teknisi Gigi
		SOP Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
		SOP Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
		SOP Surat Izin Praktik Penata Anastesi
		SOP Surat Izin Praktik Dokter Hewan
		SOP Surat Izin Praktek Akupunturis
		SOP Surat Izin Kerja Akupunturis
		SOP Surat Izin Kerja Optometris
		SOP Surat Izin Praktek Ortoris Prostetis
		SOP Surat izin Kerja Teknisi Kardiovaskuler
		SOP Surat Izin Klinik Hewan
		SOP Surat Izin Rumah Sakit Hewan
		SOP Surat Izin Rumah Sakit Hewan Khusus
		SOP Surat Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner
		SOP Surat Izin Tenaga Kesehatan Hewan WNA
		SOP Penerbitan Izin Penempatan Pedagang Pasar
		SOP Penerbitan Izin Promosi Dalam Pasar
		SOP Penertiban Reklame Dalam Pasar
		SOP Izin Institusi Penguji Alat Kesehatan
		SOP Izin Penyelenggaraan Puskesmas
		SOP Izin Panti Sehat
		SOP Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik
		SOP Izin Unit Penyelenggaraan Optikal
		SOP Izin Unit Transfusi Darah/Bank Darah
		SOP Surat Izin Kerja Okupasi Terapis
		SOP Surat Izin Praktik Psikologi Klinis
		SOP Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
		SOP Surat Izin Tukang Gigi
		SOP Izin Pemakaian Kekayaan Daerah tanah dan/Atau Bangunan
		SOP Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		dan/atau Lapangan SOP Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Penurunan Trotoar SOP Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Bahu Badan Jalan SOP Izin Perubahan Penggunaan Tanah SOP Izin Penempatan Bangunan Reklame SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi SOP Izin Mendirikan Bangunan SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi SOP Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	SOP Pendataan Jenis Organisasi Kesenian SOP Penerbitan Nomor induk Kesenian SOP Penyelenggaraan Pameran seni budaya SOP Pendataan Benda Cagar Budaya SOP Pendataan Lembaga Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa SOP Peningkatan Apresiasi seni SOP Penerbitan rekomendasi penghayatan kepercayaan SOP Penerbitan Nomor Registrasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa SOP Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tingkat Kota (PORKOT) SOP KESEGARAN JASMANI revisi SOP HAORNAS SOP LPS SOP PENGIRIMAN KONTINGEN SOP Pembinaan dan pengiriman Paskib
28	Dinas Perpustakaan	SOP Administrasi Surat Keluar (Yang Ditujukan Dalam Lingkup Pemerintah Kota Madiun)

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
	dan Kearsipan	SOP Administrasi Surat Masuk
		SOP Akuisisi Arsip Statis
		SOP Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah
		SOP Bimbingan Teknis Budaya Baca dan Literasi
		SOP Layanan Alih Media Arsip
		SOP Layanan Baca Di Tempat
		SOP Layanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup
		SOP Layanan Keanggotaan Perpustakaan Pada Sub Koordinator Pengelolaan Perpustakaan dan Pelestarian Naskah Kuno
		SOP Layanan Layanan JARIMU (Jemputan Antar-ambil buku dari rumahmu)
		SOP Layanan Peminjaman Buku <i>Online</i>
		SOP Layanan Peminjaman Buku
		SOP Layanan Pengembalian Buku
		SOP Layanan Perpanjangan Buku
		SOP Layanan Registrasi Ulang/Perpanjangan KTA Perpustakaan
		SOP Lomba Bertutur
		SOP Melaksanakan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Subkoordinator Pengelolaan Perpustakaan dan Pelestarian Naskah Kuno
		SOP Melaksanakan Kerja sama dan Kemitraan Dengan Perangkat Daerah dan/ Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya Pada Seksi Pengelolaan Arsip Statis
		SOP Melaksanakan Kerja sama dan Kemitraan Dengan Perangkat Daerah dan/ Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Mengembangkan Kekhasan Koleksi Perpustakaan
		SOP Menghimpun Data, Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Dengan Lingkup Tugasnya Pada Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis
		SOP Menghimpun Data, Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Dengan Lingkup Tugasnya Pada Subkoordinator Pengelolaan Arsip Dinamis
		SOP Menghimpun Data, Menyusun Rencana Kebijakan Teknis Operasional Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya
		SOP Menghimpun Data, Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja Program, Kegiatan dan anggaran Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya
		SOP Menghimpun Data, Menyusun Rumusan Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya
		SOP Menghimpun Data, Menyusun Rumusan Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya Pada Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis
		SOP Menghimpun, Menganalisa Data Sebagai Bahan Koordinasi Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya
		SOP Merumuskan Sasaran Pelaksanaan Tugas Sesuai dengan Lingkungan Tugasnya
		SOP Merumuskan Sasaran Pelaksanaan Tugas Sesuai Dengan Lingkungan Tugasnya Pada Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis
		SOP Pelaksanaan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Subkoordinator Pembudayaan Gemar Membaca

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Subkoordinator Kebudayaan Gemar Membaca
		SOP Pelatihan Penggunaan Perpustakaan Elektronik
		SOP Pelayanan Tamu
		SOP pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
		SOP Pembinaan Perpustakaan Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan PAUD, Perpustakaan Satuan Pendidikan Dasar, Perpustakaan perguruan Tinggi dan TBM
		SOP Pembuatan Kartu Investasi Ruangan
		SOP Pemilihan Duta Baca
		SOP Pemusnahan Arsip Dibawah 10 Tahun
		SOP Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
		SOP Penataan Arsip Aktif
		SOP Penataan Arsip Inaktif Tidak Teratur
		SOP Penataan Arsip Inaktif Teratur
		SOP Penatausahaan Barang
		SOP Pendataan Kelembagaan Dan Teknis Pengelola Perpustakaan
		SOP Penelusuran Naskah Kuno
		SOP Penerbitan Ijin Cuti
		SOP Penetapan Jadwal Pelayanan perpustakaan Keliling
		SOP Pengajuan Ganti Uang/ Tambah Uang Persediaan
		SOP Pengajuan Ijin Menikah
		SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat
		SOP Pengajuan LS Belanja Gaji/LS Belanja Tidak Langsung/ LS Belanja Langsung
		SOP Pengajuan Pelanggaran Disiplin Pegawai
		SOP Pengajuan Pensiun
		SOP Pengajuan Usulan Penghapusan Barang

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Pengajuan Uang Persediaan
		SOP Pengamanan Kantor
		SOP Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah
		SOP Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
		SOP Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
		SOP Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
		SOP Pengolahan Arsip Statis
		SOP Pengusulan Izin belajar
		SOP Pengusulan kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)
		SOP Pengusulan Kartu Pegawai
		SOP Pengusulan Satya Lencana
		SOP Pengusulan Tugas Belajar
		SOP Pengusulan Tunjangan Istri/Suami/Anak
		SOP Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Yang Digabung dan Dibubarkan, Dan Pemekaran Daerah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan
		SOP Penyelenggaraan Rapat Dinas
		SOP Penyiapan Data Sebagai Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pada Subkoordinator Pengelolaan Perpustakaan dan Pelestarian Naskah Kuno
		SOP Penyimpanan Arsip Aktif
		SOP Penyusunan Daftar Urut kepangkatan
		SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ DOKumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran
		SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
		SOP Penyusunan Laporan keuangan
		SOP Penyusunan Laporan Kinerja
		SOP Penyusunan Neraca Aset
		SOP Penyusunan Pelaksanaan Program Dan

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		Evaluasi Pelaksanaan Tugas-Tugas Pada Subkoordinator Pembudayaan Gemar Membaca
		SOP Penyusunan Pelaksanaan Program dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas-Tugas Pada Subkoordinator Pengelolaan Arsip Statis
		SOP Penyusunan Pelaksanaan Program Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas-Tugas Pada Subkoordinator Pengelolaan Perpustakaan dan Pelestarian Naskah Kuno
		SOP Penyusunan Perencanaan Program Subkoordinator Pengelolaan Arsip Dinamis
		SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja
		SOP Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran/ Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran
		SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
		SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan)
		SOP Penyusunan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Subkoordinator Pengelolaan perpustakaan dan Pelestarian Naskah Kuno
		SOP Penyusunan Rencana Strategis
		SOP Penyusunan Sasaran kerja Pegawai
		SOP Penyusunan SPJ Fungsional/Administrasi
		SOP Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat
		SOP Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Daerah
		SOP Publikasi Informasi Melalui Website
		SOP Restorasi Arsip
		SOP Tata Cara Akses Arsip Statis
29	Dinas Perdagangan	SOP Penyelenggaraan Rapat Dinas
		SOP Pengawasan Lapangan Bidang Perdagangan
		SOP Pemberian Rekomendasi TDUP Pedagang

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		Kaki Lima SOP Izin Persetujuan Pameran SOP Perpanjangan Ijin Penempatan SOP Pelaksanaan Pameran Dagang SOP Penerbitan Surat Permohonan Izin Promosi SOP Penerimaan Retribusi Pasar SOP Pemeliharaan Pasar SOP Pengawasan Pasar SOP Keamanan dan Ketertiban Pasar SOP Administrasi Surat Masuk SOP Administrasi Surat Keluar (Yang Ditujukan Dalam Lingkup Pemerintah Kota Madiun) SOP Administrasi Surat Keluar (Yang Ditujukan Keluar Instansi Pemerintah Kota Madiun) SOP Penyimpanan Arsip Aktif SOP Pengamanan Kantor SOP Publikasi Informasi Melalui Website SOP Pelayanan Tamu SOP Pelayanan Penyusunan Pengaduan
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SOP Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran SOP Pemberian Rekomendasi Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran SOP Penyuluhan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran SOP Seksi Operasional Kebakaran dan Penyelamatan SOP Seksi Inspeksi dan Sarana Prasarana Kebakaran SOP Pemberian Rekomendasi Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran SOP Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran SOP Non Yustisi

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Yustisi
		SOP Yustisi Prokes
		SOP Pengajuan Cuti Pegawai
		SOP Penyusunan Penetapan Kinerja
		SOP Penyusunan Rencana Kerja
		SOP Penyusunan Renstra SKPD
		SOP Patroli Gabungan
		SOP Patroli Insidentil
		SOP Penertiban Gabungan
		SOP Penertiban Insidentil
		SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		SOP Penyusunan Laporan Keuangan
		SOP Pelayanan Tamu
		SOP Pembuatan KIR
		SOP Penatausahaan Barang
		SOP Penerbitan SPM
		SOP Pengaduan Masyarakat
		SOP Pengesahan SPJ Fungsional
		SOP Penghapusan Barang
		SOP Penyimpanan Arsip
		SOP Penyusunan Neraca Aset
		SOP Penyusunan RKA dan DPA
		SOP Perawatan Kendaraan Dinas
		SOP Penerbitan Surat Perintah Pembayaran
		SOP Surat Masuk
		SOP Surat Keluar
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	SOP Administrasi Surat Masuk
		SOP Administrasi Surat Keluar (lingkungan Pemkot Madiun)
		SOP Administrasi Surat Keluar (di luar Pemkot Madiun)
		SOP Penyimpanan Arsip
		SOP Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Pembuatan KIR
		SOP Pengajuan Usulan Penghapusan Barang
		SOP Penyelenggaraan Rapat Dinas
		SOP Pelayanan Tamu
		SOP Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
		SOP Pengamanan Kantor Kecamatan
		SOP Penatausahaan barang
		SOP Publikasi Informasi Melalui Website
		SOP Penerbitan Ijin Cuti Pegawai
		SOP Penyusunan SKP
		SOP Pengajuan Ijin Menikah
		SOP Pengajuan Pelanggaran Disiplin Pegawai
		SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
		SOP Pengusulan Kartu Pegawai
		SOP Pengusulan Kartu Istri (KARIS)- Kartu Suami (KARSU)
		SOP Pengusulan Tunjangan Istri-Suami
		SOP Pengusulan Tugas Belajar
		SOP Pengusulan Izin Belajar
		SOP Pengusulan Satya Lencana
		SOP Pengajuan Pensiun
		SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat
		SOP Penyusunan Renstra
		SOP Penyusunan Renja
		SOP Penyusunan RKA-RKPA
		SOP Penyusunan Perjanjian Kerja
		SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
		SOP Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
		SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
		SOP Pengajuan Daftar Gaji
		SOP Pengajuan Uang Persediaan
		SOP Pengajuan Ganti Uang (GU) Tambah Uang (TU) Persediaan
		SOP Pengajuan LS Gaji-Belanja Langsung-Belanja

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		<p>Tidak Langsung</p> <p>SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan</p> <p>SOP Penyusunan Laporan Keuangan</p> <p>SOP Penyusunan Neraca Aset</p> <p>SOP Penyusunan DPA-DPPA</p> <p>SOP PENGADAAN OBAT DAN BMHP</p> <p>SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN OBAT DAN BMHP</p> <p>SOP PENGAJUAN KEBUTUHAN Belanja ANGGARAN</p> <p>SOP PENGAJUAN KEBUTUHAN ANGGARAN</p> <p>SOP MASTER PENUNJANG MEDIS</p> <p>SOP Penyusunan Daftar Kebutuhan Linen</p> <p>SOP Pengadaan Makan Minum Pasien</p> <p>SOP Pengelolaan Limbah Medis</p> <p>SOP Pengadaan Alat Kesehatan</p> <p>SOP RENSTRA RSUD KONSUL</p> <p>SOP Pengajuan Klaim Biaya Pasien BPJS</p> <p>SOP Pengajuan Klaim Biaya Pasien JAMKESMASTA</p> <p>SOP Penyusunan Rekapitulasi Penerimaan Pasien Bayar</p> <p>SOP Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran Pendapatan</p>
32	Kecamatan Manguharjo	<p>SOP Penyiapan Data Koordinasi dengan Instansi Lain Bidang Sosial, Kesehatan dan Keagamaan</p> <p>SOP Penyiapan Bahan Fasilitasi Dengan Instansi Bidang Sosial, Kesehatan, Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan pemuda dan Olahraga</p> <p>SOP Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)</p> <p>SOP Pelayanan Penerbitan Dispensasi Nikah</p> <p>SOP Penyiapan Laporan Pelaksanaan Program di</p>

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		Bidang Kesejahteraan Sosial
		SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarpras dan Fasilitas Pelayanan Umum
		SOP Koordinasi dengan Perangkat Daerah Instansi Vertikal Swasta di Bidang Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
		SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan
		SOP Pemantauan Musrenbang Kelurahan
		SOP Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
		SOP Pelaksanaan Lomba Kelurahan Berhasil Tingkat Kecamatan
		SOP Pembinaan Ketua LPMK dan Ketua RT atau RW
		SOP Pelaksanaan Bimbingan dan Supervisi Administrasi Kelurahan
		SOP Pelaksanaan Fasilitasi dan Konsultasi Administrasi Kelurahan
		SOP Pelaksanaan Rakor Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dgn PD, Kelurahan dan Instansi Vertikal
		SOP Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris
		SOP Penyusunan Buku Profil Kecamatan
		SOP Penyusunan Monografi Kecamatan
		SOP Laporan Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Sawah Aset Pemerintah Kota Madiun
		SOP Rekomendasi SKCK
		SOP Legalisasi Pengantar Surat Keterangan IMB
		SOP Legalisasi Pengantar Surat Keterangan Ijin Penutupan Jalan
		SOP Legalisasi Pengantar Surat Keterangan Ijin Keramaian

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		SOP Laporan Ketentraman dan Ketertiban
		SOP Rekomendasi Ijin Usaha
		SOP Penyusunan Renstra
		SOP Penyusunan Renja
		SOP Penyusunan RKA RKPA
		SOP Penyusunan Perjanjian Kerja
		SOP Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
		SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
		SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat
		SOP Penerbitan Ijin Cuti Pegawai
		SOP Penyusunan SKP
		SOP Pengajuan Ijin Menikah
		SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai
		SOP Pengusulan Kartu Istri (KARIS)- Kartu Suami (KARSU)
		SOP Pengusulan Tugas Belajar (konfirmasi BKD)
		SOP Pengusulan Izin Belajar (konfirmasi BKD)
		SOP Pengusulan Satya Lencana
		SOP Pengajuan Pensiun
		SOP Administrasi Surat Masuk
		SOP Administrasi Surat Keluar (lingkup Pemkot Madiun)
		SOP Penyimpanan Arsip
		SOP Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat
		SOP Pembuatan KIR
		SOP Pengajuan Usulan Penghapusan Barang
		SOP Penyelenggaraan Rapat Dinas
		SOP Pelayanan Tamu
		SOP Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
		SOP Pengamanan Kantor Kecamatan
		SOP Penatausahaan Barang
		SOP Publikasi Informasi melalui Website
		SOP Pengajuan Uang Persediaan
		SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan atau

Kode OPD	Nama OPD	Nama SOP
		Tambah Uang
		SOP Pengajuan LS Gaji
		SOP Pengajuan LS Barang jasa
		SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
		SOP Penyusunan Laporan Keuangan
		SOP Penyusunan Neraca Aset
		SOP Penyusunan DPA-DPPA
		SOP Penyusunan SPJ Fungsional Administratif
		SOP Pelayanan Sewa Gedung Pertemuan
33	Kecamatan Kartoharjo	SOP Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris

Lampiran 3.1 Metadata Proses Bisnis SPBE

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.01	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian kelembagaan dan analisa jabatan, ketatalaksanaan, dan pengembangan kinerja	RAB 09.06	Aparatur Negara
P.02	Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bagian peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan publikasi, penyuluhan dan bantuan hukum	RAB 05.01	Hukum
P.03	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian Layanan pengadaan secara elektronik, Pengelolaan pengadaan barang/jasa, Penyusunan dan pengendalian program	RAB 02.08	Investasi

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.04	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian Perekonomian, Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Kesejahteraan rakyat	RAB 02.07	Badan Usaha Milik Negara
P.05	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian Tata usaha dan keuangan, Rumah tangga dan perlengkapan	RAB 09.07	Kesekretariatan Negara
P.06	Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian Pemerintahan, Kerjasama Daerah, Pembinaan kecamatan	RAB 09.01	Aparatur Negara
P.07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian Penanganan Masyarakat dan pengungsi, Tata cara pelaksanaan koordinasi, pengerahan dan pemanfaatan sumber daya manusia, Rehabilitasi, Pengelolaan bantuan	RAB.04.02	Sosial

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.08	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan infrastruktur, kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, penelitian dan pengembangan.	RAB 09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional
				RAB 06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
P.09	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset.	RAB 09.02	Keuangan
P.10	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pengelolaan pajak daerah, dan penagihan, pemeriksaan dan pembukuan.	RAB 09.02	Keuangan
P.11	Badan Kepegawaian	Badan Kepegawaian	Penyelenggaraan urusan pemerintah	RAB 09.06	Aparatur Negara

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	dalam bagian bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi, dan pengembangan sumber daya manusia.	RAB 06.01	Pendidikan
P.12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang ideologi, ketahanan bangsa, dan lembaga politik dan organisasi kemasyarakatan.	RAB 05.03	Hak Asasi Manusia
P.13	Inspektorat Daerah	Inspektorat	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III, Inspektorat Pembantu IV	RAB 09.06	Aparatur Negara
P.14	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian umum dan keuangan, persidangan dan perundang-undangan, dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan	RAB 09.07	Kesekretariatan Negara

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang penyediaan layanan kesehatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, pemberdayaan masyarakat kesehatan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera	RAB 04.01	Kesehatan
P.16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pengelolaan sumber daya air, bidang cipta karya, bina marga, dan tata kota	RAB 03.01	Pekerjaan Umum
P.17	Dinas Perumahan	Dinas Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintah	RAB 03.04	Perumahan

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
	Rakyat dan Kawasan Permukiman	dan Kawasan Permukiman	dalam bidang perumahan, permukiman dan pertanahan, dan prasarana, sarana dan utilitas ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum dan pemakaman	RAB 03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
				RAB 03.06	Pertanahan
P.18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak, rehabilitasi sosial, dan sosial, penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan	RAB 04.02	Sosial
				RAB 04.03	Pemberdayaan Perempuan
P.19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian bidang tenaga kerja, perindustrian, dan koperasi usaha kecil dan menengah	RAB 02.01	Industri
				RAB 02.09	Koperasi
				RAB 02.10	Usaha Kecil dan Menengah
				RAB 03.02	Transmigrasi
				RAB 06.03	Ketenagakerjaan

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.20	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan dasar, dan bidang kurikulum, pembinaan bahasa dan sastra.	RAB 06.01	Pendidikan
P.21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan	RAB 02.03	Pertanian
				RAB 02.05	Peternakan
				RAB 02.06	Perikanan

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.22	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang penataan, pengawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun	RAB 07.05	Lingkungan Hidup
P.23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	RAB 03.07	Kependudukan
P.24	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas, dan angkutan darat	RAB 03.03	Transportasi
P.25	Dinas Komunikasi	Dinas Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintah	RAB 01.01	Pertahanan

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
	dan Informatika	dan Informatika	dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan statistik dan persandian.	RAB 06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
				RAB 09.03	Informasi
				RAB 09.04	Komunikasi
P.26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian kelompok jabatan fungsional penanaman modal, kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu, dan seksi pengaduan, informasi layanan, penyuluhan layanan dan transmigrasi.	RAB 02.08	Investasi
P.27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang kebudayaan, pariwisata, dan kepemudaan dan olahraga	RAB 02.11	Pariwisata
				RAB 06.04	Pemuda
				RAB 06.05	Olahraga
				RAB 08.02	Kebudayaan

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang perpustakaan, dan kearsipan	RAB 06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
P.29	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang usaha perdagangan, dan pengelolaan pasar rakyat	RAB 02.02	Perdagangan
P.30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan pemadam kebakaran dan penyelamatan.	RAB 05.02	Keamanan

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang penyediaan layanan kesehatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera	RAB 04.01	Kesehatan
P.32	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	Penyelenggaraan pengelolaan urusan pemerintah bidang kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan kecamatan	RAB 09.01	Aparatur Negara
P.33	Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Kartoharjo	Penyelenggaraan pengelolaan urusan pemerintah bidang kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan kecamatan	RAB 09.01	Aparatur Negara

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.34	Puskesmas Manguharjo	Puskesmas Manguharjo	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang penyediaan layanan kesehatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera	RAB 04.01	Kesehatan

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.35	Puskesmas Sukosari	Puskesmas Sukosari	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang penyediaan layanan kesehatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera	RAB 04.01	Kesehatan

Lampiran 4.1 Metadata Eksisting Data dan Informasi

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.01.001	Data SAKIP	Informasi Data Daftar Nilai SAKIP masing-masing OPD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi nilai SAKIP masing-masing OPD	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Bagian Organisasi	DAD.01.01, DAD.01.05
DAD.01.002	Data Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Informasi data penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh instansi pemerintahan yang bertanggungjawab	Bertujuan untuk mengetahui Informasi penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Bagian Organisasi	DAD.01.02

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.01.003	Data informasi publik Bagian Organisasi	nformasi data terkait Sekertariat Daerah Bagian Organisasi	Bertujuan untuk penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Bagian Organisasi	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.01.03
DAD.01.004	Data anjab dan ABK	Aplikasi yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen analisis jabatan (Anjab), analisis beban kerja (ABK) dan KJ Pemerintah Kota Madiun	Berfungsi untuk menyusun dokumen analisis jabatan (Anjab), analisis beban kerja (ABK) dan KJ Pemerintah Kota Madiun	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Bagian Organisasi	DAD.01.04, DAL.01.03

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.02.001	Data Produk Hukum	Informasi Data Peraturan perundang-undangan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data perundang-undangan	RAD 05.01 Data Hukum	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Bagian Hukum	DAD.02.01, DAL.02.05
DAD.02.002	Data informasi publik Bagian Hukum	informasi data terkait Sekertariat Daerah Bagian Hukum	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Bagian Hukum	RAD 05.01 Data Hukum	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.02.02, DAL.02.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.03.001	Data LPSE (KTP dan NPWP)	Informasi Data Pengelolaan PBJ Pemerintah Kota Madiun	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengelolaan PBJ Pemerintah Kota Madiun	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.03.01, DAL.03.05
DAD.03.002	Data LPSE	Informasi data Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.	bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.03.02, DAL.03.06

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.03.003	Data produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah	Informasi data E-katalog berupa Aplikasi belanja <i>online</i> yang menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.	Befungsi sebagai tempat penyimpanan elektronik informasi mengenai barang, produk, ataupun jasa. E-katalog memiliki peranan dalam perbandingan berbagai produk sejenis	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	DAD.03.05, DAL.03.09
DAD.03.004	Data informasi publik Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	informasi terkait Sekertariat Daerah Bagian Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Befungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.03.07, DAL.02.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.03.005	Data Tender	Pintu gerbang sistem informasi elektronik, memuat informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).	Berfungsi untuk memberikan informasi terkait pengadaan barang/jasa secara nasional	RAD 02.02 Data Perdagangan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	DAD.03.03, DAL.03.05
DAD.03.006	Data penyedia dan non-penyedia	Aplikasi untuk pemrosesan dan pencatatan pengadaan barang jasa dengan metode epurchasing	Berfungsi melakukan pemrosesan dan pencatatan pengadaan barang jasa dengan metode epurchasing	RAD 02.02 Data Perdagangan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	DAD.03.04, DAL.03.08

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.03.007	data atau informasi kinerja penyedia barang/jasa (identitas, kualifikasi, serta riwayat kinerja penyedia.)	Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau Vendor Mangement System adalah aplikasi yang memuat data atau informasi kinerja penyedia barang/jasa.	Berfungsi untuk memberikan informasi kinerja penyedia barang jasa meliputi data atau informasi mengenai identitas, kualifikasi, serta riwayat kinerja penyedia.	RAD 02.02 Data Perdagangan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	DAD.03.06, DAL.03.05
DAD.04.001	Data Hibah Bansos	Informasi Data nama penerima hibah dan bansos dari bag. Prekokesra	Bertujuan untuk mengetahui Informasi nama penerima hibah dan bansos dari bag. Prekokesra	RAD 04.02 Data Sosial	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	DAL.04.01
DAD.04.002	Data inflasi	Informasi data terkait inflasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait inflasi	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	DAL.04.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.04.003	Data BUMD Kota Madiun	Informasi data terkait BUMD (Laporan Keuangan, SOTK, Seleksi)	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait BUMD (Laporan Keuangan, SOTK, Seleksi)	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	DAL.04.03
DAD.04.004	Data Pelayanan	Informasi data dan kegiatan Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Bertujuan untuk penyebaran informasi dan kegiatan Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.04.01
DAD.05.001	Data Agenda dan Data Kegiatan Walikota	Informasi Data Agenda dan Data Kegiatan Walikota	Bertujuan untuk mengetahui apa saja agenda dan kegiatan walikota selama bertugas	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Bagian Umum	DAD.05.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.05.002	Data Ketersediaan Ruang dan Data Peminjaman Ruang	Informasi Data ketersediaan ruang dan data peminjaman ruangan	Bertujuan untuk mengetahui Data ketersediaan ruang dan Data peminjaman ruangan	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Bagian Umum	DAD.05.02, DAL.05.01
DAD.06.001	Data informasi publik Bagian Pemerintahan	informasi terkait Sekertariat Daerah Bagian Pemerintah , yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Bagian Pemerintah	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.06.01
DAD.07.001	Data Bencana	Informasi data kebencanaan secara dinamis	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data kebencanaan secara dinamis	RAD 04.02 Data Sosial	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.07.002	Data Jumlah Desa Tangguh Bencana	Informasi Data Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	RAD 04.02 Data Sosial	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	tidak ada
DAD.07.003	Data Kerugian Akibat Bencana	Laporan yang menjelaskan kerugian akibat bencana beserta bukti dukung	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Laporan yang menjelaskan kerugian akibat bencana beserta bukti dukung	RAD 04.02 Data Sosial	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	tidak ada
DAD.07.004	Data informasi publik BPBD	Informasi terkait profil, kegiatan, berita kebencanaan, dsb terkait BPBD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Laporan yang menjelaskan kerugian akibat bencana beserta bukti dukung	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.07.01, DAL.02.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.08.001	Data RPJMD (perencanaan 5 tahunan) dan Data RKPD (perencanaan tahunan)	Menginformasikan seluruh perencanaan kepala daerah dalam kurun waktu 5 tahun beserta capaian kinerja pertahun	Bertujuan untuk Menginformasikan seluruh perencanaan kepala daerah dalam kurun waktu 5 tahun beserta capaian kinerja pertahun	RAD 09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	DAD.08.01, DAL.08.01
DAD.08.002	Data Evaluasi capaian kinerja Pemerintah Dearah	informasi data proses Monitoring dan Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, khususnya dalam menyusun SAKIP/LAKIP, Pengukuran Perjanjian Kinerja dan LKPJ	Bertujuan untuk memudahkan proses Monitoring dan Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	DAD.08.02, DAL.08.03

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.08.003	Data informasi publik Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Website penyebaran informasi terkait Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bertujuan sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.08.03, DAL.02.05
DAD.09.001	Data Aset	Menginformasikan seluruh pengelolaan administrasi dan pemanfaat aset kota madiun.	Bertujuan untuk Menginformasikan seluruh pengelolaan administrasi dan pemanfaat aset kota madiun.	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.09.10, DAL.09.07

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.09.002	Data Anggaran Kegiatan	informasi data analisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.	Berfungsi untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan SKPD	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.09.01, DAL.09.06
DAD.09.003	Data Pembangunan Daerah	informasi data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.	Berfungsi untuk manajemen data pembangunan daerah	RAD 09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.09.02, DAL.09.08

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.09.004	Data Pengelolaan Keuangan SKPD	informasi data bidang pengelolaan keuangan daerah	Bertujuan untuk Menginformasika pengelolaan keuangan	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.09.03, DAL.09.04
DAD.09.005	Data Pengelolaan Gaji Pegawai	informasi data gaji ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota	Bertujuan untuk Menginformasikan seluruh pengelolaan data gaji ASN dan non-ASN di lingkungan pemerinatahn, provinsi, kabupaten dan daerah	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.09.04, DAL.09.03

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.09.006	Data Pelaporan DAK Fisik	informasi data monitoring transaksi SPAN	Berfungsi untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.09.05, DAL.09.11
DAD.09.007	Data Agenda Pimpinan	informasi data jadwal dan agenda pimpinan	Bertujuan untuk menyajikan jadwal dan agenda pimpinan.	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.09.06, DAL.02.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.09.008	Data Pelaporan Dana Intensif Daerah (DID)	informasi data pelaporan perbendahraan dan keungan daerah kepada DPJK	Bertujuan untuk melaporkan seluruh perbendahraan dan keungan daerah kepada DPJK	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.09.07, DAL.09.13
DAD.09.009	Data Pembayaran Setoran ke Kas Negara Non Pajak	informasi data pembayaran dan penerimaan negara	Bertujuan untuk membantu memproses pembayaran penerimaan negara	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.09.08, DAL.09.14

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.09.010	Data monitoring Dana Transfer Dari Pusat (kemenkeu)	informasi data penyaluran dana daerah dan desa	Bertujuan untuk mempermudah penyaluran dana daerah dan desa	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.09.09, DAL.09.15
DAD.09.011	Data barang daerah	informasi data barang daerah	Bertujuan untuk Menginformasikan pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.09.11, DAL.09.07

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.09.012	Data informasi publik Badan Keuangan dan Aset Daerah	informasi penyebaran informasi terkait Badan Keuangan dan Aset Daerah	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Keuangan	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.09.12, DAL.02.05
DAD.09.013	Data DAK Non Fisik dari Pusat	Aladin : adalah aplikasi dari Pusat (dijen Perimbangan keuangan- kemenkeu) yang di gunakan untuk Pelaporan Pengelolaan DAK Non Fisik	untuk membantu kewajiban pengelolaan DAK Non Fisik di daerah - daerah	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.09.13, DAL.09.12

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.10.001	Data Wajib Pajak, Obyek pajak	Informasi Data pelayanan pajak daerah	Bertujuan untuk mengetahui Informasi informasi pelayanan pajak daerah	RAD 09.02 Data Keuangan	Terbuka	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.10.01, DAL.10.01
DAD.10.002	Data Pajak Daerah	Sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.	Berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.10.02, DAL.10.02

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.10.003	Data informasi publik Badan Pendapatan Daerah	Informasi Data terkait Badan Pendapatan Daerah	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Badan Pendapatan Daerah	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.10.03, DAL.02.05
DAD.10.004	Data pajak Daerah sektor hotel dan resto	Aplikasi untuk mengelola pajak daerah sektor hotel dan restaurant	Berfungsi untuk mengelola pajak daerah sektor hotel dan restaurant	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.10.04, DAL.10.02

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.10.005	Capaian kerja pencegahan korupsi	MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.	Berfungsi untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi,	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Badan Pendapatan Daerah	DAD.10.05, DAL.10.19

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.11.001	Data Kepegawaian, data penilaian kinerja pegawai	Informasi Data Kepegawaian	Berfungsi untuk mempermudah PNS dalam penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	DAD.11.02, DAL.11.02
DAD.11.002	Data Kepegawaian seluruh OPD	Informasi terkait Data Kepegawaian seluruh OPD, seperti data Analisa kebutuhan diklat, data tugas belajar, data pengembangan kompetensi teknis dan data pengembangan kompetensi ASN	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Analisa kebutuhan diklat, data tugas belajar, data pengembangan kompetensi teknis dan data pengembangan kompetensi ASN	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	DAD.11.01, DAL.11.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.11.003	Data Pangkat dan Golongan ASN	Informasi Data pangkat dan golongan ASN	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pangkat dan golongan ASN	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	DAD.11.08, DAL.11.15
DAD.11.004	Data Informasi CPNS	Informasi Data mengenai CPNS	Bertujuan untuk mengetahui informasi Data CPNS	RAD 09.03 Data Informasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	DAD.11.12, DAL.11.12

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.11.005	Data Penilaian Kinerja Pegawai	Informasi Data pencatatan kinerja pegawai negeri sipil	Berfungsi untuk mencatat kinerja pegawai negeri sipil.	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	DAD.11.03, DAL.06.02
DAD.11.006	Data Penjatuhan Hukuman Disiplin	Informasi Data Penjatuhan Hukuman Disiplin	Berfungsi sebagai aplikasi yang dipergunakan sebagai layanan kepegawaian berbasis <i>online</i>	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Bagian Hukum	DAD.11.04, DAL.11.21

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.11.007	Data informasi publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Informasi Data terkait Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAD 09.03 Data Informasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.11.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.11.008	Data aset kekayaan ASN	<p>SIHARKA ((Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan) adalah sistem yang berguna untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki oleh setiap ASN di Indonesia. Dengan melaporkan jumlah kekayaan yang dimiliki, ASN dapat mempertanggungjawabkan jumlah kenaikan harta saat sebelum dan sesudah menjadi ASN</p>	<p>Berfungsi sebagai media pelaporan harta kekayaan ASN</p>	<p>RAD 09.06 Data Aparatur Negara</p>	<p>Tertutup</p>	<p>Data Statistik</p>	<p>Realtime</p>	<p>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>	DAD.11.06

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.11.009	Data pelaporan hukuman disiplin	<p>IDIS BKN (Integrated Disicipline Badan Kepegawaian Negara) merupakan sistem informasi pelaporan proses hukuman disiplin yang terintegrasi dengan sistem SAPK BKN. Sistem informasi ini bertujuan untuk memberikan standar dan kemudahan dalam melakukan proses pelaporan hukuman disiplin mulai dari identifikasi sampai dengan pembuatan surat keputusan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Berfungsi sebagai media dalam pelaporan proses hukuman disiplin</p>	<p>RAD 09.06 Data Aparatur Negara</p>	<p>Tertutup</p>	<p>Data Statistik</p>	<p>Realtime</p>	<p>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>	<p>DAD.11.07, DAL.11.06</p>

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.11.010	data mutasi ASN	Aplikasi dalam memudahkan pelayanan mutasi ASN yaitu untuk Mutasi Antar Jabatan dan Mutasi Antar Daerah. Sistem emutasi terintegrasi secara nasional dengan Sistem SAPK BKN, Sistem Simratio Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Sistem Informasi SDM Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan	Berfungsi untuk memudahkan pelayanan mutasi ASN	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	DAD.11.09, DAL.11.23

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.11.011	data pelayanan administrasi	Sistem Informasi <i>Online</i> Layanan Administrasi untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan tepat waktu yang berbasis sistem informasi <i>online</i>	Untuk memudahkan pelayanan administrasi ASN	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	DAD.11.10, DAL.1.1.27

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.11.012	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	aplikasi untuk rekonsiliasi data kepegawaian sehingga memudahkan dalam pelayanan kepegawaian, sekaligus mengantisipasi munculnya tindak pidana korupsi	Berfungsi untuk rekonsiliasi data kepegawaian sehingga memudahkan dalam pelayanan kepegawaian, sekaligus mengantisipasi munculnya tindak pidana korupsi	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	DAD.11.11, DAL.11.07
DAD.12.001	Data Rekapitulasi izin penelitian	Informasi Data rekapitulasi izin penelitian, Data agenda walikota,	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data rekapitulasi izin penelitian, Data agenda walikota,	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	DAD.12.01, DAL.12.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.12.002	Data Rekapitulasi Jumlah Agama dan suku	Informasi Data Mengenai Rekapitulasi Jumlah Agama dan suku	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Rekapitulasi Jumlah Agama dan suku	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	tidak ada
DAD.12.003	Data informasi publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Informasi terkait Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.12.02, DAL.02.05
DAD.13.001	Rekomendasi Hasil Pengawasan (LHP)	Informasi Data Mengenai Rekomendasi hasil pengawasan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Rekomendasi hasil pengawasan	RAD 09.01 Data Dalam Negeri	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Inspektorat Daerah	DAL.13.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.13.002	Data aktivitas, kegiatan dan program OPD	Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara	RAD 09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Inspektorat Daerah	DAL.13.01
3	Data informasi publik Inspektorat Daerah	Informasi Data Website penyebaran informasi terkait Inspektorat Daerah	Bertujuan sebagai informasi dan kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAL.02.05
1	Data aspirasi masyarakat	informasi terkait penyampaian aspirasi masyarakat secara <i>online</i>	Berfungsi sebagai pendukung pengawasan DPRD.	RAD 09.07 Data Kesekretariatan Negara	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Sekretariat DPRD	DAL.14.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.14.002	Data informasi publik Sekretariat DPRD	informasi terkait Sekretariat DPRD, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Sekretariat DPRD	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAL.02.05
DAD.14.003	Data Sarpas	Informasi Data Sarpas, kepegawaian Perencanaan Reses keuangan Dokumen evaluasi (umum dan keuangan) Notulensi rapat Raperda dan penganggaran dan pengawasan	Bertujuan untuk mengetahui sarpras, perencanaan evaluasi umum dan keuangan serta penganggaran dan pengawasan	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Sekretariat DPRD	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.001	Data informasi publik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	informasi data penyebaran informasi terkait Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bertujuan sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.15.01, DAL.02.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.002	Registrasi Pasien (NIK, Nama, Alamat, dsb)	Sistem Informasi Kesehatan Terpadu Berbasis <i>Online</i> untuk pelayanan pasien di seluruh puskesmas. Di mana aplikasi itu menyediakan pendaftaran secara <i>online</i> kepada masyarakat. Sehingga, mereka tidak perlu lagi mengantre di puskesmas. Karena ketika pasien melakukan pendaftaran <i>online</i> dapat langsung mengetahui jadwal dan jam pemeriksaan.	Berfungsi untuk mempermudah pencatatan pelayanan pasien di puskesmas	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.02, DAL.34.02

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.003	Data perencanaan, data kegiatan dan data keuangan	Kuitansi Elektronik Dengan Dasar Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur merupakan aplikasi untuk kepentingan keuangan, menggabungkan mualai dari proses perencanaan sampai realisasi keuangan karena aplikasi yang ada tidak saling terintegrasi. Akan ada penomoran atau ID setiap kwitansi dari suatu kegiatan. Untuk penyimpanan bukti lampiran (kwitansi, nota, foto, dsb) akan terkoneksi dengan telegram untuk menghemat memory pada server.	Berfungsi dalam mengintegrasikan proses mualai dari perencanaan sampai realisasi keuangan dalam satu aplikasi	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.15.03

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.004	Data Pelaporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika	Informasi terkait pelaporan NARKOTIKA	Bertujuan untuk informasi terkait pelaporan NARKOTIKA	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.54
DAD.15.005	Data Terkait Apotek	Informasi terkait Apotek	Bertujuan untuk informasi terkait Apotek	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAL.35.07
DAD.15.006	Data Perizinan	Informasi terkait data Perizinan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data Perizinan	RAD 04.01 Data Kesehatan	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.26.002

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.007	Data Akreditasi Puskesmas	Informasi terkait data Akreditasi Puskesmas	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data Akreditasi Puskesmas	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.62
DAD.15.008	Data Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Informasi terkait data Alat Kesehatan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data Alat Kesehatan	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.09

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.009	data pelayanan kesehatan, data BPJS	platform digital dari BPJS Kesehatan yang difungsikan untuk mempermudah akses kesehatan. Platform tersebut membantu peserta aktif BPJS kesehatan untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah	Berfungsi untuk membantu peserta aktif BPJS kesehatan untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.10
DAD.15.010	Data pelayanan posyandu	Informasi terkait data pelayanan posyandu	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait data pelayanan posyandu	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.32

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.011	Data Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Informasi terkait Data Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait Data Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.66
DAD.15.012	Data imunisasi anak	Informasi terkait Data imunisasi anak	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait Data imunisasi anak	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.67
DAD.15.013	Data KB	Informasi terkait data Data KB	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait Data KB	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.69

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.014	Data kondisi fisik ASN, data aktivitas fisik dan olahraga ASN	Informasi terkait Data kondisi fisik ASN, data aktivitas fisik dan olahraga ASN	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait Data kondisi fisik ASN, data aktivitas fisik dan olahraga ASN	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.53
DAD.15.015	Data Kesehatan Lingkungan	Informasi terkait data Kesehatan Lingkungan	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait data Kesehatan Lingkungan	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.14
DAD.15.016	Data Posyandu, Data Poskestren, Data Poskeskel, Data Ukk	Informasi terkait data posyandu, data poskestren, data poskeskel, data UKK	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data posyandu, data poskestren, data poskeskel, data UKK	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.017	Data pelaksanaan program keluarga Indonesia	Informasi terkait Data pelaksanaan program keluarga Indonesia	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data pelaksanaan program keluarga Indonesia	RAD 03.07 Data Kependudukan	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.29
DAD.15.018	Data Keluarga dan Data Kegiatan Kampung KB	Informasi terkait data keluarga, data kegiatan kampung KB	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data keluarga, data kegiatan kampung KB	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.20
DAD.15.019	Data Laporan Penyerapan DAK Fisik maupun non fisik	Informasi terkait data Laporan Penyerapan DAK Fisik maupun non fisik	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait data Laporan Penyerapan DAK Fisik maupun non fisik	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.15.27

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.020	Data Laporan Audit Stunting	Informasi terkait data Laporan Audit Stunting	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait data Laporan Audit Stunting	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tidak ada
DAD.15.021	Data Alat Kontrasepsi	Informasi terkait data Alat Kontrasepsi	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait data Alat Kontrasepsi, Data KB Kespro	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.68
DAD.15.022	Data KB Kespro	Informasi terkait data KB Kespro	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait data KB Kespro	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.22

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.023	data terkait vaksinasi covid-19	Aplikasi pelaporan dan monitoring hasil vaksinasi Covid-19	Berfungsi memonitoring data hasil capaian Vaksinasi Covid-19 per sasaran indikator dan per dosis	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.23
DAD.15.024	data pelaporan kasus covid-19	Aplikasi monitoring data kasus Covid-19 Kota Madiun baik kasus aktif, sembuh, meninggal dan penyebarannya	Berfungsi memonitoring data kasus Covid-19 Kota Madiun, baik kasus aktif, sembuh, meninggal dan penyebarannya	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.26
DAD.15.025	data terkait penyakit campak	Aplikasi pemantauan/kewaspadaan dini penyakit Campak	Berfungsi memantau peningkatan penemuan penyakit Campak	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.41

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.026	data terkait penyakit ISPA / ILI	Aplikasi pemantauan/kewaspadaan dini penyakit ISPA/ILI	Berfungsi memantau peningkatan penemuan penyakit ISPA/ILI	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.42
DAD.15.027	data terkait penyakit TB	Aplikasi pengiriman specimen dahak dari Fasyankes ke Site TCM dengan bantuan Provider pengirim	Berfungsi sebagai aplikasi penghubung antara fasyankes pengirim specimen, site TCM dan provider pengirim (PT. Pos)	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.63
DAD.15.028	data terkait kusta dan frambusia	Aplikasi pelaporan kasus Kusta dan Frambusia bulanan	Berfungsi memantau peningkatan penemuan penyakit Kusta dan Frambusia	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.64

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.029	data terkait gizi masyarakat	Informasi Data terkait gizi masyarakat	Bertujuan untuk mengetahui informasi data gizi masyarakat kota madiun	RAD 04.01 Data Kesehatan	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAL.34.07
DAD.15.030	Data Kesehatan Jiwa Di Wilayah Kerja	Informasi Data ODGJ	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data ODGJ	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.51
DAD.15.031	Data Realisasi Belanja Pengadaan Barang Dan Jasa bidang kesehatan	Mengetahui berapa prosentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa bidnag kesehatan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi mengenai berapa prosentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.15.72

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.032	Data kasus PD3I	Sistem yang mengakomodasi kegiatan surveilans PD3I dari paper based ke web based	Sistem informasi yang berfungsi untuk mengakomodasi proses surveilans PD3I	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.61
DAD.15.033	Data Surveilans	Informasi Data Surveilans	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Surveilans	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.39
DAD.15.034	Data Kasus Covid-19	Informasi Data Kontak Erat Kasus Covid	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Kontak Erat Kasus Covid	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.48

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.035	Data Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Informasi Data Calon Jemaah Haji	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Calon Jemaah Haji	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.57
DAD.15.036	Data penderita HIV/AIDS	Informasi Data pencatatan dan pengobatan penderita HIV/AIDS	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data pencatatan dan pengobatan penderita HIV/AIDS	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.59 DAL.34.09
DAD.15.037	Data logistik kesehatan	Aplikasi manajemen logistik bidang kesehatan	Berfungsi untuk mnegelola logistik bidang kesehatan	RAD 09.03 Data Informasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.71

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.038	Data Kasus Malaria	Informasi Data pencatatan dan pengobatan penderita Malaria	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data pencatatan dan pengobatan penderita Malaria	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.36
DAD.15.039	<i>Update</i> Data Tenaga Kesehatan	Informasi Data Kepegawaian	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Kepegawaian	RAD 04.01 Data Kesehatan	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.07
DAD.15.040	Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	Informasi Data kepegawaian	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data kepegawaian	RAD 04.01 Data Kesehatan	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.06

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.041	Pencatatan Vaksinasi Covid-19	Informasi Pelaporan penggunaan Vaksin Covid19	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pelaporan penggunaan Vaksin Covid19	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.40
DAD.15.042	Rencana Anggaran Puskesmas	Sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah	Bertujuan untuk mengetahui Sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.09.02, DAL.09.05
DAD.15.043	Manajemen Integritas	Informasi Penyelenggaraan pelayanan publik	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Penyelenggaraan pelayanan publik	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.044	Data pelaporan IKP	Informasi Data Indikator Mutu Puskesmas	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Indikator Mutu Puskesmas	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.18
DAD.15.045	Indikator Mutu Puskesmas	informasi data Indikator Mutu Puskesmas	Berfungsi untuk membantu pelayanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat, dari mulai pendaftaran pasien, pelayanan poli	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.15

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.046	data lapangan, data pasien, data fasilitas kesehatan hingga data analisis	Informasi data lapangan, data pasien, data fasilitas kesehatan hingga data analisis	Bertujuan untuk memudahkan para surveyor kesehatan dalam mengumpulkan data seluruh keluarga di Indonesia, baik di daerah yang sudah memiliki fasilitas internet yang sudah memadai maupun di daerah terpencil yang masih mengalami kesulitan akses Internet.	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.08

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.047	Data penderita penyakit filariasis, kecacingan dan schistosomiasis	perekaman dan pelaporan untuk penyakit filariasis, kecacingan dan schistosomiasis	Berfungsi untuk perekaman dan pelaporan untuk penyakit filariasis, kecacingan dan schistosomiasis	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.11
DAD.15.048	Data Pemantauan bagi kesehatan ibu hamil serta media edukasi pernikahan dan hamil	Pemantauan bagi kesehatan ibu hamil serta media edukasi pernikahan dan hamil	Berfungsi sebagai pemantauan bagi kesehatan ibu hamil serta media edukasi pernikahan dan hamil	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.12

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.049	Data user, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Pangan	Informasi mengenai Data user, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Pangan	Berfungsi untuk memudahkan dalam memperoleh informasi TPM yang aman dan sehat sesuai dengan standar Higiene Sanitasi Pangan	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.13
DAD.15.050	Data limbah medis	Sistem Informasi Kelola Limbah Medis	Berfungsi untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan data limbah medis	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.34

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.051	Data terkait perencanaan, penganggaran, dan realisasi terkait kesehatan	menunjang fungsi perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi dalam 1 perangkat lunak yang terpadu.	Berfungsi untuk mempermudah kerja dari petugas pelaksana perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi dengan menggunakan sistem terpadu berbasis <i>online</i>	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.15.16
DAD.15.052	data terkait penanggung jawab, jumlah dokter, alamat buka praktik, jam kerja, teknologi, dan sebagainya.	Informasi terkait penanggung jawab, jumlah dokter, alamat buka praktik, jam kerja, teknologi, dan sebagainya.	Bertujuan untuk profiling, monitoring, serta pelaporan data terkait penanggung jawab, jumlah dokter, alamat buka praktik, jam kerja, teknologi, dan sebagainya.	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.17

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.053	Data terkait BPJS	memudahkan akses masyarakat pengguna Jaminan Kesehatan Nasional.	Berfungsi untuk memudahkan akses masyarakat pengguna Jaminan Kesehatan Nasional	RAD 04.02 Data Sosial	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.19
DAD.15.054	Data terkait KB	Informasi terkait Keluarga Berencana	Memberikan Informasi Alat & Obat Kontrasepsi Dan Klinik Bidan Di Indonesia	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.21, DAL.34.05
DAD.15.055	Data perencanaan DAK fisik	Digunakan untuk perencanaan DAK fisik	Berfungsi untuk perencanaan DAK fisik	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.15.24

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.056	Data peserta BPJS	Informasi terkait data peserta BPJS	Memudahkan Faskes dalam administrasi dan keuangan BPJS Kesehatan	RAD 04.02 Data Sosial	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.25
DAD.15.057	Data hasil Antigen/PCR dan biodata pemeriksaan	informasi Data hasil Antigen/PCR dan biodata pemeriksaan	Berfungsi ntuk mendata hasil Antigen/PCR Covid 19	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.28
DAD.15.058	data penyakit dan pencegahannya	informasi data penyakit dan pencegahannya	Berfungsi untuk memberikan informasi mengenai pencegahan penyakit tidak menular	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.35

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.059	Data pasien rujukan	Sistem Rujukan Terpadu yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat (horizontal maupun vertikal)	Berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.37
DAD.15.060	data hasil pemeriksaan fisik	informasi terkait data hasil pemeriksaan fisik	Berfungsi untuk memudahkan pencatatan hasil pemeriksaan fisik	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.38

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.061	data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga.	entang data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga.	Berfungsi untuk mengumpulkan data primer tentang data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga.	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.43
DAD.15.062	Data konsultasi kesehatan jiwa	Informasi tentang kesehatan jiwa bagi masyarakat yang dikembangkan oleh Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza	Berfungsi sebagai wadah komunikasi, Edukasi serta Informasi tentang kesehatan jiwa bagi masyarakat	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.44

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.063	Data limbah dan pengelolaannya	digunakan sebagai pelaporan pengolahan limbah B3 dan Non B3 yang dilakukan secara elektronik	Berfungsi sebagai pelaporan pengolahan limbah yang dilakukan secara elektronik	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.45
DAD.15.064	Data penderita Hepatitis	digunakan untuk pendataan penderita penyakit Hepatitis	Berfungsi untuk pendataan penderita penyakit Hepatitis	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.46

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.065	Seluruh data terkait kesehatan	Informasi Seluruh data terkait kesehatan	Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi manajemen kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi.	RAD 09.03 Data Informasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.47
DAD.15.066	Data penderita penyakit tular vektor dan zoonotik	informasi data terhadap penyakit tular vektor dan zoonotik termasuk DBD	Bertujuan untuk mencegah penularan penyakit bersumber hewan	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.49

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.067	Data KIE	untuk membangun Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan Penyuluh KB dan Kader Insitusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di seluruh Indonesia.	Befungsi sebagai sarana berkomunikasi, bersosialisasi, mengembangkan minat dan kemampuan jajaran pemangku kebijakan dan pelaksana Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana di Indonesia	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.50

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.068	Nilai matrix pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana setiap wilayah	informasi data Nilai matrix pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana setiap wilayah	Berfungsi untuk menganalisa secara komprehensif dan memberikan peringatan dini serta rekomendasi kebijakan sebagai solusi untuk pengendalian kependudukan	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.52
DAD.15.069	Data aduan program JKN	pengaduan seputar program JKN yang terhubung langsung oleh Kantor Cabang	Berfungsi untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian layanan informasi dan penanganan pengaduan peserta yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.55

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.070	Data kebutuhan, rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan	informasi data dalam menyusun rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan yang tepat sasaran dan berbasis bukti.	Berfungsi untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan yang tujuannya agar tepat sasaran dan berbasis bukti.	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DAD.15.56
DAD.15.071	Data informasi kesehatan	Aplikasi yang berfungsi sebagai media untuk mempromosikan informasi terkait kesehatan	Berfungsi sebagai media untuk mempromosikan informasi terkait kesehatan	RAD 09.03 Data Informasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.15.58

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.15.072	Data berkaitan dengan Pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.	Informasi terkait capaian program kependudukan dan keluarga berencana nasional	Berfungsi untuk menyediakan informasi tentang Pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.15.60
DAD.16.001	Data Pengelolaan Sumber Daya Air	Informasi Data Pengelolaan Sumber Daya Air	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air	RAD 03.01 Data Pekerjaan Umum	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada
DAD.16.002	Data Pengendalian Banjir	Informasi Data Pengendalian Banjir	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengendalian Banjir	RAD 04.02 Data Sosial	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.16.003	Data Pengembangan Jasa Konstruksi	Informasi Data Pengembangan Jasa Konstruksi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengembangan Jasa Konstruksi	RAD 03.01 Data Pekerjaan Umum	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada
DAD.16.004	Data Penataan Bangunan Gedung	Informasi Data Penataan Bangunan Gedung	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Penataan Bangunan Gedung	RAD 03.01 Data Pekerjaan Umum	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAD.16.02
DAD.16.005	Data Penataan Bangunan dan Lingkungan	Informasi Data Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	RAD 03.01 Data Pekerjaan Umum	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.16.006	Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Informasi Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	RAD 03.01 Data Pekerjaan Umum	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada
DAD.16.007	Data Perencanaan Ruang	Informasi Data Perencanaan Ruang	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Perencanaan Ruang	RAD 03.01 Data Pekerjaan Umum	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada
DAD.16.008	Data Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Informasi Data Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	RAD 03.01 Data Pekerjaan Umum	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.16.009	Data informasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Informasi Data terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.16.03, DAL.02.05
DAD.17.001	Data informasi publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	informasi terkait Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.17.02, DAL.02.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.17.002	Data Pengaduan Masyarakat	informasi terkait Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat atau Instansi	Memudahkan masyarakat maupun instansi dalam melakukan pelaporan karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun.	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DAD.17.01, DAL.17.01
DAD.18.001	Data bantuan sosial	Informasi terkait data pendukung bantuan sosial	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data pendukung bantuan sosial	RAD 04.02 Data Sosial	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DAD.18.03, DAL.18.03

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.18.002	Data gender	Informasi Data terkait gender	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait gender	RAD 04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DAD.18.02, DAL.18.02
DAD.18.003	Data sasaran penerimaan bantuan	Informasi tentang stastus sosial dan ekonomi masyarakat	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang stastus sosial dan ekonomi masyarakat	RAD 04.02 Data Sosial	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DAD.18.04, DAL.18.04

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.18.004	Data kasus kekerasan	Informasi tentang data kasus kekerasan	Bertujuan untuk mengetahui informasi tentang data kasus kekerasan	RAD 04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DAD.18.01, DAL.18.01
DAD.18.005	Data PMKS (Penyanggah masalah kesejahteraan sosial)	informasi data PMKS (Penyanggah masalah kesejahteraan sosial)	Berfungsi untuk mendata PMKS (Penyanggah masalah kesejahteraan sosial)	RAD 04.02 Data Sosial	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DAD.18.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.18.006	Data informasi publik Dinsos P3A	aplikasi penyedia informasi publik berupa layanan,kegiatan, produk hukum, berita dan lain sebagainya	Berfungsi sebagai penyedia informasi	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.18.06, DAL.02.05
DAD.19.001	Data UMKM Kota madiun	Informasi Data umkm yang sudah dibina serta data UMKM Kota madiun	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data umkm yang sudah dibina, Database UMKM Kota madiun,	RAD 02.10 Data Usaha kecil dan Menengah	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	DAL.19.19

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.19.002	Data lembaga pelatihan	Informasi Data lembaga pelatihan, Data TKW, Data Pencari Kerja, Tingkat Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Data TKA, Data Pekerja Anak, Jumlah Pencari Kerja Yang diterima, Jumlah Lowongan Pekerjaan,	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data lembaga pelatihan, Data TKW, Data Pencari Kerja, Tingkat Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Data TKA, Data Pekerja Anak, Jumlah Pencari Kerja Yang diterima, Jumlah Lowongan Pekerjaan,	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	DAD.19.002, DAL.19.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.19.003	Data informasi Produk IKM	Informasi Data Produk IKM Kota Madiun	Bertujuan untuk memberikan informasi Produk, Berita, Akun Pengguna	RAD 02.02 Data Perdagangan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	DAD.19.01, DAL.19.20
DAD.19.004	Data informasi publik Dinas Tenaga Kerja	Informasi Data Website penyebaran informasi terkait Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.19.03, DAL.02.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.19.005	Data calon pekerja migran	Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) adalah sistem pendataan Calon Pekerja Migran yang akan berangkat keluar negeri. SISKOTKLN mengintegrasikan Pemangku kepentingan terkait penempatan PMI berupa Dinas Kota, P3MI, Balai Latihan Kerja, Sarana Kesehatan, Asuransi, Pemetiksaan Psikologi, Uji Kompetensi, Pembinaan Penempatan PMI, dan Perwakilan RI di luar Negeri	Berfungsi untuk pendataan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat keluar negeri	RAD 06.02 Data Ketenagakerjaan	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	DAD.19.04, DAL.19.02

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.20.001	Dapodik (Data Pokok Pendidikan)	Informasi Data terkait pendidikan sekolah di Indonesia	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data terkait pendidikan sekolah di Indonesia	RAD 06.01 Data Pendidikan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Pendidikan	DAD.20.05
DAD.20.002	Laporan Data jumlah siswa PAUD, SD dan SMP negeri dan swasta	Informasi terkait Data jumlah siswa PAUD, SD dan SMP negeri dan swasta	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait Data jumlah siswa PAUD, SD dan SMP negeri dan swasta, data ijin operasional lembaga swasta, data akreditasi dan penerima PIP	RAD 06.01 Data Pendidikan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Pendidikan	DAL.20.03

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.20.003	data ijin operasional lembaga swasta	Informasi terkait data ijin operasional lembaga swasta	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait data ijin operasional lembaga swasta	RAD 06.01 Data Pendidikan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Pendidikan	DAL.20.02
DAD.20.004	data akreditasi dan penerima PIP	Informasi terkait data akreditasi dan penerima PIP	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait data akreditasi dan penerima PIP	RAD 06.01 Data Pendidikan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Pendidikan	DAL.20.02
DAD.20.005	Data pendidik dan tenaga kependidikan	Berisikan data pendidik dan tenaga kependidikan	Bertujuan untuk mengetahui informasi data pendidik dan tenaga kependidikan	RAD 06.01 Data Pendidikan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Pendidikan	DAL.20.02

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.20.006	Data AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	Informasi Data AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	bertujuan untuk mengetahui Informasi Data AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	RAD 06.01 Data Pendidikan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Pendidikan	DAD.20.06, DAL.20.02
DAD.20.007	Data beasiswa BBM (Data diri dari isian form)	informasi data beasiswa BDM	Digunakan untuk memberikan informasi dan pendaftaran <i>online</i> beasiswa BBM	RAD 06.01 Data Pendidikan	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Pendidikan	DAD.20.01, DAL.20.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.20.008	Data pofil lembaga pendidikan dari isian form	informasi data pendataan pendidikan	bertujuan untuk mendata informasi pendidikan dari msing-masing lembaga	RAD 06.01 Data Pendidikan	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Pendidikan	DAD.20.02, DAL.20.02
DAD.20.009	Data calon peserta didik	informasi data pendaftaran peserta didik baru jenjang SD dan SMP	Berfungsi untuk memudahkan dalam proses pendaftaran peserta didik baru jenjang SD dan SMP	RAD 06.01 Data Pendidikan	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Pendidikan	DAD.20.03, DAL.20.03

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.20.010	Data informasi publik Dinas Pendidikan	Website penyebaran informasi terkait Dinas Pendidikan, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Pendidikan	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.20.04, DAL.02.05
DAD.21.001	Laporan Penyaluran Pupuk bersubsidi Tingkat Kota	Informasi mengenai penyaluran pupuk bersubsidi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi mengenai penyaluran pupuk bersubsidi	RAD 02.03 Data Pertanian	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	DAL.21.04
DAD.21.002	Arsip Surat Rekomendasi Kredit Usaha Tani	Informasi mengenai Rekomendasi Kredit Usaha Tani	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai Rekomendasi Kredit Usaha Tani	RAD 02.03 Data Pertanian	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	DAL.21.04

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.21.003	Arsip Surat Pengantar Pencairan Dana BLM PUAP	Informasi mengenai Pengantar Pencairan Dana BLM PUAP	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai Pengantar Pencairan Dana BLM PUAP	RAD 02.03 Data Pertanian	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	DAL.21.04
DAD.21.004	Tanda Terima Pestisida Pengajuan Form AUTP	Informasi mengenai Tanda Terima Pestisida Pengajuan Form AUTP	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai Tanda Terima Pestisida Pengajuan Form AUTP	RAD 02.03 Data Pertanian	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	DAL.21.04
5	Data Kesehatan Hewan	Informasi Data Kesehatan Hewan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Kesehatan Hewan	RAD 02.05 Data Peternakan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	DAL.21.07

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.21.006	Data Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kota Madiun Tahun 2016-2020	Informasi mengenai Data Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kota Madiun Tahun 2016-2020 dan Data Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Madiun Tahun 2016-2020	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait ketersediaan dan pengelolaan kemandirian pangan dan pertanian	RAD 02.03 Data Pertanian	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	tidak ada
DAD.21.007	Data Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Madiun Tahun 2016-2020	Informasi mengenai Data Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Madiun Tahun 2016-2020	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait Data Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Madiun Tahun 2016-2020	RAD 02.03 Data Pertanian	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.21.008	Data informasi publik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Informasi Data terkait Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.21.01, DAL.02.05
DAD.22.001	Data Pengaduan Pencemaran Lingkungan	Informasi data pengaduan pencemaran lingkungan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pengaduan pencemaran	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Lingkungan Hidup	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.22.002	Data Jumlah Sekolah Adiwiyata,	Informasi Data jumlah sekolahan yang sudah mendapatkan dan yang akan menuju sekolah adiwiyata	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah sekolahan yang sudah mendapatkan dan yang akan menuju sekolah adiwiyata, serta data kelurahan yang menang kelurahan berseri	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Lingkungan Hidup	tidak ada
3	Data Kelurahan Berseri	Informasi Data Kelurahan Berseri	Bertujuan untuk mengetahui informasi Data Kelurahan Berseri	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Lingkungan Hidup	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.22.004	Data Perusahaan Yang Taat Terhadap Perizinan Lingkungan	Informasi Data AMDAL/UKL/UPL	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data AMDAL/UKL/UPL	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Lingkungan Hidup	tidak ada
DAD.22.005	Data Indikator Kinerja Utama	Informasi Data kualitas air dan kualitas udara	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kualitas air dan kualitas udara	RAD 09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Lingkungan Hidup	tidak ada
DAD.22.006	Data Titik/Lokasi Tercemar Yang Ada Di Kota Madiun	Informasi Data lokasi/daerah yang kondisinya tercemar baik air maupun udara	Bertujuan untuk mengetahui Informasi lokasi/daerah yang kondisinya tercemar baik air maupun udara	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Lingkungan Hidup	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.22.007	Data Spesies Kehati Lokal Daerah RPPLH	Informasi Data KLHS RPPLH IKLH Kehati kota madiun	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data KLHS RPPLH IKLH Kehati kota madiun	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Lingkungan Hidup	tidak ada
α	Data Volume Sampah	Informasi Data volume sampah	Bertujuan untuk mengetahui Informasi volume sampah	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Lingkungan Hidup	tidak ada
DAD.22.009	Data Volume Sampah (Timbulan Sampah, Volume Sampah, Bank Sampah)	Informasi Data pengurangan sampah, pengelolaan sampah	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pengurangan sampah, pengelolaan sampah	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Lingkungan Hidup	DAD.22.03

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.22.010	Data Rekomendasi Penyimpanan Sementara Limbah B3	Informasi Data rekomendasi B3	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data rekom B3	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Lingkungan Hidup	tidak ada
1	Data Aset DLH	Informasi Data umum dan keuangan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi umum dan keuangan	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Dinas Lingkungan Hidup	tidak ada
DAD.22.012	Data Kepegawaian dan Data Perencanaan	Informasi Data jumlah pegawai, program kegiatan, capaian kinerja	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah pegawai, program kegiatan, capaian kinerja	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Lingkungan Hidup	DAL.1.1.01
3	Data laporan lingkungan	Informasi Data Pelaporan terkait permasalahan lingkungan	Berfungsi sebagai sarana laporan jika ada permasalahan lingkungan	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Lingkungan Hidup	DAL.22.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.22.014	Data informasi publik Dinas Lingkungan Hidup	Informasi Data terkait Dinas Lingkungan Hidup	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.22.02, DAL.02.05
1	Database Kependudukan	Informasi Data biodata penduduk	Bertujuan untuk mengetahui Informasi biodata penduduk	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DAL.02.03
DAD.23.002	Data Perencanaan Dan Keuangan OPD	Informasi Data Perencanaan dan Keuangan OPD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Perencanaan dan Keuangan OPD	RAD 09.02 Data Keuangan	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DAD.09.2, DAL.09.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.23.003	Data Informasi Kepegawaian	informasi Data kepegawaian, aset dan barang milik daerah	Bertujuan untuk mengetahui informasi kepegawaian, aset dan barang milik daerah	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DAL.11.01
DAD.23.004	Data Kelahiran Dan Data Kematian (Bagi Pakai Dengan Kelurahan)	Informasi data kelahiran dan data kematian	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kelahiran dan data kematian	RAD 03.07 Data Kependudukan	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DAD.23.09, DAD.23.02, DAL.23.08, DAL.23.09

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.23.005	Data Perkawinan Dan Data Perceraian	informasi data perkawinan dan perceraian	Bertujuan untuk mengetahui informasi perkawinan dan perceraian	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DAD.23.09, DAD.23.02, DAL.23.10, DAL.23.11

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.23.006	Data KK	Informasi data KK, KTP, KIA	Bertujuan untuk mengetahui Informasi KK, KTP, KIA	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DAD.23.09, DAD.23.02, DAL.23.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.23.007	Data KK, SKP WNI, SKPT	Informasi data KK, SKP WNI, SKPT	Bertujuan untuk mengetahui Informasi KK, SKP WNI, SKPT	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DAD.23.09, DAD.23.02, DAL.23.05
DAD.23.008	Data Administrasi Kependudukan	Data Administrasi Kependudukan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Administrasi Kependudukan	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DAD.23.01, DAL.23.20

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.23.009	Data DWH Terpusat	Informasi Data Kependudukan unttuk Kerja Sama (DWH Terpusat)	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Kependudukan unttuk Kerja Sama,	RAD 03.07 Data Kependudukan	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.23.08, DAL.23.19
DAD.23.010	Data Kependudukan terkait Perceraian	Aplikasi Sistem Informasi LAYanan Dukcapil dan Pengadilan Agama untuk mengupdate status data penduduk yang melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama	Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan terkait data Perceraian di Pengadilan Agama	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DAD.23.03, DAL.23.03

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.23.011	Data Agregat Perkembangan Kependudukan	Web yang dibangun untuk menyampaikan Informasi Data Agregat Perkembangan Kependudukan	Penyampaian Informasi Data Agregat Perkembangan Kependudukan	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.23.04, DAL.02.05
DAD.23.012	Data pembuatan e-KTP	aplikasi untuk mencetak KTP	untuk mencetak KTP	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DAD.23.05, DAL.23.20

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.23.013	Data perekaman e-KTP	aplikasi desktop rekam ktp	untuk perekaman KTP	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DAD.23.06, DAL.23.20
DAD.23.014	Data informasi publik Dispendukcapil	Website penyebaran informasi dan kegiatan Dispendukcapil	Website penyebaran informasi dan kegiatan Dispendukcapil	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.23.07, DAL.02.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.24.001	Data Kendaraan Wajib Uji	Informasi Data Kendaraan Wajib Uji, Data kendaraan lulus uji, Data kendaraan tidak taat uji	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Kendaraan Wajib Uji, Data kendaraan lulus uji, Data kendaraan tidak taat uji	RAD 03.03 Data Transportasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Perhubungan	DAD.24.01, DAL.24.01
DAD.24.002	Data informasi publik Dinas Perhubungan	Informasi Data terkait Dinas Perhubungan	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Perhubungan	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.24.02, DAL.02.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.24.003	Data tilang kendaraan bermotor	ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah sistem yang akan mencatat, mendeteksi, dan memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera CCTV. Dalam pengertian lain, ETLE merupakan kamera pengintai yang akan merekam pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara	Berfungsi untuk mencatat, mendeteksi, dan memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera CCTV	RAD 03.03 Data Transportasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Perhubungan	DAD.24.04, DAL.24.02

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.24.004	Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Pelayanan pembayaran non tunai Pengujian Kendaraan Bermotor	Berfungsi untuk sinkronisasi laporan pendapatan antara SIM PKB dengan SIM Bank Jatim	RAD 03.03 Data Transportasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Perhubungan	DAD.24.03, DAL.24.03
DAD.25.001	Data Pengelolaan Informasi dan Media Publik	Informasi Data Pengelolaan Informasi dan Media Publik	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengelolaan Informasi dan Media Publik	RAD 09.03 Data Informasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAL.25.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.25.002	Data Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik	Informasi Data Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik	RAD 09.04 Data Komunikasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAL.25.04
DAD.25.003	Data Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Informasi Data Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	RAD 09.04 Data Komunikasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAL.25.06
DAD.25.004	Data Pengelolaan Data dan Statistik	Informasi Pengelolaan Data dan Statistik	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengelolaan Data dan Statistik	RAD 09.03 Data Informasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAL.25.09

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.25.005	Data Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	Informasi Pengelolaan Data Keamanan Informasi dan Persandian	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	RAD 01.01 Data Pertahanan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak ada
DAD.25.006	data paparan dan presentasi dari video conference/rapat/pelatihan	Edu merupakan platform digital learning milik Pemerintah Kota Madiun yang dikelola oleh Organisasi Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Madiun.	bertujuan untuk melihat materi hasil kajian dari kegiatan.	RAD 09.03 Data Informasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.25.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.25.007	Data penjadwalan agenda	Aplikasi untuk mendata agenda kegiatan dari walikota, wawali, sekda, OPD Kota Madiun	Berfungsi memberikan informasi terkait agenda kegiatan Walikota, wawali, sekda,dan OPD.	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.25.02
DAD.25.008	Data pengirim/penerima email	informasi Data pengirim/penerima email, data insiden	bertujuan agar dengan cepat, efisien dan terdokumentasikan nya proses dalam mengatasi insiden TI yang terjadi pada pengguna akhir	RAD 09.03 Data Informasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.25.03, DAL.25.04
o	Data informasi surat (NIP, Nama, jabatan)	informasi data persuratan yang terintegrasi dengan Esign dari BSSN	aplikasi persuratan dengan tanda tangan elektronik	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.25.04

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.25.010	Data isian form	informasi data server yang sedang ada gangguan dengan mengirimkan notifikasi melalui bot telegram	bertujuan untuk memberikan notifikasi server yang sedang ada gangguan melalui bot telegram.	RAD 09.03 Data Informasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.25.05
1	Data pelaporan	Informasi data laporan	Berfungsi dalam menyampaikan aduan pelayanan publik	RAD 09.03 Data Informasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.25.06
DAD.25.012	Data publik dari tiap OPD	Aplikasi yang menampilkan Dashboard data dari seluruh OPD	Berfungsi sebagai informasi publik dari data yang diolah setiap OPD	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.25.07, DAL.25.08

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.25.013	Data informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika	informasi terkait Dinas Komunikasi dan Informatika	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.25.08, DAL.02.05
DAD.25.014	Data publik dari tiap OPD	Aplikasi yang menampilkan informasi tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Berfungsi memberikan informasi tentang tugas dan tanggung jawab PPID di Lingkungan Pemerintahan Kota Madiun	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.25.09, DAL.25.03

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.25.015	Data tanda tangan dan pemiliknya, syarat dan ketentuan permohonan ttd elektronik	Aplikasi Tanda Tangan <i>Online</i> untuk memudahkan pelayanan administrasi pemerintah Kota Madiun	Berfungsi untuk memudahkan proses tanda tangan secara <i>online</i>	RAD 09.04 Data Komunikasi	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.25.11
DAD.25.016	Data arsip OPD	Aplikasi berbasis cloud yang digunakan untuk penyimpanan arsip masing-masing OPD di Kota Madiun	Berfungsi untuk penyimpanan arsip	RAD 09.04 Data Komunikasi	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.25.10
DAD.26.001	Data Peta investasi	Informasi data mengenai Peta Investasi	Bertujuan untuk mengetahui potensi investasi dan peluang bisnis	RAD 02.08 Data Investasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DAL.26.02

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.26.002	Data Realisasi investasi	Informasi Data dokumen realisasi investasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi dokumen realisasi investasi	RAD 02.08 Data Investasi	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DAL.26.02
DAD.26.003	Data peta sebaran perizinan	informasi data WEBGIS perizinan terbit per lokasi	Memetakan perizinan yang sudah terbit perlokasi	RAD 02.08 Data Investasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DAD.26.02,
DAD.26.004	Data peta sebaran investasi	memudahkan investor untuk berinvestasi di Kota Madiun	memudahkan investor untuk berinvestasi di Kota Madiun	RAD 02.08 Data Investasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DAD.26.04, DAL.26.02

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.26.005	Data perizinan	MASS (Madiunkota Single Submission) adalah sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik	Memberi kemudahan proses perizinan non berusaha	RAD 02.08 Data Investasi	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DAD.26.01, DAL.26.01
DAD.26.006	Data perizinan	Aplikasi Izin Usaha milik Pusat	Memberi kemudahan proses perizinan usaha	RAD 02.08 Data Investasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DAD.26.02, DAL.26.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.26.007	Data informasi publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	informasi data terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.26.05, DAL.02.05
DAD.27.001	Data Perencanaan	Informasi data perencanaan dan kepegawaian OPD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi perencanaan dan kepegawaian OPD	RAD 09.07 Data Kesekretariatan Negara	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	DAD.28.05, DAL.11.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.27.002	Data Keuangan Dan Kearsipan	Informasi data keuangan dan arsip PD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi keuangan dan arsip PD	RAD 09.07 Data Kesekretariatan Negara	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	DAD.28.05, DAL.09.05
DAD.27.003	Data terkait kesenian dan kebudayaan	Informasi data terkait kesenian dan kebudayaan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait kesenian dan kebudayaan	RAD 08.02 Data Kebudayaan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada
DAD.27.004	Data Cagar Budaya Dan Object Diduga Cagar Budaya	Informasi data cagar budaya	Bertujuan untuk mengetahui Informasi cagar budaya	RAD 08.02 Data Kebudayaan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.27.005	Data Pemuda Aktif Berwirausaha	Informasi Data Pemuda Aktif Berwirausaha	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Pemuda Aktif Berwirausaha, Data Promosi Event Daerah Yang Terlaksana, Data Sharing Session	RAD 06.04 Data Pemuda	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada
DAD.27.006	Data Promosi Event Daerah Yang Terlaksana	Informasi Data Promosi Event Daerah Yang Terlaksana	Bertujuan untuk mengetahui informasi Data Promosi Event Daerah Yang Terlaksana	RAD 06.04 Data Pemuda	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada
DAD.27.007	Data Sharing Session	Informasi Data Sharing Session	Bertujuan untuk mengetahui informasi Data Sharing Session	RAD 06.04 Data Pemuda	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.27.008	Data Akupensi Hotel Dan Rumah Kos	Informasi data akupensi hotel dan rumah kos, informasi kunjungan wisata	Bertujuan untuk mengetahui Informasi akupensi hotel dan rumah kos, informasi kunjungan wisata	RAD 02.11 Data Pariwisata	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada
DAD.27.009	Data Kunjungan Wisata	Informasi Data Kunjungan Wisata	Bertujuan untuk mengetahui informasi Data Kunjungan Wisata	RAD 02.11 Data Pariwisata	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada
DAD.27.010	Data Kakang Mbakyu	Informasi Data Kakang Mbakyu	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Kakang Mbakyu	RAD 06.04 Data Pemuda	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.27.011	Data Pemuda Berprestasi	Informasi Data Pemuda Berprestasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Pemuda Berprestasi	RAD 06.04 Data Pemuda	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada
DAD.27.012	Data Seleksi Paskibraka	Informasi Data Seleksi Paskibraka	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Seleksi Paskibraka	RAD 06.04 Data Pemuda	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada
DAD.27.013	Data Event Kepemudaan	Informasi Data Event Kepemudaan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Event Kepemudaan	RAD 06.04 Data Pemuda	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada
DAD.27.014	Data Pelatihan Kepemudaan	Informasi Data Pelatihan Kepemudaan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Pelatihan Kepemudaan	RAD 06.04 Data Pemuda	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.27.015	Data Jumlah Medali Yang Diraih	Informasi Data Jumlah Medali Yang Diraih	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Jumlah Medali Yang Diraih	RAD 06.05 Data Olahraga	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada
DAD.27.016	Data Event Kejuaraan	Informasi Data Event Kejuaraan	Bertujuan untuk mengetahui Data Event Kejuaraan	RAD 06.05 Data Olahraga	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada
DAD.27.017	Data Cabang Olahraga Yang Dibina	Informasi Data Cabang Olahraga Yang Dibina	Bertujuan untuk mengetahui Data Cabang Olahraga Yang Dibina.	RAD 06.05 Data Olahraga	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada
DAD.27.018	Data Event Festival Olahraga	Informasi Data Event Festival Olahraga	Bertujuan untuk mengetahui Data Event Festival Olahraga	RAD 06.05 Data Olahraga	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.27.019	Data Sarpras Olahraga Yang Terfasilitasi	Informasi data sarpras olahraga yang terfasilitasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi sarpras olahraga yang terfasilitasi	RAD 06.05 Data Olahraga	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	tidak ada
DAD.27.020	Data informasi publik Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	informasi terkait Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.27.01, DAL.02.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.28.001	Data terkait perpustakaan	Informasi Data Pengunjung Perpustakaan, Data jumlah bahan pustaka, data jumlah judul bahan pustaka, data bahan pustaka yang dipinjam dan dikembalikan,	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Pengunjung Perpustakaan, Data jumlah bahan pustaka, data jumlah judul bahan pustaka, data bahan pustaka yang dipinjam dan dikembalikan,	RAD 06.01 Data Pendidikan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DAD.28.01, DAL.28.02
DAD.28.002	Data arsip pusat	informasi data arsip pusat	bertujuan untuk mengelola arsip terpusat	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DAD.28.02, DAL.28.03

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.28.003	Data arsip daerah	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Kota Madiun yang dibuat untuk pengelolaan pengarsipan surat masuk-keluar	Berfungsi untuk memudahkan dalam pengelolaan pengarsipan surat daerah	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DAD.28.05, DAL.28.03
DAD.28.004	Data informasi publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	informasi terkait Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.28.04, DAL.02.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.28.005	Pembuatan Kartu anggota dan Peminjaman Bahan Pustaka, Pengolahan bahan pustaka dan nomer induk bahan pustaka.	Digunakan untuk pelayanan Perpustakaan	Berfungsi untuk melayani pemustaka antara lain layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka, pembuatan kartu anggota. Berfungsi untuk mengolah bahan pustaka, menginformasikan statistik perpustakaan.	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DAD.28.03, DAL.28.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.29.001	Data Perizinan	Informasi Data Bidang Usaha Perdagangan pada program RPJMD ini meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Bidang Usaha Perdagangan pada program RPJMD ini meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan	RAD 02.02 Data Perdagangan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Perdagangan	DAL.29.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.29.002	Laporan Pengelolaan Pasar Rakyat	Informasi Data Bidang pengelolaan pasar rakyat meliputi pelaksanaan pengelolaan retribusi dan perijinan pasar, sarana prasarana pasar dan ketertiban pasar serta pembukuan dan pemberdayaan pasar	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Bidang pengelolaan pasar rakyat meliputi pelaksanaan pengelolaan retribusi dan perijinan pasar, sarana prasarana pasar dan ketertiban pasar serta pembukuan dan pemberdayaan pasar	RAD 02.02 Data Perdagangan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Perdagangan	DAL.29.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.29.003	Laporan Dan Dokumentasi	Informasi Data Bidang Usaha perdagangan memiliki wewenang meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Perdagangan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Bidang Usaha perdagangan memiliki wewenang meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Perdagangan	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Perdagangan	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.29.004	Data Pelaksanaan Tera/Tera Ulang	Informasi Data UPTD Metrologi legal yang melakukan tugas meliputi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah, dan melaporkan tugas dibidang metrologi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi UPTD Metrologi legal merupakan UPTD yang melakukan tugas meliputi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah, dan melaporkan tugas dibidang metrologi	RAD 02.02 Data Perdagangan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Perdagangan	DAL.29.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.29.005	Data Produk	Informasi Data Bidang Usaha Perdagangan meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Perdagangan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Bidang Usaha Perdagangan meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Perdagangan	RAD 02.02 Data Perdagangan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Perdagangan	DAL.29.01
DAD.29.006	Data pedagang dan data pembayaran retribusi	informasi data pedagang dan data pembayaran retribusi	Berfungsi memudahkan pembayaran retribusi	RAD 02.02 Data Perdagangan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Dinas Perdagangan	DAD.29.01, DAL.29.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
7	Data tamu	informasi data pencatatan buku tamu	sebagai log book pencatatan buku tamu	RAD 02.02 Data Perdagangan	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perdagangan	DAD.29.02
DAD.29.008	Data informasi publik Dinas Perdagangan	informasi terkait Dinas Perdagangan	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Perdagangan	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.29.03, DAL.02.05
1	Daftar Penerima Layanan	informasi data penerima layanan	Bertujuan untuk mengetahui informasi penerima layanan	RAD 05.02 Data Keamanan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	DAL.30.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.30.002	Data Pembinaan Anjal Gepeng, Pkl, Dan Penutupan Tempat Usaha.	informasi Data Pembinaan anjal gepeng, Pkl, dan penutupan tempat usaha.	Bertujuan untuk mengetahui informasi Pembinaan anjal gepeng, Pkl, dan penutupan tempat usaha.	RAD 05.02 Data Keamanan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	tidak ada
DAD.30.003	Kumpulan Perda	Informasi Data Dokumen perda	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Dokumen perda	RAD 05.01 Data Hukum	Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	DAD.30.03, DAL.30.02
DAD.30.004	Data Rekap Bimtek /Diklat Internal	informasi Data rekap bimtek /diklat internal	Bertujuan untuk mengetahui informasi Data rekap bimtek /diklat internal	RAD 05.01 Data Hukum	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.30.005	Data Rekapitulasi Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis, ODGJ, Reklame, PKL	informasi Data Rekapitulasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis, ODGJ, Reklame, PKL,	Bertujuan untuk mengetahui informasi Rekapitulasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis, ODGJ, Reklame, PKL,	RAD 05.02 Data Keamanan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	DAL.30.01
DAD.30.006	Data Pengamanan Dan Pengawasan	informasi data Jumlah Pengamanan dan Pengawasan	Bertujuan untuk mengetahui informasi Jumlah Pengamanan dan Pengawasan	RAD 05.02 Data Keamanan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	tidak ada
DAD.30.007	Rekapan Data Pemadaman Dan Penyelamatan,	Informasi data Rekapan data Pemadaman dan penyelamatan,	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Rekapan data Pemadaman dan penyelamatan,	RAD 05.02 Data Keamanan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	DAD.30.04

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.30.008	Data informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	informasi terkait Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.30.01, DAL.02.05
DAD.30.009	Data pengisian bahan bakar	Pengelolaan data pengisian bahan Bakar yang dipergunakan sebagai penunjang kegiatan	Membantu pekerjaan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran	RAD 05.02 Data Keamanan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	DAD.30.02, DAL.14.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.30.010	data terkait pelayanan kebakaran	informasi data terkait pelayanan kebakaran	informasi publik terkait seluruh layanan pemadam kebakaran dan permintaan pelatihan edukasi	RAD 05.02 Data Keamanan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	DAD.30.05
DAD.31.001	Data Pegawai Dan Cuti	Informasi data pegawai dan cuti meliputi kuota cuti, form cuti dan surat cuti	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data pegawai dan cuti meliputi kuota cuti, form cuti dan surat cuti	RAD 09.06 Data Aparatur Negara	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	DAD.31.01, DAL.31.23

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.31.002	Data Pasien	Informasi Data Meliputi rekam medis dan pembayaran	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Meliputi rekam medis dan pembayaran	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	DAD.31.02, 'E.31.02 - DAL.31.22

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.31.003	Data penilaian tenaga kesehatan dari berbagai indikator dari isian form	Informasi Data penilaian tenaga kesehatan dari berbagai indikator dari isian form	Befungsi sebagai alat bantu yang diperuntukkan bagi Rumah Sakit yang mengikuti program Akreditasi yang diselenggarakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).	RAD 04.01 Data Kesehatan	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	DAD.31.03
DAD.31.004	Nomor Rekam Medis	Pelayanan Deteksi Dini Kehamilan Resiko Tinggi (Pendekar Hati) merupakan aplikasi pemberitahuan berupa SMS agar Ibu Hamil tidak Terlambat untuk Kontrol Kehamilannya.	Untuk mengingatkan Ibu Hamil tidak Terlambat untuk Kontrol Kehamilannya dan mendeteksi ibu hamil dengan resiko tinggi.	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	DAD.31.04

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.31.005	Nominal tarif pembayaran hasil export aplikasi SIM-RS RSUD Kota Madiun	INA-CBG merupakan sebuah singkatan dari Indonesia Case Base Groups yaitu sebuah aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim pada pemerintah	Untuk mengatasi masalah pembiayaan rumah sakit	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	DAD.31.05, DAL.31.22
DAD.31.006	Nominal Jasa Medis dari database SIM-RS RSUD Kota Madiun	Aplikasi keuangan untuk menghitung dan melakukan pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit secara tersistem sehingga diharapkan proses pembagian Jasa Pelayanan dapat meningkatkan waktu, lebih akurat dan efisien.	Aplikasi untuk menghitung dan melakukan pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit secara tersistem.	RAD 04.01 Data Kesehatan	Terbatas	Data Keuangan	Realtime	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	DAD.31.06, DAL.31.22

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.31.007	Data profil	Website penyebaran informasi terkait RSUD Kota Madiun, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, cek ketersediaan kamar tidur dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup RSUD Kota Madiun	RAD 04.01 Data Kesehatan	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.31.07, DAL.02.05
1	Data Kependudukan	Informasi Data Kependudukan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Kependudukan	RAD 03.07 Data Kependudukan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Kecamatan Manguharjo	DAL.23.01

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.32.002	Data Rencana Kegiatan	Informasi Data SICAkra digunakan untuk merancang rencana kerja kegiatan guna realisasi pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien sesuai target.	Merancang rencana kerja kegiatan kecamatan dan kelurahan	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Kecamatan Manguharjo	DAD.32.01, DAL.23.01
DAD.32.003	Data informasi publik Kecamatan Manguharjo	Website penyebaran informasi terkait Kecamatan Manguharjo, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Kecamatan Kartoharjo	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.32.02, DAL.02.05
1	Data Pegawai	Informasi Data SKP Pegawai ASN	Bertujuan untuk mengetahui Informasi SKP Pegawai ASN	RAD 09.07 Data Kesekretariatan Negara	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Kecamatan Kartoharjo	DAD.11.2

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.33.002	Surat pernyataan ahli waris	E-Surprais merupakan aplikasi Kecamatan Kartoharjo untuk mempermudah dalam pengurusan surat pernyataan ahli waris	Bertujuan untuk mengetahui Informasi SKP Pegawai ASN	RAD 03.07 Data kependudukan	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Kecamatan Kartoharjo	DAD.33.01, DAL.33.01
DAD.33.003	Data informasi publik Kecamatan Kartoharjo	Website penyebaran informasi terkait Kecamatan Kartoharjo, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Bertujuan untuk mengetahui Informasi SKP Pegawai ASN	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.33.02, DAL.02.05

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.33.004	Parameter kepuasan	Aplikasi SKM-Karto merupakan aplikasi survei kepuasan masyarakat pengunjung Kecamatan Kartoharjo	Bertujuan untuk mengetahui Informasi SKP Pegawai ASN	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Kecamatan Kartoharjo	DAD.33.03, DAL.33.02
DAD.34.001	Data Rekam Medis	Informasi data tentang data rekam medis, data konsultasi gigi, data izin PIRT, data UBM, Data rumah tangga sehat, data posyandu, data sarana air bersih	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang data rekam medis, data konsultasi gigi, data izin PIRT, data UBM, Data rumah tangga sehat, data posyandu, data sarana air bersih	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Puskesmas Manguharjo	DAL.34.03

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.34.002	Data Kunjungan Rumah	Informasi data tentang data kunjungan rumah, data pelayanan kesehatan jiwa, data pelayanan gigi, data kesehatan lansia, data kefarmasian	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang data kunjungan rumah, data pelayanan kesehatan jiwa, data pelayanan gigi, data kesehatan lansia, data kefarmasian	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Puskesmas Manguharjo	DAL.34.02

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
DAD.34.003	Data Rekam Medis	Informasi tentang Data Rekam medis, data pemeriksaan umum, data kesehatan gigi dan mulut, data KB dan imunisasi, data tindakan, data laboratorium, data fasmasi, data TB	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data Rekam medis, data pemeriksaan umum, data kesehatan gigi dan mulut, data KB dan imunisasi, data tindakan, data laboratorium, data fasmasi, data TB	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Puskesmas Manguharjo	DAL.34.03
4	Data Apotek	Informasi tentang data apotek	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang data apotek	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Puskesmas Manguharjo	DAL.15.06
5	Data Rumah Sakit	Informasi tentang Data Rumah Sakit	Bertujuan untuk mengetahui informasi tentang Data Rumah Sakit	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Puskesmas Manguharjo	DAL.15.10

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
6	Data Puskesmas	Informasi tentang Data Puskesmas	Bertujuan untuk mengetahui informasi tentang Data Puskesmas	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Puskesmas Manguharjo	tidak ada
DAD.34.007	Data Puskesmas Pembantu	Informasi tentang Data Puskesmas Pembantu	Bertujuan untuk mengetahui informasi tentang Data Puskesmas Pembantu	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Puskesmas Manguharjo	tidak ada
8	Data Optik	Informasi tentang Data Optik	Bertujuan untuk mengetahui informasi tentang Data Optik	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Puskesmas Manguharjo	DAL.15.11
DAD.34.009	Data Bangunan, Data Saranan Prasarana	informasi tentang data bangunan, data saranan prasarana	Bertujuan untuk mengetahui informasi tentang data bangunan, data saranan prasarana	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Puskesmas Manguharjo	tidak ada

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Data
C	Data PJ Mutu	Informasi data tiap PJ Mutu	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tiap PJ Mutu	RAD 04.01 Data Kesehatan	Tertutup	Data Statistik	Realtime	Puskesmas Manguharjo	tidak ada
DAD.34.011	Data informasi publik Puskesmas Manguharjo	Website penyebaran informasi terkait Puskesmas Manguharjo, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Puskesmas Manguharjo	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.34.01, DAL.02.05
DAD.35.001	Data informasi publik Puskesmas Sukosari	Website penyebaran informasi terkait Puskesmas Sukosari, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Puskesmas Sukosari	RAD 09.03 Data Informasi	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	DAD.35.01, DAL.02.05

Lampiran 5.1 Identifikasi Layanan Terhadap Program RPJMD

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
1	Bagian Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan pemantauan dan pengendalian kinerja OPD	Tidak ada
1	Bagian Organisasi	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Layanan pemantauan dan pengendalian kinerja OPD	Tidak ada
1	Bagian Organisasi	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Pelayanan Konsultasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Tidak ada
1	Bagian Organisasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Kelembagaan dan Anjab	Tidak ada
1	Bagian Organisasi	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
1	Bagian Organisasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
2	Bagian Hukum	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pelayanan Penelitian Produk Hukum	Tidak ada
2	Bagian Hukum		Pelayanan Register Penomoran dan Pengiriman Produk Hukum	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
2	Bagian Hukum		Pelayanan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tidak ada
2	Bagian Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelayanan Penyelesaian Sengketa Hukum	Tidak ada
2	Bagian Hukum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
2	Bagian Hukum	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
2	Bagian Hukum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
2	Bagian Hukum	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
2	Bagian Hukum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelayanan Konsultasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan		Pelayanan Permohonan Menjadi Narasumber	Tidak ada
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		Pelayanan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Ibadah	Tidak ada
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Pelayanan Fasilitasi Acara Keagamaan	Tidak ada
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		Pelayanan Fasilitasi Pemberangkatan dan Penjemputan Calon Jamaah Haji	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelayanan Pemberian Informasi dan Data Pengembangan dan Promosi Ekonomi Daerah/Ekonomi Kreatif	Tidak ada
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	Tidak ada	Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Pelayanan Pemberian Informasi dan Data Inflasi Daerah	Tidak ada
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelayanan Pemberian Informasi dan Data Pengembangan dan Promosi Ekonomi Daerah/Ekonomi Kreatif	Tidak ada
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
4	Bagian	Program Pemeliharaan Barang Milik	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Daerah		
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
5	Bagian Umum	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Tidak ada
5	Bagian Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Pengajuan peminjaman ruangan	Tidak ada
5	Bagian Umum	Program Penunjang Urusan	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
6	Bagian Pemerintahan	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Tidak ada	Layanan Penataan Daerah Otonom Baru
6	Bagian Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tidak ada	Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6	Bagian Pemerintahan	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah	Tidak ada	Layanan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah
6	Bagian Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
6	Bagian Pemerintahan	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
6	Bagian Pemerintahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
6	Bagian Pemerintahan	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
6	Bagian Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
7	Badan	Program Pencegahan Dini dan	Layanan Pembekalan dan	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pelatihan Penanggulangan Bencana	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Layanan Evakuasi / Penanggulangan Bencana	Tidak ada
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		layanan Penanganan Bencana Alam (Banjir, Angin puting beliung)	Tidak ada
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
7	Badan	Program Penunjang Urusan	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Penanggulangan Bencana Daerah	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsultasi mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah	Tidak ada
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Konsultasi mengenai Pengendalian Pembangunan Daerah	Tidak ada
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Konsultasi mengenai Evaluasi Pembangunan Daerah	Tidak ada
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Konsultasi mengenai Penelitian dan Pengembangan atas Program dan atau Kegiatan Pembangunan Daerah	Tidak ada
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tidak ada	Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Daerah			
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Konsultasi mengenai Evaluasi Pembangunan Daerah	Tidak ada
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Pelayanan Konsultasi Penatausahaan SIPD	Tidak ada
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Pelayanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Tidak ada
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelayanan Verifikasi SPJ Fungsional Pendapatan dan SPJ Fungsional Belanja dan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja	Tidak ada
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Pelayanan DPA dan DPPA	Tidak ada
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Pengelolaan DAK Fisik di Kota Madiun	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Pengelolaan DAK Non Fisik di Kota Madiun	Tidak ada
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Layanan Keuangan Dana Insentif Daerah	Tidak ada
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Layanan Monitoring PNBPN	Tidak ada
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Pelayanan Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal	Tidak ada
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelayanan Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tidak ada
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
10	Badan Pendapatan Daerah	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Pelayanan SIMPADAMA (Pelayanan Pajak Daerah)	Tidak ada
10	Badan Pendapatan Daerah		Pelayanan SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)	Tidak ada
10	Badan Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	Pelayanan SIMPADAMA (Pelayanan Pajak Daerah)	Tidak ada
10	Badan Pendapatan Daerah		Pelayanan SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)	Tidak ada
10	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan Penyampaian SPTPD	Tidak ada
10	Badan Pendapatan Daerah		Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerbitan NPWPD	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
10	Badan Pendapatan Daerah		Pelayanan Peberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran PBB Perkotaan	Tidak ada
10	Badan Pendapatan Daerah		Pelayanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB Perkotaan	Tidak ada
10	Badan Pendapatan Daerah		Pelayanan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh tempo SPPT PBB Perkotaan	Tidak ada
10	Badan Pendapatan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
10	Badan Pendapatan Daerah	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
10	Badan Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Layanan Permohonan Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional Keluar daerah	Tidak ada
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Layanan Permohonan Tugas Belajar	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Sumber Daya Manusia			
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Layanan Permohonan Ijin Keluar Negeri	Tidak ada
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penataan Aparatur	Layanan Penetapan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional	Tidak ada
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Layanan Sasaran Kinerja Pegawai	Tidak ada
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Permohonan Izin Belajar	Tidak ada
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Layanan Permohonan Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional Keluar	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Manusia		daerah	
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Fasilitas Kesejahteraan PNS	Layanan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS	Tidak ada
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Layanan Pemrosesan Cuti Pegawai	Tidak ada
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Layanan Pembuatan Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Istri (KARIS)	Tidak ada
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Layanan Permohonan Izin Perkawinan dan Pembinaan Pra Nikah/Pasca Nikah	Tidak ada
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya		Layanan Pelayanan Permohonan Izin Perceraian	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Manusia			
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Layanan Pengajuan Tunjangan Istri/Suami dan Anak	Tidak ada
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Layanan Penghargaan Satya Lancana	Tidak ada
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Layanan Legalisir	Tidak ada
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan Permohonan Pindah Antar Wilayah (PAW)	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelayanan Pemantauan dan Pengendalian Kinerja OPD	Tidak ada
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tidak ada	Layanan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	Tidak ada	Layanan Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	Tidak ada	Layanan Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pembinaan Orkesmas dalam kehidupan demokrasi	Pendataan Keberadaan Ormas	Tidak ada
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tidak ada	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tidak ada	Layanan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengajuan Penelitian	Tidak ada
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
13	Inspektorat Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Klinik konsultasi pengawasan interen	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
13	Inspektorat Daerah	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tidak ada	Layanan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
13	Inspektorat Daerah	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	Tidak ada	Layanan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan
13	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Klinik konsultasi pengawasan interen	Tidak ada
13	Inspektorat Daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tidak ada	Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
13	Inspektorat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
13	Inspektorat Daerah	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
13	Inspektorat Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
13	Inspektorat Daerah	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
13	Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
		Kabupaten/Kota		
14	Sekretariat DPRD	Program Layanan PerundangUndangan, Dokumentasi dan Rapat	Tidak ada	Layanan PerundangUndangan, Dokumentasi dan Rapat
14	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Layanan e-AR (Layanan Aspirasi Masyarakat)	Tidak ada
14	Sekretariat DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
14	Sekretariat DPRD	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
14	Sekretariat DPRD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
14	Sekretariat DPRD	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
14	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Layanan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bea Iur Daerah (KIS PBID)	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Keluarga Berencana			
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bea Iur Daerah (KIS PBID)	Tidak ada
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Tidak ada	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Tidak ada	Layanan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tidak ada	Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Tidak ada	

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tidak ada	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Layanan Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Ijin Usaha Apotek	Tidak ada
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Layanan penerbitan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum	Tidak ada
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Layanan Penerbitan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Jasaboga	Tidak ada
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi rumah Makan/Restoran	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Layanan Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Ijin Usaha Toko Obat	Tidak ada
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Tidak ada	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Tidak ada	Layanan Pengendalian Penduduk
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Tidak ada	Layanan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Tidak ada	LayananPemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Tidak ada	Layanan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
15	Dinas Kesehatan,	Program Penunjang Urusan	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Pelayanan Persetujuan Pembangunan Gedung	Tidak ada
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pelayanan Jasa Rekomendasi Penurunan Trotoar	Tidak ada
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Layanan pelaporan jalan dan jembatan	Tidak ada
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	Tidak ada	Layanan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Banjir	Tidak ada	Layanan Pengendalian Banjir
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tidak ada	Layanan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Layanan Pesebaran Jaringan Perpipaan
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Pelayanan Jasa Verifikasi dan Konsultasi Perencanaan Bangunan	Tidak ada
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	Tidak ada	Layanan Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tidak ada	Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Tidak ada	Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	Tidak ada	Layanan Penataan Bangunan Gedung
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tidak ada	Layanan Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Tidak ada	Layanan Penyelenggaraan Jalan
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	Tidak ada
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tidak ada	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman	Pelayanan Pendaftaran Permohonan Tanah Pemakaman (Penguburan Jenazah di Pace Keras).	Tidak ada
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Pelayanan Pengangkutan dan Pemakaman Jenazah termasuk Jenazah Orang Terlantar.	Tidak ada
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Tidak ada	Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Tidak ada	Layanan Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program pengembangan Perumahan	Pelayanan Rekomendasi Ijin Lokasi (Pembangunan dan Pengembangan Perumahan).	Tidak ada
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Pelayanan Calon Penghuni Rusunawa.	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Permukiman			
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Pelayanan Pemrosesan Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan.	Tidak ada
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pelayanan Pertanahan	Pelayanan Rekomendasi Izin Perubahan Penggunaan Tanah.	Tidak ada
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Permukiman	Kabupaten/Kota		
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Pelayanan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Tidak ada
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Sosial	Tidak ada	Layanan Pemberdayaan Sosial
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Gelandangan Psikotik dan Tempat Tinggal Tidak Tetap	Tidak ada
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pelayanan Penanganan Bencana Sosial	Tidak ada
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pelayanan Pengusulan KIS PBIN	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Perempuan dan Perlindungan Anak			
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penanganan Bencana	Penanganan Bencana Alam	Tidak ada
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Gelar Pahlawan	Tidak ada
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Usulan Gelar Perintis Kemerdekaan	Tidak ada
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Layanan Kesetaraan Gender	Tidak ada
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	Layanan Penanganan Pengaduan Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Perlindungan Anak			
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Layanan Kesetaraan Gender	Tidak ada
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Layanan Penanganan Pengaduan Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Tidak ada
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pelayanan Program Keluarga Harapan	Tidak ada
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Layanan Kesetaraan Gender	Tidak ada
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar / Kartu Indonesia Pintar Kuliah	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Perlindungan Anak			
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Pelayanan Penerbitan SPT Pendampingan Respon Kasus Anak	Tidak ada
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Perlindungan Anak			
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Layanan Kartu Tanda Pencari Kerja / AK I <i>Online</i>	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		Layanan Rekomendasi Paspor (CPMI)	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tidak ada	Layanan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Hubungan Industrial	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		Pelayanan Verifikasi Perizinan Berusaha Melalui Akun Tim Teknis	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Tidak ada	Layanan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pengembangan UMKM	Publikasi Produk Ikm Melalui Pameran	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Pelayanan Pencatatan Jaminan Kecelakaan Kerja	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		Pelayanan Pencatatan Jaminan Kematian	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Perlindungan Tenaga Kerja	Pencatatan Serikat Pekerja	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	Tidak ada	Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rekomendasi Penyelenggara Pameran Bursa Kerja/Job Market Fair	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		Pelayanan Pemberian Informasi Pasar Kerja Kepada Pencari Kerja Dan Pemberi Kerja	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	IJIN USAHA SIMPAN PINJAM (IUSP)	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pinjaman Modal Usaha Bagi Ikm Melalui Bank	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pembinaan Industri	Pelatihan Industri Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Perindustrian	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pelatihan Industri Seksi Perencanaan Dan Pembangunan Perindustrian	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tidak Ada	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Ketrasmigrasian	Layanan REKOMENDASI PASPOR (CPMI)	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Kerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Dasar	Pelayanan pendaftaran peserta didik baru	Tidak ada
20	Dinas Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tidak ada	Layanan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20	Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
		Kabupaten/Kota		
20	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Layanan LI (Laporan Individu Sekolah) profil	Tidak ada
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Tidak ada	Layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
20	Dinas Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Layanan Be SMART Kota Madiun	Tidak ada
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tidak ada	Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Non Formal	Tidak ada	Layanan Pendidikan Non Formal
20	Dinas Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Tidak ada	Layanan Pengembangan Kurikulum
20	Dinas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Pendidikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
20	Dinas Pendidikan	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pelayanan Permintaan Bantuan Pestisida Pertanian	Tidak ada
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pelayanan Verifikasi dan Validasi Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Distribusi Pupuk Bersubsidi	Tidak ada
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pelayanan Surat Pengantar Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM PUAP) Ke Bank	Tidak ada
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tidak ada	Layanan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tidak ada	Layanan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
21	Dinas Ketahanan	Program Peningkatan Diversifikasi dan	Tidak ada	Layanan Peningkatan Diversifikasi

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Pangan dan Pertanian	Ketahanan Pangan Masyarakat		dan Ketahanan Pangan Masyarakat
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tidak ada	Layanan Penanganan Kerawanan Pangan
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tidak ada	Layanan Pengawasan Keamanan Pangan
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan	Pelayanan Rekomendasi Pelayanan Kredit Petani Ikan	Tidak ada
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pelaku Usaha Perikanan	Pelayanan Sewa Sarana Prasarana Pasar Ikan	Tidak ada
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelayanan Bantuan Benih Ikan	Tidak ada
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tidak ada	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelayanan Rekomendasi Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tidak ada
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan	Pelayanan Rekomendasi Kredit Ternak	Tidak ada
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pelaku Usaha Peternakan	Pelayanan Kesehatan Hewan	Tidak ada
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tidak ada	Layanan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pelayanan Fasilitas Rumah Potong Hewan	Tidak ada
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pelayanan Rekomendasi Surat Ijin Praktek Dokter Hewan	Tidak ada
21	Dinas Ketahanan Pangan dan	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Tidak ada	Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Pertanian			Pertanian
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Perizinan usaha Pertanian	Pelayanan Fasilitas Pengajuan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Tidak ada
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Tidak ada	Layanan Penyuluhan Pertanian
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Penunjang Urusan	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Pangan dan Pertanian	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tidak ada	Layanan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tidak ada	Layanan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Tidak ada	Layanan Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tidak ada	Layanan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tidak ada	Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Tidak ada	Layanan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Tidak ada	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Tidak ada	Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tidak ada	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Tidak ada	Layanan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Layanan SILAPLING (Layanan Pelaporan lingkungan)	Tidak ada
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Tidak ada	Layanan Pengelolaan Persampahan
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Layanan SILANDEP	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Inovasi Gadjah Mada (Petugas Adminduk Berkunjung ke Rumah, Masyarakat Kota Madiun Bahagia)	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PELAYANAN INOVASI BAKTIKU EYANGKU (Bawakan AKTe kelahiran untuKmU EYANGKU	Tidak ada
23	Dinas		Program Penataan dan Pelayanan	Pelayanan Inovasi Taksiah

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Pencatatan Sipil		
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Layanan Pencatatan Kematian	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Penerbitan Akte Perceraian (Bagi Warga Non Muslim)	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan	Pelayanan Kartu Identitas Anak (Kia)	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Perkawinan (Bagi Warga Non Muslim)	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan Dan Pengesahan Anak	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Pembetulan Dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pembatalan Dokumen Administrasi Kependudukan Melalui Asas Contrarius Actus	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Layanan Pendaftaran Penduduk (SIAK)	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Layanan Pendaftaran Penduduk (SIAK)	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan		Layanan Digi Form	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Pencatatan Sipil			
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Penerbitan KK	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Penerbitan Kembali Register Dan Akta Pencatatan Sipil	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pelayanan Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Data Adminitsrasi Kependudukan	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Pencatatan Sipil			
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
24	Dinas Pehubungan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
24	Dinas Pehubungan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pelayanan E-TLE	Tidak ada
24	Dinas Pehubungan		Layanan KIR AE	Tidak ada
24	Dinas Pehubungan		Layanan pendaftaran <i>online</i> Pengujian Kendaraan Bermotor dan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor	Tidak ada
24	Dinas Pehubungan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tidak ada	Layanan Peningkatan Pelayanan Angkutan
24	Dinas Pehubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tidak ada	Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
24	Dinas Pehubungan	Program Pelayanan Administrasi	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
		Perkantoran		
24	Dinas Pehubungan	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
24	Dinas Pehubungan	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
24	Dinas Pehubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pemberian Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Tidak ada
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tidak ada	Layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Madiun	Tidak ada
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Aplikasi Informatika	Tidak ada	Program Aplikasi Informatika
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Sosialisasi di Bidang Cukai	Tidak ada	Layanan Sosialisasi di Bidang Cukai

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pelayanan Data Statistik Sektoral	Tidak ada
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tidak ada	Layanan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tidak ada	Layanan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi	Pelayanan Perizinan	Tidak ada
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Peta Digital Perizinan	Tidak ada
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Moda	Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Madiun	Tidak ada
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Promosi Penanaman Modal	Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Madiun	Tidak ada
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Madiun	Tidak ada
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Madiun	Tidak ada
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tidak ada	Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Tidak ada	Layanan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pelayanan Legalisir sertifikat dan piagam penghargaan	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pelayanan Perpanjangan Nomor Induk Kesenian	Tidak ada
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Tidak ada	Layanan Pengembangan Kesenian Tradisional
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tidak ada	Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelayanan Registrasi Nomor Induk Kesenian	Tidak ada
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelayanan Membawa Cagar Budaya Keluar Kota Dalam Satu Provinsi	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		Pelayanan Perizinan Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian	Tidak ada
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri	Tidak ada
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Tidak ada	Layanan Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tidak ada	Layanan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pemasaran Pariwisata	Tidak ada	Layanan Pemasaran Pariwisata

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tidak ada	Layanan Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
27	Dinas Kebudayaan,	Program Penunjang Urusan	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
	Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	LAYANAN JARIMU	Tidak ada
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan	Tidak ada	Layanan Pembinaan Perpustakaan
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Layanan perpustakaan dan pelestarian naskah kuno	Tidak ada
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Layanan Kearsipan Dinamis	Tidak ada
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Layanan Kearsipan Dinamis	Tidak ada
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip	Layanan Kearsipan Dinamis	Tidak ada
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
29	Dinas Perdagangan	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Layanan Retribusi Pasar	Tidak ada
29	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tidak ada	Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
29	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Tidak ada	Layanan Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat
29	Dinas Perdagangan	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Tidak ada	Layanan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
29	Dinas Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tidak ada	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
29	Dinas Perdagangan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Tidak ada	Layanan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
29	Dinas Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
29	Dinas Perdagangan	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
29	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
29	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
29	Dinas Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Layanan Pengaduan / Keluhan Masyarakat	Tidak ada
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tidak ada	Layanan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tidak ada	Layanan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Layanan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Tidak ada
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Layanan Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tidak ada
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tidak ada
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Tidak ada	Layanan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Tidak ada	Layanan Peningkatan Pelayanan BLUD
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Tidak ada	Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
32	Kecamatan Manguharjo	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Tidak ada	Layanan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan
32	Kecamatan Manguharjo	Program Dana Kelurahan	Layanan pelaporan realisasi kegiatan kelurahan	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tidak ada	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
32	Kecamatan Manguharjo	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Layanan Legalisasi surat Keterangan Kematian (Terkait yang tidak memiliki dokumen kependudukan terakhir)	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo		Layanan Legalisasi Surat Keterangan Ijin Bepergian	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo		Layanan Permintaan Data Terkait Pemerintahan Kecamatan	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo		Layanan Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris Warga Negara Indonesia Pribumi Asli	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo		Layanan Legalisasi Surat Keterangan Belum Pernah	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
			Menikah	
32	Kecamatan Manguharjo		Layanan Legalisasi Surat Permohonan Nikah	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo		Layanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo		Layanan Legalisasi Proposal Bantuan Hibah	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo		Layanan Legalisasi Surat Keterangan (Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan/IMB)	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo		Layanan Legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan)	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo		Layanan Legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu)	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo		Layanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Ijin	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
			Usaha)	
32	Kecamatan Manguharjo		Layanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Menutup Jalan)	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo		Layanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian)	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Tidak ada	Layanan Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum
32	Kecamatan Manguharjo	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tidak ada	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
32	Kecamatan Manguharjo	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Keramaian)	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tidak ada	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
32	Kecamatan Manguharjo	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
32	Kecamatan Manguharjo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Tidak ada	Layanan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tidak ada	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Tidak ada	Layanan Penyelenggaraan Kelurahan

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Tidak ada	Layanan Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Layanan Survei Kepuasan Masyarakat	Tidak ada
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pelayanan Pernyataan Ahli Waris	Tidak ada
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak ada	Tidak ada
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak ada	Tidak ada
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama Perangkat Daerah	Program RPJMD	Nama Layanan	Usulan Layanan
		Kabupaten/Kota		

Lampiran 5.2 Metadata Layanan SPBE

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.01.01	Layanan pemantauan dan pengendalian kinerja OPD	Bertujuan untuk mengukur capaian kinerja organisasi	e-SAKIP berfungsi sebagai alat untuk mengawal perencanaan kinerja dan keuangan, mengukur kinerja dan keuangan, membantu dalam keperluan pembuatan laporan, sebagai basis data yang terintegrasi, dan untuk untuk memetakan kinerja secara cascading	RAL 02.04 Aparatur Negara	Bagian Organisasi	Kementrian PAN dan RB	Pemerintah Daerah	Seluruh PD	Elektronik	RAA.01.01, RAA.01.05, DAD.01.001

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.01.02	Pelayanan Konsultasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Bertujuan untuk melayani tentang konsultasi ketataleksanaan dan pelayanan publik yang ada	Berfungsi membantu masyarakat dalam konsultasi terkait ketatalaksanaan dan pelayanan publik baik secara offline dengan langsung datang ke kantor atau dengan melakukan panggilan telepon	RAL 01.43 Informasi	Bagian Organisasi	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.01.03	Pelayanan Kelembagaan dan Anjab	Bertujuan untuk melayani kelembagaan beserta ANJAB	Berfungsi melayani OPD yang memiliki permasalahan terkait kelembagaan dan analisa jabatan dan beban kerja	RAL 02.04 Aparatur Negara	Bagian Organisasi	Tidak ada	Tidak ada	Internal PD	Elektronik	RAA.01.04, DAD.01.004

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.01.04	Layanan akuntabilitas OPD	Bertujuan untuk melakukan penilaian akuntabilitas terhadap OPD secara mandiri	Bertfungsi sebagai bagian yang melayani pengukuran akuntabilitas OPD. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Model Penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.	RAL 02.04 Aparatur Negara	Bagian Organisasi	Tidak ada	Tidak ada	Internal PD	Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.02.01	Pelayanan Penelitian Produk Hukum	Berfungsi sebagai fasilitator penyusunan produk hukum OPD	Berfungsi melakukan penelitian terkait produk hukum yang ada	RAL 01.28 Hukum	Bagian Hukum	Biro Hukum, Legislatif, Vertikal Biro Hukum, Kejaksaan, Kepolisian, Akademisi	Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Seluruh PD	Non Elektronik	
DAL.02.02	Pelayanan Register Penomoran dan Pengiriman Produk Hukum	Berfungsi sebagai fasilitator penyusunan produk hukum OPD	Berfungsi membantu OPD dalam proses registrasi penomoran serta pengiriman produk hukum	RAL 01.28 Hukum	Bagian Hukum	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Non Elektronik	
DAL.02.03	Pelayanan Penelitian Perjanjian Kerjasama, Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan	Berfungsi sebagai media pengikat antara 2 belah pihak yang melakukan perjanjian	Berfungsi sebagai pihak yang melakukan penelitian dalam hal kesepakatan	RAL 01.28 Hukum	Bagian Hukum	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.02.04	Pelayanan Penyelesaian Sengketa Hukum	Berfungsi sebagai media untuk membantu proses penyelesaian sengketa	Berfungsi membantu proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hukum	RAL 01.28 Hukum	Bagian Hukum	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Non Elektronik	
DAL.02.05	Pelayanan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bertujuan sebagai penyedia layanan sistem informasi yang berisi jaringan dokumentasi beserta informasi hukum	Berfungsi membantu proses penyebaran informasi terkait hukum yang ada melalui sistem informasi	RAL 01.28 Hukum	Bagian Hukum	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.02.01, DAD.02.001
DAL.03.01	Pelayanan Permohonan Menjadi Narasumber	Untuk memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Permohonan Menjadi Narasumber	Berfungsi membantu PD untuk menjadi narasumber	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Non Elektronik	DAD.03.001

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.03.02	Pelayanan Konsultasi Rencana Umum Pengadaan	Untuk memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Konsultasi Rencana Umum Pengadaan	Berfungsi membantu PD dalam proses diskusi terkait rencana pengadaan	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	DAD.03.003
DAL.03.03	Pelayanan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Untuk memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Berfungsi membantu PD dalam proses diskusi terkait rencana pengadaan barang/ jasa	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	DAD.03.003
DAL.03.04	Pelayanan Konsultasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Untuk memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Konsultasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Berfungsi melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh PD	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	DAD.03.007

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.03.05	Layanan Pengadaan secara elektronik	Untuk memberikan pelayanan terkait pengadaan barang secara elektronik	Berfungsi sebagai badan yang memberikan pelayanan terkait pengadaan barang secara elektronik yang dalam hal ini termasuk pelayanan terkait LPSE, SIRUP, INAPROC, e-Purchasing, e-Katalog, dan SIKAP	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.03.01,RAA.03.02, RAA.03.03, RAA.03.04, RAA.03.05, RAA.03.06, DAD.03.001, DAD.03.002, DAD.03.002, DAD.03.005, DAD.03.006, DAD.03.007
DAL.04.01	Pelayanan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Ibadah	Berfungsi untuk memberikan bantuan sosial	Berfungsi dalam memberikan bantuan untuk sarana dan prasarana ibadah	RAL 01.26 Sosial	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Dalam Negeri	Penunjang Pemerintahan	Publik	Non Elektronik	DAD.04.001

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.04.02	Pelayanan Pengajuan Izin SATGAS COVID	perizinan SATGAS COVID untuk acara di masjid agung dan tempat ibadah lainnya	Berfungsi sebagai tindakan pencegahan penyebaran covid dengan cara pemberian izin terkait satgas covid di tempat ibadah	RAL 01.25 Kesehatan	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Tidak ada	Penunjang Pemerintahan	Publik	Non Elektronik	
DAL.04.03	Pelayanan Proses Pendaftaran Seleksi BUMD	Untuk memproses Seleksi Pendirian BUMD	Berfungsi sebagai badan yang melakukan penyeleksian terhadap pendirian BUMD	RAL 01.24 Pemerintahan Daerah	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Tidak ada	Penunjang Pemerintahan	Internal PD	Non Elektronik	DAD.04.003
DAL.04.04	Pelayanan Fasilitasi Acara Keagamaan	fasilitasi acara keagamaan pemkot, seperti doa bersama, acara idul fitri, dsb	Berfungsi sebagai fasilitator acara keagamaan yang ada di kota Madiun	RAL 01.41 Agama	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Tidak ada	Penunjang Pemerintahan	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.04.05	Pelayanan Pemberian Informasi dan Data Inflasi Daerah	Jasa konsultasi data dan informasi terkait inflasi	Berfungsi sebagai badan yang memberikan informasi terkait data inflasi daerah	RAL 01.04 Ekonomi	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Tidak ada	Penunjang Pemerintahan	Publik	Elektronik	DAD.04.002
DAL.04.06	Pelayanan Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Berfungsi sebagai badan yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	RAL 01.11 Badan Usaha Milik Negara	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Dalam Negeri	Penunjang Pemerintahan	Publik	Non Elektronik	DAD.04.003

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.04.07	Pelayanan Pemberian Informasi dan Data Pengembangan dan Promosi Ekonomi Daerah/Ekonomi Kreatif	Memfasilitasi konsultasi terkait Pengembangan dan Promosi Ekonomi Daerah/Ekonomi Kreatif	Berfungsi sebagai fasilitator yang dapat memberikan informasi serta konsultasi terkait data pengembangan serta promosi ekonomi daerah/ekonomi kreatif	RAL 01.04 Ekonomi	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Tidak ada	Penunjang Pemerintahan	Publik	Elektronik	
DAL.04.08	Pelayanan Fasilitasi Pemberangkatan dan Penjemputan Calon Jamaah Haji	Konsultasi Fasilitasi Pemberangkatan dan Penjemputan Calon Jamaah Haji	Berfungsi sebagai fasilitator pemberangkatan serta penjemputan calon jemaah haji	RAL 01.41 Agama	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Agama	Penunjang Pemerintahan	Publik	Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.05.01	Pelayanan Pengajuan peminjaman ruangan	Persetujuan peminjaman ruang yang ada di Balai Kota	Berfungsi sebagai badan yang memberikan persetujuan terkait proses peminjaman ruangan	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Bagian Umum	Tidak ada	Sekretariat Daerah	Publik	Elektronik	RAA.05.02, DAD.05.001
DAL.05.02	Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Untuk dokumentasi agenda kegiatan sekretariat daerah	Berfungsi sebagai badan yang melakukan dokumentasi terkait kegiatan sekretariat daerah	RAL 02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Bagian Umum	Tidak ada	Sekretariat Daerah	Internal PD	Elektronik	RAA.05.01, DAD.05.002

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.07.01	Layanan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Bertujuan untuk memberikan pembekalan dan Pelatihan Terkait Penanggulangan Bencana	Berfungsi sebagai badan yang memberikan layanan dalam menghadapi bencana dengan cara pembekalan dan latihan penanggulangan bencana	RAL 01.26 Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.07.02	layanan Penanganan Bencana Alam (Banjir, Angin puting beliung)	Bertujuan untuk Melakukan Penanganan Bencana Alam (Banjir, Angin puting beliung)	Berfungsi sebagai badan yang melakukan penanganan bencana alam (Banjir, Angin puting beliung)	RAL 01.26 Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.07.03	Layanan Evakuasi / Penanggulangan Bencana	Bertujuan Untuk Melakukan Evakuasi / Penanggulangan Bencana	Berfungsi sebagai badan yang melakukan evakuasi serta penanggulangan ketika terjadi bencana alam	RAL 01.26 Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.08.01	Konsultasi mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemohon layanan dapat langsung menerima layanan konsultasi dengan BAPELITBANGDA Kota Madiun mengenai perencanaan pembangunan dengan mendatangi Kantor BAPELITBANGDA Kota Madiun atau menghubungi terlebih dahulu melalui telepon. Pemohon layanan adalah perencana OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau pejabat lain yang mendapatkan tugas di bidang perencanaan pembangunan.	Berfungsi sebagai badan yang menerima konsultasi terkait proses perencanaan pembangunan daerah	RAL 02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Pembangunan Daerah	Seluruh PD	Non Elektronik	RAA.08.01, DAD.08.001

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.08.02	Pelayanan Konsultasi mengenai Pengendalian Pembangunan Daerah	Pemohon dapat mengkonsultasikan mengenai evaluasi program/kegiatan yang tercantum pada dokumen perencanaannya. Pengendalian ini dimaksudkan untuk menjaga agar program/kegiatan OPD dapat berkontribusi secara maksimal dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan Kota Madiun.	Berfungsi sebagai badan untuk konsultasi mengenai pengendalian pembangunan daerah dengan cara melakukan evaluasi pada program/kegiatan yang tercantum pada dokumen perencanaan	RAL 02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kementrian Dalam Negeri	Pembangunan Daerah	Seluruh PD	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.08.03	Pelayanan Konsultasi mengenai Evaluasi Pembangunan Daerah	Pemohon dapat mengkonsultasikan mengenai evaluasi program/kegiatan yang tercantum pada dokumen perencanaannya. Pengendalian ini dimaksudkan untuk menjaga agar program/kegiatan OPD dapat berkontribusi secara maksimal dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan Kota Madiun.	Berfungsi sebagai badan untuk konsultasi mengenai evaluasi pada program/kegiatan yang tercantum pada dokumen perencanaan	RAL 02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kementrian Dalam Negeri	Pembangunan Daerah	Seluruh PD	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.08.04	Pelayanan Konsultasi mengenai Penelitian dan Pengembangan atas Program dan atau Kegiatan Pembangunan Daerah	Pemohon layanan dapat langsung menerima layanan konsultasi dengan BAPELITBANGDA Kota Madiun mengenai program dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemohon yang dipandang perlu untuk dikaji/diteliti/dikembangkan untuk keberhasilan program/kegiatan tersebut	Berfungsi sebagai badan untuk konsultasi terkait penelitian dan pengembangan terhadap program pembangunan daerah yang dirasa perlu untuk dikembangkan lagi	RAL 02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Pembangunan Daerah	Seluruh PD	Non Elektronik	RAA.08.02, DAD.08.002

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.09.01	Pelayanan Penerbitan SP2D	Memberikan dan menerbitkan SP2D untuk OPD	Berfungsi sebagai badan yang mengatur proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana untuk OPD	RAL 02.02 Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Internal PD	Elektronik	RAA.09.03, DAD.09.004

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.09.02	Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Untuk menerbitkan SKPP	Befungsi sebagai badan yang menerbitkan SKPP. SKPP adalah surat keterangan tentang terhitung mulai dihentikannya pembayaran gaji yang dibuat/dikeluarkan oleh Kuasa PA berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan pejabat berwenang dan diketahui oleh KPPN setempat. SKPP berisi rincian pembayaran gaji bulan terakhir PNS yang telah dicairkan dananya pada KPPN setempat. SKPP adalah surat	RAL 02.02 Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Internal PD	Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.09.03	Pelayanan Pengelolaan Administrasi Gaji	Pengelolaan gaji pegawai	Berfungsi sebagai badan yang mengelola gaji milik pegawai, baik ASN maupun Non-ASN	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Internal PD	Elektronik	RAA.09.04, DAD.09.005
DAL.09.04	Pelayanan Verifikasi SPJ Fungsional Pendapatan dan SPJ Fungsional Belanja dan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja	Untuk memverifikasi SPJ Fungsional Pendapatan dan SPJ Fungsional Belanja dan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja	Berfungsi sebagai verifikator SPJ Fungsional Pendapatan dan SPJ Fungsional Belanja dan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja	RAL 02.02 Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Internal PD	Elektronik	RAA.09.03, DAD.09.004
DAL.09.05	Pelayanan Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Memberikan Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Berfungsi sebagai konsultan dalam penyusunan laporan keuangan Surat Kerja Perangkat daerah (SKPD)	RAL 02.02 Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.09.03, DAD.09.004

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.09.06	Pelayanan DPA dan DPPA	Membantu manajemen dan pengelolaan DPA dan DPPA	Berfungsi sebagai badan yang membantu mengelola Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	RAL 02.02 Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.09.01, DAD.09.002
DAL.09.07	Pelayanan Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal	Melakukan Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal	Berfungsi sebagai badan yang melakukan rekonsiliasi pencatatan aset dengan realisasi belanja modal	RAL 02.02 Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.09.10, RAA.09.11, DAD.09.001, DAD.09.011
DAL.09.08	Pelayanan Konsultasi Penatausahaan SIPD	Memberikan Konsultasi Penatausahaan SIPD	Berfungsi sebagai konsultan penatausahaan SIPD	RAL 02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.09.02,RAA.09.03, DAD.09.003,DAD.09.004, DAD.23.002,

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.09.09	Pelayanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Untuk memajemen Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Berfungsi sebagai badan yang melayani pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah	RAL 02.02 Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Non Elektronik	
DAL.09.10	Pelayanan Penanganan Pengaduan Keuangan dan Aset	Masyarakat dan PD dapat melakukan pengaduan terkait keuangan dan aset	Berfungsi sebagai badan yang menerima pengaduan baik dari masyarakat maupun OPD terkait dengan keuangan maupun aset	RAL 02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Internal PD	Elektronik	RAA.25.06. DAD.25.011
DAL.09.11	Pengelolaan DAK Fisik di Kota Madiun	Bertujuan untuk mengelola DAK fisik Kota Madiun	Berfungsi sebagai badan yang melakukan manajemen pengelolaan DAK fisik di Kota Madiun	RAL 02.02 Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Internal PD	Elektronik	RAA.09.05, DAD.09.006

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.09.12	Pengelolaan DAK Non Fisik di Kota Madiun	Bertujuan untuk mengelola DAK Non-fisik Kota Madiun	Berfungsi sebagai badan yang melakukan manajemen pengelolaan DAK Non-fisik di Kota Madiun	RAL 02.02 Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Internal PD	Elektronik	RAA.09.13, DAD.09.013
DAL.09.13	Layanan Keuangan Dana Insentif Daerah	Bertujuan untuk mengelola Keuangan dana insentif daerah	Berfungsi sebagai badan yang mengelola keuangan dana insentif daerah	RAL 02.02 Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Internal PD	Elektronik	RAA.09.07, DAD.09.008
DAL.09.14	Layanan Monitoring PNBPN	Bertujuan untuk mengelola Monitoring pnbp	Berfungsi sebagai badan yang mengelola monitoring terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	RAL 02.02 Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Internal PD	Elektronik	RAA.09.08, DAD.09.009
DAL.09.15	Layanan Keuangan Desa	Bertujuan untuk mengelola layanan keuangan desa	Berfungsi sebagai badan yang mengelola keuangan desa	RAL 02.02 Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Internal PD	Elektronik	RAA.09.09, DAD.09.010

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.10.01	Pelayanan SIMPADAMA (Pelayanan Pajak Daerah)	Pelayanan pajak daerah	Berfungsi sebagai badan yang memberikan layanan terkait pajak	RAL 02.02 Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, RAA.10.04, DAD.10.001, DAD.10.004
DAL.10.02	Pelayanan SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)	Berisi data wajib obyek pajak dan cetak PBB	Berfungsi sebagai badan yang mengelola data wajib objek pajak dan cetak PBB	RAL 02.02 Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.02, DAD.10.002
DAL.10.03	Pelayanan Penerbitan Salinan SPPT dan SKPD PBB Perkotaan	Bertujuan untuk melayani penerbitan salinan SPPT dan SKPD PBB Perkotaan	Berfungsi sebagai badan yang memberikan persetujuan untuk menerbitkan salinan SPPT dan SKPD PBB Perkotaan	RAL 02.02 Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, DAD.10.001

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.10.04	Pelayanan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh tempo SPPT PBB Perkotaan	Bertujuan untuk melayani proses Penentuan Kembali Tanggal Jatuh tempo SPPT PBB Perkotaan	Berfungsi sebagai badan yang melayani proses penentuan kembali tanggal jatuh tempo SPPT PBB Perkotaan	RAL 02.02 Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, DAD.10.001
DAL.10.05	Pelayanan Peberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran PBB Perkotaan	Bertujuan untuk melayani proses Peberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran PBB Perkotaan	Berfungsi sebagai badan yang memberikan persetujuan untuk pemberian angsuran atau penundaan pembayaran PBB Perkotaan	RAL 02.02 Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, DAD.10.001

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.10.06	Pelayanan Keberatan PBB Perkotaan	Bertujuan untuk melayani proses Keberatan PBB Perkotaan	Berfungsi sebagai badan yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang mengajukan keberatan PBB Perkotaan	RAL 02.02 Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, DAD.10.001
DAL.10.07	Pelayanan Pembetulan SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan	Bertujuan untuk melayani proses Pembetulan SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan	Berfungsi sebagai badan yang mengelola pembetulan proses SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan	RAL 02.02 Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, DAD.10.001
DAL.10.08	Pelayanan Pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan	Bertujuan untuk melayani proses Pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan	Berfungsi sebagai badan yang mengelola pembatalan proses SPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan	RAL 02.02 Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, DAD.10.001

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.10.09	Pelayanan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan	Bertujuan untuk melayani proses Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan	Berfungsi sebagai badan yang mengelola proses Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan	RAL 02.02 Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, DAD.10.001
DAL.10.10	Pelayanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB Perkotaan	Bertujuan untuk melayani proses Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB Perkotaan	Berfungsi sebagai badan yang melayani proses pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perkotaan	RAL 02.02 Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, DAD.10.001
DAL.10.11	Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan NJOP	Bertujuan untuk melayani Penerbitan Surat Keterangan NJOP	Berfungsi sebagai badan yang melayani proses penerbitan Surat Keterangan NJOP	RAL 02.02 Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, DAD.10.001

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.10.12	Pelayanan Pengembalian SPOP PBB Perkotaan	Bertujuan untuk melayani proses Pengembalian SPOP PBB Perkotaan	Berfungsi sebagai badan yang mengelola proses pengembalian SPOP PBB Perkotaan	RAL 02.02 Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, DAD.10.001
DAL.10.13	Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerbitan NPWPD	Bertujuan untuk melayani proses Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerbitan NPWPD	Berfungsi sebagai badan yang mengelola Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerbitan NPWPD	RAL 02.02 Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, DAD.10.001
DAL.10.14	Pelayanan Penghapusan NPWPD atas Permohonan Wajib Pajak	Bertujuan untuk melayani proses Penghapusan NPWPD atas Permohonan Wajib Pajak	Berfungsi sebagai badan yang mengelola Penghapusan NPWPD atas Permohonan Wajib Pajak	RAL 02.02 Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, DAD.10.001

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.10.15	Pelayanan Pengajuan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan	Bertujuan untuk melayani proses Pengajuan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan	Berfungsi sebagai badan yang mengelola layanan Pengajuan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan	RAL 02.02 Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, DAD.10.001
DAL.10.16	Pelayanan Pengajuan Legalisasi/ Perforasi Bon Penjualan (Bill)	Bertujuan untuk melayani proses Pengajuan Legalisasi/ Perforasi Bon Penjualan (Bill)	Berfungsi sebagai badan yang mengelola layanan Pengajuan Legalisasi/ Perforasi Bon Penjualan (Bill)	RAL 02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, DAD.10.001
DAL.10.17	Pelayanan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bill	Bertujuan untuk melayani proses Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bill	Berfungsi sebagai badan yang mengelola layanan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bill	RAL 02.02 Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, DAD.10.001

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.10.18	Pelayanan Penyampaian SPTPD	Bertujuan untuk melayani proses Penyampaian SPTPD	Berfungsi sebagai badan yang mengelola penyampaian SPTPD yang merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.	RAL 02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.10.01, DAD.10.001
DAL.10.19	Layanan Pengawasan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi	Bertujuan untuk melakukan pengawasan dengan cara monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi	Berfungsi sebagai badan yang melakukan pengawasan terhadap capaian kinerja dari suatu program sebagai suatu cara untuk mencegah terjadinya korupsi	RAL 02.02 Keuangan						RAA.10.05, DAD.10.005

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.11.01	Layanan Informasi Kepegawaian	Memudahkan ASN dalam pengurusan administrasi kepegawaian	Berfungsi sebagai badan yang mengelola kepegawaian dengan cara memberikan informasi kepada ASN untuk memudahkan proses administrasi	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKN, Menpan, Mendagri	Pemerintahan Umum	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.04, DAD.11.006
DAL.11.02	Layanan Sasaran Kinerja Pegawai	Layanan Sasaran Kinerja Pegawai	Berfungsi sebagai badan pengelola sasaran dari kinerja pegawai. SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN.	RAL 02.07 Akuntabilitas Kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Kinerja Pegawai	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.02, DAD.11.001, DAD.33.001

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.11.03	Layanan Penanganan Pengaduan Kepegawaian	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Penanganan Pengaduan	Berfungsi sebagai badan yang melayani penanganan pengaduan dari PD	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.25.06, DAD.25.011
DAL.11.04	Layanan Legalisir	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Legalisir	Berfungsi sebagai badan yang melayani proses legalisir yang diperlukan oleh pegawai	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Non Elektronik	
DAL.11.05	Layanan Pemrosesan Cuti Pegawai	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Pemrosesan Cuti Pegawai	Berfungsi sebagai badan yang mengelola proses pengajuan cuti pegawai	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Non Elektronik	RAA.11.01, DAD.11.002

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.11.06	Layanan Penjatuhan Hukuman Disiplin	Memberikan pelayanan sesuai standar	<p>Berfungsi sebagai badan yang melakukan hukuman disiplin pegawai. Penjatuhan hukuman disiplin merupakan terkait kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.</p>	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.07, DAD.11.009

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.11.07	Layanan Pembuatan Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Istri (KARIS)	Memberikan pelayanan sesuai standar Pembuatan Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Istri (KARIS)	Berfungsi sebagai badan yang mengelola proses Pembuatan Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Istri (KARIS)	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.11, DAD.11.012
DAL.11.08	Layanan Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG)	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG)	Berfungsi sebagai badan yang melayani proses pembuatan kartu pegawai (KARPEG)	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.11, DAD.11.012
DAL.11.09	Layanan Permohonan Izin Perkawinan dan Pembinaan Pra Nikah/Pasca Nikah	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Permohonan Izin Perkawinan dan Pembinaan Pra Nikah/Pasca Nikah	Berfungsi sebagai badan yang mengelola permohonan dari pegawai terkait izin perkawinan dan pembinaan pra nikah/pasca nikah	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.11.10	Layanan Pelayanan Permohonan Izin Perceraian	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Pelayanan Permohonan Izin Perceraian	Berfungsi sebagai badan yang mengelola permohonan izin perceraian	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Non Elektronik	
DAL.11.11	Layanan Pengajuan Tunjangan Istri/Suami dan Anak	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Pengajuan Tunjangan Istri/Suami dan Anak	Berfungsi sebagai badan yang mengelola pengajuan terkait tunjangan istri/suami dan anak dari pegawai	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Non Elektronik	
DAL.11.12	Layanan Pelayanan Seleksi Penerimaan CPNS	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Pelayanan Seleksi Penerimaan CPNS	Berfungsi sebagai badan yang mengelola layanan seleksi penerimaan CPNS	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.12, DAD.11.004

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.11.13	Layanan Permintaan Data Pegawai	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Permintaan Data Pegawai	Berfungsi sebagai badan yang mengelola data pegawai sehingga dapat memberikan informasi terkait permintaan data pegawai	RAL 02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.01, DAD.11.002
DAL.11.14	Layanan Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. IV/IC keatas	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. IVIC keatas	Berfungsi sebagai badan yang mengelola proses Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. IVIC keatas pegawai	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.01, DAD.11.002
DAL.11.15	Layanan Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan IV/a IV/b	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan IV/a IV/b	Berfungsi sebagai badan yang mengelola proses Penetapan Golongan IV/a IV/b pegawai	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.01, DAD.11.002

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.11.16	Layanan Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan III/d kebawah	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan III/d kebawah	Berfungsi sebagai badan yang mengelola proses Kenaikan Pangkat Golongan III/d kebawah pegawai	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.01, DAD.11.002
DAL.11.17	Layanan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS	Berfungsi sebagai badan yang mengelola penetapan kenaikan gaji berkala PNS	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.11.18	Layanan Penetapan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Penetapan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional	Berfungsi sebagai badan yang mengelola Penetapan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.11.19	Layanan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS	Befungsi sebagai badan yang mengelola penetapan ijin bebas jabatan (MPP) PNS. Masa Persiapan Pensiun (MPP) PNS adalah rentang durasi yang diberikan pada tenaga kerja sipil maupun swasta supaya digunakan sebagai persiapan menyambut pensiun. Biasanya, durasi lazim MPP adalah 1 tahun sebelum umur pensiun	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.11.20	Layanan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS	Berfungsi sebagai badan yang mengelola layanan terkait Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS. PMK adalah proses penghitungan kembali masa kerja yang dimiliki oleh PNS sebelum diangkat menjadi CPNS sesuai dengan ketentuan	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Non Elektronik	
DAL.11.21	Layanan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/C ke Atas	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Penetapan Pensiun PNS Golongan IVIC ke Atas	Berfungsi sebagai badan yang memberikan pelayanan terkait Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/C ke Atas	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.01, RAA.11.04, DAD.11.002, DAD.11.006

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.11.22	Layanan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/B ke Bawah	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Penetapan Pensiun PNS Golongan IVIB ke Bawah	Berfungsi sebagai badan yang memberikan pelayanan terkait Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/B ke Bawah	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.01, RAA.11.04, DAD.11.002, DAD.11.006
DAL.11.23	Layanan Permohonan Pindah Antar Wilayah (PAW)	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Permohonan Pindah Antar Wilayah (PAW)	Berfungsi sebagai badan yang mengelola Permohonan Pindah Antar Wilayah (PAW) pegawai	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.09, DAD.11.010,
DAL.11.24	Layanan Permohonan Izin Belajar	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Permohonan Izin Belajar	Berfungsi sebagai badan yang mengelola proses perixinan dari belajar dari pegawai	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.28.05, DAD.28.003

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.11.25	Layanan Permohonan Tugas Belajar	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Permohonan Tugas Belajar	Berfungsi sebagai badan yang memberikan pelayanan kepada pegawai terkait permohonan untuk melakukan tugas belajar	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.28.05, DAD.28.003
DAL.11.26	Layanan Sewa Gedung Diklat	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Sewa Gedung Diklat	Berfungsi sebagai badan yang memberikan layanan terkait penyewaan gedung untuk diklat pegawai	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.05, DAD.11.007

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.11.27	Layanan Penghargaan Satya Lancana	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Penghargaan Satya Lancana	Befungsi sebagai badan yang mengeola pemberian penghargaan terkait Sty Lancana. Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada para Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus menerus	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.01, RAA.11.10, DAD.11.002, DAD.11.011

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.11.28	Layanan Permohonan Kartu Taspen	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Permohonan Kartu Taspen	Berfungsi sebagai badan yang mengelola permohonan terkait kartu TASPEN	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Non Elektronik	
DAL.11.29	Layanan Permohonan Ijin Keluar Negeri	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Permohonan Ijin Keluar Negeri	Berfungsi sebagai badan yang mengelola perizinan pegawai untuk keluar negeri	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.10, DAD.11.011
DAL.11.30	Layanan Permohonan Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional Keluar daerah	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Permohonan Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional Keluar daerah	Berfungsi sebagai badan yang mengelola permohonan pegawai untuk Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional Keluar daerah	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada	Tidak ada	Seluruh PD	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.11.31	Layanan Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Kontrak Kerja	Memberikan pelayanan sesuai standar Layanan Perpanjangan MasaKerja Tenaga Kontrak Kerja	Berfungsi sebagai badan yang memberikan pelayanan terkait perpanjangan masa kerja untuk pekerja tenaga kontrak (Non-ASN)	RAL 02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Tidak ada	Seluruh PD	Elektronik	RAA.11.01, DAD.11.002
DAL.11.32	Pelayanan Pemantauan dan Pengendalian Kinerja OPD	Bertujuan untuk mengukur akuntabilitas organisasi	Berfungsi sebagai badan yang melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja dari seluruh OPD	RAL 02.04 Aparatur Negara						RAA.11.03, DAD.11.005,

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.12.01	Pelayanan Pengajuan Penelitian	Memproses SK Rekomendasi Penelitian	Berfungsi sebagai badan yang mengelola proses perizinan untuk pengajuan penelitian dengan menghasilkan SK rekomendasi penelitian	RAL 01.33 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.12.01, DAD.12.001
DAL.12.02	Pendataan Keberadaan Ormas	Pendaftaran Ormas baru	Berfungsi sebagai badan yang bertugas untuk melakukan pendataan terkait keberadaan ormas baru	RAL 02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.12.03	Layanan akuntabilitas OPD	Bertujuan untuk mengukur akuntabilitas dari OPD	Berfungsi sebagai badan untuk mengukur akuntabilitas dari PD	RAL 02.04 Aparatur Negara						

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.13.01	Klinik konsultasi pengawasan interen	Bertujuan untuk melakukan konsultasi pengawasan interen by chat.	Berfungsi sebagai fasilitator untuk melakukan konsultasi pengawasan interen dengan metode chat	RAL 02.05 Kesekretariatan Negara	Inspektorat Daerah	Tidak ada	Pengawasan	Publik	Elektronik	RAA.13.01, DAD.13.002
DAL.14.01	Layanan e-AR (Layanan Aspirasi Masyarakat)	Untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi	Berfungsi sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat dalam memberikan kritik dan saran guna membangun Kota Madiun yang lebih baik	RAL 01.44 Komunikasi	Sekretariat DPRD	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.14.01, DAD.13.004

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.15.01	Layanan penerbitan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum	Untuk melayani proses pengurusan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola proses perizinan sertifikasi terkait Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	
DAL.15.02	Layanan Penerbitan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Jasaboga	Untuk melayani proses pengurusan sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Jasaboga	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola proses perizinan sertifikasi terkait Laik Higiene Sanitasi Jasaboga	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	
DAL.15.03	Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi rumah Makan/Restoran	Untuk melayani proses pengurusan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi rumah Makan/Restoran	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola proses perizinan sertifikasi terkait Laik Higiene Sanitasi Jasaboga	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.15.04	Pelayanan Penerbitan Sertifikasi laik Sehat Hotel	Untuk melayani proses pengurusan Surat Keterangan Laik Hotel	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola proses perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	
DAL.15.05	Layanan Penerbitan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Untuk melayani proses pengurusan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola perizinan untuk menerbitkan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.15.06	Layanan Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Ijin Usaha Apotek	Untuk melayani proses pengurusan rekomendasi pemenuhan komitmen ijin usaha apotek	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola perizinan untuk menerbitkan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Ijin Usaha Apotek	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.26.01, DAD.26.005
DAL.15.07	Layanan Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Ijin Usaha Klinik	Untuk melayani proses pengurusan rekomendasi pemenuhan komitmen ijin usaha klinik	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola perizinan untuk menerbitkan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Ijin Usaha Apotek	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.26.01, DAD.26.005

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.15.08	Layanan Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Ijin Usaha Laboratorium Klinik	untuk melayani proses pengurusan rekomendasi pemenuhan komitmen ijin usaha laboratorium klinik	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Ijin Usaha Laboratorium Klinik	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.26.01, DAD.26.005
DAL.15.09	Layanan Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Ijin Usaha Toko Obat	Untuk melayani proses pengurusan rekomendasi pemenuhan komitmen ijin usaha toko obat	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Ijin Usaha Toko Obat	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.26.01, DAD.26.005

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.15.10	Layanan Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Ijin Usaha Rumah Sakit	Untuk melayani proses penerbitan rekomendasi pemenuhan komitmen ijin usaha rumah sakit	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola perizinan untuk menerbitkan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Ijin Usaha Apotek	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.26.01, DAD.26.005
DAL.15.11	Layanan Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Ijin Usaha Optik	untuk melayani proses pegurusan rekomendasi pemenuhan komitmen ijin usaha optik	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola perizinan untuk menerbitkan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Ijin Usaha Optik	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.26.01, DAD.26.005

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.15.12	Layanan Penerbitan Rekomendasi Ijin Tenaga Kesehatan	untuk melayani proses penerbitan rekomendasi ijin tenaga kesehatan	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola perizinan untuk menerbitkan Rekomendasi Ijin Tenaga Kesehatan	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kemendes	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.26.01, DAD.26.005
DAL.15.13	Layanan Penerbitan rekomendasi Ijin Praktik Dokter/Dokter Gigi	untuk melayani proses penerbitan rekomendasi ijin praktik dokter/dokter gigi	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola perizinan untuk menerbitkan rekomendasi Ijin Praktik Dokter/Dokter Gigi	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kemendes	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	
DAL.15.14	Layanan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bea Iur Daerah (KIS PBID)	untuk melayani kartu indonesia sehat penerima bea iur daerah (KIS PBID)	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola Layanan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bea Iur Daerah (KIS PBID)	RAL 01.25 Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kemendes	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.15.10, DAD.15.009

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.15.15	ayanan Perencanaan Kebutuhan SDMK	Untuk melayani proses pengajuan cuti dari pegawai	Berfungsi sebagai penyedia layanan yang memproses pengajuan cuti dari pegawai	RAL 02.04 Aparatur Negara						RAA.15.06, RAA.15.07, DAD.15.039, DAD.15.040
DAL.16.01	Pelayanan Persetujuan Pembangunan Gedung	Bertujuan untuk mengkaji Persetujuan Bangunan Gedung	Berfungsi sebagai dinas yang memberikan persetujuan terkait pembangunan gedung	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KemePUPR	Perizinan	Publik	Elektronik	RAA.16.02, DAD.16.004
DAL.16.02	Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Bertujuan untuk mentertibkan pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola penataan ruang termasuk didalamnya persetujuan terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kementrian ATR	Perizinan	Publik	Elektronik	RAA.26.02, DAD.15.009, DAD.26.006

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.16.03	Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	Bertujuan untuk memberikan rekomendasi Ijin Usaha jasa Kontruksi (IUJK)	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola bidang bina marga yang termasuk didalamnya memberikan Rekomendasi terkait Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.16.04	Pelayanan Jasa Rekomendasi Penurunan Trotoar	Bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait peurunan trotoar	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola bidang bina marga yang termasuk didalamnya memberikan Rekomendasi terkait Penurunan Trotoar	RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.16.05	Pelayanan Rekomendasi Kelayakan Fungsi Bangunan	Bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait kelayakan fungsi bangunan	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola bidang cipta karya yang termasuk didalamnya memberikan Rekomendasi terkait Penurunan Trotoar	RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.16.06	Pelayanan Jasa Verifikasi dan Konsultasi Perencanaan Bangunan	Bertujuan untuk memberikan jasa verifikasi dan konsultasi perencanaan bangunan	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola bidang cipta karya yang termasuk didalamnya memberikan layanan Jasa Verifikasi dan Konsultasi Perencanaan Bangunan	RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.16.07	Pelayanan Reklame	Bertujuan untuk memberikan pelayanan terkait reklame	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola bidang tata kota yang termasuk didalamnya memberikan layanan terkait pemasangan reklame	RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.26.01, DAD.26.005
DAL.16.08	Layanan pelaporan jalan dan jembatan	Bertujuan untuk melayani proses pelaporan terkait kerusakan jalan dan jembatan	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola bidang bina marga yang termasuk didalamnya menerima pelaporan jalan dan jembatan dari masyarakat	RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.25.06. DAD.25.011

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.17.01	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Bertujuan untuk membantu proses pengaduan dari masyarakat	Befungsi sebagai fasilitator untuk wadah pengaduan masyarakat terkait permasalahan perumahan dan pemukiman	RAL 01.44 Komunikasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.17.01, DAD.17.002
DAL.17.02	Pelayanan Penebangan/ Pengeprasan Pohon dan atau Tanaman Tepi Jalan.	Bertujuan untuk melayani proses penebangan pohon yang mengganggu di pinggir jalan.	Berfungsi sebagai dinas yang menyediakan layanan berupa Penebangan/Pengeprasan Pohon dan atau Tanaman Tepi Jalan	RAL 01.29 Keamanan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	
DAL.17.03	Pelayanan Penerangan Jalan Umum.	Bertujuan untuk melayani penerangan di pinggir dalam kota madiun.	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola penerangan sipanjang jalan Kota Madiun	RAL 01.29 Keamanan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.17.04	Pelayanan Pendaftaran Permohonan Tanah Pemakaman (Penguburan Jenazah di Pace Keras).	Bertujuan untuk membantu proses pemakaman jenazah.	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola proses Permohonan Tanah Pemakaman	RAL 01.26 Sosial	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	
DAL.17.05	Pelayanan Pengangkutan dan Pemakaman Jenazah termasuk Jenazah Orang Terlantar.	Bertujuan untuk membantu proses pemakaman jenazah.	Berfungsi sebagai dinas yang melakukan pelayanan permintaan kepada masyarakat termasuk jenazah orang terlantar tentang pengangkutan dan pemakaman jenazah	RAL 01.26 Sosial	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.17.06	Pelayanan Rekomendasi Ijin Lokasi (Pembangunan dan Pengembangan Perumahan).	Bertujuan untuk memberikan rekomendasi proses pengembangan perumahan.	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola perisinan terkait lokasi pembangunan dan pengembangan perumahan	RAL 01.20 Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.17.07	Pelayanan Rekomendasi Izin Perubahan Penggunaan Tanah.	Bertujuan untuk memberikan izin perubahan penggunaan tanah.	Berfungsi sebagai dinas yang menglola izin terkait perubahan penggunaan tanah	RAL 01.22 Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.17.08	Pelayanan Calon Penghuni Rusunawa.	Bertujuan untuk membantu proses perpindahan penghuni rusunawa.	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola rusunawa termasuk didalamnya calon penghuni rusunawa tersebut	RAL 01.26 Sosial	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.17.09	Pelayanan Pemrosesan Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan.	Bertujuan untuk membantu proses penyerahan fasilitas baik umum maupun sosial.	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola proses Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan	RAL 01.20 Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.18.01	Layanan Penanganan Pengaduan Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Layanan ini bertujuan sebagai aplikasi Umum Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional digunakan untuk menerima dan menyelesaikan laporan	Berfungsi sebagai dinas yang menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	RAL 01.27 Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian perlindungan anak	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.18.01, DAD.18.004

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.18.02	Layanan Kesetaraan Gender	Sistem data gender ini merupakan sistem pengumpulan data sektoral ataupun non sektoral sebagai dasar analisa dan penyajian data terpilah yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Berfungsi sebagai dinas yang menyediakan sistem data gender baik data sektoral maupun non sektoral guna pembangunan program daerah	RAL 01.27 Pemberdayaan an Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementrian Sosial	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.18.02, DAD.18.002

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.18.03	Pelayanan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Penyelesaian laporan berupa menerima data pengaduan, masyarakat yg belum terakomdir bantuan-bantuan dari pemerintah, tentang permintaan informasi dll.	Befungsi sebagai dinas yang mewadahi data pengaduan masyarakat yang masih belum mendapatkan bantuan dari pemerintah	RAL 01.26 Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementrian Sosial	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.18.03, DAD.18.001

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.18.04	Pelayanan Program Keluarga Harapan	Tujuan SIKS-NG : Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai acuan semua pihak baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota,	Berfungsi sebagai dinas yang mempunyai program terkait keluarga harapan	RAL 01.27 Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Sosial	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.18.04, RAA.18.03
DAL.18.05	Pelayanan Pengusulan KIS PBIN	Bertujuan untuk melayani proses Pengusulan KIS PBIN	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola proses pengusulan KIS PBIN	RAL 01.25 Kesehatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Sosial	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.18.06	Pelayanan Penonaktifan KIS PBIN	Bertujuan untuk melayani proses Penonaktifan KIS PBIN	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola proses penonaktifan KIS PBIN	RAL 01.25 Kesehatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Sosial	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.18.07	Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar / Kartu Indonesia Pintar Kuliah	Bertujuan untuk melayani Proses Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar / Kartu Indonesia Pintar Kuliah	Berfungsi sebagai dinas yang melayani proses Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar / Kartu Indonesia Pintar Kuliah	RAL 01.31 Pendidikan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Sosial	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.18.08	Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Adopsi Anak dari Keluarga	Bertujuan untuk melayani Proses Penerbitan Surat Rekomendasi Adopsi Anak dari Keluarga	Berfungsi sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam menerbitkan Surat Rekomendasi Adopsi Anak dari Keluarga	RAL 01.27 Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Sosial	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.18.09	Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Adopsi Anak dari Panti Asuhan	Bertujuan untuk melayani Proses Penerbitan Surat Rekomendasi Adopsi Anak dari Panti Asuhan	Berfungsi sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam menerbitkan Surat Rekomendasi Adopsi Anak dari Panti Asuhan	RAL 01.27 Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Sosial	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.18.10	Pelayanan Pemberian Bantuan Pemakaman Bagi Gepeng (OT/T4)	Bertujuan untuk melayanai proses Pemberian Bantuan Pemakaman Bagi Gepeng (OT/T4)	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola Pemberian Bantuan Pemakaman Bagi Gepeng (OT/T4)	RAL 01.26 Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Sosial	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.18.11	Pelayanan Santunan Kematian	Bertujuan untuk melayani proses Pemberian Santunan Kematian	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola pemberian santunan kematian	RAL 01.26 Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Sosial	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.18.12	Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran ORSOS/Yayasan	Bertujuan untuk melayani proses Pengajuan Surat Tanda Pendaftaran ORSOS/Yayasan	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola pengajuan Surat Tanda Pendaftaran ORSOS/Yayasan	RAL 01.26 Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Sosial	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.18.13	Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Ulang ORSOS/Yayasan	Bertujuan untuk melayani proses Pengajuan Surat Tanda Pendaftaran Ulang ORSOS/Yayasan	Berfungsi sebagai dinas yang memberikan pelayanan terkait pengajuan Surat Tanda Pendaftaran Ulang ORSOS/Yayasan	RAL 01.26 Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Sosial	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.18.14	Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah	Bertujuan untuk melayani proses Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah	Berfungsi sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam memberikan izin Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Sosial	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.18.15	Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pengumpulan Sumbangan dipergunakan di dalam Wilayah Kota Madiun	Bertujuan untuk melayani proses Penerbitan Surat Rekomendasi Pengumpulan Sumbangan dipergunakan di dalam Wilayah Kota Madiun	Berfungsi sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam memberikan izin Penerbitan Surat Rekomendasi Pengumpulan Sumbangan dipergunakan di dalam Wilayah Kota Madiun	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Sosial	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.18.16	Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Usulan Gelar Perintis Kemerdekaan	Bertujuan untuk melayani proses Penerbitan Surat Rekomendasi Usulan Gelar Perintis Kemerdekaan	Berfungsi sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam memberikan izin Penerbitan Surat Rekomendasi Usulan Gelar Perintis Kemerdekaan	RAL 01.42 Kebudayaan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.18.17	Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Gelar Pahlawan	Bertujuan untuk melayani proses Penerbitan Surat Rekomendasi Gelar Pahlawan	Berfungsi sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam memberikan izin Penerbitan Surat Rekomendasi Gelar Pahlawan	RAL 01.42 Kebudayaan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.18.18	Pelayanan Penyediaan Alat Bantu	Bertujuan untuk melayani proses Bantuan Penyediaan Alat Bantu	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola proses penyaluran Bantuan Penyediaan Alat Bantu	RAL 01.26 Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Tidak ada	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.18.19	Pelayanan Penerbitan SPT Pendampingan Respon Kasus Anak	Bertujuan untuk melayani proses Penerbitan SPT Pendampingan Respon Kasus Anak	Berfungsi sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam memberikan izin Penerbitan SPT Pendampingan Respon Kasus Anak	RAL 01.27 Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Tidak Diketahui	
DAL.18.20	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Gelandangan Psikotik dan Tempat Tinggal Tidak Tetap	Bertujuan untuk melayani proses Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Gelandangan Psikotik dan Tempat Tinggal Tidak Tetap	Berfungsi sebagai dinas yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Gelandangan Psikotik dan Tempat Tinggal Tidak Tetap	RAL 01.26 Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kemensos	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.18.21	Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pelayanan Lansia Terlantar	Bertujuan untuk memberikan layanan pada Lansia Terlantar	Berfungsi sebagai penyedia layanan terhadap Lansia Terlantar dengan cara menerbitkan surat rekomendasi	RAL 01.26 Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kemensos	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.18.22	Pelayanan Penanganan Bencana Sosial	Bertujuan untuk memberikan layanan untuk Penanganan Bencana Sosial	Berfungsi sebagai dinas yang menangani Bencana Sosial	RAL 01.26 Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kemensos	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.18.23	Penanganan Bencana Alam	Penanganan Bencana Alam	Berfungsi sebagai dinas yang menangani Bencana Alam	RAL 01.26 Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kemensos	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.19.01	Layanan Kartu Tanda Pencari Kerja / Ak I Online	Pembuatan KARTU TANDA PENCARI KERJA / AK I Online	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola proses Pembuatan KARTU TANDA PENCARI KERJA / AK I Online	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Ketenagakerjaan	Publik	Elektronik	RAA.19.02, DAD.19.002

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.19.02	Rekomendasi Paspor (Cpmi)	PENERBITAN REKOMENDASI PASPOR	Berfungsi sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam memberikan izin PENERBITAN REKOMENDASI PASPOR	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Ketenagakerjaan	Publik	Elektronik	RAA.19.04, DAD.19.005
DAL.19.03	Pelayanan Pemberian Informasi Pasar Kerja Kepada Pencari Kerja Dan Pemberi Kerja	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK)	Berfungsi sebagai dinas yang memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK) kepada pencari dan pemberi kerja	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Ketenagakerjaan	Publik	Elektronik	RAA.19.02, DAD.19.002

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.19.04	Penerbitan Surat Ijin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan penerbitan surat ijin usaha	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola pemberian izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta antar kerja lokal	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Ketenagakerjaan	Publik	Non Elektronik	
DAL.19.05	Penerbitan Rekomendasi Ijin Tempat Penampungan	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan penerbitan Surat Izin Tempat Penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola penerbitan Surat Izin Tempat Penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Ketenagakerjaan	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.19.06	Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (Bkk)	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola penerbitan Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Ketenagakerjaan	Publik	Non Elektronik	
DAL.19.07	Rekomendasi Penyelenggara Pameran Bursa Kerja/Job Market Fair	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan rekomendasi penyelenggaraan pameran bursa kerja/job market fair.	Berfungsi sebagai Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan rekomendasi penyelenggaraan pameran bursa kerja/job market fair.	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Ketenagakerjaan	Publik	Non Elektronik	
DAL.19.08	Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan pengesahan peraturan perusahaan	Berfungsi pelayanan sesuai standar pelayanan pengesahan peraturan perusahaan	RAL 01.05 Industri	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Ketenagakerjaan	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.19.09	Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Ketenagakerjaan	Publik	Non Elektronik	
DAL.19.10	Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama	Memahami peraturan perundang-undangan tentang persyaratan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola peraturan perundang-undangan tentang persyaratan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Ketenagakerjaan	Publik	Non Elektronik	
DAL.19.11	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Berfungsi sebagai mediator untuk dapat menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Ketenagakerjaan	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.19.12	Pencatatan Serikat Pekerja	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan Pencatatan Serikat Pekerja	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola pelayanan Pencatatan Serikat Pekerja	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Ketenagakerjaan	Publik	Non Elektronik	
DAL.19.13	Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pinjaman Modal Usaha Bagi Ikm Melalui Bank	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan Penerbitan surat rekomendasi kredit bagi IKM	Berfungsi sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam Penerbitan surat rekomendasi kredit bagi IKM	RAL 01.12 Investasi	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Ketenagakerjaan	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.19.14	Pelayanan Pendaftaran Siaga Kita	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan Program SIAGA KITA	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola tenaga kerja yang sesuai dengan Program SIAGA KITA. Siaga Kita merupakan program unggulan Pemerintah Kota Madiun dalam upaya memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja khususnya pekerja mandiri atau Bukan Penerima Upah (BPU)	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Ketenagakerjaan	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.19.15	Pelayanan Pencatatan Jaminan Kematian	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan Program SIAGA KITA	Befungsi sebagai dinas yang mengelola tenaga kerja yang sesuai dengan Program SIAGA KITA dengan cara memberikan pelayanan terkait jaminan kematian.Siaga Kita merupakan program unggulan Pemerintah Kota Madiun dalam upaya memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja khususnya pekerja mandiri atau Bukan Penerima Upah (BPU)	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Ketenagakerjaan	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.19.16	Pelayanan Pencatatan Jaminan Kecelakaan Kerja	Memahami peraturan Perda dan Perwa tentang SIAGA KITA	Befungsi sebagai dinas yang mengelola tenaga kerja yang sesuai dengan Program SIAGA KITA dengan cara memberikan pelayanan terkait jaminan kecelakaan kerja.Siaga Kita merupakan program unggulan Pemerintah Kota Madiun dalam upaya memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja khususnya pekerja mandiri atau Bukan Penerima Upah (BPU)	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Ketenagakerjaan	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.19.17	Pelayanan Verifikasi Perizinan Berusaha Melalui Akun Tim Teknis	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan Penerbitan surat rekomendasi kredit bagi IKM	Berfungsi sebagai dinas yang memberikan perizinan terkait Penerbitan surat rekomendasi kredit bagi IKM	RAL 01.05 Industri	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Industri	Publik	Non Elektronik	
DAL.19.18	Penerbitan Surat Keterangan Rekomendasi Pengajuan Merk	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan Penerbitan surat rekomendasi kredit bagi IKM	Berfungsi sebagai dinas yang memberikan perizinan terkait Penerbitan surat rekomendasi pengajuan merk	RAL 01.05 Industri	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Industri	Publik	Non Elektronik	
DAL.19.19	Pelatihan Industri Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Perindustrian	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan Penerbitan surat rekomendasi kredit bagi IKM	Berfungsi sebagai dinas yang memberikan perizinan Penerbitan surat rekomendasi kredit bagi IKM	RAL 01.05 Industri	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Industri	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.19.20	Publikasi Produk Ikm Melalui Pameran	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan Penerbitan surat rekomendasi kredit bagi IKM	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola IKM termasuk didalamnya promosi produk IKM dengan cara membuat pameran produk IKM'	RAL 01.14 Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Koperasi	Publik	Elektronik	RAA.19.01, DAD.19.003,
DAL.19.21	Pelatihan Industri Seksi Perencanaan Dan Pembangunan Perindustrian	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan Penerbitan surat rekomendasi kredit bagi IKM	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola IKM dengan cara menyelenggarakan pelatihan	RAL 01.05 Industri	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Industri	Publik	Non Elektronik	
DAL.19.22	Ijin Usaha Simpan Pinjam (Iusp)	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola izin penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi	RAL 01.13 Koperasi	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Tidak ada	Koperasi	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.20.01	Layanan Be SMART Kota Madiun	Bertujuan untuk memberikan Informasi dan pendaftaran beasiswa BBM	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola Informasi dan pendaftaran beasiswa BBM	RAL 01.31 Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.20.01, DAD.20.007
DAL.20.02	Layanan LI (Laporan Individu Sekolah) profil	Bertujuan untuk pendataan profil pendidikan	Berfungsi sebagai dinas yang melakukan pendataan terhadap profil pendidikan	RAL 01.31 Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.20.02, DAD.20.008
DAL.20.03	Pelayanan pendaftaran peserta didik baru	Bertujuan untuk melayani proses pendaftaran peserta didik baru	Berfungsi sebagai dinas yang melayani pendaftaran peserta didik baru	RAL 01.31 Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.20.02, DAD.20.009
DAL.21.01	Pelayanan Permintaan Bantuan Pestisida Pertanian	Bertujuan untuk membantu permintaan bantuan pestisida pertanian	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola bantuan pestisida pertanian	RAL 01.07 Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.21.02	Pelayanan Surat Pengantar Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM PUAP) Ke Bank	Bertujuan untuk memberikan pelayanan terkait Surat Pengantar Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM PUAP) Ke Bank	Berfungsi sebagai dinas yang menerbitkan Surat Pengantar Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM PUAP) Ke Bank	RAL 01.07 Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.21.03	Pelayanan Rekomendasi Kredit Usaha Tani	Bertujuan untuk Memberikan rekomendasi kredit usaha tani	Berfungsi sebagai dinas yang memberikan rekomendasi kredit usaha tani	RAL 01.07 Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.21.04	Pelayanan Fasilitas Pengajuan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Bertujuan untuk memfasilitasi pengajuan klaim asuransi usaha tani padi (AUTP)	Berfungsi sebagai fasilitator pengajuan klaim asuransi usaha tani padi (AUTP)	RAL 01.07 Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.21.05	Pelayanan Verifikasi dan Validasi Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Distribusi Pupuk Bersubsidi	Bertujuan untuk melayani proses Verifikasi dan Validasi Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Distribusi Pupuk Bersubsidi	Berfungsi sebagai dinas yang melayani Verifikasi dan Validasi Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Distribusi Pupuk Bersubsidi	RAL 01.07 Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.21.06	Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Tani Ternak	Bertujuan untuk melayani pembuatan surat keterangan terdaftar kelompok tani ternak	Berfungsi sebagai dinas yang menerbitkan surat keterangan terdaftar kelompok tani ternak	RAL 01.09 Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.21.07	Pelayanan Kesehatan Hewan	Bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap kesehatan hewan	Berfungsi sebagai dinas yang memberikan pelayanan terhadap kesehatan hewan	RAL 01.09 Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.21.08	Pelayanan Rekomendasi Kredit Ternak	Bertujuan untuk memberikan layanan berupa rekomendasi terhadap kredit ternak	Berfungsi sebagai dinas yang menerbitkan rekomendasi terhadap kredit ternak	RAL 01.09 Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.21.09	Pelayanan Rekomendasi Surat Ijin Praktek Dokter Hewan	Bertujuan untuk memberikan layanan berupa rekomendasi surat ijin praktek dokter hewan	Berfungsi sebagai dinas yang menerbitkan rekomendasi surat ijin praktek dokter hewan	RAL 01.09 Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.21.10	Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan	Bertujuan untuk meberikan layanan terkait surat keterangan kesehatan hewan	Berfungsi sebagai dinas yang meberikan layanan terkait surat keterangan kesehatan hewan	RAL 01.09 Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.21.11	Pelayanan Fasilitas Rumah Potong Hewan	Bertujuan untuk memberikan layanan berupa fasilitas rumah potong hewan	Berfungsi sebagai dinas yang memberikan layanan berupa fasilitas rumah potong hewan	RAL 01.09 Pternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.21.12	Pelayanan Sewa Sarana Prasarana Pasar Ikan	Bertujuan untuk melayani proses sewa menyewa terkait sarana dan prasarana pasar ikan	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola proses pelayanan sewa menyewa sarana dan prasarana pasar ikan	RAL 01.10 Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.21.13	Pelayanan Rekomendasi Pelayanan Kredit Petani Ikan	Bertujuan untuk melayani proses rekomendasi kredit petani ikan	Berfungsi sebagai dinas yang menerbitkan rekomendasi kredit petani ikan	RAL 01.10 Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.21.14	Pelayanan Pembelian Benih Ikan	Bertujuan untuk melayani proses pembelian benih ikan	Berfungsi sebagai dinas yang melayani proses pembelian benih ikan	RAL 01.10 Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.21.15	Pelayanan Rekomendasi Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bertujuan untuk memberikan layanan berupa rekomendasi perizinan usaha terkait pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	c rekomendasi perizinan usaha terkait pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	RAL 01.10 Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.21.16	Pelayanan Bantuan Benih Ikan	Berujuan untuk memberikan layanan berupa bantuan terkait benih ikan	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola bantuan berupa benih ikan	RAL 01.10 Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.22.01	Layanan SILAPLING (Layanan Pelaporan lingkungan)	Untuk PERTEK dan SURAT LAYAK OPERASIONAL AIR LIMBAH KE AIR PERMUKAAN	Berfungsi sebagai dinas yang melayani PERTEK dan SURAT LAYAK OPERASIONAL AIR LIMBAH KE AIR PERMUKAAN	RAL 01.40 Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak ada	KOMINFO	Publik	Elektronik	RAA.22.01, DAD.22.013
DAL.23.01	Pelayanan Inovasi Taksiah	untuk percepatan penerbitan akta kematian	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola penerbitan akta kematian	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak ada	Administrasi dan Pencatatan Sipil	Publik	Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.23.02	Pelayanan Inovasi Gadjah Mada (Petugas Adminduk Berkunjung ke Rumah, Masyarakat Kota Madiun Bahagia)	peayanan jemput bola untuk masyarakat disabilitas, keterbatasan fisik untuk perekaman KTP elektronik	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola pelayanan terkait kependudukan dan pencatatan sipil dengan cara melakukan jemput bola untuk masyarakat disabilitas, keterbatasan fisik untuk perekaman KTP elektronik	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak ada	Administrasi Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.01, DAD.23.008
DAL.23.03	Layanan SILANDEP	untuk proses <i>update</i> KK dan KTP dari Penggugat Cerai	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola <i>update</i> KK dan KTP dari Penggugat Cerai	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak ada	Administrasi Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.03, DAD.23.010

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.23.04	Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	Berfungsi sebagai dinas yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.01, RAA.23.09, DAD.23.004, DAD.23.008
DAL.23.05	Pelayanan Penerbitan KK	Penerbitan KK	Berfungsi sebagai dinas yang menerbitkan KK	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.09, DAD.23.004
DAL.23.06	Pelayanan Kartu Identitas Anak (Kia)	Penerbitan KIA	Berfungsi sebagai dinas yang menerbitkan KIA	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.01, RAA.23.02, RAA.23.09, DAD.23.004, DAD.23.008

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.23.07	Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan	Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan	Berfungsi sebagai dinas yang menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.01, RAA.23.02, RAA.23.09, DAD.23.004, DAD.23.008
DAL.23.08	Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Pencatatan kelahiran	Berfungsi sebagai dinas yang melakukan pencatatan kelahiran	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.01, RAA.23.02, RAA.23.09, DAD.23.004, DAD.23.008
DAL.23.09	Layanan Pencatatan Kematian	Pencatatan Kematian	Berfungsi sebagai dinas yang melakukan Pencatatan Kematian	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.01, RAA.23.02, RAA.23.09, DAD.23.004, DAD.23.008

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.23.10	Pelayanan Pencatatan Perkawinan (Bagi Warga Non Muslim)	Pencatatan Perkawinan bagi Warga Non Muslim	Berfungsi sebagai dinas yang melakukan Pencatatan Perkawinan bagi Warga Non Muslim	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.01, RAA.23.02, RAA.23.09, DAD.23.004, DAD.23.008
DAL.23.11	Pelayanan Penerbitan Akte Perceraian (Bagi Warga Non Muslim)	Penerbitan akte perceraian bagi warga non muslim	Berfungsi sebagai dinas yang menerbitkan akte perceraian bagi warga non muslim	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.03, RAA.23.09, DAD.23.004, DAD.23.010
DAL.23.12	Pelayanan Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan Dan Pengesahan Anak	Pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak	Berfungsi sebagai dinas yang melakukan Pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.01, RAA.23.02, RAA.23.09, DAD.23.004, DAD.23.008

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.23.13	Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama	Pencatatan perubahan nama	Berfungsi sebagai dinas yang melakukan Pencatatan perubahan nama	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.01, RAA.23.02, RAA.23.09, DAD.23.004, DAD.23.008
DAL.23.14	Pelayanan Pencatatan Pembetulan Dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	Pencatatan pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil	Berfungsi sebagai dinas yang melakukan Pencatatan pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.01, RAA.23.02, RAA.23.09, DAD.23.004, DAD.23.008
DAL.23.15	Pelayanan Pembatalan Dokumen Administrasi Kependudukan Melalui Asas Contrarius Actus	PEMBATALAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI ASAS CONTRARIUS ACTUS	Berfungsi sebagai dinas yang dapat melakukan Pembatalan Dokumen Administrasi Kependudukan Melalui Asas Contrarius Actus	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.01, RAA.23.02, RAA.23.09, DAD.23.004, DAD.23.008

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.23.16	Pelayanan Penerbitan Kembali Register Dan Akta Pencatatan Sipil	PENERBITAN KEMBALI REGISTER DAN AKTA PENCATATAN SIPIL	Berfungsi sebagai dinas yang dapat menerbitkan Kembali Register Dan Akta Pencatatan Sipil	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.01, RAA.23.02, RAA.23.09, DAD.23.004, DAD.23.008
DAL.23.17	Pelayanan Permintaan Data Jumlah Penduduk	PERMINTAAN DATA JUMLAH PENDUDUK	Berfungsi sebagai dinas yang melayani Permintaan Data Jumlah Penduduk	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.01, RAA.23.02, RAA.23.09, DAD.23.004, DAD.23.008
DAL.23.18	Pelayanan Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Data Adminitrasi Kependudukan	Memfasilitasi proses permohonan kerjasama pemanfaatan data administrasi kependudukan	Berfungsi sebagai dfasilitator proses permohonan kerjasama pemanfaatan data administrasi kependudukan	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.08, DAD.23.009

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.23.19	PELAYANAN INOVASI BAKTIKU EYANGKU (Bawakan AKTe kelahIran untuKmU EYANGKU	Mendatangi langsung dalam pertemuan kelompok untuk pengurusan akte kelahiran	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola pengurusan akte kelahiran dengan cara datang langsung pada kelompok pertemuan	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Publik	Elektronik	
DAL.23.20	Layanan Pendaftaran Penduduk (SIAK)	Bertujuan untuk melayani cetak KTP	Berfungsi sebagai dinas yang melayani cetak KTP	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Internal PD	Elektronik	RAA.23.05, DAD.23.012
DAL.23.21	Layanan Pendaftaran Penduduk (SIAK)	Bertujuan untuk melayani rekam KTP	Berfungsi sebagai dinas yang melayani rekam KTP	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemendagri	Kependudukan	Internal PD	Elektronik	RAA.23.05, DAD.23.013
DAL.23.22	Layanan Digi Form	sebagai arsip digital, mempermudah verifikasi dokumen permohonan, kontrol proses pengajuan	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola arsip digital kependudukan	RAL 01.23 Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	tidak ada	Administrasi Kependudukan	Publik	Elektronik	RAA.23.02, DAD.23.004

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.24.01	Layanan KIR AE	Bertujuan untuk Pendaftaran <i>Online</i> dan Pembayaran Non Tunai Pengujian Kendaraan Bermotor	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola Pendaftaran <i>Online</i> dan Pembayaran Non Tunai Pengujian Kendaraan Bermotor	RAL 01.19 Transportasi	Dinas Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.24.01, DAD.24.001
DAL.24.02	Pelayanan E-TLE	Bertujuan untuk melakukan tilang secara elektronik	Berfungsi sebagai dinas yang melakukan tilang secara elektronik	RAL 01.19 Transportasi	Dinas Perhubungan	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.24.04, DAD.24.003
DAL.24.03	Layanan pendaftaran <i>Online</i> Pengujian Kendaraan Bermotor dan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor	Bertujuan untuk melakukan pembayaran secara non tunai	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola pembayaran secara non tunai terkait pengujian kendaraan bermotor dan SIM	RAL 01.19 Transportasi	Dinas Perhubungan	Tidak ada	Tidak ada	Internal PD	Elektronik	RAA.24.03, RAA.24.01, DAD.24.001, DAD.24.004

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.25.01	Layanan Aspirasi dan Solusi di LPPL Radio Suara Madiun	tujuan aspirasi dan solusi, memberikan ruang bagi OPD/Pemerrintah dalam memberikan informasi dan sosialisasi program pemerintah, serta menjadi medida timbal balik masyarakat untuk memberikan saran, masukan, pengaduan serta meningkatkan pengetahuan literasi informasi	Berfungsi sebagai dinas yang melakukan sosilasi program pemerintah serta menerima aspirasi dari masyarakat melalui LPPL Radio Suara Madiun	RAL 01.43 Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kemenkominf o	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Publik	Elektronik	
DAL.25.02	Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Madiun	melakukan dokumentasi berupa berita, foto, rekaman dan video	Berfungsi melakukan dokumentasi berupa berita, foto, rekaman dan video	RAL 01.43 Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kemenkominf o	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Publik	Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.25.03	Pemberian Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	memberikan informasi publik Pemerintah Kota Madiun	Berfungsi sebagai dinas yang memberikan informasi publik Pemerintah Kota Madiun	RAL 01.43 Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kementerian PAN RB, Kemenkominfo	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Publik	Elektronik	RAA.25.09, DAD.25.014
DAL.25.04	Pelayanan insiden TI	memberikan pelayanan permasalahan terkait wifi gratis di masyarakat	Berfungsi sebagai dinas memberikan pelayanan permasalahan terkait wifi gratis di masyarakat	RAL 01.43 Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	PT. Telkom	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Publik	Elektronik	RAA.25.03, DAD.25.008
DAL.25.05	Layanan Call Center 112	Memberikan layanan panggilan darurat	Berfungsi menerima layanan panggilan darurat	RAL 01.44 Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak ada	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.25.06	Government Chief Information Officer (GCIO)	Memberikan layanan jasa informasi pelatihan di GCIO, pelatihan, dan Icoworking space	Berfungsi sebagai dinas yang Memberikan layanan jasa informasi pelatihan di GCIO, pelatihan, dan Icoworking space	RAL 01.43 Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak ada	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Publik	Non Elektronik	
DAL.25.07	Layanan Aduan Pelayanan Publik		Berfungsi menerima aduan dari masyarakat	RAL 01.44 Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak ada	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Publik		RAA.25.06, DAD.25.011
DAL.25.08	Layanan Satu Data Kota Madiun		Berfungsi mengelola satu data Kota Madiun	RAL 01.43 Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak ada	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Publik	Elektronik	RAA.25.07, DAD.25.012

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.25.09	Pelayanan Data Statistik Sektoral	Memberikan layanan permintaan data sektoral	Berfungsi sebagai dinas yang melayani permintaan data sektoral	RAL 01.43 Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak ada	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Publik	Non Elektronik	
DAL.26.01	Pelayanan Perizinan	Kemudahan perizinan berusaha dan non berusaha	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola perizinan berusaha dan non berusaha	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kementerian Investasi/BKPM	Penanaman Modal	Publik	Elektronik	RAA.26.01, RAA.26.02, DA D.15.009, DAD.26.005,
DAL.26.02	Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Madiun	memberikan kemudahan informasi calon investor dan investor	Berfungsi sebagai dinas yang memberikan informasi terkait calon investor dan investor	RAL 01.43 Informasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kementerian Investasi/BKPM	Penanaman Modal	Publik	Elektronik	RAA.26.04, DAD.26.004

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.26.03	Peta Digital Perizinan	Mengetahui jumlah dan jenis perizinan di wilayah Kota Madiun	Berfungsi sebagai dinas yang menyebarkan informasi terkait jumlah dan jenis perizinan yang ada di Kota Madiundi wilayah Kota Madiun	RAL 01.43 Informasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kementerian Investasi/ BKPM	Penanaman Modal	Publik	Elektronik	RAA.26.04, DAD.26.004
DAL.27.01	Pelayanan Legalisir sertifikat dan piagam penghargaan	Memfasilitasi Legalisir sertifikat dan piagam penghargaan	Berfungsi sebagai dinas yang mengeluarkan Legalisir sertifikat dan piagam penghargaan	RAL 01.42 Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Tidak ada	Kepemudaan dan Olahraga	Publik	Non Elektronik	
DAL.27.02	Pelayanan Sewa Tempat Rekreasi dan Olahraga	Memfasilitasi Sewa Tempat Rekreasi dan Olahraga	Berfungsi sebagai dinas yang Memfasilitasi Sewa Tempat Rekreasi dan Olahraga	RAL 01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Tidak ada	Kepemudaan dan Olahraga	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.27.03	Pelayanan Registrasi Nomor Induk Kesenian	Memfasilitasi Registrasi Nomor Induk Kesenian	Berfungsi sebagai dinas yang melayani Registrasi Nomor Induk Kesenian	RAL 01.42 Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Tidak ada	Kebudayaan	Publik	Non Elektronik	
DAL.27.04	Pelayanan Perpanjangan Nomor Induk Kesenian	Memfasilitasi Perpanjangan Nomor Induk Kesenian	Berfungsi sebagai dinas yang melayani Perpanjangan Nomor Induk Kesenian	RAL 01.42 Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Tidak ada	Kebudayaan	Publik	Non Elektronik	
DAL.27.05	Pelayanan Perizinan Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian	Memfasilitasi Perizinan Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian	Berfungsi sebagai dinas yang memberikan Perizinan Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian	RAL 01.42 Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Tidak ada	Kebudayaan	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.27.06	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri	Memfasilitasi Penerbitan Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri	Berfungsi sebagai dinas yang memberikan izin terkait Penerbitan Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri	RAL 01.42 Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Tidak ada	Kebudayaan	Publik	Non Elektronik	
DAL.27.07	Pelayanan Permintaan Informasi Mengenai Kesenian Ataupun Sejarah	Memfasilitasi Permintaan Informasi Mengenai Kesenian Ataupun Sejarah	Berfungsi sebagai dinas yang melayani Permintaan Informasi Mengenai Kesenian Ataupun Sejarah	RAL 01.42 Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Tidak ada	Kebudayaan	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.27.08	Pelayanan Penerbitan Nomor Registrasi Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat	Memfasilitasi Pelayanan Penerbitan Nomor Registrasi Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat	Berfungsi sebagai dinas yang melayani Penerbitan Nomor Registrasi Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat	RAL 01.41 Agama	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Tidak ada	Kebudayaan	Publik	Non Elektronik	
DAL.27.09	Pelayanan Membawa Cagar Budaya Keluar Kota Dalam Satu Provinsi	Memfasilitasi Pelayanan Membawa Cagar Budaya Keluar Kota Dalam Satu Provinsi	berfungsi sebagai dinas yang Membawa Cagar Budaya Keluar Kota Dalam Satu Provinsi	RAL 01.42 Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Tidak ada	Kebudayaan	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.27.10	Pelayanan Pemberian Perizinan Usaha Perfilman Di Bidang Pembuatan Film, Pengedaran Film, Penjualan Film, Penyewaan Film (VCD,DVD), Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film Melalui Media Elektronik dan Tempat Hiburan	Memfasilitasi Pelayanan Pemberian Perizinan Usaha Perfilman Di Bidang Pembuatan Film, Pengedaran Film, Penjualan Film, Penyewaan Film (VCD,DVD), Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film Melalui Media Elektronik dan Tempat Hiburan	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola Perizinan Usaha Perfilman Di Bidang Pembuatan Film, Pengedaran Film, Penjualan Film, Penyewaan Film (VCD,DVD), Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film Melalui Media Elektronik dan Tempat Hiburan	RAL 01.42 Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Tidak ada	Kebudayaan	Publik	Non Elektronik	
DAL.27.11	Pelayanan Perizinan usaha Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing	Memfasilitasi Pelayanan Perizinan usaha Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing	Berfungsi sebagai dinas yang mengelola Perizinan usaha Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Tidak ada	Kebudayaan	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.28.01	LAYANAN JARIMU	Memfasilitasi masyarakat pinjam buku melalui akun medsos resmi Perpustakaan Madiun , dengan akses aplikasi INLIS.LITE	Berfungsi sebagai dinas yang melayani masyarakat untuk pinjam buku melalui akun medsos resmi Perpustakaan Madiun , dengan akses aplikasi INLIS.LITE	RAL 01.33 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PERPUSNAS	Perpustakaan	Publik	Elektronik	RAA.28.03, DAD.28.005
DAL.28.02	Layanan perpustakaan dan pelestarian naskah kuno	akses perpustakaan digital mobile; bisa baca buku lewat mobile (semacam watsapp)	Berfungsi sebagai perpustakaan digital berbasis mobile app	RAL 01.33 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak ada	Perpustakaan	Publik	Elektronik	RAA.28.01, DAL.28.02
DAL.28.03	Layanan Kearsipan Dinamis	Bertujuan sebagai layanan yang melakukan kearsipan secara dinamis	Berfungsi sebagai layanan kearsipan dinamis	RAL 01.31 Pendidikan						RAA.28.02, RAA.28.05, DAD.28.002, DAD.28.003

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.29.01	Layanan Retribusi Pasar	Aplikasi E-Retribusi ini dibuat untuk mendata pedagang, dan mengganti proses pelayanan pembayaran yang sebelumnya pembayaran Manual menjadi cashless	Berfungsi sebagai aplikasi yang dapat menggantikan metode pembayaran sebelumnya manual (cash) menjadi cashless	RAL 01.06 Perdagangan	Dinas Perdagangan	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.29.01, DAD.29.006
DAL.30.01	Layanan Pengaduan / Keluhan Masyarakat	Memberikan rasa aman, nyaman dan kondusif di wilayah Kota Madiun	Berfungsi menerima aduan dari masyarakat	RAL 01.44 Komunikasi	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi	Tidak ada	Publik	Elektronik	
DAL.30.02	Layanan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Memberikan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Berfungsi Memberikan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	RAL 02.05 Kesekretariatan Negara	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Tidak ada	Internal OPD	Elektronik	RAA.30.01, DAD.30.008

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.30.03	Layanan Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Berfungsi dalam Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Berfungsi dalam Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	RAL 01.29 Keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.30.03, DAD.30.003
DAL.30.04	Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Berfungsi dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Berfungsi dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	RAL 01.29 Keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.30.05, DAD.30.010,
DAL.31.01	antrian <i>Online</i>	memudahkan pasien mendaftar	Berfungsi untuk memudahkan pendaftaran pasien	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	
DAL.31.02	Pelayanan Loker Pendaftaran	Bertujuan untuk melakukan pendaftar	Berfungsi untuk pendaftaran	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.31.07, DAD.31.007

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.31.03	Pelayanan Instalasi Gawat Darurat	Bertujuan untuk melayani pasien IGD	Berfungsi untuk pelayanani pasien IGD	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002
DAL.31.04	Pelayanan Instalasi Rawat Jalan	Bertujuan untuk melayani pasien IRJ	Berfungsi untuk pelayanani pasien IRJ	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002
DAL.31.05	Pelayanan Instalasi Rawat Inap	Bertujuan untuk melayani pasien Rawat Inap	Berfungsi untuk pelayanan pasien Rawat Inap	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.31.06	Pelayanan Instalasi Rawat Intensif	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi untuk pelayanan pasien rawat Intensif	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002
DAL.31.07	Pelayanan Instalasi PONEK Kamar Bersalin	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi untuk pelayanan pasien rawat Intensif	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002
DAL.31.08	Pelayanan Instalasi PONEK Perinatologi	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi untuk pelayanan pasien rawat Intensif	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.31.09	Pelayanan Nifas	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi untuk pelayanan pasien rawat Intensif	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002
DAL.31.10	Pelayanan Instalasi Kamar operasi	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi untuk pelayanan pasien rawat Intensif	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002
DAL.31.11	Pelayanan Instalasi Hemodialisis	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi untuk pelayanan pasien rawat Intensif	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.31.12	Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi untuk pelayanan pasien rawat Intensif	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002
DAL.31.13	Pelayanan Visum et Repertum	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi untuk pelayanan pasien rawat Intensif	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002
DAL.31.14	Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi untuk pelayanan pasien rawat Intensif	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.31.15	Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi untuk pelayanan pasien rawat Intensif	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002
DAL.31.16	Pelayanan Instalasi Radiologi	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi untuk pelayanan pasien rawat Intensif	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002
DAL.31.17	Pelayanan Instalasi Farmasi	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi untuk pelayanan pasien rawat Intensif	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.31.18	Pelayanan Humas/Pengaduan	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi untuk pelayanan pasien rawat Intensif	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002
DAL.31.19	Pelayanan Kamar Jenazah	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi untuk pelayanan pasien rawat Intensif	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002
DAL.31.20	Pelayanan Ambulan	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi untuk pelayanan pasien rawat Intensif	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.31.21	Pelayanan Mobil Jenazah	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi untuk pelayanan penggunaan mobil jenazah	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002
DAL.31.22	Pelayanan Kasir	Bertujuan untuk melayani pasien rawat Intensif	Berfungsi melayani embayaran pasien	RAL 01.25 Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.31.02, DAD.31.002
DAL.31.23	Layanan Pengajuan Cuti Pegawai	Bertujuan untuk melayani pengajuan cuti pegawai	Berfungsi mengelola proses pengajuan cuti pegawai	RAL 02.04 Aparatur Negara						RAA.31.02, DAD.31.002

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.32.01	Layanan pelaporan realisasi kegiatan kelurahan	Untuk memonitoring laporan realisasi kegiatan kelurahan guna merealisasikan kegiatan yang efektif dan efisien sesuai target.	Berfungsi sebagai monitoring kegiatan kelurahan guna mengetahui apakah program tersebut berjalan sesuai target atau tidak.	RAL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Kecamatan Manguharjo	Kelurahan	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.31.01, DAD.31.001
DAL.32.02	Layanan Legalisasi surat Keterangan Kematian (Terkait yang tidak memiliki dokumen kependudukan terakhir)	Bertujuan untuk memfasilitasi proses legalisasi surat keterangan kematian	Berfungsi sebagai fasilitator yang mengeluarkan legalisir surat keterangan kematian	RAL 01.23 Kependudukan	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	RAA.32.01, DAD.32.002
DAL.32.03	Layanan Legalisasi Surat Keterangan Ijin Bepergian	Bertujuan untuk memfasilitasi proses legalisasi surat ijin bepergian	Berfungsi sebagai fasilitator yang mengeluarkan legalisir surat ijin bepergian	RAL 01.18 Transmigrasi	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.32.04	Layanan Permintaan Data Terkait Pemerintahan Kecamatan	Bertujuan untuk melayani permintaan data	Berfungsi untuk melayani permintaan data	RAL 02.09 Data dan Pemerintahan	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.32.05	Layanan Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris Warga Negara Indonesia Pribumi Asli	Bertujuan untuk memfasilitasi legalisasi surat pernyataan ahli waris	Berfungsi sebagai fasilitator legalisasi surat pernyataan ahli waris	RAL 02.09 Data dan Pemerintahan	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.32.06	Layanan Legalisasi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah	Bertujuan untuk memfasilitasi legalisasi surat keterangan belum menikah	Berfungsi sebagai fasilitator legalisasi surat keterangan belum menikah	RAL 01.23 Kependudukan	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.32.07	Layanan Legalisasi Surat Permohonan Nikah	Bertujuan untuk memfasilitasi legalisasi surat permohonan nikah	Berfungsi sebagai fasilitator legalisasi surat permohonan nikah	RAL 01.23 Kependudukan	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.32.08	Layanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM	Bertujuan untuk membantu proses legalisasi surat keterangan	Berfungsi sebagai fasilitator legalisasir surat keterangan	RAL 01.26 Sosial	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.32.09	Layanan Legalisasi Proposal Bantuan Hibah	Bertujuan untuk membantu proses legalisasi surat ijin	Berfungsi sebagai fasilitator legalisasir surat ijin	RAL 01.26 Sosial	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	NON Elektronik	
DAL.32.10	Layanan Legalisasi Surat Keterangan (Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan/IMB)	Bertujuan untuk membantu proses legalisasi surat keterangan	Berfungsi sebagai fasilitator legalisasir surat keterangan	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.32.11	Layanan Legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan)	Bertujuan untuk membantu proses legalisasi surat keterangan	Berfungsi sebagai fasilitator legalisasir surat keterangan	RAL 01.43 Informasi	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.32.12	Layanan Legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu)	Bertujuan untuk membantu proses legalisasi surat keterangan	Berfungsi sebagai fasilitator legalisasir surat keterangan	RAL 01.43 Informasi	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.32.13	Layanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha)	Bertujuan untuk membantu proses legalisasi surat keterangan	Berfungsi sebagai fasilitator legalisasir surat keterangan	RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.32.14	Layanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Keramaian)	Bertujuan untuk membantu proses legalisasi surat keterangan	Berfungsi sebagai fasilitator legalisasir surat keterangan	RAL 01.29 Keamanan	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.32.15	Layanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Menutup Jalan)	Bertujuan untuk membantu proses legalisasi surat keterangan	Berfungsi sebagai fasilitator legalisasir surat keterangan	RAL 01.29 Keamanan	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.32.16	Layanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian)	Bertujuan untuk membantu proses legalisasi surat keterangan	Berfungsi sebagai fasilitator legalisasir surat keterangan	RAL 01.29 Keamanan	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.32.17	Layanan pengaduan Masyarakat	Bertujuan sebagai wadah tempat pengaduan masyarakat	Berfungsi sebagai wadah tempat pengaduan masyarakat	RAL 01.44 Komunikasi	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.32.18	Layanan Pemantauan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat)	Bertujuan sebagai monitoring kegiatan bansos	Berfungsi untuk memonitoring kegiatan bansos	RAL 01.43 Informasi	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	
DAL.32.19	Layanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI)	Bertujuan untuk membantu proses legalisasi surat keterangan	Berfungsi sebagai fasilitator legalisir surat keterangan	RAL 02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Kecamatan Manguharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Non Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.33.01	Pelayanan Pernyataan Ahli Waris	Untuk mempermudah dalam koreksi surat pernyataan ahli waris	Berfungsi untuk mempermudah dalam koreksi surat pernyataan ahli waris	RAL 01.43 Informasi	Kecamatan Kartoharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	
DAL.33.02	Layanan Survei Kepuasan Masyarakat	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terkait pelayanan di Kecamatan Kartoharjo	Berfungsi untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terkait pelayanan di Kecamatan Kartoharjo	RAL 01.43 Informasi	Kecamatan Kartoharjo	Tidak ada	Tidak ada	Publik	Elektronik	RAA.33.01, DAD.33.002
DAL.34.01	Pelayanan Pendaftaran	Untuk memasukkan data pasien yang mau berobat	Berfungsi untuk memasukkan data pasien yang mau berobat	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Manguharjo	Kominfo	Kominfo	Publik	Elektronik	RAA.33.03, DAD.33.004
DAL.34.02	Pelayanan Pendaftaran dan Administrasi	Membantu Pendaftaran dan Administrasi	Berfungsi untuk Membantu Pendaftaran dan Administrasi	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Manguharjo	Dinas Kesehatan	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.15.02, DAD.15.002

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.34.03	Pelayanan Pemeriksaan Umum	Bertujuan untuk memberikan pelayanan terkait Pemeriksaan Umum	Berfungsi untuk memberikan pelayanan terkait Pemeriksaan Umum	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Manguharjo	Dinas Kesehatan	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.15.02, DAD.15.002
DAL.34.04	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Bertujuan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Terkait Gigi dan Mulut	Berfungsi untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Terkait Gigi dan Mulut	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Manguharjo	Dinkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.15.02, DAD.15.002
DAL.34.05	Pelayanan KIA-KB-Imunisasi	Bertujuan untuk memberikan Pelayanan KIA-KB-Imunisasi	Berfungsi untuk memberikan Pelayanan KIA-KB-Imunisasi	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Manguharjo	Dinkes, Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.15.02, DAD.15.002
DAL.34.06	Pelayanan Gawat Darurat (Kasus Gawat Darurat, Pasien Batuk Pilek/Suhu > 37,5°C)	Bertujuan untuk memberikan Pelayanan kegawatdaruratan	Berfungsi untuk memberikan Pelayanan kegawatdaruratan	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Manguharjo	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	RAA.15.02, RAA.15.21, DAD.15.002, DAD.15.054

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.34.07	Pelayanan Konsultasi (Gizi, Sanitasi, UBM (Upaya Berhenti Merokok dan Pengaduan))	Bertujuan untuk memberikan Pelayanan Konsultasi	Berfungsi untuk memberikan Pelayanan Konsultasi	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Manguharjo	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	
DAL.34.08	Pelayanan Santun Lansia	Bertujuan untuk memberikan Pelayanan Santun Lansia	Berfungsi untuk memberikan Pelayanan Santun Lansia	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Manguharjo	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	RAA.15.33, DAD.15.029
DAL.34.09	Pelayanan Pemeriksaan Khusus (Tb, HIV, dan Bapil)	Bertujuan untuk memberikan Pelayanan Pemeriksaan Khusus (Tb, HIV, dan Bapil)	Berfungsi untuk memberikan Pelayanan Pemeriksaan Khusus (Tb, HIV, dan Bapil)	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Manguharjo	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	
DAL.34.10	Pelayanan Kefarmasian	Bertujuan untuk memberikan Pelayanan Kefarmasian	Berfungsi untuk memberikan Pelayanan Kefarmasian	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Manguharjo	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.15.04, RAA.15.05, DAD.15.036, DAD.15.037

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.34.11	Pelayanan Laboratorium	Bertujuan untuk memberikan Pelayanan yang berhubungan dengan Laboratorium	Berfungsi untuk memberikan Pelayanan yang berhubungan dengan Laboratorium	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Manguharjo	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	RAA.15.65, DAD.15.005
DAL.34.12	Pelayanan Ambulans	Bertujuan untuk memberikan Pelayanan yang membutuhkan Ambulans	Berfungsi untuk memberikan Pelayanan yang membutuhkan Ambulans	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Manguharjo	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	
DAL.35.01	Layanan Pendaftaran dan Rekam Medik	Bertujuan untuk memberikan pelayanan terkait pendaftaran dan rekam medik	Berfungsi untuk memberikan pelayanan terkait pendaftaran dan rekam medik	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Sukosari	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	
DAL.35.02	Layanan Pemeriksaan Umum	Bertujuan untuk memberikan pelayanan terkait pemeriksaan umum	Berfungsi untuk memberikan pelayanan terkait pemeriksaan umum	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Sukosari	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.35.03	Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Bertujuan untuk memberikan pelayanan terkait kesehatan gigi dan mulut	Berfungsi untuk memberikan pelayanan terkait kesehatan gigi dan mulut	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Sukosari	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.15.02, DAD.15.002
DAL.35.04	Layanan PryKB	Bertujuan untuk memberikan pelayanan terkait pryKB	Berfungsi untuk memberikan pelayanan terkait pryKB	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Sukosari	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Tidak Diketahui	RAA.15.02, DAD.15.002
DAL.35.05	Layanan Gawat Darurat	Bertujuan untuk memberikan pelayanan gawat darurat	Berfungsi untuk memberikan pelayanan gawat darurat	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Sukosari	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Tidak Diketahui	
DAL.35.06	Layanan Gizi	Bertujuan untuk memberikan pelayanan gizi	Berfungsi untuk memberikan pelayanan gizi	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Sukosari	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	
DAL.35.07	Layanan Kefarmasian	Bertujuan untuk memberikan pelayanan terkait kefarmasian	Berfungsi untuk memberikan pelayanan terkait kefarmasian	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Sukosari	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.15.33, DAD.15.029

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
DAL.35.09	Layanan laboratorium	Bertujuan untuk memberikan pelayanan terkait laboratorium	Berfungsi untuk memberikan pelayanan terkait laboratorium	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Sukosari	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Ituak Diketahui	RAA.15.65, DAD.15.005
DAL.35.10	Layanan Konsultasi Sanitasi, Berhenti Merokok (UBM) dan VCT	Bertujuan untuk memberikan pelayanan konsultasi	Berfungsi untuk memberikan pelayanan konsultasi	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Sukosari	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Tidak Diketahui	
DAL.35.11	Layanan TB	Bertujuan untuk memberikan pelayanan terkait TB	Berfungsi untuk memberikan pelayanan terkait TB	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Sukosari	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	
DAL.35.12	Layanan Khusus	Bertujuan untuk memberikan pelayanan khusus	Berfungsi untuk memberikan pelayanan khusus	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Sukosari	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Diketahui	RAA.15.05, DAD.15.037
DAL.35.13	Layanan Vaksinasi	Bertujuan untuk memberikan pelayanan vaksin	Berfungsi untuk memberikan pelayanan vaksin	RAL 01.25 Kesehatan	Puskesmas Sukosari	Dinkes dan Kemenkes	Kesehatan	Publik	Elektronik	RAA.15.02, DAD.15.002

Lampiran 6.1 Daftar Aplikasi SPBE

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
1	Bagian Organisasi	A.E.01.01	E-SAKIP (https://esakip.madiunkota.go.id/)	Sedang dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Subkoordinator Pengembangan Kinerja
1	Bagian Organisasi	A.E.01.02	PMPRB (https://pmprb.menpan.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Bagian Organisasi dan Inspektorat	Subkoordinator Pengembangan Kinerja
1	Bagian Organisasi	A.E.01.03	Website Bagian Organisasi (https://organisasi.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Subkoordinator Ketatalaksanaan
1	Bagian Organisasi	A.E.01.04	Aplikasi Anjab ABK/SINJAB (sinjabmadiunkota.go.id)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisa Jabatan
1	Bagian Organisasi	A.E.01.05	E-SAKIP reuiu (https://esr.menpan.go.id/)	Sedang dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Subkoordinator Pengembangan Kinerja

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
2	Bagian Hukum	A.E.02.01	JDIH (https://jdih.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Subkoor Dokumentasi dan Publikasi
2	Bagian Hukum	A.E.02.02	Website Bagian Hukum (https://hukum.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Subkoordinator Dokumentasi dan Publikasi
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	A.E.03.01	LPSE (https://lpse.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Publik	Subkoordinator Layanan Publik Secara Elektronik
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	A.E.03.02	SIRUP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Subkoordinator Layanan Publik Secara Elektronik

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	A.E.03.03	INAPROC (https://inaproc.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Subkoordinator Layanan Publik Secara Elektronik
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	A.E.03.04	e-purchasing	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Subkoordinator Layanan Publik Secara Elektronik
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	A.E.03.05	e-Katalog (https://e-katalog.lkpp.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Subkoordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	A.E.03.06	SIKAP (https://sikap.lkpp.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Subkoordinator Layanan Publik Secara Elektronik

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	A.E.03.07	Website Bagian Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan (https://adbang.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Subkoordinator Penyusunan dan Pengendalian Program
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	A.E.04.01	Website Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (https://ekokesra.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Subkoordinator Perekonomian
5	Bagian Umum	A.E.05.01	Si Cakep	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Subkoordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
5	Bagian Umum	A.E.05.02	E-Ruang	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Subkoordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
6	Bagian Pemerintahan	A.E.06.01	Website Bagian Pemerintah (https://pemerintahan.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Subkoordinator Pengembangan Otonomi Daerah
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A.E.07.01	Website BPBD (http://bpbd.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	A.E.08.01	E-KAK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	A.E.08.02	Simonev (https://simonev.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	A.E.08.03	Website BAPEDALITBANGDA (https://bapelitbangda.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.01	ASB (Analisis Standar Biaya) (https://sipkd.madiunkota.go.id/asb2023)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Anggaran
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.02	SIPD (https://madiun.sipd.kemendagri.go.id/daerah)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Akuntansi dan Aset
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.03	SIPKD (http://sipkd.madiunkota.go.id/sipkd2022)	Sedang dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Akuntansi dan Aset

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.04	SIM GAJI	Sedang dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Perbendaharaan
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.05	OMSPAN (https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD	Bidang Anggaran
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.06	UPDATE AGENDA KEGIATAN PIMPINAN (https://sipkd.madiunkota.go.id/agenda_kegiatan_pimpinan/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal PD dan Publik	Sekretariat
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.07	DID (http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/lapordjpk/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD	Bidang Akuntansi dan Aset

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.08	SIMPONI (https://www.simponi.kemenkeu.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD	Bidang Anggaran
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.09	SIMTRADA (Sistem Informasi Transfer ke Daerah Dan Dana Desa)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD	Bidang Anggaran
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.10	SIGMA (https://sigma.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal PD dan Publik	Bidang Akuntansi dan Aset
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.11	SIMDA BMD	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Akuntansi dan Aset
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.12	Website BKAD (https://bkad.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.13	ALADIN	Sedang dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	BKAD Kota Madiun dan Instansi yang mengelola Keuangan DAK Non Fisik di Daerah	Bidang Perbendaharaan
10	Badan Pendapatan Daerah	A.E.10.01	SIMPADAMA (https://simpadama.madiunkota.go.id/)	Sedang dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal PD DAN PUBLIK	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
10	Badan Pendapatan Daerah	A.E.10.02	SISMIOP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal PD	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
10	Badan Pendapatan Daerah	A.E.10.03	Website BAPENDA (https://bapenda.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
10	Badan Pendapatan Daerah	A.E.10.04	TAPINGBOX	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal PD	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
10	Badan Pendapatan Daerah	A.E.10.05	Aplikasi MCP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Seluruh OPD	Sekretariat
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.01	SIK (https://sik.madiunkota.go.id/simpeg/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.02	M-SKP (https://skp.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.03	E-Kinerja (https://ekinerja.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi - Sub Bidang Informasi
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.04	My SAPK (SAPK)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	BKN, BKN KANREG dan seluruh Badan Kepegawaian Daerah se-Indonesia	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.05	Website BKPSDM (https://bkpsdm.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.06	SI HARKA (https://siharka.menpan.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.07	IDIS BKN (https://idis.bkn.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.08	SIASN (https://siasn.bkn.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Mutasi

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.09	e-Mutasi (https://emutasiotda.kemendagri.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Mutasi
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.10	SIOLA (https://ula.kemendagri.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Mutasi
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.11	AREK Online (http://www.arekkanreg2bkn.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Mutasi

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.12	SSCASN (https://sscasn.bkn.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal PD, Publik	Badan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A.E.12.01	Si-Permata (https://bakesbangpol.madiunkota.go.id/sipermata/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang Ideologi
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A.E.12.02	Website BAKESBANGPOL (https://bakesbangpol.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
13	Inspektorat Daerah	A.E.13.01	SPIP (Sistem Informasi Pengendalian Intern)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Inspektorat Pembantu

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
13	Inspektorat Daerah	A.E.13.02	Website Inspektorat (https://inspektorat.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
14	Sekretariat DPRD	A.E.14.01	e-AR (http://dprd.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
14	Sekretariat DPRD	A.E.14.02	e-Inisiatif (http://dprd.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
14	Sekretariat DPRD	A.E.14.03	Website Sekretariat DPRD (https://setdprd.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bagian Umum dan Keuangan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.01	Website Dinkes, PP dan KB (http://dinkes.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.02	SIST-BRO (http://sikda.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Publik	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.03	KUE DAKON (kuedakon.my.id)	Sedang dikembangkan	Belum digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD	Sekretariat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.04	SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.05	SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.06	REN BUT https://renbut.kemkes.go.id/	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.07	SI-SDMK (https://sisdmk.kemkes.go.id/login)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.08	Aplikasi Keluarga Sehat 2.0 (PIS-PK)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.09	ASPAK (http://aspak.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.10	Pcare BPJS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.11	E-Filca	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.12	Elsimil	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal PD	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.13	E-Monev HSP (Higien dan Sanitasi Pangan)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.14	E-Monev Kualitas Kesling (TTU, TFU, PKAM, STBM, PLM, KKS)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.15	E-Puskesmas (https://epuskesmas.id /)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Puskesmas	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.16	e-Renggar (https://e-renggar.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas	Sekretariat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.17	HFIS (https://hfis.bpjs-kesehatan.go.id/hfis/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.18	IKP (https://mutufasyankes.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.19	JKN Mobile	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.20	Kampung KB	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal PD dan Admin Kecamatan	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.21	KLIK KB (https://klikkb.com/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Bidan, Publik	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.22	APLIKASI KOMUNIKASI DATA / KOMDAT (https://komdat.kemkes.go.id/l)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	PD (Dinkes)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.23	KPCPEN VAKSINASI	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Publik	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.24	KRISNA	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD dan Dinas yang mendapatkan DAK	Sekretariat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.25	Lupis (https://lupis.bpjs-kesehatan.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, rumah Sakit dan Klinik)	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.26	Monitoring PPKM	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Publik	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.27	Morena	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD	Sekretariat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.28	New All Record Antigen/PCR COVID-19 (https://allrecord-antigen.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, rumah Sakit dan Klinik)	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.29	New Siga (https://newsiga.bkkbn.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Petugas KB	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.30	E-Logistik	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.31	SIERA (https://siera.bpkp.go.id/p3dn)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD	Sekretariat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.32	PWS Imunisasi (IDL, Campak Rubela)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.33	Si Gizi Terpadu - ePPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.34	Sikelim (Sistem Informasi Kelola Limbah Medis)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.35	SIPTM	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.36	SISMAL (Sistem Informasi Malaria)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.37	SISRUTE (Sistem Rujukan Terpadu)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.38	SITKO	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.39	SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.40	SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.41	Pemantaua Wilayah Setempat (PWS) Campak	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinkes, Fasyankes	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.42	Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) ISPA / ILI	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinkes, Fasyankes	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.43	PK 21	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinkes, Fasyankes	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.44	Sehat Jiwa (Aplikasi Konsultasi Kesehatan Jiwa)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.45	SI RAJA LIMBAH	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, rumah Sakit dan Klinik, dsb)	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.46	SIHEPI (http://sihepi.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, rumah Sakit dan Klinik, dsb)	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.47	SIKDA Generik	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, rumah Sakit dan Klinik, dsb)	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.48	SILACAK (Sistem Informasi Tracing COVID-19)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Publik	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.49	SILANTOR (https://silantor.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.50	Silili KEREN	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Penyuluh KB dan Kader Insitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.51	Simkeswa (http://siskewa.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Puskesmas	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.52	Siperindu (https://siperindu.online/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik, Internal PD	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.53	SIPGAR (https://sipgar.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.54	SIPNAP (https://sipnap.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Seluruh Fasilitas Kesehatan (Dinas Kesehatan, Puskesmas, apotek dan Klinik)	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.55	SIPP BPJS (https://sipp.bpjs-kesehatan.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.56	SISCOBIKES (http://siscobikes.ppjk.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.57	Siskohatkes (https://siskohatkes.ke.mkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik (Jamaah Haji)	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.58	Sistem Informasi Promkes (https://promkes.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.59	SITRUST HIV	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinkes, Puskesmas, Rumah Sakit	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.60	Statistik Rutin (http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal PD	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.61	Surveilans PD3I (http://pd3i.org/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	petugas surveilans di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten, petugas laboratorium Nasional, Publik	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.62	Sistem Pelaporan INM Puskesmas	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	puskesmas	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.63	SITRUS TB	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinkes, fasyankes, Provider (PT. Pos)	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.64	SITASIA (Sistem Informasi Porgram Kusta dan Frambusia)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinkes, Fasyankes	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.65	SIMONA (https://simona.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.66	E-KOHORT (https://ekohort.kemkes.go.id/)	Selesai Dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Dinkes, Puskesmas	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.67	ASIK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Seluruh Tenaga Kesehatan	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.68	SIRIKA (http://sirika.bkkbn.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal PD	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.69	Rumah Dataku	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal PD	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A.E.16.01	SILAT (www.silat.madiunkota.go.id)	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan (sudah beralih ke aplikasi Laport milik pusat)	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang Bina Marga
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A.E.16.02	SIMBG	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang Cipta Karya
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A.E.16.03	Website DPUPR (https://dpupr.madiunkab.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	A.E.17.01	Sisan Baline	Sedang dikembangkan menjadi Aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	A.E.17.02	Website Disperkim (https://disperkim.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A.E.18.01	SIMFONI PPA (https://kekerasan.kemennppa.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal PD	Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A.E.18.02	SIDEGAN (https://www.sites.google.com/view/sidegan-kotamadiun)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Seluruh PD	Bidang Pemberdayaan Perempuan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A.E.18.03	PUSKESOS (https://puskesos.madiunkota.go.id./)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal PD dan Publik	Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A.E.18.04	SIKS-NG (https://siks.kemensos.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal PD	Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A.E.18.05	MADIUN MONITORING (dinsosapp.madiunkota.go.id)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal PD	Bidang Rehabilitasi Sosial

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A.E.18.06	Websiite Dinas Sosial P3A (dinsos.madiunkota.go.id)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Publik	Sekretariat
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	A.E.19.01	E-KAMI	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Publik	Bidang Perindustrian, Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	A.E.19.02	SiCAKER (sicaker.madiunkota.go.id)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Publik	Bidang Tenaga Kerja
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	A.E.19.03	Website DISNAKER (https://disnaker.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	A.E.19.04	SISKOTKLN (http://siskotkln.bnpp2tki.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Publik	Bidang Tenaga Kerja
20	Dinas Pendidikan	A.E.20.01	Be SMART Kota Madiun (https://beasiswa.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Publik	Sekretariat
20	Dinas Pendidikan	A.E.20.02	Aplikasi LI (https://lidisdik.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal	Sekretariat
20	Dinas Pendidikan	A.E.20.03	PPDB (https://ppdb.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal	Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
20	Dinas Pendidikan	A.E.20.04	Website Dinas Pendidikan (https://disdik.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
20	Dinas Pendidikan	A.E.20.05	DAPODIK (https://dapo.kemdikbud.go.id/)	Selesai Dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra
20	Dinas Pendidikan	A.E.20.06	AKM Kelas (https://pusmendik.kemdikbud.go.id/akmkelas/)	Selesai Dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	A.E.21.01	Website Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (https://disperta.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
22	Dinas Lingkungan Hidup	A.E.22.01	SILAPLING (silapling.madiunkota.go.id)	Sedang dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	A.E.22.02	Website Dinas Lingkungan Hidup (https://dlh.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
22	Dinas Lingkungan Hidup	A.E.22.03	SITEBAS (Sistem Informasi Terpadu Bank Sampah)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal PD	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.01	SIAK TERPUSAT	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal PD	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.02	Aplikasi Digiform	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal PD	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.03	SILANDEP (SISTEM INFORMASI LAYANAN DUKCAPIL DAN PA)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal PD	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.04	Web Intranet Disdukcapil (capil.madiunkota.net)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Seluruh PD	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.05	BCARD	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal PD	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.06	BENROLLER	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal PD	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.07	Website Dispendukcapil (https://capil.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.08	Web Service Pemanfaatan Data DWH Terpusat	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Seluruh PD (PD yang telah bekerjasama)	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.09	Klik WA	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
24	Dinas Perhubungan	A.E.24.01	E-Kir (http://ujikir.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	BIDANG ANGKUTAN DARAT
24	Dinas Perhubungan	A.E.24.02	Website Dinas Perhubungan (https://dishub.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
24	Dinas Perhubungan	A.E.24.03	CSS Bank Jatim	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal PD	Sekretariat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
24	Dinas Perhubungan	A.E.24.04	e-TLE (https://etle.jatim.polri.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Publik	Bidang Lalu Lintas
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.01	Aplikasi Edu (edu.madiunkota.go.id)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.02	agenda.madiunkota.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Publik	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.03	servicedesk (servicedesk dan klik wa.net)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	seluruh PD, publik	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.04	e-surat	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	seuluh PD	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.05	Syslog	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal PD	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.06	LAPOR SP4N (https://kotamadiun.lapor.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Seluruh PD, Publik	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.07	Madiun Dashboard (https://dashboard.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Seluruh PD, Publik	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.08	Website Dinas Komunikasi dan Informatika (https://Dinas Komunikasi dan Informatika.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.09	PPID (https://ppid.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.10	Penyimpanan Arsip Bersama	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.11	TTE (Tanda Tangan Elektronik)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Seluruh PD	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A.E.26.01	MASS Madiun (https://perizinan.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A.E.26.02	OSS (https://oss.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A.E.26.03	WEBGIS DPMPTSP (https://perizinan.madunkota.go.id/webgis/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A.E.26.04	PETA SEBARAN INVESTASI (https://investasi.madunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Koordinator Penanaman Modal
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A.E.26.05	Website DPMPTSP (https://perizinan.madunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	A.E.27.01	Website Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (https://disbudparpora.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A.E.28.01	iMadiun	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Publik	Bidang perpustakaan
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A.E.28.02	SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Kearsipan
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A.E.28.03	INLIS.LITE (Inlislite.madiunkota.go.id)	sedang dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Publik	Bidang Perpustakaan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A.E.28.04	Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (https://perpustakaan.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A.E.28.05	SIKD (https://sikd.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh PD	Bidang Kearsipan
29	Dinas Perdagangan	A.E.29.01	E-Retribusi	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat
29	Dinas Perdagangan	A.E.29.02	Bumu	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal	Sekretariat
29	Dinas Perdagangan	A.E.29.03	Website Dinas Perdagangan (https://perdagangan.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A.E.30.0 1	Website Satpol PP dan Damkar (https://satpol.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sekretariat
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A.E.30.0 2	BBM Satpol PP	Sedang dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal PD	Sekretariat
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A.E.30.0 3	aplikasi Gakda	Sedang dikembangkan	masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal PD	bidang penegakkan peraturan perundang - undangan
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A.E.30.0 4	SIM Satpol PP Kota Madiun (sim.polppmadiunkota.id)	Sedang dikembangkan	masih	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal PD	bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A.E.30.05	Lek Pakar	Sedang dikembangkan	belum digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	A.E.31.01	E-SITI	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Pegawai RSUD Kota Madiun	Sekretariat
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	A.E.31.02	SIM-RS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal PD	Sekretariat
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	A.E.31.03	SISMADAK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD	Bidang Pelayanan
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	A.E.31.04	Pendekar Hati	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal PD dan Publik	Bidang Pelayanan
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	A.E.31.05	INACBGS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Seluruh PD	Bidang Keuangan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	A.E.31.06	SI-JASPEL	Sedang dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD	Bidang Keuangan
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	A.E.31.07	Website RSUD Kota Madiun (http://rsud.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
32	Kecamatan Manguharjo	A.E.32.01	SICAKRA	Sedang dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal PD dan Kelurahan	Sekretariat, Subbagian Umum dan Keuangan
32	Kecamatan Manguharjo	A.E.32.02	Website Kecamatan Manguharjo (https://kecamatan-manguharjo.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
33	Kecamatan Kartoharjo	A.E.33.01	E-Surprais (e-surprais.epizy)	Sedang dikembangkan	Masih digunakan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal PD	Bidang Pelayanan Publik - Seksi Pemerintahan

Kode PD	Nama PD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan (Sedang / Selesai dikembangkan)	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)	Area Aplikasi	Model Referensi Aplikasi SPBE	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
33	Kecamatan Kartoharjo	A.E.33.02	Website Kecamatan Kartoharjo (https://kecamatan-kartoharjo.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
33	Kecamatan Kartoharjo	A.E.33.03	SKM-Karto	Sedang dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Bidang Layanan Publik - Seksi Pemerintahan
34	Puskesmas Manguharjo	A.E.34.01	Website Puskesmas Manguharjo (https://puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat
35	Puskesmas Sukosari	A.E.35.01	Website Puskesmas Sukosari (https://puskesmassukosari.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik	Sekretariat

Lampiran 6.2 Metadata Aplikasi SPBE

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.01.01	1	E-SAKIP (https://esakip.madiunkota.go.id/)	Aplikasi yang digunakan sebagai pengumpulan Data Dukung penilaian Indeks SAKIP per OPD dan Indeks SAKIP Tingkat Kota.	Berfungsi untuk mengumpulkan data dukung penilaian Indeks SAKIP per OPD dan Indeks SAKIP Tingkat Kota	Data SAKIP (IKU,IKI, Renja, Renstra, LKj, RPJMD)	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Bagian Organisasi	Informasi seputar SAKIP	Bagian Organisasi	Website	Google Drive	Proprietary	PHP	Laravel	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ms.Excel	Subkoordinator Pengembangan Kinerja	RAA.01.02	Development	DAD.01.001, DAL.01.01, DAL.06.02
DAA.01.02	1	PMPRB (https://pmprb.menpan.go.id/)	Website yang digunakan untuk penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh instansi pemerintahan yang bertanggungjawab	Berfungsi untuk penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Data Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Lembar Kerja Evaluasi (LKE)	Bagian Organisasi	Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Subkoordinator Pengembangan Kinerja	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.01.002

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait	
DAA.01.03	1	Website Bagian Organisasi (https://organisasi.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Sekertariat Daerah Bagian Organisasi, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Bagian Organisasi	Data informasi publik Bagian Organisasi (profil, berita, kegiatan, dsb)	Informasi Publik	Bagian Organisasi	Informasi seputar Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	Website	Server Kominfo	Open Source	Wordpress	MySQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL		Subkoordinator Ketatalaksanaan	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.01.003
DAA.01.04	1	Aplikasi Anjab&ABK /SINJAB (sinjabmadiunkota.go.id)	Aplikasi yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen analisis jabatan (Anjab), analisis beban kerja (ABK) dan KJ Pemerintah Kota Madiun	Berfungsi untuk menyusun dokumen analisis jabatan (Anjab), analisis beban kerja (ABK) dan KJ Pemerintah Kota Madiun	Data anjab dan ABK	Dokumen Anjab & ABK	Bagian Organisasi	Informasi laporan data Anjab dan ABK	Bagian Organisasi	Website	Server Kominfo	Proprietary	PHP	Laravel	Dinas Komunikasi dan Informatika	Postgre		Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisa Jabatan	RAA.01.02	Development	DAD.01.004, DAL.01.03

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.01.05	1	E-SAKIP reviu (https://esr.menpan.go.id/)	sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara <i>online</i> .	Berfungsi sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara <i>online</i> .	Data SAKIP (IKU,IKI,Renja,Renstra, LKj, RPJMD)	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Bagian Organisasi	Informasi seputar SAKIP	Bagian Organisasi	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Subkoordinator Pengembangan Kinerja	RAA.01.02	Development	DAD.01.001, DAL.01.01, DAL.06.02

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pengembangan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.02.01	2	JDIH (https://jdih.madiunkota.go.id/)	JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat.	Digunakan untuk publikasi produk hukum	Data Produk Hukum (salinan produk hukum dalam bentuk file .pdf)	Informasi Produk Hukum Kota Madiun	Bagian Hukum	Laporan Produk Hukum	Bagian Hukum	Website	Server internal OPD	Proprietary	Dinas Komunikasi dan Informatika	Postgre	Dinas Komunikasi dan Informatika	PostgreSQL	Subkoor Dokumentasi dan Publikasi	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.02.001, DAL.02.05
DAA.02.02	2	Website Bagian Hukum (https://hukum.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Sekertariat Daerah Bagian Hukum, yaitu berupa profil, laporan, berita, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Bagian Hukum	Data informasi publik Bagian Hukum (profil, berita, kegiatan, dsb)	Informasi Publik	Bagian Hukum	Informasi seputar bagian hukum	Bagian Hukum	Website	Server Kominfo	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Subkoordinator Dokumentasi dan Publikasi	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.02.002

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.03.01	3	LPSE (https://lpse.madiunkota.go.id/)	Aplikasi Layanan Pengadaan secara elektronik	Berfungsi sebagai aplikasi yang memberikan informasi Pengadaan secara elektronik	Data LPSE (KTP dan NPWP)	Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Barang / Jasa dan Administrasi	Laporan Data LPSE	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Website	Server Kominfo	Proprietary	PHP	Pusat	Pusat	MySQL	Subkoordinator Layanan Publik Secara Elektronik	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.03.001, DAL.03.05
DAA.03.02	3	SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.	SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.	Data LPSE	Laporan RUP (Rencana Umum Pengadaan)	Barang / Jasa dan Administrasi	Laporan Data LPSE	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Website server pusat	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Postgre	Subkoordinator Layanan Publik Secara Elektronik	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.03.002, DAL.03.05

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.03.03	3	INAPROC (https://inaproc.id/)	Pintu gerbang sistem informasi elektronik, memuat informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).	Berfungsi untuk memberikan informasi terkait pengadaan barang/jasa secara nasional	Data tender, data produk pengadaan barang dan jasa	Laporan Tender	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Laporan Tender	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Subkoordinator Layanan Publik Secara Elektronik	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.03.005, DAL.03.05
DAA.03.04	3	e-purchasing	Aplikasi untuk pemrosesan dan pencatatan pengadaan barang jasa dengan metode epurchasing	Berfungsi melakukan pemrosesan dan pencatatan pengadaan barang jasa dengan metode epurchasing	data penyedia, non-penyedia	pencatatan pengadaan barang /jasa melalui epurchasing	Barang / Jasa dan Administrasi	Laporan data penyedia, non-penyedia	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Website	Server Kominfo	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Subkoordinator Layanan Publik Secara Elektronik	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.03.006, DAL.03.05

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.03.05	3	e-Katalog (https://e-katalog.lkpp.go.id/)	Aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.	Berfungsi sebagai tempat penyimpanan elektronik informasi mengenai barang, produk, ataupun jasa. E-katalog memiliki peranan yang penting karena berisikan daftar item, spesifikasi dan harga yang menjadi rujukan dalam perbandingan berbagai produk sejenis	Data produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah	Laporan RUP (Rencana Umum Pengadaan)	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Laporan Data Produk	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Subkoordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.03.003,DAL.03.05

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.03.06	3	SIKAP (https://sikap.lkpp.go.id/)	Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau Vendor Management System adalah aplikasi yang memuat data atau informasi kinerja penyedia barang/jasa. Informasi kinerja penyedia barang/jasa meliputi data atau informasi mengenai identitas, kualifikasi, serta riwayat kinerja penyedia.	Berfungsi untuk memberikan informasi kinerja penyedia barang/jasa meliputi data atau informasi mengenai identitas, kualifikasi, serta riwayat kinerja penyedia.	data atau informasi kinerja penyedia barang/jasa (identitas, kualifikasi, serta riwayat kinerja penyedia.)	memuat data atau informasi kinerja penyedia barang/jasa.	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Informasi seputar kinerja penyedia barang/jasa	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Subkoordinator Layanan Publik Secara Elektronik	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.03.007, DAL.03.05

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.03.07	3	Website Bagian Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan (https://adb.ang.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Sekertariat Daerah Bagian Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Data informasi publik Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan (profil, berita, kegiatan, dsb)	Informasi Publik	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Informasi seputar badan pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Website	server pusat	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Subkoordinator Penyusunan dan Pengendalian Program	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.03.004

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.04.01	4	Website Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (https://ekokesra.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi dan kegiatan Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Data Pelayanan, IKM, data kegiatan, Produk Hukum dan data Kegiatan	Informasi Publik	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan Data Pelayanan	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Website	Komputer Internal PD	Proprietary	Wordpress	MySQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Subkoordinator Perekonomian	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.04.004
DAA.05.01	5	Si Cakep	APLIKASI AGENDA KEGIATAN KEPALA DAERAH (WALIKOTA)	Menampilkan Rincian Acara Kegiatan Walikota Per Hari Dengan Detail Acara Hingga Orang Yang Terlibat Didalam	Data agenda atau kegiatan Walikota	Informasi tentang agenda atau kegiatan Walikota	Bagian Umum	Laporan Data Agenda dan Data Kegiatan Walikota	Bagian Umum	Website	Komputer Internal PD	Open Source	PHP	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Subkoordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.05.001, DAI.05.02

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.05.02	5	E-Ruang	APLIKASI PEMINJAMAN RUANGAN BALAIKOTA	Aplikasi Peminjaman Ruangan Balaikota	Data ketersediaan ruangan dan data peminjam ruangan	Informasi ketersediaan ruangan	Bagian Umum	Laporan Data Ketersediaan Ruangan dan Data Peminjaman Ruangan	Bagian Umum	Website	Komputer Internal PD	Open Source	PHP	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Subkoordinator Rumah Tangga dan Peringkapan	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.05.002, DAL.05.01	
DAA.06.01	6	Website Bagian Pemerintah (https://pemerintahan.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Sekertariat Daerah , yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Bagian Pemerintah	Data informasi publik Bagian Pemerintahan	Informasi Publik	Bagian Pemerintahan	Informasi seputar bagian pemerintahan	Bagian Pemerintahan	Website	Server Kominfo	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Subkoordinator Pengembangan Otonomi Daerah	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.06.001	

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pengembangan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.07.01	7	Website BPBD (http://bpbd.madiunkota.go.id/)	Penyaluran informasi terkait profil, kegiatan, produk hukum, berita, dsb terkait BPBD	Penyaluran informasi	Data informasi publik BPBD (profil, berita, kegiatan, dsb)	Informasi Publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Informasi seputar BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Website	Server Kominfo	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.07.004

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.08.01	8	E-KAK	aplikasi digunakan untuk menjelaskan rincian perencanaan sub kegiatan, kegiatan dan program dari setiap OPD	Berfungsi untuk menjelaskan rincian sub kegiatan, kegiatan dan program dari perencanaan setiap OPD	Data RPJMD (perencanaan 5 tahunan) dan Data RKPD (perencanaan tahunan), data permasalahan perangkat daerah, data rincian belanja (per rekening), data tematik, data kinerja, data program, kegiatan, dan sub kegiatan	Tupoksi perencanaan seluruh OPD	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Laporan Data RPJMD (perencanaan 5 tahunan) dan Data RKPD (perencanaan tahunan)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Website	Server Kominfo	Open Source	Ruby	Ruby on rails	Pihak Ketiga	Excel	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.08.001, DAL.08.01

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.08.02	8	Simonev (https://simonev.madiun.kota.go.id/)	Aplikasi SIMONEV (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan) atau biasa juga disebut E-Monev adalah aplikasi yang menginovasi proses Monitoring dan Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, khususnya dalam menyusun SAKIP/LAKIP, Pengukuran Kinerja dan LKPJ menjadi Perjanjian Kinerja dan LKPJ menjadi lebih transparan, cepat, terintegrasi konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Berfungsi dalam memudahkan proses Monitoring dan Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, khususnya dalam menyusun SAKIP/LAKIP, Pengukuran Kinerja dan LKPJ menjadi lebih transparan, cepat, terintegrasi konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Data Evaluasi capaian kinerja Pemerintah Dearah	Laporan Evaluasi capaian kinerja Pemerintah Dearah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Laporan Data Evaluasi capaian kinerja Pemerintah Dearah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Website	Server Kominfo	Open Source	PHP	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	PostgreSQL	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.08.002, DAL.08.03

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.08.03	8	Website BAPEDALITB ANGDA (https://bap elitbangda.m adiunkota.go .id/)	Website penyebaran informasi terkait Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data informasi publik Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (profil, berita, kegiatan, dsb)	Informasi Publik	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Informasi seputar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Website	Komputer Internal PD	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.08.003

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.09.01	9	ASB (Analisis Standar Biaya) (https://sipk.d.madiunkota.go.id/asb2023)	ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.	Berfungsi untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan SKPD	Data Anggaran Kegiatan	Laporan Analisis Standar Biaya	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Data Anggaran Kegiatan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website	Komputer Internal PD	Proprietary	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga	Bidang Anggaran	RAA.01.02	Pihak Ketiga	DAD.09.002, DAL.09.06
DAA.09.02	9	SIPD https://madiun.sipd.kemendagri.go.id/daerah	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.	Berfungsi untuk manajemen data pembangunan daerah	Data Pembangunan Daerah	Laporan Pembangunan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Data Pembangunan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website	Komputer Internal PD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Akuntansi dan Aset	RAA.01.02	Pusat	DAD.09.003, DAD.23.002, DAL.09.08

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.09.03	9	SIPKD http://sipkd.madiunkota.go.id/sipkd 2022	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.	Berfungsi untuk membantu pengelolaan keuangan	Data Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan SKPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Data Pengelolaan Keuangan SKPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website	Server Kominfo	opensource	php	CI	Internal PD	MariaDB	Bidang Akuntansi dan Aset	RAA.01.02	live server sipkd.madiunkota.go.id	DAD.09.004, DAL.09.01, DAL.09.04, DAL.09.05, DAL.09.08

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.09.04	9	SIM GAJI	Simgaji adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan data gaji ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota	Berfungsi dalam mengelola gaji pegawai	Data Pengelolaan Gaji Pegawai	Laporan Gaji Pegawai	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Data Pengelolaan Gaji Pegawai	Badan Keuangan dan Aset Daerah	desktop	Server Kominfo	opensource	PHP	CI	Pihak Ketiga	MariaDB	Bidang Perbendaharaan	RAA.01.02	live server (sigma.madiunkota.go.id)	DAD.09.005, DAL.09.03
DAA.09.05	9	OMSPAN https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/	OM SPAN (<i>online monitoring SPAN</i>) adalah Aplikasi berbasis WEB yang dapat diakses melalui jaringan Intranet dan Internet yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan.	Berfungsi untuk melakukan monitoring transaksi SPAN	Data Pelaporan DAK Fisik	Laporan Pengelolaan DAK Fisik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Data Pelaporan DAK Fisik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website	Server Kominfo	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi database pusat	Bidang Anggaran	RAA.01.02	Pusat	DAD.09.006, DAL.09.11

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.09.06	9	UPDATE AGENDA KEGIATAN PIMPINAN https://sipkd.madiunkota.go.id/agenda_kegiatan_pimpinan/	Digunakan untuk menyajikan dan jadwal agenda pimpinan	Berfungsi untuk menyajikan dan jadwal agenda pimpinan	Data Agenda Pimpinan	Informasi jadwal dan agenda pimpinan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Data Agenda Pimpinan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website	Server Kominfo	opensource	php	CI	Internal PD	MariaDB	Sekretariat	RAA.02.02	live server sipkd.madiunkota.go.id	DAD.09.007
DAA.09.07	9	DID (http://sikd.djpk.kemendju.go.id/laporanjpk/)	DID merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pelaporan perbendaharaan dan keuangan daerah kepada DPJK	Berfungsi untuk pelaporan perbendaharaan dan keuangan daerah kepada DPJK	Data Pelaporan Dana Intensif Daerah (DID)	Laporan perbendaharaan dan keuangan daerah kepada DPJK	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Data Pelaporan Dana Intensif Daerah (DID)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website	Server internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi database pusat	Bidang Akuntansi dan Aset	RAA.01.02	Pusat	DAD.09.008, DAL.09.13

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.09.08	9	SIMPONI (https://www.simponi.ke-menkeu.go.id/)	Simponi adalah bagian dari fasilitas pembayaran penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi ke-2 (MPN G-2) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang telah diluncurkan 2014 lalu.	Berfungsi untuk membantu memproses pembayaran penerimaan negara	Data Pembayaran Setoran ke Kas Negara Non Pajak	Laporan pembayaran penerimaan negara	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Data Pembayaran Setoran ke Kas Negara Non Pajak	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website	Server Kominfo	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi database pusat	Bidang Anggaran	RAA.01.02	Pusat	DAD.09.009, DAL.09.14
DAA.09.09	9	SIMTRADA (Sistem Informasi Transfer ke Daerah Dan Dana Desa)	SIMTRADA wadah yang digunakan untuk mempermudah penyaluran dana daerah dan desa	Berfungsi untuk menyalurkan dana daerah dan desa	Data monitoring Dana Transfer Dari Pusat (kemenkeu)	Laporan Penyaluran dana daerah dan desa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Data monitoring Dana Transfer Dari Pusat (kemenkeu)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website server pusat	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi database pusat	Bidang Anggaran	RAA.01.02	Pusat	DAD.09.010, DAL.09.15

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.09.10	9	SIGMA https://sigma.madiunkota.go.id	SIGMA merupakan aplikasi atau sistem informasi geografis yang dikembangkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Madiun. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan pendataan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun khususnya untuk aset yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.	Berfungsi untuk mempermudah pengelolaan dan pendataan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun	Data Aset (Aset (administrasi dan sertifikasi) , Pemanfaatan Aset, Potensi Aset, dan Peta Aset daerah Kota Madiun)	Informasi aset daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Data Aset	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website	Server Kominfo	opensource	php	CI	Pihak Ketiga	MySQL	Bidang Akuntansi dan Aset	RAA.01.01	live server (sigma.madiunkota.go.id)	DAD.09.001, DAL.09.07

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.09.11	9	SIMDA BMD	Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.	Perfungsi untuk pengelolaan barang daerah	Data barang daerah	Informasi barang milik daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Data barang daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	desktop	Server internal OPD	opensource	PHP	CI	Pusat (BPKP)	MySQL	Bidang Akuntansi dan Aset	RAA.01.02	live server (sigma.madiunkota.go.id)	DAD.09.011, DAL.09.07
DAA.09.12	9	Website BKAD (https://bka.d.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Badan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data informasi publik Badan Keuangan dan Aset Daerah (profil, berita, kegiatan, dsb)	Informasi Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Informasi seputar BKAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website	Server internal OPD	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.09.012

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.09.13	9	ALADIN	Aladin : adalah aplikasi dari Pusat (dijen Perimbangan keuanagan-kemenkeu) yang di gunakan untuk Pelaporan Pengelolaan DAK Non Fisik	untuk membantu kewajiban pengelolaan DAK Non Fisik di daerah - daerah	Data DAK Non Fisik dari Pusat	Laporan Pengelolaan DAK Non Fisik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Data DAK Non Fisik dari Pusat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website	Server Kominfo	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Pusat Perimbangan Keuangan)	Aplikasi database pusat	Bidang Perbendaharaan	RAA.01.02	Pusat	DAD.09.013, DAL.09.12
DAA.10.01	10	SIMPADAMA (https://simpadama.madiunkota.go.id/)	Sistem Informasi Pajak Daerah Kota Madiun merupakan aplikasi yang digunakan dalam mengelola pajak daerah.	Berfungsi untuk mengelola pajak daerah	Data Wajib Pajak, Obyek pajak, NPWPD, SUBYEK PAJAK, WAJIB PAJAK	Laporan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Laporan Data Wajib Pajak, Obyek pajak	Badan Pendapatan Daerah	Website	server pusat	Proprietary	PHP, JAVA	CI	Pihak Ketiga	MySQL	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	RAA.01.01	Development	DAL.10.09, DAL.10.10, DAL.10.11, DAL.10.12,

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.10.02	10	SISMIOIP	Sismiop atau Sistem Manajemen Infromasi Objek Pajak merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.	Berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer	Data Pajak Daerah	Laporan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Laporan Data Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Desktop	server pusat	Proprietary	PHP, JAVA	CI	Pihak Ketiga	MySql	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	RAA.02.02	Development	DAD.10.002, DAL.10.02

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.10.03	10	Website BAPENDA (https://bapenda.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Badan Pendapatan Daerah, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Badan Pendapatan Daerah	Data informasi publik Badan Pendapatan Daerah (profil, berita, kegiatan, dsb)	Informasi Publik	Badan Pendapatan Daerah	Informasi seputar BPD Data informasi publik Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Website	server pusat	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.10.003
DAA.10.04	10	TAPINGBOX	Aplikasi untuk mengelola pajak daerah sektor hotel dan restaurant	Berfungsi untuk mengelola pajak daerah sektor hotel dan restaurant	Data pajak Daerah sektor hotel dan resto	Laporan pajak daerah sektor hotrl dan restaurant	Badan Pendapatan Daerah	Laporan Data pajak Daerah sektor hotel dan resto	Badan Pendapatan Daerah	Website	Server internal OPD	Proprietary	PHP, JAVA	CI	Pihak Ketiga	MySQL	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	RAA.02.02	Development	DAD.10.004, DAL.10.02

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.10.05	10	Aplikasi MCP	MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.	Berfungsi untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi,	Capaian kerja pencegahan korupsi	Dashboard Capaian kerja pencegahan korupsi	Badan Pendapatan Daerah	Laporan hasil capaian kinerja program pencegahan korupsi	Badan Pendapatan Daerah	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Sekretariat	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.10.005

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.11.01	11	SIK (https://sik.madiunkota.go.id/simpeg/)	Sistem Informasi Kepegawaian adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data kepegawaian seluruh OPD	Berfungsi untuk informasi seluruh data kepegawaian	Data Kepegawaian seluruh OPD, seperti data Analisa Kebutuhan Diklat, Data Tugas Belajar, Data Pengembangan Kompetensi Teknis dan Data Pengembangan Kompetensi ASN	Informasi data pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan data kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website	Server Kominfo	Open source	PHP	Laravel	Internal PD	MySQL	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAL.11.05, DAL.11.13, DAL.11.14, DAL.11.15, DAL.11.16, DAL.11.21, DAL.11.22, DAL.11.27, DAL.11.31

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pengembangan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.11.02	1 1	M-SKP (https://skp.madiunkota.go.id/)	Manajemen Sasaran Kinerja Pegawai (M-SKP) adalah aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah PNS dalam penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Berfungsi untuk mempermudah PNS dalam penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	data kepegawaian, data SKP	Hasil penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan Data Kepegawaian, data penilaian kinerja pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website	server Pusat	Open source	PHP	Laravel	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.11.001, DAD.33.001, DAL.11.02
DAA.11.03	1 1	E-Kinerja (https://ekin.kota.go.id/)	Sistem yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan kinerja pegawai negeri sipil.	Berfungsi untuk mencatat kinerja pegawai negeri sipil.	data kepegawaian, data penilaian kinerja pegawai	Laporan Penilaian Kinerja Pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan penilaian kinerja pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website & Mobile	Server internal OPD	Open source	PHP	Laravel	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi - Sub Bidang Informasi	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.11.005, DAL.11.31

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.11.04	1 1	My SAPK (SAPK)	sistem aplikasi pelayanan kepegawaian BKN untuk memudahkan kegiatan administrasi PNS seperti penginputan PNS, dan sebagainya.	Berfungsi sebagai aplikasi yang dipergunakan sebagai layanan kepegawaian berbasis <i>online</i>	Data Diklat Teknis dan Fungsional, Data Penjatuhan Hukuman Disiplin, Layanan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/C ke Atas	Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan Data Penjatuhan Hukuman Disiplin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website & mobile	Server Kominfo	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Badan Kepegawaian Negara)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	RAA.01.02	Pusat	DAD.11.006, DAL.11.01, DAL.11.21, DAL.11.22

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.11.05	1 1	Website BKPSDM (https://bkpsdm.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data informasi publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (profil, berita, kegiatan, dsb)	Informasi Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Informasi seputar BKPSDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website	Server Kominfo	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.11.007, DAL.11.26

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.1.1.06	1 1	SI HARKA (https://siharka.menpan.go.id/)	SIHARKA ((Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan) adalah sistem yang berguna untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki oleh setiap ASN di Indonesia. Dengan melaporkan jumlah kekayaan yang dimiliki, ASN dapat mempertanggungjawabkan jumlah kenaikan harta saat sebelum dan sesudah menjadi ASN	Berfungsi sebagai media pelaporan harta kekayaan ASN	Data aset kekayaan ASN	Laporan Harta Kekayaan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan Data aset kekayaan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website	Server Kominfo	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kemenpan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.1.1.008

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.1.1.07	1 1	IDIS BKN (https://idis.bkn.go.id/)	IDIS BKN (Integrated Discipline Badan Kepegawaian Negara) merupakan sistem informasi pelaporan proses hukuman disiplin yang terintegrasi dengan sistem SAPK BKN. Sistem informasi ini bertujuan untuk memberikan standar dan kemudahan dalam melakukan proses pelaporan hukuman disiplin mulai dari identifikasi sampai dengan pembuatan surat keputusan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Berfungsi sebagai media dalam pelaporan proses hukuman disiplin	Data pelaporan hukuman disiplin	pelaporan hukuman disiplin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan Data pelaporan hukuman disiplin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website	Server Kominfo	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (BKN)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.11.009, DAL.1.1.06

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.11.08	1 1	SIASN (https://siasn.bkn.go.id/)	SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (SIASN) merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah	Berfungsi untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah	Data Pangkat dan Golongan ASN	informasi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan Data Pangkat dan Golongan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website	Server Kominfo	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (BKN)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Mutasi	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.11.003, DAL.11.15, DAL.11.16

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.11.09	1 1	e-Mutasi (https://emutasiotda.kemendagri.go.id/)	Aplikasi dalam memudahkan pelayanan mutasi ASN yaitu untuk Mutasi Antar Jabatan dan Mutasi Antar Daerah. Sistem emutasi terintegrasi secara nasional dengan Sistem SAPK BKN, Sistem Simratio Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Sistem Informasi SDM Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan	Berfungsi untuk memudahkan pelayanan mutasi ASN	data mutasi ASN	informasi mutasi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan data mutasi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website	Server Kominfo	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kemendagri)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Mutasi	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.11.010, DAL.11.23

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pengembangan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.11.10	1 1	SIOLA (https://ula.kemendagri.go.id/)	Sistem Informasi <i>Online</i> Layanan Administrasi untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan tepat waktu yang berbasis sistem informasi <i>online</i>	Untuk memudahkan pelayanan administrasi ASN	data pelayanan administrasi	Administrasi pegawai pemerintahan secara <i>online</i>	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan data pelayanan administrasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website	Server Kominfo	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kemendagri)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Mutasi	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.11.011, DAL.11.121, DAL.11.20
DAA.11.11	1 1	AREK <i>Online</i> (http://www.arekkanreg2.bkn.id/)	aplikasi untuk rekonsiliasi data kepegawaian sehingga memudahkan dalam pelayanan kepegawaian, sekaligus mengantisipasi munculnya tindak pidana korupsi	Berfungsi untuk rekonsiliasi data kepegawaian sehingga memudahkan dalam pelayanan kepegawaian, sekaligus mengantisipasi munculnya tindak pidana korupsi	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	Rekonsiliasi data	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan Rekonsiliasi Data Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website	Server Kominfo	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (BKN)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Mutasi	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.11.012, DAL.11.07, DAL.11.08

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.11.12	1 1	SSCASN (https://ssca.sn.bkn.go.id/)	Portal SSCASN merupakan portal masuk dan informasi mengenai suatu proses seleksi baik SSCN, SSPPPK, maupun Sekolah Kedinasan	Berfungsi sebagai aplikasi untuk proses seleksi CPNS	Data Informasi CPNS	Proses seleksi CPNS <i>online</i>	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Informasi seputar CPNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website	server Pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (BKN)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Badan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.11.004, DAL.11.12
DAA.12.01	1 2	Si-Permata (https://bak.esbangpol.madiunkota.go.id/sipermata/)	Si Permata Merupakan aplikasi yang di gunakan untuk Pengajuan rekomendasi ijin surat Penelitian secara <i>online</i>	Berfungsi untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan surat rekomendasi ijin penelitian	Data Identitas Pengaju; Data Dokumen Persyaratan; Data Penelitian	Surat Rekomendasi Perizinan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Surat Rekomendasi Perizinan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Website	Server Kominfo	Open Source	PHP	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	Postgre	Bidang Ideologi	RAA.01.01	Live	DAD.12.001, DAL.12.01

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.12.02	1 2	Website BAKESBANG POL (https://bakembangpol.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data informasi publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (profil, berita, kegiatan, dsb)	Informasi Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Informasi seputar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Website	server Pusat	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.12.003

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.13.01	1 3	SPIP (Sistem Informasi Pengendalian Intern)	Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Berfungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Data aktivitas, kegiatan dan program OPD	Laporan hasil pengawasan	Inspektorat Daerah	Laporan Data aktivitas, kegiatan dan program OPD	Inspektorat Daerah	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Inspektorat Pembantu	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.13.002, DAL.13.01

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.13.02	13	Website Inspektorat (https://inspektorat.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Inspektorat Daerah, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan lingkup Inspektorat Daerah	Data informasi publik Inspektorat Daerah (profil, berita, kegiatan, dsb)	Informasi Publik	Inspektorat Daerah	Informasi seputar Inspektorat daerah	Inspektorat Daerah	Website	server pusat	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.13.003
DAA.14.01	14	e-AR (http://dprd.madiunkota.go.id/)	e-AR (aplikasi Rakyat) merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk penyampaian aspirasi masyarakat secara <i>online</i>	Berfungsi untuk mendukung pengawasan DPRD.	Data aspirasi masyarakat	Penyampaian aspirasi masyarakat secara <i>online</i>	Sekretariat DPRD	Laporan Data aspirasi masyarakat	Sekretariat DPRD	Website	server Pusat	Open source	PHP	Laravel	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.13.004, DAL.14.01

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.14.02	14	e-Inisiatif (http://dprd.madiunkota.go.id/)	Aplikasi untuk menampung masukan terhadap substansi materi Raperda Inisiatif DPRD yang sedang disusun oleh DPRD Kota Madiun dalam kurun waktu tertentu.	Berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap substansi materi Raperda	Data masukan terhadap substansi materi Raperda Inisiatif DPRD	Masukan Raperda	Sekretariat DPRD	Laporan masukan terhadap substansi materi Raperda Inisiatif DPRD	Sekretariat DPRD	Website	server Pusat	Open source	PHP	Laravel	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	RAA.01.01	Deployment (Live)	
DAA.14.03	14	Website Sekretariat DPRD (https://setdprd.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Sekretariat DPRD, yaitu berupa profil, laporan, berita, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Sekretariat DPRD	Data informasi publik Sekretariat DPRD (profil, berita, kegiatan, dsb)	Informasi Publik	Sekretariat DPRD	Informasi seputar sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Website	Server Kominfo	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Bagian Umum dan Keuangan	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.14.001

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.01	15	Website Dinkes, PP dan KB (http://dinkes.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Data informasi publik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (profil, berita, kegiatan, dsb)	Informasi Publik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Informasi seputar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Komputer Internal PD	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.001

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.02	1 5	SIST-BRO (http://sikda.madiunkota.go.id/)	Sistem Informasi Kesehatan Terpadu Berbasis <i>Online</i> untuk pelayanan pasien di seluruh puskesmas. Di mana aplikasi itu menyediakan pendaftaran secara <i>online</i> kepada masyarakat. Sehingga, mereka tidak perlu lagi mengantre di puskesmas. Karena ketika pasien melakukan pendaftaran <i>online</i> dapat langsung mengetahui jadwal dan jam pemeriksaan.	Berfungsi untuk mempermudah pencatatan pelayan pasien dipuskesmas	Registrasi Pasien (NIK, Nama, Alamat,dsb)	Antrian pemeriksaan, hasil rekam medis	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Registrasi Pasien (NIK, Nama, Alamat,dsb)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website & Mobile	Server Kominfo	Open Source	PHP	Java Scrip	Pihak Ketiga	MySQL, SQL Server	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.15.002, DAL.34.01 - DAL.34.05, DAL.35.02, DAL.35.03, DAL.35.13

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.03	15	KUE DAKON (kuedakon.my.id)	Kuitansi Elektronik Dengan Dasar Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur merupakan aplikasi untuk kepentingan keuangan, menggabungkan mualai dari proses perencanaan sampai realisasi keuangan karena aplikasi yang ada tidak saling terintegrasi. Akan ada penomoran atau ID setiap kwitansi dari suatu kegiatan. Untuk penyimpanan bukti lampiran (kwitansi, nota,foto, dsb) akan terkoneksi dengan telegram untuk menghemat memory pada server.	Berfungsi dalam mengintegrasikan proses mualai dari perencanaan sampai realisasi keuangan dalam satu aplikasi	Data perencanaan, data kegiatan dan data keuangan	Dokumen perencanaan dan Keuangan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data perencanaan, data kegiatan dan data keuangan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Komputer Internal PD	Open Source	PHP dan java	PHP dan MySQLi	Internal PD	MySQL	Sekretariat	RAA.01.02	Development	DAD.15.003

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.04	15	SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS)	aplikasi untuk pencatatan survei penderita AIDS	Berfungsi untuk pencatatan survei penderita AIDS	Data penderita HIV/AIDS (Nama, NIK, Tanggal Lahir, Reagen)	Laporan penderita AIDS yang telah disurvei	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan penderita HIV/AIDS yang telah disurvei	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server pusat	open source	PHP	PHP dan Javascrip dan MySQL	Pihak Ketiga	Aplikasi database pusat	Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.036, DAL.34.09

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.05	15	SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis)	Aplikasi untuk Pencatatan Pasien Tuberculosis	Berfungsi untuk Pencatatan Pasien Tuberculosis	Data penderita Tuberculosis (NIK, Nama, Alamat, Reagen)	Laporan pencatatan pasien Tuberculosis	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan terkait penyakit dan pendataan pasien TB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Kominfo	Open Source	PHP dan Javascript	PHP dan Javascript	Pihak Ketiga	Aplikasi database pusat	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.037, DAL.35.11

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.06	15	REN BUT https://renbut.kemkes.go.id/	Aplikasi perencanaan kebutuhan SDM di fasilitas pelayanan kesehatan Berfungsi untuk memudahkan perencanaan kebutuhan SDM di fasilitas pelayanan kesehatan	Berfungsi dalam perencanaan kebutuhan SDM TIK.	Data kebutuhan Tenaga Kesehatan	Laporan Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Kominfo	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database pusat	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.040
DAA.15.07	15	SI-SDMK https://sisdms.kemkes.go.id/login	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk mendata informasi SDM Kesehatan.	Berfungsi untuk memfasilitasi penempatan tenaga kesehatan yang tepat (kualifikasi dan keterampilan) di tempat yang tepat (lokasi penempatan) pada waktu yang tepat (ketersediaan), serta pengelolaan data SDM Kesehatan.	Data Tenaga Kesehatan	Informasi terkait data SDM Kesehatan yang ada	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Update Data Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Kominfo	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database pusat	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.039

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.08	1 5	Aplikasi Keluarga Sehat 2.0 (PIS-PK)	Aplikasi untuk menunjang program Pemerintah Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga atau PIS-PIK. aplikasi pendataan kesehatan untuk setiap KK	Berfungsi untuk memudahkan para surveyor kesehatan dalam mengumpulkan data seluruh keluarga di Indonesia, baik di daerah yang sudah memiliki fasilitas internet yang sudah memadai maupun di daerah terpencil yang masih mengalami kesulitan akses Internet.	data lapangan, data pasien, data fasilitas kesehatan hingga data analisis	Laporan pendataan kesehatan setiap keluarga	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan pendataan kesehatan setiap keluarga	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website & Mobile	Server Kominfo	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database pusat	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.046

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.09	15	ASPAK (http://aspak.kemkes.go.id/)	Suatu aplikasi berbasis Website yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Berfungsi untuk mienghimpun data dan menyajikan informasi mengenai Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Data Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Laporan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Komputer Internal PD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.008
DAA.15.10	15	Pcare BPJS	platform digital dari BPJS Kesehatan yang difungsikan untuk mempermudah akses kesehatan. Platform tersebut membantu peserta aktif BPJS kesehatan untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah	Berfungsi untuk membantu peserta aktif BPJS kesehatan untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah	data pelayanan kesehatan, data BPJS	Laporan Penggunaan Pelayanan BPJS	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Penggunaan Pelayanan BPJS	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website & Mobile server pusat	Proprietary	BPJS	BPJS	BPJS	Aplikasi database BPJS	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.009, DAL.15.14	

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.11	15	E-Filca	Aplikasi sistem perekaman dan pelaporan untuk penyakit filariasis, kecacingan dan schistosomiasis	Berfungsi untuk perekaman dan pelaporan untuk penyakit filariasis, kecacingan dan schistosomiasis	Data penderita penyakit filariasis, kecacingan dan schistosomiasis	Pendataan penyakit filariasis, kecacingan dan schistosomiasis	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data penderita penyakit filariasis, kecacingan dan schistosomiasis	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Mobile	Server internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.047
DAA.15.12	15	Elsimil	Pemantauan bagi kesehatan ibu hamil serta media edukasi pernikahan dan hamil	Berfungsi sebagai pemantauan bagi kesehatan ibu hamil serta media edukasi pernikahan dan hamil	Data Pemantauan bagi kesehatan ibu hamil serta media edukasi pernikahan dan hamil	Laporan hasil Pemantauan bagi kesehatan ibu hamil dan laporan pelaksanaan edukasi pernikahan dan hamil	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data Pemantauan bagi kesehatan ibu hamil serta media edukasi pernikahan dan hamil	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website server pusat	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.048

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pengembangan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.13	1 5	E-Monev HSP (Higien dan Sanitasi Pangan)	suatu aplikasi yang didedikasikan kepada masyarakat untuk memudahkan dalam memperoleh informasi TPM yang aman dan sehat sesuai dengan standar Higien Sanitasi Pangan	Berfungsi untuk memudahkan dalam memperoleh informasi TPM yang aman dan sehat sesuai dengan standar Higien Sanitasi Pangan	Data user, Sertifikat Laik Higien Sanitasi Pangan	Informasi TPM yang aman dan sehat sesuai dengan standar Higien Sanitasi Pangan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data user, Sertifikat Laik Higien Sanitasi Pangan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website & mobile	server aplikasi	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.049
DAA.15.14	1 5	E-Monev Kualitas Kesling (TTU, TFU, PKAM, STBM, PLM, KKS)	Sistem informasi Kelola Kesehatan Lingkungan	Berfungsi untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan data kesehatan lingkungan	Data kesehatan lingkungan	Laporan data kesehatan lingkungan	Pengendalian Penduduk dan	Laporan Data Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server aplikasi	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.015

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.15	15	E-Puskesmas (https://epuskesmas.id/)	ePuskesmas merupakan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas yang berbasis web based dan mobile digunakan untuk membantu pelayanan dan manajemen Puskesmas sebagai lembaga pelayanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat, dari mulai pendaftaran pasien, pelayanan poli yang terintegrasi dengan Dinkes Kota/Kab, Dinkes Provinsi dan Kementerian Kesehatan RI	Berfungsi untuk membantu pelayanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat, dari mulai pendaftaran pasien, pelayanan poli	Data pelayanan, data pasien	Pelayanan <i>online</i>	Laporan Indikator Mutu Puskesmas	Dinas Kesehatan, Pengendalian dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Mobile	server aplikasi	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.045

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.16	15	e-Renggar (https://e-renggar.kemkes.go.id/)	Sistem Informasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan untuk menunjang fungsi perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi dalam 1 perangkat lunak yang terpadu.	Berfungsi untuk mempermudah kerja dari petugas pelaksana perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi dengan menggunakan sistem terpadu berbasis <i>online</i>	Data terkait perencanaan, penganggaran, dan realisasi terkait kesehatan	Laporan perencanaan, penganggaran, dan realisasi terkait kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data terkait perencanaan, penganggaran, dan realisasi terkait kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server pusat, komputer	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Sekretariat	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.051

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.17	15	HFIS (https://hfis.bpjs-kesehatan.go.id/hfis/)	Health Facilities Information System atau HFIS BPJS adalah aplikasi berbasis Website yang ditujukan bagi berbagai fasilitas kesehatan untuk tujuan profiling, monitoring, serta pelaporan data terkait penanggung jawab, jumlah dokter, alamat buka praktik, jam kerja, teknologi, dan sebagainya.	Bertujuan untuk profiling, monitoring, serta pelaporan data terkait penanggung jawab, jumlah dokter, alamat buka praktik, jam kerja, teknologi, dan sebagainya.	data terkait penanggung jawab, jumlah dokter, alamat buka praktik, jam kerja, teknologi, dan sebagainya.	Pendataan fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan data terkait penanggung jawab, jumlah dokter, alamat buka praktik, jam kerja, teknologi, dan sebagainya.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server pusat, komputer	Proprietary	BPJS	BPJS	BPJS	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.052

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.18	1 5	IKP (https://mutufasyankes.kemkes.go.id/)	Aplikasi yang berfungsi untuk pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien)	Berfungsi untuk pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien)	Data pelaporan IKP	Laporan IKP	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan IKP	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server pusat, komputer	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.044

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.19	1 5	JKN Mobile	Aplikasi untuk memudahkan akses masyarakat pengguna Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam aplikasi Mobile JKN terdapat menu peserta, ubah data peserta, ketersediaan tempat tidur, pendaftaran pelayanan, premi, konsultasi dokter, jadwal tindakan operasi, skrining kesehatan, obat yang ditanggung, catatan pembayaran, pendaftaran peserta, pembayaran, riwayat pelayanan, informasi dan pengaduan,dll.	Berfungsi untuk memudahkan akses masyarakat pengguna Jaminan Kesehatan Nasional	Data peserta BPJS, data pelayanan, data pengaduan,d sb	Laporan Data terkait BPJS	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data terkait BPJS	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Mobile	server pusat	Proprietary	BPJS	BPJS	BPJS	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.053

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.20	15	Kampung KB	Digunakan untuk monitoring kegiatan yang adai di kampung KB	Berfungsi untuk monitoring kegiatan yang adai di kampung KB	Data Keluarga, Data Kegiatan Kampung KB	Laporan Kegiatan di KAMPUNG kb	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data Keluarga, Data Kegiatan Kampung KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.018

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.21	1 5	KLIK KB (https://klik.kb.com/)	Klikkb Adalah Aplikasi Untuk Bidan Yang Menjadikan Layanan KB Semakin Mudah Dan Berkualitas Dengan Memberikan Informasi Alat & Obat Kontrasepsi Dan Klinik Bidan Di Indonesia	Memberikan Informasi Alat & Obat Kontrasepsi Dan Klinik Di Indonesia	Data bidan, data terkait KB	Informasi terkait KB, informasi bidan, konsultasi bidan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data terkait KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Mobile	Server Pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (BKKBN)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.054, DAL.34.05

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.22	15	APLIKASI KOMUNIKASI DATA / KOMDAT(https://komdat.kemkes.go.id/l)	Aplikasi Komunikasi Data yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi kesehatan secara berkala yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Privinsi	Berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi kesehatan secara berkala	Data Derajat Kesehatan, Upaya Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan dan Determinan Kesehatan, Data Germas	Data agregat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data Kesehatan Indonesia Terpusat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.020, DAD.15.030

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.23	15	KPCPEN VAKSINASI	Aplikasi pelaporan dan monitoring hasil vaksinasi Covid-19	Berfungsi memonitoring data hasil capaian Vaksinasi Covid-19 per sasaran indikator dan per dosis	data terkait vaksinasi covid-19	Informasi data hasil vaksinasi Covid-19	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan pelaksanaan vaksinasi covid-19	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.02.01	Deployment (Live)	DAD.15.023, DAD.15.031

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.24	1 5	KRISNA	Digunakan untuk perencanaan fisik DAK	Berfungsi untuk perencanaan DAK fisik	Data perencanaan DAK fisik	Laporan perencanaan DAK fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data perencanaan DAK fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Sekretariat	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.055

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.25	15	Lupis (https://lupis.bpjs-kesehatan.go.id/)	Aplikasi Lupis BPJS, Luar Paket INA-CBG Diperuntukkan bagi Faskes yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Semoga dengan Aplikasi LUPIS BPJS ini dapat membantu mempermudah FKTP / Faskes dalam menjalankan tugas sehari-hari. Lupis lebih difokuskan untuk administrasi dan keuangan.	Memudahkan Faskes dalam administrasi dan keuangan BPJS Kesehatan	Data peserta BPJS, data pelayanan, data klaim BPJS	Administrasi BPJS Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data peserta BPJS Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website & Mobile	Server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.056

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.26	1 5	Monitoring PPKM	Aplikasi monitoring data kasus Covid-19 Kota Madiun baik kasus aktif, sembuh, meninggal dan penyebarannya	Berfungsi memonitoring data kasus Covid-19 Kota Madiun, baik kasus aktif, sembuh, meninggal dan penyebarannya	data pelaporan kasus covid-19	Laporan kasus covid-19	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan kasus covid-19	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi database Pemerintah Kota	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.02.01	Deployment (Live)	DAD.15.024

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.27	1 5	Morena	Digunakan pelaporan perencanaan, monitoring, dan evaluasi dana DAK (Dana Alokasi Khusus) baik fisik maupun non fisik	Berfungsi untuk pelaporan perencanaan, monitoring, dan evaluasi dana DAK (Dana Alokasi Khusus) baik fisik maupun non fisik	Data Laporan Penyerapan DAK Fisik maupun non fisik	Laporan perencanaan, monitoring, dan evaluasi dana DAK fisik maupun non fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Penyerapan DAK Fisik maupun non fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server pusat, Komputer	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Sekretariat	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.019

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.28	15	New All Record Antigen/PCR COVID-19 (https://allrecord-antigen.kemkes.go.id/)	Sebuah Aplikasi Dari Kementerian Kesehatan RI untuk mengisi hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen, dan petugas yang mengisi adalah pengelola data yang bertugas di fasyankes	Berfungsi untuk mendata hasil Antigen/PCR Covid 19	Data hasil Antigen/PCR dan biodata pemeriksaan	Pendataan hasil Antigen/PCR	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data hasil Antigen/PCR dan biodata pemeriksaan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server pusat, Komputer	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.02.01	Deployment (Live)	DAD.15.057

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.29	15	New Siga (https://new.siga.bkkbn.go.id/)	Aplikasi sistem informasi keluarga dari BKKBN yang telah mengintegrasikan sistem informasi kependudukan dengan Basis Data Keluarga Indonesia. Aplikasi New SIGA ini akan menjadi data operasional bagi petugas KB dan pihak terkait dalam melakukan intervensi terhadap program BKKBN, khususnya program Bangga Kencana.	Berfungsi untuk pencatatan dan pelaporan Pelayanan KB, Pengendalian Lapangan dan Pendataan Keluarga.	Data pelaksanaan program keluarga Indonesia	Laporan pelaksanaan program keluarga Indonesia	Laporan pelaksanaan program keluarga Indonesia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server pusat, Komputer	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (BKKBN)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.017

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.30	15	E-Logistik	Aplikasi manajemen logistik bidang kesehatan	Berfungsi untuk mengelola logistik bidang kesehatan	Data logistik kesehatan	Dokumen logistik bidang kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data logistik kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.037

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.31	15	SIERA (https://siera.bpkp.go.id/p3dn)	Aplikasi yang berfungsi dalam penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa bidnag kesehatan	Berfungsi untuk mengetahui Informasi mengenai berapa prosentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa	Data Realisasi Belanja Pengadaan Barang Dan Jasa bidang kesehatan	Pengawasan penggunaan produksi dalam negeri	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data Realisasi Belanja Pengadaan Barang Dan Jasa bidang kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (BPKP)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Sekretariat	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.031

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.32	15	PWS Imunisasi (IDL, Campak Rubela)	aplikasi untuk pemantauan wilayah sekitar (PWS) yang dapat melihat kinerja pelayanan imunisasi di Posyandu tiap bulannya (IDL, Campak, Rubela)	Berfungsi untuk memantau pelayanan posyandu	data pelayanan posyandu	Laporan pelayanan posyandu	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan pelayanan posyandu	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perserongan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.010

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.33	15	Si Gizi Terpadu - ePPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)	Sistem informasi gizi terpadu (SIGIZI TERPADU) merupakan bagian besar dari sistem yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan data gizi baik data sasaran tiap individu, status gizi, cakupan kinerja dan juga data PMT yang bersumber dari APBN maupun dari APBD.	Berfungsi untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan data gizi	data gizi masyarakat	Laporan kondisi gizi masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan data terkait gizi masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Komputer Internal PD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.029., DAL.34.07

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pengembangan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.34	15	Sikelim (Sistem Informasi Kelola Limbah Medis)	Sistem Informasi Kelola Limbah Medis	Berfungsi untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan data limbah medis	Data limbah medis	Laporan Limbah Medis	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data limbah medis	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.15.050
DAA.15.35	15	SIPTM	Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (Kanker, Stroke, DM, Gangguan Indra)	Berfungsi untuk memberikan informasi mengenai pencegahan penyakit tidak menular	data penyakit dan pencegahannya	Informasi data penyakit dan pencegahannya	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan data penyakit dan pencegahannya	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.058

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.36	15	SISMAL (Sistem Informasi Malaria)	Sistem Informasi Malaria adalah sistem pelaporan penderita malaria yang dikelola oleh puskesmas dan rumah sakit kemudian dilaporkan ke kementerian kesehatan setiap bulannya	Berfungsi untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan kasus malaria	Data Kasus Malaria	Laporan kasus Malaria	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data Malaria	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.038

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.37	1 5	SISRUTE (Sistem Rujukan Terpadu)	Sistem Rujukan Terpadu yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat (horizontal maupun vertikal) dengan tujuan mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien	Berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien	Data pasien rujukan	Laporan pasien rujukan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data pasien rujukan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	komputer internal PD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.059

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.38	15	SITKO	Sistem Informasi terpadu kesehatan kerja dan olahraga	Berfungsi untuk memudahkan pencatatan hasil pemeriksaan fisik	data hasil pemeriksaan fisik	Laporan hasil pemeriksaan fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan data hasil pemeriksaan fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.060

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pengembangan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.39	15	SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)	Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon adalah suatu sistem yang dapat memantau perkembangan trend suatu penyakit menular potensial KLB/wabah dari waktu ke waktu (periode mingguan) dan memberikan sinyal peringatan (alert) kepada pengelola program bila kasus tersebut melebihi nilai ambang batasnya sehingga mendorong program untuk melakukan respons.	Berfungsi untuk memantau perkembangan trend suatu penyakit menular potensial KLB/wabah	Data Surveilans	Laporan Data Surveilans	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data Surveilans	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.40	1 5	SMILE (Sistem Monitoring dan Logistik Elektronik)	Sistem Monitoring Logistik berbasis Elektronik (SMILE) adalah inovasi solusi teknologi untuk memperkuat sistem rantai pasokan vaksin imunisasi di Indonesia. SMILE dapat memberikan pandangan secara real-time atas logistik rantai dingin vaksin dan suhu penyimpanannya di seluruh titik penyedia vaksin pemerintah sampai tingkat Posyandu.	Berfungsi untuk mempermudah pencatatan vaksin	Data Pencatatan Vaksinasi Covid-19	Informasi terkait vaksin	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Pencatatan Vaksinasi Covid-19	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.041

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.41	15	Pemantaua Wilayah Setempat (PWS) Campak	Aplikasi pemantauan/kewaspadaan dini penyakit Campak	Berfungsi memantau peningkatan penemuan penyakit Campak	data terkait penyakit campak	Informasi data Penyakit Campak Kota madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan data terkait penyakit campak	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Kominfo	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.025

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.42	1 5	Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) ISPA / ILI	Aplikasi pemantauan/kewaspadaan dini penyakit ISPA/ILI	Berfungsi memantau peningkatan penemuan penyakit ISPA/ILI	data terkait penyakit ISPA / ILI	Informasi data Penyakit ISPA/ILI Kota madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan data terkait penyakit ISPA / ILI	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.034

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.43	15	PK 21	Aplikasi yang digunakan untuk pengumpulan data primer tentang data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga.	Berfungsi untuk mengumpulkan data primer tentang data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga.	data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga.	Pendataan data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (BKKBN)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.061

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.44	1 5	Sehat Jiwa (Aplikasi Konsultasi Kesehatan Jiwa)	Aplikasi Sehat Jiwa adalah Aplikasi yang di kembangkan sebagai wadah komunikasi, Edukasi serta Informasi tentang kesehatan jiwa bagi masyarakat yang di kembangkan oleh Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza	Berfungsi sebagai wadah komunikasi, Edukasi serta Informasi tentang kesehatan jiwa bagi masyarakat	Data konsultasi kesehatan jiwa	Berita acara konsultasi kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data konsultasi kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Mobile	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.062

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.45	15	SI RAJA LIMBAH	Aplikasi yang digunakan sebagai pelaporan pengolahan limbah B3 dan Non B3 yang dilakukan secara elektronik	Berfungsi sebagai pelaporan pengolahan limbah yang dilakukan secara elektronik	Data limbah dan pengelolaannya	Laporan pengelolaan limbah	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data limbah dan pengelolaannya	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.15.063

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.46	15	SIHEPI (http://sihepi.kemkes.go.id/)	SIHEPI (Sistem Informasi Hepatitis) adalah aplikasi yang digunakan untuk pendataan penderita penyakit Hepatitis	Berfungsi untuk pendataan penderita penyakit Hepatitis	Data penderita Hepatitis	Pendataan penderita Hepatitis	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data penderita Hepatitis	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.064

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.47	1 5	SIKDA Generik	Aplikasi SIKDA adalah aplikasi sistem informasi kesehatan yang mengintegrasikan sistem-sistem informasi di puskesmas, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya, baik itu milik pemerintah maupun swasta	Berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi manajemen kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi.	Seluruh data terkait kesehatan	standarisasi Sistem Informasi Kesehatan sehingga dapat tersedia datadan informasi kesehatan yang akurat, tepat , dan cepat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Seluruh data terkait kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.065

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.48	15	SILACAK (Sistem Informasi Tracing COVID-19)	SILACAK (Sistem Informasi Tracing COVID-19) adalah aplikasi penguatan tracing alias penelusuran dalam penanganan Covid-19	Berfungsi sebaagi penelusuran dalam penanganan Covid-19	Data tracing COVID	Pendataan tracing COVID	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data Kasus Covid-19	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website & Mobile	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.02.01	Deployment (Live)	DAD.15.034
DAA.15.49	15	SILANTOR (https://silantor.kemkes.go.id/)	Silantor (Sistem Surveilans Vektor) merupakan sistem yang dikembangkan dalam rangka kewaspadaan dini terhadap penyakit tular vektor dan zoonotik termasuk DBD	Berfungsi untuk untuk mencegah penularan penyakit bersumber hewan	Data penderita penyakit tular vektor dan zoonotik	Pendataan penyakit tular vektor dan zoonotik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data penderita penyakit tular vektor dan zoonotik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website & Mobile	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.066

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.50	15	Silili KEREN	aplikasi untuk membangun Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan Penyuluh KB dan Kader Insitusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di seluruh Indonesia.	Berfungsi sebagai sarana berkomunikasi, bersosialisasi, mengembangkan minat dan kemampuan jajaran pemangku kebijakan dan pelaksana Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana di Indonesia	Data KIE, data penyuluh KB dan Kader Insitusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di seluruh Indonesia.	Media komunikasi penyuluh KB secara <i>online</i>	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data KIE	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Mobile	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (BKKBN)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.067

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.51	15	Simkeswa (http://siske wa.kemkes.g o.id/)	Simkeswa (Sistem Informasi Kesehatan Jiwa) adalah aplikasi yang dimanfaatkan sebagai pendataan data kesehatan yang terkait kesehatan jiwa.	Berfungsi sebagai pendataan data kesehatan yang terkait kesehatan jiwa.	Data kesehatan jiwa	Pendataan data kesehatan jiwa			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.019, DAD.15.038

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.52	15	Siperindu (https://siperindu.online/)	SIPERINDU (Sistem Infromasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk) adalah aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu bagi pemerintah dan masyarakat mendapatkan informasi peringatan dini situasi kependudukan serta rekomendasi kebijakan, untuk kesiapsiagaan dan respon terhadap program pengendalian penduduk	Berfungsi untuk menganalisa secara komprehensif dan memberikan peringatan dini serta rekomendasi kebijakan sebagai solusi untuk pengendalian kependudukan	Nilai matrix pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana setiap wilayah	Nilai indikator per wilayah, map indikator per wilayah, grafik trend, piramida penduduk.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Nilai matrix pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana setiap wilayah	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (BKKBN)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	RAA.01.01	Deployment (Live)	

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.53	15	SIPGAR (https://sipgar.kemkes.go.id/)	SIPGAR (Sistem Informasi Kebugaran) merupakan Sistem Informasi Kebugaran dari kementerian kesehatan RI yang dapat mengukur kebugaran tubuh seseorang. Aplikasi ini disosialisasikan kepada ASN dilingkungan Pemkot. Tujuannya agar ASN secara mandiri dapat mengukur kebugaran.	Berfungsi agar ASN secara mandiri dapat mengukur kebugaran	Data kondisi fisik ASN, data aktivitas fisik dan olahraga ASN	Pengukuran kebugaran mandiri	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Kebugaran ASN	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website & Mobile	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.014

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.54	15	SIPNAP (https://sipnap.kemkes.go.id/)	SIPNAP (Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika) adalah aplikasi yang berfungsi untuk pelaporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika	Berfungsi untuk pelaporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika	Data laporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika	Laporan Kasus penggunaan Narkotika dan Psikotropika	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Kasus penggunaan Narkotika dan Psikotropika	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.005

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.55	15	SIPP BPJS (https://sipp.bpjs-kesehatan.go.id/)	Saluran Informasi Penanganan Pengaduan (SIPP) BPJS Kesehatan merupakan sistem yang di sediakan untuk peserta JKN-KIS mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan seputar program JKN yang terhubung langsung oleh Kantor Cabang yang dapat memberikan informasi dan menangani pengaduan sesuai kebutuhan peserta secara realtime.	Berfungsi untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian layanan informasi dan penanganan pengaduan peserta yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.	Data aduan program JKN	Laporan aduan dan penanganan permasalahan program JKN	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data aduan program JKN	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website & Mobile	Server Internal OPD	Proprietary	BPJS	BPJS	Pusat (BPJS)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.069

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.56	1 5	SISCOBIKES (http://sisco-bikes.ppjk.ke-mkes.go.id/)	SISCOBIKES (Sistem Costing Biaya Kesehatan) adalah aplikasi perangkat pembiayaan Untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan yang tujuannya agar tepat sasaran dan berbasis bukti.	Berfungsi untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan yang tujuannya agar tepat sasaran dan berbasis bukti.	Data kebutuhan, rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan	Laporan rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan yang tepat sasaran dan berbasis bukti.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data kebutuhan, rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.070

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.57	15	Siskohatkes (https://siskohatkes.kemkes.go.id/)	Siskohatkes (Sistem Komputerisasi Haji Bidang Kesehatan) adalah sistem informasi untuk pencatatan dan pelaporan data kesehatan Jemaah Haji	Berfungsi untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan kondisi kesehataan jamaah haji.	Data kesehatan Jemaah Haji	Laporan kesehatan jamaah haji	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website & Mobile	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.035

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.58	15	Sistem Informasi Promkes (https://promkes.kemkes.go.id/)	Aplikasi yang berfungsi sebagai media untuk mempromosikan informasi terkait kesehatan	Berfungsi sebagai media untuk mempromosikan informasi terkait kesehatan	Data informasi kesehatan	Informasi publik tentang kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Informasi seputar kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.071

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.59	15	SITRUST HIV	Aplikasi SITRUST HIV merupakan sistem informasi berbasis Website & Mobile Android sebagai alat monitoring status pengiriman spesimen secara realtime. Pengembangan aplikasi SITRUST HIV berangkat dari praktik baik sebelumnya dalam membantu transportasi spesimen dalam program tuberkulosis nasional. SITRUST HIV digunakan untuk pencatatan dan pelaporan transportasi spesimen viral load dan EID. Kegunaannya adalah untuk komunikasi antar pengguna dalam kaitannya dengan permintaan pemeriksaan dan penjemputan spesimen, konfirmasi penerimaan, pemantauan status pengiriman (treking), serta penginputan hasil pemeriksaan.	Berfungsi untuk pencatatan dan pelaporan transportasi spesimen viral load dan EID. Kegunaannya adalah untuk komunikasi antar pengguna dalam kaitannya dengan permintaan pemeriksaan dan penjemputan penderit HIV	Data permintaan pemeriksaan dan penjemputan penderit HIV	permintaan pemeriksaan dan penjemputan penderit HIV secara online	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan penderita HIV/AIDS yang telah disurvei dan telah ditangani	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website & Mobile	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.036, DAL.34.09

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.60	15	Statistik Rutin (http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/)	Situs Pengolahan Data Statistik Rutin merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka menyediakan informasi tentang Pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.	Berfungsi untuk menyediakan informasi tentang Pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.	Data berkaitan dengan Pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.	Informasi Pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data berkaitan dengan Pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (BKKBN)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.072

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.61	1 5	Surveilans PD3I (http://pd3i.org/)	Sistem yang mengakomodasi kegiatan surveilans PD3I dari paper based ke web based	Sistem informasi yang berfungsi untuk mengakomodasi proses surveilans PD3I	Data kasus PD3I	Pendataan kasus PD3I	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data kasus PD3I	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.032

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.62	15	Sistem Pelaporan INM Puskesmas	aplikasi pemantauan indeks nasional mutu Puskesmas dan pelaporan IKP di puskesmas	berfungsi sebagai alat pemantauan indeks nasional mutu Puskesmas dan pelaporan IKP di puskesmas	Data Akreditasi Puskesmas	Laporan Hasil Akreditasi Puskesmas	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Hasil Akreditasi Puskesmas	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.007

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.63	15	SITRUS TB	Aplikasi pengiriman specimen dahak dari Fasyankes ke Site TCM dengan bantuan Provider pengiriman	Berfungsi sebagai aplikasi penghubung antara fasyankes pengirim specimen, site TCM dan provider pengirim (PT. Pos)	data terkait penyakit TB	Informasi Specimen terduga TBC yang dikirim ke site TCM	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan terkait penyakit dan pendataan pasien TB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.027, DAL.34.09

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.64	15	SITASIA (Sistem Informasi Porgram Kusta dan Frambusia)	Aplikasi pelaporan kasus Kusta dan Frambusia bulanan	Berfungsi memantau peningkatan penemuan penyakit Kusta dan Frambusia	data terkait kusta dan frambusia	Informasi data Penyakit Kusta & Frambusia Kota madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan data terkait kusta dan frambusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	Server Internal OPD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.036

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.65	15	SIMONA (https://simona.kemkes.go.id/)	Sistem Informasi Monitoring dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai sistem pembinaan serta monitoring untuk rumah sakit, apotek, toko obat, apotek, dan klinik yang merupakan bagian dari Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	Berfungsi sebagai sistem pembinaan serta monitoring untuk rumah sakit, apotek, toko obat, dan klinik yang merupakan bagian dari Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	Data Terkait Apotek	Laporan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.15.005, DAL.34.10, DAL.35.07

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.66	15	E-KOHORT (https://ekohort.kemkes.go.id/)	aplikasi untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA)	Berfungsi untuk memudahkan pemantauan kesehatan ibu dan anak	Data Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Laporan Pelayanan KIA	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Pelayanan KIA	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.011

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.67	1 5	ASIK	Aplikasi ASIK merupakan upaya pemerintah untuk peningkatan layanan kesehatan dalam membantu para tenaga kesehatan untuk pencatatan imunisasi anak di Indonesia secara digital.	Berfungsi untuk peningkatan layanan kesehatan dalam membantu para tenaga kesehatan untuk pencatatan imunisasi anak di Indonesia secara digital.	Data imunisasi anak	Laporan Pencatatan data imunisasi anak	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Pencatatan data imunisasi anak	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Mobile	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.018

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.68	15	SIRIKA (http://sirika.bkkbn.go.id/)	Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon (SIRIKA) merupakan aplikasi BKKBN dalam proses pengolahan data pelaporan logistik dan pengelolaan di Gudang secara digital.	Berfungsi untuk pengolahan data pelaporan logistik dan pengelolaan di Gudang secara digital.	Data alat kontrasepsi	Laporan Data Alat Kontrasepsi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Data Alat Kontrasepsi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (BKKBN)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.021

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.15.69	1 5	Rumah Dataku	Aplikasi pendataan KB dari bkkbn	Berfungsi sebagai pendataan KB	Data KB	Pendataan KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Pendataan KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Kesehatan)	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.013

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framewor k	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.16.01	1 6	SILAT (www.silat.m adiunkota.go .id)	Sistem Informasi Jalan dan Jembatan (SILAT) adalah aplikasi yang digunakan untuk pelaporan jalan dan jembatan oleh masyarakat kepada DPUPR	Berfungsi untuk permasalahan pelaporan jalan dan jembatan	Data Laporan Jalan dan Jembatan	Laporan permasalahan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan permasalahan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Website	server pusat	Proprietary	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga	Bidang Bina Marga	RAA.01.01	Pihak Ketiga	DAD.16.005, DAL.16.08

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.16.02	16	SIMBG	Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah sistem aplikasi berbasis web yang didesain untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam layanan IMB dan SLF oleh Pemerintah.	Berfungsi untuk manajemen bangunan dan gedung	Data gedung dan bangunan, data permohonan	Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik fungsi (SLF), Surat Kepemilikan Bangunan Gedung	Laporan Data Penataan Bangunan Gedung	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi database Pemerintah Pusat	Bidang Cipta Karya	RAA.01.01	Pusat	DAD.16.004, DAL.16.01

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.16.03	16	Website DPUPR (https://dpu.pr.madiunkab.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data informasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Informasi Publik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Informasi seputar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Website	server pusat	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.16.009

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.17.01	1 7	Sisan Baline	apikasi ini digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kepada disperkim agar masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor hnyaperlu lewat hp pengaduan sudah tersampaikan ke disperkim	Memudahkan masyarakat maupun instansi dalam melakukan pelaporan karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun.	Data Pengaduan Masyarakat	pelayanan Pengaduan Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan Data Pengaduan Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Website	server pusat	Open source	Wordpress	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Website (Google Form)	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.17.002, DAL.17.01

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.17.02	17	Website Disperkim (https://disparkim.madiun.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Data informasi publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Informasi Publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Informasi seputar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Website	server pusat	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.17.001

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.18.01	18	SIMFONI PPA (https://kekerasan.kemennppa.go.id/)	Menerima laporan, dan verifikasi laporan, tindak lanjut laporan, dan merujuk laporan, mengarsip laporan, bukan wewenang, dan data rahasia	tujuan : Aplikasi Umum Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional digunakan untuk menerima dan menyelesaikan laporan berupa aspirasi, pengaduan, dan permintaan informasi yang berasal dari masyarakat	Data kasus kekerasan (KK,NIK, identitas lain)	Laporan Pengaduan publik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan Data kasus kekerasan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Database aplikasi	Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.18.004, DAL.18.01

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.18.02	18	SIDEGAN (https://www.sites.google.com/view/sidegan-kotamadiun)	Sistem data gender Kota Madiun adalah data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan Statistik Gender yang didalamnya mengandung informasi isu gender. Sistem data gender ini merupakan sistem pengumpulan data sektoral ataupun non sektoral sebagai dasar analisa dan penyajian data terpilah yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berbasis gender. Sistem ini menggunakan google form, spreadsheets dan drive dari Google open data. Dimana Perangkat Daerah bisa mengembangkan struktur data lebih lanjut.	Menerima laporan, dan verifikasi laporan, tindak lanjut laporan, dan mengarsip laporan, bukan wewenang, dan data rahasia terkait gender	Data gender, data perempuan kepala keluarga, data disabilitas, data pegawai seluruh OPD, data peserta kegiatan	Penyajian data berdasarkan gender	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan Data gender	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Website	server pusat	Proprietary	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Aplikasi SIDEGAN	Bidang Pemberdayaan Perempuan	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.18.002, DAL.18.02

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.18.03	18	PUSKESOS (https://puskesos.madiunkota.go.id/)	puskesmas dibangun dengan tujuan untuk memudahkan warga atau fakir miskin untuk mendapatkan perlindungan sosial serta lepas dari kemiskinan	untuk mengurus data masyarakat miskin sebagai penerima bantuan sosial , pengajuan bantuan sosial dan penyaluran bantuan sosial	Data bantuan sosial, data DTKS, data PBI, data TPM	Pendataan masyarakat miskin	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan Data bantuan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Website	server pusat	Proprietary	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi PUSKESOS	Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.18.001, DAL.18.03

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.18.04	18	SIKS-NG (https://siks.kemensos.go.id/)	Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) merupakan aplikasi nasional untuk penerima segala jenis bantuan pemerintah. Aplikasi ini memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Data sasaran penerimaan bantuan, data keluarga miskin	Penyaluran bantuan pemerintah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan Data sasaran penerimaan bantuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi SIKS-NG	Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	RAA.01.01	Deployment (Live)	A.E.18.03, DAL.18.04

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.18.05	18	MADIUN MONITORING (dinsosapp.madiunkota.go.id)	Aplikasi yang berfungsi untuk mendata PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial)	Berfungsi untuk mendata PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial)	Data PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial)	Pendataan Penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan Data PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Website & Mobile	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	ada Ms excel	Bidang Rehabilitasi Sosial	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.18.005
DAA.18.06	18	Website Dinas Sosial P3A (dinsos.madiunkota.go.id)	aplikasi penyedia informasi publik berupa layanan,kegiatan, produk hukum, berita dan lain sebagainya	penyedia informasi	Data informasi publik Dinsos P3A (profil, kegiatan, berita,dsb)	Informasi Publik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Informasi seputar Dinsos P3A	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Website	server pusat	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.18.006

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framewor Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.19.01	19	E-KAMI	Aplikasi yang memberikan informasi terkait Produk IKM Kota Madiun	Produk, Berita, Akun Pengguna	Data informasi Produk IKM (Nama Produk, Deskripsi Produk, Alamat Produsen, Informasi Pengguna)	informasi Produk IKM Kota Madiun	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Informasi seputar Produk IKM	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Mobile	server pusat	Open source	Java	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga	MySQL	Bidang Perindustrian, Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	RAA.02.02	Live	DAD.19.003, DAL.19.20

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pengembangan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.19.02	19	SiCAKER (sicaker.madiunkota.go.id)	SICAKER merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi lowongan kerja kepada masyarakat dan memfasilitasi perusahaan dalam memberikane pemasangan iklan lowongan kerja. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat langsung mendaftar dan memasukkan lamaran kerja melalui aplikasi, sehingga proses pencarian kerja dapat lebih mudah, efektif dan efisien. Selain itu terdapat informasi dalam bentuk artikel seputar dunia kerja yang diharapkan mampu memberikan informasi terkini tentang peraturan, berita terbaru, dan informasi lainnya.	Berfungsi untuk memberikan informasi lowongan kerja kepada masyarakat dan memfasilitasi perusahaan dalam memberikan informasi lowongan pekerjaan.	Data lembaga pelatihan, Data TKW, Data Pencari Kerja, Tingkat Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Data TKA, Data Pekerja Anak, Jumlah Pencari Kerja Yang diterima, Jumlah Lowongan Pekerjaan,	Informasi lowongan kerja, hasil AK 1	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Laporan Data lembaga pelatihan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Mobile	server pusat	Open source	PHP	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga	MySQL	Bidang Tenaga Kerja	RAA.02.02	Live	DAD.19.002, DAL.19.01, DAL.19.03

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.19.03	19	Website DISNAKER (https://disnaker.madiun.kota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, yaitu profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Data informasi publik Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Informasi Publik	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Informasi seputar Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Website	server pusat	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.19.004

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.19.04	19	SISKOTKLN (http://sisko.tkl.n.bnp2tki.go.id/)	Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) adalah sistem pendataan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat keluar negeri. SISKOTKLN mengintegrasikan Pemangku kepentingan terkait dengan penempatan PMI yang antara lain Dinas Kabupaten/Kota, P3MI, Balai Latihan Kerja Luar Negeri, Sarana Kesehatan, Asuransi, Pemetiksaan Psikologi, Lembaga Uji Kompetensi, Pembiayaan Penempatan PMI, dan Perwakilan RI di luar Negeri	Berfungsi untuk pendataan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat keluar negeri	Data calon pekerja migran	Informasi Publik	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Laporan Data calon pekerja migran	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi Database Pusat	Bidang Tenaga Kerja	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.19.005, DAL.19.02

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.20.01	20	Be SMART Kota Madiun (https://beasiswa.madiunkota.go.id/)	Digunakan untuk memberikan informasi dan pendaftaran online beasiswa BBM	Pendaftaran online	Data beasiswa BBM (Data diri dari isian form)	Informasi dan Pendaftaran beasiswa	Dinas Pendidikan	Laporan Data beasiswa BBM (Data diri dari isian form)	Dinas Pendidikan	Website	server pusat	Open Source	PHP	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak diketahui	Sekretariat	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.20.007, DAL.20.01	
DAA.20.02	20	Aplikasi LI (https://lidisdik.madiunkota.go.id)	LI (Laporan Individu Sekolah) adalah Aplikasi pendataan pendidikan	Untuk mendata informasi pendidikan dari masing-masing lembaga	Data profil lembaga pendidikan dari isian form	Pendataan siswa dan sekolah	Dinas Pendidikan	Laporan profil lembaga pendidikan dari isian form	Dinas Pendidikan	Website	server pusat	Open Source	PHP	CI	Internal PD	Tidak diketahui	Sekretariat	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.20.008, DAL.20.02	

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.20.03	20	PPDB (https://ppdb.madiunkota.go.id/)	Pelayanan pendaftaran peserta didik baru jenjang SD dan SMP	Berfungsi untuk memudahkan dalam proses pendaftaran peserta didik baru jenjang SD dan SMP	Data calon peserta didik	Pendaftaran siswa <i>online</i>	Dinas Pendidikan	Laporan Data calon peserta didik	Dinas Pendidikan	Website	server pusat	Open Source	PHP	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak diketahui	Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.20.009, DAL.20.03
DAA.20.04	20	Website Dinas Pendidikan (https://disdik.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Dinas Pendidikan, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Pendidikan	Data informasi publik Dinas Pendidikan	Informasi Publik	Dinas Pendidikan	Informasi seputar Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Website	server pusat	Proprietary	Wordpress	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.20.010

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.20.05	20	DAPODIK (https://dapod.o.kemdikbud.go.id/)	Data Pokok Pendidikan, yang mana merupakan Sistem pendataan skala Nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama Pendidikan Nasional, yang merupakan bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional. Data terintegrasi dengan DAPODIK Pusat	Berfungsi untuk menyebarkan informasi dan data terkait Pendidikan di Indonesia	Data Pokok Pendidikan,	Data Pokok Pendidikan	Dinas Pendidikan	Laporan Data Pokok Pendidikan	Dinas Pendidikan	Website	server pusat	Proprietary	Pusat	Deployment (Live)	Pusat	Database Aplikasi Pusat	Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.20.001

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.20.06	20	AKM Kelas (https://pusmendik.kemdikbud.go.id/akmkelas/)	AKM Kelas digunakan sebagai alat bantu guru di kelas untuk mendiagnosa hasil belajar setiap individu murid. Tujuannya adalah untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid (teaching at the right level).	Tujuannya adalah untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid (teaching at the right level).	Data AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	AKM Online	Dinas Pendidikan	Laporan Data AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	Dinas Pendidikan	Website & Mobile	server pusat	Proprietary	Pusat	Deployment (Live)	Pusat	Database Aplikasi Pusat	Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.20.006

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.21.01	21.01	Website Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (https://disperda.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Website Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data informasi publik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Informasi Publik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Informasi seputar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Website	server pusat	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.21.008

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.22.01	2 2	SILAPLING (silapling.madiunkota.go.id)	Aplikasi Pelaporan terkait permasalahan lingkungan	Berfungsi sebagai sarana laporan jika ada permasalahan lingkungan	Data laporan lingkungan	Hsil laporan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Data laporan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Website	server pusat	Open source	PHP	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Bidang Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	RAA.01.01	Development	DAD.22.013, DAL.22.01

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.22.02	2 2	Website Dinas Lingkungan Hidup (https://dlh.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Dinas Lingkungan Hidup, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Data informasi publik Dinas Lingkungan Hidup	Informasi Publik	Dinas Lingkungan Hidup	Informasi seputar Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Website	server pusat	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.22.014

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.22.03	2 2	SITEBAS (Sistem Informasi Terpadu Bank Sampah)	SITEBAS (Sistem Informasi Terpadu Bank Sampah) ini dibuat untuk mempermudah dalam pengumpulan data serta memantau sejauh mana aktifitas dari Bank Sampah yang ada di Kota Madiun	Berfungsi untuk untuk mempermudah dalam pengumpulan data serta memantau sejauh mana aktifitas dari Bank Sampah yang ada di Kota Madiun	Data Volume Sampah (Timbulan Sampah, Volume Sampah, Bank Sampah)	Laporan data aktivitas bank sampah	Laporan Data Volume Sampah (Timbulan Sampah, Bank Sampah)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Website	server pusat	Open source	PHP	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	RAA.02.02	Development	DAD.22.009

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.23.01	2 3	SIAK TERPUSAT	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Untuk Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NIK dan biodata penduduk	Laporan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desktop	Komputer Internal PD	Proprietary	Dibangun dan dikembangkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	Dibangun dan dikembangkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	Pusat (Kemendagri)	Oracle	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	RAA.01.01	Server Proxy SIAK TERPUSAT	DAL.23.06, DAL.23.09, DAL.23.06, DAL.23.07, DAL.23.06, DAL.23.09, DAL.23.10, DAL.23.12, DAL.23.13, DAL.23.14, DAL.23.15, DAL.23.16, DAL.23.17

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.23.02	2 3	Aplikasi Digiform	untuk proses verifikasi berkas pengajuan permohonan	untuk proses verifikasi berkas pengajuan permohonan	data berkas persyaratan yang harus diverifikasi	Hasil verifikasi berkas persyaratan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil verifikasi berkas persyaratan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Website	Komputer Internal PD	Proprietary	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga	Postgre	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	RAA.02.02	Pihak Ketiga	DAL.23.06, DAL.23.09, DAL.23.10, DAL.23.12, DAL.23.13, DAL.23.14

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.23.03	2 3	SILANDEP (SISTEM INFORMASI LAYANAN DUKCAPIL DAN PA)	Aplikasi Sistem Informasi Layanan Dukcapil dan Pengadilan Agama untuk mengupdate status data penduduk yang melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama	Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan terkait data Perceraian di Pengadilan Agama	Data Kependudukan an terkait Perceraian (NIK, Putusan Pengadilan dll)	Penerbitan Dokumen Kependudukan terkait data Perceraian di Pengadilan Agama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan Data Kependudukan terkait Perceraian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Website	Komputer Internal PD	Open Source	PHP	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.23.010, DAL.23.11

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.23.04	2 3	Web Intranet Disdukcapil (capil.madiunkota.net)	Web yang dibangun untuk menyampaikan Informasi Data Agregat Perkembangan Kependudukan	Penyampaian Informasi Data Agregat Perkembangan Kependudukan	Data Agregat Perkembangan Kependudukan	Data Agregat Perkembangan Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan Data Agregat Perkembangan Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Website	server pusat	Proprietary	Dinas Komunikasi dan Informatika (Wordpress)	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.23.011

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.23.05	2 3	BCARD	aplikasi untuk mencetak KTP	untuk mencetak KTP	Data pembuatan e-KTP (KK, foto identitas, biodata kependudukan)	KTP Elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan pembuatan e-KTP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desktop	Komputer Internal PD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi Database Pusat	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.23.012, DAL.23.20
DAA.23.06	2 3	BENROLLER	aplikasi rekam ktp desktop	untuk perekaman KTP	Data perekaman e-KTP (KK, foto identitas, biodata kependudukan)	KTP Elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan perekaman e-KTP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desktop	server aplikasi	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi Database Pusat	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.23.013, DAL.23.21

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.23.07	2 3	Website Dispendukcapil (https://capi1.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi dan kegiatan Dispendukcapil	Website penyebaran informasi dan kegiatan Dispendukcapil	Data informasi publik Dispendukcapil (Profil, Produk hukum, laporan, kegiatan, berita, dan informasi lainnya)	Informasi Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Informasi seputar Dispendukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Website	Komputer Internal PD	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.23.014

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.23.08	2 3	Web Service Pemanfaatan Data DWH Terpusat	Web service yang akan diberikan akses kepada OPD yang bekerjasama dengan Dispendukcapil untuk pemanfaatan data	Berfungsi untuk menmberikan data Dispendukcapil kepada OPD yang telah bekerjasama	Data DWH Terpusat	Data DWH Terpusat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan Data Kerjasama (DWH Terpusat)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Website	Komputer Internal PD	Open Source	PHP	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.23.009, DAL.23.18

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.23.09	2 3	Klik WA	Memanfaatkan aplikasi Whatsapp sebagai media dalam berkomunikasi kepada publik terkait dokumen persyaratan yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh petugas Dispendukcapil menggunakan aplikasi Digiform	Berfungsi untuk memudahkan dalam proses tanya jawab dan kelengkapan dokumen sebelum proses verifikasi	Seluruh data sesuai dengan keperluan (KK.KTP,dan sebagainya)	Dokumen persyaratan sesuai dengan keperluan yang akan diverifikasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen persyaratan sesuai dengan keperluan yang akan diverifikasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mobile	Komputer Internal PD	Proprietary	Whatsapp	Whatsapp	Dinas Komunikasi dan Informatika	Whatsapp	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	RAA.01.01	Whatsapp	DAD.23.004, DAD.23.005, DAD.23.006, DAD.23.007, DAL.23.04 -DAL.23.17

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.24.01	24	E-Kir (http://ujikir.madiunkota.go.id/)	Pengujian Kendaraan Bermotor <i>online</i>	Pengujian Kendaraan Bermotor <i>online</i>	Data Kendaraan Wajib Uji, Data kendaraan lulus uji, Data kendaraan tidak taat uji	Hasil Uji KIR	Dinas Perhubungan	Laporan Data Kendaraan Wajib Uji	Dinas Perhubungan	Website	Server Kominfo	Open Source	PHP	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga	MySQL	BIDANG ANGKUTAN DARAT	RAA.01.01	Live	DAD.24.001, DAL.24.01
DAA.24.02	24	Website Dinas Perhubungan (https://dishub.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Dinas Perhubungan, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Perhubungan	Data informasi publik Dinas Perhubungan	Informasi Publik	Dinas Perhubungan	Informasi seputar Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Website	Server Kominfo	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.24.002

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.24.03	2 4	CSS Bank Jatim	Pelayanan pembayaran non tunai Pengujian Kendaraan Bermotor	Berfungsi untuk sinkronisasi laporan pendapatan antara SIM PKB dengan SIM Bank Jatim	Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Pembayaran Non Tunai Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Laporan Pembayaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Dinas Perhubungan	Desktop	server pusat	Proprietary	Bank Jatim	Bank Jatim	Bank Jatim	Tidak diketahui	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.24.004, DAL.24.03

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.24.04	24	e-TLE (https://etle.jatim.polri.go.id/)	ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah sistem yang akan mencatat, mendeteksi, dan memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera CCTV. Dalam pengertian lain, ETLE merupakan kamera pengintai yang akan merekam pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara	Berfungsi untuk mencatat, mendeteksi, dan memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera CCTV	Data tilang kendaraan bermotor	Tilang <i>online</i>	Dinas Perhubungan	Laporan Data tilang kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	Website	Server Pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat	Aplikasi Database Pusat	Bidang Lalu Lintas	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.24.003, DAL.24.02

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.25.01	25	Aplikasi Edu (edu.madiun.kota.go.id)	Edu merupakan platform digital learning milik Pemerintah Kota Madiun yang dikelola oleh Organisasi Pemerintah Daerah Kota Madiun.	Aplikasi bank data milik pemerintah kota madiun. digunakan untuk melihat materi hasil kajian dari kegiatan.	data paparan dan presentasi dari video conference/rapat/pelatihan	materi hasil kajian dari kegiatan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan data paparan dan presentasi dari video conference/rapat/pelatihan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Website	Server Pusat	Open Source	PHP	Laravel	Internal PD	Postgree	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	RAA.01.02	Deployment	DAD.25.006

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.25.02	2 5	agenda.madi unkota.go.id	Aplikasi untuk mendata agenda kegiatan dari walikota, wawali, sekda, OPD Kota Madiun	Berfungsi memberikan informasi terkait agenda kegiatan Walikota, wawali, sekda, dan OPD.	Data penjadwalan agenda (walikota, wawali, sekda, OPD)	Informasi agenda kegiatan pemerintah daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan Data penjadwalan agenda	Dinas Komunikasi dan Informatika	Website	Server Pusat	Open Source	PHP	Laravel	Dinas Komunikasi dan Informatika	Postgree	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.25.007

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pengembangan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.25.03	25	servicedesk (servicedesk dan klik wa.net)	perangkat lunak Manajemen Pengelolaan Layanan TI yang memungkinkan dengan cepat, tepat dan mendokumentasikan pelaksanaan proses pengelolaan TI yang efektif dan efisien, serta mendukung proses-proses dari ITIL. Dengan IT ServiceDesk, pengguna akan mendapatkan banyak keuntungan yang terbaik. Dan sebagai bagian dari organisasi pengguna akan lebih memahami alur proses Manajemen Pengelolaan Layanan TI.	agar dengan cepat, efisien dan terdokumentasikan proses lainnya dalam mengatasi insiden TI yang terjadi pada pengguna akhir, dimulai dari adanya laporan gangguan dari pengguna kepada service desk melalui email, telepon, fax, sms atau datang langsung, selanjutnya service desk akan mencatat dan menyelesaikannya, jika service desk tidak mampu menyelesaikannya maka service desk akan mendelegasikan kepada teknisi ahli untuk dapat penanganan dan penyelesaiannya	data pengirim/penerima email, data insiden	Berita acara laporan insiden dan penanganan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan Data pengirim/penerima email	Dinas Komunikasi dan Informatika	Website	Server Pusat	open source	PHP	CI	Pihak Ketiga	Postgree	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	RAA.01.02	deployment	DAD.25.008, DAL.25.04

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.25.04	25	e-surat	aplikasi persuratan yang terintegrasi dengan Esign dari BSSN agar surat yang dibuat dapat tertandatanganinya secara digital dan resmi diakui negara.	aplikasi persuratan dengan tanda tangan elektronik	Data informasi surat (NIP, Nama, jabatan)	Disposisi surat <i>online</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Informasi seputar Data informasi surat (NIP, Nama, jabatan)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Website	server aplikasi	open source	php	CI	Pihak Ketiga	Postgree	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	RAA.01.02	deployment	DAD.25.009

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.25.05	25	Syslog	aplikasi yang digunakan untuk mengetahui server yang sedang ada gangguan dengan mengirimkan notifikasi melalui bot telegram	memberikan notifikasi server yang sedang ada gangguan melalui bot telegram.	alamat server yang akan dipantau melalui isian form	Notifikasi jika ada server yang bermasalah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan Data isian form	Dinas Komunikasi dan Informatika	Website	Server Kominfo	Open Source	PHP	Laravel	Internal PD	Postgree	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	RAA.02.02	Deployment	DAD.25.010

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.25.06	25	LAPOR SP4N (https://kota.madiun.lapor.go.id/)	SP4N LAPOR! adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N LAPOR! akan menjadi aplikasi pengelola pengaduan di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. R	Berfungsi dalam menyampaikan aduan pelayanan publik	Data pelaporan	Laporan aduan pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan aduan pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Website	Komputer Internal PD	Open Source	PHP	Laravel	Internal PD	Postgrec	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	RAA.01.01	Deployment	DAD.25.011, DAL.25.07

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.25.07	2 5	Madiun Dashboard (https://dashboard.madiunkota.go.id/)	Aplikasi yang menampilkan Dashboard data dari seluruh OPD	Berfungsi sebagai informasi publik dari data yang diolah setiap OPD	Data publik dari tiap OPD	Dashboard data publik setiap OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dashboard data publik setiap OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Website	Server Kominfo	Open Source	PHP	PHP Native	Dinas Komunikasi dan Informatika	Postgre	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.25.012, DAL.25.08

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.25.08	25	Website Dinas Komunikasi dan Informatika (https://Dinas Komunikasi dan Informatika.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika	Data informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Informasi seputar Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Website	server aplikasi	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.25.013

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.25.09	2 5	PPID https://ppid.madiunkota.go.id/	Aplikasi yang menampilkan informasi tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Berfungsi memberikan informasi tentang tugas dan tanggung jawab PPID di Lingkungan Pemerintahan Kota Madiun	Data publik dari tiap OPD	Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan Data publik dari tiap OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Website	Server Kominfo	Open Source	PHP	PHP Wordpress	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.25.014, DAL.25.03

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.25.10	25	Penyimpanan Arsip Bersama	Aplikasi berbasis cloud yang digunakan untuk penyimpanan arsip masing-masing OPD di Kota Madiun	Berfungsi untuk penyimpanan arsip	Data arsip OPD	Penyimpanan arsip digital	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyimpanan arsip digital	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cloud	server pusat	Proprietary	Cloud	Cloud	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cloud	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.25.016

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.25.11	25	TTE (Tanda Tangan Elektronik)	Aplikasi Tanda Tangan Online untuk memudahkan pelayanan administrasi pemerintah Kota Madiun	Berfungsi untuk memudahkan proses tanda tangan secara online	Data tanda tangan dan pemiliknya, syarat dan ketentuan permohonan ttd elektronik	Surat Digital (Paperless)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat Digital (Paperless)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Website	Server internal OPD	Open Source	PHP	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.25.015

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pengembangan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.26.01	26	MASS Madiun (https://perizinan.madiunkota.go.id/)	MASS (Madiunkota Single Submission) adalah sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik	Memberi kemudahan proses perizinan non berusaha	Data perizinan	Proses perizinan <i>online</i>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Data perizinan selain pusat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Website & Mobile	Komputer Internal PD	Proprietary	PHP	ReactJS	Pihak Ketiga	MYSQL	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	RAA.01.01	live	DAL.15.08, DAL.15.09, DAL.15.10, DAL.15.11, DAL.15.12, DAL.16.07

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.26.02	26	OSS (https://oss.go.id/)	Aplikasi Izin Usaha milik Pusat	Memberi kemudahan proses perizinan usaha	Data perizinan	Proses perisinan <i>online</i>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Data perizinan pusat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Website	Komputer Internal PD	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Kementerian Investasi / BKPM)	Aplikasi Database Pusat	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.15.009, DAD.26.006, DAL.16.02, DAL.26.01

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.26.03	26	WEBGIS DPMPTSP (https://perizinan.madiunkota.go.id/webgis/)	Aplikasi berbasis Web GIS yang memberikan informasi terkait peta persebaran perizinan terbit per lokasi	memetakan perizinan yang sudah terbit perlokasi	Data peta sebaran perizinan	peta sebaran perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Data peta sebaran investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Website	server pusat	Open Source	PHP	CI	Pihak Ketiga	Tidak diketahui	Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	RAA.01.01	Live	DAD.26.003, DAL.26.03

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.26.04	26	PETA SEBARAN INVESTASI (https://investasi.madiunkota.go.id/)	memudahkan investor untuk berinvestasi di Kota Madiun	memudahkan investor untuk berinvestasi di Kota Madiun	Data peta sebaran investasi	peta sebaran investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Data peta sebaran investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Website	Server Kominfo	Open Source	PHP	CI	Pihak Ketiga	Tidak diketahui	Koordinator Penanaman Modal	RAA.01.01	Live	DAD.26.004, DAL.26.02

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.26.05	26	Website DPMPTSP (https://perizinan.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data informasi publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Informasi Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Informasi seputar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Website	Komputer Internal PD	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.26.007

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.27.01	27	Website Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga (https://disbudparpora.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga , yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Data informasi publik Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Informasi Publik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Informasi seputar Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Website	Server Kominfo	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.27.020

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.28.01	28	iMadiun	<p>Perpustakaan Digital iMadiun. Ada ribuan ebook dalam aplikasi ini, mudah diakses dan sangat praktis bagi para pemustaka dan peminat buku.</p> <p>Ada banyak kelebihan dari Perpustakaan Digital seperti ini, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pemustaka/pengunjung dapat memanfaatkan layanan ini kapanpun dimanapun melalui akses internet maupun komputer. -Penyimpanan koleksi lebih mudah dan aman -Buku-buku koleksi lebih mudah mengakses. -Peminjam dan pengembalian buku lebih sistematis dan tidak perlu menunggu lama untuk proses panjang. -Pustakawan dapat dengan mudah memonitor ketersediaan buku serta merencanakan penambahan koleksi buku baru. -Aktivitas pemustaka/pengunjung dapat terekam dengan baik dan tersusun dalam bentuk data statistic, yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi pengambilan keputusan di kemudian hari. 	Berfungsi untuk memudahkan proses simpan dan pinjam buku dan pengelolaan perpustakaan Kota Madiun	Data Pengunjung Perpustakaan, Data Jumlah Bahan Pustaka, Data Jumlah Judul Bahan Pustaka, Data Bahan Pustaka Yang Dipinjam Dan Dikembalikan,	Perpustakaan online	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Laporan Data terkait perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Mobile	Server Kominfo	Open Source	Java	Pihak Ketiga	Pihak Ketiga	Tidak diketahui	Bidang perpustakaan	RAA.02.02	Live	DAD.28.001, DAL.28.02

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.28.02	28	SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang meliputi pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antar-instansi pemerintah, pemeliharaan arsip untuk menjaganya agar tetap autentik, utuh dan terpercaya, penggunaan arsip oleh yang berhak, serta pemindahan dan pemusnahan arsip.	Berfungsi untuk mengelola arsip	Data arsip	Penyimpanan arsip surat masuk-keluar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Laporan Data arsip pusat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Website	Server pusat	Proprietary	Pusat	Pusat	Pusat (Arsip Nasional Republik Indonesia / ANRI)	Aplikasi Database Pusat	Bidang Kearsipan	RAA.01.02	Deployment	DAD.28.002

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.28.03	28	INLIS.LITE (Inlislite.madiunkota.go.id)	Digunakan untuk pelayanan Perpustakaan	Berfungsi untuk melayani pemustaka antara lain layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka, pembuatan kartu anggota. Berfungsi untuk mengolah bahan pustaka, menginformasikan statistik perpustakaan.	Pembuatan Kartu anggota :NIK, Pendidikan, Gender, Alamat. Layanan Pengembalian dan Peminjaman Bahan Pustaka :nomor kartu anggota,Pengolahan bahan pustaka : ISBN, dan nomer induk bahan pustaka.	Bahan Pustaka yang dipinjam dan dikembalikan, Bahan Pustaka yang sudah terolah, dan Kartu Anggota Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Laporan Pelayanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Website	Komputer Internal PD	Open Source	PHP	CI	Pusat (PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA)	MySQL	Bidang Perpustakaan	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.28.005, DAL.28.01

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pengembangan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.28.04	28	Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (https://perpustakaan.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data informasi publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Informasi Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Informasi seputar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Website	Computer Internal PD	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.28.004

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.28.05	28	SIKD (https://sikd.madiunkota.go.id/)	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Kota Madiun i yang dibuat untuk pengelolaan pengarsipan surat masuk-keluar	Berfungsi untuk memudahkan dalam pengelolaan pengarsipan surat	Data arsip	Penyimpanan arsip surat masuk keluar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Laporan Data arsip daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Website	Komputer Internal PD	Open Source	PHP	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Bidang Kearsipan	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.28.003, DAL.1.1.24, DAL.1.1.25, DAL.28.03

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.29.01	29	E-Retribusi	Aplikasi E-Retribusi ini dibuat untuk mendata pedagang, dan mengganti proses pelayanan pembayaran yang sebelumnya pembayaran manual menjadi cashless	Berfungsi memudahkan pembayaran retribusi	Data pedagang dan data pembayaran retribusi	Pembayaran retribusi <i>online</i>	Dinas Perdagangan	Laporan Data pedagang dan data pembayaran retribusi	Dinas Perdagangan	Mobile	Komputer Internal PD	Open Source	PHP	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.29.006, DAL.29.01
DAA.29.02	29	Bumu	Bumu adalah sebuah aplikasi pencatatan buku tamu	sebagai log book pencatatan buku tamu	Data tamu (Nama, No Handpohone, alamat, keperluan)	Pendataan tamu secara <i>online</i>	Dinas Perdagangan	Laporan Data tamu	Dinas Perdagangan	Website	Server Kominfo	open source	PHP	CI	Internal PD	MySQL	Sekretariat	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.29.007

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.29.03	29	Website Dinas Perdagangan (https://perdagangan.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Dinas Perdagangan, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Perdagangan	Data informasi publik Dinas Perdagangan	Informasi Publik	Dinas Perdagangan	Informasi seputar Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	Website	Komputer Internal PD	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.29.008

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.30.01	30	Website Satpol PP dan Damkar (https://satpol.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Data informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Informasi Publik	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Informasi seputar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Website	Komputer Internal PD	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.30.008, DAL.30.01

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.30.02	30	BBM Satpol PP	Pengelolaan data pengisian bahan Bakar yang dipergunakan sebagai penunjang kegiatan	Membantu pekerjaan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran	Data pengisian bahan bakar (Nomor Rangka Mobil, Nomor database, Tanggal, angka satuan Liter, dan Nama Petugas/Pemohon isi BBM)	Pendataan pengisian bahan bakar untuk penunjang kegiatan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Laporan Data pengisian bahan bakar	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Website	Komputer Internal PD	Open Source	PHP	CI	Internal PD	MySQL	Sekretariat	RAA.02.02	Development	DAD.30.009

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pengembangan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.30.04	30	SIM Satpol PP Kota Madiun (sim.polppm.adiunkota.id)	penyimpanan data internal	penyimpanan data internal	Rekapan Data Pemadaman Dan Penyelamatan, (NIK,dsb)	Penyimpanan data internal	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Laporan Rekapan Data Pemadaman Dan Penyelamatan,	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Website	Komputer Internal PD	Open Source	PHP	CI	internal PD	MySQL	bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan	RAA.02.02	Development	DAD.30.007
DAA.30.03	30	aplikasi Gakda	untuk peyimpanan seluruh perda	untuk peyimpanan seluruh perda	kumpulan dokuman perda	Repository peraturan daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Laporan Kumpulan Perda	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Mobile	Komputer Internal PD	Open Source	PHP	ci	internal PD	google drive	bidang penegakkan peraturan perundang - undangan	RAA.02.02	evelopmen	DAD.30.003, DAL.30.02

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.30.05	30	Lek Pakar	Aplikasi yang memuat informasi publik terkait seluruh layanan pemadam kebakaran dan permimtaan pelatihan edukasi	informasi publik terkait seluruh layanan pemadam kebakaran dan permimtaan pelatihan edukasi	data terkait pelayanan kebakaran	Informasi kejadian kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Laporan data terkait pelayanan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Website	Komputer Internal PD	Open Source	PHP	CI	Internal PD		Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan	RAA.01.01	Development	DAD.30.010, DAL.30.03

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.31.01	3 1	E-SITI	Aplikasi pengajuan cuti elektronik bagi pegawai RSUD Kota Madiun	Memudahkan pegawai melakukan pengajuan cuti dan atasan melakukan persetujuan cuti, dan memudahkan staff kepegawaian dalam melakukan rekap cuti	Data Pegawai dan Cuti	Surat Cuti, Form Cuti, Rekap Cuti	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Laporan Data Pegawai Dan Cuti	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Website	Komputer Internal PD	open source	PHP, HTML, JS	CI	Internal PD	MySQL	Sekretariat	RAA.01.02	Deployment	DAD.31.001, DAL.31.23

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.31.02	31	SIM-RS	SIM-RS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.	Untuk memfasilitasi pelayanan dalam Rumah Sakit.	-NIK dari database dispendukcapil, -data identitas pasien seperti nama, nomor bpjs, alamat, nomor telepon dari isian form, - nomor SEP, nomonr rujukan dan data BPJS lainnya dari V-CLAIM BPJS	Sistem informasi yang saling terintegrasi	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Laporan Data Pasien	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Website	Server Kominfo	Open Source	PHP	Native	Pihak Ketiga	MySQL	Sekretariat	RAA.02.02	Deployment (Live)	DAD.31.002, DAL.31.02 - DAL.31.22

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pengembangan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.31.03	3 1	SISMADAK	Aplikasi SISMADAK atau Sistem Manajemen Dokumen Akreditasi merupakan aplikasi alat bantu yang diperuntukkan bagi Rumah Sakit yang mengikuti program Akreditasi yang diselenggarakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).	Sebagai persiapan akreditasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mencari kembali dokumen bukti yang berhubungan dengan akreditasi.	Data penilaian tenaga kesehatan dari berbagai indikator dari isian form	Hasil program akreditasi	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Laporan Data penilaian tenaga kesehatan dari berbagai indikator dari isian form	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Website	Komputer Internal PD	Open Source	PHP	Native	Pihak Ketiga	Aplikasi Database Pusat	Bidang Pelayanan	RAA.01.02	Deployment (Live)	DAD.31.003

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.31.04	3 1	Pendekar Hati	Pelayanan Deteksi Dini Kehamilan Resiko Tinggi (Pendekar Hati) merupakan aplikasi pemberitahuan berupa SMS agar Ibu Hamil tidak Terlambat untuk Kontrol Kehamilannya.	Untuk mengingatkan Ibu Hamil tidak Terlambat untuk Kontrol Kehamilannya dan mendeteksi ibu hamil dengan resiko tinggi.	Nomor Rekam Medis, Nama, Jadwal Kontrol dan Nomor HP Pasien dari database SIM-RS Kota Madiun	Reminder untuk ibu hamil agar memeriksakan kehamilan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Laporan Data Rekam Medis	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Website	Computer Internal PD	Open Source	PHP	Native	Internal PD	Tidak diketahui	Bidang Pelayanan	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.31.004

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.31.05	31	INACBGS	INA-CBG merupakan sebuah singkatan dari Indonesia Case Base Groups yaitu sebuah aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim pada pemerintah	Untuk mengatasi masalah pembiayaan rumah sakit	Nominal tarif pembayaran hasil export aplikasi SIM-RS RSUD Kota Madiun	Klaim pembiayaan rumah sakit kepada pemerintag	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	D.E.31.005 Laporan Nominal tarif pembayaran hasil export aplikasi SIM-RS RSUD Kota Madiun	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Website	Komputer Internal PD	Open Source	PHP	Native	Pihak Ketiga	Tidak diketahui	Bidang Keuangan	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.31.005

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembang	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.31.06	3 1	SI-JASPEL	Aplikasi keuangan untuk menghitung dan melakukan pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit secara tersistem sehingga diharapkan proses pembagian Jasa Pelayanan dapat meningkatkan waktu, lebih akurat dan efisien.	Aplikasi untuk menghitung dan melakukan pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit secara tersistem.	Nominal Jasa Medis dari database SIM-RS RSUD Kota Madiun, Data Pegawai dari database E-SITI	Pengelolaan jasa pelayanan rumah sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Laporan Nominal Jasa Medis dari database SIM-RS RSUD Kota Madiun	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Website	Server Kominfo	Open Source	PHP	Laravel	Internal PD	Tidak diketahui	Bidang Keuangan	RAA.01.02	Development	DAD.31.006

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.31.07	31	Website RSUD Kota Madiun (http://rsud.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait RSUD Kota Madiun, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, cek ketersediaan kamar tidur dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup RSUD Kota Madiun	Data profil, layanan, berita, data kamar tidur, dsb	Informasi Publik	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Laporan Data profil	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Website	Server Kominfo	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.31.007, DAL.31.01
DAA.32.01	32	SICAKRA	SICAKRA digunakan untuk merancang rencana kerja kegiatan guna realisasi pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien sesuai target.	Merancang rencana kerja kegiatan kecamatan dan kelurahan	Data Rencana Kegiatan dan Data Pelaporan Realisasi Kegiatan	Laporan Rencana Kegiatan	Kecamatan Manguharjo	Laporan Data Rencana Kegiatan	Kecamatan Manguharjo	Website	Server internal OPD	Open Source	PHP	Laravel	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat, Subbagian Umum dan Keuangan	RAA.01.02	Development	DAD.32.002, DAL.32.01

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.32.02	32	Website Kecamatan Manguharjo (https://kecamatan-manguharjo.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Kecamatan Manguharjo, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di Kecamatan Kartoharjo	Data informasi publik Kecamatan Manguharjo	Informasi Publik	Kecamatan Manguharjo	Informasi seputar Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	Website	server aplikasi	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.32.003

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.33.01	33	E-Surprais (e-surprais.epizy)	E-Surprais (Elektronik Surat Penyataan Ahli Waris) merupakan aplikasi Kecamatan Kartoharjo untuk mempermudah dalam pengurusan surat pernyataan ahli waris	Untuk mengurus dan mempermudah dalam koreksi berkas surat pernyataan ahli waris	Surat pernyataan ahli waris, KK, KTP, buku nikah, akta kematian, akta kelahiran dan berkas pendukung lainnya	Surat Ahli Waris	Kecamatan Kartoharjo	Laporan Surat pernyataan ahli waris	Kecamatan Kartoharjo	Website	Server Kominfo	Open Source	Php	Codeigniter (CI)	Internal PD	MySQL	Bidang Pelayanan Publik - Seksi Pemerintahan	RAA.02.02	Development	DAD.33.002, DAL.33.01

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.33.02	33	Website Kecamatan Kartoharjo (https://kecamatan-kartoharjo.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Kecamatan Kartoharjo, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di Kecamatan Kartoharjo	Data informasi publik Kecamatan Kartoharjo	Informasi Publik	Kecamatan Kartoharjo	Informasi seputar Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Kartoharjo	Website	Server Kominfo	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.33.003
DAA.33.03	33	SKM-Karto	Aplikasi SKM-Karto merupakan aplikasi survei kepuasan masyarakat pengunjung Kecamatan Kartoharjo	Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengunjung Kecamatan Kartoharjo	Parameter kepuasan	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kartoharjo	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kartoharjo	Website	Whatsapp dan Server Kominfo	Open Source	Php	Laravel	Internal PD	Tidak diketahui	Bidang Layanan Publik - Seksi Pemerintahan	RAA.01.01	Development	DAD.33.004, DAL.33.02

ID	Kode OPD	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Inputan Data	Luaran	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman yang digunakan	Framework	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Area Aplikasi	Nama Server Aplikasi	ID Metadata terkait
DAA.34.01	34	Website Puskesmas Manguharjo (https://puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Puskesmas Manguharjo, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Puskesmas Manguharjo	Data informasi publik Puskesmas Manguharjo	Informasi Publik	Puskesmas Manguharjo	Informasi seputar Puskesmas Manguharjo	Puskesmas Manguharjo	Website	Whatsapp dan Server Kominfo	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.34.01
DAA.35.01	35	Website Puskesmas Sukosari (https://puskesmasukosari.madiunkota.go.id/)	Website penyebaran informasi terkait Puskesmas Sukosari, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Puskesmas Sukosari	Data informasi publik Puskesmas Sukosari	Informasi Publik	Puskesmas Sukosari	Informasi seputar Puskesmas Sukosari	Puskesmas Sukosari	Website	Whatsapp dan Server Kominfo	Open Source	Wordpress	CI	Dinas Komunikasi dan Informatika	MySQL	Sekretariat	RAA.01.01	Deployment (Live)	DAD.35.001

Lampiran 7.5 Sistem Penghubung Layanan

Kode PD	PD	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem	Jenis Sistem Penghubung	Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Aplikasi yang Dihubungkan
1	Bagian Organisasi	website madiunkota.go.id	website resmi Kota Madiun	online	Milik Pemerintah Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika	madiunkota.go.id	Simda BMD, E-SAKIP, Si Muna
2	Bagian Hukum	website madiunkota.go.id	website resmi Kota Madiun	online	Milik Pemerintah Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika	madiunkota.go.id	JDIH
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	M-SKP	Merupakan Sistem yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sasarkan kinerja pegawai yang berstruktur dan lengkap	Server	Diskominfo Kota Madiun	Diskominfo Kota Madiun	Server Madiun Kota	E-Kinerja, SIKPD

Kode PD	PD	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem	Jenis Sistem Penghubung	Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Aplikasi yang Dihubungkan
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	E-Surat	Merupakan Sistem yang berguna untuk menangani surat menyurat PD secara terstruktur	Server	Diskominfo Kota Madiun	Diskominfo Kota Madiun	Server Madiun Kota	SIKD,E-Ruang rapat
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	API Request	Mengambil data pegawai, program, kegiatan, kepegawaian, kinerja	API	SENDIRI	BKPSDM	KOMINFO	MSKP

Kode PD	PD	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem	Jenis Sistem Penghubung	Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Aplikasi yang Dihubungkan
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sistem Pengaduan fia WA dan google form	Penguna layanan bisa sewaktu waktu menghubungi nomor WA resmi atau google form yang telah di sediakan dan dapat di akses di website resmi BKAD kota Madiun , atau juga bisa lewat medsos resmi	dua arah bisa tanya jawab	milik resmi BKAD	BKAD Kota Madiun	wifi intranet Pemkot Madiun	google form, wa, medsos, website
16	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Web API	Menghubungkan database dinkes ke database lainnya dengan scurity yang diizinkan	Web Service	Kedua Belah Pihak	Tidak	Jaringan Publik dan Lokal	Database SIST-BrO dan NIK Capil, Database SIST-Bro dan Layanan BPJS

Kode PD	PD	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem	Jenis Sistem Penghubung	Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Aplikasi yang Dihubungkan
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	website madiunkota.go.id	website resmi Kota Madiun	online	Milik Pemerintah Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika	madiunkota.go.id	website Disperkim
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	puskesmas	https://puskesmas.madiunkota.go.id adalah layanan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai acuan semua pihak baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota,	online	Kemensos	dinsos PP dan PA	madiunkota.go.id	https://puskesmas.madiunkota.go.id .

Kode PD	PD	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem	Jenis Sistem Penghubung	Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Aplikasi yang Dihubungkan
20	Dinas Pendidikan	Website dan Informasi Resmi Pemerintah Kota Madiun	Situs resmi Pemerintah Kota Madiun	Online	Milik Pemerintah Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika	madiunkota.go.id	PPID, Pengaduan Layanan, LAPOR!, SABERPUNGLI, LPSE, elhkpn, SiRUP, SIOLA,
23	Dinas Lingkungan Hidup	Si tebas	pelayanan aplikasi data dari bank sampah	aplikasi	organisasi	DLH Kota Madiun	-	Si TEBAS
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Web Service Pemanfaatan Data DWH Terpusat	Web Service	Web Service	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	VPN DWH Terpusat	Web Service yang dikembangkan Diskominfo selaku PD yang bekerjasama dengan PKS
25	Dinas Perhubungan	KIR AE	Pelayanan pendaftaran online Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pembayaran Non Tunai	API	Bank Jatim	Dinas Perhubungan	VPN	Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Sistem Pembayaran Non Tunai Bank Jatim

Kode PD	PD	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem	Jenis Sistem Penghubung	Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Aplikasi yang Dihubungkan
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	negara API	sebagai sarana integrasi aplikasi di Pemerintah Kota Madiun	API	Dinas Komunikasi dan Informatika kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika kota Madiun	-	SKP, esakip, emonev, simonev, e-KAK
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	simantra	sistem informasi pemanfaatan pertukaran data	layanan data	kementerian kominfo	kementerian kominfo	tidak ada	tidak ada

Kode PD	PD	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem	Jenis Sistem Penghubung	Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Aplikasi yang Dihubungkan
30	Dinas Perdagangan	E-Retribusi API VA	Aplikasi E-Retribusi ini dibuat untuk mendata pedagang, dan mengganti proses pelayanan pembayaran yang sebelumnya pembayaran manual menjadi cashless	API VA	Dinkominfo	Pemerintah Kota Madiun	-	E-Retribusi dengan sistem Bank Jatim

Lampiran 7.6 Kondisi Eksisting Perangkat Periferal

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
2	Bagian Hukum	I.PKP.001	LCD	Digunakan untuk rapat	Hardware	1	Bagian Hukum	Bagian Hukum
		I.PKP.002	Web Cam	Digunakan untuk meeting	Hardware	1	Bagian Hukum	Bagian Hukum
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	I.PKP.003	Scanner perangkat	Scanner	Plustek	3	pada PD	Bagian pengolahan barang dan jasa
		I.PKP.004	Perangkat presentasi	Proyektor	Epson	2	Internal PD	Bagian pengelolaan barang dan jasa
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	I.PKP.005	Scanner	Scanner	Input	1	OPD	Internal OPD
		I.PKP.006	Handy Talky	Handy Talky	Input dan Output	1	OPD	Internal OPD
		I.PKP.007	Layar film/proyektor	Layar film/proyektor	Input	1	OPD	Internal OPD
		I.PKP.008	Handy cam	Handy cam	Output	1	OPD	Internal OPD
		I.PKP.009	Televisi	Televisi	Output	1	OPD	Internal OPD
5	Bagian Umum	I.PKP.010	Layar Film/Projector	Layar Film/Projector	Layar Film/Projector	12	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
		I.PKP.011	CAMERA FILM	Nikon / D3200	CAMERA FILM	4	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
6	Bagian Pemerintahan	I.PKP.012	Scanner	Scanner	Scanner	1	Internal OPD	Bagian administrasi Pemerintahan umum
		I.PKP.013	Proyektor	Proyektor	Proyektor	1	Ruang rapat	Internal OPD
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	I.PKP.014	Scanner	Fujitsu Image	Hardware	1	BPBD	BPBD
		I.PKP.015	LCD	Panasonic	Hardware	1	BPBD	BPBD
		I.PKP.016	Handy Cam	Handy Cam	Hardware	1	BPBD	BPBD
		I.PKP.017	Camera	Camera	Hardware	5	BPBD	BPBD
		I.PKP.018	Printer	Canon / Pixma MX-366	Hardware	5	BPBD	BPBD
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	I.PKP.019	Camera	Canon Digital	Camera	6	BAPPEDA	BAPPEDA
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	I.PKP.020	Proyektor	Untuk rapat	Hardware	2	BKAD	BKAD
		I.PKP.021	LCD	Untuk rapat dan monitoring	Hardware	8	BKAD	BKAD
10	Badan Pendapatan							

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
	Daerah							
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	I.PKP.022	scanner	scanner	Input	-	Internal OPD	OPD
		I.PKP.023	projrctor	projrctor	Output	-	Internal OPD	OPD
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Tidak ada					
13	Inspektorat Daerah		-	-	-	-	-	-
14	Sekretariat DPRD	I.PKP.024	SCANNER	EPSON,	PERALATAN PERKANTORAN	4	INTERNAL OPD	INTERNAL OPD
		I.PKP.025	PROYEKTOR	LG, SAMSUNG	ALAT PERKANTORAN	33	INTERNAL OPD	INTERNAL OPD
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	I.PKP.026	Speaker aktif	berupa sound kecil untuk penguat suara, dimanfaatkan saat rapat kecil	speaker aktif	8	beberapa ruang kasie dan staf	masing-masing personal

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
		I.PKP.027	Speaker Aktif	Sound pengeras untuk acara lapangan atau rapat diruangan lebar	Sound sistem	3 Unit	Gudang Bagian Umum, Mobil dan Ruangan Rapat	Bagian pemeliharaan asset
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	I.PKP.028	LCD	Digunakan untuk rapat	Hardware	7	DPUPR	DPUPR
		I.PKP.029	Webcam	Digunakan untuk rapat <i>online</i>	Hardware	2	DPUPR	DPUPR
		I.PKP.030	Proyektor	Digunakan untuk presentasi	Hardware	5 kondisi baik dan 2 rusak	DPUPR	DPUPR
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	I.PKP.031	Drone	Kamera Drone Untuk Kegiatan <i>Outdoor</i>	Perangkat Keras	2	Mobile	Internal OPD
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	I.PKP.032	monitor / proyektor	monitor layar ukuran 80 inci	epson	2	di ruang rapat	Dinas Sosial PP dan PA

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	I.PKP.033	LCD PROJECTOR	Panasonic / PT - VX61; Epson	LCD PROJECTOR	5	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		I.PKP.034	Camera Digital	NIKON L830; Logitech / Video Conferencing System	Camera Digital	8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
20	Dinas Pendidikan	I.PKP.035	LCD	COOCAA	Hardware	4	Ruang rapat	Internal OPD
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	I.PKP.036	Scanner	Document Scanner	epson	1	Sekretariat	Sekretariat
		I.PKP.037	LCD Proyektor	Screen Proyektor	Epson	1	Sekretariat	Sekretariat
22	Dinas Lingkungan Hidup	I.PKP.038	LCD	Epson	Perangkatt keras	2	Di ruang pertemuan DLH	DLH
		I.PKP.039	TV	Polytron,Samsu ng dan LG	Perangkat keras	5	Ruang pelayanan, Ruang rapat ,ruang jalan pandan, umum dan keuangan Ruang kepala dinas	DLH

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
		I.PKP.040	Kamera digital	Canon	Perangkat keras	3	Mobile	DLH
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	I.PKP.041	Printer Fargo	Printer untuk pencetakan KTP-El	HDP 5000	4	Ruang Operator dan Mobil Pelayanan Keliling	Disdukcapil
		I.PKP.042	Printer Evolis	Printer Untuk Pencetakan KIA	Primacy/308	3 (1 baik dan 2 rusak)	Ruang Operator	Disdukcapil
		I.PKP.043	Card Reader	Pembaca dan Penulis Chip KTp-el	Abaka H+ dan Abaka D+	3	Ruang Pelayanan dan Ruang Operator	Disdukcapil
		I.PKP.044	Mesin Fotocopy	Perangkat Cetak/Penggunaan dan Scanner	Ricoh/MP250 1 Series	1	Ruang Fotocopy	Disdukcapil
		I.PKP.045	Scanner	Perangkat Scanning	Brother/ADS-2700W, Canon/P-21511, Fujitsu/ScanSnap SV600	3	Ruang Sekretariat	Disdukcapil
		I.PKP.046	Printer Epson	Perangkat Cetak dan	L3110	2	Ruang Sekretariat dan	Disdukcapil

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
				Scaner			Ruang Kepala Seksi	
		I.PKP.047	Printer Brother	Perangkat Cetak dan Scaner	DCP T300	2	Ruang Pelayanan dan Ruang Sekretariat	Disdukcapil
		I.PKP.048	Printer Epson	Perangkat Cetak dan Scanner	L360	1	Ruang Sekretariat	Disdukcapil
		I.PKP.049	Printer Epson L1300	Perangkat Cetak	L1300	2	1 Ruang Pelayanan (1 disimpan)	Disdukcapil
		I.PKP.050	Printer Canon	Printer Cetak dokumen	IP2770	1	Ruang Kepala Seksi	Disdukcapil
		I.PKP.051	Printer Epson	Printer Cetak dokumen	L120	10	Ruang Operator, Mobil Pelayanan Keliling, Ruang Pelayanan, Ruang Sekretariat, Ruang Kabid, Kepala Seksi dan Mall	Disdukcapil

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
							Pelayanan	
		I.PKP.052	Printer Epson	Printer Cetak dokumen	L110	2	Ruang Pelayanan/Ruang Sekretariat	Disdukcapil
		I.PKP.053	Printer Brother	Printer Cetak dokumen	DCP J105	1	Ruang Kepala Seksi	Disdukcapil
		I.PKP.054	Printer Epson	Printer Cetak dokumen	L310	8	Ruang Operator, Mobil Pelayanan Keliling, Ruang Pelayanan, Ruang Sekretariat, Ruang Kabid, Kepala Seksi dan Mall Pelayanan	Disdukcapil
		I.PKP.055	Printer Brother	Printer Cetak dokumen	DCP T310	1	Ruang Sekretariat	Disdukcapil

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
		I.PKP.056	Printer HP	Printer Cetak dokumen	Laser Jet 107a	7	Ruang Pelayanan/Operator/Ruang Sekretariat	Disdukcapil
		I.PKP.057	Mesin Fotocopy	Perangkat Cetak/Pengandaan dan Scanner	Fujixerox	1	Ruang Sekretariat	Disdukcapil
		I.PKP.058	Soundssystem Polytron	Alat penguat suara	PTS 2525	1	Ruang Sekretariat	Disdukcapil
		I.PKP.059	Soundssystem Behringer	Alat penguat suara	-	1	Ruang Sekretariat	Disdukcapil
		I.PKP.060	Overhead Projector	LCD Proyektor	Benq Focus SP 0	1	Ruang Aula	Disdukcapil
		I.PKP.061	Overhead Projector	LCD Proyektor	Benq / MX704	1	Ruang Aula	Disdukcapil
		I.PKP.062	Scanner Aibi	Iris Scanner KTP-el	-	1	Ruang Pelayanan dan Mobil Pelayanan Keliling	Disdukcapil
		I.PKP.063	Scanner Cmitech	Iris Scanner KTP-el	BMT20	1	Ruang Pelayanan dan Mobil Pelayanan	Disdukcapil

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
							Keliling	
		I.PKP.064	Scanner Biomorf	Fingerprint scanner rekam KTP-el	B-ScanTenprint 1051	2	Ruang Pelayanan dan Mobil Pelayanan Keliling	Disdukcapil
		I.PKP.065	Scanner B-scan	Fingerprint scanner rekam KTP-el	NScan-T /enbioscan-T	1	Ruang Pelayanan dan Mobil Pelayanan Keliling	Disdukcapil
24	Dinas Perhubungan		-	-	-	-	-	-
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	I.PKP.066	Server	Server VM	HPE Proliant DL380 Gen9	2 Unit	Ruang Server	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
		I.PKP.067	Server	Server VM	HPE Proliant DL380 Gen10	3 Unit	Ruang Server	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
		I.PKP.068	Storage	Server Storage	NAS	3 Unit	Ruang Server	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
		I.PKP.069	Router	Router	Mikrotik	6 Unit	Ruang Server	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
								Kota Madiun
		I.PKP.070	Proyektor	LCD Proyektor	Epson / EB 695	1 Unit	Ruang Server	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
		I.PKP.071	Proyektor	LCD Proyektor	SONY/vPL-EX 14 hibah	1 Unit	Ruang Server	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
		I.PKP.072	Scanner	Scanner	-	12 Unit	Ruang Server	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	I.PKP.073	Proyektor	Sony dan epson	Hardware	3	ruang rapat dan mobile	Internal OPD
		I.PKP.074	CCTV	Hikvison	Perangkat keras	8	Internal OPD	Internal OPD
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	I.PKP.075	Camera, TV, video trone	-	-	-	-	-
28	Dinas Perpustakaan dan		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
	Kearsipan							
29	Dinas Perdagangan	I.PKP.076	Kamera	Kamera Cannon EOS	Kamera	4	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan
		I.PKP.077	LCD Projector	LCD Projector ePSON EX300	LCD Projector	1	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		-	-	-	-	-	-
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	I.PKP.078	Sensor Sidik Jari	Perangkat perekam sidik jari untuk konfirmasi kehadiran pasien poli yang menggunakan asuransi BPJS	Fingerspot FlexCode 4500	9	Instalasi HD, Loker BPJS, Loker Manual dan Loker Anjungan	RSUD Kota Madiun
		I.PKP.079	Monitor	Monitor	Monitor PC 19 inch	150	Masing-masing ruangan	RSUD Kota Madiun
		I.PKP.080	Proyektor	Proyektor	Proyektor	2	Aula dan TU	RSUD Kota Madiun
		I.PKP.081	TV	TV (Smart TV dan Analog)	32", 40", 60"	20	RSUD Kota Madiun	RSUD Kota Madiun

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
32	Kecamatan Manguharjo	I.PKP.082	LED TV	-	Toshiba P2301	1	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
		I.PKP.083	LED TV	-	LG LB550	1	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
		I.PKP.084	Scanner	-	Brother ads-1600w	1	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
		I.PKP.085	Scanner	-	Hp officejet pro 7720	1	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
		I.PKP.086	Monitor Layar	-	Brite	1	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
		I.PKP.087	Monitor Layar	-	Layar Gantung	2	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
		I.PKP.088	Proyektor	-	Sony xga vpl-ex130	1	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
		I.PKP.089	Proyektor	-	Sony vpl-dx 11	1	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
		I.PKP.090	Speaker	-	Yamaha Platinum	1	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
		I.PKP.091	Speaker	-	Soundbest s8111	2	Kecamatan manguharjo	Kecamatan Manguharjo
		I.PKP.092	Speaker	-	Ashley ACT 600 Pro	1	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
33	Kecamatan Kartoharjo	I.PKP.093	MICROPHONE WIRELESS MIC	PGX4, BETA/58A	MIC	2	AULA KECAMATAN KARTOHARJO	KECAMATAN KARTOHARJO
		I.PKP.094	SCANNER	CANON, COMPACT	CANON	3	KECAMATAN KARTOHARJO	KECAMATAN KARTOHARJO
		I.PKP.095	PROYEKTOR	ACER	ACER	1	AULA KECAMATAN KARTOHARJO	KECAMATAN KARTOHARJO
34	Puskesmas Manguharjo	I.PKP.096	Speaker Aktif	Untuk panggilan pasien	Speaker Aktif	3	Ruang tunggu pasien	TU
35	Puskesmas Sukosari	I.PKP.097	Proyektor + Attachment	-	-	5	Ruang rapat besar Ruang rapat kecil	Tata Usaha
		I.PKP.098	Sound System	Sound System	Sound System	1	Ruang rapat besar	Tata Usaha

Lampiran 9.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan Anggaran SPBE tahun 2022

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan <i>software</i> komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan <i>software</i> komersial.		Total Anggaran TIK
			Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	
1	Bagian Organisasi	Y	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Upgrade Sistem Aplikasi Simjab.madiunkota.go.id, pemeliharaan PC, laptop dan printer	109.875.000	109.875.000
2	Bagian Hukum	Y	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Pemeliharaan Komputer, Printer, Laptop, dan mesin ketik	10.648.000	10.648.000
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Y	Tidak ada	0	Pembelian flashdisk dan harddisk eksternal	15.070.000	Tidak ada	0	15.070.000
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Y	Tidak ada	0	Belanja modal komputer dan penunjang (flashdisk)	94.305.075	Pemeliharaan Komputer dan printer	7.370.000	101.675.075

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan <i>software</i> komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan <i>software</i> komersial.		Total Anggaran TIK
5	Bagian Umum	Y	Tidak ada	0	Pembelian notebook, tablet, internet dan penunjang peralatan komputer	134.243.050	Service PC, Printer	17.810.000	152.053.050
6	Bagian Pemerintahan	T	Tidak ada						
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Y	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Pemeliharaan komputer dan printer	7.051.000	7.051.000
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Y	Pembangunan aplikasi E-KAK	90.000.000	Tidak ada	0	Tidak ada	0	90.000.000
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Y	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Komputer, Printer dan Laptop	49.640.000	49.640.000
10	Badan Pendapatan Daerah	Y	Belanja jasa Konversi aplikasi dari sistim informasi	264.442.000	Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi SIMPADAMA	110.000.000	Tidak ada	0	374.442.000

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan <i>software</i> komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan <i>software</i> komersial.		Total Anggaran TIK
			SIMPADAMA						
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Y	Tidak ada	0	Sewa laptop, Sewa Kamera Webcam Registrasi/Zoom + Tripod, upah tenaga terampil TIK	238.650.000	Tidak ada	0	238.650.000
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	T	Tidak ada						
13	Inspektorat Daerah	Y	Tidak ada	0	Belanja peralatan dan mesin lainnya	390.231.325	Belanja rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	22.801.000	413.032.325

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan <i>software</i> komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan <i>software</i> komersial.		Total Anggaran TIK
14	Sekretariat DPRD	Y	Pembuatan Aplikasi SMS Gateway, SIJADI ANDROID/IOS Biaya Jasa Konfigurasi dan Instalasi Aplikasi Jadwal Rapat, Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi SIJADI	130.000.000	Pengadaan Subwoofer untuk gedung paripurna	123.200.000	Pemeliharaan peralatan komputer dan penunjangnya serta sewa wireless indor	130.916.400	384.116.400
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Y	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Pemeliharaan perangkat komputer, printer, scanner dan mesin ketik	140.865.300	140.865.300
16	Dinas Pekerjaan	Y	Tidak ada	0	Pembelian internet dan	2.282.455	Pemeliharaan cctv, printer dan	42.230.000	65.054.505

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan <i>software</i> komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan <i>software</i> komersial.		Total Anggaran TIK
	Umum dan Penataan Ruang				peralatan komputer		Komputer		
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Y	Tidak ada	0	Pembelian printer, proyektor, scanner, running text, flash disk	64.452.940	Pemeliharaan Komputer, printer,, scanner, cctv, proyektor	64.505.100	128.958.040
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Y	Tidak ada	0	pembelian komputer dan printer , scanner jaringan cctv	55.237.625	Pemeliharaan suku cadang scanner jaringan cctv	54.482.550	109.720.175
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Y	Pengembangan SI-Caker 2021	65.862.500	Tidak ada	0	Service Komputer; Printer	17.774.460	83.636.960

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan <i>software</i> komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan <i>software</i> komersial.		Total Anggaran TIK
20	Dinas Pendidikan	Y	Desain dan database website PPDB dan LI	65.800.000	Pembelian komputer dan printer	39.000.000	Jaringan PPDB, pemeliharaan komputer, laptop, printer, CCTV	335.191.415	439.991.415
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Y	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Pemeliharaan Komputer dan Printer	20.511.000	20.511.000
22	Dinas Lingkungan Hidup	Y	Tidak ada	0	Belanja Perlatan Komputer	39.416.025	Pemeliharaan PC dan <i>software</i>	35.170.000	74.586.025
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Y	jasa konsultasi penyusunan analisis data	33.000.000	Pembelian PC, Barcode reader, camera , card printer, mesin anjungan, running text	117.735.795	Pemeliharaan CCTV, printer, mesin fotocopy, dan perangkat komputer	21.038.999	171.774.794
24	Dinas Perhubungan	T	Tidak ada						
25	Dinas Komunikasi dan	Y	pengembangan sistem aplikasi	300.000.000	ip publik, domain, SSL, akun zoom	90.259.830	pemeliharaan jaringan, cctv, server, internet OPD, wifi	8.983.597.940	9.373.857.770

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan <i>software</i> komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan <i>software</i> komersial.		Total Anggaran TIK
	Informatika				meeting		gratis masyarakat		
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Y	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Belanja jasa konversi aplikasi/sistem Informasi	30.000.000	30.000.000
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Y	Tidak ada	0	Pembelian peralatan komputer	20.790.000	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.800.000	32.670.000
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Y	Tidak ada	0	Pembelian sarana prasaran kantor (komputer, laptop, Tablet)	638.467.900	pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	64.900.000	703.367.900
29	Dinas Perdagangan	Y	Aplikasi E-Retribusi	150.000.000	Tidak ada	0	Service PC, Laptop, Printer, CCTV	74.714.000	224.714.000

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan <i>software</i> komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan <i>software</i> komersial.		Total Anggaran TIK
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Y	Tidak ada	0	Pembelian Printer	4.965.000	Pemeliharaan Handy Talky(HT), Printer, dan Laptop	50.000.000	54.965.000
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Y	Jasa penataan ulang jaringan CCTV, upgrade jaringan komputer	276.520.000	Tidak ada	0	Pemeliharaan Jaringan internet, CCTV, <i>software</i> , telepon & PABX	258.228.350	534.748.350
32	Kecamatan Manguharjo	Y	Tidak ada	0	Pembelian Laptop	7.397.500	pemeliharaan komputer	12.918.200	20.315.700
33	Kecamatan Kartoharjo	Y	Tidak ada	0	Pembelian Notebook	118.164.860	Pemeliharaan 7 unit CCTV pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.336.000	125.500.860

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A. Pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan <i>software</i> komersial.		B. Pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi.		C. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan <i>software</i> komersial.		Total Anggaran TIK
34	Puskesmas Manguharjo	Y	Tidak ada	0	Belanja komputer, printer injet dan alat penghancur kertas	48.450.000	Pemeliharaan komputer, printer dan aplikasi BLUD	48.450.000	135.400.000
35	Puskesmas Sukosari	Y	Tidak ada	0	Pembelian Laptop dan Printer	29.548.200	Pemeliharaan Perangkat Keras dan Lunak Tahun 2022	15.032.800	44.581.000

Lampiran 10.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan SDM TIK

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honoror)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
1	Bagian Organisasi	Admin Website	ARGE APIS TANALA, A.Md	PNS	Y	D3	Sosialisasi Penilaian Admin PPID	E-Sertifikat
2	Bagian Hukum	Admin Website	Fevi Henda A.	Tenaga Upahan	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
		Operator/User Sistem						
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Service/Help Desk	Wilan	PNS	Y	S3	Tidak Ada	Tidak Ada
		Admin Website	Deny Fahrudin Fachurohman, S.Kom	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
		Operator/User Sistem	Decky Abdul Rohman Yasin S.KOM, M.AP	PNS	Y	S2	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Bagian Perekonomian dan	Teknisi Komputer	Dwitasari Nilaningrum	PNS	Y	D3	Tidak Ada	Tidak Ada
		Operator/User						

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Kesejahteraan Rakyat	Sistem						
5	Bagian Umum	Operator/User Sistem	Irvan Sanjaya	Kontrak	T	Tidak Diketahui	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Bagian Pemerintahan	Tidak Ada						
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Teknisi Komputer	Thaliq Pradhana	PNS	Y	D-III Teknik Komputer	Tidak Ada	Opertaor TIK
		Service/Help Desk						
		Operator/User Sistem						
		Admin Keamanan TI						
		Admin Website	Ahmadi	Honorer	Y	S-1 Teknik	Tidak Ada	Operator TIK
		Admin Database						
		Analisis Sistem & Desain						

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Operator/User Sistem	ANDRI BUSTAMI	PNS	T	S2	BELUM	BELUM
			Ali Yoga	PNS	T	S1	BELUM	BELUM
			BUDIMAN	PNS	T	D3	BELUM	BELUM
		Programmer	AMANDA VIEKE ALAM PUTRI	Tenaga Upahan	Tidak Diketahui	Tidak Diketahui	BELUM	BELUM
			RYAN BRILLIANT ISLAMEY	Tenaga Upahan	Tidak Diketahui	Tidak Diketahui	BELUM	BELUM
			SYAHRUL ROMADHON ROHMA AZIIZ	Tenaga Upahan	Tidak Diketahui	Tidak Diketahui	BELUM	BELUM
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Teknisi Komputer	Nonot Dwi Hantoro	PNS	Y	SMA	ada	tidak ada
			Luqman Chakim Putra, S.Kom.	Tenaga Upahan	Y	S1	ada	ada
			Nasir	PNS	T	SMA	ada	tidak ada
			Zain fikri Hanastyono, S.Kom.	CPNS	Y	S1	ada	ada
			Bambang Murjito	PNS	Y	SMA	ada	tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		Teknisi & Admin Jaringan	Nonot Dwi Santoro	PNS	Y	SMA	ada	tidak ada
			Zain Fikri Hanastyono, S.Kom	PNS	Y	S1	ada	tidak ada
			Luqman Chakim Putra, S.Kom.	Tenaga Upahan	Y	S1	ada	ada
		Service/Help Desk	NURI KUSUMAWATI, SE	PNS	Y	S1	ADA	ADA
			WINDARTO, SE	PNS	Y	S1	ADA	ADA
			DAMAYANTI WULANSUCI, SE	Tenaga Upahan	Y	S1	ADA	ADA
			SENDY ALYANDRI PARILA, S.Akun	PNS	Y	S1	ADA	ADA
			NUR ANDRE PUTRA	Tenaga Upahan	Y	D3	ADA	ADA
		Admin	Nonot	PNS	Y	SMA	ada	tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		Database	Dwihantoro (Anggaran)					
			NASIR (Perbendaharaan)	Tenaga Upahan	Y	S1	ada	ada
			Nur Andre Putra (Akuntansi)	Tenaga Upahan	Y	D3	ada	ada
			Nurwidayati , SE (sekretariat)	PNS	Y	SMA	ada	tidak ada
		Admin Website	Bambang Murjito	PNS	Y	D3	ada	ada
		Analisis Sistem & Desain	Nonot Dwihantoro (database Internal)	PNS	Y	SMA	ada	tidak ada
			Luqman Cakim Putra (Aplikasi internal)	Tenaga Upahan	Y	S1	ada	ada
			Bambang Murjito (website & medsos)	Tenaga Upahan	Y	S1	ada	tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		Programmer	Luqman Caqim Putra	Tenaga Upahan	Y	S1	ada	ada
		Operator/User Sistem	NONOT DWI HANTORO	PNS	Y	SMA	ADA	TIDAK ADA
			NASIR	PNS	Y	SMA	ADA	TIDAK ADA
			BAMBANG MURJITO	PNS	Y	SMA	ADA	TIDAK ADA
			SUMINTO	PNS	Y	SMK	ADA	TIDAK ADA
			ANDRI	Tenaga Upahan	Y	D3	ADA	TIDAK ADA
			Admin Keamanan TI	NONOT DWI HANTORO	CPNS	Y	SMA	ADA
		ZAIN FIKRI HANASTYONO, S. Kom		CPNS	Y	S1	ADA	ADA
		NUR ANDRE PUTRA		Tenaga Upahan	Y	D3	ADA	ADA
		NASIR		PNS	Y	SMA	ADA	TIDAK ADA
		LUQMAN CAKIM PUTRA, S. Kom.		Tenaga Upahan	Y	S1	ADA	ADA

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
10	Badan Pendapatan Daerah	Teknisi Komputer	Helmi	PNS	T	D3	ADA	ADA
		Teknisi & Admin Jaringan						
		Admin Website						
		Admin Database	Nugroho	PNS	Y	S1	ADA	ADA
			Wawan	PNS	Y	S1	ADA	ADA
		Analisis Sistem & Desain	Imron	PNS	T	D3	ADA	TIDAK ADA
			Helmi	PNS	T	D3	ADA	TIDAK ADA
		Operator/User Sistem	Tata	PNS	Y	S1	ADA	ADA
			Beauty	PNS	Y	S2	ADA	ADA
			Ratih	PNS	Y	S3	ADA	ADA
			Dewi	PNS	Y	Tidak Diketahui	ADA	ADA
Admin Keamanan TI	Nugroho	PNS	T	S1	ADA	TIDAK ADA		
11	Badan Kepegawaian	Programmer	AJI CONDRO SAPUTRO	CPNS	Y	D3 Sistem Informasi	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		A.Md.Kom					
		Operator/User Sistem	IZZA NOER FITRIANA A.Md	CPNS	Y	D3 Teknik Informatika	Tidak ada	Tidak ada
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tidak Ada						
13	Inspektorat Daerah	Operator/User Sistem	R.r Nurul Paramastuti	PNS	Y	D3	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			SUBIANTORO	PNS	Y	SMA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
14	Sekretariat DPRD	Admin Website	Debi Wira Adinata, S.Kom	Tenaga Upahan	T	S1	Pelatihan Website PPID	TIDAK ADA
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Teknisi Komputer	Luthfi Eko Susanto	THL	Y	D3	Ada	Progammimg & design grafis
			Muhammad Ainul Yaqin	THL	Y	S1	Ada	Design grafis
		Teknisi & Admin	Luthfi Eko Susanto	THL	Y	D3	Ada	Progammimg & design

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		Jaringan						grafis
			Muhammad Ainul Yaqin	THL	Y	S1	Ada	Design grafis
		Service/Help Desk	Luthfi Eko Susanto	THL	Y	D3	Ada	Progammimg & design grafis
			Muhammad Ainul Yaqin	THL	Y	S1	Ada	Design grafis
		Admin Website	Luthfi Eko Susanto	THL	Y	D3	Ada	Progammimg & design grafis
			Muhammad Ainul Yaqin	THL	Y	S1	Ada	Design grafis
		Admin Database	Luthfi Eko Susanto	THL	Y	D3	Ada	Progammimg & design grafis
			Muhammad Ainul Yaqin	THL	Y	S1	Ada	Design grafis
		Analisis Sistem &	Luthfi Eko	THL	Y	D3	Ada	Progammimg

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		Desain	Susanto					& design grafis
			Muhammad Ainul Yaqin	THL	Y	S1	Ada	Design grafis
		Programmer	Luthfi Eko Susanto	THL	Y	D3	Ada	progamming & design grafis
			Muhammad Ainul Yaqin	THL	Y	S1	Ada	Design grafis
		Operator/User Sistem	Luthfi Eko Susanto	THL	Y	D3	Ada	progamming & design grafis
			Luthfi Eko Susanto	THL	Y	D3	Ada	progamming & design grafis
		Admin Keamanan TI	Luthfi Eko Susanto	THL	Y	D3	Ada	progamming & design grafis
			Muhammad Ainul Yaqin	THL	Y	S1	Ada	Design grafis
16	Dinas Pekerjaan Umum dan	Operator/User Sistem	Didik Dharmono, A.Md	PNS	T	D3	tidak ada	tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Penataan Ruang		Kurnia Octaviani Nursandhi, A.Md	PNS	T	D3	tidak ada	tidak ada
			Seno Bayumurti, SE	PNS	T	S1	tidak ada	tidak ada
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Admin Website	ALRIZAL FAJAR BAGASKORO	Tenaga Upahan	T	S1	Tidak ada	Tidak ada
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Teknisi Komputer	FEBRIADI SANTOSA, A.Md	ASN	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada
		Admin Website	JOKO SANTOSA, A.Md	ASN	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada
		Operator/User Sistem	FEBRIADI SANTOSA, A.Md	ASN	Y	D3	ada	ada tapi tertentu dan perlu upgrade diklat

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
			JOKO SANTOSA, A.Md	ASN	Y	D3	tidak ada	ada tapi tertentu dan perlu upgrade diklat
			SLAMET WAHYUDI	ASN	Y	SMA	tidak ada	tidak ada
			DEDY HERMAWAN, S.AB	ASN	Y	S1	tidak ada	tidak ada
			ALFIT RAHMANU, SE	ASN	Y	S2	tidak ada	tidak ada
			NUR AZIZAH, S.Sos	ASN	Y	S3	tidak ada	tidak ada
			AAN SETYANINGSIH, S.Sos	ASN	Y	Tidak Diketahui	tidak ada	tidak ada
			NURUL ISNAYATI, S.Sos	ASN	Y	Tidak Diketahui	tidak ada	tidak ada
			AGUNG IMAM SAFI'I	Non - ASN	Y	SMA	tidak ada	tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
			SATYA ASTUTI	Non - ASN	Y	S1	tidak ada	tidak ada
			MISTANTO	Non - ASN	Y	SMA	tidak ada	tidak ada
			ALFIAN WAHYU A.P.	Non - ASN	Y	S1	tidak ada	tidak ada
			EKO SARWANTO	Non - ASN	Y	SMA	tidak ada	tidak ada
			RIZAL BAGUS D.C.	Non - ASN	Y	S1	tidak ada	tidak ada
			WAWAN SIREGAR WAHYU BASUKI	Non - ASN	Y	S1	tidak ada	tidak ada
			ONNY BAGUS WAHYU MURDIYANTO	Non - ASN	Y	SMA	tidak ada	tidak ada
			DESTA ARIF SAPUTRA	Non - ASN	Y	S1	tidak ada	tidak ada
			EKO PURNOMO	Non - ASN	Y	S1	tidak ada	tidak ada
			ERVAN TRI SANTOSO	Non - ASN	Y	SMA	tidak ada	tidak ada
			YULITA DWI HARIYANTI	Non - ASN	Y	S1	tidak ada	tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
			PUTIH KUSUMA ARDHANI	Non - ASN	Y	S1	tidak ada	tidak ada
			MUHAMMAD SATRIO UTOMO	Non - ASN	Y	S1	tidak ada	tidak ada
			TRI ENDAH	Non - ASN	Y	S2	tidak ada	tidak ada
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Admin Website	ROCHMAD EFFENDI	PNS	T	D3	PELATIHAN PENGEMBANGAN WEB	TIDAK ADA
		Operator/User Sistem	WAHYU WIDODO	PNS	T	SMA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			BERLIAN PUSPARANI	PNS	Y	S1	TIDAK ADA	TIDAK ADA
20	Dinas Pendidikan	Admin Website	Andy Setiyawan	PNS	Y	SMA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Nanang Kuncoro, A.Md	PNS	Y	D3	TIDAK ADA	TIDAK ADA
		Operator/User Sistem	Taufan Mahardika	Honorer	Y	S1	TIDAK ADA	TIDAK ADA
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Teknisi Komputer	alikh sholikin A.md	PNS	Y	D3	TIDAK ADA	TIDAK ADA
		Admin Website	Edi Purwanto	Honorer	Y	S1	TIDAK ADA	TIDAK ADA
22	Dinas	Admin Website	Aditya	Tenaga Upahan	Y	S1	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Lingkungan Hidup	Operator/User Sistem	Cintya	Tenaga Upahan	Y	S1	TIDAK ADA	TIDAK ADA
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Teknisi Komputer	YESSI MAWAR SARI S.Kom	PNS	Y	S-1 Sarjana Komputer	Bimtek Pengelola SIAK bagi Pejabat PIAK serta ADB	Tidak ada
			TRI MAYA SARI S.Kom	PNS	Y	S-1 Ilmu Komputer	Bimtek Pengelola SIAK bagi Pejabat PIAK serta ADB	Tidak ada
			DIPA AYU S.	CPNS	Y	D-3 Teknik Informatika	Tidak ada	Tidak ada
		Admin Database	RIZKA LIATMAJA, S.Kom	CPNS	Y	S-1 Teknik Informatika	Tidak ada	Tidak ada
			YOGA BUDI SETYA NUGRAHA, S.Kom	CPNS	Y	S-1 Informatika	Tidak ada	Tidak ada
24	Dinas Perhubungan	Admin Website	Faris Helmi Al Hakim	PNS	Y	D2	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Teknisi Komputer	Muhar Abado	Tenaga Upahan	Y	Diploma	Ada	Ada
		Teknisi & Admin Jaringan	Haziz Mastoni	Tenaga Upahan	Y	SMK	Ada	Ada
		Service/Help Desk	Dewi Aulia Suryo	ASN	Y	Diploma	Ada	Ada
		Admin Website	Ramadhani Dibyo	Tenaga Upahan	Y	Diploma	Ada	Ada
		Admin Database	Nirmala Aliffia, S.Kom	Tenaga Ahli	Y	S1	Ada	Ada
		Analisis Sistem & Desain	Tunggul Priyono, ST	ASN	Y	S1	Ada	Ada
		Programmer	BERLIN WIBI SELVANDRIYANA, S.Kom	Tenaga Ahli	Y	S1	Ada	Ada
		Operator/User Sistem	SAFITRI FEBRIANTI, A.Md	Tenaga Upahan	Y	Diploma	Ada	Ada
		Admin Keamanan TI	RAHMAD SUKARNO, A.Md	ASN	Y	Diploma	Ada	Ada

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Service/Help Desk	ATIKA ANIS	Honorer	T	S1	Tidak ada	Tidak ada
		Admin Website	HAMID ABDULLAH	Honorer	T	S1	Tidak ada	Tidak ada
		Admin Database	INTANIAR A	Honorer	T	S1	Tidak ada	Tidak ada
		Operator/User Sistem	ADITYA S	Honorer	T	S1	Tidak ada	Tidak ada
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Operator/User Sistem	Lissa Yualiyanti, A.Md.	PNS	Y	D3 Teknik Informatika	Ada	Tidak ada
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Teknisi Komputer	DWI SULISTYOWATI	PNS	T	SMA	Tidak ada	Tidak ada
		Service/Help Desk						
		Operator/User Sistem						
		Admin Website	FEBRI ADI	PNS	T	D3	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
			DARMAWAN			PERPUSTAKAAN		
		Admin Database	MAFUD AL AMIN	PNS	T	D4 KEARSIPAN	Tidak ada	Tidak ada
29	Dinas Perdagangan	Teknisi & Admin Jaringan	Catur Wibowo	PNS	Y	D3	Ada	Ada
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Admin Website	Eko Purnomo	Honorer	T	S1 Hukum	Tidak ada	Tidak ada
		Programmer	Nova Eka Susilo Asmoro	Honorer	T	D-III Komputerisasi Akuntansi	Tidak ada	Tidak ada
		Admin Keamanan TI						
		Operator/User Sistem	Restyo Fitrianto	PNS	T	D-III Administrasi Negara	Tidak ada	Tidak ada
		Admin Data Base						
Analisis Sistem Dan Desain	Andita Susanti Putri, A.Md	PNS	Y	D3	Ada	Ada		
31	Rumah Sakit Umum Daerah	Teknisi Komputer	Moch. Auladi Sadewa	BLUD	Y	S-1 Teknik Informatika	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Kota Madiun	Teknisi & Admin Jaringan	Chandra Rohman Nugraha	PNS	Y	D-3 Teknik Komputer	Tidak ada	Tidak ada
		Analisis Sistem & Desain						
		Operator/User Sistem						
		Admin Keamanan TI						
		Service/Help Desk	Hendrianto Wibowo	BLUD	Y	D-3 Komputer dan Sistem Informasi	Tidak ada	Tidak ada
		Admin Website	Jeriko Hosea Julanto	PNS	Y	S-1 Teknik Informatika	Tidak ada	Tidak ada
Programmer	Eriko Hosea Julanto	PNS	Y	S-1 Teknik Informatika	Tidak ada	Tidak ada		
Admin Database								
32	Kecamatan Manguharjo	Teknisi Komputer	Ari Prasetya Aji	PNS	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		Admin Website	Ali Burhan	PNS	T	SMA/SMK	Tidak ada	Tidak ada
33	Kecamatan Kartoharjo	Admin Website	Dimas Jagad	Honorer	Y	SMA/SMK	Tidak ada	Tidak ada
		Admin Database	Vinda Nofia	PNS	Y	D3	Tidak ada	Tidak ada
34	Puskesmas Manguharjo	Teknisi Komputer	Rudi Setiyawan	BLUD	Y	D3 Teknik Komputer Kontrol	Tidak ada	Tidak ada
		Admin Website						
		Admin Database						
		Programmer						
35	Puskesmas Sukosari	Service/Help Desk	Nur Risca A	PNS	Y	S1 Kesehatan Masyarakat	Tidak ada	Tidak ada
		Admin Website	Cherlly Pritta Rinandha	BLUD	Y	S1 Kesehatan Masyarakat	Tidak ada	Tidak ada
		Admin Database	Itami Dinarita	PNS	Y	S1 Kesehatan Masyarakat	Tidak ada	Tidak ada

BAB II

ARSITEKTUR PROSES BISNIS DAN SOP

2.1 Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai penyusunan **Proses Bisnis** yang telah dibuat baik pada tingkat kota maupun tingkat Perangkat Daerah. Proses bisnis merupakan gambaran dari setiap proses kerja yang akan dilakukan oleh masing-masing instansi agar nantinya, setiap instansi dapat melaksanakan fungsi dan tugas pekerjaan secara efektif dan efisien. Penyusunan proses bisnis ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan yang meliputi penyusunan peta proses bisnis level Kota atau Kabupaten, peta proses bisnis level Perangkat Daerah hingga terbentuknya SOP yang dibutuhkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

2.1.1. Pengertian Proses Bisnis

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana didalamnya terdapat penjelasan terkait domain proses bisnis. Proses bisnis merupakan sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Proses bisnis juga merupakan salah satu domain Arsitektur SPBE yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Dalam penyusunan proses bisnis, pada Pemerintah Daerah berpedoman berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah daerah. Untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan yang terintegrasi, penyusunan proses bisnis harus disusun secara terintegrasi.

Setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Hal ini berkaitan dengan penyusunan proses bisnis yang tertuang dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018** tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Peta proses bisnis merupakan aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan

secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategi terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Sehingga pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melakukan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.

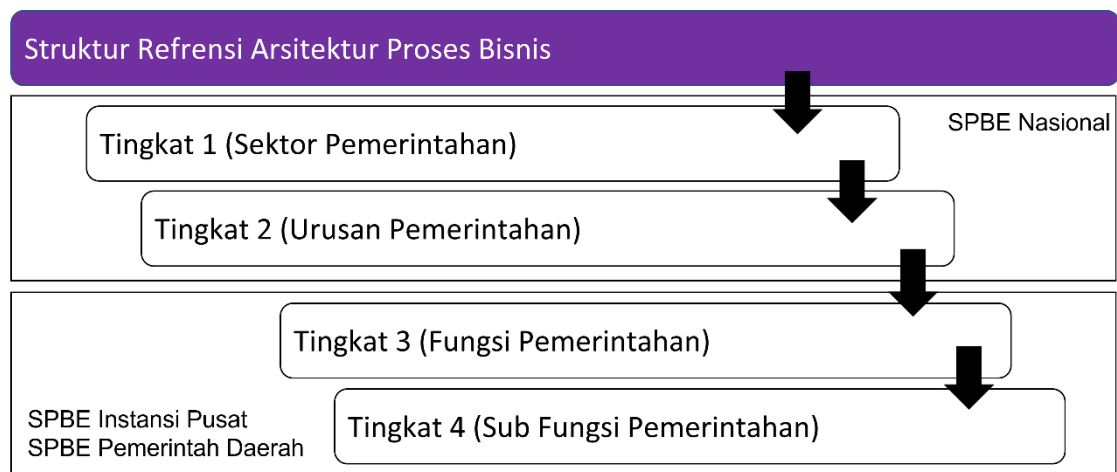
2.1.2. Referensi Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. **Referensi Proses Bisnis (RAB)** digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/ urusan/ fungsi/ proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan, kemudian diklasifikasikan substansi pemerintah ke dalam 4 (empat) tingkatan Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis, yaitu:

- a. Sektor Pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Fungsi Pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (tiga), yang selanjutnya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional; dan
- d. Sub Fungsi Pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (empat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini

sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor Pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 45 (empat puluh lima) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua). Pemerintah Daerah, dalam menyusun RAB masing-masing mengacu pada **Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)** SPBE Nasional serta melengkapi proses bisnis pada tingkat bawahnya yaitu pada fungsi pemerintahan di tingkat 3 (tiga) dan sub fungsi pemerintahan di tingkat 4 (empat) sebagaimana dijelaskan pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1 Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Berdasarkan Gambar 2.1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana yang termuat dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang SPBE telah dijelaskan bahwa Domain proses bisnis memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkatan, dimana terdapat tingkat 1 (satu) dan tingkat 2 (dua) yang merupakan struktur di tingkat nasional serta mengacu pada Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dimana tingkat 1 (satu) dan tingkat 2 (dua) merupakan struktur SPBE nasional. Berdasarkan hal tersebut maka ditentukan referensi arsitektur Proses Bisnis tingkat Nasional yang mengacu pada Pemerintahan Berbasis Elektronik. Arsitektur SPBE terkait proses bisnis dijelaskan pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1 Referensi Proses Bisnis Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara.
0102	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri.
Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri.
02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan.
02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian.
02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan.
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan.
02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan.
02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan penanaman modal.
02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan koperasi.
02.10	Usaha Kecil Dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi.
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.
03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tunggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
03.06	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian.
03.07	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.
Perindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
04.03	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum.
05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.
05.03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia.
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan.
06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan.
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi.
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan.
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan.
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Budaya dan Agama (08)		
08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama.
08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan.
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara.
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi.
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Kesekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sekretariat negara.

Berikut merupakan Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis yang mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022** tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang terdapat pada Metadata Arsitektur Proses Bisnis. Atribut proses bisnis proses bisnis secara detail disajikan pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.1 Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Bisnis/Urusan	Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Bisnis/Urusan	Merupakan uraian dari urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.

No	Nama Atribut	Keterangan
4	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih
5	Sasaran Strategis	Merupakan sasaran strategis IPPD
6	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Merupakan indikator yang merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis
7	Nilai IKU Target	Nilai yang IKU yang ditargetkan
8	Nilai IKU Relasasi	Nilai yang IKU yang dicapai
9	IDE metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

2.1.3. Hasil Penilaian SPBE

Berdasarkan indikator penilaian pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang *Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi SPBE berskala nasional, dimana seluruh (K/L/D/I) memiliki indeks penilaian masing-masing.

Tujuan dilakukannya evaluasi ini agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya. Evaluasi SPBE dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai 1-5 yang nantinya akan menghasilkan nilai Indeks. Nilai ini dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Detail nilai indeks dan predikat dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Berpedoman pada predikat indeks yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hasil Evaluasi SPBE tahun 2021, detail hasil perolehan nilai tingkat kematangan indikator untuk Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada **Gambar 2.2**.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator		
Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)		
No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	4
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2

Gambar 2.1 Laporan Hasil Evaluasi SPBE
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 2.1 hasil Penilaian SPBE tahun 2021 Pemerintah Kota Madiun, menunjukkan **nilai tingkat kematangan** adalah **4 (empat)** dengan **predikat memuaskan** pada **indikator 14 (empat belas)** yaitu **Inovasi Proses Bisnis SPBE**. Pada indikator tersebut telah melampaui target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator. Dimana indikator tersebut pada kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Inovasi proses bisnis telah diterapkan ke dalam SPBE namun perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik agar dapat naik pada level 5. Pada kriteria pemenuhan level instansi pada Pemerintah Kota Madiun telah melakukan perbaikan pada proses bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis. Bentuk perbaikan pada proses bisnis Kota Madiun yaitu menghapuskan Sub-Proses Utama MDN-01 Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun salah satunya adalah tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis

SPBE. Pada aspek kebijakan Perencanaan Strategis SPBE terlihat adanya kebijakan *internal* menjadi **kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun** yaitu **Inovasi Proses Bisnis SPBE** yang ditandai dengan data dukung yaitu **Keputusan Walikota Madiun Nomor: 180.45-401.021/253/2019** tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun. Dokumen model pada Peta Proses Bisnis sudah sesuai standar dan telah didokumentasikan secara formal. Data dukung juga menunjukkan Pemerintah Kota Madiun telah melakukan perbaikan pada proses bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis yang menghasilkan perbaikan produk proses bisnis yaitu SOP yang baru dan beberapa dari bentuk manual sudah diimplementasikan menjadi berbasis elektronik.

Adapun dari hasil laporan evaluasi Kemenpan RB bahwa **kelemahan domain Proses Bisnis SPBE** yang dimiliki Pemerintah Kota Madiun yaitu Arsitektur SPBE atau kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Dimana sebagian data dukung tidak relevan, sehingga hanya mencapai level 2 (dua) dimana Dokumen Arsitektur SPBE tidak/belum mencakup referensi dan domain Arsitektur SPBE instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu referensi dan domain arsitektur proses bisnis. Pencapaian level 3 (tiga) belum tercapai karena data dukung yang dilampirkan belum menggambarkan untuk 6 (enam) domain arsitektur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target. Untuk aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE, tentang Pengaturan untuk penyusunan kebijakan internal mencakup seluruh domain, pada Referensi arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE harus mencakup salah satunya Domain Arsitektur Proses Bisnis.

2.1.4 Ruang Lingkup

SPBE terdapat 6 (enam) domain, yaitu Domain Proses Bisnis, Domain Layanan SPBE, Domain Data dan Informasi, Domain Aplikasi SPBE, Domain Infrastruktur SPBE dan Domain Keamanan SPBE seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Domain yang akan dibahas pada bab II ini adalah Domain Proses Bisnis. Berikut akan dijabarkan pembahasan pada domain arsitektur proses bisnis:

- a. Referensi proses bisnis yang digunakan untuk publik arsitektur proses bisnis SPBE;
- b. Identifikasi urusan Pemerintah Kota Madiun;
- c. Identifikasi Metadata Proses Bisnis SPBE;
- d. Identifikasi peta relasi Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan referensi proses bisnis (RB);
- e. Ketentuan penyusunan proses bisnis didasarkan pada Permen PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- f. Identifikasi peta relasi berdasarkan Substansi arsitektur pada domain arsitektur proses bisnis yang menjadi target arsitektur SPBE Nasional sampai dengan tahun 2026; dan
- g. Identifikasi Usulan Standar Operasional Prosedur yang terbagi menjadi SOP Administratif dan Teknis.

2.2 Metodologi

Sub Bab ini membahas terkait Metodologi penyusunan Arsitektur proses bisnis SPBE yang mencakup tahapan persiapan dan perencanaan serta tahapan pengembangan. terkait Identifikasi Peta Relasi dan Identifikasi Usulan SOP.

2.2.1 Metodologi Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE

Penyusunan arsitektur proses bisnis terdapat 8 (delapan) tahapan yaitu, identifikasi referensi arsitektur proses bisnis, identifikasi urusan pemerintah, identifikasi metadata proses bisnis, identifikasi peta proses bisnis di level Kota Madiun, identifikasi peta proses bisnis pada masing-masing PD, identifikasi peta relasi, dan identifikasi usulan standar operasional prosedur (SOP).

2.2.2. Tahapan Persiapan dan Perencanaan

Tahapan ini mengacu pada **Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang SPBE**, yang menjelaskan bahwa langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan

sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi;
- b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah; dan
- c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Tahap persiapan dan perencanaan meliputi **pengumpulan informasi** dan **pengorganisasian**.

A. Pengumpulan Informasi

Tahapan pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggung jawab proses, perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, risiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses. Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencana strategis, laporan kinerja, tugas dan fungsi organisasi.

Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis antara lain informasi terkait dengan *supplier*, *input*, *proses*, *output*, dan *customer*. Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:

1. Analisis kausal: telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.
2. Klasifikasi proses: memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.

3. Pemodelan proses: pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

B. Pengorganisasian

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis, antara lain:

1. Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan instansi pemerintah.
2. Secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana.

2.2.3 Tahapan Pengembangan

Dalam tahapan ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2 dan level selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.

A. Penyusunan peta proses bisnis menggunakan level atau tingkatan

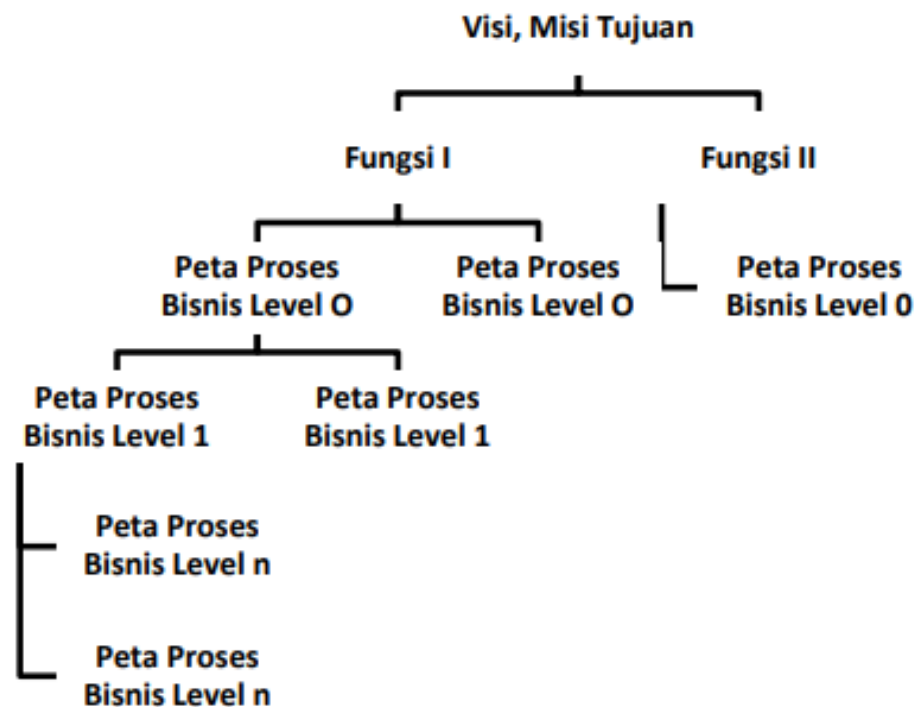
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis. Dalam hal ini menjelaskan

bahwa pada penyusunan peta proses bisnis ini digambarkan melalui penyusunan Peta proses bisnis level Kota yang akan menjelaskan proses bisnis yang dilakukan oleh masing-masing PD terkait secara keseluruhan.

Tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis di dalam instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan.
2. Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan.
3. Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktivitas satu ke aktivitas berikutnya yang dapat digambarkan pada Gambar 2.3 berikut ini:



Gambar 2.3 Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

B. Peta Proses Bisnis pada Tiap PD

Peta proses bisnis yang dimiliki setiap perangkat daerah, berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peta Proses Bisnis Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

a) Proses Inti

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah.
- ii. Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi.
- iii. Memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

b) Proses Pendukung

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Memenuhi kebutuhan pengguna internal.
- ii. Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

c) Proses Lainnya

Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

2. Peta Proses Bisnis Level 1

merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Peta proses

bisnis level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

3. Peta Proses Bisnis Level n

merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.

2.2.4 Identifikasi Peta Relasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Peta relasi (*relationship map*) merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

- a. Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses;
- b. Peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta proses bisnis proses;
- c. Pada tahap penyusunan peta hubungan dapat memungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya; dan
- d. Melakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya.

2.2.5. Identifikasi Usulan SOP

Proses identifikasi usulan SOP adalah proses pengidentifikasian berupa usulan SOP berdasarkan dari layanan eksisting, maupun berupa usulan layanan administrasi dan layanan publik SPBE serta layanan terhadap program RPJMD pada masing-masing perangkat daerah.

2.3 Arsitektur Peta Proses Bisnis

Sub Bab ini membahas tentang Arsitektur Proses Bisnis SPBE. Penyusunan Arsitektur SPBE dimulai dari referensi arsitektur proses bisnis SPBE, identifikasi urusan pemerintah, identifikasi metadata

proses bisnis SPBE, identifikasi peta proses bisnis tiap perangkat daerah, identifikasi peta relasi, dan identifikasi usulan SOP.

2.3.1. Persiapan dan Perencanaan Proses Bisnis

Berdasarkan penyusunan dan perencanaan peta proses bisnis, terdapat hal pokok sebagai landasan utama yaitu kegiatan atau proses kerja yang ada dalam Pemerintah Kota Madiun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah (P-RPJMD) Kota Madiun 2019-2024. Dimana langkah awal dalam penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Pada proses selanjutnya melakukan pemetaan urusan yang ada dalam P-RPJMD, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan terhadap setiap proses bisnis maupun sub-proses bisnis yang dimiliki dalam setiap unit organisasi Sehingga, dapat diketahui aktivitas-aktivitas yang ada dalam instansi pemerintah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan kedalam kelompok (~~folder~~) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi;
- b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah; dan
- c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

2.3.2. Pengembangan Peta Proses Bisnis Level Kota

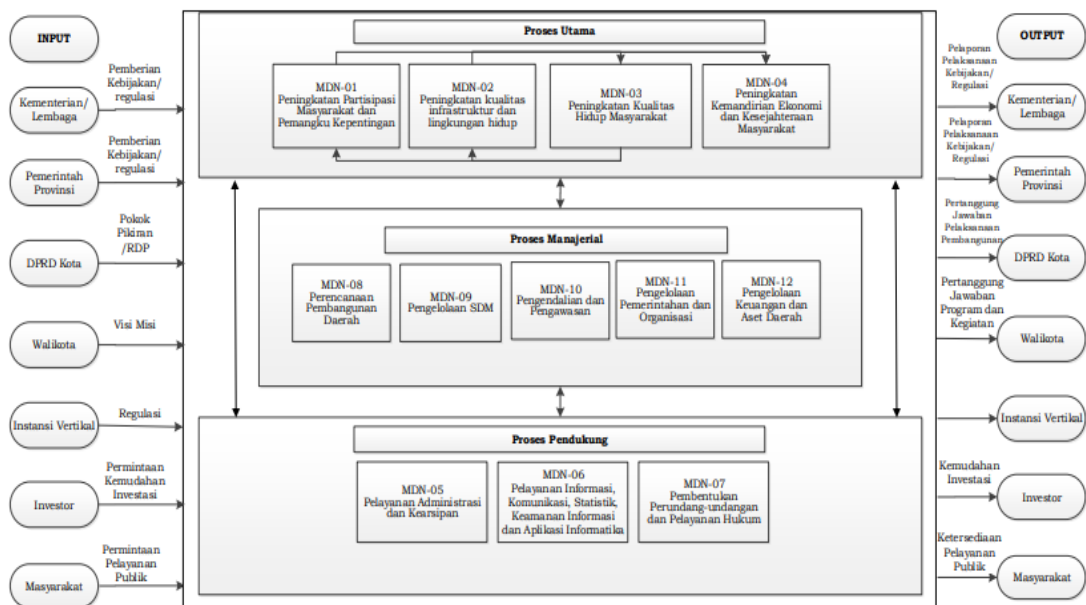
Penyusunan peta proses bisnis level Kota mengacu pada RPJMD tahun 2019-2024. Dalam penyusunan tersebut proses bisnis disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD tersebut. Misi Kota Madiun diturunkan sebagai proses bisnis utama dalam pembuatan proses bisnis level kota. Gambaran peta proses bisnis Pemerintah Kota Madiun telah berpedoman pada prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SipoC).

Peta proses bisnis yang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan tingkatannya diidentifikasi 3 (tiga) tahapan proses,

yaitu proses utama, proses manajerial dan proses pendukung. Penjelasan terkait tahap proses dijelaskan di bawah ini:

- a. **Proses Utama** merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama dimana pada proses ini berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintahan dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi. Proses ini berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah. Serta memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna;
- b. **Proses Manajerial** merupakan proses untuk mengelola perencanaan dan pembangunan daerah, pengelolaan SDM, pengendalian dan pengawasan, pengelolaan pemerintahan dan organisasi, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- c. **Proses Pendukung** merupakan proses untuk mengelola operasional dan manajemen dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Pada proses ini juga memenuhi kebutuhan pengguna internal.

Berdasarkan kondisi eksisting Kota Madiun telah memiliki peta proses bisnis level kota. Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kota Madiun untuk tingkat kematangan Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE mendapatkan nilai 4. Pemerintah Detail peta proses bisnis level kota Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada **Gambar 2.4**.



Gambar 2.4 Peta Proses Bisnis Kota Madiun

Representasi dari **Gambar 2.4** menunjukkan Peta proses bisnis level 0 Kota Madiun tersebut merupakan peta proses bisnis sebelum dilakukan perubahan. Perubahan terdapat pada peta proses bisnis Pemerintah Kota Madiun Level 1 atau yang sering disebut Peta Sub Proses. Pengembangan Peta proses bisnis level 1 Kota Madiun untuk tahapan selanjutnya pada **Sub Proses MDN-01** dihapuskan dari peta proses bisnis level 1 kota.

Meskipun Pemerintah Kota Madiun telah melakukan perbaikan pada proses bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis yang menghasilkan perbaikan produk proses bisnis. Namun pengembangan harus dilakukan agar indikator 14 Inovasi Proses Bisnis SPBE dapat mencapai nilai kematangan indikator level 5, hal yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi peta proses bisnis Level Kota dengan melakukan perbaikan Inovasi proses bisnis yang diterapkan dalam sistem elektronik selanjutnya dilakukan proses reviu dan evaluasi secara periodik dengan tujuan agar penyusunan proses bisnis selaras dengan arsitektur SPBE pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

2.3.3. Identifikasi Urusan Pemerintah

Pemetaan urusan pemerintah telah didapatkan Urusan di Pemerintahan Kota Madiun terbagi menjadi 8 (delapan) kelompok urusan. Delapan urusan tersebut yaitu **Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar** (6 urusan), **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar** (16 urusan), **Urusan Pemerintahan Pilihan** (7 urusan), **Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan** (4 urusan), **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** (8 urusan), **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan** (2 urusan), **Unsur Kewilayahan** (2 urusan), dan **Unsur Pemerintahan Umum** (1 urusan) yang masing-masing diuraikan pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4 Identifikasi Urusan Pemerintahan Kota Madiun

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama PD	Kode referensi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur
Urusan Pemerintahan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	RAB 06.01	Pendidikan

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama PD	Kode referensi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur
Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAB 04.01	Kesehatan
		Rumah Sakit Umum Daerah		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RAB 03.04	Perumahan
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	RAB 03.01	Pekerjaan Umum
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	RAB 05.02	Keamanan
			RAB.04.02	Sosial
	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB 04.02	Sosial
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	RAB 02.09	Koperasi
			RAB 02.10	Usaha Kecil dan Menengah
			RAB 06.03	Ketenagakerjaan
	Pengendalian Pendudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAB 03.07	Kependudukan

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama PD	Kode referensi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAB 04.03	Pemberdayaan Perempuan
	Perhubungan	Dinas Perhubungan	RAB 03.03	Transportasi
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAB 09.03	Informasi
			RAB 09.04	Komunikasi
	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAB 06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAB 01.01	Pertahanan
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAB 02.09	Koperasi
			RAB 02.10	Usaha Kecil dan Menengah
	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAB 02.03	Pertanian
			RAB 02.05	Peternakan
			RAB 02.06	Perikanan
	Pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	RAB 03.06	Pertanahan
	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	RAB 07.05	Lingkungan Hidup
	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan,	RAB 06.04	Pemuda
			RAB	Olahraga

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama PD	Kode referensi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur
		dan Olahraga	06.05	
	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga	RAB 08.02	Kebudayaan
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAB 03.07	Kependudukan
	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAB 06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAB 06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Urusan Pemerintahan Pilihan	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAB 02.03	Pertanian
	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAB 02.06	Perikanan
	Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga	RAB 02.11	Pariwisata
	Perdagangan	Dinas Perdagangan	RAB 02.02	Perdagangan
	Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	RAB 02.01	Industri
	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	RAB 03.02	Transmigrasi

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama PD	Kode referensi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur
	Unsur Staf	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	RAB 09.07	Kesekretariatan Negara
		Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	RAB 02.07	Badan Usaha Milik Negara
		Bagian Hukum	RAB 05.01	Hukum
		Bagian Organisasi	RAB 09.06	Aparatur Negara
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintah	RAB 09.01	Dalam Negeri
		Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		
		Bagian Hukum		
		Bagian Organisasi		
		Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan		
	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD		
	Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	RAB 09.07	Kesekretariatan Negara
Perencanaan	Badan Perencanaan, Penelitian dan	RAB 09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama PD	Kode referensi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur	
		Pengembangan Daerah			
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah	RAB 06.01	Pendidikan	
	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB 09.06	Aparatur Negara	
	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB 06.01	Pendidikan	
	Perencanaan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAB 09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	
	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAB 06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan Daerah	RAB 09.02	Keuangan
	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Inspektorat	RAB 09.06	Aparatur Negara	
	Fungsi Penunjang Kecamatan	Kecamatan Kartoharjo			
Kecamatan Manguharjo					

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama PD	Kode referensi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektorat	Inspektorat	RAB 09.06	Aparatur Negara
			RAB 09.07	Kesekretariatan Negara
Unsur Kewilayahan	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Kartoharjo	RAB 09.06	Aparatur Negara
		Kecamatan Manguharjo		
Unsur Kewilayahan	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Kartoharjo	RAB 09.06	Aparatur Negara
		Kecamatan Manguharjo		
Unsur Kewilayahan	Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAB 09.06	Aparatur Negara
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAB 09.07	Kesekretariatan Negara

8 (delapan) kelompok urusan telah dijabarkan kedalam daftar urusan PD Kota Madiun yang menangani urusan terkait serta dipetakan. Dari **45 (empat puluh lima) referensi arsitektur bisnis**, Pemerintah Kota Madiun telah memenuhi 36 (tiga puluh enam) referensi arsitektur proses bisnis. Sementara untuk **7 (tujuh) referensi arsitektur proses bisnis** lainnya tidak menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun. Untuk 7 (tujuh) referensi proses bisnis yang tidak ada pada Pemerintah Kota Madiun diantaranya (RAB 01.02) **Hubungan Luar Negeri**, (RAB 02.04) **Perkebunan**, (RAB 07.01) **Pertambangan**, (RAB 07.04) **Kelautan**, (RAB 07.03) **Kehutanan**, (RAB 08.01) **Agama**, dan (RAB 07.02) **Energi**.

2.3.4. Identifikasi Metadata Proses Bisnis SPBE

Proses identifikasi atribut metadata proses bisnis dianalisa, dimana pada setiap urusan yang ada pada masing-masing PD dipetakan ke dalam Referensi Arsitektur Bisnis (RAB). Hasil pemetaan metadata Proses Bisnis dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Metadata Proses Bisnis SPBE

ID Proses Bisnis	Nama PD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.01	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian kelembagaan dan analisa jabatan, ketatalaksanaan, dan pengembangan kinerja	RAB 09.06	Aparatur Negara
P.02	Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bagian peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan publikasi, penyuluhan dan bantuan hukum	RAB 05.01	Hukum
P.03	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian Layanan pengadaan secara elektronik, Pengelolaan pengadaan barang/jasa, Penyusunan dan pengendalian program	RAB 02.08	Investasi
P.04	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian Perekonomian, Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Kesejahteraan rakyat	RAB 02.07	Badan Usaha Milik Negara
P.05	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian Tata usaha dan keuangan, Rumah tangga dan perlengkapan	RAB 09.07	Kesekretariatan Negara

ID Proses Bisnis	Nama PD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.06	Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian Pemerintahan, Kerjasama Daerah, Pembinaan kecamatan	RAB 09.01	Aparatur Negara
P.07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian Penanganan Masyarakat dan pengungsi, Tata cara pelaksanaan koordinasi, pengerahan dan pemanfaatan sumber daya manusia, Rehabilitasi, Pengelolaan bantuan	RAB 04.02	Sosial
P.08	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan infrastruktur, kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, penelitian dan pengembangan.	RAB 09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional
				RAB 06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
P.09	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset.	RAB 09.02	Keuangan

ID Proses Bisnis	Nama PD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.10	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pengelolaan pajak daerah, dan penagihan, pemeriksaan dan pembukuan.	RAB 09.02	Keuangan
P.11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi, dan pengembangan sumber daya manusia.	RAB 09.06	Aparatur Negara
				RAB 06.01	Pendidikan
P.12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang ideologi, ketahanan bangsa, dan lembaga politik dan organisasi kemasyarakatan.	RAB 05.03	Hak Asasi Manusia
P.13	Inspektorat	Inspektorat	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III, Inspektorat Pembantu IV	RAB 09.06	Aparatur Negara
				RAB 09.07	Kesekretariatan Negara
P.14	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian umum dan keuangan, persidangan dan perundang-undangan, dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan	RAB 09.07	Kesekretariatan Negara

ID Proses Bisnis	Nama PD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang penyediaan layanan kesehatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, pemberdayaan masyarakat kesehatan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera	RAB 04.01	Kesehatan
P.16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pengelolaan sumber daya air, bidang cipta karya, bina marga, dan tata kota	RAB 03.01	Pekerjaan Umum
P.17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang perumahan, permukiman dan pertanahan, dan prasarana, sarana dan utilitas ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum dan pemakaman	RAB 03.04	Perumahan
				RAB 03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
				RAB 03.06	Pertanahan
P.18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak, rehabilitasi sosial, dan sosial, penanganan bencana dan	RAB 04.02	Sosial
				RAB 04.03	Pemberdayaan Perempuan

ID Proses Bisnis	Nama PD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
			pengelolaan taman makam pahlawan		
P.19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian bidang tenaga kerja, perindustrian, dan koperasi usaha kecil dan menengah	RAB 02.01	Industri
				RAB 02.09	Koperasi
				RAB 02.10	Usaha Kecil dan Menengah
				RAB 03.02	Transmigrasi
				RAB 06.03	Ketenagakerjaan
P.20	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan dasar, dan bidang kurikulum, pembinaan bahasa dan sastra.	RAB 06.01	Pendidikan
P.21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan	RAB 02.03	Pertanian
				RAB 02.05	Peternakan
				RAB 02.06	Perikanan

ID Proses Bisnis	Nama PD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.22	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang penataan, pengawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun	RAB 07.05	Lingkungan Hidup
P.23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	RAB 03.07	Kependudukan
P.24	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas, dan angkutan darat	RAB 03.03	Transportasi
P.25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan statistik dan persandian.	RAB 01.01	Pertahanan
				RAB 06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
				RAB 09.03	Informasi
				RAB 09.04	Komunikasi

ID Proses Bisnis	Nama PD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian kelompok jabatan fungsional penanaman modal, kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu, dan seksi pengaduan, informasi layanan, penyuluhan layanan dan transmigrasi.	RAB 02.08	Investasi
P.27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang kebudayaan, pariwisata, dan kepemudaan dan olahraga	RAB 02.11	Pariwisata
				RAB 06.04	Pemuda
				RAB 06.05	Olahraga
				RAB 08.02	Kebudayaan
P.28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang perpustakaan, dan kearsipan	RAB 06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
P.29	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang usaha perdagangan, dan pengelolaan pasar rakyat	RAB 02.02	Perdagangan
P.30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan pemadam kebakaran dan penyelamatan.	RAB 05.02	Keamanan

ID Proses Bisnis	Nama PD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang penyediaan layanan kesehatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera	RAB 04.01	Kesehatan
P.32	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo	Penyelenggaraan pengelolaan urusan pemerintah bidang kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan kecamatan	RAB 09.01	Aparatur Negara
P.33	Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Kartoharjo	Penyelenggaraan pengelolaan urusan pemerintah bidang kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan kecamatan	RAB 09.01	Aparatur Negara
P.34	Puskesmas Manguharjo	Puskesmas Manguharjo	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang penyediaan layanan kesehatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera	RAB 04.01	Kesehatan

ID Proses Bisnis	Nama PD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.35	Puskesmas Sukosari	Puskesmas Sukosari	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang penyediaan layanan kesehatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera	RAB 04.01	Kesehatan

2.3.5. Pengembangan Peta Proses Bisnis pada tiap PD

Tahapan ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan dan penerapan SPBE di Pemerintah Kota Madiun berdasarkan salah satu domain yaitu domain arsitektur Proses Bisnis. Proses pengembangan dilakukan dengan cara pengkodean dan identifikasi peta proses bisnis pada setiap PD. Hal ini dilakukan dengan tujuan guna meningkatkan efisiensi dalam visualisasi pada masing-masing proses bisnis.

2.3.5.1 Pengkodean Proses Bisnis

Penyusunan proses bisnis level PD diawali dengan mengumpulkan daftar kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing PD Pemerintah Kota Madiun. Dilanjutkan dengan pemetaan terhadap proses bisnis maupun sub-proses bisnis yang dimiliki pada setiap PD. Penyusunan peta proses bisnis pada setiap PD terdiri dari peta proses bisnis level 0, peta proses bisnis level 1, peta proses bisnis level selanjutnya (level n), peta relasi dan peta lintas fungsi. Pada penyusunan peta proses bisnis, diperlukan pengkodean pada masing-masing prosesnya. Tujuan dilakukannya pengkodean adalah agar masing-masing proses bisnis yang divisualisasikan lebih efisien.

Pengkodean dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu, Kategori Pertama adalah 0 (nol) untuk proses manajerial atau aktivitas yang dilakukan seluruh PD. Kategori kedua adalah pengkodean yang dimulai dari 0 (nol) hingga 40 (empat puluh) sesuai dengan jumlah PD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun, dimana untuk kecamatan dituliskan secara umum sebagai bentuk penggambaran 31 (tiga puluh satu) Kecamatan yang ada di Pemerintah Kota Madiun. Pengkodean untuk proses manajerial yang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh PD secara keseluruhan. Proses manajerial dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat. Kode proses manajerial dapat dilihat pada Tabel 2.6. sedangkan pada Tabel 2.7 merupakan pengkodean untuk setiap PD pada Pemerintah Kota Madiun.

Tabel 2.6 Pengkodean Proses Manajerial

Kode Proses	Contoh Nama Proses
0.1	Pelaksanaan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan
0.2	Pelaksanaan koordinasi program dan pelayanan administratif perangkat daerah

Tabel 2.7 Kode Perangkat Daerah

Kode PD	Nama Perangkat Daerah
1	Bagian Organisasi
2	Bagian Hukum
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
5	Bagian Umum
6	Bagian Pemerintahan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah
10	Badan Pendapatan Daerah

Kode PD	Nama Perangkat Daerah
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Inspektorat
14	Sekretariat DPRD
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
20	Dinas Pendidikan
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
22	Dinas Lingkungan Hidup
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	Dinas Perhubungan
25	Dinas Komunikasi dan Informatika
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29	Dinas Perdagangan
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
32	Kecamatan Manguharjo
33	Kecamatan Kartoharjo
34	Puskesmas Manguharjo
35	Puskesmas Sukosari

Proses bisnis pada PD dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu proses bisnis manajerial, proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung. Proses bisnis manajerial merupakan proses bisnis yang

dijalankan oleh Sekretariat pada masing-masing PD. Proses utama dijalankan oleh masing-masing bidang PD. Pada proses bisnis pendukung mengambil dari program yang akan dijalankan oleh masing-masing PD dan belum ada pada proses utama.

Pengkodean proses bisnis manajerial dijabarkan pada Tabel 3.1. Pengkodean proses bisnis umum dijabarkan pada Tabel 3.2 yang menggunakan kode PD masing-masing. Langkah-langkah dalam melakukan pengkodean proses bisnis manajerial adalah sebagai berikut:

- a. Proses bisnis level 0 menggunakan 2 (dua) kode yaitu 0.X;
- b. Variabel 0 adalah variabel kontrol atau variabel tetap yang artinya adalah proses bisnis manajerial;
- c. Variabel X adalah variabel yang menunjukkan urutan proses bisnis;
- d. Proses bisnis level 1 menggunakan 3 (tiga) kode yaitu 0.X.Y; dan
- e. Variabel Y adalah variabel yang menunjukkan urutan proses bisnis yang berfungsi untuk menjelaskan proses yang ada pada level 0.

Selain menggambarkan proses bisnis manajerial, diperlukan untuk menggambarkan proses bisnis umum. Langkah-langkah pengkodean proses bisnis umum adalah sebagai berikut:

- a. Proses bisnis level 0 menggunakan 2 (dua) kode yaitu X.Y;
- b. Variabel X adalah kode PD yang dijabarkan pada Tabel 3.2;
- c. Variabel Y adalah variabel yang menunjukkan urutan proses bisnis;
- d. Proses bisnis level 1 menggunakan 3 (tiga) kode yaitu X.Y.Z; dan
- e. Variabel Z adalah variabel yang menunjukkan urutan proses bisnis yang berfungsi untuk menjelaskan proses yang ada pada level 0.

Seluruh proses bisnis level 0, level 1, dan peta sub proses bisnis akan digambarkan pada masing-masing sub bab sesuai dengan kode urutan PD.

2.3.5.2 Hasil Identifikasi Peta Proses Bisnis Tiap PD

Identifikasi Peta Proses Bisnis tiap PD mengacu pada SOTK dan TUSI pada masing-masing PD, peta proses bisnis setiap PD dijabarkan menjadi 3 proses yaitu Level 0, Level 1, Level n. Dimana pada Level 0 adalah proses bisnis yang dijalankan bidang pada setiap PD,

kemudian Level 1 merupakan proses bisnis yang dijalankan seksi/subkoordinator di setiap PD, serta Level n dijelaskan bahwa proses tersebut mengacu pada tugas dan fungsi dari setiap seksi/subkoordinator pada setiap PD.

1. Bagian Organisasi

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Bagian Organisasi** memiliki urusan **Sekretariat Daerah**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Bagian Organisasi memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 09.06 Aparatur Negara, Bagian Organisasi** dengan kode proses bisnis **P.01** dengan detail uraian proses dapat dilihat pada **Tabel 2.8**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021** dimana Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, analisa dan formasi jabatan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.8**

Tabel 2.8 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

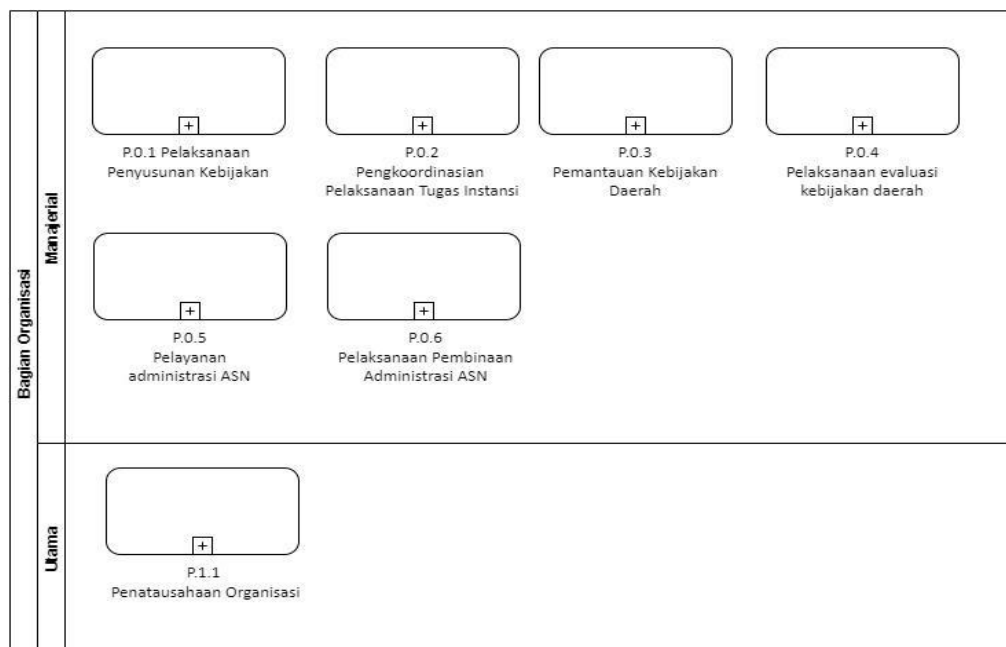
Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan
P.0.2	Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas Instansi
P.0.3	Pemantauan Kebijakan Daerah
P.0.4	Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Daerah
P.0.5	Pelayanan Administrasi ASN
P.0.6	Pelaksanaan Pembinaan Administratif ASN

Tabel 2.9 dianalisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Bagian Organisasi. Sehingga pada Bagian Organisasi memiliki 6 (enam) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1 - P.0.6. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.9**.

Tabel 2.9 Daftar Proses Level 0 dan Level 1 Bagian Organisasi

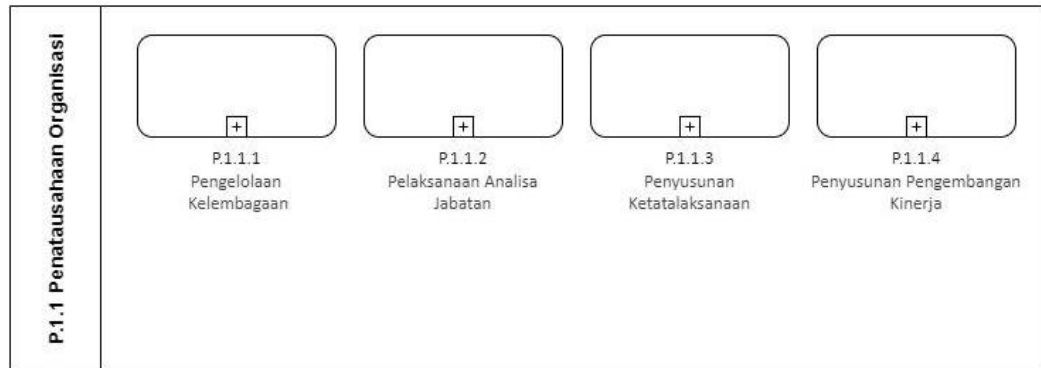
Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.1.1	Penatausahaan Organisasi	P.1.1.1	Pengelolaan Kelembagaan
		P.1.1.2	Pelaksanaan Analisa Jabatan
		P.1.1.3	Penyusunan Ketatalaksanaan
		P.1.1.4	Penyusunan Pengembangan Kinerja

Tabel 2.9, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau subkoordinator pada Bagian Organisasi. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau subkoordinator pada Bagian Organisasi. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail proses bisnis level O Bagian Organisasi dapat dilihat pada **Gambar 2.5**.



Gambar 2.5 Peta Proses Bisnis Level 0 Bagian Organisasi

Berdasarkan Gambar 2.5, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Pada Bagian Organisasi terdapat 1 (satu) subbagian, sehingga memiliki 1 (satu) proses utama level 0 yaitu P.1.1. Gambar 2.6 merupakan peta proses bisnis level 0 utama dan level 1.



Gambar 2.6 Peta Proses Bisnis Utama Level 1
Bagian Organisasi

Berdasarkan **Gambar 2.6**, dijabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari subbagian atau sub koordinator subkoordinator pada Bagian Pemerintahan, selanjutnya Organisasi, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, yang diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok dan fungsi tiap subbagian atau seksi setiap bagian yang dimiliki oleh Bagian Organisasi sehingga menghasilkan **1 (satu) proses bisnis utama level 0 dan 4 (empat) proses bisnis utama level 1**.

2. Bagian Hukum

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Bagian Hukum** memiliki urusan **Sekretariat Daerah**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Bagian Hukum memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 05.01 Hukum, Bagian Hukum** dengan kode proses bisnis **P.02**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021** dimana Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaah hukum, mempublikasikan, mendokumentasikan produk hukum, serta melaksanakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.12**

Tabel 2.10 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

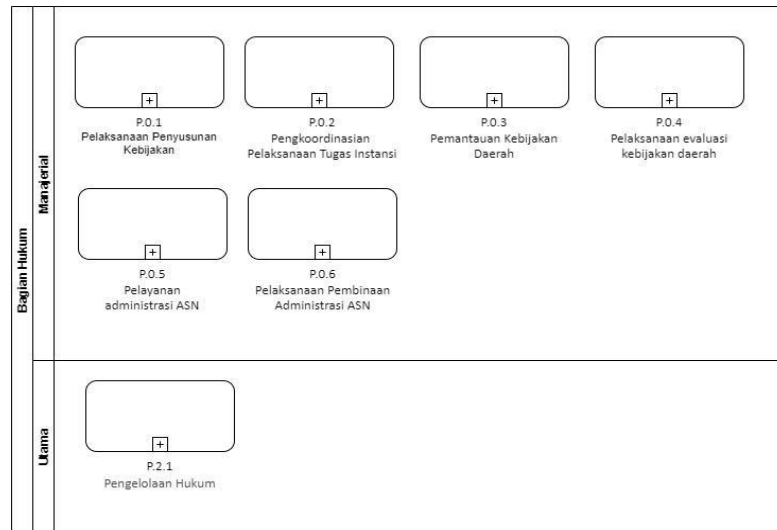
Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan
P.0.2	Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas Instansi
P.0.3	Pemantauan Kebijakan Daerah
P.0.4	Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Daerah
P.0.5	Pelayanan Administrasi ASN
P.0.6	Pelaksanaan Pembinaan Administratif ASN

Tabel 2.10 dianalisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Bagian Hukum. Sehingga pada Bagian Hukum memiliki 6 (enam) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1 sampai dengan P.0.6. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.11**.

Tabel 2.11 Daftar Proses Level 0 dan Level 1 Bagian Hukum

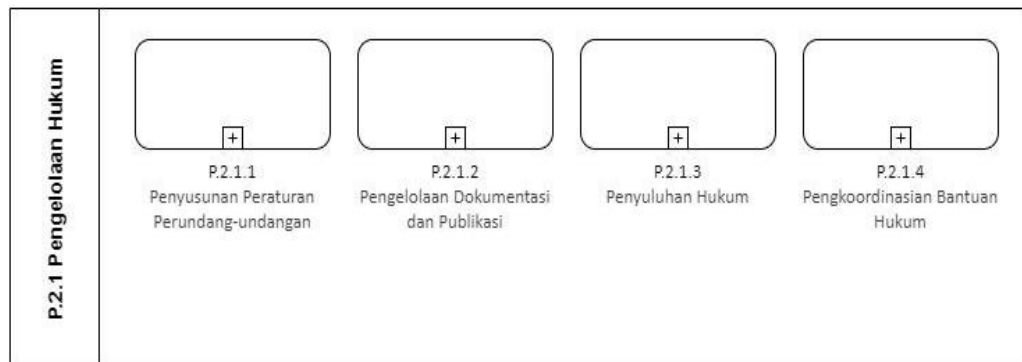
Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.2.1	Pengelolaan Hukum	P.2.1.1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
		P.2.1.2	Pengelolaan Dokumentasi dan Publikasi
		P.2.1.3	Penyuluhan Hukum
		P.2.1.4	Pengkoordinasian Bantuan Hukum

Tabel 2.11, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau subkoordinator pada Bagian Hukum. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau subkoordinator pada Bagian Hukum. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail proses bisnis level 0 Bagian Hukum dapat dilihat pada **Gambar 2.7**.



Gambar 2.7 Peta Proses Bisnis Level 0 Bagian Hukum

Berdasarkan Gambar 2.7, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Untuk proses bisnis P.2.1 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya akan ditampilkan pada **Gambar 2.8**.



Gambar 2.8 Peta Proses Bisnis Utama Level 1 Bagian Hukum

Gambar 2.8 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari subkoordinator pada Bagian Hukum, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Bagian Hukum sehingga menghasilkan **1 (satu) proses bisnis utama level 0 dan 4 (empat) proses bisnis utama level 1**.

3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan** memiliki urusan **Sekretariat Daerah**. Berdasarkan

Arsitektur SPBE Nasional, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 02.08 Investasi, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan** dengan kode proses bisnis **P.03**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021** dimana Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, fasilitasi advokasi, pembinaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pelaporan. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.14**

Tabel 2.14 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan
P.0.2	Pelaksanaan Tugas Instansi
P.0.3	Pemantauan Kebijakan Daerah
P.0.4	Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Daerah
P.0.5	Pelayanan Administrasi ASN
P.0.6	Pelaksanaan Pembinaan Administratif ASN

Tabel 2.14 dianalisis berdasarkan ~~dari~~ proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan. Sehingga pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan memiliki 6 (enam) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1 sampai dengan P.0.6. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.15**.

Tabel 2.15 Daftar Proses Level 0 dan Level 1

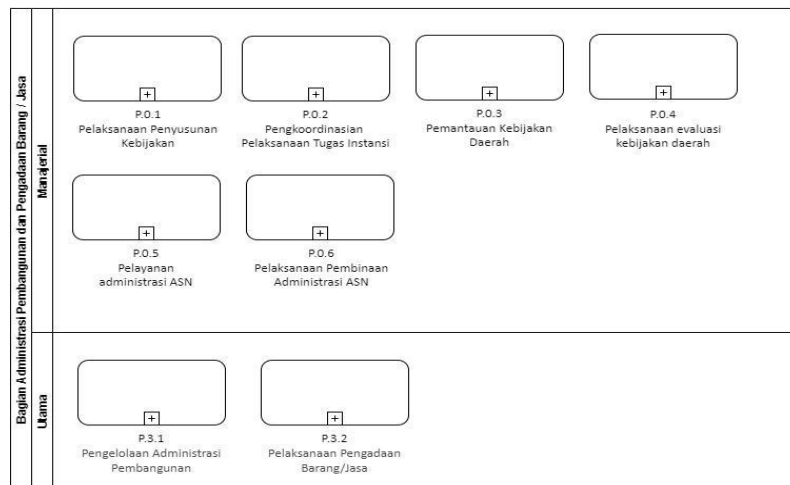
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.3.1	Pengelolaan Administrasi Pembangunan	P.3.1.1	Penyusunan Program
		P.3.1.2	Pelaksanaan Pengendalian Program

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.3.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	P.3.2.1	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik
		P.3.2.2	Pengelolaan pengadaan barang/jasa

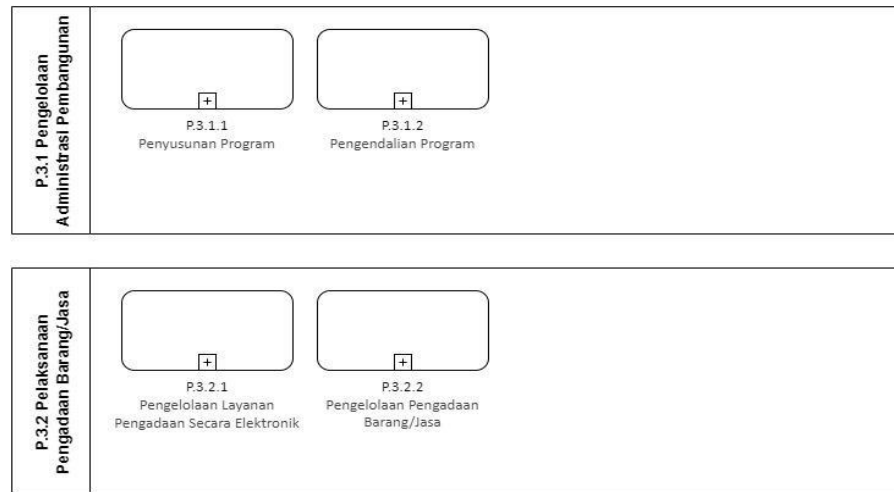
Sebagaimana pada Tabel 2.15, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau subkoordinator pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau subkoordinator pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail proses bisnis level 0 Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan dapat dilihat pada

Gambar 2.9



Gambar 2.9 Peta Proses Bisnis Level 0 Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan

Berdasarkan **Gambar 2.9**, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.3.1 dan P.3.2 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.10**.



Gambar 2.10 Peta Proses Bisnis Utama Level 1 Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan

Gambar 2.10 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari subkoordinator pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan sehingga menghasilkan **2 (dua) proses bisnis utama level 0 dan 4 (empat) proses bisnis utama level 1.**

4. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat** memiliki urusan **Sekretariat Daerah**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, **Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat** memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 02.07 Badan Usaha Milik Negara, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat** dengan kode proses bisnis **P.04**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021** dimana Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekda dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi, penyusunan pedoman, fasilitasi sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Daerah dan pemberdayaan perekonomian serta melaksanakan koordinasi penyusunan petunjuk teknis peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang keagamaan. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.16**

Tabel 2.16 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan
P.0.2	Pelaksanaan Tugas Instansi
P.0.3	Pemantauan Kebijakan Daerah
P.0.4	Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Daerah
P.0.5	Pelayanan Administrasi ASN
P.0.6	Pelaksanaan Pembinaan Administratif ASN

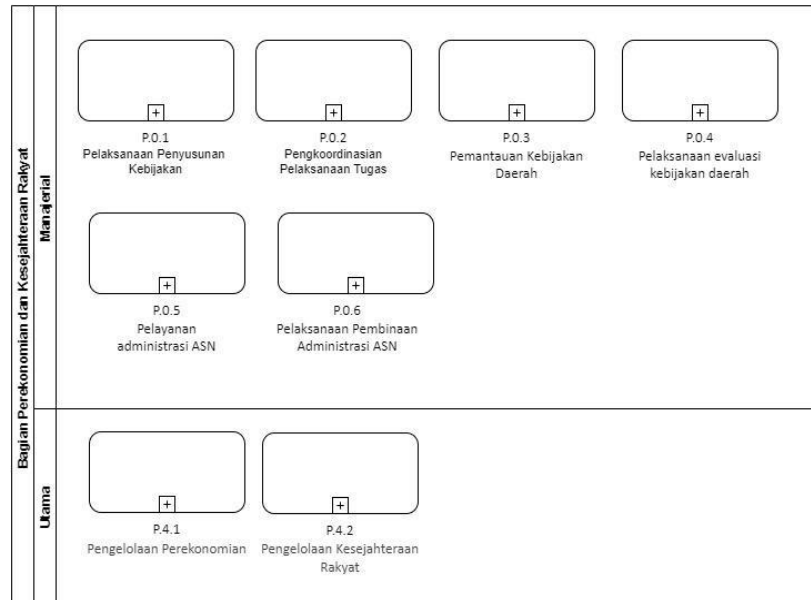
Tabel 2.16 di analisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. Sehingga pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat memiliki 6 (enam) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1 sampai dengan P.0.6. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.17**.

Tabel 2.17 Daftar Proses Level 0 dan Level 1 Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.4.1	Pengelolaan Perekonomian	P.4.1.1	Pengelolaan perekonomian
P.4.2	Pengelolaan Kesejahteraan Rakyat	P.4.1.2	Pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
		P.4.1.3	Pengelolaan Kesejahteraan Rakyat

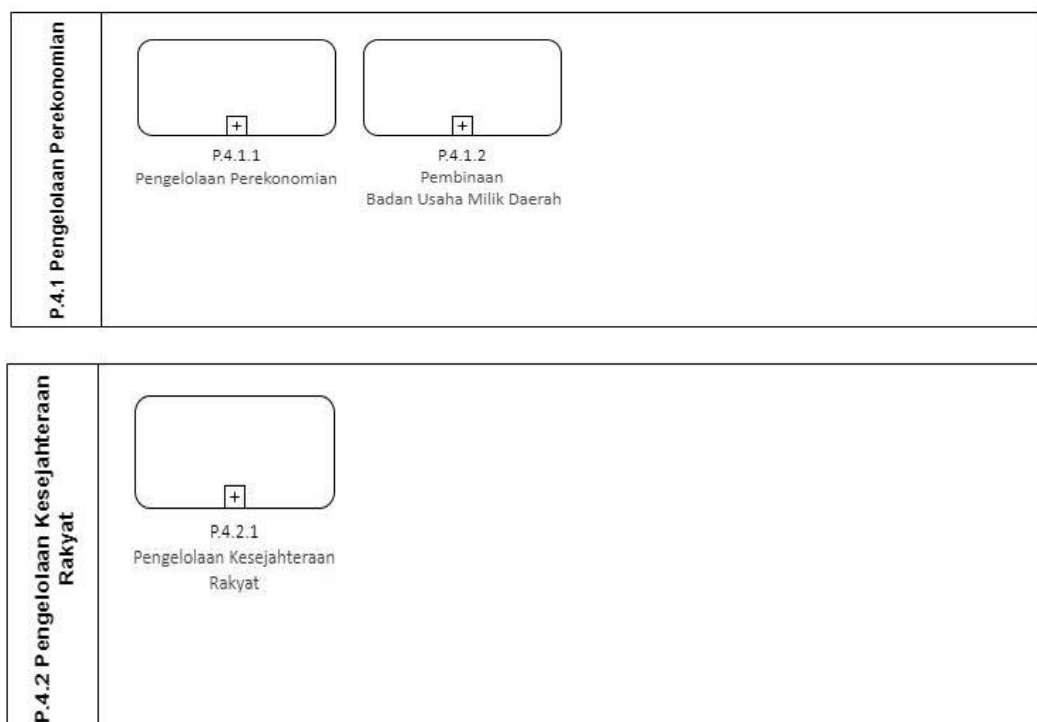
Tabel 2.17, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau subkoordinator pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau subkoordinator pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dapat dilihat **Gambar 2.13**.



Gambar 2.13 Peta Proses Bisnis Level 0
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan Gambar 2.13, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Pada Proses bisnis P.4.1 dan P.4.2 merupakan proses bisnis level 1 utama pada **Gambar 2.14**.



Gambar 2.14 Peta Proses Bisnis Utama Level 1
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Gambar 2.14 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari subkoordinator pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sehingga menghasilkan **2 (dua) proses bisnis utama level 0** dan **3 (tiga) proses bisnis utama level 1**.

5. Bagian Umum

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Bagian Umum** memiliki urusan **Sekretariat Daerah**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Bagian Umum memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 09.07 Kesekretariatan Negara, Bagian Umum** dengan kode proses bisnis **P.05**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021** dimana Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan Sekretariat Daerah dan keuangan pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kepegawaian Sekretariat Daerah. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.18**

Tabel 2.18 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan
P.0.2	Pelaksanaan Tugas Instansi
P.0.3	Pemantauan Kebijakan Daerah
P.0.4	Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Daerah
P.0.5	Pelayanan Administrasi ASN
P.0.6	Pelaksanaan Pembinaan Administratif ASN

Tabel 2.18 di analisis berdasarkan dari proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Bagian Umum. Sehingga pada Bagian Umum memiliki 6 (enam) proses bisnis level 0

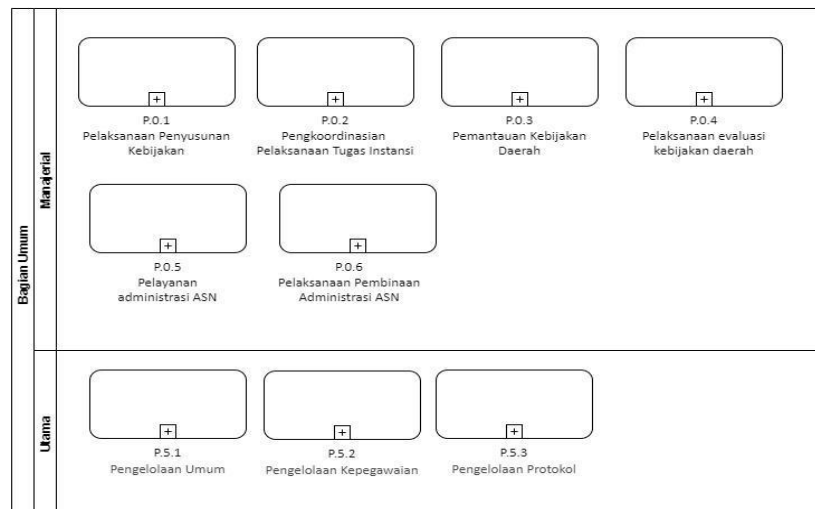
manajerial yaitu P.0.1 sampai dengan P.0.6. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.19**.

Tabel 2.19 Daftar Proses Level 0 dan Level 1 Bagian Umum

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.5.1	Pengelolaan Umum	P.5.1.1	Pengelolaan Tata Usaha
		P.5.1.2	Pengelolaan Keuangan
		P.5.1.3	Pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan
P.5.2	Pengelolaan Kepegawaian		
P.5.3	Pengelolaan Protokol		

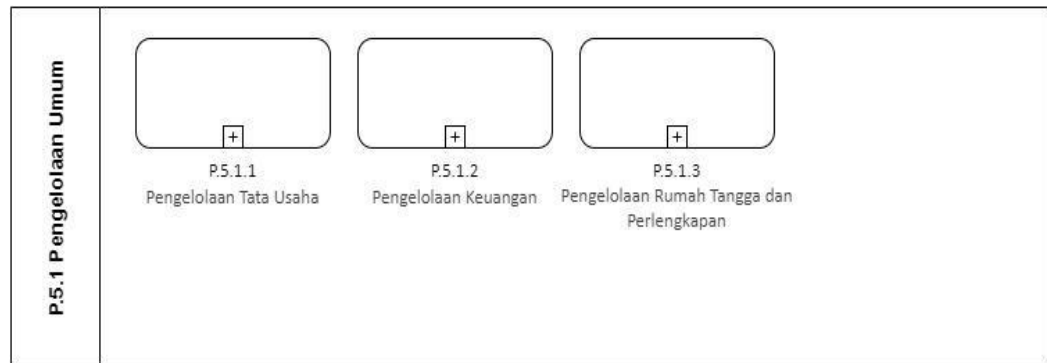
Sebagaimana pada Tabel 2.19, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau subkoordinator pada Bagian Umum. Selanjutnya pada proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau subkoordinator pada Bagian Umum. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Bagian Umum dapat dilihat

Gambar 2.15



Gambar 2.15 Peta Proses Bisnis Level 0 Bagian Umum

Berdasarkan Gambar 2.15, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Pada Proses bisnis P.5.1, P.5.2, dan P.5.3 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada pada **Gambar 2.16**.



Gambar 2.16

Peta Proses Bisnis Utama Level 1 Bagian Umum

Gambar 2.16 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari subkoordinator pada Bagian Umum, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Bagian Umum sehingga menghasilkan **1 proses bisnis utama level 0** dan **3 (tiga) proses bisnis utama level 1**.

6. Bagian Pemerintahan

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Bagian Pemerintahan** memiliki urusan **Sekretariat Daerah**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Bagian Pemerintahan memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 09.06 Aparatur Negara, Bagian Pemerintahan** dengan kode proses bisnis **P.06**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021** dimana Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan otonomi daerah, penyelenggaraan kerja sama daerah, dan pembinaan kecamatan serta penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.20**

Tabel 2.20 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
-----------	------------------

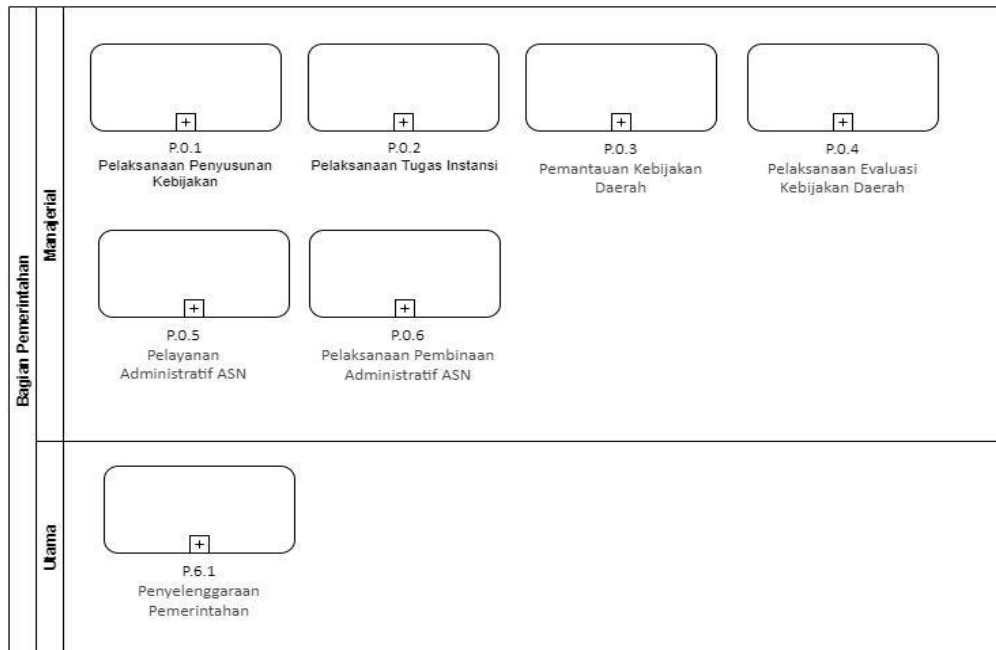
Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan
P.0.2	Pelaksanaan Tugas Instansi
P.0.3	Pemantauan Kebijakan Daerah
P.0.4	Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Daerah
P.0.5	Pelayanan Administrasi ASN
P.0.6	Pelaksanaan Pembinaan Administratif ASN

Tabel 2.20 di analisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Bagian Pemerintahan. Sehingga pada Bagian Pemerintahan memiliki 6 (enam) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1 sampai dengan P.0.6. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.21**.

Tabel 2.21 Daftar Proses Level 0 dan Level 1 Bagian Pemerintahan

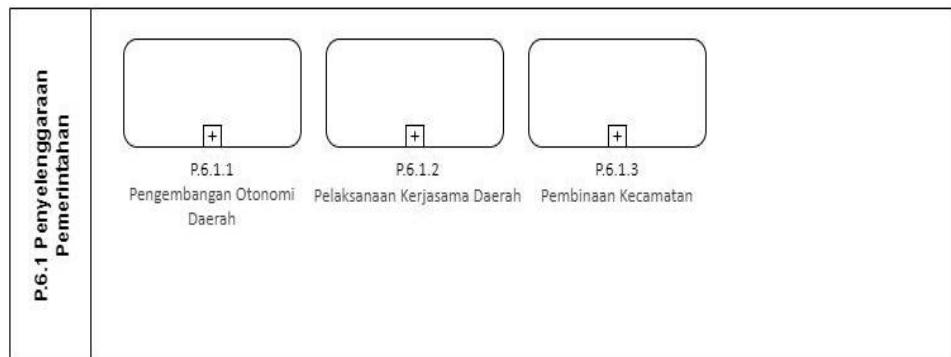
Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.6.1	Pengelolaan Pemerintahan	P.6.1.1	Pengembangan Otonomi Daerah
		P.6.1.2	Pelaksanaan Kerjasama Daerah
		P.6.1.3	Pembinaan Kecamatan

Sebagaimana pada Tabel 2.21, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau subkoordinator pada Bagian Pemerintahan. Selanjutnya pada proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau subkoordinator pada Bagian Pemerintahan. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Bagian Pemerintahan dapat dilihat pada **Gambar 2.17**



Gambar 2.17 Peta Proses Bisnis Level 0 Bagian Pemerintahan

Berdasarkan Gambar 2.17, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.6.1 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.18**.



Gambar 2.18 Peta Proses Bisnis Utama Level 1 Bagian Pemerintahan

Gambar 2.18 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari subkoordinator pada Bagian Pemerintahan, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Bagian Pemerintahan sehingga menghasilkan **1 (satu) proses bisnis utama level 0** dan **3 (tiga) proses bisnis utama level 1**.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** memiliki urusan

Ketentraman, Ketertiban Umuarsm dan Perlindungan. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 04.02 Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah** dengan kode proses bisnis **P.07**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja** dimana Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas memimpin, menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.22**

Tabel 2.22 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pengelolaan Administrasi sarana dan prasarana
P.0.2	Pengelolaan Administrasi umum
P.0.3	Penyusunan Perencanaan
P.0.4	Pengelolaan data belanja
P.0.5	Pengelolaan keuangan

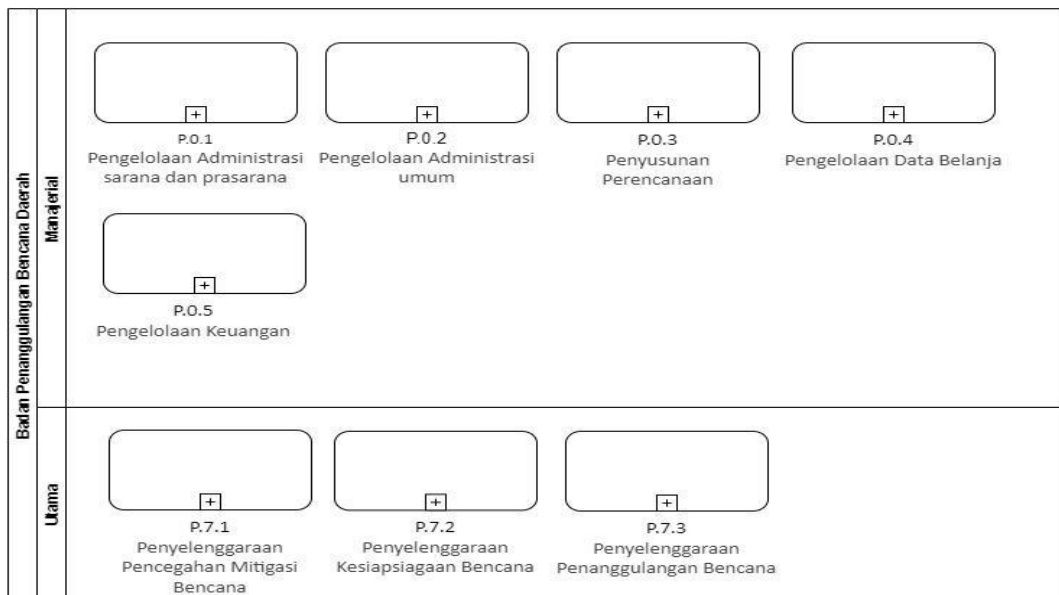
Tabel 2.22 di analisis berdasarkan dari proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sehingga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 5 proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.5. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.23**.

Tabel 2.23 Daftar Proses Level 0 dan Level 1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.7.1	Penyelenggaraan Pencegahan Mitigasi Bencana	P.7.1.1	Penyuluh Pencegahan Bencana
P.7.2	Penyelenggaraan Kesiapsiagaan	P.7.2.1	Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
	Bencana		
P.7.3	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	P.7.3.1	Pengelolaan Kedaruratan Bencana
		P.7.3.2	Pengelolaan Logistik
		P.7.3.3	Pelaksanaan Rehabilitasi
		P.7.3.4	Pelaksanaan Rekonstruksi

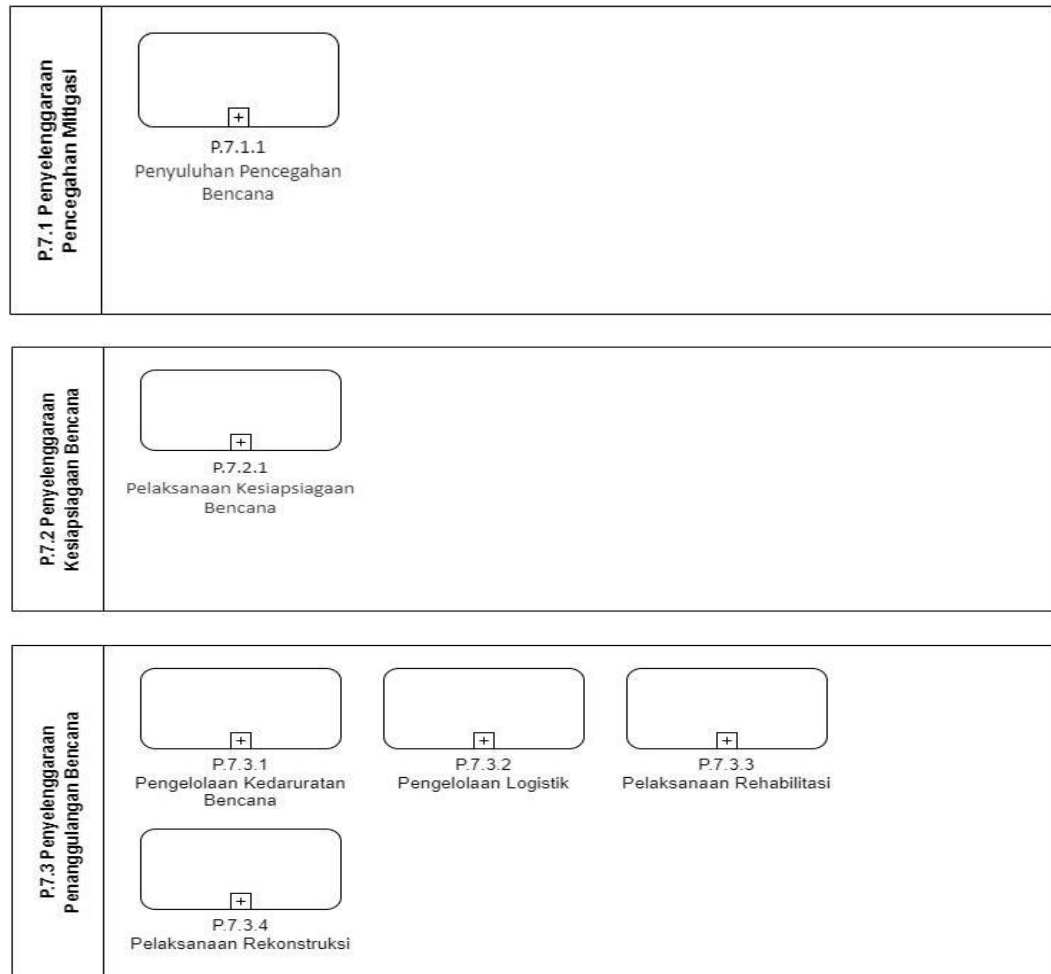
Tabel 2.23 Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau subkoordinator pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau subkoordinator pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan MENPAN-RB No. 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada **Gambar 2.19**



Gambar 2.19 Peta Proses Bisnis Level 0
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan **Gambar 2.19**, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Pada

Proses bisnis P.7.1, P.7.2, dan P.7.3 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya pada **Gambar 2.20**.



Gambar 2.20 Peta Proses Bisnis Utama Level 1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Gambar 2.20 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari subkoordinator pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah sehingga menghasilkan **3 (tiga) proses bisnis utama level 0** dan **6 (enam) proses bisnis utama level 1**.

8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** memiliki urusan **Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki referensi arsitektur

proses bisnis SPBE yaitu **RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional dan RAB 06.03 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** dengan kode proses bisnis **P.08**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun No. 83 tahun 2021** dimana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.24**

Tabel 2.24 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Penyusunan Perencanaan
P.0.2	Pengelolaan Umum
P.0.3	Penyiapan Kepegawaian
P.0.4	Pengelolaan Keuangan

Tabel 2.24 di analisis berdasarkan dari proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sehingga pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki 4 proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.25**.

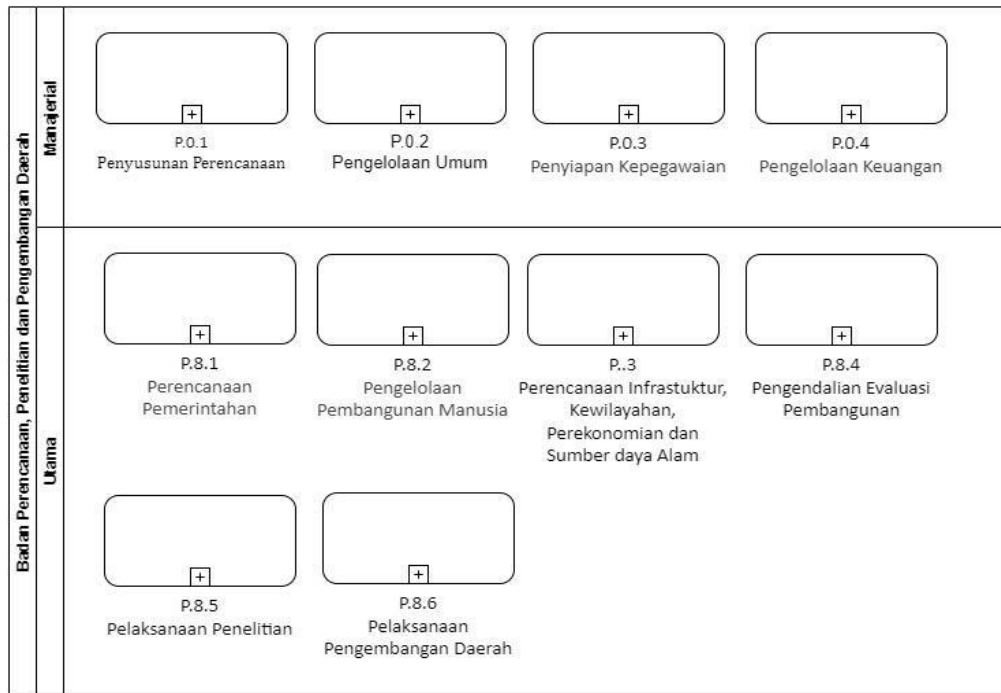
Tabel 2.25 Daftar Proses Level 0 dan Level 1

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.8.1	Perencanaan Pemerintahan	P.8.1.1	Penyelenggaraan Pemerintahan
P.8.2	Pengelolaan Pembangunan Manusia	P.8.2.1	Pelaksanaan Pembangunan Manusia
P.8.3	Pelaksanaan Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan	P.8.3.1	Pelaksanaan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
		P.8.3.2	Perencanaan

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
	Sumber Daya Alam		Perekonomian dan Sumber Daya Alam
P.8.4	Pengendalian Evaluasi Pembangunan	P.8.4.1	Perencanaan Pendanaan Pembangunan
		P.8.4.2	Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan
P.8.5	Pelaksanaan Penelitian	P.8.5.1	Pengelolaan Penelitian dan Kajian
P.8.6	Pelaksanaan Pengembangan Daerah	P.8.6.1	Pengelolaan Inovasi Pengembangan Daerah

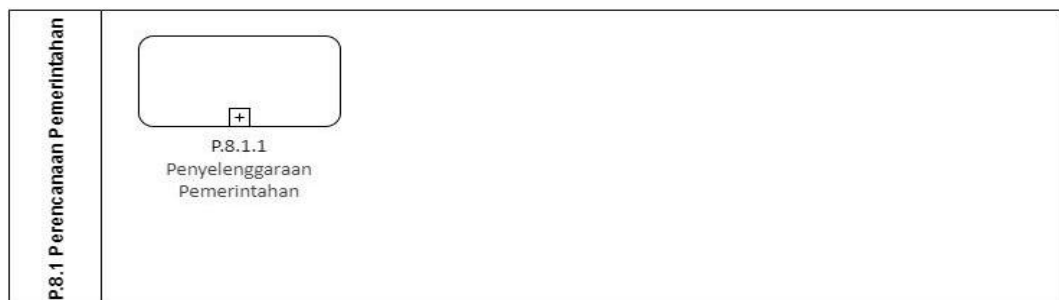
Tabel 2.25, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau subkoordinator pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau subkoordinator pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dapat dilihat pada **Gambar 2.21**.

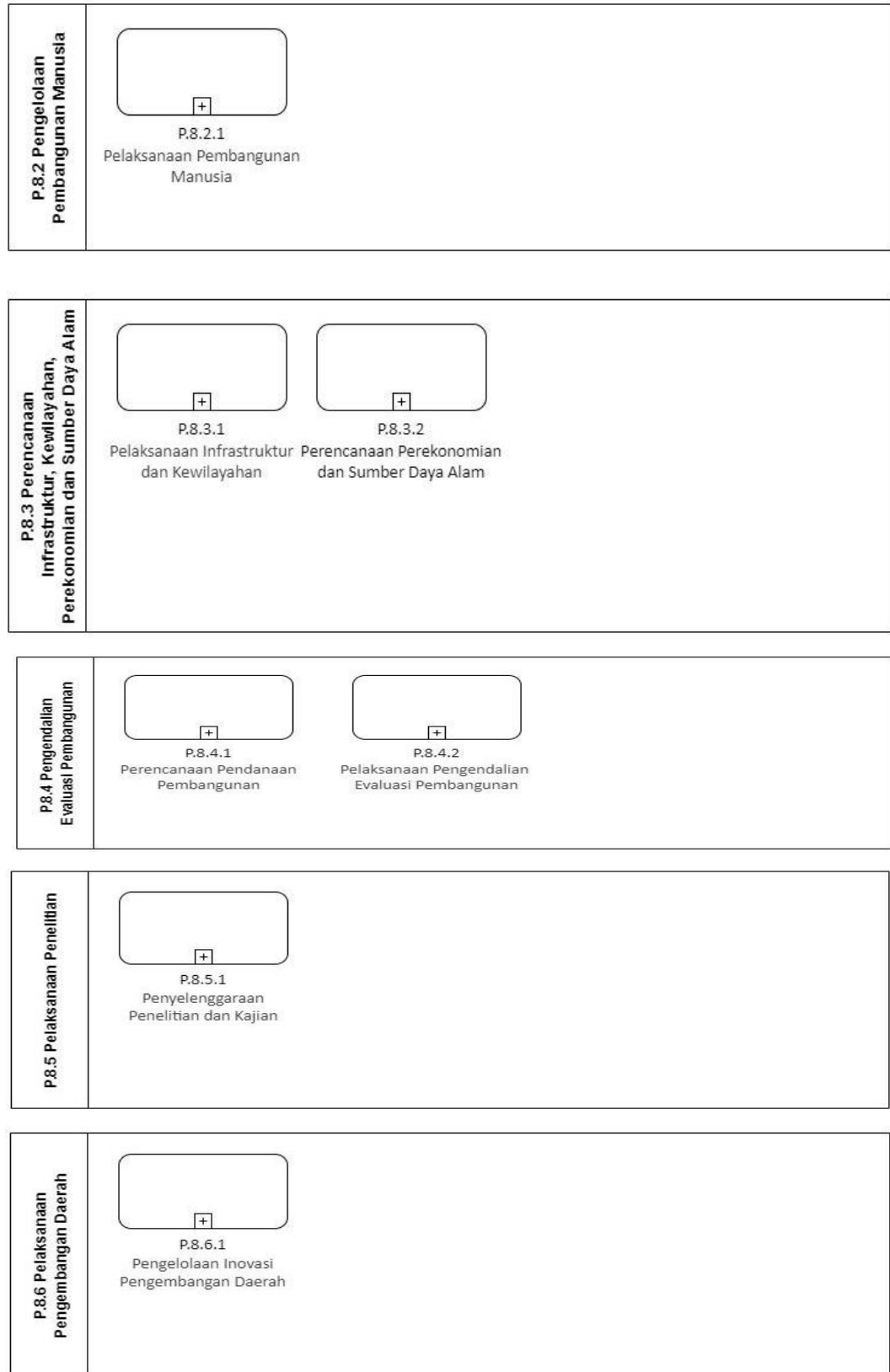


Gambar 2.21 Peta Proses Bisnis Level 0

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan Gambar 2.21, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Pada Proses bisnis P.8.1, P.8.2, P.8.3, P.8.4, P.8.5, dan P.8.6 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya digambarkan pada **Gambar 2.22**.





Gambar 2.22 Peta Proses Bisnis Utama Level 1

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Gambar 2.22 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari subkoordinator pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki

oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sehingga menghasilkan 6 (enam) proses bisnis utama level 0 (nol) dan 8 (delapan) proses bisnis utama level 1.

9. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Badan Keuangan dan Aset Daerah** memiliki urusan **Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 09.02 Keuangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah** dengan kode proses bisnis **P.09**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 81 Tahun 2021** dimana dimana Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.26**

Tabel 2.26 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Penyusunan Perencanaan
P.0.2	Penyiapan Kepegawaian
P.0.3	Pengelolaan Umum
P.0.4	Pengelolaan Keuangan

Tabel 2.26 di analisis berdasarkan dari proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.27**.

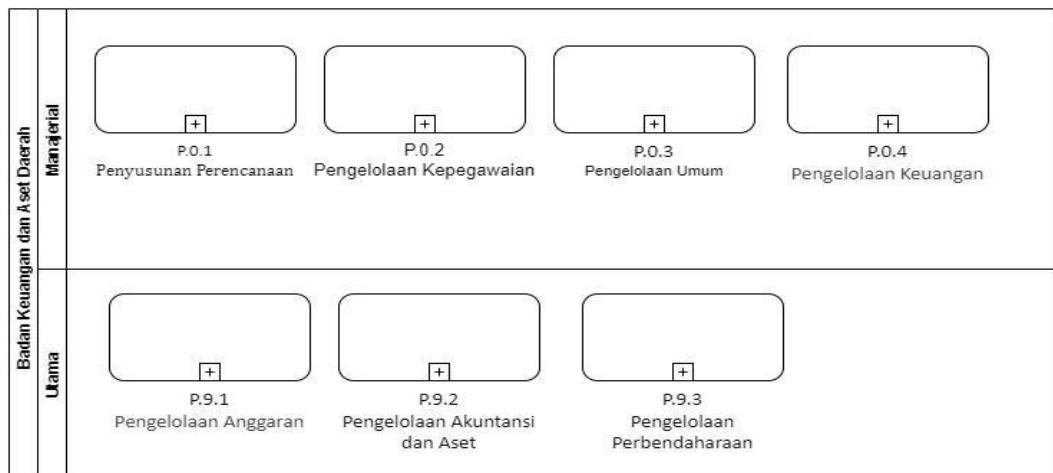
Tabel 2.27 Daftar Proses Level 0 dan Level 1

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.9.1	Pengelolaan Anggaran	P.9.1.1	Penyusunan Kebijakan Anggaran
P.9.2	Pengelolaan	P.9.2.1	Pengelolaan

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
	Akuntansi dan Aset		Pendayagunaan Aset
P.9.3	Pengelolaan Perbendaharaan	P.9.3.1	Pengelolaan Kas Daerah
		P.9.3.2	Pengelolaan Anggaran

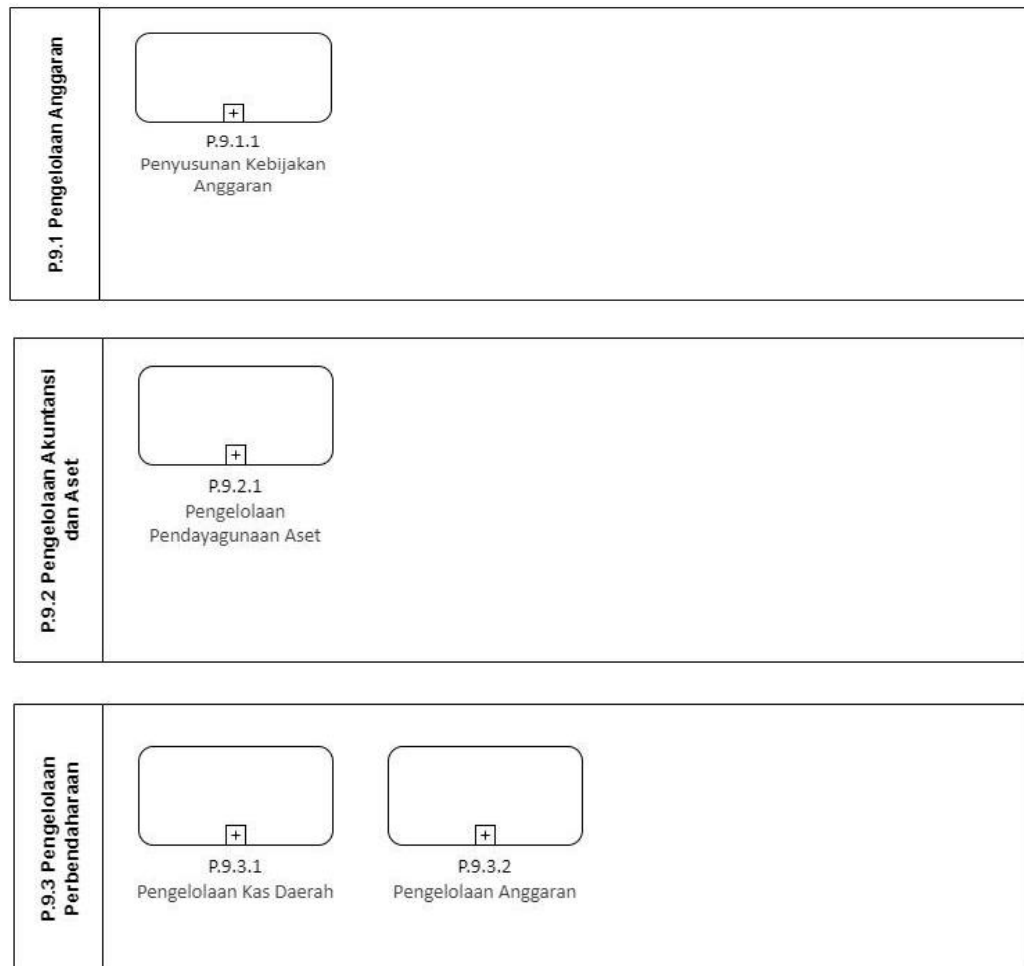
Tabel 2.27, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau subkoordinator pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau subkoordinator pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada **Gambar 2.23**.



Gambar 2.23 Peta Proses Bisnis Level 0
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Gambar 2.23, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Pada

Proses bisnis P.9.1, P.9.2, dan P.9.3 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.24**.



Gambar 2.24 Peta Proses Bisnis Utama Level 1
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Gambar 2.24 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari subkoordinator pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sehingga menghasilkan **3 (tiga) proses bisnis utama level 0** dan **4 (empat) proses bisnis utama level 1**.

10. Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Badan Pendapatan Daerah** memiliki urusan **Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Badan Pendapatan Daerah memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 09.02 Keuangan, Badan Pendapatan Daerah** dengan kode proses bisnis **P.10**. Sedangkan

penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2021** dimana Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang penghimpunan pajak daerah. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.28**

Tabel 2.28 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Penyusunan Perencanaan
P.0.2	Penyiapan Kepegawaian
P.0.3	Pengelolaan Umum
P.0.4	Pengelolaan Keuangan

Tabel 2.28 di analisis berdasarkan dari proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Badan Pendapatan Daerah. Sehingga pada Badan Pendapatan Daerah memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.29**.

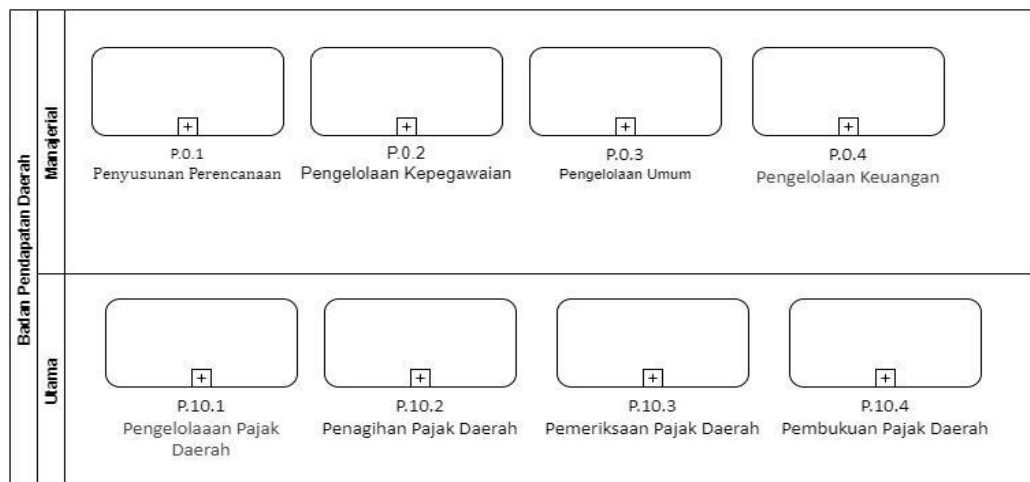
Tabel 2.29 Daftar Proses Level 0 dan Level 1

Badan Pendapatan Daerah

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.10.1	Pengelolaan Pajak Daerah	P.10.1.1	Pelayanan Pajak Daerah
		P.10.1.2	Penyusunan Penetapan Pajak Daerah
P.10.2	Penagihan Pajak Daerah	P.10.2.1	Pengelolaan Intensifikasi Pajak Daerah
		P.10.2.3	Pengelolaan Ekstensifikasi Pajak Daerah
P.10.3	Pemeriksaan Pajak Daerah	P.10.3.1	Pelaksanaan Evaluasi Pajak Daerah
P.10.4	Pengelolaan Pembukuan	P.10.4.1	Pendataan Pajak Daerah

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
	Pajak Daerah		

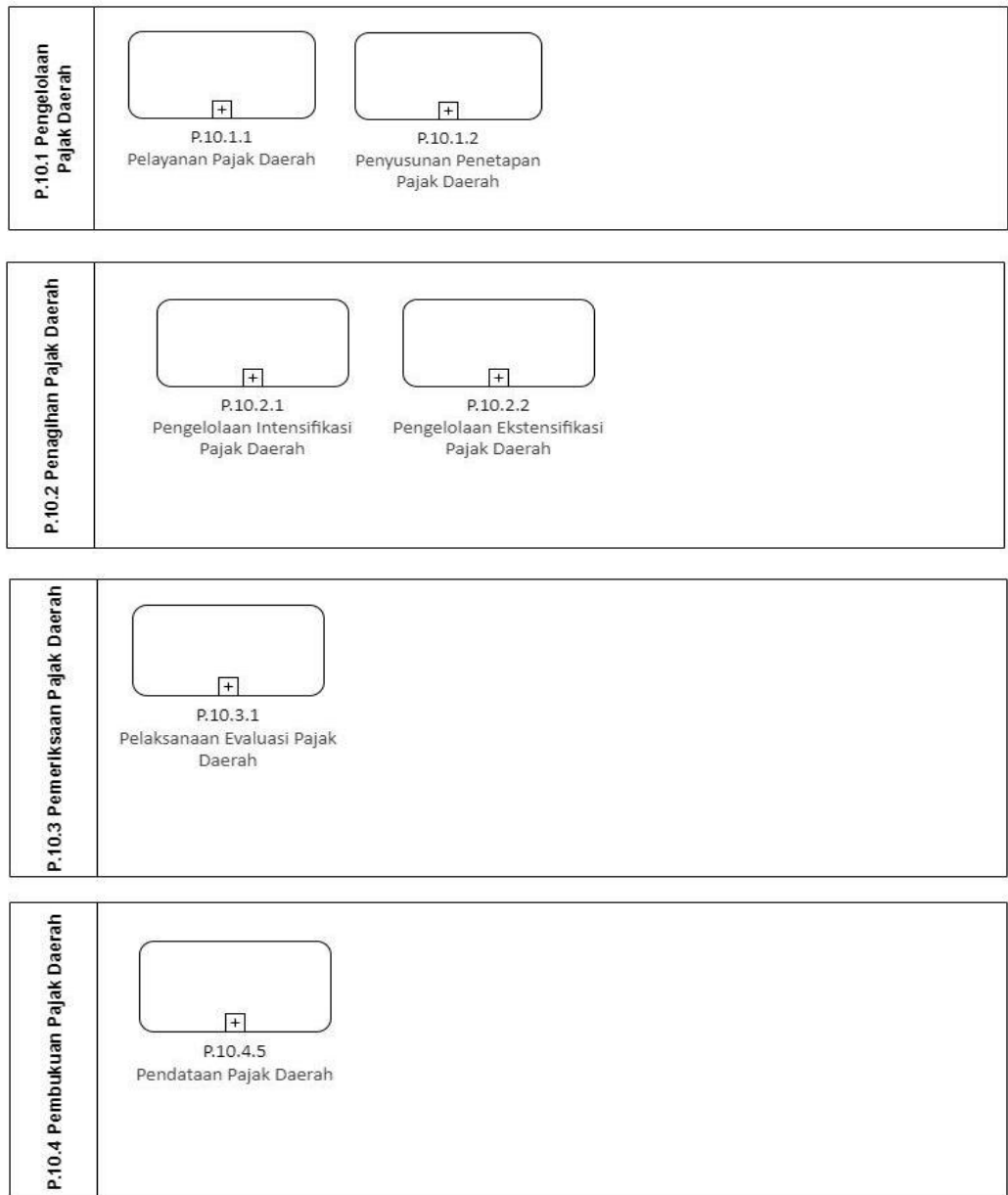
Tabel 2.29, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau subkoordinator pada Badan Pendapatan Daerah. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau subkoordinator pada Badan Pendapatan Daerah. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada **Gambar 2.25.**



Gambar 2.25 Peta Proses Bisnis Level 0

Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Gambar 2.25, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Pada Proses bisnis P.10.1, P.10.2, P.10.3, dan P.10.4 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.26.**



Gambar 2.26 Peta Proses Bisnis Utama Level 1
Badan Pendapatan Daerah

Gambar 2.26 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari subkoordinator pada Badan Pendapatan Daerah, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah sehingga menghasilkan **4 (empat) proses bisnis utama level 0 dan 6 (enam) proses bisnis utama level 1.**

11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

memiliki urusan **Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 09.06 Aparatur Negara dan RAB 06.02 Pendidikan, Bagian Pemerintahan** dengan kode proses bisnis **P.11**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 80 Tahun 2021** dimana Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.30**

Tabel 2.30 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pengelolaan Umum
P.0.2	Pengelolaan Keuangan
P.0.3	Penyusunan Perencanaan
P.0.4	Pengelolaan Kepegawaian

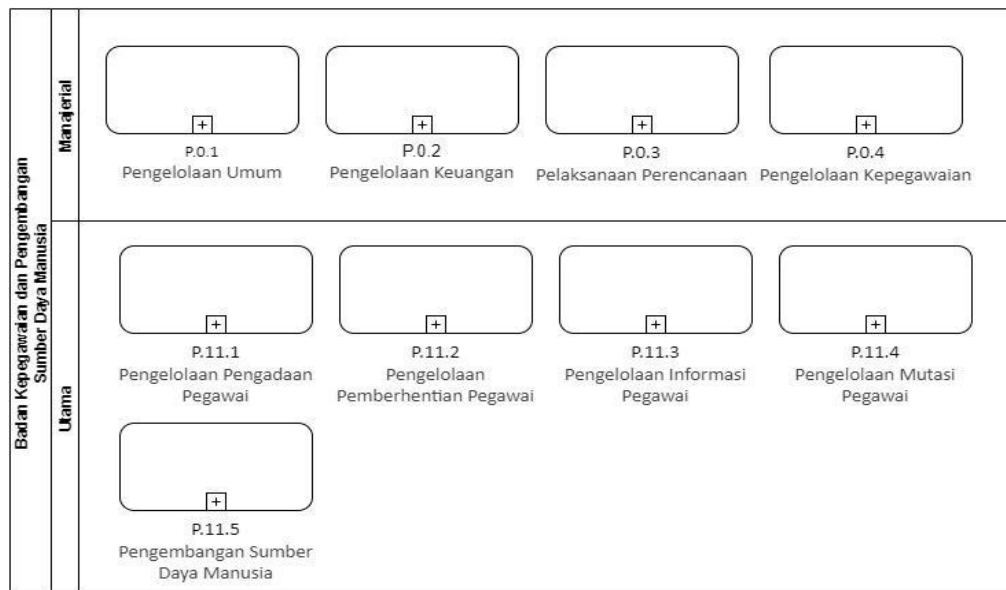
Tabel 2.30 di analisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia. Sehingga pada Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.31**.

Tabel 2.31 Daftar Proses Level 0 dan Level 1
Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.11.1	Pengelolaan Pengadaan Pegawai	P.11.1.1	Penyusunan Formasi Pegawai
		P.11.1.2	Perencanaan Pengadaan Pegawai
P.11.2	Pengelolaan Pemberhentian Pegawai	P.11.2.1	Pelaksanaan Pembinaan
		P.11.2.3	Perencanaan Pemberhentian
P.11.3	Pengelolaan Informasi	P.11.3.1	Penyebaran informasi Pegawai

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
	Pegawai		
P.11.4	Pengelolaan Mutasi Pegawai	P.11.4.1	Pengelolaan Jabatan
		P.11.4.2	Pengelolaan Kepangkatan
P.11.5	Pengembangan Sumber Daya Manusia	P.11.5.1	Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Teknis
		P.11.5.2	Penyusunan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

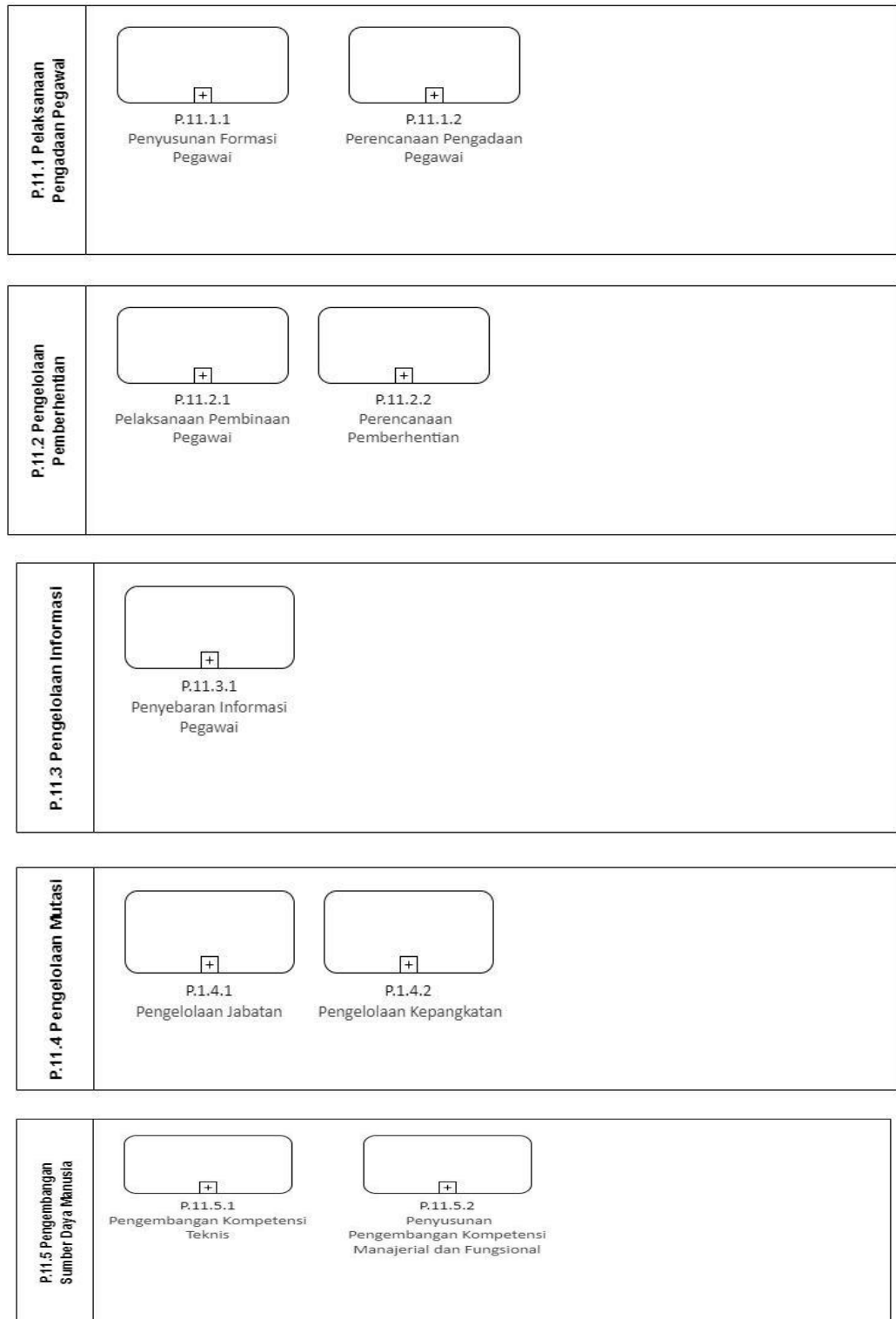
Tabel 2.31, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia. Selanjutnya pada proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan MENPAN-RB No. 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada **Gambar 2.27.**



Gambar 2.27 Peta Proses Bisnis Level 0
Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Gambar 2.27, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.11.1, P.11.2, P.11.3, P.11.4, dan P.11.5

merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.28**.



Gambar 2.28 Peta Proses Bisnis Utama Level 1
Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia

Gambar 2.28 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas

pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia sehingga menghasilkan **5 (lima) proses bisnis utama level 0** dan **9 (sembilan) proses bisnis utama level 1**.

12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** memiliki urusan **Kesatuan Bangsa dan Politik**. Berdasarkan tentang Arsitektur SPBE Nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 05.03 Hak Asasi Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** dengan kode proses bisnis **P.12**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2021** dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan bina ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, lembaga politik dan organisasi kemasyarakatan. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.32**

Tabel 2.32 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Penyusunan Perencanaan
P.0.2	Pengelolaan Kepegawaian
P.0.3	Pengelolaan Umum
P.0.4	Pengelolaan Keuangan

Tabel 2.32 di analisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.33**.

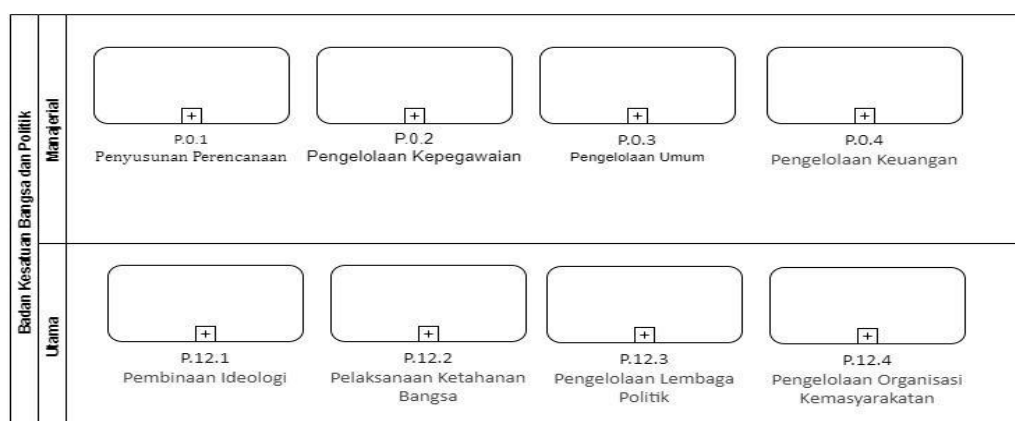
Tabel 2.33 Daftar Proses Level 0 dan Level 1

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
-----------	------------------	-----------	------------------

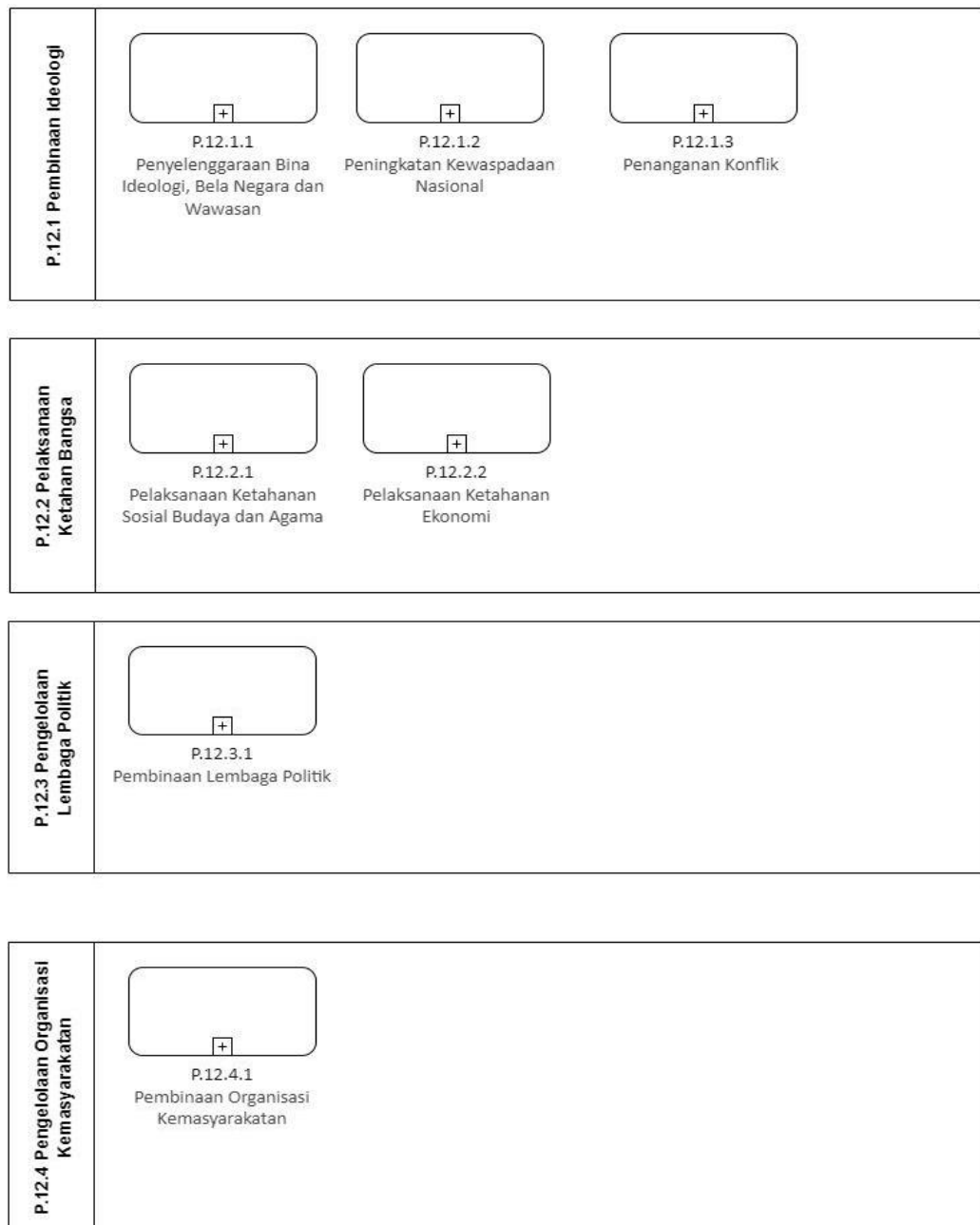
Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.12.1	Pembinaan Ideologi	P.12.1.1	Penyelenggaraan Bina Ideologi, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan
		P.12.1.2	Pengelolaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
P.12.2	Pelaksanaan Ketahanan Bangsa	P.12.2.1	Pelaksanaan Ketahanan Sosial Budaya dan Agama
		P.12.2.3	Penyiapan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi
P.12.3	Pengelolaan Lembaga Politik	P.12.3.1	Pembinaan Lembaga Politik
P.12.4	Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan	P.12.4.1	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel 2.33, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya pada proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan MENPAN-RB No. 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada **Gambar 2.29**



Gambar 2.29 Peta Proses Bisnis Level 0
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan **Gambar 2.29**, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.12.1, P.12.2, P.12.3, dan P.12.4 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.30**.



Gambar 2.30 Peta Proses Bisnis Utama Level 1

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Gambar 2.30 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga menghasilkan **4 (empat) proses bisnis utama level 0** dan **6 (enam) proses bisnis utama level 1**.

13. Inspektorat

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Inspektorat** memiliki urusan **Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Inspektorat memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 09.06 Aparatur Negara dan RAB 09.07 Kesekretariatan Negara, Inspektorat** dengan kode proses bisnis **P.13**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2021** dimana Inspektorat mempunyai tugas membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.34**

Tabel 2.34 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Penyusunan Perencanaan
P.0.2	Pengelolaan Umum
P.0.3	Pengelolaan Keuangan
P.0.4	Pengelolaan Kepegawaian

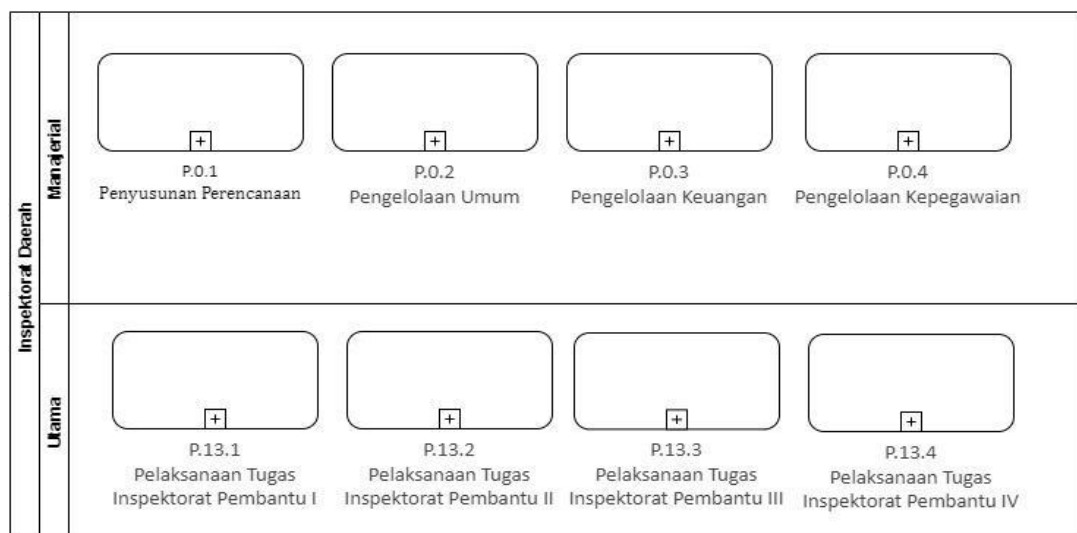
Tabel 2.34 di analisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Inspektorat. Sehingga pada Inspektorat memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.35**.

Tabel 2.35 Daftar Proses Level 0 dan Level 1 Inspektorat

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.13.1	Pelaksanaan Tugas Inspektorat		

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
	Pembantu I		
P.13.2	Pelaksanaan Tugas Inspektorat Pembantu II		
P.13.3	Pelaksanaan Tugas Inspektorat Pembantu III		
P.13.4	Pelaksanaan Tugas Inspektorat Pembantu IV		

Tabel 2.35, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Inspektorat. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Inspektorat. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan MENPAN-RB No. 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Inspektorat dapat dilihat pada **Gambar 2.31**.



Gambar 2.31 Peta Proses Bisnis Level 0 Inspektorat

Berdasarkan Gambar 2.31, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Inspektorat, sehingga menghasilkan **4 (empat) proses bisnis utama level 0**.

14. Sekretariat DPRD

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Sekretariat DPRD** memiliki urusan **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Sekretariat DPRD memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 09.07 Sekretariat Negara, Sekretariat DPRD** dengan kode proses bisnis **P.14** dengan detail uraian proses dapat dilihat pada **Tabel 2.36**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 62 Tahun 2021** dimana Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tugas ahli dengan kemampuan keuangan daerah. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.36**

Tabel 2.36 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
P.0.2	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
P.0.3	Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
P.0.4	Penyediaan dan pengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Tabel 2.36 di analisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Sekretariat Daerah. Sehingga pada Sekretariat Daerah memiliki 4 (empat) proses

bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.37**.

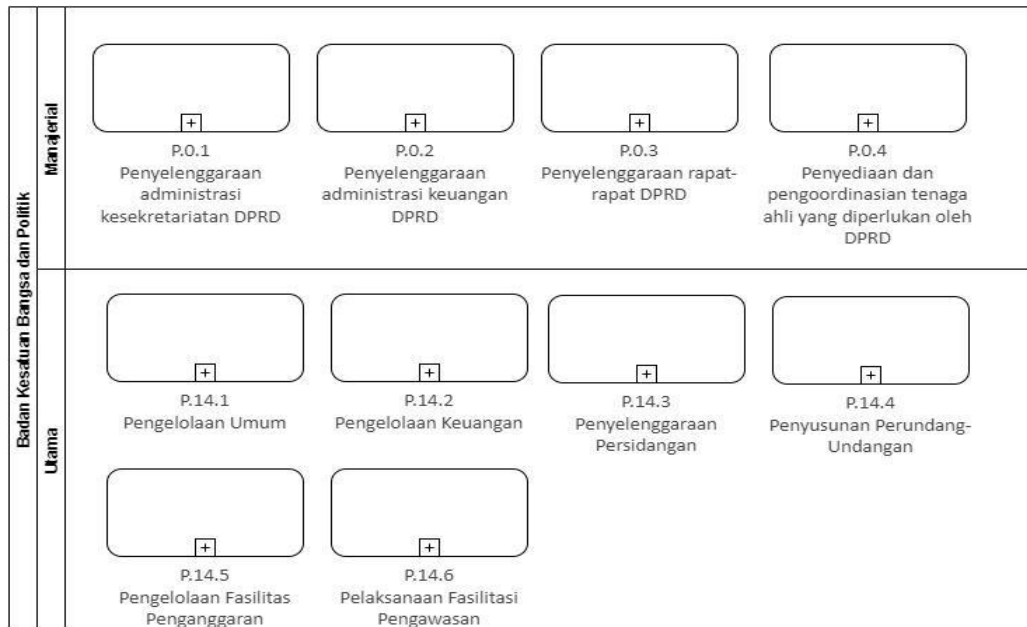
Tabel 2.37 Daftar Proses Level 0 dan Level 1 Sekretariat DPRD

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.14.1	Pengelolaan Umum	P.14.1.1	Penyusunan Program
P.14.2	Pengelolaan Keuangan	P.14.2.1	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
P.14.3	Penyelenggaraan Persidangan	P.14.3.1	Pelaksanaan Persidangan, Risalah dan Publikasi
P.14.4	Penyusunan Perundang-undangan	P.14.4.1	Penyusunan Kajian dan Perundang-undangan
		P.14.4.2	Pengesahan Perundang-undangan
P.14.5	Pengelolaan Fasilitas Penganggaran	P.14.5.1	Pelaksanaan Fasilitas Penganggaran
P.14.6	Pelaksanaan Pengawasan	P.14.6.1	Penyelenggaraan Fasilitasi Pengawasan

Tabel 2.37 Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Sekretariat DPRD. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Sekretariat DPRD. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah.

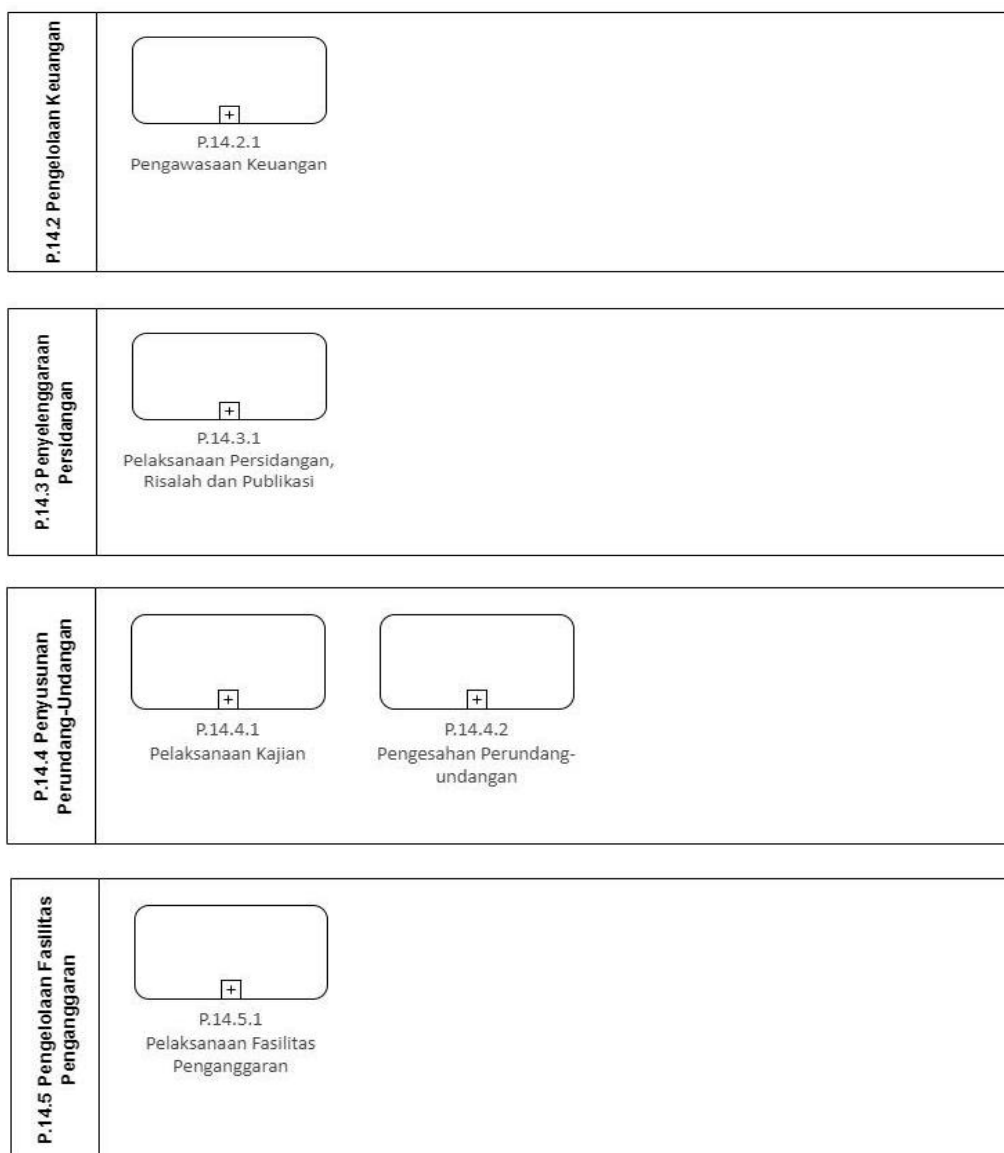
Detail Proses bisnis Level 0 Sekretariat DPRD dapat dilihat pada **Gambar 2.32** akan dijelaskan gambar proses bisnis level 0 Sekretariat DPRD.



Gambar 2.32 Peta Proses Bisnis Level 0 Sekretariat DPRD

Berdasarkan **Gambar 2.32**, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.14.1, P.14.2, P.14.3, P.14.4, P.14.5, dan P.14.6 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.33**.





Gambar 2.33 Peta Proses Bisnis Utama Level 1
Sekretariat DPRD

Gambar 2.33 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Sekretariat DPRD, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD sehingga menghasilkan **5 (lima) proses bisnis utama level 0** dan **7 (tujuh) proses bisnis utama level 1**.

15. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** memiliki urusan **Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional,

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 04.01 Kesehatan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** dengan kode proses bisnis **P.15**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 66 Tahun 2021** dimana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.38**

Tabel 2.38 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Penyusunan Perencanaan
P.0.2	Pengelolaan Umum
P.0.3	Pengelolaan Kepegawaian
P.0.4	Pengelolaan Keuangan

Tabel 2.38 di analisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sehingga pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1 sampai dengan P.0.4. Berikut detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.39**.

Tabel 2.39 Daftar Proses Level 0 dan Level 1

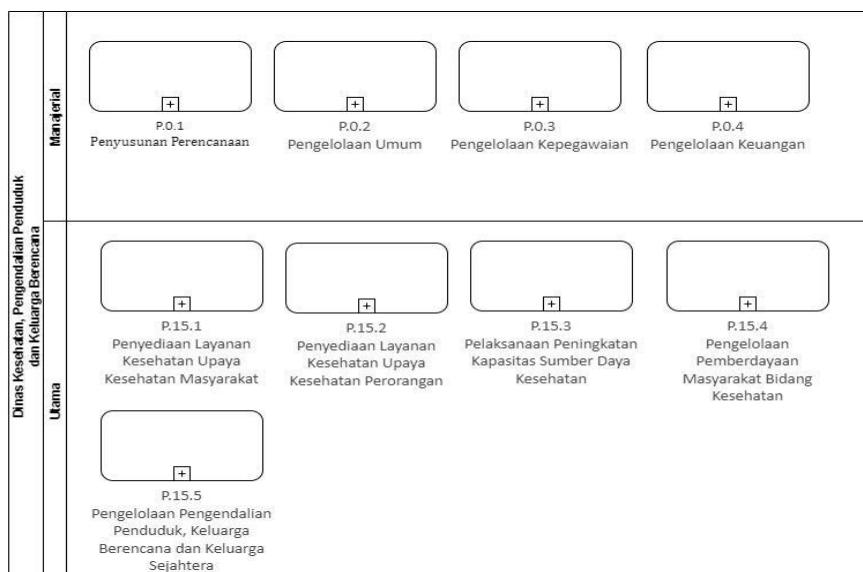
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.15.1	Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan	P.15.1.1	Pengelolaan Layanan Kesehatan Ibu, Balita, dan Gizi Masyarakat
P.15.2	Penyediaan Layanan	P.15.2.1	Penyelenggaraan Pelayanan

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
	Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat		Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa dan Napza
		P.15.2.2	Pengelolaan Penyakit Menular dan Tidak Menular
P.15.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	P.15.3.1	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
		P.15.3.2	Peningkatan Sumber Daya Manusia
		P.15.3.3	Pengawasan Pembiayaan Kesehatan
		P.15.3.4	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		P.15.3.5	Penyediaan Fasilitas Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit
P.15.4	Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	P.15.4.1	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kreatif
		P.15.4.2	Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga
		P.15.4.3	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
P.15.5	Pengelolaan Pengendalian Penduduk,	P.15.5.1	Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

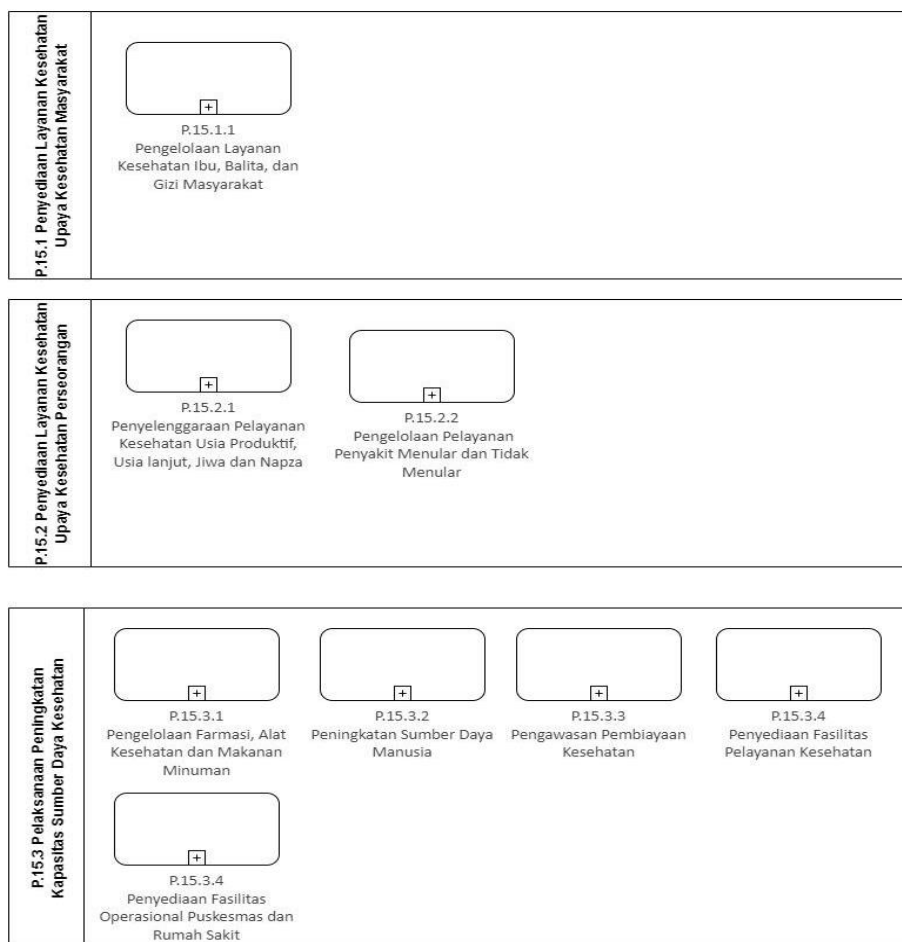
Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	P.15.5.2	Pelaksanaan Peningkatan Keluarga Sejahtera
		P.15.5.3	Pengelolaan Pengendalian Penduduk
		P.15.5.4	Penyusunan Advokasi Penggerakan Kependudukan
		P.15.5.5	Pengelolaan Informasi Kependudukan
		P.15.5.6	Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Berencana

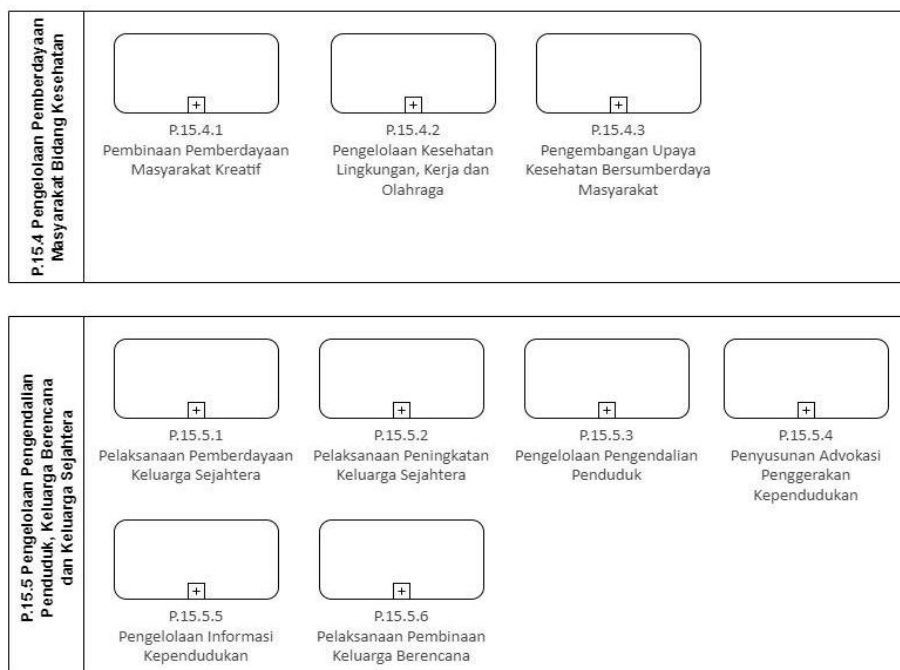
Tabel 2.39, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selanjutnya pada proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Level 0 dapat dilihat pada **Gambar 2.34**.



Gambar 2.34 Peta Proses Bisnis Level 0 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Gambar 2.34, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.15.1, P.15.2, P.15.3, P.15.4 dan P.15.5 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.35**.





Gambar 2.35 Peta Proses Bisnis Utama Level 1 Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambar 2.35 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga menghasilkan **5 (lima) proses bisnis utama level 0** dan **17 (tujuh belas) proses bisnis utama level 1**.

16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** memiliki urusan **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 03.01 Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dengan kode proses bisnis **P.16** dengan detail uraian proses dapat dilihat pada **Tabel 2.40**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2021** dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan urusan

pemerintahan di bidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta penataan ruang. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.26**

Tabel 2.40 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Penyusunan Perencanaan
P.0.2	Pengelolaan Kepegawaian
P.0.3	Pengelolaan Umum
P.0.4	Pengelolaan Keuangan

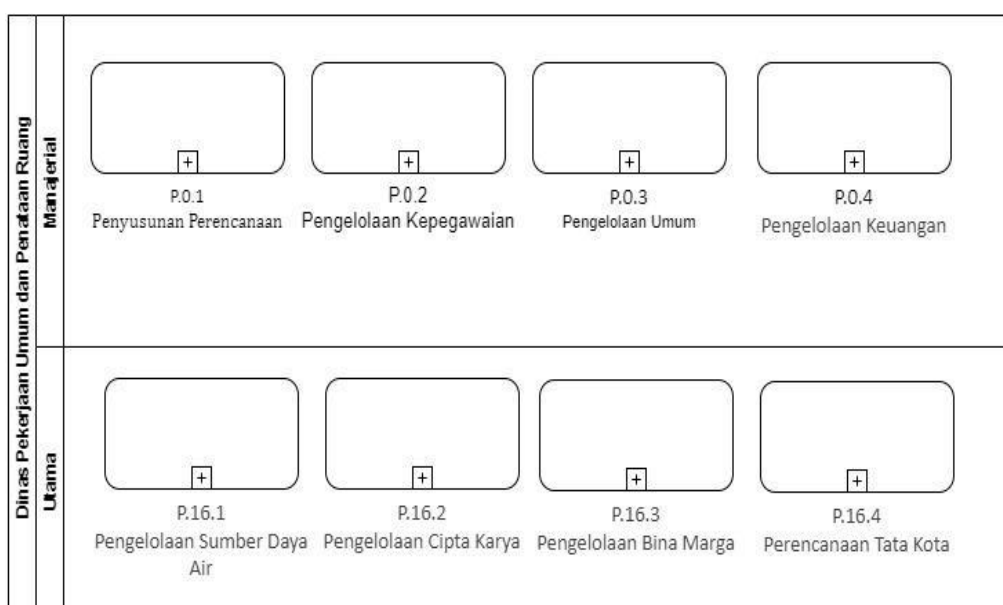
Tabel 2.40 di analisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Berikut detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.41**.

Tabel 2.41 Daftar Proses Level 0 dan Level 1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.16.1	Pengelolaan Sumber Daya Air	P.16.1.1	Penyelenggaraan Sumber Daya Air
		P.16.1.2	Pengelolaan Pengendalian banjir
P.16.2	Pengelolaan Cipta Karya	P.16.2.1	Pelaksanaan Pengembangan Jasa Konstruksi
		P.16.2.2	Perencanaan Penataan Bangunan Gedung
		P.16.2.3	Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan
P.16.3	Pengelolaan Bina Marga	P.16.3.1	Pengelolaan Pembangunan Jalan dan

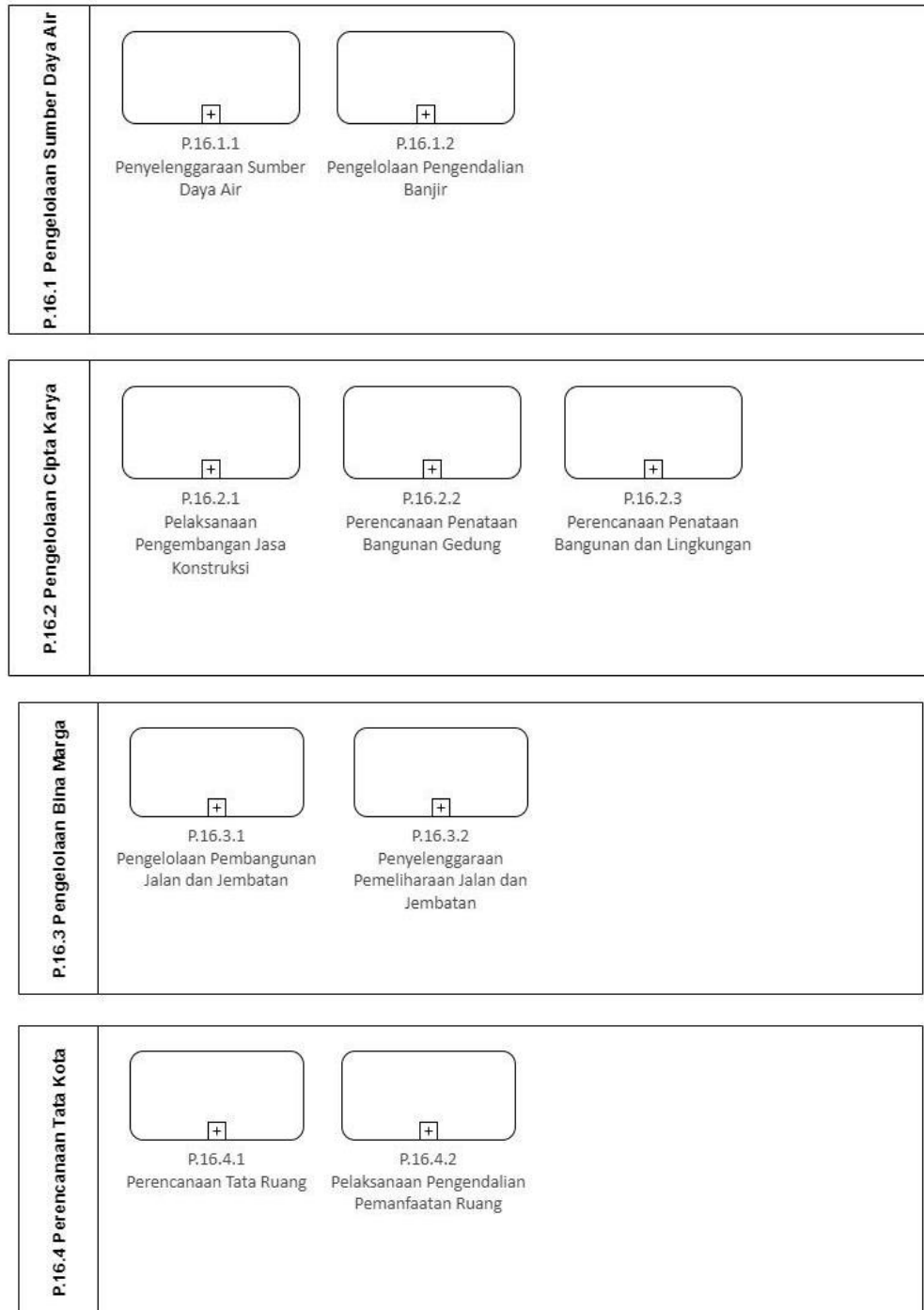
Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
			Jembatan
		P.16.3.2	Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
P.16.4	Perencanaan Tata Kota	P.16.4.1	Perencanaan Tata Ruang
		P.16.4.2	Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tabel 2.41 Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selanjutnya pada proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan MENPAN-RB No. 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang dapat dilihat pada **Gambar 2.36**.



Gambar 2.36 Peta Proses Bisnis Level 0
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Gambar 2.36, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.16.1, P.16.2, P.16.3, dan P.16.4 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.37**.



Gambar 2.37 Peta Proses Bisnis Utama Level 1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambar 2.37 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga menghasilkan **4 (empat) proses bisnis utama level 0** dan **9 (sembilan) proses bisnis utama level 1**.

17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** memiliki urusan **Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman** dan **Pertanahan**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 03.04 Perumahan, RAB 03.05 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal, dan RAB 03.06 Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** dengan kode proses bisnis **P.17**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun 2021** dimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan perumahan, pertanahan, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum, serta pemakaman. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.42**

Tabel 2.42 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pengelolaan Umum
P.0.2	Pengelolaan Keuangan
P.0.3	Penyusunan Perencanaan
P.0.4	Pengelolaan Kepegawaian

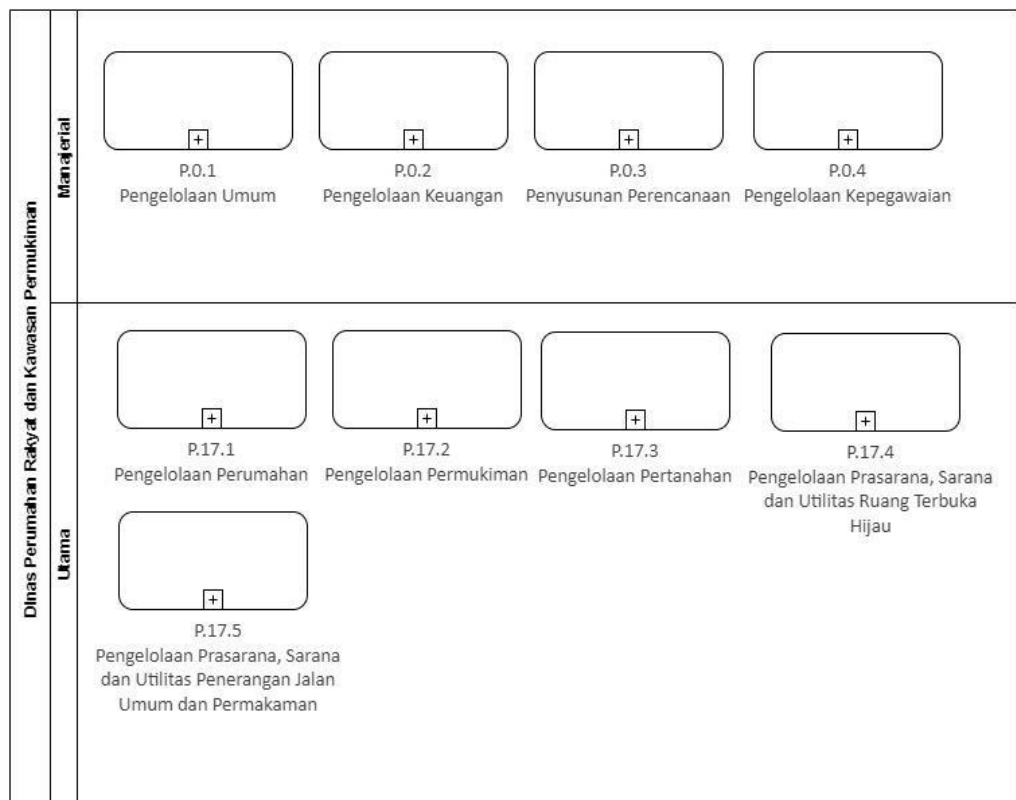
Tabel 2.42 di analisis berdasarkan dari proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sehingga pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Berikut detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.43**

Tabel 2.43 Daftar Proses Level 0 dan Level 1

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

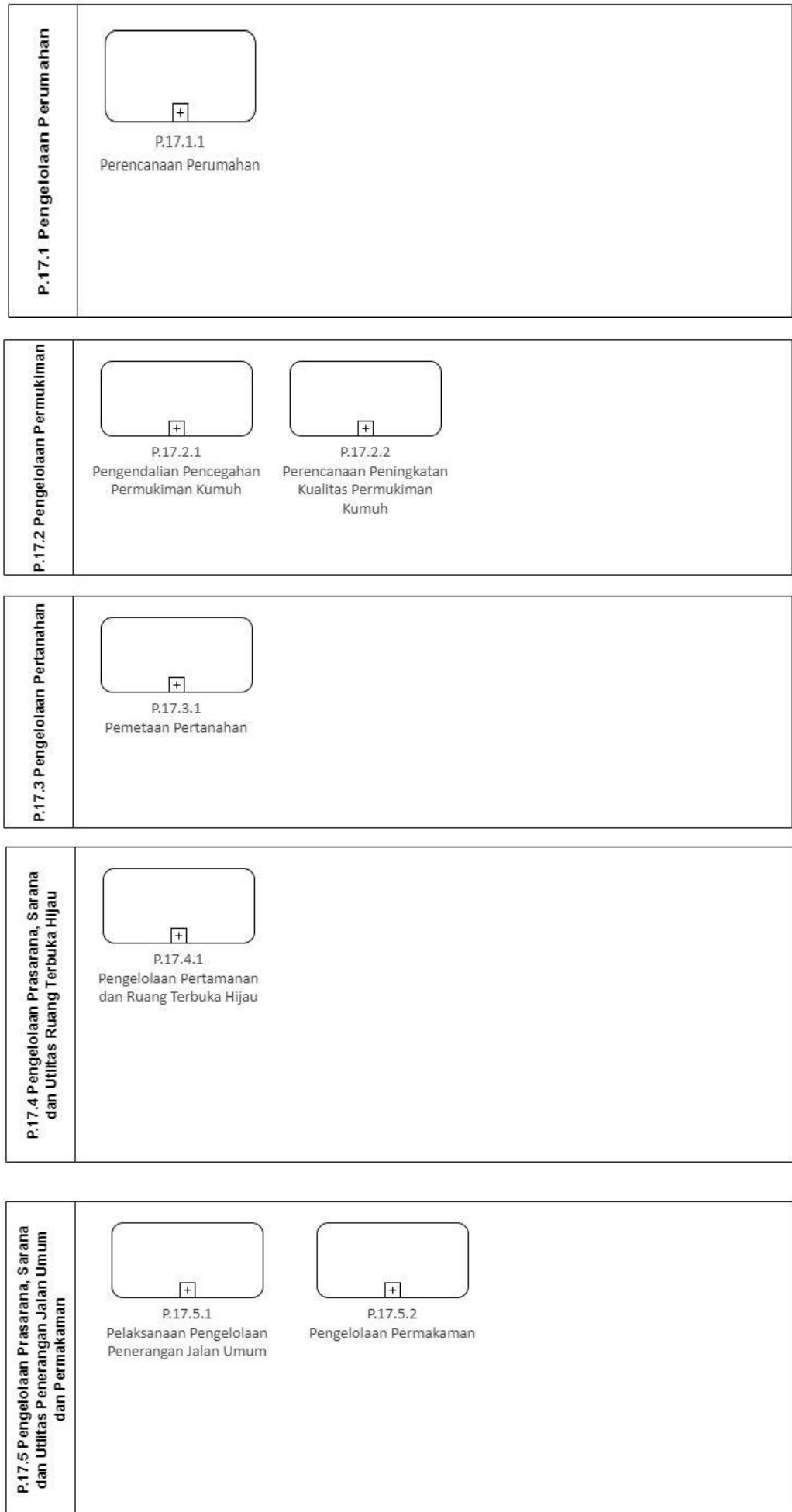
Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.17.1	Pengelolaan Perumahan	P.17.1.1	Perencanaan Perumahan
P.17.2	Pengelolaan Permukiman	P.17.2.1	Penyelenggaraan Pencegahan Kualitas Permukiman Kumuh
		P.17.2.2	Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
P.17.3	Pengelolaan Pertanahan	P.17.3.1	Pelaksanaan Pengelolaan Pertanahan
P.17.4	Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman	P.17.4.1	Pengelolaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau
P.17.5	Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman	P.17.5.1	Pelaksanaan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
		P.17.5.2	Pengelolaan Pemakaman

Tabel 2.43, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dapat dilihat pada **Gambar 2.38**.



Gambar 2.38 Peta Proses Bisnis Level 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Gambar 2.38, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Pada proses bisnis P.17.1, P.17.2, P.17.3, P.17.4 dan P.17.5 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.39**.



Gambar 2.39 Peta Proses Bisnis Utama Level 1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambar 2.39 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga menghasilkan 5 (lima) proses bisnis utama level 0 dan 7 (tujuh) proses bisnis utama level 1.

18. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** memiliki urusan **Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 04.02 Sosial** dan **RAB 04.03 Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** dengan kode proses bisnis **P.18**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021** dimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.44**

Tabel 2.44 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Penyusunan Perencanaan
P.0.2	Pengelolaan Keuangan
P.0.3	Pengelolaan Umum
P.0.4	Pengelolaan Kepegawaian

Tabel 2.44 di analisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehingga pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

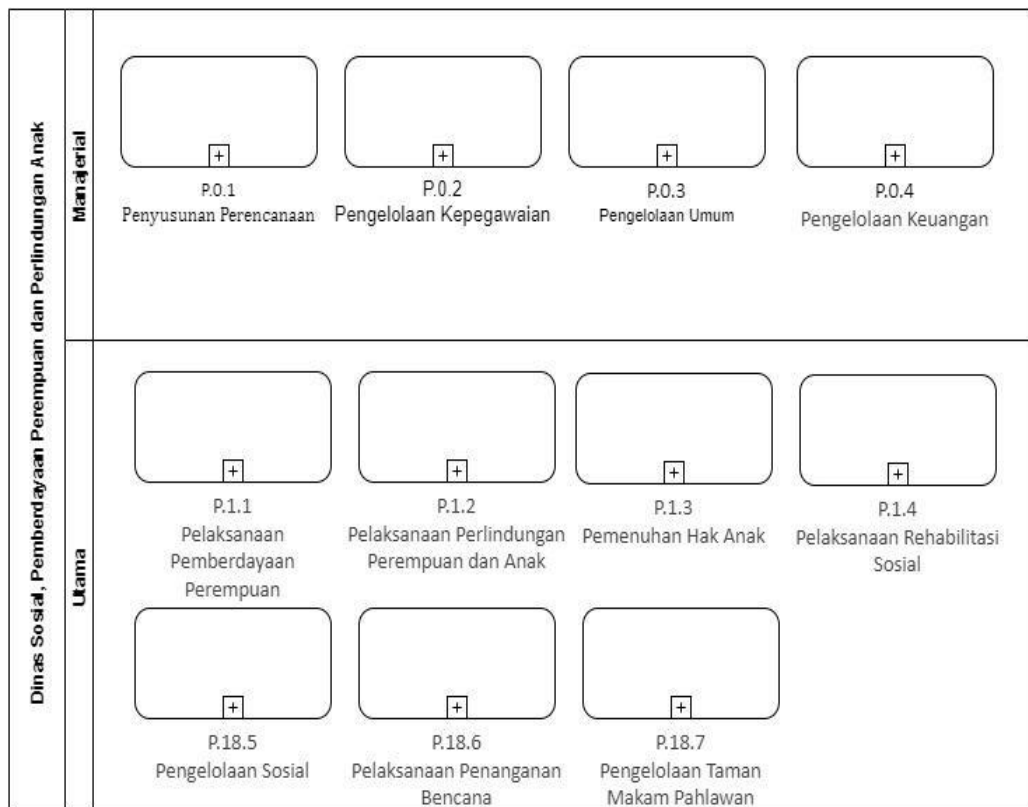
Anak memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Berikut detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.45**.

Tabel 2.45 Daftar Proses Level 0 dan Level 1 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.18.1	Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan	P.18.1.1	Pembinaan Pengarusutamaan Gender
		P.18.1.2	Pengembangan Pemberdayaan Perempuan
		P.18.1.3	Peningkatan Kualitas Keluarga
		P.18.1.4	Pengelolaan Data Gender
P.18.2	Pelaksanaan Perlindungan Perempuan	P.18.2.1	Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak
		P.18.2.2	Pelaksanaan Perlindungan Anak
P.18.3	Pemenuhan Hak Anak	P.18.3.1	Pemberdayaan Pemenuhan Hak Anak
P.18.4	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	P.18.4.1	Pengembangan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar secara gelandangan pengemis
		P.18.4.2	Pengelolaan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
P.18.5	Pengelolaan Sosial	P.18.5.1	Pemberdayaan Sosial
		P.18.5.2	Pelaksanaan Perlindungan Sosial
		P.18.5.3	Pelaksanaan Jaminan Sosial
P.18.6	Pelaksanaan Penanganan Bencana	P.18.6.1	Pengelolaan Penanganan Bencana
P.18.7	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	P.18.7.1	Pelaksanaan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

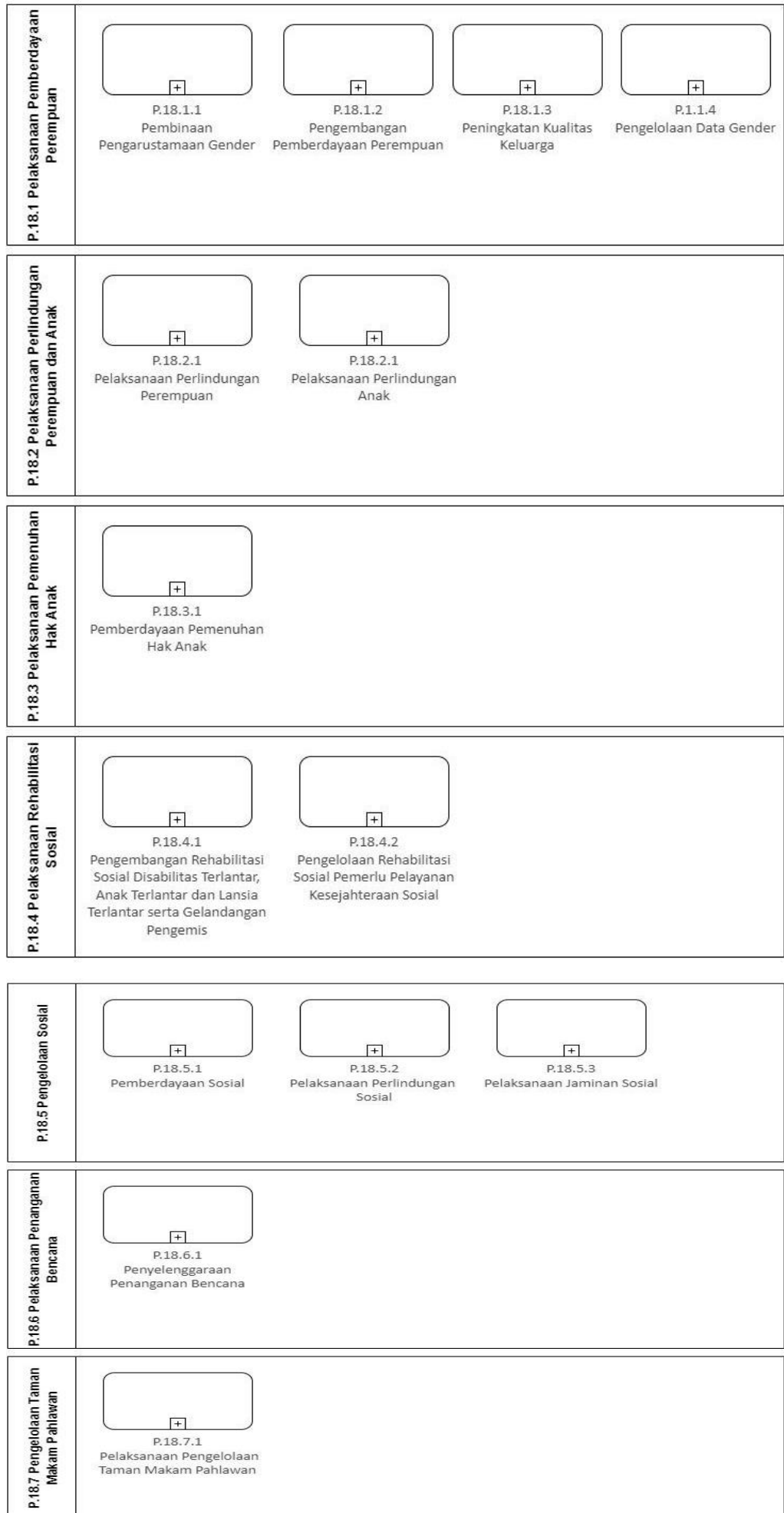
Tabel 2.45, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi

pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan MENPAN-RB No. 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada **Gambar 2.40**.



Gambar 2.40 Peta Proses Bisnis Level 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Gambar 2.40, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Pada Proses bisnis P.18.1, P.18.2, P.18.3, P.18.4, P.18.5, P.18.6 dan P.18.7 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.41**.



Gambar 2.41 Peta Proses Bisnis Utama Level 1 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambar 2.41 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga menghasilkan **7 (tujuh) proses bisnis utama level 0** dan **14 (empat belas) proses bisnis utama level 1**.

19. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah** memiliki urusan **Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Transmigrasi**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 02.01 Industri, RAB 02.09 Koperasi, RAB 02.10 Usaha Kecil dan Menengah, RAB 03.02 Transmigrasi** dan **RAB 06.03 Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah** dengan kode proses bisnis **P.19**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 71 Tahun 2021** dimana Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, perindustrian serta koperasi usaha kecil dan menengah. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.46**

Tabel 2.46 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pengelolaan Umum
P.0.2	Pengelolaan Keuangan
P.0.3	Pengelolaan Kepegawaian
P.0.4	Penyusunan Perencanaan

Tabel 2.46 di analisis berdasarkan dari-proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Dinas Tenaga Kerja,

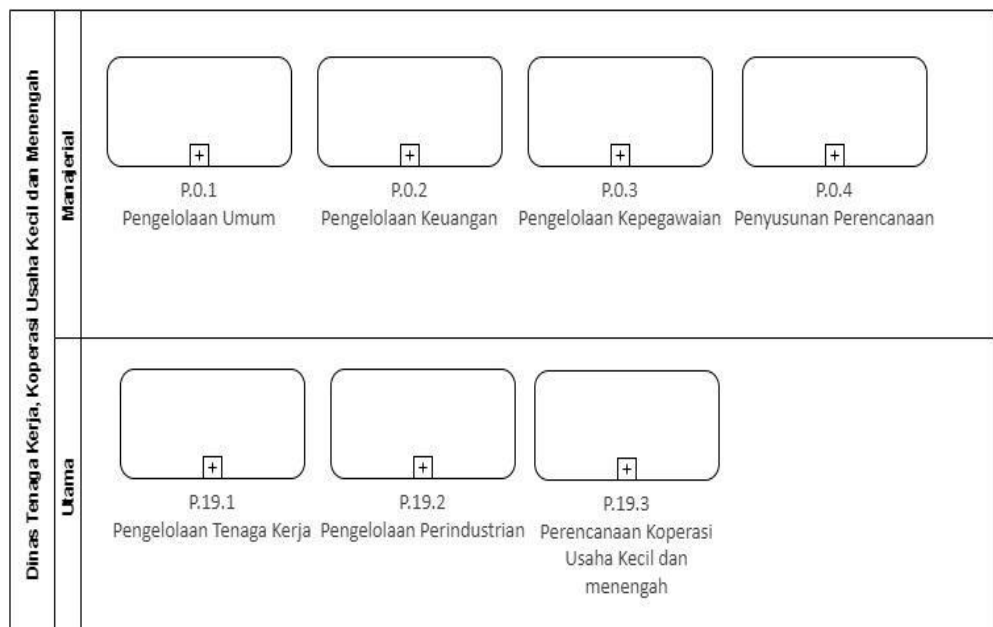
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Sehingga pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1 sampai dengan P.0.4. Berikut detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.47**.

Tabel 2.47 Daftar Proses Level 0 dan Level 1

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

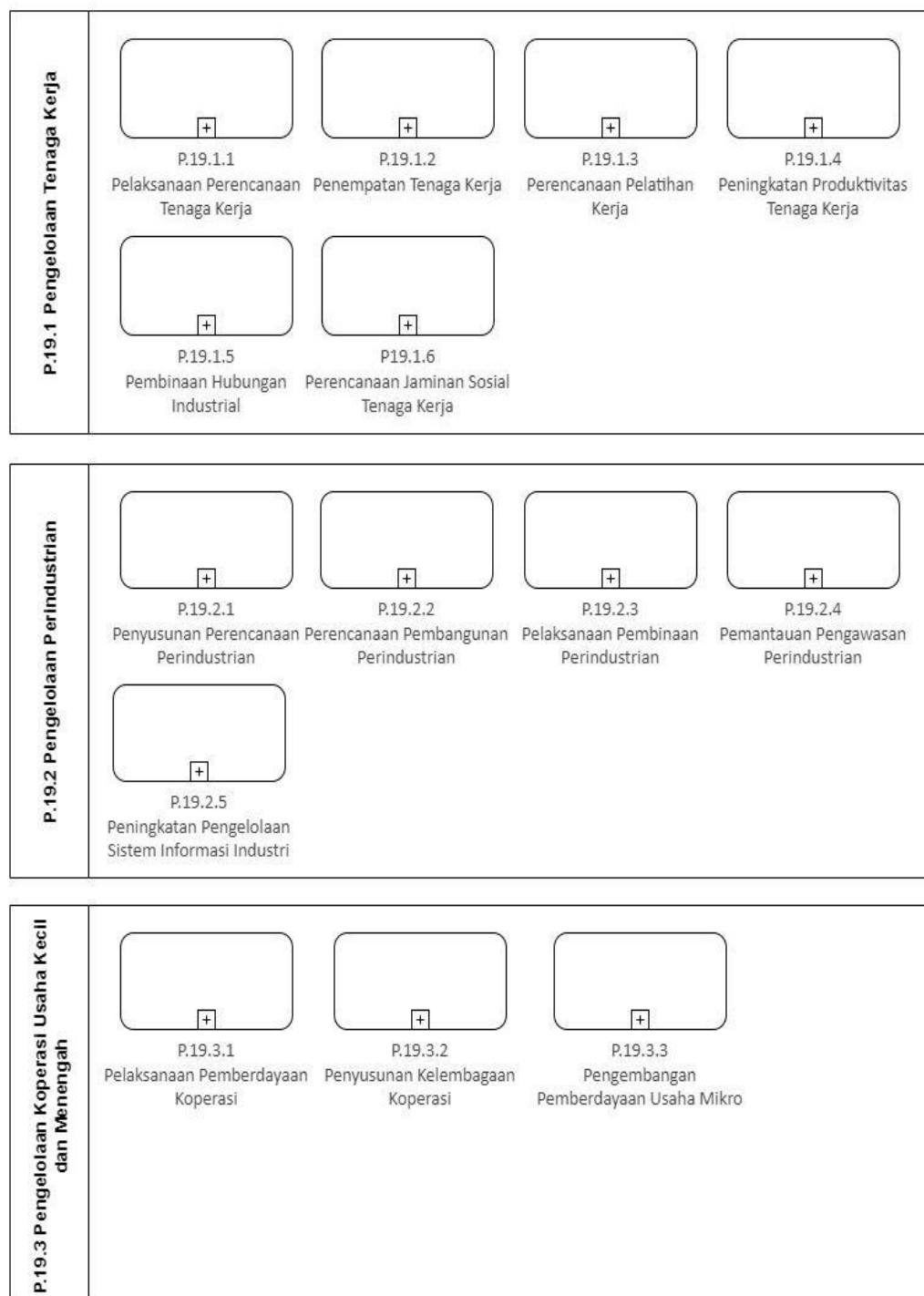
Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.19.1	Pengelolaan Tenaga Kerja	P.19.1.1	Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
		P.19.1.2	Penempatan Tenaga Kerja
		P.19.1.3	Perencanaan Pelatihan Kerja
		P.19.1.4	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
		P.19.1.5	Pembinaan Hubungan Industrial
		P.19.1.6	Perencanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
P.19.2	Pengelolaan Perindustrian	P.19.2.1	Penyusunan Perencanaan Perindustrian
		P.19.2.2	Perencanaan Pembangunan Perindustrian
		P.19.2.3	Pelaksanaan Pembinaan Perindustrian
		P.19.2.4	Pemantauan Pengawasan Perindustrian
		P.19.2.5	Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Industri
P.19.3	Pengelolaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	P.19.3.1	Perencanaan Pemberdayaan Koperasi
		P.19.3.2	Penyusunan Kelembagaan Koperasi
		P.19.3.3	Pengembangan Pemberdayaan Usaha Mikro

Sebagaimana pada Tabel 2.47, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan MENPAN-RB No. 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada **Gambar 2.42.**



Gambar 2.42 Peta Proses Bisnis Level 0 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Gambar 2.42, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.19.1, P.19.2, dan P.19.3 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.43.**



Gambar 2.43 Peta Proses Bisnis Utama Level 1 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Gambar 2.43 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sehingga menghasilkan 3 (tiga) proses bisnis utama level 0 dan 6 (enam) proses bisnis utama level 1.

20. Dinas Pendidikan

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Dinas Pendidikan** memiliki urusan **Pendidikan**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Pendidikan memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 06.01 Pendidikan, Dinas Pendidikan** dengan kode proses bisnis **P.20**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2021** dimana Dinas pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.48**

Tabel 2.48 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pengelolaan Umum
P.0.2	Pengelolaan Keuangan
P.0.3	Pengelolaan Kepegawaian
P.0.4	Penyusunan Perencanaan

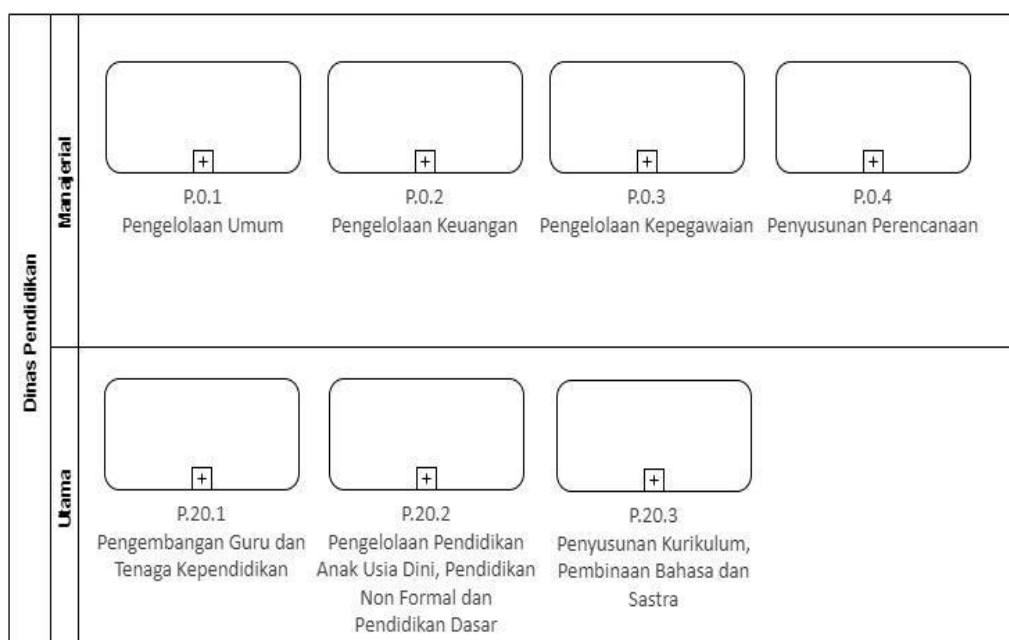
Tabel 2.48 di analisis berdasarkan ~~dari~~ proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Dinas Pendidikan. Sehingga pada Dinas Pendidikan memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.49**.

Tabel 2.49 Daftar Proses Level 0 dan Level 1 Dinas Pendidikan

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.20.1	Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	P.20.1.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Guru dan Tenaga Kependidikan
		P.20.1.2	Peningkatan Sumber Daya Manusia Guru dan Tenaga Kependidikan
P.20.2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non	P.20.2.1	Penyusunan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
	Formal dan Pendidikan Dasar		
P.20.3	Penyusunan Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra	P.20.3.1	Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

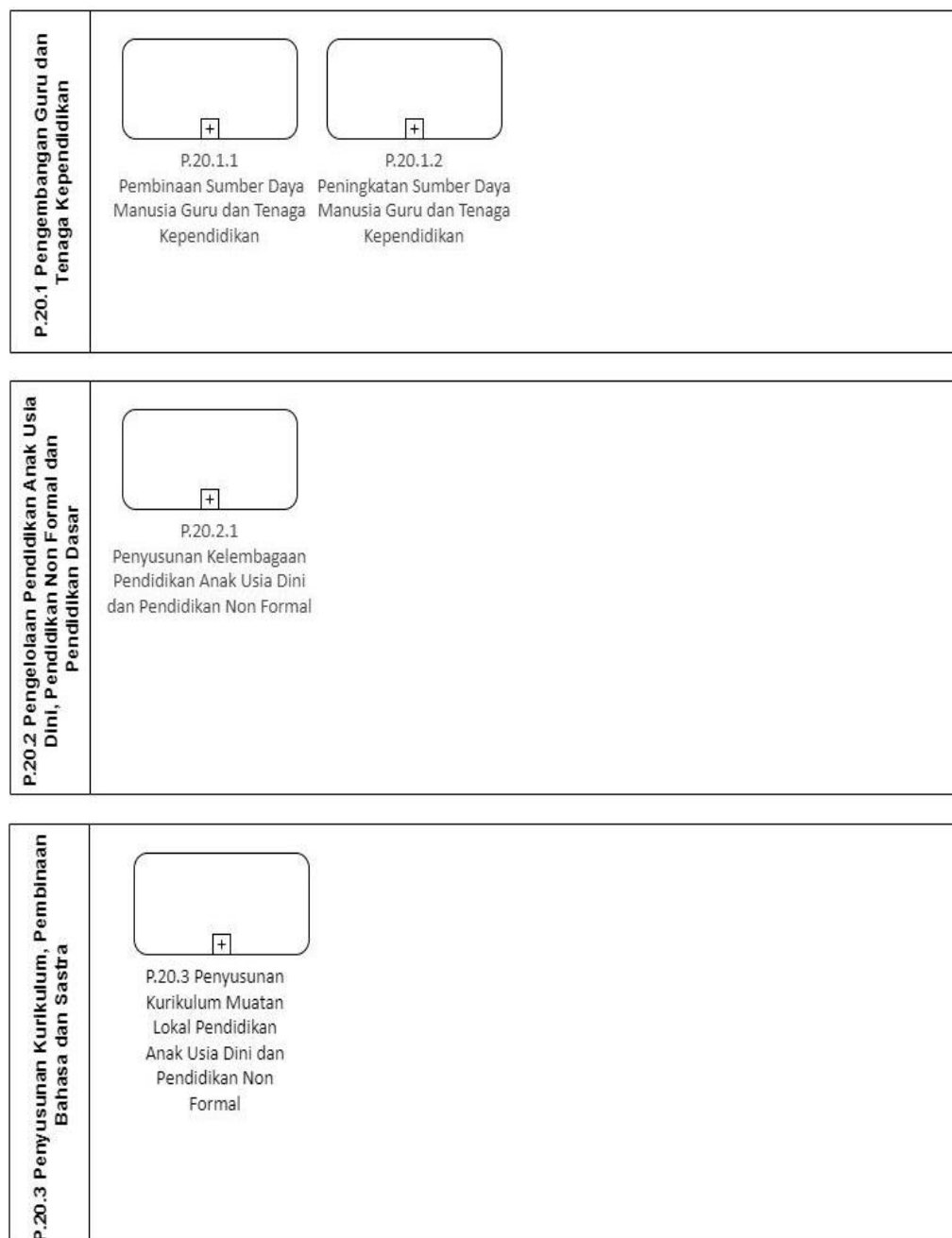
Tabel 2.49, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Pendidikan. Selanjutnya pada proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Pendidikan. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Dinas Pendidikan dapat dilihat pada **Gambar 2.44**.



Gambar 2.44 Peta Proses Bisnis Level 0 Dinas Pendidikan

Berdasarkan Gambar 2.44, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Pada proses bisnis P.20.1, P.20.2 dan P.20.3 merupakan proses

bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.45.**



Gambar 2.45 Peta Proses Bisnis Utama Level 1 Dinas Pendidikan

Gambar 2.45 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Dinas Pendidikan, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan sehingga menghasilkan **3 (tiga) proses bisnis utama level 0 dan 4 (empat) proses bisnis utama level 1.**

21. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** memiliki urusan **Pangan,**

Pertanian dan Perikanan. Berdasarkan tentang Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 02.03 Pertanian, RAB 02.05 Peternakan,** dan **RAB 02.06 Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** dengan kode proses bisnis **P.21.** Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 76 Tahun 2021** dimana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang perikanan. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.50**

Tabel 2.50 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pengelolaan Umum
P.0.2	Pengelolaan Keuangan
P.0.3	Pengelolaan Kepegawaian
P.0.4	Penyusunan Perencanaan

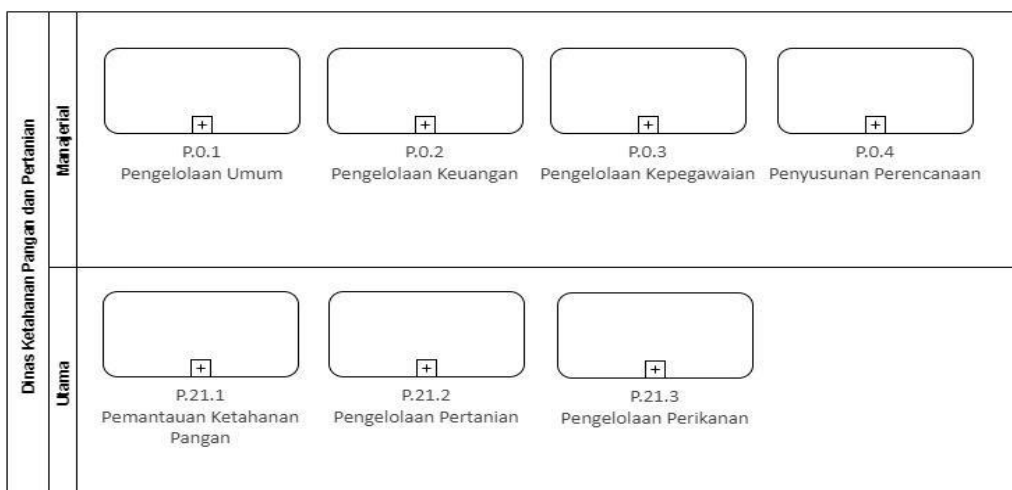
Tabel 2.50 di analisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sehingga pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.51.**

Tabel 2.51 Daftar Proses Level 0 dan Level 1 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.21.1	Pemantauan Ketahanan Pangan	P.21.1.1	Pemantauan Ketersediaan Pangan
		P.21.1.2	Pengelolaan Kemandirian Pangan
		P.21.1.3	Pengelolaan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
		P.21.1.4	Pemantauan Keamanan Pangan

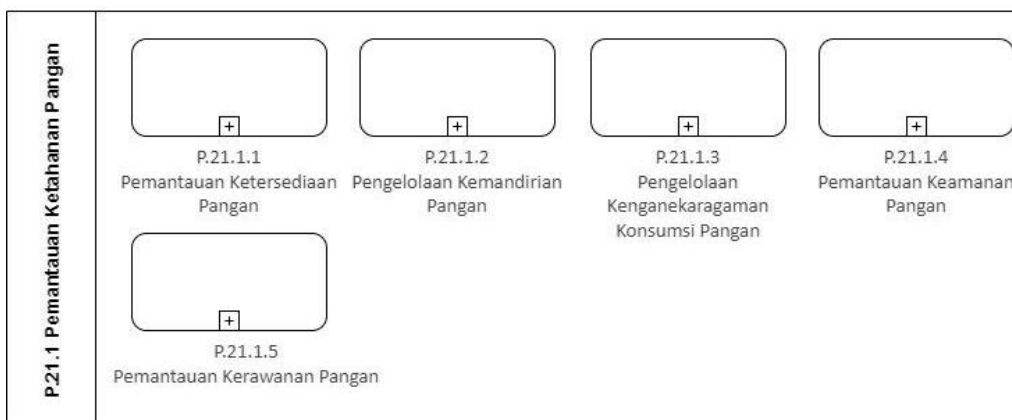
Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
		P.21.1.5	Pemantauan Kerawanan Pangan
P.21.2	Pengelolaan Pertanian	P.21.2.1	Pengelolaan Budidaya, Prasarana, dan Sarana Pertanian
		P.21.2.2	Penyuluhan Bencana Pertanian
		P.21.2.3	Pembinaan pengendalian bencana pertanian
		P.21.2.4	Penanggulangan Bencana Pertanian
		P.21.2.5	Pelaksanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan
		P.21.2.6	Pengelolaan Kesehatan Hewan
P.21.3	Pengelolaan Perikanan	P.21.3.1	Perencanaan Perikanan Budidaya
		P.21.3.2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan
		P.21.3.3	Peningkatan Produk perikanan
		P.21.3.4	Pelaksanaan Pemasaran Produk Perikanan

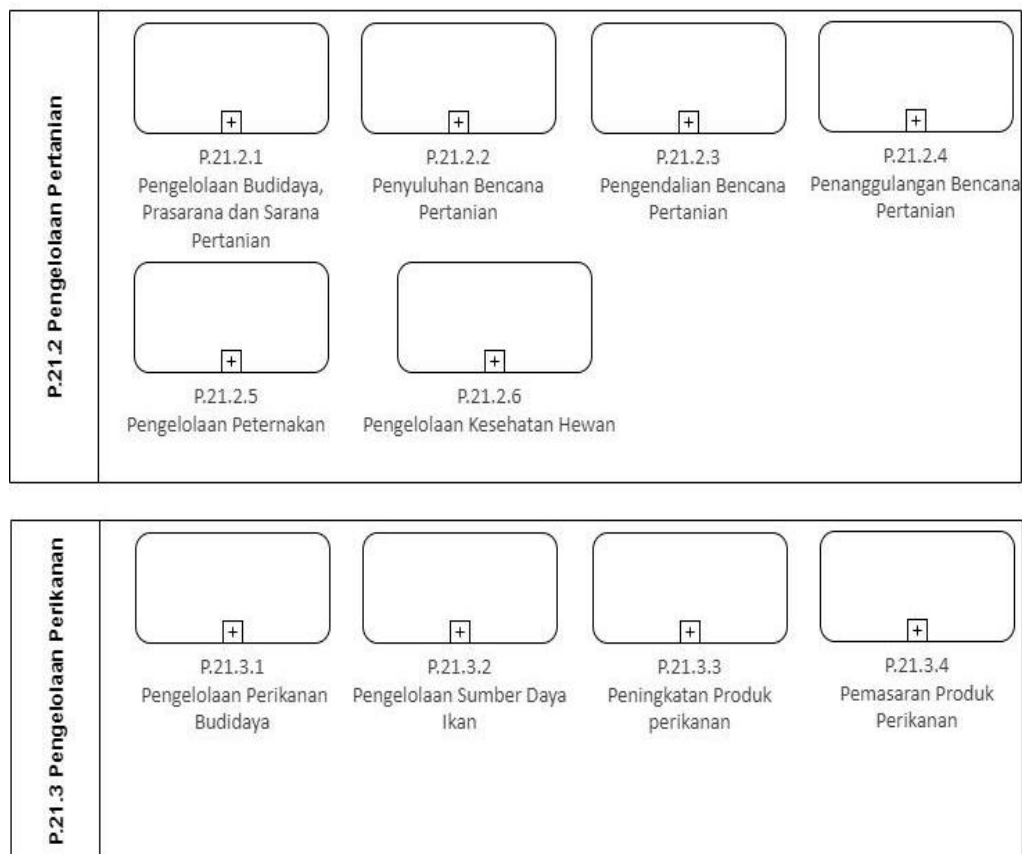
Tabel 2.51 Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada **Gambar 2.46**.



Gambar 2.46 Peta Proses Bisnis Level 0 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Berdasarkan Gambar 2.46, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.21.1, P.21.2 dan P.21.3 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.47**.





Gambar 2.47 Peta Proses Bisnis Utama Level 1 Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian

Gambar 2.47 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sehingga menghasilkan **3 (tiga) proses bisnis utama level 0 dan 15 (lima belas) proses bisnis utama level 1.**

22. Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Dinas Lingkungan Hidup** memiliki urusan **Lingkungan Hidup**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Lingkungan Hidup memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 07.05 Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup** dengan kode proses bisnis **P.22**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2021** dimana Dinas Lingkungan hidup mempunyai tugas mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan

hidup. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.52**

Tabel 2.52 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pengelolaan Umum
P.0.2	Pengelolaan Keuangan
P.0.3	Pengelolaan Kepegawaian
P.0.4	Penyusunan Perencanaan

Tabel 2.52 di analisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga pada Dinas Lingkungan Hidup memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Berikut detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.53.**

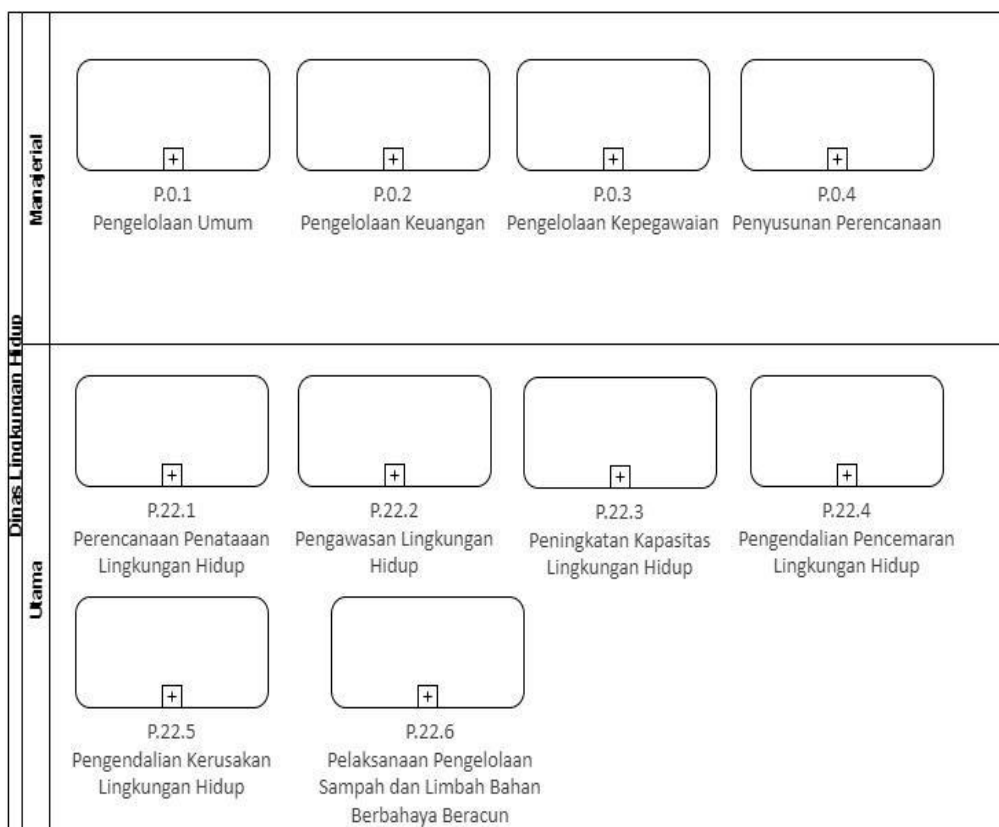
Tabel 2.53 Daftar Proses Level 0 dan Level 1

Dinas Lingkungan Hidup

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.22.1	Perencanaan Penataan Lingkungan Hidup	P.22.1.1	Pengaduan Hukum Lingkungan Hidup
		P.22.1.2	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
P.22.2	Pengawasan Lingkungan Hidup	P.22.2.1	Pengawasan Lingkungan Hidup
P.22.3	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	P.22.3.1	Perencanaan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		P.22.3.2	Pengelolaan Lingkungan Hidup
P.22.4	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	P.22.4.1	Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
		P.22.4.2	Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
		P.22.4.3	Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.22.5	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	P.22.5.1	Pemantauan Kerusakan Lingkungan Hidup
		P.22.5.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lingkungan Hidup
		P.22.5.3	Penataan Lingkungan Hidup
P.22.6	Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun	P.22.6.1	Pengelolaan Kebersihan Sampah
		P.22.6.2	Pelaksanaan Pengangkutan Sampah
		P.22.6.3	Pengelolaan Pengolahan Sampah
		P.22.6.4	Pengelolaan Pengurangan Sampah
		P.22.6.5	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

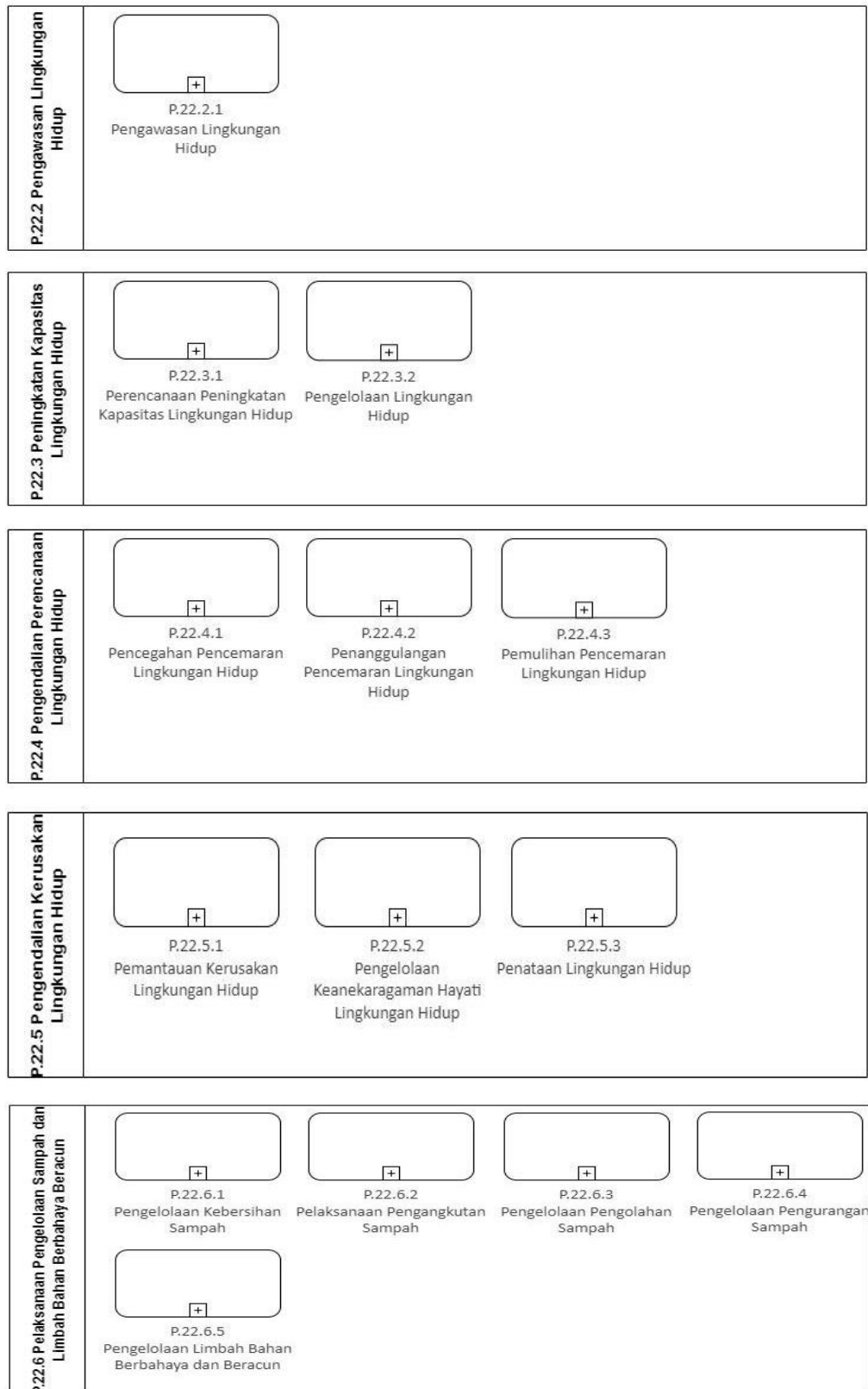
Tabel 2.53 Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau subkoordinator pada Dinas Lingkungan Hidup. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada **Gambar 2.48**.



Gambar 2.48 Peta Proses Bisnis Level 0 Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan **Gambar 2.48**, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.22.1, P.22.2, P.22.3, P.22.4, P.22.5, dan P.22.6 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan digambarkan pada **Gambar 2.49**.





Gambar 2.49 Peta Proses Bisnis Utama Level 1
Dinas Lingkungan Hidup

Gambar 2.49 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan

Hidup sehingga menghasilkan **6 (enam) proses bisnis utama level 0** dan **16 (enam belas) proses bisnis utama level 1**.

23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** memiliki urusan **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 03.07 Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** dengan kode proses bisnis **P.23**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 68 Tahun 2021** dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.54**.

Tabel 2.54 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Penyusunan Perencanaan
P.0.2	Pengelolaan Keuangan
P.0.3	Pengelolaan Umum
P.0.4	Pengelolaan Kepegawaian

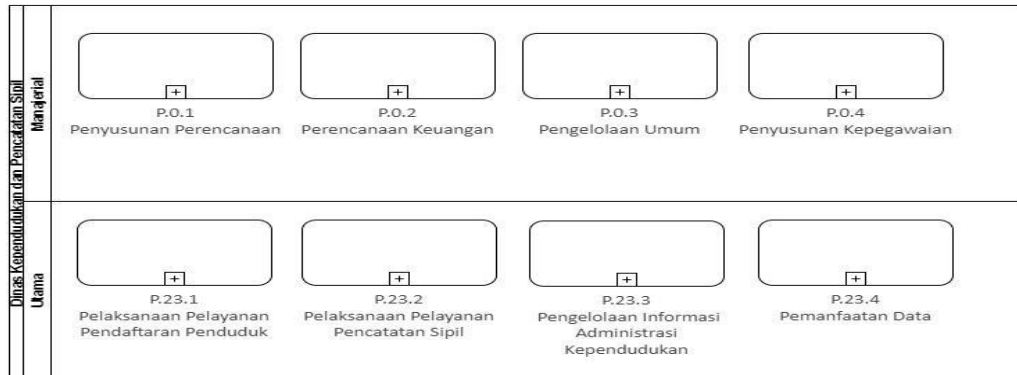
Tabel 2.54 di analisis berdasarkan ~~dari~~ proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1 - P.0.4. Berikut detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.55**.

Tabel 2.55 Daftar Proses Level 0 dan Level 1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.23.1	Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	P.23.1.1	Pengelolaan Identitas Penduduk
		P.23.1.2	Pendokumentasian Pindah Datang Penduduk
		P.23.1.3	Pendokumentasian Pendataan Penduduk
P.23.2	Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil	P.23.2.1	Pendokumentasian Pencatatan Kelahiran Penduduk
		P.23.2.2	Pencatatan Kematian Penduduk
		P.23.2.3	Pengelolaan Pencatatan Perkawinan
		P.23.2.4	Pencatatan Perceraian
		P.23.2.5	Pencatatan Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
P.23.3	Pengelolaan Informasi Administrasi	P.23.3.1	Pencatatan Informasi Administrasi Kependudukan
P.23.4	Pemanfaatan Data	P.23.4.1	Perencanaan Kerja Sama Pelayanan
		P.23.4.2	Penyusunan Inovasi Pelayanan

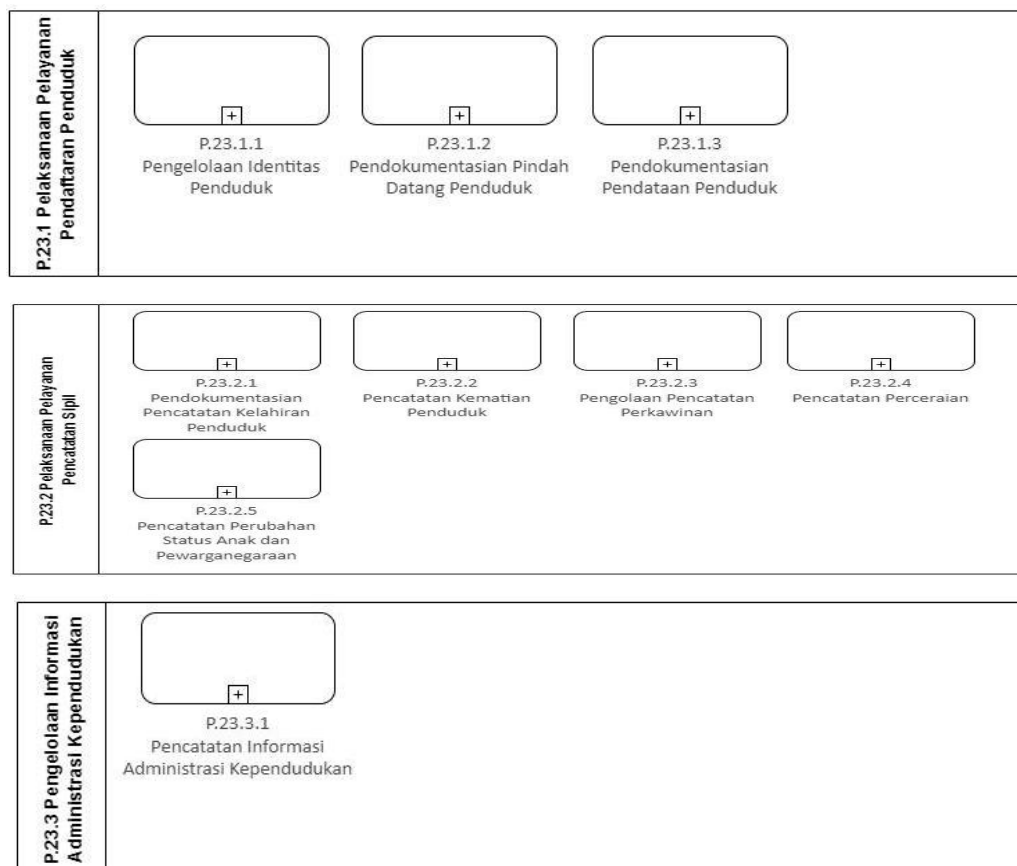
Tabel 2.55 Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan

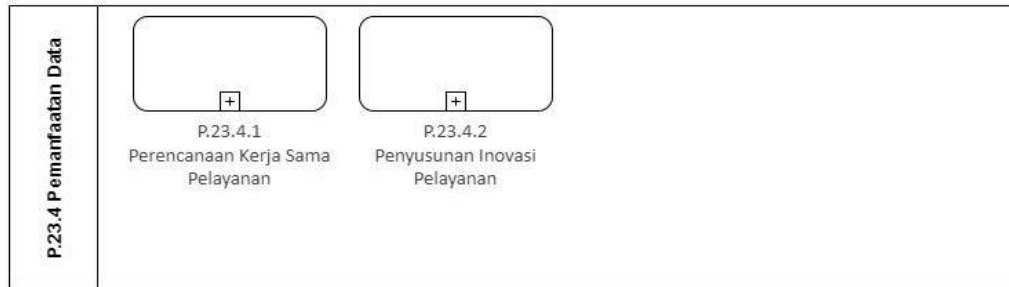
Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada **Gambar 2.50**.



Gambar 2.50 Peta Proses Bisnis Level 0
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Gambar 2.50, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.23.1, P.23.2, P.23.3 dan P.23.4 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.51**.





Gambar 2.51 Peta Proses Bisnis Utama Level 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambar 2.51 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga menghasilkan **4 (empat) proses bisnis utama level 0** dan **15 (lima belas) proses bisnis utama level 1**.

24. Dinas Perhubungan

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Dinas Perhubungan** memiliki urusan **Perhubungan**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Perhubungan memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 03.03 Transportasi, Dinas Perhubungan** dengan kode proses bisnis **P.24**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 75 Tahun 2021** dimana Dinas Perhubungan mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.56**

Tabel 2.56 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Perencanaan Umum
P.0.2	Pengelolaan Keuangan
P.0.3	Penyusunan Perencanaan
P.0.4	Pengelolaan Kepegawaian

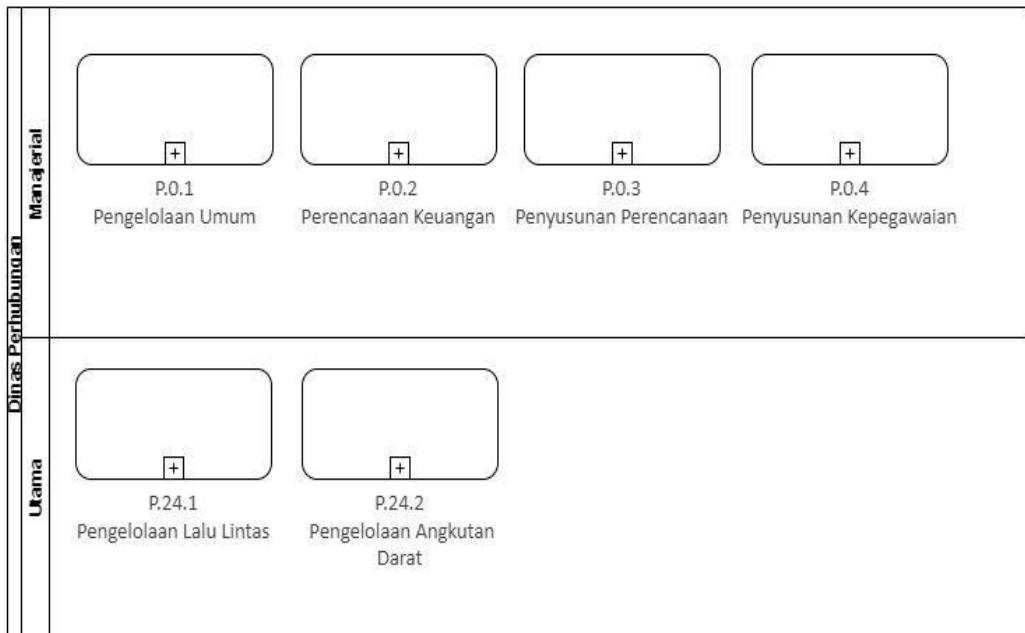
Tabel 2.56 dianalisis berdasarkan dari proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Dinas Perhubungan.

Sehingga pada Dinas Perhubungan memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Berikut detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.57**.

Tabel 2.57 Daftar Proses Level 0 dan Level 1
Dinas Perhubungan

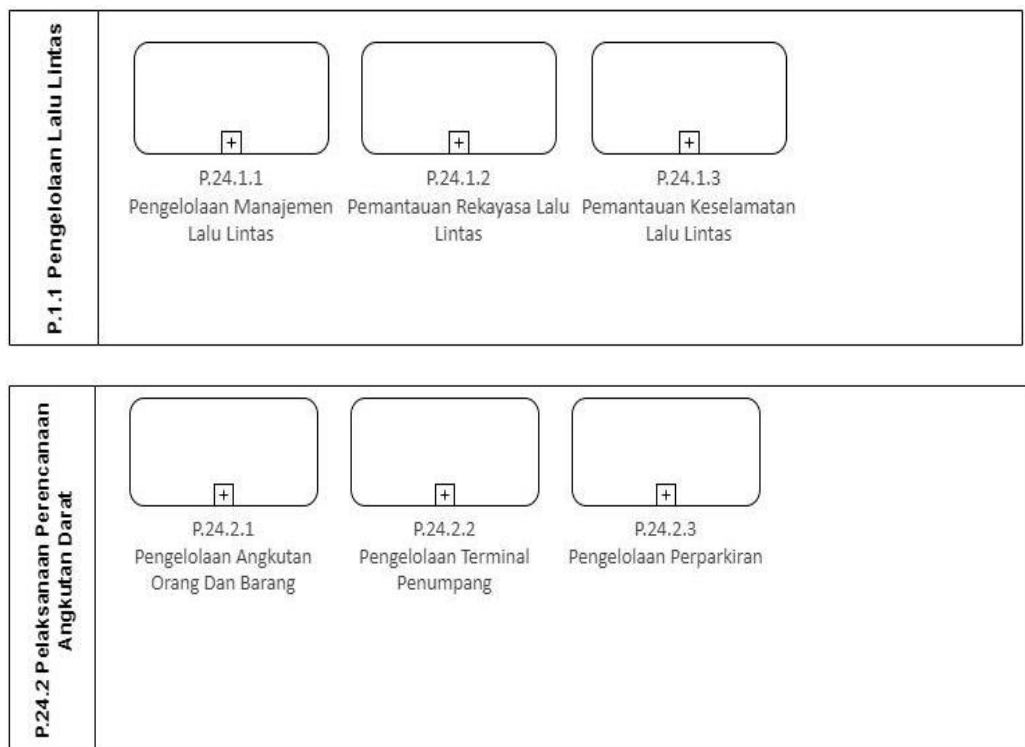
Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.24.1	Pengelolaan Lalu Lintas	P.24.1.1	Pengelolaan Manajemen Lalu Lintas
		P.24.1.2	Pemantauan Rekayasa Lalu Lintas
		P.24.1.3	Pemantauan Keselamatan Lalu Lintas
P.24.2	Pengelolaan Angkutan Darat	P.24.2.1	Pengelolaan Angkutan Orang Dan Barang
		P.24.2.2	Pengelolaan Terminal Penumpang
		P.24.2.3	Pengelolaan Perparkiran

Tabel 2.57, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Perhubungan. Selanjutnya pada proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Perhubungan. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan MENPAN-RB No. 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Dinas Perhubungan dapat dilihat pada **Gambar 2.52**.



Gambar 2.52 Peta Proses Bisnis Level 0 Dinas Perhubungan

Berdasarkan Gambar 2.52, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.24.1 dan P.24.2 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.53**.



Gambar 2.53 Peta Proses Bisnis Utama Level 1 Dinas Perhubungan

Gambar 2.53 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Dinas Perhubungan, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1,

diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan sehingga menghasilkan **2 proses bisnis utama level 0** dan **6 proses bisnis utama level 1**.

25. Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Dinas Komunikasi dan Informatika** memiliki urusan **Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 01.01 Pertahanan, RAB 06.03 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, RAB 09.03 Informasi** dan **RAB 09.04 Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika** dengan kode proses bisnis **P.25**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 72 Tahun 2021** dimana Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, evaluasi, dan bimbingan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.58**

Tabel 2.58 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pengelolaan Umum
P.0.2	Perencanaan Keuangan
P.0.3	Penyusunan Perencanaan
P.0.4	Penyusunan Kepegawaian

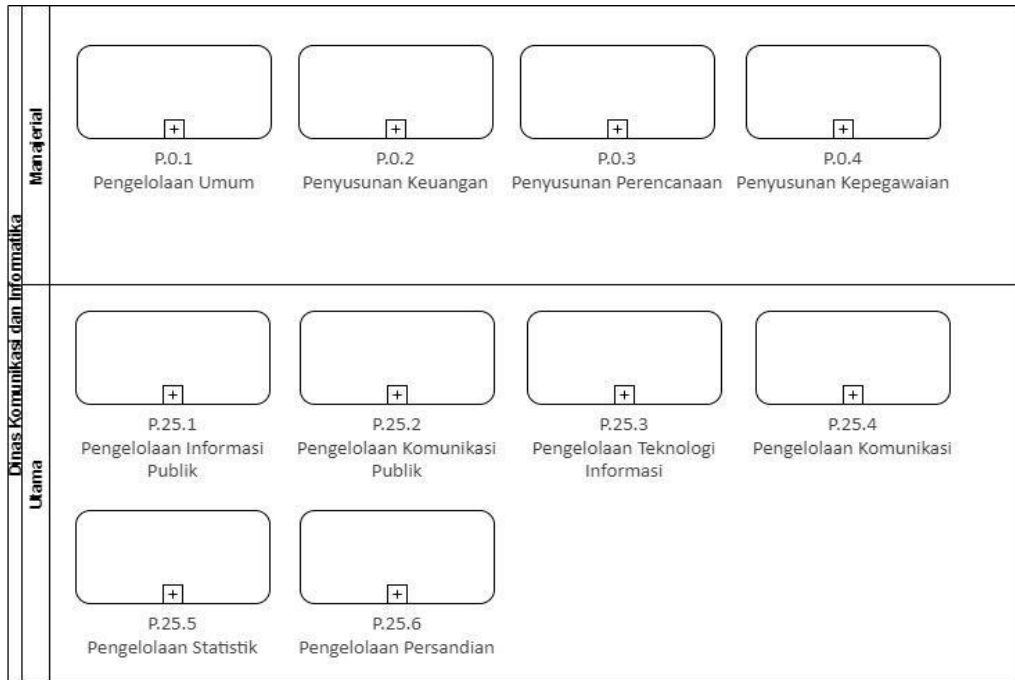
Tabel 2.58 di analisis berdasarkan dari proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Dinas Komunikasi dan Informatika. Sehingga pada Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Berikut detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.59**.

Tabel 2.59 Daftar Proses Level 0 dan Level 1
Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.25.1	Pengelolaan Informasi Publik	P.25.1.1	Penyelenggaraan Informasi Publik
		P.25.1.2	Pemantauan Media Publik
P.25.2	Pengelolaan Komunikasi Publik	P.25.2.1	Pengelolaan Komunikasi Publik

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.25.3	Pengelolaan Teknologi Informasi	P.25.3.1	Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Elektronik
		P.25.3.2	Pengembangan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik
		P.25.3.3	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi
P.25.4	Pengelolaan Komunikasi	P.25.4.1	Pengembangan Komunikasi
P.25.5	Pengelolaan Statistik	P.25.4.2	Pengelolaan Data
		P.25.4.3	Penyelenggaraan Pengelolaan Statistik
P.25.5	Pengelolaan Persandian	P.25.4.4	Pengelolaan Keamanan
		P.25.4.5	Penyelenggaraan Persandian

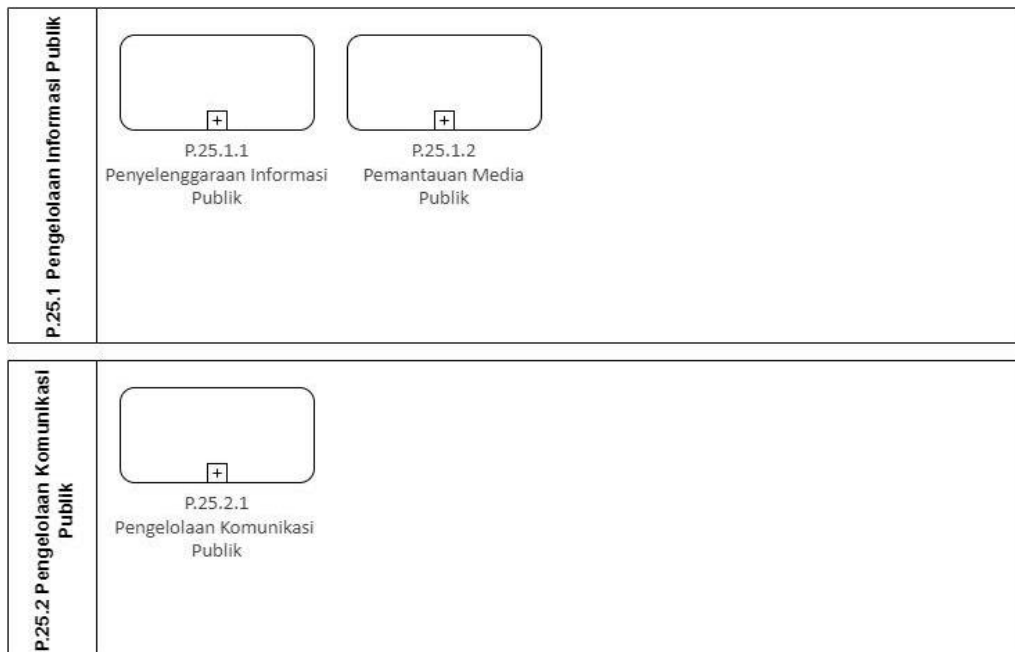
Tabel 2.59, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada **Gambar 2.54**.

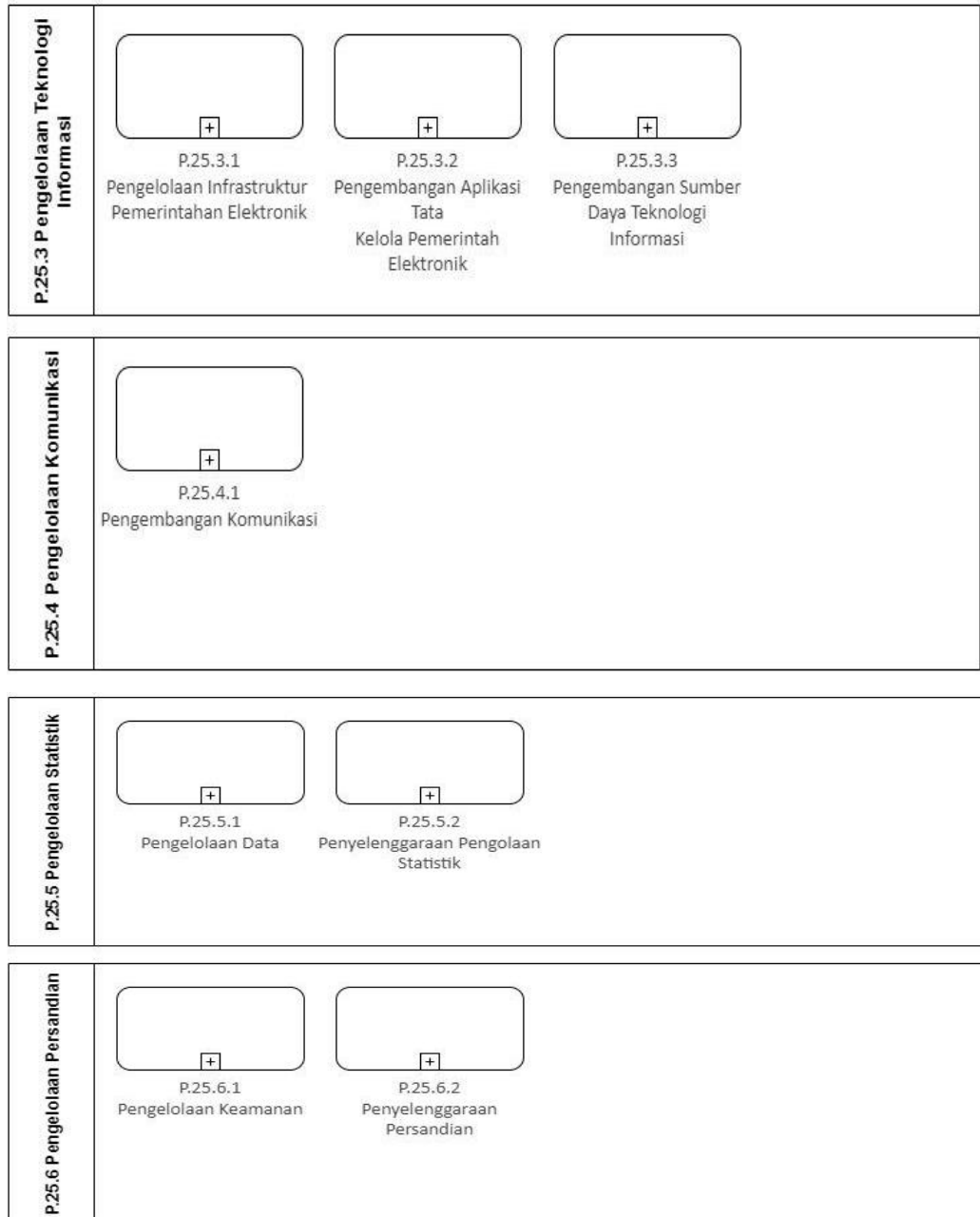


Gambar 2.54 Peta Proses Bisnis Level 0

Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Gambar 2.54, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.25.1, P.25.2, P.25.3, P.25.4 dan P.25.5 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.55**.





Gambar 2.55 Peta Proses Bisnis Utama Level 1
Dinas Komunikasi dan Informatika

Gambar 2.55 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga menghasilkan **6 (enam) proses bisnis utama level 0 dan 11 (sebelas) proses bisnis utama level 1.**

26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** memiliki urusan **Penanaman Modal.** Berdasarkan Tentang

Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 02.08 Investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** dengan kode proses bisnis **P.26**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 69 Tahun 2021** dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan transmigrasi. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.60**

Tabel 2.60 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Penyusunan Perencanaan
P.0.2	Pengolahan Kepegawaian
P.0.3	Pengelolaan Umum
P.0.4	Penyusunan Keuangan

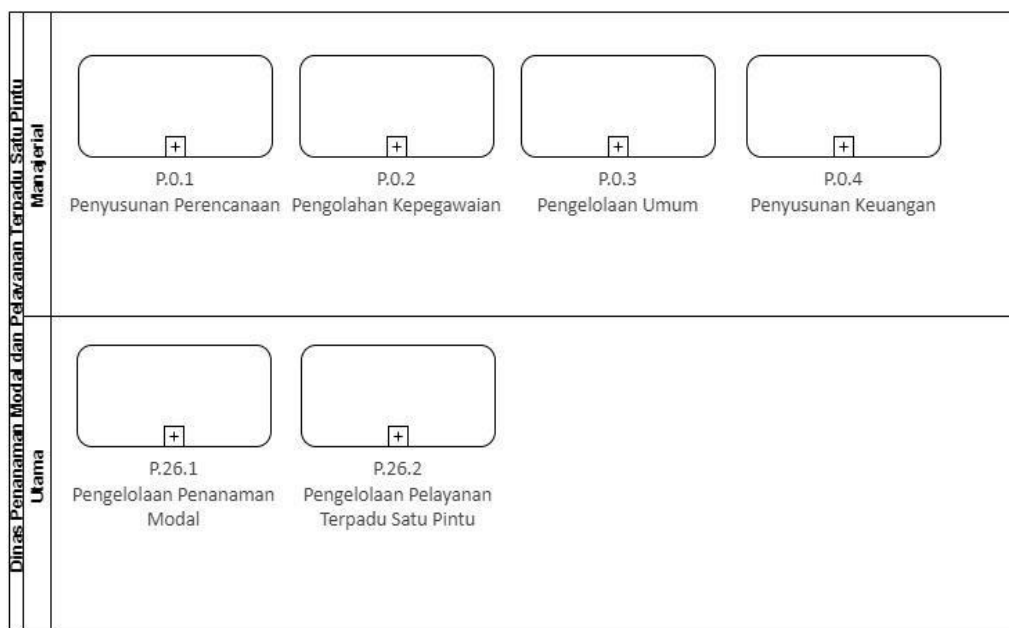
Tabel 2.60 dianalisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Sehingga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1 sampai dengan P.0.4. Berikut detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.61**.

Tabel 2.61 Daftar Proses Level 0 dan Level 1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.26.1	Pengelolaan Penanaman Modal	P.26.1.1	Perencanaan Iklim Penanaman Modal
		P.26.1.2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		P.26.1.3	Perencanaan Promosi Penanaman Modal
		P.26.1.4	Pengembangan Promosi Penanaman Modal

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
		P.26.1.5	Pengendalian Penanaman Modal
		P.26.1.6	Pelayanan Perizinan Berusaha
		P.26.1.7	Pelayanan Non Perizinan Berusaha
		P.26.1.8	Pelayanan Perizinan Non Berusaha
		P.26.1.9	Pelayanan Non Perizinan Non Berusaha
		P.26.1.10	Penyusunan Kebijakan Layanan
		P.26.1.11	Pelaporan Layanan
		P.26.1.12	Penanganan Pengaduan
		P.26.1.13	Penyebaran Informasi Layanan
		P.26.1.14	Penyuluhan Layanan
		P.26.1.15	Penyuluhan Transmigrasi
P.26.2	Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

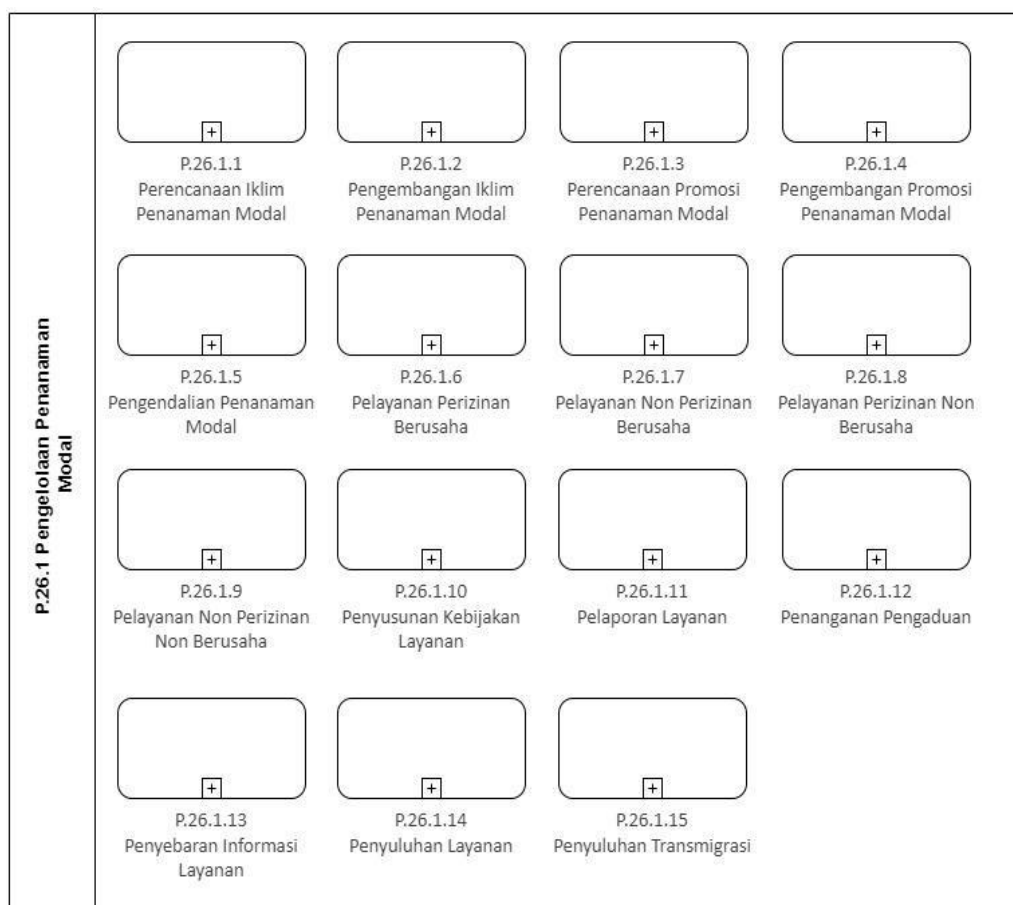
Tabel 2.61, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dapat dilihat pada **Gambar 2.55**.



Gambar 2.55 Peta Proses Bisnis Level 0

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Berdasarkan Gambar 2.55, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.26.1 dan P.26.2 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.56**.



Gambar 2.56 Peta Proses Bisnis Utama Level 1

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Gambar 2.56 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu sehingga menghasilkan **1 (satu) proses bisnis utama level 0** dan **15 (lima belas) proses bisnis utama level 1**.

27. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga** memiliki urusan **Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 02.11 Pariwisata, RAB 06.04 Pemuda, RAB 06.05, dan RAB 08.02 Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga** dengan kode proses bisnis **P.27**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 65 Tahun 2021** dimana Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga tersebut mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.62**

Tabel 2.62 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Penyusunan Perencanaan
P.0.2	Pengolahan Kepegawaian
P.0.3	Pengelolaan Umum
P.0.4	Penyusunan Keuangan

Tabel 2.62 di analisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga. Sehingga pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4.

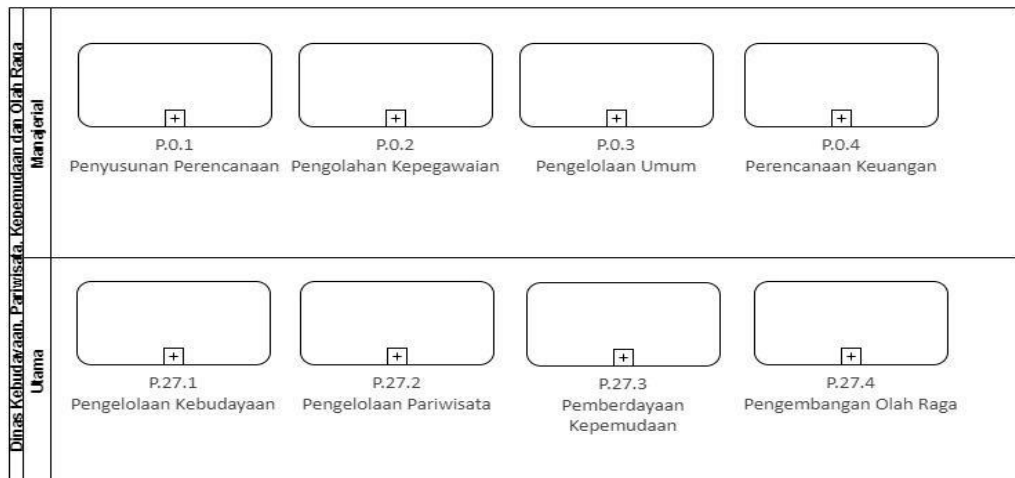
Berikut detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.63.**

Tabel 2.63 Daftar Proses Level 0 dan Level 1
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.27.1	Pengelolaan Kebudayaan	P.27.1.1	Pengembangan Kebudayaan
		P.27.1.2	Pengelolaan Kesenian
		P.27.1.3	Pemeliharaan Sejarah Budaya
		P.27.1.4	Pemeliharaan Nilai Tradisi Budaya
		P.27.1.5	Pendokumentasian Pelestarian Cagar Budaya
P.27.2	Pengelolaan Pariwisata	P.27.2.1	Pengelolaan Destinasi Pariwisata
		P.27.2.2	Pengembangan Destinasi Pariwisata
		P.27.2.3	Pemasaran Sumber Daya Pariwisata
		P.27.2.4	Pemasaran Ekonomi Kreatif
		P.27.2.5	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
		P.27.2.6	Pengembangan Ekonomi Kreatif
P.27.3	Pemberdayaan Kepemudaan	P.27.3.1	Pengembangan Kepemudaan
P.27.4	Pengembangan Olah Raga	P.27.4.1	Peningkatan Pemberdayaan Olahraga
		P.27.4.2	Pengelolaan Wisma, Gedung Olah Raga dan Lapangan Olah Raga

Tabel 2.63 Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi

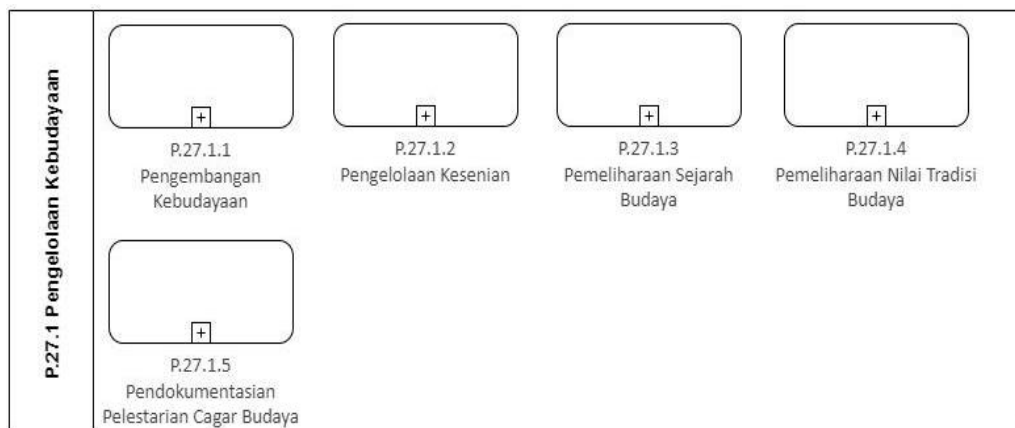
sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada **Gambar 2.57**.

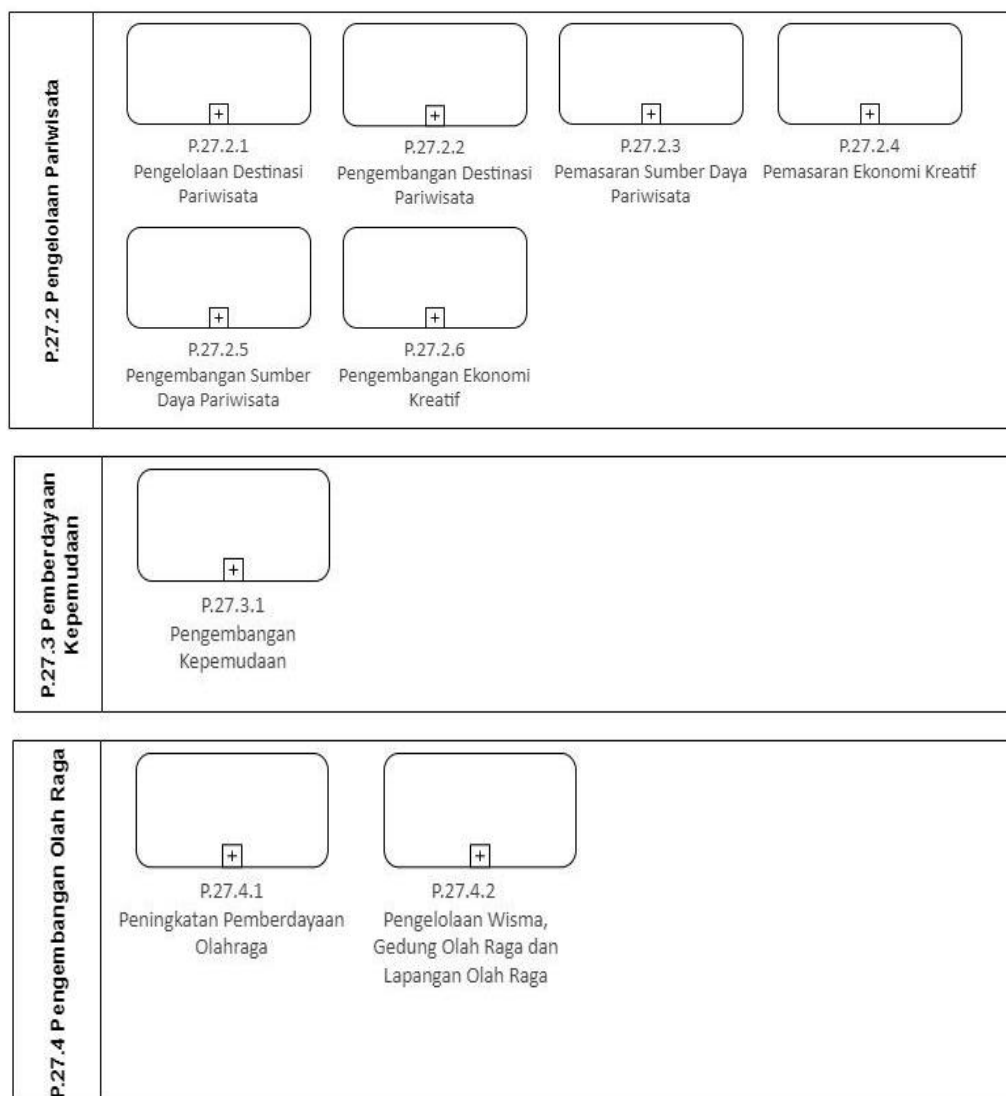


Gambar 2.57 Peta Proses Bisnis Level 0

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan Gambar 2.57, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.27.1, P.27.2, P.27.3, dan P.27.4 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.58**.





Gambar 2.58 Peta Proses Bisnis Utama Level 1

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Gambar 2.58 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga sehingga menghasilkan **4 (empat) proses bisnis utama level 0** dan **14 (empat belas) proses bisnis utama level 1**.

28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** memiliki urusan **Perpustakaan dan Kearsipan**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 06.03 Ilmu Pengetahuan dan**

Teknologi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan kode proses bisnis **P.28**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 78 Tahun 2021** dimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.64**

Tabel 2.64 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Penyusunan Perencanaan
P.0.2	Pengolahan Kepegawaian
P.0.3	Pengelolaan Umum
P.0.4	Perencanaan Keuangan

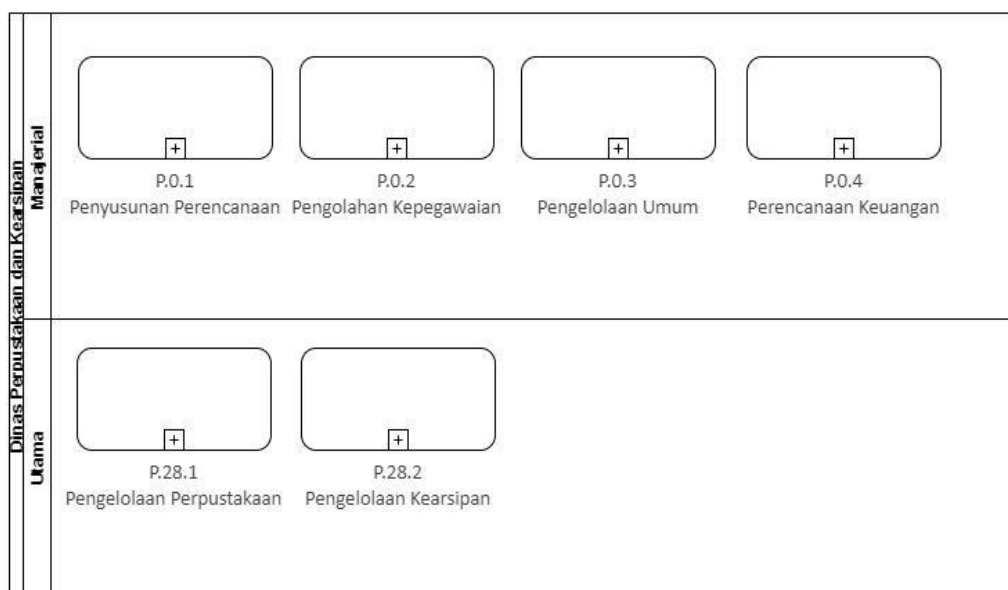
Tabel 2.64 di analisis berdasarkan dari proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sehingga pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.65**.

Tabel 2.65 Daftar Proses Level 0 dan Level 1
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.27.1	Pengelolaan Perpustakaan	P.27.1.1	Pengembangan Perpustakaan
		P.27.1.2	Pelestarian Naskah Kuno
		P.27.1.3	Pembudayaan Gemar Membaca
P.27.2	Pengelolaan Kearsipan	P.27.2.1	Pengelolaan Arsip Dinamis
		P.27.2.2	Pendokumentasian Arsip Statis

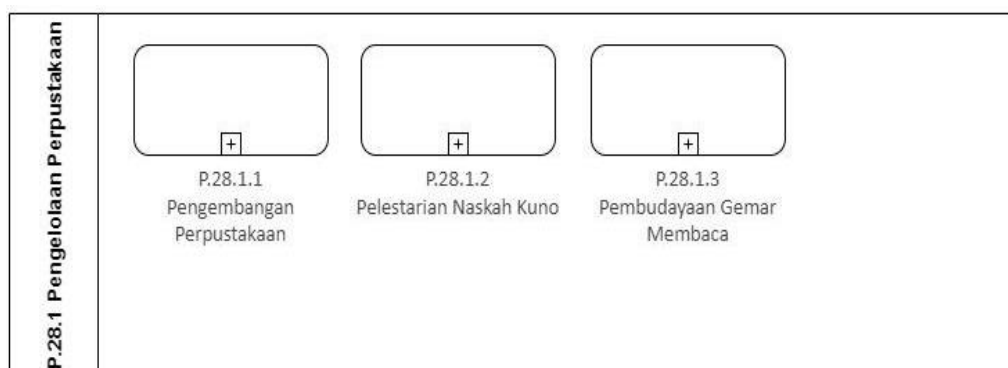
Tabel 2.65, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selanjutnya proses

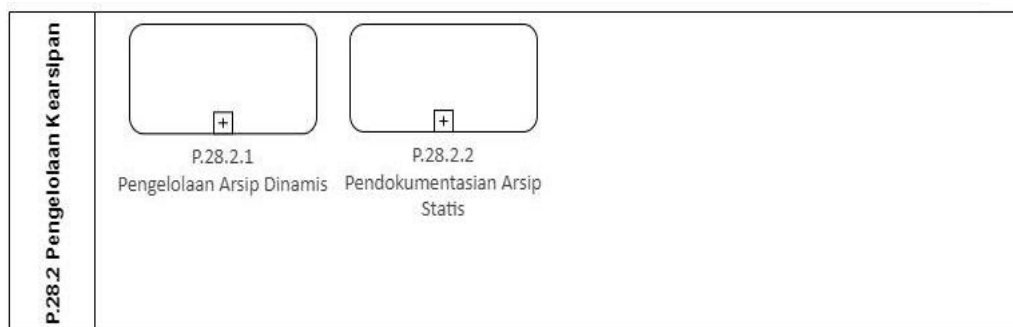
bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan MENPAN-RB No. 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada **Gambar 2.59**.



Gambar 2.59 Peta Proses Bisnis Level 0
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan Gambar 2.59, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.28.1 dan P.28.2 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.60**.





Gambar 2.60 Peta Proses Bisnis Utama Level 1
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Gambar 2.60 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga menghasilkan **2 (dua) proses bisnis utama level 0 dan 5 (lima) proses bisnis utama level 1.**

29. Dinas Perdagangan

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Dinas Perdagangan** memiliki urusan **Perdagangan**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Perdagangan memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 02.02 Perdagangan, Dinas Perdagangan** dengan kode proses bisnis **P.29**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 70 Tahun 2021** dimana Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.66**

Tabel 2.66 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Perencanaan Umum
P.0.2	Penyusunan Keuangan
P.0.3	Penyusunan Perencanaan
P.0.4	Pengelolaan Kepegawaian

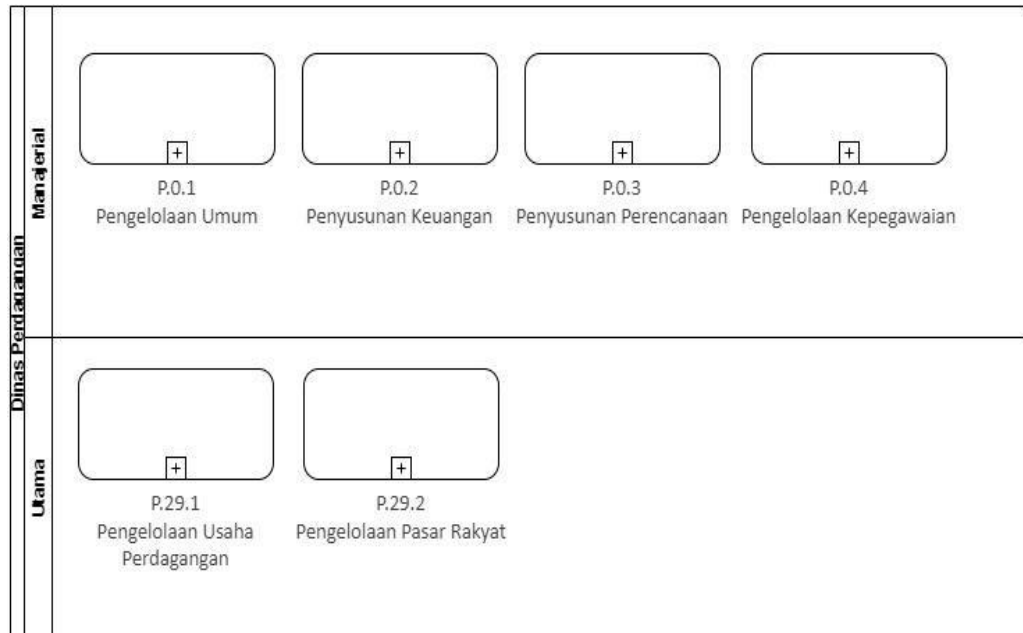
Tabel 2.66 dianalisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Dinas Perdagangan. Sehingga pada Dinas Perdagangan memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.67**.

Tabel 2.67 Daftar Proses Level 0 dan Level 1
Dinas Perdagangan

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.29.1	Pengelolaan Usaha Perdagangan	P.29.1.1	Pengawasan Perizinan Perdagangan
		P.29.1.2	Pembinaan Usaha Perdagangan
		P.29.1.3	Pemantauan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		P.29.1.4	Penggunaan Produk Dalam Negeri
		P.29.1.5	Pemasaran Produk Dalam Negeri
P.29.2	Pengelolaan Pasar Rakyat	P.29.2.1	Pengendalian Pasar Rakyat
		P.29.2.2	Pengelolaan Retribusi Pasar Rakyat
		P.29.2.3	Pengelolaan Perizinan Pasar Rakyat
		P.29.2.4	Pengelolaan Sarana Prasarana Pasar Rakyat
		P.29.2.5	Pengamanan Ketertiban Pasar Rakyat

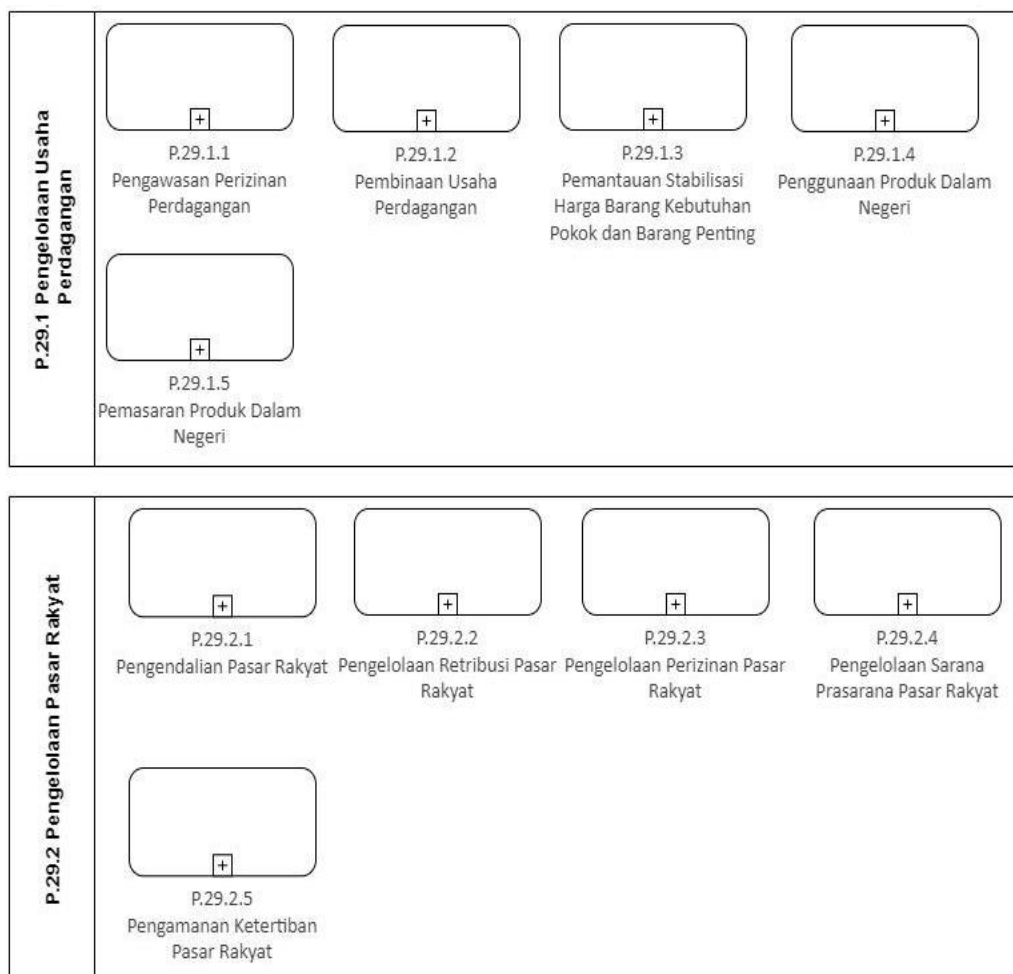
Tabel 2.67 Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Perdagangan. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas

pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Dinas Perdagangan. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Dinas Perdagangan dapat dilihat pada **Gambar 2.61**.



Gambar 2.61 Peta Proses Bisnis Level 0 Dinas Perdagangan

Berdasarkan Gambar 2.61, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.29.1 dan P.29.2 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.62**.



Gambar 2.62 Peta Proses Bisnis Utama Level 1 Dinas Perdagangan

Gambar 2.62 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Dinas Perdagangan, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan sehingga menghasilkan **2 (dua) proses bisnis utama level 0** dan **10 (sepuluh) proses bisnis utama level 1**.

30. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran** memiliki urusan **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 05.02 Keamanan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran** dengan kode proses bisnis **P.30**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 79 Tahun 2021** dimana Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, serta pemadam kebakaran dan penyelamatan. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.68**

Tabel 2.68 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Perencanaan Umum
P.0.2	Penyusunan Keuangan
P.0.3	Penyusunan Perencanaan
P.0.4	Pengelolaan Kepegawaian

Tabel 2.68 di analisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sehingga pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.69**.

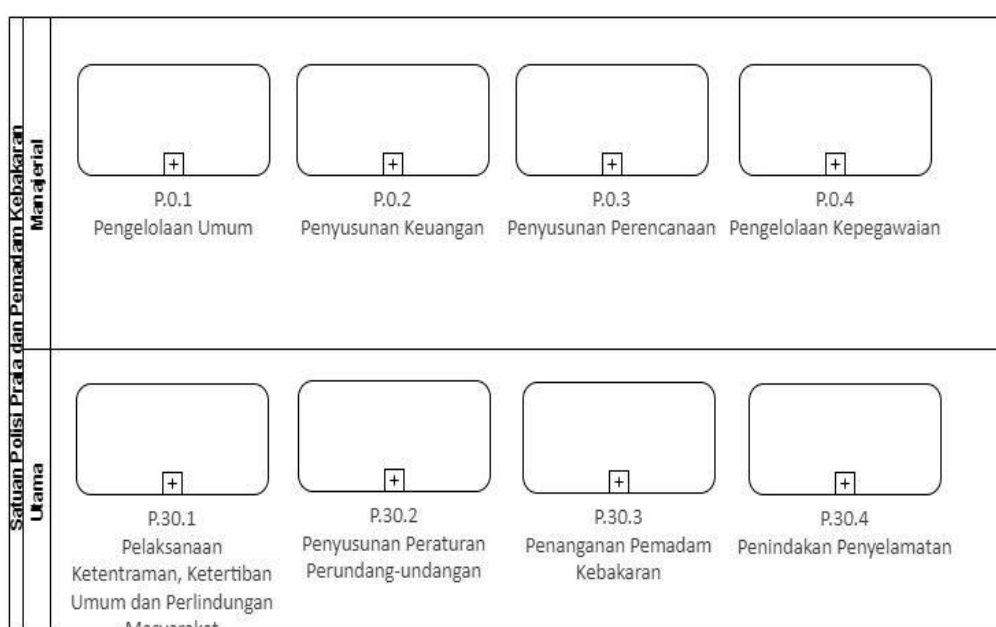
Tabel 2.69 Daftar Proses Level 0 dan Level 1

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.30.1	Pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	P.30.1.1	Pelaksanaan Pengamanan Aset
		P.30.1.2	Pemantauan Pengawasan
P.30..2	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	P.30.2.1	Pembinaan Peraturan Perundang-undangan
		P.30.2.2	Pengawasan Peraturan Perundang-undangan
		P.30.2.3	Penyuluhan Peraturan

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
			Perundang-undangan
P.30.3	Penanganan Pemadam Kebakaran	P.30.3.1	Penyelenggaraan Inspeksi, Sarana dan Prasarana Kebakaran
P.30.4	Penindakan Penyelamatan	P.30.4.1	Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Kebakaran

Tabel 2.69 Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada **Gambar 2.63**.

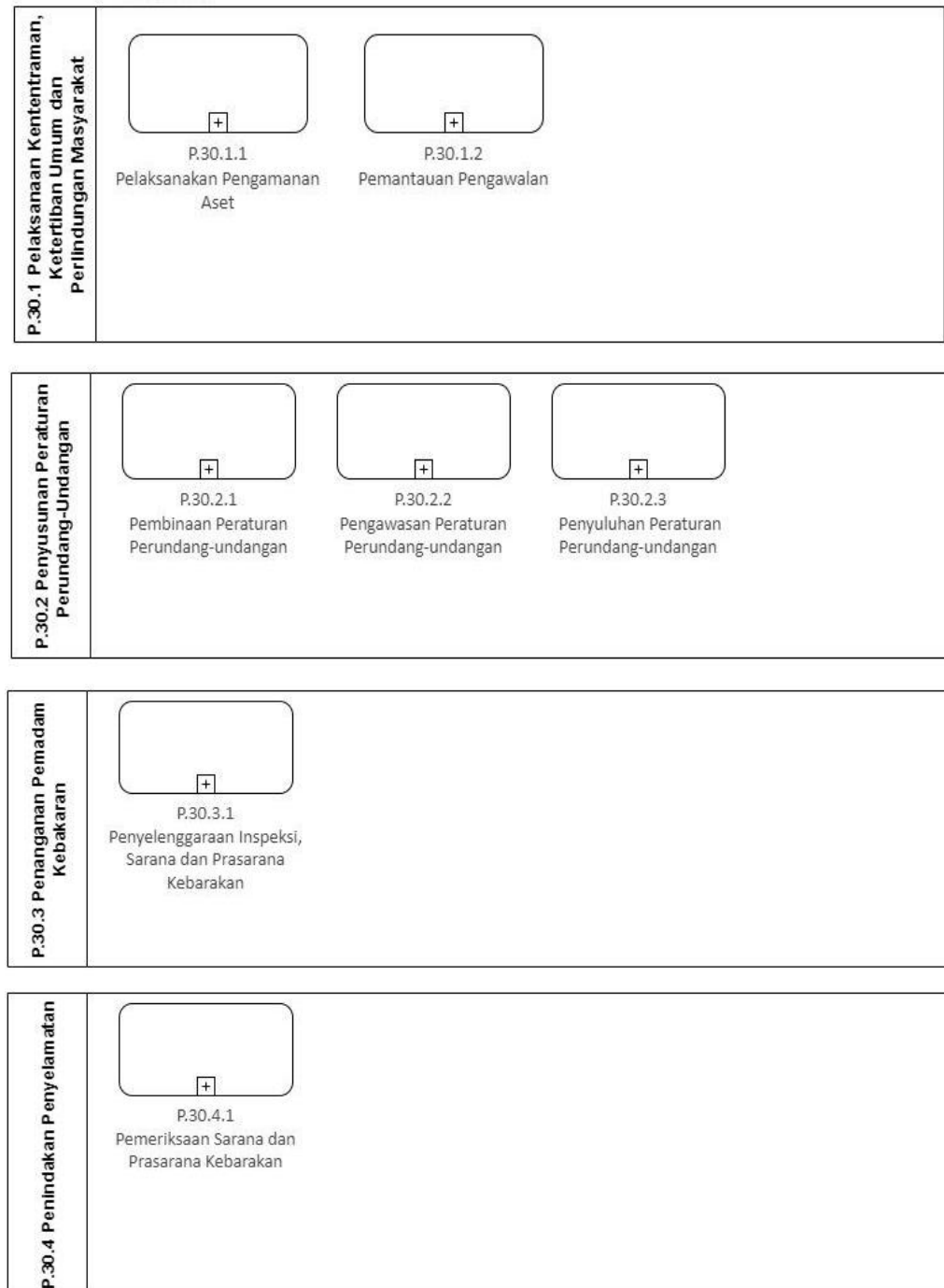


Gambar 2.63 Peta Proses Bisnis Level 0

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan **Gambar 2.63**, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level

1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.30.1, P.30.2, P.30.3 dan P.30.4 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.64.**



Gambar 2.64 Peta Proses Bisnis Utama Level 1
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Gambar 2.64 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang

dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sehingga menghasilkan **4 (empat) proses bisnis utama level 0 dan 7 (tujuh) proses bisnis utama level 1.**

31. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun** memiliki urusan **Kesehatan**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 04.01 Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun** dengan kode proses bisnis **P.31**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 66 Tahun 2021** dimana Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan dari perawatan sakit hingga sembuh. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.70**

Tabel 2.70 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Penyusunan Bagian Umum
P.0.2	Pengolahan Kepegawaian
P.0.3	Penyusunan Perencanaan

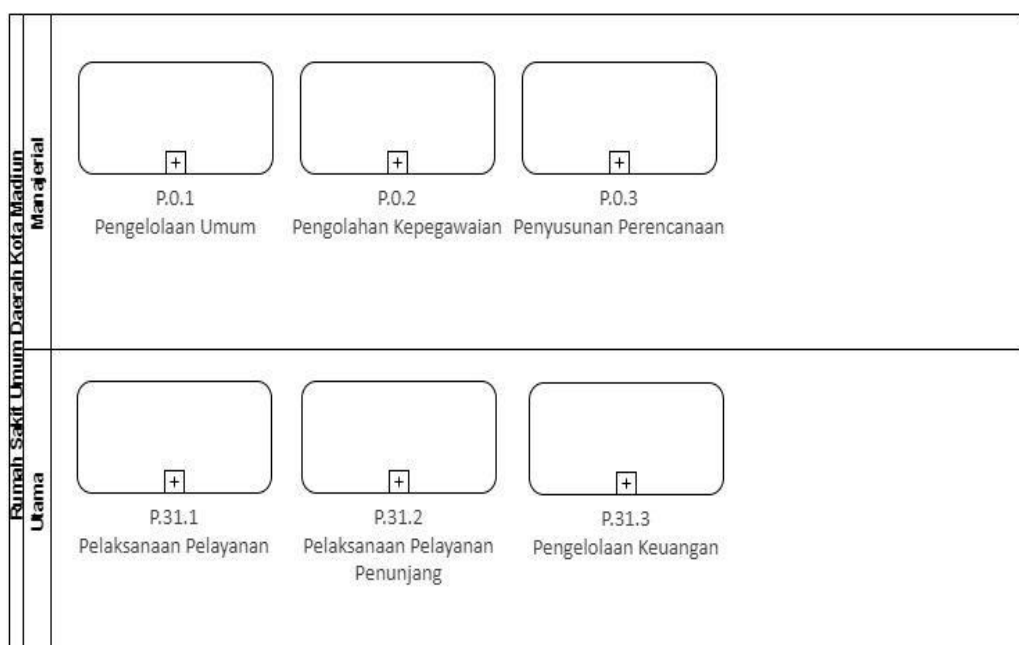
Tabel 2.70 di analisis berdasarkan dari proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Rumah Sakit Umum Daerah. Sehingga pada Rumah Sakit Umum Daerah memiliki 3 (tiga) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.3. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.71**.

Tabel 2.71 Daftar Proses Level 0 dan Level 1
Rumah Sakit Umum Daerah

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.31.1	Pelaksanaan Pelayanan	P.31.1.1	Pelaksanaan Pelayanan Medis
		P.31.1.2	Pelaksanaan Pelayanan

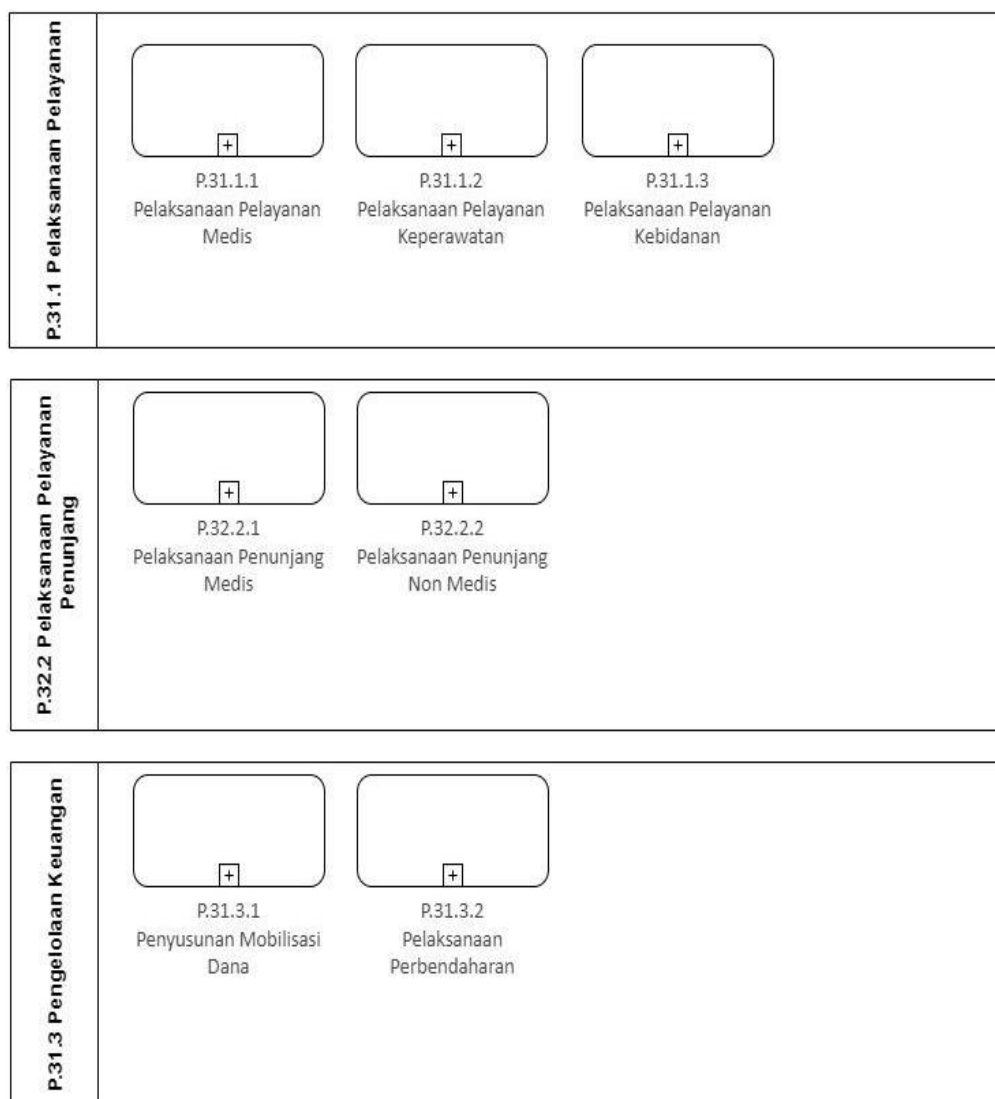
Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
			Keperawatan
		P.31.1.3	Pelaksanaan Pelayanan Kebidanan
P.31.2	Pelaksanaan Pelayanan Penunjang	P.31.2.1	Pelaksanaan Penunjang Medis
		P.31.2.2	Pelaksanaan Penunjang Non Medis
P.31.3	Pengelolaan Keuangan	P.31.3.1	Penyusunan Mobilisasi Dana
		P.33.3.2	Pelaksanaan Perbendaharaan

Tabel 2.71, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Rumah Sakit Umum Daerah. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Rumah Sakit Umum Daerah. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Rumah Sakit Umum Daerah dapat dilihat pada **Gambar 2.65**.



Gambar 2.65 Peta Proses Bisnis Level 0
Rumah Sakit Umum Daerah

Berdasarkan Gambar 2.65, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Proses bisnis level 1 utama merupakan turunan dari proses bisnis level 0 utama. Proses bisnis P.31.1, P.31.2, dan P.31.3 merupakan proses bisnis level 1 utama yang selanjutnya ditampilkan pada **Gambar 2.66.**



Gambar 2.66 Peta Proses Bisnis Utama Level 1
Rumah Sakit Umum Daerah

Gambar 2.66 menjabarkan setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian dijabarkan lagi menjadi proses bisnis utama level 1, diidentifikasi berdasarkan analisis tugas pokok serta fungsi pada setiap bagian yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah sehingga menghasilkan **3 (tiga) proses bisnis utama level 0 dan 7 (tujuh) proses bisnis utama level 1.**

32. Kecamatan Manguharjo

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Kecamatan Manguharjo** memiliki urusan **Penunjang Kecamatan**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Kecamatan Manguharjo memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 09.01 Aparatur Negara, Kecamatan Manguharjo** dengan kode proses bisnis **P.32. Sedangkan** penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020** dimana Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau kelurahan. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.72**

Tabel 2.72 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pengelolaan Umum
P.0.2	Penyusunan Perencanaan
P.0.3	Pengelolaan Kepegawaian
P.0.4	Penyusunan Keuangan

Tabel 2.72 di analisis berdasarkan dari proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Kecamatan Manguharjo. Sehingga pada Kecamatan Manguharjo memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.73**.

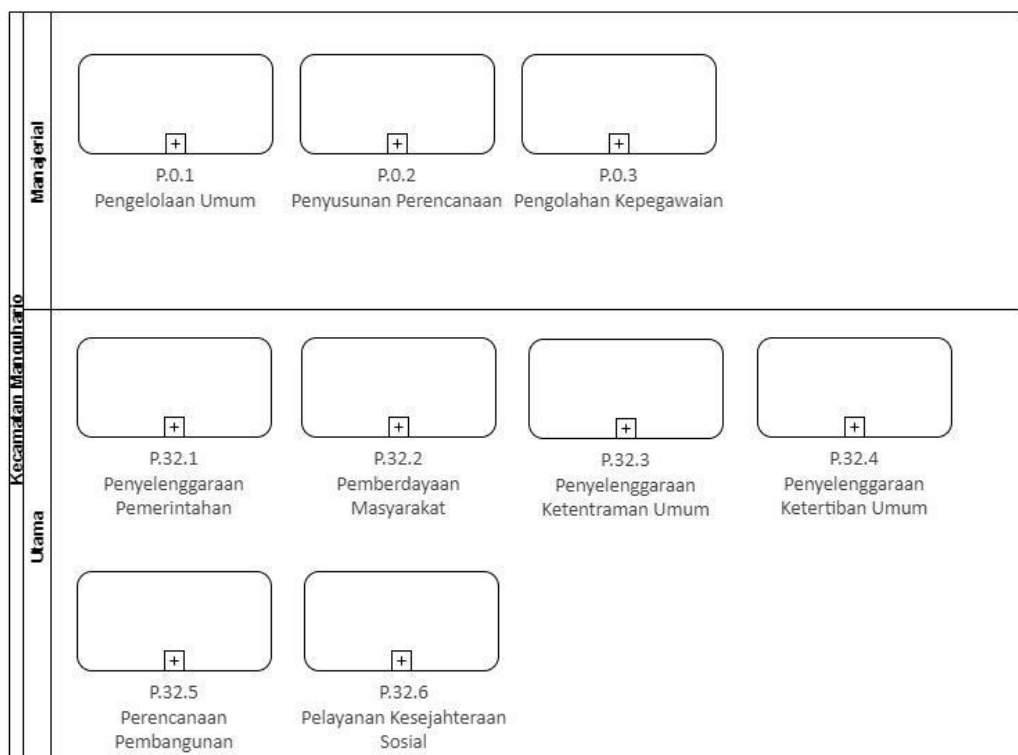
Tabel 2.73 Daftar Proses Level 0 dan Level 1

Kecamatan Manguharjo

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
P.32.1	Penyelenggaraan Pemerintahan		
P.32.2	Pemberdayaan Masyarakat		
P.32.3	Penyelenggaraan Ketentraman Umum		
P.32.4	Penyelenggaraan		

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0	Kode Lv 1	Nama Proses Lv 1
	Ketertiban Umum		
P.32.5	Perencanaan Pembangunan		
P.32.6	Pelayanan Kesejahteraan Sosial		

Tabel 2.73 Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Kecamatan Manguharjo. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Kecamatan Manguharjo. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Kecamatan Manguharjo dapat dilihat pada **Gambar 2.67.**



Gambar 2.67 Peta Proses Bisnis Level 0
Kecamatan Manguharjo

Berdasarkan Gambar 2.67, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Kecamatan Manguharjo, sehingga menghasilkan **6 (enam) proses bisnis utama level 0**.

33. Kecamatan Kartoharjo

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Kecamatan Kartoharjo** memiliki urusan **Penunjang Kecamatan**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Kecamatan Kartoharjo memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 09.01 Aparatur Negara, Kecamatan Kartoharjo** dengan kode proses bisnis **P.33**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020** dimana Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau kelurahan. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.74**.

Tabel 2.74 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pengelolaan Umum
P.0.2	Penyusunan Perencanaan
P.0.3	Pengelolaan Kepegawaian
P.0.4	Penyusunan Keuangan

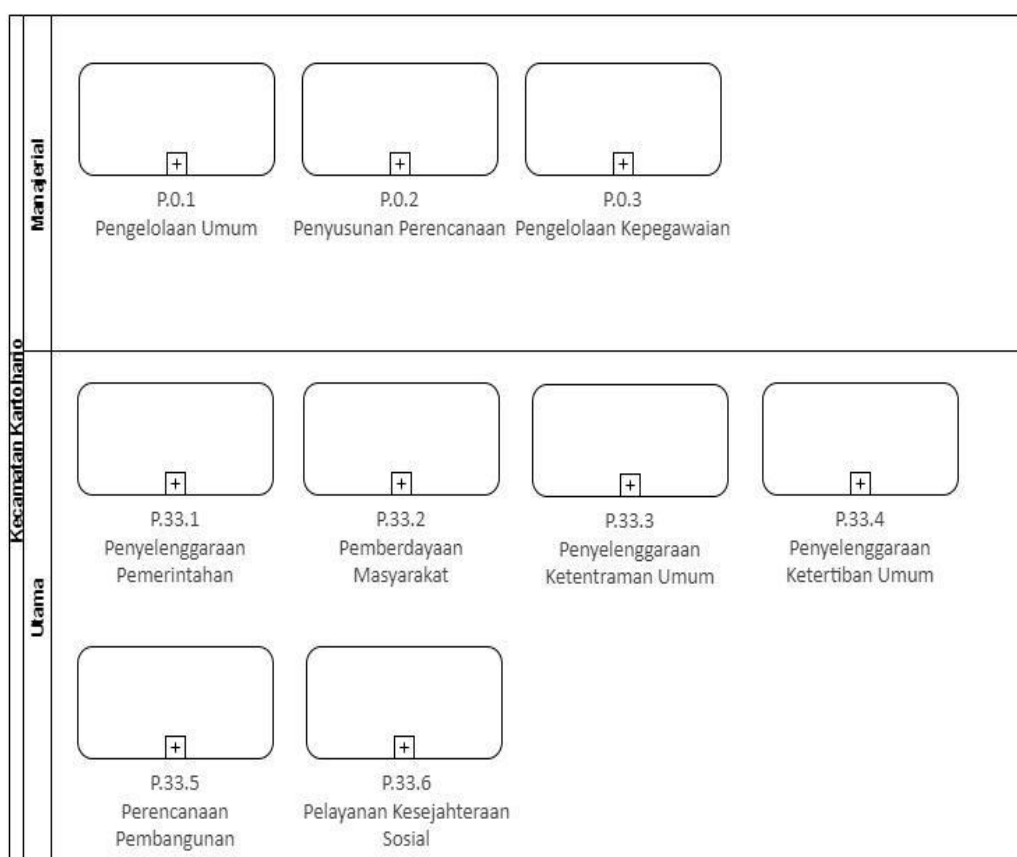
Tabel 2.74 di analisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Kecamatan Kartoharjo. Sehingga pada Kecamatan Kartoharjo memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.75**.

Tabel 2.75 Daftar Proses Level 0 dan Level 1

Kecamatan Kartoharjo

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0
P.33.1	Penyelenggaraan Pemerintahan
P.33.2	Pemberdayaan Masyarakat
P.33.3	Penyelenggaraan Ketentraman Umum
P.33.4	Penyelenggaraan Ketertiban Umum
P.33.5	Perencanaan Pembangunan
P.33.6	Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Sebagaimana pada Tabel 2.75 Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Kecamatan Kartoharjo. Selanjutnya pada proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Kecamatan Kartoharjo. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Kecamatan Kartoharjo dapat dilihat pada **Gambar 2.68**.



Gambar 2.68 Peta Proses Bisnis Level 0 Kecamatan Kartoharjo

Berdasarkan **Gambar 2.68**, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Setiap proses utama level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Kecamatan Manguharjo, sehingga menghasilkan **6 (enam) proses bisnis utama level 0**.

34. Puskesmas Manguharjo

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Puskesmas Manguharjo** memiliki urusan **Kesehatan**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Puskesmas Manguharjo memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 04.01 Kesehatan, Puskesmas Manguharjo** dengan kode proses bisnis **P.34**. Sedangkan penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 66 Tahun 2021** dimana Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.76**

Tabel 2.76 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pengelolaan Umum
P.0.2	Penyusunan Perencanaan
P.0.3	Pengelolaan Kepegawaian

Tabel 2.76 dianalisis berdasarkan proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Puskesmas Manguharjo. Sehingga pada Puskesmas Manguharjo memiliki 4 (empat) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.4. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.77**.

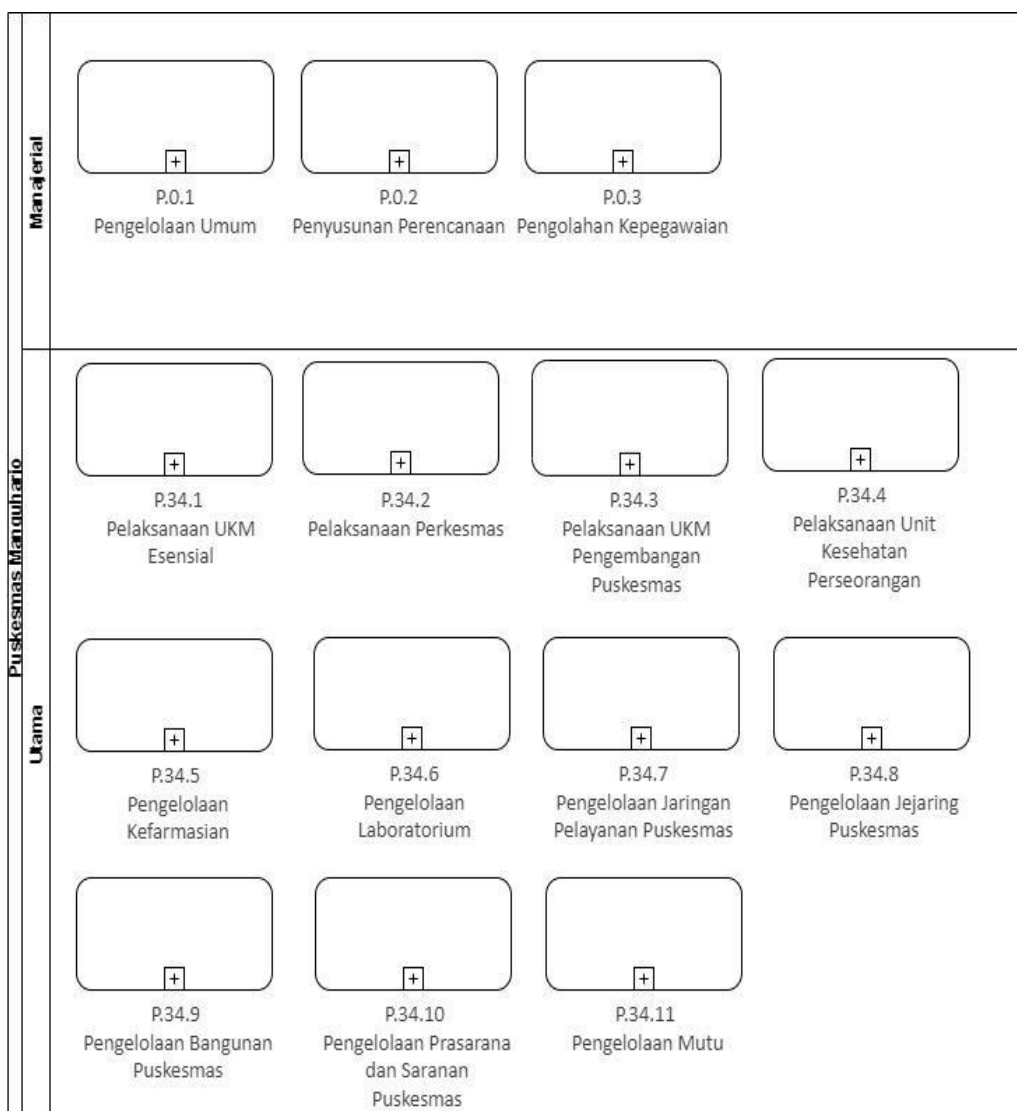
Tabel 2.77 Daftar Proses Level 0 dan Level 1

Puskesmas Manguharjo

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0
P.34.1	Pelaksanaan UKM Esensial
P.34.2	Pelaksanaan Perkesmas
P.34.3	Pelaksanaan UKM Pengembangan Puskesmas
P.34.4	Pelaksanaan Unit Kesehatan Perseorangan
P.34.5	Pengelolaan Kefarmasian
P.34.6	Pengelolaan Laboratorium
P.34.7	Pengelolaan Jaringan Pelayanan Puskesmas
P.34.8	Pengelolaan Jejaring Puskesmas
P.34.9	Pengelolaan Bangunan Puskesmas

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0
P.34.10	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Puskesmas
P.34.11	Pengelolaan Mutu

Tabel 2.77, Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Puskesmas Manguharjo. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Puskesmas Manguharjo. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Puskesmas Manguharjo dapat dilihat pada **Gambar 2.69**.



Gambar 2.69 Peta Proses Bisnis Level 0 Puskesmas Manguharjo

Berdasarkan **Gambar 2.69**, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Setiap Proses bisnis level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Puskesmas Manguharjo, sehingga menghasilkan **11 (sebelas) proses bisnis utama level 0**.

35. Puskesmas Sukosari

Berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, **Puskesmas Sukosari** memiliki urusan **Kesehatan**. Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Puskesmas Sukosari memiliki referensi arsitektur proses bisnis SPBE yaitu **RAB 04.01 Kesehatan, Puskesmas Sukosari** dengan kode proses bisnis **P.35**. Sebagaimana penyusunan proses bisnis level PD mengacu pada **Peraturan Walikota Madiun Nomor 66 Tahun 2021** dimana Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Detail uraian Proses Manajerial Level 0 dapat dilihat pada **Tabel 2.78**

Tabel 2.78 Hasil Identifikasi Proses Manajerial Level 0

Kode LV 0	Nama Proses Lv 0
P.0.1	Pengelolaan Umum
P.0.2	Penyusunan Perencanaan
P.0.3	Pengelolaan Kepegawaian

Tabel 2.78 di analisis berdasarkan ~~dari~~ proses bisnis yang dijalankan pada bidang sekretariat di Puskesmas Sukosari. Sehingga pada Puskesmas Sukosari memiliki 3 (tiga) proses bisnis level 0 manajerial yaitu P.0.1-P.0.3. Detail uraian proses utama level 0 dan level 1 dapat dilihat pada **Tabel 2.79**.

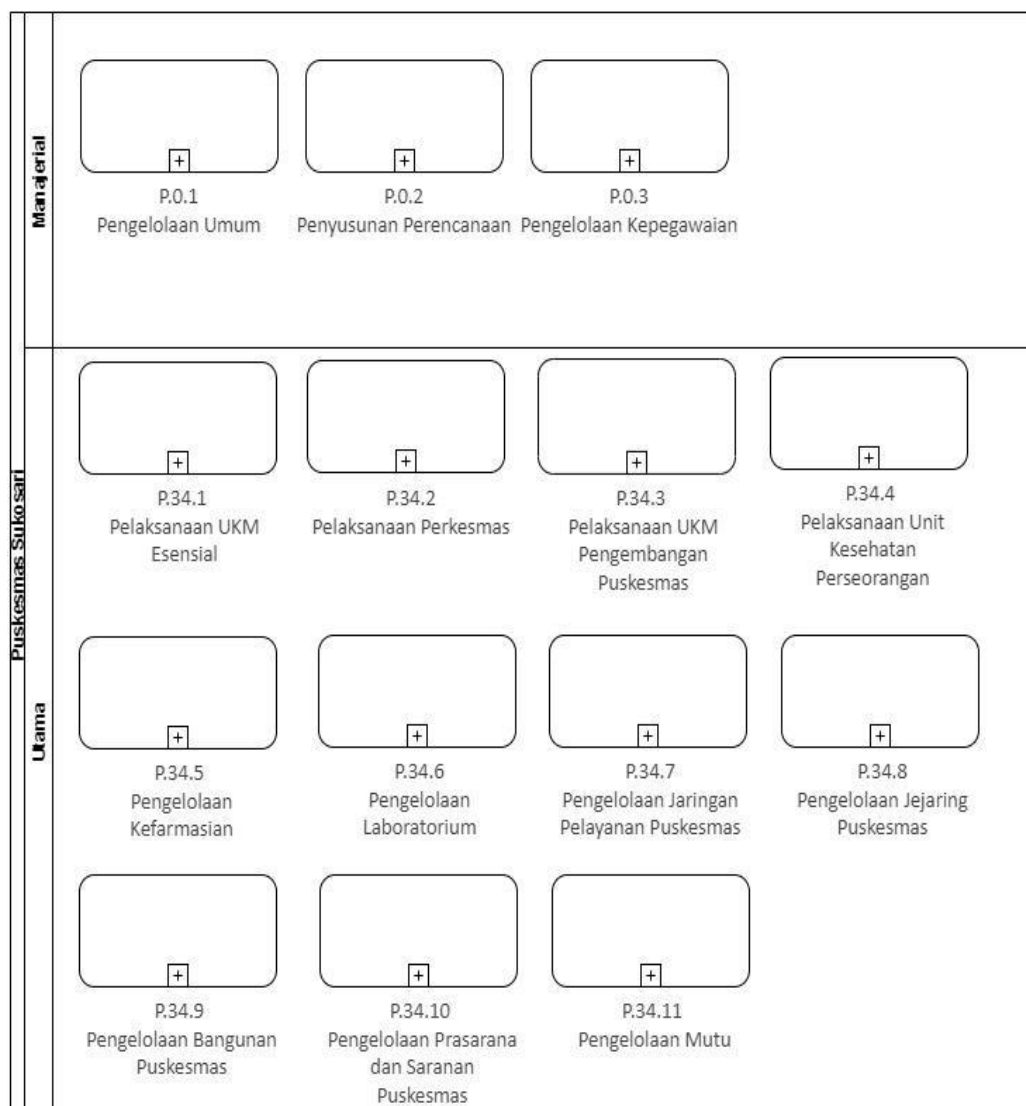
Tabel 2.79 Daftar Proses Level 0 dan Level 1

Puskesmas Sukosari

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0
P.35.1	Pelaksanaan UKM Esensial
P.35.2	Pelaksanaan Perkesmas

Kode Lv 0	Nama Proses Lv 0
P.35.3	Pelaksanaan UKM Pengembangan Puskesmas
P.35.4	Pelaksanaan Unit Kesehatan Perseorangan
P.35.5	Pengelolaan Kefarmasian
P.35.6	Pengelolaan Laboratorium
P.35.7	Pengelolaan Jaringan Pelayanan Puskesmas
P.35.8	Pengelolaan Jejaring Puskesmas
P.35.9	Pengelolaan Bangunan Puskesmas
P.35.10	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Puskesmas
P.35.11	Pengelolaan Mutu

Tabel 2.79 Proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan proses bisnis sub bagian atau sub koordinator pada Puskesmas Sukosari. Selanjutnya proses bisnis level 1 akan dijabarkan lagi pada proses identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian atau sub koordinator pada Puskesmas Sukosari. Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta proses bisnis Instansi Pemerintah. Detail Proses bisnis Level 0 Puskesmas Sukosari dapat dilihat pada **Gambar 2.70**.



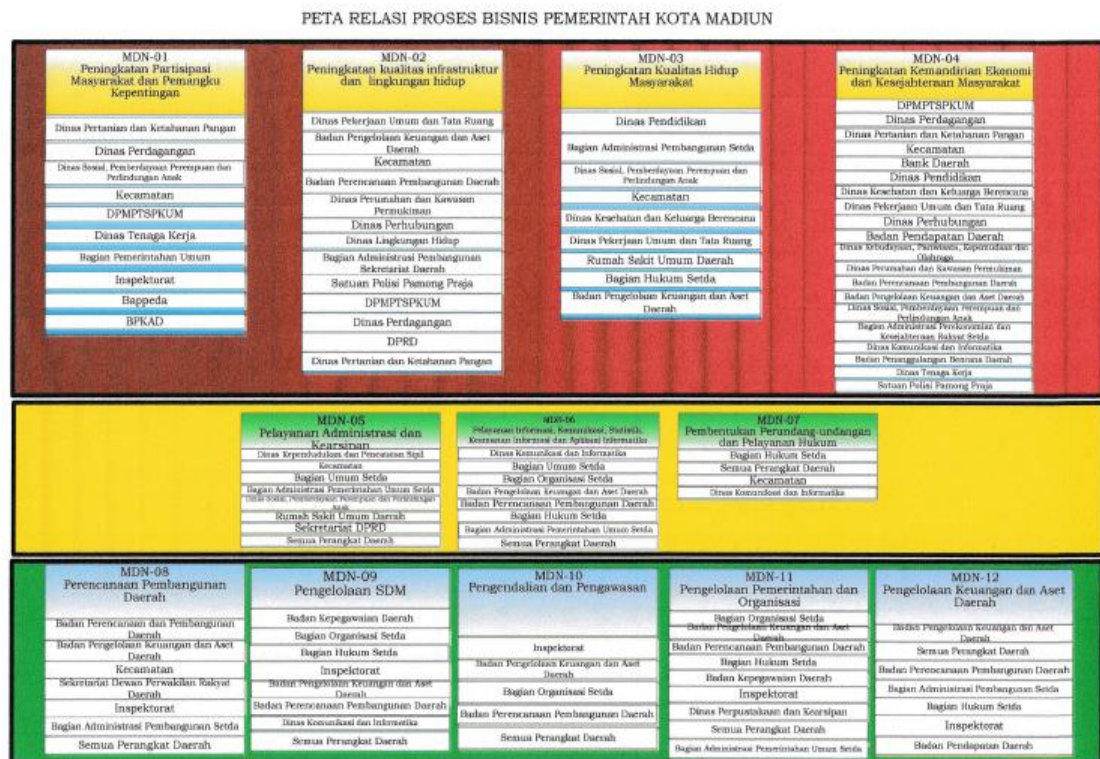
Gambar 2.70 Peta Proses Bisnis Level 0 Puskesmas Sukosari

Berdasarkan **Gambar 2.70**, proses bisnis level 0 utama diidentifikasi berdasarkan bidang sekretariat. Setiap Proses bisnis level 0 berdasarkan dari sub koordinator pada Puskesmas Sukosari, sehingga menghasilkan **11 proses bisnis utama level 0**.

2.3.6 Identifikasi Peta Relasi Kota

Sebagaimana tertuang pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018** dimana Peta Relasi merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada proses bisnis. Pihak-pihak yang terlibat, merupakan PD yang terdapat pada Pemerintah Kota Madiun. Fungsi penting dalam adanya peta relasi ini adalah guna memahami peranan pada setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai *output* yang telah ditentukan.

Pembuatan peta relasi disusun dengan memasukan nama-nama unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses dan subproses. Setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta proses bisnis merupakan cara penulisan membuat peta relasi. Penyusunan peta relasi pada Pemerintah Kota Madiun dianalisis berdasarkan proses bisnis level Kota dimana perangkat daerah yang terlibat dalam setiap proses baik proses utama, proses manajemen serta proses pendukung. Ilustrasi peta relasi proses bisnis Kota Madiun dapat dilihat pada **Gambar 2.71**.



Gambar 2.71 Peta Relasi Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun

Pada Gambar 2.71 menjelaskan terkait pihak-pihak atau PD pada Pemerintah Kota Madiun yang bertanggung jawab menjalankan proses bisnis. Terdapat 3 (tiga) proses bisnis yang teridentifikasi dari peta relasi tersebut yaitu Proses Bisnis Utama, Proses Bisnis Manajerial dan Proses Bisnis Pendukung. Pada Proses Bisnis Utama sebelum perubahan perubahan terdapat 4 (tiga) proses, namun setelah dilakukan perubahan maka proses bisnis utama menjadi 3 (tiga) proses. Dimana proses yang pertama yaitu **Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup (MDN-02)** dengan 13 (tiga belas) PD sebagai penanggung jawab. Pada proses kedua yaitu **Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat (MDN-03)** dengan 9 (sembilan) PD sebagai penanggung jawab.

Proses utama ketiga yaitu **Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (MDN-04)** dengan 20 PD penanggung jawab.

Pada Proses Bisnis Manajerial terdapat 3 (tiga) proses yaitu pertama **Pelayanan Administrasi dan Kearsipan (MDN-05)** dengan 8 (delapan) PD penanggung jawab, kedua **Pelayanan Informasi, Komunikasi, Statistik, Keamanan Informasi dan Aplikasi Informatika (MDN-06)** dimana terdapat 8 (delapan) PD sebagai penanggung jawab, dan terakhir **Pembentukan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum (MDN-07)** dengan 4 (empat) PD sebagai penanggung jawab.

Pada Proses Bisnis Pendukung terdapat 5 (lima) proses yaitu pertama **Perencanaan Pembangunan Daerah (MDN-08)** dimana terdapat 7 (tujuh) PD sebagai penanggung jawab, kedua **Pengelolaan SDM (MDN-09)** dengan 8 (delapan) PD sebagai penanggung jawab, ketiga **Pengendalian dan Pengawasan (MDN-10)** dengan 5 (lima) PD penanggung jawab, keempat yaitu **Pengelolaan Pemerintahan dan Organisasi (MDN-11)** dengan 9 (sembilan) PD sebagai penanggung jawab, dan terakhir **Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (MDN-12)** dengan 7 (tujuh) PD sebagai penanggung jawab.

2.3.7 Identifikasi Usulan Standar Operasional Prosedur

Identifikasi usulan SOP merupakan proses pengidentifikasian usulan SOP berdasarkan layanan yang terdapat pada masing-masing OPD. Namun, usulan tersebut jika layanan belum didukung dengan SOP.

2.3.7.1 Usulan SOP pada Layanan Eksisting SPBE

Pada Pemerintah Kota Madiun dari **322** (tiga ratus dua puluh dua) **layanan** terdapat **248** (dua ratus empat puluh delapan) **layanan yang telah didukung SOP** namun masih terdapat **74** (tujuh puluh empat) **layanan (tujuh puluh empat) layanan yang belum didukung SOP**. Berdasarkan dari hasil kondisi eksisting tersebut dibutuhkan usulan SOP untuk mendukung kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan eksisting sehingga dapat memberikan arahan dengan jelas dan detail. Usulan SOP pada Layanan eksisting SPBE dapat dilihat pada **Tabel 2.80**.

Tabel 2.80 Usulan SOP Pada Layanan Eksisting

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
1	Bagian Organisasi	Layanan Akuntabilitas OPD	SOP Layanan Akuntabilitas OPD	2023
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Layanan Pengadaan secara elektronik	SOP Layanan Pengadaan secara elektronik	2023
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Layanan Pengadaan secara elektronik menggunakan website	SOP Layanan Pengadaan secara elektronik menggunakan website	2024
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Pelayanan Pengajuan Izin SATGAS COVID	SOP Pengajuan Izin SATGAS COVID	2023
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Pelayanan Fasilitas Acara Keagamaan	SOP Fasilitas Acara Keagamaan	2024
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Pelayanan Pemberian Informasi dan Data Pengembangan dan Promosi Ekonomi Daerah/Ekonomi Kreatif	SOP Pemberian Informasi dan Data Pengembangan dan Promosi Ekonomi Daerah/Ekonomi Kreatif	2025
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Pelayanan Fasilitas Pemberangkatan dan Penjemputan Calon Jamaah Haji	SOP Fasilitas Pemberangkatan dan Penjemputan Calon Jamaah Haji	2026
5	Bagian Umum	Pelayanan Pengajuan peminjaman ruangan	SOP Pengajuan peminjaman ruangan	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
5	Bagian Umum	Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	SOP Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	2024
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	SOP Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	2024
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan Evakuasi / Penanggulangan Bencana	SOP Layanan Evakuasi / Penanggulangan Bencana	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pelayanan Pemakaian (sewa, kerjasama) Kekayaan Pemerintah Daerah Kota Madiun	SOP Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah kota Madiun	2023 /2024
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan DAK Fisik di Kota Madiun	SOP Pengelolaan DAK Fisik di Kota Madiun	2024
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan DAK Non Fisik di Kota Madiun	SOP Pengelolaan DAK Non Fisik di Kota Madiun	2025
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Keuangan Dana Insentif Daerah	SOP Layanan Keuangan Dana Insentif Daerah	2025
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Monitoring PNBPN	SOP Layanan Monitoring PNBPN	2026
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Keuangan Desa	SOP Layanan Keuangan Desa	2027
10	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Pengawasan Monitoring Capaian Kinerja Program Pencegahan Korupsi	SOP Layanan Pengawasan Monitoring Capaian Kinerja Program Pencegahan Korupsi	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Legalisir	SOP Layanan Legalisir	2023
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Pelayanan Seleksi Penerimaan CPNS	SOP Layanan Seleksi Penerimaan CPNS	2024
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS	SOP Layanan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS	2024
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS	SOP Layanan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS	2025
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Sewa Gedung Diklat	SOP Layanan Sewa Gedung Diklat	2025
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Permohonan Kartu Taspen	SOP Layanan Permohonan Kartu Taspen	2026
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Permohonan Ijin Keluar Negeri	SOP Permohonan Ijin Keluar Negeri	2026
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Permohonan Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional Keluar daerah	SOP Permohonan Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional Keluar Daerah	2027

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Kontrak Kerja	SOP Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Kontrak Kerja	2027
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelayanan Pemantauan dan Pengendalian Kinerja OPD	SOP Pelayanan Pemantauan dan Pengendalian Kinerja OPD	2023
14	Sekretariat DPRD	Layanan e-AR (Layanan Aspirasi Masyarakat)	SOP e-AR (Layanan Aspirasi Masyarakat)	2025
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Perencanaan Kebutuhan SDM	SOP Layanan Perencanaan Kebutuhan SDM	2023
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Pelaporan Jalan dan Jembatan	SOP Layanan Pelaporan Jalan dan Jembatan	2024
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Persebaran Jaringan Perpipaan	SOP Layanan Persebaran Jaringan Perpipaan	2022
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	SOP Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Program Keluarga Harapan	SOP Program Keluarga Harapan	2024
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Pengusulan KIS PBIN	SOP Pengusulan KIS PBIN	2025

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Penonaktifan KIS PBIN	SOP Penonaktifan KIS PBIN	2026
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar / Kartu Indonesia Pintar Kuliah	SOP Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Kuliah	2026
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Santunan Kematian	SOP Pelayanan Santunan Kematian	2026
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah	SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah	2027
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Penerbitan SPT Pendampingan Respon Kasus Anak	SOP Penerbitan SPT Pendampingan Respon Kasus Anak	2027
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Gelandangan Psikotik dan Tempat Tinggal Tidak Tetap	SOP Penerbitan Rekomendasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Gelandangan Psikotik dan Tempat Tinggal Tidak Tetap	2024
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi	SOP Penerbitan Surat Rekomendasi	2025

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
	Perlindungan Anak	Pelayanan Lansia Terlantar	Pelayanan Lansia Terlantar	
20	Dinas Pendidikan	Layanan Be SMART Kota Madiun	SOP Be SMART Kota Madiun	2024
20	Dinas Pendidikan	Layanan LI (Laporan Individu Sekolah) profil	SOP LI (Laporan Individu Sekolah) profil	2025
20	Dinas Pendidikan	Pelayanan pendaftaran peserta didik baru	SOP Pelayanan pendaftaran peserta didik baru	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan SILAPLING	SOP SILAPLING	2025
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan SILANDEP	SOP SILANDEP	2023
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Digi Form	SOP Digi Form	2023
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	2023
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Penerbitan KK	SOP Penerbitan KK	2024
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan	SOP Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan	2024

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Kelahiran	SOP Pencatatan Kelahiran	2025
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan Kematian	SOP Pencatatan Kematian	2025
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan Dan Pengesahan Anak	SOP Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak	2026
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama	SOP Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama	2026
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Pembetulan Dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	SOP Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	2027
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pembatalan Dokumen Administrasi Kependudukan Melalui Asas Contrarius Actus	SOP Pembatalan Dokumen Administrasi Kependudukan Melalui Asas Contrarius Actus	2027
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Penerbitan Kembali Register Dan Akta Pencatatan Sipil	SOP Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil	2027
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Permintaan Data Jumlah Penduduk	SOP Permintaan Data Jumlah Penduduk	2027

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan	SOP Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan	2027
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Inovasi Baktiku Eyangku (Bawakan Akte Kelahiran Untukmu EYANGKU	SOP Inovasi Baktiku Eyangku (Bawakan Akte kelahiran untukmu Eyangku)	2023
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Pendaftaran Penduduk (SIAK)	SOP Layanan Pendaftaran Penduduk (SIAK)	2024
24	Dinas Perhubungan	Pelayanan E-TLE	SOP Pelayanan E-TLE	2023
24	Dinas Perhubungan	Layanan pendaftaran Online Pengujian Kendaraan Bermotor dan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor	SOP Layanan pendaftaran Online Pengujian Kendaraan Bermotor dan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor	2024
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Aduan Pelayanan Publik	SOP Layanan Aduan Pelayanan Publik	2023
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Satu Data Kota Madiun	SOP Layanan Satu Data Kota Madiun	2024
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Madiun	SOP Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Madiun	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peta Digital Perizinan	SOP Peta Digital Perizinan	2024
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pelayanan Perpustakaan	SOP Layanan Jarimu	2022
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Kearsipan Dinamis	SOP Layanan Kearsipan Dinamis	2023
32	Kecamatan Manguharjo	Layanan pelaporan realisasi kegiatan kelurahan	SOP Pelaporan Realisasi Kegiatan Kelurahan	2023
33	Kecamatan Kartoharjo	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat	SOP Survey Kepuasan Masyarakat	2024

2.3.7.2 Usulan SOP pada Usulan Layanan Administrasi dan Layanan Publik SPBE

Berdasarkan pada hasil analisis, usulan SOP hanya diusulkan hanya terhadap Layanan Publik Sektoral. Terdapat 6 (enam) usulan SOP pada Layanan Publik Sektoral. Usulan SOP pada layanan Publik Sektoral dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.81**.

Tabel 2.81 Usulan SOP Layanan Administrasi dan Layanan Publik SPBE

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Aplikasi Usulan	OPD Pemilik Layanan	Usulan SOP
1	Pengajaran	RAL 01.31 Pendidikan	Pengembangan Aplikasi LI	Dinas Pendidikan	SOP Pengembangan Aplikasi LI
2	Pariwisata	RAL 01.43 Informasi	Aplikasi Pelayanan Publik Disbudparpora (E-Disbudpora)	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah	SOP E-Disbudpora

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Aplikasi Usulan	OPD Pemilik Layanan	Usulan SOP
				Raga	
3	Pemuda dan Olahraga	RAL 01.43 Informasi	Sistem Informasi Kepemudaan Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	SOP Sistem Informasi Kepemudaan
4	Pemuda dan Olahraga	RAL 01.43 Informasi	Aplikasi Pelayanan Publik Disbudparpora (E-Disbudpora)	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	SOP E-Disbudpora
5	Perhubungan dan lalu lintas	RAL 01.19 Transportasi	Aplikasi E-Hub	Dinas Perhubungan	SOP E-Hub
6	Perhubungan dan lalu lintas	RAL 01.19 Transportasi	Sistem Informasi Pelayanan Angkutan Umum dan Pelajar	Dinas Perhubungan	SOP Sistem Informasi Layanan Angkutan Umum

2.3.7.3 Usulan SOP pada Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD

Usulan SOP ini digunakan sebagai mendukung kinerja terkait program yang ada. Program RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksudkan untuk jangka periode selama 5 tahun. Terdapat sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) usulan SOP untuk mendukung usulan layanan terhadap program RPJMD Pemerintah Kota Madiun. Usulan SOP yang terintegrasi pada Usulan Layanan terhadap program RPJMD ditunjukkan pada **Tabel 2.82**.

Tabel 2.82 Usulan SOP Pada Layanan Terhadap Program RPJMD

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
1	Bagian Hukum	Tidak ada		
2	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Tidak ada		
3	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	SOP Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi
4	Bagian Umum	Tidak ada		
5	Bagian pemerintahan	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Layanan Penataan Daerah Otonom Baru	SOP Layanan Penataan Daerah Otonom Baru
6	Bagian pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SOP Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
6	Bagian pemerintahan	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah	Layanan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah	SOP Layanan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak ada		
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada		
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pelayanan Peningkatan Kemampuan Kinerja Bendahara Pengeluaran dan penerimaan semua OPD	Layanan konsultasi terkait Tupoksi Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran OPD	SOP Layanan konsultasi terkait Tupoksi Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran OPD
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pelayanan Peningkatan Kemampuan Kinerja Pengurus barang dan Penyimpan Barang semua OPD	Layanan konsultasi terkait Tupoksi Pengurus dan Penyimpan Barang	SOP Layanan konsultasi terkait Tupoksi Pengurus dan Penyimpan Barang

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Penyuluhan kepada masyarakat tentang tata cara Pemakaian (sewa, kerjasama) Kekayaan Pemerintah Daerah Kota Madiun	Layanan cara memperoleh Rekomendasi Pemakaian (sewa, kerjasama) Kekayaan Pemerintah Daerah Kota Madiun	SOP Rekomendasi Pemakaian (sewa, kerjasama) Kekayaan Pemerintah Daerah Kota Madiun
10	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada		
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada		
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Layanan Kemitraan Pengembangan Wawasan	SOP Layanan Kemitraan Pengembangan Wawasan
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	Layanan Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	SOP Layanan Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Ormas	Layanan Pendidikan Politik Masyarakat dan Ormas	SOP Layanan Pendidikan Politik Masyarakat dan Ormas

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	SOP Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Layanan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	SOP Layanan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
13	Inspektorat	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Layanan Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	SOP Layanan Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
13	Inspektorat	Program Perumusan, Penyempurnaan dan Penataan Kebijakan dan Sisdur Pembinaan dan Pengawasan	Layanan Perumusan, Penyempurnaan dan Penataan Kebijakan dan Sisdur Pembinaan dan Pengawasan	SOP Layanan Perumusan, Penyempurnaan dan Penataan Kebijakan dan Sisdur Pembinaan dan Pengawasan

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
13	Inspektorat	Program Pendampingan dan Asistensi	Layanan Pendampingan dan Asistensi	SOP Layanan Pendampingan dan Asistensi
14	Sekretariat DPRD	Program Layanan Perundang Undangan, Dokumentasi dan Rapat	Layanan Perundang Undangan, Dokumentasi dan Rapat	SOP Layanan Perundang Undangan, Dokumentasi dan Rapat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	SOP Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	SOP Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	SOP Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Layanan Pengendalian Penduduk	SOP Layanan Pengendalian Penduduk

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Layanan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	SOP Layanan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Layanan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	SOP Layanan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Layanan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	SOP Layanan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Layanan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	SOP Layanan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan Peningkatan Pelayanan BLUD	SOP Layanan Peningkatan Pelayanan BLUD
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	SOP Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	Layanan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	SOP Layanan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Banjir	Layanan Pengendalian Banjir	SOP Layanan Pengendalian Banjir
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Layanan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	SOP Layanan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
			Layanan Persebaran Jaringan Perpipaan	SOP Layanan Persebaran Jaringan Perpipaan
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	Layanan Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	SOP Layanan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	SOP Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	SOP Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Layanan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	SOP Layanan Penataan Bangunan dan Lingkungannya
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Layanan Penyelenggaraan Jalan	SOP Layanan Penyelenggaraan Jalan
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	SOP Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	layanan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	SOP layanan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Layanan Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	SOP Layanan Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Sosial	Layanan Pemberdayaan Sosial	SOP Layanan Pemberdayaan Sosial
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Layanan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	SOP Layanan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	SOP Layanan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program kesempatan perluasan kerja	Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	SOP Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	SOP Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
20	Dinas Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Layanan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SOP Layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	SOP Layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	SOP Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Non Formal	Layanan Pendidikan Non Formal	SOP Layanan Pendidikan Non Formal
20	Dinas Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Layanan Pengembangan Kurikulum	SOP Layanan Pengembangan Kurikulum

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Layanan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	SOP Layanan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Layanan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	SOP Layanan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Layanan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	SOP Layanan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Layanan Penanganan Kerawanan Pangan	SOP Layanan Penanganan Kerawanan Pangan

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	SOP Layanan Pengawasan Keamanan Pangan
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Layanan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	SOP Layanan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	SOP Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Layanan Penyuluhan Pertanian	SOP Layanan Penyuluhan Pertanian
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Layanan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	SOP Layanan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Layanan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	SOP Layanan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Layanan Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	SOP Layanan Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Layanan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	SOP Layanan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	SOP Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Layanan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	SOP Layanan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	SOP Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	SOP Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Layanan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	SOP Layanan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Layanan Pengelolaan Persampahan	SOP Layanan Pengelolaan Persampahan
23	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tidak ada		
24	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SOP Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
24	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Layanan Peningkatan Pelayanan Angkutan	SOP Layanan Peningkatan Pelayanan Angkutan
24	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	SOP Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika	SOP Layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Aplikasi Informatika	Layanan Aplikasi Informatika	SOP Layanan Aplikasi Informatika
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Sosialisasi di Bidang Cukai	Layanan Sosialisasi di Bidang Cukai	SOP Layanan Sosialisasi di Bidang Cukai
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Layanan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	SOP Layanan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
25	Dinas Informatika dan Komunikasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Layanan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	SOP Layanan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	SOP Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Layanan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	SOP Layanan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Layanan Pengembangan Kesenian Tradisional	SOP Layanan Pengembangan Kesenian Tradisional
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	SOP Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Layanan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	SOP Layanan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Layanan Pemasaran Pariwisata	SOP Layanan Pemasaran Pariwisata
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan	Layanan Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan	SOP Layanan Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan	Layanan Pembinaan Perpustakaan	SOP Layanan Pembinaan Perpustakaan
29	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi	Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	SOP Layanan Peningkatan Sarana Distribusi

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
		Perdagangan		Perdagangan
29	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Layanan Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	SOP Layanan Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat
29	Dinas Perdagangan	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Layanan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	SOP Layanan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
29	Dinas Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	SOP Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
29	Dinas Perdagangan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Layanan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	SOP Layanan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Layanan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	SOP Layanan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SOP Layanan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
32	Kecamatan Manguharjo	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Layanan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	SOP Layanan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan
32	Kecamatan Manguharjo	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	SOP Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
32	Kecamatan Manguharjo	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Layanan Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	SOP Layanan Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum
32	Kecamatan Manguharjo	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SOP Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
32	Kecamatan Manguharjo	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	SOP Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Layanan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	SOP Layanan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan

	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP
34	Kecamatan Kartoharjo	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	SOP Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Layanan Penyelenggaraan Kelurahan	(Sudah ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan)
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Layanan Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	SOP Layanan Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum

BAB III

ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI DAN LAYANAN SPBE

3.1 Pendahuluan

Pada Bab 1 membahas terkait beberapa domain yang terdapat pada arsitektur SPBE yaitu domain arsitektur data dan informasi dan domain layanan SPBE. Masing-masing domain akan dijelaskan pada bab ini.

3.1.1 Pengertian Data dan Informasi

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik arsitektur SPBE terbagi menjadi 6 (enam) domain, yaitu domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur Aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE dan domain arsitektur layanan SPBE. Gambaran keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE dapat diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja SPBE yang didalamnya memuat Arsitektur SPBE Nasional.

Seluruh domain akan memiliki keterkaitan dengan domain lainnya, dengan adanya keterkaitan antar domain tersebut maka dapat merelasikan informasi-informasi lainnya terkait urusan pemerintahan. Urusan Pemerintahan yang dilakukan, sebagai contoh melihat layanan-layanan yang dihasilkan dalam urusan pemerintahan tersebut, atau aplikasi dan infrastruktur apa saja yang mendukung, serta data dan informasi apa yang diperlukan atau dihasilkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Provinsi, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di pemerintahan yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi. Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip yang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.

Sejalan dengan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia yang diatur dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019** tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Provinsi melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Provinsi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

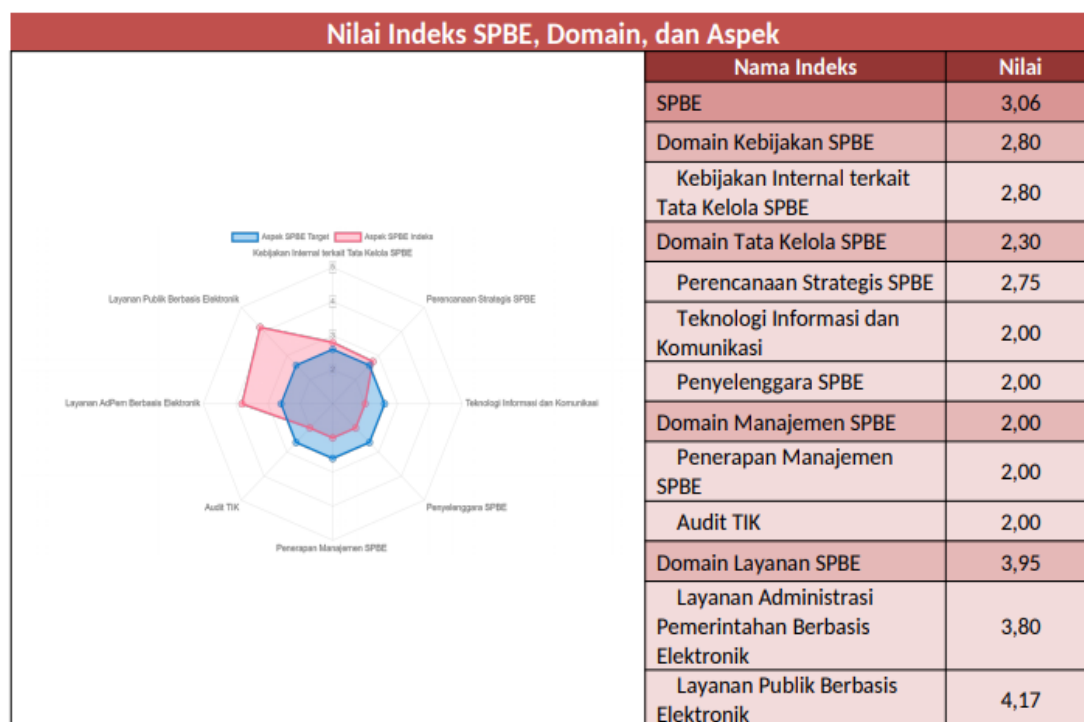
3.1.2 Pengertian Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik layanan SPBE terdiri dari 2 (dua) jenis layanan yaitu layanan administrasi dan layanan publik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah dengan cara mendukung tata laksana internal birokrasi di pemerintahan Daerah. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik mencakup layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Sedangkan layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan yang bersifat publik baik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik mencakup layanan yang mendukung kegiatan di berbagai sektor seperti sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022**, Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu Referensi Arsitektur Layanan (RAL) diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dunia usaha seperti penerapan Cipta Kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (*Government to Citizen/G2C dan Government to Business/G2B*) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah maupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (*Government to Government/G2G, Government to Employee/G2E*).

3.1.3 Hasil Penilaian SPBE

Berikut adalah hasil penilaian dari Evaluasi SPBE Tahun 2021 Pemerintah Kota Madiun yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilihat pada Gambar 3.1



Gambar 3.1 Hasil Evaluasi SPBE

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kota Madiun tahun 2021 dapat diketahui bahwa domain layanan SPBE memiliki nilai 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) dengan predikat “sangat baik”. Aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik memiliki nilai 3,80 (tiga koma delapan puluh) dan layanan publik berbasis elektronik memiliki nilai 4,17 (empat koma tujuh belas) dengan predikat “sangat baik”. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa layanan pemerintahan Kota Madiun baik dari layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik memiliki kekuatan serta kelemahan. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik memiliki kekuatan berdasarkan Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai dengan data dukung berupa penerapan Layanan Kinerja Pegawai yaitu aplikasi e-Kinerja. Berdasarkan data dukung e-Kinerja telah dilakukan pengembangan dan telah menunjukkan integrasi dengan beberapa aplikasi seperti SIK dan SKP. Hal ini menggambarkan pemenuhan level 4 (empat) dimana Layanan Layanan Kinerja Pegawai telah memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri masih belum ada. Selanjutnya, layanan publik berbasis elektronik memiliki kekuatan berdasarkan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Publik Sektor 3 (tiga) di bidang Kesehatan. Pada layanan Kesehatan terdapat aplikasi Sist Bro yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Madiun dan telah dikembangkan sesuai dengan permintaan (reviu) dan evaluasi seperti pengaksesan yang dapat dilakukan melalui *smartphone*. Aplikasi ini juga sudah berkolaborasi dengan dan terintegrasi dengan *PCare* dari BPJS dan *CenterView* dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Layanan Pengaduan Pelayanan publik yang diterapkan di Pemerintah Kota Madiun adalah LAPOR! SP4N yang juga menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE. Aplikasi ini sudah terintegrasi secara nasional hal ini menunjukkan kematangan mencapai level 4. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri masih belum ada.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kota Madiun tahun 2021 dapat diketahui bahwa terdapat 47 (empat puluh tujuh) indikator yang digunakan untuk mengukur penilaian SPBE. Indikator penilaian dianggap mencapai target apabila memiliki kematangan

bernilai 3 (tiga). Layanan dengan tingkat kematangan bernilai 3 (tiga) memiliki bukti pendukung berupa dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur *upload* dan/atau *download* untuk mendukung *input* dan *output* data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status *approval* data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun *automasi*. Layanan yang memiliki tingkat kematangan tersebut perlu membuat suatu rekomendasi agar bisa mencapai tingkat kematangan yang ada di atasnya, yaitu tingkat 4 (empat) dan 5 (lima). Proses rekomendasi kenaikan tingkat kematangan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 terkait Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Berdasarkan aspek 7 (tujuh) dan 8 (delapan) terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki tingkat kematangan bernilai 3 (tiga). Indikator tersebut adalah indikator 37 (tiga puluh tujuh) Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis, indikator 38 (tiga puluh delapan) Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah 3, dan indikator 39 (tiga puluh sembilan) Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah. Dalam meningkatkan indikator 37 (tiga puluh tujuh) Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis dari tingkat 3 (tiga) ke tingkat 4 (empat), maka kriteria pemenuhan yang diperlukan yaitu adanya kolaborasi dari layanan kearsipan dinamis dengan layanan SPBE yang lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan layanan kearsipan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya. Selanjutnya, untuk mencapai tingkat 5 (lima) maka diperlukan layanan kearsipan dinamis yang sudah mencapai tingkat kematangan bernilai 4 (empat) dan layanan dapat ditingkatkan atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi. Dalam meningkatkan indikator 38 (tiga puluh delapan) Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah 3 dari tingkat 3 (tiga) ke tingkat 4 (empat), maka kriteria pemenuhan yang diperlukan yaitu adanya kolaborasi dari Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah 3 dengan layanan SPBE

lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Instansi Pusat dan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Daerah lainnya. Selanjutnya, untuk mencapai tingkat 5 maka diperlukan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah 3 (tiga) yang sudah mencapai tingkat kematangan bernilai 4 (empat) dan layanan dapat ditingkatkan atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi. Terakhir, dalam meningkatkan indikator 39 (tiga puluh sembilan) Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah dari tingkat 3 (tiga) ke tingkat 4 (empat), maka kriteria pemenuhan yang diperlukan yaitu adanya kolaborasi dari Layanan Pengawasan Internal Pemerintah dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan Layanan Pengawasan Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya. Selanjutnya, untuk mencapai tingkat 5 maka diperlukan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang sudah mencapai tingkat kematangan bernilai 4 (empat) dan layanan dapat ditingkatkan atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

3.1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas pada bab ini akan dijelaskan terkait dengan Domain Data dan Informasi serta Domain Layanan SPBE. Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sendiri memiliki total 6 (enam) domain antara lain, Domain Proses Bisnis, Domain Data dan Informasi, Domain Data dan Informasi, Domain Aplikasi SPBE, Domain Infrastruktur SPBE dan Domain Keamanan SPBE yang dijelaskan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018**.

Berikut akan dijabarkan pembahasan tentang domain:

a. Arsitektur Data dan Informasi

1. Referensi data dan informasi yang digunakan untuk menyusun arsitektur data dan informasi.
2. Identifikasi Metadata Data dan Informasi.
3. Identifikasi *gap* data dan informasi.
4. Identifikasi daftar data tiap PD.

5. Identifikasi usulan integrasi data yang terdiri dari data Kependudukan, Kepegawaian, Keuangan, dan data spasial (GIS).

b. Arsitektur Layanan SPBE

1. Referensi Layanan SPBE yang digunakan untuk menyusun arsitektur Layanan SPBE.
2. Identifikasi metadata layanan SPBE.
3. Identifikasi gap Layanan SPBE.
4. Identifikasi Usulan Layanan.

3.2 Metodologi

Bab ini menjelaskan terkait metodologi dan referensi arsitektur data dan informasi serta layanan SPBE. Masing-masing metode akan dijelaskan pada sub bab di bawah ini.

3.2.1 Metodologi Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi

Proses Penyusunan Arsitektur data dan informasi terdapat 5 (lima) tahapan yaitu, identifikasi referensi arsitektur data dan informasi, identifikasi metadata data dan informasi, identifikasi gap data dan informasi, identifikasi data dan informasi tiap PD dan identifikasi integrasi data dan informasi.

3.2.1.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019** tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan yaitu untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk memperoleh data tersebut diperlukan adanya perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Hal ini dilakukan dikarenakan data yang dimiliki oleh pemerintah memiliki pengelompokan berdasarkan taksonomi arsitektur data dan informasi yang terdiri dari 10 (sepuluh data) pada Data Pokok tingkat pertama dan 50 (lima puluh data) pada Data Tematik tingkat kedua. Adanya tinjauan pengelompokan data tersebut, maka perlu dilakukan proses identifikasi referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan sebagai acuan dalam mengklasifikasi data pada Pemerintah Kota Madiun.

3.2.1.2 Identifikasi Metadata Data dan Informasi

Identifikasi metadata data dan informasi dilakukan dengan tujuan pemetaan suatu data yang ada pada Pemerintahan berdasarkan taksonominya. Hal ini mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Metadata data dan informasi yang dimaksud adalah sebuah data yang menjelaskan suatu kegiatan urusan pemerintahan yang terdapat pada setiap masing-masing PD.

3.2.1.2 Identifikasi gap Data dan Informasi

Identifikasi gap data dan informasi bertujuan untuk mengetahui tingkat kesenjangan data dan informasi yang ada pada suatu pemerintahan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara membandingkan kondisi data dan informasi yang ada saat ini pada suatu pemerintahan dengan parameter dan referensi nasional dan kondisi ideal yang diharapkan. Dari hasil kesenjangan tersebut maka menjadi masukan agar data dan informasi pemerintahan menjadi lebih baik.

3.2.1.3 Identifikasi Daftar Data dan Informasi Tiap PD

Identifikasi data dan informasi tiap PD merupakan proses identifikasi data yang ada pada setiap PD dipetakan sesuai struktur referensi arsitektur. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah data yang dikelola pada setiap PD, bentuk data tersebut, tempat penyimpanan data tersebut, aplikasi *database* dan jenis akses data yang digunakan pada setiap masing-masing PD.

3.2.1.4 Identifikasi Integrasi Data dan Informasi

Identifikasi integrasi data dan informasi merupakan data yang ada pada suatu PD yang berbagi akses digunakan oleh PD lain dengan suatu aplikasi penghubung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui relasi data antar PD dengan suatu aplikasi yang digunakan.

3.2.2 Metodologi Penyusunan Arsitektur Layanan SPBE

Penyusunan Arsitektur Layanan SPBE terdapat 4 (empat) tahapan yaitu identifikasi referensi arsitektur layanan SPBE, identifikasi metadata layanan SPBE, identifikasi layanan SPBE eksisting, identifikasi *gap* layanan SPBE eksisting dan identifikasi usulan layanan SPBE.

3.2.2.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Layanan SPBE

RAL merupakan sistem klasifikasi layanan pemerintah yang berasal dari proses bisnis tertentu. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan

dapat mengidentifikasi dan mengelompokan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan yang tepat akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif.

3.2.2.2 Identifikasi Metadata Layanan SPBE

Arsitektur SPBE memiliki Metadata Arsitektur SPBE yang merupakan model terstruktur untuk memudahkan penggambaran hubungan antar Domain Arsitektur SPBE tersebut. Metadata Arsitektur SPBE memudahkan dalam mengelola, mengidentifikasi, dan melakukan pencarian terhadap domain arsitekturnya. Setiap Metadata Arsitektur SPBE memiliki beberapa atribut yang berupa karakteristik/ciri yang merepresentasikan entitas yang terdapat pada Metadata Arsitektur SPBE secara lebih jelas.

3.2.2.3 Identifikasi Layanan SPBE Eksisting

Identifikasi layanan eksisting SPBE memiliki fungsi untuk mengetahui layanan apa saja yang dimiliki oleh PD pada saat ini. Layanan ini akan digunakan sebagai bahan kajian untuk melakukan analisis kebutuhan layanan di masa depan.

3.2.2.4 Identifikasi Gap Layanan SPBE

Identifikasi gap layanan SPBE dilakukan dengan cara membandingkan kondisi eksisting suatu layanan terhadap kondisi ideal layanan yang berdasarkan parameter dan struktur referensi nasional. Setelah dilakukan pengukuran maka akan didapatkan kekurangan dari layanan tersebut. Kekurangan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan layanan yang lebih baik dimasa depan.

3.2.2.5 Identifikasi Usulan Layanan SPBE

Setelah dilakukan analisis GAP, maka tahapan selanjutnya adalah identifikasi usulan layanan. Usulan layanan didapatkan dari hasil analisis layanan yang terdapat pada program RPJMD. Oleh karena itu, dapat diketahui usulan layanan apa saja yang sesuai dengan program untuk mendukung dan meningkatkan implementasi suatu program.

3.3 ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

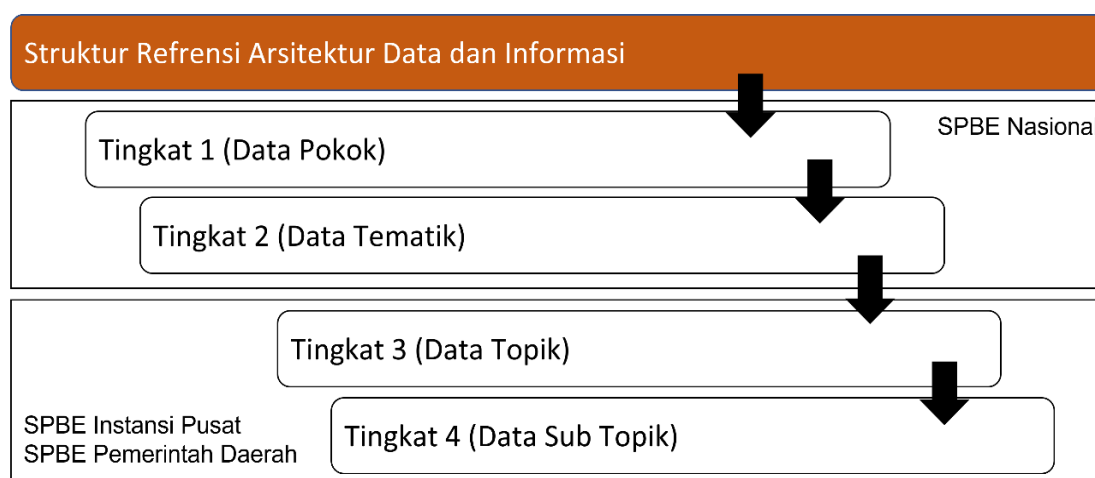
Bab ini membahas tentang Arsitektur Data dan Informasi yang terdiri dari pembahasan identifikasi referensi data dan informasi,

identifikasi metadata yang digunakan, gap analisis, daftar data yang dimiliki tiap PD dan usulan integrasi data.

3.3.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Referensi arsitektur data dan informasi mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. RAD digunakan sebagai acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya taksonomi dalam RAD yang selaras dengan RAB, maka memberikan kemudahan dalam menentukan metode berbagi pakai data (*interoperabilitas*) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redundansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi. Domain data dan informasi sebagaimana yang telah ditentukan pada dokumen Arsitektur SPBE Nasional, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, terdapat tingkat 1 (satu) dan tingkat 2 (dua) merupakan struktur di tingkat nasional serta tingkat 3 (tiga) dan tingkat 4 (empat) yang merupakan struktur di tingkat IPPD.

Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) SPBE Nasional terdiri dari 10 (sepuluh) Data Pokok di tingkat 1 (satu) dan 49 (empat puluh sembilan) Data Tematik di tingkat 2 (dua). Pemerintah Daerah, dalam menyusun RAD masing-masing mengacu pada **RAD** SPBE Nasional serta melengkapi atau mendefinisikan pada tingkat di bawahnya yaitu tingkat 3 (tiga) dan tingkat 4 (empat) sebagaimana dijelaskan pada **Gambar 3.2**.



Gambar 3.2 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Tabel 3.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Data Pertahanan	Data yang merepresentasikan bidang pertahanan negara.
01.02	Data Hubungan Luar Negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri.
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Data Industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri.
02.02	Data Perdagangan	Data yang merepresentasikan bidang perdagangan.
02.03	Data Pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pertanian.
02.04	Data Perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang perkebunan
02.05	Data Peternakan	Data yang merepresentasikan bidang peternakan
02.06	Data Perikanan	Data yang merepresentasikan bidang perikanan.
02.07	Data Badan Usaha Milik Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Data Investasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan penanaman modal.
02.09	Data Koperasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan koperasi.
02.10	Data Usaha Kecil dan Menengah	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan usaha kecil dan menengah
02.11	Data Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Data Pekerjaan Umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
03.02	Data Transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi.
03.03	Data Transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi.
03.04	Data Perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan.
03.05	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Data Pertanahan	Data yang merepresentasikan bidang pertanahan.
03.07	Data Kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Data Kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan.
04.02	Data Sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial.
04.03	Data Pemberdayaan Perempuan	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan perempuan
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Data Hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum
05.02	Data Keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan
05.03	Data Hak Asasi Manusia	Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Data Pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan.
06.02	Data Ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan.
06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
06.04	Data Pemuda	Data yang merepresentasikan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
		bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda
06.05	Data Olahraga	Data yang merepresentasikan bidang keolahragaan.
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Data Pertambangan	Data yang merepresentasikan bidang pertambangan.
07.02	Data Energi	Data yang merepresentasikan bidang energi.
07.03	Data Kehutanan	Data yang merepresentasikan bidang kehutanan.
07.04	Data Kelautan	Data yang merepresentasikan bidang kelautan.
07.05	Data Lingkungan Hidup	Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup
Informasi Budaya dan Agama (08)		
08.01	Data Agama	Data yang merepresentasikan bidang agama.
08.02	Data Kebudayaan	Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan
Informasi Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Data Dalam Negeri	Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri.
09.02	Data Keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan negara
09.03	Data Informasi	Data yang merepresentasikan bidang informasi.
09.04	Data Komunikasi	Data yang merepresentasikan bidang komunikasi
09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data yang merepresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional
09.06	Data Aparatur Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Data Kesekretariatan Negara	Data yang merepresentasikan bidang kesekretariatan negara

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Data Pendukung Umum (10)		
10.01	Data Kebijakan Pemerintahan	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah
10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan pemerintahan
10.03	Data Kewilayahan	Data yang merepresentasikan informasi kewilayahan
10.04	Data Dukung Lainnya	Data yang merepresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya.

Tabel 3.1 merupakan tabel Referensi Arsitektur Data dan Informasi Nasional yang terdiri dari 10 (sepuluh) Data Pokok pada Tingkat 1 dan 49 (Empat puluh sembilan) Data Tematik pada Tingkat 2.

3.3.2 Identifikasi Metadata Data dan Informasi

Berdasarkan hasil identifikasi data dan informasi yang ada pada Pemerintah Kota Madiun didapati **302 (tiga ratus dua) data** yang telah dipetakan sesuai dengan taksonomi Referensi Arsitektur Data Dan Informasi yang ada pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

Atribut metadata arsitektur SPBE adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan metadata suatu arsitektur SPBE. Atribut tersebut digunakan untuk membedakan metadata arsitektur SPBE dengan metadata lainnya. Pada metadata data dan informasi, metadata yang diidentifikasi berupa:

- a. ID;
- b. Nama Data;
- c. Uraian Data;
- d. Tujuan Data;
- e. Kode Model Referensi Data;

- f. Sifat Data;
- g. Jenis Data;
- h. Validasi Data;
- i. Penghasil Data/Produsen Data;
- j. Penanggung Jawab Data/Wali Data;
- k. Informasi yang terkait (output);
- l. Informasi yang terkait (input);
- m. Interoperabilitas; dan
- n. ID Metadata Terkait.

3.3.3 Identifikasi Gap Data dan Informasi

Menurut hasil survei *Gap* data dan informasi pada Pemerintah Kota Madiun diperoleh beberapa *Gap* atau kesenjangan, beberapa kesenjangan tersebut ada pada parameter **Bentuk data yang dimiliki data** dengan besar persentase kesenjangan **27% (dua puluh tujuh persen) data** yang dimiliki atau dikelola secara *offline*. Parameter kedua yaitu **Tempat penyimpanan data** yang terdapat *Gap* atau kesenjangan sebesar **41% (empat puluh satu persen) data** yang masih belum disimpan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan masih disimpan pada PD mandiri atau Pihak Ketiga. Parameter ketiga yaitu **Aplikasi Database** yang terdapat kesenjangan atau *Gap* sebesar **29% (dua puluh sembilan persen) data** yang masih disimpan secara manual atau bisa diartikan belum menggunakan aplikasi *database* dalam pengelolaan data yang ada pada OPD. Parameter keempat adalah jenis akses data, berdasarkan hasil analisis jenis **akses data** pada seluruh OPD pada Pemerintah Kota Madiun didapati *gap* atau kesenjangan sebesar **77% (tujuh puluh tujuh persen) data** yang jenis aksesnya hanya OPD pengelolanya. Untuk lebih detail hasil identifikasi *Gap* atau kesenjangan data dan informasi yang ada pada Pemerintah Kota Madiun akan ditampilkan pada **Tabel 3.2**

Tabel 3.2 Analisis *gap* Data dan Informasi

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Bentuk data yang dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> • 27% (83) dengan bentuk data <i>Offline</i> • 73% (219) dengan bentuk data <i>Online</i> • 0% (0) dengan bentuk data <i>Online</i> 	Seluruh Bentuk data diharuskan untuk <i>Online</i> demi mendukung program Pemerintah Satu	Terdapat 83 data yang masih tersimpan secara <i>Offline</i> , seluruh PD yang dimana datanya masih

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	& <i>Offline</i>	Data Indonesia	disimpan secara Offline disarankan untuk segera disimpan secara Online sehingga pengelolaan data dapat dilakukan setiap saat.
Tempat Penyimpanan data	<ul style="list-style-type: none"> • 10% (29) Server Internal PD • 31% (94) Server Kominfo • 27% (83) Server Pusat • 0% (1) Google Drive • 27% (83) Komputer Internal PD • 2% (7) Server Aplikasi • 1% (2) Server Pusat, Komputer • 1% (3) Whatsapp, Server Kominfo 	Penyimpanan data dan informasi dilakukan terpusat pada server yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga penyimpanan data dan informasi terpusat pada satu <i>data center</i> untuk memudahkan data terkontrol dan menjaga keamanan data.	Masih terdapat beberapa PD yang menyimpan datanya secara <i>offline</i> maupun server secara internal yang masih memiliki kerentanan data hilang maupun rusak. Diharapkan data tersebut segera dipusatkan sehingga data mempermudah dalam menjaga dan mengontrol data.
Aplikasi <i>Database</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2% (6) PostgreSQL • 13% (39) Server Kominfo • 26% (78) Server Pusat • 0% (1) Oracle • 19% (57) MySQL • 26% (78) Ms.Office • 0% (1) Google Drive • 2% (5) Storage • 1% (2) MariaDB • 7% (20) Server 	Dalam penggunaannya Aplikasi <i>Database</i> merupakan aplikasi yang salah satunya mampu digunakan untuk saling bagi pakai antar layanan dan aplikasi, Sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam penggunaan layanan nya.	Aplikasi <i>database</i> yang digunakan masih beragam, diharapkan kedepannya tiap PD dapat menggunakan 1 jenis <i>database</i> sehingga data dapat saling terintegrasi dan saling terhubung satu sama lain dengan lebih mudah.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	Aplikasi <ul style="list-style-type: none"> • 1% (3) Whatsapp dan PostgreSQL • 1% (2) Server Aplikasi, Ms.Office • 3% (9) Komputer Internal PD • 0% (1) Cloud 		
Jenis akses data	<ul style="list-style-type: none"> • 5% (15) Bagi Pakai PD • 77% (232) Internal PD • 18% (55) Publik 	Jenis akses data bagi pakai dengan PD lain atau public merupakan kebutuhan umum yang harus ada pada setiap perangkat daerah hal ini dikarenakan pihak lain hal ini berfungsi untuk saling keterbukaan data guna mendukung antar layanan pada perangkat daerah.	Terdapat 231 data yang hanya dapat diakses oleh internal PD, diharapkan apabila data tersebut bukan data rahasia PD untuk bisa dijadikan public maupun bagi pakai PD sehingga data tersebut dapat diintegrasikan.

3.3.4 Identifikasi Daftar Data dan Informasi Tiap PD

Pada pembagian tugas dan fungsi, setiap PD memiliki kepentingan yang berbeda-beda dengan PD lainnya dan sebagian PD mempunyai tugas dan fungsi pendukung PD lainnya. Dari perbedaan kepentingan setiap PD tersebut, maka data yang dikelola pada masing-masing urusan terkait pun juga berbeda-beda sesuai dengan bidang pengampu. PD yang mengelola suatu data dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang dikelolanya disebut dengan **Produsen Data**. Data dan informasi yang ada pada setiap PD pada Pemerintah Kota Madiun yang telah diidentifikasi mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Madiun, akan dikaji untuk dapat memberikan usulan aplikasi, integrasi data dan usulan lainnya. Berikut merupakan

penjabaran data dan Informasi setiap PD pada Pemerintah Kota Madiun.

3.3.4.1 Bagian Organisasi

Berdasarkan urusannya Bagian Organisasi memiliki **3 (tiga) Sub Koordinator** dan memiliki urusan terkait **Sekretariat Daerah**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Bagian Organisasi memiliki **4 (empat) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 Metadata Bagian Organisasi

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bagian Organisasi	Data SAKIP dan E-SAKIP REVIU	Informasi data Daftar Nilai SAKIP masing-masing OPD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi nilai SAKIP masing-masing OPD	RAD 09.06 Data Aparatur Negara
Bagian Organisasi	Data Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Informasi data penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh instansi pemerintahan yang bertanggung jawab	Bertujuan untuk mengetahui Informasi penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	RAD 09.06 Data Aparatur Negara
Bagian Organisasi	Data informasi publik Bagian Organisasi	informasi data terkait Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	Bertujuan untuk penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup	RAD 09.03 Data Informasi

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
			Bagian Organisasi	
Bagian Organisasi	Data anjab dan ABK	Aplikasi yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen analisis jabatan (Anjab), analisis beban kerja (ABK) dan KJ Pemerintah Kota Madiun	Berfungsi untuk menyusun dokumen analisis jabatan (Anjab), analisis beban kerja (ABK) dan KJ Pemerintah Kota Madiun	RAD 09.06 Data Aparatur Negara

Berdasarkan Tabel 3.3 Bagian Organisasi memiliki 4 (empat) data, dengan data yang disimpan secara **Online**, dengan tempat penyimpanan data pada **Google Drive** dan **server kominfo** serta **server pusat**, dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.2 Bagian Hukum

Berdasarkan urusannya Bagian Hukum memiliki **3 (tiga) Sub Koordinator** dan memiliki urusan terkait **Sekretariat Daerah**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Bagian Hukum memiliki **2 (dua) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4 Metadata Bagian Hukum

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bagian Hukum	Data produk hukum	Informasi Data Peraturan perundang-	Bertujuan untuk mengetahui	RAD 05.01 Data Hukum

		undangan	Informasi data perundang-undangan	
Bagian Hukum	Data informasi publik Bagian Hukum	Informasi data terkait Sekretariat Daerah Bagian Hukum	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Bagian Hukum	RAD 05.01 Data Hukum

Berdasarkan Tabel 3.4 Bagian Hukum memiliki 2 data, dengan data yang disimpan secara **Online**, dengan tempat penyimpanan data pada **server Internal PD** dan **server kominfo**, dengan akses data **internal PD**.

3.3.4.3 Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan

Berdasarkan urusannya Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan memiliki **3 (tiga) Sub Koordinator** dan memiliki urusan terkait **Unsur Staff**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan memiliki **7 (tujuh) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5 Metadata Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Data LPSE (KTP dan NPWP)	Informasi Data Pengelolaan PBJ Pemerintah Kota Madiun	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengelolaan PBJ Pemerintah Kota Madiun	RAD 09.02 Data Keuangan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Data LPSE	Informasi data Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.	bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.	RAD 09.02 Data Keuangan
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Data produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah	Informasi data E-katalog berupa Aplikasi belanja <i>online</i> yang menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.	Bertfungsi sebagai tempat penyimpanan elektronik informasi mengenai barang, produk, ataupun jasa. E-katalog memiliki peranan dalam perbandingan berbagai produk sejenis	RAD 09.02 Data Keuangan
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Data informasi publik Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Informasi terkait Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Bertfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	RAD 09.03 Data Informasi
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Data tender	Pintu gerbang sistem informasi	Bertfungsi untuk memberikan	RAD 02.02 Data Perdagangan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
		elektronik, memuat informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).	informasi terkait pengadaan barang/jasa secara nasional	
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Data penyedia dan non-penyedia	Aplikasi untuk pemrosesan dan pencatatan pengadaan barang jasa dengan metode e purchasing	Berfungsi melakukan pemrosesan dan pencatatan pengadaan barang jasa dengan metode e purchasing	RAD 02.02 Data Perdagangan
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Data atau informasi kinerja penyedia barang/jasa (identitas, kualifikasi, serta riwayat kinerja penyedia.)	Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau Vendor Management System adalah aplikasi yang memuat data atau informasi kinerja penyedia barang/jasa.	Berfungsi untuk memberikan informasi kinerja penyedia barang jasa meliputi data atau informasi mengenai identitas, kualifikasi, serta riwayat kinerja penyedia.	RAD 02.02 Data Perdagangan

Berdasarkan Tabel 3.5 Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan memiliki 7 data, dengan data yang disimpan secara **Online**, dengan tempat penyimpanan data pada **server pusat** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.4 Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan urusannya Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat memiliki **3 Sub Koordinator** dan memiliki urusan terkait **Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat memiliki **4 (empat)** Data. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.6**.

Tabel 3.6 Metadata Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat	Data hibah bansos	Informasi data nama penerima hibah dan bansos dari Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Bertujuan untuk mengetahui Informasi nama penerima hibah dan bansos dari bag. Prokesra	RAD 04.02 Data Sosial
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat	Data inflasi	Informasi data terkait inflasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait inflasi	RAD 09.02 Data Keuangan
Bagian Perekonomian dan	Data BUMD Kota Madiun	Informasi data terkait BUMD (Laporan	Bertujuan untuk mengetahui	RAD 09.02 Data Keuangan

Kesejahteraan rakyat		Keuangan, SOTK, Seleksi)	Informasi terkait BUMD (Laporan Keuangan, SOTK, Seleksi)	
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat	Data pelayanan	Informasi data dan kegiatan Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Bertujuan untuk penyebaran informasi dan kegiatan Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan Tabel 3.6 Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat memiliki 4 (empat) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **komputer internal PD** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.5 Bagian Umum

Berdasarkan urusannya Bagian Umum memiliki **3 (tiga) Sub Koordinator** dan memiliki urusan terkait **Sekretariat Daerah**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Bagian Umum memiliki **2 (dua) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.7**.

Tabel 3.7 Metadata Bagian Umum

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bagian Umum Sekretariat Daerah	Data agenda dan data kegiatan Walikota	Informasi Data agenda dan data kegiatan Walikota	Bertujuan untuk mengetahui apa saja agenda dan kegiatan Walikota selama bertugas	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan

Bagian Umum	Data ketersediaan ruangan dan data peminjaman ruangan	Informasi data ketersediaan ruang dan data peminjaman ruangan	Bertujuan untuk mengetahui data ketersediaan ruang dan data peminjaman ruangan	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya
-------------	---	---	--	----------------------------------

Berdasarkan Tabel 3.7 Bagian Umum memiliki 2 (dua) data, dengan data yang disimpan secara **Online**, dengan tempat penyimpanan data pada **server kominfo** dengan akses data **internal PD**.

3.3.4.6 Bagian Pemerintahan

Berdasarkan urusannya Bagian Pemerintahan memiliki **3 (tiga) Sub Koordinator** dan memiliki urusan terkait **Sekretariat Daerah**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Bagian Pemerintahan memiliki **1 (satu) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.8**

Tabel 3.8 Metadata Bagian Pemerintahan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bagian Pemerintahan	Data informasi publik Bagian Pemerintahan	informasi terkait Sekretariat Daerah Bagian Pemerintah , yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Bagian Pemerintah	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan Tabel 3.8 Bagian Pemerintahan memiliki 1 (satu) data, dengan data yang disimpan secara **Online**, dengan tempat penyimpanan data pada **server kominfo** dengan akses data **publik**.

3.3.4.7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan urusannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki **1 (satu) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki **4 (empat) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.9**.

Tabel 3.9 Metadata Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Kebencanaan	Data bencana	Informasi data kebencanaan secara dinamis	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data kebencanaan secara dinamis	RAD 04.02 Data Sosial
Kebencanaan	Data jumlah Desa tangguh bencana	Informasi Data Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	RAD 04.02 Data Sosial
Kebencanaan	Data kerugian akibat bencana	Laporan yang menjelaskan kerugian akibat bencana beserta bukti dukung	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Laporan yang menjelaskan kerugian akibat bencana beserta bukti dukung	RAD 04.02 Data Sosial
Kebencanaan	Data informasi publik BPBD	informasi terkait profil, kegiatan, produk hukum,	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Laporan yang menjelaskan kerugian akibat	RAD 09.03 Data Informasi

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
		berita, dsb terkait BPBD	bencana beserta bukti dukung	

Berdasarkan Tabel 3.9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 4 (empat) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **komputer internal PD** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.8 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan urusannya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki **4 (empat) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki **3 (tiga) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.10**.

Tabel 3.10 Metadata Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bapelitbangda/ Bidang Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data RPJMD (perencanaan 5 tahunan) dan Data RKPD (perencanaan tahunan)	Menginformasikan seluruh perencanaan kepala daerah dalam kurun waktu 5 tahun beserta capaian kinerja per tahun	Bertujuan untuk Menginformasikan seluruh perencanaan kepala daerah dalam kurun waktu 5 tahun beserta capaian kinerja per tahun	RAD 09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional

Bapelitbangda /Bidang Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data evaluasi capaian kinerja Pemerintah Daerah	Informasi data proses Monitoring dan Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, khususnya dalam penyusunan SAKIP/LAKIP, Pengukuran Perjanjian Kinerja dan LKPJ	Bertujuan untuk memudahkan proses Monitoring dan Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	RAD 09.06 Data Aparatur Negara
Bapelitbangda /Bidang Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data informasi publik Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Website penyebaran informasi terkait Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan Tabel 3.10 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki 3 (tiga) data, dengan data yang disimpan secara **Online**, dengan tempat penyimpanan data pada **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.9 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan urusannya Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki **3 (tiga) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki **13 (tiga belas) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.11**.

Tabel 3.11 Metadata Badan Keuangan dan Aset Daerah

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Akuntansi dan Aset	Data aset	Menginformasikan seluruh pengelolaan administrasi dan pemanfaat aset kota madiun.	Bertujuan untuk Menginformasikan seluruh pengelolaan administrasi dan pemanfaat aset kota madiun.	RAD 09.02 Data Keuangan
Bidang Anggaran	Data anggaran kegiatan	informasi data analisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.	Berfungsi untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan SKPD	RAD 09.02 Data Keuangan
Bidang Akuntansi dan Aset	Data pembangunan daerah	Informasi data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.	Berfungsi untuk manajemen data pembangunan daerah	RAD 09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Bidang Anggaran	Data Pengelolaan Keuangan SKPD	informasi data bidang pengelolaan keuangan daerah	Bertujuan untuk Menginformasikan pengelolaan keuangan	RAD 09.02 Data Keuangan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Anggaran	Data Pengelolaan Gaji Pegawai	Informasi data gaji ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota	Bertujuan untuk Menginformasikan seluruh pengelolaan data gaji ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintahan, provinsi, kabupaten dan daerah	RAD 09.02 Data Keuangan
Bidang Anggaran	Data pelaporan DAK fisik	Informasi data monitoring transaksi SPAN	Berfungsi untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan	RAD 09.02 Data Keuangan
Sekretariat	Data agenda pimpinan	Informasi data jadwal dan agenda pimpinan	Bertujuan untuk menyajikan jadwal dan agenda pimpinan.	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan
Bidang Anggaran	Data pelaporan Dana Intensif Daerah (DID)	Informasi data pelaporan perbendaharaan dan keuangan daerah kepada DPJK	Bertujuan untuk melaporkan seluruh perbendaharaan dan keuangan daerah kepada DPJK	RAD 09.02 Data Keuangan
Bidang Anggaran	Data pembayaran setoran ke kas negara pon pajak	Informasi data pembayaran dan penerimaan negara	Bertujuan untuk membantu memproses pembayaran penerimaan negara	RAD 09.02 Data Keuangan
Bidang Anggaran	Data monitoring Dana Transfer Dari Pusat (kemenkeu)	informasi data penyaluran dana daerah dan desa	Bertujuan untuk mempermudah penyaluran dana daerah dan desa	RAD 09.02 Data Keuangan
Bidang Akuntansi dan Aset	Data barang daerah	Informasi data barang daerah	Bertujuan untuk Menginformasikan pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan,	RAD 09.02 Data Keuangan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
			penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.	
Kesekretariatan	Data informasi publik Badan Keuangan dan Aset Daerah	Informasi penyebaran informasi terkait Badan Keuangan dan Aset Daerah	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAD 09.03 Data Informasi
Bidang Anggaran	Data DAK Non Fisik dari Pusat	Aladin adalah aplikasi dari Pusat (ditjen Perimbangan keuangan-kemenkeu) yang digunakan untuk Pelaporan Pengelolaan DAK Non Fisik	untuk membantu kewajiban pengelolaan DAK Non Fisik di daerah - daerah	RAD 09.02 Data Keuangan

Berdasarkan Tabel 3.11 Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 13 (tiga belas) data, dengan data yang disimpan secara **Online**, dengan tempat penyimpanan data pada **server pusat, MariaDB, MySQL** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.10 Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan urusannya Badan Pendapatan Daerah memiliki **2 (dua) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Badan Pendapatan Daerah memiliki **5 (lima) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk

data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.12**.

Tabel 3.12 Metadata Badan Pendapatan Daerah

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Pengelolaan Pajak Daerah	Data Wajib Pajak, Objek pajak	Informasi Data pelayanan pajak daerah	Bertujuan untuk mengetahui Informasi informasi pelayanan pajak daerah	RAD 09.02 Data Keuangan
Pengelolaan Pajak Daerah	Data Pajak Daerah	Sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.	Berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer	RAD 09.02 Data Keuangan
Pengelolaan Pajak Daerah	Data informasi publik Badan Pendapatan Daerah	Informasi Data terkait Badan Pendapatan Daerah	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Badan Pendapatan Daerah	RAD 09.03 Data Informasi
Pengelolaan Pajak Daerah	Data pajak Daerah sektor hotel dan resto	Aplikasi untuk mengelola pajak daerah sektor hotel dan restaurant	Berfungsi untuk mengelola pajak daerah sektor hotel dan restaurant	RAD 09.02 Data Keuangan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Pengelolaan Pajak Daerah	Capaian kerja pencegahan korupsi	MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.	Berfungsi untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi,	RAD 09.06 Data Aparatur Negara

Berdasarkan Tabel 3.12 Badan Pendapatan Daerah memiliki 5 (lima) data, dengan data yang disimpan secara **Online**, dengan tempat penyimpanan data pada **server pusat, MySQL** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.11 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan urusannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki **3 (tiga) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki **12 (dua belas) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.13**.

Tabel 3.13 Metadata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Badan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Data Kepegawaian, data penilaian kinerja pegawai	Informasi Data Kepegawaian	Berfungsi untuk mempermudah PNS dalam penyusunan dan penilaian SKP	RAD 09.06 Data Aparatur Negara
Badan Pengembang SDM	Data Kepegawaian seluruh OPD	Informasi terkait Data Kepegawaian seluruh OPD, seperti data Analisis kebutuhan diklat, data tugas belajar, data pengembangan kompetensi teknis dan data pengembangan kompetensi ASN	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Analisis kebutuhan diklat, data tugas belajar, data pengembangan kompetensi teknis dan data pengembangan kompetensi ASN	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan
Bidang Mutasi	Data Pangkat dan Golongan ASN	Informasi Data pangkat dan golongan ASN	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pangkat dan golongan ASN	RAD 09.06 Data Aparatur Negara
Badan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Data Informasi CPNS	Informasi Data mengenai CPNS	Bertujuan untuk mengetahui informasi Data CPNS	RAD 09.03 Data Informasi
Badan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Data Penilaian Kinerja Pegawai	Informasi Data pencatatan kinerja pegawai negeri sipil	Berfungsi untuk mencatat kinerja pegawai negeri sipil.	RAD 09.06 Data Aparatur Negara

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Badan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Data Penjatuhan Hukuman Disiplin	Informasi Data Penjatuhan Hukuman Disiplin	Berfungsi sebagai aplikasi yang dipergunakan sebagai layanan kepegawaian berbasis <i>online</i>	RAD 09.06 Data Aparatur Negara
Badan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Data informasi publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Informasi Data terkait Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAD 09.03 Data Informasi
Badan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Data aset kekayaan ASN	SIHARKA adalah sistem yang berguna untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki oleh setiap ASN di Indonesia. Dengan melaporkan jumlah kekayaan yang dimiliki, ASN dapat mempertanggungjawabkan jumlah kenaikan harta saat sebelum dan sesudah menjadi ASN	Berfungsi sebagai media pelaporan harta kekayaan ASN	RAD 09.06 Data Aparatur Negara
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data pelaporan hukuman disiplin	IDIS BKN merupakan sistem informasi pelaporan proses hukuman disiplin yang terintegrasi dengan sistem SAPK BKN. Sistem informasi ini bertujuan untuk memberikan standar dan kemudahan	Berfungsi sebagai media dalam pelaporan proses hukuman disiplin	RAD 09.06 Data Aparatur Negara

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
		dalam melakukan proses pelaporan hukuman disiplin mulai dari identifikasi sampai dengan pembuatan surat keputusan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
Bidang Mutasi	data mutasi ASN	Aplikasi dalam memudahkan pelayanan mutasi ASN yaitu untuk Mutasi Antar Jabatan dan Mutasi Antar Daerah. Sistem emutasi terintegrasi secara nasional dengan Sistem SAPK BKN, Sistem Simratio Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Sistem Informasi SDM Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan	Berfungsi untuk memudahkan pelayanan mutasi ASN	RAD 09.06 Data Aparatur Negara
Badan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	data pelayanan administrasi	Sistem Informasi <i>Online</i> Layanan Administrasi untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan tepat waktu yang berbasis sistem informasi <i>online</i>	Untuk memudahkan pelayanan administrasi ASN	RAD 09.03 Data Informasi

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Badan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	aplikasi untuk rekonsiliasi data kepegawaian sehingga memudahkan dalam pelayanan kepegawaian, sekaligus mengantisipasi munculnya tindak pidana korupsi	Berfungsi untuk rekonsiliasi data kepegawaian sehingga memudahkan dalam pelayanan kepegawaian, sekaligus mengantisipasi munculnya tindak pidana korupsi	RAD 09.06 Data Aparatur Negara

Berdasarkan Tabel 3.13 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 12 (dua belas) data, dengan data yang disimpan secara **Online**, dengan tempat penyimpanan data pada **server pusat, MySQL** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD, Bagi pakai OPD** dan **publik**.

3.3.4.12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan urusannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki **3 (tiga) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Kesatuan Bangsa dan Politik**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki **3 (tiga) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.14**.

Tabel 3.14 Metadata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Ideologi	Data Rekapitulasi izin penelitian	Informasi Data rekapitulasi izin	Bertujuan untuk mengetahui Informasi	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
		penelitian, Data agenda walikota,	Data rekapitulasi izin penelitian, Data agenda walikota,	
Politik	Data Rekapitulasi Jumlah Agama dan suku	Informasi Data Mengenai Rekapitulasi Jumlah Agama dan suku	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Rekapitulasi Jumlah Agama dan suku	RAD 03.07 Data Kependudukan
Kesekretariatan	Data informasi publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Informasi terkait Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan Tabel 3.14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 3 (tiga) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **Komputer internal PD** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.13 Inspektorat

Berdasarkan urusannya Inspektorat memiliki **4 (empat) Subkoordinator** dan memiliki urusan terkait **Unsur Pengawas Penyelenggaraan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Inspektorat Daerah

memiliki **3 (tiga)** Data. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.15**.

Tabel 3.15 Metadata Inspektorat Daerah

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Irbn 1 (Sosial Pendidikan), Irbn 2 (Keuangan,Kesehatan), Irbn 3 (Pembangunan dan Kepegawaian), Irbn 4 (Investigasi)	Rekomendasi Hasil Pengawasan (LHP)	Informasi Data Mengenai Rekomendasi hasil pengawasan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Rekomendasi hasil pengawasan	RAD 09.01 Data Dalam Negeri
Kesekretariatan	Data aktivitas, kegiatan dan program OPD	Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara	RAD 09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Kesekretariatan	Data informasi publik Inspektorat Daerah	Informasi Data Website penyebaran informasi terkait Inspektorat Daerah	Bertujuan sebagai informasi dan kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan Tabel 3.15 Inspektorat Daerah memiliki 3 (tiga) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **Komputer internal PD, server pusat** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD, bagi pakai OPD** dan **publik**.

3.3.4.14 Sekretariat DPRD

Berdasarkan urusannya Sekretariat DPRD memiliki **3 (tiga) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Sekretariat Dewan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Sekretariat DPRD memiliki **3 (tiga) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.16**.

Tabel 3.16 Metadata Sekretariat DPRD

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Data aspirasi masyarakat	informasi terkait penyampaian aspirasi masyarakat secara <i>online</i>	Berfungsi sebagai pendukung pengawasan DPRD.	RAD 09.07 Data Kesekretariatan Negara
Kesekretariatan	Data informasi publik Sekretariat DPRD	informasi terkait Sekretariat DPRD, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Sekretariat DPRD	RAD 09.03 Data Informasi
Bagian umum dan keuangan, bagian persidangan dan perundang undangan, bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan	Data Sarpras	Informasi Data Sarpras, kepegawaian Perencanaan Reses keuangan Dokumen evaluasi (umum dan keuangan) Notulensi rapat Raperda dan penganggaran dan pengawasan	Bertujuan untuk mengetahui sarpras, perencanaan evaluasi umum dan keuangan serta penganggaran dan pengawasan	RAD 09.02 Data Keuangan

Berdasarkan Tabel 3.16 Sekretariat DPRD memiliki 3 (tiga) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **Komputer internal PD** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.15 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan urusannya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki **4 (empat) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki **72 (tujuh puluh dua) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.17**.

Tabel 3.17 Metadata Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Kesekretariatan	Data informasi publik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Informasi data penyebaran informasi terkait Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	RAD 09.03 Data Informasi
Sekretariat	Registrasi Pasien (NIK, Nama, Alamat, dsb)	Sistem Informasi Kesehatan Terpadu Berbasis <i>Online</i> untuk pelayanan pasien di seluruh puskesmas. Dimana aplikasi itu menyediakan pendaftaran secara <i>online</i> kepada masyarakat.	Berfungsi untuk mempermudah pencatatan pelayanan pasien di puskesmas	RAD 04.01 Data Kesehatan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Kesekretariatan	Data perencanaan, data kegiatan dan data keuangan	Kwitansi Elektronik Dengan Dasar Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur merupakan aplikasi untuk kepentingan keuangan, menggabungkan mulai dari proses perencanaan sampai realisasi keuangan karena aplikasi yang ada tidak saling terintegrasi.	Berfungsi dalam mengintegrasikan proses mulai dari perencanaan sampai realisasi keuangan dalam satu aplikasi	RAD 09.02 Data Keuangan
Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Data Pelaporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika	Informasi terkait pelaporan NARKOTIKA	Bertujuan untuk informasi terkait pelaporan NARKOTIKA	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Data Terkait Apotek	Informasi terkait Apotek	Bertujuan untuk informasi terkait Apotek	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Data Perizinan	Informasi terkait data Perizinan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data Perizinan	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Data Akreditasi Puskesmas	Informasi terkait data Akreditasi Puskesmas	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data Akreditasi Puskesmas	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Data Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Informasi terkait data Alat Kesehatan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data Alat Kesehatan	RAD 04.01 Data Kesehatan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	data pelayanan kesehatan, data BPJS	platform digital dari BPJS Kesehatan yang difungsikan untuk mempermudah akses kesehatan.	Berfungsi untuk membantu peserta aktif BPJS kesehatan untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data pelayanan posyandu	Informasi terkait data pelayanan posyandu	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait data pelayanan posyandu	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Informasi terkait Data Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait Data Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data imunisasi anak	Informasi terkait Data imunisasi anak	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait Data imunisasi anak	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Data KB	Informasi terkait data Data KB	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait Data KB	RAD 04.01 Data Kesehatan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Data kondisi fisik ASN, data aktivitas fisik dan olahraga ASN	Informasi terkait Data kondisi fisik ASN, data aktivitas fisik dan olahraga ASN	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait Data kondisi fisik ASN, data aktivitas fisik dan olahraga ASN	RAD 09.06 Data Aparatur Negara
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Data Kesehatan Lingkungan	Informasi terkait data Kesehatan Lingkungan	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait data Kesehatan Lingkungan	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Data Posyandu, Data Poskestren, Data Poskeskel, Data Ukk	Informasi terkait data posyandu, data poskestren, data poskeskel, data UKK	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data posyandu, data poskestren, data poskeskel, data UKK	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Data pelaksanaan program keluarga Indonesia	Informasi terkait Data pelaksanaan program keluarga Indonesia	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data pelaksanaan program keluarga Indonesia	RAD 03.07 Data Kependudukan
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Data Keluarga dan Data Kegiatan Kampung KB	Informasi terkait data keluarga, data kegiatan kampung KB	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data keluarga, data kegiatan kampung KB	RAD 03.07 Data Kependudukan
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Data Laporan Penyerapan DAK Fisik maupun non fisik	Informasi terkait data Laporan Penyerapan DAK Fisik maupun non fisik	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait data Laporan Penyerapan DAK Fisik maupun non fisik	RAD 09.02 Data Keuangan
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan	Data Laporan Audit Stunting	Informasi terkait data Laporan Audit Stunting	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait data Laporan Audit	RAD 03.07 Data Kependudukan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Keluarga Sejahtera			Stunting	
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Data Alat Kontrasepsi	Informasi terkait data Alat Kontrasepsi	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait data Alat Kontrasepsi, Data KB Kespro	RAD 03.07 Data Kependudukan
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Data KB Kespro	Informasi terkait data KB Kespro	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait data KB Kespro	RAD 03.07 Data Kependudukan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data terkait vaksinasi covid-19	Aplikasi pelaporan dan monitoring hasil vaksinasi Covid-19	Berfungsi memonitoring data hasil capaian Vaksinasi Covid-19 per sasaran indikator dan per dosis	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data pelaporan kasus covid-19	Aplikasi monitoring data kasus Covid-19 Kota Madiun baik kasus aktif, sembuh, meninggal dan penyebarannya	Berfungsi memonitoring data kasus Covid-19 Kota Madiun, baik kasus aktif, sembuh, meninggal dan penyebarannya	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya	Data terkait penyakit campak	Aplikasi pemantauan/kewaspadaan dini penyakit Campak	Berfungsi memantau peningkatan penemuan penyakit Campak	RAD 04.01 Data Kesehatan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Kesehatan Masyarakat				
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data terkait penyakit ISPA / ILI	Aplikasi pemantauan/kewaspadaan dini penyakit ISPA/ILI	Berfungsi memantau peningkatan penemuan penyakit ISPA/ILI	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data terkait penyakit TB	Aplikasi pengiriman spesimen dahak dari Fasyankes ke Site TCM dengan bantuan Provider pengirim	Berfungsi sebagai aplikasi penghubung antara fasyankes pengirim specimen, site TCM dan provider pengirim (PT. Pos)	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data terkait kusta dan frambusia	Aplikasi pelaporan kasus Kusta dan Frambusia bulanan	Berfungsi memantau peningkatan penemuan penyakit Kusta dan Frambusia	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data terkait gizi masyarakat	Informasi Data terkait gizi masyarakat	Bertujuan untuk mengetahui informasi data gizi masyarakat kota madiun	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyediaan Layanan	Data Kesehatan Jiwa Di Wilayah Kerja	Informasi Data ODGJ	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data	RAD 04.01 Data Kesehatan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			ODGJ	
Kesekretariatan	Data Realisasi Belanja Pengadaan Barang Dan Jasa bidang kesehatan	Mengetahui berapa prosentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi mengenai berapa prosentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa	RAD 09.02 Data Keuangan
Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data kasus PD3I	Sistem yang mengakomodasi kegiatan surveilans PD3I dari paper based ke web based	Sistem informasi yang berfungsi untuk mengakomodasi proses surveilans PD3I	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data Surveilans	Informasi Data Surveilans	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Surveilans	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya	Data Kasus Covid-19	Informasi Data Kontak Erat Kasus Covid	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Kontak Erat Kasus Covid	RAD 04.01 Data Kesehatan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Kesehatan Masyarakat				
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Informasi Data Calon Jemaah Haji	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Calon Jemaah Haji	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data penderita HIV/AIDS	Informasi Data pencatatan dan pengobatan penderita HIV/AIDS	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data pencatatan dan pengobatan penderita HIV/AIDS	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data logistik kesehatan	Aplikasi manajemen logistik bidang kesehatan	Berfungsi untuk mengelola logistik bidang kesehatan	RAD 09.03 Data Informasi
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data Kasus Malaria	Informasi Data pencatatan dan pengobatan penderita Malaria	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data pencatatan dan pengobatan penderita Malaria	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia	Update Data Tenaga	Informasi Data Kepegawaian	Bertujuan untuk mengetahui	RAD 04.01 Data Kesehatan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan		Informasi Data Kepegawaian	
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	Informasi Data kepegawaian	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data kepegawaian	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pencatatan Vaksinasi Covid-19	Informasi Pelaporan penggunaan Vaksin Covid19	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pelaporan penggunaan Vaksin Covid19	RAD 04.01 Data Kesehatan
Kesekretariatan	Rencana Anggaran Puskesmas	Sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah	Bertujuan untuk mengetahui Sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah	RAD 04.01 Data Kesehatan
Kesekretariatan	Manajemen Integritas	Informasi Penyelenggaraan pelayanan publik	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Penyelenggaraan pelayanan publik	RAD 04.01 Data Kesehatan
Kesekretariatan	Data pelaporan IKP	Informasi Data Indikator Mutu Puskesmas	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Indikator Mutu Puskesmas	RAD 04.01 Data Kesehatan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Indikator Mutu Puskesmas	Informasi data Indikator Mutu Puskesmas	Berfungsi untuk membantu pelayanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat, dari mulai pendaftaran pasien, pelayanan poli	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	data lapangan, data pasien, data fasilitas kesehatan hingga data analisis	Informasi data lapangan, data pasien, data fasilitas kesehatan hingga data analisis	Berfungsi untuk memudahkan para surveior kesehatan dalam mengumpulkan data seluruh keluarga di Indonesia, baik di daerah yang sudah memiliki fasilitas internet yang sudah memadai maupun di daerah terpencil yang masih mengalami kesulitan akses Internet.	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data penderita penyakit filariasis, kecacingan dan schistosomiasis	Perekaman dan pelaporan untuk penyakit filariasis, kecacingan dan schistosomiasis	Berfungsi untuk perekaman dan pelaporan untuk penyakit filariasis, kecacingan dan schistosomiasis	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data Pemantauan bagi kesehatan ibu hamil serta media edukasi pernikahan dan hamil	Pemantauan bagi kesehatan ibu hamil serta media edukasi pernikahan dan hamil	Berfungsi sebagai pemantauan bagi kesehatan ibu hamil serta media edukasi pernikahan dan hamil	RAD 04.01 Data Kesehatan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data user, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Pangan	Informasi mengenai Data user, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Pangan	Berfungsi untuk memudahkan dalam memperoleh informasi TPM yang aman dan sehat sesuai dengan standar Higiene Sanitasi Pangan	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data limbah medis	Sistem Informasi Kelola Limbah Medis	Berfungsi untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan data limbah medis	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data terkait perencanaan, penganggaran, dan realisasi terkait kesehatan	Menunjang fungsi perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi dalam 1 perangkat lunak yang terpadu.	Berfungsi untuk mempermudah kerja dari petugas pelaksana perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi dengan menggunakan sistem terpadu berbasis <i>online</i>	RAD 09.02 Data Keuangan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	data terkait penanggung jawab, jumlah dokter, alamat buka praktek, jam kerja, teknologi, dan sebagainya.	Informasi terkait penanggung jawab, jumlah dokter, alamat buka praktek, jam kerja, teknologi, dan sebagainya.	Bertujuan untuk profiling, monitoring, serta pelaporan data terkait penanggung jawab, jumlah dokter, alamat buka praktek, jam kerja, teknologi, dan sebagainya.	RAD 04.01 Data Kesehatan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data terkait BPJS	Memudahkan akses masyarakat pengguna Jaminan Kesehatan Nasional.	Berfungsi untuk memudahkan akses masyarakat pengguna Jaminan Kesehatan Nasional	RAD 04.02 Data Sosial
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data terkait KB	Informasi terkait Keluarga Berencana	Memberikan Informasi Alat & Obat Kontrasepsi Dan Klinik Bidan Di Indonesia	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data perencanaan DAK fisik	Digunakan untuk perencanaan DAK fisik	Berfungsi untuk perencanaan DAK fisik	RAD 09.02 Data Keuangan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data peserta BPJS	Informasi terkait data peserta BPJS	Memudahkan Faskes dalam administrasi dan keuangan BPJS Kesehatan	RAD 04.02 Data Sosial
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data hasil Antigen/PCR dan biodata pemeriksaan	Informasi Data hasil Antigen/PCR dan biodata pemeriksaan	Berfungsi untuk mendata hasil Antigen/PCR Covid 19	RAD 04.01 Data Kesehatan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data penyakit dan pencegahannya	Informasi data penyakit dan pencegahannya	Berfungsi untuk memberikan informasi mengenai pencegahan penyakit tidak menular	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data pasien rujukan	Sistem Rujukan Terpadu yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat (horizontal maupun vertikal)	Berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	data hasil pemeriksaan fisik	informasi terkait data hasil pemeriksaan fisik	Berfungsi untuk memudahkan pencatatan hasil pemeriksaan fisik	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga.	tentang data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga.	Berfungsi untuk mengumpulkan data primer tentang data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga.	RAD 03.07 Data Kependudukan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data konsultasi kesehatan jiwa	Informasi tentang kesehatan jiwa bagi masyarakat yang di kembangkan oleh Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza	Berfungsi sebagai wadah komunikasi, Edukasi serta Informasi tentang kesehatan jiwa bagi masyarakat	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data limbah dan pengelolaannya	Digunakan sebagai pelaporan pengolahan limbah B3 dan Non B3 yang dilakukan secara elektronik	Berfungsi sebagai pelaporan pengolahan limbah yang dilakukan secara elektronik	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data penderita Hepatitis	Digunakan untuk pendataan penderita penyakit Hepatitis	Berfungsi untuk pendataan penderita penyakit Hepatitis	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Seluruh data terkait kesehatan	Informasi Seluruh data terkait kesehatan	Berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi manajemen kesehatan melalui pemanfaatan	RAD 09.03 Data Informasi

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
			teknologi informasi komunikasi.	
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data penderita penyakit tular vektor dan zoonotik	Informasi data terhadap penyakit tular vektor dan zoonotik termasuk DBD	Berfungsi untuk untuk mencegah penularan penyakit bersumber hewan	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data KIE	Untuk membangun Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan Penyuluh KB dan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di seluruh Indonesia.	Berfungsi sebagai sarana berkomunikasi, bersosialisasi, mengembangkan minat dan kemampuan jajarannya pemangku kebijakan dan pelaksana Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana di Indonesia	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Nilai matrik pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana setiap wilayah	Informasi data Nilai matrik pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana setiap wilayah	Berfungsi untuk menganalisa secara komprehensif dan memberikan peringatan dini serta rekomendasi kebijakan sebagai solusi	RAD 03.07 Data Kependudukan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
			untuk pengendalian kependudukan	
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data aduan program JKN	Pengaduan seputar program JKN yang terhubung langsung oleh Kantor Cabang	Berfungsi untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian layanan informasi dan penanganan pengaduan peserta yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data kebutuhan, rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan	Informasi data dalam menyusun rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan yang tepat sasaran dan berbasis bukti.	Berfungsi untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan yang tujuannya agar tepat sasaran dan berbasis bukti.	RAD 09.02 Data Keuangan
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data informasi kesehatan	Aplikasi yang berfungsi sebagai media untuk mempromosikan informasi terkait kesehatan	Berfungsi sebagai media untuk mempromosikan informasi terkait kesehatan	RAD 09.03 Data Informasi
Bidang Penyedia Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data berkaitan dengan Pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.	Informasi terkait capaian program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Berfungsi untuk menyediakan informasi tentang Pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.	RAD 03.07 Data Kependudukan

Berdasarkan Tabel 3.17 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki 72 (tujuh puluh dua) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **Komputer internal PD, server aplikasi, server pusat, server internal OPD** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD, Bagi pakai OPD** dan **publik**.

3.3.4.16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan urusannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki **4 (empat) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki **9 (sembilan) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.18**.

Tabel 3.18 Metadata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Data Pengelolaan Sumber Daya Air	Informasi Data Pengelolaan Sumber Daya Air	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air	RAD 03.01 Data Pekerjaan Umum
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Data Pengendalian Banjir	Informasi Data Pengendalian Banjir	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengendalian Banjir	RAD 04.02 Data Sosial
Bidang Cipta Karya	Data Pengembangan Jasa Konstruksi	Informasi Data Pengembangan Jasa Konstruksi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengembangan	RAD 03.01 Data Pekerjaan Umum

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
			n Jasa Konstruksi	
Bidang Cipta Karya	Data Penataan Bangunan Gedung	Informasi Data Penataan Bangunan Gedung	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Penataan Bangunan Gedung	RAD 03.01 Data Pekerjaan Umum
Bidang Cipta Karya	Data Penataan Bangunan dan Lingkungan	Informasi Data Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	RAD 03.01 Data Pekerjaan Umum
Bidang Bina Marga	Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Informasi Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	RAD 03.01 Data Pekerjaan Umum
Bidang Tata Kota	Data Perencanaan Ruang	Informasi Data Perencanaan Ruang	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Perencanaan Ruang	RAD 03.01 Data Pekerjaan Umum
Bidang Tata Kota	Data Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Informasi Data Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengendalian	RAD 03.01 Data Pekerjaan Umum

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
			Pemanfaatan Ruang	
Kesekretariatan	Data informasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Informasi Data terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan Tabel 3.18 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 9 (sembilan) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **Komputer internal PD, server pusat** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.17 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan urusannya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki **2 (dua) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki **2 (dua) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.19**.

Tabel 3.19 Metadata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Kesekretariatan	Data informasi publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Informasi terkait Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RAD 09.03 Data Informasi
Kesekretariatan	Data Pengaduan Masyarakat	Informasi terkait Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat atau Instansi	Memudahkan masyarakat maupun instansi dalam melakukan pelaporan karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun.	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan Tabel 3.19 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 2 (dua) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dengan tempat penyimpanan data pada **server pusat** dan **server kominfo** dengan akses data **publik**.

3.3.4.18 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan urusannya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki **4 (empat) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki **6 (enam) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.20**.

Tabel 3.20 Metadata Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Data bantuan sosial	Informasi terkait data pendukung bantuan sosial	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data pendukung bantuan sosial	RAD 04.02 Data Sosial
Bidang Pemberdayaan Perempuan	Data gender	Informasi Data terkait gender	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait gender	RAD 04.03 Data Pemberdayaan Perempuan
Bidang Rehabilitas Sosial	Data sasaran penerimaan bantuan	Informasi tentang status sosial dan ekonomi masyarakat	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang status sosial dan ekonomi masyarakat	RAD 04.02 Data Sosial
Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Data kasus kekerasan	Informasi tentang data kasus kekerasan	Bertujuan untuk mengetahui informasi tentang data kasus kekerasan	RAD 04.03 Data Pemberdayaan Perempuan
Bidang Rehabilitasi Sosial	Data PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial)	Informasi data PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan)	Berfungsi untuk mendata PMKS (Penyandang	RAD 04.02 Data Sosial

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
		sosial)	masalah kesejahteraan sosial)	
Kesekretariatan	Data informasi publik Dinsos P3A	aplikasi penyedia informasi publik berupa layanan,kegiatan, produk hukum, berita dan lain sebagainya	Berfungsi sebagai penyedia informasi	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan Tabel 3.20 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 6 (enam) data, dengan data yang disimpan secara **Online**, dengan tempat penyimpanan data pada **server pusat**, **server aplikasi** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.19 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Berdasarkan urusannya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah memiliki **3 (tiga) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah memiliki **5 (lima) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.21**.

Tabel 3.21 Metadata Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
UMKM	Data UMKM Kota madiun	Informasi Data umkm yang sudah dibina serta data UMKM Kota	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data umkm yang	RAD 02.10 Data Usaha kecil dan Menengah

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
		madiun	sudah dibina, Database UMKM Kota madiun	
Bidang Tenaga Kerja	Data lembaga pelatihan	Informasi Data lembaga pelatihan, Data TKW, Data Pencari Kerja, Tingkat Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Data TKA, Data Pekerja Anak, Jumlah Pencari Kerja Yang diterima, Jumlah Lowongan Pekerjaan,	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data lembaga pelatihan, Data TKW, Data Pencari Kerja, Tingkat Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Data TKA, Data Pekerja Anak, Jumlah Pencari Kerja Yang diterima, Jumlah Lowongan Pekerjaan,	RAD 06.02 Data ketenagakerjaan
Bidang Perindustrian	Data informasi Produk IKM	Informasi Data Produk IKM Kota Madiun	Bertujuan untuk memberikan informasi Produk, Berita, Akun Pengguna	RAD 02.02 Data Perdagangan
Kesekretariatan	Data informasi publik Dinas Tenaga Kerja	Informasi Data Website penyebaran informasi terkait Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil	Bertujuan sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Tenaga Kerja, Koperasi	RAD 09.03 Data Informasi

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
		Dan Menengah	Usaha Kecil Dan Menengah	
Bidang Tenaga Kerja	Data calon pekerja migran	SISKOTKLN adalah sistem pendataan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat keluar negeri.	Berfungsi untuk pendataan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat keluar negeri	RAD 06.02 Data Ketenagakerjaan

Berdasarkan Tabel 3.21 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah memiliki 5 (lima) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **komputer internal PD**, **server pusat**, **server aplikasi** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.20 Dinas Pendidikan

Berdasarkan urusannya Dinas Pendidikan memiliki **3 (tiga) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Pendidikan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Dinas Pendidikan memiliki **10 (sepuluh) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.22**.

Tabel 3.22 Metadata Dinas Pendidikan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Sekretariat	Dapodik	Informasi Data terkait pendidikan sekolah di Indonesia	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data terkait pendidikan	RAD 06.01 Data Pendidikan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
			sekolah di Indonesia	
Bidang Pengelolaan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar	Laporan Data jumlah siswa PAUD, SD dan SMP negeri dan swasta	Informasi terkait Data jumlah siswa PAUD, SD dan SMP negeri dan swasta	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait Data jumlah siswa PAUD, SD dan SMP negeri dan swasta	RAD 06.01 Data Pendidikan
Bidang Pengelolaan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar	Data ijin operasional lembaga swasta	Informasi terkait data ijin operasional lembaga swasta	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data ijin operasional lembaga swasta	RAD 06.01 Data Pendidikan
Bidang Pengelolaan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar	Data akreditasi dan penerima PIP	Informasi terkait data akreditasi dan penerima PIP	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data akreditasi dan penerima PIP	RAD 06.01 Data Pendidikan
Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Data pendidik dan tenaga kependidikan	Berisikan data pendidik dan tenaga kependidikan	Bertujuan untuk mengetahui informasi data pendidik dan tenaga kependidikan	RAD 06.01 Data Pendidikan
Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan	Data AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	Informasi Data AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	bertujuan untuk mengetahui Informasi	RAD 06.01 Data Pendidikan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Sastra			Data AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	
Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar	Data beasiswa BBM (Data diri dari isian form)	informasi data beasiswa BBM	Digunakan untuk memberikan informasi dan pendaftaran <i>online</i> beasiswa BBM	RAD 06.01 Data Pendidikan
Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar	Data profil lembaga pendidikan dari isian form	Informasi data pendataan pendidikan	bertujuan untuk mendata informasi pendidikan dari masing-masing lembaga	RAD 06.01 Data Pendidikan
Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar	Data calon peserta didik	Informasi data pendaftaran peserta didik baru jenjang SD dan SMP	Berfungsi untuk memudahkan dalam proses pendaftaran peserta didik baru jenjang SD dan SMP	RAD 06.01 Data Pendidikan
Kesekretariatan	Data informasi publik Dinas Pendidikan	Website penyebaran informasi terkait Dinas Pendidikan, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Pendidikan	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan Tabel 3.22 Dinas Pendidikan memiliki 10 (sepuluh) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **komputer internal PD**,

server pusat dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.21 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Berdasarkan urusannya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki **3 (tiga) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Pangan, Pertanian dan Perikanan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki **8 (delapan) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.23**.

Tabel 3.23 Metadata Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Pertanian	Laporan Penyaluran Pupuk bersubsidi Tingkat Kota	Informasi mengenai penyaluran pupuk bersubsidi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi mengenai penyaluran pupuk bersubsidi	RAD 02.03 Data Pertanian
Pertanian	Arsip Surat Rekomendasi Kredit Usaha Tani	Informasi mengenai Rekomendasi Kredit Usaha Tani	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai Rekomendasi Kredit Usaha Tani	RAD 02.03 Data Pertanian
Pertanian	Arsip Surat Pengantar Pencairan Dana BLM PUAP	Informasi mengenai Pengantar Pencairan Dana BLM PUAP	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai Pengantar Pencairan Dana BLM PUAP	RAD 02.03 Data Pertanian
Pertanian	Tanda Terima Pestisida Pengajuan Form AOTP	Informasi mengenai Tanda Terima Pestisida Pengajuan Form AOTP	Bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai Tanda Terima Pestisida Pengajuan Form AOTP	RAD 02.03 Data Pertanian
Pertanian	Data Kesehatan Hewan	Informasi Data Kesehatan Hewan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Kesehatan Hewan	RAD 02.05 Data Pternakan
Bidang Ketahanan	Data Pencapaian	Informasi mengenai Data	Bertujuan untuk mengetahui informasi	RAD 02.03 Data

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Kota Madiun Tahun 2016-2020	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kota Madiun Tahun 2016-2020 dan Data Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Madiun Tahun 2016-2020	terkait ketersediaan dan pengelolaan kemandirian pangan dan pertanian	Pertanian
Bidang Ketahanan Pangan	Data Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Madiun Tahun 2016-2020	Informasi mengenai Data Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Madiun Tahun 2016-2020	Bertujuan untuk mengetahui informasi terkait Data Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Madiun Tahun 2016-2020	RAD 02.03 Data Pertanian
Kesekretariatan	Data informasi publik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Informasi Data terkait Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan Tabel 3.23 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki 8 (delapan) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **komputer internal PD** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.5 Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan urusannya Dinas Lingkungan Hidup memiliki **3 (tiga) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Lingkungan Hidup**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup memiliki **14 (empat belas) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.24**.

Tabel 3.24 Metadata Dinas Lingkungan Hidup

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Data Pengaduan Pencemaran Lingkungan	Informasi data pengaduan pencemaran lingkungan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pengaduan pencemaran	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup
Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Data Jumlah Sekolah Adiwiyata,	Informasi Data jumlah sekolahan yang sudah mendapatkan dan yang akan menuju sekolah adiwiyata	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah sekolahan yang sudah mendapatkan dan yang akan menuju sekolah adiwiyata, serta data kelurahan yang menang kelurahan berseri	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup
Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Data Kelurahan Berseri	Informasi Data Kelurahan Berseri	Bertujuan untuk mengetahui informasi Data Kelurahan Berseri	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup
Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Data Perusahaan Yang Taat Terhadap Perizinan Lingkungan	Informasi Data AMDAL/UKL/UPL	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data AMDAL/UKL/UPL	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Data Indikator Kinerja Utama	Informasi Data kualitas air dan kualitas udara	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kualitas air dan kualitas udara	RAD 09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Data Titik/Lokasi Tercemar Yang Ada Di Kota Madiun	Informasi Data lokasi/daerah yang kondisinya tercemar baik air maupun udara	Bertujuan untuk mengetahui Informasi lokasi/daerah yang kondisinya tercemar baik air maupun udara	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Data Spesies Kehati Lokal Daerah RPPLH	Informasi Data KLHS RPPLH IKLH Kehati kota madiun	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data KLHS RPPLH IKLH Kehati kota madiun	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	Data Volume Sampah	Informasi Data volume sampah	Bertujuan untuk mengetahui Informasi volume sampah	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	Data Volume Sampah (Timbulan Sampah, Volume Sampah, Bank Sampah)	Informasi Data pengurangan sampah, pengelolaan sampah	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pengurangan sampah, pengelolaan sampah	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya	Data Rekomendasi Penyimpanan Sementara Limbah B3	Informasi Data rekomendasi B3	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data rekom B3	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Beracun				
Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Data Aset DLH	Informasi Data umum dan keuangan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi umum dan keuangan	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup
Sekretariat DLH	Data Kepegawaian dan Data Perencanaan	Informasi Data jumlah pegawai, program kegiatan, capaian kinerja	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah pegawai, program kegiatan, capaian kinerja	RAD 09.06 Data Aparatur Negara
Bidang Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Data laporan lingkungan	Informasi Data Pelaporan terkait permasalahan lingkungan	Berfungsi sebagai sarana laporan jika ada permasalahan lingkungan	RAD 07.05 Data Lingkungan Hidup
Kesekretariat	Data informasi publik Dinas Lingkungan Hidup	Informasi Data terkait Dinas Lingkungan Hidup	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan Tabel 3.24 Dinas Lingkungan Hidup memiliki 14 (empat belas) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **komputer internal PD** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.23 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan urusannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki **3 (tiga) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki **14 (empat belas) Data**.

Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.25**.

Tabel 3.25 Metadata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	<i>Database</i> Kependudukan	Informasi Data biodata penduduk	Bertujuan untuk mengetahui Informasi biodata penduduk	RAD 03.07 Data Kependudukan
Sekretariat	Data Perencanaan Dan Keuangan OPD	Informasi Data Perencanaan dan Keuangan OPD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Perencanaan dan Keuangan OPD	RAD 09.02 Data Keuangan
Sekretariat	Data Informasi Kepegawaian	Informasi Data kepegawaian, aset dan barang milik daerah	Bertujuan untuk mengetahui informasi kepegawaian, aset dan barang milik daerah	RAD 09.06 Data Aparatur Negara
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Data Kelahiran dan Data Kematian (Bagi Pakai dengan Kelurahan)	Informasi data kelahiran dan data kematian	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kelahiran dan data kematian	RAD 03.07 Data Kependudukan
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Data Perkawinan Dan Data Perceraian	Informasi data perkawinan dan perceraian	Bertujuan untuk mengetahui informasi perkawinan dan perceraian	RAD 03.07 Data Kependudukan
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Data KK	Informasi data KK, KTP, KIA	Bertujuan untuk mengetahui Informasi KK, KTP, KIA	RAD 03.07 Data Kependudukan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Data KK, SKP WNI, SKPT	Informasi data KK, SKP WNI, SKPT	Bertujuan untuk mengetahui Informasi KK, SKP WNI, SKPT	RAD 03.07 Data Kependudukan
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Data Administrasi Kependudukan	Data Administrasi Kependudukan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Administrasi Kependudukan	RAD 03.07 Data Kependudukan
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Data DWH Terpusat	Informasi Data Kependudukan untuk Kerjasama (DWH Terpusat)	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Kependudukan untuk Kerja Sama	RAD 03.07 Data Kependudukan
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Data Kependudukan terkait Perceraian	Aplikasi Sistem Informasi Layanan Dukcapil dan Pengadilan Agama untuk mengupdate status data penduduk yang melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama	Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan terkait data Perceraian di Pengadilan Agama	RAD 03.07 Data Kependudukan
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Data Agregat Perkembangan Kependudukan	Web yang dibangun untuk menyampaikan Informasi Data Agregat Perkembangan Kependudukan	Penyampaian Informasi Data Agregat Perkembangan Kependudukan	RAD 09.03 Data Informasi
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Data pembuatan e-KTP	Aplikasi untuk mencetak KTP	Untuk mencetak KTP	RAD 03.07 Data Kependudukan
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Data perekaman e-KTP	Aplikasi desktop rekam ktp	Untuk perekaman KTP	RAD 03.07 Data Kependudukan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Data informasi publik Dispendukcapil	Website penyebaran informasi dan kegiatan Dispendukcapil	Website penyebaran informasi dan kegiatan Dispendukcapil	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan Tabel 3.25 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 14 (empat belas) data, dengan data yang disimpan secara **Online**, dengan tempat penyimpanan data pada **server internal PD, server pusat** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD, bagi pakai OPD** dan **publik**.

3.3.4.24 Dinas Perhubungan

Berdasarkan urusannya Dinas Perhubungan memiliki **2 (dua) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Perhubungan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Dinas Perhubungan memiliki **4 (empat) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.26**.

Tabel 3.26 Metadata Dinas Perhubungan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Data Kendaraan Wajib Uji	Informasi Data Kendaraan Wajib Uji, Data kendaraan lulus uji, Data kendaraan tidak taat uji	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Kendaraan Wajib Uji, Data kendaraan lulus uji, Data kendaraan tidak taat uji	RAD 03.03 Data Transportasi

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Kesekretariatan	Data informasi publik Dinas Perhubungan	Informasi Data terkait Dinas Perhubungan	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Perhubungan	RAD 09.03 Data Informasi
Bidang Lalu Lintas	Data tilang kendaraan bermotor	ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah sistem yang akan mencatat, mendeteksi, dan memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera CCTV.	Berfungsi untuk mencatat, mendeteksi, dan memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera CCTV	RAD 03.03 Data Transportasi
Kesekretariatan	Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Pelayanan pembayaran non tunai Pengujian Kendaraan Bermotor	Berfungsi untuk sinkronisasi laporan pendapatan antara SIM PKB dengan SIM Bank Jatim	RAD 03.03 Data Transportasi

Berdasarkan Tabel 3.26 Dinas Perhubungan memiliki 4 (empat) data, dengan data yang disimpan secara **Online**, dengan tempat penyimpanan data pada **server internal PD**, **server pusat** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.25 Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan urusannya Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki **3 (tiga) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Statistika, Persandian, Komunikasi dan Informatika**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki **16 (enam belas)** Data. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.27**.

Tabel 3.27 Metadata Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Data Pengelolaan Informasi dan Media Publik	Informasi Data Pengelolaan Informasi dan Media Publik	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengelolaan Informasi dan Media Publik	RAD 09.03 Data Informasi
Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Data Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik	Informasi Data Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik	RAD 09.04 Data Komunikasi
Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Data Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Informasi Data Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	RAD 09.04 Data Komunikasi
Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian	Data Pengelolaan Data dan Statistik	Informasi Pengelolaan Data dan Statistik	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengelolaan Data dan Statistik	RAD 09.03 Data Informasi
Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian	Data Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	Informasi Pengelolaan Data Keamanan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pengelolaan	RAD 01.01 Data Pertahanan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
		Informasi dan Persandian	Keamanan Informasi dan Persandian	
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	data paparan dan presentasi dari video conference/rapat /pelatihan	Edu merupakan platform digital learning milik Pemerintah Kota Madiun yang dikelola oleh Organisasi Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Madiun.	bertujuan untuk melihat materi hasil kajian dari kegiatan.	RAD 09.03 Data Informasi
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Data penjadwalan agenda	Aplikasi untuk mendata agenda kegiatan dari Walikota, Wawali, Sekda, OPD Kota Madiun	Berfungsi memberikan informasi terkait agenda kegiatan Walikota, Wawali, Sekda,dan OPD.	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Data pengirim/penerima email	Informasi Data pengirim/penerima email, data insiden	Bertujuan agar dengan cepat, efisien dan terdokumentasikan proses dalam mengatasi insiden TI yang terjadi pada pengguna akhir	RAD 09.03 Data Informasi
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Data informasi surat (NIP, Nama, jabatan)	Informasi data persuratan yang terintegrasi dengan Esign dari BSSN	Aplikasi persuratan dengan tanda tangan elektronik	RAD 09.06 Data Aparatur Negara
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Data isian form	Informasi data server yang sedang ada gangguan dengan mengirimkan	Bertujuan untuk memberikan notifikasi server yang sedang ada gangguan melalui bot telegram.	RAD 09.03 Data Informasi

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
		notifikasi melalui bot telegram		
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Data pelaporan	Informasi data laporan	Berfungsi dalam menyampaikan aduan pelayanan publik	RAD 09.03 Data Informasi
Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Data publik dari tiap OPD	Aplikasi yang menampilkan Dashboard data dari seluruh OPD	Berfungsi sebagai informasi publik dari data yang diolah setiap OPD	RAD 09.03 Data Informasi
Kesekretariatan	Data informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Informasi terkait Dinas Komunikasi dan Informatika	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika	RAD 09.03 Data Informasi
Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Data publik dari tiap OPD	Aplikasi yang menampilkan informasi tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Berfungsi memberikan informasi tentang tugas dan tanggung jawab PPID di Lingkungan Pemerintahan Kota Madiun	RAD 09.03 Data Informasi
Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian	Data tanda tangan dan pemiliknya, syarat dan ketentuan permohonan ttd elektronik	Aplikasi Tanda Tangan <i>Online</i> untuk memudahkan pelayanan administrasi pemerintah Kota Madiun	Berfungsi untuk memudahkan proses tanda tangan secara <i>online</i>	RAD 09.04 Data Komunikasi
Kesekretariatan	Data arsip OPD	Aplikasi berbasis cloud yang digunakan	Berfungsi untuk penyimpanan arsip	RAD 09.04 Data Komunikasi

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
		untuk penyimpanan arsip masing-masing OPD di Kota Madiun		

Berdasarkan Tabel 3.27 Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 16 (enam belas) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **komputer internal PD** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD, bagi pakai OPD** dan **publik**.

3.3.4.26 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan urusannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki **4 (empat) Koordinator** dan memiliki urusan terkait **Penanaman Modal**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **7 (tujuh) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.28**.

Tabel 3.28 Metadata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Penanaman Modal	Data Peta investasi	Informasi data mengenai Peta Investasi	Bertujuan untuk mengetahui potensi investasi dan peluang bisnis	RAD 02.08 Data Investasi
Penanaman Modal	Data Realisasi investasi	Informasi Data dokumen realisasi investasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi dokumen realisasi investasi	RAD 02.08 Data Investasi

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Koordinator dan Subkoordinator	Data peta sebaran perizinan	Informasi data WEBGIS perizinan terbit per lokasi	Memetakan perizinan yang sudah terbit perlokasi	RAD 02.08 Data Investasi
Koordinator dan Subkoordinator	Data peta sebaran investasi	Memudahkan investor untuk berinvestasi di Kota Madiun	Memudahkan investor untuk berinvestasi di Kota Madiun	RAD 02.08 Data Investasi
Koordinator dan Subkoordinator	Data perizinan	MASS (Madiunkota Single Submission) adalah sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik	Memberi kemudahan proses perizinan non berusaha	RAD 02.08 Data Investasi
Koordinator dan Subkoordinator	Data perizinan	Aplikasi Izin Usaha milik Pusat	Memberi kemudahan proses perizinan usaha	RAD 02.08 Data Investasi
Kesekretariatan	Data informasi publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	informasi data terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan hasil identifikasi metadata secara detail dapat dilihat pada Bab 1 tentang Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kota Madiun. Berdasarkan Tabel 3.28 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 7 (tujuh) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **komputer internal PD**, **server pusat** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.27 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan urusannya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga memiliki **3 (tiga) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga memiliki **20 (dua puluh) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, Bentuk Data, Tempat penyimpanan data, Aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan Akses Data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.29**.

Tabel 3.29 Metadata

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Sekretariat	Data Perencanaan	Informasi data perencanaan dan kepegawaian OPD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi perencanaan dan kepegawaian OPD	RAD 09.07 Data Kesekretaria tan Negara
Sekretariat	Data Keuangan Dan Kearsipan	Informasi data keuangan dan arsip PD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi keuangan dan arsip PD	RAD 09.07 Data Kesekretaria tan Negara
Kebudayaan	Data terkait kesenian dan kebudayaan	Informasi data terkait kesenian dan kebudayaan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait kesenian dan kebudayaan	RAD 08.02 Data Kebudayaan
Kebudayaan	Data cagar budaya dan object diduga vagar	Informasi data cagar budaya	Bertujuan untuk mengetahui Informasi cagar	RAD 08.02 Data Kebudayaan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
	budaya		budaya	
Pariwisata	Data pemuda aktif berwirausahaan	Informasi data pemuda aktif berwirausahaan	Bertujuan untuk mengetahui informasi data pemuda aktif berwirausaha, data promosi event daerah yang terlaksana, Data Sharing Session	RAD 06.04 Data Pemuda
Pariwisata	Data promosi event daerah yang terlaksana	Informasi data promosi event daerah yang terlaksana	Bertujuan untuk mengetahui informasi data promosi event daerah yang terlaksana	RAD 06.04 Data Pemuda
Pariwisata	Data sharing session	Informasi data sharing session	Bertujuan untuk mengetahui informasi data sharing session	RAD 06.04 Data Pemuda
Pariwisata	Data akupensi hotel dan rumah kos	Informasi data akupensi hotel dan rumah kos, informasi kunjungan wisata	Bertujuan untuk mengetahui Informasi akupensi hotel dan rumah kos, informasi kunjungan wisata	RAD 02.11 Data Pariwisata
Pariwisata	Data kunjungan wisata	Informasi data kunjungan wisata	Bertujuan untuk mengetahui informasi data kunjungan	RAD 02.11 Data Pariwisata

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
			wisata	
Kepemudaan dan Olahraga	Data kakang mbakyu	Informasi data kakang mbakyu	Bertujuan untuk mengetahui informasi data kakang mbakyu	RAD 06.04 Data Pemuda
Kepemudaan dan Olahraga	Data pemuda berprestasi	Informasi data pemuda berprestasi	Bertujuan untuk mengetahui informasi data pemuda berprestasi	RAD 06.04 Data Pemuda
Kepemudaan dan Olahraga	Data seleksi paskibraka	Informasi data seleksi paskibraka	Bertujuan untuk mengetahui informasi data seleksi paskibraka	RAD 06.04 Data Pemuda
Kepemudaan dan Olahraga	Data event kepemudaan	Informasi data event kepemudaan	Bertujuan untuk mengetahui informasi data event kepemudaan	RAD 06.04 Data Pemuda
Kepemudaan dan Olahraga	Data pelatihan kepemudaan	Informasi data pelatihan kepemudaan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data pelatihan kepemudaan	RAD 06.04 Data Pemuda
Kepemudaan dan Olahraga	Data jumlah medali yang diraih	Informasi data jumlah medali yang diraih	Bertujuan untuk mengetahui informasi data jumlah medali yang diraih	RAD 06.05 Data Olahraga
Kepemudaan dan Olahraga	Data event kejuaraan	Informasi data event	Bertujuan untuk	RAD 06.05 Data

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
		kejuaraan	mengetahui data event kejuaraan	Olahraga
Kepemudaan dan Olahraga	Data cabang olahraga yang dibina	Informasi data cabang olahraga yang dibina	Bertujuan untuk mengetahui data cabang olahraga yang dibina.	RAD 06.05 Data Olahraga
Kepemudaan dan Olahraga	Data event festival olahraga	Informasi data event festival olahraga	Bertujuan untuk mengetahui Data event festival olahraga	RAD 06.05 Data Olahraga
Kepemudaan dan Olahraga	Data sarpras olahraga yang Terfasilitasi	Informasi data sarpras olahraga yang terfasilitasi	Bertujuan untuk mengetahui informasi sarpras olahraga yang terfasilitasi	RAD 06.05 Data Olahraga
Kesekretariatan	Data informasi publik Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Informasi terkait Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan Tabel 3.29 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga memiliki 20 (dua puluh) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **komputer internal PD, server aplikasi** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD, bagi pakai OPD** dan **publik**.

3.3.4.28 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan urusannya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki **2 (dua) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Perpustakaan dan Kearsipan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki **5 (lima) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, Bentuk Data, Tempat penyimpanan data, Aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan Akses Data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.30**.

Tabel 3.30 Metadata Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Perpustakaan	Data terkait perpustakaan	Informasi Data Pengunjung Perpustakaan, Data jumlah bahan pustaka, data jumlah judul bahan pustaka, data bahan pustaka yang dipinjam dan dikembalikan,	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Data Pengunjung Perpustakaan, Data jumlah bahan pustaka, data jumlah judul bahan pustaka, data bahan pustaka yang dipinjam dan dikembalikan,	RAD 06.01 Data Pendidikan
Bidang Kearsipan	Data arsip pusat	Informasi data arsip pusat	Bertujuan untuk mengelola arsip terpusat	RAD 09.06 Data Aparatur Negara
Bidang Kearsipan	Data arsip daerah	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Kota Madiun yang dibuat untuk pengelolaan pengarsipan surat masuk-keluar	Berfungsi untuk memudahkan dalam pengelolaan pengarsipan surat daerah	RAD 09.06 Data Aparatur Negara

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Kesekretariatan	Data informasi publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Informasi terkait Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAD 09.03 Data Informasi
Bidang Perpustakaan	Pembuatan Kartu anggota dan Peminjaman Bahan Pustaka, Pengolahan bahan pustaka dan nomor induk bahan pustaka.	Digunakan untuk pelayanan Perpustakaan	Berfungsi untuk melayani pemustaka antara lain layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka, pembuatan kartu anggota. Berfungsi untuk mengolah bahan pustaka, menginformasikan statistik perpustakaan.	RAD 09.06 Data Aparatur Negara

Berdasarkan Tabel 3.30 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki 5 (lima) data, dengan data yang disimpan secara **Online**, dengan tempat penyimpanan data pada **server pusat** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.29 Dinas Perdagangan

Berdasarkan urusannya Dinas Perdagangan memiliki **2 (dua) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Perdagangan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Dinas Perdagangan memiliki **8 (delapan)** Data. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data.. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.31**.

Tabel 3.31 Metadata Dinas Perdagangan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Usaha Perdagangan	Data perizinan	Informasi Data Bidang Usaha Perdagangan pada program RPJMD ini meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Bidang Usaha Perdagangan pada program RPJMD ini meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan	RAD 02.02 Data Perdagangan
Pengelolaan Pasar Rakyat	Laporan pengelolaan pasar rakyat	Informasi data bidang pengelolaan pasar rakyat meliputi pelaksanaan pengelolaan retribusi dan perizinan pasar, sarana prasarana pasar dan ketertiban pasar serta pembukuan dan pemberdayaan pasar	Bertujuan untuk mengetahui informasi bidang pengelolaan pasar rakyat meliputi pelaksanaan pengelolaan retribusi dan perizinan pasar, sarana prasarana pasar dan ketertiban pasar serta pembukuan dan pemberdayaan pasar	RAD 02.02 Data Perdagangan
Usaha Perdagangan	Laporan dan dokumentasi	Informasi data bidang usaha perdagangan memiliki wewenang meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Perdagangan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi bidang usaha perdagangan memiliki wewenang meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Perdagangan	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
UPTD Metrologi Legal	Data pelaksanaan Tera/Tera Ulang	Informasi data UPTD Metrologi legal yang melakukan tugas meliputi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah, dan melaporkan tugas bidang metrologi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi UPTD Metrologi legal merupakan UPTD yang melakukan tugas meliputi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah, dan melaporkan tugas bidang metrologi	RAD 02.02 Data Perdagangan
Usaha Perdagangan	Data produk	Informasi Data Bidang Usaha Perdagangan meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Perdagangan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Bidang Usaha Perdagangan meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Perdagangan	RAD 02.02 Data Perdagangan
Bidang Usaha Perdagangan	Data pedagang dan data pembayaran retribusi	Informasi data pedagang dan data pembayaran retribusi	Berfungsi memudahkan pembayaran retribusi	RAD 02.02 Data Perdagangan
Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat	Data tamu	Informasi data pencatatan buku tamu	Sebagai logbook pencatatan buku tamu	RAD 02.02 Data Perdagangan
Kesekretariatan	Data informasi publik Dinas Perdagangan	Informasi terkait Dinas Perdagangan	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Dinas Perdagangan	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan Tabel 3.31 Dinas Perdagangan memiliki 8 (delapan) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **komputer internal PD** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.20 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan urusannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki **3 (tiga) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki **10 (sepuluh) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.32**.

Tabel 3.32 Metadata Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Daftar penerima layanan	Informasi data penerima layanan	Bertujuan untuk mengetahui informasi penerima layanan	RAD 05.02 Data Keamanan
Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan	Data pembinaan anjal gepeng, PKL, dan penutupan Tempat Usaha.	Informasi data pembinaan anjal gepeng PKL, dan penutupan tempat usaha.	Bertujuan untuk mengetahui informasi pembinaan anjal gepeng, PKL, dan penutupan tempat usaha.	RAD 05.02 Data Keamanan
Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan	Kumpulan perda	Informasi data dokumen perda	Bertujuan untuk mengetahui informasi dokumen perda	RAD 05.01 Data Hukum

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan	Data rekapan bimtek /diklat internal	Informasi data rekapan Bimtek /diklat internal	Bertujuan untuk mengetahui informasi data rekapan bimtek /diklat internal	RAD 05.01 Data Hukum
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Data rekapitulasi anjal gepeng, ODGJ, reklame, PKL	Informasi data rekapitulasi anjal gepeng, ODGJ, reklame, PKL,	Bertujuan untuk mengetahui informasi rekapitulasi anjal gepeng, ODGJ, reklame, PKL,	RAD 05.02 Data Keamanan
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Data pengamanan dan pengawalan	Informasi data jumlah pengamanan dan pengawalan	Bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah pengamanan dan pengawalan	RAD 05.02 Data Keamanan
Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekapan data pemadaman dan penyelamatan,	Informasi data rekapan data pemadaman dan penyelamatan,	Bertujuan untuk mengetahui informasi rekapan data pemadaman dan penyelamatan	RAD 05.02 Data Keamanan
Kesekretariatan	Data informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	informasi terkait Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	RAD 09.03 Data Informasi

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
			Kebakaran	
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Data pengisian bahan bakar	Pengelolaan data pengisian bahan bakar yang dipergunakan sebagai penunjang kegiatan	Membantu pekerjaan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	RAD 05.02 Data Keamanan
Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Data terkait pelayanan kebakaran	Informasi data terkait pelayanan kebakaran	Informasi publik terkait seluruh layanan pemadam kebakaran dan permintaan pelatihan edukasi	RAD 05.02 Data Keamanan

Berdasarkan Tabel 3.32 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki 10 (sepuluh) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **komputer internal PD** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.30 Sakit Umum Daerah Kota Madiun

Berdasarkan urusannya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun memiliki **3 (tiga) Bidang** dan memiliki urusan terkait **Kesehatan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun memiliki **7 (tujuh) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.33**.

Tabel 3.33 Metadata Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Bagian Umum	Data pegawai dan cuti	Informasi data pegawai dan cuti meliputi kuota cuti, form cuti dan surat cuti	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data pegawai dan cuti meliputi kuota cuti, form cuti dan surat cuti	RAD 09.06 Data Aparatur Negara
Bagian Pelayanan	Data pasien	Informasi data meliputi rekam medis dan pembayaran	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Meliputi rekam medis dan pembayaran	RAD 04.01 Data Kesehatan
Data tidak diketahui	Data penilaian tenaga kesehatan dari berbagai indikator dari isian form	Informasi data penilaian tenaga kesehatan dari berbagai indikator dari isian form	Berfungsi sebagai alat bantu yang diperuntukkan bagi Rumah Sakit yang mengikuti program Akreditasi yang diselenggarakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).	RAD 04.01 Data Kesehatan
Bagian Pelayanan	Nomor rekam Medis	Pelayanan Deteksi Dini Kehamilan Resiko Tinggi (Pendekar Hati) merupakan aplikasi pemberitahuan berupa SMS agar ibu hamil tidak terlambat untuk kontrol kehamilannya.	Untuk mengingatkan Ibu Hamil tidak Terlambat untuk Kontrol Kehamilannya dan mendeteksi ibu hamil dengan resiko tinggi.	RAD 04.01 Data Kesehatan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Data tidak diketahui	Nominal tarif pembayaran hasil export aplikasi SIM-RS RSUD Kota Madiun	INA-CBG merupakan sebuah aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim pada pemerintah	Untuk mengatasi masalah pembiayaan rumah sakit	RAD 04.01 Data Kesehatan
Data tidak diketahui	Nominal jasa medis dari <i>database</i> SIM-RS RSUD Kota Madiun	Aplikasi keuangan untuk menghitung dan melakukan pembagian jasa pelayanan Rumah Sakit secara tersistem sehingga diharapkan proses pembagian jasa pelayanan dapat menyingkat waktu, lebih akurat dan efisien.	Aplikasi untuk menghitung dan melakukan pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit secara tersistem.	RAD 04.01 Data Kesehatan
Kesekretariatan	Data profil	Website penyebaran informasi terkait RSUD Kota Madiun, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, cek ketersediaan kamar tidur dan informasi lainnya.	Befungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup RSUD Kota Madiun	RAD 04.01 Data Kesehatan

Berdasarkan Tabel 3.33 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun memiliki 7 (tujuh) data, dengan data yang disimpan secara **Online**, dengan tempat penyimpanan data pada **server internal PD** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD**, bagi pakai **OPD** dan **publik**.

3.3.4.32 Kecamatan Manguharjo

Berdasarkan urusannya Kecamatan Manguharjo memiliki **5 (lima) Seksi** dan memiliki urusan terkait **Penunjang Kecamatan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Kecamatan Manguharjo memiliki **3 (tiga) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.34**.

Tabel 3.34 Metadata Kecamatan Manguharjo

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
1. Seksi Pemerintahan, 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, 4. Seksi Pembangunan, 5. Seksi Kesejahteraan Sosial	Data Kependudukan	Informasi Data Kependudukan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Kependudukan	RAD 03.07 Data Kependudukan
Kesekretariatan	Data rencana kegiatan	Informasi data SICAKRA digunakan untuk merancang rencana kerja	Merancang rencana kerja kegiatan kecamatan dan kelurahan	RAD 10.02 Data Manajemen Kegiatan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
		kegiatan guna realisasi pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien sesuai target.		
Kesekretariatan	Data informasi publik Kecamatan Manguharjo	Website penyebaran informasi terkait Kecamatan Manguharjo, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Kartoharjo	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan Tabel 3.34 Kecamatan Manguharjo memiliki 3 (tiga) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **komputer internal PD** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.33 Kecamatan Kartoharjo

Berdasarkan urusannya Kecamatan Kartoharjo memiliki **5 (lima) Seksi** dan memiliki urusan terkait **Penunjang Kecamatan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Kecamatan Kartoharjo memiliki **4 (empat) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.35**.

Tabel 3.35 Metadata Kecamatan Kartoharjo

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Sekretaris Kecamatan	Data pegawai	Informasi Data SKP Pegawai ASN	Bertujuan untuk mengetahui Informasi SKP	RAD 09.07 Data Kesekretariatan Negara

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
			Pegawai ASN	
Kesekretariatan	Surat pernyataan ahli waris	E-Surpris merupakan aplikasi Kecamatan Kartoharjo untuk mempermudah dalam pengurusan surat pernyataan ahli waris	Bertujuan untuk mengetahui Informasi SKP Pegawai ASN	RAD 03.07 Data kependudukan
Kesekretariatan	Data informasi publik Kecamatan Kartoharjo	Website penyebaran informasi terkait Kecamatan Kartoharjo, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Bertujuan untuk mengetahui Informasi SKP Pegawai ASN	RAD 09.03 Data Informasi
Kesekretariatan	Parameter kepuasan	Aplikasi SKM-Kartoharjo merupakan aplikasi survei kepuasan masyarakat pengunjung Kecamatan Kartoharjo	Bertujuan untuk mengetahui Informasi SKP Pegawai ASN	RAD 10.04 Data Dukung Lainnya

Berdasarkan Tabel 3.35 Kecamatan Kartoharjo memiliki 4 (empat) data, dengan data yang disimpan secara **Online**, dengan tempat penyimpanan data pada **server kominfo** dengan akses data **internal PD, bagi pakai OPD dan publik**.

3.3.4.34 Puskesmas Manguharjo

Berdasarkan urusannya Puskesmas Manguharjo memiliki **6 (enam) Penanggung Jawab** dan memiliki urusan terkait **Kesehatan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang

telah dilakukan sebelumnya Puskesmas Manguharjo memiliki **11 (sebelas)** Data. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.36**.

Tabel 3.36 Metadata Puskesmas Manguharjo

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
PJ UKM Esensial dan Puskesmas	Data rekam medis	Informasi data tentang data rekam medis, data konsultasi gigi, data izin PIRT, data UBM, Data rumah tangga sehat, data posyandu, data sarana air bersih	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang data rekam medis, data konsultasi gigi, data izin PIRT, data UBM, Data rumah tangga sehat, data posyandu, data sarana air bersih	RAD 04.01 Data Kesehatan
PJ UKM Pengembangan	Data kunjungan rumah	Informasi data tentang data kunjungan rumah, data pelayanan kesehatan jiwa, data pelayanan gigi, data kesehatan lansia, data kefarmasian	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang data kunjungan rumah, data pelayanan kesehatan jiwa, data pelayanan gigi, data kesehatan lansia, data kefarmasian	RAD 04.01 Data Kesehatan
PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium	Data rekam medis	Informasi tentang data rekam medis, data pemeriksaan umum, data kesehatan gigi dan mulut, data KB dan imunisasi, data tindakan, data	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang data rekam medis, data pemeriksaan umum, data kesehatan gigi dan mulut, data KB dan	RAD 04.01 Data Kesehatan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
		laboratorium, data formasi, data TB	imunisasi, data tindakan, data laboratorium, data formasi, data TB	
PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaringan Puskesmas	Data Apotek	Informasi tentang data apotek	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang data apotek	RAD 04.01 Data Kesehatan
PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaringan Puskesmas	Data Rumah Sakit	Informasi tentang Data Rumah Sakit	Bertujuan untuk mengetahui informasi tentang Data Rumah Sakit	RAD 04.01 Data Kesehatan
PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaringan Puskesmas	Data Puskesmas	Informasi tentang Data Puskesmas	Bertujuan untuk mengetahui informasi tentang Data Puskesmas	RAD 04.01 Data Kesehatan
PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaringan Puskesmas	Data Puskesmas Pembantu	Informasi tentang Data Puskesmas Pembantu	Bertujuan untuk mengetahui informasi tentang Data Puskesmas Pembantu	RAD 04.01 Data Kesehatan
PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaringan Puskesmas	Data optik	Informasi tentang data optik	Bertujuan untuk mengetahui informasi tentang data optik	RAD 04.01 Data Kesehatan
PJ Bangunan, Prasarana dan Peralatan	Data bangunan dan Data sarana prasarana	informasi tentang data bangunan, data sarana prasarana	Bertujuan untuk mengetahui informasi tentang data bangunan, data sarana prasarana	RAD 04.01 Data Kesehatan

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
PJ Mutu	Data PJ Mutu	Informasi data tiap PJ Mutu	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tiap PJ Mutu	RAD 04.01 Data Kesehatan
Kesekretariatan	Data informasi publik Puskesmas Manguharjo	Website penyebaran informasi terkait Puskesmas Manguharjo, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Berfungsi sebagai penyebaran informasi dan kegiatan di lingkup Puskesmas Manguharjo	RAD 09.03 Data Informasi

Berdasarkan Tabel 3.36 Puskesmas Manguharjo memiliki 11 (sebelas) data, dengan data yang disimpan secara **Online** dan **Offline**, dengan tempat penyimpanan data pada **komputer internal PD** dan **server kominfo** dengan akses data **internal PD** dan **publik**.

3.3.4.35 Puskesmas Sukosari

Berdasarkan urusannya Puskesmas Sukosari memiliki **6 (enam) Penanggung Jawab** dan memiliki urusan terkait **Kesehatan**. Berdasarkan hasil survei dan analisis dari tugas dan fungsi yang telah dilakukan sebelumnya Puskesmas Sukosari memiliki **1 (satu) Data**. Metadata ini menjelaskan uraian data, tujuan data, kode model referensi, bentuk data, tempat penyimpanan data, aplikasi *database* atau penyimpanan data yang dipakai, dan akses data. Detail dari daftar metadata dapat dilihat pada **Tabel 3.37**.

Tabel 3.37 Metadata Puskesmas Sukosari

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
Kesekretariatan	Data informasi publik Puskesmas	Website penyebaran informasi terkait	Berfungsi sebagai penyebaran informasi	RAD 09.03 Data Informasi

Bidang OPD	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data
	Sukosari	Puskesmas Sukosari, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	dan kegiatan di lingkup Puskesmas Sukosari	

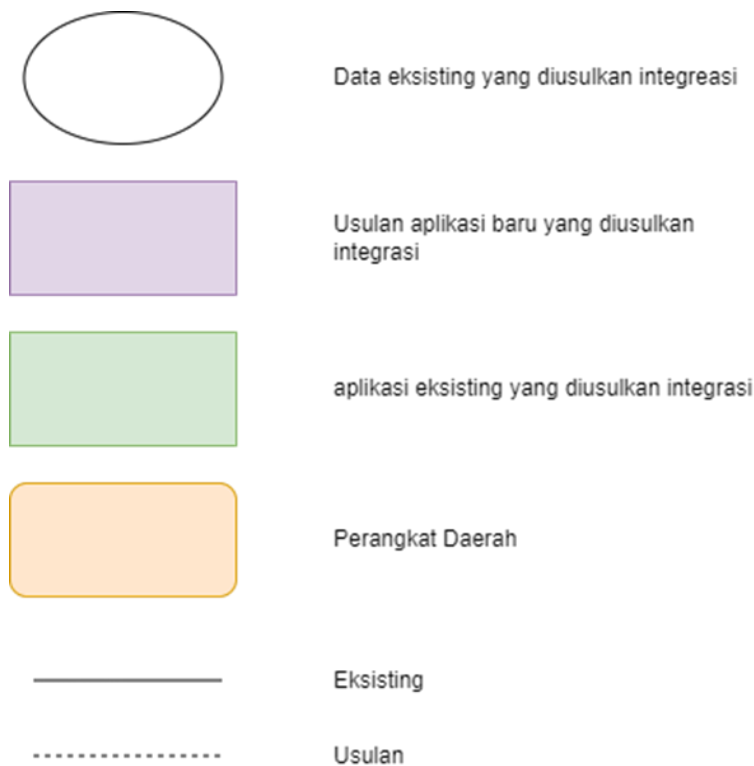
Berdasarkan Tabel 3.37 Puskesmas Sukosari memiliki 1 data, dengan data yang disimpan secara **Online**, dengan tempat penyimpanan data pada **server kominfo** dengan akses data **publik**.

3.3.5 Identifikasi Usulan Integrasi Data dan Informasi

Identifikasi usulan Integrasi data adalah proses menghubungkan atau mengkombinasikan dua atau lebih set data yang berasal dari sumber yang berbeda ke dalam suatu tempat penyimpanan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi duplikat atau redundansi dari data yang ada. Sesuai dengan tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Maka perlu dilakukan integrasi data yang terdapat pada Pemerintahan Kota Madiun.

Pada bagian ini, akan diusulkan integrasi antar data kependudukan, data kepegawaian, data keuangan dan data spasial. Data kependudukan, data kepegawaian, data keuangan dan data spasial merupakan data induk yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintahan. Data Kependudukan dan Data Kepegawaian merupakan data unik yang memiliki data unik yaitu NIK dan NIP. Dari data unik tersebut kemudian dapat diturunkan menjadi set data lain yang mampu memberikan kemudahan bagi pelayanan pemerintahan untuk masyarakat dan memberikan kemudahan untuk pengelolaan data pemerintah yang bersumber

dari masing-masing pegawai. Sedangkan data keuangan memiliki data yang krusial yang pengolahannya melibatkan banyak pihak dan dijaga keamanannya. Hal ini sesuai dengan prinsip pemenuhan data yaitu data harus memenuhi standar data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Kode Referensi/Data Induk. Untuk pemenuhan standar data, data kependudukan, data kepegawaian dan data keuangan mengikuti standar data dari pusat. Sedangkan untuk data spasial disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut. Dalam penggambaran peta integrasi data ke depannya akan digunakan beberapa simbol yang penjelasannya ada pada **Gambar 3.39**.



Gambar 3.39 Penjelasan Simbol Usulan Integrasi

3.3.5.1 Usulan Integrasi Data Kependudukan

Data kependudukan merupakan salah satu data yang dikenal sebagai data induk jika dirunut berdasarkan karakteristik hingga kegunaan data tersebut. Salah satu ciri yang menunjukkan bahwa data kependudukan merupakan data set dasar adalah kode unik NIK yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Indonesia. Dari data unik tersebut kemudian dapat diturunkan menjadi set data lain yang mampu memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimana data kependudukan ini merupakan data yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Agar data kependudukan dapat

terorganisir dengan baik, maka akan diberikan usulan terkait integrasi data-data kependudukan di Pemerintah Kota Madiun. Sehingga, harapan adanya integrasi data ini akan memberikan referensi dalam pembuatan *api gateway* Kota Madiun. **Tabel 3.38** berikut merupakan usulan integrasi data yang berkaitan dengan data kependudukan.

Tabel 3.38 Usulan Integrasi Data Kependudukan

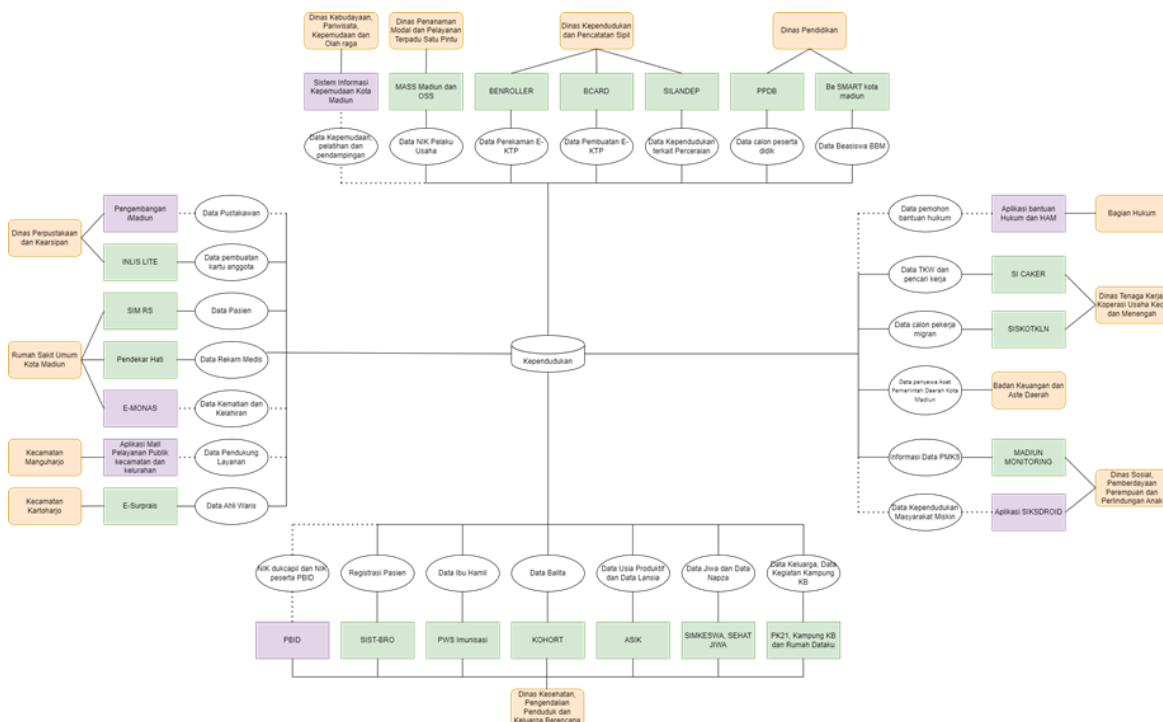
Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi Eksisting	Tahun
2	Bagian Hukum	Data pemohon bantuan hukum	Aplikasi Bantuan Hukum dan HAM (https://sidbankum.bphn.go.id/)	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data penyewa aset Pemerintah Daerah Kota Madiun	Belum ada Aplikasi	2024
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Registrasi pasien (NIK, Nama, Alamat, dsb)	SIST-BRO Pendaftaran <i>Online</i>	2023
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data ibu hamil	PWS Imunisasi	2024
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data balita	KOHORT	2024
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data usia produktif dan Data lansia	ASIK	2025
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan	Data jiwa dan Data Napza	SIMKESWA, SEHAT JIWA	2026

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi Eksisting	Tahun
	Keluarga Berencana			
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data keluarga dan Data kegiatan kampung KB	PK21, KAMPUNG KB & RUMAH DATAKU	2027
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	NIK Dukcapil dan NIK peserta Penerima Nantuan Iuran Daerah (PBID)	Aplikasi Pemadanan NIK Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID)	2027
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Informasi data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	MADIUN MONITORING (dinsosapp.madiunkota.go.id)	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Data kependudukan masyarakat miskin	Aplikasi SIKSDROID	2024
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Data lembaga pelatihan, Data TKW, Data Pencari Kerja, Tingkat Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Data TKA, Data Pekerja Anak, Jumlah Pencari Kerja Yang diterima, Jumlah Lowongan Pekerjaan,	Si Caker	2023
19	Dinas Tenaga	Data calon pekerja	SISKOTKLN	2024

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi Eksisting	Tahun
	Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	migran	(http://siskotkln.bnp2tki.go.id/)	
20	Dinas Pendidikan	Data beasiswa BBM (Data diri dari isian form)	Be SMART Kota Madiun (https://beasiswa.madiunkota.go.id/)	2023
20	Dinas Pendidikan	Data calon peserta didik	PPDB (https://ppdb.madiunkota.go.id/)	2024
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Kependudukan terkait Perceraian (NIK, Putusan Pengadilan dll)	SILANDEP (SISTEM INFORMASI LAYANAN DUKCAPIL DAN PA)	2023
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data pembuatan e-KTP (KK, foto identitas, biodata kependudukan)	BCARD	2024
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data perekaman e-KTP (KK, foto identitas, biodata kependudukan)	BENROLLER	2025
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data NIK Pelaku Usaha	MASS Madiun dan OSS	2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Data Kepemudaan, Data pelatihan dan pendampingan	Sistem Informasi Kepemudaan Kota Madiun	2023
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data pustakawan	Pengembangan iMadiun	2024
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pembuatan Kartu anggota: NIK, Pendidikan, Gender, Alamat.	INLIS.LITE (Inlislite.madiunkota.go.id)	2023

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi Eksisting	Tahun
		Layanan Pengembalian dan Peminjaman Bahan Pustaka : nomor kartu anggota, Pengolahan bahan pustaka: ISBN dan nomor induk bahan pustaka.		
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Data pasien	SIM RS	2023
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Nomor rekam medis, nama, jadwal kontrol dan nomor HP pasien dari <i>database</i> SIM-RS Kota Madiun	Pendekar Hati	2024
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Data kematian dan kelahiran	E- Monas (Mortalitas dan Natalitas)	2025
32	Kecamatan Manguharjo	Data pendukung pelayanan	Aplikasi Mall Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	2023
33	Kecamatan Kartoharjo	Surat pernyataan ahli waris, KK, KTP, buku nikah, akta kematian, akta kelahiran dan berkas pendukung lainnya	E-Surprais (Elektronik Surat Pernyataan Ahli Waris)	2023

Pada **Tabel 3.40** terdapat total 27 (dua puluh tujuh) data yang berkaitan dengan data kependudukan yang tersebar pada 13 (tiga belas) OPD. Data kependudukan yang disebutkan merupakan data yang memiliki keterkaitan dengan NIK ataupun data terkait data pribadi penduduk. Untuk pemetaan integrasi data kependudukan dapat dilihat pada **Gambar 3.4**.



Gambar 3.4 Usulan Integrasi Data Kependudukan

Gambar 3.4 menunjukkan data yang pengelolaannya perlu integrasi dan/atau berkaitan dengan data kependudukan. Dari analisis yang telah dilakukan, diketahui terdapat 27 (dua puluh tujuh) data yang diusulkan untuk diintegrasikan dengan data kependudukan. Sedangkan untuk aplikasi, terdapat 26 (dua puluh enam) aplikasi eksisting dan usulan yang diusulkan untuk dilakukan integrasi dengan data kependudukan guna mengurangi duplikasi data ataupun data bias.

3.3.5.2 Usulan Integrasi Data Kepegawaian

Data kepegawaian adalah informasi yang disusun berdasarkan arsip dokumen kepegawaian dari instansi yang bersangkutan di Pemerintah Kota Madiun. Seluruh pegawai memiliki NIP (Nomor Induk Pegawai) yang unik dan merupakan salah satu data induk kepegawaian. Data kepegawaian yang unik tersebut, kemudian dapat diturunkan menjadi set data lain yang mampu memberikan kemudahan bagi pengelolaan data pemerintah yang bersumber berdasar data masing-masing pegawai. Agar data kepegawaian dapat terstruktur dengan baik, maka diberikan usulan data kepegawaian di Pemerintah Kota Madiun. **Tabel 3.39** menjabarkan usulan integrasi data yang berkaitan dengan data kepegawaian.

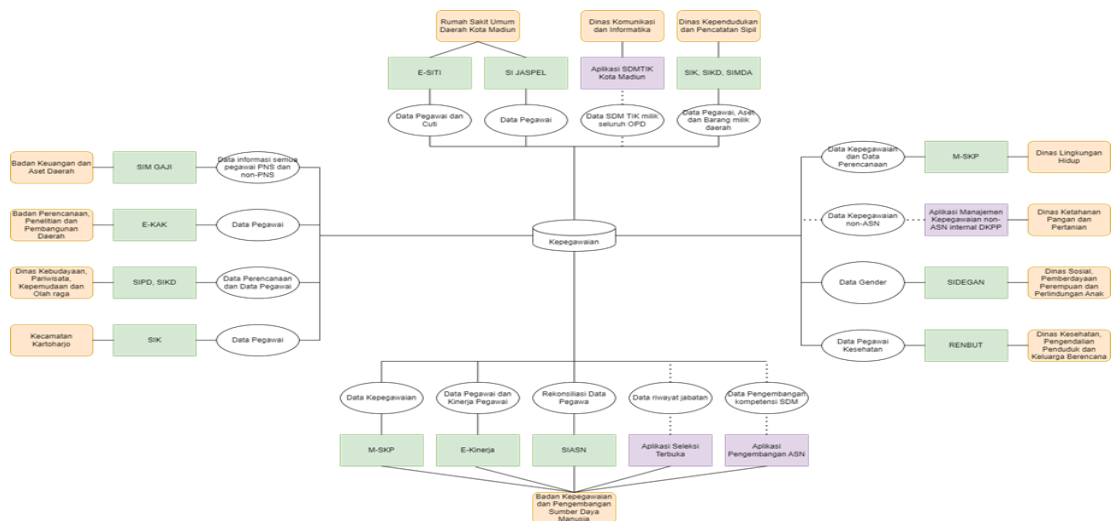
Tabel 3.39 Usulan Integrasi Data Kepegawaian

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi Eksisting	Tahun
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data pegawai berdasarkan sasaran kinerja pegawai	E-KAK	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data informasi Semua pegawai PNS dan non PNS Pemkot Madiun (untuk menentukan besaran gaji)	SIM GAJI	2023
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Kepegawaian, dan Data penilaian kinerja pegawai	M-SKP	2023
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data kepegawaian dan Data penilaian kinerja pegawai	E-Kinerja (https://ekinerja.madiunkota.go.id/)	2026
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rekonsiliasi data kepegawaian	SIASN	2024
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data riwayat jabatan	Aplikasi Seleksi Terbuka	2025
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Data kegiatan pengembangan kompetensi SDM	Aplikasi Pengembangan ASN	2025

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi Eksisting	Tahun
	Sumber Daya Manusia			
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data kepegawaian khusus kesehatan	REN BUT	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Data gender, Data perempuan kepala keluarga, Data disabilitas, Data pegawai seluruh OPD dan Data peserta kegiatan	SIDEGAN	2023
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data kepegawaian non-ASN	Aplikasi Manajemen Kepegawaian Non ASN Internal DKPP	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Data kepegawaian dan Data perencanaan	M-SKP	2023
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data informasi kepegawaian, Data aset, dan Data barang milik daerah	SIK, SIKD, SIMDA	2023
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data SDM TIK di seluruh OPD, Data pembinaan dan pengembangan SDM TIK	Aplikasi SDM TIK Kota Madiun	2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,	Data perencanaan (Renstra Renja,	SIPD, SIKD	2023

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi Eksisting	Tahun
	Kepemudaan dan Olah Raga	RKA) dan Data Kepegawaian		
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Data pegawai dan Data Cuti	E-SITI	2023
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Nominal jasa medis dari <i>database</i> SIM-RS RSUD Kota Madiun, Data pegawai dari <i>database</i> E-SITI	SI-JASPEL	2024
33	Kecamatan Kartoharjo	Data pegawai	SIK dan https://skp.madiunkota.go.id/	2023

Pada **Tabel 3.39** terdapat total 17 (Tujuh Belas) data yang berkaitan dengan data kepegawaian. Data tersebut tersebar pada 11 (sebelas) OPD. Data kepegawaian yang disebutkan merupakan data yang memiliki keterkaitan dengan NIP. Untuk pemetaan integrasi data kepegawaian dapat dilihat pada **Gambar 3.5**.



Gambar 3.5 Usulan Integrasi Data Kepegawaian

Berdasarkan **Gambar 3.5** menunjukkan data yang pengelolaannya perlu integrasi dan/atau berkaitan dengan data kepegawaian. didapatkan 17 (tujuh belas) data eksisting. Sedangkan untuk aplikasi, terdapat 15 (lima belas) aplikasi eksisting dan usulan yang akan diusulkan untuk dilakukan integrasi dengan data kepegawaian untuk mengurangi duplikasi data ataupun data bias.

3.3.5.3 Usulan Integrasi Data Keuangan

Data keuangan merupakan salah satu data krusial yang pengelolaannya meliputi beberapa pihak dan dijaga keamanannya dalam keterkaitan dengan dataset lain. Data keuangan bisa dikelola dalam bentuk perencanaan, pengadaan, pengelolaan implementasi, hingga pengawasannya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemusatan data krusial tersebut sangat penting untuk menunjang keamanan serta penurunan kemungkinan redudansi data. Maka dapat diusulkan integrasi data keuangan dari seluruh OPD yang mengelola data keuangan di Pemerintah Kota Madiun. **Tabel 3.40** merupakan tabel usulan integrasi data keuangan Kota Madiun.

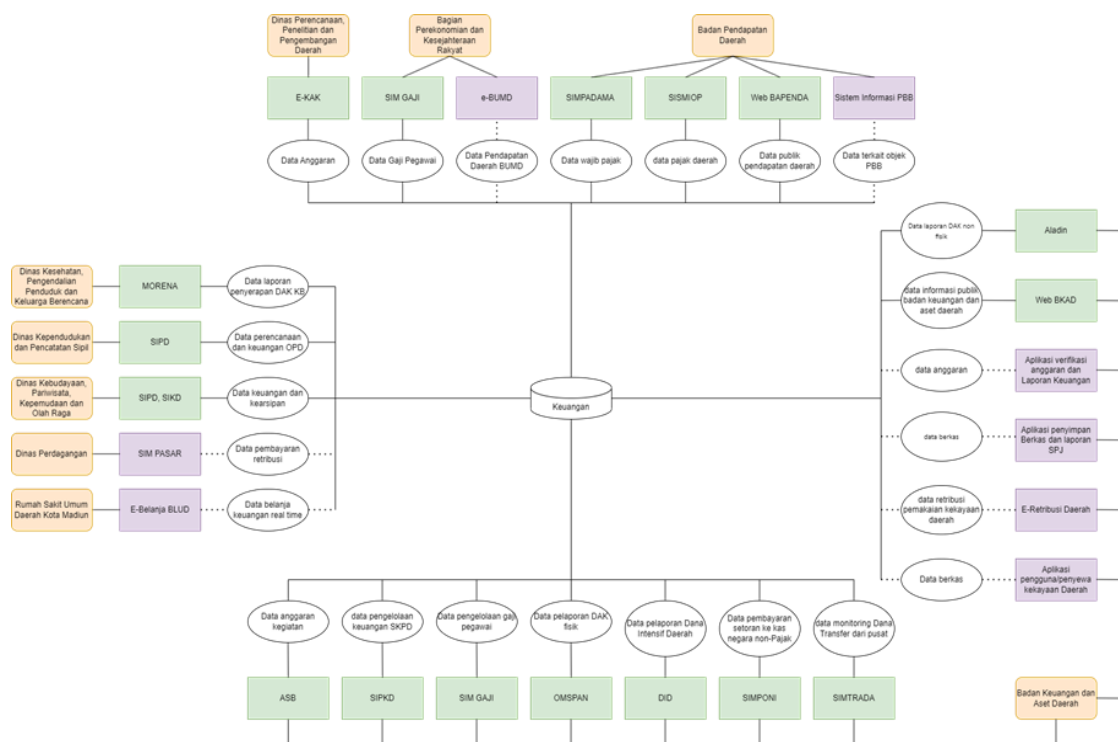
Tabel 3.40 Usulan Integrasi Data Keuangan

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi Eksisting	Tahun
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Data gaji pegawai	SIM GAJI	2023
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Data pendapatan daerah dari BUMD	e-BUMD	2024
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data anggaran berdasarkan sasaran kinerja pegawai	E-KAK	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data anggaran kegiatan	ASB (Analisis Standar Biaya) (https://sipkd.madiunkota.go.id/asb2023)	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data pengelolaan keuangan SKPD	SIPKD (http://sipkd.madiunkota.go.id/sipkd2022)	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data pengelolaan gaji pegawai	SIM GAJI	2024

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi Eksisting	Tahun
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data pelaporan DAK fisik	OMSPAN https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/	2024
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data pelaporan Dana Intensif Daerah (DID)	DID http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/lapordjpk/	2025
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data pembayaran setoran ke kas negara non pajak	SIMPONI https://www.simponi.kemenkeu.go.id/	2025
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data monitoring Dana Transfer Dari Pusat (Kemenkeu)	SIMTRADA (Sistem Informasi Transfer ke Daerah Dan Dana Desa)	2026
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data pelaporan DAK non fisik	Aladin	2026
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data informasi publik Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website BKAD (https://bkad.madiunkota.go.id/)	2027
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Seluruh hasil kegiatan yang telah dilaksanakan setiap OPD dan Data anggaran	Aplikasi Verifikasi anggaran dan Laporan Keuangan secara terintegrasi	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data berkas	Aplikasi Penyimpanan Berkas untuk Laporan dan SPJ	2024
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data terkait retribusi pemakaian kekayaan	E-Retribusi Daerah	2025

Kode OPD	OPD	Data yang dikelola	Aplikasi Eksisting	Tahun
		daerah		
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data berkas	Aplikasi Pengguna /penyewa Kekayaan Daerah	2027
10	Badan Pendapatan Daerah	Data wajib pajak dan objek pajak	SIMPADAMA	2023
10	Badan Pendapatan Daerah	Data pajak daerah	SISMIOP	2024
10	Badan Pendapatan Daerah	Data informasi publik Badan Pendapatan Daerah	Website BAPENDA (https://bapenda.madiunkota.go.id/)	2025
10	Badan Pendapatan Daerah	Data terkait objek PBB	Sistem Informasi PBB	2026
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data laporan penyerapan DAK KB	MORENA	2024
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data perencanaan dan keuangan OPD	SIPD	2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Data keuangan dan Kearsipan	SIPD, SIKD	2023
29	Dinas Perdagangan	Data pembayaran retribusi	SIM PASAR	2023
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Data belanja keuangan real time (Akrual)	E-Belanja BLUD	2023

Pada **Tabel 3.40** terdapat total 25 (dua puluh lima) data yang berkaitan dengan data keuangan. Data tersebut tersebar pada 9 (sembilan) OPD. Data keuangan yang disebutkan merupakan data yang memiliki keterkaitan dengan anggaran dan pendapatan Pemerintah Kota Madiun. Untuk pemetaan integrasi data keuangan dapat dilihat pada **Gambar 3.6**.



Gambar 3.6 Usulan Integrasi Data Keuangan

Gambar 3.6 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun memiliki 25 (dua puluh lima) aplikasi eksisting dan usulan yang perlu diintegrasikan keseluruhan data keuangan antar aplikasi yang dimiliki instansi tersebut. Pentingnya integrasi untuk data yang berkaitan dengan keuangan adalah untuk menjaga keamanan data tersebut, sehingga meminimalkan kesalahan pengolahan data ataupun data yang bias.

3.3.5.4 Usulan Integrasi Data Spasial

Data spasial merupakan data yang dikelola oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dimana data spasial ini akan diimplementasikan ke dalam Web-GIS. Web-GIS adalah gabungan antara design grafis pemetaan, peta digital dengan analisa geografis, pemrograman komputer, dan sebuah *database* yang saling terhubung menjadi satu bagian web design dan web pemetaan. Kebutuhan akan keberadaan serta penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, cepat dan juga dapat

dipertanggungjawabkan merupakan hal yang mampu memberikan dampak cukup signifikan terhadap pengoptimalan potensi dan pendayagunaan sumber daya wilayah Kota Madiun. **Tabel 3.41** merupakan usulan integrasi data geospasial.

Tabel 3.41 Usulan Integrasi Data Spasial

Kode OPD	OPD	Data Eksisting	Usulan Data	Tahun
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Data perdagangan		2023
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Data industri		2023
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Data kios/ruko/pasar		2023
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Data sarana keagamaan	Data BUMD dan Data inflasi	2023
6	Bagian Pemerintahan		Peta kondisi umum (Data persebaran desa)	2023
6	Bagian Pemerintahan		Peta Kondisi Umum (Data persebaran kecamatan)	2023
6	Bagian Pemerintahan		Peta Kondisi Umum (Data persebaran kelurahan)	2023
6	Bagian Pemerintahan		Data batas wilayah	2023
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Data persebaran bencana	2023
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian	Data fasilitas kesehatan		2023

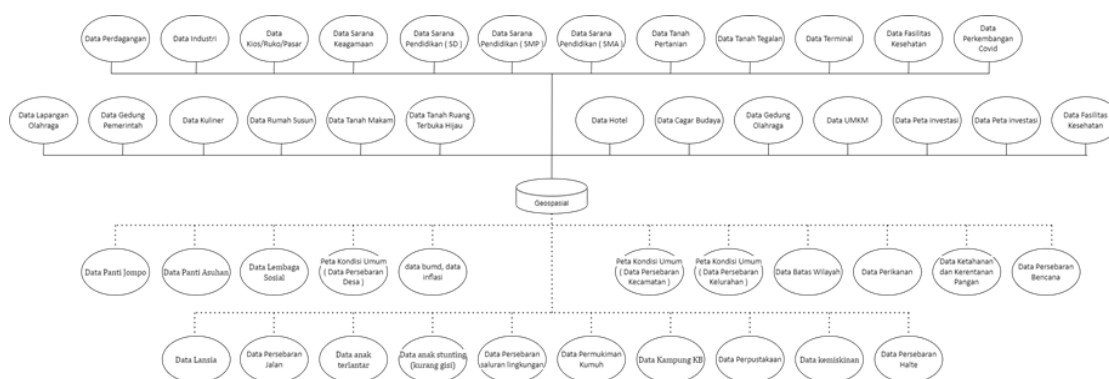
Kode OPD	OPD	Data Eksisting	Usulan Data	Tahun
	Penduduk dan Keluarga Berencana			
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data perkembangan Covid		2023
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Data persebaran jalan	2023
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data gedung Pemerintah		2023
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Data persebaran saluran lingkungan/limbah domestik rumah tangga	2022
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Data rumah susun		2023
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Data tanah makam		2023
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Data tanah Ruang Terbuka Hijau		2023
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Data Permukiman Kumuh	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Data Kampung KB	2023

Kode OPD	OPD	Data Eksisting	Usulan Data	Tahun
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Data Lembaga Sosial	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Data Panti Asuhan	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Data Panti Jompo	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Data kemiskinan	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Data lansia	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Data anak terlantar	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Data anak stunting (kurang gizi)	2023
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Data UMKM		2023
20	Dinas Pendidikan	Data Sarana Pendidikan (SD)		2023
20	Dinas Pendidikan	Data Sarana Pendidikan (SMP)		2023
20	Dinas Pendidikan	Data Sarana Pendidikan (SMA)		2023

Kode OPD	OPD	Data Eksisting	Usulan Data	Tahun
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data tanah pertanian		2023
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data tanah tegalan		2023
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Data Perikanan	2023
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2023
24	Dinas Perhubungan	Data Terminal		2023
24	Dinas Perhubungan		Data persebaran halte	2023
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data peta investasi		2023
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data peta investasi		2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Data Hotel		2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Data kuliner		2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Data lapangan olahraga		2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan	Data gedung olahraga		2023

Kode OPD	OPD	Data Eksisting	Usulan Data	Tahun
	Olah Raga			
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Data cagar budaya		2023
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Data Perpustakaan	2023
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Data fasilitas kesehatan		2023
34	Puskesmas Manguharjo	Data fasilitas kesehatan		2023
35	Puskesmas Sukosari	Data fasilitas kesehatan		2023

Tabel 3.41 diketahui bahwa Pemerintah Kota Madiun memiliki 27 (dua puluh tujuh) data spasial eksisting dan 21 (dua puluh satu) data spasial usulan yang terdapat pada 19 (sembilan belas) OPD, data ini merupakan data yang dapat diintegrasikan. Untuk menggambarkan usulan integrasi data spasial tersebut dapat dilihat pada **Gambar 3.7** usulan integrasi data geospasial.



Gambar 3.7 Usulan Integrasi Data Geospasial

Berdasarkan Gambar 3.7 diketahui bahwa belum adanya integrasi pada beberapa PD di lingkup Pemerintah Kota Madiun. Pemetaan data yang terintegrasi terhadap Web GIS adalah data yang memerlukan detail titik lokasi per wilayah, sehingga data dapat dilihat dengan jelas di setiap titik wilayah Kota Madiun berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Pada gambar tersebut diketahui bahwa terdapat 27 data terkait geospasial, untuk itu diusulkan untuk saling terintegrasi.

3.3.6 Identifikasi Usulan Tata Kelola Data dan Informasi

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Hal ini tertulis pada **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019** tentang Satu Data Indonesia. Berdasarkan kondisi eksisting Pemerintahan Kota Madiun belum memiliki manajemen data untuk pengolahan datanya. Perlu adanya Usulan Tata Kelola dan Satu Data Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia. **Tabel 3.42** memberikan penjabaran lengkap terkait Usulan Tata Kelola dan Satu Data Indonesia.

Tabel 3.42 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
1	Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten	Penyusunan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia yang terdiri dari Pembina Data, Walidata, Wali Data Pendukung, Produsen Data	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah	Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Perencanaan Data	Penentuan daftar Data yang memuat Produsen Data untuk masing-masing Data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data Penentuan daftar Data yang dijadikan Data prioritas	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
		Pembahasan daftar data yang telah disusun melalui forum satu data	
		Kesepakatan daftar data yang telah disusun melalui forum satu data	
4	Pengumpulan Data	<p>Pengumpulan data sesuai dengan Standar Data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia, dan jadwal pematkhiran Data atau rilis Data</p> <p>Penyampaian data yang telah dikumpulkan oleh produsen data kepada walidata</p>	- Seluruh PD
5	Pemeriksaan Data	<p>Pemeriksaan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia oleh wali data</p> <p>Pengembalian data yang tidak sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Wali Data</p> <p>Perbaikan data sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh produsen data</p>	<p>- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>- Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>- Seluruh SKPD</p>
6	Pengolahan data	<p>Penyiapan data input yang telah dilengkapi dengan metadata</p> <p>Perekaman/penyimpanan data secara digital maupun manual</p>	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	Penyebarluasan Data	<p>Pemberian akses data</p> <p>Pendistribusian data dalam bentuk media cetak</p>	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
		dan elektronik	Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pembatasan akses data tertentu oleh wali data	
		Pertukaran Data	

Berdasarkan **Tabel 3.42** pelaksanaan Satu Data Indonesia terdiri dari **7 (tujuh) tahapan** yaitu: penyusunan tim penyelenggaraan Satu Data Indonesia, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia, perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, pengolahan data dan penyebarluasan data. Untuk penanggung jawab penyelenggara Satu Data Indonesia terdapat **3 (tiga) penanggung jawab** yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku (**Pembina Data**), Dinas Komunikasi dan Informatika selaku (**Wali Data**), dan seluruh PD selaku (**Produsen Data**).

3.4 **Arsitektur Layanan SPBE**

Sub bab ini akan membahas terkait detail Arsitektur Layanan SPBE. Pembahasan tersebut terbagi menjadi 4 (empat) sub-bagian yaitu Identifikasi Referensi Arsitektur Layanan SPBE, Identifikasi Metadata Arsitektur Layanan SPBE, Identifikasi Gap Layanan SPBE dan Identifikasi Usulan Layanan SPBE.

3.4.1 **Identifikasi Referensi Arsitektur Layanan SPBE**

RAL merupakan sistem klasifikasi layanan pemerintah yang berasal dari proses bisnis tertentu. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan yang tepat akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif.

Domain layanan sebagaimana yang telah ditentukan pada Gambar 3.47, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 dan tingkat 2 merupakan struktur di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan RAL tingkat nasional yang terdiri dari 2 (dua) domain layanan

di tingkat 1 (pertama) dan 54 (lima puluh empat) area layanan di tingkat 2 (kedua). Referensi arsitektur layanan SPBE dijelaskan lebih detail pada **Tabel 3.43**.

Tabel 3.43 Referensi Arsitektur Layanan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
Layanan Publik (01)		
01.01	Pertahanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan negara
01.02	Hubungan Luar Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang hubungan luar negeri.
01.03	Kenegaraan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kenegaraan.
01.04	Ekonomi	Kegiatan pelayanan dalam bidang perekonomian.
01.05	Industri	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan industri.
01.06	Perdagangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perdagangan.
01.07	Pertanian	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian.
01.08	Perkebunan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perkebunan
01.09	Peternakan	Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan.
01.10	Perikanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan
01.11	Badan Usaha Milik Negara	Kegiatan pelayanan dalam pengelolaan badan usaha milik negara.
01.12	Investasi	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan penanaman modal
01.13	Koperasi	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan koperasi.
01.14	Usaha Kecil dan Menengah	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan usaha kecil dan menengah
01.15	Pariwisata	Kegiatan pelayanan dalam bidang

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
		kepariwisataan
01.16	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi.
01.17	Pekerjaan Umum	Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum.
01.18	Transmigrasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transmigrasi
01.19	Transportasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi.
01.20	Perumahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan
01.21	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
01.22	Pertanahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanahan
01.23	Kependudukan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan
01.24	Pemerintahan Daerah	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum
01.25	Kesehatan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan
01.26	Sosial	Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial.
01.27	Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
01.28	Hukum	Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum.
01.29	Keamanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan
01.30	Hak Asasi Manusia	Kegiatan pelayanan dalam bidang hak asasi manusia
01.31	Pendidikan	Kegiatan pelayanan dalam bidang

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
		pendidikan
01.32	Ketenagakerjaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan
01.33	Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
01.34	Pemuda	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda
01.35	Olahraga	Kegiatan pelayanan dalam bidang keolahragaan
01.36	Pertambangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertambangan.
01.37	Energi	Kegiatan pelayanan dalam bidang energi.
01.38	Kehutanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan
01.39	Kelautan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan.
01.40	Lingkungan Hidup	Kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup
01.41	Agama	Kegiatan pelayanan dalam bidang agama.
01.42	Kebudayaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan.
01.43	Informasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi.
01.44	Komunikasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi.
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)		
02.01	Dalam Negeri	Kegiatan pelayanan bidang dalam negeri.
02.02	Keuangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan negara
02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
02.04	Aparatur Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
		pengelolaan aparatur negara.
02.05	Kesekretariatan Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang sekretariat negara.
02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/instansi.
02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja
02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan
02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan.

3.4.2 Identifikasi Metadata Layanan SPBE

Metadata arsitektur layanan SPBE berisi informasi mengenai luaran atau hasil dari sebuah/beberapa urusan pemerintahan sebagai induknya. Entitas metadata arsitektur layanan SPBE berhubungan dengan arsitektur aplikasi SPBE sebagai perangkat yang memberikan layanan tersebut. Pada entitas ini tidak terdapat hubungan internal sehingga tidak perlu dilakukan dekomposisi. Berdasarkan hasil survei yang terdapat pada Bab 1, dapat diketahui bahwa hampir seluruh PD pada Pemerintah Kota Madiun sudah memiliki layanan. Dari data yang dihimpun diketahui bahwa terdapat **322 (tiga ratus dua puluh dua) layanan** yang tersebar dalam 34 (tiga puluh empat) dari 35 (tiga puluh lima) PD Pemerintah Kota Madiun. Hasil identifikasi layanan tersebut dapat dipetakan sesuai dengan taksonomi Kode Model Referensi Layanan dan Referensi Arsitektur Layanan SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Penjabaran metadata layanan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun termuat dalam Identifikasi Gap Layanan SPBE.

Identifikasi GAP Layanan SPBE dilakukan dengan cara membandingkan kondisi eksisting Pemerintahan Kota Madiun dengan kondisi ideal dari suatu layanan. Beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur kesenjangan GAP yaitu Layanan administrasi, Layanan Publik, Layanan Publik Sektoral, Ketersediaan layanan, Akses layanan dan Ketersediaan layanan terhadap program. Analisis Gap dapat dilihat pada **tabel 3.44**.

Tabel 3.44 Analisis GAP

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Ketersediaan layanan	Terdapat 322 layanan yang tersebar pada 34 PD.	Seluruh instansi Pemerintahan memiliki layanan dan atau mendukung layanan PD lain.	Terdapat GAP karena ada 1 PD yang tidak memiliki layanan yaitu Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.
Akses layanan	Berdasarkan 322 layanan yang ada di Kota Madiun, terdapat 119 layanan yang memiliki akses secara <i>online</i> , 137 layanan dengan akses manual, dan 66 layanan dengan akses online dan manual.	Layanan didukung aplikasi umum berbagi pakai dan atau aplikasi khusus (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE)	Perlu dilakukan perubahan terhadap 137 layanan dengan akses manual menjadi <i>online</i> .
Layanan administrasi	Dari 10 layanan administrasi berbasis elektronik pada PERPRES Nomor 95 Tahun 2018, dapat diketahui dari semua	Layanan didukung dengan aplikasi bagi pakai (Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang SPBE)	Kondisi ideal telah terpenuhi.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	layanan telah didukung oleh aplikasi.		
Layanan Publik	Berdasarkan 3 (tiga) jenis layanan publik berbasis elektronik, layanan eksisting yang ada di Pemerintahan Kota Madiun telah didukung oleh aplikasi pusat maupun daerah.	Penggunaan aplikasi bagi pakai untuk mendukung layanan dan Pemerintah dapat menyempurnakan dengan pembangunan aplikasi khusus jika belum tersedia aplikasi umum berbagi pakai (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE)	Pengusulan perubahan pada aplikasi layanan publik internal daerah untuk dapat menjadi bagi pakai dengan PD lain.
Layanan Publik Sektoral	Terdapat 67 layanan pada publik sektoral. Selain itu, terdapat 5 sektoral yang tidak memiliki layanan dan didukung aplikasi yaitu pengajaran, energi, sumber daya alam, pariwisata, dan pemuda & olahraga.	Menggunakan aplikasi bagi pakai dan Pemerintah dapat menyempurnakan dengan pembangunan aplikasi khusus jika belum tersedia aplikasi umum berbagi pakai (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE)	Perlu dilakukan pengusulan layanan dan aplikasi terkait sektor yang masih belum didukung layanan maupun aplikasi.
Ketersediaan layanan terhadap	Berdasarkan data analisis terdapat 365 program.	Seluruh program yang tercantum pada RPJMD	Perlu dilakukan penambahan terhadap

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
program	Terdapat 124 layanan yang mendukung program. Sedangkan terdapat 241 layanan yang tidak didukung oleh program.	telah didukung oleh layanan Pemerintah Kota Madiun	layanan agar program RPJMD dapat terealisasi secara keseluruhan

3.4.3 Identifikasi Usulan Layanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, layanan SPBE merupakan serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Selanjutnya, pada bagian ini akan dilakukan identifikasi usulan layanan SPBE yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok usulan, meliputi Usulan Layanan Administrasi Berbasis Elektronik, Usulan Layanan Publik Berbasis Elektronik SPBE dan Usulan Layanan Terhadap Program.

3.4.3.1 Usulan Layanan Administrasi dan Layanan Publik SPBE

Usulan Layanan Administrasi dan Publik merupakan usulan berdasarkan hasil analisis atau identifikasi kondisi eksisting berdasarkan hasil survei Pemerintahan Kota Madiun yang ada pada Bab 1 Kondisi Eksisting dan Gap Analisis Pemerintah Kota Madiun. Pengusulan layanan SPBE ini berdasarkan layanan administrasi dan publik yang ada pemerintahan Kota Madiun yang masih belum didukung oleh aplikasi atau masih menggunakan aplikasi yang belum terintegrasi dengan yang lain.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat 2 (dua) kelompok layanan SPBE yaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Aspek layanan administrasi pemerintah memiliki 10 (sepuluh) indikator layanan, antara lain:

- a. Perencanaan;
- b. Penganggaran;
- c. Keuangan;
- d. Pengadaan barang dan jasa;
- e. Kepegawaian;
- f. Kearsipan Dinamis;
- g. Pengelolaan barang milik Daerah;
- h. Pengawasan Internal Pemerintah;
- i. Akuntabilitas kinerja organisasi; dan
- j. Kinerja Pegawai.

Sedangkan aspek layanan publik berbasis elektronik yang dianalisis terdiri dari:

- a. Layanan Pengaduan Layanan Publik;
- b. Layanan Data Terbuka;
- c. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- d. Layanan Publik Sektoral (Pendidikan, Pengajaran, Pekerjaan dan Usaha, Tempat Tinggal, Komunikasi dan Informasi, dst).

Berdasarkan daftar layanan yang telah dilakukan identifikasi kondisi eksisting beserta analisis gap, maka guna meningkatkan layanan diusulkan aplikasi pendukung untuk layanan administrasi dan layanan publik baik berupa usulan aplikasi baru ataupun usulan pengembangan dari aplikasi yang telah ada sebelumnya. Usulan aplikasi yang ada terdiri dari penggunaan aplikasi pusat dan aplikasi daerah. Usulan aplikasi layanan administrasi dan layanan publik dapat dilihat pada pada **Tabel 3.45**.

Tabel 3.45 Usulan Layanan Administrasi dan Layanan Publik

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Aplikasi Usulan	OPD Pemilik Layanan
Layanan administrasi				
1	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
Layanan publik sektoral				
1	Pengajaran	RAL 01.31 Pendidikan	Pengembangan Aplikasi LI	Dinas Pendidikan
2	Pariwisata	RAL 01.43 Informasi	Aplikasi Pelayanan Publik	Dinas Kebudayaan,

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Aplikasi Usulan	OPD Pemilik Layanan
			Disbudparpora (E-Disbudpora)	Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	Pemuda dan Olahraga	RAL 01.43 Informasi	Sistem Informasi Kepemudaan Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
4	Pemuda dan Olahraga	RAL 01.43 Informasi	Aplikasi Pelayanan Publik Disbudparpora (E-Disbudpora)	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
5	Perhubungan dan lalu lintas	RAL 01.19 Transportasi	Aplikasi E-Hub	Dinas Perhubungan
6	Perhubungan dan lalu lintas	RAL 01.19 Transportasi	Sistem Informasi Pelayanan Angkutan Umum dan Pelajar	Dinas Perhubungan

Pada Tabel 3.45 terdapat 5 (lima) usulan terhadap layanan publik sektoral, yaitu pada layanan pengajaran, pariwisata, pemuda dan olahraga, perhubungan dan lalu lintas.

3.4.3.2 Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD

Usulan layanan terhadap program ini diperoleh berdasarkan identifikasi kondisi eksisting, yang mana untuk nama rogram diidentifikasi berdasarkan RPJMD pada Pemerintah Kota Madiun. Total usulan layanan berdasarkan program yang tertuang dalam RPJMD berjumlah **100 (seratus) layanan** yang mendukung program masing-masing PD. Penjelasan terkait usulan layanan terhadap program dapat dilihat berdasarkan Tabel 3.46.

Tabel 3.46 Usulan Layanan Terhadap Program

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan
4	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial Di Bidang Ekonomi
6	Bagian Pemerintahan	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Layanan Penataan Daerah Otonom Baru
6	Bagian Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Layanan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
6	Bagian Pemerintahan	Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah Pemerintah Daerah	Layanan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah
8	Badan Perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Program Pelayanan Peningkatan Kemampuan Kinerja Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Semua OPD	Layanan Konsultasi Terkait Tupoksi Bendahara Penerimaan Dan Pengeluaran OPD
9	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Program Pelayanan Peningkatan Kemampuan Kinerja Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Semua OPD	Layanan Konsultasi Terkait Tupoksi Pengurus Dan Penyimpan Barang

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan
9	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Program Penyuluhan Kepada Masyarakat tentang Tata Cara Pemakaian (Sewa, Kerjasama) Kekayaan Pemerintah Daerah Kota Madiun	Layanan Cara Memperoleh Rekomendasi Pemakaian (Sewa, Kerjasama) Kekayaan Pemerintah Daerah Kota Madiun
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Layanan Kemitraan Pengembangan Wawasan
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	Layanan Peningkatan Pemahaman Ideologi Dan HAM Serta Pencegahan Konflik Sosial
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	Layanan Pendidikan Politik Masyarakat Dan Orkemas
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Layanan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
13	Inspektorat Daerah	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Layanan Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan
		(APIP)	Intern Pemerintah (APIP)
13	Inspektorat Daerah	Program Perumusan, Penyempurnaan Dan Penataan Kebijakan dan Sisdur Pembinaan Dan Pengawasan	Layanan Perumusan, Penyempurnaan Dan Penataan Kebijakan dan Sisdur Pembinaan dan Pengawasan
13	Inspektorat Daerah	Program Pendampingan Dan Asistensi	Layanan Pendampingan dan Asistensi
14	Sekretariat DPRD	Program Layanan Perundang Undangan, Dokumentasi Dan Rapat	Layanan Perundang Undangan, Dokumentasi Dan Rapat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan	Program Pengendalian Penduduk	Layanan Pengendalian Penduduk

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan
	Keluarga Berencana		
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Layanan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Layanan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Layanan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-Gorong	Layanan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-Gorong
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Banjir	Layanan Pengendalian Banjir
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Layanan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
16	Dinas Pekerjaan	Program Pengembangan	Layanan Persebaran Jaringan Perpipaan

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan
	Umum Dan Penataan Ruang	Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	Layanan Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Layanan Penataan Bangunan dan Lingkungannya
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Layanan Penyelenggaraan Jalan
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang
17	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
17	Dinas Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Layanan Lingkungan Sehat Perumahan

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan
	Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Permukiman	Permukiman
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Sosial	Layanan Pemberdayaan Sosial
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Layanan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Kesempatan Perluasan Kerja	Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
20	Dinas Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Layanan Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Non Formal	Layanan Pendidikan Non Formal

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan
20	Dinas Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Layanan Pengembangan Kurikulum
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Layanan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Layanan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Layanan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Layanan Penanganan Kerawanan Pangan
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Layanan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Layanan Penyuluhan Pertanian

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Layanan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Layanan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Layanan Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Layanan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Layanan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan	Layanan Peningkatan Pendidikan,

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan
		Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Layanan Pengelolaan Persampahan
24	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Layanan Peningkatan Pelayanan Angkutan
24	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
25	Dinas Informatika Dan Komunikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika
25	Dinas Informatika Dan Komunikasi	Program Aplikasi Informatika	Layanan Aplikasi Informatika
25	Dinas Informatika Dan Komunikasi	Program Sosialisasi Di Bidang Cukai	Layanan Sosialisasi Di Bidang Cukai
25	Dinas Informatika Dan Komunikasi	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Layanan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
25	Dinas Informatika Dan Komunikasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Layanan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Layanan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Layanan Pengembangan Kesenian Tradisional
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Layanan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Layanan Pemasaran Pariwisata
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan	Layanan Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Layanan Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan
	Dan Olahraga		
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan	Layanan Pembinaan Perpustakaan
29	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
29	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Layanan Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat
29	Dinas Perdagangan	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Layanan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
29	Dinas Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
29	Dinas Perdagangan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Layanan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
30	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Layanan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
30	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
31	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk &	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Layanan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan
	Kb		
31	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Kb	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan Peningkatan Pelayanan BLUD
31	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Kb	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan
32	Kecamatan Manguharjo	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Layanan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan
32	Kecamatan Manguharjo	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
32	Kecamatan Manguharjo	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Layanan Koordinasi, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum
32	Kecamatan Manguharjo	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
32	Kecamatan Manguharjo	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Layanan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan
34	Kecamatan Kartoharjo	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
34	Kecamatan Kartoharjo	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Layanan Penyelenggaraan Kelurahan
34	Kecamatan Kartoharjo	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Layanan Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum

Terdapat total 106 (seratus enam) usulan layanan yang mendukung program pada 25 (dua puluh lima) PD yang ada di Pemerintahan Kota Madiun. Usulan layanan merupakan identifikasi terhadap program masing-masing PD yang tertuang dalam RPJMD. Sebagaimana program yang terdapat pada masing-masing PD dapat didukung oleh layanan, guna memberikan pelayanan baik kepada masyarakat maupun internal PD.

BAB IV

ARSITEKTUR APLIKASI SPBE

4.1 Pendahuluan

Pada bab ini Subtansi ini akan dibahas mengenai latar belakang penyusunan arsitektur SPBE pada domain aplikasi serta penjelasan hasil penilaian SPBE yang di dapatkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Kemudian akan dijelaskan pula terkait penjabaran struktur arsitektur aplikasi SPBE, referensi arsitektur aplikasi SPBE, pengembangan struktur aplikasi dan ruang lingkup pembahasan pada Bab 4 arsitektur aplikasi SPBE.

4.1.1 Pengertian Aplikasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE menjelaskan bahwa **Aplikasi SPBE** adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Aplikasi SPBE terdiri dari Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. **Aplikasi Umum** merupakan aplikasi SPBE yang dalam penggunaannya dapat digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Aplikasi umum dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian atau Pemerintah Pusat agar dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam membantu manajemen dan melaksanakan proses bisnis pemerintah daerah agar data yang dikelola terkumpul menjadi satu dan mudah dalam pengelolaan data. **Aplikasi Khusus** merupakan aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintahan Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintahan Daerah lain. Aplikasi khusus dibangun untuk mendukung proses bisnis atau pelayanan dengan kebutuhan tertentu.

4.1.2 Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE

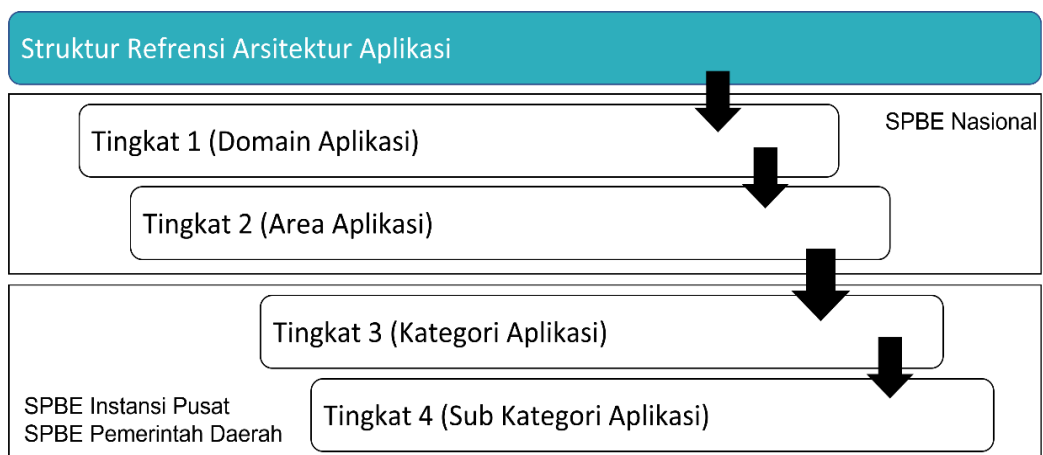
Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan bahwa posisi aplikasi dalam SPBE yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dimana domain arsitektur aplikasi menempati posisi di bawah domain layanan yang menunjukkan bahwa aplikasi sebagai media pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan dari instansi pemerintah. **Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) SPBE** adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. Referensi arsitektur menjadi acuan untuk penyusunan domain arsitektur secara nasional, sehingga Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) akan menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan aplikasi yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur TIK nasional. Berdasarkan informasi yang dihasilkan dari proses pemetaan tersebut, akan membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi ataupun redundansi, peluang untuk berbagi pakai, ataupun untuk penggunaan kembali. Pemetaan domain aplikasi SPBE yang menggunakan RAA akan dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur TIK nasional.

Dalam domain arsitektur Aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi Aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur Aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. **Domain aplikasi**, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;

- b. **Area aplikasi**, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. **Kategori aplikasi**, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- d. **Sub kategori aplikasi**, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (empat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Proses klasifikasi dan identifikasi pada struktur domain di tingkat nasional akan menjadi arah kebijakan arsitektur SPBE nasional, melalui referensi arsitektur aplikasi dan menjadi acuan pada pembentukan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya ilustrasi struktur RAA SPBE dapat dilihat pada **Gambar 4.1**.



Gambar 4.1 Arsitektur Aplikasi SPBE

4.1.3 Referensi Aplikasi SPBE

Domain Aplikasi SPBE memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (satu) dan tingkat 2 (dua) merupakan struktur di tingkat nasional. Sedangkan tingkat 3 (tiga) dan tingkat 4 (empat) merupakan struktur di tingkat Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah. Penjelasan mengenai taksonomi referensi arsitektur aplikasi SPBE dijabarkan pada

Tabel 4.1

Tabel 4.1 Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
Aplikasi Umum (01)		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misis Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
		berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.

Dalam penjelasan domain arsitektur aplikasi ini, dibutuhkan entitas metadata arsitektur aplikasi SPBE yang memiliki keterkaitan dengan domain lain. Untuk menganalisis arsitektur aplikasi dalam penerapan SPBE digunakan dokumen acuan yaitu **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022** tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didalamnya terdapat metadata yang sudah ditentukan informasi atau data apa saja yang dibutuhkan. Secara umum metadata aplikasi meliputi atribut metadata yang dijabarkan pada **Tabel 4.2** sebagai berikut.

Tabel 4.2 Atribut Metadata Aplikasi SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi
4	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung.
5	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi
6	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata layanan.
7	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan.
9	Inputan Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan (diinputkan)
10	Supplier Data	Merupakan identifikasi terhadap nama penghasil data.
11	Luaran Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dihasilkan
12	Customer Data	Merupakan identifikasi terhadap pengguna data
13	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (Desktop; Web;

No.	Nama Atribut	Keterangan
		Cloud; atau <i>Mobile</i>)
14	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server
15	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (Open Source/Proprietary)
16	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi
17	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau Framework yang digunakan oleh aplikasi
18	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi.
19	Unit Pengembang	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi
20	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan
21	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

Atribut pada Tabel 4.2 digunakan untuk melakukan analisis dari metadata Aplikasi SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun.

4.1.4 Ruang Lingkup

Terdapat 6 (enam) domain dalam SPBE yaitu, Domain Layanan SPBE, Domain Proses Bisnis, Domain Data dan Informasi, Domain Aplikasi SPBE, Domain Infrastruktur SPBE dan Domain Keamanan SPBE seperti halnya yang termuat dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018**.

Domain yang akan dibahas pada bab ini adalah Domain Aplikasi SPBE. Berikut ini akan dijabarkan pembahasan pada domain Aplikasi SPBE:

- a. Identifikasi Referensi Aplikasi SPBE;
- b. Identifikasi Metadata Aplikasi SPBE;
- c. Identifikasi Gap Aplikasi SPBE;
- d. Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Administrasi dan Layanan Publik Berbasis elektronik;
- e. Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Manual;
- f. Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Survei;
- g. Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Pengembangan; dan
- h. Identifikasi Usulan aplikasi berdasarkan hasil pemetaan dari tupoksi masing-masing OPD terhadap kelompok urusan.

4.1.5 Hasil Evaluasi SPBE

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2021 didapatkan bahwa tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE Kota Madiun mendapatkan nilai 2 (dua) yang berarti dalam kategori **“cukup”**. Kelemahan pada Substansi Indikator Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE dimana data dukung yang dilampirkan belum menggambarkan dokumen pelaksanaan penyusunan Aplikasi lengkap dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pemeliharaan, sesuai SOP. Didapatkan juga bahwa Pemerintah Kota Madiun belum memiliki daftar aplikasi yang dimiliki oleh seluruh PD.

4.2 Metodologi

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai tahapan dalam perencanaan usulan domain aplikasi yang dimulai dari identifikasi referensi aplikasi, metadata aplikasi dan gap aplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi usulan aplikasi yang terbagi menjadi 6 (enam) jenis serta identifikasi usulan integrasi aplikasi.

4.2.1 Identifikasi Metadata Aplikasi Eksisting SPBE

Analisis kondisi eksisting dilakukan untuk melakukan pendataan terkait aplikasi eksisting yang dimiliki oleh seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Madiun. Data eksisting aplikasi ini didapatkan dari hasil survei *online* dan survei lapangan yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya.

4.2.2 Identifikasi Gap Aplikasi SPBE

Setelah dilakukan analisis kondisi eksisting, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis gap untuk mengetahui perbandingan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal dari aplikasi SPBE. Analisis gap atau kesenjangan dilakukan dengan cara mengidentifikasi seluruh aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah pada Kota Madiun. Analisis gap aplikasi ditentukan dengan membandingkan antara kinerja eksisting Pemerintah Kota Madiun saat ini dengan kondisi ideal yang tercantum pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Informasi Pemerintah Berbasis Elektronik.

Pada analisis gap aplikasi SPBE dilakukan pemetaan seluruh aplikasi yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan cara memetakan data aplikasi eksisting ke dalam beberapa identifikasi yang dapat dilakukan seperti pemetaan berdasarkan Program RPJMD Pemerintah Kota Madiun dan juga berdasarkan bidang yang ada pada setiap PD di Kota Madiun. Setelah analisis GAP aplikasi telah teridentifikasi, selanjutnya dapat dilakukan analisis usulan aplikasi untuk seluruh PD di Kota Madiun.

4.2.3 Analisis Usulan Aplikasi SPBE

Penyusunan analisis usulan aplikasi SPBE terbagi menjadi 5 kategori identifikasi dan ditambah dengan identifikasi terkait usulan integrasi aplikasi yang akan dijabarkan.

4.2.3.1 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan

Administrasi dan Layanan Publik Berbasis elektronik

Pemetaan aplikasi eksisting dilakukan berdasarkan 10 (sepuluh) layanan administrasi berbasis elektronik dan 28 (dua puluh delapan) layanan publik sektoral berbasis elektronik yang terdapat pada **Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018** tentang SPBE. Dari hasil pemetaan tersebut, maka akan terlihat layanan mana yang belum didukung oleh aplikasi dan selanjutnya dapat dilakukan analisis untuk mendapatkan usulan aplikasi.

4.2.3.2 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Manual

Analisis usulan aplikasi berdasarkan layanan manual dilakukan dengan memetakan seluruh aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun terhadap seluruh layanan yang dimiliki setiap PD di Pemerintah Kota Madiun. Setelah dilakukan pemetaan maka dapat diketahui layanan yang berjalan secara manual dan selanjutnya dapat dianalisis untuk mendapatkan usulan aplikasi untuk mendukung berjalannya layanan agar berjalan lebih efektif dan efisien.

4.2.3.3 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Survei

Analisis usulan aplikasi SPBE yang berdasarkan hasil survei didapatkan dari hasil pengisian web survei maupun wawancara secara langsung dengan narasumber setiap PD Pemerintah Kota Madiun. Usulan hasil survei akan dipertimbangkan untuk menjadi rekomendasi usulan aplikasi SPBE karena dapat mewakili beberapa permasalahan dari masing-masing PD yang telah disampaikan pada saat pengumpulan data.

4.2.3.4 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Pengembangan

Analisis usulan aplikasi berdasarkan pengembangan merupakan usulan aplikasi yang mengambil dari aplikasi yang sudah ada namun dilakukan pengembangan dari aplikasi

tersebut karena terdapat fitur yang perlu ditambahkan atau memungkinkan penggabungan beberapa aplikasi untuk diusulkan menjadi satu kesatuan aplikasi yang terintegrasi.

4.2.3.5 Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan hasil pemetaan dari tupoksi masing-masing OPD terhadap kelompok urusan

Pada bagian ini dilakukan pemetaan tupoksi dari masing-masing PD terhadap aplikasi SPBE eksisting, layanan, serta program RPJMD. Setiap PD akan dipetakan berdasarkan urusan, bidang, serta seksinya. Pemetaan ini akan menghasilkan gap mengenai seksi yang belum memiliki dukungan aplikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Setelah diidentifikasi maka dapat dilihat tupoksi yang seharusnya dapat didukung aplikasi namun belum tersedia aplikasi pendukung sehingga dapat diusulkan aplikasi untuk mendukung kelancaran berjalannya tupoksi tersebut.

4.2.3.6 Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi

Identifikasi usulan integrasi aplikasi dilakukan dengan analisis dari aplikasi eksisting dan juga aplikasi usulan. Penentuan integrasi didasarkan pada kebutuhan aplikasi dan juga usulan dari kebutuhan PD saat dilakukan survei.

4.3 Arsitektur Aplikasi SPBE

Sub bab ini menjelaskan terkait proses penyusunan Arsitektur Aplikasi SPBE, dimulai dengan identifikasi metadata aplikasi eksisting SPBE, penentuan Gap aplikasi, dan usulan aplikasi SPBE berdasarkan jenis layanan dari referensi arsitektur aplikasi SPBE, usulan aplikasi pada saat survei, usulan aplikasi berdasarkan layanan manual, hingga tugas pokok dan fungsi setiap OPD.

4.3.1 Identifikasi Metadata Aplikasi Eksisting SPBE

Metadata aplikasi dianalisis berdasarkan **Arsitektur SPBE Nasional**, dokumen ini dijadikan sebagai acuan dalam penerapan SPBE yang berkaitan dengan Aplikasi, maka didalamnya terdapat

metadata yang sudah ditentukan informasi atau data apa saja yang dibutuhkan. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadi suatu informasi yang mudah untuk dikelola, ditemukan, dan digunakan kembali.

4.3.2 Identifikasi Gap Aplikasi SPBE

Setelah melakukan analisis kondisi saat ini dari Aplikasi SPBE maka dilakukan analisis ideal. Agar mendapatkan gap analisis/ kesenjangan aplikasi. Analisis gap atau kesenjangan dilakukan dengan cara mengidentifikasi seluruh aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah pada Kota.

Analisis gap aplikasi SPBE dilakukan pemetaan seluruh aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah dengan cara memetakan data aplikasi eksisting ke dalam beberapa identifikasi yang dapat dilakukan seperti pemetaan berdasarkan Program RPJMD Pemerintah Kota Madiun dan juga berdasarkan bidang yang ada pada setiap PD di Kota Madiun. Setelah analisis GAP aplikasi telah teridentifikasi, selanjutnya dapat dilakukan yaitu analisis usulan aplikasi untuk seluruh PD di Kota Madiun. Setelah analisis GAP aplikasi telah teridentifikasi, selanjutnya dapat dilakukan yaitu analisis usulan aplikasi untuk seluruh PD di Kota Madiun. Berikut penjabaran hasil analisis gap yang secara detail dapat dilihat pada **Tabel 4.3**

Tabel 4.3 Analisa *Gap* Aplikasi SPBE

Kode PD	Nama PD	GAP
1	Bagian Organisasi	Terdapat 6 program RPJMD, 3 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Subkoordinator dan semua telah didukung aplikasi
2	Bagian Hukum	Terdapat 7 program RPJMD, 3 program belum didukung aplikasi.

Kode PD	Nama PD	GAP
		Memiliki 3 Subkoordinator, 2 Subkoordinator belum didukung aplikasi
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Terdapat 2 program RPJMD, 1 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Subkoordinator, 1 Subkoordinator belum didukung aplikasi
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Terdapat 11 program RPJMD, 4 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Subkoordinator, 2 Subkoordinator belum didukung aplikasi
5	Bagian Umum	Terdapat 3 program RPJMD, seluruh program telah didukung aplikasi. Memiliki 2 Subkoordinator, 1 Subkoordinator belum didukung aplikasi
6	Bagian Pemerintahan	Terdapat 8 program RPJMD, 4 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Subkoordinator, 2 Subkoordinator belum didukung aplikasi
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terdapat 7 program RPJMD, 3 program belum didukung aplikasi. Memiliki 1 Subkoordinator dan telah didukung aplikasi dan 3 Seksi yang belum didukung aplikasi

Kode PD	Nama PD	GAP
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terdapat 4 program RPJMD dan belum didukung aplikasi. Memiliki 5 Bidang, 3 Bidang belum didukung aplikasi
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terdapat 11 program RPJMD, 2 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
10	Badan Pendapatan Daerah	Terdapat 8 program RPJMD, 1 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Bidang, 1 Bidang belum didukung aplikasi
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terdapat 12 program RPJMD, 7 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, 1 Bidang belum didukung aplikasi
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terdapat 11 program RPJMD, 7 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, 2 Bidang belum didukung aplikasi
13	Inspektorat Daerah	Terdapat 10 program RPJMD, 4 program belum didukung aplikasi. Memiliki 5 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
14	Sekretariat DPRD	Terdapat 7 program RPJMD, 2 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Bidang, 1 Bidang belum

Kode PD	Nama PD	GAP
		didukung aplikasi
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terdapat 17 program RPJMD, 3 program belum didukung aplikasi. Memiliki 5 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terdapat 19 program RPJMD, 13 program belum didukung aplikasi. Memiliki 5 Bidang, 2 Bidang belum didukung aplikasi
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terdapat 14 program RPJMD, 8 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Bidang, 2 Bidang belum didukung aplikasi
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terdapat 19 program RPJMD, 9 program belum didukung aplikasi. Memiliki 5 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Terdapat 20 program RPJMD, 12 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
20	Dinas Pendidikan	Terdapat 12 program RPJMD, 5 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, 1 Bidang belum didukung aplikasi
21	Dinas Ketahanan Pangan dan	Terdapat 21 program RPJMD, 17 program belum didukung aplikasi.

Kode PD	Nama PD	GAP
	Pertanian	Memiliki 4 Bidang, 3 Bidang belum didukung aplikasi
22	Dinas Lingkungan Hidup	Terdapat 17 program RPJMD, 11 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, 2 Bidang belum didukung aplikasi
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terdapat 11 program RPJMD, 1 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, 1 Bidang belum didukung aplikasi
24	Dinas Perhubungan	Terdapat 8 program RPJMD, 3 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terdapat 13 program RPJMD, 3 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terdapat 15 program RPJMD, 4 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Terdapat 16 program RPJMD, 12 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, 3 Bidang belum didukung aplikasi

Kode PD	Nama PD	GAP
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terdapat 11 program RPJMD, 2 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
29	Dinas Perdagangan	Terdapat 13 program RPJMD, 6 program belum didukung aplikasi. Memiliki 3 Bidang, 1 Bidang belum didukung aplikasi
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Terdapat 11 program RPJMD, 5 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Terdapat 6 program RPJMD, 3 program belum didukung aplikasi. Memiliki 4 Bidang, seluruh Bidang sudah didukung aplikasi
32	Kecamatan Manguharjo	Terdapat 13 program RPJMD, 8 program belum didukung aplikasi. Memiliki 1 Bidang dan 4 Seksi, hanya Bidang Sekretariat yang didukung aplikasi
33	Kecamatan Kartoharjo	Terdapat 13 program RPJMD, 7 program belum didukung aplikasi. Memiliki 1 Bidang dan 4 Seksi, Bidang dan 1 Seksi sudah didukung aplikasi
34	Puskesmas Mangunharjo	Tidak memiliki program RPJMD karena dibawah naungan Dinas Kesehatan. Menggunakan aplikasi

Kode PD	Nama PD	GAP
		dari Daerah, Pusat dan Dinas Kesehatan saja, tidak memiliki aplikasi mandiri
35	Puskesmas Sukosari	Tidak memiliki program RPJMD karena dibawah naungan Dinas Kesehatan. Menggunakan aplikasi dari Daerah, Pusat dan Dinas Kesehatan saja, tidak memiliki aplikasi mandiri

Berdasarkan analisis GAP tersebut didapatkan bahwa seluruh PD pada Pemerintah Kota Madiun untuk Bidang dan Program RPJMD belum secara keseluruhan ~~telah~~ didukung aplikasi. Perangkat Daerah yang seluruh Bidang nya sudah didukung aplikasi diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagian Organisasi;
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
- g. Dinas Perhubungan;
- h. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- k. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk PD yang seluruh Program RPJMD yang diampu sudah didukung aplikasi adalah Bagian Umum, dan untuk PD yang seluruh Program RPJMD yang diampu belum didukung aplikasi adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

4.3.3 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Administrasi dan Layanan Publik Berbasis elektronik

Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Administrasi dan Layanan Publik Berbasis elektronik dilakukan dengan cara pemetaan aplikasi eksisting ke dalam 10 (sepuluh) layanan administrasi berbasis elektronik dan 28 (dua puluh delapan) layanan publik sektoral berbasis elektronik yang terdapat pada **Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Dari hasil pemetaan tersebut, maka dapat diidentifikasi kelompok layanan mana saja yang belum didukung dengan aplikasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab I, terdapat **6 (enam) layanan publik sektoral** yang belum didukung layanan dan aplikasi **diantaranya yaitu, layanan sektor pendidikan, layanan sektor energi, layanan sektor perhubungan dan lalu lintas, layanan sektor sumber daya alam, layanan sektor pariwisata, dan layanan sektor pemuda dan olahraga**. Sedangkan layanan administrasi pemerintahan sudah didukung aplikasi untuk seluruh jenis layanan. Sehingga, usulan aplikasi hanya difokuskan untuk mendukung layanan publik sektoral yang belum didukung aplikasi, yaitu terdapat sejumlah **5 (lima) usulan aplikasi** sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 4.4** sebagai berikut.

Tabel 4.4 Usulan Aplikasi Pendukung Layanan Administrasi dan Publik Berbasis Elektronik

Layanan Administrasi				
No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Aplikasi Usulan	OPD Pemilik Layanan
Tidak ada usulan aplikasi				
Layanan Publik Sektoral				
No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Aplikasi Usulan	OPD Pemilik Layanan
1	Pengajaran	RAL 01.31 Pendidikan	Pengembangan Aplikasi LI	Dinas Pendidikan
2	Pariwisata	RAL 01.43 Informasi	Aplikasi Pelayanan Publik Disbudparpora (E-Disbudpora)	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	Pemuda dan Olahraga			
3	Pemuda dan Olahraga	RAL 01.43 Informasi	Sistem Informasi Kepemudaan Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
5	Perhubungan dan lalu lintas	RAL 01.19 Transportasi	Aplikasi E-Hub	Dinas Perhubungan
6	Perhubungan dan lalu lintas	RAL 01.19 Transportasi	Sistem Informasi Pelayanan	Dinas Perhubungan

			Angkutan Umum dan Pelajar	
--	--	--	---------------------------------	--

Dari Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 5 (lima) usulan aplikasi berdasarkan aplikasi berdasarkan 4 (empat) jenis layanan publik sektoral, yaitu Pengembangan Aplikasi LI untuk jenis layanan pengajaran, Aplikasi E-Disbudpora untuk jenis layanan Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga, serta Sistem Informasi Kepemudaan Kota Madiun untuk jenis layanan Pemuda dan Olahraga. Sedangkan bagi 2 (dua) jenis layanan lainnya yaitu, layanan sektor energi dan layanan sektor sumber daya alam, tidak adanya pengusulan aplikasi dikarenakan tidak ada tugas pokok dan fungsi OPD yang bertanggungjawab atas layanan tersebut.

4.3.4 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Manual

Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan layanan manual dilakukan dengan cara memetakan layanan dan aplikasi pendukung sehingga dapat ditinjau layanan apa saja yang masih berjalan secara manual, Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I bahwa terdapat **322 (tiga ratus dua puluh dua) layanan** yang tersebar dalam 35 PD dan sebanyak **137 (seratus tiga puluh tujuh) layanan** masih berjalan secara manual, Dalam pengusulan aplikasi, tidak semua layanan diberikan usulan aplikasi baru. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan untuk menggunakan usulan aplikasi yang sama untuk beberapa layanan yang serupa atau dapat dikelompokkan menjadi satu, seperti contohnya usulan Aplikasi Bantuan Hukum dan HAM yang mendukung 2 (dua) layanan yaitu, Pelayanan Penyelesaian Sengketa Hukum dan Pelayanan Penelitian Perjanjian Kerjasama, Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan, selain itu pada dasarnya masih banyak aplikasi lainnya yang mendukung beberapa layanan. Untuk lebih jelasnya, usulan aplikasi untuk tiap layanan dapat dilihat secara detail pada **Tabel 4.5** sebagai berikut.

Tabel 4.5 Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Manual

No	Kode OPD	Nama OPD	Layanan yang didukung	Aplikasi pendukung Usulan
1	2	Bagian Hukum	Pelayanan Penyelesaian Sengketa Hukum, Pelayanan Penelitian Perjanjian Kerjasama, Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan	Aplikasi Bantuan Hukum dan HAM (https://sidbank.um.bphn.go.id/)
2	2	Bagian Hukum	Pelayanan Penelitian Produk Hukum, Pelayanan Register Penomoran dan Pengiriman Produk Hukum	Pengembangan JDIH
3	4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Pelayanan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Ibadah	Sistem Informasi Pengelolaan Hibah
4	4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Pelayanan Proses Pendaftaran Seleksi BUMD, Pelayanan Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	e-BUMD
5	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan Evakuasi / Penanggulangan Bencana, layanan Penanganan Bencana Alam (Banjir, Angin Puting Beliung)	Sistem Informasi Kebencanaan
6	9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Pengembangan SIM GAJI

No	Kode OPD	Nama OPD	Layanan yang didukung	Aplikasi pendukung Usulan
7	9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pelayanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	E-Retribusi Daerah
8	11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Legalisir	Aplikasi Legalisir dan Keabsahan <i>Online</i>
9	11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Permohonan Izin Perkawinan dan Pembinaan Pra Nikah/Pasca Nikah, Layanan Permohonan Izin Perceraian, Layanan Pengajuan Tunjangan Istri/Suami dan Anak, Layanan Permohonan Kartu Taspen, Layanan Permohonan Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional Keluar daerah	Aplikasi Permohonan /Perizinan/Pengajuan Kepegawaian
10	12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pendataan Keberadaan Ormas	SIORMAS
11	15	Dinas Kesehatan, Pengendalian	Layanan penerbitan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum,	Aplikasi Layanan Publik DINKES (Pengembangan

No	Kode OPD	Nama OPD	Layanan yang didukung	Aplikasi pendukung Usulan
		Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Penerbitan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Jasaboga, Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi rumah Makan/Restoran, Pelayanan Penerbitan Sertifikasi laik Sehat Hotel, Layanan Penerbitan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Layanan Penerbitan rekomendasi Ijin Praktik Dokter/Dokter Gigi	E-SIP - Surat Izin Praktek)
12	16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelayanan Jasa Rekomendasi Penurunan Trotoar, Pelayanan Rekomendasi Kelayakan Fungsi Bangunan	Aplikasi Layanan Publik PUPR
13	16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelayanan Jasa Verifikasi dan Konsultasi Perencanaan Bangunan	SIMTARUBANG
14	18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar / Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Pelayanan Penerbitan	Aplikasi Layanan Publik Dinsos P3A

No	Kode OPD	Nama OPD	Layanan yang didukung	Aplikasi pendukung Usulan
		Anak	Surat Rekomendasi Adopsi Anak dari Keluarga, Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Adopsi Anak dari Panti Asuhan, Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah, Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pengumpulan Sumbangan dipergunakan di dalam Wilayah Kota Madiun, Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Usulan Gelar Perintis Kemerdekaan, Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Gelar Pahlawan, Pelayanan Penyediaan Alat Bantu, Pelayanan Penerbitan SPT Pendampingan Respon Kasus Anak, Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Gelandangan Psikotik dan Tempat Tinggal Tidak Tetap,	

No	Kode OPD	Nama OPD	Layanan yang didukung	Aplikasi pendukung Usulan
			Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pelayanan Lansia Terlantar	
15	18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran ORSOS/Yayasan, Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Ulang ORSOS/Yayasan	SI ORSOS
16	19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	pengembangan si-CAKER
17	21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Tani Ternak, Pelayanan Kesehatan Hewan, Pelayanan Rekomendasi Kredit Ternak, Pelayanan Rekomendasi Surat Ijin Praktek Dokter Hewan, Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan, Pelayanan Fasilitas Rumah Potong Hewan	SIM HEWAN
18	21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pelayanan Sewa Sarana Prasarana Pasar Ikan, Pelayanan Rekomendasi Pelayanan Kredit Petani	SIM IKAN

No	Kode OPD	Nama OPD	Layanan yang didukung	Aplikasi pendukung Usulan
			Ikan, Pelayanan Pembelian Benih Ikan, Pelayanan Rekomendasi Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pelayanan Bantuan Benih Ikan	
19	21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pelayanan Permintaan Bantuan Pestisida Pertanian, Pelayanan Surat Pengantar Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM PUAP) Ke Bank, Pelayanan Rekomendasi Kredit Usaha Tani, Pelayanan Fasilitas Pengajuan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Pelayanan Verifikasi dan Validasi Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Distribusi Pupuk Bersubsidi	SIM TANI
20	27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan	Pelayanan Sewa Tempat Rekreasi dan Olahraga, Pelayanan Registrasi Nomor Induk Kesenian	E-Disbudpora

No	Kode OPD	Nama OPD	Layanan yang didukung	Aplikasi pendukung Usulan
		dan Olah Raga	Pelayanan Perpanjangan Nomor Induk Kesenian, Pelayanan Perizinan Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam rangka Kerjasama Luar Negeri, Pelayanan Permintaan Informasi Mengenai Kesenian Atau pun Sejarah, Pelayanan Penerbitan Nomor Registrasi Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat Pelayanan Membawa Cagar Budaya Keluar Kota dalam Satu Provinsi, Pelayanan Pemberian Perizinan Usaha Perfilman di Bidang Pembuatan Film, Pengedaran Film, Penjualan Film, Penyewaan Film (VCD,DVD), Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film melalui Media Elektronik dan	

No	Kode OPD	Nama OPD	Layanan yang didukung	Aplikasi pendukung Usulan
			Tempat Hiburan Pelayanan Perizinan usaha terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing	
21	30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Layanan Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	SISKAMLING

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa tidak semua layanan manual dilakukan pengusulan aplikasi. Hal ini dikarenakan setiap usulan aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan OPD yang mana tidak semua layanan dapat berjalan secara efektif bila menggunakan aplikasi. Dari total 322 (tiga ratus dua puluh dua) layanan manual didapatkan **21 (dua puluh satu) usulan aplikasi** yang mendukung sebanyak **96 (sembilan puluh enam) layanan** dari **13 (tiga belas) PD**. Dari 21 (dua puluh satu) usulan aplikasi tersebut terdapat **18 (delapan belas) aplikasi baru** aplikasi didapatkan dari hasil survei dan 15 (lima belas) aplikasi berdasarkan analisis dan **3 (tiga) aplikasi pengembangan** dari aplikasi yang sudah ada. PD yang memiliki usulan aplikasi berdasarkan layanan manual paling banyak adalah **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** sebanyak 3 (tiga) usulan aplikasi. Sedangkan aplikasi yang mendukung layanan paling banyak adalah **Aplikasi E-Disbudpora** dan **Aplikasi Pelayanan Publik Disbudpar** yang mendukung 10 (sepuluh) layanan.

4.3.5 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Survei

Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan hasil survei didapatkan dari survei lapangan yang dilaksanakan pada 35 (tiga

puluh lima) OPD di Kota Madiun dimana setiap PD telah menyampaikan usulan aplikasi berdasarkan kebutuhan PD. Usulan tersebut dianalisis seperti penggabungan beberapa usulan aplikasi dengan fungsi sejenis menjadi satu aplikasi baru dan usulan aplikasi yang masih dapat dikembangkan pada aplikasi yang sudah ada. Usulan aplikasi berdasarkan hasil survei dapat dilihat pada **Tabel 4.6** sebagai berikut.

Tabel 4.6 Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Survei

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
1	1	Bagian Organisasi	E-SOP	Aplikasi sebagai media dalam proses Penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan Alur pekerjaan masing-masing Subkoordinator/Esselon IV
2	1	Bagian Organisasi	Aplikasi SUKMA	Satu Aplikasi yang dapat disebarakan kepada masyarakat guna untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah Kota Madiun. Dapat dibuatkan modul (page) tiap OPD sesuai kebutuhan masing-masing, akan tetapi seluruh data SKM Pemerintah Daerah akan terkumpul dalam satu aplikasi tersebut. Tiap OPD juga memiliki akses sebagai admin untuk melihat data

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
				SKM yang telah masuk untuk selanjutnya akan dilaksanakan analisis dan menghasilkan Nilai IKM.
3	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Kebencanaan	Fungsi Pusat Data dan Informasi Kebencanaan adalah sebagai penerima, pengolah, dan pendistribusi informasi. Dalam rangka mengoperasionalkan mengoptimalkan pencatatan peristiwa bencana perlu dicatat sesuai dengan ciri-ciri setiap peristiwa bencana yang datanya diperlukan untuk membuat hubungan antar variabel dalam mengembangkan statistik runtun waktu, seperti, tren jangka panjang dari dampak bencana. Dampak bencana yang dihimpun ke dalam database adalah dampak korban jiwa dan nominal kerugian harta benda. Untuk mengakomodir hal tersebut maka dibuatlah Sistem Informasi Kebencanaan berbasis WEB yang dapat diakses oleh semua orang

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
				dan operator piket Pusdalops BPBD Kota Madiun.
4	8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Aplikasi penyusunan dokumen perencanaan OPD (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja)	Untuk memberikan data dan informasi terkait data kinerja dan anggaran mengenai sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
5	8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Aplikasi Pengendalian dan Informasi Pembangunan	Memantau Perencanaan penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) di seluruh OPD
6	8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Aplikasi E-KAK	Aplikasi tindak lanjut dari E-KAK untuk melihat APBD, merupakan aplikasi yg dapat memfasilitasi pembahasan RDP APBD di DPRD antara tingkat eksekutif dan legislatif
7	9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi verifikasi anggaran dan Laporan Keuangan secara terintegrasi	Aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses verifikasi data anggaran dan digunakan untuk pengumpulan data hasil kegiatan dan laporan pertanggungjawaban Anggaran
8	9	Badan Keuangan	Aplikasi	Belum ada aplikasi untuk

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
		dan Aset Daerah	Penyimpanan Berkas untuk Laporan dan SPJ	upload bukti dukung seperti saat SPJ, sehingga masih berupa dokumen fisik yang disimpan pada OPD. sehingga Ketika BPK meminta bukti selalu datang ke OPD (seharusnya dapat dilihat melalui aplikasi)
9	9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Pengguna /Penyewa Kekayaan Daerah	Daftar pengguna /penyewa Kekayaan Daerah (ruko, sawah, bangunan gedung , gudang dll) masih disimpan secara manual baik Data pribadi maupun kelengkapan administrasinya. Dengan adanya aplikasi ini harapannya data dapat tersimpan secara <i>online</i> maupun proses pengguna atau penyewaan juga dapat dilakukan secara <i>online</i> .
10	9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Penerimaan Dan Pengeluaran Barang Habis Pakai	Penerimaan dan pengeluaran habis pakai masih dilaporkan secara manual oleh masing masing OPD. Harapannya dengan adanya aplikasi pelaporan ini dapat dilakukan secara <i>online</i> untuk mempermudah prosesnya

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
11	10	Badan Pendapatan Daerah	Sistem Informasi PBB	Mengembangkan sistem informasi terkait PBB untuk mendukung seluruh pelayanan yang berkaitan dengan PBB agar lebih efektif dan efisien secara pelayanan maupun data. Aplikasi ini juga dibuat untuk mempermudah dan sebagai panduan bagi masyarakat untuk cara cek pajak PBB secara <i>online</i> , untuk mengetahui status pembayaran, status piutang, informasi SPPT, tempat pembayaran, cek status berkas, saran dan masukan atau pengaduan wajib pajak langsung masuk ke pejabat terkait sehingga penanganan pengaduan lebih cepat sehingga meningkatkan kepuasan pelayanan masyarakat.
12	11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Seleksi Terbuka	Aplikasi Selter digunakan untuk pendaftaran seleksi terbuka JPTP yang mana hasil dari seleksi tersebut dapat terintegrasi dengan SIK (Pejabat terpilih terinput di SIK melalui aplikasi Selter)

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
13	13	Inspektorat Daerah	SINAWASDA	Aplikasi untuk pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang dimandatkan kepada Inspektorat Kota Madiun. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai media pengolahan data hasil pengawasan untuk memudahkan penyajian informasi
14	15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aplikasi Pemadanan NIK Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID)	Aplikasi Integrasi data NIK Dukcapil dan NIK peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang dapat memadankan dengan cepat ribuan database NIK peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) dengan data NIK dari Dukcapil. Saat ini masih manual dicek satu-satu
15	16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aplikasi Layanan Publik PUPR	Sistem Informasi untuk memudahkan pelayanan publik PUPR, seperti memberikan rekomendasi penurunan trotoar, rekomendasi kelayakan fungsi bangunan, dsb.
16	18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Puskesmas <i>Mobile</i>	Puskesmas dibangun dengan tujuan untuk memudahkan warga atau fakir miskin untuk mendapatkan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
		Anak		perlindungan sosial serta lepas dari kemiskinan. Diperlukan Pembuatan Aplikasi Puskesmas berbasis <i>mobile</i> secara mandiri dan terintegrasi dengan Puskesmas Pusat.
17	18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi SIKSDROID	Aplikasi SIKSDROID merupakan aplikasi SIKS-NG dalam versi <i>mobile</i> . Diperlukan pembuatan aplikasi SIKSDROID untuk aplikasi <i>mobile</i> dikarenakan data verifikasi lebih lengkap dan lebih mudah dalam proses verifikasi data di lapangan. Aplikasi ini seperti SIKSDROID dari pusat yang saat ini sudah dinonaktifkan. Diperlukan Pembuatann Aplikasi SIKSDROID secara mandiri dan terintegrasi dengan SIKS-NG milik Pusat.
18	18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi Laporan Kebencanaan dan Penyaluran Bantuan Bencana	Aplikasi Laporan Kebencanaan dan Penyaluran Bantuan Bencana digunakan untuk pendataan korban bencana alam serta informasi penyaluran bantuan bencana

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
19	21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aplikasi Manajemen Kepegawaian Non ASN Internal DKPP	Digunakan untuk mememanajemen kepegawaian Non ASN internal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
20	21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SIM HEWAN	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola seluruh informasi dan data maupun proses pelayanan berkaitan dengan Hewan, seperti Penerbitan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan), pemrosesan Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Tani Ternak pemrosesan dokumen Rekomendasi Kredit Ternak, pemrosesan dokumen Rekomendasi Surat Ijin Praktek Dokter Hewan, Fasilitas Rumah Potong Hewan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan hewan dan kebutuhan ternak
21	24	Dinas Perhubungan	Pengembangan E-Kir	Penambahan Fitur untuk Upload berkas persyaratan Uji KIR
22	26	Dinas Penanaman Modal dan	Pengembangan WEBGIS DPMPSTP	Aplikasi berbasis Web GIS yang memberikan informasi terkait peta persebaran

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu		perizinan terbit per lokasi. Pengembangan dilakukan dengan penyempurnaan peta zonasi
23	26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan MASS Madiun	Pengembangan MASS Madiun dengan penambahan modul terkait Chatbot sebagai media berkomunikasi dengan publik
24	28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan iMadiun	iMadiun merupakan aplikasi Perpustakaan Digital iMadiun. Pengembangan dilakukan dengan integrasi data NIK dengan iMadiun untuk memeriksa keabsahan <i>user</i> . Dikembangkan juga untuk mendata pustakawan dan perpustakaan yang ada di Kota Madiun serta sebagai media untuk menyampaikan informasi terkait pelatihan dan pembinaan pustakawan
25	29	Dinas Perdagangan	SIM PASAR	Pembelian barang di pasar bisa melalui expedisi (<i>marketplace</i> khusus untuk pasar) Pengelolaan penghimpunan/ pendataan informasi terkait

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
				pengelolaan pasar (kelas, retribusi, jenis bangunan);
26	30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	pengembangan SIM SATPOL PP	SIM SATPOL PP dikembangkan dengan menampilkan data rekapitulasi penanganan ringan seperti ODGJ serta kebakaran yang dapat dilihat masyarakat
27	31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	E-Aset	Digunakan untuk manajemen aset dan pengajuan pemeliharaan barang RSUD Kota Madiun
28	31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Telemedicine RSUD Kota Madiun	Aplikasi yang digunakan untuk pelayanan konsultasi atau pemeriksaan pasien secara <i>online</i> pada RSUD Kota Madiun. Aplikasi ini juga digunakan untuk menyajikan informasi terkait ketersediaan fasilitas rumah sakit layaknya kamar inap, ICU, UGD, serta ambulans di Rumah Sakit kepada masyarakat
29	31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	E-Monas	Untuk pencatatan kematian dan kelahiran secara <i>real time</i> dan terintegrasi dengan data kependudukan
30	31	Rumah Sakit Umum Daerah	E-Belanja BLUD	Digunakan manajemen dan pencatatan belanja

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
		Kota Madiun		keuangan

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat **30 (tiga puluh) usulan aplikasi** dari hasil survei yang didapatkan. Dari usulan aplikasi tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) usulan aplikasi hasil survei berdasarkan analisis untuk mendukung tupoksi, 3 (tiga) aplikasi hasil survei untuk mendukung layanan manual, dan 5 (lima) pengembangan aplikasi. Terdapat **17 (tujuh belas) PD** yang telah mengusulkan aplikasi, dimana PD yang paling banyak mengusulkan aplikasi **adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah** serta **Rumah Sakit Umum Kota Madiun** yaitu sebanyak **4 (empat) aplikasi**.

4.3.6 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Pengembangan

Identifikasi usulan pengembangan aplikasi didapatkan dari hasil survei dan analisis terhadap layanan dan SOTK PD Kota Madiun. Analisis dilakukan dengan melihat seberapa besar fungsi dan fitur dari aplikasi eksisting dapat bekerja dan layanan serta tupoksi yang saling berkaitan sehingga dapat dikelompokkan menjadi satu aplikasi. Untuk lebih lengkapnya penjelasan usulan pengembangan aplikasi dapat dilihat pada **Tabel 4.7** sebagai berikut.

Tabel 4.7 Usulan Aplikasi Berdasarkan Pengembangan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
1	2	Bagian Hukum	Pengembangan JDIH	JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
				berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat. Pengembangan aplikasi JDIIH dapat dilakukan dengan menambahkan fitur yang memungkinkan dapat melakukan pelayanan koreksi produk hukum daerah secara <i>online</i> , Perangkat daerah yang mengajukan koreksi produk hukum tidak perlu lagi datang secara langsung ke Bagian Hukum, tetapi pengajuan koreksi Rancangan produk hukum dengan mengirimkan soft copy file melalui aplikasi untuk kemudian dilakukan koreksi secara berjenjang oleh korektor dan menerima kembali hasil tanpa banyak menghabiskan waktu dan tenaga

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
				sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu dikembangkan juga fitur Registrasi Penomoran dan Pengiriman Produk Hukum secara <i>online</i>
2	2	Bagian Hukum	Pengembangan <i>Website</i> Bagian Hukum	<i>Website</i> sebagai sarana informasi dapat dikembangkan lagi dengan memberikan informasi terkait pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan keluarga sadar hukum. Dapat juga dipublikasi materi terkait pembinaan keluarga sadar hukum tersebut.
3	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembangan <i>Website</i> BPBD	Menambahkan fitur yang dapat mengisi formulir dan <i>upload</i> berkas pengajuan pelayanan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, sehingga publik tidak harus datang ke kantor
4	8	Badan Perencanaan,	Pengembangan <i>Website</i>	Memanfaatkan <i>website</i> Bapedalitbangda untuk

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bapedalitbangda	mengakomodir aspirasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
5	8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Aplikasi E-KAK	Aplikasi tindak lanjut dari E-KAK untuk melihat APBD. Aplikasi yg dapat memfasilitasi pembahasan RDP APBD pada DPRD antara eksekutif dan legislatif
6	9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengembangan SIM GAJI	Mengembangkan aplikasi SIM Gaji dari aplikasi Desktop menjadi <i>Website</i> agar mudah diakses, serta menambahkan modul untuk mengelola proses permohonan dan penerbitan SKPP secara <i>online</i>
7	10	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan SIMPADAMA	Mengembangkan SIMPADAMA sebagai sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah yang dapat membantu mengolah seluruh data PAD. Aplikasi dikembangkan dengan mengintegrasikan seluruh data yang termasuk pendapatan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
				daerah lainnya (selain pajak daerah) contohnya seperti retribusi
8	12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan Website Bangkesbangpol	Mengembangkan <i>website</i> Bangkesbangpol sebagai media dalam mengedukasi masyarakat terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sejarah kebangsaan
9	19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	pengembangan si-CAKER	Aplikasi diperuntukkan untuk pelayanan perselisihan hubungan industrial para pihak (Perusahaan Pengusaha dengan pekerja buruh). Aplikasi ini akan menjadi jembatan guna mendukung saling keterbukaan dalam penyelesaian masalah dan bisa menjadi rujukan untuk proses selanjutnya. Selain itu dapat juga ditambahkan informasi ketenagakerjaan Kota Madiun seperti data UMR, serikat pekerja, dasar hukum yang

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
				berlaku).
10	19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Pengembangan E-Kami	<p>Pengembangan aplikasi E-Kami dengan menambahkan modul sebagai aplikasi yang berfungsi untuk mengelola segala urusan terkait Koperasi, UMKM dan usaha Mikro. Selain itu pengembangan aplikasi juga dapat memberikan berbagai manfaat lainnya, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Memudahkan proses pendaftaran dan verifikasi Koperasi, UMKM dan usaha Mikro. -Memudah pencatatan aktivitas kegiatan Koperasi, UMKM dan usaha Mikro. -Memudahkan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual produk Koperasi, UMKM dan usaha Mikro. -Memudahkan pengenalan serta pemasaran produk yang dikelola oleh Koperasi,

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
				<p>UMKM dan usaha Mikro.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Monitoring dan evaluasi penilaian Koperasi, UMKM dan usaha Mikro. -Informasi pelatihan atau <i>workshop</i> terkait Koperasi, UMKM dan usaha Mikro -Proses perizinan atau penerbitan surat terkait Koperasi, UMKM dan usaha Mikro -Menampilkan data transaksi penjualan produk IKM
11	20	Dinas Pendidikan	Pengembangan Aplikasi LI	<p>Mengembangkan aplikasi LI yang dapat diakses oleh siswa dan guru, serta sebagai aplikasi pengelolaan administrasi sekolah (PAUD, TK, SD, SMP, SMU, SMK, MI, MTs, MA, dll.). Pengelolaan yang dilakukan mulai dari pendataan (siswa, mata pelajaran, jadwal pelajaran, dll.), operasional kegiatan belajar mengajar seperti mengunggah file materi</p>

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
				dan tugas serta pengembangan kurikulum sekolah. Selain itu, aplikasi LI juga perlu dikembangkan agar terintegrasi dengan aplikasi DAPODIK.
12	22	Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan Website DLH	Mengembangkan <i>website</i> DLH dengan menambahkan modul yang berisikan informasi terkait Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
13	24	Dinas Perhubungan	Pengembangan E-Kir	Penambahan Fitur untuk <i>Upload</i> berkas persyaratan Uji Kir
14	26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan WEBGIS DPMPSTP	Aplikasi berbasis Web GIS yang memberikan informasi terkait peta persebaran perizinan terbit per lokasi. Pengembangan dilakukan dengan penyempurnaan peta zonasi
15	26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Pengembangan MASS Madiun	Pengembangan MASS Madiun dengan penambahan modul terkait <i>Chatbot</i> sebagai

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi
		Terpadu Satu Pintu		media berkomunikasi dengan publik
16	28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan iMadiun	iMadiun merupakan aplikasi Perpustakaan Digital iMadiun. Pengembangan dilakukan dengan Integrasi data NIK dengan iMadiun untuk memeriksa keabsahan user. Dikembangkan juga untuk mendata pustakawan dan perpustakaan yang ada di Kota Madiun serta sebagai media untuk menyampaikan informasi terkait pelatihan dan pembinaan pustakawan

Berdasarkan Tabel 4.7 didapatkan **16 (enam belas) usulan aplikasi** pengembangan dari aplikasi yang sudah ada untuk **12 PD** di Pemerintah Kota Madiun. Dari usulan pengembangan aplikasi tersebut terdapat 5 (lima) pengembangan aplikasi yang didapatkan dari hasil Survei, 3 (tiga) pengembangan aplikasi untuk mendukung layanan manual, dan 8 (delapan) pengembangan aplikasi lainnya didapatkan berdasarkan analisis.

Dari 12 (dua belas) PD terdapat 4 (empat) PD yang memiliki usulan pengembangan aplikasi paling banyak, yaitu masing-masing 2 (dua) usulan pengembangan aplikasi, sementara 10 (sepuluh) PD lainnya diusulkan 1 (satu)

pengembangan aplikasi. PD yang mendapatkan 2 (dua) usulan pengembangan aplikasi diantaranya:

- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah harus mengembangkan *Website* BAPEDALITBANGDA dan aplikasi E-KAK.
- b. Bagian Hukum mengembangkan aplikasi JDIH dan *website* Bagian Hukum.
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengembangkan WEBGIS DPMPTSP dan MASS Madiun.
- d. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah mengembangkan aplikasi SI-CAKER dan aplikasi E-KAMI.

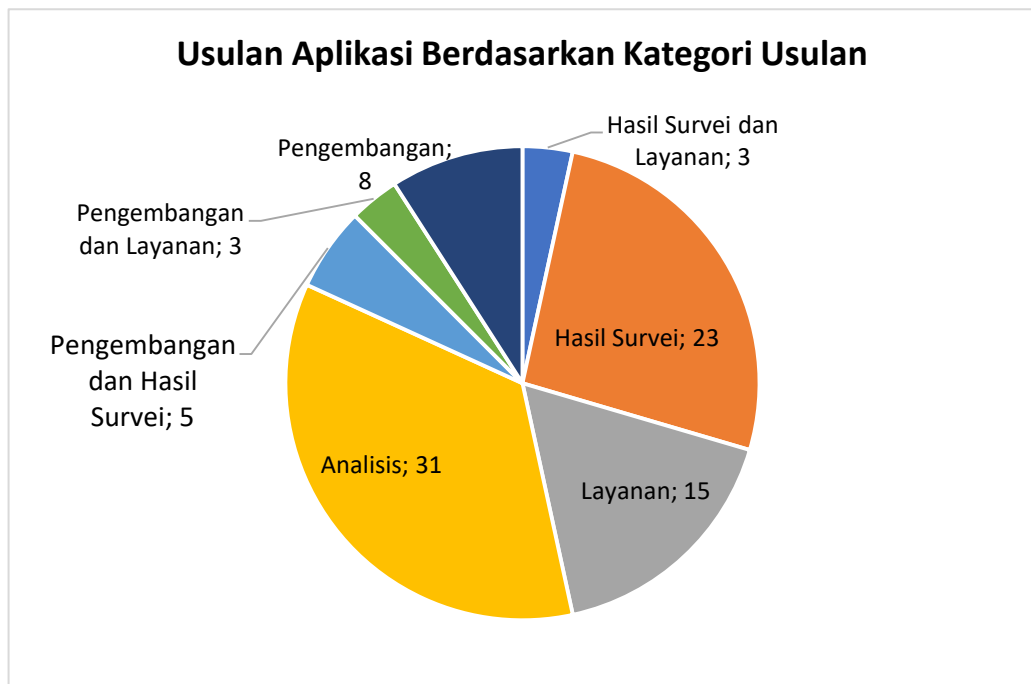
4.3.7 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Pemetaan dari Tupoksi masing-masing OPD terhadap Kelompok Urusan

Setelah dilakukan identifikasi, didapatkan **total 87 (delapan puluh tujuh) usulan aplikasi**. Usulan aplikasi tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- a. **Hasil Survei dan Layanan** yaitu usulan aplikasi berdasarkan hasil survei yang mendukung layanan manual **(3 aplikasi)**
- b. **Hasil Survei**, yaitu usulan aplikasi berdasarkan hasil survei yang mendukung tupoksi **(21 aplikasi)**
- c. **Layanan**, yaitu usulan aplikasi berdasarkan analisis untuk mendukung layanan manual **(12 aplikasi)**
- d. **Analisis**, yaitu usulan aplikasi berdasarkan analisis yang mendukung tupoksi **(26 aplikasi)**
- e. **Pengembangan dan Hasil Survei**, yaitu pengembangan aplikasi berdasarkan hasil survei **(5 aplikasi)**
- f. **Pengembangan dan Layanan**, yaitu pengembangan aplikasi yang mendukung layanan manual **(4 aplikasi)**

- g. **Pengembangan**, yaitu pengembangan aplikasi berdasarkan analisis yang mendukung tupoksi (**8 aplikasi**)
- h. **Pusat dan Hasil Survei**, yaitu usulan aplikasi aplikasi pusat berdasarkan Hasil Survei yang mendukung tupoksi (**1 aplikasi**)
- i. **Pusat dan Analisis**, yaitu usulan aplikasi aplikasi pusat berdasarkan Analisis yang mendukung tupoksi (**5 aplikasi**)
- j. **Pusat dan Layanan**, yaitu usulan aplikasi aplikasi pusat yang mendukung layanan manual (**2 aplikasi**)

Secara detail persentase jumlah aplikasi untuk masing-masing kategori dapat dilihat pada **Gambar 4.2**.



Gambar 4.2 Usulan Aplikasi berdasarkan Kategori Usulan

Berdasarkan Gambar 4.2, terdapat 87 (delapan puluh tujuh) usulan aplikasi yang didalamnya terdapat **8 aplikasi pusat** yang kemudian terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu 1 (satu) aplikasi berdasarkan hasil survei, 2 (dua) aplikasi untuk

mendukung layanan manual, dan 5 (lima) aplikasi berdasarkan hasil analisis.

Dari 35 (tiga puluh lima) PD yang ada di Kota Madiun terdapat 5 (lima) PD yang tidak diusulkan penambahan aplikasi, yaitu **Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Kartoharjo, Puskesmas Mangunharjo, dan Puskesmas Sukosari**. Selanjutnya seluruh usulan aplikasi akan dipetakan berdasarkan PD penanggung jawab aplikasi. Data usulan yang dihasilkan kemudian dipetakan ke dalam identifikasi bidang, program, layanan, dan aplikasi eksisting. Identifikasi dilakukan dengan melakukan pemetaan urusan, serta tupoksi masing-masing PD untuk menghasilkan data dan informasi. Sebelumnya, aplikasi eksisting harus dipetakan terlebih dulu pada pemetaan data dan informasi yang telah dilakukan dengan tujuan agar aplikasi yang diusulkan nantinya tidak tumpang tindih dengan aplikasi eksisting yang dimiliki masing-masing PD. Selain itu identifikasi ini dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi untuk mendukung seluruh urusan hingga bidang dapat didukung oleh aplikasi. Hasilnya dapat melihat bidang mana yang sudah dan belum didukung dengan penggunaan aplikasi.

Pembahasan lebih lanjut terkait usulan aplikasi untuk tiap PD akan dijelaskan secara rinci pada substansi di bawah ini.

4.3.7.1 Bagian Organisasi

Bagian Organisasi memiliki 3 (tiga) Subkoordinator yang membantu proses bisnis utama dari PD, dimana seluruh Subkoordinator telah didukung dengan adanya aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Bagian Organisasi terdapat total 6 (enam) program yang mana 4 (empat) program belum didukung oleh aplikasi. Setelah dilakukan analisis

didapatkan 2 (dua) usulan aplikasi yang selanjutnya dijabarkan pada **Tabel 4.8** sebagai berikut.

Tabel 4.8 Usulan Aplikasi Bagian Organisasi

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
E-SOP	Aplikasi sebagai media dalam proses Penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan Alur pekerjaan masing-masing Subkoordinator/Esselon IV	RAA 01.02	<i>Website</i>	Seluruh OPD
Aplikasi SUKMA	Aplikasi yang dapat disebarakan kepada masyarakat guna untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah Kota Madiun. Dapat dibuatkan modul tiap OPD sesuai kebutuhan masing-masing, akan tetapi seluruh data SKM Pemerintah Daerah akan terkumpul dalam satu aplikasi tersebut. Tiap OPD juga memiliki akses sebagai admin untuk melihat data SKM yang telah masuk untuk selanjutnya akan dilaksanakan analisis dan menghasilkan Nilai IKM.	RAA 01.01	<i>Website</i>	Publik dan Seluruh OPD

Berdasarkan Tabel 4.8 terdapat **2 (dua) usulan aplikasi** berbasis *website* yaitu pertama adalah aplikasi **E-SOP** yang merupakan aplikasi administrasi pemerintah yang akan digunakan oleh seluruh OPD yang mendukung program Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik. Kedua adalah **aplikasi SUKMA** milik pemerintah pusat yang merupakan Aplikasi Layanan Publik yang akan digunakan oleh seluruh OPD dan juga publik sebagai penerima layanan yang mendukung Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah.

4.3.7.2 Bagian Hukum

Bagian Hukum memiliki 3 (tiga) Subkoordinator yang membantu proses bisnis utama dari PD, dimana 2 (dua) Subkoordinator belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Bagian Hukum terdapat total 7 (tujuh) program yang mana 3 (tiga) program belum didukung oleh aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 3 (tiga) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.9** sebagai berikut.

Tabel 4.9 Usulan Aplikasi Bagian Hukum

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aplikasi Bantuan Hukum dan HAM (https://sidbankum.bphn.go.id/)	Aplikasi yang memfasilitasi permohonan bantuan hukum serta permasalahan HAM secara gratis kepada masyarakat kurang mampu, serta proses Perjanjian Kerjasama, Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan di bidang hukum yang	RAA 02.02	<i>Website</i>	Publik, Internal OPD

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	dapat diproses secara <i>online</i> . Selain itu juga menampilkan <i>dashboard</i> data-data berkaitan dengan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan beserta <i>progress</i> penanganan. Semua data akan terekam di aplikasi ini sehingga akan mudah melakukan pengelolaan data			
Pengembangan JDIH	JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat. Pengembangan aplikasi JDIH dapat dilakukan dengan menambahkan fitur yang memungkinkan dapat melakukan pelayanan koreksi produk hukum daerah secara <i>online</i> ,	RAA 01.02	<i>Website</i>	Seluruh OPD

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	<p>Perangkat daerah yang mengajukan koreksi produk hukum tidak perlu lagi datang secara langsung ke Bagian Hukum, tetapi pengajuan koreksi Rancangan produk hukum dengan mengirimkan <i>soft copy file</i> melalui aplikasi untuk kemudian dilakukan koreksi secara berjenjang oleh korektor dan menerima kembali hasil tanpa banyak menghabiskan waktu dan tenaga sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu dikembangkan juga fitur Registrasi Penomoran dan Pengiriman Produk Hukum secara <i>online</i></p>			
<p>Pengembangan <i>Website</i> Bagian Hukum</p>	<p><i>Website</i> sebagai sarana informasi dapat dikembangkan lagi dengan memberikan informasi terkait pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan keluarga sadar</p>	<p>RAA 02.02</p>	<p><i>Website</i></p>	<p>Publik</p>

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	hukum. Dapat juga dipublikasi materi terkait pembinaan keluarga sadar hukum tersebut.			

Berdasarkan Tabel 4.9 terdapat **3 (tiga) usulan aplikasi** berbasis *website* dimana satu aplikasi merupakan aplikasi baru milik pusat dan 2 (dua) aplikasi lainnya merupakan pengembangan aplikasi yang sudah ada. Pertama, aplikasi Bantuan Hukum dan HAM diusulkan untuk mendukung layanan yang masih manual yaitu Pelayanan Penyelesaian Sengketa Hukum dan Pelayanan Penelitian Perjanjian Kerjasama, Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan serta untuk mendukung Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kedua, pengembangan aplikasi JDIH diusulkan untuk mendukung Pelayanan Penelitian Produk Hukum, Pelayanan Register Penomoran, Pengiriman Produk Hukum serta mendukung program Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan, pengembangan *website* Bagian Hukum diusulkan untuk mendukung Tupoksi Subkoordinator Penyuluhan Bantuan Hukum, yaitu menyelenggarakan penyuluhan hukum dan pembinaan keluarga sadar hukum.

4.3.7.3 Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan memiliki 3 (tiga) Subkoordinator yang membantu proses bisnis utama dari PD, dimana 1 (satu) Subkoordinator belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan

terdapat total 2 (dua) program yang mana 1 (satu) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal PD, didapatkan bahwa **tidak ada usulan** aplikasi untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa karena seluruh aplikasi telah disediakan oleh Pemerintah Pusat.

4.3.7.4 Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat memiliki 3 (tiga) Subkoordinator yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana 2 (dua) Subkoordinator belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat terdapat total 11 (sebelas) program yang mana 4 (empat) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 2 (dua) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.10** sebagai berikut.

Tabel 4.10 Usulan Aplikasi Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Sistem Informasi Pengelolaan Hibah	Untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan bantuan hibah tempat ibadah, serta transparansi data dalam pengelolaan dana hibah	RAA 01.01	<i>Website</i>	Publik
e-BUMD	Sistem aplikasi yang berisi data-data dan Informasi Badan Usaha	RAA.02.02	<i>Website</i>	Internal OPD

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	Milik Daerah (BUMD) dan digunakan sebagai proses pendaftaran seleksi BUMD serta proses pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)			

Berdasarkan Tabel 4.10 terdapat 2 (dua) usulan aplikasi berbasis *website* yang diusulkan untuk Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. Pertama, aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Hibah sebagai aplikasi yang diperuntukkan bagi publik untuk mendukung berjalannya Pelayanan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Ibadah. Kedua, aplikasi e-BUMD sebagai aplikasi milik pusat yang digunakan oleh internal PD untuk mendukung berjalannya Pelayanan Proses Pendaftaran Seleksi BUMD dan Pelayanan Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi BUMD.

4.3.7.5 Bagian Umum

Bagian Umum memiliki 2 (dua) Subkoordinator yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana 1 (satu) Subkoordinator belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Bagian Umum terdapat 3 (tiga) program yang mana seluruh program telah didukung dengan aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 2 (dua) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.11** sebagai berikut.

Tabel 4.11 Usulan Aplikasi Bagian Umum

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Website Bagian Umum	Website penyebaran informasi terkait Sekretariat Daerah Bagian Umum, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	RAA 01.01	Website	Publik
Aplikasi Pelayanan Internal Sekretariat Daerah	Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan dalam proses peminjaman/penggunaan kendaraan dinas, serta digunakan untuk memudahkan proses permintaan penyediaan jamuan makan dan minum rapat. Menampilkan data terkait ketersediaan kendaraan dinas dan juga menampilkan menu jamuan yang dapat disediakan.	RAA.02.02	Website	Internal OPD (Seluruh Bagian pada Sekda)

Berdasarkan Tabel 4.11 terdapat 2 (dua) usulan aplikasi berbasis *website* yang diusulkan untuk Bagian Umum. Pertama, *website* Bagian Umum yang diusulkan untuk menyebarkan informasi publik dan kedua, aplikasi Pelayanan Internal Sekretariat Daerah sebagai aplikasi untuk mendukung Tupoksi Subkoordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan yang dapat digunakan oleh seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah.

4.3.7.6 Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan memiliki 3 (tiga) Subkoordinator yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana 2 (dua) Subkoordinator belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Bagian Pemerintahan terdapat total 11 (sebelas) program yang mana 4 (empat) program belum didukung oleh aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 2 (dua) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.12** sebagai berikut.

Tabel 4.12 Usulan Aplikasi Bagian Pemerintahan

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Sistem Informasi Kerja Sama Daerah	Sistem informasi untuk mengelola data kerja sama daerah untuk memudahkan dalam evaluasi pelaksanaan kerja sama serta memudahkan perangkat daerah yang akan mengajukan kerja sama.	RAA.01.02	<i>Website</i>	Seluruh OPD, Publik
Aplikasi Kewilayahan	Aplikasi pemetaan wilayah yang berfungsi untuk mengelola pemetaan batas wilayah antar kelurahan, kecamatan, dan daerah. Aplikasi berbasis WEBGIS dan berisikan informasi mengenai batas wilayah tersebut.	RAA.02.02	<i>Website</i>	Internal OPD & Publik

Berdasarkan Tabel 4.12 terdapat 2 (dua) usulan aplikasi berbasis *website* yang diusulkan untuk Bagian Pemerintahan. Pertama, aplikasi Sistem Informasi Kerjasama Daerah yang diusulkan untuk mendukung tupoksi Subkoordinator Kerjasama Daerah serta Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah Pemerintah Daerah yang diperuntukkan untuk seluruh OPD dan juga publik . Kedua, aplikasi Kewilayahan yang diusulkan untuk mendukung Program Penataan Daerah Otonom Baru yang dapat digunakan untuk publik maupun internal PD sendiri.

4.3.7.7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 1 (satu) Subkoordinator dan 3 (tiga) Seksi yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana 1 (satu) Subkoordinator telah didukung aplikasi dan 3 (tiga) seksi belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat total 7 (tujuh) program yang mana 3 (tiga) program belum didukung aplikasi.

Setelah dilakukan analisis didapatkan 3 (tiga) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.13** sebagai berikut.

Tabel 4.14 Usulan Aplikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Sistem Informasi Kebencanaan	Fungsi Pusat Data dan Informasi Kebencanaan adalah sebagai penerima, pengolah, dan pendistribusi informasi. Dalam rangka mengoperasionalkan mengoptimalkan	RAA.02.02	<i>Website</i>	Publik, Internal PD dan Dinas Sosial

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	<p>pencatatan peristiwa bencana perlu dicatat sesuai dengan ciri-ciri setiap peristiwa bencana yang datanya diperlukan untuk membuat hubungan antar variabel dalam mengembangkan statistik runtun waktu, seperti, tren jangka panjang dari dampak bencana. Dampak bencana yang dihimpun ke dalam database adalah dampak korban jiwa dan nominal kerugian harta benda. Untuk mengakomodir hal tersebut maka dibuatlah Sistem Informasi Kebencanaan berbasis WEB yang dapat diakses oleh semua orang dan operator piket Pusdalops BPBD Kota Madiun.</p>			

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Sistem Informasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Sistem informasi yang bertujuan untuk keperluan Pengolahan Data Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam, meliputi seluruh tahap pelaksanaan sampai dengan Laporan Akhir proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi	RAA.02.02	Website	Publik
Pengembangan Website BPBD	Menambahkan fitur yang dapat mengisi formulir dan mengupload berkas pengajuan pelayanan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, sehingga publik tidak harus datang ke kantor	RAA.02.02	Website	Publik

Berdasarkan **Tabel 4.14** terdapat 3 (tiga) usulan aplikasi berbasis *website* dan merupakan aplikasi khusus fungsi tertentu. Pertama, aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan yang diusulkan untuk mendukung Layanan Evakuasi/Penanggulangan Bencana, Layanan Penanganan Bencana Alam (Banjir, Angin puting beliung) serta Program Penanggulangan Bencana. Kedua, aplikasi

Sistem Informasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang diusulkan untuk mendukung tupoksi dari Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Ketiga, Pengembangan *website* BPBD yang diusulkan untuk mendukung Layanan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana serta Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

4.3.7.8 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki 5 (lima) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana 3 (lima) bidang belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat total 4 (empat) program yang mana seluruh program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 4 (empat) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.14** sebagai berikut.

Tabel 4.14 Usulan Aplikasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aplikasi penyusunan dokumen perencanaan OPD (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja)	Aplikasi untuk memberikan data dan informasi terkait data kinerja dan anggaran mengenai sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	RAA 01.02	<i>Website</i>	seluruh OPD
Pengembangan <i>Website</i> BAPEDALITBANGDA	Memfaatkan <i>website</i> Bapedalitbang untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	RAA.02.02	<i>Website</i>	Publik
Aplikasi Pengendalian	Aplikasi untuk	RAA 01.02	<i>Website</i>	seluruh

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
dan Informasi Pembangunan	memantau Perencanaan penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) di seluruh OPD			OPD
Pengembangan Aplikasi E-KAK	Aplikasi tindak lanjut dari E-KAK untuk melihat APBD. Aplikasi yg dapat memfasilitasi pembahasan rdp apbd pada dprd antara eksekutif dan legislatif	RAA 01.02	<i>Website</i>	seluruh OPD

Berdasarkan Tabel 4.14 terdapat 4 (empat) usulan aplikasi berbasis *website* dimana tiga aplikasi merupakan aplikasi administrasi pemerintahan yang digunakan oleh seluruh PD dan satu aplikasi merupakan aplikasi layanan publik. Pertama, aplikasi penyusunan dokumen perencanaan OPD (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) diusulkan berdasarkan hasil survei dan juga untuk mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kedua, pengembangan *website* Bapedalitbangda yang diusulkan untuk mendukung Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Ketiga, aplikasi Pengendalian dan Informasi Pembangunan yang diusulkan berdasarkan hasil survei terkait kebutuhan PD. Keempat, pengembangan Aplikasi E-KAK yang diusulkan berdasarkan hasil survei dan mendukung Program Koordinasi serta Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.3.7.9 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 4 (empat) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana seluruh bidang telah didukung aplikasi. Sedangkan untuk

program RPJMD dari Badan Keuangan dan Aset Daerah terdapat total 11 (sebelas) program yang mana 2 (dua) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 6 (enam) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.15** sebagai berikut.

Tabel 4.15 Usulan Aplikasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aplikasi verifikasi anggaran dan Laporan Keuangan secara terintegrasi	Aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses verifikasi data anggaran dan digunakan untuk pengumpulan data hasil kegiatan dan laporan pertanggungjawaban Anggaran	RAA 01.02	<i>Website</i>	seluruh OPD
Aplikasi Penyimpanan Berkas untuk Laporan dan SPJ	Belum ada aplikasi untuk upload bukti dukung seperti saat SPJ, sehingga masih berupa dokumen fisik yang disimpan pada OPD. sehingga Ketika BPK meminta bukti selalu datang ke OPD (seharusnya dapat dilihat melalui aplikasi)	RAA.01.02	<i>Website</i>	Internal OPD
Pengembangan SIM GAJI	Mengembangkan aplikasi SIM Gaji dari aplikasi Desktop menjadi <i>Website</i> agar mudah diakses, serta menambahkan modul untuk mengelola proses permohonan dan penerbitan SKPP secara <i>online</i>	RAA 01.02	<i>Website</i>	Seluruh OPD
E-Retribusi Daerah	Aplikasi pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD). aplikasi e-retribusi menjadi salah satu upaya	RAA.02.02	<i>Website</i> dan <i>Mobile</i>	Internal PD dan Publik

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	untuk meningkatkan efisien waktu, meminimalisir kesalahan pencatatan data, serta meminimalisir kesalahan transaksi pembayaran ketika melakukan pembayaran retribusi PKD.			
Aplikasi Pengguna /Penyewa Kekayaan Daerah	Daftar pengguna /penyewa Kekayaan Daerah (ruko, sawah, bangunan gedung , gudang dll) masih disimpan secara manual baik Data pribadi maupun kelengkapan administrasinya. Dengan adanya aplikasi ini harapannya data dapat tersimpan secara <i>online</i> maupun proses pengguna atau penyewaan juga dapat dilakukan secara <i>online</i> .	RAA.01.02	<i>Website</i>	Internal OPD dan Publik
Aplikasi Penerimaan Dan Pengeluaran Barang Habis Pakai	Penerimaan dan pengeluaran habis pakai masih dilaporkan secara manual oleh masing masing OPD. Harapannya dengan adanya aplikasi pelaporan ini dapat dilakukan secara <i>online</i> untuk mempermudah prosesnya	RAA.01.02	<i>Website</i>	Seluruh PD

Berdasarkan Tabel 4.15 terdapat 6 (enam) usulan aplikasi berbasis *website* yang diusulkan untuk BKAD. Pertama, aplikasi Verifikasi Anggaran dan Laporan Keuangan secara terintegrasi yang merupakan usulan aplikasi berdasarkan hasil survei serta nantinya sebagai aplikasi administrasi pemerintahan yang digunakan oleh seluruh PD. Kedua, aplikasi

Penyimpanan Berkas untuk Laporan dan SPJ sebagai aplikasi administrasi pemerintahan yang didapatkan dari kebutuhan Dinas Kesehatan, PP dan KB yang nantinya dapat digunakan oleh seluruh OPD. Ketiga, pengembangan aplikasi SIM GAJI yang diusulkan untuk mendukung Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP). Keempat, aplikasi E-Retribusi Daerah yang diusulkan untuk mendukung Pelayanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Kelima, aplikasi Pengguna /Penyewa Kekayaan Daerah sebagai usulan aplikasi berdasarkan hasil survei yang nantinya digunakan oleh internal PD dan juga secara publik. Kelima, aplikasi Penerimaan dan Pengeluaran Barang Habis Pakai yang diusulkan berdasarkan hasil survei untuk nantinya dapat digunakan oleh seluruh PD.

4.3.7.10 Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah memiliki 3 (tiga) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana 1 (satu) Bidang belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Badan Pendapatan Daerah terdapat total 8 (delapan) program yang mana 1 (satu) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 2 (dua) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.16** berikut.

Tabel 4.16 Usulan Aplikasi Badan Pendapatan Daerah

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan SIMPADAMA	Mengembangkan SIMPADAMA sebagai Sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah yang dapat membantu mengolah seluruh data pendapatan asli daerah (PAD) .	RAA.02.02	<i>Website</i>	Internal OPD

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	Dikembangkan dengan mengintegrasikan seluruh data yang termasuk pendapatan daerah lainnya (Selain pajak daerah), seperti retribusi, dan pendapatan daerah lainnya			
Sistem Informasi PBB	Sistem informasi terkait PBB untuk mendukung seluruh pelayanan yang berkaitan dengan PBB agar lebih efektif dan efisien secara pelayanan maupun data. Aplikasi ini juga dibuat untuk mempermudah dan sebagai panduan bagi masyarakat untuk cara cek pajak pbb secara <i>online</i> , untuk mengetahui status pembayaran, status piutang, informasi sppt, tempat pembayaran, cek status berkas, saran dan masukan atau pengaduan wajib pajak langsung masuk ke pejabat terkait sehingga penanganan pengaduan lebih cepat sehingga meningkatkan kepuasan pelayanan masyarakat.	RAA.02.03	<i>Website</i> dan <i>Mobile</i>	Internal OPD dan Publik

Berdasarkan Tabel 4.16 terdapat 2 (dua) usulan aplikasi dimana satu aplikasi merupakan pengembangan aplikasi yang sudah ada dan satu lainnya merupakan aplikasi baru. Pertama, Pengembangan aplikasi SIMPADAMA yang diusulkan berdasarkan analisis agar seluruh data yang berkaitan dapat saling terintegrasi. Kedua, aplikasi Sistem Informasi PBB yang diusulkan berdasarkan hasil survei untuk nantinya akan digunakan oleh internal PD maupun oleh publik.

4.3.7.11 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 4 (empat) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana 1 (empat) Bidang belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat total 12 (dua belas) program yang mana 7 (tujuh) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 4 (empat) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.17** sebagai berikut.

Tabel 4.17 Usulan Aplikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aplikasi Seleksi Terbuka	Aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran seleksi terbuka JPTP yang hasil seleksi bisa terintegrasi dengan SIK (Pejabat terpilih terinput di SIK melalui aplikasi Selter)	RAA 01.02	Website	Publik
Aplikasi Legalisir dan Keabsahan Online	Aplikasi yang dapat memudahkan dalam pelayanan legalisir	RAA.02.02	Website	Seluruh OPD, Publik

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	<p>secara <i>online</i>. Masyarakat dapat mengupload berkas tanpa harus datang ke kantor dan akan terdapat informasi terkait status permohonan legalisir.</p>			
<p>Aplikasi Permohonan /Perizinan/Pengajuan Kepegawaian</p>	<p>Aplikasi yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan/perizinan secara <i>online</i> terkait urusan kepegawaian, termasuk Aplikasi Pindah Antar Wilayah (PAW) atau Mutasi antar Pemda.</p>	<p>RAA 01.02</p>	<p>Website</p>	<p>Seluruh OPD dan Publik</p>
<p>Aplikasi Pengembangan ASN</p>	<p>Aplikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi pengembangan kompetensi SDM yang bertujuan untuk mengelola perencanaan pengembangan kompetensi SDM Pemerintah Daerah. Aplikasi ini berfungsi sebagai penyebaran informasi dan pengumpulan data terkait pengembangan kompetensi pegawai, seperti pelaksanaan Bimtek, Seminar, <i>Workshop</i>, Sertifikasi,</p>	<p>RAA.01.02</p>	<p>Website</p>	<p>Seluruh OPD</p>

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	dsb yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi SDM.			

Berdasarkan Tabel 4.17 terdapat 5 usulan aplikasi berbasis *website*. Pertama, aplikasi Seleksi Terbuka yang merupakan aplikasi berdasarkan hasil survei sekaligus sebagai pendukung Program Peningkatan Kapasitas Aparatur. Kedua, aplikasi Legalisir dan Keabsahan *Online* yang diusulkan untuk mendukung Layanan Legalisir yang masih berjalan secara manual namun juga dapat digunakan oleh seluruh PD dan juga publik. Ketiga, aplikasi Permohonan /Perizinan/Pengajuan Kepegawaian yang diusulkan untuk mendukung seluruh layanan permohonan/perizinan/pengajuan terkait kepegawaian yang masih berjalan secara manual bagi seluruh PD maupun publik untuk pengajuan permohonan mutasi dari Pemerintah Daerah lain. Keempat, aplikasi Pengembangan ASN yang diusulkan untuk mendukung tupoksi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

4.3.7.12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 4 (empat) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana 1 (satu) Bidang belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat total 11 (sebelas) program yang mana 7 (tujuh) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 3 (tiga) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.18** sebagai berikut.

Tabel 4.18 Usulan Aplikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
SIORMAS	Aplikasi untuk mengelola data Organisasi Masyarakat yang ada di Kota Madiun, Dengan aplikasi ini, publik dapat melakukan pendaftaran ORMAS secara <i>online</i> . Aplikasi ini juga berfungsi untuk mendata ORMAS serta kegiatan ORMAS sehingga kegiatan ORMAS dapat terpantau.	RAA.02.02	<i>Website</i>	Internal OPD, Publik
Pengembangan <i>Website</i> Bangkesbangpol	Mengembangkan <i>website</i> Bangkesbangpol sebagai media dalam mengedukasi masyarakat terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sejarah kebangsaan	RAA 01.01	<i>Website</i>	Publik
Aplikasi Mitigasi Konflik	Sistem peringatan dini untuk mencegah terjadinya konflik di daerah Kota Madiun. Sistem yang dapat menghimpun data laporan kegiatan, kejadian dan kasus yang berhubungan dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya serta keamanan, ketentraman dan ketertiban dari seluruh Kecamatan di Kota Madiun, sehingga	RAA.02.02	<i>Website</i>	Publik

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	dengan data tersebut dapat disampaikan informasi mengenai potensi konflik di daerah Kota Madiun kepada masyarakat. Dapat diintegrasikan dengan Website Bangkesbangpol terkait Berita Peringatan Konflik.			

Berdasarkan Tabel 4.18 terdapat 3 (tiga) usulan aplikasi berbasis *website*. Pertama, aplikasi SIORMAS (Sistem Informasi Pendataan Ormas) yang diusulkan untuk mendukung Pelayanan Pendataan Keberadaan Ormas dan juga mendukung Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas serta Program Pembinaan Orkesmas dalam kehidupan demokrasi. Kedua, pengembangan *website* Bangkesbangpol yang diusulkan untuk mendukung Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Ketiga, aplikasi Mitigasi Konflik yang diusulkan untuk mendukung tupoksi Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan sekaligus mendukung Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial.

4.3.7.13 Inspektorat

Inspektorat memiliki 5 (lima) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana seluruh Bidang telah didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Inspektorat terdapat 10 (sepuluh) program yang mana 4 (empat) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis

didapatkan 1 (satu) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.19** sebagai berikut.

Tabel 4.19 Usulan Aplikasi Inspektorat

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
SINAWASDA	Aplikasi untuk pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang dimandatkan kepada Inspektorat Kota Madiun. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai media pengolahan data hasil pengawasan untuk memudahkan penyajian informasi	RAA.01.02	Website	Seluruh OPD

Berdasarkan Tabel 4.19 terdapat satu usulan aplikasi administrasi pemerintahan berbasis *website* yang dapat digunakan oleh seluruh PD, yaitu SINAWASDA yang merupakan usulan berdasarkan hasil survei untuk memenuhi kebutuhan Inspektorat.

4.3.7.14 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki 3 (tiga) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana 1 (satu) bidang belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Inspektorat Daerah terdapat total 7 (tujuh) program yang mana 2 (dua) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 1 (satu) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.20** sebagai berikut.

Tabel 4.20 Usulan Aplikasi Sekretariat DPRD

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
E-risalah (Sistem Pengelola Rapat)	Sistem informasi yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi terkait bahan materi Rapat, dan juga dapat digunakan sebagai pencatatan hasil rapat sehingga dapat dibaca kembali oleh pihak yang berkepentingan. Disini Seluruh OPD berperan menjadi admin sehingga bahan dan hasil rapat dapat <i>dishare</i> kepada orang yang berkepentingan saja melalui <i>email</i> maupun <i>group</i> media sosial yang digunakan.	RAA.01.02	<i>Website</i>	Seluruh OPD

Berdasarkan Tabel 4.20 terdapat satu usulan aplikasi administrasi pemerintahan berbasis *website* yang dapat digunakan oleh seluruh PD, yaitu aplikasi E-Risalah yang diusulkan untuk mendukung tupoksi Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Subkoordinator Persidangan, Risalah serta Publikasi.

4.3.7.15 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki 5 (lima) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana seluruh bidang telah didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat total 17 (tujuh belas) program yang mana 3 (tiga) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 2 (dua) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.21** sebagai berikut.

Tabel 4.21 Usulan Aplikasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aplikasi PBID	Aplikasi PBID yang dapat memadankan dengan cepat ribuan <i>database</i> NIK peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) dengan data NIK dari Dukcapil. Mengingat yang berlaku saat ini masih secara manual dan harus dicek satu persatu	RAA.02.02	<i>Website</i>	Internal OPD
E-SIP - Surat Izin Praktek	Sistem Informasi untuk memudahkan pelayanan publik di bidang kesehatan, seperti memberikan rekomendasi perizinan, dan penerbitan sertifikasi	RAA.02.02	<i>Website</i>	Internal OPD, Publik

Berdasarkan Tabel 4.21 terdapat 2 (dua) usulan aplikasi berbasis *website* yang merupakan aplikasi khusus fungsi tertentu. Pertama, aplikasi Pemadanan NIK Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang diusulkan berdasarkan hasil survei kebutuhan Dinas Kesehatan, PP & KB untuk kemudian digunakan oleh pihak internal PD. Kedua, aplikasi E-SIP - Surat Izin Praktek yang diusulkan untuk mendukung seluruh layanan

terkait penerbitan sertifikasi maupun surat rekomendasi yang saat ini masih berjalan secara manual.

4.3.7.16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 5 (lima) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana 2 (dua) bidang belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat total 19 (sembilan belas) program yang mana 13 (tiga belas) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 4 (empat) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.22** berikut.

Tabel 4.22 Usulan Aplikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aplikasi Layanan Publik PUPR	Sistem Informasi untuk memudahkan pelayanan publik PUPR, seperti memberikan rekomendasi penurunan trotoar, rekomendasi kelayakan fungsi bangunan,dsb	RAA.02.02	Website	Internal OPD, Publik
SIMTARUBANG	Sistem Informasi yang digunakan sebagai media konsultasi dan verifikasi terkait perencanaan pembangunan dan tata ruang di Kota Madiun, serta menampilkan pemetaan yang memuat data/informasi perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan bangunan di Kota	RAA.02.02	Website	Internal OPD, Publik

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	Madiun Maksud dikembangkannya aplikasi ini adalah dalam rangka penyebarluasan informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kepada masyarakat luas.			
Sistem Informasi Sumber Daya Air	Aplikasi yang dapat memetakan Sumber Daya Air (embung, waduk, bendungan, irigasi, dan pos hujan, sungai, sumber air bersih, dan air limbah,dsb) di Kota Madiun dengan berbasis geografis/GIS dan menampilkan data-data yang terkait. Serta memberikan informasi wujud pelestarian sumber daya air	RAA 01.01	<i>Website</i>	Internal OPD & Publik
SIBIMA Konstruksi (https://sibima.pu.go.id/)	Sistem layanan publik yang berfungsi untuk melayani masyarakat jasa konstruksi di seluruh Indonesia dalam rangka capacity building bidang jasa konstruksi. Bentuk layanan publik yg disediakan antara lain: -Layanan informasi jasa konstruksi;	RAA.02.02	<i>Website</i>	Publik

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	-Layanan konsultasi tentang pembinaan jasa konstruksi; -Layanan distance learning SIBIMA Konstruksi.			

Berdasarkan Tabel 4.22 terdapat 4 (empat) usulan aplikasi berbasis *website* dimana satu aplikasi merupakan aplikasi milik pusat dan tiga aplikasi lainnya. Pertama, aplikasi SIBIMA Konstruksi yang diusulkan untuk mendukung tupoksi dari Bidang Cipta Karya - Subkoordinator Pengembangan Jasa Konstruksi dan juga mendukung Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Kedua, aplikasi Layanan Publik PUPR yang diusulkan untuk mendukung Pelayanan Jasa Rekomendasi Penurunan Trotoar, Pelayanan Rekomendasi Kelayakan Fungsi Bangunan, sekaligus mendukung Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya serta Program Penyelenggaraan Jalan. Ketiga, aplikasi SIMTARUBANG diusulkan untuk mendukung Pelayanan Jasa Verifikasi dan Konsultasi Perencanaan Bangunan serta Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Keempat, aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Air yang diusulkan untuk mendukung tupoksi Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air - Subkoordinator Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendukung Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

4.3.7.17 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 3 (tiga) Bidang yang membantu proses bisnis utama

dari PD dimana 2 (dua) bidang belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat total 14 (empat belas) program yang mana 8 (delapan) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 2 (dua) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.23** sebagai berikut.

Tabel 4.23 Usulan Aplikasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Sistem Informasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman	Sistem informasi yang berfungsi untuk mengelola data Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Permukiman di wilayah Kota Madiun yang mencakup data kecamatan, data pengembang, dan data lain yang berkaitan. Selain berisi database dapat juga ditampilkan dalam bentuk infografis agar lebih mudah melihat data secara keseluruhan.	RAA.02.02	<i>Website</i>	Internal OPD & Publik
Aplikasi Identifikasi dan Pengelola Data Permukiman	Aplikasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi permukiman yang dikategorikan menjadi pemukiman kumuh maupun permukiman bersih dan digunakan sebagai pengelolaan data permukiman kumuh menjadi suatu informasi	RAA.02.02	<i>Website</i>	Internal OPD & Publik

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	yang informatif. Pada aplikasi ini juga akan ditampilkan pemetaan data permukiman kumuh Kota Madiun berbasis WEBGIS, serta menampilkan informasi terkait pencegahan dan program peningkatan kualitas permukiman kumuh.			

Berdasarkan Tabel 4.23 terdapat 2 (dua) usulan aplikasi berbasis *website* yang merupakan aplikasi khusus fungsi tertentu. Pertama, aplikasi Sistem Informasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman yang diusulkan untuk mendukung tupoksi Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Permukiman sekaligus mendukung Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Kedua, aplikasi Identifikasi dan Pengelola Data Pemukiman yang diusulkan untuk mendukung tupoksi dari Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan-Subkoordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh sekaligus mendukung Program Kawasan Permukiman.

4.3.7.18 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 5 (lima) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana seluruh bidang telah didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat total 19 (sembilan belas) program yang mana 9 (sembilan) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 6 (enam) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.24** sebagai berikut.

Tabel 4.24 Usulan Aplikasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Puskesmas <i>Mobile</i>	Puskesmas dibangun dengan tujuan untuk memudahkan warga atau fakir miskin untuk mendapatkan perlindungan sosial serta lepas dari kemiskinan. Diperlukan Pembuatan Aplikasi Puskesmas berbasis <i>mobile</i> secara mandiri dan terintegrasi dengan Puskesmas Pusat.	RAA.02.02	<i>Mobile</i>	Internal OPD
Aplikasi SIKSDROID	Aplikasi SIKSDROID merupakan aplikasi SIKS-NG dalam versi <i>mobile</i> . Diperlukan pembuatan aplikasi SIKSDROID untuk aplikasi <i>mobile</i> dikarenakan data verifikasi lebih lengkap dan lebih mudah dalam proses verifikasi data di lapangan. Aplikasi ini seperti SISDROID dari pusat yang saat ini sudah dinonaktifkan. Diperlukan Pembuatann Aplikasi SIKSDROID secara mandiri dan terintegrasi dengan SIKS-NG milik Pusat.	RAA.02.02	<i>Mobile</i>	Internal OPD

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aplikasi Laporan Kebencanaan dan Penyaluran Bantuan Bencana	Aplikasi Laporan Kebencanaan dan Penyaluran Bantuan Bencana digunakan untuk pendataan korban bencana alam serta informasi penyaluran bantuan bencana	RAA.02.02	<i>Website</i>	Internal PD, Publik dan BPBD
Aplikasi Layanan Publik Dinsos P3A	Sistem informasi yang digunakan untuk memudahkan pelayanan publik Dinas Sosial P3A dalam penerbitan surat rekomendasi.	RAA.02.02	<i>Website</i>	Internal OPD, Publik
SI ORSOS	Aplikasi yang berfungsi untuk pendaftaran maupun pendaftaran ulang serta untuk pendataan ORSOS/Yayasan beserta kegiatannya	RAA.02.02	<i>Website</i>	Internal OPD, Publik
Aplikasi Rehabilitasi Sosial	Aplikasi pendataan dan pelaporan adanya disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar, gelandangan pengemis dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya, serta sebagai proses pelayanan terkait tindakan rehabilitasi sosial seperti saat pemberian bantuan dan pemrosesan dokumen pendukungnya	RAA.02.02	<i>Website</i>	Internal OPD, Publik

Berdasarkan **Tabel 4.25** terdapat 6 (enam) usulan aplikasi yang mana empat aplikasi berbasis *website* dan dua aplikasi berbasis *mobile*. Untuk aplikasi Puskesmas *mobile*, aplikasi SIKSDROID, dan Aplikasi Laporan Kebencanaan dan

Penyaluran Bantuan Bencana diusulkan berdasarkan pada hasil survei sesuai kebutuhan Dinas Sosial P3A. Sedangkan aplikasi Layanan Publik Dinsos P3A diusulkan untuk mendukung pelayanan terkait rekomendasi dan permohonan untuk Dinsos P3A. Kemudian bagi aplikasi SI ORSOS diusulkan untuk mendukung Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran ORSOS/Yayasan dan Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Ulang ORSOS/Yayasan. Terakhir, aplikasi Rehabilitasi Sosial diusulkan untuk mendukung tupoksi Bidang Rehabilitasi Sosial serta Program Rehabilitasi Sosial.

4.3.7.19 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki 4 (empat) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana seluruh bidang telah didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdapat total 20 (dua puluh) program yang mana 12 (dua belas) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 3 (tiga) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.26** berikut.

Tabel 4.26 Usulan Aplikasi Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan SI-CAKER	Aplikasi diperuntukkan untuk pelayanan perselisihan hubungan industrial para pihak (Perusahaan Pengusaha dengan pekerja buruh) . Aplikasi ini akan menjadi jembatan guna mendukung	RAA.02.02	<i>Website</i>	Publik

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	<p>saling keterbukaan dalam penyelesaian masalah dan bisa menjadi rujukan untuk proses selanjutnya. Selain itu dapat juga ditambahkan informasi ketenagakerjaan Kota Madiun seperti data UMR, serikat pekerja, dasar hukum yang berlaku).</p>			
<p>Pengembangan E-Kami</p>	<p>Pengembangan aplikasi E-Kami dengan menambahkan modul sebagai aplikasi yang berfungsi untuk mengelola segala urusan terkait Koperasi, UMKM dan usaha Mikro. Selain itu, pengembangan aplikasi juga turut memberikan berbagai manfaat lain, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan proses pendaftaran dan verifikasi Koperasi, UMKM dan usaha Mikro. - Memudah pencatatan aktivitas kegiatan Koperasi, UMKM dan usaha Mikro. - Memudahkan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual produk Koperasi, UMKM dan usaha Mikro. - Memudahkan pengenalan serta pemasaran produk yang dikelola oleh Koperasi, UMKM dan usaha Mikro. - Monitoring dan evaluasi 	<p>RAA.02.02</p>	<p><i>Website & Mobile</i></p>	<p>Pelaku operasi, UMKM dan Usaha Mikro, Internal OPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	penilaian Koperasi, UMKM dan usaha Mikro. - Informasi pelatihan atau workshop terkait Koperasi, UMKM dan usaha Mikro - Proses perizinan atau penerbitan surat terkait Koperasi, UMKM dan usaha Mikro - Menampilkan data transaksi penjualan produk IKM			
SIPRONI	Aplikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara cepat kebutuhan peningkatan produktivitas setiap sektor usaha maupun secara individu sehingga dapat mengetahui gambaran kondisi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki	RAA 01.01	Website	Publik

Berdasarkan Tabel 4.25 terdapat 3 (tiga) usulan aplikasi berbasis *website* dimana dua aplikasi merupakan pengembangan aplikasi yang sudah ada dan satu aplikasi baru. Pertama, aplikasi Pengembangan SI-CAKER yang diusulkan untuk mendukung Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta mendukung Program Hubungan Industrial. Kedua, Pengembangan aplikasi E-Kami yang diusulkan untuk mendukung Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Program

Pembinaan Industri, dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Ketiga, aplikasi SIPRONI yang diusulkan untuk mendukung Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

4.3.7.20 Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan memiliki 4 (empat) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana 1 (satu) bidang belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Dinas Pendidikan terdapat total 12 (dua belas) program yang mana 5 (lima) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 3 (tiga) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.26** sebagai berikut.

Tabel 4.26 Usulan Aplikasi Dinas Pendidikan

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan Aplikasi LI	Mengembangkan aplikasi LI yang dapat diakses oleh siswa dan guru, serta sebagai aplikasi pengelolaan administrasi sekolah (PAUD,TK,SD, SMP, SMU, SMK, MI, MTs, MA, dll.). Pengelolaan yang dilakukan mulai dari pendataan (siswa, mata pelajaran, jadwal pelajaran, dll.), operasional kegiatan belajar mengajar seperti mengunggah file materi dan tugas serta pengembangan kurikulum sekolah. Aplikasi LI juga perlu dikembangkan agar terintegrasi dengan aplikasi DAPODIK.	RAA.02.02	Website	Siswa dan Guru
Aplikasi	Aplikasi yang berfungsi	RAA.02.02	Website	Tenaga

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Manajemen Tenaga Kependidikan	untuk mengelola data Tenaga Kependidikan serta memberikan informasi terkait pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan seperti adanya Bimtek, Seminar, Workshop, Sertifikasi, dsb yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan. Dengan aplikasi ini dapat diketahui kegiatan pengembangan kompetensi apa saja yang telah diikuti oleh Tenaga Kependidikan, prestasi yang telah diraih, dsb.			Kependidikan
Sistem Informasi Lembaga Pendidikan Non Formal	Aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan proses pendaftaran akreditasi lembaga pendidikan non formal serta sebagai aplikasi untuk mengelola dan pendataan lembaga pendidikan non formal yang ada di Kota Madiun	RAA.02.02	<i>Website</i>	Publik (Lembaga Pendidikan Non Formal)

Berdasarkan Tabel 4.26 terdapat 3 (tiga) usulan aplikasi berbasis *website* dimana satu aplikasi merupakan pengembangan aplikasi yang sudah ada dan dua aplikasi lainnya merupakan aplikasi baru. Pertama, Pengembangan aplikasi LI yang diusulkan untuk mendukung Program Pendidikan Anak Usia Dini dan juga Program Pengembangan

Kurikulum. Kedua, aplikasi Manajemen Tenaga Kependidikan yang diusulkan untuk mendukung Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Ketiga, Sistem Informasi Lembaga Pendidikan Non Formal yang diusulkan untuk mendukung Program Pendidikan Non Formal.

4.3.7.21 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki 4 (empat) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana 3 (tiga) bidang belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdapat total 21 (dua puluh satu) program yang mana 17 (tujuh belas) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 5 (lima) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.27** sebagai berikut.

Tabel 4.27 Usulan Aplikasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aplikasi Manajemen Kepegawaian Non ASN Internal DKPP	Aplikasi yang digunakan untuk memajemen kepegawaian Non ASN	RAA 01.02	Website	Internal OPD
SIM HEWAN	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola seluruh informasi dan data maupun proses pelayanan berkaitan dengan Hewan, seperti Penerbitan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan), pemrosesan Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Tani Ternak	RAA.02.02	Website	Internal OPD dan Publik

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	<p>pemrosesan dokumen Rekomendasi Kredit Ternak, pemrosesan dokumen Rekomendasi Surat Ijin Praktek Dokter Hewan, Fasilitas Rumah Potong Hewan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan hewan dan kebutuhan ternak</p>			
SIM IKAN	<p>Aplikasi yang digunakan untuk mengelola seluruh informasi, data dan pelayanan berkaitan dengan perikanan, seperti Sewa Sarana Prasarana Pasar Ikan, pemrosesan Rekomendasi Pelayanan Kredit Petani Ikan , Pembelian Benih Ikan, pemrosesan Rekomendasi Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan , dan pemrosesan Bantuan Benih Ikan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan ikan</p>	RAA.02.02	<i>Website</i>	Internal OPD dan Publik
SIM TANI	<p>Aplikasi yang digunakan untuk mengelola seluruh informasi, data dan pelayanan berkaitan dengan pertanian, seperti Permintaan Bantuan Pestisida Pertanian, Surat Pengantar Pencairan Dana BLM PUAP Ke Bank, Rekomendasi Kredit Usaha Tani , Pengajuan Klaim</p>	RAA.02.02	<i>Website</i>	Internal OPD dan Publik

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Verifikasi dan Validasi Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Distribusi Pupuk Bersubsidi , dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pertanian			
Aplikasi Ketahanan dan Kerawanan Pangan	Aplikasi yang berfungsi menginformasikan data panel harga pangan sebagai bagian dari analisis proyeksi ketersediaan dan harga pangan sehingga dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang kuat bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan. Aplikasi ini juga berguna untuk memetakan Ketahanan dan Kerawanan Pangan tingkat Kelurahan Kota Madiun dengan menampilkan geografis wilayah tahan dan rentan rawan pangan dengan dua gradasi warna yaitu merah dan hijau.	RAA.02.02	Website	Internal OPD dan Publik

Berdasarkan Tabel 4.27 terdapat 5 (lima) usulan aplikasi berbasis *website*. Pertama, aplikasi Manajemen Kepegawaian Non ASN Internal DKPP yang diusulkan berdasarkan hasil survei kebutuhan internal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kedua, aplikasi SIM HEWAN yang diusulkan untuk mendukung layanan dan program terkait hewan. Ketiga,

aplikasi SIM IKAN yang diusulkan untuk mendukung layanan dan program terkait perikanan. Keempat, aplikasi SIM TANI yang diusulkan untuk mendukung layanan dan program terkait pertanian. Kelima, aplikasi Aplikasi Ketahanan dan Kerawanan Pangan yang diusulkan untuk mendukung Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.

4.3.7.22 Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup memiliki 4 (empat) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana 2 (dua) bidang belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Dinas Lingkungan Hidup terdapat total 17 (tujuh belas) program yang mana 11 (sebelas) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 3 (tiga) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.28** sebagai berikut.

Tabel 4.28 Usulan Aplikasi Dinas Lingkungan Hidup

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan Aplikasi SILAPLING	Mengembangkan aplikasi SILAPLING sebagai berikut : #Untuk Pelayanan Pelaporan Lingkungan : - Ditambahkan modul formulir untuk pelaporan lingkungan untuk masyarakat umum (tidak hanya perusahaan) - Dikembangkan dengan menambahkan fitur status pelaporan dan tindakan apa yang dilakukan serta	RAA.02.02	Website & Mobile	Internal OPD, Publik

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	<p>progress pelaksanaannya.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dikembangkan dengan menambahkan page yang dapat diakses masyarakat secara publik (tidak perlu login) untuk melihat informasi dan data terkait pelaporan yang sudah ditindaklanjuti. <p>#Penambahan Modul Lain</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyediakan informasi dan pemesanan pasokan bibit tanaman yang dapat digunakan oleh masyarakat serta memantau perkembangan penanaman pohon yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan pemberdayaan masyarakat menuju kelurahan bersih dan lestari.- Seluruh pelayanan surat persetujuan dan rekomendasi terkait lingkungan dapat diurus menggunakan aplikasi "SILAPLING"- Seluruh pelayanan surat persetujuan dan rekomendasi terkait lingkungan dapat diurus menggunakan aplikasi			

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	SILAPLING			
Aplikasi Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	<p># Aplikasi layanan pengelolaan sampah dan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga hingga ke TPST pemerintah secara lengkap, meliputi seluruh penggiat pengelola sampah, yaitu tukang sampah, usaha daur ulang hingga akademisi maupun aktivis persampahan, pengangkutan sampah di jalan protokol dan pedestrian, pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke tempat pemrosesan akhir, pengangkutan sampah dari tempat sampah pemilah dan tempat pembuangan sampah liar sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses berbagai informasi terkait pengangkutan dan pengelolaan sampah.</p> <p># Aplikasi ini juga berfungsi untuk memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah secara <i>online</i>.</p>	RAA.02.02	<i>Website & Mobile</i>	Internal OPD, Publik

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	# Aplikasi ini dilengkapi GPS Tracking yang memungkinkan proses pengangkutan dan pembuangan limbah B3 akan secara realtime dapat terpantau keberadaannya sampai ke lokasi pembuangan akhir.			
Pengembangan Website DLH	Mengembangkan <i>website</i> DLH dengan menambahkan modul yang berisikan informasi terkait Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	RAA.01.01	<i>Website</i>	Publik

Berdasarkan Tabel 4.28 terdapat 3 (tiga) usulan aplikasi berbasis *website* dimana satu aplikasi merupakan aplikasi baru dan dua aplikasi lainnya merupakan pengembangan aplikasi yang sudah ada. Pertama, pengembangan aplikasi SILAPLING yang diusulkan untuk mendukung tupoksi Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup-Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Subkoordinator Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup serta mendukung Program Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Kedua, aplikasi Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang diusulkan untuk mendukung tupoksi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun serta mendukung Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3), dan Program Pengelolaan Persampahan. Ketiga, pengembangan *website* DLH untuk mendukung tupoksi Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup-Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, serta mendukung Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

4.3.7.23 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 4 (empat) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana 1 (satu) bidang belum didukung adanya aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat total 11 (sebelas) program yang mana 1 (satu) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal PD, didapatkan bahwa **tidak ada usulan** aplikasi untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4.3.7.24 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan memiliki 3 (tiga) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana seluruh bidang telah didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Dinas Perhubungan terdapat 8 (delapan) program yang mana 3 (tiga) program belum didukung dengan adanya aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 2 (dua) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.29** sebagai berikut.

Tabel 4.29 Usulan Aplikasi Dinas Perhubungan

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aplikasi E-Hub	<p>Aplikasi untuk pelayanan perizinan/pemberian rekomendasi dari Dinas Perhubungan, meliputi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rekomendasi penyelenggaraan perlengkapan jalan, bangunan dan/atau fasilitas selain perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan -Rekomendasi izin penggunaan badan dan bahu jalan selain untuk kepentingan lalu lintas -Rekomendasi izin dan pendirian badan usaha / Lembaga pendidikan dan latihan mengemudi -dsb <p>Aplikasi ini menampilkan infografis terkait data kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap harinya melalui integrasi data dengan kepolisian, serta memberikan informasi kondisi lalu lintas secara real time</p>	RAA.02.02	Website	Internal OPD dan Publik
Sistem Informasi	Aplikasi untuk pendataan angkutan umum (untuk	RAA.02.02	Website dan	Pengelola Angkutan

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pelayanan Angkutan Umum dan Pelajar	umum maupun angkutan pelajar) dan urusan terkait ruang fasilitas angkutan umum (terminal dan halte) di Kota Madiun. Memberikan informasi operasional (jadwal dan lintasan trayek), serta posisi angkutan secara real time menggunakan GPS.		<i>Mobile</i>	umum, Publik, Internal OPD

Berdasarkan Tabel 4.29 terdapat 2 (dua) usulan aplikasi khusus fungsi tertentu untuk Dinas Perhubungan. Pertama, aplikasi E-Hub yang diusulkan untuk mendukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kedua, aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Angkutan Umum dan Pelajar yang diusulkan untuk mendukung tupoksi dari Bidang Angkutan Darat sekaligus mendukung Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4.3.7.25 Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 3 (tiga) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana seluruh bidang telah didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat total 13 (tiga belas) program yang mana 3 (tiga) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 3 (tiga) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.30** sebagai berikut.

Tabel 4.30 Usulan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Satu Data Kota Madiun	Aplikasi untuk mengelola dan mempublikasikan data-data pemerintahan agar seluruh data dapat terpusat ke dalam satu platform	RAA.02.02	Website	Seluruh OPD dan Publik
Aplikasi SDM TIK Kota Madiun	Aplikasi untuk mengelola data dan pengembangan sumber daya TIK di pemerintahan Kota Madiun. Pada aplikasi ini juga dilakukan monitoring terhadap kinerja SDM TIK mengenai pengembangan aplikasi, pelaksanaan manajemen dan keamanan TIK, dsb.	RAA.02.02	Website	Seluruh OPD
Aplikasi Manajemen Aplikasi	Aplikasi yang berfungsi untuk mendata dan menampilkan seluruh aplikasi yang dimiliki oleh seluruh OPD di Kota Madiun untuk memudahkan dalam pencatatan perkembangan aplikasi seperti perubahan aplikasi, status pengembangan aplikasi, permasalahan aplikasi, integrasi aplikasi, dsb.	RAA.02.02	Website	Internal OPD

Berdasarkan Tabel 4.30 terdapat 3 (tiga) usulan aplikasi khusus fungsi tertentu untuk mendukung kebutuhan Diskominfo. Pertama, aplikasi Satu Data Kota Madiun yang diusulkan untuk mendukung Program Aplikasi Informatika.

Kedua, aplikasi SDM TIK Kota Madiun yang diusulkan untuk mendukung Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Ketiga, aplikasi Manajemen Aplikasi yang diusulkan untuk mendukung Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

4.3.7.26 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 4 (empat) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana seluruh bidang telah didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat total 15 (lima belas) program yang mana 4 (empat) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 2 (dua) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.31** berikut.

Tabel 4.31 Usulan Aplikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan WEBGIS DPMPSTP	Aplikasi berbasis Web GIS yang memberikan informasi terkait peta persebaran perizinan terbit per lokasi. Pengembangan dilakukan dengan penyempurnaan peta zonasi	RAA 01.01	<i>Website</i>	Publik dan Internal OPD
Pengembangan MASS Madiun	Pengembangan MASS Madiun dengan penambahan modul terkait Chatbot sebagai media berkomunikasi dengan publik	RAA.02.02	<i>Website</i>	Publik dan Internal OPD

Berdasarkan Tabel 4.31 terdapat 2 (dua) usulan aplikasi berbasis *website* yang mana dua aplikasi tersebut merupakan pengembangan aplikasi yang sudah ada. Pengembangan aplikasi WEBGIS DPMPTSP dan Pengembangan aplikasi MASS Madiun diusulkan berdasarkan hasil survei dari kebutuhan internal DPMPTSP. Kedua aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang diperuntukkan untuk internal PD dan juga untuk publik.

4.3.7.27 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga memiliki 4 (empat) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana 3 (tiga) bidang belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga terdapat total 16 (enam belas) program yang mana 12 (dua belas) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 2 (dua) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.32** berikut.

Tabel 4.32 Usulan Aplikasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
E-Disbudpora	Membuat aplikasi yang mencakup seluruh informasi publik dan pelayanan publik Disbudparpora Menampilkan daftar Pariwisata, Kebudayaan, Kesenian, Sejarah, Museum, dan Cagar Budaya yang dimiliki Kota Madiun beserta informasinya beserta persebarannya dalam bentuk Web GIS # Mengakomodir pelayanan manual menjadi <i>online</i> ,	RAA.02.02	<i>Website</i>	Internal OPD dan Publik

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	<p>diantaranya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sewa Tempat Rekreasi dan Olahraga (menampilkan jadwal yang tersedia dan sekaligus transaksi secara <i>online</i>) - Registrasi Nomor Induk Kesenian - Perpanjangan Nomor Induk Kesenian - Perizinan Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian - Penerbitan Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri - Penerbitan Nomor Registrasi Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat - Perizinan Membawa Cagar Budaya Keluar Kota Dalam Satu Provinsi - Pemberian Perizinan Usaha Perfilman Di Bidang Pembuatan Film, Penedaran Film, Penjualan Film, Penyewaan Film (VCD,DVD), Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film Melalui Media Elektronik dan Tempat Hiburan - Perizinan usaha Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing 			
Sistem Informasi	Sistem informasi untuk mendata data kepemudaan dari	RAA.02.02	Website	Internal OPD dan

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Kepemudaan Kota Madiun	bermacam aspek untuk kepentingan data daerah dan BPS. Berfungsi juga untuk memfasilitasi Wirausaha Muda, atlet dan pemuda yang berprestasi lainnya, serta memberikan informasi terkait adanya pelatihan dan pendampingan.			Publik

Berdasarkan Tabel 4.32 terdapat 2 (dua) usulan aplikasi berbasis *website* yang diperuntukkan untuk internal PD maupun publik. Pertama, aplikasi E-Disbudpora yang diusulkan untuk mendukung seluruh pelayanan Disbudpora yang masih berjalan secara manual serta seluruh program yang berkaitan dengan layanan publik kesenian, pariwisata dan olahraga. Kedua, aplikasi Sistem Informasi Kepemudaan Kota Madiun diusulkan untuk mendukung Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

4.3.7.28 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki 3 (tiga) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana seluruh bidang telah didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat total 11 (sebelas) program yang mana 2 (dua) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 1 (satu) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.33** sebagai berikut.

Tabel 4.33 Usulan Aplikasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan iMadiun	Pengembangan aplikasi dilakukan dengan Integrasi data NIK dengan iMadiun untuk memeriksa keabsahaan user. Dikembangkan juga untuk mendata pustakawan dan perpustakaan yang ada di Kota Madiun serta sebagai media untuk menyampaikan informasi terkait pelatihan dan pembinaan pustakawan	RAA.02.02	Website	Publik

Berdasarkan **Tabel 4.35** terdapat satu usulan aplikasi yang merupakan pengembangan dari aplikasi yang sudah ada yaitu, Pengembangan aplikasi iMadiun yang diusulkan untuk mendukung Program Pembinaan Perpustakaan.

4.3.7.29 Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan memiliki 3 (tiga) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana satu bidang belum didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Dinas Perdagangan terdapat total 13 (tiga belas) program yang mana 6 (enam) program belum didukung dengan adanya aplikasi. Setelah dilakukan analisis maka didapatkan 6 (enam) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.34** berikut.

Tabel 4.34 Usulan Aplikasi Dinas Perdagangan

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
SIM PASAR	Pembelian barang di pasar bisa melalui expedisi (marketplace khusus untuk pasar); Pengelolaan penghimpunan/ pendataan informasi terkait pengelolaan pasar (kelas, retribusi, jenis bangunan);	RAA.02.02	<i>Mobile</i>	Publik
SP2KP	Aplikasi pendataan dan pemantauan pasar dan Harga serta stok/pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting)	RAA 01.01	<i>Website</i>	Surveior, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Publik
Aplikasi Perlindungan Konsumen	Aplikasi yang berfungsi sebagai pelaporan kasus sengketa konsumen dan proses penyelesaiannya. Aplikasi ini juga berfungsi untuk pendaftaran, pendataan dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat	RAA.02.02	<i>Website</i>	Internal OPD dan Publik
InaExport	Pelaku ekspor dapat menggunakan aplikasi ini untuk mempromosikan produk-produk unggulan mereka. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem dagang yang kondusif karena pengguna diverifikasi terlebih dahulu	RAA.02.02	<i>Website & Mobile</i>	Publik

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	<p>oleh Kemendag saat mendaftar sebagai anggota, menyediakan fasilitas etalase virtual sehingga pelaku usaha ekspor dapat menampilkan produk unggulan mereka, lengkap dengan informasi dan spesifikasinya untuk membantu buyer memilih produk. memiliki media komunikasi langsung daring berbasis fitur chat yang membantu mempercepat terjadinya kontak antara pelaku usaha ekspor dengan buyer potensial, menyediakan fitur inquiry dan rencana kegiatan penjajakan kesepakatan bisnis(business matching)yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk aktif mencari peluang ekspor. Aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai sarana berpromosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara digital.</p>			
SIMPEL	<p>Aplikasi yang berfungsi untuk pelaporan dan pengawasan ukuran, takaran, dan timbangan</p>	RAA.02.02	Website	Publik

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	dalam bertransaksi perdagangan sehingga membantu meminimalisir kerugian yang diterima bagi konsumen dan pelaku usaha.			
Pengembangan BUMU	Aplikasi yang berfungsi sebagai pencatatan buku tamu. Seluruh OPD di Kota Madiun dapat turut menggunakan aplikasi ini agar pencatatan tamu tidak secara manual.	RAA.02.02	Website	Publik

Berdasarkan Tabel 4.34 terdapat 6 (enam) usulan aplikasi, dimana tiga aplikasi diantaranya merupakan aplikasi milik pusat, dua aplikasi baru dan satu aplikasi merupakan pengembangan dari yang sudah ada. Pertama, aplikasi SIM PASAR yang diusulkan berdasarkan hasil survei dari kebutuhan Dinas Perdagangan. Kedua, aplikasi SP2KP dan aplikasi SIMPEL merupakan aplikasi milik pusat yang diusulkan untuk mendukung Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Ketiga, aplikasi Perlindungan Konsumen yang diusulkan untuk mendukung tupoksi dari Bidang Usaha Perdagangan, Subkoordinator Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta mendukung Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. Ketiga, aplikasi Ina Export sebagai aplikasi pusat yang diusulkan untuk mendukung Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Keempat, Pengembangan aplikasi BUMU yang diusulkan karena aplikasi tersebut memiliki untuk PD lain sehingga dapat diimplementasikan ke seluruh PD di Kota Madiun.

4.3.7.30 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki 4 (empat) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana seluruh bidang telah didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdapat total 11 (sebelas) program yang mana 5 (lima) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 2 (dua) usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.35** sebagai berikut.

Tabel 4.35 Usulan Aplikasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Pengembangan SIM SATPOL PP	SIM SATPOL PP dikembangkan dengan menampilkan data rekapitulasi penanganan ringan seperti ODGJ, kebakaran yang bisa dilihat masyarakat	RAA 01.01	Website	internal OPD dan Publik
SISKAMLING	Pengecekan alat pemadam kebakaran. Aplikasi pelaporan dan pendataan terkait alat pemadam tabung ringan	RAA.02.02	Website	SISKAMLING, Internal OPD

Berdasarkan Tabel 4.35 terdapat 2 (dua) usulan aplikasi yang mana satu aplikasi merupakan aplikasi baru dan satu lainnya merupakan pengembangan dari aplikasi yang sudah ada. Pertama, pengembangan aplikasi SIM SATPOL PP diusulkan berdasarkan hasil survei kebutuhan dari Satpol PP dan Damkar. Kedua, aplikasi SISKAMLING diusulkan untuk mendukung Layanan Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

4.3.7.31 Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah memiliki 4 (empat) Bidang yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana seluruh bidang telah didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun terdapat 6 (enam) program yang mana 3 (tiga) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan 4 (empat) usulan aplikasi yang dijabarkan pada Tabel 4.36 berikut.

Tabel 4.36 Usulan Aplikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
E-Aset	Aplikasi yang digunakan untuk manajemen aset dan pengajuan pemeliharaan barang RSUD Kota Madiun	RAA.02.03	<i>Website</i>	Internal OPD
Telemedicine RSUD Kota Madiun	Aplikasi yang digunakan untuk pelayanan konsultasi atau pemeriksaan pasien secara <i>online</i> pada RSUD Kota Madiun. Aplikasi ini juga digunakan untuk menyajikan informasi terkait ketersediaan fasilitas rumah sakit, seperti kamar inap, ICU, UGD, ambulance di Rumah Sakit untuk masyarakat	RAA.02.04	<i>Website dan Mobile</i>	Publik
E- Monas	Aplikasi yang digunakan untuk pencatatan kematian dan kelahiran secara real time dan terintegrasi dengan data kependudukan	RAA.02.05	<i>Website</i>	Internal OPD
E-Belanja BLUD	Aplikasi yang digunakan untuk manajemen dan pencatatan belanja keuangan	RAA.02.06	<i>Website</i>	Internal OPD

Berdasarkan Tabel 4.36 terdapat 4 (empat) usulan aplikasi khusus fungsi tertentu yang diusulkan untuk mendukung kebutuhan RSUD Kota Madiun. Pertama, aplikasi E-Aset dan aplikasi Telemedicine RSUD Kota Madiun yang diusulkan berdasarkan hasil survei serta untuk mendukung Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit. Kedua, aplikasi E- Monas dan aplikasi E-Belanja BLUD yang juga diusulkan berdasarkan hasil survei terkait kebutuhan RSUD Kota Madiun.

4.3.7.32 Kecamatan Manguharjo

Kecamatan Manguharjo memiliki 1 (satu) Bidang dan 4 (empat) Seksi yang membantu proses bisnis utama dari PD, dimana Bidang dan 1 (satu) Seksi telah didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Kecamatan Manguharjo terdapat total 13 (tiga belas) program yang mana 8 (delapan) program belum didukung aplikasi. Setelah dilakukan analisis didapatkan satu usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.37** sebagai berikut.

Tabel 4.37 Usulan Aplikasi Kecamatan Manguharjo

Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Aplikasi Mall Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan pelayanan dari Kecamatan dan Kelurahan agar masyarakat tidak lagi datang langsung ke kantor untuk urusan administrasi surat-menyurat. Setelah aplikasi ini berhasil diimplementasikan di Kecamatan Manguharjo, maka selanjutnya dapat juga diimplementasikan kepada seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun.	RAA 01.02	<i>Website</i>	Kecamatan, kelurahan dan Publik

Berdasarkan Tabel 4.37 terdapat satu usulan aplikasi yaitu, aplikasi Mall Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan yang diusulkan untuk mendukung Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

4.3.7.33 Kecamatan Kartoharjo

Kecamatan Kartoharjo memiliki 1 (satu) Bidang dan 4 (empat) Seksi yang membantu proses bisnis utama dari PD dimana Bidang dan 1 (satu) Seksi telah didukung aplikasi. Sedangkan untuk program RPJMD dari Kecamatan Manguharjo terdapat 13 (tiga belas) program yang mana 7 (tujuh) program belum didukung dengan adanya aplikasi. Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan internal maupun eksternal PD, didapatkan bahwa **tidak ada usulan** aplikasi untuk Kecamatan Kartoharjo.

4.3.7.34 Puskesmas Manguharjo

Berdasarkan urusannya Puskesmas Manguharjo menangani urusan Kesehatan dibawah naungan Dinas Kesehatan. Setelah dilakukan analisis terkait kebutuhan puskesmas berdasarkan kebutuhan internal maupun eksternal PD, didapatkan bahwa **tidak ada usulan** aplikasi untuk Puskesmas Manguharjo dikarenakan seluruh aplikasi mengikuti arahan dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun Kementerian Kesehatan.

4.3.7.35 Puskesmas Sukoharjo

Berdasarkan urusannya Puskesmas Sukoharjo menangani urusan Kesehatan dibawah naungan Dinas Kesehatan. Setelah dilakukan analisis terkait kebutuhan puskesmas berdasarkan kebutuhan internal maupun eksternal PD, didapatkan bahwa **tidak ada usulan** aplikasi untuk Puskesmas Sukoharjo dikarenakan seluruh aplikasi mengikuti arahan dari Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun Kementerian Kesehatan.

4.3.8 Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi SPBE

Setelah dilakukan analisis terkait usulan aplikasi untuk seluruh OPD di Pemerintahan Kota Madiun, didapatkan **87 (delapan puluh tujuh) usulan aplikasi** yang terdiri dari pembangunan aplikasi baru, pemanfaatan aplikasi pusat, dan pengembangan aplikasi eksisting. Setelah dilakukan analisis terhadap SOTK serta uraian serta fungsi masing-masing aplikasi yang dimiliki, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa aplikasi yang memiliki fungsi yang sama, mengelola data yang sama, maupun secara fungsi sebaiknya di integrasikan agar meningkatkan efisiensi kinerja pegawai dan layanan. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) usulan integrasi antar aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 4.38** sebagai berikut.

Tabel 4.38 Usulan Integrasi Aplikasi SPBE

OPD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi Eksisting/Usulan	Nama OPD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi
Bagian Hukum	Aplikasi Bantuan Hukum dan HAM (https://sidbankum.bphn.go.id/)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Web Service Pemanfaatan Data DWH Terpusat
Bagian Pemerintahan	Aplikasi Mall Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Web Service Pemanfaatan Data DWH Terpusat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Kebencanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Madiun Dashboard
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Kebencanaan

OPD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi Eksisting/Usulan	Nama OPD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Aplikasi penyusunan dokumen perencanaan OPD (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	M-SKP
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Aplikasi Pengendalian dan Informasi Pembangunan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Aplikasi penyusunan dokumen perencanaan OPD (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Verifikasi anggaran dan Laporan Keuangan secara terintegrasi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	ASB (Analisis Standar Biaya) (https://sipkd.madiunkota.go.id/asb 2023)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Verifikasi anggaran dan Laporan Keuangan secara terintegrasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KUE DAKON (kuedakon.my.id)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Verifikasi anggaran dan Laporan Keuangan secara terintegrasi	Bagian Organisasi	E-SAKIP (https://esakip.madiunkota.go.id/)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Verifikasi anggaran dan Laporan Keuangan secara terintegrasi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	E-KAK
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Verifikasi anggaran dan Laporan Keuangan secara terintegrasi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIPKD http://sipkd.madiunkota.go.id/sipkd2022

OPD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi Eksisting/Usulan	Nama OPD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aplikasi Penyimpanan Berkas untuk Laporan dan SPJ	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KUE DAKON (kuedakon.my.id)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aplikasi Penyimpanan Berkas untuk Laporan dan SPJ	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIPKD (http://sipkd.madiunkota.go.id/sipkd2022)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIM GAJI (Pengembangan)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SIK
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	e-BUMD	Badan Pendapatan Daerah	SIMPADAMA (Pengembangan)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	E-Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	SIMPADAMA (Pengembangan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Seleksi Terbuka	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SIK
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Pindah Antar Wilayah (PAW) atau Mutasi antar Pemda	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SIK

OPD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi Eksisting/Usulan	Nama OPD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aplikasi Integrasi data NIK Dukcapil dan NIK peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Web Service Pemanfaatan Data DWH Terpusat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aplikasi Layanan Publik PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	MASS Madiun
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi SIKSDROID	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SIKS-NG
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi Laporan Kebencanaan dan Penyaluran Bantuan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Kebencanaan
Dinas Pendidikan	DAPODIK	Dinas Pendidikan	Aplikasi LI
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aplikasi Manajemen Kepegawaian Non ASN Internal DKPP	SIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dinas Perhubungan	E-Kir	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Web Service Pemanfaatan Data DWH Terpusat
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	iMadiun (Pengembangan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Web Service Pemanfaatan Data DWH Terpusat
Dinas Perdagangan	E-Retribusi	Dinas Perdagangan	SIM PASAR
Dinas Perdagangan	Aplikasi Perlindungan Konsumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Web Service Pemanfaatan Data DWH Terpusat

OPD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi Eksisting/Usulan	Nama OPD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi
		Sipil	
Dinas Perdagangan	InaExport	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Web Service Pemanfaatan Data DWH Terpusat
Dinas Perdagangan	BUMU (Pengembangan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Web Service Pemanfaatan Data DWH Terpusat
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Telemedicine	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Web Service Pemanfaatan Data DWH Terpusat
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	E- Monas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Web Service Pemanfaatan Data DWH Terpusat

Berdasarkan data pada Tabel 4.38 terdapat **33 (tiga puluh tiga) usulan integrasi aplikasi**. Dari usulan integrasi tersebut terdapat 43 (empat puluh tiga) aplikasi yang nantinya akan diintegrasikan dengan aplikasi yang saling berhubungan sesuai dengan penjabaran yang ada pada tabel diatas. Proses integrasi aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pengelolaan dan pengoperasian sistem serta menciptakan integrasi data yang efisien.

4.4 DAFTAR USULAN APLIKASI SPBE

Sub bab ini berisi tentang daftar usulan aplikasi yang sebelumnya, kemudian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yakni **referensi aplikasi** (administrasi/layanan publik/misi tertentu/fungsi tertentu) yang didasarkan pada Kode Model Referensi SPBE Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun

2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik, dan **jenis pengembangan aplikasi** (usulan hasil survei/usulan hasil analisis/pengembangan/penggunaan aplikasi pusat).

4.4.1 Daftar Usulan Aplikasi SPBE

Daftar usulan aplikasi ini merupakan hasil analisis akhir dari langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam mengidentifikasi usulan aplikasi. Adapun detail usulan di setiap PD telah dijabarkan dengan rincian keseluruhan **87 (delapan puluh tujuh) Usulan Aplikasi**. Daftar usulan aplikasi terkait PD Pengelola, nama aplikasi, kategori usulan, referensi aplikasi, basis aplikasi dan pengguna aplikasi dilihat pada **Tabel 4.39** di bawah ini. Sedangkan untuk detail tabel usulan aplikasi secara keseluruhan mencakup PD Pemilik, dan penjelasan aplikasi dapat dilihat pada **Lampiran Usulan Aplikasi**.

Tabel 4.39 Daftar Usulan Aplikasi SPBE

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
1	Bagian Organisasi	E-SOP	Hasil Survei	Aplikasi administrasi pemerintah	Website	Seluruh OPD sampai dengan Kelurahan
2	Bagian Organisasi	Aplikasi SUKMA	Hasil Survei	Aplikasi Layanan Publik	Website	Publik dan Seluruh OPD
3	Bagian Hukum	Aplikasi Bantuan Hukum dan HAM (https://sidbankum.bphn.go.id/)	Layanan	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik, Internal OPD
4	Bagian Hukum	Pengembangan JDIH	Pengembangan dan Layanan	Aplikasi administrasi pemerintahan	Website	Seluruh OPD

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
5	Bagian Hukum	Pengembangan <i>Website</i> Bagian Hukum	Pengembangan	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Website</i>	Publik
6	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Sistem Informasi Pengelolaan Hibah	Layanan	Aplikasi Layanan Publik	<i>Website</i>	Internal OPD & Publik
7	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	e-BUMD	Layanan	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Website</i>	Internal OPD
8	Bagian Umum	<i>Website</i> Bagian Umum	Analisis	Aplikasi Layanan Publik	<i>Website</i>	Publik
9	Bagian Umum	Aplikasi Pelayanan Internal Sekretariat Daerah	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Website</i>	Internal OPD (Seluruh Bagian pada Sekda)
10	Bagian Pemerintahan	Sistem Informasi Kerja Sama Daerah	Analisis	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	<i>Website</i>	Seluruh OPD, Publik
11	Bagian Pemerintahan	Aplikasi Kewilayahan	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Website</i>	Internal OPD & Publik
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Kebencanaan	Hasil Survei dan Layanan	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Website</i>	Publik dan OPD lain (Dinas Sosial)
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Rehabilitasi dan	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Website</i>	Internal OPD & Publik

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
		Rekonstruksi				
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembangan Website BPBD	Pengembangan	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
15	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Aplikasi penyusunan dokumen perencanaan OPD (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja)	Hasil Survei	Aplikasi administrasi pemerintahan	Website	seluruh OPD
16	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Website BAPEDALITBANG	Pengembangan	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Aplikasi Pengendalian dan Informasi Pembangunan	Hasil Survei dan Layanan	Aplikasi administrasi pemerintahan	Website	seluruh OPD
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Aplikasi E-KAK	Pengembangan Hasil Survei	Aplikasi administrasi pemerintahan	Website	seluruh OPD
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi untuk verifikasi anggaran dan Laporan Keuangan secara terintegrasi	Hasil Survei	Aplikasi administrasi pemerintahan	Website	seluruh OPD
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Penyimpanan	Hasil Survei	Aplikasi Administrasi	Website	Internal OPD

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
		Berkas untuk Laporan dan SPJ		Pemerintahan		
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengembangan SIM GAJI	Pengembangan dan Layanan	Aplikasi administrasi pemerintahan	Website	Seluruh OPD
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	E-Retribusi Daerah	Layanan	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website dan Mobile	Internal PD dan Publik
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Daftar pengguna /penyewa Kekayaan Daerah (ruko, sawah, bangunan gedung , gudang dll)	Hasil Survei	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Website	Internal OPD & Publik
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Penerimaan dan pengeluaran barang habis pakai terintegrasi ke seluruh OPD	Hasil Survei	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Website	Seluruh PD
25	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan SIMPADAMA	Pengembangan, Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD
26	Badan Pendapatan Daerah	Pembuatan Sistem Informasi PBB	Hasil Survei	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD & Publik
27	Badan Kepegawaian dan	Aplikasi Seleksi Terbuka	Hasil Survei	Aplikasi administrasi	Website	Publik

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	Pengembangan Sumber Daya Manusia			pemerintahan		
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Legalisir dan Keabsahan <i>Online</i>	Layanan	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Website</i>	Seluruh OPD, Publik
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Permohonan /Perizinan/Pengajuan Internal BKPSDM	Layanan	Aplikasi administrasi pemerintahan	<i>Website</i>	Seluruh OPD dan Publik
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Pengembangan ASN	Analisis	Aplikasi Administrasi Pemerintah	<i>Website</i>	Seluruh OPD
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SIORMAS	Layanan	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Website</i>	Internal OPD, Publik
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan <i>Website</i> Bangkesbangpo 1	Pengembangan	Aplikasi Layanan Publik	<i>Website</i>	Publik
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aplikasi Mitigasi Konflik	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Website</i>	Internal OPD & Publik
34	Inspektorat Daerah	SINAWASDA	Hasil Survei	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	<i>Website</i>	Seluruh PD
35	Sekretariat DPRD	E-risalah	Analisis	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	<i>Website</i>	Seluruh OPD

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
36	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aplikasi Integrasi data NIK Dukcapil dan NIK peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID)	Hasil Survei	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD
37	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengembangan E-SIP - Surat Izin Praktek	Pengembangan	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD, Publik
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aplikasi Layanan Publik PUPR	Hasil Survei dan Layanan	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD, Publik
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIMTARUBANG	Layanan	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD, Publik
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Sumber Daya Air	Analisis	Aplikasi Layanan Publik	Website	Internal OPD & Publik
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIBIMA Konstruksi (https://sibima.pu.go.id/)	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
42	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD & Publik

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
		dan Pemakaman				
43	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Aplikasi Identifikasi dan Pengelola Data Pemukiman	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD & Publik
44	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengembangan Puskesmas untuk <i>Mobile</i>	Hasil Survei	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Mobile</i>	Internal OPD
45	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi SIKSDROID	Hasil Survei	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Mobile</i>	Internal OPD
46	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi Laporan Kebencanaan dan Penyaluran Bantuan Bencana	Hasil Survei	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik dan OPD lain (BPBD)
47	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi Layanan Publik Dinsos P3A	Layanan	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD, Publik
48	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SI ORSOS	Layanan	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD, Publik
49	Dinas Sosial, Pemberdayaan	Aplikasi Rehabilitasi	Analisis	Aplikasi Fungsi	Website	Internal OPD, Publik

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial		Tertentu		
50	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	pengembangan si-CAKER	Pengembangan dan Layanan	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD & Publik
51	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Pengembangan E-Kami	Pengembangan	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website & Mobile	Publik (Pelaku operasi, UMKM dan Usaha Mikro) & OPD lain (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
52	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	SIPRONI	Analisis	Aplikasi Layanan Publik	Website	Publik
53	Dinas Pendidikan	Pengembangan Aplikasi LI	Pengembangan	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik (Siswa dan Guru)
54	Dinas Pendidikan	Aplikasi Manajemen Tenaga Kependidikan	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik (Tenaga Kependidikan)
55	Dinas Pendidikan	Sistem Informasi Lembaga Pendidikan Non Formal	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik (Lembaga Pendidikan Non Formal)

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
56	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aplikasi Manajemen Kepegawaian Non ASN Internal DKPP	Hasil Survei	Aplikasi administrasi pemerintah	Website	Internal OPD
57	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SIM HEWAN	Hasil Survei dan Layanan	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD & Publik
58	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SIM IKAN	Layanan	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD & Publik
59	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SIM TANI	Layanan	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD & Publik
60	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aplikasi Ketahanan dan Kerawanan Pangan	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD & Publik
61	Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan Aplikasi SILAPLING	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website & Mobile	Internal OPD, Publik
62	Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website & Mobile	Internal OPD, Publik
63	Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan Website DLH	Pengembangan,	Aplikasi Layanan Publik	Website	Publik
64	Dinas Perhubungan	Pengembangan E-Kir	Pengembangan	Aplikasi Fungsi	Website	Internal OPD &

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
			dan Hasil Survei	Tertentu		Publik
65	Dinas Perhubungan	Aplikasi E-Hub	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Website</i>	Internal OPD & Publik
66	Dinas Perhubungan	Sistem Informasi Pelayanan Angkutan Umum dan Pelajar	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Website dan Mobile</i>	Internal OPD & Publik (Pengelola Angkutan umum dan masyarakat)
67	Dinas Komunikasi dan Informatika	Satu Data Kota Madiun	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Website</i>	Seluruh OPD dan Publik
68	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi SDM TIK Kota Madiun	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Website</i>	Seluruh OPD
69	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Manajemen Aplikasi	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Website</i>	Internal OPD
70	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan WEBGIS DPMPSTSP	Pengembangan dan Hasil Survei	Aplikasi Layanan Publik	<i>Website</i>	Publik dan Internal OPD
71	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan MASS Madiun	Pengembangan dan Hasil Survei	Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Website</i>	Publik dan Internal OPD
72	Dinas	E-Disbudpora	Layanan	Aplikasi	<i>Website</i>	Internal

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			Fungsi Tertentu		OPD & Publik
73	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Sistem Informasi Kepemudaan Kota Madiun	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik dan Internal OPD
74	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan iMadiun	Pengembangan dan Hasil Survei	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
75	Dinas Perdagangan	SIM PASAR	Hasil Survei	Aplikasi Fungsi Tertentu	Mobile	Publik
76	Dinas Perdagangan	SP2KP	Analisis	Aplikasi Layanan Publik	Website	Publik (Surveior dan masyarakat) & OPD lain (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
77	Dinas Perdagangan	Aplikasi Perlindungan Konsumen	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD & Publik
78	Dinas Perdagangan	InaExport	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website & Mobile	Internal OPD & Publik
79	Dinas Perdagangan	SIMPEL	Analisis	Aplikasi Fungsi	Website	Publik

No	Nama OPD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
				Tertentu		
80	Dinas Perdagangan	Pengembangan BUMU	Analisis	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
81	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	pengembangan SIM SATPOL PP	Hasil Survei	Aplikasi Layanan Publik	Website	Internal OPD & Publik
82	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SISKAMLING	Layanan	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD & Publik (SISKAMLING)
83	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	E-Aset	Hasil Survei	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD
84	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Telemedicine RSUD Kota Madiun	Hasil Survei	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website dan Mobile	Internal OPD & Publik
85	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	E- Monas	Hasil Survei	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD
86	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	E-Belanja BLUD	Hasil Survei	Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal OPD
87	Kecamatan Manguharjo	Aplikasi Mall Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Analisis	Aplikasi administrasi pemerintah	Website	OPD lain (seluruh Kecamatan dan Kelurahan) & Publik

4.4.2 Pengelompokan Usulan Aplikasi SPBE

Kategori usulan aplikasi dianalisis berdasarkan data daftar usulan aplikasi yang disajikan pada **Tabel 4.39**. Seluruh usulan aplikasi dikategorikan menjadi **4 (empat) kategori**, yaitu berdasarkan jenis pengembangannya, referensi aplikasi, basis aplikasi, dan pengguna aplikasi.

4.4.2.1 Jumlah Aplikasi berdasarkan Jenis Pengembangan

Kategori aplikasi berdasarkan jenis usulan secara umum dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu aplikasi usulan hasil Survei, aplikasi usulan hasil analisis, aplikasi pengembangan, dan usulan penggunaan aplikasi pusat.

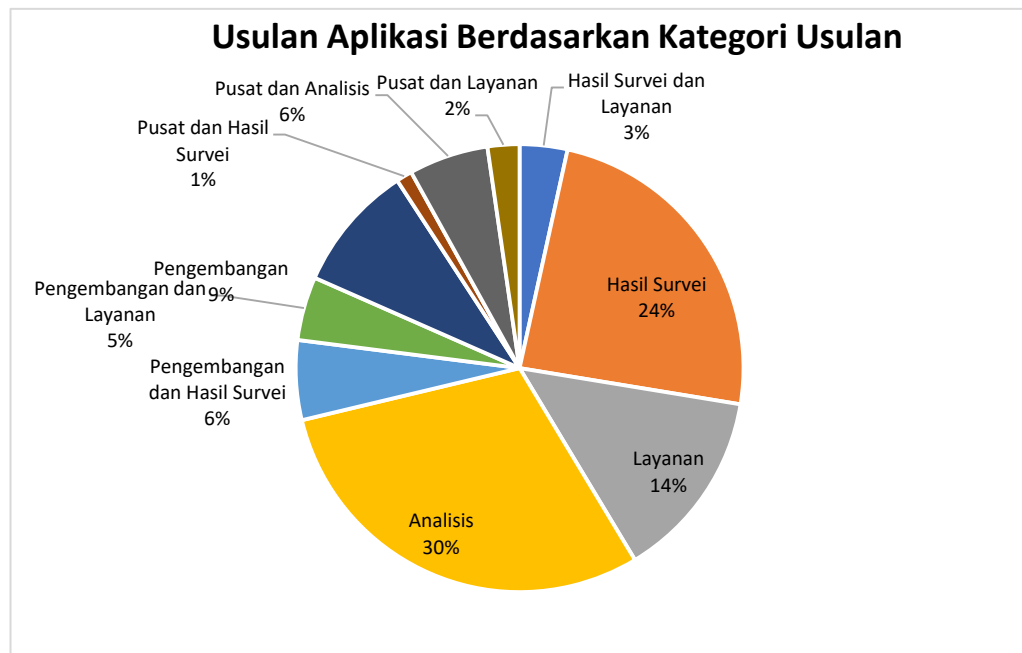
- a. **Aplikasi usulan hasil Survei** adalah jenis pengembangan aplikasi yang didasarkan pada usulan hasil Survei yang telah dilakukan pada Pemerintah Kota Madiun.
- b. **Aplikasi usulan hasil analisis** adalah jenis pengembangan aplikasi yang diperoleh berdasarkan hasil identifikasi program prioritas RPJMD, identifikasi potensi aplikasi yang diperoleh dari hasil pemetaan antara proses bisnis, dan data dan informasi, identifikasi layanan SPBE dengan akses manual, dan identifikasi 14 (empat belas) layanan.
- c. **Aplikasi pengembangan** adalah jenis pengembangan aplikasi SPBE eksisting berupa usulan pengembangan fitur dan fungsi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan ataupun usulan perbaikan dari aplikasi eksisting yang bermasalah, dan juga usulan pengintegrasian suatu aplikasi dengan aplikasi lain.
- d. **Usulan penggunaan aplikasi pusat** adalah jenis pengembangan penggunaan aplikasi yang telah disediakan oleh instansi pusat yang diperkirakan akan

dapat mencakup tupoksi yang dijalankan Pemerintah Kota Madiun.

Untuk mengelompokkan kategori jenis penggunaan aplikasi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori aplikasi, sehingga pengelompokan aplikasi berdasarkan jenis penggunaannya terbagi menjadi 10 (sepuluh) kategori. Secara detail dapat dilihat sebagai berikut:

- a. **Hasil Survei dan Layanan** yaitu usulan aplikasi berdasarkan hasil survei yang mendukung layanan manual **(3 aplikasi)**
- b. **Hasil Survei**, yaitu usulan aplikasi berdasarkan hasil survei yang mendukung tupoksi **(21 aplikasi)**
- c. **Layanan**, yaitu usulan aplikasi berdasarkan analisis untuk mendukung layanan manual **(12 aplikasi)**
- d. **Analisis**, yaitu usulan aplikasi berdasarkan analisis yang mendukung tupoksi **(26 aplikasi)**
- e. **Pengembangan dan Hasil Survei**, yaitu pengembangan aplikasi berdasarkan hasil survei **(5 aplikasi)**
- f. **Pengembangan dan Layanan**, yaitu pengembangan aplikasi yang mendukung layanan manual **(4 aplikasi)**
- g. **Pengembangan**, yaitu pengembangan aplikasi berdasarkan analisis yang mendukung tupoksi **(8 aplikasi)**
- h. **Pusat dan Hasil Survei**, yaitu usulan aplikasi aplikasi pusat berdasarkan Hasil Survei yang mendukung tupoksi **(1 aplikasi)**
- i. **Pusat dan Analisis**, yaitu usulan aplikasi aplikasi pusat berdasarkan Analisis yang mendukung tupoksi **(5 aplikasi)**
- j. **Pusat dan Layanan**, yaitu usulan aplikasi aplikasi pusat yang mendukung layanan manual **(2 aplikasi)**

Untuk detail persentase jumlah aplikasi untuk masing-masing kategori dapat dilihat pada **Gambar 4.3** berikut.



Gambar 4.4.3 Persentase Jenis Usulan Aplikasi

Berdasarkan **Gambar 4.47** usulan aplikasi paling banyak didapatkan adalah usulan aplikasi berdasarkan analisis yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) aplikasi (30%) dan yang paling sedikit adalah usulan aplikasi aplikasi pusat berdasarkan Hasil Survei sebanyak 1 (satu) aplikasi (1%). Dari hasil Dari 87 (delapan puluh tujuh) usulan aplikasi tersebut terdapat **8 (delapan) aplikasi pusat** yang terbagi menjadi 3 kategori yaitu 1 aplikasi berdasarkan hasil survei, 2 (dua) aplikasi untuk mendukung layanan manual, dan 5 (lima) aplikasi berdasarkan hasil analisis.

4.4.2.2 Jumlah Aplikasi berdasarkan Fungsi Aplikasi

Mengacu pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, kategori aplikasi berdasarkan fungsinya dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu aplikasi layanan administrasi pemerintahan, aplikasi layanan publik, aplikasi misi tertentu,

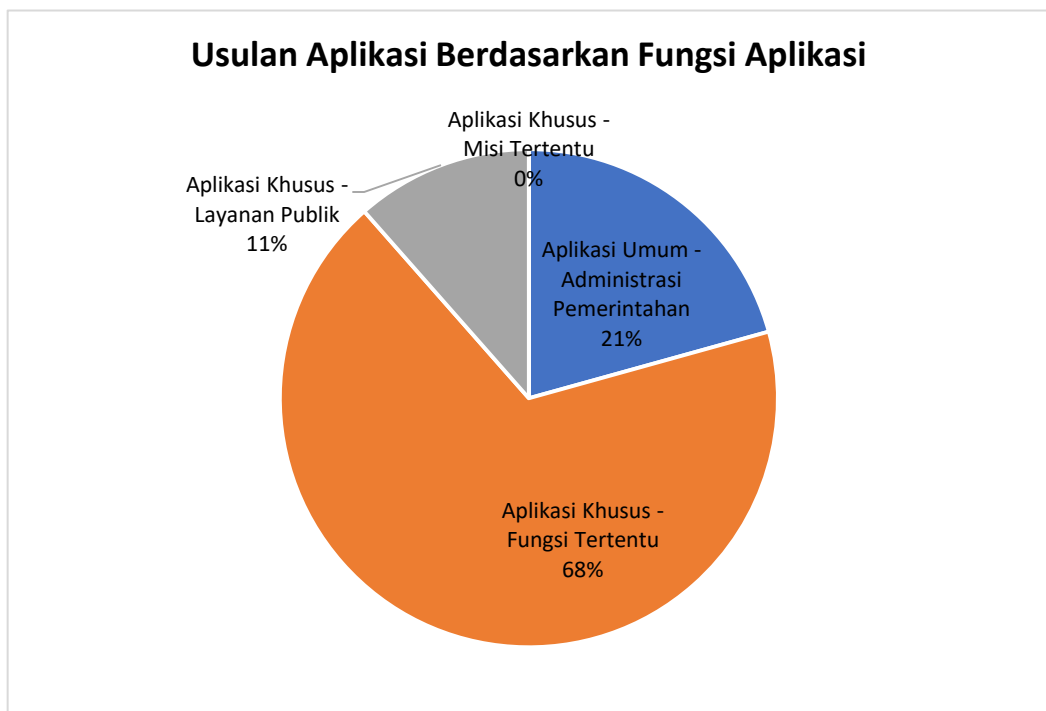
dan aplikasi fungsi tertentu. Lebih lanjut berikut akan dijabarkan secara mendetail pengkategorian aplikasi berdasarkan fungsinya, yaitu:

- a. **RAA 01.02 Aplikasi layanan administrasi pemerintahan** berbasis elektronik merupakan aplikasi yang akan dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan administrasi yang sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Kota Madiun. Dalam implementasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum yang akan digunakan secara berbagi pakai.
- b. **RAA 01.02 Aplikasi layanan publik** berbasis elektronik merupakan aplikasi yang akan dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan terkait pelayanan kepada masyarakat. Dalam implementasi layanan publik berbasis elektronik diperlukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, namun tetap diutamakan untuk mengembangkan aplikasi umum berbagai pakai.
- c. **RAA 02.01 Aplikasi Misi Tertentu** merupakan aplikasi yang pengembangannya berdasarkan misi tertentu pada OPD, dimana aplikasi ini akan mendukung instansi dalam mencapai misi yang akan dicapai.
- d. **RAA 02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu** merupakan aplikasi yang pengembangannya berdasarkan Fungsi tertentu pada OPD, dimana fungsi-fungsi khusus pada OPD dapat ditentukan oleh SOTK di setiap OPD Pemerintahan Kota Madiun.

Berdasarkan daftar usulan aplikasi pada **Tabel 4.39** diketahui dari 87 (delapan puluh tujuh) aplikasi usulan kemudian dikategorikan berdasarkan referensi aplikasi sebagai berikut.

- a. 18 Aplikasi Umum - Administrasi Pemerintahan (21%)**
- b. 10 Aplikasi Umum - Layanan Publik (11%)**
- c. 59 Aplikasi Khusus - Fungsi Tertentu (68%)**
- d. 0 Aplikasi Khusus - Misi Tertentu (0%)**

Berdasarkan data di atas maka grafik data kategori aplikasi usulan berdasarkan referensi aplikasi SPBE dapat dilihat pada **Gambar 4.48** sebagai berikut.



Gambar 4.4.4 Usulan Aplikasi Berdasarkan Referensi Aplikasi SPBE

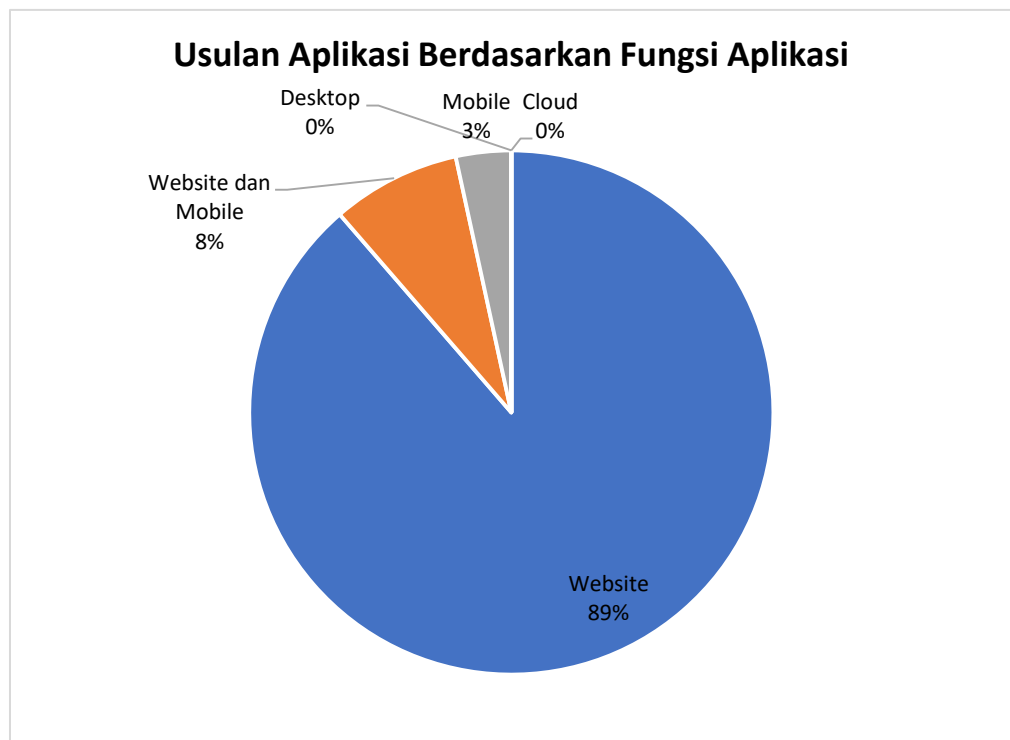
Berdasarkan **Gambar 4.4** dapat dilihat jika aplikasi usulan paling banyak adalah aplikasi khusus fungsi tertentu yaitu sebanyak **59 aplikasi (67%)**. Untuk usulan aplikasi Pemerintah Kota Madiun tidak memiliki usulan aplikasi untuk kategori aplikasi khusus misi tertentu.

4.4.2.3 Jumlah Usulan Aplikasi berdasarkan Basis Aplikasi

Basis aplikasi terbagi menjadi 4 basis, yaitu **Mobile, Cloud, Website, dan SMS Gateway**. Detail jumlah dan persentase dari Basis aplikasi dari total **87 aplikasi** pada Kota Madiun dapat dilihat di bawah ini:

- a. **77 aplikasi (89%)** Berbasis *Website*
- b. **3 aplikasi (3%)** Berbasis *Mobile*
- c. **7 aplikasi (8%)** Berbasis *Website dan Mobile*
- d. **0 aplikasi (0%)** berbasis *Desktop*
- e. **0 aplikasi (0%)** berbasis *Cloud*

Persentase aplikasi usulan berdasarkan basis aplikasi dapat dilihat pada **Gambar 4.5**.



Gambar 4.4.5 Usulan Aplikasi Berdasarkan Basis Aplikasi

Berdasarkan **Gambar 4.5** didapatkan bahwa usulan aplikasi Pemerintah Kota Madiun yang paling banyak jumlahnya adalah aplikasi berbasis *website* yaitu sebanyak **78 (tujuh puluh delapan) aplikasi (89%)**, kemudian untuk aplikasi berbasis *website dan mobile* sebanyak **7 (tujuh) aplikasi (8%)**,

dan paling sedikit adalah aplikasi berbasis *mobile* yaitu sebanyak **3 aplikasi (3%)**. Tiga aplikasi berbasis *mobile* diantaranya yaitu, **Puskesmas Mobile** dan **Aplikasi SIKSDROID** milik **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, serta **SIM PASAR** milik **Dinas Perdagangan**. Sedangkan usulan aplikasi untuk Pemerintah Kota Madiun tidak ada yang berbasis *desktop* dan juga *cloud*.

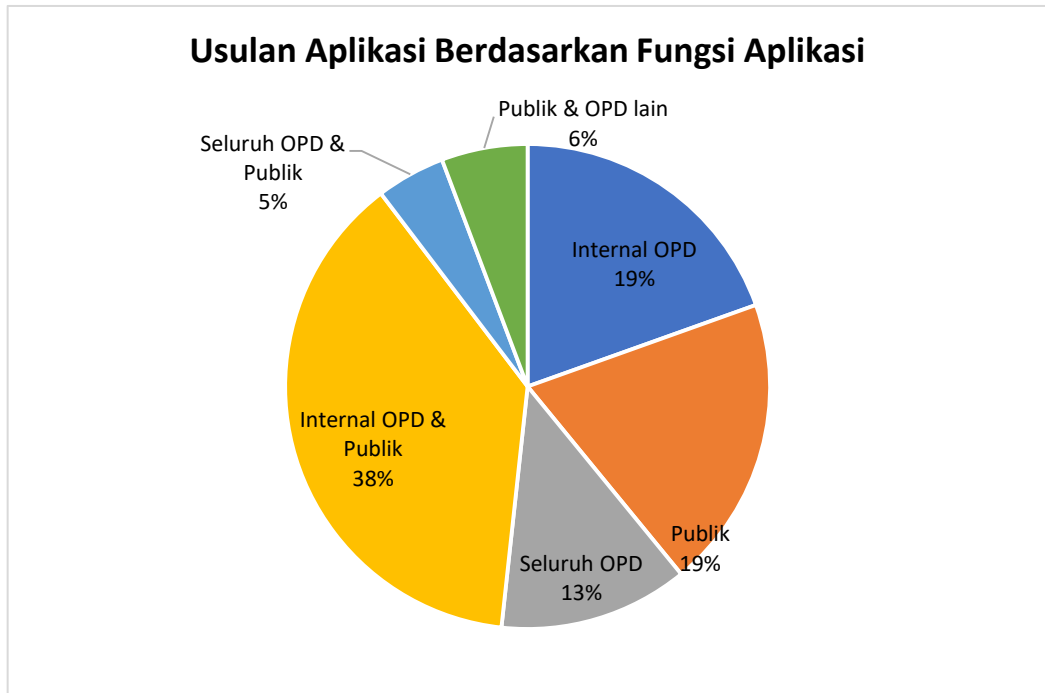
4.4.2.4 Jumlah Aplikasi berdasarkan Penggunaan Aplikasi

Pengguna aplikasi terbagi menjadi **3 (tiga) kategori**, yaitu **Publik, Internal PD, dan Seluruh PD**, namun dimungkinkan untuk setiap aplikasi dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) kategori sehingga untuk kategori pengguna aplikasi dapat dikategorikan menjadi **6 (enam)** diantaranya **Internal OPD, Publik, Seluruh OPD, Internal OPD & Publik, Seluruh OPD & Publik**, serta **Publik & OPD lain**.

Detail jumlah dan persentase dari Penggunaan aplikasi dari total **87 (delapan puluh tujuh) aplikasi** pada Kota Madiun dapat dilihat di bawah ini:

- a. **17 aplikasi (19%)** Pengguna Publik
- b. **11 aplikasi (13%)** Pengguna Seluruh PD
- c. **17 aplikasi (19%)** Pengguna Internal PD
- d. **33 aplikasi (38%)** Pengguna Internal OPD & Publik
- e. **4 aplikasi (5%)** Pengguna Seluruh OPD & Publik
- f. **5 aplikasi (6%)** Pengguna Publik & OPD lain

Persentase aplikasi usulan berdasarkan basis aplikasi dapat dilihat pada **Gambar 4.6**



Gambar 4.4.6 Usulan Aplikasi Berdasarkan Pengguna Aplikasi

Berdasarkan **Gambar 4.6** terlihat bahwa usulan aplikasi Pemerintah Kota Madiun dengan jumlah paling banyak adalah aplikasi yang digunakan untuk Internal OPD & Publik yaitu sebanyak **33 aplikasi (38%)**, sedangkan yang paling sedikit adalah aplikasi yang digunakan oleh Seluruh OPD & Publik yaitu sebanyak **4 aplikasi (5%)**.

LAMPIRAN 1 METADATA USULAN APLIKASI SPBE

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
1	1	Bagian Organisasi	E-SOP	Aplikasi sebagai media dalam proses Penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan Alur pekerjaan masing-masing Subkoordinator/Esselon IV	Hasil Survei	Bagian Organisasi	RAA 01.02	Aplikasi administrasi pemerintah	Tidak ada	Alur pekerjaan masing-masing Subkoordinator/Esselon IV	Peta Standar Operasional Prosedur	Website	Seluruh OPD sampai dengan Kelurahan	Subkoordinator Ketatalaksanaan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
1	1	Bagian Organisasi	Aplikasi SUKMA	Satu Aplikasi yang dapat disebarkan kepada masyarakat guna untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah Kota Madiun. Dapat dibuatkan modul (page) tiap OPD sesuai kebutuhan masing-masing, akan tetapi seluruh data SKM Pemerintah Daerah akan terkumpul dalam satu aplikasi tersebut. Tiap OPD juga memiliki akses sebagai admin untuk melihat data SKM yang telah masuk untuk selanjutnya akan dilaksanakan analisis dan menghasilkan Nilai IKM.	Hasil Survei	Pusat	RAA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Tidak ada	Data SKM, Data Nilai IKM	Nilai IKM tiap OPD dan point-point penting lainnya terkait kepuasan masyarakat	Website	Publik dan Seluruh OPD	Subkoordinator Ketatalaksanaan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
3	2	Bagian Hukum	Aplikasi Bantuan Hukum dan HAM (https://sid.bankum.bphn.go.id/)	Aplikasi yang memfasilitasi permohonan bantuan hukum serta permasalahan HAM secara gratis kepada masyarakat kurang mampu, serta proses Perjanjian Kerjasama, Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan di bidang hukum yang dapat diproses secara <i>online</i> . Selain itu juga menampilkan dashboard data-data berkaitan dengan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan beserta progress penanganan. Semua data akan terrekam di aplikasi ini sehingga akan mudah melakukan pengelolaan data	Layanan	Pusat (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	RAA 02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Pelayanan Penyelesaian Sengketa Hukum, Pelayanan Penelitian Perjanjian Kerjasama, Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan	Data Pemohon Bantuan Hukum	Rekomendasi / Persetujuan Permohonan Bantuan Hukum, Dashboard Data Bantuan Hukum	<i>Website</i>	Publik, Internal OPD	Subkoordinator Penyuluhan dan Bantuan Hukum

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
4	2	Bagian Hukum	Pengembangan JDIH	JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan informasi hukum lengkap, akurat, mudah, dan tepat. Pengembangan aplikasi JDIH dilakukan dengan menambahkan pelayanan koreksi produk hukum secara <i>online</i> pengajuan koreksi Rancangan produk hukum dengan mengirimkan <i>softcopy</i> melalui aplikasi kemudian dilakukan koreksi secara berjenjang dan menerima kembali hasil tanpa banyak menghabiskan waktu dan tenaga sehingga lebih efektif dan efisien. Dikembangkan juga fitur Registrasi Penomoran dan Pengiriman Produk Hukum secara <i>online</i>	Pengembangan dan Layanan	Bagian Hukum	RAA 01.02	Aplikasi administrasi pemerintahan	Pelayanan Penelitian Produk Hukum , Pelayanan Register Penomoran dan Pengiriman Produk Hukum	Data produk hukum, data hasil koreksi	Koreksi produk hukum secara <i>online</i>	<i>Website</i>	Seluruh OPD	Sub Koordinator Peraturan Perundang Undangan dan Subkoordinator Dokumentasi dan Publikasi

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
5	2	Bagian Hukum	Pengembangan <i>Website</i> Bagian Hukum	<i>Website</i> sebagai sarana informasi dapat dikembangkan lagi dengan memberikan informasi terkait pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan keluarga sadar hukum. Dapat juga dipublikasi materi terkait pembinaan keluarga sadar hukum tersebut.	Pengembangan	Bagian Hukum	RAA 02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum	Informasi pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum	<i>Website</i>	Publik	Subkoordinator Penyuluhan Bantuan Hukum

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
6	4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Sistem Informasi Pengelolaan Hibah	Untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan bantuan hibah tempat ibadah, serta transparansi data dalam pengelolaan dana hibah	Layanan	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	RAA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Pelayanan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Ibadah	Data rumah ibadah, lembaga keagamaan dan organisasi lainnya	Rekomendasi / Persetujuan Permohonan Hibah, Laporan Pemberian bantuan hibah pemerintah daerah	Website	Internal OPD & Publik	Subkoordinator Kesejahteraan Rakyat

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
7	4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	e-BUMD	Sistem aplikasi yang berisi data-data dan Informasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan digunakan sebagai proses pendaftaran seleksi BUMD serta proses pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Layanan	Pusat (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia)	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Pelayanan Proses Pendaftaran Seleksi BUMD, Pelayanan Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Data BUMD	Informasi terkait BUMD	Website	Internal OPD	SubKoordinator Pembinaan, Badan Usaha Milik Daerah

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
8	5	Bagian Umum	Website Bagian Umum	Website penyebaran informasi terkait Sekertariat Daerah Bagian Umum , yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	Analisis	Bagian Umum	RAA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Data informasi publik Bagian Umum	Informasi Publik	Website	Publik	Subkoordinator Tata Usaha dan Keuangan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
9	5	Bagian Umum	Aplikasi Pelayanan Internal Sekretariat Daerah	Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan dalam proses peminjaman/penggunaan kendaraan dinas, serta digunakan untuk memudahkan proses permintaann penyediaan jamuan makan dan minum rapat. Menampilkan data terkait ketersediaan kendaraan dinas dan juga menampilkan menu jamuan yang dapat disediakan.	Analisis	Bagian Umum	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data penggunaan kendaraan dinas, data permintaan jamuan rapat	Pelayanan secara <i>online</i>	<i>Website</i>	Internal OPD (Seluruh Bagian pada Sekda)	Subkoordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
10	6	Bagian Pemerintahan	Sistem Informasi Kerja Sama Daerah	Sistem informasi untuk mengelola data kerja sama daerah untuk memudahkan dalam evaluasi pelaksanaan kerja sama serta memudahkan perangkat daerah yang akan mengajukan kerja sama.	Analisis	Bagian Pemerintahan	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Tidak ada	Jenis kerja sama, judul kerja sama, nomor dan tanggal, mulai, berakhir, status, tindak lanjut PKS, keterangan	Database kerja sama daerah	Website	Seluruh OPD, Publik	Subkoordinator Kerjasama Daerah

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
11	6	Bagian Pemerintahan	Aplikasi Kewilayahan	Aplikasi pemetaan wilayah yang berfungsi untuk mengelola pemetaan batas wilayah antar kelurahan, kecamatan, dan daerah. Aplikasi berbasis WEBGIS dan berisikan informasi mengenai batas wilayah tersebut.	Analisis	Bagian Pemerintahan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Infografis data lain, Data lain yang berkaitan dengan Administrasi Kewilayahan	Peta Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Infografis data lain yang berkaitan dengan Administrasi Kewilayahan	Website	Internal OPD & Publik	Subkoordinator Kerjasama Daerah

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
12	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Kebencanaan	Fungsi Pusat Data dan Informasi Kebencanaan adalah sebagai penerima, pengolah, dan pendistribusi informasi. Dalam rangka mengoptimalkan pencatatan peristiwa bencana perlu dicatat sesuai dengan ciri-ciri setiap peristiwa bencana yang datanya diperlukan untuk membuat hubungan antar variabel dalam mengembangkan statistik runtun waktu, seperti, tren jangka panjang dari dampak bencana. Dampak bencana yang dihimpun database adalah dampak korban jiwa dan nominal kerugian harta benda. Untuk mengakomodir hal tersebut maka dibuatlah Sistem Informasi Bencana berbasis WEB yang dapat diakses oleh semua orang dan operator piket Pusdalops.	Hasil Survei dan Layanan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Layanan Evakuasi / Penanggulangan Bencana, layanan Penanganan Bencana Alam (Banjir, Angin puting beliung)	1. Data Kejadian yang berisi Hari, Tanggal, Waktu, Lokasi, Nama Kejadian, Kronologi, Pelapor/Sumber berita Kejadian, dan total kerugian rata-rata 2. Data Kejadian per Jenis Kejadian	Informasi data bencana, informasi data bencana per jenis kejadian, informasi data bencana bulanan, informasi data bencana tahunan	Website	Publik dan OPD lain (Dinas Sosial)	Seksi Kegawatdaruratan dan Logistik, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
13	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Sistem informasi yang bertujuan untuk keperluan Pengelolaan Data Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam, meliputi seluruh tahap pelaksanaan sampai dengan Laporan Akhir proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Analisis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam	Laporan Akhir proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Website	Internal OPD & Publik	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
14	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembangan <i>Website</i> BPBD	Menambahkan fitur yang dapat mengisi formulir dan mengupload berkas pengajuan pelayanan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, sehingga publik tidak harus datang ke kantor	Pengembangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Layanan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Data pemohon, data kegiatan	Pengajuan Kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana secara <i>online</i>	<i>Website</i>	Publik	Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
15	8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Aplikasi penyusunan dokumen perencanaan OPD (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja)	Untuk memberikan data dan informasi terkait data kinerja dan anggaran mengenai sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Dae	Hasil Survei	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAA 01.02	Aplikasi administrasi pemerintahan	Tidak ada	Data program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator dan anggaran, data permasalahan	Laporan KAK dan Rincian Belanja	Website	seluruh OPD	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
16	8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan <i>Website</i> Bapedalitbangda	Memfaatkan <i>website</i> untuk aspirasi dalam Perencanaan Pembangunan	Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data aspirasi masyarakat	Penyampaian aspirasi masyarakat <i>online</i>	<i>Website</i>	Publik	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
17	8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Aplikasi Pengendalian dan Informasi Pembangunan	Memantau Perencanaan penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) di seluruh OPD	Hasil Survei	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAA 01.02	Aplikasi administrasi pemerintahan	Tidak ada	Data dokumen perencanaan OPD	Monitoring penyusunan dokumen perencanaan	Website	seluruh OPD	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
18	8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Aplikasi E-KAK	Aplikasi tindak lanjut dari e-kak untuk melihat APBD. Aplikasi yg dapat memfasilitasi pembahasan rdp apbd pada dprd antara eksekutif dan legislatif	Pengembangan dan Hasil Survei	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAA 01.02	Aplikasi administrasi pemerintahan	Tidak ada	Data APBD	Melihat data APBD	Website	seluruh OPD	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
19	9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi verifikasi anggaran dan Laporan Keuangan secara terintegrasi	Aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses verifikasi data anggaran dan digunakan untuk pengumpulan data hasil kegiatan dan laporan pertanggungjawaban Anggaran	Hasil Survei	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01.02	Aplikasi administrasi pemerintahan	Tidak ada	seluruh hasil kegiatan yang telah dilaksanakan setiap OPD, data anggaran	Laporan Keuangan dari hasil kegiatan	Website	seluruh OPD	Bidang Akuntansi dan Aset

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
20	9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Penyimpanan Berkas untuk Laporan dan SPJ	Belum ada aplikasi untuk upload bukti dukung seperti saat SPJ, sehingga masih berupa dokumen fisik yang disimpan pada OPD. sehingga Ketika BPK meminta bukti selalu datang ke OPD (seharusnya dapat dilihat melalui aplikasi)	Hasil Survei	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Tidak ada	Data berkas	Berkas dan dokumen bukti dapat dilihat secara <i>online</i>	<i>Website</i>	Internal OPD	Sekretariat

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
21	9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengembangan SIM GAJI	Mengembangkan aplikasi SIM Gaji dari aplikasi Desktop menjadi <i>Website</i> agar mudah diakses, serta menambahkan modul untuk mengelola proses permohonan dan penerbitan SKPP secara <i>online</i>	Pengembangan dan Layanan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01.02	Aplikasi administrasi pemerintahan	Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Data SKPP	SKPP <i>Online</i>	<i>Website</i>	Seluruh OPD	Bidang Perbendaharaan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
22	9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	E-Retribusi Daerah	Aplikasi pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD). aplikasi e-retribusi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisien waktu, meminimalisir kesalahan pencatatan data, serta meminimalisir kesalahan transaksi pembayaran ketika melakukan pembayaran retribusi PKD.	Layanan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Pelayanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Data terkait retribusi pemakaiaan kekayaan daerah	Pembayaran dan pencatatan retribusi secara sistematis	Website dan Mobile	Internal PD dan Publik	Bidang Akuntansi dan Aset

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
23	9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Pengguna /Penyewa Kekayaan Daerah	<p>Daftar pengguna /penyewa Kekayaan Daerah (ruko, sawah, bangunan gedung , gudang dll) masih di simpan secara manual baik Data pribadi maupun kelengkapan administrasinya. Dengan adanya aplikasi ini harapannya data dapat tersimpan secara inline maupun proses pengguna atau penyewaan juga dapat dilakukan secara <i>online</i>.</p>	Hasil Survei	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Tidak ada	Data berkas	Berkas dan dokumen bukti dapat dilihat secara <i>online</i>	<i>Website</i>	Internal OPD & Publik	Sekretariat

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
24	9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Penerimaan Dan Pengeluaran Barang Habis Pakai	Penerimaan dan pengeluaran habis pakai masih dilaporkan secara manual oleh masing masing OPD. Harapannya dengan adanya aplikasi pelaporan ini dapat dilakukan secara <i>online</i> untuk mempermudah prosesnya	Hasil Survei	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Tidak ada	Data berkas	Pengunaan barang habis paki bisa dilihat dan dilaporkan secara tranparan, dan menghindari belanja barang yg tidak di perlukan	<i>Website</i>	Seluruh PD	Sekretariat

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
25	10	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan SIMPADAMA	Mengembangkan SIMPADAMA sebagai Sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah yang dapat membantu mengolah seluruh data pendapatan asli daerah (PAD) . Dikembangkan dengan mengintegrasikan seluruh data yang termasuk pendapat daerah lainnya (Selain pajak daerah), seperti retribusi, dan pendapatan daerah lainnya.	Pengembangan, Analisis	Badan Pendapatan Daerah	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data PAD, data barang berhatga milik daerah, data retribusi	Informasi pendapatan asli daerah dari berbagai sumber	Website	Internal OPD	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
26	10	Badan Pendapatan Daerah	Sistem Informasi PBB	<p>Mengembangkan sistem informasi terkait PBB untuk mendukung seluruh pelayanan yang berkaitan dengan PBB agar lebih efektif dan efisien secara pelayanan maupun data.</p> <p>Aplikasi ini juga dibuat untuk mempermudah dan sebagai panduan bagi masyarakat untuk cara cek pajak pbb secara <i>online</i>, untuk mengetahui status pembayaran, status piutang, informasi sppt, tempat pembayaran, cek status berkas, saran dan masukan atau pengaduan wajib pajak langsung masuk ke pejabat terkait sehingga penanganan pengaduan lebih cepat sehingga meningkatkan kepuasan pelayanan masyarakat.</p>	Hasil Survei	Badan Pendapatan Daerah	RAA.02.03	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data terkait objek PBB	Informasi PBB	<i>Website dan Mobile</i>	Internal OPD & Publik	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
27	11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Seleksi Terbuka	Aplikasi Selter digunakan untuk pendaftaran seleksi terbuka JPTP yang hasil seleksi bisa terintegrasi dengan SIK (Pejabat terpilih terinput di SIK melalui aplikasi Selter)	Hasil Survei	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAA 01.02	Aplikasi administrasi pemerintahan	Tidak ada	data riwayat jabatan	Hasil Seleksi Terbuka	Website	Publik	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
28	11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Legalisir dan Keabsahan <i>Online</i>	Aplikasi yang dapat memudahkan dalam pelayanan legalisir secara <i>online</i> . Masyarakat dapat mengupload berkas tanpa harus datang ke kantor dan akan terdapat informasi terkait status permohonan legalisir.	Layanan	Pengembangan Sumber Daya	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Layanan Legalisir	Data dokumen yang akan dilegalisir, data pemohon	Legalisir <i>online</i>	<i>Website</i>	Seluruh OPD, Publik	Sekretariat

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
29	11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Permohonan /Perizinan/ Pengajuan Kepegawaian	Aplikasi yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan/perizinan secara <i>online</i> terkait urusan kepegawaian, termasuk Aplikasi Pindah Antar Wilayah (PAW) atau Mutasi antar Pemda	Layanan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAA 01.02	Aplikasi administrasi pemerintahan	Layanan Permohonan Izin Perkawinan dan Pembinaan Pra Nikah/Pasca Nikah, Layanan Pelayanan Permohonan Izin Perceraian, Layanan Pengajuan Tunjangan Istri/Suami dan Anak, Layanan Permohonan Kartu Taspen, Layanan Permohonan Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional Keluar daerah	Data permohonan/perizinan/pengajuan	Pengajuan/Permohonan/Perizinan secara <i>online</i>	Website	Seluruh OPD dan Publik	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
30	11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Pengembangan ASN	Aplikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi pengembangan kompetensi SDM yang bertujuan untuk mengelola perencanaan pengembangan kompetensi SDM Pemerintah Daerah. Aplikasi ini berfungsi sebagai penyebaran informasi dan pengumpulan data terkait pengembangan kompetensi pegawai, seperti pelaksanaan Bimtek, Seminar, Workshop, Sertifikasi, dsb yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi SDM.	Analisis	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintah	Tidak ada	Data Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM	Informasi adanya Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM	Website	Seluruh OPD	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
31	12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SIORMAS (Sistem Informasi Pendataan Ormas)	Aplikasi untuk mengelola data Organisasi Masyarakat yang ada di Kota Madiun, Dengan aplikasi ini, publik dapat melakukan pendaftaran ORMAS secara <i>online</i> . Aplikasi ini juga berfungsi untuk mendata ORMAS serta kegiatan ORMAS sehingga kegiatan ORMAS dapat terpantau.	Layanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Pendataan Keberadaan Ormas	Data profil ORMAS, Data kegiatan ORMAS, Data evaluasi ORMAS	Pendataan ORMAS secara <i>online</i>	<i>Website</i>	Internal OPD, Publik	Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Masyarakat

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
32	12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan <i>Website</i> Bangkesbangpol	Mengembangkan <i>website</i> Bangkesbangpol sebagai media dalam mengedukasi masyarakat terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sejarah kebangsaan	Pengembangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Tidak ada	Data terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sejarah kebangsaan	Informasi wawasan kebangsaan dan nilai sejarah	<i>Website</i>	Publik	Sekretariat, Bidang Ideologi

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
33	12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aplikasi Mitigasi Konflik	Sistem peringatan dini untuk mencegah terjadinya konflik di daerah Kota Madiun. Sistem yang dapat menghimpun data laporan kegiatan, kejadian dan kasus yang berhubungan dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya serta keamanan, ketentraman dan ketertiban dari seluruh Kecamatan di Kota Madiun, sehingga dengan data tersebut dapat disampaikan informasi mengenai potensi konflik di daerah Kota Madiun kepada masyarakat. Dapat diintegrasikan dengan <i>Website</i> Bangkesbangpol terkait Berita Peringatan Konflik.	Analisis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data laporan kegiatan, kejadian dan kasus yang berhubungan dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya serta keamanan, ketentraman dan ketertiban dari seluruh Kecamatan di Kota Madiun	Peringatan dini untuk Masyarakat jika akan terjadi Konflik yang dapat dibagikan ke Sosial Media agar memudahkan penyampaian berita.	<i>Website</i>	Internal OPD & Publik	Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
34	13	Inspektorat Daerah	SINAWASD A	Aplikasi untuk pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang dimandatkan kepada Inspektorat Kota Madiun. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai media pengolahan data hasil pengawasan untuk memudahkan penyajian informasi	Hasil Survei	Inspektorat Daerah	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Tidak ada	data umum dan data kinerja perangkat daerah	dashboard pembinaan dan pengawasan Inspektorat Kota Madiun	Website	Seluruh PD	Sekretariat Inspektorat Kota Madiun

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
35	14	Sekretariat DPRD	E -risalah (Sistem Pengelola Rapat)	Sistem informasi dapat digunakan untuk menyebarkan informasi terkait bahan materi Rapat, juga dapat digunakan sebagai pencatatan hasil rapat sehingga dapat dibaca kembali oleh pihak yang berkepentingan. Disini Seluruh OPD berperan menjadi admin sehingga bahan dan hasil rapat dapat dishare kepada orang yang berkepentingan saja melalui email maupun group media sosial yang digunakan.	Analisis	Sekretariat DPRD	RAA.01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Tidak ada	hasil notulensi rapat	notulensi rapat <i>online</i>	<i>Website</i>	Seluruh OPD	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
36	15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aplikasi Pematangan NIK Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID)	Aplikasi Integrasi data NIK Dukcapil dan NIK peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang dapat memadankan dengan cepat ribuan database NIK peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) dengan data NIK dari Dukcapil. Saat ini masih manual dicek satu-satu	Hasil Survei	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	NIK Dukcapil dan NIK peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID)	Proses pematangan NIK dengan cepat	Website	Internal OPD	Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
37	15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	E-SIP - Surat Izin Praktek	Sistem Informasi untuk memudahkan pelayanan publik di bidang kesehatan, seperti memberikan rekomendasi perizinan, dan penerbitan sertifikasi	Layanan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Layanan penerbitan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum, Layanan Penerbitan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Jasaboga, Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi rumah Makan/Restoran, Pelayanan Penerbitan Sertifikasi laik Sehat Hotel, Layanan Penerbitan Sertifikasi Produksi Pangan	Data pemohon, data sesuai keperluan	Pelayanan publik kesehatan secara <i>online</i>	Website	Internal OPD, Publik	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
38	16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aplikasi Layanan Publik PUPR	Sistem Informasi untuk memudahkan pelayanan publik PUPR, memberikan rekomendasi penurunan trotoar, rekomendasi kelayakan fungsi bangunan,dsb	Hasil Survei dan Layanan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Pelayanan Jasa Rekomendasi Penurunan Trotoar, Pelayanan Rekomendasi Kelayakan Fungsi Bangunan	Data pemohon, data sesuai keperluan	Pelayanan publik secara <i>online</i>	<i>Website</i>	Internal OPD, Publik	Bidang Bina Marga ,

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
39	16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIMTARUB ANG	Sistem Informasi yang digunakan sebagai media konsultasi dan verifikasi terkait perencanaan pembangunan dan tata ruang di Kota Madiun, serta menampilkan pemetaan yang memuat data / informasi perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan bangunan di Kota Madiun. Maksud dikembangkannya aplikasi ini adalah dalam rangka penyebarluasan informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kepada masyarakat luas.	Layanan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Pelayanan Jasa Verifikasi dan Konsultasi Perencanaan Bangunan	Data perencanaan dan pembangunan dan tata ruang	perencanaan dan pembangunan dan tata ruang secara <i>online</i>	Website	Internal OPD, Publik	Bidang Cipta Karya , Bidang Tata Kota

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
40	16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Sumber Daya Air	Aplikasi yang dapat memetakan Sumber Daya Air (embung, waduk, bendungan, irigasi, dan pos hujan, sungai, sumber air bersih, dan air limbah,dsb) di Kota Madiun dengan berbasis geografis/GIS dan menampilkan data-data yang terkait. Serta memberikan informasi wujud pelestarian sumber daya air	Analisis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Tidak ada	Data Sumber Daya Air	Informasi Sumber Daya Air	Website	Internal OPD & Publik	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
41	16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIBIMA Konstruksi (https://sibima.pu.go.id/)	<p>Sistem layanan publik yang berfungsi untuk melayani masyarakat jasa konstruksi di seluruh Indonesia dalam rangka capacity building bidang jasa konstruksi.</p> <p>Bentuk layanan publik yg disediakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Layanan informasi jasa konstruksi; -Layanan konsultasi tentang pembinaan jasa konstruksi; -Layanan distance learning SIBIMA Konstruksi. 	Analisis	Pusat (Kementerian PUPR)	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data jasa konstruksi	Informasi jasa konstruksi	Website	Publik	Bidang Cipta Karya

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
42	17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Permakaman	Ssitem informasi yang berfungsi untuk mengelola data Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Permakaman di wilayah Kota Madiun yang mencakup data kecamatan, data pengembang, dan data lain yang berkaitan. Selain berisi database dapat juga ditampilkan dalam bentuk infografis agar lebih mudah melihat data secara keseluruhan.	Analisis	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Permakaman	Informasi terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Permakaman	Website	Internal OPD & Publik	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Permakaman

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
43	17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Aplikasi Identifikasi dan Pengelola Data Pemukiman	Aplikasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi permukiman yang dikategorikan menjadi pemukiman kumuh maupun permukiman bersih dan digunakan sebagai pengelolaan data pemukiman kumuh menjadi suatu informasi yang informatif. Pada aplikasi ini juga akan ditampilkan pemetaan data pemukiman kumuh Kota Madiun berbasis WEBGIS, serta menampilkan informasi terkait pencegahan dan program peningkatan kualitas permukiman kumuh.	Analisis	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data pemukiman kumuh, data pencegahan dan program peningkatan kualitas permukiman kumuh.	Pendataan dan pemetaan Sumber Daya Air dan pelestariannya	Website	Internal OPD & Publik	Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
44	18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Puskesmas <i>Mobile</i>	Puskesmas dibangun dengan tujuan untuk memudahkan warga atau fakir miskin untuk mendapatka perlindungan sosial serta lepas dari kemiskinan. Diperlukan Pembuatann Aplikasi Puskesmas berbasis <i>mobile</i> secara mandiri dan terintegrasi dengan Puskesmas Pusat.	Hasil Survei	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data bantuan sosial, data aduan bantuan sosial, data pengajuan bantuan sosial	Verifikasi bantuan sosial	<i>Mobile</i>	Internal OPD	Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
45	18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi SIKSDROID	Aplikasi SIKSDROID merupakan aplikasi SIKS-NG dalam versi <i>mobile</i> . Diperlukan pembuatan aplikasi SIKSDROID untuk aplikasi <i>mobile</i> dikarenakan data verifikasi lebih lengkap dan lebih mudah dalam proses verifikasi data di lapangan. Aplikasi ini seperti SIKSDROID dari pusat yang saat ini sudah dinonaktifkan. Diperlukan Pembuatan Aplikasi SIKSDROID secara mandiri dan terintegrasi dengan SIKS-NG milik Pusat.	Hasil Survei	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data kependudukan masyarakat miskin	Verifikasi keluarga miskin	<i>Mobile</i>	Internal OPD	Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
46	18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi Laporan Kebencanaan dan Penyaluran Bantuan Bencana dan Penyaluran Bantuan Bencana	Aplikasi Laporan Kebencanaan dan Penyaluran Bantuan Bencana digunakan untuk pendataan korban bencana alam serta informasi penyaluran bantuan bencana	Hasil Survei	Dinsos dan BPBD	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Pelayanan Penanganan Bencana Sosial, Penanganan Bencana Alam	Laporan kejadian bencana	Laporan bencana dan penyaluran bantuan	Website	Publik dan OPD lain (BPBD)	Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
					Layanan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar / Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Adopsi Anak dari Keluarga, Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Adopsi Anak dari Panti Asuhan, Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah		Pelayanan penerbitan surat rekomendasi secara onlune	Website	Internal OPD, Publik	Bidang Rehabilitasi Sosial,

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
48	18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SI ORSOS	Aplikasi yang berfungsi untuk pendaftaran maupun pendaftaran ulang serta untuk pendataan ORSOS/Yayasan beserta kegiatannya	Layanan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran ORSOS/Yayasan, Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Ulang ORSOS/Yayasan	Data ORSOS/Yayasan	Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran ORSOS/Yayasan,	Website	Internal OPD, Publik	Bidang Rehabilitasi Sosial

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
49	18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi Rehabilitasi Sosial	Aplikasi pendataan dan pelaporan adanya disabilitas terlantar, anak terlantardan lansia terlantar, gelandangan pengemis dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya, serta sebagai proses pelayanan terkait tindakan rehabilitasi sosial seperti saat pemberian bantuan dan pemrosesan dokumen pendukungnya	Analisis	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data rehabilitasi sosial	Pendataan <i>online</i> terkait rehabilitasi sosial	<i>Website</i>	Internal OPD, Publik	Bidang Rehabilitasi Sosial

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
50	19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Pengembangan SI-CAKER	Aplikasi diperuntukkan untuk pelayanan perselisihan hubungan industrial para pihak (Perusahaan Pengusaha dengan pekerja buruh) . Aplikasi ini akan menjadi jembatan guna mendukung saling keterbukaan dalam penyelesaian masalah dan bisa menjadi rujukan untuk proses selanjutnya. Selain itu dapat juga ditambahkan informasi ketenagakerjaan Kota Madiun seperti data UMR, serikat pekerja, dasar hukum yang berlaku).	Pengembangan dan Layanan	Dinas Tenaga Kerja	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Data Perusahaan, Data pengadilan perselisihan, Data perselisihan, Data Ketenagakerjaan (informasi UMR, Serikat pekerja, dasar hukum)	Informasi Perusahaan, Informasi Perselisihan Hubungan Industrial	Website	Internal OPD & Publik	Bidang Perindustrian

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
51	19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Pengembangan E-Kami	<p>Pengembangan aplikasi E-Kami dengan menambahkan modul sebagai Aplikasi yang berfungsi mengelola segala urusan terkait Koperasi, UMKM dan usaha Mikro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan proses pendaftaran dan verifikasi Koperasi, UMKM dan usaha Mikro. - Memudah mencatatkan aktivitas kegiatan Koperasi, UMKM dan usaha Mikro. - Memudahkan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual produk Koperasi, UMKM dan usaha Mikro. - Informasi pelatihan atau workshop terkait Koperasi, UMKM dan usaha Mikro - Menampilkan data transaksi penjualan produk IKM 	Pengembangan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	<p>Data operasi, UMKM dan Usaha Mikro yang telah terdaftar, Data kegiatan, data produk. Data penilaian koperasi, Data transaksi pembelian produk dari IKM.</p>	<p>Laporan Pendaftaran operasi, UMKM dan Usaha mikro, Laporan Kegiatan, Laporan Penilaian Koperasi.</p>	Website & Mobile	Publik (Pelaku operasi, UMKM dan Usaha Mikro) & OPD lain (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
52	19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Sistem Informasi Layanan Produktivitas Terkini (SIPRONI)	Aplikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara cepat kebutuhan peningkatan produktivitas setiap sektor usaha maupun secara individu sehingga dapat mengetahui gambaran kondisi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki	Analisis	Pusat (Kementerian Tenaga Kerja)	RAA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Tidak ada	Data SDM yang terdaftar, Data Pelatihan dan Bimtek, Data Pengukuran Produktivitas	Hasil Pengukuran Produktivitas, Informasi Pelatihan dan Bimtek	Website	Publik	Bidang Tenaga Kerja

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
53	20	Dinas Pendidikan	Pengembangan Aplikasi LI	Mengembangkan aplikasi LI yang dapat diakses oleh siswa dan guru, serta sebagai aplikasi pengelolaan administrasi sekolah (PAUD,TK,SD, SMP, SMU, SMK, MI, MTs, MA, dll.). Pengelolaan yang dilakukan mulai dari pendataan (siswa, mata pelajaran, jadwal pelajaran, dll.), operasional kegiatan belajar mengajar seperti mengunggah file materi dan tugas serta pengembangan kurikulum sekolah. Aplikasi LI juga perlu dikembangkan agar terintegrasi dengan aplikasi DAPODIK.	Pengembangan	Dinas Pendidikan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data operasional sekolah (Data siswa, data mata pelajaran beserta jadwalnya, data modul belajar, file tugas)	Informasi Manajemen Sekolah	Website	Publik (Siswa dan Guru)	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar, Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
54	20	Dinas Pendidikan	Aplikasi Manajemen Tenaga Kependidikan	Aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data Tenaga Kependidikan serta memberikan informasi terkait pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan seperti adanya Bimtek, Seminar, Workshop, Sertifikasi, dsb yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan. Dengan aplikasi ini dapat diketahui kegiatan pengembangan kompetensi apa saja yang telah diikuti oleh Tenaga Kependidikan, prestasi yang telah diraih, dsb.	Analisis	Dinas Pendidikan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data Tenaga Kependidikan, Data Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan	Informasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan, Informasi Tenaga Kependidikan	Website	Publik (Tenaga Kependidikan)	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
55	20	Dinas Pendidikan	Sistem Informasi Lembaga Pendidikan Non Formal	Aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan proses pendaftaran akreditasi lembaga pendidikan non formal serta sebagai aplikasi untuk mengelola dan pendataan lembaga pendidikan non formal yang ada di Kota Madiun	Analisis	Dinas Pendidikan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data Lembaga Pendidikan non formal.	Akreditasi lembaga pendidikan non formal	Website	Publik (Lembaga Pendidikan Non Formal)	Unit Operasional Teknologi Bidang Pengerjaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar,

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
56	21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aplikasi Manajemen Kepegawaian Non ASN Internal DKPP	Digunakan untuk manajemen kepegawaian Non ASN internal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Hasil Survei	Dinas Pendidikan	RAA 01.02	Aplikasi administrasi pemerintah	Layanan Kepegawaian	Data Kepegawaian Non-ASN	Rekap data kepegawaian Non-ASN	Website	Internal OPD	Sekretariat

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
57	21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SIM HEWAN	Aplikasi digunakan untuk mengelola seluruh informasi dan data maupun proses pelayanan berkaitan dengan Hewan, seperti Penerbitan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan), pemrosesan Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Tani Ternak pemrosesan dokumen Rekomendasi Kredit Ternak, pemrosesan dokumen Rekomendasi Surat Ijin Praktek Dokter Hewan, Fasilitas Rumah Potong Hewan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan hewan dan kebutuhan ternak	Hasil Survei dan Layanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Tani Ternak, Pelayanan Kesehatan Hewan, Pelayanan Rekomendasi Kredit Ternak, Pelayanan Rekomendasi Surat Ijin Praktek Dokter Hewan, Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan, Pelayanan	Data hewan, data kesehatan hewan, data kelompok ternak	informasi dan pelayanan tentang hewan/ternak secara online seperti SKKH yang sudah ditandatangani	Website	Internal OPD & Publik	Bidang Pertanian

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
58	21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SIM IKAN	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola seluruh informasi, data dan pelayanan berkaitan dengan perikanan, seperti Sewa Sarana Prasarana Pasar Ikan, pemrosesan Rekomendasi Pelayanan Kredit Petani Ikan, Pembelian Benih Ikan, pemrosesan Rekomendasi Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan pemrosesan Bantuan Benih Ikan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan ikan	Layanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Pelayanan Sewa Sarana Prasarana Pasar Ikan, Pelayanan Rekomendasi Pelayanan Kredit Petani Ikan, Pelayanan Pembelian Benih Ikan, Pelayanan Rekomendasi Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pelayanan	Data perikanan, data benih ikan, data hasil perikanan, data saranan prasarana pasar ikan, dsb	Informasi dan pelayanan tentang perikanan secara online	Website	Internal OPD & Publik	Bidang Perikanan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
59	21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SIM TANI	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola seluruh informasi, data dan pelayanan berkaitan dengan pertanian, seperti Permintaan Bantuan Pesticida Pertanian, Surat Pengantar Pencairan Dana BLM PUAP Ke Bank, Rekomendasi Kredit Usaha Tani, Pengajuan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Verifikasi dan Validasi	Layanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Pelayanan Permintaan Bantuan Pesticida Pertanian, Pelayanan Surat Pengantar Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM PUAP) Ke Bank, Pelayanan Rekomendasi Kredit Usaha Tani, Pelayanan	Data berkaitan dengan pertanian	Informasi dan pelayanan tentang pertanian secara <i>online</i>	<i>Website</i>	Internal OPD & Publik	Bidang Pertanian

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
60	21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aplikasi Ketahanan dan Kerawanan Pangan	Aplikasi yang berfungsi menginformasikan data panel harga pangan dari analisis proyeksi ketersediaan dan harga pangan menjadi sumber informasi dan referensi bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan. Aplikasi untuk memetakan Ketahanan dan Kerawanan Pangan tingkat Kelurahan dengan menampilkan geografis wilayah tahan dan rentan rawan pangan dengan dua gradasi warna yaitu merah dan hijau.	Analisis	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data kondisi pangan	Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan	Website	Internal OPD & Publik	Bidang Ketahanan Pangan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
61	22	Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan Aplikasi SILAPLING	"Mengembangkan aplikasi SILAPLING sebagai berikut : #Untuk Pelayanan Pelaporan Lingkungan : - Ditambahkan modul formulir untuk pelaporan lingkungan untuk masyarakat umum (tidak hanya perusahaan) - Seluruh pelayanan surat persetujuan dan rekomendasi terkait lingkungan dapat diurus menggunakan aplikasi SILAPLING" - Seluruh pelayanan surat persetujuan dan rekomendasi terkait lingkungan dapat diurus menggunakan aplikasi SILAPLING	Analisis	Dinas Lingkungan Hidup	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data kegiatan penanaman pohon, data bibit pohon, data pemesanan bibit pohon, data	Informasi kegiatan penanaman pohon, , Doku men perizinan atau persetujuan	Website & Mobile	Internal OPD, Publik	Bidang Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
62	22	Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	<p># Aplikasi layanan pengelolaan sampah dan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga hingga ke TPST pemerintah secara lengkap, pengangkutan sampah dari tempat sampah pemilah dan tempat pembuangan sampah liar sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses berbagai informasi terkait pengangkutan dan pengelolaan sampah.</p> <p># Aplikasi ini juga berfungsi untuk memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah secara <i>online</i>.</p> <p># Aplikasi ini dilengkapi GPS Tracking yang memungkinkan proses pengangkutan dan pembuangan limbah B3 akan secara realtime dapat terpantau keberadaannya sampai ke lokasi pembuangan akhir.</p>	Analisis	Dinas Lingkungan Hidup	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data pengangkutan dan pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, data sarana dan prasarana, data pembayar retribusi	Proses pengangkutan Sampah dan Limbah Bahan Beracun secara dan Proses pembayaran retribusi secara <i>online</i>	<i>Website & Mobile</i>	Internal OPD, Publik	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
63	22	Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan <i>Website</i> DLH	Mengembangkan <i>website</i> DLH dengan menambahkan modul yang berisikan informasi terkait Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	Pengembangan,	Dinas Lingkungan Hidup	RAA.01.01	Aplikasi Layanan Publik	Tidak ada	Data Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Informasi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	<i>Website</i>	Publik	Sekretariat, Bidang Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
64	24	Dinas Perhubungan	Pengembangan E-Kir	Penambahan Fitur untuk Upload berkas persyaratan Uji Kir	Pengembangan dan Hasil Survei	Dinas Perhubungan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Berkas persyaratan untuk uji kendaraan level 5	Berkas persyaratan upload	Website	Internal OPD & Publik	Bidang Angkutan Darat

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
65	24	Dinas Perhubungan	Aplikasi E-Hub	<p>Aplikasi pelayanan perizinan/pemberian rekomendasi dari Dinas Perhubungan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi penyelenggaraan perlengkapan jalan, bangunan dan/atau fasilitas selain perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan - Rekomendasi izin penggunaan badan dan bahu jalan selain untuk kepentingan lalu lintas - Rekomendasi izin dan pendirian badan usaha / Lembaga pendidikan dan latihan mengemudi - dsb <p>Menampilkan infografis terkait data kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap harinya melalui integrasi data dengan kepolisian, serta memberikan informasi kondisi lalu lintas secara real time</p>	Analisis	Dinas Perhubungan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data terkait pelayanan, data kecelakaan lalu lintas, data badan usaha / Lembaga pendidikan dan latihan	Pelayanan secara online, Infografis data kecelakaan dan mengemudi	Website	Internal OPD & Publik	Bidang Lalu Lintas

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
66	24	Dinas Perhubungan	Sistem Informasi Pelayanan Angkutan Umum dan Pelajar	Aplikasi untuk pendataan angkutan umum (untuk umum maupun angkutan pelajar) dan urusan terkait ruang fasilitas angkutan umum (terminal dan halte) di Kota Madiun. Memberikan informasi operasional (jadwal dan lintasan trayek), serta posisi angkutan secara real time menggunakan GPS.	Analisis	Dinas Perhubungan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data angkutan umum dan fasilitas angkutan umum, data jadwal operasional titik penjemputan dan titik tujuan, jumlah jaringan trayek, jumlah penumpang	Tracking operasional angkutan umum	Website dan Mobile	Internal OPD & Publik (Pengelola Angkutan umum dan masyarakat)	Bidang Angkutan Darat

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
67	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Satu Data Kota Madiun	Aplikasi untuk mengelola dan mempublikasikan data-data pemerintahan agar seluruh data dapat terpusat kedalam satu platform	Analisis	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Seluruh Data tiap OPD	Pusat Data	Website	Seluruh OPD dan Publik	Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
68	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi SDM TIK Kota Madiun	Aplikasi mengelola data dan pengembangan sumber daya TIK di pemerintahan Kota Madiun. Pada aplikasi ini juga dilakukan monitoring terhadap kinerja SDM TIK mengenai pengembangan aplikasi, pelaksanaan manajemen dan keamanan TIK, dsb.	Analisis	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data SDM TIK di seluruh OPD, data pembinaan dan pengembangan SDM TIK	Pengelolaan SDM TIK	Website	Seluruh OPD	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
69	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Manajemen Aplikasi	Aplikasi yang berfungsi untuk mendata dan menampilkan seluruh aplikasi yang dimiliki oleh seluruh OPD di Kota Madiun untuk memudahkan dalam pencatatan perkembangan aplikasi seperti perubahan aplikasi, status pengembangan aplikasi, permasalahan aplikasi, integrasi aplikasi, dsb.	Analisis	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data aplikasi seluruh PD di Kota Madiun	Informasi terkait seluruh aplikasi pemerintah Kota Madiun	Website	Internal OPD	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
70	26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan WEBGIS DPMPSTP	Aplikasi berbasis Web GIS yang memberikan informasi terkait peta persebaran perizinan terbit per lokasi. Pengembangan dilakukan dengan penyempurnaan peta zonasi	Pengembangan dan Hasil Survei	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Tidak ada	Data peta zonasi	Peta Sebaran Perizinan	Website	Publik dan Internal OPD	Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
71	26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan Madiun MASS	Pengembangan Madiun dengan penambahan modul terkait Chat bot sebagai media berkomunikasi dengan public	Pengembangan dan Hasil Survei	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data pengguna, data permasalahan	Chzt bot	Website	Publik dan Internal OPD	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
					Layanan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	#Pelayanan Sewa Tempat Rekreasi dan Olahraga #Pelayanan Registrasi Nomor Induk Kesenian #Pelayanan Perpanjangan Nomor Induk Kesenian #Pelayanan Perizinan Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian #Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian			Website	Internal OPD & Publik	Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
73	27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Sistem Informasi Kepemudaan Kota Madiun	Sistem informasi untuk mendata data kepemudaan dari bermacam aspek untuk kepentingan data daerah dan BPS. Berfungsi juga untuk memfasilitasi Wirausaha Muda, atlet dan pemuda yang berprestasi lainnya, serta memberikan informasi terkait adanya pelatihan dan pendampingan.	Analisis	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data Kepemudaan, Data pelatihan dan pendampingan	Informasi Data Kepemudaan dan Kepramukaan, Informasi pelatihan dan pendampingan	Website	Publik dan Internal OPD	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
74	28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan iMadiun	iMadiun merupakan aplikasi Perpustakaan Digital iMadiun. Pengembangan dilakukan dengan Integrasi data NIK dengan iMadiun untuk memeriksa keabsahaan user. Dikembangkan juga untuk mendata pustakawan dan perpustakaan yang ada di Kota Madiun serta sebagai media untuk menyampaikan informasi terkait pelatihan dan pembinaan pustakawan	Pengembangan dan Hasil Survei	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data pustakawan	Integrasi Data	Website	Publik	Perpustakaan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
75	29	Dinas Perdagangan	SIM PASAR	Pembelian barang di pasar bisa melalui expedisi (marketplace khusus untuk pasar); Pengelolaan pengumpulan/ pendataan informasi terkait pengelolaan pasar (kelas, retribusi, jenis bangunan);	Hasil Survei	Dinas Perdagangan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Database pasar, data retribusi; data pedagang; data pedagang;	Generate laporan terkait rekapitulasi e-retribusi, dan manajemen pasar	Mobile	Publik	Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
76	29	Dinas Perdagangan	SP2KP	Aplikasi pendataan dan pemantauan pasar dan Harga serta stok/pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting)	Analisis	Pusat (Kementerian Perdagangan)	RAA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Tidak ada	Data pasar, data harga dan stok Bapokting	Informasi Harga Bapokting, dan ketersediaan barang secara harian	Website	Publik (Surveiior dan masyarakat) & OPD lain (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
77	29	Dinas Perdagangan	Aplikasi Perlindungan Konsumen	Aplikasi yang berfungsi sebagai pelaporan kasus sengketa konsumen dan proses penyelesaiannya. Aplikasi ini juga berfungsi untuk pendaftaran, pendataan dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat	Analisis	Dinas Perdagangan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data sengketa konsumen, data Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat	Pelaporan dan Penyelesaian Sengketa Konsumenten secara online, Pendaftaran dan pendataan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat secara online	Website	Internal OPD & Publik	Bidang Usaha Perdagangan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
78	29	Dinas Perdagangan	InaExport	<p>Pelaku ekspor dapat menggunakan aplikasi ini untuk mempromosikan produk-produk unggulan mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan ekosistem dagang yang kondusif karena pengguna diverifikasi terlebih dahulu oleh Kemendag saat mendaftar sebagai anggota. - Menyediakan fasilitas etalase virtuelle sehingga pelaku usaha ekspor dapat menampilkan produk unggulan mereka, lengkap dengan informasi dan spesifikasinya untuk membantu buyer memilih produk. - Memiliki media komunikasi langsung daring berbasis fitur chat yang membantu mempercepat terjadinya kontak antara pelaku usaha ekspor dengan buyer potensial. - Menyediakan fitur inquiry dan rencana kegiatan penjajakan kesepakatan bisnis (business matching) yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk aktif mencari peluang ekspor. Aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai sarana berpromosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara digital. 	Analisis	Pusat (Kementerian Perdagangan)	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data exportir, data produk, data transaksi, data buyer	Aplikasi export online	Website & Mobile	Internal OPD & Publik	Bidang Usaha Perdagangan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
79	29	Dinas Perdagangan	SIMPEL	Aplikasi yang berfungsi untuk pelaporan dan pengawasan ukuran, takaran, dan timbangan dalam bertransaksi perdagangan sehingga membantu meminimalisir kerugian yang diterima bagi konsumen dan pelaku usaha.	Analisis	Pusat (Kementerian Perdagangan)	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data pelaporan Tera dan Tera Ulang	Pelaporan Tera dan Tera Ulang	Website	Publik	Bidang Usaha Perdagangan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
80	29	Dinas Perdagangan	Pengembangan BUMU	Bumu adalah sebuah aplikasi pencatatan buku tamu. Seluruh OPD di Kota Madiun dapat turut menggunakan aplikasi ini agar pencatatan tamu tidak secara manual.	Analisis	Dinas Perdagangan	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data tamu dan urusannya	Penca tatan tamu secara <i>online</i>	<i>Website</i>	Publik	Sekretariat
81	30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	pengembangan SIM SATPOL PP	SIM SATPOL PP dikembangkan dengan menampilkan data rekapitulasi penanganan ringan seperti ODGJ, kebakaran yang bisa dilihat masyarakat	Hasil Survei	Praja dan Pemadam	RAA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Tidak ada	seluruh data di satpol pp dan damkar	Dash board informasi	<i>Website</i>	Internal OPD & Publik	Sekretariat

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
82	30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SISKAMLIN G	pengecekan alat pemadam kebakaran - aplikasi pelaporan dan pendataan terkait alat pemadam tabung ringan	Layanan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	RAA.02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Layanan Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Data pelapor, data siskamling, data alat pemadam tabung ringan	Penca tatan hasil inspeksi SISKAMLIN G	Website	Internal OPD & Publik (SISKAMLING)	Bidang ketenagamaan, keterampilan Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
83	31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	E-Aset	Digunakan untuk manajemen aset dan pengajuan pemeliharaan barang RSUD Kota Madiun	Hasil Survei	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	RAA.02.03	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data Aset	Rekap an Data Aset	Website	Internal OPD	Sekretariat

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
84	31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Telemedicine RSUD Kota Madiun	Aplikasi yang digunakan untuk pelayanan konsultasi atau pemeriksaan pasien secara <i>online</i> pada RSUD Kota Madiun. Aplikasi ini juga digunakan menyajikan informasi terkait ketersediaan fasilitas rumah sakit, seperti kamar inap, ICU, UGD, ambulance di Rumah Sakit untuk masyarakat	Hasil Survei	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	RAA.02.04	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data pasien, data dokter, data hasil konsultasi, data ketersediaan tempat tidur	Konsultasi pemeriksaan <i>online</i> dan Informasi Ketersediaan fasilitas rumah sakit	<i>Website dan Mobile</i>	Internal OPD & Publik	Bidang Pelayanan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
85	31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	E- Monas	Untuk pencatatan kematian dan kelahiran secara real time dan terintegrasi dengan data kependudukan	Hasil Survei	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	RAA.02.05	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data Kematian dan Kelahiran	Laporan kematian dan kelahiran	Website	Internal OPD	Bidang Pelayanan

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
86	31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	E-Belanja BLUD	Digunakan manajemen dan pencatatan belanja keuangan	Hasil Survei	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	RAA.02.06	Aplikasi Fungsi Tertentu	Tidak ada	Data Belanja Keuangan Real time (Akrual)	Rekap data belanja	Website	Internal OPD	Sekretariat

No	Kode OPD	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kategori Usulan	OPD Pemilik	Area Aplikasi	Referensi Aplikasi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
87	32	Kecamatan Manguharjo	Aplikasi Mall Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan pelayanan dari Kecamatan dan Kelurahan agar masyarakat tidak lagi datang langsung ke kantor untuk urusan administrasi surat-menyurat. Setelah aplikasi ini berhasil diimplementasikan di Kecamatan Manguharjo, maka selanjutnya dapat juga diimplementasikan kepada seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun.	Analisis	Bagian Pemerintahan	RAA 01.02	Aplikasi administrasi pemerintah	Seluruh pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	Data penduduk pelayan	Pelayanan secara <i>online</i>	<i>Website</i>	OPD lain (seluruh Kecamatan dan Kelurahan) & Publik	Seksi pemerintahan

BAB V

ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

5.1 Pendahuluan

Bab ini akan membahas secara umum terkait Arsitektur Infrastruktur SPBE yang akan menjadi dasar acuan dalam penyusunan Bab 5. Penjelasan diawali dengan pengertian infrastruktur SPBE, dilanjutkan dengan penjabaran struktur referensi Arsitektur dan metadata Infrastruktur SPBE yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Draft Arsitektur SPBE Nasional.

5.1.1 Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas 2 (dua) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. **Jaringan Intra Pemerintah** merupakan jaringan inter koneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah** merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Tujuan dari disusunnya RAI SPBE adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya.

Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAI adalah:

- a. Taksonomi RAI harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
- b. Didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur TIK;
- c. Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- d. Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
- e. Berbasis standar umum (*open standard*);
- f. Dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RAD melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh RAK.

RAI berlaku secara nasional, sehingga IPPD menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur TIK yang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan infrastruktur TIK yang menjadi prioritas agenda pembangunan.

5.1.2 Penyusunan dan Struktur Referensi Infrastruktur SPBE

Tujuan dari disusunnya Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilitasnya.

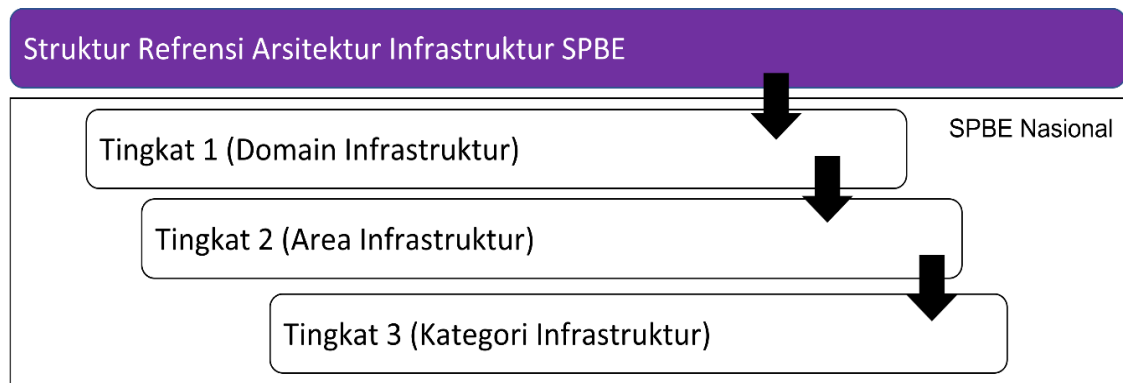
Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAI adalah:

- a. Taksonomi RAI harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
- b. Didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur TIK;
- c. Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- d. Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
- e. Berbasis standar umum (*open standard*); dan
- f. Dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RAD melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh RAK.

RAI berlaku secara nasional, sehingga IPPD menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur TIK yang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan infrastruktur TIK yang menjadi prioritas agenda pembangunan.

Struktur dari RAI SPBE Nasional pada 3 (tiga) tingkat teratas, yaitu:

- a. Domain, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain sebagai RAI tingkat 1 (pertama);
- b. Area, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam area sesuai dengan masing-masing domain infrastrukturnya sebagai RAI tingkat 2 (kedua); dan
- c. Kategori, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam kategori sesuai dengan masing-masing area infrastrukturnya sebagai RAI tingkat 3 (ketiga).



Gambar 5.1 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

5.1.3 Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI)

Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) berdasarkan hasil harmonisasi Arsitektur SPBE Nasional terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 (satu) dan 7 (tujuh) area di tingkat 2 (satu). RAI menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK baik secara nasional maupun untuk IPPD, sebagaimana pada **Gambar 5.1**. Lebih lanjut, terkait dengan penjelasan pada setiap komponen dalam RAI referensi arsitektur infrastruktur SPBE akan dijabarkan pada **Tabel 5.1** sedangkan untuk penjelasan terkait atribut metadata infrastruktur SPBE akan dijabarkan mulai **Tabel 5.2** hingga **Tabel 5.11**.

Tabel 5.1 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE
Fasilitasi Komputasi (01)		
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
Sistem Integrasi (02)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara sub sistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi.
02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.
Platform (03)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi <i>cloud</i> untuk lingkungan kerja aplikasi.

Tabel 5.2 Atribut Metadata Komputasi Awan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama <i>Government Cloud</i>	Nama <i>government cloud</i> yang digunakan
3.	Deskripsi <i>Government Cloud</i>	Penjelasan dari <i>government cloud</i> yang digunakan

No.	Nama Atribut	Keterangan
4.	Tipe <i>Government Cloud</i>	Jenis dari <i>government cloud</i> yang digunakan (PaaS, IaaS, SaaS, BDaaS, dan SecaaS)
5.	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari <i>government cloud</i> yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>government cloud</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7.	BiayaLayanan	Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk layanan <i>government cloud</i> .
8.	Unit Pengembang <i>Government Cloud</i>	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan <i>government cloud</i> .
9.	Unit Operasional <i>Government Cloud</i>	Unit operasional <i>government cloud</i> yang digunakan.
10.	Jangka Waktu Pelayanan	Periode penggunaan layanan <i>government cloud</i> .
11.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 5.3 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Perangkat Lunak	Nama perangkat lunak yang digunakan.
3.	Deskripsi Perangkat Lunak	Penjelasan dari perangkat lunak yang digunakan.
4.	Tipe Perangkat Lunak	Jenis dari perangkat lunak yang digunakan (sistem operasi, sistem utilitas atau sistem <i>database</i>).
5.	Jenis Sistem Operasi (jika pilihan adalah 1 pada No. 3)	(Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS atau Lainnya)
6.	Jenis Sistem Utilitas (jika pilihan adalah 2 pada No. 3)	(Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)

No.	Nama Atribut	Keterangan
7.	Jenis Sistem Database (jika pilihan adalah 3 pada No. 3)	(Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)
8.	Jenis Lisensi	Jenis lisensi perangkat lunak yang digunakan (lisensi seumur hidup, lisensi periodik, atau kode sumber terbuka).
9.	Nama Pemilik Lisensi	Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak.
10.	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak yang digunakan.
11.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 5.4 Atribut Metadata Perangkat Keras *Server*

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama <i>Server</i>	Nama dari perangkat <i>server</i> yang digunakan.
3.	Deskripsi <i>Server</i>	Berisi deskripsi dari perangkat <i>server</i> yang digunakan.
4.	Jenis Penggunaan <i>Server</i>	Jenis penggunaan dari <i>server</i> yang digunakan, jenis penggunaan tersebut antara lain <i>web server</i> , <i>mail server</i> , aplikasi, database, <i>file server</i> , <i>active directory</i> , dan keamanan informasi.
5.	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>data storage</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7.	Unit Pengelola <i>Server</i>	Unit pengelola <i>server</i> yang digunakan.

No.	Nama Atribut	Keterangan
8.	Lokasi Data <i>Storage</i>	Lokasi dari data storage yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
9.	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh <i>server</i> , pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10.	Kapasitas Penyimpanan	Kapasitas memori atau <i>Random Access Memory</i> (RAM) yang digunakan oleh <i>server</i> , satuan kapasitas memori dalam <i>GigaByte</i> (GB).
11.	Jenis Teknologi <i>Prosesor</i>	Jenis teknologi <i>prosesor</i> yang digunakan oleh <i>server</i> , a.l.: <i>High End, Mid End, Low End</i> .
12.	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada <i>server</i> , satuan kapasitas penyimpanan dalam <i>Gigabyte</i> (GB).
13.	Teknik Penyimpanan	Teknik penyimpanan yang digunakan pada <i>server</i> RAID 1, RAID 3, RAID 5, atau non-RAID.
14.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 5.5 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama <i>Data Storage</i>	Nama dari data <i>storage</i> yang digunakan.
3.	Deskripsi <i>Data Storage</i>	Berisi deskripsi dari data <i>storage</i> yang digunakan.
4.	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data dan informasi.
5.	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>data storage</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.

No.	Nama Atribut	Keterangan
7.	Unit Pengelola <i>Data Storage</i>	Unit pengelola <i>data storage</i> yang digunakan.
8.	Lokasi <i>Data Storage</i>	Lokasi dari <i>data storage</i> yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
9.	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh <i>data storage</i> , pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10.	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada <i>data storage</i> , satuan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte (GB).
11.	Metode Akses <i>Data Sharing</i>	Metode Akses data sharing yang digunakan pada <i>data storage</i> (<i>Direct Attached Storage/DAS</i> atau <i>Network Attached Storage/NAS</i>).
12.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 5.6 Atribut Metadata Perangkat Jaringan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama <i>Network/Communication Device</i>	Nama <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan
3.	Deskripsi <i>Network/Communication Device</i>	Penjelasan dari <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan
4.	Tipe <i>Network/Communication Device</i>	Jenis dari <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment)
5.	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>Network/</i>

No.	Nama Atribut	Keterangan
		<i>Communication Device</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri
7.	Unit Pengelola <i>Network/Communication Device</i>	Unit pengelola <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan
8.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 5.7 Atribut Metadata Perangkat Keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama <i>Security Device</i>	Nama dari <i>Security Device</i> yang digunakan
3.	Deskripsi <i>Security Device</i>	Penjelasan dari <i>Security Device</i> yang digunakan
4.	Tipe <i>Security Device</i>	Jenis dari <i>security device</i> yang digunakan (<i>Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control</i>)
5.	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari <i>Security Device</i> yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>Security Device</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7.	Unit Pengelola <i>Security Device</i>	Unit pengelola <i>Security Device</i> yang digunakan
8.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 5.8 Atribut Perangkat Keras Periferal

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Periferal	Nama periferal yang digunakan.
3.	Deskripsi Periferal	Penjelasan dari periferal yang digunakan.
4.	Tipe Periferal	Jenis dari periferal yang digunakan (<i>input, output, input/output</i>).
5.	Lokasi Penempatan Periferal	(mengacu pada metadata fasilitas)
6.	Unit Pengelola <i>Network/Communication Device</i>	Unit pengelola periferal yang digunakan
7.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 5.9 Atribut Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Sistem Penghubung	Nama sistem penghubung yang digunakan atau dimiliki.
3.	Deskripsi Sistem Penghubung	Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang digunakan.
4.	Jenis Sistem Penghubung	Jenis sistem penghubung yang digunakan (Sistem penghubung pemerintah / sistem penghubung non pemerintah).
5.	Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6.	Nama Pemilik	Nama pemilik data <i>storage</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7.	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Nama jaringan intra yang digunakan oleh sistem penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari metadata jaringan intra pemerintah.

No.	Nama Atribut	Keterangan
8.	Aplikasi yang Dihubungkan	Aplikasi yang dihubungkan oleh sistem penghubung, pilihan aplikasi didapat dari metadata aplikasi.
9.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 5.10 Atribut Jaringan Intra Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Jaringan	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
3.	Deskripsi Jaringan	Merupakan penjelasan dari jaringan.
4.	Jenis Jaringan	Merupakan jenis jaringan yang digunakan.
5.	Kepemilikan	Merupakan pemilik dari jaringan.
6.	Nama Pemilik	Merupakan nama dari pemilik jaringan.
7.	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Merupakan unit kerja/perangkat daerah pengelola jaringan.
8.	<i>Bandwidth</i>	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> yang tersedia.
9.	Tipe Media Jaringan	Merupakan tipe dari media jaringan.
10.	Media Lainnya	Merupakan tipe dari media jaringan.
11.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Tabel 5.11 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Fasilitas	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
3.	Kode Model Referensi SPBE	Merupakan kode model referensi SPBE sesuai dengan fasilitas yang dipilih.
4.	<i>Bandwidth</i> Intranet	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> internet yang tersedia selama 1 tahun.
5.	<i>Bandwidth</i> Internet	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> internet yang tersedia selama 1 tahun.
6.	Lokasi	Merupakan lokasi dari fasilitas.

No.	Nama Atribut	Keterangan
7.	Kepemilikan	Merupakan unit pemilik dari fasilitas.
8.	Unit Kerja Penanggung Jawab	Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang bertanggung jawab atas fasilitas.
9.	Klasifikasi <i>Tier</i> Fasilitas	Merupakan klasifikasi <i>tier</i> fasilitas.
10.	Sistem Pengamanan Fasilitas	Merupakan tipe pengamanan fasilitas.
11.	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

5... Ruang Lingkup

5.2 Metodologi

Pada Sub bab ini akan dibahas terkait metodologi yang digunakan dalam melakukan analisis Arsitektur Infrastruktur SPBE pada Pemerintah Kota Madiun. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Bab ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan yang dimulai analisis kondisi eksisting, analisis kesenjangan, dan analisis usulan.

5.2.1 Analisis Kondisi Eksisting

Analisis kondisi eksisting dilakukan untuk mengetahui terkait kondisi terkini penerapan infrastruktur yang ada di Pemerintah Kota Madiun. Proses analisis kondisi eksisting terdiri dari input berupa data yang dihasilkan pelaksanaan survei *online* dan *offline*, yang kemudian diproses dengan melakukan analisa dan review data. Sehingga dari proses pengolahan data dapat menghasilkan kondisi eksisting.

5.2.2 Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan merupakan proses analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi terkait tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau tindakan untuk mencapai kinerja yang diharapkan di masa mendatang. Analisis kesenjangan juga membandingkan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal terkait infrastruktur SPBE pada Pemerintah Kota Madiun. Input yang digunakan pada tahap ini yaitu berupa data terkait dengan kondisi eksisting dan selanjutnya dilakukan proses membandingkan dari hasil analisis antara kondisi eksisting dengan kondisi infrastruktur SPBE yang diharapkan di masa mendatang.

5.2.3 Analisis Usulan

Analisis usulan infrastruktur SPBE merupakan saran perbaikan atau rekomendasi pengembangan untuk peningkatan penerapan Infrastruktur dan nilai indeks SPBE domain infrastruktur SPBE yang akan diterapkan pada Pemerintahan Kota Madiun. Input pada tahap ini merupakan hasil dari analisis kesenjangan yang telah didapatkan dan selanjutnya dilakukan proses analisa untuk mendapatkan solusi berupa usulan prioritas infrastruktur. Dari usulan peta rencana infrastruktur, nantinya digunakan untuk membantu meningkatkan nilai indeks SPBE yang ingin dicapai pada setiap indikatornya. Adapun indikator capaian keberhasilan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5.3 Arsitektur Infranstruktur SPBE

Sub bab ini menjelaskan terkait Arsitektur Infrastruktur SPBE, dimulai dari pembahasan kondisi eksisting infrastruktur SPBE, permasalahan infrastruktur, kondisi kesenjangan infrastruktur, dan usulan infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Madiun. Adapun pembahasan infrastruktur yang dimaksudkan yaitu jaringan intra pemerintah, pusat data atau ruang *server*, komputasi, sistem penghubung layanan, perangkat keras dan perangkat lunak

5.3.1 Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE

Bahwa seluruh data Kondisi Eksisting didapatkan dari Hasil Survei Lapangan pada seluruh PD yang ada di Pemerintah Kota Madiun. Kondisi Eksisting yang akan dijelaskan pada sub-sub di bawah ini terkait dengan pembahasan infrastruktur yang terdiri dari jaringan intra pemerintah, pusat data atau ruang *server*, komputasi, sistem penghubung layanan, perangkat keras dan perangkat lunak serta dilengkapi dengan permasalahan dan Analisis Kesenjangan dari kondisi eksisting yang didapatkan.

5.3.1.1 Kondisi Eksisting Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra

instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah. Pembahasan terkait dengan jaringan intra pemerintah meliputi ketersediaan topologi jaringan dan ketersediaan *bandwidth* yang terdapat pada Pemerintah Kota Madiun.

Kondisi eksisting terkait dengan infrastruktur Jaringan yang ada di Pemerintah Kota Madiun sudah cukup baik dalam penerapannya. Bentuk penerapan yaitu dengan penerapan jaringan intra pemerintah terpusat yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dan penggunaan media Jaringan yang ada di Pemerintah Kota Madiun telah menerapkan Fiber Optik dalam integrasi jaringan yang digunakan, keseluruhan Jaringan Intra Pemerintah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Keseluruhan data eksisting terkait infrastruktur jaringan didapatkan dari proses pelaksanaan survei lapangan berdasarkan dengan kondisi sebenarnya yang telah diimplementasikan oleh seluruh PD di Pemerintah Kota Madiun. Penjabaran kondisi eksisting jaringan intra pemerintah yang ada di Pemerintah Kota Madiun akan dijelaskan pada substansi ~~subbab~~ dibawah ini.

a. Ketersediaan Topologi Jaringan

Jaringan intra pemerintah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun **sudah menghubungkan** seluruh PD yang ada. Pengelolaan jaringan intra pemerintah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dimana seluruh PD terhubung menggunakan jaringan *fiber optic* dengan menggunakan *core* yang cukup besar. Pemerintah Kota Madiun menggunakan **2 (dua) ISP** yaitu PT. Mora Telematika Indonesia dan PT Inter Media Lintas Nusa dengan masing masing sewa *bandwidth* sebesar 500 Mbps yang semuanya masuk melalui *Router BGP*. Distribusi dari *Router BGP* disebarkan melalui beberapa router sesuai dengan fungsi masing masing, yaitu **Core Internet** yang berfungsi sebagai *router* distribusi internet untuk OPD, **router core server** untuk kebutuhan konektivitas pada *server farm* dan **router VPN** untuk memenuhi kebutuhan jaringan VPN.

Cadangan konektivitas jaringan intra pemerintah saat ini menggunakan jaringan *wireless* atau jaringan lama yang digunakan sebelum adanya gelaran *fiber optic*. Jaringan *wireless* ini digunakan ketika ada kendala atau proses maintenance pada jaringan *fiber optic*. Untuk proses keamanan jaringan saat ini menggunakan satu buah *firewall* fisik yang diletakkan sebelum *Core BGP*. Dengan implementasi pengamanan berupa *firewall* fisik ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengamanan untuk seluruh OPD yang terdiri dari 27 Kelurahan, 6 Puskesmas, 30 OPD, 70 Sekolah dan 1 RSUD.

b. Ketersediaan Bandwidth

Berdasarkan dengan kondisi eksisting yang didapatkan dari pengumpulan data survei yang dilakukan sebelumnya, diperoleh data terkait dengan ketersediaan *bandwidth* yang ada di Pemerintah Kota Madiun. Seluruh **Jaringan Intra Pemerintah telah terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun** dimana seluruh *bandwidth* pada masing-masing PD telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Ketersediaan *bandwidth* untuk Jaringan Intra Pemerintah Kota Madiun yaitu saat ini **menggunakan 2 (dua) media yang digunakan untuk distribusi Jaringan intra pemerintah** antara lain yaitu menggunakan Kabel Fiber Optik dan Nirkabel (*Wireless*). Detail Ketersediaan Bandwidth dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Tabel 7.8.**

5.3.1.2 Kondisi Eksisting Ruang Server

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Ruang *Server* memiliki definisi sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Kondisi Eksisting terkait Ruang *Server* yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun saat ini **telah menerapkan Pemusatan Data Center** pada **Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun** yang ditunjukkan dengan adanya Pusat Data atau Ruang *server* yang dimiliki saat ini dan terdapat beberapa PD yang telah meletakkan pada Ruang *Server* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang mana nantinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola dan merawat *server* yang dititipkan oleh PD serta **telah dilengkapi dengan adanya standar keamanan ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang diterapkan pada ruang *server***. Penjelasan secara detail terkait dengan Daftar *server* dan Aspek pusat data akan dijelaskan pada sub bab dibawah ini.

a. Daftar *Server*

Berdasarkan dengan kondisi eksisting terkait dengan data *server* yang ada pada Pemerintah Kota Madiun terdapat beberapa daftar *server* yang dimiliki dan dikelola oleh beberapa PD dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Dari hasil pengumpulan data survei yang dilakukan pada Pemerintah Kota Madiun terdapat **29 *Server*** yang dimiliki oleh **7 PD**. Detail penjabaran daftar *server* yang dimiliki oleh pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Tabel 7.9**.

b. Aspek Pusat Data (Ruang *Server*)

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pusat Data atau *Server* memiliki definisi sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Tolok ukur kelayakan atau kesiapan sebuah ruang *server* dalam memenuhi fungsinya salah satunya adalah Aspek pusat data. Terutama apabila ruang *server* tersebut direncanakan untuk menampung kebutuhan atau pemusatan pusat data pemerintah daerah. Aspek ruang *server* perlu diperhatikan sebagaimana yang telah dijelaskan pada **TIA-942 untuk standar yang baik dalam pembuatan serta pemusatan data pada Ruang *Server***. Berikut merupakan detail penerapan aspek pusat data yang ada pada beberapa PD yang dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Tabel 7.10**.

5.3.1.3 Kondisi Eksisting Komputasi Awan

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE pada sub domain Infrastruktur

disebutkan komputasi dibedakan menjadi 2, yaitu komputasi awan dan fasilitas komputasi. **Komputasi awan** yang berfokus pada penggunaan perangkat lunak pada sistem *cloud*. Sedangkan **fasilitas komputasi** lebih mengarah pada metode komputasi yang lebih kompleks seperti halnya cloud computing ataupun pemrosesan sebuah program dengan sistem cloud.

1. Komputasi Awan

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, Komputasi awan adalah lapisan yang menghubungkan antara lapisan arsitektur lainnya secara logikal berbentuk layanan infrastruktur SPBE berbagi pakai berupa sistem *Infrastructure as a Services* (IaaS), *Platform as a Services* (PaaS), dan *Software as a Services* (SaaS), dimana data dan informasi didalamnya, diolah menggunakan *Big Data as a Services* (BdaaS), serta didukung aspek keamanan untuk keseluruhan komputasi awan dengan *Security as a Services* (SecaaS). Salah satu yang sering ditemukan dan paling populer adalah Google Drive, yang tidak hanya menyediakan media penyimpanan tetapi juga media pengolah angka, pengolah kata dan lainnya. Detail penerapan penggunaan Komputasi Awan pada Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Gambar 7.2.**

Dari hasil pengumpulan data survei terkait dengan kondisi eksisting terdapat data penggunaan Komputasi Awan pada lingkungan Pemerintah Kota Madiun antara lain yaitu **7 (Tujuh) PD** atau sebesar **20%** telah menerapkan penggunaan Komputasi Awan berupa Google Drive dan **28 (Dua Puluh Delapan) PD** atau sebesar **80%** yang belum menggunakan komputasi awan. Berikut merupakan detail penggunaan Komputasi Awan yang dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Tabel 7.11.**

2. Fasilitas Komputasi (*Server*)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE fasilitas komputasi awan berupa pusat data nasional, pusat data komputasi dan pusat kendali yang bersifat nasional. Fasilitas komputasi ini berupa fasilitas komputasi milik IPPD yang telah terintegrasi dengan fasilitas komputasi nasional. Dalam ruang lingkup daerah, pusat data ini dapat diwakilkan dengan ruang *server*, sedangkan untuk pusat komputasi kendali dapat berupa *command center*.

Pemanfaatan pusat komputasi lebih membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, sehingga tidak banyak yang menerapkan untuk tingkat PD. Namun kelebihan dari fasilitas komputasi yang memadai salah satunya adalah bisa digunakan secara berbagi dengan PD lain seperti penggunaan *Google Drive*, *Onedrive* dan *Owncloud*. Dari hasil pengumpulan data survei terkait dengan kondisi eksisting, PD yang terdapat pada Kota Madiun hingga saat ini terkait penerapan komputasi awan **belum menyeluruh menerapkan** dan hanya terdapat beberapa PD yang telah menggunakan dan menerapkan Fasilitas Komputasi.

5.3.1.4 Kondisi Eksisting Sistem Penghubung Layanan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan. Sistem penghubung layanan memiliki tujuan untuk mempermudah dalam melakukan integrasi layanan yang telah didukung dengan aplikasi. Sistem penghubung layanan dapat direalisasikan dalam bentuk *Web Service*, API (*point to point* maupun *gateway*), dan database. Dari hasil pengumpulan data survei terkait dengan kondisi eksisting, Pemerintah Kota Madiun **belum menerapkan** Sistem Penghubung Layanan secara terpusat. Pemerintah Kota Madiun saat ini telah menerapkan beberapa Penghubung Layanan yang dibangun sendiri dan digunakan pada beberapa PD yaitu terdapat **15 PD** yang menggunakan Penghubung layanan dengan memanfaatkan Web API

dan Web Service. Berikut merupakan detail sistem penghubung layanan yang dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Lampiran 7.5.**

5.3.1.5 Kondisi Eksisting Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Pengklasifikasian infrastruktur terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat Keras terdiri dari perangkat keras utama, perangkat keras peripheral, perangkat jaringan dan perangkat media penyimpanan. Sedangkan perangkat lunak yang terdiri dari sistem operasi dan aplikasi perkantoran yang digunakan untuk menunjang dalam pelaksanaan infrastruktur SPBE pada Pemerintah Kota Madiun. Ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak didapatkan dari hasil survei yang telah dilakukan pada masing-masing PD pada Pemerintah Kota Madiun.

1. Perangkat Keras

Ketersediaan perangkat keras pada Pemerintah Kota Madiun digunakan untuk menunjang dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ketersediaan Perangkat Keras dibedakan menjadi 4 poin pembahasan yaitu Perangkat Keras Utama, Perangkat Keras Periferal, Perangkat Jaringan, dan Perangkat Media Penyimpanan. Berikut penjelasan detail terkait macam-macam perangkat keras yang dijelaskan di bawah ini.

a) Perangkat Keras Utama

Berdasarkan dengan kondisi eksisting perangkat keras yang ada pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Tabel 7.12-7.14** dapat disimpulkan jumlah keseluruhan perangkat keras yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun, dijabarkan pada **Tabel 5.12**

Tabel 5.12 Total Eksisting Perangkat Keras Utama

No	Nama Perangkat Keras	Jumlah
1	PC	996
2	Laptop	765
3	Printer	948

Dari hasil jumlah perangkat keras yang terdata pada saat survei, terdapat perangkat keras dengan usia penggunaan lebih dari 5 tahun serta terdapat beberapa PD tidak melakukan inventarisasi barang secara berkala sehingga pada tabel yang dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Tabel 7.12-7.15** terkait dengan data untuk perangkat Komputer (PC), Laptop dan printer yang berjumlah 0.

Hal tersebut dapat menjadi dasar usulan untuk pengadaan pembaharuan perangkat, dengan usia penggunaan diatas 5 tahun untuk mendukung kinerja dan performa kebutuhan kantor sehari hari. Perangkat dengan usia penggunaan tersebut adalah usia optimal untuk dilakukannya pergantian perangkat keras mengingat munculnya OS baru, keadaptifan dalam membuka browser atau melakukan hal berat pada perangkat keras dengan membuka aplikasi baru, serta menurunnya performa perangkat keras.

b) Perangkat Keras Periferal

Perangkat Keras Periferal atau perangkat tambahan adalah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Beberapa perangkat yang umum digunakan yaitu terdiri dari Scanner, Printer Khusus , Kamera, Speaker, HT, LED TV, Monitor, Proyektor dan lain sebagainya. Berikut merupakan daftar perangkat periferal yang diperoleh dari hasil survei pada 35 PD dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Tabel 7.16.**

c) Perangkat Keras Jaringan

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 pada pasal 27 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa jaringan intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup

yang menghubungkan antar jaringan intra pusat dan pemerintah daerah. Agar terlaksananya jaringan intra pemerintah harus memenuhi infrastruktur terkait perangkat konektivitas yang digunakan untuk mendukung terlaksananya infrastruktur jaringan intra pemerintah, Adapun perangkat yang digunakan meliputi *Modem, Hub/Switch, Gateway-Router, Access Point, Repeater Wifi dan Antena Outdoor*. Berikut merupakan perangkat keras Jaringan yang dimiliki oleh masing-masing PD yang ada pada Pemerintah Kota Madiun yang dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Tabel 6.17 – Tabel 6.22.**

Berdasarkan dengan penjelasan pada tabel diatas terkait dengan ketersediaan perangkat Jaringan dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing PD telah terdapat perangkat Jaringan yang mendukung terkait dengan integrasi atau distribusi jaringan intra pemerintah kota madiun. Berikut merupakan total seluruh perangkat jaringan yang ada pada masing-masing PD dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Tabel 7.23.** Terkait dengan antena outdoor, dirasa perlu dilakukan pendataan aset lebih lanjut mengingat informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika antena outdoor digunakan sebagai backup jaringan *fiber optic*.

Tabel 5.13 Eksisting Perangkat Jaringan

Nama Perangkat	>= 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Jumlah
Modem	9	2	2	13
Hub/Switch	9	67	21	97
Gateway/router	9	15	0	24
Access Point	4	53	1	58
Repeater Wifi	4	1	0	5
Antena Outdoor	6	5	0	11

2. Perangkat Lunak

Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang infrastruktur SPBE adalah tersedianya perangkat lunak. Penggunaan perangkat lunak dibutuhkan dalam mendukung aktivitas sehari-hari untuk menunjang kinerja Pemerintah Kota Madiun. Dalam Draft Arsitektur SPBE yang diterbitkan pada 22 Juni 2021 pada metadata disebutkan perangkat lunak platform terbagi menjadi sistem operasi dan aplikasi perkantoran (pemrosesan kata, pemrosesan angka, pemrosesan visual, editing foto, tools programming, DBMS, penyuntingan video, browser, dan video conference).

Ketersediaan perangkat lunak yang terdapat pada Pemerintah Kota Madiun digunakan sebagai penunjang atau sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Sistem operasi terdiri dari windows, linux, mac, dual os, dan lainnya. Sedangkan aplikasi perkantoran terdiri dari Ms. Office, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, dan lainnya. Perangkat lunak yang terdapat pada Pemerintah Kota Madiun akan dijelaskan lebih detail di bawah ini.

a) Sistem Operasi

Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer, kecuali program booting. Berikut merupakan kondisi eksisting dari penggunaan sistem operasi pada Pemerintah Kota Madiun yang dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Gambar 7.3.**

Mayoritas penggunaan sistem operasi pada Pemerintah Kota Madiun lebih kepada Sistem Operasi Windows yaitu sebanyak **35 PD** yang menggunakan dengan persentase 95% , Linux sebanyak **1 PD** yang menggunakan dengan presentase 1%, dan Mac sebanyak **5 OPD** yang menggunakan dengan presentase 4%.

b) Aplikasi Perkantoran

Perangkat lunak aplikasi perkantoran digunakan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari dari masing-masing PD. Penggunaan perangkat lunak aplikasi perkantoran dibagi beberapa bagian yaitu Aplikasi perkantoran pemrosesan kata, pemrosesan angka, pemrosesan visual, editing foto, tools programming, DBMS, penyuntingan video, browser, dan video conference. Ilustrasi penggunaan aplikasi perkantoran yang ada di Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Gambar 7.4.**

Berdasarkan dengan Gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat 9 Aplikasi Perkantoran yang digunakan pada OPD yang ada di Pemerintah Kota Madiun, antara lain yaitu Pemrosesan Kata 13%, Pemrosesan Angka 13%, Pemrosesan Visual 11%, Editing Video 6%, Tools Programming 6%, DBMS 4%, Editing Foto 17%, Browser 19% dan Video Conference 11%.

3. Perangkat Media Penyimpanan

Berdasarkan dengan Kondisi Eksisting yang didapatkan dari hasil survey, pada beberapa PD terdapat perangkat media penyimpanan yang digunakan antara lain seperti Hardisk Eksternal dan Flashdisk dan beberapa perangkat penyimpanan lainnya yang bertujuan untuk menyimpan backup data perkantoran ataupun data penting. Berikut merupakan detail perangkat media penyimpanan yang ada pada OPD di Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Tabel 7.24.**

5.3.1.6 Permasalahan Infrastruktur SPBE

Berdasarkan dengan kondisi eksisting infrastruktur SPBE Kota Madiun yang didapatkan dari Hasil Pengumpulan Data Survey terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu, sebagai berikut: diantaranya Permasalahan Jaringan Intra Pemerintah, Permasalahan Ruang *Server/Server*, Permasalahan Sistem Penghubung Layanan, Permasalahan Perangkat Keras dan Lunak

(Sistem Operasi dan Aplikasi Perkantoran). Setiap permasalahan terkait dengan infrastruktur dibahas pada sub bab berikut.

1. Permasalahan Jaringan Intra Pemerintah

Permasalahan Jaringan yang terjadi pada Pemerintah Kota Madiun terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam Penerapan Jaringan Intra yang dimiliki saat ini, antara lain seperti Putus, Internet Lambat, dan Kerusakan Perangkat Keras Jaringan. Ilustrasi permasalahan Jaringan dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Gambar 7.5.**

Berdasarkan dengan **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Gambar 7.5** Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Jaringan Intra Pemerintah yang ada di Pemerintah Kota Madiun antara lain yaitu Persentase terjadinya Internet Putus sebanyak 42% jaringan internet lambat 41%, Kerusakan Modem 11%, dan kerusakan Perangkat Keras Jaringan 6%. Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Jaringan yang mayoritas dihadapi oleh OPD di Kota Madiun yaitu **Permasalahan terkait Jaringan putus** dengan persentase 42%.

2. Permasalahan Ruang Server (Data Center)

Permasalahan Ruang *Server* / *Server* yang terjadi pada Pemerintah Kota Madiun terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam Penerapan Ruang *Server* yang dimiliki saat ini, antara lain seperti *Server Down*, Kelistrikan, Kehilangan data, Perangkat dan Peralatan Rusak, Ruang *Server* tidak memenuhi Aspek dan Permasalahan Jaringan. Ilustrasi permasalahan Ruang *Server* dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Gambar 7.6.**

Berdasarkan dengan **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Gambar 7.6** Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Ruang *Server* yang ada di Pemerintah Kota Madiun antara lain yaitu Persentase terjadinya Kelistrikan (Sering Mati) sebanyak 40%, Ruang *Server* tidak memenuhi aspek sebanyak 40%, dan Data tidak *update* 20%. Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Ruang *Server*

yang mayoritas di Kota Madiun yaitu **Jaringan Lambat(Internet)** dengan Persentase sebanyak 65%,

3. Permasalahan Sistem Penghubung Layanan

Permasalahan Sistem Penghubung Layanan yang terjadi pada Pemerintah Kota Madiun untuk saat ini yang dialami tidak cukup signifikan antara tidak adanya Sistem Penghubung Layanan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan terdapat beberapa permasalahan yang ditampilkan pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Gambar 7.7.**

Berdasarkan dengan **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Gambar 7.7** Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Sistem Penghubung Layanan yang ada di Pemerintah Kota Madiun antara lain yaitu persentase Data yang tidak tersedia 16 %, Koneksi ke *server* terputus 50% dan tidak tertariknya data dari *server* 34%.

4. Permasalahan Perangkat Keras

Permasalahan Perangkat Keras yang terjadi pada Pemerintah Kota Madiun terdapat beberapa permasalahan yang dialami saat ini, antara lain seperti Kerusakan *Keyboard/mouse*, Kerusakan Komputer, Kerusakan *Laptop*, Kerusakan *Printer*. Ilustrasi permasalahan Perangkat Keras dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Gambar 7.8.**

Berdasarkan dengan **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Gambar 7.8** Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Perangkat Keras yang ada di Pemerintah Kota Madiun antara lain yaitu persentase Kerusakan *Keyboard/Mouse* sebanyak 22%, Kerusakan Komputer sebanyak 26%, Kerusakan *Laptop* sebanyak 25% dan Kerusakan *Printer* sebanyak 27%.

5. Permasalahan Perangkat Lunak

Permasalahan Perangkat Lunak yang terjadi pada Pemerintah Kota Madiun terdapat beberapa permasalahan yang dialami saat ini, antara lain seperti Aplikasi Perkantoran yang *Hank* dan *Update* OS terlalu sering. Ilustrasi permasalahan Perangkat

Lunak dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Gambar 7.9.**

Berdasarkan dengan **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Gambar 7.9** Kondisi Eksisting terkait dengan permasalahan Perangkat Lunak yang ada di Pemerintah Kota Madiun antara lain yaitu presentasi Aplikasi Perkantoran yang *Hang* sebanyak 65% dan *Update OS* terlalu sering sebanyak 35%. Sehingga dapat disimpulkan Permasalahan Perangkat Lunak yang mayoritas di Kota Madiun yaitu **Aplikasi Perkantoran yang Hang** dengan Persentase sebanyak 65% (enam puluh lima persen).

5.3.2 Kondisi Eksisting Kesenjangan Infrastruktur

Bagian ini menjelaskan terkait analisis kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari infrastruktur Pemerintah Kota Madiun. Analisis kesenjangan diperlukan untuk memenuhi proses perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur Pemerintah Kota Madiun. Penjelasan mengenai analisis kesenjangan infrastruktur Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada **Bab 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kota Madiun Tabel 7.25.**

5.3.3 Usulan Infrastruktur SPBE

Berdasarkan hasil eksisting dan kesenjangan yang telah dijabarkan, terdapat usulan infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Madiun yang akan dijelaskan dalam beberapa pembahasan yaitu jaringan pemerintahan, ruang *server*, perangkat keras dan perangkat lunak, komputasi dan sistem penghubung layanan. Rekomendasi Usulan terkait dengan Infrastruktur SPBE yang berkaitan dengan ruang *server* yaitu berdasarkan dengan standar TIA-942 dan SNI Pusat Data Agustus 2021 terkait Standar Pusat Data. Dalam usulan infrastruktur didasari dengan kondisi infrastruktur yang digunakan saat ini dengan mempertimbangkan usia perangkat dan efisiensi penggunaannya, maka dari itu diperlukan peremajaan infrastruktur. Terdapat sejumlah ~~Point~~ usulan infrastruktur yang menjadi titik fokus selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 5.14**

Tabel 5.14 Usulan Infrastruktur SPBE Kota Madiun

No	Usulan	Spesifikasi	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Belanja internet terpusat	Penambahan Alokasi Bandwidth untuk Jaringan Intra Pemerintah (Belanja Internet Terpusat)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2024-2025
2	Peremajaan Perangkat Jaringan	Peremajaan Perangkat Jaringan pendukung proses Integrasi Jaringan Intra Pemerintah (Router, Switch/Hub, Access Point, Repeater Wifi, Antena Outdoor Wireless) disesuaikan dengan usia perangkat yang lebih dari 5 tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023-2024
3	Pengkajian Penerapan Jaringan Intra	Melakukan Pengkajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah telah sesuai dan berjalan dengan baik tidaknya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023
4	Penambahan Area <i>Demilitarized Zone</i> (DMZ)	Penerapan DMZ (Demilitarized Zone) pada <i>server</i> digunakan untuk keamanan pada <i>server</i> yang digunakan saat terhubung dengan Jaringan luar <i>server</i> dan dalam <i>server</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023
5	Dokumentasi Topologi Jaringan Fisik dan Logic	Membuat dokumentasi terkait pembuatan Topologi Jaringan Fisik dan Logic	Dinas Komunikasi dan Informatika	2023

No	Usulan	Spesifikasi	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
			Kota Madiun	
6	<i>Surveillance</i> ISO ke-2	Melakukan Kroscek ulang seluruh Dokumen Kebijakan dan SOP Penerapan ISO 27001	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023
7	Sertifikasi Ulang ISO 27001	Melakukan <i>Update/Resertifikasi</i> ulang terkait penerapan Standar ISO 27001	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023
8	Penerapan Penetration Testing	Melakukan Penetration Testing untuk mengetahui permasalahan dan celah pada aplikasi yang digunakan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Setiap Tahun (2023-2027)
9	Pengadaan Perangkat Penyimpanan / Storage (NAS/SAN)	Melakukan Pengadaan Perangkat Keras Storage / Penyimpanan sebagai bentuk penerapan teknologi penyimpanan yang terbaru dan mempermudah akses melalui jaringan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2024-2025
10	Penerapan dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Melakukan Penerapan SPLPdengan mengikuti seluruh prosedur dan pengajuan yang sesuai	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023-2025

No	Usulan	Spesifikasi	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
	Terpusat (SPLP)			
11	Update Kebijakan SOP yang sudah ada	Melakukan <i>Update</i> Kebijakan SOP pada seluruh SOP yang telah ada saat ini terutama pada Ruang <i>Server</i> .	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023

5.3.3.1 Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan dari pengumpulan data survei dan analisis terkait Jaringan Intra Pemerintah Kota Madiun saat ini telah menerapkan jaringan intra pemerintah yang telah terintegrasi dan didistribusikan pada seluruh PD yang ditunjukkan dengan kepemilikan perangkat Jaringan yang dimiliki, penggunaan *fiber optic* dan *Wireless* dalam integrasi Jaringan, dan pemusatan jaringan internet yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, tetapi masih terdapat kekurangan yaitu belum adanya Topologi Jaringan dalam bentuk Fisik maupun *Logic*. Analisis usulan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah yang dapat diterapkan dan menjadi pertimbangan usulan pada Pemerintah Kota Madiun terbagi menjadi 5 (lima) bagian, untuk lebih detailnya akan dijabarkan pada **Tabel 5.15**

Tabel 5.15 Usulan Jaringan Intra Pemerintah Kota Madiun

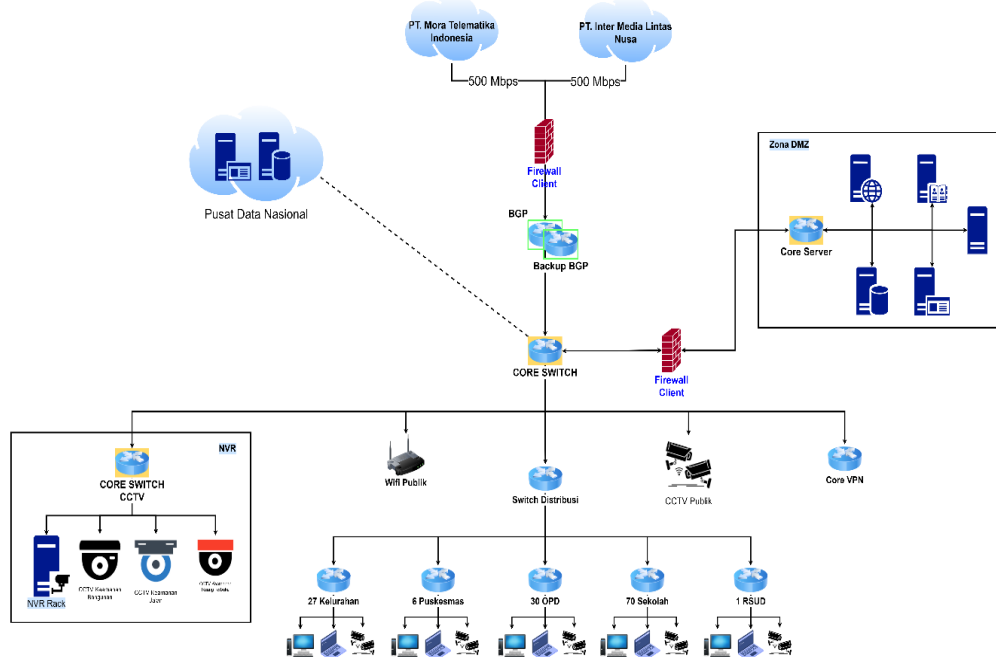
No	Usulan	Spesifikasi	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Belanja internet terpusat	Penambahan Alokasi Bandwidth untuk Jaringan Intra Pemerintah (Belanja Internet Terpusat)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2024-2025

No	Usulan	Spesifikasi	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
2	Peremajaan Perangkat Jaringan	Peremajaan Perangkat Jaringan pendukung proses Integrasi Jaringan Intra Pemerintah (Router, Switch/Hub, Access Point, Repeater Wifi, Antena Outdoor Wireless) disesuaikan dengan usia perangkat yang lebih dari 5 tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023-2024
3	Pengkajian Penerapan Jaringan Intra	Melakukan Pengkajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah telah sesuai dan berjalan dengan baik tidaknya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023
4	Dokumentasi Topologi Jaringan Fisik dan Logic	Membuat dokumentasi terkait pembuatan Topologi Jaringan Fisik dan Logic	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023
5	Penambahan Area <i>Demilitarized Zone</i> (DMZ)	Penerapan DMZ (<i>Demilitarized Zone</i>) pada <i>server</i> digunakan untuk keamanan pada <i>server</i> yang digunakan saat terhubung dengan Jaringan luar <i>server</i> dan dalam <i>server</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023

1. Usulan Topologi Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan dengan kondisi eksisting yang didapatkan bahwa Pemerintah Kota Madiun dalam penerapan Jaringan Intra Pemerintah belum didukung dengan adanya Topologi Jaringan baik dalam bentuk fisik maupun *logic*, maka dari itu terdapat usulan Topologi Jaringan yang dapat digunakan sebagai Acuan Topologi Jaringan yang diterapkan pada Pemerintah Kota Madiun berdasarkan data yang diperoleh dari FGD. Berikut merupakan usulan terkait Topologi Jaringan Intra Pemerintah yang ditampilkan pada **Gambar 5.2**

Topologi Jaringan Kota Madiun



Gambar 5.2 Usulan Topologi Jaringan Intra Pemerintah Kota Madiun Berdasarkan dengan **Gambar 5.16** menjelaskan bahwa terdapat usulan terkait pembuatan Topologi Jaringan Intra Pemerintah Kota Madiun dan beberapa penambahan pendukung dalam penerapan jaringan intra pemerintah yang sesuai, berikut merupakan penjelasan detail terkait usulan Topologi Jaringan Intra Pemerintah:

a) Penambahan *Firewall*

Penambahan *firewall* tersebut diletakkan pada akses yang akan menuju ke *server* yang bertujuan untuk mengamankan akses keluar masuk pada *server*.

b) Penambahan *Router Backup BGP*

Penambahan *router backup* BGP bertujuan untuk mencegah apabila terjadi kerusakan ataupun terjadi masalah pada *router core* BGP dan sudah tersedia *router backup* yang membackup seluruh aktivitas pada core router.

2. **Usulan *Bandwidth***

Bandwidth adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data. Terkait *bandwidth* internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Kebutuhan *bandwidth* berbeda-beda untuk jaringan komputer yang berbeda. Dalam konteks koneksi Internet, makin banyak Pengguna yang membutuhkan Kecepatan Koneksi Internet yang sama, makin Besar *bandwidth* yang dibutuhkan kantor tersebut. Guna menghitung Kebutuhan *bandwidth* sebuah kantor maka perlu menghitung hal berikut ini:

- a) Jumlah perangkat yang terkoneksi internet
- b) Jumlah SDM yang mengakses Internet pada masing-masing PD
- c) Batas maksimal *bandwidth* yang diijinkan untuk setiap perangkat

Pada perhitungan kebutuhan *bandwidth*, asumsi yang digunakan adalah satu orang staf menggunakan 1 (satu) alat yang terkoneksi internet. Sementara itu, untuk kebutuhan *bandwidth* setiap perangkat didasarkan pada kompleksitas konten yang diakses oleh pengguna. *Support* Google memberikan rekomendasi pengelompokan pengguna sebagai berikut:

- a. Pengguna RINGAN : 200 Kbps (*web browsing*)
- b. Pengguna SEDANG : 500 Kbps (mengakses dan mengedit dokumen *Google Drive*)
- c. Pengguna BERAT: min. 1 Mbps (*streaming video*)

Berdasarkan kondisi eksisting terkait *bandwidth* yang diterapkan pada Pemerintah Kota Madiun saat ini maka dari itu diperlukan usulan penambahan *bandwidth* pada masing-masing PD secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing PD dan melihat jumlah SDM pada PD tersebut.

Dikarenakan kondisi saat ini masih terjadi beberapa kendala dalam pembagian di beberapa PD dan banyak mengeluhkan untuk akses internet (*bandwidth*) yang lambat, dan beberapa keluhan tersebut dikarenakan kurang adanya Tim IT pada PD. Maka dari itu Dinas Komunikasi dan Informatika diperlukan perhatian khusus antara lain:

- a) Melakukan Kajian kembali terkait *bandwidth* yang diberikan pada Seluruh PD yang ada di Pemerintah Kota Madiun terkait penggunaan *bandwidth* yang disesuaikan dengan Kondisi PD yang membutuhkan internet lebih prioritas dan memastikan seluruh PD telah terhubung dengan Jaringan Intra dan mendapatkan *bandwidth* yang cukup.
- b) Memastikan perangkat Jaringan yang digunakan dapat mendukung untuk memperluas cakupan akses internet pada setiap ruangan PD dikarenakan tidak memperbolehkan untuk mengadakan perangkat Jaringan dan penyewaan provider selain yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun maka dari itu bertanggung jawab atas keseluruhan akses internet yang terhubung sebagai bentuk upaya maksimal Jaringan Intra Pemerintah yang baik.

Kedua usulan tersebut menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan *bandwidth* secara baik dan efisien untuk digunakan pada Pemerintah Kota Madiun dalam menunjang kinerja dan operasional seluruh PD. Berikut merupakan Usulan penambahan *bandwidth* pada masing-masing PD yang ditampilkan pada **Tabel 5.16**

Tabel 5.16 Usulan Penambahan Alokasi Bandwidth

Kode PD	Nama PD	Usulan Penambahan Bandwith	Tahun Pengadaan
1	Bagian Organisasi	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025

Kode PD	Nama PD	Usulan Penambahan Bandwith	Tahun Pengadaan
2	Bagian Hukum	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
5	Bagian Umum	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
6	Bagian Pemerintahan	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025

Kode PD	Nama PD	Usulan Penambahan Bandwith	Tahun Pengadaan
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
10	Badan Pendapatan Daerah	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
13	Inspektorat Daerah	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
14	Sekretariat DPRD	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025

Kode PD	Nama PD	Usulan Penambahan Bandwith	Tahun Pengadaan
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
20	Dinas Pendidikan	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
22	Dinas Lingkungan Hidup	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025

Kode PD	Nama PD	Usulan Penambahan Bandwith	Tahun Pengadaan
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
24	Dinas Perhubungan	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
29	Dinas Perdagangan	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025

Kode PD	Nama PD	Usulan Penambahan Bandwith	Tahun Pengadaan
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
32	Kecamatan Manguharjo	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
33	Kecamatan Kartoharjo	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 40 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
34	Puskesmas Mangunharjo	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 20 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025
35	Puskesmas Sukosari	10 Mbps pada masing-masing OPD dari Alokasi sebelumnya yang diberikan 20 Mbps pada masing-masing OPD	2024-2025

3. Usulan Manajemen dan Tata Kelola Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/Men/Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional telah diberikan panduan kepada

penanggung jawab tata kelola dalam mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penggunaan teknologi informasi dan dalam organisasi/instansi. Penerapan tata kelola teknologi informasi dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi yang efektif, efisien, dan layak pada suatu organisasi/instansi.

Manajemen jaringan adalah proses pengadministrasian dan pengelolaan jaringan komputer. Layanan yang diberikan oleh disiplin ini meliputi analisis kesalahan, manajemen kinerja, penyediaan jaringan, dan pemeliharaan kualitas layanan. Perangkat lunak manajemen jaringan digunakan oleh administrator jaringan untuk membantu menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Manajemen jaringan memiliki fungsi untuk memonitor, mengontrol jaringan komputer dan komponen sistem. Manajemen jaringan mencoba menggunakan kekuatan komputer dan jaringan untuk mengatur dan mengelola sistem serta jaringan itu sendiri. Lebih lanjut, manajemen jaringan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

a) Manajemen Kesalahan (*Fault Management*)

Menyediakan fasilitas yang memungkinkan administrator jaringan untuk mengetahui kesalahan (*Fault*) pada perangkat yang dikelola, jaringan, dan operasi jaringan, agar dapat segera menentukan apa penyebabnya dan dapat segera mengambil tindakan (perbaikan).

b) Manajemen Konfigurasi (*Configuration Management*)

Memonitor informasi konfigurasi jaringan sehingga dampak dari perangkat keras maupun lunak tertentu dapat dikelola dengan baik.

c) Pelaporan (*Accounting*)

Mengukur utilisasi jaringan dari pengguna atau grup tertentu untuk membantu dalam menjaga performa jaringan pada level tertentu yang dapat diterima.

d) Manajemen Performa (*Performance Management*)

Mengukur berbagai aspek dari performa jaringan termasuk pengumpulan dan analisis dari data statistik sistem sehingga dapat dikelola dan dipertahankan pada level tertentu yang dapat diterima.

e) Manajemen Keamanan (*Security Management*)

Mengatur akses ke sumber daya jaringan sehingga informasi tidak dapat diperoleh tanpa izin.

Mengingat aktivitas pengelolaan Jaringan Intra adalah tanggung jawab SDM yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun maka **dibutuhkan SOP untuk standarisasi pelaksanaan seluruh aktivitas Jaringan Intra**. Berdasarkan kondisi eksisting untuk saat ini terkait penerapan SOP Jaringan belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan SOP yang dapat diterapkan pada penerapan Jaringan. Berikut merupakan rekomendasi pembuatan SOP Jaringan yang ditampilkan pada **Tabel 5.17**

Tabel 5.17 Usulan Kebutuhan SOP Jaringan

No	Usulan Kebutuhan SOP
1	SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan
2	SOP Penanganan Gangguan Jaringan
3	SOP Pemasangan Jaringan Baru
4	SOP Pemeliharaan Perangkat Jaringan
5	SOP Keamanan Kabel
6	SOP Maintenance Gangguan Jaringan
7	SOP Layanan Troubleshooting Gangguan Jaringan
8	SOP Pengeblokan Jaringan (Tissue Embedding)
9	SOP Manajemen dan Akses Jaringan
10	SOP Networking
11	SOP Instalasi Jaringan Internet, Intranet dan Wireless Access
12	SOP Pengelolaan Hak Akses
13	SOP ISP Mati

Sebagaimana termuat pada Tabel 5.17, terdapat 13 (tiga belas) usulan kebutuhan SOP. Terkait penjelasan detail dari SOP tersebut yang nantinya dapat diterapkan pada Ruang *Server* akan dijabarkan dibawah ini, yaitu:

a) SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan

Pada Penerapan Jaringan intra diperlukan untuk manajemen Pengelolaan dan Pemeliharaan jaringan untuk mengontrol seluruh aktivitas jaringan.

b) SOP Penanganan Gangguan Jaringan

SOP Penanganan Gangguan Jaringan untuk mengatasi permasalahan gangguan jaringan yang digunakan saat ini.

c) SOP Pemasangan Jaringan Baru

SOP Pemasangan Jaringan Baru digunakan sebagai prosedur yang diterapkan untuk pemasangan jaringan baru dan telah diizinkan.

d) SOP Pemeliharaan Perangkat Jaringan

Pemeliharaan Perangkat Jaringan diperlukan SOP untuk mengatur seluruh Pemeliharaan Perangkat Jaringan yang dimiliki saat ini dan memastikan perangkat jaringan telah sesuai dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

e) SOP Keamanan Kabel

Keamanan Kabel menjadi point penting dalam penerapan penggunaan jaringan dan penerapan jaringan intra, memastikan seluruh penggunaan kabel telah memenuhi keamanan penggunaannya.

f) SOP Maintenance Gangguan Jaringan

Seluruh kegiatan terkait dengan *Maintenance* Gangguan Jaringan harus diperhatikan dan terdokumentasi dalam pelaksanaannya.

g) SOP Layanan Troubleshooting Gangguan Jaringan

Prosedur yang digunakan untuk menangani *Troubleshooting* Gangguan Jaringan yang digunakan saat ini.

h) SOP Pengeblokan Jaringan (*Tissue Embedding*)

Jaringan yang digunakan perlu dilakukan pengeblokan Jaringan (*Tissue Embedding*) untuk memastikan jaringan yang digunakan harus sesuai dengan akses yang telah terdata dan yang tidak memiliki akses akan dilakukan pengeblokan.

i) SOP Manajemen dan Akses Jaringan

Diperlukan terkait Manajemen dan Akses Jaringan yang digunakan saat ini untuk memastikan seluruh akses jaringan yang digunakan telah terdata dan dikelola dengan baik.

j) SOP Networking

memberikan gambaran tentang beberapa prosedur dan teknik untuk membangun *Local Area Network* (LAN) atau jaringan komputer.

k) SOP Instalasi Jaringan Internet, Intranet dan Wireless Access

Mengawal dan mengawasi jalannya instalasi jaringan internet dan *wireless access point* di area Lingkup Pemerintah Kota Madiun.

l) SOP Pengelolaan Hak Akses

Pengelolaan Hak Akses digunakan untuk mengetahui seluruh *resource* dan tanggung jawab terkait akses jaringan.

m) SOP ISP Mati

SOP yang bertujuan untuk penanganan apabila terjadi ISP yang digunakan mengalami gangguan / mati.

5.3.3.2 Ruang Server

Berdasarkan dengan Kondisi Eksisting terkait Ruang *Server* yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun, saat ini **telah diterapkan Pemusatan Data Center** pada **Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun** yang ditunjukkan dengan adanya Pusat Data atau ruang *server* yang dimiliki saat ini dan terdapat beberapa PD yang telah meletakkan pada ruang *server* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang mana nantinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola dan merawat server yang dititipkan oleh PD serta **telah dilengkapi dengan adanya standar keamanan ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang diterapkan pada ruang server**. Pedoman untuk penggunaan dan penerapan pusat data secara umum adalah TIA 942 dan SNI Pusat data. Kedua standar tersebut dapat menjadi acuan dalam standarisasi Gedung pusat data dan penerapan aspek-aspek pusat data. Usulan terkait dengan ruang *server* terdiri dari usulan manajemen dan tata kelola ruang *server*, pengujian keamanan, usulan perangkat penyimpanan dan usulan perangkat *server backup*. Secara detail usulan pada ruang *server* akan dijelaskan pada **Tabel 5.18** dan penjelasan dibawah ini.

Tabel 5.18 Usulan Ruang *Server*

No	Usulan	Spesifikasi	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Penerapan Penetration Testing	Melakukan Penetration Testing untuk mengetahui permasalahan dan celah pada aplikasi yang digunakan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Setiap Tahun (2023-2027)
2	Pengadaan Perangkat Penyimpanan / Storage (NAS/SAN)	Melakukan Pengadaan Perangkat Keras Storage / Penyimpanan sebagai bentuk penerapan teknologi penyimpanan yang terbaru dan mempermudah akses melalui jaringan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2024-2025
3	<i>Update</i> Kebijakan SOP yang sudah ada	Melakukan <i>Update</i> Kebijakan SOP pada seluruh SOP yang telah ada saat ini terutama pada Ruang <i>Server</i> .	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023

1. Usulan Tata Kelola dan Manajemen Ruang *Server*

Usulan Point yang harus diperhatikan dalam aktivitas pengelolaan keamanan ruang *server* adalah tanggung jawab SDM yang ada di organisasi terutama pada lingkup ruang *server* , maka **dibutuhkan SOP untuk standarisasi pelaksanaan seluruh aktivitas ruang *server***. Berdasarkan kondisi eksisting, Penerapan Manajemen dan Tata Kelola ruang *server* yang dimiliki saat ini **telah diterapkan secara maksimal** yang ditunjukkan dengan adanya **41 (empat puluh satu) SOP** yang diterapkan pada ruang *server* Dinas Komunikasi dan

Informatika. Usulan yang dapat dilakukan dalam penerapan tata kelola dan manajemen ruang *server* yaitu dengan **mengevaluasi dan mengkaji ulang terkait penerapan SOP yang ada pada ruang *server* dan memastikan SOP yang tidak dijalankan untuk dapat diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang ada.** Adapun usulan yang dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yaitu dengan **melakukan *Update Kebijakan SOP* pada seluruh SOP yang sudah ada saat ini.**

2. Usulan Pengujian Keamanan

Pemerintah Kota Madiun dapat menerapkan pengujian Pentest untuk melakukan evaluasi dan analisa terhadap keamanan dari sebuah sistem dan jaringan komputer yang digunakan saat ini. Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan sebuah simulasi serangan terhadap sistem jaringan intra Pemerintah Kota Madiun untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem jaringan dan sebagai bentuk langkah preventif untuk menjaga aset-aset digital yang ada di Pemerintah Kota Madiun. Terdapat 3 (tiga) metode yang dapat digunakan dalam penerapan testing antara lain:

- a) *Black Box Testing* atau *Blind Disclosure*,** yaitu metode Pentest dimana diasumsikan Pentester tidak mengetahui sama sekali infrastruktur dari target pentest. Maka dari itu harus dilakukan percobaan untuk menggali dari awal semua informasi yang diperlukan kemudian melakukan analisis serta menentukan jenis *attack* yang akan dilakukan.
- b) *White Box Testing* atau *Full Disclosure*,** yaitu kebalikan dari black box testing, dikarenakan tester telah mengetahui semua informasi yang diperlukan untuk melakukan pentest.
- c) *Grey Box Testing* atau *Partial Disclosure*,** yaitu kombinasi dari kondisi black box dan white box testing.

Berdasarkan dengan objeknya, Pentest dapat dibagi menjadi 6 (enam) jenis yang mana setiap objek membutuhkan perlakuan yang berbeda di setiap objek yang akan dilakukan pengujian antara lain:

- a) **Network Service Pentest**, objek yang diuji adalah infrastruktur jaringan. Tujuannya untuk mengidentifikasi kelemahan pada objek-objek *network service* seperti *server*, *firewall*, *switch*, *router*, *printer*, *workstation*, dan lain-lain.
- b) **Web Application Pentest**, digunakan untuk menemukan kerentanan dan kelemahan keamanan pada aplikasi berbasis *web* dengan menggunakan beberapa teknik dan serangan, yang tujuannya untuk menembus keamanan suatu *web application*. Beberapa elemen yang dipindai dalam upaya *pentest* jenis ini, seperti *web based application*, *browser* dan komponen-komponen lainnya seperti *ActiveX*, *Plugins*, *Silverlight*, *Scriptlets*, dan *Applets*.
- c) **Client Side Pentest**, digunakan untuk menemukan kelemahan keamanan pada *client side application*. Beberapa program atau aplikasi yang termasuk *client side application*, seperti *Putty*, *email clients*, *web browsers*, *Macromedia Flash*, dan lain-lain. Program-program lain seperti *Adobe Photoshop* dan *Microsoft Office Suite* juga menjadi subyek testing dari *client side application*.
- d) **Wireless Pentest**, melibatkan identifikasi dan inspeksi koneksi yang menghubungkan *device-device* dalam satu *Wifi* pada Jaringan intra pemerintah. Beberapa *device* yang menjadi objek *pentest* jenis ini seperti, *desktop*, *laptop*, *tablet*, *smartphones*, dan *Internet of Things (IoT)*.
- e) **Social Engineering Pentest**, upaya untuk membujuk atau menebar trik kepada *user* untuk memberikan informasi sensitif. Beberapa data yang kerap menjadi sasaran upaya ini seperti *username* dan *password*. Serangan *cyber social engineering* yang biasa dilakukan oleh *Pentest* seperti *Phising*, *Tailgating*, *Imposter*, *Name Dropping*, *Pretexting*, *Dumpster Diving*, *Eavesdropping*, dan *Gifts*.
- f) **Physical Pentest**, merupakan upaya dari *Pentester* untuk menembus hambatan fisik dari infrastruktur, bangunan, sistem, bahkan karyawan dari sebuah perusahaan.

Pentest memiliki standar yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaannya, yang dibagi ke dalam beberapa tahap antara lain:

a) ***Pre-engagement Interactions* atau *Planning*.**

Pada tahapan ini membahas mengenai ruang lingkup Pentest, rentang waktu, dokumen legal (kontrak), jumlah tim yang dibutuhkan. Termasuk apakah karyawan diberitahukan terlebih dahulu atau tidak tentang adanya pentest.

b) ***Information Gathering*.**

Pada tahapan ini mengumpulkan semua informasi tentang sistem target yang selanjutnya dilakukan *network survey* untuk mengumpulkan informasi *domain*, *server*, layanan yang ada, *IP address*, *host*, adanya *firewall*, dan sebagainya. *Tools* yang dapat digunakan misalnya Nmap.

c) ***Vulnerability Assessment*.**

Setelah mengetahui informasi tentang sistem, pencarian celah keamanan bisa dilakukan secara manual atau otomatis, misalnya dengan *Nessus*.

d) ***Exploitation* atau *Penetration Attempt*.**

Pada proses ini dilakukan penentuan target, pemilihan *tools* dan *exploit* yang tepat. Umumnya diperlukan kemampuan *password cracking*. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *social engineering* dan pengujian *physical security* dari sistem

e) ***Reporting*.**

Pada tahapan pembuatan laporan ini biasanya dilaporkan tentang langkah kerja yang dilakukan, celah keamanan yang ditemukan serta usulan perbaikan.

Salah satu aspek penting dalam melakukan *Pentest* adalah menentukan ruang lingkup dimana Pentester harus melakukan pengujian keamanannya. Ruang lingkup yang dimaksud dapat mendefinisikan sistem, lokasi, teknik, dan *tools* apa yang dapat digunakan dalam melakukan *Pentest*. Melakukan pembatasan ruang lingkup Pentest untuk membantu pemfokusan anggota tim IT dalam melakukan tugas *Pentest*. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dengan melakukan

Pentest secara teratur **setiap tahun sekali** untuk memastikan keamanan jaringan, Aplikasi dan manajemen Teknologi Informasi yang lebih konsisten dan terarah. Pengajuan Pentest dengan menyertakan Daftar aplikasi yang akan dilakukan pentest, nantinya akan dikirimkan pada Diskominfo Provinsi.

3. Usulan Perangkat Penyimpanan / Storage (NAS/SAN)

Rekomendasi penggunaan *Storage Area Network* (SAN) sebagai solusi konfigurasi masa depan dalam media penyimpanan data dalam jumlah besar (*Tera Byte*) dalam berbagai servis yang berbasis *online* di Internet maupun Intranet yang dapat diterapkan pada Pemerintah Kota Madiun. *Storage Area Network* (SAN) adalah sebuah jaringan berkecepatan sangat tinggi yang khusus, terdiri dari *server* dan penyimpanan (*storage*). Tujuan utama SAN adalah untuk menangani trafik data dalam jumlah besar antara *server* dan peralatan penyimpanan, tanpa mengurangi *bandwidth* yang ada di LAN/WAN. Media penyimpanan SAN tersambung melalui *Fiber Channel*, sebuah teknologi komunikasi data berkecepatan sangat tinggi yang nantinya menjadikan SAN sebuah jaringan *dedicated* yang *platform-independent* yang beroperasi di belakang *server*.

SAN terdiri dari infrastruktur komunikasi, yang memberikan sambungan fisik, dan lapisan *management*, yang mengatur sambungan, elemen penyimpanan, dan sistem komputer sehingga menghasilkan *transfer* data yang sangat aman dan handal.



Gambar 5.3 Rekomendasi SAN IBM FlashSystem 5030 SFF

SAN merupakan sebuah sistem dimana 2 atau lebih *server* bisa mengakses sebuah *storage* (bisa juga lebih dari 1), komponen 2 SAN itu terdiri dari:

- a) *Server* :Melakukan semua operasi ke *client* dan ke *storage*
- b) *SAN Switch* :Menghubungkan *storage* ke *server* dan mengatur pembagian akses

c) *Storage* :Sebuah media dimana data disimpan.

Perlu diingat kalau yang digunakan SAN maka protokol yang digunakan adalah block jadi tidak sembarangan *client* yang bisa mengakses, biasanya hanya *server* saja yang bisa mengakses data di SAN.

Adapun Keuntungan dari penggunaan SAN sebagai media penyimpanan berdasarkan aspek yang ada antara lain:

a) *Availability*

satu *copy* dari data jadi dapat diakses oleh semua *host* melalui jalur yang berbeda dan semua data lebih efisien di *manage*-nya.

b) *Reliability*

infrastruktur transport data yang dapat menjamin tingkat kesalahan yang sangat minimal, dan kemampuan dalam mengatasi kegagalan.

c) *Scalability*

server maupun *storage* dapat ditambahkan secara independent satu dan lainnya, dengan tanpa pembatas harus menggunakan sistem yang *proprietary*.

d) *Performance*

Fibre Channel (standar *enabling* teknologi untuk interkonektivitas SAN) mempunyai *bandwidth* 100 MBps *bandwidth* dengan *overhead* yang rendah, dan SAN akan memisahkan *trafik backup* dengan trafik standar LAN/WAN.

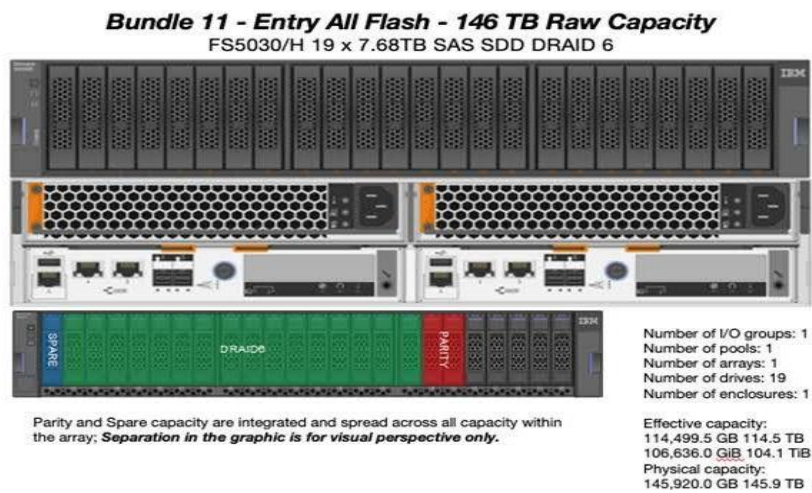
e) *Manageability*

Berkembangnya perangkat lunak dan standar baik untuk *Fibre Channel Arbitrated Loop* (FC-AL) maupun *Fibre Channel Fabric* memungkinkan manajemen dilakukan secara terpusat dan koreksi dan deteksi kesalahan yang proaktif.

f) *Return On Information Management*

Karena bertambahnya tingkat redundansi dan kemampuan manajemen yang baik, maupun kemampuan untuk di tambahkan *server* dan *storage* secara independen. SAN pada akhirnya kemungkinan biaya kepemilikan yang rendah pada saat yang sama menaikkan *Return On Information Management* (ROIM) dibandingkan metoda penyimpanan tradisional.

Rekomendasi Penggunaan SAN yaitu dengan tipe **IBM FlashSystem 5030 SFF** ataupun dengan merk dan spesifikasi serupa yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penggunaan SAN pada Pemerintah Kota Madiun, detail gambar perangkat SAN dengan tipe **IBM FlashSystem 5030 SFF** akan ditampilkan pada **Gambar 5.3 dan Gambar 5.4**



Gambar 5.4 Detail IBM FlashSystem 5030 SFF

Model penutup kontrol *Flash System 5030* menawarkan tingkat kinerja, skalabilitas, dan fungsionalitas tertinggi antara lain:

- a) *Dual processor 6-core dan cache hingga 64 GB*
- b) Dukungan untuk 504 *drive* persistem dengan pemasangan delapan penutup ekspansi *Flash System 5000 High Density LFF* dan 1.008 *drive* dengan konfigurasi *cluster* dua arah
- c) Kumpulan reduksi data dengan deduplikasi, kompresi, dan penyediaan tipis untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan
- d) Enkripsi data saat istirahat yang disimpan dalam sistem *Flash System 5030*

IBM *FlashSystem 5030 SFF* yang sebelumnya *Storwize V5030E*, dilengkapi *prosesor* enam inti dengan total *cache* hingga 64 GB dan lampiran hingga dua puluh penutup ekspansi 2U atau hingga delapan penutup ekspansi 5U, memberikan dukungan hingga 504 *drive*. *FlashSystem 5030* mendukung pengelompokan sistem termasuk *HyperSwap*, kumpulan reduksi data dengan deduplikasi dan kompresi, dan enkripsi data saat istirahat. Serta membutuhkan 64 GB *cache sistem*.

Penawaran *FlashSystem 5030* terdiri dari model enklosur kontrol dan model enklosur ekspansi baru yaitu:

- a) Dua tabung simpul, masing-masing dengan *prosesor* enam inti.
- b) *Cache* 32 GB (16 GB per tabung) dengan *cache* 64 GB opsional (32 GB per tabung).
- c) Standar konektivitas 10 GbiSCSI (tembaga) dengan opsional 16 Gb FC, 12 Gb SAS, 10 GbiSCSI (optik), 25 GbiSCSI (optik) konektivitas.
- d) Port SAS 12 Gb untuk *attachment enclosure* ekspansi.
- e) Dua belas slot untuk *drive LFF SAS* 3,5 inci (Model 3H2) dan 24 slot untuk *drive SFF SAS* 2,5 inci (Model 3H4).
- f) 2U, penutup rak 19 inci dengan catu daya 100 - 240 V AC atau -48 V DC.

Enkripsi untuk keamanan data yang ditingkatkan dengan *FlashSystem 5030* mendukung enkripsi untuk data saat istirahat. Enkripsi dilakukan oleh enklosur kontrol *FlashSystem 5030* untuk data yang disimpan dalam seluruh sistem *FlashSystem 5030*, enclosure kontrol *FlashSystem 5030*, dan semua enklosur ekspansi *FlashSystem 5000* yang terpasang. Enkripsi diaktifkan pada *FlashSystem 5030* melalui akuisisi fitur *Encryption Enablement*. Fitur ini memungkinkan enkripsi pada seluruh sistem *FlashSystem 5030*. Fitur Enkripsi USB *Flash Drives (Four Pack)* atau *IBM Security Key Manager (SKLM)* diperlukan untuk manajemen kunci enkripsi.

5.3.3.3 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Usulan terkait perangkat keras mempertimbangkan beberapa aspek seperti jumlah dari SDM yang ada dan usulan SDM yang baru, selain itu untuk mengusulkan perangkat baru ini dikategorikan berdasarkan usia dari perangkat yang lebih dari 5 (lima) tahun akan tetapi perlu dicek kembali ke masing-masing PD tentang kondisi pada perangkat keras yang dimiliki. Apabila terdapat kerusakan, dapat untuk dilakukan pengusulan pergantian perangkat yang baru. Sedangkan untuk Perangkat Lunak diusulkan sebagai acuan dalam penggunaan perangkat lunak yang dapat mendukung pengoperasian layanan yang terpasang pada perangkat keras.

Usulan terkait dengan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak terbagi menjadi 5 usulan perangkat yaitu Perangkat Keras Utama, Perangkat Keras Periferal, Perangkat Jaringan dan Perangkat Lunak *Platform*. Berikut merupakan penjabaran secara detail terkait Usulan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak akan dijelaskan pada substansi dibawah ini.

1. Usulan Perangkat Utama

Usulan Perangkat Keras Utama bertujuan untuk menunjang pelaksanaan layanan yang ada di masing-masing PD, dan usulan terkait perangkat keras utama terdiri dari 3 perangkat yaitu Perangkat Komputer (PC), Perangkat Laptop, dan Perangkat *Printer*. Detail terkait dengan usulan perangkat Keras Utama akan dijelaskan dibawah ini.

a) Usulan Perangkat PC

Berdasarkan kondisi eksisting pada perangkat keras PC pada seluruh PD yang ada di Pemerintah Kota Madiun maka diusulkan untuk melakukan peremajaan perangkat PC sebesar **678 (enam ratus tujuh puluh delapan) Unit** untuk mendukung operasional kantor yang memenuhi kategori yaitu dengan umur yang lebih dari 5 (lima) tahun. Detail usulan perangkat keras PC dapat dilihat pada **Tabel 5.19**

Tabel 5.19 Usulan Perangkat Keras PC

Kode OPD	Nama PD	Usulan PC					Jumlah PC
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Organisasi	1	1	1	0	2	5
2	Bagian Hukum	2	0	2	0	1	5
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	2	2	2	2	2	10
4	Bagian Perekonomian dan	2	1	1	0	1	5

Kode OPD	Nama PD	Usulan PC					Jumlah PC
		2023	2024	2025	2026	2027	
	Kesejahteraan Rakyat						
5	Bagian Umum	8	8	8	7	7	38
6	Bagian Pemerintahan	2	1	1	2	2	8
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	2	1	2	2	8
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	2	3	2	3	14
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7	6	5	5	5	28
10	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2	2	2	10
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	4	2	4	3	15
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	3	2	3	2	12
13	Inspektorat Daerah	4	8	7	6	6	31
14	Sekretariat DPRD	3	2	2	3	2	12
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan	6	8	7	8	7	36

Kode OPD	Nama PD	Usulan PC					Jumlah PC
		2023	2024	2025	2026	2027	
	Keluarga Berencana						
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	8	8	6	8	36
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3	3	3	3	3	15
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	5	4	5	3	20
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1	4	3	3	4	15
20	Dinas Pendidikan	4	5	7	5	6	27
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2	2	2	2	4	12
22	Dinas Lingkungan Hidup	3	4	5	4	4	20
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	5	5	25
24	Dinas Perhubungan	6	9	10	9	11	45
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	8	9	8	9	40

Kode OPD	Nama PD	Usulan PC					Jumlah PC
		2023	2024	2025	2026	2027	
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	2	3	4	4	15
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	2	2	1	3	2	10
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	3	2	2	2	12
29	Dinas Perdagangan	3	3	3	3	3	15
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	3	2	3	1	10
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	10	8	8	10	12	48
32	Kecamatan Manguharjo	2	2	1	1	1	7
33	Kecamatan Kartoharjo	2	3	3	3	4	15
34	Puskesmas Mangunharjo	7	7	7	7	6	34
35	Puskesmas Sukosari	1	5	4	5	5	20
Total Usulan PC		120	141	136	137	144	678

Berdasarkan Tabel 5.19 didapatkan bahwa dari 35 (tiga puluh lima) PD **diperlukan melakukan pengadaan Perangkat Komputer (PC)**. Beberapa PD lain memiliki kebutuhan perangkat PC yang beragam. Total kebutuhan perangkat keras

dari 35 (tiga puluh lima) PD yaitu **678 (enam ratus tujuh puluh delapan) Unit** selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangan jumlah perangkat banyak yang berusia lebih dari 5 (lima) tahun. Pengajuan pengusulan perangkat keras Komputer (PC) diharapkan dapat dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan keputusan PD masing-masing.

b) Usulan Perangkat Laptop

Berdasarkan kondisi eksisting pada perangkat keras Laptop pada seluruh PD yang ada di Pemerintah Kota Madiun maka diusulkan untuk melakukan peremajaan perangkat Laptop sebesar **527 (lima ratus dua puluh tujuh) Unit** untuk mendukung operasional kantor yang memenuhi kategori yaitu dengan umur yang lebih dari 5 (lima) tahun. Detail usulan perangkat keras Laptop dapat dilihat pada **Tabel 5.20**

Tabel 5.20 Usulan Perangkat Keras Laptop

Kode OPD	Nama PD	Usulan Laptop					Jumlah Laptop
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Organisasi	2	1	1	1	1	6
2	Bagian Hukum	2	2	2	2	1	9
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	2	3	2	3	2	12
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	3	3	3	2	2	13
5	Bagian Umum	7	7	7	7	6	34
6	Bagian Pemerintahan	1	1	1	2	3	8
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	1	1	1	5

Kode OPD	Nama PD	Usulan Laptop					Jumlah Laptop
		2023	2024	2025	2026	2027	
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	3	3	2	2	13
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4	4	4	4	4	20
10	Badan Pendapatan Daerah	3	1	1	1	1	7
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	2	2	2	10
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	0	2	2	1	6
13	Inspektorat Daerah	11	11	11	11	11	55
14	Sekretariat DPRD	3	2	2	2	2	11
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	4	4	4	4	24
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	4	2	4	4	16
17	Dinas Perumahan Rakyat dan	1	2	2	2	2	9

Kode OPD	Nama PD	Usulan Laptop					Jumlah Laptop
		2023	2024	2025	2026	2027	
	Kawasan Permukiman						
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	8	8	8	8	40
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	3	2	2	1	1	9
20	Dinas Pendidikan	3	3	3	3	3	15
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2	2	1	1	1	7
22	Dinas Lingkungan Hidup	6	6	6	6	6	30
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	2	2	2	10
24	Dinas Perhubungan	2	3	3	4	6	18
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	6	8	5	5	30
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	3	2	2	1	10
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,	2	1	3	2	2	10

Kode OPD	Nama PD	Usulan Laptop					Jumlah Laptop
		2023	2024	2025	2026	2027	
	Kepemudaan dan Olah Raga						
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	2	3	3	5	15
29	Dinas Perdagangan	0	2	2	6	8	18
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	2	2	2	3	10
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	1	2	2	1	2	8
32	Kecamatan Manguharjo	2	2	2	2	2	10
33	Kecamatan Kartoharjo	3	3	3	0	0	9
34	Puskesmas Mangunharjo	2	2	0	1	1	6
35	Puskesmas Sukosari	2	3	2	4	3	14
Total Usulan Laptop		105	105	104	105	108	527

Berdasarkan Tabel 5.20 didapatkan bahwa dari 35 (tiga puluh lima) PD **diperlukan melakukan pengadaan Perangkat Laptop**. Beberapa PD lain memiliki kebutuhan perangkat laptop yang beragam. Total kebutuhan perangkat keras dari 35 (tiga puluh lima) PD yaitu **527** (lima ratus dua puluh tujuh) **Unit** selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangan jumlah perangkat banyak yang berusia lebih dari 5 (lima) tahun. Pengajuan pengusulan perangkat keras Laptop diharapkan dapat dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan keputusan PD masing-masing.

c) Usulan Perangkat Printer

Berdasarkan kondisi eksisting pada perangkat keras Printer pada seluruh PD yang ada di Pemerintah Kota Madiun maka diusulkan untuk melakukan peremajaan perangkat Printer sebesar **564 (lima ratus enam puluh empat) Unit** untuk mendukung operasional kantor yang memenuhi kategori yaitu dengan umur yang lebih dari 5 (lima) tahun. Detail usulan perangkat keras Printer dapat dilihat pada **Tabel 5.21**.

Tabel 5.21 Usulan Perangkat Keras Printer

Kode OPD	Nama PD	Usulan Printer					Jumlah Printer
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Organisasi	2	2	1	0	1	6
2	Bagian Hukum	2	2	0	1	1	6
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	1	2	2	2	2	9
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2	2	2	0	0	6
5	Bagian Umum	8	5	4	7	6	30
6	Bagian Pemerintahan	3	2	2	0	0	7
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	1	2	1	6
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	4	4	4	4	21
9	Badan Keuangan dan	8	7	7	7	7	36

Kode OPD	Nama PD	Usulan Printer					Jumlah Printer
		2023	2024	2025	2026	2027	
	Aset Daerah						
10	Badan Pendapatan Daerah	3	2	3	2	4	14
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	3	4	4	5	20
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	3	2	2	1	10
13	Inspektorat Daerah	6	6	8	6	8	34
14	Sekretariat DPRD	8	5	5	5	5	28
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	6	6	6	6	34
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	8	8	8	8	40
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	2	2	1	0	6
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	5	5	5	5	25

Kode OPD	Nama PD	Usulan Printer					Jumlah Printer
		2023	2024	2025	2026	2027	
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	3	4	3	4	6	20
20	Dinas Pendidikan	2	1	3	2	2	10
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2	3	2	2	3	12
22	Dinas Lingkungan Hidup	4	4	2	2	2	14
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	3	3	3	1	13
24	Dinas Perhubungan	6	8	8	5	5	32
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	6	6	6	6	30
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	3	2	2	2	12
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	2	0	3	3	2	10
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	2	2	2	2	10

Kode OPD	Nama PD	Usulan Printer					Jumlah Printer
		2023	2024	2025	2026	2027	
29	Dinas Perdagangan	4	1	1	3	2	11
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	0	2	0	1	4
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	2	2	2	2	2	10
32	Kecamatan Manguharjo	2	1	1	0	1	5
33	Kecamatan Kartoharjo	3	2	3	2	2	12
34	Puskesmas Mangunharjo	3	2	3	2	3	13
35	Puskesmas Sukosari	2	1	2	1	2	8
Total Usulan Printer		129	110	114	103	108	564

Berdasarkan Tabel 5.21 didapatkan bahwa dari 35 (tiga puluh lima) PD **diperlukan melakukan pengadaan Perangkat Printer**. Beberapa PD lain memiliki kebutuhan perangkat Printer Yang beragam. Total kebutuhan perangkat keras dari 35 (tiga puluh lima) PD yaitu **564 Unit** selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangan jumlah perangkat banyak yang berusia lebih dari 5 (lima) tahun. Pengajuan pengusulan perangkat keras Printer diharapkan dapat dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan keputusan PD masing-masing.

d) Usulan Perangkat Periferal

Perangkat keras periferal yang akan diusulkan didasarkan pada hasil analisis terhadap pemenuhan kebutuhan yang berguna sebagai penunjang penyediaan operasional pada masing-masing PD yang ada di Pemerintah Kota Madiun. Perangkat pendukung yang diusulkan terkait tambahan perangkat periferal terdiri dari yaitu, LED TV, *Proyektor*, dan *Scanner*. Berikut merupakan usulan mengenai perangkat keras periferal yang selanjutnya ditampilkan pada **Tabel 5.22**.

Tabel 5.22 Usulan Perangkat Periferal

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras		
		Nama Perangkat	Detail	Tahun
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Smart TV di atas 60 InCh atau Videotron	Ultra Narrow Bezel Seamless Video Wall Smart Advertising Display	2024 - 2027
10	Badan Pendapatan Daerah	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras		
		Nama Perangkat	Detail	Tahun
13	Inspektorat Daerah	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Scanner	Media Pemindai Gambar	2023
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LED video wall TV Monitor 80 inci	untuk presentasi di ruang rapat	2023
20	Dinas Pendidikan	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras		
		Nama Perangkat	Detail	Tahun
24	Dinas Perhubungan	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2024
33	Kecamatan Kartoharjo	LCD + Proyektor, sound system	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2024

Kode OPD	Nama OPD	Perangkat Keras		
		Nama Perangkat	Detail	Tahun
34	Puskesmas Mangunharjo	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2024

e) Usulan Perangkat Jaringan

Perangkat keras jaringan yang akan diusulkan berdasarkan dengan hasil analisis terhadap usia pakai perangkat tersebut dan kebutuhan perangkat yang digunakan, terdapat kategori yang bisa dilakukan pembaruan perangkat keras jaringan seperti umur sudah lebih dari 5 (lima) tahun. Perangkat Jaringan Intra yang digunakan di seluruh PD yang ada pada Pemerintah Kota Madiun yaitu disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dikarenakan pengadaan Internet telah terpusat maka dari itu diperlukan usulan terkait tambahan perangkat Jaringan untuk mendukung distribusi Jaringan. Berikut akan dipaparkan terkait usulan mengenai perangkat keras jaringan, yaitu:

i. Usulan Perangkat Modern

Tidak semua perangkat daerah perlu melakukan pengadaan perangkat jaringan dalam rangka peremajaan perangkat. Hal ini tentunya melihat dari kondisi eksisting yang ada dari Untuk usulan perangkat modem oleh PD di Pemerintah Kota Madiun sebagaimana termuat pada **Tabel 5.23** diusulkan untuk **8 (delapan)** PD yang terdiri dari Bagian Organisasi, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Kartoharjo, dan Puskesmas Sukosari.

Tabel 5.23 Usulan Perangkat Modem

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Modem					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Organisasi	1	0	0	0	0	1
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	0	0	1	0	2
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	1	0	0	1
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	0	0	0	0	1
22	Dinas Lingkungan Hidup	1	0	0	0	0	1
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	0	0	0	2
33	Kecamatan Kartoharjo	5	0	0	0	0	5
35	Puskesmas Sukosari	1	0	0	0	0	1
Total Usulan		11	1	1	1	0	14

ii. Usulan Perangkat HUB/ Switch

Usulan selanjutnya adalah *HUB/switch*. HUB memiliki fungsi sebagai titik koneksi umum untuk perangkat di jaringan. Sedangkan jaringan *switch* adalah perangkat

jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat bersama pada satu jaringan komputer. Setiap perangkat daerah diusulkan melakukan peremajaan perangkat setidaknya 1 (satu) perangkat. Peremajaan perangkat terbanyak perlu dilakukan oleh **RSUD Kota Madiun** dengan jumlah perangkat *HUB/switch* sebanyak 11 (sebelas) unit. Detail usulan dapat dilihat pada **Tabel 5.24**.

Tabel 5.24 Usulan Perangkat *HUB/Switch*

Kode OPD	Nama OPD	Usulan HUB/Switch					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Organisasi	2	0	1	0	0	3
2	Bagian Hukum	1	0	0	0	0	1
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	0	1	0	0	0	1
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1	0	0	0	0	1
5	Bagian Umum	1	0	0	0	0	1
6	Bagian Pemerintahan	1	0	0	0	0	1
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	0	0	1
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	1	0	0	0	1
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	0	0	0	0	1
10	Badan Pendapatan Daerah	1	0	0	0	0	1

Kode OPD	Nama OPD	Usulan HUB/Switch					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	0	0	0	0	1
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	0	0	0	0	1
13	Inspektorat Daerah	1	0	0	0	0	1
14	Sekretariat DPRD	1	0	0	0	0	1
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	2	0	2	0	5
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	0	0	0	0	1
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0	0	1	0	1
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0	0	0	0	1
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1	0	0	0	0	1
20	Dinas Pendidikan	0	1	0	0	0	1
21	Dinas Ketahanan Pangan dan	0	0	1	0	0	1

Kode OPD	Nama OPD	Usulan HUB/Switch					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
	Pertanian						
22	Dinas Lingkungan Hidup	1	0	0	0	0	1
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	0	2	0	2	5
24	Dinas Perhubungan	1	0	0	0	0	1
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	1	1	5
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	0	0	0	0	1
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	1	0	0	0	0	1
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	0	0	0	0	1
29	Dinas Perdagangan	1	0	0	0	0	1
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	1	0	0	0	1
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	0	6	0	3	2	11

Kode OPD	Nama OPD	Usulan HUB/Switch					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
32	Kecamatan Manguharjo	1	1	0	0	0	2
33	Kecamatan Kartoharjo	1	1	0	0	0	2
34	Puskesmas Mangunharjo	0	0	1	0	0	1
35	Puskesmas Sukosari	1	0	0	1	0	2
Total Usulan		27	16	6	8	5	62

iii. Usulan Perangkat Router

Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau Internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai perutean atau penghalaan. Usulan *gateway router* perlu dilakukan oleh **31 (tiga puluh satu) perangkat daerah** dimana usulan peremajaan perangkat terbanyak perlu dilakukan oleh **Kecamatan Kartoharjo** dengan jumlah perangkat sebanyak **5 (lima)** unit. Secara detail dapat dilihat pada **Tabel 5.25**

Tabel 5.25 Usulan Perangkat *Gateway-Router*

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Router					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Organisasi	1	0	0	0	0	1
5	Bagian Umum	1	0	0	0	0	1
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	1	0	0	1
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	1	0	0	1	2

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Router					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	0	1	0	0	2
10	Badan Pendapatan Daerah	0	1	0	0	0	1
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	1	0	0	1	2
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	0	0	0	1	2
13	Inspektorat Daerah	1	0	1	0	0	2
14	Sekretariat DPRD	1	0	0	1	0	2
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	1	1	2	1	5
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	1	0	1	0	2
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	0	0	1	0	2
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	1	0	0	0	1	2

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Router					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
	Perlindungan Anak						
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1	0	0	1	0	2
20	Dinas Pendidikan	1	0	0	0	1	2
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	0	0	0	1	2
22	Dinas Lingkungan Hidup	1	0	0	0	0	1
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	0	0	0	0	1
24	Dinas Perhubungan	0	0	0	1	0	1
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	0	0	0	1
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	0	0	0	0	1
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	0	1	0	0	0	1
28	Dinas Perpustakaan	1	0	0	0	0	1

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Router					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
	dan Kearsipan						
29	Dinas Perdagangan	1	0	0	0	0	1
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	0	0	0	0	1
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	0	1	0	2	1	4
32	Kecamatan Manguharjo	1	0	0	0	0	1
33	Kecamatan Kartoharjo	1	1	1	1	1	5
34	Puskesmas Mangunharjo	1	0	0	0	0	1
35	Puskesmas Sukosari	1	0	0	0	0	1
Total Usulan		21	9	5	10	9	54

iv. Usulan Perangkat Access Point

Access Point adalah suatu peranti yang memungkinkan peranti *nirkabel* untuk terhubung ke dalam jaringan dengan menggunakan *Wifi*, *Bluetooth*, atau standar lain. Seluruh perangkat daerah direkomendasikan untuk melakukan peremajaan *access point* karena setiap perangkat yang dimiliki rata-rata sudah berusia diatas 5 (lima) tahun. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perangkat daerah yang direkomendasikan perangkat dengan jumlah terbanyak yaitu **10 (sepuluh)** Unit *access point*.

Tabel 5.26 Usulan Access Point

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Access Point					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Organisasi	1	0	0	0	0	1
2	Bagian Hukum	1	0	0	0	0	1

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Access Point					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	0	0	1	0	0	1
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1	0	0	0	0	1
5	Bagian Umum	1	0	0	0	0	1
6	Bagian Pemerintahan	1	0	0	0	0	1
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	0	0	1
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	1	1	2	2	7
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	1	1	0	0	3
10	Badan Pendapatan Daerah	1	1		1	0	3
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	1	0	1	0	2
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	0	0	1	3

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Access Point					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
13	Inspektorat	2	0	1	0	1	4
14	Sekretariat DPRD	1	0	1	0	0	2
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	0	2	0	2	6
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	0	1	0	0	3
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	0	1	0	0	3
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0	1	0	1	3
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1	1	0	0	0	2
20	Dinas Pendidikan	1	0	1	0	0	2
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	0	1	0	0	2
22	Dinas Lingkungan Hidup	1	0	1	0	0	2
23	Dinas Kependudukan	2	0	2	0	1	5

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Access Point					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
	dan Pencatatan Sipil						
24	Dinas Perhubungan	1	0	1	0	1	3
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	2	2	2	2	10
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	0	1	0	1	4
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	0	1	0	0	1	2
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	0	1	0	1	3
29	Dinas Perdagangan	1	0	1	0	0	2
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	0	0	1	0	2
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	2	1	1	1	1	6
32	Kecamatan Manguharjo	1	0	0	1	0	2
33	Kecamatan Kartoharjo	1	0	0	1	0	2
34	Puskesmas Mangunharjo	1	1	0	1	0	3

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Access Point					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
35	Puskesmas Sukosari	2	0	0	1	0	3
Total Usulan		40	12	22	12	15	101

v. Usulan Perangkat Repeater Wifi

Kecamatan Kartoharjo merupakan satu satunya OPD yang diusulkan untuk melakukan peremajaan perangkat *repeater wifi* karena berdasarkan kondisi eksisting perangkat yang dimiliki sudah berusia diatas 5 tahun.

Tabel 5.27 Usulan Repeater Wifi

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Repeater Wifi					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
33	Kecamatan Kartoharjo	1	0	0	0	0	1

f) Usulan Perangkat Lunak Platform

Berdasarkan dengan hasil Analisa dari data eksisting yang didapatkan melalui proses survei pada Pemerintah Kota Madiun, terdapat beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam bentuk *free Trial* dan masih belum berlisensi pada perangkat yang ada di setiap PD dan terdapat beberapa perangkat lunak yang terpasang serta digunakan bersifat *crack*. Penggunaan perangkat *trial* juga tidak boleh dilakukan proses *crack* yang merupakan bentuk kegiatan ilegal dan perangkat lunak dengan lisensi *trial* akan bergantung pada masa *trial* yang normalnya relatif pendek. Jika sudah berakhir masa *trial* maka perangkat tersebut tidak dapat digunakan atau fitur yang tersedia akan dibatasi penggunaannya. Berikut merupakan usulan terkait dengan Perangkat Lunak *Platform* berdasarkan dengan prioritas penggunaan yang ditampilkan pada **Tabel 5.28**

Tabel 5.28 Usulan Perangkat Lunak Platform

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ Database)	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
Windows Server	Sistem Operasi berbasis windows yang pemanfaatannya mendukung enterprise-level management, data storage, applications, and communications.	Sistem Operasi	Windows Server	Trialware, SaaS atau volume licensing	Tahunan
Net Framework	Sebuah perangkat lunak kerangka kerja yang berjalan terutama pada sistem operasi Microsoft Windows	Sistem Utilitas	Framework Class Library	Licensing	Free
XAMPP	Perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program untuk mengkonfigurasi pengaturan database pada phpmyadmin.	Sistem Database	Database Management	Open Source	Free
Android Studio	<i>Integrated Development Environment</i> untuk sistem operasi <i>Android</i> , yang dibangun di atas perangkat lunak <i>JetBrains IntelliJ IDEA</i> dan didesain khusus untuk pengembangan <i>Android</i> .	Sistem Utilitas	Pemrograman	Open Source	Free

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ Database)	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
Maria DB	relational database management system (DBMS) <i>opensource</i> yang merupakan pengganti drop-in yang kompatibel.	<i>Sistem Database</i>	<i>Database Management</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
<i>Adobe Premiere Pro</i>	sebuah program penyunting video berbasis non-linier dari Adobe Systems.	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Perangkat Lunak Design</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
<i>Lightwork</i>	<i>Software editor</i> untuk mengedit Video berbasis <i>open source</i> yang memiliki fitur lengkap untuk mendukung proses editing video grafis	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Perangkat Lunak Design</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
Blender	Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak 3D, aplikasi 3D interaktif dan permainan video	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Perangkat Lunak Design</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
Adobe Photoshop	Perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Perangkat Lunak Design</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
GIMP	Perangkat lunak editor citra yang dikhususkan untuk proses editing foto atau gambar dan pembuatan efek berbasis open source	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Perangkat Lunak Design</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free Trial</i>

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ Database)	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
WHM dan CPANEL	Perangkat lunak berbayar untuk mengelola domain dan hosting	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Hosting management</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Tahunan</i>
Microsoft Office	Perangkat lunak paket aplikasi perkantoran	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Aplikasi Perkantoran</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
Visual Studio Code	Perangkat lunak penyunting source code, menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, mere faktor kode, dan Git	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Pemrograman</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
Winbox	Perangkat lunak untuk mengatur jaringan internal	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Networking</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
Foxit Reader	Aplikasi pembaca, pencari, dan pencetak dokumen PDF multilingual. Perangkat lunak ini memungkinkan penggunaanya untuk mendesain form PDF yang interaktif, memasukkan gambar, menambah jaringan, menambahkan keterangan pada PDF, mengirim PDF, dan lain sebagainya	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Aplikasi Perkantoran</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
Corel Draw	Perangkat lunak untuk editor grafis vektor	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Perangkat Lunak Design</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ Database)	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
SPSS	Singkatan dari Statistical Package for the Social Sciences, merupakan program komputer yang dipakai untuk analisis statistika	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Aplikasi Statistik</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
FileZilla	Dikenal dengan sebutan FileZilla Client, adalah salah satu software FTP yang mendukung FTP, SFTP, dan FTPS	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Hosting management</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
Proxmox	Merupakan sebuah platform virtualisasi open source untuk menjalankan aplikasi dan mesin virtual	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Server management</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
Zimbra	Aplikasi mailing yang memunculkan sebuah antarmuka pemrograman aplikasi SOAP untuk semua fungsi dan juga merupakan sebuah IMAP dan POP3 server	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Mailing management</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
Kinemaster Pro	Perangkat lunak ponsel pintar yang khusus digunakan untuk keperluan pengeditan video	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Perangkat Lunak Design</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
OBS Studio	Perangkat lunak untuk perekaman dan streaming langsung, transmisi	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Video Streamer</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ Database)	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
	<p>data terutama dilakukan melalui Real Time Messaging Protocol (RTMP) dan dapat dikirim ke tujuan pendukung RTMP mana pun, termasuk banyak preset untuk situs web streaming seperti YouTube, Twitch, Instagram, dan Facebook</p>				
Audacity Pro	<p>Aplikasi editor audio digital, pengguna bisa mengoreksi berkas suara tertentu, atau sekedar menambahkan berbagai efek yang disediakan. Selain itu, pengguna juga dapat berkreasi dengan suara yang dimiliki sendiri</p>	Sistem Utilitas	Audio Editor	Purchase / Trial	Free Trial
Zoom	<p>Perangkat lunak telekonferensi, dengan fitur konferensi video grup, berbagi layar, plugin, ekstensi browser, dan kemampuan untuk merekam rapat dan membuatnya secara otomatis ditranskripsi</p>	Sistem Utilitas	Telekonferensi	Purchase / Trial	Free Trial

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ Database)	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
Xsplit	Aplikasi streaming langsung dan aplikasi video-mixing yang sebagian besar digunakan untuk menangkap game play untuk streaming langsung atau keperluan perekaman video	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Video Streamer</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
ArcGIS	Paket perangkat lunak yang terdiri dari produk perangkat lunak sistem informasi geografis, meliputi perangkat lunak berbasis Windows yaitu ArcReader yang memungkinkan pengguna menampilkan peta yang dibuat menggunakan produk ArcGIS lainnya	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>GIS</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
Zabbix	Perangkat lunak pemantauan beragam komponen TI, termasuk jaringan, server, mesin virtual, dan layanan cloud. Menyediakan metrik-metrik pemantauan, antara lain pemanfaatan jaringan, beban	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Network Monitoring</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas / Database)	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
	CPU, dan konsumsi ruang disk				
Wireshark	Aplikasi penganalisis lalu lintas jaringan, digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis, perangkat lunak dan pengembangan protokol komunikasi	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Network Monitoring</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
KeePassX	Perangkat lunak manajemen akun	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Account Management</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
MacOS 11	Sistem operasi dengan antar muka grafis yang dikembangkan dan disediakan untuk komputer Macintosh	<i>Sistem Operasi</i>	<i>MacOS</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
Ubuntu 20.04 LTS	Sistem Operasi berbasis Linux Debian yang ditawarkan dalam tiga edisi resmi: Ubuntu Desktop untuk komputer pribadi, Ubuntu Server untuk server dan cloud computing, dan Ubuntu Core untuk IoT, perangkat kecil dan robot	<i>Sistem Operasi</i>	<i>Linux</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
Canva Pro	Platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen dan	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Perangkat Lunak Design</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi / Utilitas/ Database)	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
	konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan				
Google Drive Premium	Layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang memungkinkan penggunaanya untuk menyimpan data di server mereka, mensinkronisasi data di perangkat yang berbeda, dan saling berbagi berkas	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Aplikasi Perkantoran</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
Trello	Aplikasi ini dapat digunakan untuk tujuan pribadi dan bisnis termasuk manajemen real estat, manajemen proyek perangkat lunak, papan buletin sekolah, perencanaan pelajaran, akuntansi, desain web, permainan, dan manajemen kasus kantor hukum	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Aplikasi Manajemen</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
ViPlex Express	Merupakan aplikasi untuk pemutaran video, terutama dengan monitor besar seperti LED, NEC, dan Videotron	<i>Sistem Utilitas</i>	<i>Perangkat Multimedia</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>

5.3.3.4 Komputasi

Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional yang diterbitkan pada 22 Juni 2021 dan Hasil Harmonisasi Arsitektur SPBE Nasional, Komputasi awan adalah lapisan yang menghubungkan antara lapisan arsitektur lainnya secara logikal berbentuk layanan infrastruktur SPBE berbagi pakai berupa siste Iaas, PaaS, dan SaaS, dimana data dan informasi didalamnya, diolah menggunakan BaaS, serta didukung aspek keamanan untuk keseluruhan komputasi awan dengan SecaaS.

Rekomendasi usulan terkait dengan Penggunaan Komputasi awan yang dapat diterapkan pada seluruh PD yang ada di Pemerintah Kota Madiun yaitu dengan menerapkan penyimpanan pada *Cloud*, *Google Drive* yang dibuat dengan akun resmi dinas dan beberapa penggunaan *Cloud* berlisensi lainnya. Tujuan penggunaan Komputasi awan yaitu untuk mempermudah dalam penyimpanan data yang dapat diakses secara *realtime* dan kapan saja apabila dibutuhkan secara cepat.

5.3.3.5 Sistem Penghubung Layanan

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 33 Ayat 1 menjelaskan bahwa penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE. Lebih lanjut, pada Ayat 3 turut dijelaskan bahwa dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus membuat keterhubungan dan akses jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah dengan jaringan intra pemerintah yang memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE serta mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

Amanat Regulasi yang digunakan sebagai pelaksanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Berikut merupakan isi dari amanat regulasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan SPLP yang ditampilkan pada **Tabel 5.29**

Tabel 5.29 Amanat Regulasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (2018 – 2022)	Tentang RPJMN 2020-2024. Penyediaan Sistem Penghubung
Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Layanan Pemerintah (2020 – 2022)

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
(<i>Cloud Service</i> , Integrasi Kanal Layanan) (2018 – 2025)	
Penerapan Big Data Pemerintah dan Penerapan Kecerdasan Buatan (2019 – 2025)	

Dalam penerapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan menggunakan API Manager terdapat beberapa aspek-aspek yang harus diperhatikan, antara lain yaitu:

- a. Keamanan berbagi pakai melalui sumberdaya internal maupun eksternal.
- b. Kemudahan dalam membuat API dari berbagai layanan dan sumber data.
- c. Mendukung berbagai jenis API untuk diaplikasikan kedalam sistem.
- d. Fleksibilitas pengaplikasian melalui *cloud* yang didukung server yang handal.
- e. Penghematan sumber daya dan biaya yang diperlukan untuk seluruh pengguna.

Sebagaimana telah dijabarkan pada Bab 1 terkait kondisi eksisting dari penerapan Sistem Penghubung Layanan ditemukan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kota Madiun **belum menerapkan Sistem Penghubung Layanan**, maka dari itu terdapat beberapa rekomendasi terkait dengan penerapan SPLP pada Pemerintah Kota Madiun. Berikut merupakan rekomendasi sistem penghubung layanan yang ditampilkan pada **Tabel 5.30**

Tabel 5.30 Usulan Sistem Penghubung Layanan

No.	Nama Sistem Penghubung Layanan	Detail Usulan	Tahun Pelaksanaan
1	Melakukan Pengajuan Penggunaan SPLP	Melakukan Pengajuan terkait penggunaan Penghubung Layanan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat (Kemkominfo) melalui penyuratan secara resmi	2023-2024
2	Mengikuti Kegiatan Bimtek dan Pelatihan SPLP	Mengikuti kegiatan terkait dengan Bimtek dan Pelatihan penggunaan SPLP yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai arahan bagaimana tata cara penggunaannya.	2024

No.	Nama Sistem Penghubung Layanan	Detail Usulan	Tahun Pelaksanaan
3	Melakukan Kajian Terkait penggunaan API	Memastikan data yang akan diintegrasikan pada SPLP dipastikan terlebih dahulu melalui proses kajian untuk penerapan API yang digunakan melalui SPLP	2024
4	Membuat Kajian untuk Konsolidasi data	Diperlukan kajian untuk mengetahui data apakah yang akan diintegrasikan melalui SPLP	2024
5	Layanan Interoperabilitas Data (LID) melalui SPLP	Melakukan Integrasi Layanan Menggunakan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh PD melalui SPLP yang telah digunakan saat ini.	2025

Berdasarkan Tabel 5.30 terkait usulan Sistem Penghubung Layanan yang dapat diterapkan pada Pemerintah Kota Madiun akan dijelaskan secara lebih detail dibawah ini:

- a. Pemerintah Kota Madiun dapat melakukan pengajuan terkait pemanfaatan dan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang disediakan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Komunikasi dan Informatika), dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, dengan perihal untuk permohonan penggunaan SPLP, sosialisasi/bimbingan teknis/pendampingan teknis SPLP, dan Penggunaan API Manager yang mana pada surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun atau Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
- b. Mengikuti kegiatan terkait dengan Bimtek dan Pelatihan penggunaan SPLP yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai arahan bagaimana tata cara penggunaannya.
- c. Membuat Kajian untuk Data yang akan diintegrasikan untuk mengetahui data apakah yang akan diintegrasikan melalui SPLP dengan memanfaatkan API Management yang memiliki tujuan untuk mempermudah dalam proses mengakses satu pintu data dan mempercepat dalam memberikan pelayanan.

- d. Pemerintah Kota Madiun dapat melakukan konsolidasi data untuk data yang akan diintegrasikan yang dapat mendukung layanan.
- e. Melakukan Integrasi Layanan Menggunakan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh PD melalui SPLP yang telah digunakan saat ini.

BAB VI

ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

6.1 Pendahuluan

Sub Bab ini akan menjelaskan terkait penyusunan arsitektur Keamanan SPBE, yang mana didalamnya akan membahas dasar acuan atau referensi SPBE serta Taksonomi dan Metadata Keamanan SPBE yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE.

6.1.1 Keamanan SPBE

Keamanan SPBE Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE adalah pengendalian keamanan yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. **Penjaminan kerahasiaan** dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. **Penjaminan keutuhan** dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. **Penjaminan ketersediaan** dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. **Penjaminan keaslian** dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. **Penjaminan kenirsangkalan (*non repudiation*)** dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Dalam penerapan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas

pemerintahan di bidang keamanan *cyber*. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

6.1.2 Referensi Keamanan SPBE

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang diterapkan melalui Arsitektur SPBE, Referensi Keamanan SPBE (RAK) pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah. Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pengujian kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Secara tidak langsung, RAK akan turut mengawal pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan pada umumnya akan turut melancarkan pelaksanaan pemerataan infrastruktur TIK.

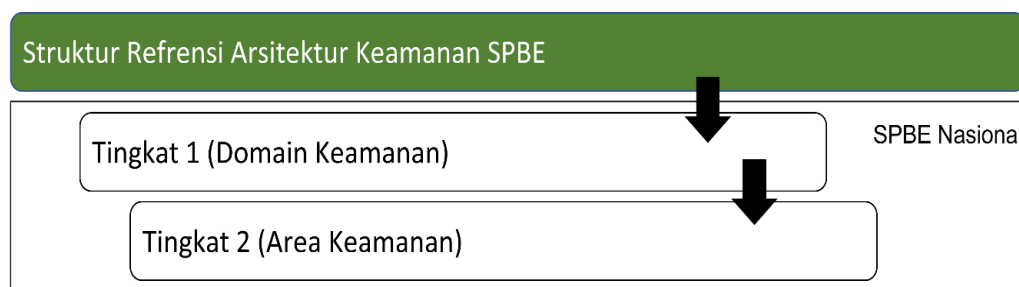
Tabel 6.1 Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
01.03	Regulasi Lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	Edukasi kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	Identifikasi kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	Penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE
02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

Berdasarkan Tabel 6.1, untuk hasil harmonisasi arsitektur SPBE Nasional dimana termuat didalamnya mengenai beberapa hal yang bertujuan untuk melengkapi rencana penerapan SPBE. Pada Arsitektur SPBE Nasional, terdapat Taksonomi atau pengelompokan Referensi Arsitektur SPBE dimana salah satunya adalah taksonomi Keamanan SPBE.



Gambar 6.1 Struktur Referensi Keamanan SPBE

Berdasarkan Gambar 6.1, Struktur dari RAK SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan pertimbangan kelaikan keamanan, sebagai RK tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai RAK tingkat 2 (dua).

Selanjutnya untuk mendefinisikan elemen didalamnya, akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE.

6.1.3 Metadata Keamanan SPBE

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE** Arsitektur SPBE memiliki metadata arsitektur yang merupakan model terstruktur untuk memudahkan penggambaran hubungan antar domain arsitektur tersebut. Metadata arsitektur memudahkan dalam mengelola, mengidentifikasi, dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap domain arsitekturnya. Masing-masing metadata arsitektur memiliki beberapa atribut yang merupakan karakteristik/ciri yang mendefinisikan metadata arsitekturnya. Metadata arsitektur ini dapat merepresentasikan entitas yang terdapat pada arsitektur SPBE secara lebih jelas. Pada metadata keamanan meliputi Keamanan Data dan Informasi, Keamanan Infrastruktur SPBE, Keamanan Aplikasi SPBE yang dituangkan dalam bentuk penerapan keamanan pengelolaan jaringan, penggunaan perangkat keamanan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Pada aspek Manajemen Keamanan merupakan penerapan standar keamanan yang digunakan, pemberlakuan SOP dan audit keamanan secara keseluruhan.

Atribut metadata arsitektur SPBE adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan metadata suatu arsitektur SPBE. Atribut tersebut digunakan untuk membedakan metadata arsitektur SPBE dengan metadata lainnya. Rincian mengenai atribut metadata arsitektur SPBE dapat dilihat pada **Tabel 6.2** hingga ~~dan~~ **Tabel 6.10**.

Tabel 6.2 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Security Device</i>	Nama dari Security Device yang digunakan
3	Deskripsi <i>Security Device</i>	Penjelasan dari Security Device yang digunakan
4	Tipe <i>Security Device</i>	Jenis dari security device yang digunakan (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless intrusion prevention and detection system, Unified Threat Management, atau Network Access Control)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari Security Device yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Status kepemilikan dari Security Device yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)

No	Nama Atribut	Keterangan
7	Unit Pengelola <i>Security Device</i>	Unit pengelola <i>Security Device</i> yang digunakan
8	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 6.3 Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Standar Keamanan	Merupakan nama dari Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD
3	Jenis Standar Keamanan	Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD diantaranya: a. Standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan SPBE; b. Standar internasional terkait keamanan informasi; dan c. Regulasi lainnya.
4	Deskripsi	Merupakan penjelasan dari standar teknis dan prosedur yang dimasukkan
5	Tanggal Mulai Penerapan	Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya

No	Nama Atribut	Keterangan
6	Tanggal Akhir Penerapan	Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya
7	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 6.4 Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan output, pelaksana, dan peserta dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE.
4	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE
5	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 6.5 Atribut Metadata Kerentanan Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan pelaksana dan metode yang digunakan dari kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
4	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
5	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 6.6 Atribut Metadata Peningkatan Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan peningkatan keamanan
3	Deskripsi Kegiatan Peningkatan	Merupakan penjelasan dari kegiatan peningkatan keamanan.

No	Nama Atribut	Keterangan
	Keamanan SPBE	
4	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan peningkatan keamanan.
5	Nilai Kematangan Keamanan Siber	Merupakan nilai kematangan atas keamanan siber organisasi berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk satu organisasi
6	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 6.7 Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan dari kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
4	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
	Keamanan SPBE	
5	Nilai Kematangan Penangan Insiden Siber	Merupakan nilai kematangan atas penanganan insiden berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk lingkup yang ditentukan
6	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 6.8 Atribut Metadata Audit Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan audit keamanan SPBE.
3	Hasil Audit Keamanan SPBE	Merupakan hasil dari pelaksanaan audit keamanan SPBE berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber, yang terdiri dari: a. belum/tidak dilaksanakan; b. memadai; c. perlu peningkatan; d. tidak memadai.

No	Nama Atribut	Keterangan
4	Jenis Audit Keamanan SPBE	Merupakan jenis dari audit keamanan, yang terdiri dari: a. internal, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; dan b. eksternal, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi.
5	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan audit keamanan
6	Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE	Merupakan tindak lanjut atas audit keamanan yang terdiri dari: a. belum ditindaklanjuti, yaitu kurang dari sama dengan 15% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti; b. sebagian ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut yang dilakukan lebih dari 15% dan kurang dari sama dengan 50%; c. sebagian besar ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut yang dilakukan lebih dari 50% dan kurang dari sama dengan 85%; dan d. penuh ditindaklanjuti, yaitu lebih dari 85% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti.

No	Nama Atribut	Keterangan
7	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 6.9 Atribut Metadata Audit Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan kelaikan keamanan SPBE terhadap aplikasi umum dan/atau infrastruktur SPBE yang dimiliki yang akan terhubung kepada infrastruktur SPBE Nasional
3	Tanggal Kelaikan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan kelaikan keamanan SPBE
4	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

6.2 Metodologi

Pada Sub bab berikut akan dijabarkan terkait metodologi yang digunakan dalam penyusunan Bab ini. Metodologi yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu analisis kondisi eksisting, analisis kesenjangan dan analisis usulan keamanan SPBE. Masing-masing tahapan akan dijabarkan secara mendetail pada substansi selanjutnya.

6.2.1 Analisis Kondisi Eksisting

Analisis kondisi eksisting dilakukan untuk menindaklanjuti terkait dengan kondisi terkini Arsitektur Keamanan SPBE yang ada di Pemerintah Kota Madiun. Proses analisis kondisi eksisting terdiri dari tahap input berupa data yang didapatkan dari hasil survei *online* dan *offline* yang kemudian diproses dengan melakukan analisa dan reuiu data. Sehingga menghasilkan kondisi eksisting secara mendetail sebagaimana yang telah dijabarkan. Proses analisis kondisi eksisting terdiri dari:

a. Input

Input dari tahapan ini merupakan hasil dari tahapan sebelumnya, yaitu analisa kondisi eksisting keamanan infrastruktur saat ini dan hasil analisa penentuan ekspektasi atau target yang ingin dituju terkait Keamanan SPBE.

b. Proses

Proses dalam tahapan ini dilakukan dengan membandingkan antara kondisi eksisting keamanan infrastruktur saat ini dengan target atau tujuan Kondisi keamanan infrastruktur yang ingin dituju.

c. Output

Output yang dihasilkan berupa *list* Kesenjangan dari ketidaksesuaian antara kondisi eksisting keamanan infrastruktur saat ini dengan kondisi yang ingin dituju pada setiap indikatornya.

6.2.2 Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan merupakan analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa mendatang dari kondisi eksisting yang dibandingkan dengan kondisi ideal untuk Keamanan SPBE. Input pada tahapan kesenjangan berdasarkan

analisa kondisi eksisting keamanan infrastruktur saat ini dan hasil analisa kondisi ideal terkait kemandirian SPBE. Selanjutnya, membandingkan antara kondisi eksisting keamanan infrastruktur saat ini dengan target atau tujuan kondisi keamanan infrastruktur yang akan dicapai. Dari input dan proses analisis kesenjangan didapatkan list kesenjangan dari ketidaksesuaian antara kondisi eksisting keamanan infrastruktur saat ini dengan kondisi yang ingin dituju pada setiap parameter indikatornya.

6.2.3 Analisis Usulan

Analisis Keamanan SPBE ini melakukan analisis terkait kebutuhan yang mendukung penerapan Keamanan SPBE. Proses analisis usulan Keamanan SPBE terdiri dari:

a. Input

Pada analisis kesenjangan, berdasarkan dengan Kondisi Eksisting yang didapat sebelumnya akan digunakan sebagai *input* data pada tahapan awal yang digunakan sebagai usulan keamanan SPBE.

b. Proses

Setiap indikator yang ada diperoleh dari Kesenjangan, kemudian Proses selanjutnya dilakukan pencarian terkait solusi berupa usulan untuk memenuhi kondisi yang ingin dicapai dari setiap indikator Keamanan SPBE yang ada di Pemerintah Kota Madiun.

c. Output

Hasil dari tahapan ini adalah daftar berupa rekomendasi kebutuhan Keamanan SPBE sesuai dengan rekomendasi Usulan Keamanan yang ditujukan dan diterapkan pada Pemerintah Kota Madiun.

6.3 **Arsitektur Keamanan SPBE**

Pada Bab 3 menjelaskan mengenai usulan untuk keamanan SPBE pada Kota Madiun. Usulan ini berdasarkan kesenjangan kondisi eksisting dengan kondisi ideal atau kondisi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Pemerintah Kota Madiun. Selain itu dalam Bab 3 membahas juga tentang usulan penerapan keamanan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dan juga audit keamanan.

6.3.1 **Kondisi Eksisting Keamanan SPBE**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, seluruh instansi pemerintah wajib Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dimana telah dijelaskan bahwa faktor keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*Non Repudiation*) terkait dengan data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Secara umum Pemerintah Kota Madiun **telah menerapkan menerapkan secara keseluruhan** terkait standar keamanan yang sesuai dengan standar keamanan baik standar nasional maupun internasional. Dari segi keamanan fisik, Pemerintah Kota Madiun telah menerapkan adanya penggunaan *firewall* untuk keamanan jaringan dan Server, perangkat keamanan pendukung dan SOP keamanan serta dilengkapi dengan implementasi CCTV di setiap PD sebagai bentuk sarana pendukung keamanan.

Dari segi Tata Kelola Keamanan, Pemerintah Kota Madiun menggunakan **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi**. Hal ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan implementasi keamanan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengampu utama terkait dengan Keamanan SPBE. Beberapa bentuk kegiatan terkait

dengan keamanan yang dapat dilakukan oleh Kota Madiun pada tahap awal dalam melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan **Standar ISO 27001, Indeks KAMI, Manajemen Risiko, inventarisir atau evaluasi SOP Keamanan** dan Beberapa penerapan keamanan lainnya.

Penerapan Audit yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun yaitu telah melakukan Audit dengan Pendampingan Tenaga Ahli terkait penerapan Standar ISO 27001 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi sejak tahun 2020 dan telah dilakukan pengecekan Kondisi desain keamanan fisik dan *logic* serta telah dilakukan penerapan Indeks KAMI pada tahun 2022 sebagai bentuk audit internal terkait penerapan keamanan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

6.3.1.1 Keamanan Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang mengatur dan memastikan terselenggaranya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE. Sedangkan Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas antara lain :

a. Standar Keamanan Informasi

Berdasarkan dengan Kondisi Eksisting terkait dengan penerapan Standar Keamanan Informasi yang diterapkan Pemerintah Kota Madiun saat ini yaitu telah menerapkan Standar ISO 27001 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Penerapan Standar ISO 27001 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sejak tahun 2020 hingga saat ini serta telah dilakukan audit *internal* dan *eksternal*.

b. Prosedur/SOP Keamanan Informasi

Pemerintah Kota Madiun terkait dengan Penerapan SOP Keamanan Informasi yang terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan data yang didapatkan dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Tim. Pemerintah Kota Madiun telah menerapkan Prosedur/SOP Keamanan Informasi pada Ruang server ataupun pada seluruh Operasional yang ada di masing-masing Server.

6.3.1.2 Keamanan Teknis

Berdasarkan dengan pengumpulan data hasil survei terkait Penerapan Keamanan Teknis yang ada di Pemerintah Kota Madiun, saat ini telah menerapkan Keamanan Teknis pada beberapa Aspek Keamanan, diantaranya dengan adanya perangkat keamanan pendukung yaitu CCTV, Alat dan alarm Pemadam *Finger Lock*, *Firewall*, *Fingerprint*, Sensor Pintu/*Access Kontrol*.

6.3.1.3 Audit Keamanan

Penerapan Audit yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun yaitu telah melakukan Audit dengan Pendampingan Tenaga Ahli terkait penerapan Standar ISO 27001 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi sejak tahun 2020 dan telah dilakukan pengecekan Kondisi desain keamanan fisik dan logic serta telah dilakukan penerapan Indeks KAMI pada tahun 2022 sebagai bentuk audit internal terkait penerapan keamanan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

6.3.1.4 Permasalahan Keamanan SPBE

Permasalahan Keamanan SPBE di Pemerintah Kota Madiun yang didapatkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan terkait kondisi eksisting keamanan pada Pemerintah Kota Madiun terdapat beberapa permasalahan keamanan SPBE yang didapatkan berdasarkan dengan hasil surveillance ISO 27001 (Audit Internal).

6.3.2 Kondisi Kesenjangan SPBE

Terdapat beberapa permasalahan dan usulan yang terdapat pada Pemerintah Kota Madiun dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas Arsitektur Keamanan SPBE yang ada. Sehingga, diperlukan analisis GAP untuk memenuhi proses perbaikan dan peningkatan kualitas keamanan yang semuanya dilakukan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan tertulis pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Arsitektur SPBE Nasional.

6.3.3 Usulan Keamanan SPBE

Seiring berkembangnya era digital, faktor keamanan informasi merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam banyak bidang. Begitu pula dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada sub bab ini akan dibahas terkait salah satu domain SPBE yaitu Keamanan SPBE. Sebagaimana pelaksanaan keamanan SPBE ini telah mengacu kepada **Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara Nomor 10 Tahun 2019 dan ISO 27001:2013**. Penerapan keamanan SPBE yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 lebih membahas terkait dengan persandian serta pengamanan data dan informasi. Beberapa keamanan yang disebutkan dalam BSSN Nomor 10 Tahun 2019 diantaranya adalah keamanan Sumber Daya TI, akses kontrol, jaringan, surat elektronik dan lainnya. Dalam setiap konteks keamanan dapat diturunkan menjadi bentuk kegiatan kecil seperti halnya pembagian hak

akses, penerapan standar kata sandi dan lain sebagainya.

b. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 secara spesifik membahas terkait dengan Keamanan SPBE. Dimana panduan yang disebutkan di dalamnya mengacu pada konsep *Plan, Do, Check, dan Act* (PDCA). Pada masing masing tahapan terdapat strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan terkait dengan keamanan

c. ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

ISO 27001:2013 merupakan standar internasional yang juga merupakan acuan dari pembentukan banyak standar lain seperti Indeks KAMI dan bahkan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 pun merupakan sebuah turunan dari ISO 27001:2013.



Gambar 6.2 Kerangka Kerja Proses Evaluasi (PDCA)

Berdasarkan Gambar 6.2, dalam penerapan keamanan, salah satu acuan yang digunakan adalah Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 menjelaskan aspek yang harus dilakukan terkait dengan Manajemen Keamanan yang harus dilakukan setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Beberapa program Keamanan SPBE yang dapat dilakukan berdasarkan aspeknya adalah edukasi kesadaran keamanan SPBE, penilaian kerentanan Keamanan SPBE, peningkatan Keamanan SPBE, penanganan insiden Keamanan SPBE dan Audit Keamanan SPBE. Secara detail kegiatan yang dapat dilakukan berdasarkan masing masing aspek dijelaskan pada **Tabel 6.10**

Tabel 6.10 Aspek implementasi keamanan

Aspek	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pelaksana
Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	1) Melakukan penggantian kata sandi secara rutin serta menerapkan tingkat kompleksitas kata sandi yang digunakan sesuai dengan standar yaitu terdiri dari minimal 8 digit yang dimana terdiri dari Angka, Huruf dan Simbol.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh PD

Aspek	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pelaksana
	2) Pemberian pembatasan penggunaan internet sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari serangan virus/malware/ trojan dari situs yang telah dibuka	Seluruh PD	Seluruh PD
	3) Menggunakan software yang telah berlisensi sebagai Langkah pencegahan adanya serangan keamanan.	Seluruh PD	Seluruh PD
Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE	1) Melakukan inventarisasi seluruh aset SPBE meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur yang ada pada Pemerintah Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Aspek	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pelaksana
	2) Mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE dengan cara melakukan <i>penetration testing</i> dan <i>vulnerability assessment</i> pada data dan informasi, aplikasi dan infrastruktur yang ada pada Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3) Melakukan pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika	Inspektorat
	4) Melakukan analisis dan evaluasi kerentanan keamanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Peningkatan	1) Menerapkan standar teknis	Dinas Komunikasi	Seluruh PD

Aspek	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pelaksana
Keamanan SPBE	dan prosedur Keamanan SPBE	dan Informatika	
	2) Melakukan bimbingan teknis mengenai standar Keamanan SPBE.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3) peningkatan keamanan lingkup ruang server kepada PD yang memiliki server	Dinas Komunikasi dan Informatika	PD pemilik server
Penanganan Insiden Keamanan SPBE	1) Sosialisasi kegiatan peningkatan kesadaran keamanan TI	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2) Peningkatan kompetensi melalui sertifikasi keamanan TI	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	3) Membuat standar operasional prosedur tentang Penanganan Insiden	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Aspek	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pelaksana
	4) Pembuatan catatan atau laporan penanganan insiden, check list dan <i>log book</i> yang dilakukan secara berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh PD
Audit SPBE	1) Audit Aplikasi	Diskominfo	Seluruh PD pemilik aplikasi
	2) Audit Infrastruktur	Inspektorat	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3) Audit Keamanan	Inspektorat	Seluruh PD

Berdasarkan Tabel 6.10, kerangka kerja keamanan informasi yang kemudian dilakukan proses *cascading* dengan template abacus dimana merupakan acuan atau ketentuan dari Kementerian PANRB. Pembahasan akan dibagi menjadi **4 (empat)**, tahapan tersebut meliputi perencanaan, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut. Penjelasan setiap tahapan sebagaimana pada sub bab berikut.

6.3.3.1 Tahap Perencanaan Keamanan SPBE

Dalam Pemantauan dan Evaluasi Indeks SPBE, tahap perencanaan menjadi komponen penting dalam setiap domain SPBE. Begitu pula dalam ruang lingkup keamanan SPBE perlu dilakukan perencanaan, dimana salah satu kegiatan yang dapat

dilakukan selain membentuk Tim Audit adalah dengan menentukan ruang lingkup pada fase perencanaan. Dengan adanya isu-isu terkait keamanan yang sering terjadi beberapa waktu terakhir ini, maka perlu dilaksanakan peningkatan kesadaran keamanan pada lingkup Pemerintah Kota Madiun. **Edukasi kesadaran** atau yang sering kali dikenal dengan **awareness**. Edukasi kesadaran dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan Keamanan SPBE bagi setiap individu. Dengan dilakukannya edukasi kesadaran, diharapkan dapat mengurangi ancaman yang berasal dari internal organisasi, seperti halnya memberikan *password* kepada orang yang tidak berwenang. Sebagai berikut beberapa contoh kegiatan edukasi kesadaran Keamanan SPBE sebagaimana termuat pada **Tabel 6.11**

Tabel 6.11 Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

No	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
1	Sosialisasi Kesadaran Keamanan Informasi Data	Memberikan edukasi kesadaran pada seluruh PD di Kota Madiun terkait dengan Keamanan Data	2022
2	Sosialisasi Keamanan Hak Akses	Memberikan edukasi kesadaran pada lingkup Pemerintah Kota Madiun terkait dengan Keamanan Hak Akses	2022
3	Sosialisasi Pedoman	Memberikan edukasi kesadaran pada lingkup	2022

No	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
	Pembuatan Password dan Penggantian	Pemerintah Kota Madiun terkait dengan pedoman pembuatan password dan penggantian	
4	Pelatihan Standar Keamanan	Memberikan edukasi kesadaran pada lingkup Pemerintah Kota Madiun terkait dengan standar keamanan	2022
5	Melakukan reminder penggantian password secara berkala	Melakukan reminder secara berkala pada ruang lingkup Pemerintah Kota Madiun terkait dengan penggantian password	2022

Peningkatan kesadaran keamanan dapat dilakukan secara rutin untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko keamanan. Misalnya saja sosialisasi untuk penggantian *password* secara berkala dan sosialisasi terkait kebijakan keamanan yang berlaku pada Pemerintah Kota Madiun.

Selain pelaksanaan edukasi kesadaran, tahapan pertama yang dilakukan dalam hal perencanaan adalah menentukan ruang lingkup. Penentuan ruang lingkup untuk menentukan fokus atau arah kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga nantinya dapat terbentuk rencana strategis dan solusi pengembangan yang fokus pada penyelesaian masalah. Adapun usulan kategori keamanan yang dapat diterapkan pada Pemerintah Kota Madiun sebagaimana termuat pada **Tabel 6.12**

Tabel 6.12 Usulan Keamanan SPBE

No	Kategori Keamanan	Aspek Keamanan	Usulan Kegiatan	Tahun
1	Bagian Umum	Keamanan Sumber Daya Teknologi Informasi	Pengadaan Antivirus Terpusat	2024
			Pembuatan Standar Antivirus	2023
			Pembuatan Standar Pemindaian Computer (<i>Daily Scanning</i>)	2023
			Pengadaan CCTV di Ruang Publik	2023
			Pembuatan Prosedur Pengawasan CCTV	2023
			Keamanan Akses kontrol	Pembuatan Daftar DNS Atau IP Yang Diperbolehkan
		Pembuatan Standar Hak User (<i>User Access Right</i>)		2023
		Pembuatan Pembagian Hak User		2023
		Pembuatan Standar Kata Sandi		2023
		Pembuatan Frekuensi Pengubahan Kata Sandi		2023
		Prosedur Penambahan/Pergantian/Penghapusan Hak Akses		2023
		Keamanan Sumber daya manusia	Pendayagunaan SDM untuk bidang keamanan informasi	2023-2027

No	Kategori Keamanan	Aspek Keamanan	Usulan Kegiatan	Tahun
			Peningkatan kompetensi SDM bidang keamanan informasi	2023-2027
			Pembuatan Prosedur rekrut Pegawai	2023
2	Keamanan Data dan Informasi	Confidentiality (kerahasiaan)	Pembatasan akses untuk kategori data dan informasi tertentu	2023
		Integrity (keutuhan)	Menerapkan proses enkripsi dan dekripsi	2023
		Availability (ketersediaan akses)	Didukung dengan DRC atau layanan manual jika layanan online mengalami kegagalan	2023
		Authentication (keaslian)	Melakukan verifikasi manual sebagai langkah verifikasi akhir	2023
		keamanan Data dan Informasi	Pembuatan Standar klasifikasi data dan informasi	2023
			Pembuatan pelabelan data dan informasi	2023
Pembuatan Kebijakan keamanan informasi	2023			
3	Keamanan Aplikasi SPBE	keamanan Perangkat Informasi / Aplikasi	Penerapan <i>Public Key Infrastructure</i> (PKI)	2023
			Pembuatan Standard <i>Public Key Infrastructure</i> (PKI)	2023
			Prosedur Pemadaman/memutus/mengaktifkan/menyalakan Aplikasi	2023

No	Kategori Keamanan	Aspek Keamanan	Usulan Kegiatan	Tahun
4	Keamanan Sistem Penghubung	Keamanan Surat Elektronik	Pembuatan Prosedur <i>Digital Signature</i>	2023
		Keamanan Komunikasi	Implementasi <i>Encryption Techniques</i>	2023
			Kebijakan Komunikasi	2023
			Prosedur Berkomunikasi yang Aman	2023
			Prosedur <i>Teleworking</i>	2023
5	Keamanan Jaringan Intra	Keamanan Jaringan	Pembuatan Kebijakan Jaringan (<i>Network Policy</i>)	2023
			Pembuatan Kebijakan Pengiriman Informasi	2023
			Pembuatan Prosedur Pengiriman Informasi	2023
6	Keamanan Pusat Data (Ruang Server)	Keamanan Pusat Data	Penyesuaian Ruang Server dengan Standar Keamanan dengan mempertimbangkan Aspek Keamanan	2023
			Penyewaan DRC (<i>Disaster Recovery Center</i>) sebagai <i>backup</i> server	2023
			Penerapan Demilitarized Zone (DMZ) pada server yang dimiliki	2023
			Pembuatan Prosedur Perawatan Rutin Perangkat UPS	2023
			Penerapan Teknologi	2023

No	Kategori Keamanan	Aspek Keamanan	Usulan Kegiatan	Tahun
			<i>Face recognize</i>	
			Implementasi ruang situs dan tata letak (<i>site space and layout</i>)	2023
			Implementasi Infrastruktur Pengkabelan	2023
			Implementasi <i>Tired Reliability</i>	2023
			Prosedur Akses Pusat Data	2023
			Prosedur menambah/mengurangi perangkat pada server di ruang server	2023
			Prosedure Remote server	2023
			Prosedur Perawatan Server	2023
			Prosedur Insiden Manajemen	2023

6.3.3.2 Tahap Implementasi Keamanan SPBE

Pada tahap implementasi terbagi menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu **Standar Keamanan**, **Penanganan Insiden**, dan **Peningkatan Keamanan**. Dimana standar teknis merupakan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan setiap kegiatan keamanan SPBE. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan **inventarisir** ulang standar keamanan yang sudah dimiliki masing masing **perangkat daerah**, sehingga dapat dilakukan pemenuhan standar keamanan yang dibutuhkan atau melakukan pembaharuan dokumen standar keamanan yang

sudah ada. Berikut daftar standar keamanan yang dapat dijadikan acuan dalam kebutuhan standar keamanan oleh Pemerintah Kota Madiun sebagaimana pada **Tabel 6.13**

Tabel 6.13 Standar Keamanan yang diterapkan

Nama Standar Keamanan	Tanggal Mulai Penerapan
Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021	Tahun 2021
ISO 27001: 2013	Tahun 2021 (<i>Audit Surveillance</i> 2022 Februari)
Pembuatan Standar Kata Sandi	Sudah diterapkan berupa figura bagaimana kata sandi yang baik
Pembuatan Standar Klasifikasi Data dan Informasi	Sudah diterapkan dengan adanya PPID
Pembuatan Pedoman Pencatatan Insiden (<i>log book</i>)	Suda diterapkan dan memiliki formulir untuk dokumentasi insiden
SOP Akses ke Ruang Pusat Data	Sudah diterapkan
SOP Audit Internal	Belum diterapkan
SOP <i>Backup dan Restore</i>	Sudah diterapkan
SOP Keamanan Infrastruktur TIK	Sudah diterapkan
SOP Keamanan Kabel	Sudah diterapkan
SOP Media yang Dapat Dilepas (<i>Removable Media</i>)	Sudah diterapkan
SOP Pelabelan Informasi	Sudah diterapkan
SOP Pembuangan Media	Belum diterapkan
SOP Pemeliharaan Server	Sudah diterapkan
SOP Pengelolaan Risiko	Sudah diterapkan
SOP Penanganan Aset	Sudah diterapkan

Nama Standar Keamanan	Tanggal Mulai Penerapan
SOP Penanganan <i>Insident</i>	Sudah diterapkan
SOP Pengelolaan Perangkat Hilang	Sudah diterapkan
SOP Pemisahan Lingkungan Pengembangan dan pengujian	Belum diterapkan
SOP Manajemen Kapasitas	Sudah diterapkan
SOP Pengelolaan Akses Server	Sudah diterapkan
SOP Pengelolaan Hak Akses	Sudah diterapkan
SOP Pengelolaan <i>Password</i>	Sudah diterapkan
SOP Pengelolaan Perubahan	Sudah diterapkan
SOP Penilaian dan Penanganan Risiko	Sudah diterapkan
SOP Penilaian Kejadian Keamanan Informasi	Sudah diterapkan
SOP Penilaian Kerentanan Teknis	Belum diterapkan
SOP Penilaian Uji Tuntas Pemasok	Belum diterapkan
SOP Perawatan Peralatan TI	Sudah diterapkan
SOP Permintaan Hak Akses	Sudah diterapkan
SOP Pertukaran Data dan Informasi	Belum diterapkan
SOP Tanggap Insiden Kelanjutan Bisnis	Belum diterapkan
SOP Tinjauan Manajemen	Belum diterapkan
SOP Transfer Media Fisik	Sudah diterapkan
SOP Untuk Bekerja di Area	Belum diterapkan

Nama Standar Keamanan	Tanggal Mulai Penerapan
yang aman	
SOP Perawatan <i>Genset</i>	Sudah diterapkan
SOP Pemadaman Listrik	Sudah diterapkan
SOP Pengelolaan Akses Non Fisik (<i>Logic</i>)	Belum diterapkan
SOP Perawatan Rutin Perangkat UPS	Sudah diterapkan
SOP Pengawasan CCTV	Belum diterapkan
SOP Penanganan Insiden dan Ketidaksesuaian	Sudah diterapkan

Dengan adanya standar keamanan yang sudah dibuat dan ditetapkan, maka diharapkan setiap pelaksana keamanan mematuhi dan menggunakan standar tersebut sebagai pedoman pelaksanaan terlebih dalam hal penanganan insiden. Setiap terjadi insiden, perlu adanya pencatatan dalam bentuk catatan aktivitas sistem, sehingga terdapat pencatatan atau dokumentasi terkait dengan insiden yang terjadi. Berdasarkan ketentuan format ABACUS, setiap insiden yang terjadi perlu dicatat sehingga terdapat dokumentasi insiden apa saja yang pernah terjadi dan bagaimana penanganan yang dilakukan. ABACUS merupakan aplikasi yang dipilih oleh Kementerian PAN-RB untuk memetakan relasi dari setiap domain SPBE, aplikasi ini baru saja disosialisasikan pada tahun 2022 sekitar bulan April dan Mei.

Pada dasarnya, setiap insiden SPBE yang terjadi dicatat hingga pada tahap kematangan penanganan insiden keamanan SPBE dan tanggal kegiatan. Hal ini sebagaimana bisa dilihat pada **Tabel 6.14**

Tabel 6.14 Penanganan Insiden SPBE

Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Penangan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Ketengangan Insiden Keamanan
Terjadinya serangan pada server	Berisikan pedoman jika terjadi serangan pada server, seperti misalnya <i>malware, hacker</i> dan lainnya	Sedang	Sesuai terjadinya <i>insiden</i>	Jarang terjadi namun langsung <i>critical</i>
Penanganan terjadinya pemadaman	Berisikan pedoman jika terjadi pemadaman listrik	Tinggi	Sesuai terjadinya <i>insiden</i>	Biasanya ada surat dan selalu <i>prepare</i>
Penanganan kegagalan UPS	Berisikan pedoman jika terjadi kegagalan UPS	Tinggi	Sesuai terjadinya <i>insiden</i>	Jumlah UPS ada 3 dan paralel
Penanganan kerusakan infrastruktur	Berisikan pedoman jika terjadi kerusakan infrastruktur	Tinggi	Sesuai terjadinya <i>insiden</i>	Rusak langsung ganti
Penanganan Insiden dan Ketidaksesuaian	Berisikan pedoman jika terjadi insiden dan ketidaksesuaian	Tinggi	Sesuai terjadinya <i>insiden</i>	Sudah dilakukan penanganan berdasarkan dengan prosedur <i>insiden</i>

Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Penangan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Ketengangan Insiden Keamanan
Penanganan Kehilangan Aset atau Data	Berisikan pedoman jika terjadi kehilangan aset atau data	Rendah	Sesuai terjadinya <i>insiden</i>	Masih belum mengalami dan belum ada acuan serta ukuran

Bentuk identifikasi keamanan dilakukan untuk menemukan celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak pihak tidak bertanggung jawab mendapatkan informasi atau tindakan merugikan lainnya. Berikut merupakan bentuk identifikasi kerentanan keamanan SPBE yang dapat dilakukan dan diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 6.15**

Tabel 6.15 Proses Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE

Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE
Indeks KAMI	Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi.	17 Juni 2021
Manajemen Risiko	Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang	Agustus 2020

Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE
	berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan /pengelolaan sumber daya.	
Audit TIK SPBE	Audit TIK SPBE bertujuan untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya terkait, Secara memadai telah dapat digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi Aset b. Menjaga Integritas dan Ketersediaan Sistem dan Data c. Menyediakan Informasi yang Relevan dan Handal d. Mencapai Tujuan Organisasi dengan Efektif e. Menggunakan Sumber Daya dengan Efisien 	Agustus 2020
Unit Testing	Jenis <i>software</i> testing yang dilakukan untuk menguji suatu bagian atau komponen <i>software</i> berupa kode, fungsi, metode, prosedur, modul, atau objek tersendiri dimana pengujian unit ini dilakukan sebelum <i>system integration testing</i> .	Belum Dilakukan
Performance Testing / Stress	Suatu proses untuk menguji batas ketahanan dan kestabilan sebuah	Belum Dilakukan

Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE
<i>Testing</i>	sistem termasuk modul aplikasi dan infrastrukturnya, serta menguji bagaimana sistem/aplikasi tersebut dapat bekerja kembali setelah terjadi <i>down</i> dalam kondisi load yang tinggi.	
<i>Penetration Testing</i>	Suatu kegiatan dimana seseorang mencoba mensimulasikan serangan yang bisa dilakukan terhadap jaringan instansi untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem jaringan yang digunakan dan mengevaluasi keamanan dari sebuah sistem dan jaringan komputer	Februari 2022
<i>Reliability Testing</i>	Kemungkinan operasi perangkat lunak bebas kegagalan untuk jangka waktu tertentu dalam lingkungan tertentu dan memastikan bahwa perangkat lunak dapat diandalkan serta memenuhi tujuan pembuatannya pada jangka waktu tertentu dalam lingkungan tertentu dan mampu melakukan operasi bebas kesalahan.	Belum Dilakukan
<i>Vulnerability Testing</i>	Proses pengujian kerentanan terhadap penerapan keamanan pada sistem / infrastruktur yang memungkinkan terjadinya akses tanpa izin dengan mengeksploitasi kecacatan sistem	Belum Dilakukan

6.3.3.3 Tahap Evaluasi Keamanan SPBE

Terdapat rekomendasi usulan pembuatan SOP untuk yang untuk saat ini belum dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun. Daftar SOP yang perlu dipersiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika,

Tabel 6.16 Usulan SOP Jaringan

Nama Standar Keamanan	Tanggal Mulai Penerapan
SOP Audit Internal	Belum diterapkan
SOP Pembuangan Media	Belum diterapkan
SOP Pemisahan Lingkungan Pengembangan dan pengujian	Belum diterapkan
SOP Penilaian Kerentanan Teknis	Belum diterapkan
SOP Penilaian Uji Tuntas Pemasok	Belum diterapkan
SOP Pertukaran Data dan Informasi	Belum diterapkan
SOP Tanggap Insiden Kelanjutan Bisnis	Belum diterapkan
SOP Tinjauan Manajemen	Belum diterapkan
SOP Untuk Bekerja di Area yang aman	Belum diterapkan
SOP Pengelolaan Akses Non Fisik (<i>Logic</i>)	Belum diterapkan
SOP Pengawasan CCTV	Belum diterapkan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE tentang SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pemeriksaan/evaluasi secara

sistematis dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah atau meningkatkan kinerja terhadap Aplikasi SPBE.

Audit SPBE sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 adalah audit yang dilakukan terhadap Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE. Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE diamanatkan kepada BPPT dan Audit Keamanan SPBE diamanatkan kepada BSSN. Terdapat 3 (tiga) jenis audit (audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan), dapat dijelaskan terkait 3 (tiga) jenis audit tersebut. Dijelaskan (*step by step*) pelaksanaan auditnya, dan perangkat audit yang digunakan menggunakan perangkat audit yang dimiliki oleh BPPT (untuk audit infrastruktur dan aplikasi). Berikut merupakan standar dan tata cara pelaksanaan Audit sebagaimana yang ditampilkan pada **Gambar 6.3**



Gambar 6.3 Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit

Berdasarkan Gambar 6.3, audit dilakukan dalam bentuk Audit Internal dan Audit Eksternal. Audit eksternal adalah Audit yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK (LATIK) Pemerintah dan Swasta Terakreditasi, sedangkan Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh pegawai IPPD yang ditetapkan

oleh Sekretaris Daerah atau Sekretaris Utama Instansi. Untuk **Audit Aplikasi** terdiri dari **124 (seratus dua puluh empat) Indikator** penilaian dimana setiap indikator memiliki 4 level penilaian dimulai dengan **level 0** hingga **level 3**. Sedangkan untuk **Audit Infrastruktur** terbagi kedalam 3 kategori yaitu, Pusat Data dimana terdiri dari **183 (seratus delapan puluh tiga) Indikator**, Jaringan Intra Pemerintah terdiri dari **47 (empat puluh tujuh) Indikator**, dan Sistem Penghubung Layanan sebanyak **49 (empat puluh sembilan) Indikator**. Setiap kategori terdiri dari **2 (dua) Domain** yaitu Fungsionalitas dan Kinerja Pusat Data serta Aspek Lain Pusat Data. Audit SPBE ini bersifat lebih rinci dan lebih teknis jika dibandingkan dengan Evaluasi SPBE. Berikut penjelasan secara detail terkait Audit SPBE, antara lain:

- a. **Audit Keamanan SPBE** adalah Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi lingkup Keamanan SPBE dimana di dalamnya terdapat proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan / atau standar yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan audit keamanan yang dapat dilaksanakan antara lain:
 - i. Melakukan review terhadap standar, kontrol dan SOP yang sudah ada.
 - ii. Melakukan *Penetration Testing*.
- b. **Audit Aplikasi** adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Audit Aplikasi mencakup, yaitu:

- i. Aplikasi umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bergantian oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Aplikasi Umum ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- ii. Aplikasi khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain. Aplikasi khusus ditentukan oleh IPPD (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah).

Lingkup dari Audit Aplikasi adalah Tata kelola, Manajemen, dan Fungsionalitas Kinerja aplikasi. Adapun kegiatan audit Aplikasi yang dapat dilakukan antara lain:

- i. Melakukan proses review secara berkala terkait fitur yang ada dalam aplikasi.
 - ii. Membuat kuesioner secara berkala kepada user pengguna aplikasi.
 - iii. Melakukan pembuatan aplikasi atau sistem yang bertujuan untuk menunjang seluruh aktivitas layanan SPBE.
 - iv. Diperlukan adanya integrasi antar aplikasi atau sistem.
- c. **Audit Infrastruktur SPBE** adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan mencakup Infrastruktur Nasional dan Infrastruktur IPPD. Lingkup (domain) dari Audit Infrastruktur SPBE adalah Tata kelola, dan Fungsionalitas Kinerja Infrastruktur. Fungsionalitas Kinerja Infrastruktur dikelompokkan menjadi Pusat Data (Ruang Server), Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan. Adapun Usulan Pelaksanaan

Audit Infrastruktur yang dapat dilakukan antara lain dengan melalui kegiatan berikut ini:

- i. Melakukan peremajaan lisensi untuk jenis aplikasi yang memiliki masa berlaku lisensi.
- ii. Peningkatan kompetensi terkait pengetahuan infrastruktur.
- iii. Membentuk tim Internal Audit.
- iv. Perawatan Infrastruktur (Perangkat TI)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan bahwa terkait dengan Audit SPBE perlu direncanakan setidaknya 2 (dua) tahun sekali untuk Audit Eksternal dan Audit Internal dilakukan dalam 1 (satu) tahun sekali. Bentuk tindak lanjut dapat dilakukan dengan penerapan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur menggunakan Tools Audit BPPT/BRIN melalui <https://audit-infrastruktur-aplikasi.bppt.go.id/webaudit-v2/> dan melakukan *Surveillance* ISO 27001:2013 yang harus dilakukan sebanyak **2 (dua)** kali dalam rentang waktu 2 (dua) tahun sejak didapatkannya Sertifikat ISO 27001:2013. Kegiatan *Surveilans* merupakan bentuk sederhana dari proses sertifikasi ISO 27001, dimana proses pengecekan dilakukan secara acak oleh pihak auditor untuk memastikan setiap kebijakan dan tahapan dilaksanakan sesuai ketentuan ruang lingkup ISO 27001 yang dijabarkan pada table berikut.

Tabel 6.17 Rekomendasi Kegiatan Audit SPBE

No	Audit SPBE	Aktivitas	Standar/ Framework	Tahun Pelaksanaan
1	<i>Surveillance</i> ISO Ke-2	Melakukan Audit ISO tahap 1 (Audit Sertifikasi) Stage 1 (Dokumen Kebijakan dan SOP)	ISO 27001:2013	2023

No	Audit SPBE	Aktivitas	Standar/ Framework	Tahun Pelaksanaan
		Stage 2 (Pengecekan Lapangan)		
2	Resertifikasi ISO 27001	Melakukan Audit ISO Tahap 2 (Resertifikasi) untuk <i>update</i> pada versi yang terbaru ISO 27001:2022	<i>Update</i> ISO 27001:2013 ke ISO 27001:2022	2023
3	Audit Aplikasi	Melakukan Audit Aplikasi Umum dilakukan oleh BPPT sebagai Lembaga Audit TIK (LATIK) Pemerintah, sedangkan Audit Aplikasi Khusus dilakukan oleh Lembaga Audit TIK Swasta Terakreditasi	<i>Tools</i> Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE BPPT / BRIN	2023
4	Audit Infrastruktur	Melakukan Audit internal terkait Infrastruktur Kota Madiun menggunakan <i>Tools</i> BPPT/BRIN	<i>Tools</i> Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE BPPT/BRIN	2023

6.3.3.4 Tahap Tindak Lanjut Keamanan SPBE

Dengan pembuatan SOP yang sebagai acuan, diharapkan bagi pengguna untuk menjalankan SOP ketika terjadi insiden pada pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan ketentuan dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana telah ditetapkan bahwa setiap perangkat daerah perlu mencatat insiden-insiden apa saja yang terjadi. Hal ini sebenarnya merupakan standar umum, yang sering kali dikenal dengan Log Insiden. Berikut ini terdapat peningkatan keamanan SPBE dan kealaikan yang mungkin terjadi sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 6.18**

Tabel 6.18 Peningkatan Keamanan SPBE

Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE
<i>Configuration Management</i>	<i>Configuration management</i> dibutuhkan untuk mencatat setiap aset TIK yang terhubung dengan internet. Sehingga lebih mudah dalam pendataan aset dan IP yang digunakan	Selalu aktif dilaksanakan
Update <i>Patch</i> server secara berkala	Proses pembaharuan <i>patch</i> untuk memastikan mendapatkan fitur dan kondisi terbaru dari server	Harus meminta permit dulu untuk melaksanakan update patch
Memperbaharui lisensi perangkat keras dan lunak berkala	Proses pembaharuan lisensi perangkat untuk mendapatkan fitur terbaru	Sudah dilaksanakan
Implementasi DRC	DRC digunakan sebagai cadangan server untuk meminimalisir <i>downtime</i> jika terjadi insiden	Sudah dilaksanakan
Penerapan Proses Enkripsi dan Dekripsi	Proses enkripsi dan dekripsi untuk memastikan data atau password tetap aman ketika melakukan komunikasi	Sudah dilaksanakan

Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE
Menerapkan metode Verifikasi Data	Tahapan verifikasi untuk memastikan data yang masuk merupakan data yang sudah sesuai	Sudah dilaksanakan
Implementasi tanda tangan digital	Untuk mempermudah proses layanan elektronik dan mencegah terjadinya penggunaan tanda tangan tanpa izin	Sudah TTE
Pemanfaatan CCTV di ruang publik	Memantau lokasi lokasi publik yang dirasa berpotensi terjadi insiden atau pada akses akses utama	Sudah ada pada ruang publik dan titik kerawanan
Peningkatan kompetensi SDM dalam bidang Keamanan Informasi	Peningkatan kompetensi SDM untuk memastikan personil terkait tetap <i>update</i> dengan kondisi terkini	Dilaksanakan pada bulan maret 2021 untuk training keamanan informasi
Peremajaan Perangkat TIK	Untuk mengurangi risiko terjadinya kerusakan perangkat, terutama pada perangkat yang sudah berusia lebih dari 5 tahun.	Bertahap dilaksanakan

Berdasarkan Standar SNI ISO-IEC 27001: 2013 pada klausul 10 (sepuluh) terkait Tindak Lanjut untuk proses tindak lanjut yang berkaitan dengan ketidaksesuaian tingkat penanganan insiden, dimana kesiapan penanganan dinilai berdasarkan tiga level, tinggi sedang dan rendah. Tindak lanjut adalah tindakan korektif untuk memastikan perbaikan pada temuan sudah dilaksanakan atau tidak. Dalam konsep kerangka

kerja evaluasi (PDCA), tahapan tindak lanjut merupakan tahapan akhir sebelum nantinya kembali pada siklus pertama yaitu perencanaan. Dalam pembahasan terkait Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif yang didapatkan beberapa tindakan yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan tindakan terhadap ketidaksesuaian dengan mengambil tindakan untuk mengendalikan dan mengoreksi terjadinya ketidaksesuaian serta menangani konsekuensi yang terjadi.
- b. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan/mengeliminasi penyebab ketidaksesuaian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian yang terulang kembali dan di tempat lain dengan melakukan Reviu ketidaksesuaian, Menentukan penyebab ketidaksesuaian, dan Menentukan ketidaksesuaian yang serupa atau potensi terjadinya kembali.
- c. Melaksanakan tindakan pencegahan dalam bentuk apapun yang diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian.
- d. Mereviu efektivitas tindakan korektif apapun yang diambil.
- e. Membuat perubahan pada Sistem Manajemen Keamanan Informasi apabila diperlukan.

Sedangkan dalam perbaikan berkelanjutan bertujuan sebagai tindakan yang dilakukan oleh Instansi untuk selalu melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian, kecukupan, dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap penerapan SPBE dapat melalui *penetration testing* dan *vulnerability assessment* pada data dan informasi, aplikasi dan infrastruktur yang ada pada lingkup Pemerintahan Kota Madiun yang bertujuan untuk

mengurangi risiko terjadinya peretasan dan kehilangan data. Penanganan insiden Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (3) huruf d dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. Mengidentifikasi sumber serangan keamanan.
- b. Menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya.
- c. Memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi.
- d. Mendokumentasi bukti insiden yang terjadi.
- e. Memitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE.

Insiden yang terjadi dicatat hingga pada tahap kematangan penanganan insiden Keamanan SPBE dan tanggal kegiatan.

Tabel 6.19 Rekomendasi penanganan insiden Keamanan SPBE

Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Penangan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Ketengangan Insiden Keamanan
Terjadinya serangan pada server	Berisikan pedoman jika terjadi serangan pada server, seperti misalnya <i>malware, hacker</i> dan lainnya	Sedang (tergantung pada kesiapan Pemerintah Kota Madiun)	Sesuai terjadinya <i>insiden</i>	Jarang terjadi namun tergolong <i>critical insiden</i>
Penanganan terjadinya pemadaman	Berisikan pedoman jika terjadi pemadaman	Tinggi (tergantung pada kesiapan)	Sesuai terjadinya <i>insiden</i>	Biasanya ada surat dan selalu <i>prepare</i>

Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Penangan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Ketengangan Insiden Keamanan
	listrik	Pemerintah Pemerintah Kota Madiun)		
Penanganan kegagalan UPS	Berisikan pedoman jika terjadi kegagalan UPS	Tinggi (tergantung pada kesiapan Pemerintah Kota Madiun)	Sesuai terjadinya <i>insiden</i>	Jumlah UPS ada 3 dan <i>paralel</i>
Penanganan kerusakan infrastruktur	Berisikan pedoman jika terjadi kerusakan infrastruktur	Tinggi (tergantung pada kesiapan Pemerintah Kota Madiun)	Sesuai terjadinya <i>insiden</i>	Rusak langsung ganti
Penanganan Insiden dan Ketidaksesuaian	Berisikan pedoman jika terjadi insiden dan ketidaksesuaian	Tinggi (tergantung pada kesiapan Pemerintah Kota Madiun)	Sesuai terjadinya <i>insiden</i>	Sudah dilakukan penanganan berdasarkan dengan prosedur <i>insiden</i>
Penanganan Kehilangan Aset atau Data	Berisikan pedoman jika terjadi kehilangan aset atau data	Rendah (tergantung pada kesiapan Pemerintah Kota Madiun)	Sesuai terjadinya <i>insiden</i>	Masih belum mengalami dan belum ada acuan serta ukuran

Berdasarkan pada Tabel 6.19, maka dengan adanya standar keamanan yang sudah dibuat dan ditetapkan, maka diharapkan setiap pelaksana keamanan mematuhi dan menggunakan standar tersebut sebagai pedoman pelaksanaan terlebih dalam hal penanganan insiden. Setiap terjadi insiden, perlu adanya pencatatan dalam bentuk catatan aktivitas sistem, sehingga terdapat pencatatan atau dokumentasi terkait dengan insiden yang terjadi. Berdasarkan ketentuan format Surat Edaran, setiap insiden yang terjadi perlu dicatat sehingga terdapat dokumentasi insiden apa saja yang pernah terjadi dan bagaimana penanganan yang dilakukan.

BAB VII

ARSITEKTUR TATA KELOLA, MANAJEMEN SPBE DAN PENYELENGGARAAN SPBE

7.1 Pendahuluan

Pada Subtansi ini akan menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan buku 7 terkait Tata Kelola dan Manajemen SPBE dan Penyelenggara SPBE. Selain itu akan dibahas juga terkait hasil penilaian dari Evaluasi SPBE 2022 Pemerintah Kota Madiun yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dimana pada pelaksanaan evaluasi SPBE ini memuat penilaian Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE dan Domain Manajemen SPBE.

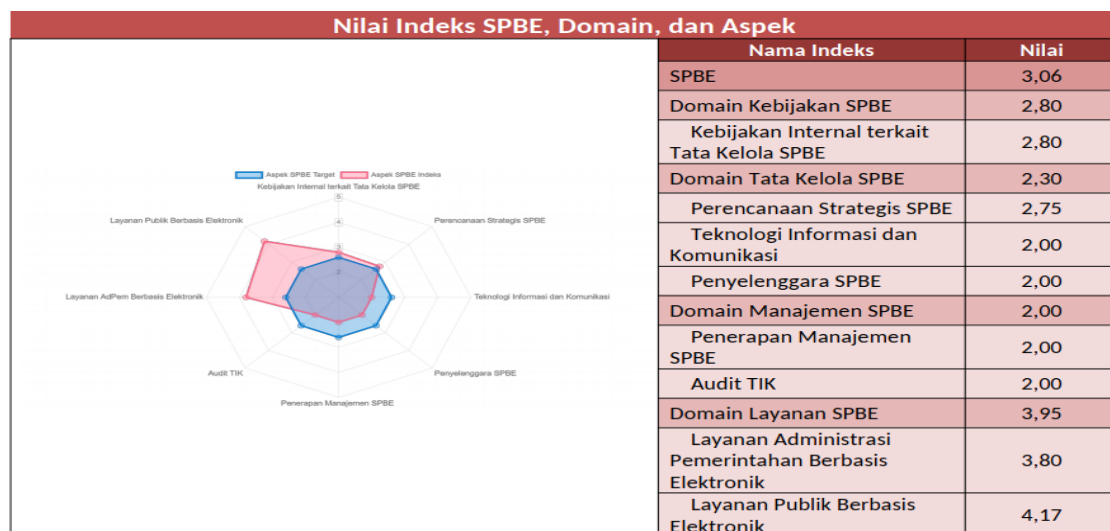
7.1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menyatakan bahwa Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Berdasarkan Rancangan Lampiran Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, diperlukan perbaikan Tata Kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di Pemerintah Daerah, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE. Adapun Inisiatif Strategi dari Kegiatan Tata Kelola SPBE adalah Pembangunan Arsitektur PSBE, Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE, Penguatan Kebijakan SPBE dan Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE.

7.1.2 Hasil Penilaian SPBE

Berikut adalah hasil penilaian dari Evaluasi SPBE 2021 Pemerintah Kota Madiun yang dilakukan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilihat pada **Gambar 7.1**.



Gambar 7.1 Hasil Penilaian SPBE Kota Madiun Tahun 2021

Hasil Penilaian SPBE tahun 2021 pada Pemerintah Kota Madiun untuk **Domain Kebijakan SPBE** menunjukkan nilai **2,80**. Indeks ini menunjukkan hasil dengan **predikat “Baik”**. Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun adalah dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Kebijakan Manajemen Data, Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Layanan Pusat Data, Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Kebijakan penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah, Kebijakan manajemen keamanan informasi, Kebijakan audit teknologi informasi dan komunikasi dan Kebijakan tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah. Terkait hal ini Pemerintah Kota Madiun belum memiliki kekuatan pada Aspek ini di ruang lingkup Internal Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun memiliki kelemahan untuk substansi Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE dimana Pengaturan untuk penyusunan arsitektur hanya sebagian domain saja sehingga hanya dapat mencapai level 2. Selain itu Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data, data dukung tidak menggambarkan adanya serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas. Berdasarkan hal ini maka hanya mencapai level 2.

Pada **Domain Tata Kelola SPBE** mempunyai nilai **2,30**. Dimana pada Domain tersebut terdapat **Aspek Perencanaan Strategi SPBE**

yang memiliki nilai **2,75** dengan **Predikat “Baik”**, **Aspek Teknologi Informasi** bernilai **2,00** dengan **Predikat “Cukup”**, serta **Aspek Penyelenggara SPBE** bernilai **2,00** dengan **Predikat “Cukup”**.

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun adalah dengan adanya Kebijakan Internal Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE, Tingkat Kematangan Peta. Pada Aspek Kebijakan Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun yaitu Inovasi Proses Bisnis SPBE yang ditandai dengan data dukung yaitu Keputusan Walikota Madiun Nomor: 180.45-401.021/253/2019 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun, Dokumen model Peta Proses Bisnis sudah sesuai standar dan telah didokumentasikan secara formal. Data dukung juga menunjukkan Pemerintah Kota Madiun telah melakukan perbaikan pada proses bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis yang menghasilkan perbaikan produk proses bisnis yaitu SOP yang baru dan beberapa dari bentuk manual sudah diimplementasikan menjadi berbasis elektronik. Proses rewiu dan evaluasi juga sudah dilakukan. Namun disisi lain pada Aspek Perencanaan Strategis, Pemerintah Kota Madiun memiliki kelemahan yaitu Arsitektur SPBE atau kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Dimana sebagian data dukung tidak relevan

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi Komunikasi SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Madiun belum memiliki kekuatan pada Aspek ini di ruang lingkup Internal Kota Madiun. Terdapat beberapa kelemahan pada Aspek Teknologi Informasi Komunikasi pada Pemerintah Kota Madiun yaitu substansi indikator tingkat kematangan Pusat Data dimana berdasarkan data dukung yang dilampirkan tidak ditemukan adanya dokumentasi tentang Pusat Data/Data Center fisik. data dukung yang dilampirkan adalah manajemen keamanan informasi

bukanlah penerapan layanan pusat data sehingga data dukung tidak relevan.

Selain itu kelemahan juga pada Substansi Indikator Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE dimana data dukung yang dilampirkan belum menggambarkan dokumen pelaksanaan penyusunan Aplikasi lengkap dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pemeliharaan. sesuai SOP. Kelemahan juga terdapat pada substansi Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dimana pada bukti dukung terlampir integrasi masih belum terlihat dilakukan secara menyeluruh (hanya aplikasi dengan inaproc).

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun adalah dengan adanya Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Kolaborasi Penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun belum memiliki kekuatan pada Aspek Penyelenggara SPBE di ruang lingkup Internal. Sedangkan kelemahan Aspek Penyelenggara SPBE dari Pemerintah Kota Madiun yaitu substansi indikator tingkat kematangan Tim Koordinasi SPBE dimana berdasarkan bukti dukung, Pemerintah Kota Madiun telah memiliki tim koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE, yang ditunjukkan pada dokumen **Keputusan Walikota No 180.45-401.021/129/2021 Tahun 2021** tentang Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Madiun dan **Keputusan Walikota Nomor 180.45-401.021/145/2021 Tahun 2021** tentang Tim Asesor Internal Pemerintah Kota Madiun. namun bukti dukung belum dapat menunjukkan adanya pemenuhan tugas dan fungsi yang tertera pada SK Tim Koordinasi secara menyeluruh. Selain itu pada substansi tingkat kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun dimana berdasarkan data dukung walaupun kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Pemkot Madiun telah dilaksanakan sesuai perencanaan namun Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE tidak dibentuk secara formal. Belum ada bukti dukung yang menunjukkan kolaborasi oleh tim yang dibentuk secara formal. Selain itu kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE tidak/belum dilaksanakan pada seluruh unit

kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah (kolaborasi dibentuk berdasarkan adanya kegiatan bersama).

Pada **Domain Manajemen SPBE** mendapatkan nilai **2,00** dengan predikat **“Cukup”**. Dalam domain manajemen SPBE memiliki **dua Aspek** yaitu **Aspek Penerapan Manajemen SPBE** yang memiliki nilai **2,00** dengan predikat **“Cukup”** dan **Aspek Audit TIK** yang mendapat nilai **2,00** dengan predikat **“Cukup”**.

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun adalah dengan adanya proses manajemen yaitu Pemenuhan aspek Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE. Pemerintah Kota Madiun belum memiliki kekuatan pada Aspek ini di ruang lingkup Internal Kota Madiun. Sedangkan terdapat kelemahan pada Pemerintah Kota Madiun masih belum melaksanakan penerapan manajemen SPBE seperti Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Manajemen Perubahan dimana tidak ditemukan adanya perencanaan matang yang dituangkan dalam RKPD atau Renstra terkait dengan manajemen selain itu beberapa bukti dukung yang disampaikan tidak relevan.

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek pelaksanaan Audit TIK yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun yaitu pelaksanaan audit keamanan SPBE. Pada Aspek pelaksanaan Audit TIK ini dapat terlihat adanya pelaksanaan audit keamanan SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkot Madiun. Pelaksanaan audit keamanan pada Pemkot Madiun dibuktikan dengan pelaksanaan internal audit untuk keamanan SPBE yang sesuai dengan sertifikat ISO 27001. Namun disisi lain terdapat kelemahan yaitu pelaksanaan audit infrastruktur dan pelaksanaan audit aplikasi SPBE dimana kegiatan audit ini belum dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti pada Renstra.

Nilai indikator yang harus ditingkatkan pada Pemerintah Kota Madiun dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE (Aspek 1)

- a. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur PSBE Instansi Pusat/Pemerintah (Indikator 1) dengan nilai tingkat kematangan **2**.
- b. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data (Indikator 3) dengan nilai tingkat kematangan **2**.

Perencanaan Strategis SPBE (Aspek 2)

- a. Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Indikator 11) dengan nilai tingkat kematangan **1**.
- b. Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Indikator 12) dengan nilai tingkat kematangan **2**.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (Aspek 3)

- a. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE (Indikator 15) dengan nilai tingkat kematangan **2**.
- b. Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data SPBE (indikator 16) dengan nilai tingkat kematangan **1**.
- c. Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah (Indikator 18) dengan nilai tingkat kematangan **2**.

Penyelenggara SPBE (Aspek 4)

- a. Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Indikator 19) dengan nilai tingkat kematangan **2**.
- b. Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE (indikator 20) dengan nilai kematangan **2**.

Penerapan Manajemen SPBE (Aspek 5)

- a. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko SPBE (Indikator 21) dengan nilai tingkat kematangan **1**.
- b. Tingkat Penerapan Manajemen Data (Indikator 23) dengan nilai tingkat kematangan **2**.
- c. Tingkat Penerapan Manajemen Aset TIK (Indikator 24) dengan nilai tingkat kematangan **2**.
- d. Tingkat Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Indikator 25) dengan nilai tingkat kematangan **2**.

- e. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan (Indikator 26) dengan nilai tingkat kematangan **1**.
- f. Tingkat Penerapan Manajemen Perubahan (Indikator 27) dengan nilai tingkat kematangan **2**.

Audit TIK (Aspek 6)

- a. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (Indikator 29) dengan nilai tingkat kematangan **1**.
- b. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (Indikator 30) dengan nilai tingkat kematangan **1**.

7.1.3 Ruang Lingkup

Dalam buku ini akan dibahas seputar tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit TIK, kebijakan SPBE dan penyelenggara SPBE. Pada tata kelola SPBE akan dibahas mengenai tata kelola SPBE, kebijakan internal SPBE, PD Mandiri TIK dan peran pengelolaan TIK serta audit TIK. Pada manajemen SPBE akan dibahas mengenai manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan. Pada pembahasan terakhir mengenai penyelenggara SPBE akan dibahas mengenai tim koordinasi SPBE, struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, serta pembahasan mengenai kompetensi SDM SPBE.

7.2 Metodologi dan Referensi Arsitektur SPBE

Subtansi 7.2 ini akan menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penyusunan buku tata kelola dan manajemen ini. Selain itu akan dibahas referensi hukum yang mendasari pengambilan usulan yang ada dalam buku ini.

7.2.1 Metodologi Penyusunan Tata Kelola SPBE

Metodologi penyusunan arsitektur tata kelola SPBE dimulai dari identifikasi hukum yang menjadi referensi penyusunan tata kelola SPBE hingga analisis usulan audit teknologi informasi di Kota Madiun.

7.2.1.1 Identifikasi Refrensi Hukum Tata Kelola SPBE

Tahap identifikasi referensi hukum Tata Kelola SPBE dilakukan untuk mengetahui dasar hukum yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan arsitektur Tata Kelola SPBE. Referensi hukum yang diambil mengacu pada Peraturan Presiden, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi, Peraturan Walikota, dan Surat Keputusan Walikota.

7.2.1.2 Identifikasi Kerangka Kerja Tata Kelola SPBE

Identifikasi kerangka kerja tata kelola SPBE merupakan tahapan penentuan *best practice* untuk penyusunan Tata Kelola SPBE. *Best practice* sendiri adalah suatu cara paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas, berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulangi yang telah terbukti dalam jangka waktu yang cukup lama.

7.2.1.3 Identifikasi Kondisi Eksisting

Pada tahap identifikasi kondisi eksisting dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi pelaksanaan tata kelola SPBE saat ini pada Kota Madiun. Hal ini dilakukan untuk kedepannya bisa dibandingkan dengan kondisi tata Kelola SPBE yang ideal.

7.2.1.4 Identifikasi Gap Tata Kelola SPBE

Tahap identifikasi Gap tata Kelola SPBE bertujuan untuk mengetahui kesenjangan kondisi tata kelola SPBE di Kota Madiun. Tahap ini dilakukan dengan membandingkan kondisi saat ini tata Kelola SPBE dengan kondisi tata Kelola SPBE yang ideal.

7.2.1.5 Analisis Usulan Kebijakan SPBE

Analisis urusan kebijakan SPBE merupakan tahap untuk memberikan saran atas perbaikan kebijakan SPBE pada Kota Madiun. Usulan ini didasarkan pada analisis GAP dari Kebijakan Tata Kelola SPBE pada Kota Madiun.

7.2.1.6 Analisis Usulan PD Mandiri TIK

Pada tahapan analisis usulan Perangkat Daerah Mandiri TIK dilakukan dengan memberikan saran mengenai Perangkat Daerah Mandiri TIK yang ada di Kota Madiun. Tahapan ini dilakukan untuk mencapai kondisi ideal dari Perangkat Daerah Mandiri TIK.

7.2.1.7 Identifikasi Kondisi Eksisting

Pada tahap identifikasi kondisi eksisting dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi saat ini dalam pelaksanaan manajemen SPBE pada Kota Madiun. Hal ini dilakukan untuk kedepannya dibandingkan dengan kondisi ideal manajemen SPBE.

7.2.1.8 Analisis Usulan Pembagian Peran terhadap Pengelolaan TI

Tahapan analisis usulan pembagian peran terhadap pengelolaan TI memiliki tujuan untuk membantu pembagian peran terhadap pengelolaan TI yang ideal. Tahap ini dilakukan dengan pemberian saran perbaikan terhadap pembagian peran pengelolaan TI.

7.2.1.9 Analisis Usulan Audit TIK

Analisis usulan audit TIK bertujuan untuk membantu pelaksanaan Audit TIK yang terdiri dari Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan. Tahapan ini dilakukan dengan pemberian saran perbaikan dan saran pelaksanaan Audit TIK pada Pemerintah Kota Madiun.

7.2.2 Metodologi Penyusunan Manajemen SPBE

Penyusunan Arsitektur Manajemen SPBE dimulai dari identifikasi hukum yang berkaitan dengan manajemen SPBE hingga analisis usulan terhadap manajemen SPBE di Kota Madiun.

7.2.2.1 Identifikasi Refrensi Hukum Manajemen SPBE

Tahap identifikasi referensi hukum manajemen SPBE dilakukan untuk mengetahui dasar hukum yang akan digunakan dalam penyusunan arsitektur manajemen SPBE. Referensi hukum yang diambil mengacu pada Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi.

7.2.2.2 Identifikasi Gap Manajemen SPBE

Tahap identifikasi gap manajemen SPBE bertujuan untuk mengetahui kesenjangan kondisi manajemen SPBE di Kota Madiun. Tahapan ini dilakukan dengan membandingkan kondisi manajemen SPBE saat ini dengan kondisi manajemen SPBE yang ideal.

7.2.2.3 Analisis Usulan Manajemen SPBE

Analisis usulan manajemen SPBE akan dilakukan pemberian usulan dan saran perbaikan terhadap manajemen SPBE di Kota Madiun. Usulan dan saran yang diberikan didasarkan pada hasil analisis gap manajemen SPBE di Kota Madiun.

7.2.3 Metodologi Penyusunan Penyelenggara SPBE

Tahapan penyusunan Arsitektur Penyelenggara SPBE dimulai dari identifikasi hukum yang berkaitan dengan penyelenggara SPBE sampai analisis usulan terhadap sumber daya manusia SPBE di Kota Madiun.

7.2.3.1 Identifikasi Referensi Hukum Penyelenggara SPBE

Tahapan untuk mengetahui dasar hukum yang akan digunakan dalam penyelenggara SPBE dilakukan identifikasi referensi hukum penyelenggara SPBE. Referensi hukum yang diambil mengacu pada Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi.

7.2.3.2 Identifikasi Kondisi Eksisting

Tahapan identifikasi kondisi eksisting dilakukan untuk pemeriksaan terhadap kondisi saat ini dalam penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun. Dalam hal ini dilakukan guna kedepannya dibandingkan dengan kondisi ideal manajemen SPBE.

7.2.3.3 Identifikasi Gap Penyelenggara SPBE

Tahapan identifikasi GAP penyelenggara SPBE bertujuan untuk mengetahui kesenjangan kondisi penyelenggara SPBE di Kota Madiun. Tahapan ini dilakukan dengan membandingkan kondisi penyelenggara SPBE saat ini dengan kondisi manajemen SPBE yang ideal.

7.2.3.4 Analisis Usulan Penyelenggara SPBE

Tahapan analisis usulan penyelenggara SPBE dilakukan untuk memberikan saran perbaikan atas penyelenggara SPBE yang ada di Kota Madiun. Usulan ini berdasarkan analisis Gap dari penyelenggara SPBE di Kota Madiun.

7.2.3.5 Analisis Usulan Sumber Daya Manusia SPBE

Tahapan analisis usulan sumber daya manusia SPBE dilakukan untuk pemberian saran mengenai sumber daya manusia SPBE yang ada di Kota Madiun. Pada tahap ini dilakukan untuk mencapai kondisi ideal dari sumber daya manusia SPBE pada Pemerintah Kota Madiun.

7.3 Arsitektur Tatakelola SPBE

Pada Subtansi 7.3 akan dijelaskan mengenai kondisi eksisting hingga usulan dari arsitektur Tata Kelola SPBE pada Pemerintah Kota Madiun. Usulan yang akan dibahas adalah usulan mengenai kebijakan SPBE, Perangkat Daerah Mandiri TIK, pembagian peran terhadap pengelolaan TIK, dan audit TIK.

7.3.1. Identifikasi Referensi Hukum Tata Kelola SPBE

Penyusunan Tata Kelola SPBE Pemerintah Kota Madiun dibuat dengan mengacu dan memenuhi peraturan-peraturan terkini pemerintah yang berkaitan dengan Tata Kelola meliputi:

1. **Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007** tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. **Peraturan Presiden Tahun 2022** tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
5. **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022** tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
6. **Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 Tentang** Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

7.3.2. Identifikasi Kerangka Kerja Tata Kelola SPBE

Kerangka kerja (*framework*) yang digunakan dalam penyusunan Tata Kelola SPBE mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa tata kelola bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Berikut merupakan detail informasi terkait unsur-unsur SPBE dan penerapannya pada kondisi saat ini di Pemerintah Kota Madiun.

7.3.3. Identifikasi Kondisi Eksisting

Bagian ini menjelaskan terkait kondisi saat ini dari tata kelola SPBE di Pemerintahan Kota Madiun. Berdasarkan Hasil Penilaian SPBE tahun 2021 untuk Kota Madiun untuk **Domain Kebijakan SPBE** menunjukkan nilai **2,80**. Indeks ini menunjukkan hasil dengan **predikat “Baik”**. Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh

Pemerintah Kota Madiun adalah dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Kebijakan Manajemen Data, Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Layanan Pusat Data, Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Kebijakan penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah, Kebijakan manajemen keamanan informasi, Kebijakan audit teknologi informasi dan komunikasi dan Kebijakan tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah. Hasil Penilaian indikator dalam aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE yang perlu ditingkatkan karena memiliki nilai kurang dari 3 adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur PSBE Instansi Pusat/Pemerintah (Indikator 1) dengan nilai tingkat kematangan **2**.
- b. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data (Indikator 3) dengan nilai tingkat kematangan **2**.

Pada **Domain Tata Kelola SPBE** mempunyai nilai **2,30**. Dimana pada Domain tersebut terdapat **Aspek Perencanaan Strategi SPBE** yang memiliki nilai **2,75** dengan **Predikat “Baik”**, **Aspek Teknologi Informasi** bernilai **2,00** dengan **Predikat “Cukup”**, serta **Aspek Penyelenggara SPBE** bernilai **2,00** dengan **Predikat “Cukup”**. Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun adalah dengan adanya Kebijakan Internal Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE dan Tingkat Kematangan Peta. Berikut Hasil Penilaian indikator pada Domain Tata Kelola SPBE yang perlu ditingkatkan karena memiliki nilai kurang dari 3 adalah sebagai berikut:

- **Perencanaan Strategis SPBE (Aspek 2)**
 - a. Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Indikator 11) dengan nilai tingkat kematangan **1**.
 - b. Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Indikator 12) dengan nilai tingkat kematangan **2**.
- **Teknologi Informasi dan Komunikasi (Aspek 3)**
 - a. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE (Indikator 15) dengan nilai tingkat kematangan **2**.

- b. Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data SPBE (indikator 16) dengan nilai tingkat kematangan **1**.
- c. Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah (Indikator 18) dengan nilai tingkat kematangan **2**.

Sedangkan pada **Domain Manajemen SPBE** mendapatkan nilai **2,00** dengan predikat **“Cukup”**. Dalam domain manajemen SPBE memiliki **dua Aspek** yaitu **Aspek Penerapan Manajemen SPBE** yang memiliki nilai **2,00** dengan predikat **“Cukup”** dan **Aspek Audit TIK** yang mendapat nilai **2,00** dengan predikat **“Cukup”**. Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun adalah dengan adanya proses manajemen yaitu Pemenuhan aspek Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE. Sedangkan untuk Aspek Audit TIK secara keseluruhan yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun yaitu pelaksanaan audit keamanan SPBE dibuktikan dengan pelaksanaan internal audit untuk keamanan SPBE yang sesuai dengan sertifikat ISO 27001.

Berikut Hasil Penilaian indikator pada Domain Manajemen SPBE yang perlu ditingkatkan karena memiliki nilai kurang dari 3 adalah sebagai berikut:

- **Penerapan Manajemen SPBE (Aspek 5)**
 - a. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko SPBE (Indikator 21) dengan nilai tingkat kematangan **1**.
 - b. Tingkat Penerapan Manajemen Data (Indikator 23) dengan nilai tingkat kematangan **2**.
 - c. Tingkat Penerapan Manajemen Aset TIK (Indikator 24) dengan nilai tingkat kematangan **2**.
 - d. Tingkat Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Indikator 25) dengan nilai tingkat kematangan **2**.
 - e. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan (Indikator 26) dengan nilai tingkat kematangan **1**.
 - f. Tingkat Penerapan Manajemen Perubahan (Indikator 27) dengan nilai tingkat kematangan **2**.

- **Audit TIK (Aspek 6)**

a. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (Indikator 29) dengan nilai tingkat kematangan **1**.

b. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (Indikator 30) dengan nilai tingkat kematangan **1**.

Kondisi eksisting Tata Kelola SPBE secara jelas dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kota Madiun pada Bab 10**. Penjelasan secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 7.1** berikut.

Tabel 7.1 Hasil Penilaian Indikator dan Kebijakan Internal Eksisting

No	Indikator	Kebijakan Internal Eksisting
1	Arsitektur SPBE	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kedua Pasal 6
2	Peta Rencana SPBE	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Ketiga Pasal 7
3	Manajemen Data	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Keenam Pasal 10 - 12
4	Pembangunan Aplikasi SPBE	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kedelapan Pasal 23 dan 24.
5	Layanan Pusat Data	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Paragraf 2 Pasal 14 - 17
6	Layanan Jaringan Intra	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Paragraf 3 Pasal 18 - 21

No	Indikator	Kebijakan Internal Eksisting
7	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Paragraf 4 Pasal 22
8	Manajemen Keamanan Informasi	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kesembilan Pasal 25 dan 26.
9	Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bab VI
10	Tim Koordinasi SPBE	Keputusan Walikota Madiun Nomor : 180.45-401.021/129/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

7.3.4 Identifikasi GAP Tata Kelola SPBE

Bagian ini akan menjelaskan perbandingan kondisi tata kelola SPBE Pemerintah Kota Madiun saat ini dengan kondisi ideal yang seharusnya dijalankan pada tata kelola SPBE. Kesimpulan yang diambil dari dua kondisi yaitu hasil analisis *gap* dari kondisi tata kelola SPBE. Untuk hasil perbandingan tersebut dapat dilihat secara rinci pada **Tabel 7.2** berikut.

Tabel 7.2 Identifikasi Gap Tata Kelola SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Kebijakan SPBE			
Arsitektur SPBE	Sudah memiliki kebijakan internal yang mengatur tentang Arsitektur SPBE, yaitu Peraturan	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap	Dalam Perbup terkait Arsitektur SPBE Kota Madiun telah dituangkan 6 komponen arsitektur SPBE,

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	<p>Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kedua Pasal 6</p>	<p>pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE) serta telah terintegrasi antar pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan internal telah direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.</p>	<p>yaitu Arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE, namun dalam penyusunan arsitektur SPBE hanya sebagian domain saja sehingga hanya dapat mencapai level 2.</p>
<p>Peta Rencana SPBE</p>	<p>Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Peta Rencana SPBE, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Ketiga Pasal 7</p>	<p>Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan</p>	<p>Dalam Peta Rencana SPBE Kota Madiun belum menggambarkan secara detail Peta Rencana SPBE yang mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap yaitu peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE,</p>

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
		SPBE, dan Audit TIK) dan keselarasan dengan peta rencana SPBE nasional.	Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK.
Manajemen Data	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Manajemen Data, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Keenam Pasal 10 - 12	Kebijakan internal manajemen data di pemerintah daerah untuk mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.	Manajemen Data Pemerintah Kota Madiun tidak menggambarkan adanya serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas data.
Pembangunan Aplikasi SPBE	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Pembangunan Aplikasi SPBE, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kedelapan Pasal	Kebijakan internal telah mengatur terkait proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Pemerintah Daerah, serta keterpaduan dan pengendalian	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE belum menggambarkan dokumen pelaksanaan penyusunan Aplikasi lengkap dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pemeliharaan yang sesuai dengan SOP

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	23 dan 24.	Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Pemerintah Daerah	
Layanan Pusat Data	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Layanan Pusat Data, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Paragraf 2 Pasal 14 - 17	Kebijakan internal telah mengatur terkait Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/ perangkat daerah di Pemerintah Daerah dan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional.	Belum memiliki pusat data seperti Satu Data Kota Madiun yang dapat digunakan sebagai pusat data yang dapat dilihat secara publik
Layanan Jaringan Intra	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Layanan Jaringan Intra, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan	Kebijakan internal telah mengatur terkait Layanan Jaringan Intra Pemerintah untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah dan interkoneksi Layanan Jaringan	Pemerintah Kota Madiun telah mengimplementasi kan jaringan intra pemerintah yang disediakan terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	Pemerintah Kota Madiun Paragraf 3 Pasal 18 - 21	Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Pemerintah Daerah lain.	
Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Paragraf 4 Pasal 22	Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah dan keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.	Integrasi terhadap aplikasi masih belum terlihat dilakukan secara menyeluruh
Manajemen Keamanan Informasi	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Manajemen Keamanan Informasi, yaitu Peraturan Walikota Madiun	Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan	Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi pada Pemerintah Kota Madiun belum mengatur seluruh cakupan

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kesembilan Pasal 25 dan 26.	Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi) serta penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah.	Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi) serta penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah.
Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Sudah ada kebijakan internal yang mengatur tentang Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi, yaitu Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bab VI	Kebijakan internal telah mengatur terkait pelaksanaan Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).	Pelaksanaan audit keamanan informasi pada Pemerintah Kota Madiun telah mengacu pada ISO 27001.
Tim Koordinasi	Sudah ada kebijakan internal	Kebijakan internal terkait Tim	Belum dijelaskan secara rinci terkait

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
SPBE	yang mengatur tentang Tim Koordinasi SPBE, yaitu Keputusan Walikota Madiun Nomor : 180.45-401.021/129/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan Keputusan Walikota Nomor 180.45-401.021/145/2021 Tahun 2021 tentang Tim Asesor Internal Pemerintah Kota Madiun	Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal telah direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Madiun.
Pemantauan dan Evaluasi			
Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Mayoritas PD belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE. Hanya 6 dari 35 PD yang menyebutkan telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE	Seluruh perangkat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE secara berkala dan mendokumentasikannya dalam bentuk laporan.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE belum terdokumentasikan dengan baik, dan juga belum ada pelaksanaan Audit yang dilaksanakan dengan perencanaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
			pedoman Audit SPBE.
Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi SPBE	Mayoritas PD belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE. Hanya 6 dari 35 PD yang menyebutkan telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE	Seluruh perangkat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE secara berkala dan mendokumentasikannya dalam bentuk laporan.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE belum terdokumentasikan dengan baik, dan juga belum ada pelaksanaan Audit yang dilaksanakan dengan perencanaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan pedoman Audit SPBE.
Audit TIK			
Audit Infrastruktur SPBE	Belum ada PD yang telah melaksanakan audit infrastruktur SPBE.	Audit Infrastruktur dilaksanakan dengan perencanaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan pedoman Audit Infrastruktur SPBE.	Belum ada PD yang telah melaksanakan audit keamanan SPBE.
Audit Aplikasi SPBE	Hanya 2 dari 35 PD yang telah melaksanakan audit aplikasi SPBE, namun belum sesuai dengan Pedoman Audit Aplikasi SPBE	Audit Aplikasi dilaksanakan dengan perencanaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan pedoman Audit Aplikasi SPBE.	Dalam pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE belum dilaksanakan dengan perencanaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan pedoman Audit

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
			Aplikasi SPBE dan belum terdokumentasikan dengan baik.
Audit Keamanan SPBE	Belum ada PD yang telah melaksanakan audit keamanan SPBE.	Audit Keamanan dilaksanakan dengan perencanaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan pedoman Audit Keamanan serta oleh dilakukan SPBE.	Belum ada PD yang telah melaksanakan audit keamanan SPBE.

7.3.5 Analisis Usulan Kebijakan SPBE

Dari hasil analisis gap kebijakan SPBE yang telah dilakukan, maka didapatkan kesenjangan dari kondisi saat ini terhadap kondisi ideal. Untuk itu diberikan analisis usulan untuk mencapai kondisi yang ideal. Usulan terhadap kebijakan SPBE diambil dari **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020**. Usulan yang diberikan terdiri dari 8 aspek yang ada pada PERMENPAN Nomor 59 Tahun 2020. Dengan usulan kebijakan SPBE ini diharapkan mampu meningkatkan Penilaian SPBE Kota Madiun pada **Domain Kebijakan SPBE** yang mempunyai nilai **2,80** dan **Domain Tata Kelola SPBE** yang mempunyai nilai **2,30** menjadi lebih tinggi. Usulan kebijakan telah dijabarkan secara lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 7.3**.

Tabel 7.3 Hasil Analisis Usulan Kebijakan SPBE

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun
Aspek 1: Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE					
1	Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 1 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai	Saran perbaikan yang dapat dilakukan adalah melakukan reuview terkait kebijakan internal Arsitektur SPBE	Segera melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pada Perwal yang telah dimiliki	

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun
		<p>level nilai kematangan 2. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kedua Pasal 6, namun Pemerintah Kota Madiun masih memiliki kelemahan untuk substansi Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE dimana Peraturan untuk penyusunan arsitektur hanya sebagian domain saja sehingga hanya dapat mencapai level 2.</p>	<p>yaitu pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Kemudian kebijakan internal direviu dan dievaluasi secara periodik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.</p>	<p>atau melakukan reviu pada Perwal yang ada saat ini</p>	<p>2023</p>
<p>2</p>	<p>Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah</p>	<p>Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 2 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 3. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE yang termuat</p>	<p>Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini adalah dengan melakukan reviu atau perubahan terhadap Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang telah mengatur</p>	<p>Melakukan review terhadap perwal/perbub yang sudah berlaku sehingga dapat mengakomodir perubahan yang diperlukan. Misalnya memenuhi semua domain arsitektur SPBE</p>	<p>2023</p>

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun
		<p>dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Ketiga Pasal 7, namun Pemerintah Kota Madiun memiliki kelemahan untuk substansi Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE, dimana belum menggambarkan Peta Rencana SPBE yang mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap yaitu peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK.</p>	<p>seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK). Selanjutnya kebijakan internal tersebut juga mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional. Kemudian kebijakan internal direviu dan dievaluasi secara periodik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.</p>		
3	Manajemen Data	<p>Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 3 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 2. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki</p>	<p>Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini adalah dengan melakukan reviu atau perubahan terhadap Kebijakan Internal Manajemen Data</p>	<p>Melakukan review terhadap Perbub/Perwal yang telah menerapkan serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis</p>	

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun
		kebijakan internal terkait Manajemen Data yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Keenam Pasal 10 - 12 , namun tingkat kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data Pemerintah Kota Madiun tidak menggambarkan adanya serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas data.	Pemerintah Daerah yang telah menerapkan serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas data. Selanjutnya Pemerintah Kota Madiun dapat menerapkan inovasi Satu Data Kota Madiun agar seluruh data dapat saling terintegrasi ke dalam sebuah platform	Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas data, serta melaksanakan inovasi Satu Data Kota Madiun.	2023
4	Pembangunan Aplikasi	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 4 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 3 . Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun	Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini adalah dengan melakukan reviu atau perubahan terhadap Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi Pemerintah Daerah secara lengkap mulai dari perencanaan,	Melakukan reviu terhadap perwal/perbub yang sudah berlaku sehingga dapat mengkomodir perubahan yang diperlukan. Misalnya memenuhi pelaksanaan penyusunan Aplikasi lengkap dari perencanaan, analisis, desain,	2023

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun
		<p>2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kedelapan Pasal 23 dan 24, namun tingkat kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE belum menggambarkan dokumen pelaksanaan penyusunan Aplikasi lengkap dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pemeliharaan yang sesuai dengan SOP</p>	<p>analisis, desain, implementasi, pemeliharaan yang sesuai dengan SOP.</p>	<p>implementasi, pemeliharaan yang sesuai dengan SOP.</p>	
5	Layanan Pusat Data	<p>Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 5 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 3. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Paragraf 2 Pasal 14 - 17, namun data dukung yang dilampirkan tidak</p>	<p>Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini untuk mencapai tingkat kematangan di atas 3, yaitu hal yang harus dilakukan adalah melakukan reviu kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/ perangkat daerah di Pemerintah Daerah dan interkoneksi</p>	<p>Melakukan reviu terhadap perbub/perwal yang sudah berlaku sehingga dapat mengakomodir perubahan yang diperlukan. Misalnya melakukan interkoneksi layanan pusat data pemerintah daerah dengan layanan pusat data nasional</p>	2023

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun
		<p>ditemukan adanya dokumentasi tentang Pusat Data/Data Center fisik. data dukung yang dilampirkan adalah manajemen keamanan informasi, bukanlah penerapan layanan pusat data sehingga data dukung tidak relevan.</p>	<p>Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional dan pelaksanaan evaluasi secara periodik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.</p>		
6	Layanan Jaringan Intra Pemerintah	<p>Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 6 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 3. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Paragraf 3 Pasal 18 - 21. Pemerintah Kota Madiun telah mengimplementasikan</p>	<p>Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini untuk mencapai tingkat kematangan di atas 3, maka kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus direviu dan dievaluasi secara periodik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru sehingga didalam kebijakan baru tersebut memuat Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat</p>	<p>Melakukan reviu terhadap perbub/perwal yang sudah berlaku sehingga dapat mengakomodir perubahan yang diperlukan. Misalnya melakukan keterhubungan dan akses jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya</p>	2023

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun
		<p>jaringan intra pemerintah yang disediakan terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika.</p>	<p>daerah di Pemerintah Daerah dan interkoneksi Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Pemerintah Daerah lain.</p>		
7	<p>Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</p>	<p>Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 7 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 3. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Paragraf 4 Pasal 22. Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dimana pada</p>	<p>Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini untuk mencapai tingkat kematangan di atas 3, yaitu harus dilakukan integrasi secara menyeluruh dan dilakukan revaluasi dan evaluasi secara periodik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru</p>	<p>Melakukan revaluasi terhadap perbub/perwal yang sudah berlaku sehingga dapat mengakomodir perubahan yang diperlukan. Misalnya melakukan keterhubungan antara sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah dengan sistem penghubung layanan pemerintah, mengintegrasikan secara menyeluruh aplikasi yang saling berkaitan.</p>	2023

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun
		bukti dukung terlampir integrasi masih belum terlihat dilakukan secara menyeluruh (hanya aplikasi dengan inaproc)			
8	Manajemen Keamanan Informasi	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 8 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 3. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kesembilan Pasal 25 dan 26. Pemerintah Kota Madiun belum melaksanakan penerapan manajemen keamanan informasi, dimana tidak ditemukan adanya perencanaan matang yang dituangkan dalam RKPD atau Renstra terkait dengan manajemen selain itu	Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini untuk mencapai tingkat kematangan di atas 3 yaitu harus melakukan revisi atau perbaikan kebijakan internal dan melakukan perencanaan yang matang yang dituangkan dalam RKPD atau Renstra terkait dengan manajemen sehingga dapat memenuhi semua cakupan manajemen keamanan informasi	Mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi) serta penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah. Selanjutnya melakukan revisi atau perbaikan kebijakan internal dan melakukan perencanaan yang matang yang dituangkan dalam RKPD	2023

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun
		<p>beberapa bukti dukung yang disampaikan tidak relevan</p>		<p>atau Renstra.</p>	
<p>9</p>	<p>Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi</p>	<p>Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 8 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 9. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bab VI. Pelaksanaan audit keamanan pada Pemkot Madiun dibuktikan dengan pelaksanaan internal audit untuk keamanan SPBE yang sesuai dengan sertifikat ISO 27001, namun pelaksanaan audit aplikasi SPBE dimana kegiatan audit ini belum dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti pada Renstra.</p>	<p>Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini untuk mencapai tingkat kematangan di atas 3, yaitu dengan mendokumentasi kan pelaksanaan kegiatan audit aplikasi SPBE secara rinci ke dalam dokumen perencanaan seperti pada Renstra</p>	<p>Mendokumentasi kan pelaksanaan kegiatan audit aplikasi SPBE secara rinci ke dalam dokumen perencanaan seperti pada Renstra</p>	<p>2023</p>

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun
10	Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 10 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 3. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki tim koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE, yang ditunjukkan pada dokumen: 1. Keputusan Walikota No 180.45-401.021/129/2021 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Madiun 2. Keputusan Walikota Nomor 180.45 401.021/145/2021 Tahun 2021 tentang Tim Asesor Internal Pemerintah Kota Madiun. Dari hasil review didapatkan bahwa bukti dukung belum dapat menunjukkan adanya pemenuhan tugas dan fungsi yang tertera pada SK Tim Koordinasi secara menyeluruh. Selain itu berdasarkan data dukung walaupun kolaborasi antar unit kerja/perangkat	Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini untuk mencapai tingkat kematangan di atas 3, yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap kebijakan terkait untuk menambahkan informasi terkait tugas dan fungsi secara menyeluruh. Selain itu juga diperlukan peninjauan kembali terkait Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE yang dipaparkan dengan jelas dan dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah	Melakukan perbaikan terhadap kebijakan terkait untuk menambahkan informasi terkait tugas dan fungsi secara menyeluruh. Selain itu juga diperlukan peninjauan kembali terkait Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE yang dipaparkan dengan jelas dan dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah	2023

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun
		daerah di Pemkot Madiun telah dilaksanakan sesuai perencanaan namun Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE tidak dibentuk secara formal. Belum ada bukti dukung yang menunjukkan kolaborasi oleh tim yang dibentuk secara formal. Selain itu kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE tidak/belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah (kolaborasi dibentuk berdasarkan adanya kegiatan bersama).			

7.3.6 Analisis Usulan Pembagian Peran terhadap Pengelolaan TI

Pada bagian ini akan menjelaskan hasil analisis usulan pembagian peran terhadap pengelolaan TI. Usulan ini didapatkan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 dan Peta Okupasi TIK. Dimana pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 menyatakan bahwa kompetensi teknis SPBE yang diharapkan dimiliki oleh pegawai ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif. Selanjutnya, kompetensi tersebut akan

dipetakan dengan SI/ TI yang ada pada Peta Okupasi TIK. Berdasarkan tanggung jawab dalam pengelolaan TI, terdapat 4 peran yang direkomendasikan, yaitu **pembangun, operator, pemelihara,** dan **pengembang**. Detail masing-masing peran adalah sebagai berikut:

- **Perangkat Daerah Pembangun Sistem:** Merancang dan membangun sistem baru
- **Perangkat Daerah Operator dan admin sistem:** Mengoperasikan sistem yang umumnya memiliki kewenangan untuk melakukan konfigurasi sistem, menambah pengguna, dan menetapkan peran pengguna sistem
- **Perangkat Daerah Pemelihara atau perawat sistem:** Melakukan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan sistem
- **Perangkat Daerah pengembang Sistem:** Mengembangkan sistem yang telah dibangun sebelumnya

Berikut adalah hasil usulan pembagian peran terhadap pengelolaan TI yang dapat dilihat pada **Tabel 7.4**

Tabel 7.4 Hasil Pembagian Usulan Peran Pengelola TI

Jenis SI/TI	Pembuat Sistem	Operator Sistem	Pemeliharaan Sistem	Pengembang Sistem
Perangkat keras dan Piranti Digital	Setiap PD	Setiap PD	Setiap PD	Setiap PD
Perangkat lunak dan pemrograman	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika	Setiap PD	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika
Jaringan LAN (internal PD di belakang router)	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika	Setiap PD (Dengan bantuan pihak ketiga)	Setiap PD (Dengan bantuan pihak ketiga)	PD (Wajib Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika)
Server	PD Mandiri TIK dan Dinas	PD Mandiri TIK dan Dinas	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan

Jenis SI/TI	Pembuat Sistem	Operator Sistem	Pemeliharaan Sistem	Pengembang Sistem
	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	dan Informatika	Informatika

Aspek Perangkat Keras dan Piranti Digital berkaitan dengan kemampuan dalam merancang, mendesain, merakit, mengoperasikan, mengendalikan, dan memelihara perangkat keras komputer maupun piranti digital lainnya (*hardware*). Pengelolaan perangkat keras dilakukan oleh semua PD karena setiap PD harus bisa mengoperasikan hingga memelihara perangkat TI yang dimiliki oleh PD tersebut.

Aspek Pengembangan Perangkat Lunak dan Pemrograman berkaitan dengan kemampuan dalam merancang, mendesain, mengkonfigurasi, dan membuat perangkat lunak (*software*) maupun aplikasi yang dijalankan/dioperasikan dalam lingkungan komputer, piranti digital, maupun jaringan. Spektrum kemampuan ini berhubungan erat dengan metodologi atau *life cycle* pembuatan perangkat lunak, yaitu: perencanaan, perancangan, pemrograman, pengujian, perbaikan, penerapan, dan penilaian. Aspek ini dikelola oleh PD mandiri TIK dan Dinas Komunikasi dan Informatika karena PD mandiri TIK merupakan PD yang mampu melakukan pembuatan, pengelolaan, dan pengembangan aplikasi yang digunakan secara mandiri. Sedangkan untuk operator sistem dilakukan oleh PD yang menggunakan sistem tersebut.

Aspek Jaringan LAN berkaitan dengan kemampuan dalam merancang, membangun, mengoperasikan, dan mengawasi berbagai komponen teknis jaringan LAN untuk internal PD di belakang router. Aspek ini dikelola oleh Setiap PD dengan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan instalasi dan pemeliharaannya. Aspek ini diperlukan manakala Jaringan Intra pemerintah yang tersedia masih belum memadai kapasitas bandwidthnya, sehingga membutuhkan penambahan.

Aspek Server berkaitan dengan kemampuan dalam merancang, membangun, mengoperasikan, dan mengawasi server yang dimiliki. Aspek ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai

dengan tugas Bidang Penyelenggaraan e-Government yang mengelola infrastruktur dan teknologi informasi. Selain itu, PD Mandiri TIK yang memang sudah memiliki server dan wajib memiliki server sendiri karena ketentuan dari Kementerian pusat, dapat melakukan pengelolaannya secara mandiri atau dapat bekerjasama dengan Diskominfo ataupun pihak ketiga.

7.3.7 Analisis Usulan Audit TIK

Berdasarkan Hasil Penilaian SPBE tahun 2021 didapatkan bahwa **Aspek Audit TIK** yang mendapat nilai **2,00** dengan predikat **“Cukup”**. Secara keseluruhan penerapan pada Aspek pelaksanaan Audit TIK yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun yaitu pelaksanaan audit keamanan SPBE. Pada Aspek pelaksanaan Audit TIK ini dapat terlihat adanya pelaksanaan audit keamanan SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkot Madiun. Pelaksanaan audit keamanan pada Pemkot Madiun dibuktikan dengan pelaksanaan internal audit untuk keamanan SPBE yang sesuai dengan sertifikat ISO 27001. Namun disisi lain terdapat kelemahan yaitu pelaksanaan audit infrastruktur dan pelaksanaan audit aplikasi SPBE dimana kegiatan audit ini belum dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti pada Renstra.

Berdasarkan referensi hukum terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pelaksanaan audit TIK perlu dilakukan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Audit SPBE dapat dikelompokkan menjadi **Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur Pemerintah Daerah SPBE dan Audit Keamanan**. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 sebelum dilaksanakannya audit oleh pihak eksternal, maka sebelumnya dapat dilakukan audit oleh pihak internal yaitu auditor internal pemerintah daerah. Audit internal dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Inspektorat. Pelaksanaan audit internal dapat mengacu kepada peraturan audit eksternal yang akan dijelaskan di bawah ini.

7.3.7.1 Audit Infrastruktur SPBE

Berdasarkan Hasil Penilaian SPBE tahun 2021 didapatkan bahwa tingkat kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (Indikator 29) dengan nilai tingkat kematangan **1** dengan predikat “**kurang**” dikarenakan pelaksanaan audit infrastruktur belum dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti pada Renstra.

Audit Infrastruktur SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara 30 Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE mengacu kepada Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2021 Tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Audit Infrastruktur SPBE terdiri dari Audit Jaringan Intra Pemerintah dan Audit Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Ruang lingkup panduan teknis audit Jaringan Intra Pemerintah atau Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) **Perencanaan**

Perencanaan jaringan intra pemerintah mencakup kebutuhan bisnis, kebutuhan jaringan dan rancangan jaringan. Tahap perencanaan dapat mengacu kepada Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Nasional, dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

b) **Pengembangan**

Tahap pengembangan dapat mengacu kepada deskripsi dalam rancangan, selanjutnya dapat dilakukan oleh tim internal organisasi atau dari pihak ketiga.

c) **Pengoperasian**

Konfigurasi jaringan SPBE/sistem penghubung layanan pemerintah dapat dikustomisasi dan dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai. Uji coba terhadap jaringan intra pemerintah/sistem penghubung layanan pemerintah harus terdokumentasi dalam suatu rencana pengujian (test plan), rancangan pengujian (test design), prosedur pengujian (test

procedures) dan laporan pengujian (test report). jaringan intra pemerintah/sistem penghubung layanan pemerintah dilengkapi dengan dokumentasi baik untuk operator maupun administrator.

d) Pemeliharaan

Pemeliharaan harus didokumentasikan dalam suatu dokumen yang mencakup pemeliharaan jaringan/sistem penghubung layanan dan manajemen konfigurasi jaringan/sistem penghubung layanan.

Audit Infrastruktur SPBE dilakukan oleh LATIK SPBE berdasarkan permintaan IPPD atau penugasan badan. Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan mengikuti tata cara audit yang secara garis besar terbagi menjadi tiga kelompok tahapan, yaitu Tahap perencanaan (*pre-audit*); Tahap pelaksanaan lapangan (*on site audit*); dan Tahap analisa data dan pelaporan (*post audit*). Adapun ketiga kelompok tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Penyiapan Tim Audit

Audit Infrastruktur SPBE dilakukan oleh sebuah tim audit yang terdiri dari posisi-posisi berikut dengan uraian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. **Pengawas mutu**, berperan melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas audit untuk menjamin pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit. Pengawas mutu harus memiliki kualifikasi auditor teknologi utama atau yang setara.
2. **Lead Auditor**, bertanggung jawab merencanakan audit teknologi, melaksanakan audit di lapangan, mengendalikan data dan melaporkan hasil audit teknologi. Lead Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan auditor teknologi madya.
3. Auditor, bertugas membantu Lead Auditor dalam aktivitas audit teknologi. Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan auditor teknologi muda.
4. **Asisten Auditor**, bertugas membantu Auditor dalam aktivitas audit teknologi.
5. **Teknisi**, bertugas membantu Auditor dalam pengumpulan data lapangan.

6. **Narasumber**, berperan memberi masukan yang berkaitan dengan isu, status teknologi, dan keilmuan yang relevan.

b) Quick Assessment

Quick Assessment dilakukan untuk mengenali objek audit dengan mengidentifikasi: current issue, lokasi organisasi yang diaudit, struktur organisasi dari organisasi yang diaudit, proses bisnis dari organisasi, atau bagian yang diaudit.

c) Penyiapan Rencana Audit

Tim Audit Infrastruktur SPBE harus merencanakan tindakan audit dengan mendefinisikan hal-hal berikut:

1. Tujuan Audit
2. Lingkup
3. Pendekatan
4. Kriteria
5. Parameter
6. Acuan
7. Metode Pengumpulan Data
8. Penentuan Objek
9. Data Primer dan Sekunder
10. Metode Analisa
11. Deliverable
12. Perkiraan Jadwal Pelaksanaan

d) Penyepakatan Rencana Audit

Ketua tim audit dan Auditee harus menyepakati rencana audit sebelum tahap pelaksanaan audit.

e) Penyiapan Protokol Audit

Protokol audit yang berisi detail instrumen audit, antara lain daftar data, pertanyaan dan pengujian; formulir untuk mencatat data, jawaban, hasil observasi dan hasil pengujian.

f) Penetapan Parameter Acuan

Menetapkan parameter acuan untuk setiap kriteria diperlukan untuk memberikan suatu acuan perbandingan.

g) Pertemuan Pembukaan

Tim Audit Infrastruktur SPBE Melakukan pertemuan pembukaan dengan Audit.

h) Pelaksanaan Lapangan

Melaksanakan audit lapangan, melalui Penelaahan dokumen; Wawancara; Observasi lapangan; Pengujian; dan Verifikasi bukti.

i) Pertemuan Penutupan

Tim Audit Infrastruktur SPBE Melakukan pertemuan penutupan dengan Audit.

j) Analisa Data;

k) Pengelolaan Data;

l) Penyusunan Laporan

Laporan audit disampaikan oleh ketua tim audit kepada pimpinan LATIK SPBE. Laporan meliputi latar belakang, tujuan, lingkup, pendekatan audit, kriteria dan acuan, metode pengumpulan data, metode analisa, hasil analisis, temuan dan kesimpulan, dan rekomendasi.

m) Proof-read Laporan

Draft laporan diriviu oleh ketua tim audit untuk memastikan konsistensi dengan tujuan dan ruang lingkup audit. Laporan Audit disahkan oleh pimpinan LATIK SPBE.

n) Penyerahan Laporan

Laporan hasil audit disampaikan oleh pimpinan LATIK SPBE kepada Auditee dan lembaga lain sesuai kesepakatan dengan Audit

o) Evaluasi Aktivitas

Evaluasi secara menyeluruh dilakukan setelah aktivitas audit selesai yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aktivitas audit yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan audit berikutnya. Evaluasi dilakukan oleh tim pengawas mutu setelah aktivitas audit selesai.

7.3.7.2 Audit Aplikasi SPBE

Berdasarkan Hasil Penilaian SPBE tahun 2021 didapatkan bahwa tingkat kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dengan nilai tingkat kematangan **1** dengan predikat “**kurang**” dikarenakan pelaksanaan audit aplikasi SPBE belum dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti pada Renstra.

Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE mengacu kepada **Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia**

Tahun 2021 Tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Audit Aplikasi SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Ruang lingkup panduan fungsionalitas dan kinerja aplikasi SPBE terdiri atas tahapan berikut.

a) Perencanaan Aplikasi

Perencanaan aplikasi disusun dalam suatu dokumen menggunakan basis spesifikasi yang mencakup unsur: a. Kemampuan Aplikasi; Dan b. Persyaratan Proses Bisnis IPPD. Rancangan aplikasi disusun berdasarkan persyaratan aplikasi serta memperhatikan kesesuaiannya terhadap ketentuan perundangan dan integrasi data. Rancangan tersebut beserta penjelasannya didokumentasikan sebagai Dokumen Deskripsi Perancangan Aplikasi.

b) Pengembangan Aplikasi

Aplikasi SPBE dikembangkan oleh tim internal Audit dan/atau pihak ketiga dengan mengacu kepada dokumen Deskripsi Perancangan Aplikasi. Pengembangan aplikasi harus dilengkapi dengan dokumentasi penggunaan aplikasi dan tanggungjawab data pengguna. Penggunaan aplikasi mencakup pengguna dengan klasifikasi end-users, dan administrator.

c) Pengoperasian Aplikasi

Kinerja pengoperasian aplikasi dapat dievaluasi dari fungsi komponen perangkat lunak Sistem Elektronik yang digunakan untuk menjalankan SPBE. Kinerja sistem elektronik untuk mendukung fungsi Audit dikelompokkan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu Mampu mendukung semua fungsi proses bisnis Audit; Mampu mendukung Sebagian fungsi proses bisnis Audit; dan Belum mampu mendukung fungsi proses bisnis Audit

d) Pemeliharaan Aplikasi

Pemeliharaan terhadap aplikasi didokumentasikan dalam suatu dokumen pemeliharaan yang mencakup Lingkup pemeliharaan;

Alokasi sumberdaya; Pencatatan kinerja; dan Urutan/rangkaian proses pemeliharaan.

Audit Aplikasi SPBE dilakukan LATIK SPBE berdasarkan permintaan Auditee atau penugasan Badan. Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan dengan mengikuti tata cara audit yang secara garis besar terbagi dalam tiga tahapan, yaitu Tahap perencanaan (pre-audit); Tahap pelaksanaan lapangan (on site audit); dan Tahap analisa data dan pelaporan (post audit). Adapun ketiga tahapan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Penyiapan Tim Audit

Audit Aplikasi SPBE dilakukan oleh sebuah tim audit yang terdiri dari posisi-posisi berikut dengan uraian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pengawas mutu, berperan melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas audit untuk menjamin pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit. Pengawas mutu harus memiliki kualifikasi auditor teknologi utama atau yang setara.
2. Lead Auditor, bertanggung jawab merencanakan audit teknologi, melaksanakan audit di lapangan, mengendalikan data dan melaporkan hasil audit teknologi. Lead Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan auditor teknologi madya.
3. Auditor, bertugas membantu Lead Auditor dalam aktivitas audit teknologi. Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan auditor teknologi muda.
4. Asisten Auditor, bertugas membantu Auditor dalam aktivitas audit teknologi.
5. Teknisi, bertugas membantu Auditor dalam pengumpulan data lapangan.
6. Narasumber, berperan memberi masukan yang berkaitan dengan isu, status teknologi, dan keilmuan yang relevan.

b) Quick Assessment

Quick Assessment dilakukan untuk mengenali objek audit dengan mengidentifikasi: current issue, lokasi organisasi yang diaudit, struktur organisasi dari organisasi yang diaudit, proses bisnis dari organisasi, atau bagian yang diaudit.

c) Penyiapan Rencana Audit

Tim Audit Aplikasi SPBE harus merencanakan tindakan audit dengan mendefinisikan hal-hal berikut:

1. Tujuan Audit
2. Lingkup
3. Pendekatan
4. Kriteria
5. Parameter
6. Acuan
7. Metode Pengumpulan Data
8. Penentuan Objek
9. Data Primer dan Sekunder
10. Metode Analisa
11. Deliverable
12. Perkiraan Jadwal Pelaksanaan

d) Penyepakatan Rencana Audit

Ketua tim audit dan Audit harus menyepakati rencana audit sebelum tahap pelaksanaan audit.

e) Penyiapan Protokol Audit

Protokol audit yang berisi detail instrumen audit, antara lain daftar data, pertanyaan dan pengujian; formulir untuk mencatat data, jawaban, hasil observasi dan hasil pengujian.

f) Penetapan Parameter Acuan

Menetapkan parameter acuan untuk setiap kriteria diperlukan untuk memberikan suatu acuan pembandingan

g) Pertemuan Pembukaan

Tim Audit Aplikasi SPBE Melakukan pertemuan pembukaan dengan Audit.

h) Pelaksanaan Lapangan

Melaksanakan audit lapangan, melalui Penelaahan dokumen; Wawancara; Observasi lapangan; Pengujian; dan Verifikasi bukti.

i) Pertemuan Penutupan

Tim Audit Aplikasi SPBE Melakukan pertemuan penutupan dengan Audit.

j) Analisa Data

k) Pengelolaan Data

l) Penyusunan Laporan

Laporan audit disampaikan oleh ketua tim audit kepada pimpinan LATIK SPBE. Laporan mencakup latar belakang, tujuan, lingkup, pendekatan audit, kriteria dan acuan, metoda pengumpulan data, metode analisa, hasil analisis, temuan dan kesimpulan, dan rekomendasi.

m) Proof-read Laporan

n) Draft laporan diriviu oleh ketua tim audit untuk memastikan konsistensi dengan tujuan dan ruang lingkup audit. Laporan Audit disahkan oleh pimpinan LATIK SPBE.

o) Penyerahan Laporan

Laporan hasil audit disampaikan oleh pimpinan LATIK SPBE kepada Auditee dan lembaga lain sesuai kesepakatan dengan Audit.

p) Evaluasi Aktivitas

Evaluasi secara menyeluruh dilakukan setelah aktivitas audit selesai yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aktivitas audit yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan audit berikutnya. Evaluasi dilakukan oleh tim pengawas mutu setelah aktivitas audit selesai.

7.3.7.3 Audit Keamanan SPBE

Berdasarkan Hasil Penilaian SPBE tahun 2021 didapatkan bahwa tingkat kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dengan nilai tingkat kematangan **4** dengan predikat **“sangat baik”**. Pelaksanaan audit keamanan pada Pemkot Madiun dibuktikan dengan pelaksanaan internal audit untuk keamanan SPBE yang sesuai dengan sertifikat ISO 27001.

Audit Keamanan SPBE mengacu pada **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Audit Keamanan SPBE adalah Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi cakupan keamanan SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria

dan/atau standar yang telah ditetapkan. Domain Audit Keamanan SPBE terdiri dari:

a) Audit atas Keamanan Aplikasi SPBE

Audit atas Keamanan Aplikasi SPBE harus mencakup kepada pengujian atas kontrol keamanan dalam perencanaan Aplikasi SPBE; pengembangan Aplikasi SPBE; operasional Aplikasi SPBE; dan pemantauan Aplikasi SPBE.

b) Audit atas Keamanan Infrastruktur SPBE

Audit atas Keamanan Infrastruktur SPBE terdiri atas: audit atas Sistem Penghubung Layanan; dan audit atas Jaringan Intra.

c) Audit atas Manajemen Keamanan SPBE

Audit atas manajemen keamanan SPBE terdiri atas audit atas tata kelola keamanan SPBE; audit atas sistem manajemen keamanan SPBE; dan audit atas pengendalian keamanan SPBE.

Audit keamanan SPBE harus dilakukan menggunakan tata cara yang sudah baku dan teruji. Tata cara Audit Keamanan SPBE terdiri atas:

a. Permintaan

Permintaan Audit Keamanan SPBE dilakukan dengan mengirimkan surat permintaan Audit Keamanan SPBE kepada LATIK cakupan Keamanan SPBE.

b. Penugasan

Penugasan Audit Keamanan SPBE dilakukan oleh pimpinan LATIK cakupan Keamanan SPBE dengan menerbitkan surat tugas Audit Keamanan SPBE.

c. Perencanaan

Perencanaan Audit Keamanan SPBE dilakukan oleh tim Audit Keamanan SPBE dengan menyusun Perencanaan Audit Keamanan SPBE. Perencanaan Audit Keamanan SPBE mencakup:

1. Analisis risiko keamanan SPBE, merupakan proses identifikasi dan evaluasi risiko keamanan SPBE yang relevan dengan domain Audit Keamanan SPBE.
2. Penentuan kriteria Audit Keamanan SPBE, merupakan proses identifikasi dan pemetaan kriteria kontrol keamanan SPBE yang sesuai dengan domain Audit Keamanan SPBE.

3. Rencana pengujian Audit Keamanan SPBE, berisikan rencana prosedur pengujian yang harus dilakukan Auditor atas kontrol keamanan SPBE termasuk alokasi waktu, personel dan alat bantu Audit Keamanan SPBE.

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE sebagaimana paling minimal harus mencakup prosedur berikut.

1. Pemahaman kontrol keamanan SPBE, merupakan prosedur yang dilakukan Auditor dalam mengidentifikasi informasi terdokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang kontrol keamanan SPBE.
2. Evaluasi desain kontrol keamanan SPBE, merupakan prosedur yang dilakukan Auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa desain kontrol keamanan SPBE telah sesuai dengan kriteria kontrol keamanan SPBE yang digunakan.
3. Pengujian implementasi kontrol keamanan SPBE, merupakan prosedur yang dilakukan Auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa implementasi kontrol telah sesuai dengan desain kontrol yang ada.
4. Pengujian terinci efektivitas kontrol keamanan SPBE. Merupakan prosedur yang dilakukan Auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa implementasi kontrol telah sesuai dengan desain kontrol yang ada.
5. Supervisi, prosedur ini mencakup supervisi aspek mutu Audit Keamanan SPBE dan supervisi aspek teknis Audit Keamanan SPBE.
6. Pelaporan, dilakukan oleh tim Audit Keamanan SPBE dengan menyusun Laporan Hasil Audit. Laporan Hasil Audit mencakup:
 - a. Kondisi yang memerlukan perhatian pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah
 - b. Resiko atau potensi risiko yang diidentifikasi
 - c. Kriteria kontrol keamanan SPBE yang digunakan sesuai dengan domain Audit Keamanan SPBE
 - d. Rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

e. Rencana tindak lanjut dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

7. Tindak lanjut.

Berdasarkan hasil Survei yang menyatakan bahwa hampir seluruh PD pada Kota Madiun belum pernah melakukan Audit SPBE dan hanya Dinas Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan audit sesuai dengan prosedur dan standar audit SPBE, maka dapat diusulkan prosedur dan kegiatan Audit SPBE yang dilengkapi dengan spesifikasi untuk mempermudah pemahaman dan persiapan pelaksanaan kegiatan Audit SPBE pada masing masing PD di Kota Madiun. Audit SPBE berdasarkan amanat dari Perpes dan BPPT merupakan tanggung jawab dari **Inspektorat Daerah** yang memiliki urusan pengawasan.

Sedangkan rekomendasi untuk Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PD yang telah melaksanakan audit keamanan informasi dan telah mengacu pada kerangka kerja ISO 27001:2013 yaitu dengan melaksanakan *Surveillance* Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO/IEC 27001:2013 yang dilakukan setiap tahun selama sertifikasi itu masih berlaku, untuk memantau pelaksanaan ISO, sebelum dilakukan re-sertifikasi pada tahun ketiga.

Sebagaimana pelaksanaan Audit SPBE yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan BPPT, dimana Audit SPBE merupakan tanggung jawab dari **Inspektorat Daerah** yang memiliki urusan pengawasan. Pembagian jenis Audit TIK berdasarkan kategori Audit dapat disimpulkan pada

Tabel 7.5

Tabel 7.5 Pembagian Jenis Audit TIK Berdasarkan Kategori Audit TIK SPBE

No	Kategori	Kegiatan	Spesifikasi
1	Audit Infrastruktur SPBE	Penyusunan kebijakan tentang audit TIK	Kebijakan memuat tentang teknis pelaksanaan audit, tim pelaksana audit, dan kebutuhan audit lainnya

No	Kategori	Kegiatan	Spesifikasi
		Penyiapan tim audit	Tim audit internal dan SK penugasan
		Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah	Pelaksanaan kegiatan Audit Infrastruktur Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
2	Audit Aplikasi SPBE	Penyusunan kebijakan tentang audit TIK	Kebijakan memuat tentang teknis pelaksanaan audit, tim pelaksanaan audit, dan kebutuhan audit lainnya
		Penyiapan tim audit	Tim audit internal dan SK penugasan
		Pelaksanaan Audit Aplikasi Khusus	Pelaksanaan Audit Aplikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah
3	Audit Keamanan SPBE	Penyusunan kebijakan tentang audit TIK	Kebijakan memuat tentang teknis pelaksanaan audit, tim pelaksanaan audit, dan kebutuhan audit lainnya
		Penyiapan tim audit	Tim audit internal dan SK penugasan
		Pelaksanaan Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Pusat dan Daerah	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
		Audit Keamanan Aplikasi Khusus	urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan audit Keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan

No	Kategori	Kegiatan	Spesifikasi
			audit keamanan Aplikasi Khusus.

7.3.7.4 Kesimpulan Usulan Audit TIK

Setelah penjelasan dari analisis usulan audit infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE, maka dapat ditarik kesimpulan yang disajikan dalam **Tabel 7.6** berikut.

Tabel 7.6 Pelaksanaan Audit TIK berdasarkan kategori Audit TIK SPBE

No	Audit SPBE	Aktivitas	Standar/ Framework	Tahun
1	Audit Infrastruktur SPBE	a. Penyiapan Tim Audit	Tools Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE BPPT/BRIN Dan ISO 27001 : 2022	2023, 2025, 2027
		b. <i>Quick assessment</i>		
		c. Penyiapan rencana audit Infrastruktur SPBE		
		d. Penyepakatan rencana audit Infrastruktur SPBE		
		e. Penyiapan protokol audit Infrastruktur SPBE		
		f. Penetapan parameter acuan yang akan dilakukan audit Infrastruktur SPBE		
		g. Pertemuan pembukaan kegiatan audit Infrastruktur SPBE		
		h. Pelaksanaan lapangan audit Infrastruktur SPBE		
		i. Pertemuan penutupan kegiatan audit Infrastruktur SPBE		
		j. Analisa data audit Infrastruktur SPBE		
		k. Pengelolaan data audit Infrastruktur SPBE		
		l. Penyusunan laporan audit Infrastruktur SPBE		
		m. <i>Proof-read</i> laporan		

No	Audit SPBE	Aktivitas	Standar/ Framework	Tahun
		audit Infrastruktur SPBE n. Penyerahan laporan audit Infrastruktur SPBE o. Evaluasi aktivitas audit Infrastruktur SPBE		
2	Audit Aplikasi SPBE	a. Penyiapan tim audit aplikasi SPBE b. <i>Quick assessment</i> c. Penyiapan rencana audit aplikasi SPBE d. Penyepakatan rencana audit aplikasi SPBE e. Penyiapan protokol audit aplikasi SPBE f. Penetapan parameter acuan yang akan dilakukan audit aplikasi SPBE g. Pertemuan pembukaan kegiatan audit aplikasi SPBE h. Pelaksanaan lapangan audit aplikasi SPBE i. Pertemuan penutupan kegiatan audit aplikasi SPBE j. Analisa data audit aplikasi SPBE k. Pengelolaan data audit aplikasi SPBE l. Penyusunan laporan audit aplikasi SPBE m. Proof-read laporan audit aplikasi SPBE n. Penyerahan laporan audit aplikasi SPBE	Tools Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE BPPT/BRIN Dan ISO 27001: 2022	2023, 2025, 2027

No	Audit SPBE	Aktivitas	Standar/ Framework	Tahun
		o. Evaluasi aktivitas audit aplikasi SPBE		
3	Audit Keamanan SPBE	a. Permintaan pelaksanaan kegiatan Audit Keamanan SPBE	Tools Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE BPPT/BRIN Dan ISO 27001 : 2022	2023, 2025, 2027
		b. Penugasan Tim Audit Keamanan SPBE		
		c. Perencanaan Kegiatan Audit Keamanan SPBE		
		d. Surveillance ISO Ke-2		
		e. Resertifikasi ISO 27001		

7.4 Analisis Manajemen SPBE

Pada Subtansi ini akan dijelaskan kondisi eksisting serta usulan dari arsitektur manajemen SPBE di Pemerintahan Kota Madiun. Usulan yang akan dibahas adalah mengenai manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan.

7.4.1 Identifikasi Referensi Hukum Manajemen SPBE

Penyusunan arsitektur manajemen SPBE mengacu kepada beberapa sumber hukum. Berikut adalah landasan hukum yang digunakan, yaitu:

1. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019** tentang Satu Data Indonesia.
3. **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019** tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah
4. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5. **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020** tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020** tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. **Peraturan Walikota Madiun Nomor 2020** Tentang Satu Data Kota Madiun.

7.4.2 Identifikasi Kondisi Eksisting

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait kondisi pelaksanaan manajemen SPBE pada Pemerintah Kota Madiun yang sebelumnya telah dianalisis pada Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kota Madiun. Berdasarkan hasil penilaian SPBE didapatkan bahwa Pada **Domain Manajemen SPBE** mendapatkan nilai **2,00** dengan predikat **“Cukup”**. Dalam domain manajemen SPBE memiliki **dua Aspek** yaitu **Aspek Penerapan Manajemen SPBE** yang memiliki nilai **2,00** dengan predikat **“Cukup”** dan **Aspek Audit TIK** yang mendapat nilai **2,00** dengan predikat **“Cukup”**.

Secara keseluruhan penerapan pada **Aspek Manajemen SPBE** yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun adalah dengan adanya proses manajemen yaitu Pemenuhan aspek Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE. Secara keseluruhan penerapan pada Aspek pelaksanaan Audit TIK yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun yaitu pelaksanaan audit keamanan SPBE. Pada **Aspek pelaksanaan Audit TIK** ini dapat terlihat adanya pelaksanaan audit keamanan SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkot Madiun. Pelaksanaan audit keamanan pada Pemkot Madiun dibuktikan dengan pelaksanaan internal audit untuk keamanan SPBE yang sesuai dengan sertifikat ISO 27001.

Berikut indikator beserta hasil penilaian dari Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang perlu ditingkatkan :

- **Penerapan Manajemen SPBE (Aspek 5)**
 - a. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko SPBE (Indikator 21) dengan nilai tingkat kematangan **1**.
 - b. Tingkat Penerapan Manajemen Data (Indikator 23) dengan nilai tingkat kematangan **2**.
 - c. Tingkat Penerapan Manajemen Aset TIK (Indikator 24) dengan nilai tingkat kematangan **2**.
 - d. Tingkat Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Indikator 25) dengan nilai tingkat kematangan **2**.
 - e. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan (Indikator 26) dengan nilai tingkat kematangan **1**.
 - f. Tingkat Penerapan Manajemen Perubahan (Indikator 27) dengan nilai tingkat kematangan **2**.
- **Audit TIK (Aspek 6)**
 - a. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (Indikator 29) dengan nilai tingkat kematangan **1**.
 - b. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (Indikator 30) dengan nilai tingkat kematangan **1**.

Berikut dapat dilihat pada **Tabel 7.8** terkait hasil analisis berdasarkan hasil survey kepada 35 PD terkait kondisi eksisting dari setiap manajemen SPBE.

Tabel 7.7 Kondisi eksisting Manajemen SPBE

No	Parameter	Eksisting
1	Manajemen Risiko	7 dari 35 OPD telah melaksanakan manajemen risiko, tetapi belum melakukan manajemen risiko sesuai dengan program kegiatan yang terencana.
2	Manajemen Keamanan	4 dari 35 OPD telah melaksanakan manajemen keamanan informasi. Satu OPD yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengacu pada kerangka kerja ISO 27001:2013 , sedangkan 3 OPD lain belum melakukan manajemen keamanan sesuai dengan program

No	Parameter	Eksisting
		kegiatan yang terencana maupun kerangka kerja manajemen keamanan
3	Manajemen Data	3 dari 35 OPD telah melaksanakan manajemen data, tetapi belum melakukan manajemen data sesuai dengan program kegiatan yang terencana.
4	Manajemen Aset TIK	5 dari 35 OPD telah melaksanakan manajemen aset TIK, tetapi belum melakukan manajemen aset TIK sesuai dengan program kegiatan yang terencana.
5	Manajemen Sumber Daya Manusia	7 dari 35 OPD telah melaksanakan manajemen sumber daya manusia, tetapi belum melakukan manajemen sumber daya manusia sesuai dengan program kegiatan yang terencana.
6	Manajemen Pengetahuan	5 dari 35 OPD telah melaksanakan manajemen pengetahuan, tetapi belum melakukan manajemen pengetahuan sesuai dengan program kegiatan yang terencana.
7	Manajemen Perubahan	3 dari 45 OPD telah melaksanakan manajemen perubahan, tetapi belum melakukan manajemen perubahan sesuai dengan program kegiatan yang terencana.
8	Manajemen Layanan	5 dari 45 OPD telah melaksanakan manajemen layanan, tetapi belum melakukan manajemen layanan sesuai dengan program kegiatan yang terencana.

7.4.3 Identifikasi GAP Manajemen SPBE

Setelah mengetahui kondisi eksisting manajemen SPBE, maka kondisi eksisting tersebut akan dibandingkan dengan kondisi ideal dari manajemen SPBE. Dari perbandingan tersebut maka akan didapatkan kesenjangan atau *gap*. Untuk Gap pada setiap manajemen SPBE dapat dilihat pada **Tabel 7.8**

Tabel 7.8 Analisis GAP Manajemen SPBE

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
Manajemen Risiko	Terdapat 7 dari 35 PD yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen risiko, namun dalam pelaksanaan Manajemen risiko belum dilakukan dengan program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Risiko SPBE	Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE. Kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah.	Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko belum dilaksanakan secara terencana dan belum mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Risiko SPBE, serta belum terdokumenta sikan dengan baik.
Manajemen Keamanan	Terdapat 3 dari 35 PD yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen keamanan, namun dalam pelaksanaan Manajemen keamanan belum dilakukan	Pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Risiko SPBE dan dilakukan melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE	Dalam pelaksanaan Manajemen Keamanan belum dilaksanakan secara terencana dan belum mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	<p>dengan program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Keamanan TIK.</p>	<p>Pemerintah Daerah. Selain itu, pengendalian Keamanan Informasi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi.</p>	<p>Keamanan Informasi, serta belum terdokumentasikan dengan baik.</p>
Manajemen Data	<p>Terdapat 3 dari 35 PD yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen data, namun dalam pelaksanaan manajemen data belum dilakukan dengan program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Data.</p>	<p>Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Manajemen Data telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Data yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data serta dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah.</p>	<p>Dalam pelaksanaan Manajemen Data belum dilaksanakan secara terencana dan belum mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Data, serta belum terdokumentasikan dengan baik.</p>

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
Manajemen Aset TIK	Terdapat 5 dari 35 PD yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen aset TIK, namun dalam pelaksanaan manajemen aset TIK belum dilakukan dengan program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Aset TIK	Manajemen Aset TIK diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset TIK serta dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK. Selain itu, penerapan Manajemen Aset TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK	Dalam pelaksanaan Manajemen Aset belum dilaksanakan secara terencana dan belum mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Aset TIK, serta belum terdokumentasikan dengan baik.
Manajemen Sumber Daya Manusia	Terdapat 7 dari 35 PD yang menyebutkan telah	Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi di bidang	Dalam pelaksanaan Manajemen Sumber Daya

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	<p>melaksanakan manajemen Sumber Daya Manusia, namun dalam pelaksanaan manajemen Sumber Daya Manusia belum dilakukan dengan program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Sumber Daya Manusia.</p>	<p>proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE selanjutnya dilakukan peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.</p>	<p>Manusia belum dilaksanakan secara terencana dan belum mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Sumber Daya Manusia, serta belum terdokumenta sikan dengan baik.</p>
Manajemen Pengetahuan	<p>Terdapat 5 dari 35 PD yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen pengetahuan, namun dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan</p>	<p>Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan dan mengacu pada pedoman di Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE. Semua unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan</p>	<p>Dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan belum dilaksanakan secara terencana dan belum mengacu pada standar atau</p>

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	<p>belum dilakukan dengan program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Pengetahuan.</p>	<p>Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPB</p>	<p><i>framework</i> Manajemen Pengetahuan, serta belum terdokumenta sikan dengan baik.</p>
<p>Manajemen Perubahan</p>	<p>Terdapat 3 dari 35 PD yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen perubahan, namun dalam pelaksanaan manajemen perubahan belum dilakukan dengan program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau <i>framework</i></p>	<p>Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan dan dilakukan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah terkait di Pemerintah Daerah sesuai pedoman Manajemen Perubahan. Selain itu, kegiatan Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Perubahan SPBE.</p>	<p>Dalam pelaksanaan Manajemen Perubahan belum dilaksanakan secara terencana dan belum mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Pengetahuan, serta belum terdokumenta sikan dengan baik.</p>

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	Manajemen Perubahan.		
Manajemen Layanan	Terdapat 5 dari 35 PD yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen layanan, namun dalam pelaksanaan manajemen layanan belum dilakukan dengan program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Layanan.	Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan dan dilakukan pada seluruh proses Manajemen Layanan SPBE yaitu Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE. Selain itu, Manajemen Layanan SPBE telah diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan, dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Layanan SPBE.	Dalam pelaksanaan Manajemen Layanan belum dilaksanakan secara terencana dan belum mengacu pada standar atau <i>framework</i> Manajemen Pengetahuan, serta belum terdokumentasikan dengan baik.

7.4.4 Analisis Usulan Manajemen SPBE

Pada bagian ini akan menjabarkan usulan untuk setiap manajemen SPBE. Usulan tersebut berdasarkan dari analisis gap yang berguna untuk menjadikan kondisi manajemen SPBE yang ada bisa mencapai kondisi yang ideal. Usulan-usulan diambil dari beberapa *best practice* dan peraturan-peraturan terkait. Dengan adanya usulan penerapan Manajemen SPBE ini diharapkan dapat meningkatkan penilaian SPBE.

7.4.4.1 Manajemen Risiko

Berdasarkan pengumpulan data hasil survei kepada 35 PD di Kota Madiun, terdapat **7 PD** menyebutkan bahwa telah melaksanakan manajemen risiko, tetapi belum melaksanakan sesuai dengan program kegiatan yang terencana serta belum mengacu pada **framework** manajemen risiko. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko di Pemerintah Kota Madiun masih **rendah**.

Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko ada beberapa kerangka kerja yang dapat digunakan sebagai acuan diantaranya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, PERPRES Nomor 95 Tahun 2018, ISO 31000/2018, dan COBIT (*Control Objectives for Information Related Technology*) 5.

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjelaskan bahwa Manajemen risiko merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap adanya risiko dalam SPBE. Sedangkan dalam **Permenpan 5/2020, Manajemen Risiko SPBE** didefinisikan sebagai pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik spesifik terkait Risiko SPBE, di mana **Risiko SPBE** didefinisikan sebagai peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.

Dalam kerangka kerja ISO 31000/2018 pelaksanaan manajemen risiko menitikberatkan pada efisiensi organisasi dalam mengintegrasikan risiko manajemen menjadi aktivitas dan fungsi yang signifikan. Efektivitas manajemen risiko sendiri tergantung dari integrasinya ke dalam tata kelola organisasi, termasuk pengambilan keputusan. Hal tersebut akan membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan, terutama manajemen puncak. Dengan framework ini, penerapan manajemen risiko akan dilakukan dalam serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko yang dimiliki oleh organisasi.

COBIT 5 merupakan sebuah kerangka kerja yang didesain membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan

tata kelola dan manajemen teknologi informasi COBIT 5 *for risk* merupakan bagian dari COBIT 5 yang membahas manajemen risiko. *Risk appetite* yaitu level dan jenis risiko yang bersedia diterima oleh organisasi sehingga risiko tidak harus dihindari dengan menetapkan nilai maksimum terhadap risiko pada beberapa kategori proses bisnis yang di dalamnya mengandung risiko TI yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berikut dijelaskan rekomendasi kegiatan dalam mendukung berjalannya Manajemen Risiko pada Pemerintah Kota Madiun:

1. Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Risiko SPBE

Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Risiko SPBE berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, dan budaya risiko SPBE.

2. Penentuan struktur pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE

Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE bertujuan untuk menentukan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE. Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE meliputi Unit Pemilik Risiko SPBE, Pemilik Risiko SPBE.

Koordinator Risiko SPBE dan Pengelola Risiko SPBE. Identifikasi rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko termuat dalam renstra/RKPD Perangkat Daerah

3. Pelaksanaan Komunikasi dan Konsultasi

Proses ini dilakukan untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai Risiko SPBE. Komunikasi dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai Risiko SPBE. Sementara konsultasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Proses ini dapat diwujudkan melalui komunikasi dan konsultasi dengan mengagendakan rapat berkala, rapat insidental, dan FGD

4. Penetapan Konteks Risiko SPBE

Pada proses ini dilakukan identifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan Risiko SPBE yang harus dikelola

dalam proses Manajemen Risiko SPBE. Terdapat beberapa tahapan dalam proses ini, yaitu:

a. Inventarisasi Informasi Umum

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai unit kerja yang menerapkan Manajemen Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi nama Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE, tugas UPR SPBE, fungsi UPR SPBE, dan periode waktu pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE dalam kurun waktu satu tahun

b. Identifikasi Sasaran SPBE

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan sasaran SPBE beserta indikator dan targetnya yang mendukung sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi sasaran UPR SPBE, sasaran SPBE, indikator kinerja SPBE dan target kinerja SPBE.

c. Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE bertujuan untuk menentukan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE. Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE meliputi Unit Pemilik Risiko SPBE, Pemilik Risiko SPBE, Koordinator Risiko SPBE dan Pengelola Risiko SPBE.

d. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memahami pihak-pihak yang melakukan interaksi dengan UPR SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE. Pihak-pihak tersebut meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, instansi pemerintah, atau non instansi pemerintah. Hubungan kerja antara UPR SPBE dan setiap pihak pemangku kepentingan yang terkait dengan penerapan SPBE perlu dideskripsikan dengan jelas.

e. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan

Identifikasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh UPR SPBE. Informasi yang perlu dijelaskan dalam melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan

meliputi nama peraturan dan amanat dalam peraturan tersebut.

f. Penetapan Kategori Risiko SPBE

Penetapan Kategori Risiko SPBE bertujuan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE dapat dilakukan secara komprehensif. Kategori risiko SPBE meliputi rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, proses bisnis, rencana dan anggaran, inovasi, kepatuhan terhadap peraturan, pengadaan barang dan jasa, proyek pembangunan/pengembangan sistem, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, layanan SPBE, SDM SPBE, dan bencana alam.

g. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE

Penetapan Area Dampak Risiko SPBE bertujuan untuk mengetahui area mana saja yang terkena efek dari Risiko SPBE di Pemerintah Daerah. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE diawali dengan melakukan identifikasi dampak Risiko SPBE. Area Dampak Risiko SPBE yang menjadi fokus penerapan Manajemen Risiko SPBE meliputi finansial, reputasi, kinerja, layanan organisasi, operasional dan aset TIK, hukum dan regulasi, sumber daya manusia.

h. Penetapan Kriteria Risiko SPBE

Penetapan Kriteria Risiko SPBE bertujuan untuk mengukur dan menentukan seberapa besar kemungkinan kejadian dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi. Penetapan Kriteria Risiko SPBE ini terdiri atas kriteria kemungkinan dan dampak SPBE.

i. Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

Matriks analisis Risiko SPBE berisi kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak untuk dapat menetapkan Besaran Risiko SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk angka.

j. Selera Risiko SPBE

Selera Risiko SPBE bertujuan untuk memberikan acuan dalam penentuan ambang batas minimum terhadap Besaran Risiko SPBE yang harus ditangani untuk setiap Kategori

Resiko SPBE baik Risiko SPBE Positif maupun Risiko SPBE Negatif. Penentuan Selera Risiko SPBE ini dapat disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE serta konteks internal dan eksternal Pemerintah Daerah.

5. Penilaian Risiko SPBE

Penilaian Risiko SPBE bertujuan untuk memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penilaian Risiko SPBE dilakukan pada setiap Sasaran SPBE. Tahapan penilaian Risiko SPBE meliputi:

- a) Identifikasi Risiko dengan menguraikan jenis risiko SPBE, Penyebab, kategori, dampak, dan area dampak.
- b) Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE
- c) Penetapan Kategori Risiko SPBE
- d) Penetapan Area Dampak Risiko SPBE
- e) Penetapan Kriteria Risiko SPBE
- f) Penentuan Selera Risiko SPBE disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE serta konteks internal dan eksternal masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- g) Analisis Risiko SPBE meliputi Sistem Pengendalian, Level Kemungkinan, Level Dampak dan Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

6. Evaluasi Risiko SPBE

Evaluasi Risiko SPBE dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko SPBE lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya. Pengambilan keputusan mengacu pada Selera Risiko SPBE yang telah ditentukan. Prioritas penanganan Risiko SPBE diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPBE. Apabila terdapat lebih dari satu Risiko SPBE yang memiliki besaran yang sama maka cara penentuan prioritas berdasarkan *expert judgement*.

7. Penanganan Risiko SPBE

Penanganan Risiko SPBE merupakan proses untuk memodifikasi penyebab Risiko SPBE. Penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganan Risiko

SPBE. Informasi yang dicantumkan pada penanganan Risiko SPBE meliputi prioritas risiko, rencana penanganan risiko, rencana aksi penanganan risiko, keluaran, jadwal implementasi, penanggung jawab dan risiko residual.

8. Pencatatan dan Pelaporan

Proses Manajemen Risiko SPBE dan keluaran yang dihasilkan perlu dicatat dan dilaporkan dengan mekanisme yang tepat. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko SPBE serta keluaran yang dihasilkan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas aktivitas Manajemen Risiko SPBE, serta mengawal interaksi dengan pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab serta akuntabilitas terhadap Manajemen Risiko SPBE.

Seluruh PD yang memiliki layanan perlu melakukan manajemen risiko untuk layanannya. Untuk PD yang bertanggung jawab dalam **pelaksanaan manajemen risiko** adalah **Inspektorat**. Hal ini dikarenakan **Inspektorat** yang **menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan**.

7.4.4.2 Manajemen Keamanan Informasi

Berdasarkan pengumpulan data hasil survei kepada 35 Perangkat Daerah di Kota Madiun, terdapat **4 Perangkat Daerah** yang menyebutkan telah melaksanakan manajemen keamanan informasi. Diantara 4 Perangkat Daerah tersebut, hanya **Dinas Komunikasi dan Informatika** yang telah melaksanakan manajemen keamanan informasi dengan mengacu pada kerangka kerja keamanan informasi, yaitu mengacu pada **ISO 27001:2013**.

Rekomendasi untuk Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PD yang telah melaksanakan audit keamanan informasi dan telah mengacu pada kerangka kerja ISO 27001:2013 yaitu dengan melaksanakan Audit Surveillance Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO/IEC 27001:2013 di tiap tahun selama sertifikasi itu masih berlaku untuk memantau pelaksanaan ISO, sebelum dilakukan re-sertifikasi pada tahun ketiga.

Untuk PD lain yang belum maupun sudah melaksanakan manajemen keamanan informasi namun belum mengacu pada kerangka kerja manajemen keamanan informasi, maka

direkomendasikan agar turut melaksanakan sertifikasi keamanan informasi yaitu ISO/IEC 27001:2013 seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun dengan menerapkan INDEKS KAMI. Indeks KAMI merupakan alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi. Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.

ISO/IEC 27001 menetapkan persyaratan untuk penetapan, penerapan, pengoperasian, pemantauan, pengkajian, peningkatan dan pemeliharaan Sistem Manajemen keamanan informasi (SMKI) dengan mengadopsi model **Plan-Do- Act (PDCA)**. Definisi proses Sistem Manajemen Keamanan Informasi diantaranya adalah:

- a) **Plan (Penetapan SMKI):** Menetapkan kebijakan, sasaran, proses dan prosedur SKMI yang sesuai untuk mengelola risiko dan perbaikan keamanan informasi agar menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebijakan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi hingga evaluasi dan penanganan risiko, dimana proses tersebut merupakan pelaksanaan manajemen risiko.
- b) **Do (Penerapan dan pengoperasian SKMI):** Menerapkan dan mengoperasikan kebijakan, pengendalian, proses dan prosedur SKMI.
- c) **Check (Pemantauan dan pengkajian SKMI):** Mengakses dan, apabila berlaku, mengukur kinerja proses terhadap kebijakan , sasaran SKMI dan pengalaman praktis dan melaporkan hasilnya kepada manajemen untuk pengkajian.
- d) **Act (Peningkatan dan pemeliharaan SKMI):** Mengambil tindakan korektif dan pencegahan berdasarkan hasil internal

audit SKMI dan tinjauan manajemen atau informasi terkait lainnya, untuk mencapai perbaikan berkesinambungan dalam SKMI.

Dengan mengacu pada ISO/IEC 27001, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2020 dan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 maka rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan manajemen data:

1. Penyusunan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi

Penyusunan dokumen pedoman keamanan informasi dapat disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Pembuatan Kerangka Kerja Keamanan Informasi

Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Pengelolaan Aset informasi

Pelaksanaan program kerja SPBE menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika.

4. Penyusunan kebijakan pengamanan informasi

Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE dapat disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

5. Pembinaan dan pengawasan teknis

Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen keamanan informasi adalah **Dinas Komunikasi dan Informatika** . Hal ini selaras dengan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika **dari Seksi Pengelola Keamanan dan Penyelenggara Persandian.**

7.4.4.3 Manajemen Data

Berdasarkan pengumpulan data hasil survei kepada 35 PD di Kota Madiun, terdapat **3 PD** yang menyatakan bahwa telah

melaksanakan manajemen data, tetapi belum melaksanakan sesuai dengan program kegiatan yang terencana serta belum mengacu pada **framework** manajemen data. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko di Pemerintah Kota Madiun masih **rendah**.

Pelaksanaan manajemen data telah diatur dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019** tentang Satu Data Indonesia. Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Berikut prinsip-prinsip yang harus dilakukan untuk mencapai Satu Data Indonesia berdasarkan PERPRES Nomor 39 Tahun 2019.

- a) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Berikut rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan manajemen data:

- 1. Pembuatan dokumen pedoman manajemen data pada IPPD**
Penyusunan dokumen pedoman manajemen data pada IPPD.
- 2. Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah**
Spesifikasi data yang terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- 3. Manajemen arsitektur data**
Perencanaan data induk dan data referensi.
- 4. Manajemen Data Induk dan Data Referensi**
Untuk melaksanakan manajemen data induk dan data referensi dapat dilakukan dengan
 - a. Pengumpulan data induk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappedalitbang.
 - b. Pemeriksaan data induk dan data referensi.

- c. Penyebarluasan data induk dan data referensi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappedalitbang.
- d. Pembaruan Data Induk dan Data Referensi.

5. Manajemen Basis Data

Dalam manajemen basis data dapat dilakukan dengan Penyimpanan data pada pusat data nasional

6. Manajemen Kualitas Data

Dalam melaksanakan manajemen kualitas data dapat dilakukan dengan perencanaan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data

Selain menerapkan Manajemen Data berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, referensi lain yang dapat digunakan adalah dengan mengimplementasikan kerangka kerja manajemen data yaitu ***The Data Management Association (DAMA) dalam Data Management Body of Knowledge (DMBOK)***. Kerangka kerja DAMA-DMBOK adalah kumpulan konsep dan praktis pada suatu area manajemen data yang inisiatif dan dikelola oleh DAMA (Data Management Association), yang merupakan asosiasi nirlaba dimana berkumpulnya professional-profesional dalam bidang data. Adapun 11 fungsi manajemen data pada DAMA yaitu meliputi:

1. **Tata Kelola Data:** Meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian manajemen dan penggunaan data.
2. **Manajemen Arsitektur Data:** Merupakan bagian mengintegrasikan arsitektur enterprise. Dalam hal ini yang dilakukan adalah mereview memvalidasi, menyetujui, dan filterisasi ulang arsitektur data.
3. **Pembangunan Data:** Meliputi analisis, perancangan, pembangunan dan pengujian, pendistribusian serta pemeliharaan. Dalam hal ini melakukan mendefinisikan kebutuhan dan spesifikasi data yang diorganisasikan analis dan arsitek data ke dalam model data logik. Dalam hal ini juga memvalidasi model fisik data dan desain basis data, berpartisipasi dalam pengujian dan konversi basis data, dan memastikan konsistensi penggunaan istilah dalam dokumentasi dan pelatihan.

4. **Manajemen Operasional Basis Data:** Mendukung struktur fisik aset data mendefinisikan kebutuhan untuk pemulihan dan performansi data, dan membantu layanan level di area ini. Pada fungsi ini juga termasuk mengidentifikasi, memperoleh dan mengawasi sumber data eksternal.
5. **Manajemen Keamanan Data:** Menjamin privasi, kepercayaan dan hak akses. Dalam hal ini menyediakan kebutuhan keamanan, kepercayaan dan privasi, mengidentifikasi isu keamanan data, membantu dalam audit keamanan data, dan mengklasifikasikan kerahasiaan dalam dokumen dan produk informasi lainnya.
6. **Manajemen Integrasi Data dan Interoperabilitas:** Melakukan integrasi data dengan merubah data menjadi bentuk yang konsisten, baik secara fisik maupun virtual. Sedangkan interoperabilitas adalah kemampuan data untuk dapat berkomunikasi dengan beberapa sistem.
7. **Manajemen Referensi dan Data Master:** Mengelola versi utama dan replika data, mengawasi pembuatan, pengubahan dan penghapusan kode dan data referensi lain, mendefinisikan kebutuhan manajemen master data, mengidentifikasi isu manajemen master data.
8. **Manajemen Data Warehouse dan Intelijen Bisnis:** Membuka akses dalam memberikan data yang mendukung keputusan dalam hal pelaporan dan analisis. Menyediakan kebutuhan intelijen bisnis dan matrik manajemen, dan mengidentifikasi isu intelijen bisnis.
9. **Manajemen Dokumen dan Konten:** Meliputi penyimpanan, perlindungan, indeks dan hak akses untuk menemukan data yang tidak terstruktur. Membuat dan mengelola metadata bisnis (nama, arti, aturan bisnis), mendefinisikan akses metadata dan kebutuhan integrasi, dan menggunakan metadata untuk membuat kepengurusan data dan keputusan tata kelola yang efektif. Mendefinisikan dan mengelola metadata bisnis merupakan jantung kepengurusan data.
10. **Manajemen Metadata:** Mengintegrasikan, mengendalikan dan mendistribusikan metadata.

11. **Manajemen Kualitas Data:** Mendefinisikan, mengawasi dan melakukan improvisasi kualitas data. Mendefinisikan kebutuhan kualitas data dan aturan bisnis, edit dan validasi aplikasi tes, membantu analisa, sertifikasi, audit kualitas data, memimpin usaha pembersihan data, mengidentifikasi cara yang proaktif untuk menyelesaikan penyebab utama rendahnya kualitas data, mempromosikan kesadaran tentang kualitas data dan memastikan kebutuhan kualitas data ditemukan. secara efektif menampilkan dan menganalisis kualitas data dalam hubungan dengan profesional data.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Badan Perencanaan Nasional Nomor 16 Tahun 2020, dan Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2021, serta tugas dan fungsi perangkat daerah, seluruh Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan manajemen data.

Perangkat Daerah penanggung jawab untuk Manajemen Data adalah **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah** dan **Dinas Komunikasi dan Informatika**.

7.4.4.4 Manajemen Aset TIK

Berdasarkan pengumpulan data hasil survei kepada 35 Perangkat Daerah di Kota Madiun, terdapat **5** Perangkat Daerah yang menyebutkan jika telah melaksanakan manajemen aset TIK, tetapi belum melaksanakan sesuai dengan program kegiatan yang terencana serta belum mengacu pada **framework** manajemen aset TIK. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen aset TIK di Pemerintah Kota Madiun masih **rendah**.

Salah satu framework yang dapat digunakan untuk melaksanakan manajemen aset TIK adalah ITIL 4.0 “*Asset Management*”. Pelaksanaan manajemen aset berdasarkan ITIL meliputi semua perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, cloud services dan perangkat client. Manajemen aset mencakup pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pembuangan dari aset organisasi yang kritis. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur daur hidup aset dan pengeluaran biaya dari peralatan dan infrastruktur TI. Kebutuhan aktivitas manajemen aset dapat berbeda tergantung jenis aset tersebut, seperti:

- 1) **Perangkat Keras:** Aset harus diberi label untuk kejelasan dalam identifikasi. Informasi yang perlu diketahui adalah lokasi aset untuk dapat melindungi aset dari pencurian atau kerusakan.
- 2) **Perangkat Lunak:** Aset harus dilindungi dari penyalinan yang tak sesuai peraturan. Organisasi harus memastikan bahwa persyaratan lisensi dipatuhi dan lisensi hanya digunakan kembali dengan cara yang diizinkan berdasarkan kontrak.
- 3) **Cloud-based:** Aset harus terdaftar di spesifik produk atau kelompok, sehingga biayanya dapat dikelola. Biaya harus dikelola sehingga organisasi memiliki fleksibilitas untuk meminta fitur baru atau penggunaan cloud saat dibutuhkan, dan untuk menghapus fitur yang tidak diperlukan, tanpa resiko biaya yang tidak terkendali.
- 4) **Perangkat client:** Aset harus diberikan kepada individu yang bertanggung jawab atas perawatan mereka. Proses diperlukan untuk mengelola perangkat yang hilang atau dicuri, dan alat mungkin diperlukan untuk menghapus data sensitif darinya atau memastikan bahwa data ini tidak hilang atau dicuri dengan perangkat.

Kerangka kerja lain yang berkaitan dengan manajemen aset adalah **Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018**, menyebutkan bahwa manajemen aset dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

Berdasarkan ITIL 4.0 “*Asset Management*”, terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan dalam melaksanakan manajemen aset yaitu meliputi:

- 1) Mendefinisikan, mengisi, dan memelihara daftar aset dalam hal struktur dan konten, dan fasilitas penyimpanan untuk aset dan media terkait.
- 2) Mengontrol siklus hidup aset (misalnya, memutakhirkan perangkat lunak usang atau memasukkan anggota staf baru dengan laptop dan ponsel) dan mencatat semua perubahan aset (status, lokasi, karakteristik, penugasan, dll).

- 3) Menyediakan data terkini dan historis, laporan, dan dukungan untuk praktik lain tentang aset TI.
- 4) Mengaudit aset, media terkait, dan kesesuaian (terutama dengan peraturan, dan syarat dan ketentuan lisensi) dan mendorong perbaikan korektif dan preventif untuk menangani masalah yang terdeteksi.

Berikut rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan manajemen Aset TIK untuk Kota Madiun:

1. **Pengelolaan Aset TIK** dengan menginventarisasi aset SPBE (data, Informasi, aplikasi, dan infrastruktur).
2. **Penyusunan Dokumen pedoman Perencanaan Aset TIK**
3. **Penyusunan Dokumen pedoman pengadaan aset Tik**
4. **Penyusunan Dokumen pedoman penghapusan Aset TIK**

Untuk Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen aset adalah **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**. Namun seluruh Perangkat Daerah tetap harus melakukan manajemen aset secara mandiri, khususnya pada **Subbagian Umum** di setiap Perangkat Daerah dengan tugas melaksanakan pengelolaan aset di Perangkat Daerah masing-masing.

7.4.4.5 Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Berdasarkan pengumpulan data hasil survei kepada 35 Perangkat Daerah di Kota Madiun, terdapat **7 Perangkat Daerah** yang menyebutkan jika telah melaksanakan manajemen sumber daya manusia, tetapi belum melaksanakan sesuai dengan program kegiatan yang terencana serta belum mengacu pada **framework** manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko di Pemerintah Kota Madiun masih **rendah**.

Manajemen Sumber Daya Manusia memungkinkan organisasi, pemimpin, dan manajer untuk fokus dalam menciptakan strategi orang yang efektif dan dapat ditindaklanjuti, dan untuk menjalankan strategi itu di berbagai tingkatan dalam organisasi. Strategi yang baik harus mendukung identifikasi peran dan pengetahuan terkait, serta keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menjaga organisasi tetap berjalan dari hari ke hari. Hal ini juga harus mengatasi teknologi yang muncul dan kepemimpinan dan kemampuan perubahan

organisasi yang diperlukan untuk memposisikan organisasi untuk pertumbuhan di masa depan.

Dasar hukum dalam manajemen sumber daya manusia diantaranya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2021. Sedangkan salah satu *framework* yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan manajemen sumber daya manusia ialah **ITIL 4.0 “Workforce & Talent Management”** dan **Peta Okupasi Nasional area fungsi TIK BNSP**. Praktik manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang tepat dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dan dalam peran yang benar untuk mendukung tujuan bisnisnya. Hal ini bermanfaat bagi organisasi untuk mengurangi backlog, meningkatkan kualitas, menghindari pengerjaan ulang yang disebabkan oleh cacat, dan mengurangi waktu tunggu sambil juga menutup kesenjangan pengetahuan dan keterampilan.

Berikut rekomendasi yang diberikan dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia meliputi:

1. Penyusunan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE

Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK.

2. Penyusunan Struktur berdasarkan kompetensi

Untuk mengetahui kompetensi tiap SDM yang ada maka perlu dilakukan penyusunan peta jabatan.

3. Pembuatan Dokumen Pencatatan dan Pelaporan

Setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus didokumentasikan dengan Menyusun Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK.

4. Pembinaan Sumber daya manusia SPBE

Agar pembinaan SDM tepat sasaran dan mendapatkan hasil yang optimal maka perlu adanya analisis kebutuhan pelatihan bagi pejabat TIK.

Seluruh Perangkat Daerah harus melakukan manajemen sumber daya manusia untuk sumber daya manusia yang ada di PD masing-masing yaitu pada **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Sedangkan untuk penanggung jawab dari manajemen SDM adalah **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**. Hal itu selaras dengan fungsi **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** yaitu melaksanakan urusan di bidang, pendidikan dan pelatihan penjenjangan, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional serta pengembangan kompetensi.

7.4.4.6 Manajemen Pengetahuan

Salah satu framework yang dapat digunakan untuk melaksanakan manajemen pengetahuan adalah **ITIL 4.0 “Knowledge Management”**. Pelaksanaan manajemen pengetahuan dalam ITIL bertujuan untuk membantu membuat keputusan selama proses layanan dengan mengontrol dan mengelola aliran informasi. Manajemen pengetahuan dapat memastikan bahwa pengetahuan yang didistribusikan kepada karyawan akurat, andal, dan dapat dipercaya. Meningkatkan kualitas informasi mempersiapkan karyawan untuk membuat keputusan yang efektif, dan hasil akhirnya adalah tim yang lebih efisien.

Proses manajemen pengetahuan dipecah menjadi aktivitas kunci yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proses, yaitu:

1) Strategi Manajemen Pengetahuan

Membuat strategi untuk mengidentifikasi informasi yang harus diproses melalui manajemen pengetahuan. Strategi harus didokumentasikan untuk memastikan semua anggota paham terhadap tujuan yang diharapkan. Langkah pertama untuk menciptakan strategi manajemen pengetahuan adalah mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ada di tim layanan TI. Kesenjangan pengetahuan didefinisikan sebagai perbedaan antara pengetahuan yang dibutuhkan *service desk* TI dan pengetahuan yang ada yang digunakannya saat ini. Beberapa cara untuk mendapatkan data yang relevan secara internal dari *service desk* TI adalah mengenali pola dan tren dalam insiden yang berulang, mengidentifikasi kategori/sub kategori dengan insiden terbanyak, dan survei dari pengguna akhir atau pelanggan. Pengetahuan dari sumber eksternal dapat diperoleh dari *database*, situs *web*, pelanggan, pemasok, pesaing, dan mitra.

2) Transfer Pengetahuan

Memutuskan bagaimana pengetahuan akan *ditransfer* di antara anggota tim dan antar departemen. Pengetahuan yang dikumpulkan, dianalisis, dan disimpan perlu dibagikan ke tim lain ketika mereka menggunakan berbagai proses di *service desk* seperti insiden, masalah, manajemen proyek, dll. Dalam hal ini, *transfer* pengetahuan dapat terjadi melalui program pendampingan, *work shadowing* serta bekerja berpasangan.

3) Manajemen informasi

Informasi hanya dapat menjadi pengetahuan jika dikelola dan didistribusikan dengan benar ke seluruh tim. Akses ke informasi sangat penting untuk proses manajemen pengetahuan. Manajemen informasi adalah bagian dari proses yang melibatkan pengumpulan data, pengelolaan informasi, dan menentukan bagaimana informasi ini akan diterjemahkan menjadi pengetahuan. Kebijakan dan prosedur dapat dibuat menggunakan informasi, tetapi harus terlebih dahulu membuat proses untuk mengatur informasi ini ke dalam prosedur dan mencatatnya dalam manual yang dapat diakses oleh anggota tim sesuai kebutuhan.

4) SMKS (Service Knowledge Management System)

Service Knowledge Management System (SKMS) adalah kumpulan sistem, alat, dan *database* yang diperlukan untuk manajemen pengetahuan yang sukses. Ada dua bagian penting dari SKMS, yaitu CMS dan CMDBs. *Configuration Management System* (CMS) mengelola semua informasi konfigurasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Laporan insiden, kesalahan yang dibuat, dan umpan balik adalah bagian dari sistem ini. *Configuration Management Databases* (CMDBs) berisi potongan-potongan kunci dari data konfigurasi yang telah dimasukkan ke dalam *database*. SKMS juga berisi beberapa lapisan yang memungkinkan informasi diproses sebagai pengetahuan dan tersedia untuk anggota tim dan orang lain dalam organisasi melalui alat dan basis data. Berikut adalah 4 lapisan SMKS:

a) Lapisan Presentasi memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi. Pada lapisan ini, pengguna disajikan dengan materi visual yang memungkinkan mereka untuk

mencari, menelusuri, dan memperbarui informasi yang mereka temukan di sistem. Pengguna juga dapat diberi kesempatan untuk berkolaborasi guna meningkatkan basis pengetahuan dan memastikan bahwa pengeditan dilakukan sesuai kebutuhan.

- b) Lapisan Pemrosesan Pengetahuan** memungkinkan pengguna untuk melaporkan informasi yang dapat dianalisis. Manajemen kinerja juga merupakan bagian dari lapisan ini dan dapat digunakan untuk menentukan apakah anggota tim memenuhi sasaran kinerja.
- c) Lapisan Integrasi Informasi** mengintegrasikan semua informasi dari bagian organisasi yang relevan di satu tempat. Jika organisasi memiliki mitra, informasi yang terkait dengan mitra ini juga dapat ditemukan di lapisan ini.
- d) Lapisan Integrasi Data** mengintegrasikan data yang harus dikelola untuk proses Manajemen Pengetahuan yang sukses dengan mengelola aplikasi, dokumen, dan file. Sumber data ditemukan di lapisan ini, serta alat yang dapat digunakan anggota tim untuk menerapkan data sebagai pengetahuan dengan benar.

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, diantaranya sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Pengetahuan**
- 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Pengetahuan SPBE**, yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya
- 3. Pelaksanaan Program Kerja SPBE Menginventarisasi Seluruh Aset SPBE (Data, Informasi, Aplikasi, Dan Infrastruktur)**, pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE

Seluruh Perangkat Daerah harus melaksanakan manajemen pengetahuan, namun untuk penanggung jawab dari pelaksanaan manajemen pengetahuan adalah **Dinas Komunikasi dan**

Informatika, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Sekretaris masing-masing Perangkat Daerah.

7.4.4.7 Manajemen Perubahan

Berdasarkan pengumpulan data hasil survei kepada 35 PD di Kota Madiun, terdapat **3 PD** yang menyebutkan jika telah melaksanakan manajemen perubahan, tetapi belum melaksanakan sesuai dengan program kegiatan yang terencana serta belum mengacu pada **framework** manajemen perubahan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko di Pemerintah Kota Madiun masih **rendah**.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Misi dari proses manajemen perubahan TI adalah untuk menerapkan perubahan dengan cara yang paling efisien, sambil meminimalkan dampak negatif pada pelanggan ketika perubahan diterapkan. **Best practice yang dapat digunakan adalah ITIL 4.0 “Change Management”**. Sebelum mulai menggunakan prosedur ITIL, maka harus menetapkan peran sebagai berikut:

- a) Inisiator Perubahan mengakui dan mengidentifikasi kebutuhan untuk perubahan. Inisiator perubahan harus seseorang yang bekerja secara langsung dengan alat layanan dukungan.
- b) Koordinator Perubahan menilai permintaan untuk perubahan yang berasal dari manajemen insiden, manajemen masalah, manajemen rilis, atau manajemen kontinuitas. Koordinator perubahan mendaftarkan perubahan yang diperlukan untuk menangani permintaan perubahan atau menerima permintaan perubahan dari pemrakarsa perubahan lainnya; menentukan risiko dan dampak perubahan yang diminta; menyiapkan rencana implementasi dengan membuat tugas; dan memantau kemajuan perubahan.
- c) Manajer perubahan umumnya diperlukan dalam organisasi menengah dan besar. Orang-orang ini bertanggung jawab untuk mengelola prosedur perubahan, menerima dan memprioritaskan permintaan perubahan, mengevaluasi tingkat risiko yang terkait

dengan permintaan, dan menyimpan catatan menyeluruh tentang hasil setiap perubahan.

- d) Dewan Penasihat Perubahan bertanggung jawab untuk otorisasi perubahan dan selanjutnya mengevaluasi permintaan ketika manajer perubahan menentukan bahwa ada risiko tinggi yang terkait dengan permintaan ini. Dewan memperhitungkan dampak perubahan yang diminta terhadap semua pihak yang terkena dampak. Ketika perubahan berisiko tinggi ini menjadi perhatian dewan penasihat perubahan, dewan akan menjadwalkan pertemuan dengan agenda terperinci untuk menentukan bagaimana melanjutkannya.
- e) Approver memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak perubahan.
- f) Tim Implementasi Perubahan merupakan tim yang bertanggung jawab untuk benar-benar membuat perubahan. Manajer TI, akan sering bertanggung jawab untuk mengawasi perubahan.

Ada berbagai jenis permintaan perubahan, atau kelas perubahan, yang biasanya dikelola dengan cara yang berbeda:

- a. Perubahan standar adalah perubahan pada layanan atau infrastruktur TI di mana proses implementasi dan risikonya diketahui di muka. Perubahan ini dikelola sesuai dengan kebijakan yang sudah dimiliki oleh organisasi TI. Karena perubahan ini tunduk pada kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, perubahan tersebut adalah yang paling mudah untuk diprioritaskan dan diterapkan, dan sering kali tidak memerlukan persetujuan dari perspektif manajemen risiko.
- b. Perubahan normal adalah perubahan yang harus melalui proses perubahan sebelum disetujui dan diimplementasikan. Jika berisiko tinggi, dewan penasihat perubahan harus memutuskan apakah perubahan akan diterapkan atau tidak.
- c. Perubahan darurat muncul ketika terjadi kesalahan atau ancaman yang tidak terduga, seperti ketika cacat pada infrastruktur yang terkait dengan layanan perlu segera ditangani. Ancaman keamanan adalah contoh lain dari situasi darurat yang mengharuskan perubahan segera dilakukan.

Berdasarkan pengumpulan data hasil survei kepada 35 PD di Kota Madiun, terdapat **5 PD** yang menyebutkan jika telah

melaksanakan manajemen pengetahuan, tetapi belum melaksanakan sesuai dengan program kegiatan yang terencana serta belum mengacu pada **framework** manajemen pengetahuan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko di Pemerintah Kota Madiun masih **rendah**.

Berdasarkan kondisi tersebut, rekomendasi kegiatan yang diberikan adalah:

1. Penyusunan Log Manajemen Perubahan

Penyusunan Log Manajemen perubahan pada unit kerja pusat data dan informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan seluruh Perangkat Daerah.

2. Penyusunan Dokumen SOP Perubahan

Penyusunan SOP manajemen perubahan SPBE informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan seluruh Perangkat Daerah.

Untuk Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen perubahan adalah **Dinas Komunikasi dan Informatika** dan **seluruh Perangkat Daerah** harus melaksanakan manajemen perubahan terhadap aset yang dimiliki Perangkat Daerah tersebut.

7.4.4.8 Manajemen Layanan

Berdasarkan pengumpulan data hasil survei kepada 35 Perangkat Daerah di Kota Madiun, terdapat **5 Perangkat Daerah** yang menyebutkan jika telah melaksanakan manajemen layanan, tetapi belum melaksanakan sesuai dengan program kegiatan yang terencana serta belum mengacu pada **framework** manajemen layanan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko di Pemerintah Kota Madiun masih **rendah**.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Pemerintah Kota Madiun, hanya 1 dari 45 PD yang telah melaksanakan manajemen Layanan, namun manajemen layanan belum dilakukan dengan program kegiatan yang terencana dan mengacu pada standar atau pedoman Manajemen Layanan SPBE.

Dalam rangka mewujudkan layanan SPBE yang baik, dapat menggunakan best practice yang disediakan oleh ITIL. Pelaksanaan manajemen layanan dapat mengacu dari beberapa proses yang ada di ITIL 4.0 yaitu **service desk, incident management, problem management, monitoring & event management dan service request management.**

1) **Service Desk**

Service desk menyediakan berbagai saluran untuk akses termasuk telepon, portal layanan dan aplikasi mobile, chatting, email, service desk langsung, dan media sosial. Betapa pun efisiennya *service desk* dan orang-orangnya, akan selalu ada masalah yang membutuhkan eskalasi dan dukungan pendukung dari tim lain. Tim dukungan dan pengembangan perlu bekerja sama erat dengan *service desk* untuk menyajikan dan memberikan pendekatan 'kombinasi' kepada pengguna dan pelanggan.

Staf *service desk* memerlukan pelatihan dan kompetensi dalam keterampilan teknis dan bisnis, terutama keterampilan layanan pelanggan seperti empati, analisis insiden dan penentuan prioritas, komunikasi yang efektif, dan kecerdasan emosional. Keterampilan utama adalah untuk dapat sepenuhnya memahami dan mendiagnosis insiden tertentu dalam hal prioritas bisnis, dan mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya, menggunakan keterampilan, pengetahuan, orang, dan proses yang tersedia.

Berikut rekomendasi pengadaan Service Desk untuk PD Kota Madiun. Seluruh PD pada Pemerintah Kota Madiun diusulkan adanya Service Desk. Untuk detailnya dapat dilihat pada **Tabel 7.9** berikut

Tabel 7.9 Usulan Service Desk Pemerintah Kota Madiun

Kode PD	Nama PD
1	Bagian Organisasi
2	Bagian Hukum
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan

Kode PD	Nama PD
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
5	Bagian Umum
6	Bagian Pemerintahan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah
10	Badan Pendapatan Daerah
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Inspektorat Daerah
14	Sekretariat DPRD
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
20	Dinas Pendidikan
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
22	Dinas Lingkungan Hidup
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	Dinas Perhubungan
25	Dinas Komunikasi dan Informatika
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode PD	Nama PD
29	Dinas Perdagangan
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
32	Kecamatan Manguharjo
33	Kecamatan Kartoharjo
34	Puskesmas Manguharjo
35	Puskesmas Sukosari

2) ***Incident Management (Manajemen Insiden)***

Manajemen insiden tidak dilaksanakan untuk analisis terkait akar penyebab dari suatu insiden terjadi, akan tetapi, fokusnya adalah melakukan sesuatu untuk memulihkan layanan. ITIL merekomendasikan proses manajemen dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

a. Identifikasi Sumber Insiden

Pelaporan insiden dapat dilakukan dengan melaporkan layanan secara langsung, panggilan telepon, email, dan pemberitahuan otomatis, seperti perangkat lunak pemantauan jaringan atau utilitas pemindaian sistem. Service desk kemudian memutuskan apakah masalah tersebut benar-benar insiden atau permintaan. Permintaan merupakan hal yang berbeda dari insiden dan cara penanganannya pun berbeda.

b. Pencatatan Insiden

Setelah diidentifikasi sebagai insiden, service desk mencatat insiden tersebut sebagai tiket. Tiket harus menyertakan informasi, seperti nama pengguna dan informasi kontak, deskripsi insiden, serta tanggal dan waktu laporan. Proses logging juga dapat mencakup kategorisasi, prioritas, dan langkah-langkah yang diselesaikan oleh service desk.

c. Kategorisasi insiden

Kategorisasi insiden merupakan langkah penting dalam proses manajemen insiden. Kategorisasi melibatkan dan menetapkan kategori setidaknya satu sub kategori untuk

insiden tersebut. Tindakan ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, memungkinkan service desk untuk mengurutkan dan memodelkan insiden berdasarkan kategori dan sub kategorinya. Kedua, memungkinkan beberapa masalah untuk diprioritaskan secara otomatis. Tujuan ketiga adalah untuk menyediakan pelacakan insiden yang akurat.

d. Prioritas Insiden

Prioritas insiden penting untuk kepatuhan respons SOP. Prioritas insiden ditentukan oleh dampaknya terhadap pengguna dan bisnis serta urgensinya.

e. Tanggapan Insiden

Setelah diidentifikasi, dikategorikan, diprioritaskan, dan dicatat, service desk dapat menangani dan menyelesaikan insiden tersebut. Penyelesaian insiden melibatkan lima langkah:

- i. Diagnosa awal. Ini terjadi ketika pengguna menjelaskan masalahnya dan menjawab pertanyaan pemecahan masalah.
- ii. Eskalasi insiden. Ini terjadi ketika insiden memerlukan dukungan lanjutan, seperti mengirim teknisi di lokasi atau bantuan dari staf pendukung.
- iii. Investigasi & diagnosis. Proses ini berlangsung selama pemecahan masalah ketika hipotesis insiden awal dikonfirmasi sebagai benar. Setelah insiden didiagnosis, staf dapat menerapkan solusi, seperti mengubah pengaturan perangkat lunak, penerapan patch perangkat lunak, atau memesan perangkat keras baru.
- iv. Resolusi & pemulihan. Ini adalah saat service desk mengonfirmasi bahwa layanan telah dipulihkan.
- v. Penutupan insiden. Pada titik ini, insiden dianggap selesai dan proses insiden berakhir.

3) Problem Management (Manajemen Masalah)

Ketika pengguna terus menghadapi insiden yang sama tanpa penyelesaian, mereka kehilangan kepercayaan pada kemampuan service desk untuk menyelesaikan masalah apa pun. Oleh karena itu tujuan utama dari manajemen masalah adalah untuk mengidentifikasi, memecahkan masalah,

mendokumentasikan, dan menyelesaikan akar penyebab insiden berulang. Proses manajemen masalah ITIL memiliki beberapa langkah, yaitu:

a. **Mendeteksi masalah**

Masalah muncul baik melalui eskalasi dari service desk, atau melalui evaluasi proaktif pola insiden dan peringatan dari manajemen event atau proses peningkatan layanan berkelanjutan. Tanda-tanda masalah termasuk insiden yang terjadi di seluruh organisasi dengan kondisi serupa, insiden yang berulang meskipun pemecahan masalah berhasil, dan insiden yang tidak dapat diselesaikan di service desk.

b. **Mencatat masalah**

Data masalah terkait, seperti waktu dan tanggal kejadian, insiden terkait, gejala, langkah pemecahan masalah sebelumnya, dan kategori masalah, semuanya membantu tim manajemen masalah meneliti akar masalahnya.

c. **Mengkategorikan masalah**

Kategorisasi masalah harus sesuai dengan kategorisasi insiden. Kategorisasi insiden (dan masalah) melibatkan penetapan kategori utama dan sekunder untuk masalah tersebut.

d. **Memprioritaskan masalah**

Prioritas masalah ditentukan oleh dampaknya terhadap pengguna dan bisnis serta urgensinya.

e. **Penyelidikan dan diagnosis masalah**

Kecepatan penyelidikan dan diagnosis masalah tergantung pada prioritas yang ditetapkan. Masalah dengan prioritas tinggi harus selalu ditangani terlebih dahulu, karena dampaknya terhadap layanan adalah yang terbesar. Kategorisasi yang benar sangat membantu karena mengidentifikasi tren lebih mudah ketika kategori masalah berkorelasi dengan kategori insiden.

f. **Mengidentifikasi Solusi Masalah**

Memberikan solusi terkait masalah sangat diperlukan karena masalah tidak bisa diselesaikan di tingkat insiden. Memberikan solusi merupakan tindakan sementara yang bisa dilakukan, salah satu caranya adalah service desk

dapat memulihkan layanan pengguna saat masalah sedang dalam proses penanganan. Laporan masalah dapat dianggap selesai ketika masalah tersebut sudah selesai ditangani dan dapat berjalan sesuai dengan semula.

g. **Melaporkan catatan kesalahan yang diketahui**

Setelah solusi telah diidentifikasi, itu harus dikomunikasikan kepada staf dalam organisasi sebagai kesalahan yang diketahui. Ini praktik yang baik untuk merekam kesalahan yang diketahui baik di basis pengetahuan insiden dan apa yang disebut ITIL sebagai *known error database* (KEDB). Mendokumentasikan solusi memungkinkan service desk untuk menyelesaikan insiden dengan cepat dan menghindari masalah lebih lanjut yang diangkat pada masalah yang sama.

h. **Menyelesaikan masalah**

Masalah harus diselesaikan bila memungkinkan dengan menyelesaikan penyebab yang mendasari serangkaian insiden dan mencegah insiden tersebut terjadi lagi. Beberapa resolusi mungkin memerlukan dewan manajemen perubahan, karena dapat memengaruhi tingkat layanan. Semua risiko harus dievaluasi dan diperhitungkan sebelum menerapkan resolusi. Dokumentasikan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah untuk menambah pengetahuan organisasi.

i. **Menutup masalah**

Langkah ini seharusnya hanya terjadi setelah masalah dilaporkan, dikategorikan, diprioritaskan, diidentifikasi, didiagnosis, dan diselesaikan. Sementara banyak organisasi berhenti pada langkah ini, namun berdasarkan ITIL, manajemen masalah tidak hanya berhenti di bagian ini, tetapi perlu satu step lagi, yaitu meninjau masalah.

j. **Meninjau masalah**

Meninjau masalah dikenal juga sebagai proses tinjauan masalah utama. Tinjauan masalah utama adalah kegiatan organisasi yang mencegah masalah di masa depan. Selama peninjauan, tim manajemen masalah mengevaluasi dokumentasi masalah dan mengidentifikasi apa yang terjadi

dan mengapa. Tinjauan masalah ini harus menghasilkan proses yang lebih baik, pelatihan staf, atau dokumentasi yang lebih lengkap.

4) Event Management (Manajemen Peristiwa)

Selama fase desain layanan TI, organisasi harus menentukan jenis peristiwa mana yang perlu dibuat, dan bagaimana peristiwa itu akan dihasilkan, untuk setiap jenis item konfigurasi (CI) yang terlibat dalam penyampaian layanan. Berikut merupakan siklus hidup event management:

a. Terjadinya Event

Dalam event management ITIL, kuncinya adalah menentukan jenis kejadian yang signifikan bagi operasional dan memastikan memiliki sistem untuk mendeteksinya.

b. Notifikasi Event

Notifikasi biasanya dikirim oleh alat pemantauan atau CI (*configuration item*). Pada tahap ini, ini hanyalah pemberitahuan bahwa suatu peristiwa telah terjadi dan biasanya belum ditafsirkan atau dikorelasikan untuk memahami makna atau dampaknya.

c. Deteksi Event

Pada langkah ini, sistem pemantauan, agen otomatis, atau solusi manajemen sistem menerima pemberitahuan dan menentukan arti peristiwa tersebut.

d. Log Event

Catatan peristiwa dibuat, bersama dengan tindakan selanjutnya yang diambil.

e. Pemfilteran dan korelasi

Langkah pertama dari proses ini hanyalah memfilter peristiwa mana yang harus diabaikan dan peristiwa mana yang akan diteruskan ke sistem manajemen peristiwa. Di tingkat korelasi kedua, mesin korelasi menggunakan aturan bisnis yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan pentingnya peristiwa peringatan dan pengecualian, dan memutuskan langkah selanjutnya yang sesuai.

f. Tanggapan peristiwa / tindakan lebih lanjut

Semua peristiwa (dan tanggapan) harus dicatat. Selain itu, berdasarkan jenis dan tingkat keparahan peristiwa, mesin korelasi dapat menentukan apakah peristiwa itu pantas untuk ditingkatkan ke tim atau individu, atau dalam kasus peringatan dan pengecualian yang lebih parah, bahkan secara otomatis membuat insiden, masalah, atau perubahan.

g. **Menutup Event**

Jika suatu peristiwa menghasilkan insiden, masalah, atau perubahan yang dibuat, penutupan event harus ditangani melalui proses masing-masing. Sebuah event dapat "ditutup" dalam sistem manajemen event dengan memastikan event dicatat dengan benar serta tindakan selanjutnya yang diambil, dan termasuk tautan ke insiden, masalah, atau permintaan perubahan yang sesuai.

5) **Service Request Management** (Manajemen Permintaan Layanan)

Tujuan dari pelaksanaan manajemen permintaan layanan adalah untuk mendukung kualitas layanan yang disepakati dengan menangani semua permintaan layanan yang telah ditentukan sebelumnya, yang dimulai oleh pengguna dengan cara yang efektif dan ramah pengguna (*user friendly*). Manajemen permintaan layanan bergantung pada proses dan prosedur yang dirancang dengan baik, yang dioperasikan melalui otomatisasi untuk memaksimalkan efisiensi praktik. Berikut hal yang digunakan ITIL dalam proses Pemenuhan Permintaan :

a. **Permintaan Layanan**

Permintaan formal dari pengguna untuk sesuatu yang akan diberikan, misalnya permintaan informasi atau saran untuk mengatur ulang kata sandi atau menginstal *workstation* untuk pengguna baru. Rincian Permintaan Layanan dicatat pada Catatan Permintaan Layanan.

b. **Model Permintaan**

Model Permintaan Layanan mendefinisikan langkah-langkah spesifik yang disepakati yang akan diikuti untuk Permintaan Layanan dari jenis atau kategori tertentu.

c. **Catatan Permintaan**

Layanan Catatan yang berisi semua detail dari Permintaan Layanan. Permintaan Layanan adalah permintaan formal dari pengguna untuk menyediakan sesuatu, misalnya permintaan informasi atau saran untuk mengatur ulang kata sandi atau menginstal *workstation* untuk pengguna baru.

d. **Informasi Status Permintaan Layanan**

Pesan yang berisi status saat ini dari Permintaan Layanan yang dikirim ke pengguna yang sebelumnya dilaporkan meminta layanan. Informasi status biasanya diberikan kepada pengguna di berbagai titik selama siklus hidup Permintaan Layanan.

Berikut direkomendasikan layanan yang harus disediakan dalam mendukung *service request management*:

1. **Layanan Perizinan Online**

Penyedia platform layanan perizinan online.

2. **Layanan Kepegawaian Online**

Penyedia platform layanan kepegawaian online.

3. **Layanan Pengaduan Dan Pelaporan**

Penyediaan platform pengaduan dan pelaporan layanan Rumah Sakit Umum Daerah.

4. **Layanan Dan Pengaduan Online**

Pengelolaan platform pelayanan dan pengaduan online.

Setiap Perangkat Daerah harus melaksanakan manajemen layanan terhadap layanan yang dimiliki oleh PD tersebut. Untuk penanggung jawab dari pelaksanaan manajemen layanan adalah **Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, serta **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**.

7.4.4.9 Kesimpulan Manajemen SPBE

Setelah penjelasan dari analisis usulan manajemen SPBE maka dapat ditarik kesimpulan yang disajikan dalam **Tabel 7.10**

Tabel 7.10 Hasil Kesimpulan Manajemen SPBE

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
A. Manajemen Risiko SPBE			
Referensi Hukum: Peraturan Menteri RB 5/2020, ISO 31000			
1	Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Risiko SPBE	Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi penetapan konteks, penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko)	Inspektorat Seluruh PD
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Manajemen Risiko SPBE	Pemantauan Implementasi Kebijakan, Pedoman, Panduan, Instruksi Kerja terkait Risiko SPBE	Inspektorat
3	Penentuan struktur pelaksanaan kegiatan Manajemen Risiko SPBE	Identifikasi rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko yang termuat dalam renstra/RKPD Perangkat Daerah	Inspektorat
4	Pelaksanaan Komunikasi dan Konsultasi	Penerapan Manajemen Risiko melalui komunikasi dan konsultasi dengan mengagendakan rapat berkala, rapat insidental, dan FGD	Inspektorat
5	Penetapan Konteks Risiko SPBE	Inventarisasi Informasi Umum Penerapan Manajemen Risiko (Jika terdapat perubahan ruang lingkup risiko, maka kegiatan dapat disesuaikan setiap tahunnya)	Inspektorat
		Identifikasi Sasaran SPBE dengan menguraikan sasaran UPR SPBE, sasaran SPBE, indikator kinerja SPBE dan target kinerja SPBE (Jika	Inspektorat

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
		terdapat perubahan ruang lingkup risiko, maka kegiatan dapat disesuaikan setiap tahunnya)	
		Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE dengan menguraikan unit pemilik risiko SPBE, Pemilik Risiko SPBE, Koordinator Risiko SPBE, dan Pengelola Risiko SPBE (Jika terdapat perubahan ruang lingkup risiko, maka kegiatan dapat disesuaikan setiap tahunnya)	Inspektorat
		Identifikasi Pemangku Kepentingan meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, instansi pemerintah atau non instansi pemerintah (Jika terdapat perubahan ruang lingkup risiko, maka kegiatan dapat disesuaikan setiap tahunnya)	Inspektorat
		Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Manajemen Risiko (Jika terdapat perubahan ruang lingkup risiko, maka kegiatan dapat disesuaikan setiap tahunnya)	Inspektorat
		Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE	Inspektorat
		Penyusun dan Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko SPBE (Jika terdapat perubahan ruang lingkup	Inspektorat

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
		risiko, maka kegiatan dapat disesuaikan setiap tahunnya)	
6	Penilaian Risiko SPBE	Identifikasi Risiko dengan menguraikan jenis risiko SPBE, Penyebab, kategori, dampak, dan area dampak	Inspektorat
		Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE	Inspektorat
		Penetapan Kategori Risiko SPBE	Inspektorat
		Penetapan Area Dampak Risiko SPBE	Inspektorat
		Penetapan Kriteria Risiko SPBE	Inspektorat
		Penentuan Selera Risiko SPBE disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE serta konteks internal dan eksternal masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Inspektorat
		Analisis Risiko SPBE meliputi Sistem Pengendalian, Level Kemungkinan, Level Dampak dan Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE	Inspektorat
		Evaluasi Risiko SPBE (Penyusunan evaluasi risiko SPBE)	Inspektorat
		7	Evaluasi Risiko SPBE

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
8	Penanganan Risiko SPBE	Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya	Inspektorat
9	Pemantauan dan Reviu	Pengukuran perubahan tingkat dukungan, kesadaran, dan pemahaman dan pemangku kepentingan terhadap Manajemen Risiko SPBE	Inspektorat
		Pemutakhiran rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE	Inspektorat
		Pelaksanaan perbaikan berkelanjutan	Inspektorat
10	Pencatatan dan Pelaporan	Penyusunan laporan manajemen resiko SPBE secara periodik dan insidental	Inspektorat
B. Manajemen Keamanan Informasi			
Referensi Hukum: BSSN 4/2020, BSSN 10/2019, ISO 27001, Indeks KAMI			
1	Penyusunan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi	Penyusunan dokumen pedoman keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi
2	Pembuatan Kerangka Kerja Keamanan Informasi	Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang meliputi 6 proses aktivitas manajemen keamanan informasi yaitu:	Dinas Komunikasi dan Informasi
		- Penetapan Ruang Lingkup	

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
		<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Penanggungjawab - Perencanaan - Dukungan Pengoperasian - Evaluasi Kinerja - Perbaikan berkelanjutan <p>Dimana proses tersebut akan ditetapkan oleh Walikota dengan dokumen Surat Keputusan (SK) yang telah dikomunikasikan dan didokumentasikan oleh Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	
3	Penetapan Ruang Lingkup	Pelaksanaan program kerja SPBE menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi
4	Penetapan Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggung-Jawab Proses Manajemen Keamanan Informasi adalah SEKDA sebagai Koordinator SPBE - Sekda menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE, terdiri: 	Dinas Komunikasi dan Informasi

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
		1) pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing; dan	
		2) pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.	
5	Perencanaan dan Pelaksanaan	Program Kerja keamanan SPBE dibuat oleh Tim Pelaksana Teknis Keamanan SPBE yaitu: - Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE dengan melakukan Sosialisasi atau Pelatihan	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Perencanaan dan Pelaksanaan	- Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE dengan melakukan menginventarisasi seluruh aset SPBE, mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Perencanaan dan Pelaksanaan	- Peningkatan Keamanan SPBE dengan melakukan menerapkan standar teknis dan prosedur	Dinas Komunikasi dan Informasi

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
		Keamanan SPBE, menguji fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE	
	Perencanaan dan Pelaksanaan	- Penanganan Insiden dengan melakukan mengidentifikasi sumber serangan, menganalisis informasi, memprioritaskan penanganan insiden, mendokumentasi bukti insiden mendokumentasi bukti insiden, memitigasi atau mengurangi dampak risiko	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Perencanaan dan Pelaksanaan	Melakukan audit keamanan informasi berdasarkan peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informasi
C. Manajemen Data			
Referensi Hukum: Peraturan Bappenas Nomor 16 Tahun 2020, Perpres Nomor 39 Tahun 2019			
1	Pembuatan dokumen pedoman manajemen data pada IPPD	Penyusunan dokumen pedoman manajemen data pada IPPD	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Manajemen Data	Pemantauan Implementasi Kebijakan, Pedoman, Panduan, Instruksi Kerja terkait Manajemen Data	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
			Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah	Spesifikasi data yang terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Penyusunan Proses Manajemen Data	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Arsitektur Data - Pengelolaan Data Induk - Pengelolaan Data Referensi - Pengelolaan Basis Data - Pengelolaan Kualitas Data 	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Manajemen Data Induk dan Data Referensi	<p>Pengumpulan data induk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappedalitbang</p> <p>Pemeriksaan data induk dan data referensi</p> <p>Penyebarluasan data induk dan data referensi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappedalitbang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
			Daerah
			- Dinas Komunikasi dan Informatika
			- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			- Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Manajemen Basis Data	Penyimpanan data pada pusat data nasional	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Manajemen Kualitas Data	Perencanaan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pematkhiran data	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika
D. Manajemen Aset TIK			
Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018, ITIL			
1	Proses Pengelolaan Aset TIK mencakup (Perencanaan, Pengadaan, perawatan dan	Menginventarisasi aset TIK yang mencakup:	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Dinas Komunikasi dan
		- perangkat lunak	
		- perangkat keras,	
		- data dan informasi, - infrastruktur,	

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
	penghapusan Aset TIK)	- SDM TIK,	Informatika
		- lisensi,	
		- SOP TIK,	
		- <i>outsorce services</i> ,	
		- <i>IT asset register</i> .	
2	Perencanaan dokumen pedoman Aset TIK	Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			- Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Evaluasi dan Monitoring pedoman pengadaan aset TIK	Penyusunan laporan pengadaan aset TIK	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			- Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Evaluasi dan Monitoring pedoman penghapusan Aset TIK	Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			- Dinas Komunikasi dan Informatika
E. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE			
Referensi Hukum: Perpres Nomor 59 Tahun 2018, Permenpan Nomor 59 Tahun 2021, Permenkominfo Nomor 9 Tahun 2021			
1	Perencanaan Kegiatan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	Analisis kompetensi SDM SPBE yang mencakup:	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Dinas
		- Proses Bisnis Pemerintahan	
		- Arsitektur SPBE Data dan	
		- Informasi	

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
		<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan SPBE - Aplikasi SPBE - Infrastruktur SPBE 	Komunikasi dan Informatika - Bagian Organisasi
2	Pelaksanaan Struktur berdasarkan kompetensi	Penyusunan dokumen peta jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Dinas Komunikasi dan Informatika - Bagian Organisasi
	Pengelolaan Sumber daya manusia SPBE	Proses Manajemen SDM SPBE meliputi beberapa proses yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan SDM SPBE (Kebutuhan Kompetensi & Analisis Jabatan) - Pengadaan Kompetensi SDM SPBE (Perekrutan/Seleksi/Sertifikasi/Bintek/Training) 3) - Pengelolaan Karir & Evaluasi/Penilaian Kinerja SDM SPBE - Penghargaan/Kesejahteraan SDM SPBE - Hubungan Kerja (Kontrak, Penghentian) 	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Dinas Komunikasi dan Informatika - Bagian Organisasi
4	Evaluasi dan Monitoring Dokumen Pencatatan dan Pelaporan Kinerja	Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK dengan tahapan pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan & Strategi - Pengumpulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Dinas

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan, - Penyimpanan, - Penggunaan, - Alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. 	Komunikasi dan Informatika - Bagian Organisasi
F. Manajemen Pengetahuan			
Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018			
1	Penyusunan Dokumen pedoman manajemen pengetahuan	Penyusunan dokumen Pedoman Manajemen pengetahuan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Pelaksanaan manajemen pengetahuan	Pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat program kerja SPBE menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Pembinaan Manajemen Pengetahuan	Pelaksanaan pendampingan manajemen pengetahuan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Evaluasi dan Monitoring Manajemen Pengetahuan	Laporan pelaksanaan pengembangan manajemen pengetahuan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
G. Manajemen Perubahan SPBE			
Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018			
1	Penyusunan Log Manajemen perubahan	Pembuatan dokumen Kebijakan dan pedoman manajemen perubahan	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pelaksanaan Manajemen Perubahan	Penerapan dokumen kebijakan dan pedoman untuk seluruh proses dan dokumen yang ada diseluruh unit kerja (versi baru)	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Pembinaan Manajemen Perubahan	Sosialisasi kebijakan dan pedoman manajemen perubahan yang telah dibuat untuk seluruh unit kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Monitoring dan evaluasi manajemen perubahan	Laporan pelaksanaan manajemen perubahan	Dinas Komunikasi dan Informatika
H. Manajemen Layanan SPBE			
Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018, ITIL			
1	Perencanaan Manajemen Layanan	Penyusunan Klasifikasi Sistem (d disesuaikan dengan ruang lingkup)	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD
		Penetapan Target Pelayanan Pengguna (d disesuaikan dengan ruang lingkup)	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD
		Penetapan Target Pengoperasionalan Layanan (d disesuaikan dengan ruang lingkup)	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD
		Perumusan Katalog Layanan (d disesuaikan dengan ruang lingkup)	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD
2	Pelayanan Pengguna	Permintaan Layanan (bergantung kepada proses yang ada di unit kerja masing-masing)	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
		Perumusan Penanganan Gangguan	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD
3	Pengoperasian Layanan	Pemantauan dan Pemeliharaan Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD
		Pemulihan Layanan (bergantung kepada pemantauan dan pemeliharaan layanan yang telah dilakukan)	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD
4	Pengelolaan Layanan	Pengembangan Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD
		Publikasi Layanan (bergantung kepada kebutuhan yang ditinjau dari misi dan fungsi layanan tertentu)	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD
5	Evaluasi	Penyusunan Laporan Evaluasi	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD

7.5 Analisis Penyelenggara SPBE

Pada Subtansi 7.4 ini menjelaskan kondisi eksisting dan usulan Penyelenggara SPBE serta SDM TIK Pemerintah Kota Madiun. Pembahasan perihal usulan yaitu mengenai Tim Koordinasi SPBE, Tim Teknis Penerapan SPBE, Kompetensi SDM SPBE, Pengadaan SDM SPBE serta Kebutuhan Training dan Sertifikasi.

7.5.1 Identifikasi Referensi Hukum Penyelenggara SPBE

Pedoman hukum yang menjadi dasar acuan terkait peraturan-peraturan dalam penyelenggara SPBE Pemerintah Kota Madiun, meliputi:

1. **Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. **Keputusan Walikota Madiun Nomor 180.45-401.021/129/2021** Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

7.5.2 Identifikasi Kondisi Eksisting

Pemerintah Kota Madiun saat ini sudah memiliki tim koordinasi SPBE. Tim koordinasi SPBE Pemerintah Kota Madiun diatur dalam **Keputusan Walikota Madiun Nomor 180.45-401.021/129/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun**. Dimana dalam surat keputusan telah diatur tugas dari tim koordinasi SPBE yaitu:

Tabel 7.11 Kondisi Eksisting Tim Koordinasi SPBE

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	Pelindung	Walikota Madiun
2	Pembina	Wakil Walikota Madiun
3	Koordinator	Sekretaris Daerah
4	Wakil Koordinator I	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
5	Wakil Koordinator II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6	Anggota	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
		Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat
		Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
		Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat
		Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
		Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
		Sekretaris DPRD
		Inspektur
		Kepala Dinas Pendidikan
		Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
		Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kepala Dinas Perdagangan
		Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kepala Dinas Perhubungan
		Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
		Pemadaman Kebakaran
		Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Badan Pendapatan Daerah
		Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Direktur rumah Sakit Umum Daerah
		Camat Kartoharjo
		Camat Manguharjo
		Camat Taman

7.5.3 Identifikasi Gap Penyelenggara SPBE

Identifikasi Gap penyelenggara SPBE akan dijelaskan mengenai kesenjangan antara kondisi eksisting penyelenggara SPBE dan SDM TIK di Pemerintah Kota Madiun. Identifikasi ini dimaksudkan guna memberikan acuan terkait seberapa besar kesenjangan kondisi eksisting penyelenggara SPBE dan SDM TIK agar dapat mencapai kondisi ideal. Lebih detail dapat dilihat pada **Tabel 7.12** hasil identifikasi Gap Penyelenggara SPBE.

Tabel 7.12 Identifikasi Gap Penyelenggara SPBE

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
Ketersediaan SDM TIK	Dari hasil kondisi eksisting Ketersediaan SDM TIK, 33 (94%) PD pada Pemerintah Kota Madiun telah memiliki 121 pegawai yang	Setiap PD di Pemerintah Kota Madiun memiliki SDM pada masing-masing PD.	Dari 35 PD pada Pemerintah Kota Madiun 2 atau (6%) PD masih belum memiliki SDM TIK.

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	ditunjuk sebagai SDM TIK. Dan sebanyak 2 (6%) PD masih belum memiliki pegawai yang ditunjuk sebagai SDM TIK.		
Ketersediaan Tupoksi pada SDM TIK SPBE	Pada kondisi eksisting ketersediaan Tupoksi SDM TIK SPBE, mayoritas 35 PD Pemerintah Madiun 93 SDM TIK atau sebesar (77%) telah memiliki tupoksi/SK . Sedangkan 25 SDM TIK atau (20%) masih belum memiliki Tupoksi/SK , serta 3 SDM TIK atau (2 %) tidak menyertakan bukti ada atau tidak adanya Tupoksi/SK	Setiap PD di Pemerintah Kota Madiun memiliki divisi/tim khusus untuk mengelola SI/TI secara struktur organisasi yaitu memiliki SK/Tupoksi khusus untuk pekerjaan terkait TIK.	Dari 35 PD pada Pemerintah Kota Madiun, sebanyak 25 SDM TIK atau 20% belum memiliki tupoksi/SK . Serta 3 SDM TIK atau 2% tidak menyertakan bukti tupoksi/SK .
Kompetensi SDM TIK sesuai peta okupasi	Pada kondisi eksisting Kompetensi SDM TIK sesuai peta okupasi, terdapat 9 unit	Pemerintah daerah memiliki SDM TIK yang berkompetensi pada 16 fungsi kunci di Peta Okupasi.	Terdapat 8 (delapan) kompetensi yang belum dimiliki oleh PD yaitu <i>IT</i>

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	<p>kompetensi dengan 8 fungsi kunci.</p>		<p><i>Governance and Management, IT Project Management, IT Enterprise Architecture, IT and Computing Facilities Management, IT Multimedia, IT Mobility and Internet of Things, Integration Application System, dan IT Consultancy and Advisory.</i></p>
<p>Kompetensi SDM TIK SPBE</p>	<p>Dari keseluruhan SDM TIK yang dimiliki PD Pemerintah Kota Madiun, mayoritas Kompetensi SDM TIK yaitu sebagai Operator/User System sebanyak 58 orang.</p>	<p>Terdapat 4 kompetensi yang dimiliki SDM TIK yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi perencanaan SPBE 2. Rekayasa proses bisnis Pemerintah 3. Pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal 4. Pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan 	<p>Pada Pemerintah Kota Madiun masih terdapat 2 PD yang masih belum memiliki SDM TIK yaitu Bagian Pemerintahan serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
		responsif.	
Pendidikan SDM TIK SPBE	Berdasarkan hasil data survei telah didapatkan yang kemudian dikalkulasikan, Pendidikan terakhir SDM TIK pada Pemerintah Madiun sebagian besar yaitu S1 dan D3 .	SDM TIK memiliki keahlian terkait dengan kompetensi atau pekerjaan yang dilakukan sebagai bentuk adanya standar kompetensi teknis SPBE.	Pada Pemerintah Madiun masih terdapat SDM TIK yang berbeda atau tidak berkaitan dengan riwayat Pendidikan terakhir. Serta masih terdapat data SDM TIK yang tidak diketahui riwayat pendidikan terakhirnya.
Training SDM TIK SPBE	Pada hasil kondisi eksisting training SDM TIK SPBE pada Pemerintah Kota Madiun, terdapat 41 SDM TIK yang telah mengikuti kegiatan Training TI.	Adanya peningkatan kompetensi dengan kegiatan training berbagai bidang khusus TIK.	Sebanyak 82 SDM TIK pada Pemerintah Kota Madiun masih belum pernah mengikuti kegiatan training TI.
Sertifikasi SDM TIK SPBE	Pada hasil kondisi eksisting sertifikasi SDM TIK SPBE pada Pemerintah Kota Madiun, terdapat sebanyak 32 SDM TIK telah	Tersedianya SDM TIK yang telah memiliki sertifikasi secara kompetensi terkait.	Sebanyak 91 SDM TIK pada Pemerintah Kota Madiun masih belum pernah memiliki sertifikasi TI.

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	memiliki sertifikasi TI.		

7.5.4 Analisis Usulan Penyelenggara SPBE

Berdasarkan dari hasil analisis Gap Penyelenggara SPBE Pemerintah Kota Madiun, maka diusulkan saran perbaikan untuk mencapai kondisi ideal. Berikut merupakan usulan-usulan yang sebaiknya dilakukan Pemerintah Kota Madiun untuk mencapai kondisi ideal dari Penyelenggara SPBE.

7.5.4.1 Usulan Tim Koordinasi SPBE

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, guna meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE, diperlukan adanya pembentukan Tim Koordinasi SPBE. Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE di Pemerintah Daerah. Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah. Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh sekretaris daerah, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

Sesuai dari hasil kondisi eksisting, pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kota Madiun untuk indikator tingkat kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah mendapatkan nilai 3.

Justifikasi Tim Koordinasi SPBE telah terbentuk serta adanya kolaborasi Penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun. Namun bukti dukung belum dapat menunjukkan adanya pemenuhan tugas dan fungsi yang tertera pada SK Tim Koordinasi secara menyeluruh.

Berikut merupakan usulan perbaikan dalam penyusunan Tim Koordinasi SPBE berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, tentang usulan yang menjelaskan susunan tim koordinasi beserta tupoksi yang dimiliki oleh setiap jabatan. Usulan tim koordinasi SPBE serta penjelasan tupoksi dapat dilihat pada **Tabel** berikut.

Tabel 7.13 Usulan Tim Koordinasi SPBE

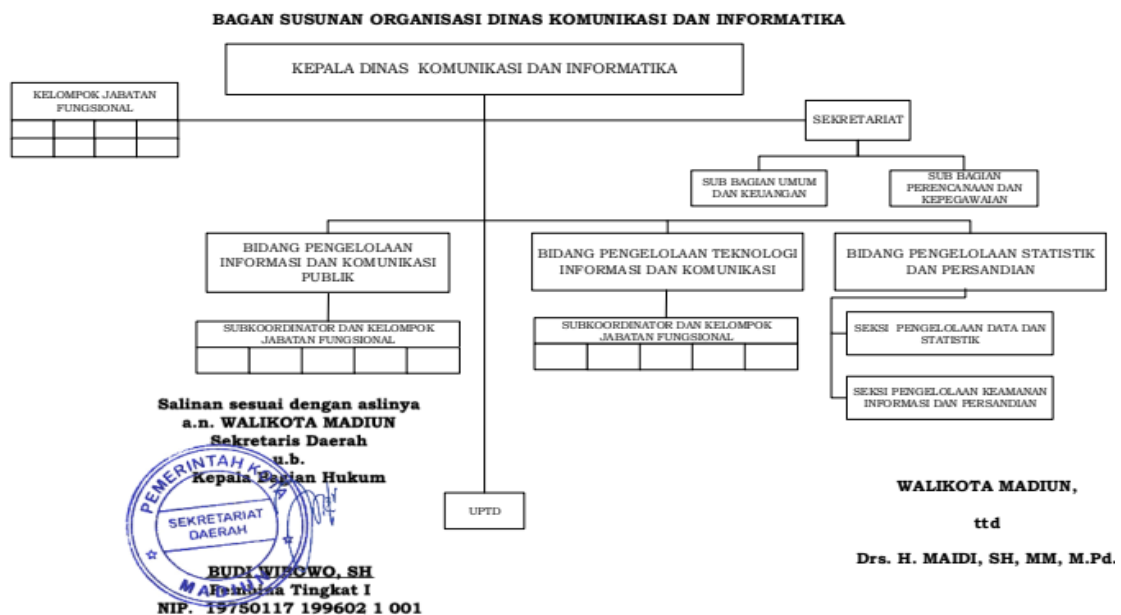
Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Tupoksi
Walikota Madiun	Pengarah	Menetapkan peraturan atau kebijakan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Madiun
Sekretaris Daerah Kota Madiun	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan penetapan kebijakan SPBE Pemerintah Kota Madiun b. Mengkoordinasikan Layanan Pemerintah c. Mengkoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengendalian terkait arsitektur SPBE b. Melakukan koordinasi terkait pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK c. Melakukan pengendalian dan pengarahan manajemen aset TIK dan layanan SPBE d. Melakukan koordinasi terhadap keamanan informasi dalam pelaksanaan SPBE
Inspektur Inspektorat Kota Madiun	Anggota	Melakukan pengendalian dan pengarahan terhadap pengawasan SPBE
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun	Anggota	Melakukan koordinasi perencanaan implementasi SPBE, tata kelola data, manajemen data di Pemerintah Kota Madiun
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun	Anggota	Melakukan koordinasi terhadap perencanaan terkait anggaran pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Madiun
Kepala Badan Kepegawaian dan	Anggota	Melakukan pengendalian dan pengarahan terhadap layanan SPBE

Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Tupoksi
Pengembangan SDM		di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan TIK
Kepala Bagian Organisasi Kota Madiun	Anggota	Melakukan koordinasi terkait integrasi proses bisnis di Pemerintah Kota Madiun
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun	Anggota	Melakukan pengendalian dan pengarahan terhadap Inovasi dan Teknologi SPBE

7.5.4.2 Analisis Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

Analisis struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah diatur dalam **Peraturan Walikota Madiun Nomor 72 Tahun 2021** tentang Kedudukan, susunan organisasi rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk penjelasan detail bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dapat dilihat pada **Gambar**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 72 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021



Gambar 7.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam penyelenggaraan dan penerapan SPBE, suatu departemen TI mengacu pada pembagian kerja dan tugas yang ada pada kerangka kerja ITIL. Dimana dalam kerangka kerja tersebut, Departemen TI memiliki beberapa bagian penting diantaranya *CIO* (Kepala Departemen), *Information Security*, *System Development*, *Service Delivery* dan *System Support*. Berikut merupakan pemetaan dari Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang telah disesuaikan dengan peran dan tugas dalam standar kerangka kerja ITIL.

Tabel 7.14 Hasil pemetaan peran ITIL 3 terhadap peran jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Peran dalam ITIL	Peran dalam Dinas Komunikasi dan Informatika
1.	CIO	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.	<i>Information Security</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian
3.	<i>System Development</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
4.	<i>Service Delivery</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
5.	<i>System Support</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik • Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian

Pemetaan pada **Tabel 7.14** telah disesuaikan berdasarkan keadaan eksisting dari tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dengan peran dan tanggung jawab ITIL, 2011.

7.5.5 Analisis Usulan Sumber Daya Manusia SPBE

Sub bagian ini akan membahas mengenai usulan sumber daya manusia SPBE berdasarkan hasil analisis gap dari sumber daya manusia SPBE di Pemerintahan Kota Madiun. Usulan yang diberikan antara lain terdiri dari Kompetensi SDM SPBE, Pengadaan SDM SPBE, dan kebutuhan pelatihan dan sertifikasi SDM SPBE.

7.5.5.1 Analisis Kompetensi SDM SPBE

Usulan ini didapatkan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 dan Peta Okupasi TIK. Dimana pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2018 menyatakan bahwa kompetensi teknis SPBE yang diharapkan dimiliki oleh pegawai ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif. Kompetensi tersebut jika dijabarkan menurut Peta Okupasi TIK maka akan didapatkan beberapa kompetensi sebagai berikut:

1. Kompetensi Perencanaan SPBE

Menurut peta Okupasi TIK, kompetensi perencanaan SPBE meliputi:

a. Manajemen dan Tata Kelola Teknologi Informasi

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam merencanakan, merancang, mengadakan, membangun, menerapkan, menjalankan, dan mengendalikan tata kelola sistem dan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Hal utama pada aspek ini yaitu berkaitan dengan isu seputar *governance* dan manajemen.

b. Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam hal merencanakan, mempersiapkan, menjalankan, mengelola, menilai, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas proyek sistem dan teknologi informasi. Hal utama dari aspek ini yaitu manajemen ruang lingkup, kualitas, waktu, biaya, risiko, komunikasi, pengadaan, sumber daya manusia, pemangku kepentingan, dan integrasi.

2. Rekayasa Proses Bisnis Pemerintahan

Menurut Peta Okupasi TIK, kompetensi proses bisnis pemerintahan adalah:

Arsitektur Teknologi Informasi Korporasi

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam hal merencanakan, merancang, mendesain, menerapkan/mengimplementasikan, mengkaji, merevisi, menilai, mengelola, dan mengendalikan arsitektur enterprise beserta sub-sistem

pembentuknya. Adapun sub-sistem pembentuknya berupa arsitektur bisnis (proses), arsitektur aplikasi, arsitektur informasi, arsitektur teknologi, arsitektur organisasi, dan arsitektur kebijakan (*policy*).

3. Pengelolaan TIK yang Terintegrasi, Aman, dan Andal

Menurut Peta Okupasi TIK, kompetensi pengelolaan TIK terdiri dari:

a. Pengembangan Perangkat Lunak dan Pemrograman

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam merancang, mendesain, mengkonfigurasi, dan membuat perangkat lunak maupun aplikasi yang dijalankan/dioperasikan dalam lingkungan komputer piranti digital, maupun jaringan. Spektrum kemampuan ini berkaitan dengan metodologi pembuatan perangkat lunak yaitu perencanaan, perancangan, pemrograman, pengujian, perbaikan, penerapan, dan penilaian.

Selain itu, aspek ini juga berkaitan dengan kemampuan individu dalam membuat dan mengembangkan program komputer yang dapat dijalankan dalam berbagai lingkungan komputasi, baik menggunakan bahasa tingkat rendah hingga tingkat tinggi, dan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup.

b. Sistem Manajemen Data

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam merancang, membangun, dan mengimplementasikan sistem basis data dan/atau informasi (konten digital). Ruang lingkup dan jenis model *database* dimaksud beraneka ragam, seperti berbasis struktur, relasional, objek, dan lain sebagainya. Termasuk di dalam domain ini adalah kemampuan mengolah data tidak terstruktur seperti yang dikembangkan dalam konsep big data dan *business intelligence*.

c. Perangkat Keras dan Piranti Digital

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam merancang, mendesain, merakit, mengoperasikan, mengendalikan, dan memelihara perangkat keras komputer maupun piranti digital lainnya (*hardware*). Yang dimaksud

dengan piranti digital lain adalah notebook., tablet, telepon pintar (*smartphone*), dan beraneka ragam gawai lainnya.

d. Infrastruktur dan Jaringan

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam merancang, membangun, mengoperasikan, dan mengawasi berbagai komponen teknis jaringan infrastruktur dan telekomunikasi. Yang dimaksud dengan infrastruktur telekomunikasi di sini adalah medium transmisi atau koneksi berbasis digital/elektronik, yang beroperasi melalui darat (*terrestrial*), laut (kabel laut), maupun udara (satelit).

e. Sistem Operasi dan Aplikasi Pendukung

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam mengembangkan, menginstal, mengkonfigurasi, menggunakan, dan memelihara sistem operasi komputer – baik untuk sistem mandiri (*stand-alone*) maupun dalam bentuk jaringan (*network*). Sistem operasi yang dimaksud melingkupi berbagai jenis baik yang bersifat terbuka (*open source*) maupun tertutup (*proprietary*).

f. Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam merencanakan, merancang, membangun, menguji coba, menerapkan, mengembangkan, menilai, dan mengendalikan sistem informasi. Sistem informasi pada dasarnya dibangun oleh sejumlah komponen yang saling terkait satu dan lainnya.

Elemen pembentuknya terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: manusia (organisasi), proses, dan teknologi. Dalam tataran implementasinya, terdapat berbagai jenis variasi sistem dimaksud, misalnya sistem informasi keuangan, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi korporat, sistem informasi rumah sakit, sistem informasi pengendalian, dan lain sebagainya.

g. Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam hal merencanakan, merancang, membangun, menerapkan, mengelola, menilai, mengukur, dan mengendalikan sistem keamanan data, informasi, sistem,

dan/atau internet. Spektrum ruang lingkup kapabilitas ini bervariasi dari yang sangat konseptual hingga teknis, dan mulai dari yang teoritis hingga terapan. Disamping itu, aspek ini berkaitan pula dengan kemampuan organisasi dalam memenuhi atau mematuhi berbagai peraturan/regulasi teknis di bidang keamanan informasi.

h. Multimedia

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam merancang, membuat, mengembangkan, dan menerapkan aplikasi dan/atau konten berbasis multimedia dalam platform antarmuka (*user interface*) yang beragam. Multimedia merupakan representasi digital dalam berbagai format media seperti: teks, gambar/citra/grafis, suara/audio, film/video, atau kombinasi di antaranya. Beragam media ini dikembangkan untuk kebutuhan pengguna yang menginginkan adanya model navigasi aplikasi (input maupun output) yang menarik, mudah digunakan (*user friendly*), dan ergonomis.

i. Teknologi *Mobile* dan *Internet-Of-Things*

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam merancang, membuat, mengembangkan, mengonfigurasi, menerapkan, dan mengendalikan teknologi yang berhubungan dengan kanal akses (*access channels* atau *distribution channels*). Belakangan ini telah dikenal sejumlah teknologi kanal akses yang dikenal masyarakat seperti: ATM, kios, TV digital, tablet, smartpone, gadget, kamera, dan lain sebagainya – baik yang berdiri sendiri maupun yang telah dirakit (*embedded*) dalam entitas lain seperti: mobil, pesawat, kereta api, motor, mesin cuci, lemari es, dan lain sebagainya (*internet-of-things*).

j. Sistem Informasi Terintegrasi

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam merencanakan, merancang, membangun, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem informasi terintegrasi dan terpadu yang di dalamnya terdiri dari berbagai komponen penting berupa komponen teknologi, proses, dan manusia. Ruang lingkup yang

ditangani sangatlah luas, mulai yang bersifat strategis hingga teknis – termasuk di dalamnya.

4. Pengelolaan Layanan yang Inovatif, Adaptif, dan Responsif

Menurut Peta Okupasi TIK, kompetensi pengelolaan layanan meliputi:

a. Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam hal merencanakan, merancang, mendesain, menerapkan, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai layanan teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Layanan dimaksud melingkupi aspek-aspek utama seperti: ketersediaan, dukungan bantuan, kualitas, keberlanjutan, berkesinambungan, dan lain sebagainya.

b. Sistem Manajemen Fasilitas Teknologi Informasi

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam hal merencanakan, merancang, mendesain, membangun, menjalankan/menerapkan/mengimplementasikan, mengelola, dan mengendalikan berbagai fasilitas, sarana prasarana, dan teknologi pendukung sistem informasi. Fasilitas maupun sarana prasarana dimaksud antara lain: *data center, call center, disaster recovery center, server room, cloud computing facilities*, dan lain sebagainya.

c. Konsultasi dan Layanan Jasa SDM Teknologi Informasi

Aspek ini berkaitan erat dengan kemampuan seorang individu dalam memberikan berbagai jasa layanan terkait dengan teknologi informasi, seperti konsultasi, pendampingan, pelatihan, penelitian, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya mereka yang ingin menekuni bidang digital entrepreneurship.

7.5.5.2 Pengadaan SDM SPBE

Setelah analisis kompetensi SDM TIK yang dibutuhkan untuk SPBE, maka pada bagian ini akan dijabarkan usulan penanggung jawab dan pengadaan SDM TIK yang wajib ada pada setiap Perangkat Daerah.

1. Kompetensi Perencanaan SPBE

Menurut **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** rencana SPBE dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu penanggung jawab terkait perencanaan SPBE di Pemerintah Kota Madiun adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk perencanaan kompetensi SDM maka dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika.

2. Rekayasa Proses Bisnis Pemerintahan

Rekayasa proses bisnis pemerintahan dikelola oleh **Bagian Organisasi** karena mengacu pada tugas **Bagian Tata Laksana** yaitu menyusun pedoman tata naskah dinas, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja. Oleh karena itu, Kepala Sekretariat Bagian Organisasi dan Kepala Sekretariat Daerah harus memiliki kompetensi terkait rekayasa proses bisnis pemerintahan dalam melaksanakan SPBE. Dinas Komunikasi Informatika juga berkoordinasi dan berperan dalam menentukan prosedur pendokumentasian terkait proses bisnis pemerintahan.

3. Pengelolaan TIK yang Terintegrasi, Aman, dan Andal

Pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal merupakan tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun pelaksanaan dari pengelolaan TIK haruslah dilakukan oleh semua PD di Pemerintahan Kota Madiun. Untuk kedepannya pemenuhan kebutuhan pengelolaan sistem digital akan meningkat, maka diperlukan beberapa kompetensi tambahan dalam pengelolaan TIK. Dalam hal ini penambahan kompetensi tidak sama dengan penambahan pegawai, karena bisa saja satu pegawai menguasai beberapa kompetensi TIK yang diperlukan. Untuk PD yang sudah termasuk ke dalam PD mandiri TIK, terdapat 9 kompetensi yang harus dimiliki yaitu Teknisi Komputer, Teknisi & Admin Jaringan, Service/Help Desk, *Admin Website*, *Admin Database*, *Analisis Sistem & Desain*, *Programmer*, *Operator/User Sistem*, Dan *Admin Keamanan TI*. Sedangkan untuk PD yang masih belum menjadi PD mandiri TIK, setidaknya terdapat 4 kompetensi yang dimiliki yaitu *operator/user sistem*, *Teknisi Komputer*, *Admin Website* dan *service/help desk*. Untuk usulan kompetensi lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 7.15**

Tabel 7.15 Usulan Pengadaan SDM TIK untuk tiap PD

Kode OPD	Nama OPD	Usulan SDM TIK
1	Bagian Organisasi	<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Operator/User Sistem</i>
		<i>Teknisi Komputer</i>
2	Bagian Hukum	<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Teknisi Komputer</i>
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Teknisi Komputer
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Admin Website</i>
5	Bagian Umum	<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Teknisi Komputer</i>
		<i>Admin Website</i>
6	Bagian Pemerintahan	<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Operator/User Sistem</i>
		<i>Teknisi Komputer</i>
		<i>Admin Website</i>
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak Ada Usulan SDM TIK
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	<i>Teknisi Komputer</i>
		<i>Admin Database</i>
		<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Analisis Sistem dan Desain</i>
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak Ada Usulan SDM TIK
10	Badan Pendapatan Daerah	<i>Programmer</i>
		<i>Service/Help Desk</i>
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<i>Admin Keamanan TI</i>
		<i>Teknisi Komputer</i>
		<i>Admin Website</i>
		<i>Admin Database</i>
		<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Teknisi dan Admin Jaringan</i>
<i>Analisis Sistem dan Desain</i>		

Kode OPD	Nama OPD	Usulan SDM TIK
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Service/Help Desk
		Operator/User Sistem
		Teknisi Komputer
		Admin Website
13	Inspektorat Daerah	Service/Help Desk
		Teknisi Komputer
		Admin Website
		Prakom (programmer)
		(SDM APIP Existing)
		(SDM APIP Existing)
14	Sekretariat DPRD	Service/Help Desk
		Operator/User Sistem
		Teknisi Komputer
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tidak Ada Usulan SDM TIK
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Service/Help Desk
		Teknisi Komputer
		Admin Website
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Service/Help Desk
		Operator/User Sistem
		Teknisi Komputer
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Service/Help Desk
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Service/Help Desk
		Teknisi Komputer
20	Dinas Pendidikan	Programmer

Kode OPD	Nama OPD	Usulan SDM TIK
		<i>Teknisi Komputer</i>
		<i>Admin Database</i>
		<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Teknisi dan Admin Jaringan</i>
		<i>Analisis Sistem dan Desain</i>
		<i>Admin Keamanan TI</i>
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Operator/User Sistem</i>
22	Dinas Lingkungan Hidup	<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Teknisi Komputer</i>
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<i>Programmer</i>
		<i>Admin Keamanan TI</i>
		<i>Operator/User Sistem</i>
		<i>Admin Database</i>
		<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Teknisi dan Admin Jaringan</i>
		<i>Analisis Sistem dan Desain</i>
24	Dinas Perhubungan	<i>Programmer</i>
		<i>Teknisi Komputer</i>
		<i>Admin Database</i>
		<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Teknisi dan Admin Jaringan</i>
		<i>Analisis Sistem dan Desain</i>
		<i>Operator/User Sistem</i>
		<i>Admin Keamanan TI</i>
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak Ada Usulan SDM TIK
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<i>Programmer</i>
		<i>Teknisi Komputer</i>
		<i>Teknisi dan Admin Jaringan</i>

Kode OPD	Nama OPD	Usulan SDM TIK
		<i>Analisis Sistem dan Desain</i>
		<i>Admin Keamanan TI</i>
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Teknisi Komputer</i>
		<i>Admin Website</i>
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak Ada Usulan SDM TIK
29	Dinas Perdagangan	<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Operator/User Sistem</i>
		<i>Teknisi Komputer</i>
		<i>Admin Website</i>
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Teknisi Komputer</i>
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Tidak Ada Usulan SDM TIK
32	Kecamatan Manguharjo	<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Operator/User Sistem</i>
33	Kecamatan Kartoharjo	<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Operator/User Sistem</i>
		<i>Teknisi Komputer</i>
		<i>Admin dan teknisi jaringan</i>
34	Puskesmas Manguharjo	<i>Service/Help Desk</i>
		<i>Operator/User Sistem</i>
35	Puskesmas Sukosari	<i>Operator/User Sistem</i>
		<i>Teknisi Komputer</i>

Dalam usulan SDM SPBE ada beberapa PD pada Pemerintah Kota Madiun yang sudah memiliki SDM TIK secara lengkap, PD yang memiliki SDM TIK lengkap yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.

4. Pengelolaan Layanan yang Inovatif, Adaptif, dan Responsif

Pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif merupakan tanggung jawab setiap PD terhadap layanan yang dimiliki masing-masing. Kondisi eksisting di Pemerintah Kota Madiun masih banyak Perangkat Daerah yang tidak memiliki *service/help desk*. Untuk itu diusulkan dua jenis *service desk* yang ada di Pemerintah Kota Madiun.

1) Service Desk Tier 1

Service desk tier 1 berfungsi untuk menangani **masalah yang bersifat dasar**. *Service desk* ini digunakan untuk dukungan masalah tingkat dasar seperti memecahkan masalah penggunaan dan memenuhi permintaan *service desk* yang memerlukan keterlibatan TI. Jika tidak ada solusi yang tersedia, personel tier 1 mengeskalisasi insiden ketingkat yang lebih tinggi. Personil yang dibutuhkan pada tier 1 adalah personil teknis tingkat bawah yang dilatih untuk memecahkan masalah yang diketahui dan untuk memenuhi permintaan layanan dengan mengikuti SOP atau panduan. *Service desk tier 1* harus ada di setiap PD di Pemerintahan Kota Madiun.

2) Service Desk Tier 2

Service desk tier 2 ini berfungsi untuk dukungan **teknis yang mendalam**. Personil yang dibutuhkan pada tier 2 adalah teknisi yang berpengalaman dan berpengetahuan menilai masalah dan memberikan solusi untuk masalah yang tidak dapat ditangani oleh tingkat 1 serta personel dengan pengetahuan mendalam tentang produk atau layanan. *Service desk tier 2* harus diadakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

7.5.5.3 Analisis Kebutuhan Training SDM

Analisis kebutuhan training SDM merupakan hal yang dilakukan untuk mewujudkan SDM TIK yang berpengalaman dalam proses penyelenggaraan SPBE. Maka sangat diperlukan kegiatan guna meningkatkan kualitas SDM TIK yang dibutuhkan sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan kompetensi SDM TIK yang dimiliki PD. Berdasarkan kondisi eksisting yang dimiliki Pemerintah Kota Madiun, SDM TIK pada tiap PD masih sedikit yang telah mengikuti training sesuai dengan bidang TIK. Dari kondisi tersebut, diusulkan pengadaan training dari kompetensi SPBE. Jenis training dan target SDM TIK yang dimaksud dapat dilihat pada **Tabel 7.16**

Tabel 7.16 Usulan Kebutuhan Pelatihan/ Training SDM TIK

Kompetensi	Detail	Jenis Training	Target SDM (STOK)
Perencanaan SPBE	Manajemen dan Tata Kelola TI	Training Tata Kelola & Manajemen TI (ITIL, COBIT, CGEIT)	- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika - Semua Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Manajemen Proyek TI	Training Manajemen Proyek (PMP)	- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika - Semua Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Arsitektur Teknologi Informasi dan Korporasi	Training Enterprise Architecture (TOGAF)	- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Perencanaan Strategis		- Semua Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika - Kepala Badan Perencanaan

Kompetensi	Detail	Jenis Training	Target SDM (STOK)
			Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Manajemen Pengadaan Investasi TI		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika - Kepala Badan Pendapatan Daerah - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah - Semua Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengukuran Kinerja TI (Monev dan Audit)	Training Evaluasi dan Audit SI (CISA)	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat - Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik
Rekayasa Proses Bisnis Pemerintahan	Manajemen Proses Bisnis	Training Business Process Management	<ul style="list-style-type: none"> - Semua Kepala Dinas/ Bagian/ Badan - Analis Sistem - Analis Proses Bisnis
	Rekayasa Proses Bisnis	Training Business Process Re-Engineering	<ul style="list-style-type: none"> - Semua Kepala Dinas/ Bagian/ Badan - Analis Sistem - Analis Proses Bisnis
	Arsitektur Teknologi Informasi dan Korporasi	Training Enterprise Architecture (TOGAF)	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Komunikasi dan Informatika - Semua Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan

Kompetensi	Detail	Jenis Training	Target SDM (STOK)
			Informatika - Kepala Bagian Organisasi
Pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal	Analisis dan Desain Sistem	Training Sistem Analisis	- Subkoordinator Pengelolaan
		Training Software Testing	Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik - Analisis Sistem pada seluruh PD
	Perangkat keras dan piranti digital	Training Teknisi Komputer:	- Kepala Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi - Teknisi di setiap PD
		· Sistem Operasi	
		· Jaringan	
		· Hardware	
	Pemrograman	Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	Programmer pada masing-masing PD
		Teknologi Mobile	Training IoT
	Sistem Manajemen Data	Training Analisis dan Desain Basis Data	Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Data
		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	
Training Big Data Analyst			

Kompetensi	Detail	Jenis Training	Target SDM (STOK)
		Training Pengolahan Data	
		Training Integrasi Data	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Programmer pada masing-masing PD
		Training Ilmu Statistik	- Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Data pada masing-masing PD - Seksi Statistik Sektoral
		<i>Training Geographic Information System</i>	- Kepala dan Anggota Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
		<i>Training Artificial Intelligence</i>	- Programmer dan Administrator Data pada masing-masing PD
Infrastruktur dan Jaringan		Training Desain Jaringan Komputer (CCDA, CCDP)	Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian
		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian
Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP,	Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian

Kompetensi	Detail	Jenis Training	Target SDM (STOK)
		CCSP, ISO 27001)	
		Training Teknis Keamanan Informasi (Hacking, Enkripsi, Dekripsi, Recovery, dan Forensik Data)	Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian
Pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif	Sistem Manajemen Layanan TI (Service Desk)	Training Human di Era Digital	- Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		<i>Training Service Desk</i>	<i>Service Desk Tier 1</i>
			<i>Service Desk Tier 2</i>
		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	- Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Training Perkantoran	- <i>Service Desk Tier 1</i> - <i>Service Desk Tier 2</i>	
	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Training ITIL	
			- Kepala Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik
			- Kepala Bidang Informasi dan

Kompetensi	Detail	Jenis Training	Target SDM (STOK)
			Komunikasi Publik
		Training Cloud Computing	Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian
		Training Administrasi Server	Kepala Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika
		Training Data Center Technical Support	Kepala Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika
		Training Administrasi Jaringan Komputer	Kepala Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika
		Training Desain Grafis	- Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Multimedia	Training Multimedia	Seluruh Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika

Kompetensi	Detail	Jenis Training	Target SDM (STOK)
------------	--------	----------------	-------------------

7.5.5.4 Analisis Kebutuhan Sertifikasi SDM

Dari hasil analisis kondisi eksisting pada Pemerintah Kota Madiun SDM TIK masih banyak yang belum melaksanakan sertifikasi terkait bidang TIK. Maka analisis kebutuhan sertifikasi SDM dilakukan guna mewujudkan SDM yang berpengalaman disertai dengan adanya sertifikasi khusus terkait kompetensi pekerjaan terkait. Dari kondisi tersebut, diusulkan pengadaan sertifikasi kompetensi SPBE. Usulan sertifikasi dari kompetensi SPBE yang telah dianalisis sebelumnya dapat dilihat pada **Tabel 7.18**

Tabel 7.18 Usulan Kebutuhan Sertifikasi SDM TIK

Kompetensi	Detail	Jenis Sertifikasi	Target SDM
Perencanaan SPBE	Manajemen dan Tata Kelola TI	Sertifikasi Tata Kelola & Manajemen TI (ITIL, COBIT, CGEIT)	- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika - Semua Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Manajemen Proyek TI	Sertifikasi Manajemen Proyek (PMP)	- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika - Semua Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Arsitektur Teknologi Informasi	Sertifikasi Enterprise Architecture	- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kompetensi	Detail	Jenis Sertifikasi	Target SDM
	dan Korporasi	(TOGAF)	
	Perencanaan Strategis		<ul style="list-style-type: none"> - Semua Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Manajemen Pengadaan Investasi TI	Sertifikasi Manajemen Investasi Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika - Kepala Badan Pendapatan Daerah - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah - Semua Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengukuran Kinerja TI (Monev dan Audit)	Sertifikasi Evaluasi dan Audit SI (CISA)	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat - Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik
Rekayasa Proses Bisnis Pemerintahan	Manajemen Proses Bisnis	Sertifikasi Business Process Management	<ul style="list-style-type: none"> - Semua Kepala Dinas/ Bagian/ Badan - Analis Sistem - Analis Proses Bisnis

Kompetensi	Detail	Jenis Sertifikasi	Target SDM
	Rekayasa Proses Bisnis	Sertifikasi Business Process Re-Engineering	- Semua Kepala Dinas/ Bagian/ Badan - Analis Sistem - Analis Proses Bisnis
	Arsitektur Teknologi Informasi dan Korporasi	Sertifikasi Enterprise Architecture (TOGAF)	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Semua Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika - Kepala Bagian Organisasi
Pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal	Analis dan Desain Sistem	Sertifikasi Sistem Analis	- Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik - Analis Sistem pada seluruh PD
		Sertifikasi Software Testing	
	Perangkat keras dan piranti digital	Sertifikasi Teknisi Komputer:	- Kepala Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi - Teknisi di setiap PD
		· Sistem Operasi	
		· Jaringan	
		· Hardware	
	· Troubleshooting masalah general pada komputer		
Pemrograman	Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	Programmer pada masing-masing PD	
Teknologi Mobile	Sertifikasi IoT	Programmer pada masing-masing PD	

Kompetensi	Detail	Jenis Sertifikasi	Target SDM
Sistem Manajemen Data		Sertifikasi Analisis dan Desain Basis Data	Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Data
		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	
		Sertifikasi Big Data Analyst	
		Sertifikasi Pengolahan Data	
		Sertifikasi Integrasi Data	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Programmer pada masing-masing PD
		Sertifikasi Ilmu Statistik	- Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Data pada masing-masing PD - Seksi Statistik Sektoral
		<i>Sertifikasi Geographic Information System</i>	- Kepala dan Anggota Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
	<i>Sertifikasi Artificial Intelligence</i>	- Programmer dan Administrator Data pada masing-masing PD	
	Infrastruktur dan Jaringan	Sertifikasi Desain Jaringan Komputer (CCDA, CCDP)	Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian

Kompetensi	Detail	Jenis Sertifikasi	Target SDM
		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian
	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian
		Sertifikasi Teknis Keamanan Informasi (Hacking, Enkripsi, Dekripsi, Recovery, dan Forensik Data)	Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian
Pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif	Sistem Manajemen Layanan TI (<i>Service Desk</i>)	Sertifikasi Human di Era Digital	- Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		<i>Sertifikasi Service Desk</i>	<i>Service Desk Tier 1</i>
			<i>Service Desk Tier 2</i>
		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	- Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Sertifikasi Perkantoran	- <i>Service Desk Tier 1</i> - <i>Service Desk Tier 2</i>
Sistem Manajemen Fasilitas TI	Sertifikasi ITIL	- Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	

Kompetensi	Detail	Jenis Sertifikasi	Target SDM
			- Kepala Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik
			- Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
		Sertifikasi Cloud Computing	Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian
		Sertifikasi Administrasi Server	Kepala Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika
		Sertifikasi Data Center Technical Support	Kepala Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika
		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer	Kepala Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik Dinas Komunikasi dan

Kompetensi	Detail	Jenis Sertifikasi	Target SDM
			Informatika
	Multimedia	Sertifikasi Desain Grafis	- Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
		Sertifikasi Multimedia	Seluruh Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika

Lampiran SDM TIK

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
1	Bagian Organisasi	Ada	Admin Website		Bukan Mandiri TIK	Web Content Management Social Media (Online)		2023
				Service/Help Desk		Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2024
				Operator/User Sistem		Bimbingan Teknis		2025
				Teknisi Komputer		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2026
2	Bagian Hukum	Ada	Admin Website		Bukan Mandiri	Web Content Management		2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
					TIK	Social Media (Online)		
			Operator/User Sistem			Bimbingan Teknis		2024
			Service/Help Desk			Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2025
			Teknisi Komputer			Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2026
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi	Ada	Service/Help Desk		Bukan Mandiri TIK	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2023
			Admin Website			Web Content Management		2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
	Pembangunan					Social Media (Online)		
			Operator/User Sistem			Bimbingan Teknis		2025
				Teknisi Komputer		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2026
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Ada	Operator/User Sistem		Bukan Mandiri	Bimbingan Teknis		2023
			Teknisi Komputer		TIK	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2024
				Service/Help Desk		Service Desk (CompTIA A+)	Service Desk (CompTIA A+)	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						(Online)		
				Admin Website		Web Content Management Social Media (Online)		2026
5	Bagian Umum	Ada	Operator/User Sistem		Bukan Mandiri	Bimbingan Teknis		2023
				Service/Help Desk	TIK	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2024
				Teknisi Komputer		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2025
				Admin		Web Content		2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
				Website		Management Social Media (Online)		
6	Bagian Pemerintahan	Tidak Ada		<i>Service/Help Desk</i>	Bukan Mandiri TIK	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2023
				<i>Operator/User Sistem</i>		Bimbingan Teknis		2024
				<i>Teknisi Komputer</i>		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2025
				<i>Admin Website</i>		Web Content Management Social Media (Online)		2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ada	<i>Teknisi Komputer</i>		PD Mandiri TIK	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2023
			<i>Service/Help Desk</i>			Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2023
			<i>Admin Website</i>			Web Content Management Social Media (Online)		2023
			<i>Admin Database</i>			Administrasi Basis Data (MCDBA)	Administrasi Basis Data (MCDBA)	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Desain Basis Data (Database) (Online)	Desain Basis Data (Database)	2024
						Big Data Anayst (Online)	Big Data Analyst	2024
						Integrasi Data	Integrasi Data	2024
						Cloud Computing (AWS) (Online)	Cloud Computing (AWS)	2024
						Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	2024
			Analisis Sistem			Desainer	Desainer	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
			& Desain			Grafis	Grafis	
						Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	2025
						Manajemen Proyek (PMP)	Manajemen Proyek (PMP)	2025
						Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	2025
						Enterprise Architecture (TOGAF)	Enterprise Architecture (TOGAF)	2025
						Business	Business	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Process Re-Engineering	Process Re-Engineering	
						Business Process Management	Business Process Management	2025
						Analisis dan Software Testing	Analisis dan Software Testing	2025
						GIS (Geographic Information System)	GIS (Geographic Information System)	2025
						Desainer Multimedia	Desainer Multimedia	2025
						ERP Analisis	ERP Analisis	2025
			Operator/User			Bimbingan		2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
			Sistem			Teknis		
			Admin Keamanan TI			Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	2026
						Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	2026
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Ada	Operator/User Sistem		Bukan Mandiri	Bimbingan Teknis		2023
				Teknisi Komputer	TIK	Teknisi Komputer	Teknisi Komputer	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
	Daerah					(CompTIA ITF+) (Online)	(CompTIA ITF+)	
				<i>Admin Database</i>		Administrasi Basis Data (MCDBA)	Administrasi Basis Data (MCDBA)	2024
						Desain Basis Data (Database) (Online)	Desain Basis Data (Database)	2024
						Big Data Analyst (Online)	Big Data Analyst	2024
						Integrasi Data	Integrasi Data	2024
						Cloud Computing (AWS) (Online)	Cloud Computing (AWS)	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	2024
				<i>Service/Help Desk</i>		Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2024
				<i>Analisis Sistem dan Desain</i>		Desainer Grafis	Desainer Grafis	2026
						Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	2023
						Manajemen Proyek (PMP)	Manajemen Proyek (PMP)	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	2023
						Enterprise Architecture (TOGAF)	Enterprise Architecture (TOGAF)	2023
						Business Process Re-Engineering	Business Process Re-Engineering	2023
						Business Process Management	Business Process Management	2023
						Analisis dan Software	Analisis dan Software	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Testing	Testing	
						GIS (Geographic Information System)	GIS (Geographic Information System)	2023
						Desainer Multimedia	Desainer Multimedia	2023
						ERP Analis	ERP Analis	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ada	Teknisi Komputer		PD Mandiri TIK	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2023
			Teknisi & Admin Jaringan			Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						and Switching)	and Switching)	
						Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Evaluasi dan Audit SI (CISA)	2023
						Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	2023
						IT Disaster Recovery	IT Disaster Recovery	2023
			Service/ Help Desk			Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2023
			Admin			Administrasi	Administrasi	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
			<i>Database</i>			Basis Data (MCDBA)	Basis Data (MCDBA)	
						Desain Basis Data (Database) (<i>Online</i>)	Desain Basis Data (Database)	2024
						Big Data Analyst (<i>Online</i>)	Big Data Analyst	2024
						Integrasi Data	Integrasi Data	2024
						Cloud Computing (AWS) (<i>Online</i>)	Cloud Computing (AWS)	2024
						Data Center Technical Support	Data Center Technical Support	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						(CCNA Data Center)	(CCNA Data Center)	
			<i>Admin Website</i>			Web Content Management Social Media (Online)		2024
			<i>Analisis Sistem & Desain</i>			Desainer Grafis	Desainer Grafis	2025
						Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	2025
						Manajemen Proyek (PMP)	Manajemen Proyek (PMP)	2025
						Manajemen Investasi	Manajemen Investasi	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Teknologi Informasi (ITAM)	Teknologi Informasi (ITAM)	
						Enterprise Architecture (TOGAF)	Enterprise Architecture (TOGAF)	2025
						Business Process Re-Engineering	Business Process Re-Engineering	2025
						Business Process Management	Business Process Management	2025
						Analisis dan Software Testing	Analisis dan Software Testing	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						GIS (Geographic Information System)	GIS (Geographic Information System)	2025
						Desainer Multimedia	Desainer Multimedia	2025
						Desainer Grafis	Desainer Grafis	2025
						ERP Analis	ERP Analis	2025
			<i>Programmer</i>			Programmer (OCA, OCP)	Programmer (OCA, OCP)	2025
						Artificial Intelligence (AI)	Artificial Intelligence (AI)	2026
						IoT (Online)	IoT	2026
			<i>Operator/ User</i>			Bimbingan		2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
			Sistem			Teknis		
			Admin Keamanan TI			Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	2027
						Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	2027
			Teknisi & Admin Jaringan			Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						and Switching)	and Switching)	
						Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Evaluasi dan Audit SI (CISA)	2023
						Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	2023
						IT Disaster Recovery	IT Disaster Recovery	2023
			Admin Website			Web Content Management Social Media (Online)		2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
			<i>Admin Database</i>			Administrasi Basis Data (MCDBA)	Administrasi Basis Data (MCDBA)	2024
						Desain Basis Data (Database) (<i>Online</i>)	Desain Basis Data (Database)	2024
						Big Data Analyst (<i>Online</i>)	Big Data Analyst	2024
						Integrasi Data	Integrasi Data	2024
						Cloud Computing (AWS) (<i>Online</i>)	Cloud Computing (AWS)	2024
						Data Center Technical	Data Center Technical	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Support (CCNA Data Center)	Support (CCNA Data Center)	
			<i>Analisis Sistem & Desain</i>			Desainer Grafis	Desainer Grafis	2025
						Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	2025
						Manajemen Proyek (PMP)	Manajemen Proyek (PMP)	2025
						Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Enterprise Architecture (TOGAF)	Enterprise Architecture (TOGAF)	2025
						Business Process Re-Engineering	Business Process Re-Engineering	2025
						Business Process Management	Business Process Management	2025
						Analisis dan Software Testing	Analisis dan Software Testing	2025
						GIS (Geographic Information System)	GIS (Geographic Information System)	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Desainer Multimedia	Desainer Multimedia	2025
						ERP Analis	ERP Analis	2025
			<i>Operator/User Sistem</i>			Bimbingan Teknis		2026
			<i>Admin Keamanan TI</i>			Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	2026
						Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
				Programmer		Programmer (OCA, OCP)	Programmer (OCA, OCP)	2027
						Artificial Intelligence (AI)	Artificial Intelligence (AI)	2027
						IoT (<i>Online</i>)	IoT	2027
				Service/Help Desk		Service Desk (CompTIA A+) (<i>Online</i>)	Service Desk (CompTIA A+)	2027
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ada	<i>Programmer</i>		Bukan PD Mandiri TIK	Programmer (OCA, OCP)	Programmer (OCA, OCP)	2023
						Artificial Intelligence (AI)	Artificial Intelligence (AI)	2023
						IoT (<i>Online</i>)	IoT	2023
			<i>Operator/ User</i>			Bimbingan		2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
			<i>Sistem</i>			Teknis		
				Admin Keamanan TI		Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	2023
						Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	2023
				Teknisi Komputer		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
				Admin Website		Web Content Management Social Media (Online)		2024
				Admin Database		Administrasi Basis Data (MCDBA)	Administrasi Basis Data (MCDBA)	2024
						Desain Basis Data (Database) (Online)	Desain Basis Data (Database)	2024
						Big Data Analyst (Online)	Big Data Anayst	2024
						Integrasi Data Cloud	Integrasi Data Cloud	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Computing (AWS) (Online)	Computing (AWS)	
						Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	2024
				Service/Help Desk		Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2025
				Teknisi dan Admin Jaringan		Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	2025
						Evaluasi dan	Evaluasi dan	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Audit SI (CISA)	Audit SI (CISA)	
						Desain Jaringan Komputer (CCDA) (<i>Online</i>)	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	2025
						IT Disaster Recovery	IT Disaster Recovery	2025
				Analisis Sistem dan Desain		Desainer Grafis	Desainer Grafis	2026
						Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	2026
						Manajemen Proyek (PMP)	Manajemen Proyek (PMP)	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	2026
						Enterprise Architecture (TOGAF)	Enterprise Architecture (TOGAF)	2026
						Business Process Re-Engineering	Business Process Re-Engineering	2026
						Business Process Management	Business Process Management	2026
						Analisis dan Software	Analisis dan Software	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Testing	Testing	
						GIS (Geographic Information System)	GIS (Geographic Information System)	2026
						Desainer Multimedia	Desainer Multimedia	2026
						ERP Analis	ERP Analis	2026
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tidak Ada		<i>Service/Help Desk</i>	Bukan PD Mandiri TIK	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2023
				<i>Operator/User Sistem</i>		Bimbingan Teknis		2024
				<i>Teknisi Komputer</i>		Teknisi Komputer (CompTIA	Teknisi Komputer (CompTIA	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						ITF+) (Online)	ITF+)	
				<i>Admin Website</i>		Web Content Management Social Media (Online)		2026
13	Inspektorat Daerah	Ada	<i>Operator/User Sistem</i>		Bukan PD Mandiri	Bimbingan Teknis		2023
				<i>Service/Help Desk</i>	TIK	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2024
				<i>Teknisi Komputer</i>		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2025
				<i>Admin Website</i>		Web Content Management		2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Social Media (Online)		
				<i>Prakom (programmer)</i>		-		2023
				<i>(SDM APIP Existing)</i>		Diklat APIP Inspektorat Kota Madiun secara bertahap selama 4 tahun dalam rangka sertifikasi untuk Audit IT, seperti CISA dan/atau sejenisnya	-	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						yang lebih cocok dengan kondisi rencana pengembangan IT Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (TAHUN I)		

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
				(SDM APIP Existing)		Diklat APIP Inspektorat Kota Madiun secara bertahap selama 4 tahun dalam rangka sertifikasi untuk Audit IT, seperti CISA dan/atau sejenisnya yang lebih cocok dengan kondisi rencana	-	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						pengembangan IT Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (TAHUN II)		
				(SDM APIP Existing)		Diklat APIP Inspektorat Kota Madiun secara bertahap selama 4 tahun dalam rangka	-	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						sertifikasi untuk Audit IT, seperti CISA dan/atau sejenisnya yang lebih cocok dengan kondisi rencana pengembangan IT Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (TAHUN III)		

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
				(SDM APIP Existing)		Diklat APIP Inspektorat Kota Madiun secara bertahap selama 4 tahun dalam rangka sertifikasi untuk Audit IT, seperti CISA dan/atau sejenisnya yang lebih cocok dengan kondisi rencana	-	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						pengembangan IT Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (TAHUN IV)		
				<i>(SDM APIP Existing)</i>		Bimbingan Teknis mengerjakan soal-soal ujian (Try Out-Try Out) dalam rangka sertifikasi	Sertifikasi untuk Audit IT seperti CISA dan/atau sejenisnya yang lebih cocok dengan kondisi	2027

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						untuk Audit IT, seperti soal-soal ujian CISA dan/atau sejenisnya (TAHUN V)	rencana pengembangan IT Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	
14	Sekretariat DPRD	Ada	<i>Admin Website</i>		Bukan PD Mandiri TIK	Web Content Management Social Media (Online)		2023
				Service/Help Desk		Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2024
				Operator/User		Bimbingan		2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
				Sistem		Teknis		
				Teknisi Komputer		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2026
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ada	Teknisi Komputer		PD Mandiri TIK	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2023
			Teknisi & Admin Jaringan			Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	2023
						Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Evaluasi dan Audit SI (CISA)	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	2023
						IT Disaster Recovery	IT Disaster Recovery	2023
			<i>Service/Help Desk</i>			Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2023
			<i>Admin Website</i>			Web Content Management Social Media (Online)		2023
			<i>Admin Database</i>			Administrasi Basis Data	Administrasi Basis Data	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						(MCDBA)	(MCDBA)	
						Desain Basis Data (Database) (Online)	Desain Basis Data (Database)	2024
						Big Data Analyst (Online)	Big Data Analyst	2024
						Integrasi Data	Integrasi Data	2024
						Cloud Computing (AWS) (Online)	Cloud Computing (AWS)	2024
						Data Center Technical Support (CCNA Data	Data Center Technical Support (CCNA Data	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Center)	Center)	
			<i>Analisis Sistem & Desain</i>			Desainer Grafis	Desainer Grafis	2025
						Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	2025
						Manajemen Proyek (PMP)	Manajemen Proyek (PMP)	2025
						Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Enterprise Architecture (TOGAF)	Enterprise Architecture (TOGAF)	2025
						Business Process Re-Engineering	Business Process Re-Engineering	2025
						Business Process Management	Business Process Management	2025
						Analisis dan Software Testing	Analisis dan Software Testing	2025
						GIS (Geographic Information System)	GIS (Geographic Information System)	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Desainer Multimedia	Desainer Multimedia	2025
						ERP Analis	ERP Analis	2025
			<i>Programmer</i>			Programmer (OCA, OCP)	Programmer (OCA, OCP)	2026
						Artificial Intelligence (AI)	Artificial Intelligence (AI)	2026
						IoT (Online)	IoT	2026
			<i>Operator/User Sistem</i>			Bimbingan Teknis		2027
			<i>Admin Keamanan TI</i>			Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	2027

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	2027
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada	<i>Operator/User Sistem</i>		Bukan PD Mandiri	Bimbingan Teknis		2023
				<i>Service/Help Desk</i>	TIK	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2024
				<i>Teknisi Komputer</i>		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2025
				<i>Admin</i>		Web Content		2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
				Website		Management Social Media (Online)		
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Ada	Admin Website		Bukan PD Mandiri TIK	Web Content Management Social Media (Online)		2023
				Service/Help Desk		Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2024
				Operator/User Sistem		Bimbingan Teknis		2025
				Teknisi Komputer		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ada	Teknisi Komputer		Bukan PD Mandiri TIK	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2023
			Admin Website			Web Content Management Social Media (Online)		2024
			Operator/User Sistem			Service Desk (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2025
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Ada	Admin Website		Bukan PD Mandiri TIK	Web Content Management Social Media (Online)		2023
			Operator/User			Bimbingan		2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
			Sistem			Teknis		
				Service/Help Desk		Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2025
				Teknisi Komputer		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2026
20	Dinas Pendidikan	Ada	Admin Website		Bukan PD Mandiri TIK	Web Content Management Social Media (Online)		2023
			Operator/User Sistem			Bimbingan Teknis		2023
				Programmer		Programmer (OCA, OCP)	Programmer (OCA, OCP)	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Artificial Intelligence (AI)	Artificial Intelligence (AI)	2023
						IoT (Online)	IoT	2023
				Teknisi Komputer		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2023
				Admin Database		Administrasi Basis Data (MCDBA)	Administrasi Basis Data (MCDBA)	2024
						Desain Basis Data (Database) (Online)	Desain Basis Data (Database)	2024
						Big Data	Big Data	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Analyst (Online)	Analyst	
						Integrasi Data	Integrasi Data	2024
						Cloud Computing (AWS) (Online)	Cloud Computing (AWS)	2024
						Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	2024
				Service/Help Desk		Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
				Teknisi dan Admin Jaringan		Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	2025
						Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Evaluasi dan Audit SI (CISA)	2025
						Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	2025
						IT Disaster Recovery	IT Disaster Recovery	2025
				Analisis Sistem dan Desain		Desainer Grafis	Desainer Grafis	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	2026
						Manajemen Proyek (PMP)	Manajemen Proyek (PMP)	2026
						Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	2026
						Enterprise Architecture (TOGAF)	Enterprise Architecture (TOGAF)	2026
						Business Process Re-	Business Process Re-	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Engineering	Engineering	
						Business Process Management	Business Process Management	2026
						Analisis dan Software Testing	Analisis dan Software Testing	2026
						GIS (Geographic Information System)	GIS (Geographic Information System)	2026
						Desainer Multimedia	Desainer Multimedia	2026
						ERP Analis	ERP Analis	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
				Admin Keamanan TI		Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	2027
						Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	2027
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ada	Teknisi Komputer		Bukan PD Mandiri TIK	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2023
			Admin			Web Content		2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
			Website			Management Social Media (Online)		
				Service/Help Desk		Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2025
				Operator/User Sistem		Bimbingan Teknis		2026
22	Dinas Lingkungan Hidup	Ada	Admin Website		Bukan PD Mandiri TIK	Web Content Management Social Media (Online)		2023
			Operator/User Sistem			Bimbingan Teknis		2024
				Service/Help Desk		Service Desk (CompTIA A+)	Service Desk (CompTIA A+)	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						(Online)		
				Teknisi Komputer		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2026
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ada	Teknisi Komputer		Bukan PD Mandiri TIK	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2023
			Admin Website			Web Content Management Social Media (Online)		2023
				Programmer		Programmer (OCA, OCP)	Programmer (OCA, OCP)	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Artificial Intelligence (AI)	Artificial Intelligence (AI)	2023
						IoT (Online)	IoT	2024
				Admin Keamanan TI		Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	2024
						Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	2024
				Operator/User		Bimbingan		2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
				Sistem		Teknis		
				Admin Database		Administrasi Basis Data (MCDBA)	Administrasi Basis Data (MCDBA)	2025
						Desain Basis Data (Database) (Online)	Desain Basis Data (Database)	2025
						Big Data Analyst (Online)	Big Data Analyst	2025
						Integrasi Data	Integrasi Data	2025
						Cloud Computing (AWS) (Online)	Cloud Computing (AWS)	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	2025
				Service/Help Desk		Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2026
				Teknisi dan Admin Jaringan		Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	2023
						Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Evaluasi dan Audit SI (CISA)	2023
						Desain	Desain	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Jaringan Komputer (CCDA)	
						IT Disaster Recovery	IT Disaster Recovery	2023
				Analisis Sistem dan Desain		Desainer Grafis	Desainer Grafis	2027
						Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	2027
						Manajemen Proyek (PMP)	Manajemen Proyek (PMP)	2027
						Manajemen Investasi	Manajemen Investasi	2027

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Teknologi Informasi (ITAM)	Teknologi Informasi (ITAM)	
						Enterprise Architecture (TOGAF)	Enterprise Architecture (TOGAF)	2027
						Business Process Re-Engineering	Business Process Re-Engineering	2027
						Business Process Management	Business Process Management	2027
						Analisis dan Software Testing	Analisis dan Software Testing	2027

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						GIS (Geographic Information System)	GIS (Geographic Information System)	2027
						Desainer Multimedia	Desainer Multimedia	2027
						ERP Analis	ERP Analis	2027
24	Dinas Perhubungan	Ada	Admin Website		Bukan PD Mandiri TIK	Web Content Management Social Media (Online)		2023
				Programmer		Programmer (OCA, OCP)	Programmer (OCA, OCP)	2023
						Artificial Intelligence (AI)	Artificial Intelligence (AI)	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						IoT (Online)	IoT	2023
				Teknisi Komputer		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2023
				Admin Database		Administrasi Basis Data (MCDBA)	Administrasi Basis Data (MCDBA)	2024
						Desain Basis Data (Database) (Online)	Desain Basis Data (Database)	2024
						Big Data Analyst (Online)	Big Data Analyst	2024
						Integrasi Data	Integrasi Data	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Cloud Computing (AWS) (Online)	Cloud Computing (AWS)	2024
						Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	2024
				Service/Help Desk		Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2024
				Teknisi dan Admin Jaringan		Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Evaluasi dan Audit SI (CISA)	2025
						Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	2025
						IT Disaster Recovery	IT Disaster Recovery	2025
				Analisis Sistem dan Desain		Desainer Grafis	Desainer Grafis	2026
						Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	2026
						Manajemen	Manajemen	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Proyek (PMP)	Proyek (PMP)	
						Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	2026
						Enterprise Architecture (TOGAF)	Enterprise Architecture (TOGAF)	2026
						Business Process Re-Engineering	Business Process Re-Engineering	2026
						Business Process Management	Business Process Management	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Analisis dan Software Testing	Analisis dan Software Testing	2026
						GIS (Geographic Information System)	GIS (Geographic Information System)	2026
						Desainer Multimedia	Desainer Multimedia	2026
						ERP Analis	ERP Analis	2026
				Operator/User Sistem		Bimbingan Teknis		2027
				Admin Keamanan TI		Teknis Keamanan Informasi (CCNA	Teknis Keamanan Informasi (CCNA	2027

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Security)	Security)	
						Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	2027
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ada	Teknisi Komputer		PD Mandiri TIK	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2023
			Teknisi & Admin Jaringan			Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						and Switching)	and Switching)	
						Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Evaluasi dan Audit SI (CISA)	2023
						Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	2023
						IT Disaster Recovery	IT Disaster Recovery	2023
			Service/Help Desk			Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2023
			Admin			Web Content		2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
			Website			Management Social Media (Online)		
			Admin Database			Administrasi Basis Data (MCDBA)	Administrasi Basis Data (MCDBA)	2024
						Desain Basis Data (Database) (Online)	Desain Basis Data (Database)	2024
						Big Data Analyst (Online)	Big Data Analyst	2024
						Integrasi Data	Integrasi Data	2024
						Cloud Computing	Cloud Computing	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						(AWS) (Online)	(AWS)	
						Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	2024
			Analisis Sistem & Desain			Desainer Grafis	Desainer Grafis	2025
						Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	2025
						Manajemen Proyek (PMP)	Manajemen Proyek (PMP)	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	2025
						Enterprise Architecture (TOGAF)	Enterprise Architecture (TOGAF)	2025
						Business Process Re-Engineering	Business Process Re-Engineering	2025
						Business Process Management	Business Process Management	2025
						Analisis dan Software	Analisis dan Software	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Testing	Testing	
						GIS (Geographic Information System)	GIS (Geographic Information System)	2025
						Desainer Multimedia	Desainer Multimedia	2025
						ERP Analis	ERP Analis	2025
			Programmer			Programmer (OCA, OCP)	Programmer (OCA, OCP)	2026
						Artificial Intelligence (AI)	Artificial Intelligence (AI)	2026
						IoT (Online)	IoT	2026
			Operator/User Sistem			Bimbingan Teknis		2027

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
			Admin Keamanan TI			Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	2027
						Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	2027
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Ada	Service/Help Desk		Bukan PD Mandiri TIK	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2023
			Admin Website			Web Content Management		2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
	Pintu					Social Media (Online)		
			Admin Database			Administrasi Basis Data (MCDBA)	Administrasi Basis Data (MCDBA)	2023
						Desain Basis Data (Database) (Online)	Desain Basis Data (Database)	2023
						Big Data Analyst (Online)	Big Data Analyst	2023
						Integrasi Data	Integrasi Data	2023
						Cloud Computing (AWS) (Online)	Cloud Computing (AWS)	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	2023
			Operator/User Sistem			Bimbingan Teknis		2024
				Programmer		Programmer (OCA, OCP)	Programmer (OCA, OCP)	2024
						Artificial Intelligence (AI)	Artificial Intelligence (AI)	2024
						IoT (Online)	IoT	2024
				Teknisi Komputer		Teknisi Komputer (CompTIA	Teknisi Komputer (CompTIA	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						ITF+) (Online)	ITF+)	
				Teknisi dan Admin Jaringan		Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	2025
						Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Evaluasi dan Audit SI (CISA)	2025
						Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	2025
						IT Disaster Recovery	IT Disaster Recovery	2025
				Analisis Sistem		Desainer	Desainer	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
				dan Desain		Grafis	Grafis	
						Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	2026
						Manajemen Proyek (PMP)	Manajemen Proyek (PMP)	2026
						Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	2026
						Enterprise Architecture (TOGAF)	Enterprise Architecture (TOGAF)	2026
						Business	Business	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Process Re-Engineering	Process Re-Engineering	
						Business Process Management	Business Process Management	2026
						Analisis dan Software Testing	Analisis dan Software Testing	2026
						GIS (Geographic Information System)	GIS (Geographic Information System)	2026
						Desainer Multimedia	Desainer Multimedia	2026
						ERP Analis	ERP Analis	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
				Admin Keamanan TI		Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	2027
						Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	2027
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Ada	Operator/User Sistem		Bukan PD Mandiri	Bimbingan Teknis		2023
			Service/Help Desk		TIK	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
				Teknisi Komputer		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2025
				Admin Website		Web Content Management Social Media (Online)		2026
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ada	Teknisi Komputer		PD Mandiri TIK	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2023
			Service/Help Desk			Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2023
			Admin			Web Content		2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
			Website			Management Social Media (Online)		
			Admin Database			Administrasi Basis Data (MCDBA)	Administrasi Basis Data (MCDBA)	2025
						Desain Basis Data (Database) (Online)	Desain Basis Data (Database)	2025
						Big Data Analyst (Online)	Big Data Analyst	2025
						Integrasi Data	Integrasi Data	2026
						Cloud Computing	Cloud Computing	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						(AWS) (Online)	(AWS)	
						Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	2027
			Operator/User Sistem			Bimbingan Teknis		2027
29	Dinas Perdagangan	Ada	Teknisi & Admin Jaringan		Bukan PD Mandiri TIK	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	2023
						Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Evaluasi dan Audit SI (CISA)	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	2023
						IT Disaster Recovery	IT Disaster Recovery	2023
				Service/Help Desk		Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2024
				Operator/User Sistem		Bimbingan Teknis		2025
				Teknisi Komputer		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
				Admin Website		Web Content Management Social Media (Online)		2027
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ada	Admin Website		Bukan PD Mandiri TIK	Web Content Management Social Media (Online)		2023
			Programmer			Programmer (OCA, OCP)	Programmer (OCA, OCP)	2023
						Artificial Intelligence (AI)	Artificial Intelligence (AI)	2023
						IoT (Online)	IoT	2023
			Admin Keamanan TI			Teknis Keamanan	Teknis Keamanan	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Informasi (CCNA Security)	Informasi (CCNA Security)	
						Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	2023
			Operator/User Sistem			Bimbingan Teknis		2024
			Admin Database			Administrasi Basis Data (MCDBA)	Administrasi Basis Data (MCDBA)	2024
						Desain Basis Data	Desain Basis Data	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						(Database) (Online)	(Database)	
						Big Data Analyst (Online)	Big Data Analyst	2024
						Integrasi Data	Integrasi Data	2024
						Cloud Computing (AWS) (Online)	Cloud Computing (AWS)	2024
						Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	2024
			Analisis Sistem & Desain			Desainer Grafis	Desainer Grafis	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	2025
						Manajemen Proyek (PMP)	Manajemen Proyek (PMP)	2025
						Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	2025
						Enterprise Architecture (TOGAF)	Enterprise Architecture (TOGAF)	2025
						Business Process Re-	Business Process Re-	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Engineering	Engineering	
						Business Process Management	Business Process Management	2025
						Analisis dan Software Testing	Analisis dan Software Testing	2025
						GIS (Geographic Information System)	GIS (Geographic Information System)	2025
						Desainer Multimedia	Desainer Multimedia	2025
						ERP Analis	ERP Analis	2025
				Service/Help Desk		Service Desk (CompTIA A+)	Service Desk (CompTIA A+)	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						(Online)		
				Teknisi Komputer		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2027
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Ada	Teknisi Komputer		PD Mandiri TIK	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2023
			Teknisi & Admin Jaringan			Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	2023
						Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Evaluasi dan Audit SI (CISA)	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	2023
						IT Disaster Recovery	IT Disaster Recovery	2023
			Service/Help Desk			Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2024
			Admin Website			Web Content Management Social Media (Online)		2024
			Admin Database			Administrasi Basis Data	Administrasi Basis Data	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						(MCDBA)	(MCDBA)	
						Desain Basis Data (Database) (Online)	Desain Basis Data (Database)	2025
						Big Data Analyst (Online)	Big Data Analyst	2025
						Integrasi Data	Integrasi Data	2025
						Cloud Computing (AWS) (Online)	Cloud Computing (AWS)	2025
						Data Center Technical Support (CCNA Data	Data Center Technical Support (CCNA Data	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Center)	Center)	
			Analisis Sistem & Desain			Desainer Grafis	Desainer Grafis	2026
						Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	2026
						Manajemen Proyek (PMP)	Manajemen Proyek (PMP)	2026
						Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Enterprise Architecture (TOGAF)	Enterprise Architecture (TOGAF)	2026
						Business Process Re-Engineering	Business Process Re-Engineering	2026
						Business Process Management	Business Process Management	2026
						Analisis dan Software Testing	Analisis dan Software Testing	2026
						GIS (Geographic Information System)	GIS (Geographic Information System)	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Desainer Multimedia	Desainer Multimedia	2026
						ERP Analis	ERP Analis	2026
			Programmer			Programmer (OCA, OCP)	Programmer (OCA, OCP)	2027
						Artificial Intelligence (AI)	Artificial Intelligence (AI)	2027
						IoT (Online)	IoT	2027
			Operator/User Sistem			Bimbingan Teknis		2027
			Admin Keamanan TI			Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	2027

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	2027
32	Kecamatan Manguharjo	Ada	Teknisi Komputer		Bukan PD Mandiri TIK	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2023
			Admin Website			Web Content Management Social Media (Online)		2024
						Service Desk (CompTIA A+)	Service Desk (CompTIA A+)	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						(Online)		
				Operator/User Sistem		Bimbingan Teknis		2026
33	Kecamatan Kartoharjo	Ada	Admin Website		Bukan PD Mandiri TIK	Web Content Management Social Media (Online)		2023
			Admin Database			Administrasi Basis Data (MCDBA)	Administrasi Basis Data (MCDBA)	2024
						Desain Basis Data (Database) (Online)	Desain Basis Data (Database)	2024
						Big Data Analyst	Big Data Analyst	2024

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						(Online)		
						Integrasi Data	Integrasi Data	2024
						Cloud Computing (AWS) (Online)	Cloud Computing (AWS)	2024
						Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	2024
				Service/Help Desk		Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2025
				Operator/User Sistem		Bimbingan Teknis		2026
				Teknisi		Teknisi		2027

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
				Komputer		Komputer (CompTIA ITF+) (Online)		
				Admin dan teknisi jaringan		Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	2023
						Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Evaluasi dan Audit SI (CISA)	2023
						Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	2023
						IT Disaster	IT Disaster	2023

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Recovery	Recovery	
34	Puskesmas Manguharjo	Ada	Teknisi Komputer		Bukan PD Mandiri TIK	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2023
			Admin Website			Web Content Management Social Media (Online)		2024
			Admin Database			Administrasi Basis Data (MCDBA)	Administrasi Basis Data (MCDBA)	2025
						Desain Basis Data (Database) (Online)	Desain Basis Data (Database)	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Big Data Analyst (Online)	Big Data Analyst	2025
						Integrasi Data	Integrasi Data	2025
						Cloud Computing (AWS) (Online)	Cloud Computing (AWS)	2025
						Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	2025
			Programmer			Programmer (OCA, OCP)	Programmer (OCA, OCP)	2026
						Artificial Intelligence	Artificial Intelligence	2026

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						(AI)	(AI)	
						IoT (Online)	IoT	2026
				Service/Help Desk		Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2027
				Operator/User Sistem		Bimbingan Teknis		2027
35	Puskesmas Sukosari	Ada	Service/Help Desk		Bukan PD Mandiri TIK	Service Desk (CompTIA A+) (Online)	Service Desk (CompTIA A+)	2023
			Admin Website			Web Content Management Social Media (Online)		2024
			Admin Database			Administrasi Basis Data	Administrasi Basis Data	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						(MCDBA)	(MCDBA)	
						Desain Basis Data (Database) (Online)	Desain Basis Data (Database)	2025
						Big Data Analyst (Online)	Big Data Analyst	2025
						Integrasi Data	Integrasi Data	2025
						Cloud Computing (AWS) (Online)	Cloud Computing (AWS)	2025

Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Apakah memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Usulan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi	Perangkat Daerah Mandiri	Usulan Pelatihan	Usulan Sertifikasi	Tahun Pelaksanaan
						Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	2025
				Operator/ User Sistem		Bimbingan Teknis		2026
				Teknisi Komputer		Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	2027

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.